MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

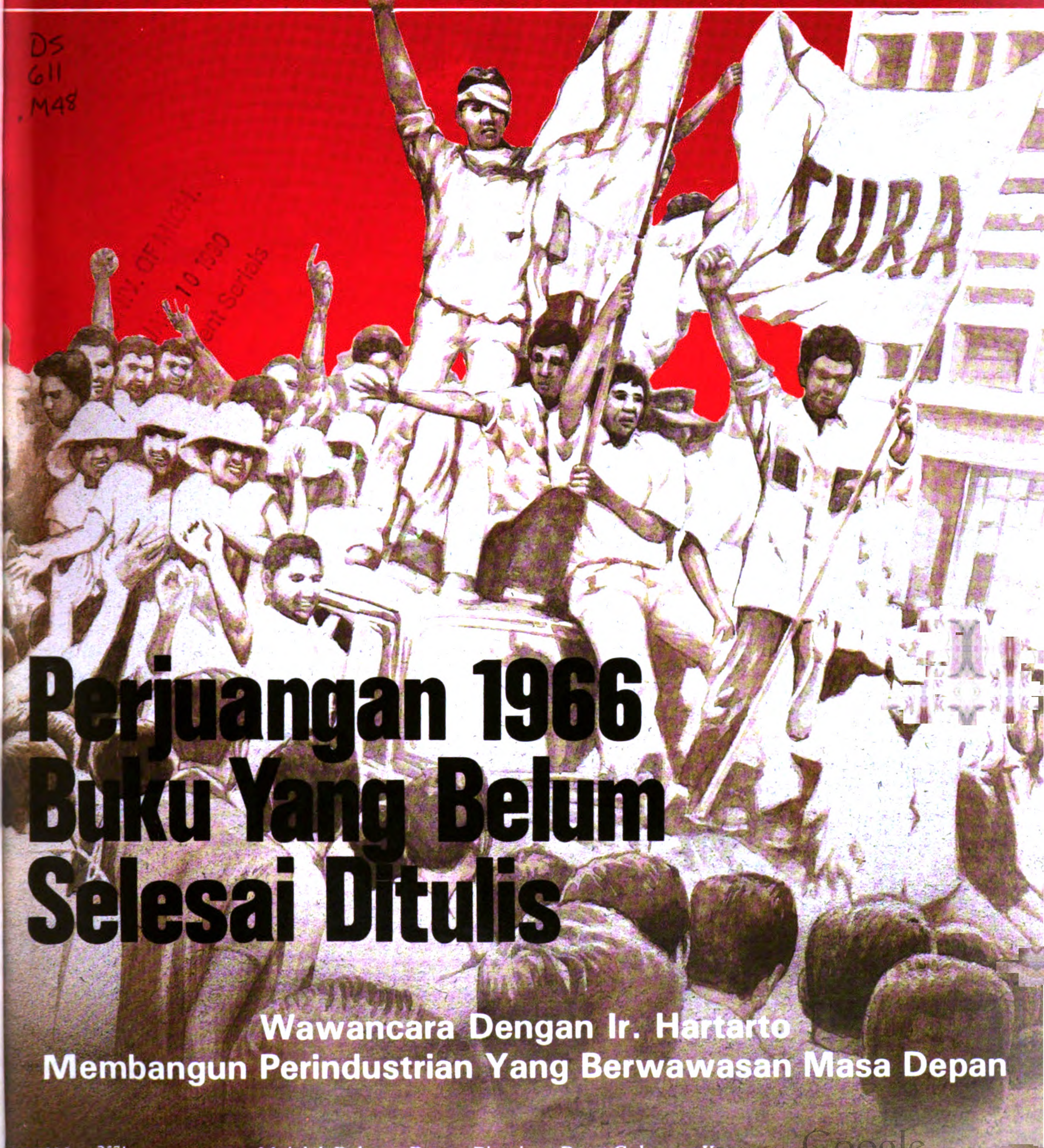

Perjuangan 1966 Buku Yang Belum Selesai Ditulis

Wawancara Dengan Ir. Hartarto
Membangun Perindustrian Yang Berwawasan Masa Depan

ISSN 0216 — 2571

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

Ruang isi lebih luas, hemat dan serasi dalam penampilan

NR-450EA

Lemari Es National pilihan terbaik untuk kebutuhan rumah tangga modern

Kini para Ibu rumah tangga moderen tidak perlu lagi berbelanja setiap hari. Dengan Lemari Es National kebutuhan untuk beberapa hari dapat terpenuhi, keistimewaan Lemari Es National, berkapasitas isi lebih luas dan pengoperasian tanpa bunga es (No Frost), dinding bagian belakang rata (Flat Back) memudahkan penempatan pada ruangan. Lemari Es National dirancang khusus dalam berbagai model serta menambah keindahan Interior rumah tangga Anda.

NR-216 TRH
No Frost-Flat Back
Kapasitas : 210 Lt, Warna : Putih Mutiara, Hijau

NR-246 TRH
No Frost-Flat Back
Kapasitas : 240 Lt, Warna : Putih Mutiara, Hijau.

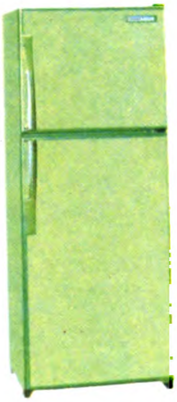

NR-316 TRH
No Frost-Flat Back
Kapasitas : 305 Lt, Warna : Putih Mutiara, Hijau.

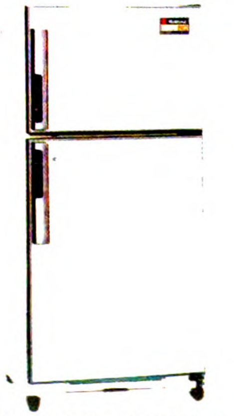

NR-436 TE, No Frost
Kapasitas : 431 Lt, Warna : Putih Mutiara, Hijau.

NR-450 EA, 3-Pintu No Frost
Kapasitas : 446 Lt, Warna : Putih Mutiara.

National

GOBEL

Produksi
P.T. National Gobel
Agen Tunggal
P.T. Gobel Dharma Nusantara

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/ Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli.
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Ariono Poernomo.
Subandrio.
Djonharro.
Rum Aly.
Ibnu Sawamo.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noerjathy.
Robert Puang Sunur.
Issidarto BA.
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO.: 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981.
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480854-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan misi penerbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI

Celah Harapan.

FOKUS

Membangun Perindustrian yang berwawasan masa depan. Wawancara dengan Menteri Perindustrian Ir. Hartarto.

LAPORAN UTAMA

Perjuangan 1966: Sebuah buku yang belum selesai ditulis. Adakah benang merah yang membentang antara ide dan cita-cita perjuangan 1966 dengan tegaknya Orde Baru kini! Dijawab oleh sejumlah tokoh pelaku 1966: Sarwo Edhie Wibowo, Dr. Midian Sirait, dr. Abdul Gafur, Sofyan Wanandi, Drs. Zamroni, Ir. Roedianto Ramelan dan pengamat Sosial Politik Dr. Alfian.

NASIONAL

RAPBN: KENAIKAN DALAM KEADAAN SERBA TERBATAS (Pidato Lengkap Presiden Soeharto menghantar RAPBN 1987-1988); Sudharmono SH tentang wawasan masa depan; Catatan perjalanan DPP Golkar ke Malaysia; dan sejumlah catatan peristiwa nasional lainnya.

KOMENTAR

Soal Arthaloka

ORGANISASI

Ketua Umum di Sulawesi Selatan dan di Belitung; Daftar Calon Sementara GOLKAR Untuk PEMILU 1987; dan sejumlah peristiwa organisasi lainnya.

INTERNASIONAL

Dunia Internasional sepanjang tahun 1986. (Bagian II-habis).

SPEKTRUM

Kepemimpinan Politik (oleh Sarwono Kusumaatmadja).

SENI BUDAYA

Rampokan. Oleh Maria Sugiharto.

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

AA Oka Mahendra SH

Digitized by Google

Celah Harapan

Dalam pidato pergantian tahun 31 Desember 1986 malam, Presiden Soeharto memperkirakan tahun 1987 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pembangunan bangsa Indonesia, sekalipun tetap memberi harapan. Dan harapan itu memang terbersit sebagaimana dikemukakan Kepala Negara tatkala menyampaikan keterangan pemerintah tentang RAPBN 1987/1988 di DPR 6 Januari lalu.

Kendati berada di tengah suasana ekonomi yang memperihatinkan, akibat resesi dunia yang lalu, RAPBN yang diajukan itu mencapai angka 22,7 trilyun rupiah lebih. Berarti ada kenaikan 6,4% dibanding tahun sebelumnya. Memang ada komentar lain, yang mengatakan bahwa meskipun nominal RAPBN naik, sesungguhnya nilainya menurun dibandingkan RAPBN sebelumnya, yakni apabila digunakan tolok ukur sama, yaitu tolok ukur sebelum devaluasi 12 September.

Akan tetapi terlepas dari adanya penilaian seperti itu, tak dapat dikurangi penghargaan kepada pemerintah yang telah memperlihatkan kesungguhan dalam menyusun RAPBN tersebut. Suatu hal yang pada hakekatnya juga mencerminkan kesungguhan pemerintah secara menyeluruh mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada tanpa perlu putus asa.

Pemerintah bersungguh-sungguh dalam menyusun RAPBN itu secara realistik. Memang anggaran pembangunannya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, namun hal itu bisa dipahami dalam kerangka sikap realistik tadi. Namun dilain pihak sektor-sektor yang layak mendapat prioritas tinggi — seperti sektor pendidikan, pertanian, pertambangan, perhubungan dan pariwisata — tampak diupayakan memperoleh anggaran yang relatif besar.

Di luar hal-hal teknis ekonomis seperti itu, penampilan sejumlah sikap pemerintah yang diwakili sikap kenegarawanan yang ditunjukkan Presiden, juga memberi arti tersendiri.

Mengenai tindakan devaluasi 12 September yang terpaksa ditempuh, Presiden Soeharto mengemukakan bahwa kebijakan itu merupakan keputusan yang sangat sulit dan berat. "Saya menganggap lebih bermoral dan lebih bertanggung jawab untuk mengatakan apa adanya kepada rakyat dan secara sadar mengambil keputusan yang pahit demi kepentingan pembangunan jangka panjang, daripada saya tidak mengambil keputusan yang pahit itu sekedar karena saya ingin menyelamatkan kata-kata yang pernah saya ucapkan sendiri."

Diakui Presiden, pada 6 Januari tahun lalu, ketika menyampaikan RAPBN 1986/1987 ia mengatakan pemerintah tak perlu dan tak akan melakukan devaluasi. Tapi kenyataannya kemudian pemerintah terpaksa mengadakan devaluasi. "Ini sama sekali tidak berarti pemerintah tidak konsekuen dengan ucapannya, terlebih-lebih bukan berarti pemerintah akan menipu atau menjerumuskan rakyat." Jika ternyata kemudian Pemerintah di bulan September lalu mengambil tindakan devaluasi, yang tampaknya tidak konsisten dengan ucapan sebelumnya, langkah itu diambil dalam keadaan benar-benar terpaksa yang tak dapat diperhitungkan sebelumnya. Namun tindakan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan kemungkinan serta dengan penuh tanggungjawab.

Dengan mencatat pernyataan yang jujur seperti ini kita dapat melihat esensi yang mengandung harapan. Bahwa kita mempunyai pemerintahan yang lebih mengutamakan pemecahan masalah secara objektif daripada hal-hal prestigeus. Berarti kita memiliki suatu pemerintahan yang pantas dipercayai dan takkan menipu. Rasa aman sebagai suatu prasyarat dengan demikian terpenuhi. Minimal, garansi objektifnya ada pada tokoh-tokoh terasnya yang telah menunjukkan dan membuktikan integritasnya selama ini. Bahwa dataran garansi ini masih perlu lebih diperluas dan diakarkan ke bawah, itu soal lain.

Sikap yang adil sebagai tanggapan perlu pula ditampilkan oleh warga masyarakat dalam bentuk partisipasi yang lebih aktif dalam pembangunan. Sebab bagaimanapun, pemerintah takkan mampu sendirian melakukan segala-galanya tanpa keikutsertaan rakyatnya. Gerak ekonomi dan segala gerak kehidupan lainnya yang hanya bersandar dan bersumber pada kegiatan pemerintah saja adalah tidak sehat untuk jangka panjang. Andalan kegiatan kehidupan harus bersumber utama pada diri masyarakat itu sendiri.

Dalam perjalanan kita ke masa depan, sesungguhnya telah terlihat adanya celah harapan. Ketika beberapa waktu yang baru lalu ini kita bersama-sama berhasil memperkuat landasan kehidupan politik dan kemasyarakatan dengan satu asas yang berarti meninggalkan pola perbedaan berdasarkan ideologi, sebenarnya mulai terpancar harapan baru pula ke dalam sektor kehidupan lainnya. Sebab secara relatif kita telah melangkah kepada pola kompetisi prestasi. Semangat dari pola kompetisi antara lain akan sangat berharga dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Bahkan secara menyeluruh dalam semua sektor kehidupan sebagai satu bangsa yang bercita-cita dan dinamis!□

Digitized by Google

Wawancara Dengan Menteri Perindustrian RI, Ir. Hartarto

Membangun Perindustrian Yang Berwawasan Masa Depan

Perindustrian atau sektor industri berperanan sangat sentral dalam proses pembangunan. Ukuran laju, sukses, gagal serta maju mundurnya proses pembangunan sering disorot dari sektor ini. Karena itu vitalnya peranan industri tidak saja karena dia menjadi indikator derap kemajuan pembangunan tapi wahana kemajuan itu sendiri.

Industrialisasi dewasa ini tampil menjadi pilihan universal semua bangsa secara sadar, dalam mengejar modernitas. Tidak mungkin satu masyarakat bangsa berhak menyandang kemajuan tanpa melakukan industrialisasi. Bangsa Indonesia pun menyadari conditio sine qua non itu.

Namun industrialisasi yang demikian vital, bukan pekerjaan mudah. Contoh sukses industrialisasi di Barat, tidak menyediakan formula absolut untuk dijiplak begitu saja lewat teknologi foto copy.

Oleh karena itu, sebagai bangsa yang mengangkat industrialisasi sebagai pilihan sadar menuju modernitas, industri yang dibangun adalah industri yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Menteri Perindustrian Ir. Hartarto menyebutnya secara jitu bahwa "kita mengembangkan perindustrian yang berwawasan masa depan."

Tentu sejuta problema harus disiasati dalam garis industrialisasi dengan perspektif demikian. Problematik itu diulas panjang lebar oleh Menteri Perindustrian Hartarto dalam wawancaranya dengan Media Karya seperti yang dirangkum di bawah ini.

SEBAGAI bangsa yang sadar memilih industrialisasi di tengah persaingan ribuan bangsa di dunia yang juga melakukan hal yang sama, maka industrialisasi yang kita laksanakan harus mempunyai strategi dan pola. Kita telah memiliki itu dalam apa yang kita sebut sebagai Pola Pengembangan Industri Nasional, yang dirumuskan dengan cakrawala pandang hingga akhir Pelita VI, saat dimana bangsa Indonesia memasuki tahap tinggal landas.

Cakrawala ini ditunjang oleh tiga langkah strategis penunjang yaitu, peletakan kerangka landasan di bidang hukum untuk pengaturan pembinaan dan pengembangan industri nasional secara mantap.

Ir. Hartarto

Lalu diikuti oleh kebijaksanaan pengelompokan industri nasional kedalam tiga kelompok dasar masing-masing (1) kelompok Industri Dasar yang mencakup industri mesin dan logam dasar dan industri kimia dasar, (2) Industri Hilir yang mencakup aneka industri dan (3) Industri Kecil.

Kemudian diikuti langkah ketiga berupa konsolidasi dan pengembangan aparatur Departemen Perindustrian dan dunia usaha secara kontinyu dan mantap.

Perlu ditekankan disini bahwa agar program-program tersebut dapat sukses, harus ditempuh usaha-usaha mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang bersifat operasional dan strategis. Diantaranya adalah mendorong berkembangnya wiraswasta; memacu profesionalisme baik di bidang manajemen maupun keahlian dan ketrampilan. Ini semua tentu saja menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan organisasi profesi.

Teknologi

Pengembangan industri nasional adalah masalah pilihan. Kita harus memilih diantara begitu banyak tawaran yang tersedia, termasuk di bidang teknologi. Di bidang yang satu ini kita sadar bahwa tidak bisa mengisolasi diri, tapi juga tidak berarti mencaplok segala pilihan yang tersedia. Sikap kita di bidang ini adalah tidak menutup diri, tapi selektif memilih tawaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.

Dunia industri sekarang menyediakan teknologi dari yang sederhana, madya hingga teknologi yang canggih dan teruji. Dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang kita miliki, kita mempergunakan ketiga jenis teknologi itu secara selektif tentunya.

Untuk memantapkan kebijaksanaan dalam pengembangan industri nasional, yang pada dasarnya dilaksanakan per komoditi, maka ditempuh kebijaksanaan pengelompokan industri nasional yang dikaitkan dengan ciri, misi dan penerapan teknologi tepat guna.

Industri nasional, sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1985 telah dikelompokkan menjadi:

Industri Dasar, yang untuk sementara dibagi atas dua sub kelompok yaitu (1) Sub Kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar dan (2) Sub Kelompok Industri Kimia Dasar.

Industri Dasar mempunyai misi pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur dengan menggunakan teknologi maju teruji, tapi tidak bersifat padat karya asal mampu menumbuhkan kegiatan ekonomi lanjutan sektor-sektor yang terkait serta jasa.

Industri Hilir, atau Aneka Industri, mempunyai misi pertumbuhan ekonomi atau pemerataan. Di sektor ini teknologi yang dipakai bisa teknologi maju teruji atau teknologi madya. Oleh karena itu bisa bersifat padat karya atau padat modal, tergantung jenis teknologinya. Dan perlu diketahui bahwa Aneka Industri saat ini merupakan andalan komoditi ekspor produksi industri disamping industri lainnya.

Industri Kecil. Di sektor ini, misi yang diemban adalah pemerataan dengan teknologi yang dipergunakan adalah teknologi madya atau teknologi sederhana. Andalan penyerapan tenaga kerja ada di sektor ini. Oleh karena itu industri kecil ini sangat strategis.

Dengan adanya kebijaksanaan pengelompokan industri nasional seperti ini yang jelas dengan ciri teknologi serta misi yang diemban maka polemik yang telah lama timbul dalam masyarakat sekitar teknologi tinggi versus teknologi sederhana dan padat modal versus padat karya, telah terjawab.

Digitized by Google

Kebijaksanaan Pengelompokan Industri Nasional

Kelompok Industri	M i s i	Teknologi Tepat Guna	Tenaga Kerja Kapital.
1. D a s a r			
— Industri Mesin dan Logam Dasar	1. Pertumbuhan Ekonomi	Maju, teruji.	Tidak padat karya.
— Industri Kimia Dasar	2. Penguatan Struktur.		
2. H i l i r Aneka Industri	1. Pertumbuhan Ekonomi, atau 2. Pemerataan	1. Maju, teruji atau 2. Madya	— Tidak padat karya, atau — Padat karya.
3. Industri kecil	Pemerataan	1. Madya, atau Sederhana.	Padat karya

Pemanfaatan litbang terapan dan penerapan teknologi tepat guna dalam berbagai cabang dan jenis industri antara lain dapat dilihat pada daftar dalam box.

Kelompok Industri Industri Dasar	Jenis Industri antara lain
Industri Mesin dan Logam Dasar;	Industri logam Mesin perkakas Alat pertanian Alat-alat berat Mesin-mesin alat listrik Elektronika Kendaraan bermotor Kereta api Pesawat terbang Kapal-kapal dan peralatan lepas pantai Mesin dan peralatan pabrik Industri strategis lainnya
Industri Kimia Dasar;	Bahan-bahan dengan teknologi sangat canggih Pupuk, pestisida dan agrokimia Semen, kaca, gas industri Pulp dan kertas, ban Garam industri Bahan-bahan kimia lainnya
Aneka Industri;	Pengolahan pangan Makanan ternak Tembakau, minuman Tekstil dan pakaian jadi Kulit Produk kimia, keramik, gelas etc Kayu, hasil hutan lainnya Logam, elektronika hiburan Bahan bangunan dan sebagainya
Industri Kecil;	Pangan Sandang Papan Logam dan barang-barang logam Minyak atsiri, barang kimia lainnya Logam dan barang logam Berbagai peralatan sederhana Produk kerajinan dan sebagainya.

Pengembangan litbang terapan, teknologi, rancang bangun, perekayasaan, standardisasi, disain produk, konsultasi dan sebagainya dilaksanakan antara lain oleh Lembaga/Balai Litbang, Instansi Pemerintah, Dunia Usaha, baik swasta maupun BUMN; Lembaga lainnya. *Baik dilaksanakan sendiri*, maupun *kerjasama, didalam negeri* dan dengan lembaga luar negeri, (persetujuan lisensi).

Penguasaan teknologi.

Penguasaan teknologi tersebut dilakukan penguasaan dalam bidang Rancang Bangun dan Perekayasaan, utamanya diarahkan kepada: (1) pembuatan mesin-mesin/ peralatan pabrik; dan (2) pabrik-pabrik yang mempunyai pasaran yang *berulang dan meningkat*.

Sampai dewasa ini tahap penguasaan teknologi tersebut telah menunjukkan arah yang menggembirakan, baik dalam *pembuatan mesin-mesin* maupun *pabrik-pabrik tertentu* (pabrik CPO, pabrik crumb rubber, pabrik pupuk ZA, TSP, Urea, dan pabrik-pabrik sederhana, seperti rotan, kopi, dan lain-lain).

Substitusi impor

Kita bukan saja telah memiliki strategi dalam pengelompokan industri dan teknologi, tapi juga di bidang substitusi impor. Di bidang ini, selalu saja timbul pendapat seolah-olah industri kita tidak bisa maju karena dimulai dengan pola substitusi impor.

Ada pendapat yang mengatakan, sebuah industri yang dibangun atas dasar substitusi impor, sulit didorong untuk ekspor. Saya ingin meluruskan terminologi itu. Substitusi impor tidak berarti kita hanya sekedar memindahkan apa yang dibuat di negeri orang untuk dijual di dalam negeri.

Kita memang tidak mempunyai pilihan lain ketika untuk pertama kali melancarkan industrialisasi pada Pelita I dulu. Ketiadaan modal dan keahlian, sementara kebutuhan untuk itu (industrialisasi) tidak bisa ditunda-tunda, maka pilihan kita adalah substitusi impor. "Orang tidak perlu risau dengan industri yang berorientasi pada substitusi impor".

Disadari sepenuhnya ketika itu bahwa sebuah industri dengan sistem substitusi impor memang sulit untuk menembus pasar ekspor, tapi hal itu berarti tidak mungkin dilaksanakan export drive. Beberapa komoditi ekspor di sektor industri yang ki-

Digitized by Google

ni mulai memasuki pasar luar negeri justru jenis industri yang dulu dimulai dengan substitusi impor.

"Saya dengan demikian tidak sependapat dengan pemikiran bahwa kita akan terus terbelenggu dalam status sebagai tukang rakit. Industri yang substitusi impor bisa menjelma menjadi industri yang berkompetisi di pasar ekspor asal dilaksanakan dengan efisien, dengan struktur permodalan yang tepat serta manajemen yang sesuai"

Walaupun berorientasi pada substitusi impor, tetapi bila diarahkan dalam skala ekonomi yang benar, yaitu memakai teknologi yang tepat, termasuk teknologi tinggi, struktur modalnya sehat, dan dikelola dengan baik, suatu industri akan kompetitif, dan akan mampu menembus kegiatan ekspor. "Janganlah disalah kaprahkan bahwa industri substitusi impor identik dengan proteksi, mismanajemen dan lainnya yang bersifat high cost economy".

Bahwa industri yang dimulai dengan strategi assembling mengalami persaingan sengit dengan negara prinsipal industri bersangkutan pun disadari. Tapi saya kembali menekankan bahwa asal ketiga faktor yang disebutkan diatas yaitu manajemen, efisiensi dan struktur permodalan diatur secara profesional, tidak perlu takut menganut substitusi impor.

Dalam rangka mengangkat industri nasional serta perekonomian secara keseluruhan maka pemerintah selama ini telah melakukan serangkaian kebijaksanaan yang umum dinilai sebagai tindakan deregulasi. Hanya saya perlu menggarisbawahi terminologi deregulasi itu sendiri. Orang sering beranggapan deregulasi sama artinya dengan liberalisasi. Itu tidak benar.

Deregulasi dalam penalaran kita adalah penataan kembali yang tidak beres, meluruskan yang bengkok sehingga meningkatkan kualitas perkembangan itu sendiri. Dalam tahap industri seperti sekarang bila diregulasi diartikan sebagai liberalisasi maka akan menimbulkan kerumitan tersendiri. Kita memang perlu semakin membuka diri, tapi perlindungan tetap perlu.

Dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi dan industri dalam negeri maka pemerintah mengumumkan Paket 25 Oktober 1986, yang merupakan langkah mendasar sebagai tindak lanjut devaluasi 12 September 1986 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor non migas.

Dua kebijaksanaan terakhir di tahun 1986 itu merupakan kelanjutan dari kebijaksanaan lain yang ditempuh pemerintah sejak 1983 sebagai antisipasi di tengah perekonomian dunia yang dilanda resesi dan kemerosotan harga minyak.

Semua langkah itu diambil dengan pertimbangan mengamankan sasaran-sasaran jangka pendek maupun jangka panjang pembangunan itu sendiri. Jadi tindakan devaluasi 1983, penjadwalan kembali proyek-proyek besar, perombakan secara menyeluruh sistem perpajakan, deregulasi perbankan, kebijaksanaan di bidang fiskal lainnya, INPRES 4/1985 dan Paket 6 Mei serta Paket 25 Oktober serta devaluasi 12 September 1986, adalah tindakan pemerintah yang tidak saja defensif tapi tetap mempunyai warna dan perspektif dinamis ke masa depan.

Untuk mengamankan pertumbuhan industri dewasa ini dan di masa mendatang selain serangkaian kebijaksanaan yang disebutkan diatas, tidak kalah pentingnya adalah sikap kerja keras untuk meningkatkan daya saing secara kontinyu. Swasta harus pintar menemukan terobosan daya saing di tengah iklim yang diciptakan pemerintah untuk itu.

"Oleh karena itu saya sangat menekankan, apresiasi dunia swasta dalam menemukan daya saing merupakan kebutuhan mutlak. Dunia swasta kita harus didorong untuk menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri. Apresiasi itu, walaupun kini dengan bangga dapat saya katakan membaik, namun perlu terus ditingkatkan".

Penciptaan iklim industri yang diupayakan pemerintah bertujuan meningkatkan ekspor, dengan andalan utama pada komoditi aneka industri, baru diikuti dengan komoditi industri mesin dan logam dasar, industri kimia dasar dan industri kecil. Selain itu pemerintah juga berupaya melaku-

PUSRI

P.T. PUPUK SRIWIDJAJA

* Penghasil Urea Pertama di Indonesia. Kapasitas produksi 1,6 juta ton setahun. Mengemban Missi Pemerintah sebagai produsen dan distributor di dalam negeri.
* Produksi sampingan : Anhydrous Ammonia, Oksigen, CO2, Acetyline dan Es Kering (Dry Ice).
* Kantor Pusat. Jalan Sungai Selayur PO Box 084 Palembang Telp. 25855, Telex 27117. * Kantor Perwakilan Jakarta. Jalan Taman Anggrek/Kemanggisan Jaya Jakarta, Telp. 5481208 Telex 442499, 44460. * Kantor Pemasaran Wilayah (KPW) Banda Aceh, Medan, Padang, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, D.I. Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Ujungpandang, Manado, Palu, Kendari, Denpasar, Mataram, Kupang, Ambon, dan Jayapura.
* Unit Pengantongan Pupuk (UPP) Belawan, Telukbayur, Cilacap, urabaya, Ujungpandang, Meneng. * Kantor Perwakilan PT. Pupuk Kujang (Cikampek), PT. Petrokimia (Gresik), PT. Pupuk Kaltim (Samarinda), PT. Asean Aceh Fertilizer dan PT. Pupuk Iskandar Muda (Lhok Seumawe). * Luar Negeri : Houston (AS), Tokyo (Jepang).

Digitized by Google

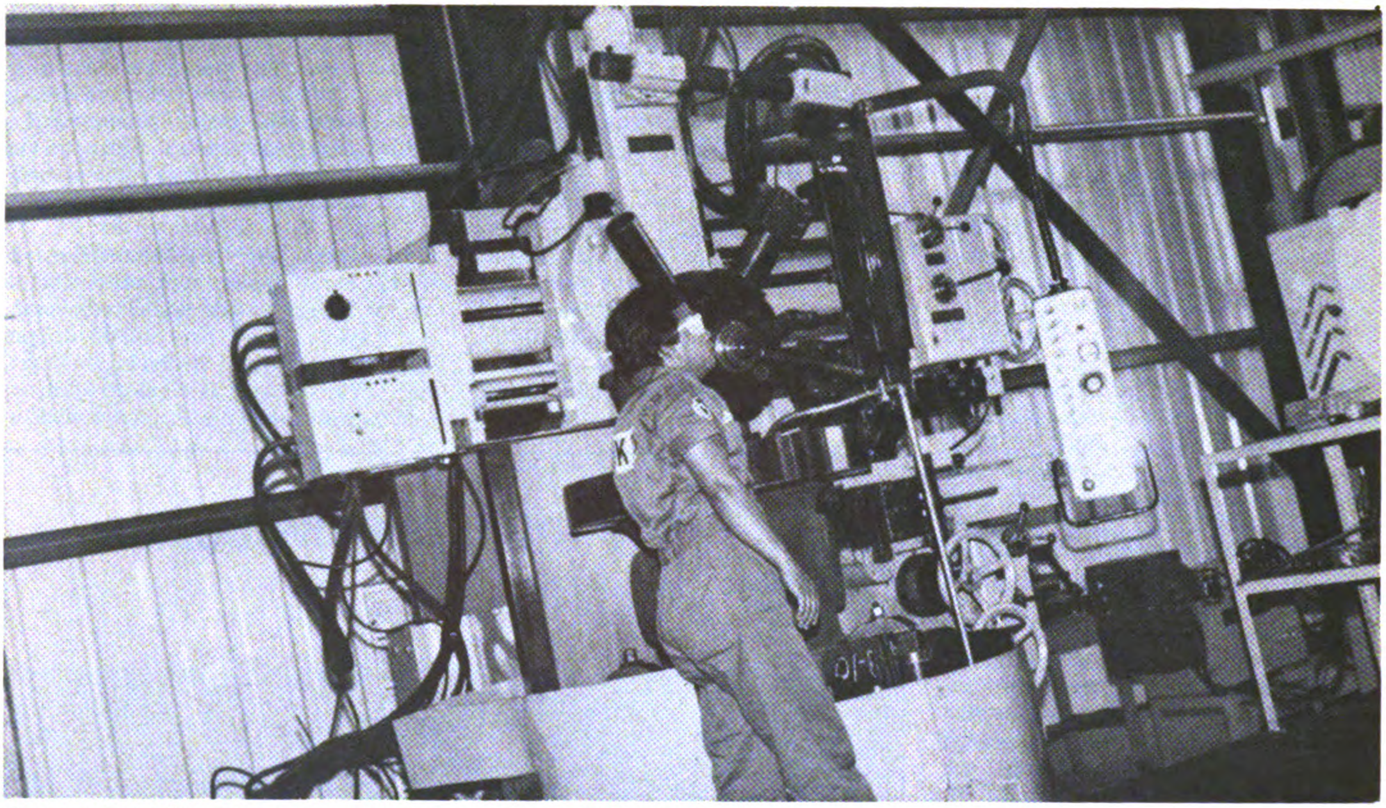

Sektor industri diharapkan mampu menunjang perekonomian nasional.

kan pendalaman struktur industri serta pembinaan industri kecil.

Lebih terpadu

Selain kebijaksanaan ekonomi nasional yang mempunyai dampak terhadap industri, pemerintah juga telah mengambil keputusan yang khusus selama ini untuk menunjang perindustrian dalam negeri sehingga sektor industri mampu menunjang perkembangan ekonomi nasional.

"Agar sasaran tersebut tercapai maka kegiatan penanganan industrialisasi harus lebih terpadu dan didukung usaha penyempurnaan iklim secara terus menerus. Untuk itu pada tanggal 2 Oktober dikeluarkan kebijaksanaan revaluasi asset disusul dengan kebijaksanaan fiskal lainnya".

Semua kebijaksanaan ini diarahkan terutama untuk mendorong kreativitas swasta untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan industri nasional.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri diarahkan kepada usaha ekspor, pendalaman struktur industri dan pengembangan industri kecil. Semua program dan prioritas ini dilandasi oleh keharusan pemanfaatan kapasitas nasional terpasang, peningkatan efisiensi dan produktivitas, peningkatan pelaksanaan keterkaitan antara sektor-sektor industri besar-menengah-kecil atas dasar manfaat untuk masing-masing sektor tersebut.

"Bila semua strategi dan sasaran ini dijalankan dengan sungguh-sungguh disertai partisipasi aktif dunia swasta, maka industri dalam negeri dengan substitusi impor yang kita anut hingga sekarang, bukan mustahil bisa ditingkatkan menjadi industri yang berhasil di bidang ekspor".

Sebagai mana pembangunan di sektor lain, sektor industri membutuhkan proses panjang. Kekurangan memang sangat banyak, tapi tidak boleh beranggapan apa yang kita kerjakan selama ini tidak berarti sama sekali. Bagi yang pesimis, mungkin akan terkejut kalau saya katakan penampilan industri dalam negeri selama tahun 1986, lebih baik dari tahun 1985. Ini adalah prestasi yang harus kita syukuri.

Mendasar

Dalam proses dan gerak industrialisasi sering terkait konotasi bahwa keuntungan lebih diutamakan dari pemerataan, karena keterlibatan modal besar dengan teknologi canggih. Bagaimana garis kebijaksanaan industri kita, sehingga aspek pemerataan dan keadilan mendapat tempat dalam proses industrialisasi di negara kita?

"Ini adalah pertanyaan yang mendasar. Seperti yang pernah saya tegaskan, bahwa langkah pertama yang diambil dalam langkah ini ialah pemantapan aspek hukum bagi 3 pelaku utama ekonomi nasional, yaitu Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan Koperasi. Untuk itu pada tahun 1985 kita telah mengundangkan UU No. 5 tentang perindustrian yang memberi kepastian hukum bagi ketiga pelaku ekonomi tersebut".

Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada sektor industri kecil karena peranannya yang sangat strategis. Dan kepada pengusaha ekonomi lemah diberikan jaminan lapangan usaha melalui kebijaksanaan pencadangan usaha atau yang dikenal dengan istilah reservation scheme. Dengan memberi kepastian hukum bagi ketiga pelaku ekonomi nasional tersebut kita harapkan akan tumbuh apa yang dinamakan demokrasi ekonomi.

Dalam pembinaannya, pengembangan industri kecil dipusatkan di sentra-sentra dan diarahkan untuk membentuk kelompok yang akhirnya disarankan untuk berkoperasi. Pelaksanaan operasionalnya sejauh mungkin ditempuh melalui program keterkaitan dengan industri besar dan menengah serta sektor jasa lainnya, sehingga pada akhirnya dapat dikembangkan hubungan serasi antara industri besar-menengah dan kecil yang pada hakekatnya merupakan tahapan realisasi dari Demokrasi Ekonomi.

Mengingat bahwa pengembangan industri kecil menumbuhkan wiraswasta-wiraswasta dengan para pengrajin dalam jumlah besar, maka dengan demikian partisipasi masyarakat dalam proses industri bisa ditingkatkan.

"Saya perlu menegaskan bahwa pemerataan dan keadilan senantiasa mendapat tempat dalam proses industrialisasi, dan selalu dikembangkan dengan dilandasi pada prinsip-prinsip ekonomi". Bila dalam pelaksanaannya terasa ada kekurangan disana sini, mungkin itu adalah masalah teknis belaka.

"Yang terpenting, kita mempunyai moral industrialisasi yang secara normatif ditetapkan secara jitu, dalam konsep Pembangunan Industri yang Berwawasan Masa Depan. Untuk itu kita harus mengenal dimana kelebihan dan kekurangan kita sendiri, atau yang dalam istilah ekonomi sering disebut dengan istilah comparative advantages". ☐ Sugiyanto/TG

Digitized by Google

Perjuangan 1966: Sebuah Buku Yang Belum Selesai Ditulis

Bukan mitos, namun merupakan peristiwa sejarah yang terkait dengan kelahiran Orde Baru

Bagaimanapun, apa yang terjadi pada 10 Januari 1966 adalah sebuah momentum sejarah. Hari itu, mahasiswa dan pelajar yang kemudian dikenal dengan penamaan Angkatan 1966 mencetuskan Tritura — Tri Tuntutan Rakyat. Dua nama ini, 'Angkatan 1966' dan 'Tritura' menjadi demikian termasyhurnya pada tahun 1966 dan beberapa tahun sesudahnya, hingga beberapa pihak menganggapnya mengarah kepada pemitos-an. Tapi terlepas dari itu, dari sudut pandang perjuangan penegakan Orde Baru, peristiwa tanggal 10 Januari 1966 memang adalah salah satu momentum penting yang ikut mengawali proses disudahinya periode Orde Lama. Dan Orde Baru ini, seperti pernah dikatakan oleh Drs. Cosmas Batubara, merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari rel Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dan 21 tahun setelah tercetusnya Tritura dan lahirnya Angkatan 1966 — pada saat yang sama Orde Baru dengan demikian juga telah mencapai usia 21 tahun — era Orde Baru ini ditandai oleh pencapaian formal yang amat mengesankan: Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas bagi segenap kekuatan politik dan kemasyarakatan. Dengan pencapaian seperti itu pulalah Pemilihan Umum keempat dalam era Orde Baru akan dijelang. Peristiwa-peristiwa sejarah, sejak 1 Oktober 1965, 10 Januari 1966, 11 Maret 1966 hingga pencapaian-pencapaian di tahun 1987 ini, jika dipertautkan dapat dipandang sebagai satu garis yang lurus.

Lalu di mana letak dan peranan sejarah Angkatan 1966 yang mencetuskan Tritura? Sembilan tahun yang silam, Parakitri Tahi Simbolon pernah melontarkan sejumlah nada ragu tentang letak dan besarnya peran dan 'mitos' Angkatan 1966. Waktu itu Tahi Simbolon menyatakan "Salah satu kesulitan terbesar untuk melihat episode Angkatan 1966 adalah anggapan kuat angkatan ini telah memainkan peranan besar bahkan menentukan dalam peristiwa bersejarah sekitar tahun 1966". Dan dari anggapan ini, "menurut anggapan lain bahwa patutlah mengharapkan peranan yang sama daripadanya setelah sepuluh tahun kemudian, kala kehidupan nasional nampaknya mulai menimbulkan banyak ketidakpuasan". Menurut Tahi Simbolon ada sekurang-kurangnya dua persoalan yang mesti dipecahkan dulu sebelum bicara sungguh-sungguh tentang Angkatan 1966. Yang pertama adalah: seberapa jauh sesungguhnya peranan angkatan ini dalam rentetan peristiwa sekitar 1966?

Dr. Midian Sirait

Digitized by Google

Ada Garis Lurus Antara 1966 Hingga Kini

Abdul Gafur — Menteri Pemuda dan Olahraga — yang dikenal pula sebagai salah satu tokoh Eksponen '66 berpendapat, ada rentangan benang merah antara idealisme yang dikandung oleh Tri Tuntutan Rakyat di tahun '66, dengan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan Orde Baru saat ini.

Tritura, katanya, sederhana dalam rumusan dan hanya terdiri dari tiga tuntutan, tapi maknanya menjangkau jauh sekali. Seperti tuntutan pertama, "Bubarkan PKI", yang berarti kita menolak ideologi komunis, Marxisme dan Leninisme, karena kita ingin ideologi Pancasila benar-benar tegak sebagai ideologi bangsa. Sedangkan tuntutan yang kedua adalah "Turunkan Harga", bukan berarti hanya menginginkan penurunan harga semata-mata, tapi punya makna yang dalam, yaitu, menginginkan sistim ekonomi yang berdasar Pancasila. Mengenai tuntutan ketiga yaitu "Reshuffle Kabinet", dijelaskan, keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan kuat di republik ini.

Selanjutnya dr Abdul Gafur menjelaskan mengenai rentangan benang merah yang terbentang semenjak awal Orde Baru di bawah kepimpinan Pak Harto, seperti, di bidang ekonomi dilaksanakan pembangunan lewat Pelita demi Pelita. Dan di bidang ideologi, Orde Baru mulai memantapkan ideologi Pancasila sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa serta yang terakhir menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas.

Perjuangan itu, katanya, merupakan perjuangan yang panjang, hampir selama dua puluh tahun, baru kita berhasil mencanangkan Pancasila sebagai satu-satunya azas di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan diterima oleh semua warga negara, termasuk setiap kekuatan sospol dan organisasi kemasyarakatan.

Selama ini pula, pemerintahan Orde Baru semakin kuat dan mantap, penertiban aparatur semakin baik dan meningkat serta sistim birokrasipun semakin teratur. "Hal ini jelas diperlukan untuk pembangunan bangsa di masa mendatang!"

Namun diakui pula, apa yang dicita-citakan Orde Baru yang juga terkait dengan rentangan benang merah dari Tritura sewaktu th '66, memang belum semua tercapai. Masih banyak yang perlu disempurnakan, seperti sering dinyatakan pula oleh Presiden Soeharto. Hanya, Abdul Gafur berpendapat, bangsa Indonesia jelas berbahagia karena dibanding dengan masa lalu, pembangunan yang dilaksanakan saat ini semakin maju dan mantap. Yang penting, tuturnya, semua pihak harus selalu waspada menjaga arah pembangunan nasional tetap di atas rel yang sudah digariskan.

dr. Abdul Gafur

Tidak ingin memitoskan

Sebagai tokoh eksponen '66 yang dari awal kebangkitan '66 sampai sekarang selalu mengikuti perjalanan angkatan tersebut, Abdul Gafur menegaskan, tidak ada segelintirpun dari angkatan '66 yang ingin memitoskan angkatan tersebut. Kalau tokh setiap tahun Tritura diperingati, bukan berarti Angkatan '66 sebagai pencetus Tritura ingin menepuk dada. Namun hanya sekedar memperingati peristiwa sejarah guna diambil manfaatnya, sebagai suri tauladan bagi generasi mendatang.

Angkatan '66 atau yang Gafur lebih senang menyebut sebagai Eksponen '66, sudah bertekad hanya sekali itu saja terjadi momentum sejarah yang demikian di tanah air, dan selanjutnya jangan terjadi lagi. Hal ini, tegas Gafur, berarti pelaksanaan Pancasila dan UUD '45 secara murni dan konsekwen, jelas merupakan tahap akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila serta UUD '45 adalah rel kita semua yang harus kita tempuh.

Selanjutnya diungkapkan, Eksponen '66 bukan hanya terdiri dari generasi muda saja, tapi adalah semua unsur yang ada di masyarakat waktu itu yang menentang kezaliman, ketidakadilan dan ketidakbenaran. "Siapa mereka itu?" demikian Gafur, "mereka adalah, ABRI, tukang beca, pemuda, mahasiswa, pelajar, ibu-ibu yang memberikan makanan bagi para Eksponen '66, tukang sayur dan sebagainya. pendeknya semua yang bangkit waktu itu adalah Eksponen '66."

Kebetulan, pemuda waktu itu berdiri di garis paling depan, maka mereka mewarnai kebangkitan Eksponen '66 waktu itu. Konsekwen dengan semua yang dibeberkan di atas, Menpora Abdul Gafur menegaskan, semua Eksponen '66 saat ini menentang adanya gagasan untuk membuat organisasi angkatan '66. Yang penting bukan strukturnya, tapi idealisme Eksponen '66. Dan idealisme Eksponen '66 menurut Gafur, meluruskan jalan sejarah serta melaksanakan Pancasila dan UUD '45 secara murni dan konsekwen, yang telah diberikan oleh Angkatan '45. Jadi, menurutnya, biarlah Angkatan '45 saja yang punya struktur dan dibakukan, yang lain tidak usah.

Pemuda di tahun 1966. Berdiri paling depan.

Digitized by Google

Proklamasi Kemerdekaan peristiwa dahsyat

Yang menyebut atau memberi batasan "angkatan", adalah, masyarakat sendiri. Jadi sebutan "angkatan" disebabkan masyarakat sendiri yang setelah meneliti sejarah perjuangan bangsa Indonesia, menemukan tonggak-tonggak sejarah dalam proses perjalanan sejarah tersebut. Lalu mereka memberi patokan dengan nama "angkatan."

Abdul Gafur selanjutnya memisalkan, dalam tahun 1908 lahir Budi Utomo, hal ini sesuatu yang bermakna di dalam perjuangan menuju gerbang kemerdekaan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para pencetus Budi Utomo tersebut adalah, mulai menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini jelas merupakan tonggak sejarah.

Pohon yang ditanam Angkatan '08 kemudian mekar dan berkembang selama periode dua puluh tahun. Kemudian mulai menguncup pada akhir periode tersebut, serta timbul kongres Pemuda tahun 1928 yang memunculkan Angkatan '28 dengan Sumpah Pemudanya.

Peristiwa yang beruntun dalam kurun waktu 20 tahun, menurut Menpora, merupakan peristiwa sejarah yang kebetulan. Karena para pemuda tahun '28 waktu itu sadar, jika kesadaran berbangsa dan bernegara yang telah disemaikan oleh pemuda-pemuda tahun '08 tidak *ditanam* di *taman* yang subur, jelas pohon itu akan layu. Oleh sebab itu, para pemuda tahun '28 membulatkan tekad untuk tidak berpikir sempit kedaerahan saja, tapi berpikir secara nasional demi kepentingan bangsa Indonesia.

Baik akhli sejarah maupun masyarakat, menganggap peristiwa kebangsaan di tahun '28 merupakan tonggak sejarah dan mereka menyebut sebagai Angkatan '28. Namun, menurut pendapat Gafur, Angkatan '28 memang tidak perlu *dibakukan*. - Sebagai suatu momen kebangkitan, Angkatan '28 hanya sebagai sebutan.

Tujuh belas tahun berikutnya, lahir Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, suatu peristiwa yang dahsyat dan paling besar! Menurut Abdul Gafur, kalau melihat tamzil, ibarat kebangkitan nasional semacam pohon, pada awalnya disemaikan, tumbuh, mekar dan menguncup, tapi kemudian mekar lagi, maka Proklamasi Kemerdekaan adalah mekarnya bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang merdeka. "Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan yang sudah diperjuangkan ratusan tahun inilah yang memang harus dibakukan!" Katanya.

Pembakuan itu, katanya, disebabkan Proklamasi Kemerdekaan punya nilai-nilai tertentu yang musti dibakukan. "Apa nilai itu?" demikian Gafur," yaitu, semangat berjuang tanpa pamrih, semangat berkorban yang menyala-nyala. Dan Nilai-nilai inilah yang akan dilestarikan. Maka dibakukanlah Angkatan '45 ini!"

Sehingga, angkatan-angkatan selanjutnya tidak perlu dibakukan. Karena angkatan yang timbul setelah Angkatan '45 hanyalah merupakan penerus dari nilai-nilai yang dikandung oleh angkatan '45. "Jadi Angkatan '66 sebenarnya tidak membawa nilai-nilai baru," tegasnya, "Angkatan '66 hanya sebagai penerus dari Angkatan '45."

Angkatan '66 merupakan pelurus nilai-nilai Angkatan '45 yang waktu itu hendak diselewengkan. Karena nilai-nilai '45 terganggu disebabkan masalah kepemimpinan waktu itu, maka Angkatan '66 mengoreksi.

Angkatan '45 dibakukan, disebabkan di dalam semangat '45 sudah terkandung nilai-nilai dasar dari perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD '45. Sedangkan Angkatan '66 yang merupakan penerus nilai-nilai '45, menurut pendapat Menpora, hanyalah merupakan sebutan dan sebahagian masyarakat menyebutnya Angkatan '66, sedangkan ia beserta kawan-kawannya lebih senang menyebut Eksponen '66.

Ia juga menekankan, Angkatan '45 sendiri yang ingin dilestarikan adalah nilai serta idealisme yang terkandung di dalamnya, bukan orang-orangnya. Toh, tak lebih seratus tahun orang-orang tersebut jelas akan habis.

Sosial kontrol pada proporsinya

Berbicara mengenai sosial kontrol yang merupakan salah satu ciri perjuangan paling menonjol dari Angkatan '66 pada waktu awal perjuangannya serta tahun-tahun berikutnya, Abdul Gafur mengatakan, sosial kontrol saat ini harus dengan cara-cara yang proporsional sesuai dengan perundangan yang berlaku. Semua pihak, masyarakat, pers, DPR dan sebagainya, berhak melakukan sosial kontrol namun harus sesuai dengan konstitusi UUD '45 dan Pancasila.

Namun, dengan tandas Abdul Gafur mengingatkan, sosial kontrol yang dilakukan saat ini tidak boleh dikaitkan dengan model sosial kontrol pada awal tahun '66. Karena sosial kontrol pada awal '66 yang dilakukan Eksponen '66 adalah bersifat mendobrak terhadap keadaan sebelumnya, yang telah menyeleweng dari Pancasila dan UUD '45. Bagaimana mungkin waktu itu bisa melakukan sosial kontrol sesuai dengan konstitusi, kata Gafur, padahal waktu itu aparatur pemerintahan rusak, mekanisme kepemimpinan nasional tidak berjalan, MPR dan DPR di bawah satu tangan, pers dibungkem, suasana ketakutan (anxious) begitu mencengkam waktu itu. Sehingga satu-satunya jalan adalah melakukan pendobrakan.

Masyarakat masih penuh dinamika.

Tapi model-model pendobrakan seperti itu jelas tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini. Karena, tegas Gafur, UUD '45 dan Pancasila telah menempatkan sosial kontrol pada proporsinya yang searah dengan perundangan yang berlaku. "Model pendobrakan seperti waktu '66 tidak boleh diulang lagi, karena justru akan membuat kita rusak!"

Semua pihak, kata Gafur, jangan melaksanakan kritik semau gue, jangan kritik asal kritik, tapi haruslah merupakan kritik yang membangun, yang konstruktif. Pemerintah orde baru saat ini jelas terbuka untuk menerima kritik, namun kritik yang membangun bukan kritik yang distruktif atau merusak.

Abdul Gafur tidak sependapat dengan sementara ahli yang menganggap masyarakat saat ini telah dihinggapi *sosial boredom* (kebosanan sosial) yang menjurus ke apatisme. Memang diakui, di sementara masyarakat urban, gejala sosial boredom ini mungkin ada. Tapi hal ini baru gejala bukan secara general atau secara menyeluruh gejala itu hinggap di masyarakat.

Gejala ini memang harus kita waspadai dan dihilangkan, supaya tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menjadi masalah sosial. Menurut Gafur, analoog dengan gejala narkotika di kalangan anak muda, hal ini baru merupakan gejala yang ada pada segelintir generasi muda, bukan seluruh generasi muda.

Masyarakat saat ini masih banyak yang penuh dinamika, penuh gairah dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional. □ **Mahmudi Romli/Subandrio**

Digitized by Google

Kedua: memadaikah peranan itu dengan anggapan yang dikaitkan dengan dirinya? Adalah Tahi Simbolon yang kemudian memberi jawab "Sesungguhnya peranan Angkatan 1966 hanyalah sampai pada taraf spontan, insidental belaka. Itulah sebabnya tidak mengherankan kalau kesadaran mereka baru sampai pada tuntutan dan seruan Tritura. Setelah PKI dibubarkan, kabinet di-resuffle dan harga mulai direm, maka habislah raison d'etre dari angkatan ini. Mereka sama sekali tidak sampai pada penciptaan paradigma kehidupan politik nasional yang baru". Wajarlah, ujarnya, kalau tidak mengharap apa-apa, apalagi yang luar biasa, dari apa yang suka disebut Angkatan 1966.

Eksponen 1966, Abdul Gafur — kini Menteri Pemuda dan Olahraga — justru melihat ada benang merah antara idealisme yang dikandung oleh Tri Tuntutan Rakyat di tahun 1966 dengan "pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan Orde Baru saat ini." Bahkan benang itu terbentang semenjak awal Orde Baru di bawah kepemimpinan pak Harto: Di bidang ekonomí dilaksanakan pembangunan lewat Pelita demi Pelita. Dan di bidang ideologi, Orde Baru mulai memantapkan ideologi Pancasila sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, serta yang terakhir menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. "Perjuangan itu merupakan perjuangan yang panjang, hampir selama dua puluh tahun, baru kita berhasil mencanangkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan diterima oleh semua warga negara, termasuk setiap kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan" (Lihat: "Garis Lurus antara 1966 hingga kini").

Untuk mengatakan sampai seberapa jauh besarnya peranan Angkatan 1966, menurut Letjen (Purn) Sarwo Edhie Wibowo — seorang pelaku sejarah di sekitar saat-saat itu — perlu mengadakan peninjauan historis secara obyektif, dalam hal ini meninjau sejarah lahirnya Angkatan 1966. "Lahirnya Angkatan 1966 merupakan tuntutan sejarah karena waktu itu terjadi suatu keadaan di mana pimpinan pemerintahan bersikap ragu-ragu menghadapi kenyataan bahwa PKI telah melakukan pemberontakan mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945", ujarnya. "Karena sikap ragu-ragu itulah maka para pemuda, mahasiswa, pelajar yang didukung oleh ABRI yang tetap setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 telah bergerak mencetuskan Tritura. Tekad dan langkah yang diambil oleh para pemuda waktu itu memang bukan sesuatu yang dapat dinilai kurang hebat. Itulah tuntutan zaman yang telah dijawab dengan elan perjuangan yang sesuai dengan jiwa, semangat dan sifat orang muda."

Penting, Menghargai Sejarah

Ir. Roedianto Ramelan, salah seorang eksponen perjuangan

Abdul Gafur

1966 yang kini menjadi pengusaha setelah usai tugasnya di DPR-RI, seperti halnya Sarwo Edhie menekankan urgensi aspek sejarah. Menurut Rudianto, harus diakui Angkatan 1966 punya andil besar dalam mendobrak Orde Lama. "Namun andil membangun serta mengisi Orde Baru bukan semata-mata dimiliki oleh angkatan 1966, tapi dimiliki pula oleh anggota masyarakat lainnya yang ikut menegakkan Orde Baru". Maka memang tidak perlu ada pembakuan bagi Angkatan 1966. "Yang penting adalah catatan sejarah yang disusun oleh para ahli sejarah untuk meneliti perjuangan Angkatan 1966. Dan catatan sejarah itu nantinya akan dibaca serta dipelajari oleh generasi men-

Sarwo Edhie Wibowo

datang, guna diambil hikmah dan suri tauladannya." Pembakuan suatu angkatan dianggapnya bukan hal urgen dan relevan, "yang penting dan harus dilestarikan adalah nilai dan idealisme dari angkatan-angkatan tersebut." Untuk hal yang terakhir ini ia tak sendirian. Dr Midian Sirait — tokoh kesatuan aksi sarjana di tahun perjuangan 1966 — juga menganggap Angkatan 1966 tak perlu dilembagakan. Sedang menurut Dr Alfian pengamat sosial politik dari LIPI "semakin mantap dan dewasa situasi sosial politik, kehadiran angkatan-angkatan takkan relevan lagi" (Lihat: "Beberapa ukuran dan dimensi pembangunan politik").

Khusus untuk Angkatan 1966, Sarwo Edhie memberikan satu uraian dalam kaitan ini. Situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita di tahun 1966 memang menghendaki suatu jawaban yang tepat. Jawaban itu, menurut Sarwo Edhie, ternyata diberikan oleh para pemuda, sehingga melahirkan momentum sejarah yang tak boleh dilupakan. "Jadi munculnya Angkatan 1966 atau munculnya penamaan Angkatan 1966 merupakan suatu hal yang wajar dapat diterima, karena tahun 1966 itulah para pemuda telah menjawab tantangan zaman yang sifatnya nasional atau berskala nasional." Perlu kiranya disadari, ujar Sarwo Edhie, tiap-tiap zaman memang menghadapi tantangan sendiri. "Kalau kita mengenal Angkatan 1908, yang merupakan pelopor tumbuhnya atau bangkitnya jiwa nasionalisme, kemudian Angkatan 1928 sebagai pelopor persatuan dan kesatuan nasional, maka kita pun kemudian mengenal Angkatan 1945 sebagai pembebas dari cengkeraman penjajah. Angkatan 1945 inilah yang kemudian selama hampir 5 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan kita harus berperang secara gigih menghadapi penjajah yang ingin kembali mencengkeram persada ibu Pertiwi." Mereka pulalah yang harus menjawab tantangan zaman yang penuh kemelut, perang saudara, yang bersumber dari masalah-masalah dalam negeri, separatisme, ancaman ideologi lain, ekstrim kanan dan kiri, penafsiran Pancasila menurut selera dan kepentingan masing-masing dan lain sebagainya. "Lahirnya Angkatan 1966 pun merupakan jawaban terhadap tantangan zaman itu. Sejak itu Angkatan 1966 dan Angkatan 1945 telah bergandengan tangan meneruskan perjuangan menjawab tantangan zaman mengisi kemerdekaan dengan pembangunan." Dengan semakin habisnya orang-orang dari Angkatan 1945, maka secara alamiah telah terjadi proses regenerasi. Yang tua mulai mundur dari kancah perjuangan digantikan oleh yang muda, yang memang memenuhi syarat, memiliki bekal untuk melanjutkan tugas-tugas menurut kemampuan masing-masing. "Angkatan 1966 menurut pengamatan saya telah tersebar dan menyebar di mana-mana, ada yang menjadi Menteri, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi ABRI. Pendek kata segala aspek kehidupan kita tidak lepas dari hadirnya Angkatan 1966 sebagai penerus perjuangan Angkatan 1945. Peran dan posisi yang ditempati tentu bukan hasil rekaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, melainkan memang secara wajar patut ditempatinya."

Lalu selain hal-hal yang diutarakan Sarwo Edhie itu, nilai dan idealisme apa dari perjuangan tahun 1966 yang patut untuk dilestarikan atau diberi kesinambungan?

Dr Midian Sirait — kini Dirjen POM Departemen Kesehatan RI — mengibaratkan angkatan dan perjuangan 1966 "buku yang belum selesai ditulis." Angkatan 1966 hendaknya jangan dipandang dari segi pengelompokan sejumlah ge-

Digitized by Google

nerasi muda waktu itu. "Angkatan 1966 itu merupakan koreksi total terhadap penyelewengan yang ada sebelumnya, agar kembali kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen." Sebagaimana juga kita memandang Angkatan 1945 bukan berdasarkan orangnya, tetapi sebagai angkatan yang mendirikan negara. Begitu pula Angkatan 28, kita pandang sebagai angkatan yang memutuskan untuk menggunakan nama Indonesia. "Menurut hemat saya, dalam sejarah, Angkatan 1966 merupakan pencerminan tekad seluruh bangsa untuk kembali kepada cita-cita Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila yang murni dan konsekuen. Semangat Orde Baru ini, belum selesai dalam pelaksanaannya. Dan belum tutup buku." Masih banyak yang harus dikerjakan lebih lanjut.

Sofyan Wanandi

Dalam Satu Garis Lurus

"Kita saat ini masih dalam fase pembangunan", ujar Dr Midian Sirait. "Membangun itu tak lain dari rentetan perubahan yang terus menerus dengan suatu tujuan tertentu." Kata lain untuk yang diutarakan Dr Midian ini adalah 'pembaharuan'. Terkait dengan pembaharuan adalah dinamika — sesuatu yang mengalir dan dalam dirinya mengandung sifat berkesinambungan atau terus menerus. Maka, seperti kata Dr. Midian Sirait, bahkan "kadang-kadang yang namanya pelaksana pembaharuan itu sendiri suatu waktu juga akan dapat menjadi obyek dari pembaharuan."

Seperti pula yang diutarakan eksponen 1966 Drs Zamroni, tujuan dasar dari perjuangan 1966 memanglah melaksanakan pembaharuan-pembaharuan. Tritura sendiri, selain menuntut pembubaran PKI, juga mengembangkan tuntutan perubahan lainnya: Perubahan sistim politik melalui isyu perombakan kabinet dan kemudian perubahan sistim ekonomi — "yang keadaanya waktu itu memang sangat parah." Dan kemudian pada masa-masa sesudahnya "kita bersepakat, dengan sumber yang berbeda-beda, untuk melaksanakan pembaharuan menurut ide 1966." Zamroni menggambarkan bahwa rekan-rekannya yang memilih wadah perjuangan Golkar memperoleh kesempatan yang lebih baik dalam keikutsertaan melakukan pembaharuan. "Sedangkan yang berada di partai, pembaharuan itu saya akui lambat sekali" (Zamroni menyebut sebab yang berupa tak adanya kerangka sama sekali dan tak dipunyainya tahapan langkah-langkah strategis). Dengan demikian, pembaharuan sistim politik ini dimotori oleh Golkar.

Eksponen perjuangan 1966 lainnya, Sofyan Wanandi, juga menunjukkan adanya garis yang nyata relevansi produk 1966 dengan proses pembangunan bangsa saat ini.

Beberapa Ukuran dan Dimensi Pembangunan Politik

Semakin mantap dan dewasa situasi sosial politik, kehadiran angkatan-angkatan, sudah tidak relevan lagi! Kecuali, jika ada penyimpangan baru atau ada kekuatan asing yang akan menjajah tanah air, baru munculnya suatu angkatan diperlukan. Demikian Dr. Alfian salah seorang pengamat sosial politik dari LIPI mengemukakan pendapatnya. Dan tentunya, kita semua tidak mengharapkan adanya penyimpangan baru dari sistim yang ada sekarang ini, terlebih adanya kekuasaan asing yang akan menjajah tanah air. Kita saat ini, tambahnya, ingin membangun demokrasi Pancasila yang sehat dan mantap.

Angkatan '45 waktu itu muncul untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa, karena saat itu ada kekuasaan asing yang masih mengangkangi tanah tumpah darah. Sedangkan Angkatan '66 muncul, karena adanya penyimpangan-penyimpangan UUD '45 dan Pancasila. Angkatan-angkatan yang ada dalam sejarah bangsa Indonesia, menurut Alfian, sudah merupakan perbendaharaan yang dikaitkan dengan dinamika bangsa kita.

Bicara mengenai Angkatan '66, menurut Alfian, kehadirannya di masyarakat tidaklah sesuatu yang berdiri sendiri. Tapi, merupakan kelanjutan dari cita-cita Angkatan

Dr. Alfian

'45 yang ingin menegakkan Pancasila dan UUD '45 secara murni dan konsekwen. Angkatan '45 berjuang memerdekakan bangsa Indonesia, yang berarti pula sifatnya melawan kolonialisme. Kemudian dalam kurun waktu dua puluh tahun berikutnya setelah merdeka, muncul Angkatan '66 yang ingin mengoreksi jalannya dinamika masyarakat orde lama waktu itu, yang dianggap telah menyimpang dari cita-cita Proklamasi '45.

Idiom paling populer di waktu '66 adalah Hanura atau hati nurani rakyat, yang berarti, Angkatan '66 mencoba menyatukan dirinya pada Hanura. Menurut Alfian, Hanura itu dari masa ke masa menginginkan sesuatunya berjalan di atas rel yang berlaku. Memang, kadang-kadang penguasa di suatu waktu bisa lupa, keinginan serta tindakannya bisa berbeda dengan keinginan Hanura. Oleh sebab itulah terjadi koreksi terhadap tindakan dan keinginan dari penguasa, yang tidak sesuai dengan Hanura.

Kembali mengenai Angkatan '45 dan '66, menurut Alfian, keduanya punya sifat perjuangan yang berbeda tapi tujuannya sama. Jika angkatan '45 berjuang untuk kemerdekaan, maka Angkatan '66 mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam sistim mengisi kemerdekaan tersebut, serta mengembalikan kepada proporsi yang sebenarnya. "Tapi tidak relevan, jika selalu muncul suatu angkatan padahal tanah air tidak diancam oleh kekuasaan asing atau terjadi penyimpangan-penyimpangan baru," katanya.

Digitized by Google

Bahaya laten komunis umpamanya, masih ada. Sedangkan tuntutan kedua dari Tritura (Bersihkan Kabinet Dwikora), pun masih relevan bila dikaitkan dengan usaha-usaha penertiban aparatur negara dewasa ini. Demikian juga tuntutan yang ketiga, soal penurunan harga-harga, "meskipun itu sebenarnya tergantung daya beli masyarakat sendiri." Harus diingat, ujar Sofyan, "Tritura adalah tujuan dan cita-cita perjuangan Angkatan 1966. Oleh sebab itu saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan kepada teman-teman yang sekarang terlibat dalam pembangunan agar introspeksi diri dan tetap setia kepada tujuan perjuangan kita." Sedang "kepada rekan-rekan seperjuangan lainnya yang tidak duduk dalam pemerintahan," Sofyan mengingatkan agar jangan hanya pandai mengeluh. "Kalau kita sepakat tidak mau mundur dari apa yang telah kita capai saat ini, maka pemerintah Orde Baru perlu kita bantu bersama-sama, antara lain dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dewasa ini saya lihat agak menurun. Mungkin akibat pengaruh devaluasi dan lain-lainnya."

Memandang Orde Baru dalam wujudnya seperti sekarang ini sebagai hasil dan kesinambungan perjuangan tahun 1966, Sarwo Edhie Wibowo membentangkan beberapa hal yang telah dicapai Orde Baru selama lebih dari 20 tahun ini. Begitu pula Dr. Midian Sirait dan Drs. Zamroni.

Selama 20 tahun terakhir, menurut Sarwo Edhie, Orde Baru telah secara murni dan konsekuen melaksanakan Pancasila dan Undang-undang

Drs. Zamroni

Dasar 1945. "Dengan disusunnya GBHN setiap 5 tahun sekali, jelas tergambarkan bahwa aspirasi rakyat telah tersalurkan dalam bentuk Pola Umum Pembangunan Nasional jangka panjang yang oleh Mandataris MPR harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya." RAPBN yang diajukan oleh Presiden/Mandataris MPR setiap tahun kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan di segala bidang, jelas menggambarkan adanya mekanisme kontrol dan demokrasi dalam pembangunan.

Telah banyak yang dicapai Orde Baru selama 20 tahun terakhir ini. Kita tidak boleh menutup mata tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah kita capai bersama. Namun tidak berarti bahwa apa yang kita peroleh itu serba sempurna. Harus kita akui secara jujur bahwa masih banyak saja problema yang harus kita atasi dengan mengerahkan tenaga, dana dan upaya, ujar Sarwo Edhie. "Saya ingin mengajak untuk menilai keberhasilan dan ke-

Salah satu ukuran

Bagi Alfian, salah satu ukuran keberhasilan sosial politik yang mantap dan sehat, jika tidak akan ada lagi angkatan-angkatan yang lahir. Kalau masih ada angkatan-angkatan yang muncul, berarti bangsa kita masih dalam tahap *transisi*.

Orde Baru, kata Alfian, ingin melaksanakan Pancasila dan UUD '45 secara murni dan konsekwen. Sejauh ini, sudah terlihat langkah-langkah menuju ke arah itu.

Bahkan saat ini, Pancasila telah diterima sebagai para digma bersama oleh ketiga kekuatan sospol serta seluruh organisasi kemasyarakatan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistim politik yang hanya menganut tiga kekuatan sospol merupakan langkah yang terbaik, dibanding sistim multi partai di zaman lalu. Penyederhanaan sistim kepartaian di samping ABRI juga merupakan kekuatan sospol, menurut Alfian, suatu langkah menuju struktur politik yang lebih mantap.

Pemilu juga sudah bisa disebut melembaga, karena telah dilaksanakan sebanyak empat kali berturut-turut setiap lima tahun. Mulai bekerjanya lembaga-lembaga supra struktur, seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA. Tapi semua ini, kata Alfian, masih dalam bentuk formal. Kadang-kadang masih perlu dimasalahkan seberapa jauh isi dari bentuk formal ini. Seperti dicontohkan, lembaga DPR seberapa jauh bisa berfungsi. Menurutnya, secara subtansi DPR masih perlu peningkatan fungsinya.

Jika berhadap-hadapan antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif, maka nampak legislatif masih lemah, sedangkan eksekutif kelihatan menyolok. Namun Alfian berpendapat, menyoloknya fungsi eksekutif itu belum berarti dirinya mengambil kekuasaan dari lainnya, tapi karena pihak legislatiflah yang nyata-nyata memang lemah.

Oleh sebab itu, problema saat ini adalah, bagaimana mengisi lembaga-lembaga formal yang ada bisa berisikan bobot yang *seyogyanya*.

Dimensi lain pembangunan politik

Selanjutnya, Alfian juga mengetengahkan dimensi lain dalam pembangunan politik bagaimana membangun budaya politik baru yang sesuai dengan UUD '45 dan Pancasila.

Pencerminan budaya politik baru ini akan terlihat di setiap perilaku dan kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, sekolah, pers, organisasi, usaha, serta segala bidang kehidupan.

Alfian mencontohkan, budaya politik baru tersebut adalah budaya musyawarah mufakat, di mana seharusnya tidak hanya berlaku di DPR tapi juga sampai ke RT-RT. Hal ini bisa tercapai, jika ada mekanisme yang menjalankannya, sehingga masyarakat di semua lapisan terbiasa mengambil setiap keputusan dengan jalan musyawarah mufakat. "Bahkan di keluargapun harus ditrapkan budaya tersebut," katanya.

Saat ini, kata Alfian, di sementara masyarakat masih belum terbiasa menggunakan budaya musyawarah mufakat tersebut, bahkan seperti di kekuatan sosial politik, kericuhan di PDI dan PPP serta di organisasi kemasyarakatan Parfi, merupakan contoh tidak adanya mekanisme musyawarah mufakat yang sehat di organisasi yang bersangkutan. Secara formil, katanya, me[illegible] pihak di dalam organisasi y[illegible] an saling melangkahi meka[illegible] sehingga terjadi kericuhan. [illegible] contohkan di organisasi kew[illegible] PWI, juga di masa lalu terjadi [illegible] disebabkan *ketidakmauan* berb[illegible] di organisasi yang bersangkutan, [illegible] apa yang telah disepakati b[illegible] tambahnya.

Namun, tutur Alfian, organisas[illegible] sasi kemasyarakatan yang bers[illegible] agamaan tidak terjangkit penyakit [illegible] perti Katholik, Kristen, dan Islam. [illegible] dalam organisasi yang bercorak keag[illegible] itu, mekanisme musyawarah mufa[illegible] dah berjalan dengan baik.

Alfian juga berpendapat, se[illegible] masyarakat lebih dewasa dalam be[illegible] maka di dalam menghadapi perubah[illegible] tuasi tidak perlu ada "kejutan" at[illegible] ngan kata lain, tidak perlu ada ang[illegible] yang muncul lagi. Karena perubah[illegible] masyarakat sudah merupakan hal [illegible] lazim. Karena semua mekanisme ya[illegible] suai dengan konstitusi telah berjalan [illegible] relnya masing-masing.

Ia tidak sependapat pula jika suatu [illegible] katan mengklaim diri sebagai angkatan yang paling berjasa. Karena mengan[illegible] diri paling berjasa, jelas tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. "Ma[illegible] katlah yang berhak menilai dan me[illegible] penghargaan kepada sesuatu angka[illegible]," katanya.

Namun ia mengingatkan pula [illegible] matangan berpikir dari suatu masya[illegible] bisa dilihat dari cara masyarakat te[illegible] menilai sesuatu masalah dengan [illegible] wajar saja, tanpa ada unsur yang di[illegible] lebihkan! demikian Dr Alfian.□ M[illegible] R/Subandrio

Digitized by Google

Jangan Sampai Terjebak

Bagi Sofyan Wanandi, peranan Angkatan '66 di masa awal kebangkitan Orde Baru adalah cukup menentukan dalam menumbangkan rezim Orla. Jadi, menurutnya, bukan hanya embel-embel ataupun sekedar mithos yang artifisial belaka. "Kitalah yang paling berani mendobrak saat itu," tegasnya.

Menurut salah seorang eksponen Angkatan '66 ini, sekarang terjun ke dunia swasta, Angkatan '66 yang dimotori oleh organisasi-organisasi mahasiswa, pada saat itu sudah merupakan suatu kekuatan yang solid dan bertumbuh menjadi sebuah pressure group yang cukup disegani.

"Tapi saya tidak meng-claim bahwa mahasiswalah yang paling berjasa pada saat itu. Sudah tentu ABRI dan rakyatpun turut berperan. Terutama ABRI, yang sebagian pemimpinnya dibunuh oleh G-30S/PKI," ujarnya.

Bedanya, kata Sofyan lagi, ABRI bergerak berdasarkan perintah dan masih terikat oleh janji Sapta Marga-nya. sedangkan gerakan-gerakan mahasiswa pada saat itu boleh dikatakan merupakan suatu aksi spontanitas yang lahir dari momentum yang tepat.

Bagaimanapun juga, gabungan ABRI, mahasiswa dan masyarakat pada saat itu telah menjadi suatu kekuatan yang dahsyat di dalam apa yang dinamakan sebagai Front Pancasila, melawan PKI dan rezim Orla. Sehingga kalau ada yang bilang bahwa peranan mahasiswa waktu itu hanya embel-embel saja; "saya rasa mereka itu orang-orang yang kurang mengerti atau tidak terlibat langsung dalam pergerakan", kata Sofyan.

Berbicara tentang peranan Angkatan '66 dalam perjalanan sejarah nasional selanjutnya, menurut Sofyan, kelahiran Angkatan ini bisa disebut sebagai periode koreksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Meskipun para eksponen Angkatan '66 itu sekarang berjalan sendiri-sendiri, tidak tergabung dalam suatu organisasi resmi, namun hendaknya jiwa dan semangat untuk mengkoreksi dan introspeksi itu tetap hidup, ujarnya.

Mengapa tidak berorganisasi saja? "Kita tidak merasa perlu untuk meniru seperti Angkatan '45. Lebih baik kita meleburkan diri ke organisasi-organisasi yang sudah ada, seperti Golkar misalnya," jawab Sofyan Wanandi. Alasannya? Tidak ingin terjebak dalam kekeliruan-kekeliruan yang sama seperti yang dialami oleh angkatan sebelumnya, di samping memang karena kesibukan pribadi-pribadi, jawabnya lagi.

Sofyan Wanandi bahkan kurang setuju dengan penamaan Angkatan untuk gerakan-gerakan pembaharuan di masa kini

Roedianto Ramelan

maupun mendatang. "Saya rasa sudah tidak relevan lagi, kecuali kalau memang ada momentum. Soal Angkatan ini saya pikir sudah selesai dengan Angkatan '45 dulu. Tetapi kalau masyarakat sendiri yang menilai dan menamakannya begitu, ya silahkan." Sebaiknya, dia menambahkan, jangan ada lagi penamaan berdasarkan Angkatan maupun pembentukan organisasi-organisasi baru yang kurang perlu. Sebab, dia mensinyalir, sekarang ini banyak orang yang mau cari enak saja dengan mengambil jalan pintas.

Dari sudut pandangan sebagai anggota MPR dia juga menghimbau agar pemerintahpun bisa dan mau memberikan contoh nyata atau keteladanan yang pantas ditiru. "Masyarakat kita ini kan sebenarnya gampang diatur, dan selalu melihat keteladanan yang diberikan oleh panutannya," ujarnya.

Mengutarakan pandangannya tentang masa depan dan peranan Angkatan '66 di dalamnya, Sofyan mengatakan bahwa masalah utama yang perlu segera di atasi adalah masalah ekonomi. "Saya pikir," ujarnya," pemerintah perlu mengambil jalan pintas untuk mengatasi kesulitan ekonomi kita dalam dua-tiga tahun mendatang."

Jangan Terjebak Atribut

Salah seorang eksponen 1966 lainnya yang waktu itu mengelola Radio Ampera, radio amatir dari mahasiswa serta pemuda 1966 yang mengumandangkan perjuangan Angkatan 1966, Ir. Roedianto Ramelan, berpendapat, memang tidak perlu ada pembakuan bagi Angkatan 1966. Yang penting, tegasnya, adalah catatan sejarah yang dibuat oleh ahli sejarah untuk meneliti perjuangan Angkatan 1966. Dan catatan sejarah itu, nantinya akan dibaca serta dipelajari oleh generasi mendatang, guna diambil hikmah dan suri tauladannya.

Berbicara mengenai motivasi yang mewarnai perjuangan Angkatan '66, menurut Roedianto, karena para Eksponen 1966 belajar dari sejarah Angkatan-angkatan sebelumnya yang berjuang demi Nusa dan Bangsa. Ia bahkan sependapat, kalau Eksponen 1966 belajar dari hikmah perjuangan Angkatan '08, Angkatan '28 dan Angkatan '45. Namun, katanya, pembakuan suatu angkatan sebenarnya tidak relevan, yang penting dan harus dilestarikan adalah nilai dan idealisme dari angkatan-angkatan tersebut.

Roedianto yang saat ini menjadi orang swasta berpendapat, setelah dua puluh tahun Orde Baru ini, seyogyanya, setiap Eksponen '66 menjadi anggota masyarakat biasa, bertindak seperti yang lain. Jika tokh, tindakan dari pribadi-pribadi Angkatan 1966 mungkin ada yang seragam, hal ini bisa jadi karena pengalaman masa lalu yang masih mewarnai pribadi-pribadi itu.

Ia juga menolak keinginan yang ingin selalu memakai atribut-atribut Angkatan '66 untuk tujuan-tujuan tertentu. Bahkan Roedianto kemudian berpendapat, biarlah Angkatan 1966 ini hanya dijadikan catatan Sejarah yang akan dipelajari oleh generasi selanjutnya.

Karena, berbeda dengan Angkatan 1945, setelah Proklamasi Kemerdekaan, setiap posisi di bidang apapun waktu itu jelas diduduki oleh Angkatan '45. Agak berbeda dengan Angkatan 1966, di mana dalam mendobrak Orla serta menciptakan Orde Baru, tidak hanya Angkatan 1966 yang punya andil, tapi juga lapisan masyarakat lainnya, seperti ABRI, pegawai negeri, K-5, tukang beca, tukang sayur, ibu-ibu dan anggota masyarakat yang beraneka ragam. "Jadi Angkatan 1966 tidak bisa mengklaim dirinya paling berjasa dalam menegakkan Orde Baru!"

Angkatan 1966 sulit menyatakan dirinya seperti Angkatan 1945, karena sewaktu zaman 1945 jelas musuh bangsa adalah kaum penjajah, sehingga bangsa Indonesia waktu itu lebih menyatu dalam melakukan perjuangan. Kalau tokh dilakukan *pembakuan* bagi suatu angkatan, maka yang berhak menerima pembakuan itu menurut Roedianto adalah, Angkatan 1945 yang telah memproklamirkan lahirnya Kemerdekaan RI. "Ini merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah, di mana perjuangan yang beratus-ratus tahun, kemudian tercapai di tahun 1945."

Diakui pula, Angkatan 1966 punya andil besar dalam mendobrak orde lama, namun andil yang membangun serta mengisi Orde Baru bukan hanya semata-mata dimiliki oleh Angkatan 1966, tapi andil itu dimiliki pula oleh anggota masyarakat lainnya yang ikut menegakkan Orde Baru. ☐ **AP/MR/S**

Digitized by Google

kurangan kita dengan kacamata Pancasila, karena pembangunan yang kita laksanakan adalah pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila." Tidak mungkin kita akan bisa menilai kiprah pembangunan yang kita laksanakan ini dengan kacamata lain. Kalau hal itu kita lakukan, maka hasil penilaian akan tidak cocok.

Sarwo Edhie menguraikan lebih lanjut bahwa dengan terlaksananya mekanisme kepemimpinan 5 tahun dalam sistim ketatanegaraan kita, maka Orde Baru telah membuktikan diri sebagai Orde Konsitusional. "Telaksananya Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali yang menghasilkan MPR dan DPR kita; kemudian MPR menetapkan GBHN dan memilih Presiden/Mandataris yang harus melaksanakan GBHN itu; Disusul dengan pelaksanaan mandat tersebut oleh Presiden dalam RAPBN yang harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR; kemudian Presiden mempertanggungjawabkan mandatnya kepada MPR pada akhir masa jabatannya disusul dengan Pemilihan Umum yang berikutnya; itulah gambaran secara garis besar mekanisme kepemimpinan 5 tahunan." Dalam pada itu, berbagai koreksi total terhadap penyimpangan dan penyelewenangan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 telah dilakukan secara terus menerus oleh Orde Baru. "Orde Baru telah berhasil melakukan koreksi-koreksi melalui jalur konstitusional, yaitu melalui Sidang-sidang MPRS tahun 1966, tahun 1967 (Sidang Istimewa), Sidang-sidang MPR tahun 1973, 1978 dan 1983." Sejumlah ketetapan yang bersifat prinsipil telah dihasilkan dalam sidang-sidang tersebut. "Selama Orde Baru telah banyak dihasilkan Undang-undang dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar 1945. Selama Orde Baru, Pemerintah maupun DPR telah melaksanakan fungsinya dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945."

Sejumlah Tugas Lanjut

Namun seperti dikatakan Dr Midian Sirait, memang masih menunggu sejumlah tugas lanjutan. Dalam hal pemantapan ideologi Pancasila, menurut Drs Zamroni, kendati telah diterima

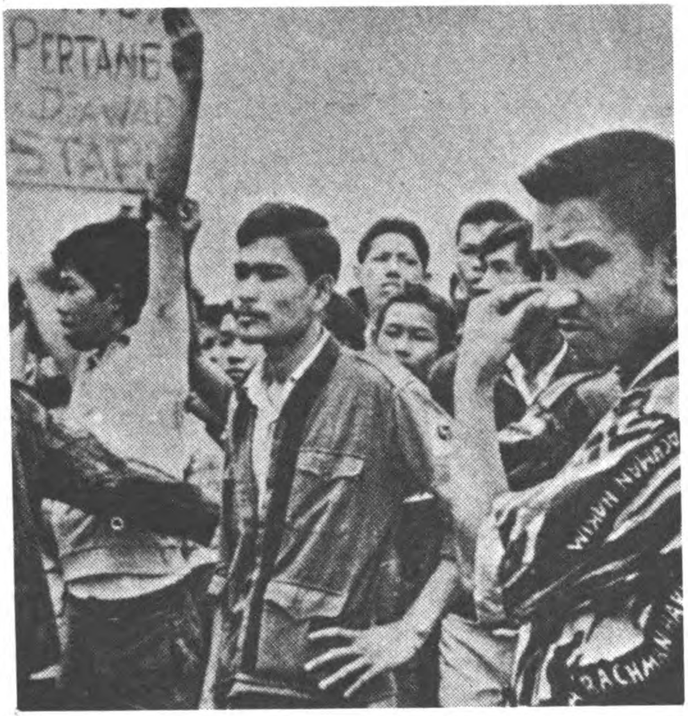

Angkatan '66. Turut menyadarkan rakyat agar tidak apatis.

sebagai satu-satunya asas, tapi "barulah penerimaan di tingkat formal." Sedangkan dalam bidang operasionalnya masih belum mantap. Secara menyeluruh dalam kehidupan politik menurut Zamroni keadaannya sama. "Dalam pemerataan strategi operasional, memang orientasi kepada pembangunan secara formal sudah. Tetapi pola kegiatan organisasi politik dikaitkan dengan proses 5 tahunan dalam bernegara dan berbangsa itu belum mantap." Seharusnya partai politik itu mempunyai jadwal kegiatan menghadapi pemilihan umum yang berupa penyempurnaan konsep pembangunan. Dan hal ini terkait dengan konsistensi jangka panjang. "Kemudian antar pemilu, kegiatan-kegiatannya dilembagakan di DPR dalam rangka mengawasi pelaksanaan GBHN. Dan di luar DPR harus sinkron dengan itu, tetapi seharusnya dititikberatkan kepada kelembagaan.".

Pembangunan ekonomi menurut Zamroni, merupakan hal yang lebih sulit daripada pembangunan politik. "Sebab pembangunan di bidang politik tidak terkait dengan masalah-masalah di luar. Berbeda halnya dengan pembangunan bidang ekonomi, yang bagaimanapun berkait dengan kegiatan ekonomi di luar negeri," ujar Zamroni. "Seperti kita ketahui, kondisi ekonomi dunia saat ini sudah mapan dengan sistim terbuka, yakni pasar bebas. Sedangkan untuk membangun ekonomi Indonesia ada ketergantungan pada ekonomi luar negeri. Maka mau tidak mau, kita mengikuti sistim yang sudah ada. Di samping itu, untuk menata ekonomi di dalam negeri, sistimnya berbeda dengan sistim internasional itu, yakni berdasarkan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945." Jadi pembangunan nasional ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat dalam jangka pendek dan menengah, sedangkan dalam jangka panjangnya adalah sistim nasional di bidang ekonomi "ini sangat memerlukan waktu."

Dalam uraian Dr Midian Sirait, di negara-negara sedang berkembang pembangunan itu dilihat dari tercapai atau tidaknya target. Tapi dalam konstitusi kita, hal itu ditentukan dengan GBHN. Jadi yang menjadi ukuran adalah tercapainya tujuan seperti apa yang tertuang dalam GBHN atau tidak. "Sedangkan kalau kita melihat di negara-negara yang sudah maju, manajemennya tidak melihat target, melainkan melihat dinamika yang ada di masyarakatnya." Jadi manajemen nasionalnya adalah menjaga agar dinamika tersebut tidak bertabrakan satu dengan yang lain. "Tapi untuk kita perlu disadari bahwa dalam proses dinamika itu kita belum selesai, yakni mengenai perubahan-perubahan itu." Dr Midian melihat koreksi perlu jalan, dan koreksi itu memang telah jalan. Namun koreksinya tidak seperti yang di tahun 1966. Koreksi sekarang ini melalui jalur lebih konstitusional. "Menurut hemat saya penting dipahami bahwa dalam rangka koreksi pada pembangunan ini perlu makin ditingkatkan lagi dinamika masyarakat dan lembaga yang memang disediakan untuk itu."

Secara menyeluruh Dr Midian Sirait menganggap keadaan ekonomi sudah baik, sudah dapat kita nikmati. Berbeda dengan dulu, membeli beras saja sulit. Tapi Dr Midian Sirait pun mengingatkan bahwa dalam suatu proses pembaharuan kadang-kadang ada kecenderungan masyarakat itu berubah-ubah. Berubah dari nilai berjuang ke nilai untuk menikmati. "Dalam hidup ini memang ada semangat untuk berjuang dan ada semangat untuk menikmati, dan sekarang ini keduanya mungkin sedang berlomba." Untuk itu setiap orang harus bermawas diri. Dan Sofyan Wanandi menambahkan konstatasi adanya gejala apatisme di sebagian masyarakat.

Kesadaran akan diri menjadi penting. Dalam kaitan ini, Dr Midian Sirait melontarkan harapan kepada organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat dapat menggairahkan semangat perjuangan dengan menggairahkan kesadaran sejarah. Dengan kesadaran sejarah, tantangan kehidupan mampu terlihat dengan baik. Dalam ucapan Dr Midian "Sejarah itu akan membangkitkan semangat, tanpa adanya kesadaran sejarah semangat itu tidak bangkit." Anjuran untuk menghargai dan selalu belajar dari sejarah juga dilontarkan Ir Roedianto Ramelan. Untuk jangka yang sedekat mungkin, adalah Sofyan Wanandi yang mengharapkan rekan-rekan perjuangannya di tahun 1966 yang telah menyebar di manamana di tengah masyarakat saat ini "ikut menyadarkan masyarakat supaya terhindar dari apatisme, dan mau turut serta bersama pemerintah mensukseskan pembangunan nasional."□

Wawancara: Mahmudi R. Soebandrio, Alex P. Badrul Mustofa
Pemadu: Rum Aly.

Digitized by Google

RAPBN: Kenaikan Dalam Keadaan Serba Terbatas

Meskipun masih berada di tengah kesulitan ekonomi yang melanda dunia, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 1987/1988 — di luar dugaan banyak pihak — mengalami kenaikan 6,4% atau Rp 22,7 trilyun lebih dibanding tahun sebelumnya. Ini tentu saja memberi harapan. Seperti yang tersirat dalam pidato pergantian tahun Presiden Soeharto, 31 Desember malam. Harapan dan tantangan, itulah yang bakal dihadapi bangsa ini di tahun 1987. Bagaimana menjawab tantangan dan menggapai harapan itu? Berikut ini adalah keterangan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, 6 Januari lalu.

Presiden di depan sidang paripurna DPR-RI.

Seperti yang telah menjadi kebiasaan dalam penyelenggaraan negara yang selama ini telah kita kembangkan bersama, maka Presiden Republik Indonesia selalu menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran yang akan datang dalam minggu pertama bulan Januari.

Tradisi yang baik ini telah kita kembangkan bersama, sebagai sumbangan bagi perkembangan kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan negara kita sesuai dengan ketentuan dan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

Sebab itu saya merasa berbahagia hari ini dapat memenuhi kewajiban saya untuk menyampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 1987/'88 kepada Sidang Dewan yang terhormat.

Pembicaraan mengenai Rancangan APBN merupakan masalah bangsa dan negara kita yang teramat penting. Sebabnya ialah karena Rancangan APBN itu menyangkut hal-hal pokok yang akan kita lakukan sebagai bangsa, termasuk di dalamnya bagaimana kita mengerahkan sumber-sumber dana untuk melaksanakan apa yang akan kita lakukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Rancangan APBN juga merupakan masalah nasional yang teramat penting, karena di dalamnya menyangkut apa yang kita lakukan dalam tahun yang bersangkutan untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara yang diamanatkan oleh rakyat melalui Sidang Umum MPR.

Karena itu, setiap sidang seperti sekarang ini selalu mendapat perhatian yang sebesar-besarnya dan diikuti dengan penuh saksama, tidak hanya oleh para Anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang memperoleh kehormatan untuk hadir di sini, akan tetapi juga oleh semua kalangan dan lapisan bangsa kita.

Perhatian yang besar itu merupakan tanda yang sangat baik dan positif, karena hal itu mencerminkan tanggung jawab yang besar dari kita semua terhadap perkembangan dan pertumbuhan bangsa dan negara kita di masa depan. Saya berharap, kiranya tanggung jawab yang besar itu akan melahirkan sikap dan tindakan yang positif dan bertanggungjawab pula. Artinya, kita semua tanpa kecuali akan mengambil sikap dan langkah di bidang masing-masing untuk menyukseskan rencana-rencana kerja nasional kita dalam tahun 1987/'88; dengan jalan di satu pihak mengembangkan sumbangan dan peranan kita yang positif demi berhasilnya tugas-tugas nasional itu, dan di lain pihak, menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari sikap dan tindakan yang tidak mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas-tugas nasional kita itu.

Dalam berbagai kesempatan selama beberapa tahun terakhir ini saya selalu mengingatkan secara terus terang bahwa kita sedang berada dalam tahun-tahun yang sangat sulit dan penuh tantangan yang berat.

Kita tidak pernah berkecil hati menghadapi kesulitan dan tantangan itu. Kita tidak pernah dan tidak akan melarikan diri dari kesulitan dan tantangan yang menghadang di depan kita.

Sebaliknya, kesulitan dan tantangan itu selalu kita hadapi dengan sikap yang realistis, penuh harapan dan kesetiaan kepada Pancasila.

Saya pernah mengatakan, bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah menghadapi ujian dan tantangan yang berat. Sebaliknya, saya mengatakan, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dalam perkembangan dan pertumbuhannya mampu melampaui rintangan dan halangan yang besar, berhasil keluar dengan selamat dari gemblengan ujian dan cobaan yang berat.

Sebagai bangsa yang lahir dari kancah

Digitized by Google

Perang Kemerdekaan dan Revolusi, kita telah melampaui dengan selamat bermacam-macam rintangan dan halangan, kita tetap berdiri tegak dan kukuh setelah mengalami berbagai ujian dan cobaan.

Semangat, jiwa dan tradisi kita sebagai bangsa pejuang ini lah yang sekarang harus kita bangkitkan kembali dalam menghadapi ujian dan tantangan berat dalam perjalanan pembangunan kita dewasa ini.

Segala macam rintangan dan halangan, semua bentuk ujian dan cobaan, kita hadapi dengan sikap yang realistik, penuh harapan dan kesetiaan terhadap Pancasila.

Sikap realistik membuat kita melihat dengan penuh ketenangan dan penuh ketajaman masalah-masalah pokok apa yang kita hadapi. Sikap realistik membuat kita mengetahui dengan penuh keyakinan kekuatan-kekuatan kita dan juga menyadari dengan kesungguhan kelemahan-kelemahan kita. Sikap realistik yang demikian akan menemukan jawaban untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi itu dan tentu akan mendatangkan harapan.

Harapan yang realistik mendorong kita semua untuk mengusahakan terlaksananya rencana-rencana kita yang telah kita tetapkan dengan mempertahankan dan lebih memperbaiki lagi apa yang sudah baik; sedangkan di lain pihak, kita semua berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dan menghindarkan diri agar kesalahan itu tidak terulang kembali di masa datang.

Dengan demikian, saat-saat yang sulit dan penuh ujian berat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mawas diri lebih dalam dan lebih sadar. Di samping berusaha menemukan langkah-langkah terobosan baru kita usahakan agar segala celah-celah dan lubang kebocoran kita tutup. Semua kekurangan dan kekeliruan kita perbaiki.

Hal-hal itu tidak saja penting agar kita mencapai hasil yang sebesar-besarnya dalam keadaan yang serba terbatas, akan tetapi juga sebagai persiapan kita yang lebih mantap lagi apabila keadaan yang lebih baik akan tiba kelak.

Dengan sikap yang realistik dan berpengharapan, kita menebalkan kesetiaan kepada Pancasila. Ini merupakan sikap kita yang mutlak.

Realistik

Setelah kita mengalami sukses-sukses awal pelaksanaan Repelita I, Repelita II dan Repelita III, maka kita menyadari bahwa tahun-tahun selanjutnya merupakan tahun yang penuh ujian, terutama di bidang ekonomi.

Sebagai bagian dari ekonomi dunia yang makin erat jalin menjalinnya antara satu negara dengan negara yang lain, lebih-lebih dengan berbagai kelemahan dan kekurangan sebagai bangsa yang sedang membangun, maka kita merasakan pengaruh-pengaruh yang tidak menguntungkan dari resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan dan serba tidak menentu.

Kenyataan itu kita tanggapi secara realistik. Karena itulah memasuki Repelita IV dengan sadar kita menetapkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari Repelita III. Padahal, justru dalam Repelita IV itu kita bertekad untuk meletakkan kerangka landasan pembangunan, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang kita, ialah tercapainya landasan yang kokoh kuat dalam Repelita V sebagai persiapan agar dalam Repelita VI nanti kita mampu tinggal landas menuju terwujudnya cita-cita nasional masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kesadaran akan beratnya tantangan dalam Repelita IV itu justru membulatkan tekad kita untuk meningkatkan kerja keras kita, meningkatkan efisiensi, produktivitas dan disiplin nasional kita, sehingga kerangka landasan dalam Repelita IV ini tetap dapat kita capai dan dapat mewujudkan landasan yang mantap dalam Repelita V. Dengan demikian jika dalam Repelita IV kita menghadapi tantangan yang tidak ringan, maka kita masih mempunyai waktu untuk membenahi segala sesuatunya dalam Repelita V sehingga dalam Repelita VI kita dapat tinggal landas dalam melanjutkan pembangunan kita menuju terlaksananya cita-cita nasional.

Jauh sebelum datangnya masa yang sulit dan berat sekarang ini kita juga telah mengambil langkah-langkah pengamanan; baik untuk mengatasi tantangan-tantangan jangka menengah maupun sekaligus sebagai persiapan jangka panjang.

Karena itulah sejak tahun 1983 kita telah mengambil serangkaian langkah-langkah pengamanan dan penyelamatan di bidang ekonomi:

Pertama, setelah kita menyesuaikan nilai rupiah kita dengan mengadakan devaluasi rupiah dalam bulan Maret 1983, kita telah menjadwalkan kembali proyek-proyek besar pemerintah yang memerlukan banyak devisa dengan tujuan untuk mengamankan neraca pembayaran;

Kedua, kita telah mengadakan langkah-langkah pembaharuan di bidang perbankan untuk meningkatkan pengerahan dana-dana pembangunan dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

Ketiga, kita telah memperbaharui undang-undang perpajakan sebagai langkah meningkatkan penerimaan pajak secara adil dan bertanggungjawab dalam rangka menyiapkan diri untuk mengimbangi kemungkinan kemerosotan penerimaan negara dari minyak bumi yang diperkirakan akan mengalami penurunan harga di pasaran dunia;

Keempat, kita telah mengambil langkah-langkah untuk memperlancar lalu lintas barang dengan melaksanakan Inpres No. 4 tahun '85 dalam rangka memperlancar kehidupan ekonomi dan menurunkan biaya produksi;

Kelima, kita telah mengusahakan peningkatan ekspor non migas melalui kebijaksanaan 6 Mei '86 yang kita lanjutkan dengan usaha-usaha untuk mendorong kegiatan ekonomi melalui kebijaksanaan 25 Oktober '86;

Keenam, kita juga mengambil berbagai langkah debirokratisasi dan lain sebagainya, kesemuanya untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, yang memungkinkan memperbesar kesempatan kerja dalam keadaan resesi dunia.

Dan, untuk mengamankan neraca pembayaran kita karena anjloknya harga minyak bumi di pasaran dunia dalam waktu yang sangat singkat, maka dalam bulan September tahun '86 kita dengan sangat terpaksa mengadakan devaluasi mata uang rupiah kita.

Tanpa langkah-langkah nyata yang telah kita ambil itu, keadaan ekonomi dan jalannya pembangunan kita tidak mungkin mencapai keadaan seperti sekarang ini. Keadaannya akan lebih sulit lagi daripada keadaan yang kita hadapi sekarang.

Memang, ketika menyampaikan Rancangan APBN 1986/'87 kepada Dewan yang terhormat pada tanggal 6 Januari tahun yang lalu, saya katakan pada waktu itu bahwa Pemerintah tidak perlu dan tidak akan melakukan devaluasi mata uang rupiah. Tetapi seperti saya katakan tadi, kenyataannya kemudian, Pemerintah terpaksa mengadakan devaluasi.

Ini sama sekali tidak berarti bahwa Pemerintah tidak konsekwen dengan ucapannya, terlebih-lebih bukan berarti Pemerintah akan menipu atau menjerumuskan rakyat. Jika ternyata Pemerintah dalam bulan September yang lalu mengambil tindakan devaluasi, yang tampaknya tidak konsisten dengan ucapan sebelumnya, maka langkah itu diambil dalam keadaan yang benar-benar terpaksa, yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Namun tindakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan kemungkinan, diambil dengan rasa penuh tanggungjawab.

Yang perlu saya kemukakan adalah, bahwa keputusan itu merupakan keputusan yang sangat sulit dan sangat berat. Saya menganggap lebih bermoral dan lebih bertanggung jawab untuk mengatakan apa adanya kepada rakyat dan secara sadar mengambil keputusan yang pahit demi kepentingan pembangunan jangka panjang, daripada saya tidak mengambil keputusan yang pahit itu sekedar karena saya hanya ingin menyelamatkan kata-kata yang pernah saya ucapkan sendiri.

Turunnya harga minyak bumi di pasaran dunia memang telah kita perkirakan sebelumnya. Justru karena telah kita perkirakan sebelumnya itulah maka sejak tahun 1983 telah kita ambil serangkaian langkah-langkah pengamanan sebagaimana tadi telah saya uraikan. Dan dengan memperhitungkan penurunan harga minyak bumi itu, maka APBN tahun 1986/'87 merupakan APBN yang pertama kali selama kita melaksanakan pembangunan yang lebih

Digitized by Google

kecil atau turun dibanding dengan APBN sebelumnya. Namun, merosotnya harga minyak bumi secara sangat tajam dalam waktu yang sangat singkat adalah sama sekali di luar dugaan; dan kenyataan menunjukkan bahwa keadaan anjloknya harga minyak bumi di pasaran sedrastis itu adalah sama sekali di luar perkiraan atau perhitungan siapa pun di semua negara di seluruh dunia.

Ketika Pemerintah menyampaikan RAPBN 1986/'87 kepada Dewan yang terhormat pada bulan Januari setahun yang lalu maka diperkirakan penurunan harga minyak bumi dari $ 28 menjadi $ 25 setiap barel. Kalaupun harga akan lebih menurun lagi maka diperkirakan akan bergerak sekitar $ 20 setiap barel. Dan pada bulan Januari 1986 harga minyak bumi memang masih berada di atas $ 25 setiap barel. Akan tetapi sejak bulan Maret 1986 dalam jangka waktu hanya enam bulan harga minyak bumi telah anjlok sampai di bawah $ 10 dan bahkan pernah mencapai hanya $ 8 setiap barelnya.

Kemerosotan harga minyak bumi yang sangat tajam tersebut jelas telah menimbulkan malapetaka bagi negara-negara penghasil minyak bumi, khususnya bagi Indonesia sebagai negara yang sedang membangun yang memiliki jumlah penduduk yang amat besar.

Syukur alhamdulillah, negara-negara penghasil minyak bumi —khususnya yang tergabung dalam OPEC—, kini telah sepakat untuk mengendalikan produksi masing-masing agar tercapai perbaikan harga minyak bumi. Namun —sebagaimana pesan yang telah saya sampaikan kepada para pemimpin negara-negara penghasil minyak bumi— perbaikan harga minyak bumi secara berarti hanyalah akan menjadi kenyataan apabila negara-negara penghasil minyak bumi benar-benar berhasil mengendalikan diri dalam menentukan produksi masing-masing dan apabila semuanya melaksanakan dengan sungguh-sungguh kesepakatan yang dicapai.

Anjloknya harga minyak bumi dalam tahun 1986 telah mengakibatkan kemerosotan penerimaan devisa kita dari minyak bumi dengan 47%; dari $ 12,4 milyar dalam tahun 1985/'86 menjadi $ 6,6 milyar dalam tahun 1986/'87. Meskipun penerimaan devisa dari ekspor di luar minyak bumi dan gas alam diperkirakan meningkat, namun keseluruhan penerimaan devisa dari ekspor migas dan non migas akan berkurang dari $ 16,6 milyar dalam tahun 1985/'86 menjadi $ 13,1 milyar dalam tahun 1986/'87, suatu penurunan sebesar 30%.

Jelas kiranya bahwa kemerosotan penerimaan devisa sebesar 30% dalam waktu satu tahun anggaran tanpa adanya tanda-tanda pemulihan dalam waktu dekat adalah keadaan luar biasa yang besar sekali akibatnya; dan yang karenanya harus dijawab dengan tindakan luar biasa pula. Dan langkah yang kita pilih adalah devaluasi. Karena langkah devaluasi itu meskipun sangat berat dan ada pengaruh negatifnya, tetap kita pandang sebagai langkah yang paling baik dalam rangka mengamankan ekonomi dan pembangunan kita

Sebagaimana saya jelaskan setahun yang lalu nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang asing kita letakkan dalam suatu sistem yang mengambang terhadap perkembangan nilai sejumlah mata uang asing yang penting. Sepanjang penerimaan devisa dari ekspor berubah dalam batas-batas yang wajar maka sistem tersebut mencerminkan nilai tukar yang wajar. Akan tetapi apabila dalam waktu yang sangat singkat penerimaan devisa merosot dengan 30% tanpa ada prospek perbaikan yang mantap dalam jangka pendek, maka perubahan nilai tukar melalui sistem mengambang akan mengakibatkan ledakan spekulasi devisa dengan akibat keadaan yang jauh lebih parah lagi. Maka sebelum hal tersebut terjadi diambillah tindakan devaluasi sebagai suatu tindakan pengamanan guna menghindarkan keadaan yang lebih parah yang akan lebih sulit untuk mengatasinya.

Dalam hubungan ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, dan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, yang telah memberikan pengertiannya terhadap tindakan devaluasi tersebut serta berusaha menyesuaikan pada keadaan yang pahit itu.

Karena minyak dan gas bumi juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar, maka penurunan harga minyak bumi juga memberikan tekanan-tekanan yang berat terhadap anggaran negara kita.

Sebab itu, neraca pembayaran dan penerimaan negara merupakan dua masalah berat yang harus kita tanggulangi dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam tahun anggaran 1987/'88, yang merupakan pelaksanaan tahun keempat Repelita IV.

Kita bersyukur, bahwa dalam menghadapi ujian dan tantangan berat itu kita telah mencapai tahap kemantapan dan tahap ketahanan dalam kehidupan nasional kita; khususnya di bidang ideologi, politik, pertahanan keamanan, kemasyarakatan, kebudayaan dan keagamaan.

Dengan kemantapan dan ketahanan tadi kita dapat mencernakan pengaruh penurunan pertumbuhan ekonomi itu secara kreatif dan positif, tanpa kita mengalami goncangan pada sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita.

Dalam jangka pendek ini berarti kita harus selalu siap menghadapi keadaan yang terburuk, sambil kita tetap berjuang untuk mencapai keadaan sebaik-baiknya dalam batas-batas kenyataan dan kemampuan yang ada, yang tidak mungkin dan tidak perlu kita ungkiri.

Dalam jangka panjang, itu berarti kita mencernakan pengaruh negatif dari keadaan ekonomi yang kita hadapi secara positif dan kreatif, dengan kita tetap berpegang teguh kepada tujuan yang hendak kita capai. Tujuan itu ialah melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas untuk membangun masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur.

Dalam menghadapi keadaan yang suram dan mengecewakan ini kita tidak perlu terjebak oleh pancingan dan provokasi untuk bersikap pesimis, acuh tak acuh, negatif dan sinis. Sebaliknya dari setiap kita diharapkan kesadaranya untuk turut berusaha secara aktif mengatasi kesulitan dan tantangan itu, sekali lagi dengan sikap yang realistik, penuh harapan dan setia kepada Pancasila.

Kekuatan Dan Ketahanan Dalam Masa Sulit

Di bidang ekonomi, berkat sukses-sukses awal pembangunan kita di masa lampau, maka kita telah memiliki kekuatan dan ketahanan dalam masa-masa yang sulit ini.

Kita telah memiliki dan dapat mempertahankan stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi yang mantap. Dalam tahun 1986 yang lalu laju inflasi kita dapat kita pertahankan di bawah 9%, meskipun kita telah mengambil langkah devaluasi yang sedikit banyak menyebabkan kenaikan harga-harga barang-barang tertentu.

Sebagai bangsa kita telah mengangkat diri dari bangsa yang berpenghasilan rendah ke tingkat bangsa yang berpenghasilan menengah. Kita juga mencapai sukses awal dalam pembangunan pertanian, karena dari bangsa yang menjadi pengimpor beras terbesar di dunia kita telah menjadi bangsa yang berswasembada beras.

Kita telah banyak membangun sarana dan prasarana ekonomi seperti bendungan-bendungan dan irigasi, pusat-pusat pembangkit tenaga listrik sebagai prasarana untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita telah menyebarkan secara luas prasarana-prasarana perhubungan dan telekomunikasi, sehingga kegiatan ekonomi makin meluas ke semua daerah dan sekaligus memperkukuh persatuan bangsa. Kita telah membangkitkan industri mulai dari yang sederhana sampai yang menggunakan teknologi mutakhir.

Kita telah membangun banyak sekali dan secara merata sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat. Sekolah-sekolah dasar telah cukup kita bangun sampai desa-desa yang terpencil, sehingga mampu menampung semua anak-anak usia sekolah. Puskesmas-puskesmas dan Puskesmas Pembantu, juga telah kita adakan lengkap dengan tenaga medis dan para medis di setiap Kecamatan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Kita memang telah memperbaiki tingkat kesehatan rakyat Indonesia yang tercermin pada menurunnya kematian bayi dan balita di satu pihak; dan bertambah panjangnya

Digitized by Google

usia rata-rata penduduk kita.

Melalui program Inpres Propinsi, Inpres Kabupaten dan Inpres Desa kita terus memeratakan pembangunan ke seluruh daerah dan ke seluruh pelosok Tanah Air juga dalam rangka meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan rakyat.

Kita juga telah membangun perumahan-perumahan rakyat, memugar desa-desa dan memperbaiki lingkungan hidup.

Tidak dapat diabaikan pula kegairahan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sarana ibadah keagamaan dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia yang berakhlak luhur sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Semuanya itu merupakan kekuatan dan sekaligus memberi harapan yang realistik dalam menghadapi masa-masa yang sulit dan penuh ujian yang sedang kita hadapi dewasa ini.

Dalam pada itu, kita harus berani mengadakan penyesuaian-penyesuaian, perbaikan-perbaikan, pembaharuan-pembaharuan dan apabila perlu koreksi-koreksi dalam pola pikir, pola kerja dan pola hidup kita dan lembaga-lembaga kita di berbagai bidang. Semuanya ini harus kita lakukan agar kita dapat memberi jawab yang setepat-tepatnya terhadap tantangan yang kita hadapi untuk mencernakan secara positif dan kreatif tantangan-tantangan di bidang ekonomi kita dewasa ini.

Dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian, perbaikan-perbaikan, pembaharuan-pembaharuan dan koreksi-koreksi, maka hal itu sama sekali tidak berarti bahwa kita meremehkan segala hasil yang telah kita capai hingga sekarang. Tugas kita justru melanjutkan dan meningkatkan segala hasil yang positif yang telah kita capai selama ini.

Bagaimanapun juga kita harus meningkatkan efisiensi, kita harus meningkatkan produktivitas, kita harus menghindarkan segala pemborosan dan kebocoran, kita harus menciptakan iklim yang menggairahkan dunia usaha dan iklim yang membangkitkan kreativitas dan paritisipasi masyarakat.

Apabila semua itu dapat kita lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagai jawaban yang setepat-tepatnya terhadap ujian dan tantangan berat dewasa ini, maka kelak, kita akan melihat bahwa tantangan yang sekarang kita rasakan sebagai pukulan, sesungguhnya merupakan berkat yang terselubung.

Mampukah kita memberi jawaban terhadap tantangan yang menghadang dihadapan kita itu?

Berdasarkan pengalaman kita di masa lampau, maka kita tidak merasa sangsi mengenai kemampuan kita untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi dewasa ini; asal kita selalu bersikap realistik, tetap mempunyai harapan dan tetap setia kepada Pancasila.

Kesetiaan kepada Pancasila itu teramat penting, sebab apa yang kita lakukan dalam jangka pendek di tahun-tahun yang akan datang untuk mengatasi tantangan, akan merupakan landasan bagi tugas jangka panjang kita, yaitu melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila menuju tinggal landas.

Demikianlah latar belakang pikiran, pokok-pokok masalah dan arah yang ditempuh Pemerintah dalam menghadapi Ujian dan tantangan kita dewasa ini; yang sekaligus juga menjadi latar belakang pemikiran dan arah yang dijadikan pedoman Pemerintah dalam menyusun Rancangan APBN 1987/'88.

Pemerintah tetap menganut anggaran berimbang seperti yang digariskan oleh GBHN, yang merupakan unsur penting untuk menjaga kestabilan ekonomi yang kukuh. Pengalaman dahulu menunjukkan bahwa tanpa kestabilan ekonomi kita tidak dapat membangun. Dengan kestabilan ekonomi yang mantap, yang merupakan unsur penting dari stabilitas nasional, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk tetap menyebarkan pemerataan dan mengusahakan pertumbuhan ekonomi, yang pengendaliannya secara terpadu merupakan pelaksanaan dari Trilogi Pembangunan yang diamanatkan oleh GBHN.

Dalam keadaan keuangan negara yang makin terbatas, maka ruang gerak kita pun lebih terbatas lagi jika dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Ini mengharuskan kita pandai-pandai menentukan prioritas yang makin dipertajam dalam keseluruhan pengeluaran negara, baik untuk keperluan rutin maupun untuk keperluan pembangunan.

Usaha kita adalah agar dalam ruang gerak yang terbatas itu kita dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya.

Seperti tahun-tahun yang lalu, disiplin pembangunan harus makin kita tingkatkan lagi. Setiap dana dan daya yang ada harus kita gunakan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, sehingga dapat tercapai sasaran-sasaran yang telah kita tentukan. Gerakan meningkatkan disiplin pembangunan efisiensi dan produktivitas harus kita jadikan gerakan nasional, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh kalangan pemerintahan, kalangan dunia usaha maupun kalangan masyarakat luas.

Dengan mengerahkan segala daya upaya, dengan memperkirakan secara wajar semua dana yang dapat digali dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka Pemerintah mengajukan kepada Dewan yang terhormat Rancangan APBN 1987/'88 sebesar Rp. 22,7 trilyun lebih. Ini berarti kenaikan 6,4% dari anggaran yang sekarang. Karena tetap dianut anggaran berimbang, maka pengeluaran negara juga akan sama besarnya dengan penerimaan ialah sebesar Rp. 22,7 trilyun lebih tadi.

Sama halnya seperti susunan APBN pada tahun-tahun yang terdahulu, maka penerimaan negara akan terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang berasal dari luar negeri.

Penerimaan dalam negeri diperkirakan mencapai Rp. 17,2 trilyun lebih atau turun dengan 3,3% dari penerimaan dalam tahun anggaran yang sekarang. Sedangkan penerimaan pembangunan diperkirakan dapat mencapai Rp. 5,5 trilyun lebih atau naik dengan 54,6% dari yang sekarang.

Mengenai pengeluaran, akan terdiri dari pengeluaran rutin sebesar Rp. 15 trilyun lebih atau naik dengan 14,5% dari yang sekarang; dan pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 7,7 trilyun lebih atau turun dengan 6,5% dari yang sekarang.

Selanjutnya, izinkan saya Saudara Ketua yang terhormat, untuk mengemukakan uraian dalam garis besar mengenai Rancangan APBN 1987/'88 itu, baik yang menyangkut penerimaan negara maupun yang menyangkut pengeluaran negara.

Seperti yang saya kemukakan tadi, penerimaan negara kita terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang berasal dari luar negeri.

Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, serta penerimaan dari luar sektor minyak bumi dan gas alam.

Mengenai penerimaan dari minyak bumi dan gas alam, maka sumbernya adalah penghasilan dari minyak bumi dan penghasilan dari gas alam. Dalam tahun anggaran 1987/'88 nanti penerimaan negara dari sektor ini akan sebesar Rp. 6,9 trilyun lebih atau turun dengan 28,7% dari rencana penerimaan tahun 1986/'87. Penerimaan tersebut terdiri dari penghasilan minyak bumi sebesar hampir Rp. 6 trilyun dan penghasilan dari gas alam sebesar Rp. 960 milyar.

Sedangkan penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam dalam anggara 1987/'88 ini diperkirakan akan sebesar Rp. 10,2 trilyun lebih atau naik dengan 27,2%.

Dari angka-angka tadi dapat kita lihat betapa besarnya pengaruh turunnya harga minyak bumi di pasaran dunia terhadap penerimaan negara kita. Dan betapa besar pula usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari luar minyak bumi dan gas alam.

Hal itu terutama berarti bahwa kita harus meningkatkan penerimaan dari pajak. Peningkatan penerimaan pajak di satu pihak mengungkapkan tekad kita untuk makin besar memikul beban pembangunan, yang merupakan tanggung jawab dan kehormatan bangsa yang merdeka, di lain pihak mengharuskan adanya usaha kita untuk mengembangkan kehidupan ekonomi nasional, yang memungkinkan peningkatan iuran setiap warga wajib pajak berupa pembayaran pajak pada negara untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesadaran kita akan kerawanan ketergantungan pada penerimaan yang berasal dari minyak bumi dan tanggung jawab kita untuk meningkatkan iuran kita dalam memikul beban pembangunan, telah mendorong kita dalam tahun 1983 yang lalu

Digitized by Google

untuk melahirkan berbagai undang-undang perpajakan yang bersifat nasional dan cocok untuk keperluan pembangunan.

Pada kesempatan ini, saya menyerukan lagi kepada masyarakat luas agar benar-benar melaksanakan dengan penuh kesadaran dan disiplin kewajibannya untuk membayar pajak. Undang-undang perpajakan kita sungguh-sungguh telah memperhatikan asas keadilan. Dan adalah adil dan sewajarnya, apabila yang berpunya dan berpenghasilan lebih besar membayar pajak lebih banyak dari pada yang belum berpunya dan berpenghasilan lebih kecil. Malahan, justru karena rasa keadilan ini, maka penghasilan sampai tingkat tertentu tidak terkena pajak.

Penerimaan Di Luar Sektor Minyak Bumi

Adapun penerimaan negara dari sektor di luar minyak bumi dan gas alam akan terdiri dari: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, cukai, pajak ekspor, penerimaan dari keuntungan penjualan bahan bakar minyak, yang dinamakan Laba Bersih Minyak (LBM), penerimaan pajak-pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak.

Sejalan dengan peningkatan intensifikasi pemungutannya dan sejalan pula dengan bertambah baiknya kesadaran membayar pajak yang telah mulai tampak, maka dalam tahun anggaran 1987/'88 diperkirakan penerimaan pajak penghasilan akan mencapai Rp. 3,3 trilyun lebih atau naik dengan lebih dari 15% dari yang sekarang.

Perkembangan yang membesarkan hati juga tampak pada pemungutan pajak pertambahan nilai. Kenaikan yang tinggi, bahkan melampaui sasaran semula, telah kita catat dalam pemungutan pajak pertambahan nilai dalam tahun anggaran 1985/'86.

Dengan makin dikuasainya cara-cara pembayaran pajak ini, baik oleh wajib pajak maupun aparat perpajakan, maka di waktu-waktu yang akan datang kita dapat mengharapkan peningkatan yang lebih besar lagi dari penerimaan pajak pertambahan nilai.

Karena itu dalam tahun anggaran 1987/'88 diperkirakan penerimaan dari pajak pertambahan nilai dapat mencapai lebih dari Rp. 3,5 trilyun atau naik dengan lebih dari 65% dari yang sekarang. Dilihat dari sudut kenaikannya, maka persentase kenaikan tadi merupakan yang tertinggi dari semua perkiraan penerimaan negara. Dilihat dari sudut nilanya, maka perkiraan penerimaan pajak pertambahan nilai merupakan sumber penerimaan negara yang tertinggi di luar sektor minyak bumi dan gas alam.

Dalam pada itu penerimaan dari pajak bumi dan bangunan diperkirakan akan mencapai Rp. 274 milyar atau turun dengan 3,5% dari yang diperkirakan dalam tahun anggaran yang sekarang.

Selanjutnya, penerimaan dari bea masuk diperkirakan mencapai Rp. 661 milyar lebih atau naik dengan 14%. Kenaikan penerimaan dari bea masuk tidak kita harapkan terlalu besar, karena pola impor kita memang makin bergeser kepada impor bahan baku dan barang modal yang bertarif rendah sampai ada yang 0%. Perkembangan ini mencerminkan usaha kita untuk terus meningkatkan penanaman modal dan peningkatan industri dalam negeri.

Selanjutnya penerimaan dari cukai diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp. 1 trilyun atau naik dengan 2% dari yang sekarang. Pemerintah akan melanjutkan kebijaksanaan yang ditempuh selama ini, ialah kebijaksanaan penerimaan cukai yang tidak semata-mata untuk memperbesar penerimaan negara. Dalam hal cukai tembakau, pengenaan cukai diarahkan untuk mengembangkan industri kecil dan tergolong lemah yang menyerap banyak tenaga kerja, khususnya yang menghasilkan rokok kretek. Sedangkan kebijaksanaan cukai gula diarahkan untuk menjaga stabilitas harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat dan perbaikan tingkat pendapatan petani tebu.

Selanjutnya penerimaan dari pajak ekspor diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp. 70 milyar atau turun dengan 10% dari yang sekarang. Sejak beberapa tahun terakhir ini penerimaan dari pajak ekspor kita cenderung turun, terutama karena diturunkannya tarif-tarif pajak ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor non migas. Kebijaksanaan utama pajak ekspor kita adalah untuk memberi dorongan kepada ekspor barang jadi, membatasi ekspor bahan mentah dan membatasi ekspor barang-barang kita yang terancam kepunahan.

Penerimaan selanjutnya adalah penerimaan pajak lainnya, yang jumlahnya diperkirakan mencapai hampir Rp. 190 milyar atau naik dengan hampir 60% dari yang sekarang. Sumber utama penerimaan ini berupa bea materai, yang pembaharuan undang-undangnya dikeluarkan dalam tahun '85.

Dalam pada itu sebagai akibat dari penurunan harga minyak bumi, maka biaya produksi BBM telah menurun dan terdapatlah Laba Bersih Minyak sebesar Rp. 114 milyar.

Jenis penerimaan dalam negeri yang terakhir adalah penerimaan bukan pajak, yang jumlahnya akan mencapai lebih dari Rp. 1 trilyun atau naik dengan 10% dari yang sekarang. Penerimaan bukan pajak ini terutama bersumber dari penerimaan berbagai badan usaha milik negara. Dengan terus meningkatkan usaha-usaha efisiensi dan produktivitas, perbaikan manajemen dan kegiatan operasionalnya, intensifikasi dan penertiban penyetorannya, maka diharapkan ada peningkatan penerimaan negara melalui laba perusahaan milik negara.

Izinkan saya selanjutnya, Saudara Ketua yang terhormat, memberi penjelasan mengenai penerimaan pembangunan.

Seperti yag tadi saya kemukakan, penerimaan pembangunan itu berasal dari bantuan luar negeri. Untuk tahun anggaran 1987/'88 jumlahnya akan mencapai lebih dari Rp. 5,5 trilyun atau naik dengan sekitar 54% dari yang sekarang.

Selama ini penerimaan pembangunan itu terdiri dari bantuan program serta bantuan proyek dan kredit ekspor.

Di samping bantuan proyek dan kredit ekspor seperti yang kita kenal dalam tahun-tahun yang lalu, maka di dalam bantuan proyek untuk tahun anggaran yang akan datang terdapat unsur baru, ialah yang berupa tambahan bantuan proyek dalam bentuk devisa yang dapat dirupiahkan, yang penggunaannya khusus untuk pembiayaan rupiah dari proyek-proyek bantuan proyek tertentu.

Tambahan bantuan proyek dalam bentuk rupiah ini kita terima dalam bentuk devisa. Karenanya bagi kita akan mempunyai manfaat ganda. Di samping untuk menyediakan pembiayaan rupiah bagi bantuan proyek tertentu, maka akan menambah jumlah devisa yang kita miliki. Dengan demikian tambahan bantuan seperti ini membantu kita mengurangi tekanan-tekanan terhadap neraca pembayaran kita di satu pihak, dan memperbesar dana yang dapat kita gunakan untuk membangun di lain pihak.

Tambahan bantuan tadi mencerminkan kepercayaan dunia luar terhadap kita. Sebab, tanpa kepercayaan tadi maka tambahan bantuan seperti itu tidak mungkin diberikan kepada sesuatu negara.

Di samping itu, jenis tambahan bantuan proyek dalam bentuk rupiah yang kita terima itu merupakan jenis bantuan yang mencerminkan hasil perjuangan negara dunia ketiga dalam rangka kerjasama Utara-Selatan.

Karena itu, melalui mimbar ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang dalam dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah menyetujui bentuk bantuan jenis ini, yang memperlancar pembangunan kita, dan memperlancar pelaksanaan dari pemberian bantuan proyek yang bersangkutan.

Adapun besarnya bantuan program untuk tahun anggaran 1987/'88 diperkirakan mencapai sekitar Rp. 121 milyar atau naik dengan 49%. Sedangkan bantuan proyek dan kredit ekspor termasuk bantuan dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 1 trilyun lebih mencapai lebih dari Rp. 5,4 trilyun atau naik dengan 54% dari yang sekarang.

Sekarang, perkenankan saya memberi penjelasan mengenai garis-garis besar pengeluaran negara; yang seperti saya kemukakan tadi terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Adapun pengeluaran rutin diperkirakan akan mencapai Rp. 15 trilyun lebih atau naik dengan 14,5% dari yang sekarang.

Digitized by Google

Sedangkan pengeluaran pembangunan, akan terdiri dari tabungan Pemerintah ditambah dengan penerimaan pembangunan yang terdiri dari bantuan program, bantuan proyek dan kredit ekspor serta tambahan bantuan proyek berupa devisa seperti tersebut di muka.

Karena penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 17,2 trilyun dan pengeluaran rutin sebesar Rp. 15 trilyun, maka kita akan mempunyai tabungan pemerintah sebesar Rp. 2,2 trilyun. Jumlah ini, ditambah dengan bantuan program sebesar Rp. 121 milyar serta bantuan proyek dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 1 trilyun, merupakan pembiayaan rupiah dalam pengeluaran pembangunan kita sebesar Rp. 3,3 trilyun lebih. Dibanding dengan pembiayaan rupiah dalam pengeluaran pembangunan yang direncanakan untuk tahun anggaran yang sekarang, maka besarnya pembiayaan rupiah dalam pengeluaran pembangunan untuk tahun anggaran yang akan datang sangat berkurang, ialah menurun sekitar 30%.

Apabila ditambah dengan bantuan proyek, dan kredit ekspor — di luar bantuan proyek dalam rupiah — sebesar lebih dari Rp. 4,4 trilyun, maka keseluruhan pengeluaran pembangunan kita akan mencapai Rp. 7,7 trilyun lebih, yang berarti turun dengan 6,5% dari yang sekarang.

Adapun pengeluaran rutin akan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bunga dan cicilan hutang serta pengeluaran rutin lainnya.

Seperti halnya tahun anggaran yang sekarang, karena keadaan keuangan negara yang sangat terbatas, maka penggunaan pengeluaran rutin akan makin dipertajam prioritasnya dan langkah-langkah penghematan makin diperketat. Prioritasnya adalah untuk menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintah, untuk terus memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan untuk memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah kita capai hingga dewasa ini. Di samping itu kita harus memenuhi kewajiban kita untuk membayar cicilan hutang dan bunganya yang jumlahnya meningkat.

Dengan arah kebijaksanaan tadi, maka belanja pegawai akan berjumlah sekitar Rp. 4,3 trilyun atau naik dengan 2,5% dari yang sekarang; terutama untuk pengangkatan pegawai baru guna menggantikan yang telah pensiun.

Dalam hubungan ini perlu saya ingatkan kembali bahwa dalam tahun anggaran 1985/'86 telah diadakan perbaikan gaji dan pensiun para pegawai negeri serta anggota ABRI yang cukup memadai, yang sekaligus memperbaiki struktur penggajian dengan menaikkan gaji pokok, di samping pemberian tunjangan jabatan bagi para guru dan para tenaga medis di Puskesmas. Untuk tahun 1987/'88 seperti halnya tahun 1986/'87 keadaan keuangan negara seperti tampak dalam angka-angka di muka sangat berat. Karena itu jelas tidak mungkin dan tidak sewajarnya mengadakan kenaikan gaji pegawai negeri dan anggota ABRI.

Untuk itu saya meminta pengertian yang dalam dari segenap pegawai negeri dan anggota ABRI. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, justru pada waktu negara dan masyarakat sedang dalam ujian keprihatinan dewasa ini, maka pada saat-saat seperti inilah pengabdian pegawai negeri dan anggota ABRI kepada negara dan masyarakat itu perlu kita tunjukkan setulus-tulusnya.

Pengeluaran rutin selanjutnya adalah untuk belanja barang, baik belanja barang di dalam negeri maupun belanja barang untuk perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, yang jumlahnya akan mencapai sekitar Rp. 1,1 trilyun atau turun dengan 14% dari yang sekarang. Seperti disinggung di muka ini merupakan bagian dari langkah yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan penghematan.

Untuk subsidi daerah otonom disediakan anggaran lebih dari Rp. 2,6 trilyun atau naik dengan 0,4% dari yang sekarang. Kenaikan ini terutama untuk menampung pegawai negeri baru, khususnya untuk guru-guru sekolah dasar dan tenaga-tenaga kesehatan di Puskesmas-puskesmas. Seperti tahun-tahun yang lalu, dalam subsidi daerah otonom ini termasuk bantuan untuk Propinsi Irian Jaya dan Propinsi Timor Timur.

Dalam pada itu pengeluaran rutin yang terbesar adalah untuk membayar bunga dan cicilan hutang dalam negeri dan luar negeri, yang jumlahnya sekitar Rp. 6,8 trilyun. Dari jumlah tadi, maka Rp. 6,76 trilyun dipakai untuk membayar bunga dan cicilan hutang luar negeri, yang berarti kenaikan lebih dari 61% dari yang sekarang.

Kenaikan yang besar tadi di samping disebabkan oleh bertambah besarnya jumlah hutang dan bunga dalam valuta asing yang harus kita bayar, terutama disebabkan oleh devaluasi yang kita lakukan dalam bulan September tahun lalu. Di samping itu membesarnya jumlah pembayaran hutang kita (dalam rupiah) juga disebabkan oleh menguatnya mata uang Yen dan beberapa mata uang negara-negara Eropah terhadap dolar AS selama beberapa waktu terakhir ini.

Membayar kembali hutang yang telah kita terima merupakan suatu kewajiban yang wajar. Ini adalah masalah kehormatan dan tanggung jawab bangsa yang berdaulat. Dengan memenuhi kewajiban membayar bunga dan cicilan hutang itu, kita justru mendapatkan kepercayaan dunia. Kepercayaan inilah yang memungkinkan kita mendapatkan pinjaman siaga untuk memperkuat cadangan devisa kita. Kepercayaan itu pula yang memberikan keyakinan kalangan internasional untuk menyediakan tambahan bantuan proyek dalam bentuk rupiah seperti yang saya jelaskan tadi.

Di samping itu, kepercayaan tadi dapat kita peroleh justru karena kita menggunakan sebaik-baiknya pinjaman luar negeri itu, ialah dengan sepenuh-penuhnya kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan. Besarnya pembayaran bunga dan cicilan luar negeri itu bukan merupakan beban yang sia-sia, karena pinjaman — yang kita peroleh dahulu itu — dewasa ini telah banyak memberi hasil dan memberi kekuatan kepada kita untuk maju dalam melanjutkan pembangunan. Dana yang kita bayarkan untuk mencicil hutang dan membayar bunga itu adalah sebagian dari hasil pembangunan, yang dananya sebagian berasal dari pinjaman luar negeri yang telah dengan baik kita manfaatkan selama ini.

Berbeda dengan anggaran dalam tahun 1986/'87 yang terdapat pengeluaran untuk pembiayaan stock pangan, maka dalam tahun anggaran yang akan datang pengeluaran untuk itu tidak disediakan.

Jenis pengeluaran rutin terakhir adalah pengeluaran rutin lainnya, yang jumlahnya mencapai Rp. 80 milyar atau turun dengan 70% dari yang sekarang. Penurunan ini terutama karena tidak ada lagi subsidi BBM.

Demikianlah mengenai pengeluaran rutin; dan selanjutnya saya akan beralih memberi uraian mengenai garis-garis besar anggaran pembangunan.

Anggaran Pembangunan Prioritas Dipertajam

Seperti telah saya kemukakan, dana pembangunan yang dapat kita kerahkan sangat terbatas. Agar dana yang sudah terbatas itu memberi manfaat yang sebesar-besarnya, maka dalam penggunaannya kita perlu makin mempertajam lagi prioritas dari yang sampai sekarang telah kita lakukan.

Seperti yang telah kita terapkan dalam tahun anggaran yang sekarang, maka prioritas-prioritas itu adalah:

Pertama, untuk menyelesaikan proyek-proyek yang dewasa ini sedang dibangun, yang tidak mungkin ditunda-tunda lagi.

Kedua, untuk melengkapi dana rupiah dari proyek-proyek yang mendapatkan bantuan luar negeri.

Ketiga, untuk melanjutkan proyek-proyek yang dapat memperluas pemerataan dan kesempatan kerja.

Keempat, untuk menyediakan biaya operasi dan pemeliharaan bagi proyek-proyek yang telah selesai pembangunannya.

Sementara itu proyek-proyek yang waktu pembangunannya memerlukan beberapa tahun diusahakan untuk memperpanjang jangka waktu perampungannya, dengan maksud agar dapat meringankan beban dana pembangunannya secara nasional. Sedangkan rencana pembangunan gedung-gedung kantor yang belum dimulai pelaksanaannya, ditunda.

Singkatnya dalam tahun anggaran 1987/'88, yang kita utamakan adalah melanjutkan dan menyelesaikan proyek-proyek yang dewasa ini sedang dalam pelaksanaan.

Dengan prioritas-prioritas dan arah yang

Digitized by Google

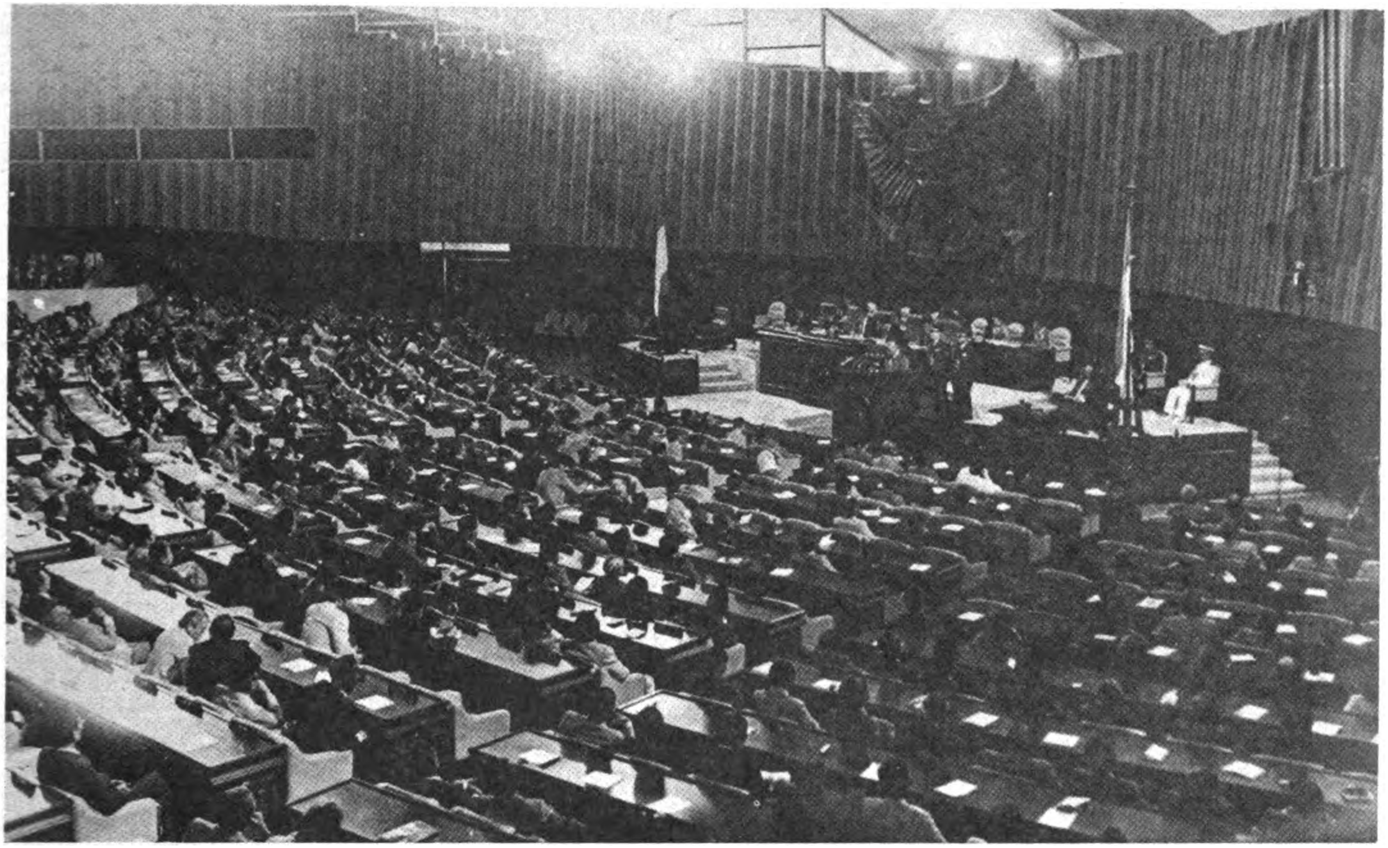

Suasana sidang paripurna itu.

demikian tadi, maka kegiatan pembangunan diarahkan agar dapat memberi pengaruh yang sebesar-besarnya terhadap gerak perekonomian kita. Dalam pada itu usaha-usaha untuk menciptakan iklim yang dapat menggairahkan kegiatan ekonomi masyarakat akan terus didorong.

Dengan jalan itu walaupun dana pembangunan yang tersedia dari anggaran negara sangat terbatas, namun tetap diharapkan dapat timbul dampak yang sebaik-baiknya dan yang sebesar-besarnya dalam batas-batas yang ada. Kita menyadari bahwa gerak dan kegiatan ekonomi tidak hanya bersumber pada kegiatan pemerintah saja, melainkan juga harus dilakukan oleh masyarakat luas. Itulah sebabnya, Pemerintah akan melanjutkan usaha untuk merangsang bangkitnya kreativitas dalam masyarakat, bangkitnya kekuatan-kekuatan ekonomi dalam semua lapisan dan kalangan masyarakat kita. Untuk tujuan itulah Pemerintah akan melanjutkan langkah-langkah efisiensi, debirokratisasi dan deregulasi, justru untuk mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tadi.

Dengan makin menajamkan lagi prioritas-prioritas pembangunan seperti yang tadi saya kemukakan, dan dengan menyesuaikan pada sumber dana yang tersedia, maka terdapat empat sektor yang masing-masing dana pembangunannya direncanakan lebih dari Rp. 1 trilyun.

Keempat sektor itu adalah: pertama, sektor perhubungan dan pariwisata; kedua, sektor pertanian dan irigasi; ketiga, sektor pertambangan dan energi; dan keempat, sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, dalam rangka tetap memperluas pemerataan pembangunan dan mendorong kegiatan ekonomi di semua daerah, maka sektor pembangunan daerah, desa dan kota akan mendapat anggaran yang cukup besar, yaitu lebih dari Rp. 873 milyar, sebagai sektor kelima terbesar disediakan anggaran pembangunan.

Perlu saya kemukakan, bahwa dengan terbatasnya dana pembangunan, maka di samping beberapa sektor yang mengalami peningkatan dana pembangunan jika dibanding dengan dana yang direncanakan dalam tahun anggaran yang sekarang, umumnya sektor-sektor lain mengalami penurunan anggaran pembangunan.

Selanjutnya, saya akan menjelaskan berbagai kegiatan pembangunan yang penting yang akan kita lakukan dalam tahun keempat Repelita IV nanti.

Sektor perhubungan dan pariwisata akan mendapatkan anggaran pembangunan sekitar Rp. 1,2 trilyun lebih atau naik dengan 21% dari yang sekarang. Pemberian prioritas yang tinggi pada sektor ini merupakan usaha untuk tetap memperkuat prasarana ekonomi, khususnya perhubungan dan telekomunikasi. Hal ini sekaligus kita kaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan kepariwisataan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa, memperluas kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi lainnya.

Kegiatannya antara lain adalah melanjutkan pembangunan jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang kini sedang berlangsung di berbagai daerah serta peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan jalan-jalan dan jembatan yang sudah ada. Juga akan dilanjutkan pembangunan dan rehabilitasi jalan kereta api. Walaupun secara terbatas, tetap akan kita lanjutkan pembangunan dermaga-dermaga guna makin memperlancar arus perhubungan melalui laut, terutama pelayaran perintis guna meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah-daerah. Kegiatan yang sama juga kita lakukan untuk memperlancar perhubungan udara serta pelayanan pos dan telekomunikasi.

Selanjutnya, sektor pertanian dan irigasi juga tetap mendapatkan prioritas tinggi. Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan kita, yang meletakkan sektor pertanian sebagai titik berat pembangunan di bidang ekonomi di samping bidang industri dan bidang-bidang lainnya. Pembangunan sektor pertanian ini di samping untuk memantapkan keadaan swasembada beras, juga untuk memperkokoh sektor pertanian dalam arti yang luas sebagai pendukung yang tangguh struktur ekonomi kita yang seimbang antara pertanian dan industri menjelang masa tinggal landas nanti.

Sektor pertanian dan irigasi akan mendapat anggaran pembangunan Rp. 1,18 trilyun atau naik sekitar 7% dari yang sekarang.

Di samping dalam rangka memantapkan swasembada beras, maka kegiatan penting lainnya adalah melanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan jumlah dan mutu produksi palawija, sayur-sayuran, buah-

Digitized by Google

buahan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Kegiatan-kegiatan ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan selama ini dalam rangka menganekaragamkan tanaman, mendorong ekspor non migas, memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki penghasilan petani.

Untuk mendukung pembangunan pertanian tadi, maka kita lanjutkan pembangunan pengairan yang meliputi pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan daerah rawa serta menyelamatkan hutan, tanah dan air.

Sektor ketiga yang mendapatkan prioritas tinggi adalah sektor pertambangan dan energi, yang disediakan biaya Rp. 1,12 trilyun atau naik sekitar 9% dari yang sekarang.

Kegiatan utamanya adalah melanjutkan pembangunan pusat-pusat tenaga listrik dan transmisi yang kini sedang giat dilakukan dan tersebar di daerah-daerah. Di samping itu juga melanjutkan pembangunan listrik pedesaan.

Pembangunan bidang perhubungan dan bidang energi seperti yang telah saya kemukakan tadi, merupakan usaha untuk menjamin kelancaran jalannya roda-roda perekonomian yang diharapkan terus meningkat, termasuk pemberian dukungan kepada kegiatan industri besar dan industri kecil serta industri rumah tangga.

Dalam anggaran pembangunan yang akan datang, sektor industri akan mendapatkan anggaran Rp. 229 milyar. Kegiatannya terutama diarahkan untuk melanjutkan kegiatan yang dewasa ini sedang dilakukan, terutama untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan dengan memberikan penyuluhan, pendidikan dan latihan dan sebagainya, sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Sedangkan pengembangan dan pembangunan industri nasional pada umumnya dilakukan oleh swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Yang dilakukan oleh Pemerintah adalah menciptakan iklim yang menggairahkan penanaman modal dan pengembangan industri.

Walaupun keadaan perekonomian kita cukup berat, namun pertumbuhan industri menunjukkan arah yang makin mantap. Dalam beberapa tahun terakhir ini industri mengalami pertumbuhan terus, malahan tatkala dalam tahun 1985 yang lalu pertumbuhan ekonomi nasional kita sebesar 1,86% maka — di luar minyak bumi dan gas alam — industri kita mengalami pertumbuhan 6,2%. Hal itu disebabkan oleh mulai berjalannya industri hulu dan industri penghasil barang modal, disertai makin terpadunya perkembangan keseluruhan industri kita.

Dalam tahun 1986 juga tetap ada tanda-tanda kuat yang menunjukkan pertumbuhan keseluruhan industri kita yang membesarkan hati. Dengan adanya usaha-usaha nyata demi terciptanya iklim yang mendorong perkembangan industri melalui

Meninggalkan DPR setelah menyampaikan RAPBN 1987/1988.

kebijaksanaan 6 Mei, devaluasi dan kebijaksanaa 25 Oktober, diharapkan pertumbuhan industri kita dapat terus berjalan dan dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh di kalangan dunia industri sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, saya yakin produksi industri kita akan dapat bersaing di pasaran internasional.

Erat hubungannya dengan usaha pengembangan industri agar dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi maka untuk pembangunan sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian disediakan anggaran yang memadai sesuai kemampuan keuangan yang ada, ialah sebesar Rp. 158 milyar lebih.

Dalam pada itu pembinaan industri kecil terus ditingkatkan, terutama melalui sentra-sentra industri kecil, dengan merangsang kreativitas masyarakat setempat. Mereka mulai memperkuat diri melalui koperasi-koperasi yang mereka dirikan sendiri, sedangkan pemasarannya sejauh mungkin dikaitkan dengan industri besar dan industri menengah serta kegiatan jasa pemasaran lainnya. Untuk pengembangan industri kecil ini, terutama yang memiliki potensi ekspor, dunia perbankan diharapkan memberi dukungan dengan menyediakan modal yang mereka perlukan.

Untuk melanjutkan pengembangan dan penyuluhan kehidupan koperasi serta untuk mengusahakan terobosan-terobosan baru dalam rangka mendorong ekspor non migas khususnya dan kegiatan perdagangan pada umumnya, maka untuk sektor perdagangan dan koperasi disediakan anggaran pembangunan sesuai kemampuan sebesar Rp. 132 milyar lebih dalam tahun anggaran yang akan datang di samping untuk sektor Pengembangan Dunia Usaha sebesar Rp. 191 milyar.

Sektor pembangunan keempat yang mendapatkan anggaran sedikit di atas Rp. 1 trilyun adalah sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Digitized by Google

Sektor ini tetap memperoleh perhatian yang sangat besar, meskipun keadaan keuangan negara sangat terbatas. Penurunan anggaran sektor ini, terutama karena berkurangnya dana untuk membangun SD, yang dewasa ini jumlahnya telah dapat memenuhi kebutuhan untuk menampung anak-anak usia sekolah dasar.

Kita bersyukur bahwa sejak Repelita I hingga sekarang kita telah membangun puluhan ribu gedung SD Inpres yang dapat menampung semua anak-anak usia sekolah kita. Karena itu untuk tahun anggaran yang akan datang kita akan menitik beratkan pembangunan gedung-gedung SD Inpres itu di daerah pemukiman baru, terutama di daerah transmigrasi. Dengan ini kita tetap memperhatikan pendidikan kepada anak-anak kita.

Walaupun dengan dana yang makin terbatas lagi, kita tetap memperhatikan penanganan masalah pendidikan pada umumnya baik sekolah-sekolah lanjutan, sekolah-sekolah kejuruan dan perguruan tinggi.

Dalam menghadapi segala ujian dan tantangan berat, arah pembangunan kita tetap tertuju pada perbaikan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Karena itu kita perlu terus memberi dorongan kepada semua daerah agar dapat mengembangkan perekonomiannya, sampai ke desa-desa. Dalam rangka inilah kita tetap memberi perhatian pada sektor pembangunan daerah, desa dan kota; yang untuk tahun anggaran yang akan datang direncanakan dana sebesar Rp. 873 milyar lebih atau turun dengan 6,9% dari yang sekarang. Dari jumlah tersebut jumlah-jumlah anggaran untuk Inpres Desa, Inpres Kabupaten, Inpres Propinsi/Daerah Tingkat I dan Inpres Penunjang Jalan tetap dipertahankan besarnya seperti yang tersedia sekarang, bahkan sedikit lebih besar. Karena itu saya berharap agar semua daerah terus mengerahkan segala kemampuannya untuk tetap membangun diri, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Potensi-potensi daerah dan kreativitas masyarakat perlu terus-menerus dibangkitkan, karena potensi-potensi itu memang ada di daerah-daerah.

Potensi daerah dan desa itu telah ditunjukkan oleh gerakan PKK, yang justru diikuti dengan penuh kegairahan oleh berjuta-juta kaum Ibu di pedesaan. Karena itulah untuk tahun anggaran yang akan datang Inpres Desa tetap disediakan, sebesar Rp. 1.350.000,- untuk setiap desa, termasuk di dalamnya bantuan sebesar Rp. 250.000,- untuk membantu PKK. Seluruh jumlah anggaran untuk Inpres Desa ini adalah sama dengan anggaran sekarang sebesar Rp. 98,9 milyar.

Demikian pula untuk bantuan Inpres Kabupaten disediakan anggaran sebesar Rp. 226 milyar, yang berarti ada kenaikan dari yang sekarang karena naiknya jumlah penduduk. Sama halnya dengan tahun-tahun terdahulu besarnya Inpres Kabupaten ini di dasarkan pada jumlah penduduk, dengan perhitungan setiap jiwa mendapatkan bantuan Rp. 1.250,-

Sama halnya seperti yang berlaku sampai sekarang, jumlah bantuan minimum untuk Inpres Kabupaten adalah Rp. 170 juta untuk setiap Kabupaten.

Untuk Inpres Daerah Tingkat I juga disediakan anggaran sebesar jumlah pada anggaran yang sekarang, ialah sebesar Rp. 280 milyar, dengan bantuan minimum sebesar Rp. 10 milyar dan bantuan maksimum sebesar Rp. 12 milyar untuk setiap Daerah Tingkat I.

Dalam pada itu, karena besar manfaatnya untuk memperlancar kehidupan ekonomi di daerah-daerah dan karena banyak menyerap tenaga kerja, maka Inpres Penunjangan Jalan juga kita lanjutkan, dengan anggaran sebesar Rp. 130 milyar, sama besar dengan yang disediakan dalam tahun anggaran sekarang.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, yang sekaligus kita kaitkan dengan pemerataan pembangunan dengan membuka daerah-daerah baru dan perluasan lapangan kerja, maka sektor tenaga kerja dan transmigrasi disediakan anggaran sesuai dengan kemampuan ialah sebesar Rp. 156 milyar lebih. Anggaran yang tersedia itu digunakan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sekarang sedang kita laksanakan.

Sektor lain yang mempunyai dampak yang cukup besar pada keberhasilan pembangunan dan sekaligus merupakan usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat adalah sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan dan keluarga berencana yang disediakan anggaran sebesar Rp. 207 milyar lebih.

Demikian pula untuk sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman tetap diberikan perhatian yang besar.

Untuk itu disediakan anggaran sebesar Rp. 41 milyar atau naik dengan 23% dari yang sekarang. Pembangunan perumahan rakyat dan perbaikan lingkungan pemukiman tetap mendapat perhatian dalam keadaan ekonomi yang sulit dewasa ini, karena perumahan yang sehat dan lingkungan yang baik merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Di samping itu, pembangunan perumahan rakyat merupakan salah satu bidang yang banyak menyerap tenaga kerja dan dapat menjadi penggerak kegiatan ekonomi lainnya yang luas jangkauannya.

Walaupun dengan dana yang sangat menurun jumlahnya, namun sektor-sektor lain yang mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas manusia tetap mendapatkan perhatian, yaitu sektor agama, sektor hukum, sektor penerangan, pers dan komunikasi sosial dan sektor sumber alam dan lingkungan hidup.

Dilihat dari sumber anggarannya, untuk sektor-sektor ini memang ada penurunan yang besar. Namun hal ini tidak berarti bahwa peningkatan kesejahteraan dan kualitas manusia kita abaikan. Di sini terbuka kesempatan yang sangat luas bagi masyarakat sendiri untuk mengembangkan kegiatannya yang kreatif. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, pemuka-pemuka agama dan pemuka-pemuka masyarakat, pers dan media-media komunikasi sosial lainnya, dapat memberi sumbangan yang sebaik-baiknya bagi usaha-usaha yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas manusia. Demikian juga untuk membangkitkan kegairahan dan kreativitas masyarakat dalam membangun dirinya menjadi manusia pembangunan yang membangun masa depan.

Jika dewasa ini kesadaran mengenai lingkungan makin meluas di kalangan masyarakat kita, misalnya, maka hal ini merupakan bukti bahwa dengan usaha yang terus menerus dan terencana, maka kesadaran, tangung jawab dan partisipasi masyarakat luas dapat bangkit.

Dalam pada itu untuk sektor aparatur pemerintah disediakan anggaran Rp. 54 milyar dalam rangka melanjutkan pembangunan sektor ini yang dewasa ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Demikian pula pembangunan sektor pertahanan keamanan kita lanjutkan, dengan anggaran sekitar Rp. 510 milyar, yang masih dalam batas-batas kemampuan keuangan yang tersedia.

Demikianlah penjelasan saya mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1987/'88 yang merupakan pelaksanaan tahun keempat Repelita IV.

Dari sekarang kita sudah dapat melihat betapa besar ujian dan tantangan di hadapan kita; kita melihat masalah-masalah apa yang akan kita hadapi dan langkah-langkah apa yang harus kita langkahkan. Kita juga sudah melihat betapa berat tugas-tugas yang harus kita pikul di atas pundak kita.

Tetapi bersamaan dengan itu kita juga melihat peluang-peluang yang terbuka. Kita tidak akan melewatkan begitu saja peluang itu. Kita akan menggunakan sebaik-baiknya agar dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya.

Dan bersamaan dengan itu kita juga telah mempersiapkan diri untuk memikul tugas-tugas yang berat tadi.

Kita siap karena selama ini kita telah mengambil semua persiapan yang kita perlukan untuk memasuki tugas yang berat tadi, untuk mengatasi segala ujian dan mengalahkan semua tantangan.

Dengan mohon kekuatan kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, marilah kita hadapi tantangan dan masalah-masalah di hadapan kita itu dengan penuh kesadaran dan penuh harapan akan berhasil mengatasinya, sebab kita percaya bahwa semuanya itu adalah bagian dari perjalanan kita bersama menuju masyarakat maju, sejahtera, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila. □

Digitized by Google

MINYAK GORENG
BERMUTU TINGGI

Bimoli

disajikan dalam KEMASAN BARU

PEMENANG
INTERNATIONAL
TRADE TROPHY PHOENICIA

BIMOLI dalam kemasan baru dengan penutup yang tidak mudah bocor akan lebih menghemat biaya pemakaian serta lebih terjamin mutu dan kebersihannya.

BIMOLI terbuat dari tumbuh-tumbuhan asli dengan warna kuning alamiah.

BIMOLI telah diakui oleh suatu Badan Pemilihan Internasional sebagai Minyak Goreng dengan mutu dan kualitet yang tinggi.

Dapatkan segera **BIMOLI** dalam **kemasan baru** pada Toko-Toko dan Supermarket langganan Anda.

Cara membuka:

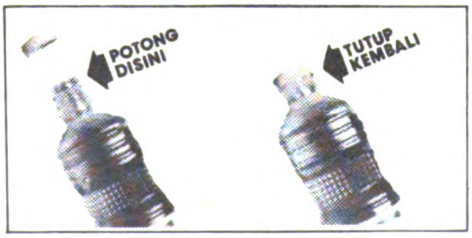

Digitized by Google

Pemerintah Menunjukkan Kesungguhan

Tiga tokoh anggota FKP DPR, Soekardi (Ketua FKP), Djoko Sudyatmiko (Wakil ketua Komisi VI), dan Drs. Rivai Siata (anggota pimpinan FKP, bekas Wakil Ketua Komisi APBN) menilai bahwa pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam menyusun RAPBN 1987/1988.

Soekardi berpendapat RAPBN yang disampaikan oleh Presiden tahun ini realistik. "Suatu prestasi yang pantas dihargai bahwa di tengah kesulitan ekonomi dewasa ini pemerintah ternyata mampu menyusun APBN yang diproyeksikan 6 persen lebih, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini suatu hasil kerja keras Presiden beserta pembantu-pembantu beliau," kata Soekardi.

Ia dapat memahami bahwa anggaran pembangunan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi ia tetap menghargai upaya Pemerintah untuk menerapkan prioritas pada sektor-sektor yang penting untuk mencapai sasaran tinggal landas seperti sektor pendidikan, pertanian, pertambangan, perhubungan beserta pariwisata. Sektor-sektor itu memperoleh anggaran di atas satu trilyun rupiah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI, Djoko Sudyatmiko berpendapat bahwa pemerintah telah bersikap sangat hati-hati dalam menyusun rencana penerimaan negara, khususnya penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas.

Sikap hati-hati itu terlihat dari kebijakan untuk menetapkan harga dasar minyak sebesar 15 dollar per barrel sebagai pedoman perhitungan, sekalipun akhir-akhir ini menunjukkan bahwa harga minyak bumi cenderung di atas angka 15 dollar. "Saya merasa cocok dengan sikap hati-hati ini. Bagaimanapun perkembangan harga minyak masih harus terus dibuktikan di lapangan," katanya.

Ia juga menghargai sikap pemerintah yang secara eksplisit menempatkan beberapa prioritas, khususnya pada bidang-bidang yang mempunyai fungsi pelayanan umum.

Dikatakannya, dalam keadaan yang sulit, fungsi pelayanan untuk perlu diselenggarakan secara lebih baik. Hanya dengan cara itu masyarakat akan merasa tersentuh dan terbangkitkan rasa kebersamaannya, dan pada gilirannya akan tumbuh motivasi yang sangat penting untuk menghadapi kesulitan. Dikatakannya, penempatan prioritas di bidang perhubungan, telekomunikasi, tenaga listrik dan usaha-usaha debirokratisasi, deregulasi yang berulang-ulang disebutkan oleh Presiden, tidak bisa tidak merupakan cerminan tekad pemerintah untuk meningkatkan fungsi pelayanan umum. Manakala motivasi masyarakat dapat dibangkitkan secara optimal, dalam waktu dekat manfaat ekonominya akan dapat dipetik.

"Suatu prestasi yang patut dihargai."

Ia juga melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden secara eksplisit menyatakan perlu menstimulir sektor masyarakat. Usaha pemerintah untuk menciptakan iklim yang baik bagi berkembangnya sektor masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena dalam situasi yang sedang baik pun hendaknya kita tidak bersikap

R. Soekardi

mental bahwa APBN merupakan satu-satunya lokomotip pembangunan.

Setelah kita menjalani kurun waktu pembangunan sekitar 20 tahun, fungsi semacam lokomotif bagi APBN harus makin kecil, dengan kata lain auto aktivitas masyarakat yang bersifat *self propelling* - hendaknya merupakan keadaan ideal yang harus dituju. Oleh karenanya ia melihat adanya kehendak untuk menciptakan iklim yang baik dengan deregulasi, debirokratisasi dan penyederhanaan prosedur merupakan langkah yang tepat. Para aparat perlu waspada dalam melaksanakannya sehingga maksud kebijakan pemerintah itu tidak meleset, misalnya jangan sampai deregulasi justru akan menjadi *reregulasi* yang akhirnya malah menimbulkan suasana lebih ruwet.

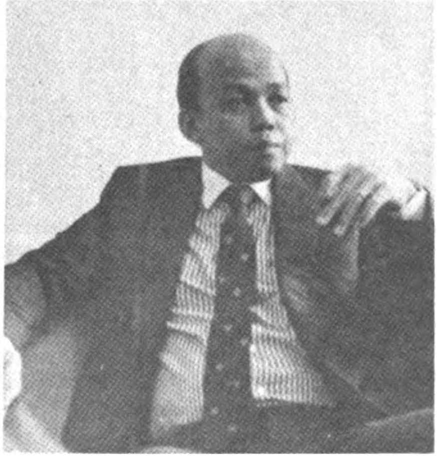

Djoko Sudyatmiko

Bukan Barang Komersial

Khusus mengenai BBM, Djoko mengemukakan, ia dapat memahami bahwa pemerintah mempunyai LBM (Laba Bersih Minyak) sekalipun BBM bukan barang komersial. Ia berpendapat, LBM itu dapat dipergunakan untuk menjaga kemungkinan

Digitized by Google

Penyampaian RAPBN itu.

Rivai Siata

yang tidak terduga. Misalnya, apabila secara riil harga pasaran minyak melebihi patokan APBN, dengan sendirinya akan mempengaruhi pendapatan APBN. Dan tidak mustahil pemerintah akan terpaksa memberikan subsidi bagi BBM dalam negeri. Perlu diingat, negara kita, selain merupakan produsen dan pengekspor minyak bumi, tetapi juga sekaligus merupakan konsumen minyak bumi. Karenanya ia melihat surplus Rp 114 milyar dari BBM itu merupakan hal positif.

Sementara itu, Soekardi mengatakan, apabila pemerintah nanti memperoleh pendapatan tambahan yang cukup memadai, misalnya dari sektor minyak dan gas, hendaknya pemerintah dapat mempertimbangkan adanya semacam gaji ke 13. Tetapi hal seperti ini memang belum dapat dijanjikan, karena keadaannya harus dilihat dulu dari perkembangan pelaksanaan APBN.

Rivai Siata mengatakan, dapat memahami bahwa pemerintah tidak menaikkan gaji pegawai negeri tahun ini, karena keadaannya memang berat. "Seperti dikatakan oleh Presiden, pegawai negeri memang diminta untuk bersabar," katanya.

Ia dapat memahami kebijakan pemerintah itu, tetapi tetap berharap, agar apabila keadaannya mulai membaik di tahun depan, perbaikan gaji dilaksanakan.

Pinjaman Luar Negeri

Rivai Siata mengatakan, Debt Service Ratio atau ambang batas yang aman terhadap hutang luar negeri memang sudah terlampaui. Tetapi ia berpendapat bahwa untuk keadaan sekarang, pinjaman itu diperlukan untuk menggerakkan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan Drs. Jacob Tobing yang mendampingi wawancara Soekardi, mengenai pinjaman itu tidak berlaku prinsip "gali lobang tutup lobang." Pinjaman itu diperlukan untuk menjaga gerak dinamika pembangunan atau kegiatan ekonomi kita. Pada gilirannya kelak ekonomi dapat berkembang sehingga kemampuan untuk mengembalikan pinjaman makin besar.

Sekalipun cicilan hutang dan bunga makin besar, Soekardi berpendapat bahwa hal itu harus dilakukan oleh pemerintah, karena erat kaitannya dengan masalah kepercayaan dan harga diri atau kehormatan sebagai bangsa. Bahkan ia memperkirakan, pasti akan timbul gejolak seandainya pemerintah sampai menunda pembayaran hutang, karena akan timbul kesan seolah-olah pemerintah sudah bangkrut. "Luar negeri tidak percaya, dan masyarakat pasti resah," katanya.

Rivai menambahkan bahwa kebijakan pemerintah menjadwalkan kembali berbagai proyek merupakan langkah yang tepat. Hal ini menunjukkan kesungguhan, bahwa pinjaman itu dimanfaatkan secara optimal.

Sektor Swasta

Sebagai upaya menggerakkan ekonomi, Djoko Sudyatmiko menekankan pentingnya menggerakkan sektor masyarakat. Menurut hematnya, sektor masyarakat harus benar-benar dapat menjadi andalan. Ia melihat, sebenarnya masyarakat mempunyai daya gerak sendiri yang potensial. Sebagai contoh, pada tahun 1985 sektor industri mencapai laju pertumbuhan 6,2% jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,3%. Menurut laporan, pertumbuhan sektor industri ini tumbuh lebih pesat lagi pada tahun 1986.

Untuk meningkatkan dan merangsang pertumbuhan industri masyarakat itu, pemerintah perlu menciptakan iklim dan memberikan kemudahan. Berbagai hambatan harus dihilangkan, dan mereka harus dirangsang untuk bersikap profesional. □

MK/Sugyanto

Digitized by Google

Pancasila Dan Masyarakat Masa Depan

Yang penting apa wawasan kita dan bagaimana mencapainya

Usai membuka dan memberikan sambutan atas nama Presiden pada Kongres V Hipiis di Ujungpandang (15 Desember 1986) , Mensesneg Sudharmono SH tampil sebagai pembawa ceramah pertama dalam seminar 'Mempersiapkan masyarakat masa depan.' Dan sejumlah pertanyaan diajukan — beberapa di antaranya cukup kritis dan menggigit — mengenai pelaksanaan pemerintahan maupun mengenai kehidupan politik.

Dari Mensesneg yang juga Ketua Umum Golkar, Seminar mengharapkan suatu gambaran masa depan menurut visi politik dan kebijaksanaan pemerintah. Tapi Ketua Umum Golkar ini memberikan perluasan dengan membahas masalah wawasan masa depan yang tidak semata-mata dari sudut pandang pemerintah. Setidak-tidaknya tercakup pula sudut pandangnya selaku pimpinan organisasi politik terbesar di Indonesia.

Seminar ini dapat dikatakan 'beruntung' karena melalui pidato pembukaan yang dibacakan oleh Mensesneg, pimpinan nasional juga turut serta memperkaya seminar ini dengan beberapa pokok pikiran dalam rangka pemikiran ke masa depan. Presiden Soeharto memberi penegasan kepada forum ini bahwa "tekad untuk membangun masa depan merupakan pendorong utama pembangunan nasional semenjak semula." Semua langkah yang kita ambil sejak 20 tahun lalu justru merupakan usaha besar untuk membangun masa depan masyarakat dan bangsa kita. Secara pribadi, Presiden mengakui, hal-hal mengenai masa depan "telah lama mengusik pemikiran saya." Masyarakat yang kita cita-citakan jelas harus merupakan masyarakat Pancasila. Keputusan kita bersama menegaskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, "merupakan keputusan kita yang sangat mendasar dalam meletakkan kerangka landasan yang kuat bagi masyarakat Indonesia hari esok itu." Tapi dalam pada itu "kita menyadari bahwa landasan ideologi yang mantap saja belum cukup. Kita harus membangun dan mengisinya dengan kemajuan, peningkatan kesejahteraan lahir dan batin." Itu berarti bahwa gambaran mengenai masyarakat hari esok yang berlandaskan Pancasila itu masih perlu kita jabarkan dan kembangkan lebih jauh.

Sejauh mana Pancasila dapat dijabarkan

Digitized by Google

dan dikembangkan lebih jauh dan kemudian sejauh mana Pancasila memberi peluang ofensif menuju kemajuan, merupakan esensi yang antara lain dipertanyakan dalam forum seminar tersebut. Dengan asumsi bahwa untuk mencapai kemajuan diperlukan perubahan orientasi kreatif dengan watak ofensif dan kompetitif, tampak kebimbangan apakah dalam dirinya Pancasila cukup mengandung faktor-faktor tersebut. Dimana peranan Pancasila dalam hal ini?

Terhadap kebimbangan seperti ini, Sudharmono membantu memberi penegasan bahwa watak kreatif dan kompetitif menjadi salah satu syarat masyarakat yang ingin maju. Dalam P4 — dalam apa yang disebut eka prasetia pancakarsa — diberikan banyak hal yang menggambarkan perlunya kerja keras. Dan ini tiada lain wujud penghargaan terhadap prestasi, sedang dalam pengertian prestasi terkandung makna kompetitif. "Kita harus mencapai prestasi setinggi-tingginya, selalu memperbaiki yang belum baik dan bahkan lebih memperbaiki yang sudah baik, kita selalu mawas diri." Jadi Pancasila justru memberi peluang untuk maju dan untuk maju itu kita mengenal kompetisi.

Ketika soal 'kompetisi' seolah-olah diperlebar menjadi pembandingan dengan kemajuan negara lain yang merdeka setelah Perang Dunia II berdasarkan suatu ranking yang dibuat fihak luar negeri — Indonesia di posisi ke-6 di antara 7 negara yang diperbandingkan — dengan tangkas Sudharmono menangkis relevansinya. "Kalau menurut saya, dalam membangun bangsa dan negara ini kita jangan terlalu terpengaruh dengan ranking-rankingan. Yang penting apa wawasan kita dan bagaimana kita bisa mewujudkan wawasan itu. Kita sudah punya wawasan yaitu wawasan Pancasila dan dijabarkan melalui GBHN. Persoalannya adalah bagaimana kita berusaha sebaik-baiknya melaksanakan program itu. Kalau kita bisa dihormati oleh negara lain, itu yang menjadi tujuan kita. Jangan sampai kita tidak memperoleh kehormatan yang layak karena tidak mampu berkembang."

Soal Eksekutif Dan ABRI

Pada seminar yang diselenggarakan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial hari pertama itu, muncul pula pertanyaan mengenai unsur eksekutif dan Abri dalam lembaga-lembaga legislatif. Mengutip angka 80% anggota badan legislatif kita berasal dari eksekutif, seorang peserta menyoroti dedikasi mereka dan mempertanyakan "apakah ini cerminan demokrasi Pancasila" ataukah semata-mata upaya mempertahankan statusquo. Dan seorang peserta lainnya mempersoalkan alasan pengamanan Pancasila sebagai dasar konsensus nasional duduknya unsur Abri dalam lembaga legislatif. "Menurut saya duduknya Abri yang sepertiga" (kini hanya 20%), ujarnya "belum menjamin keberadaan Pancasila." Bersamaan dengan itu sebuah kecaman dilontarkan kepada UU Keormasan sebagai akan menggiring pemikiran kearah yang dogmatis yang kontroversial dengan sifat keterbukaan Pancasila.

Sudharmono SH menggambarkan bahwa konsensus nasional untuk mengamankan Pancasila diambil pada awal Orde Baru setelah pemberontakan PKI. "Kebetulan dengan klimaks bencana nasional tersebut, kita lalu bertekad untuk menciptakan wawasan Orde Baru — termasuk wawasan di bidang politik — yang mencakup peranan Abri dalam kegiatan tersebut." Timbul konsensus waktu itu, bahwa kita ingin tetap berdiri di atas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan bahwa kita ingin mengikutsertakan Abri dalam segala bidang. Lalu ada soal: Disatu pihak kita ingin tetap mempertahankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, tetapi sementara itu dalam Undang-undang Dasar 1945 ada pasal 37 yang menyatakan bahwa kalau MPR menghendaki merubah Undang-undang Dasar — termasuk merubah Pancasila — hal itu dapat dilakukan bilamana sidang dihadiri duapertiga anggota dan duapertiga yang hadir menyetujui perubahan. "Pasal 37 masih labil waktu itu, sehingga perlu ada mekanisme untuk mengamankan Pasal 37 itu." Adalah kebetulan bahwa waktu itu disepakati ikut sertanya Abri dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Maka sekaligus ditetapkan bahwa Abri tidak ikut pemilu tapi dari Abri diangkat anggota MPR yang jumlahnya sepertiga jumlah anggota. "Dengan itu terjamin tidak digunakannya Pasal 37 untuk merubah Undang-undang Dasar dan Pancasila." Apa jaminannya? Di samping punya saptamarga, Abri memang sudah committed terhadap Pancasila. Bila ada anggota MPR yang meminta perubahan Undang-undang Dasar, "kita dapat atas dasar disiplin memerintahkan anggota Abri yang diangkat itu tidak usah hadir." Itu ide dasarnya. "Itu konsensus semula. Sesuai dengan perkembangan demokrasi jumlah yang diangkat tidak lagi sepertiga."

Tentang Korpri, dulu juga pernah diusulkan untuk tidak ikut pemilu dan diangkat saja menjadi anggota MPR karena toh Korpri juga abdi negara. Tapi itu tidak diwujudkan. "Berdasarkan konsensus, dianggap lebih baik Korpri tetap memilih." Terhadap anggapan adanya kerancuan antara eksekutif dengan legislatif, Sudharmono mengingatkan urutan konstitusional ketatanegaraan, yakni sebelum adanya eksekutif, terlebih dahulu harus ada legislatif, dan sebelumya lagi harus ada rakyat lebih dulu. Legislatif yang membentuk eksekutif, bukan sebaliknya. "sekarang, bagaimana membentuk MPR? Itu harus demokratis pula, sesuai dengan jiwa Sila ke-4 Pancasila. Bagaimana melaksanakan Sila ke-4 itu, kita bacalah Undang-undang Dasar 1945." Pasal 1 ayat 2 menyebutkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan pasal 2 ayat 1 menyatakan MPR terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan dari golongan. Pembentukan DPR melalui pemilihan umum (dan 20% diangkat dari Abri). Menurut UU susunan Anggota DPR dan MPR, utusan daerah adalah utusan yang dipilih di daerah (oleh DPRD) yang jumlahnya antara 4 sampai 8 orang sesuai besarnya jumlah penduduk, termasuk Gubernur/KDH. Karena Gubenur/KDH bukan hanya sekedar eksekutif tetapi juga pimpinan daerah — karena dipilih oleh DPRD — maka wajarlah ia mewakili daerah. Sedang utusan golongan — 100 orang — harus mencerminkan perwakilan setiap unsur kekuatan nasional yang ada. Dalam hal ini UU Keormasan justru dimaksudkan untuk memantapkan organisasi golongan-golongan itu. Karena menurut UU jumlah anggota MPR dua kali anggota DPR yang 500 orang, maka setelah dikurangi 147 utusan daerah dan 100 utusan golongan, masih terdapat 253 kursi. Yang terakhir ini diisi oleh peserta pemilu berdasarkan prosentasi hasilnya dalam pemilu.

"Kalau kemudian banyak anggota yang berasal dari eksekutif itu mungkin saja," Sudharmono SH menerangkan. "Mungkin yang dianggap wakil terbaik itu sekarang profesinya di eksekutif." Tapi mereka itu terpilih dan mewakili bukan sebagai eksekutif, melainkan sebagai warga negara yang terpilih melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dengan UU — sesuai demokrasi Pancasila yang berdasarkan kedaulatan rakyat yang dinyatakan lewat pemilu. "Kalau kita tidak lagi mengakui UU sebagai produk demokrasi, kalau kita tidak lagi mengakui pemilu sebagai produk demokrasi, ya bagaimana lagi." Jadi, kata Ketua Umum Golkar ini, "saya tidak sependapat kalau dikatakan sistim yang sekarang telah dicapai hanya untuk mempertahankan statusquo." Juga, UU Keormasan bukanlah untuk membatasi. Dan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak akan mengurangi kiprahnya organisasi dalam mencapai program dan tujuannya. "Kita hanya ingin memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa. Tak ingin kembali kepada gejolak pertentangan politik ideologis. Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, kita menghilangkan pertentangan ideologi. Tapi atas dasar ideologi Pancasila kita boleh berkiprah, berlomba-lomba mencapai kemajuan."

Selain Sudharmono SH, pada seminar yang sama namun di hari yang berbeda tampil pula Ir. Sarwono Kusumaatmadja — Sekjen DPP Golkar — membawakan makalah tentang 'Kepemimpinan Politik' (Bacan pada rubrik Spektrum). Ceramah lengkap Sudharmono SH tentang 'Wawasan Masa Depan Kita' dimuat pula di rubrik Nasional. Seminar yang bertepatan dengan Munas V Hipiis ini berlangsung hampir sepekan dan diikuti oleh ratusan anggotanya dan sejumlah pembicara. Munas V ini kembali memilih Dr. Alwi Dachlan sebagai Ketua untuk periode mendatang. □

Rum Aly

Digitized by Google

Oleh: Sudharmono, SH.

Wawasan Masa Depan Kita

MASA depan yang ingin kita bangun bukanlah suatu masyarakat utopis yang berada jauh di luar jangkauan. Masyarakat masa depan itu kita bangun secara realistik, dengan dukungan sumber daya nasional yang telah kita miliki. Memang benar, fokus perhatian kita bersama saat ini adalah untuk merumuskan visualisasi masyarakat Indonesia di akhir Pelita V; atau di awal Pelita VI sebagai babak baru dari Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap ke II.

Pemikiran yang menjangkau jauh ke depan ini jelas sekaligus bersifat politik dan operasional yang didukung dengan wawasan ilmiah. Sifat politiknya terletak pada mufakat dari Lembaga Tertinggi Negara, yang sejak tahun 1973 dahulu mengharuskan kita semua untuk berfikir dalam rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek. Kita diharuskan berfikir dalam kurun 25 tahunan ke depan, sejak Pelita I di tahun 1969, yang akan berakhir dalam tahun 1994, yang merupakan pembangunan jangka panjang tahap ke I. Ancang-ancang untuk pemikiran jangka panjang tahap ke II sudah harus kita awali sejak saat sekarang, dalam tahap Pelita IV dan V nanti, yaitu tahap di mana kita meletakkan dan memantapkan kerangka landasan untuk masyarakat adil makmur yang kita cita-citakan itu.

Sifat operasionalnya terletak pada rangkaian kegiatan manajemen nasional secara rasional dan pragmatis yang harus kita laksanakan setelah mufakat nasional dalam MPR itu selesai. Pembangunan nasional yang kita gerakkan untuk melaksanakan mufakat nasional itu tidak hanya meliputi bidang ekonomi. Ia sekaligus meliputi bidang politik, sosial budaya dan hankam, dalam suatu keterpaduan yang saling menunjang, baik antara satu bidang dengan bidang lainnya, maupun antara tingkat nasional dan tingkat daerah. keberhasilan pembangunan nasional kita sejak tahun 1969 merupakan prestasi ganda, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ilmiah sekaligus. Kegiatan pembangunan yang demikian kompleks tidak mungkin ditangani tanpa dukungan keahlian dari para manajer pembangunan nasional yang mempunyai kemampuan profesional, yang selanjutnya didukung oleh ilmu pengetahuan yang menjadi bidang profesinya itu.

Sekedar penyegar ingatan kita, mungkin ada manfaatnya jika saya kemukakan, bahwa segera setelah kita meletakkan pilar-pilar pertama Orde Baru di bulan Maret 1966, kita sibuk berkiprah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menyusun wawasan dan rencana mengenai masa depan ini, dalam Seminar Angkatan Darat ke II di bulan Agustus 1966 di Seskoad Bandung. Seminar ini seperti kita ketahui bersama, diikuti oleh unsur-unsur pimpinan ABRI dan kaum intelektual dari kampus-kampus kita.

Menjelang akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap I ini kita tidak lagi berada dalam suasana penuh gejolak politik, seperti dua dasawarsa yang lalu. Namun kita tetap dapat mengambil pelajaran dan kearifan dari saat-saat penting tersebut, bahwa kaum praktisi dan kaum teoritisi dapat dan perlu bekerja sama dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dengan jangkauan pandangannya yang lebih jauh, lebih luas dan juga lebih dalam, kaum teoritisi dapat menyusun rencana yang lebih akurat, yang diperlukan oleh para praktisi, yang karena tugasnya lebih banyak terikat oleh masalah-masalah kekinian.

Dengan latar belakang itu maka saya gembira dapat memenuhi permintaan Panitia Seminar ini untuk menyampaikan visi saya, kepada seminar ini berdasar pengamatan dan pengalaman selama ini.

Menelaah wawasan negara persatuan yang bersifat integralistik yang dikandung oleh Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai pangkal tolak amatlah penting kita menelaah kembali wawasan para pendiri negara kita tentang wujud masyarakat yang mereka idam-idamkan sewaktu merumuskan dasar-dasar negara. Amatlah menarik perhatian, bahwa mereka merumuskannya dalam kata-kata yang sangat umum, seperti tercantum dalam alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita menginginkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut menegakkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan sangat arif, para sesepuh bangsa kita ini menahan diri untuk merumuskan hal itu secara terinci.

Cita-cita hukum yang melatarbelakangi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dirangkum dalam Empat Pokok Pikiran yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang esensinya sama dengan Pancasila yang terdapat dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada kita diamanatkan, bahwa (1) negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tampah darah Indonesia, dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (3) negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; dan bahwa (4) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Untuk menggali lebih dalam apa yang

Digitized by Google

menjadi wawasan para pendiri negara kita ini mungkin kita perlu membuka kembali risalah-risalah sidang BPUPKI di tahun 1945 itu, untuk menemukan ungkapan pikiran yang lebih dalam dan mendasar mengenai apa yang mereka kehendaki. Kita menemukannya dalam penjelasan Prof. Mr. Dr. Soepomo, yang memegang peranan penting dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dalam penjelasannya kepada rapat badan tersebut tanggal 15 Juli 1945, Soepomo menyampaikan suatu pernyataan yang menurut pandangan saya sangat penting, yang berbunyi:

"Kita menghendaki semangat kekeluargaan yang harus meliputi seluruh lapangan hidup manusia, bukan saja dalam ekonomi, sosial, akan tetapi juga di lapangan politik, lapangan pemerintahan, artinya perhubungan antara pemerintahan dengan warga negara, semua itu harus diliputi oleh faham kekeluargaan".

Pernyataan ini sangat penting, karena dapat kita rasakan pengaruhnya secara langsung dalam seluruh konstruksi Undang-Undang Dasar 1945. Perlu kita perhatikan bahwa seluruh Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah suntingan dari laporan lisan Soepomo yang dicatat secara stenografis, dan kemudian dijadikan Penjelasan resmi di saat dimuatnya dalam Berita negara di tahun 1946.

Semangat kekeluargaan ini secara kultural mempunyai akar yang kuat dalam kebudayaan masyarakat kita.

Seperti dapat kita ikuti dalam pidato Soepomo dua minggu sebelumnya, tanggal 31 Mei 1945, pernyataan dan pilihan kepada dasar kekeluargaan ini merupakan pilihan secara sadar setelah membandingkan tiga "staatsidee" yang dominan di kala itu, yaitu: teori individualistis, seperti yang diajarkan Thomas Hobes, John Locke, J.J. Rousseau, Herber Spencer dan Harold J. Laski; teori golongan atau "the class theory of the state" dari Marx, Engles dan Stalin; dan teori integralistik dari Spinoza, Hagel dan Adam Muller. Teori yang dipandang dapat memenuhi kepentingan kita dan sesuai dengan kepribadian kita pula adalah teori integralistik dari Spinoza, Hegel dan Adam Muller tersebut, sudah barang tentu dengan penyempurnaan seperlunya, antara lain dengan mengakui hak-hak kewarganegaraan, seperti dianjurkan Drs. Mohammad Hatta. Sungguh menarik perhatian bahwa kerjasama erat antara kaum politisi dan kaum ilmuwan itu sudah ada semenjak hari-hari pertama persiapan kemerdekaan kita.

Juga sangat menarik perhatian, bahwa penolakan terhadap komunisme, yang kita laksanakan secara konstitusional dengan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, sesungguhnya sudah mempunyai akar dalam pembahasan dalam sidang-sidang BPUPKI di tahun 1945 itu. Komunisme, yang didasarkan kepada teori kelas, tidak dapat diselaraskan dengan pandangan hidup kita yang didasarkan kepada pandangan kekeluargaan. Namun kelihatannya diperlukan bukti-bukti emperis terlebih dahulu sebelum kesimpulan logika ini dapat dikukuhkan ke dalam tatanan hukum.

Dalam sidang-sidang tersebut selanjutnya, kita tidak banyak lagi menemukan wawasan mengenai masa depan, yang kita perlukan di saat ini. Seperti saya katakan tadi, mungkin hal ini disengaja oleh para sesepuh kita itu. Hal ini misalnya tercermin dalam kalimat-kalimat yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang pasti sudah sangat kita kenal ini:

"Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah, terutama zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah".

Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa para sesepuh bangsa kita itu memang secara sengaja menahan diri dalam menyusun visi masa depan itu, dan memilih suatu sikap yang lebih arif, yaitu membuka diri terhadap dinamika. Hal itu sekaligus berarti memberi kepercayaan dan amanat yang amat besar kepada gelombang demi gelombang generasi berikutnya untuk mengisi visi jika saatnya telah memerlukan hal itu.

Dalam hubungan inilah kiranya harus kita fahami demikian banyak amanat Bapak Presiden Soeharto, agar kita memahami Pancasila (dan Undang-Undang Dasar 1945) itu secara kreatif dinamis, dan tidak secara kaku dogmatis. Memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara kaku dogmatis akan merupakan suatu "kontradiction in terminis" karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, yang secara nyata mengingatkan kita untuk hidup secara dinamis.

Wawasan-wawasan lanjutan yang kita kembangkan dalam Orde Baru

Kiranya sudah jelas bagi kita bahwa pengalaman sejarah bangsa kita yang mencoba mempraktekkan sistim politik dan kenegaraan yang liberalistis bukan saja tidak membawa kemajuan pada bangsa kita, melainkan malahan hampir saja memecah-belah keutuhan dan kesatuan Bangsa.

Demikian juga, saya tidak akan mengulas demikian banyak wujud penyimpangan dalam masa Orde Lama, 1959 - 1965, karena kiranya sudah cukup banyak kita ketahui melalui berbagai forum lain. Mungkin lebih besar manfaatnya jika kita memusatkan perhatian kepada berbagai wawasan yang kita kembangkan dalam Orde Baru semenjak tahun 1966 sampai saat ini, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam; yang keseluruhannya itu bersemangatkan kekeluargaan, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan tekadnya untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka seluruh wawasan yang dikembangkan ini tetap berada pada arah yang ditetapkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Wawasan-wawasan Politik

1. Demokrasi, Konstitusi dan Tegaknya Hukum

Sejalan dan konsekuen dengan tekadnya maka melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, tidak dapat lain haruslah menegakkan dan mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dilandaskan kepada demokrasi, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan tegaknya hukum.

Setiap langkah yang kita ambil selama Orde Baru selalu dilandaskan kepada prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi dan tegaknya hukum. Setiap langkah harus didasarkan kepada kehendak dan persetujuan rakyat, sesuai dengan norma-norma konstitusional dan sistem hukum positif yang ada. Dengan demikian kita menjamin adanya kepastian dan stabilitas yang amat diperlukan bagi bangsa yang sedang membangun dirinya di segala bidang.

2. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

Pernyataan ini sangatlah penting sebagai jaminan bahwa arah dan isi pembangunan kita haruslah arah dan isi yang akan membawa Bangsa Indonesia ke cita-citanya ialah membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Karena faktor yang menentukan akan keberhasilan pembangunan yang demikian itu adalah manusia-manusia pelaksana dan pelaku pembangunan, maka perlu sekali adanya pedoman dan penuntun hidup bagi manusia Indonesia yang Pancasilais.

Sejak tahun 1978, melalui berbagai bahan penataran P4, kita menyatukan faham bahwa manusia Pancasila yang hendak kita bangun itu bukanlah "ubermensch" tetapi manusia biasa yang disamping kekuatannya juga memiliki kelemahannya. Kita menginginkan agar setiap orang dapat mengendalikan dirinya melalui proses mawas diri. Hal yang sudah baik dalam dirinya, agar dimantapkannya lebih lanjut, sedangkan kelemahan-kelemahannya agar diperbaikinya. Ia harus sadar bahwa ia hidup dalam satu masyarakat dengan orang-orang lain, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dirinya sendiri. Ia harus menghormati orang lain.

Digitized by Google

3. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Untuk lebih mengoperasionalkan Pancasila, kita mengembangkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang nasional kita, yang berpendirian bahwa walau dalam kenyataannya ada keberanekaragaman kita sebagai bangsa, namun kita menekankan aspek kesatuan dan persatuan, baik dalam segi politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam. Unsur-unsur dari keanekaragaman itu hanyalah merupakan komponen yang bersifat integral dari kesatuan dan persatuan itu. Wawasan Nusantara yang ada mulanya bersifat konsep kewilayahan ini, kemudian berkembang menjadi konsep nasional yang lebih luas. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara kita, berupa kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Konsep ketahanan nasional ini perlu kita kembangkan dalam dunia yang penuh dengan gejolak ini, agar kita dapat membina aspek-aspek vital dari kehidupan berbangsa dan bernegara itu seperti : demografi, geografi, dan sumber alamnya (kita sebut sebagai aspek alamiah) dan : ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam (disebut sebagai aspek sosial).

4. Demokrasi Pancasila

Untuk meluruskan kembali pelaksanaan dari konsep Demokrasi Terpimpin yang sebenarnya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, namun kemudian menjurus kepada pimpinan di tangan seseorang yang dipengaruhi dan memberikan peluang pada faham komunisme, maka kita mengembangkan Demokrasi Pancasila yang lebih menyadarkan diri kepada lembaga-lembaga demokrasi serta semangat kekeluargaan yang dikandung oleh Pancasila. Kita mengembangkan kebiasaan menyelesaikan masalah-masalah berat melalui kegiatan "lobbying" yang intensif, sebelum dibawa ke dalam sidang, agar dapat dihindarkan konfrontasi dan pemungutan suara. Dalam "lobbying" diusahakan untuk memahami secara mendasar berbagai keberatan yang ada, dan dicari berbagai kemungkinan pemecahan yang dapat diterima seluruh fihak.

Dalam Demokrasi Pancasila diberikan perhatian kepada proses pemecahan masalah oleh para wakil rakyat dalam lembaga-lembaga demokratis yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Proses pemecahan masalah itu diusahakan dalam suasana persaudaraan dan keakraban yang tidak terikat pada aturan formalitas, yang kemudian baru diformalkan setelah tercapai pemecahannya. Hal ini mungkin agak berbeda dengan negeri-negeri lain, di mana publikasi terutama dipusatkan kepada bagaimana hangatnya pertukaran faham dan pendapat itu dan bukannya kepada hasil pemecahannya. Hal ini mungkin merupakan selera yang agak berbeda. Kita memang kurang suka untuk ramai-ramai.

5. Konsensus Nasional

Istilah "konsensus nasional" ini timbul dalam praktek kenegaraan, berupa kesepakatan di antara kekuatan-kekuatan sosial politik mengenai suatu masalah penting dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang kemudian diterima secara luas dalam masyarakat sebagai suatu kebenaran. Salah satu di antara konsensus nasional ini adalah, misalnya, konsensus nasional di tahun 1966 untuk menyediakan sepertiga kursi MPRS untuk wakil-wakil ABRI, dalam rangka mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsensus nasional ini kemudian diwadahi dalam berbagai ketentuan perundangan. Sesuai dengan sifatnya sebagai konsensus, maka jika kemudian ternyata ada perkembangan baru yang mengharuskan perubahan, maka hal itu juga diwadahi melalui semacam konsensus nasional baru. Demikianlah misalnya konsensus nasional mengenai pengangkatan anggota ABRI sebanyak sepertiga anggota MPR itu sekarang telah ditiadakan, setelah Presiden memberikan tanggapan melalui pidato di berbagai tempat, bahwa pengangkatan tersebut dapat ditiadakan, asal ada jaminan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain melalui Referendum. Ajakan Presiden ini mendapatkan sambutan luas, dan sekarang telah dituangkan dalam ketentuan hukum konstitusi kita. Rangkaian konsensus nasional ini jelas akan berkembang terus secara dinamis di masa datang.

6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan

Sejak tahun 1983 kita telah menyepakati Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Ini berarti bahwa semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan tidak lagi dibedakan keberadaannya oleh prinsip atau ideologi Pancasila, tetapi sebaliknya dalam naungan dan dengan jaminan Pancasila itu setiap organisasi akan memiliki keleluasaannya untuk mewujudkan tujuan atau program dari organisasinya.

Berbagai organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan memang harus menjabarkan Pancasila itu dalam program-programnya. Secara praktis hal ini berarti bahwa ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program pembangunan nasional, sesuai dengan bidang yang menjadi ajang geraknya sehari-hari. Jika Pemerintah menjabarkan GBHN itu dalam Repelita-Repelita, maka organisasi kekuatan sosial politik serta organisasi kemasyarakatan akan menjabarkannya dalam program kerjanya masing-masing. Karena bersumber dari satu dokumen yang sama, maka berbagai kegiatan yang ada itu akan menghasilkan keluaran yang saling menunjang satu sama lainnya. Selain itu akan menciptakan suasana politik di mana pemerintah dan organisasi kekuatan sosial politik serta organisasi kemasyarakatan akan saling memandang sebagai **mitra kerja** yang saling memerlukan. Hal ini akan lebih memantapkan lagi pelaksanaan semangat kekeluargaan yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945.

7. Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan

Mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan ini mungkin dapat dipandang sebagai praktek kenegaraan yang amat penting. Mekanisme ini bukan saja mengatur jadwal kenegaraan kita sekali lima tahun yang berpusat pada pemilihan umum, prolog serta epilognya, tetapi juga pada kerjasama melembaga antara lembaga-lembaga penyelenggara negara. Mekanisme ini memberikan kepastian pelaksanaan norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara, sehingga setiap unsur dapat merencanakan kegiatannya masing-masing. Dengan demikian negara kekeluargaan yang bersifat integralistik ini akan semakin mantap lagi dalam segi operasionalnya.

Wawasan-wawasan Ekonomi

8. Demokrasi Ekonomi

Pemikiran ekonomi dapat dikatakan menempati tempat sentral dalam pemikiran Orde Baru semenjak 1966, walau terutama dengan pendekatan pragmatis. Asas-asas yang terkandung dalam berbagai Ketetapan MPRS di tahun 1966, dan 1968 serta berbagai seminar berusaha mencari prinsip-prinsip yang kita perlukan dalam membangun bidang ekonomi, sebagai bidang yang paling terbengkalai selama dua dasawarsa pertama kemerdekaan kita. Banyak sedikitnya usaha yang bersifat pragmatis ini berhasil mengantarkan kita ke taraf kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Sudah barang tentu adanya "boom" minyak antara tahun 1973-1982 membantu keberhasilan itu, namun tanpa ditunjang oleh kebijakan ekonomi yang memadai, bukan tidak mungkin arah penggunaan dananya akan berbeda sama sekali dari yang sudah kita nikmati selama ini. Jika kita perhatikan rangkaian buah pikiran serta kebijaksanaan yang telah kita ambil selama ini, maka tampak jelas bahwa kita maju dengan hati-hati. Hanya jika pada

Digitized by Google

saat-saat yang gawat dibutuhkan tindakan yang menentukan, kita mengambil tindakan-tindakan yang berani untuk menyelamatkan keadaan. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi misalnya, peranan koperasi yang demikian sentral dalam tatanan pemikiran pembentuk negara kita, belum dapat berkembang pada taraf yang kita inginkan, sebagai salah satu komponen ekonomi nasional disamping ekonomi sektor negara dan sektor swasta. Ini justru menjadi tantangan dan tugas kita semua untuk terus mendorong dan menggerakkan peningkatan peranan koperasi dalam kehidupan ekonomi kita.

Disamping menggerakkan peranan koperasi, maka suatu usaha rintisan yang layak menjadi perhatian kita adalah dikembangkannya sistem anak angkat dalam dunia industri, di mana suatu industri besar menyebarkan komponen produksinya kepada pengrajin-pengrajin rakyat, disertai petunjuk dan pengawasan mutu yang cukup baik. Walaupun di negeri-negeri lain hal ini tidaklah baru, namun untuk negeri kita, adanya sistem anak angkat ini jelas mempunyai arti yang penting. Kemampuan manajemen serta penguasaan teknologi dari sektor modern secara bertahap dapat dilimpahkan kepada sektor tradisional.

9. Trilogi Pembangunan

Konsep Trilogi Pembangunan, yang menekankan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasilnya, serta stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, juga berkembang selama Orde Baru. Dengan kebijaksanaan yang sudah dicantumkan dalam GBHN ini dapat manfaatkan keterpaduan upaya dalam pembangunan. Prioritas urutan unsur-unsurnya bisa berbeda-beda, namun esensi keterkaitannya satu sama lain adalah tetap. Dalam masa Orde Baru, segi pemerataan pembangunan tersebut mendapatkan perhatian sentral dari Pemerintah yang dijabarkan dalam **Delapan Jalur Pemerataan.**

10. Titik berat di bidang pertanian

Mungkin kurang banyak kita perhatikan, bahwa pembangunan nasional kita yang bertitik berat di bidang ekonomi itu selanjutnya meletakkan titik beratnya dalam bidang pertanian, dan dengan sendirinya di daerah pedesaan. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional kita sejak awal telah memihak kepada bagian terbesar rakyat Indonesia. Kemajuan daerah pedesaan dan para petaninya ini akan menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh. Keberhasilan kita berswasembada beras tidak mungkin tercapai tanpa kiprah para petani kita di daerah pedesaan ini. Pembangunan di bidang industri yang kita lakukan, bukan dengan mengabaikan bidang pertanian, tetapi sebagai imbangan dari padanya yang secara bertahap akan menjadi kekuatan yang mendukung era industrialisasi. Pilihan kita ini ternyata amat tepat.

Wawasan-wawasan Dalam Bidang Sosial Budaya

11. Kerukunan Umat Beragama

Seiring dengan lahirnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di tahun 1978, maka dari waktu ke waktu makin terasa kemantapan kerukunan hidup umat beragama. Mengingat betapa beratnya pembahasan masalah agama ini dalam tahun 1945, dan betapa pekanya masalah agama ini dalam masyarakat kita yang religius ini, maka kemajuan yang kita capai dalam kerukunan umat beragama ini sungguh merupakan suatu langkah yang amat besar. Yang kita rukunkan bukanlah agamanya, tetapi umatnya, sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sudah barang tentu langkah besar ini menghendaki pemikiran mendalam di kalangan umat beragama sendiri, khususnya mengenai konsep-konsep yang selama ini telah berurat berakar dianutnya, baik mengenai dirinya sendiri maupun mengenai umat beragama lain. Pemikiran ulang tersebut menjadi amat mendesak sewaktu kita melangkah lebih lanjut dengan menyatakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Syukurlah, sekarang ini hal itu telah selesai. Seluruh umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kerukunan antar umat beragama ini akan lebih mantap lagi di masa datang.

12. Hak kebebasan agama sebagai hak asasi yang paling asasi

Kesepakatan penting dalam tahun 1978, yang menyelesaikan perbedaan faham sejak tahun 1945 adalah bahwa hak kebebasan agama adalah hak asasi manusia yang paling asasi, bukan pemberian negara dan bukan pemberian golongan. Kesepakatan ini menyelesaikan sekaligus kekhawatiran akan berbagai bentuk campur tangan terhadap kegiatan keagamaan menurut keyakinan agama masing-masing.

13. Pengembangan budaya nasional

Selama dan sebagai hasil pembangunan di segala segi kehidupan juga telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan budaya nasional dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya daerah yang beraneka ragam.

Wawasan-wawasan Dalam Bidang Hankam

14. Dwifungsi ABRI

Adanya dwifungsi ABRI sudah kita kenal sebelum Orde Baru, tetapi dalam Orde Baru lah konsep ini berkembang secara mantap dan mendapatkan bentuknya yang mantap pula dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Dalam GBHN, ABRI baik sebagai kekuatan hankam maupun sebagai kekuatan sosial diakui sebagai salah satu Modal Nasional. Dalam taraf awal Orde Baru kehadiran dwifungsi ABRI ini masih dipertanyakan sebagian kaum politisi dan cendekiawan kita, yang umumnya masih menganut adanya dikhotomi sipil-militer, serta adanya "civilian supremacy". Konsep demikian jelas berbeda dari asas kekeluargaan yang bersifat integralistik yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945.

15. Kemanunggalan ABRI — Rakyat

Adanya kemanunggalan ABRI dengan rakyat, baik dalam semangat maupun dalam doktrin dan operasional berawal dari perang kemerdekaan. Tradisi ini melekat erat dalam semangat dan kepribadian ABRI, juga pada generasi yang lebih muda. Semangat ini tidak hanya mencakup kegiatan militer teknis, tetapi juga secara menyeluruh dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Orde Baru, semangat ini terus dipelihara dan diaktifkan, khususnya dalam kegiatan pembangunan nasional dalam arti yang luas.

Tantangan-Tantangan Baru Yang Kita Hadapi Di Masa Depan

Arahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 — baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya — , serta wawasan-wawasan lanjutan yang kita kembangkan dalam Orde Baru sekarang ini, merupakan dasar dari persepsi kita mengenai masa kini dan masa datang. Seperti juga halnya dengan jalan pikiran para pembentuk Negara kita di tahun 1945, kita tidak mengembangkan gambaran lengkap mengenai masa depan itu sekaligus. Kita tahu bahwa kita hidup dalam zaman yang tidak kurang dinamisnya, akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang tumbuh dengan amat pesat.

Adalah bijaksana jika kita menginventarisasi terlebih dahulu berbagai tantangan yang kita hadapi di saat ini dan di masa datang, untuk kemudian kita rumuskan jawaban kita terhadapnya, sebagai suatu visualisasi masa depan yang berada dalam jangkauan kita, atau dalam jangkauan Generasi Penerus yang akan melanjutkan perjuangan nasional kita ini di awal abad mendatang.

Tantangan Dalam Negeri

1. Pertambahan penduduk dan kelangkaan sumber alam

Tantangan pertama dan terutama yang akan dihadapi masa depan adalah pertambahan penduduk dalam jumlah yang besar

Digitized by Google

dan semakin langkanya sumber alam kita, terutama tanah. Pertambahan penduduk bukan saja mempunyai dampak kepada kebutuhan sandang, papan dan pangan, tetapi juga pada kondisi dan tarap hidup serta lapangan kerja. Daerah-daerah penerima transmigran selama ini, seperti misalnya Lampung, bahkan sudah mulai mengirim "transmigrannya" sendiri ke daerah lain. Pengendalian pertambahan penduduk melalui program Keluarga Berencana secara menyeluruh cukup berhasil, tetapi tidak cukup cepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Di akhir abad ini, penduduk kita akan berjumlah sekitar 230 juta orang. Pengadaan pangan untuk penduduk sejumlah demikian jelas akan merupakan masalah yang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi saat ini. Demikian juga masalah pendidikan dan lapangan kerjanya. Kita menempatkan masalah kependudukan dan sumber daya alam yang mendukungnya ini dalam prioritas pertama, karena kita telah menyatakan bahwa hakekat pembangunan nasional sebagai pengamalam Pancasila adalah pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia.

2. Kemampuan pengolahan sumber alam dengan ilmu dan teknologi

Walaupun sumber daya alam kita semakin langka, namun kita wajib bersyukur bahwa kita masih dianugerahi Tuhan dengan sumber alam yang cukup memadai, jika kita mampu mengolahnya dengan ilmu dan teknologi. Namun, dalam hal ini kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sebagian besar tenaga kerja kita hanya berpendidikan sekolah dasar atau kurang, sehingga amat terbatas kemampuannya dalam menggunakan ilmu dan teknologi yang diperlukan untuk mengolah sumber alam yang ada dilingkungannya itu. Tenaga yang pernah mendapatkan pendidikan tinggi kurang dari 1%, sehingga dengan demikian terdapat jarak yang amat jauh antara lapisan pemikir dan perintis, dengan mereka yang harus melaksanakan.

Tantangan Dari Luar

3. Perubahan dunia

Secara ringkas saya hanya ingin mengemukakan, bahwa dunia sedang mengalami proses pergeseran-pergeseran kekuatan dan tatanan yang cukup kompleks baik dalam bidang politik, ekonomi maupun militer. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan proses pergeseran dan terbentuknya tatanan baru ini mengandung berbagai kerawanan dan sekaligus harapan.

Tantangan utama

Tantangan utama bangsa Indonesia adalah tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Di atas semua tantangan yang telah disebutkan di muka baik yang datang dari dalam maupun dari luar, maka yang menjadi tantangan pokok dan utama adalah kemampuan bangsa Indonesia ini untuk tetap memelihara dan makin memantapkan persatuan dan kesatuannya di dalam kebhineka-an yang menjadi milik dan kekayaannya. Karena itu usaha untuk tetap berpijak pada Pancasila dan mengamalkan Pancasila dalam rangka membangun masyarakat Pancasila haruslah tetap menjadi pegangan kita semua dari generasi ke generasi.

230 juta jiwa di akhir abad ini.

Visualisasi Masa Depan Yang Kita Inginkan

Berpegang kepada arah yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan konsep-konsep yang kita kembangkan dalam zaman Orde Baru ini, dan menghadapkannya kepada tantangan-tantangan masa depan, memungkinkan kita untuk mengadakan visualisasi masa depan yang kita inginkan di awal abad mendatang. Adalah jelas bahwa nilai kekeluargaan yang bersifat integralistik serta jabarannya dalam Orde Baru akan kita mantapkan lebih lanjut untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan itu.

Dalam hubungan ini betapa pentingnya peranan manusia Indonesia untuk dapat melanjutkan perjuangan bangsanya menuju cita-cita yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara ini dan telah disiapkan kerangka landasannya sebagai modal dan bekal bagi tinggal landas selanjutnya.

Erat berkaitan dengan manusia yang perlu memiliki kualitas yang memadai dan memenuhi kebutuhan, maka dunia pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya perlu memperoleh perhatian yang makin besar dalam tahap-tahap pembangunan yang akan datang.

Dengan kebijaksanaan pendidikan nasional yang secara langsung diabdikan kepada kepentingan pembangunan nasional, maka perlu dikembangkan penghargaan yang lebih besar kepada ilmu pengetahuan, teknologi dan prestasi dari yang selama ini ada. Masyarakat kita yang selama ini lebih berorientasi kepada status, secara bertahap perlu diarahkan kepada masyarakat yang menghargai kreativitas, prakarsa serta prestasi, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Kita perlu memberi dorongan ke arah itu sehingga orang-orang yang berbakat dan berprestasi ini dapat menaiki jenjang sampai pada taraf yang tertinggi. Hal ini berarti perlu dibuka sistem yang kompetitif dan terbuka bagi siapa saja tanpa prioritas bagi siapapun juga.

Di samping itu dengan tetap memperkukuh ketahanan nasional kita, bangsa kita harus lebih aktif berhubungan ke luar negeri, bukan saja untuk menjual barang-barang kita secara lebih kompetitif, tetapi juga untuk mengambil alih unsur-unsur kemajuan bangsa lain yang dapat memajukan bangsa kita.

Khusus untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita perlu lebih banyak menyerap kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa lain, terutama negeri-negeri industri maju. Hanya dalam ilmu-ilmu sosial kita perlu lebih banyak mengadakan penelitian sendiri dalam masyarakat kita, untuk menemukan dalil-dalil yang berakar dalam nilai-nilai budaya bangsa kita sendiri.

Visualisasi kita mengenai masa depan, dengan ancar-ancar waktu sampai awal abad ke-21 mendatang, jelas memerlukan dukungan analisa yang lebih tajam mengenai mungkin tidaknya hal itu dilaksanakan, seperti semacam suatu social feasibility study, atau mungkin juga semacam suatu policy analysis.

Seperti pernah diutarakan oleh Presiden Soeharto dalam pidato beliau dalam dies natalis ke-25 Universitas Gajahmada di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1974, maka pendekatannya harus dari berbagai sudut dan menserasikan berbagai disiplin ilmu, sebagai pendekatan interdisipliner. Dengan pendekatan interdisipliner ini akan lebih mudah kita mendapatkan pandangan komprehensif integral yang menjadi ciri dari negara kekeluargaan yang bersifat integralistik itu.

Pengalaman negara-negara lain perlu kita pelajari dan kita ambil manfaatnya, agar supaya kita dapat menentukan dosis yang setepat-tepatnya dalam menyelenggarakan rekayasa sosial yang kita perlukan.

Adalah merupakan suatu kehormatan bagi para ahli ilmu sosial bila dapat mengemukakan berbagai alternatif yang dapat dipilih untuk melaksanakan suatu kehendak nasional yang kita inginkan. Hal ini tidak berarti bahwa para ahli ilmu sosial sendiri tidak boleh menawarkan pilihan yang lebih baik bagi kehendak nasional kita itu. Yang menjadi bidang para politisi serta para praktisi adalah merumuskan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Yang menjadi tugas para ilmuwan adalah memberikan analisa mengenai mungkin tidaknya hal itu dilaksanakan, dan jika mungkin bagaimana caranya, dan jika tidak mungkin, mengapa dan apa alternatif lainnya yang dapat dipilih. □

Digitized by Google

HONDA®

Selamat Natal dan Tahun Baru 1987

DIREKSI
&
SEGENAP KARYAWAN

P.T. Imora Motor

JL. P. JAYAKARTA No. 50, JAKARTA - PUSAT.
TELP. 6394337 - 6394599.

Digitized by Google

Catatan Kecil Dari Kunjungan DPP Golkar Ke Malaysia: Tantangan Masalah "Berbilang Kaum"

Persoalan paling mendasar dari pertumbuhan suatu bangsa, adalah berapa besar kadar osmosa yang melarutkan kepelbagaian etnik dalam masyarakat bangsa bersangkutan. Semakin banyak kelompok etnik dengan berbagai kepelbagaian dalam suatu bangsa, semakin tinggi kadar osmosa yang diperlukan untuk melarutkan kepelbagaian itu menjadi - sebuah gumpalan kesatuan yang mengeras batu.

Sulit menemukan satu negara bangsa di dunia ini, yang bebas dari kepelbagaian suku, ras, bahasa dan budaya. Sebagai negara bangsa, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi; yaitu ; adanya kesatuan bahasa. Ketiga syarat ini memang selalu terpenuhi ketika akan melahirkan sebuah negara. Tanpa terlalu mempersoalkan kepelbagaian yang ada dalam negara itu. Pendeknya, jika ketiga syarat tersebut telah dipenuhi, maka jadilah sebuah negara.

Akibatnya, tidak sedikit negara di dunia ini selalu dihadapkan pada masalah-masalah Nasional yang menyangkut kepelbagaian yang oleh orang Malaysia disebut sebagai "Berbilang Kaum" itu tadi.

Negara Malaysia, memang memenuhi ketiga persyaratan di atas. Ada kesatuan wilayah, ada kesatuan politik dan ada kesatuan bahasa. Tetapi secara nasional, mereka mulai menghadapi tantangan besar, yang semula ketika merdeka belum sempat di atasi. Ketika negara itu sibuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam situasi resesi dunia yang berkepanjangan seperti sekarang, ia dihadapkan pada persoalan *berbilang kaum*.

Negara Malaysia, memang memenuhi ketiga persyaratan di atas. Ada kesatuan wilayah, ada kesatuan politik dan ada kesatuan bahasa. Tetapi secara nasional, mereka mulai menghadapi tantangan besar, yang semula ketika merdeka belum sempat di atasi. Ketika negara itu sibuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam situasi resesi dunia yang berkepanjangan seperti sekarang, ia dihadapkan pada persoalan *berbilang kaum.*

Hampir setiap Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) Malaysia mengalami kegoncangan politik akibat kepelbahagaian itu. Ketika Tunku Abdurachman memerintah (Perdana Menteri Malaysia yang pertama), ia harus bergumul menghadapi bentrokan rasial antara kaum Melayu melawan kaum Cina, yang dikenal sebagai Peristiwa 13 Mei 1969. Sebuah kerusuhan berdarah lahir, akibat kepelbagai yang belum tersentuh sejak negara itu merdeka.

Stabilitas dan kepentingan Nasional terancam

Kepelbagaian — berbilang kaum — yang kembali — muncul setelah 18 tahun sengaja dilupakan itu, cukup menggelisahkan bagi stabilitas dan kepentingan nasional — Malaysia sekarang. Mahathir ditantang untuk menghadapi masalah ini, pada saat ia baru mulai menyusun program pembangunan nasional Malaysia selama masa jabatan keduanya sekarang ini. Ia sedang diuji, apakah cukup mampu mencegah terulangnya Peristiwa 13 Mei 1969 atau justru pada masa kepemimpinannya sekarang ini, peristiwa tersebut akan kembali berulang.

Pertanyaan paling menarik dari situasi Nasional Malaysia dewasa ini, apakah Mahathir dengan sikap moderatnya dalam memimpin bangsa Malaysia, mampu meredamkan benturan kepelbagaian rasial itu? Selama enam tahun kepemimpinan politik Mahathir, ia dihadapkan pada berbagai masalah yang lahir akibat kepelbagaian masyarakatnya. Awal tahun 1985, kepemimpinan politik Mahathir ditantang oleh apa yang disebut sebagai "Islam fundamentalis". Mahathir sendiri menganggap mereka yang menyebut diri sebagai Islam fundamentalis itu, justru sebaliknya. Karena mereka tidak menjalankan asas yang paling mendasar (fundamental) dalam ajaran agama Islam.

Pertengahan tahun 1985, kembali kepemimpinan politik Mahathir dihadapkan pada masalah MCA (Malaysia Chines Association), karena kelompok ini merasa kepentingan mereka diabaikan; terlalu banyak memberikan "provilege" (hak istimewa) kepada kaum Melayu. Ia ternyata mampu menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Tahun 1986, kembali kepemimpinan politik Mahathir diuji, ketika ia baru memulai masa jabatan Perdana Menterinya yang kedua. Ia dihadapkan pada masalah berbilang kaum, sebuah masalah klasik yang selalu muncul dalam perjalanan sejarah negara-negara berkembang. Mahathir nampak tegar menghadapi masalah kepelbagaian etnik ini.

Dengan keberhasilannya mengatasi masalah "fundamentalis dan masalah MCA, nampaknya Mahathir akan mampu pula mengatasi masalah berbilang kaum se-

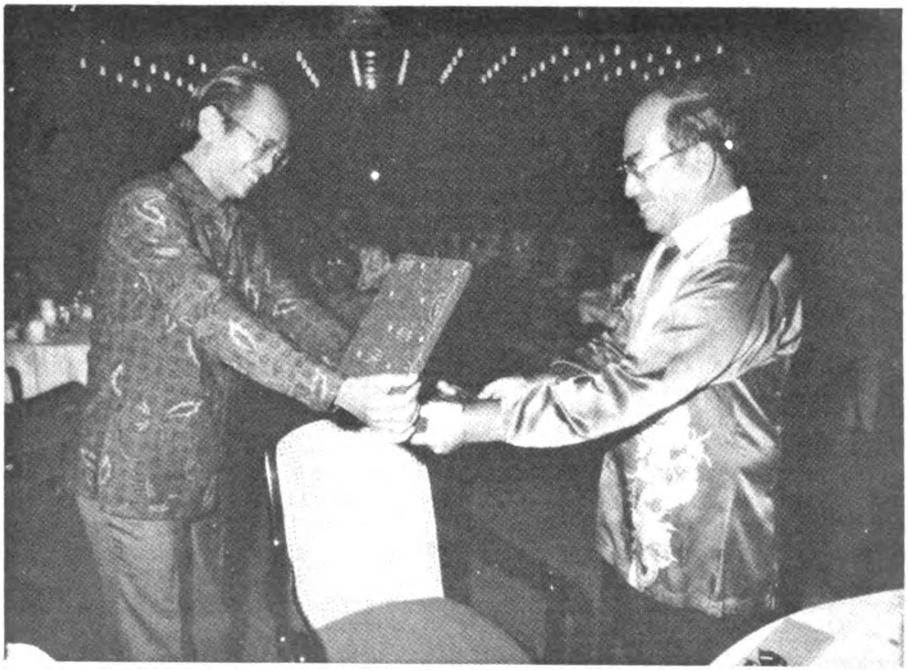

CENDERAMATA: Sekjen DPP Golkar memberikan cenderamata berupa plakat Golkar kepada Setia Usaha Agong UMNO Datuk Seri Sanusi Junet.

Digitized by Google

Ketua Parlemen Malaysia menerima Sekjen. DPP Golkar dan rombongan.

DITERIMA MAHATHIR: Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohamad selama satu setengah jam menerima rombongan DPP Golkar. (dari kiri) Dr. Mahathir Mohamad, Sarwono Kusumaatmadja, Himawan Sutanto Dubes RI di Malaysia.

karang ini. Untuk itu beberapa masalah yang rasanya perlu mendapat prioritas dalam pembangunan nasional Malaysia adalah :

— Meningkatkan kemampuan ekonomi kaum Melayu agar dapat memperkecil kesenjangan sosial antara kaum Melayu dengan kaum Cina.

— Mendorong lahirnya rasa kebangsaan/Nasionalisme Malaysia, melalui suatu keseimbangan hak dan kewajiban antar kaum sesuai dengan realitas politik yang ada dalam masyarakat. Khususnya antara kaum Melayu dan kaum Cina.

— Merumuskan suatu kebijaksanaan Nasional tentang bahasa persatuan yang berlaku secara nasional sebagai bahasa pengantar baik secara formal (digunakan di kantor-kantor pemerintah, dalam lingkungan dunia pendidikan dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi) maupun dalam pergaulan antar kaum. Tanpa menghilangkan identitas kaumnya. Misalnya : Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa Nasional.

— Faktor yang paling penting adalah mendorong terjadinya pembauran antar kaum, terutama antara kaum Melayu dengan kaum Cina, yang merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat.

Itulah beberapa catatan kecil yang berhasil direkam rombongan Sekretaris Jenderal DPP GOLKAR yang terdiri dari : Ir. Sarwono Kusumaatmadja (Sekjen), David Napitupulu (Wakil Sekjen) dan Anang Adenansi (Ketua Departemen Penerangan, Penerbitan dan Mass Media), selama kunjungan tiga harinya di Malaysia bulan lalu. Kunjungan rombongan Sekjen DPP GOLKAR itu, dalam rangka memenuhi undangan Setia Usaha Agung Partai UMNO, Datuk Sanusi Juned. Yang menarik dari kunjungan itu adalah pembicaraan yang dilakukan antara rombongan DPP GOLKAR dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Hubungan dua negara serumpun

PM. Mahathir dalam pertemuan itu mengharapkan, hubungan antara kedua negara serumpun Melayu ini, tidak hanya sampai pada generasi sekarang tetapi lebih-lebih lagi untuk masa mendatang. Untuk itu diharapkan pertemuan dan saling berkunjung antara generasi muda kedua negara terus dijalin.

Kunjungan kehormatan kepada PM Malaysia tersebut didampingi oleh Dubes RI untuk Malaysia Himawan Sutanto. Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP GOLKAR Ir. Sarwono Kusumaatmaja dalam pertemuan dengan jajaran UMNO bertempat di Kantor Pusat UMNO yang megah itu mengatakan: "Kerjasama antara kedua negara memang baik. Tetapi hendaknya diingat bahwa masing-masing negara mempunyai kedaulatan serta mempunyai sistem sosial sendiri-sendiri.

Sehingga dalam menjalin kerjasama bilateral, kedua negara harus pula menghormati kedaulatan dan sistem sosial yang dianut oleh masing-masing negara. Yang penting, kerjasama bilateral itu harus tetap melihat kepentingan Asia Tenggara secara keseluruhan.

Kebersamaan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara ini harus dapat kita pelihara keutuhannya." □ ANANG ADENANSI

Digitized by Google

Hak-hak Asasi Manusia, Masalah Yang Masih Terus Dibahas

Hak-hak asasi manusia di Indonesia bersumber pada Pancasila.

Masalah hak-hak asasi manusia bukanlah masalah yang baru. Perdebatan tentang hal ini telah dimulai sejak beberapa abad yang lalu. Sehabis perang dunia II, masalah hak-hak asasi ini semakin muncul ke permukaan bersamaan dengan semakin banyaknya negara-negara terjajah yang berhasil melepaskan diri dari rantai penjajah. Dan sampai kini pun hak asasi tetap masih menjadi masalah yang aktual sejalan dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks.

Memperingati lahirnya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia bulan Desember yang lalu DPP Golkar dalam hal ini Departemen Hubungan Luar Negeri telah mengadakan diskusi panel tentang Hak-hak Azasi Manusia, bertempat di kantor DPP Golkar di Jakarta. Diskusi yang dibuka oleh Ketua DPP Golkar R.H. Soegandhi itu mengetengahkan 3 orang pembicara yakni masing-masing Dr. Boer Mouna (Kepala Litbang Politik Luar Negeri Deplu), Jusuf Wanandi SH (Ketua Dep. Hublu DPP Golkar), dan Albert Hasibuan SH (Ketua Dep. Cendekiawan DPP Golkar).

Pembicara pertama Dr. Boer Mauna yang membawakan makalah berjudul "Perkembangan Hak-hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa" mengawali ceramahnya dengan menguraikan tentang timbulnya Hukum Internasional Hak-hak Azasi Manusia. Dikatakannya bahwa hukum internasional diciptakan untuk mengatur hubungan dan kegiatan negara-negara sebagai subjek utamanya. Pada mulanya hukum internasional tidak mau mencampuri perlakuan dari suatu negara terhadap individu-individu atau kelompok minoritas yang berada di wilayah kedaulatan negara tersebut. Akan tetapi karena sering terjadi perlakuan yang tidak wajar yang dilakukan suatu negara terhadap warga negaranya, maka timbul desakan-desakan agar negara-negara melindungi, menjamin, dan bahkan mengembangkan pelaksanaan hak asasi melalui perjanjian-perjanjian multilateral yang dibuatnya atas kehendak sendiri. Melalui proses ini maka berkembanglah suatu cabang baru hukum internasional yang disebut *Internasional Law of Human Rights.* Hukum ini berkembang pesat pada bagian kedua abad ke 20 yakni setelah berakhirnya perang dunia II dan terutama setelah lahirnya PBB.

Hak Asasi Manusia dalam Sistem PBB

PBB yang mempunyai tugas utama mencegah perang dan memelihara perdamaian, menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai salah satu prioritas utamanya. Guna mencapai tujuan tersebut, PBB membentuk organ-organ subsider untuk menangani langsung masalah-masalah hak asasi. Dalam kaitan ini Dr. Boer Mauna menyebutkan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dalam beberapa organ PBB, khususnya yang menyangkut hak penentuan nasib sendiri seperti misalnya dalam Komite Dekolonisasi yang didirikan tahun 1961, Dewan PBB untuk Namibia (1967), Komite Palestina (1975), serta Komite Khusus Anti Apartheid (1962). Ditegaskannya bahwa keanggotaan Indonesia dalam organ-organ itu merupakan bukti bahwa Indonesia dalam politik luar negeri benar-benar melaksanakan apa yang diamanatkan Undang Undang Dasar, khususnya yang tercantum pada alinea I Pembukaan UUD 1945. Di samping ke empat organ tersebut masih terdapat organ lain yang menyangkut hak-hak asasi di negara-negara yang sudah merdeka, seperti antara lain Komisi Hak-hak asasi Manusia, Komite tentang Hak-hak Budaya, Sosial dan Ekonomi, dan Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial.

Oleh Dr. Boer Mauna lebih lanjut diuraikan tentang produk-produk berupa dokumen atau putusan-putusan penting PBB yang merupakan instrumen dalam pelaksanaan hak-hak asasi manusia di dunia. Dokumen pertama yang dikeluarkan PBB mengenai itu adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang dicanangkan tanggal 10 Desember 1948, suatu deklarasi terdiri dari 30 pasal yang memuat hak-hak asasi dan kebebasan pokok yang dimiliki oleh semua individu tanpa diskriminasi apapun. Filosofi yang mendasari Deklarasi ini adalah: *All human beings are born free and equal in dignity and rights.* Lebih dari 50 negara memasukkan ketentuan-ketentuan Deklarasi tersebut ke dalam konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan nasionalnya. Menurut Dr. Boer Mauna sampai sekarang masih menjadi perdebatan tentang status juridis Deklarasi itu: sebagian mengatakan Deklarasi tidak mempunyai kekuatan mengikat, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa Deklarasi mengikat semua negara baik anggota maupun bukan anggota PBB. Terlepas dari masalah itu, menurutnya, bagaimanapun Deklarasi mempunyai kekuatan moral dan politik yang besar dalam melindungi dan memajukan hak-hak asasi di banyak negara dunia. Semenjak keluarnya Deklarasi itu sampai saat ini sudah terdapat 20 instrumen juridis mengenai hak asasi manusia termasuk berbagai deklarasi mengenai perlindungan hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, penghapusan diskriminasi dan lain-lain. Oleh Pejabat Departemen Luar Negeri itu disebutkan 2 buah instrumen penting di antaranya. Yang pertama adalah *the International Covenant on Civil and Political Rights,* yang merupakan penjabaran hak-hak sipil dan politik dari Deklarasi. Bila status juridis Deklarasi masih diragukan, maka *Covenant* ini betul-betul mengikat secara hukum bagi negara-negara pihak yang bersangkutan. Yang kedua adalah *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,* yang juga merupakan penjabaran Deklarasi.

Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Indonesia sampai saat ini belum masuk menjadi pihak pada kedua *international covenant* dimaksud.

Campur Tangan Urusan Dalam Negeri

Sebagai negara Pancasila, Indonesia mendukung prinsip-prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta menghargai usaha-usaha PBB dalam hal tersebut. Namun demikian, Indonesia tidak atau belum menjadi pihak pada sebagian besar konvensi yang dihasilkan oleh PBB sehubungan dengan hak-hak asasi itu. Menurut Dr. Boer Mauna hal ini disebabkan oleh 2 alasan pokok. Yang pertama adalah bahwa negara-negara di dunia tidak semuanya memiliki tradisi, kebudayaan, tingkat ekonomi dan sosial yang sama. Oleh sebab itu tidaklah mudah memberlakukan semua ketentuan yag terdapat dalam konvensi-konvensi tersebut pada semua negara di dunia, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Alasan yang kedua ialah perlunya dipertimbangkan lebih lanjut apakah ketentuan-ketentuan konvensi itu bukan merupakan campurtangan terhadap urusan dalam negeri suatu negara. "Indonesia men-

Digitized by Google

Hak-hak azasi manusia. Pendekatan dari segi pembangunan.

dukung penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, namun tidak dapat membenarkan hak-hak asasi tersebut digunakan untuk mencampuri urusan dalam negeri suatu negara," tegas Dr Boer Mauna. "Menjadi pihak pada suatu konvensi yang mengatur hak-hak asasi manusia bukanlah sesuatu hal yang mudah karena memerlukan persiapan dan pengkajian yang mendalam. Semuanya ini tentu saja akan diputuskan oleh kepentingan Nasional," ujar Boer Mauna mengakhiri ceramahnya.

Sementara itu pembicara yang lain Albert Hasibuan SH mengungkapkan bahwa Hak-hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru atau barang import, walaupun ada kesamaan dengan beberapa pemikiran yang bersifat internasional. Hak-hak asasi manusia di Indonesia dapat dikaitkan dengan sumbernya sendiri yakni kultur Pancasila yang kini sedang kita kembangkan secara lebih intensif. Menurut Ketua Umum Persahi itu UUD 1945 hanya memuat beberapa pasal, namun bila dihubungkan dengan Pancasila, pada hakekatnya secara konstitusional negara kita menganut prinsip-prinsip hak asasi secara utuh. "Hak-hak asasi manusia yang harus dilaksanakan disini berasal dari falsafah dasar kita sendiri, yaitu Pancasila," tutur Albert. Selanjutnya dikatakannya bila kita bicara bahwa hak-hak asasi manusia di Indonesia bersumber pada Pancasila, maka perlu diangkat satu ketentuan secara lebih sentral, yakni ketentuan 'asas keseimbangan'. Asas ini memberikan tekanan yang sama kuat antara hak dan kewajiban, antara hak asasi individu dan hak masyarakat, antara hak-hak ekonomi, hak-hak politik dan hak-hak hukum. Oleh karena itu, lanjutnya, berdasarkan asas keseimbangan dalam hak-hak asasi ini, kita akan bisa berbicara tentang adanya hak-hak kebebasan, hak-hak demokrasi dan sebagainya, dalam keseimbangan dengan pelaksanaan hak-hak ekonomi dalam pembangunan sekarang ini. "Semua itu pada hakikatnya merupakan jaminan untuk pelaksanaan satu tujuan yaitu agar tercapai pembangunan manusia seutuhnya sebagai pengalaman Pancasila," demikian Albert Hasibuan.

Hak asasi dan pembangunan

Dalam makalahnya yang berjudul "Indonesia dan penegakan hak-hak asasi manusia", Albert Hasibuan lebih condong melihat Hak-hak asasi manusia dengan pendekatan dari segi pembangunan. Pembangunan diletakkan secara sentral dalam kaitan dengan pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Menurutnya, pembangunan dalam arti yang luas mulai pula dipersoalkan kaitannya dengan hak-hak asasi manusia. Perhatian terhadap kemiskinan sebagai suatu produk pembangunan yang tidak menghiraukan hak-hak asasi manusia semakin meluas. Lahirnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* di tahun 1966 haruslah dinilai dalam perspektif ini. Disebutnya pula gejala lain bahwa ketidakadilan ekonomi internasional dengan semakin dominannya perusahaan-perusahaan multinasional secara tajam disoroti. Telah dipertanyakan pula sejauh mana tata ekonomi internasional peka terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan sejauh mana peran bantuan luar negeri turut membantu perlindungan hak-hak asasi manusia.

amka

PT AMARTA KARYA PERSERO

PERALATAN - KONSTRUKSI BAJA - KONTRAKTOR
EQUIPMENT-STEEL CONSTRUCTION-CONTRACTOR

HEAD OFFICE : JL. Dr. SURATMO NO. 1 JAKARTA 10730 Telp. : (021) 6597014-6399667-6399668 Telex : 41438 PALPU JAKARTA

BRANCH OFFICE : Jakarta — (021) 6597014. 6399667-6399668 Bekasi — (99) 71667. Bandung — (022) 56735. Semarang — (024) 26109. Yogyakarta — (0274) 2938.

Surabaya — (031) 68017 Kupang — (0391) 21482. Kendari — (0401) 21767. Palu — (0451) 26646. Ambon (0911) 42743.

DEVISION : BEKASI (099) 71667-72917 — SEMARANG (024) 26636-20577

MENSUKSESKAN PEMILU 1987 BERARTI IKUT MENEGAKKAN NEGARA KESATUAN R.I.
YANG BERAZASKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DI BAWAH PEMERINTAHAN ORDE BARU

Digitized by Google

Kesemuanya itu menunjukkan berkembangnya pengertian yang lebih luas tentang hak-hak asasi manusia, yang selama ini sering hanya dipandang dari pengertian sempit, yakni seolah-olah hanya menyangkut hak-hak sipil dan politik saja. Dalam hubungan ini Albert Hasibuan menekankan perlunya diperluas tafsiran terhadap hak-hak asasi manusia, karena sesungguhnya hak-hak asasi manusia merupakan masalah sentral kita. Menurutnya, Indonesia dengan pembangunan yang tengah dilaksanakan selama ini dapat dikatakan berusaha mengarah kepada tafsiran luas terhadap hak-hak asasi manusia. Pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kultural sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan hukum dan politik. "Adalah tetap tidak berkeadilan jika kebutuhan-kebutuhan ekonomi dikesampingkan, demikian pula sebaliknya," ujarnya. Disebutkannya pula bahwa di sementara negara tertentu sering kali "pembangunan" dijadikan alasan untuk menelantarkan hak-hak asasi manusia. Malah pembangunan sering ditafsirkan sebagai 'destabilising factor' yang cenderung melanggar hak-hak asasi manusia. Misalnya, isyu landreform berakibat terlanggarnya beberapa hak-hak hukum tuan tanah yang bisa jadi menghasilkan efek sampingan.

Berdasarkan hal-hal itu Albert menekankan bahwa hak-hak dasar ekonomi yang sering disamakan dengan *welfare rights* - harus secara tegas diperjuangkan, tak saja di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Penyempurnaan struktur ekonomi kadang-kadang perlu diadakan, di mana preferensi diberikan kepada para pengusaha kecil atau sektor informal, teknologi tepat, dan petani gurem. Bahkan, bantuan luar negeri juga harus dijadikan hak dunia ketiga, bukan lagi sekedar - *charity*. "Hal-hal tersebut membawa kita untuk menginterpretasikan kembali hak-hak asasi manusia, bahwa hak-hak asasi manusia bukan sekedar jargon kosong tetapi juga pemberantasan kemiskinan ekonomi dan kultural. Hak-hak asasi bukan sesuatu yang utopis, tetapi realistis," kata tokoh pengacara itu. Selanjutnya dikatakan bahwa dengan proses pembangunan sebagai pengalaman Pancasila dan bertujuan membangun manusia yang utuh, maka dari sudut hak-hak asasi manusia, Indonesia dapat dikatakan telah berusaha merumuskan suatu definisi yang tepat. Hal ini tampak pada penekanan keseimbangan antara hak-hak politik serta hukum, dan hak-hak ekonomi serta kultural.

Menghadapi keadaan dewasa ini, Albert Hasibuan berpendapat bahwa pembangunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan Hak asasi manusia itu akan lebih relevan bila didekati dari sudut *basic needs*. - Mengenai hal ini dikatakannya bahwa agaknya kita sudah terlalu lama bicara soal makro dan kurang pada soal mikro. "Pemenuhan hak-hak asasi manusia tidak selalu harus dimulai dengan yang besar dan mewah, tetapi dimulai dari yang kecil seperti nasi, sayur mayur dan teh hangat," ujarnya. Dinilainya pula dalam hubungan ini bahwa seruan hidup sederhana bisa menjadi relevan. "Seruan hidup sederhana bukan saja usaha untuk lebih solider dengan rakyat yang masih berkekurangan dan miskin, tetapi juga usaha untuk pelaksanaan hak-hak asasinya dengan konsekuen," demikian Albert Hasibuan.

International Humanitarian Law

Jusuf Wanandi SH yang berbicara tanpa makalah dalam diskusi itu menguraikan tentang International Humanitarian Law. Menurutnya Hukum yang merupakan Konvensi Jeneva ini berhubungan erat pula dengan pelaksanaan Hak-hak asasi, yang membela serta memberikan perlindungan bagi orang yang menderita atau terkena akibat dari keadaan konflik internasional atau perang antar negara. Di tahun 1977 Konvensi ini telah dilengkapi dengan protokol yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam hal terjadi konflik nasional atau non-internasional seperti misalnya perang saudara dalam suatu negara.

Lebih lanjut Jusuf Wanandi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan protokol itu dimungkinkan dihadirkannya Palang Merah Internasional guna ikut menghilangkan penderitaan orang-orang yang terkena akibat terjadinya konflik tersebut. Bahkan, atas prakarsa dari negeri yang bersangkutan maka dalam keadaan yang belum berbentuk perang saudara pun kehadiran Palang Merah Internasional itu dimungkinkan. Diberikannya contoh prakarsa pemerintah Indonesia mengundang Palang Merah Internasional dalam kasus tahanan G30S/PKI. Secara teratur dan bertahap Palang Merah Internasional datang ke Indonesia dan mengunjungi para tahanan tersebut. Laporan hasil kerjanya dilaporkan kepada pemerintah Indonesia berdasarkan hasil wawancara dengan para tahanan. Demikian pula kembali pemerintah Indonesia menghadirkan Palang Merah Internasional dalam masalah tahanan akibat kasus Timor Timur. Seperti dikatakan oleh Direktur CSIS itu, hasil-hasil laporan dari Palang Merah Internasional tersebut bermanfaat bagi pemerintah Indonesia sebagai masukan bagi pemecahan persoalan dalam perkembangan politik di negeri ini. Misalnya dalam melahirkan keputusan pembebasan para tahanan politik G30S/PKI. Di samping itu juga memberikan kepercayaan kepada rakyat sendiri bahwa Pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, seperti khususnya yang terjadi di Timtim. Upaya serupa ini tentu pula mempunyai dampak atau manfaat bagi RI dalam kepentingan internasional.

Dengan demikian *International Humanitarian Law* mencakup pembelaan dan perlindungan hak-hak asasi bagi orang-orang yang menderita akibat kasus konflik internasional, meliputi mereka yang sakit dan luka dalam perang termasuk dalam pertempuran di laut, para tawanan perang, serta perlindungan terhadap orang-orang sipil yang tidak ikut dalam perang tersebut. Dan lebih luas lagi mencakup pula perlindungan hak-hak asasi bagi mereka yang menderita akibat konflik nasional seperti perang saudara. Demikian antara lain uraian Yusuf Wanandi.

Diskusi yang dilakukan hari itu merupakan bagian dari kegiatan periodik Departemen Hubungan Luar Negeri DPP Golkar, dhi. dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengkajian Masalah-masalah Internasional yang diketuai oleh Marzuki Darusman SH. Ikut serta akif dalam diskusi kali ini adalah unsur-unsur praktisi hukum (antara lain T. Mulya Lubis SH dari LBH), unsur akademisi dari perguruan tinggi, para anggota DPR, unsur Lemhanas, unsur kekuatan sospol (antara lain Dudy Singadilaga dari PDI), serta unsur-unsur ormas seperti HMI, GMKI, GMNI, dan lain-lain. ☐ TA.PURNOMO

Digitized by Google

Kaum Ibu Berperan Strategis

Pendidikan Watak dan Akhlak Berada di Tangan Ibu

Banyak kekurangan, kelemahan dan hambatan dalam pembangunan yang ditemukan dalam masyarakat terdapat di bidang akhlak dan mental. Hal ini merupakan akibat yang tak terelakkan dari pergolakan-pergolakan yang dialami selaku bangsa dalam kurang lebih selama lima dasa warsa terakhir. Pergolakan-pergolakan itu menyebabkan merosotnya norma-norma sosial yang tadinya diterima berlaku oleh masyarakat, tapi bersamaan dengan itu proses modernisasi sebagai tuntutan pembangunan memerlukan norma-norma baru untuk dapat mensukseskan pembangunan.

Ungkapan di atas dikemukakan oleh Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Ibu di Jakarta Desember bulan lalu. Sehubungan dengan hal tersebut Wakil Presiden mengingatkan masyarakat terutama kaum Ibu terhadap tugas amat berat yakni mempersiapkan anak-anak sebagai generasi muda dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi masa depan. Menurut Wakil Presiden, dalam membina anak dan bangsa yang paling penting adalah pembinaan watak, idealisme serta sikap dan pandangan hidupnya agar mampu menghadapi masa depannya selaku individu maupun sebagai masyarakat dan bangsa. Ditegaskan bahwa pendidikan di bidang pengetahuan dan ketrampilan diperoleh anak-anak di sekolah. Namun pendidikan akhlak dan watak didapat di lingkungan rumah tangga dari orang tuanya terutama dari kaum Ibu. Demikian Wakil Presiden.

Masih terkait dengan peringatan Hari Ibu tahun 1986 serta masalah peran kaum ibu seperti dinyatakan Wakil Presiden, Media Karya mengadakan wawancara dengan 2 orang Ibu yang juga isteri tokoh-tokoh di kalangan ABRI, masing-masing *Ny. Tuti Sutiawati Try Sutrisno*, dan - *Ny.Tilly Kasenda*. Untuk melengkapi laporan ini juga diadakan wawancara dengan seorang wanita yang berkarya, yakni *Nn. Ida Wara Suprida, SH*, seorang pengacara.

Hidup Sederhana

Ny. Try Sutrisno yang berputera tujuh orang itu menuturkan bahwa dirinya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Ia pernah menjadi seorang guru, profesi yang sampai kini sebenarnya masih disukainya. Suaminya, Try Sutrisno yang KASAD itu, juga berasal dari keluarga sederhana. Oleh sebab itu wajar bila pasangan ini membesarkan putra-putrinya dengan pendidikan hidup sederhana pula. Kepada anak-anaknya ditanamkannya penalaran, bahwa mereka semua harus selalu sadar serta mawas diri. Segala sesuatu yang ada pada diri keluarga saat ini tidaklah datang dengan sendirinya, tetapi semuanya itu diperoleh melalui suatu proses yang oleh Ny. Try Sutrisno disebut perjuangan. Menurutnya, pengertian seperti itu akan memberikan kesadaran kepada anak-anaknya untuk tidak menyombongkan diri walaupun bapaknya seorang pejabat yang mendapatkan kepercayaan dari negara. Justru keluarga termasuk anak-anak harus ikut menjaga kepercayaan itu. Kepada anak-anaknya Ny. Try Sutrisno menekankan bahwa dana yang disediakan bagi mereka terutama adalah untuk menuntut ilmu dan bukan buat foya-foya. Pendidikan kepanduan/Pramuka di wariskan kepada anak-anak, terlebih lagi Ny. Try kini juga seorang pembina Pramuka. Pengertian 'sederhana' tidak diartikan sebagai miskin. Oleh Ny. Try Sutrisno sederhana diartikan sebagai prasojo, wajar, tidak mencolok atau berlebih-lebihan. Sebagai contoh misalnya anak-anak tidak selalu harus di antar jemput dengan mobil

Mempersiapkan anak-anak sebagai generasi muda dengan sebaik-baiknya.

Ny. Try Sutrisno

Digitized by Google

sendiri, tetapi mereka harus biasa pula naik kendaraan umum seperti bus kota, berdesak-desak dengan warga masyarakat yang lain. Dengan demikian mereka akan lebih mengenal realita kehidupan masyarakat.

Senada dengan Ny. Try Sutrisno, pada kesempatan terpisah Ny. Tilly Kasenda, isteri KASAL, menuturkan bahwa ia menekankan kepada anak-anaknya untuk tidak bersikap sombong terhadap teman-teman. Dianjurkannya untuk bersikap akrab terhadap orang lain, karena sikap ini akan menumbuhkan persaudaraan. Ditanamkannya pula agar anak-anak bersikap tolong menolong terhadap orang lain sebagai sesama makhluk Tuhan. Baik Ny. Try Sutrisno maupun Ny. Kasenda sependapat tentang perlunya selalu dialog dengan anak-anak, perlunya dipelihara keterbukaan antara orang tua dengan anak-anak. Menurut Ny. Kasenda, seorang Ibu lebih dituntut untuk menyediakan waktu bagi anak-anaknya, betapa pun sibuknya Ibu itu.

Kepada anak-anaknya yang tentu saja tidak selalu sama kadar intelektual masing-masing, Ny. Try Sutrisno memberikan kebebasan untuk memilih cita-citanya sendiri. Mereka tidak dipaksakan untuk menjadi seorang sarjana misalnya. Yang penting harus disadarkan bahwa mereka kelak harus bertanggung jawab pada diri sendiri dan keluarganya.

Peran dalam Pembangunan

Menurut Ny. Try Sutrisno, seorang Ibu dapat lebih baik melaksanakan tugas-tugasnya yang berat itu apabila ditunjang oleh pengetahuan yang luas, yang diperoleh baik secara formal maupun non formal melalui pendidikan. Dengan berpengetahuan luas, seorang Ibu akan lebih mempunyai nilai di depan suami serta lebih mampu memahami perkembangan anak-anaknya sebagai makhluk sosial yang sedang berkembang.

"Wanita masa depan adalah yang mau belajar agar mampu mendengar suara zamannya, yang berarti mampu pula berbicara dengan anak-anak zamannya," ujar Bu Try. Dikatakannya lebih lanjut bahwa dengan bekal pengetahuan pula maka seorang Ibu dapat berperan dalam pembangunan masa depan negara dan bangsa. Namun hal ini bukan berarti ia menjadi tidak berperan dalam keluarganya. "Justru semakin tinggi pengetahuan seorang wanita, ia harus semakin sadar akan kodratnya," tegasnya. Sejalan dengan pendapat ini Ny. Tilly Kasenda mengatakan pula bahwa wanita pandai atau wanita karier, bagaimanapun ia tetap seorang wanita. "Entah dia itu profesor, atau polisi, penerbang, artis, atau pengusaha, seorang wanita tak dapat menghilangkan arti dan hakikatnya sebagai wanita," ujar Ny. Kasenda. Isteri KASAL yang berputera 3 orang itu lebih lanjut mengemukakan bahwa seorang wanita yang maju berpikirnya tidak pernah akan meninggalkan

Bersikap akrab terhadap sesama.

kewajibannya sebagai seorang Ibu. Pada kesempatan yang terpisah, Nn. Ida Wara Suprida SH membenarkan pendapat serupa itu. "Sebagai wanita, apa pun profesinya, ia tetap seorang perempuan, yang bagi suami ia adalah seorang isteri, dan bagi

Ny. Tilly Kasenda

anak-anak ia adalah Ibu," cetus pengacara yang masih berstatus nona ini.

Sebagai warga negara yang religius, baik Ny. Try Sutrisno maupun Ny. Kasenda kedua-duanya mengatakan pentingnya doa dan taqwa kepada Tuhan, yang diyakini akan membawa kekuatan bagi seorang Ibu dalam menjalankan tugasnya yang berat itu.

Masih mengenai peran dalam pembangunan, Nn. Ida Wara Suprida SH yang juga seorang dosen itu mengungkapkan bahwa sebagai seorang wanita dia merasa terpanggil untuk bersama-sama pria ikut berperan menentukan nasib dan masa depan bangsa. Masa depan bangsa tidak hanya teletak pada kaum pria, tetapi juga pada kaum wanita, ujarnya. Menurut Ida penjabaran dari hal itu adalah bahwa wanita harus dapat berperan di manapun ia berada, bagi lingkungan yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hubungan ini dikatakan bahwa pendidikan adalah syarat utama agar wanita mampu berandil dalam pembangunan. Ucapannya itu telah dibuktikan oleh Ida dengan peranan yang pernah dilakukan seperti dengan aktif dalam Karang Taruna, menjadi pelatih tari, dan terakhir sebagai dosen serta pengacara. Profesi sebagai pengacara dikejarnya atas dorongan hatinya untuk membela mereka yang lemah dan perlu dibela. Sedangkan profesi dosen agaknya mewaris dari ibunya yang dulu seorang guru. Mengenai nalurinya sebagai pendidik ini, Ida mengatakan: "Kita boleh hebat dengan segudang prestasi yang kita sandang. Tetapi kepada saudara-saudara kita yang menderita dan belum maju dalam bidang pendidikan, kita harus bersimpati dan membantu memberi nilai-nilai baru agar mereka dapat pula menjadi maju."

Perlu pula ditambahkan bahwa Nona Ida ini juga berkecimpung dalam organisasi, terakhir menjabat Wakil Ketua Gema Kosgoro Jakarta Timur dan juga sebagai Wakil Sekretaris AMPI DKI.

Ida Wara Suprida SH

Menutup laporan ini patut kiranya digarisbawahi ungkapan Ny. Try Sutrisno kepada Media Karya dalam wawancara tersebut sebagai berikut: "Yang penting bukan hanya sekedar mengenang kembali peristiwa 22 Desember, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan peranan kaum wanita Indonesia dalam pembangunan bangsa dan manusia seutuhnya; yang pada akhirnya, ternyata bahwa membangun bangsa harus dimulai dari membangun diri sendiri, membangun keluarga, di mana Ibu memegang peran strategis."□

Rendy MS/TA Purnomo

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

PENGAMEN DI CENDANA

Ulang tahun pernikahan ke-39 Presiden Soeharto dan Ibu Tien tahun ini lain dari biasanya. Kali ini sebuah rombongan pengamen atau disebut juga kelompok musik jalanan, diberi kesempatan ikut memeriahkan peringatan perkawinan itu.

Kelompok pengamen itu terdiri dari tiga orang pemuda yang biasa menghibur para pengunjung rumah makan di jalan Diponegoro—Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu mereka membawakan beberapa buah lagu ciptaan mereka sendiri, dan sempat pula berwawancara dengan Kepala Negara.

Kenduri peringatan hari pernikahan itu sendiri berlangsung sederhana dan hanya dihadiri oleh lingkungan keluarga dan sanak saudara terdekat. Acara itu diisi juga dengan penyerahan hadiah perlombaan olahraga dan pemberian bea siswa kepada anak-anak yatim piatu.

Dari pernikahan antara pemuda Soeharto yang pada tahun 1947 masih berpangkat Letnan Kolonel dengan Siti Hartinah, putri keluarga Sumoharyomo dari Solo, keluarga Soeharto dikaruniai enam orang putra-putri. Empat orang di antaranya telah berkeluarga dan memberikan sembilan orang cucu.

KONTRAK YANG TERLANJUR

Kali ini Menteri Sekretaris Negara, Sudharmono SH, bukan sedang bersafari Golkar, tetapi melakukan peninjauan di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) di Serpong—Jawa Barat. Yang punya hajat tentu tak salah lagi, Menteri Negara Riset dan Teknologi, BJ Habibie.

Mengapa Menristek merasa perlu mengundang Mensesneg datang ke Serpong, sudah bisa diduga. Seperti yang diuraikannya dalam kata sambutan selamat datang, bahwa di dalam menghadapi kebijaksanaan anggaran yang ketat belakangan ini, hendaknya proyek-proyek Puspiptek mendapat prioritas sehingga dapat dilanjutkan dengan selamat.

Masalahnya, kontrak-kontrak telah terlanjur ditandatangani. Kalau dihentikan bisa menimbulkan masalah lain yang lebih buruk. Sedangkan, proyek-proyek penelitian ilmu pengetahuan yang masih dalam perencanaan memang masih dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan dana, demikian alasan Habibie.

Sebagai Menteri yang membidangi administrasi anggaran dari departemen, badan, lembaga dan instansi-instansi pemerintah lainnya, Sudharmono memang merasa perlu juga untuk meninjau secara langsung apa saja kegiatan di Serpong itu. Komentarnya; "Kelihatannya, berdasarkan laporan, semua berjalan sesuai budget yang tersedia. Dan Insya Allah untuk tahun depan (1987 maksudnya/red), tentu bisa berlanjut sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada."

Di Serpong, Mensesneg meninjau antara lain kompleks pemukiman tenaga peneliti dan karyawan yang berjumlah 458 rumah, taman rekreasi, sarana olahraga, pendidikan, perbelanjaan dan kesehatan. Pada akhir peninjauannya dia sempat meresmikan sebuah mesjid di lingkungan Puspiptek, yakni masjid Bahrul Ulum atau Samudera Ilmu.

NATAL BERSAMA KORPRI

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan Natal di lingkungan Korps Pegawai Negeri RI (Korpri) tahun 1986 lalu dirayakan bersama oleh umat Kristen Protestan dan Katholik di balai Sidang Senayan—Jakarta.

Perayaan Natal bersama yang baru pertama kali ini diadakan mendapat sambutan besar dari warga Korpi yang merayakannya, terlihat dari padatnya pengunjung sehingga panitia merasa perlu membangun beberapa tenda darurat di luar gedung untuk menampung yang tidak kebagian tempat duduk di dalam.

Suatu keistimewaan lagi, perayaan Natal bersama itu dihadiri oleh Presiden Soeharto dan sejumlah Menteri serta pejabat tinggi negara lainnya. Dalam pidatonya Presiden menyerukan agar umat Nasrani khususnya dan umat beragama di Indonesia umumnya, dapat mempertebal rasa kesetiakawanan. Rasa kesetiakawanan itu, ujar Presiden, merupakan ungkapan yang paling dalam dari pandangan hidup Pancasila.

Suasana perayaan Natal bersama itu sendiri berlangsung sederhana namun khidmat. Ketua Panitia, AE Manihuruk, pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih atas kehadiran Presiden malam itu.

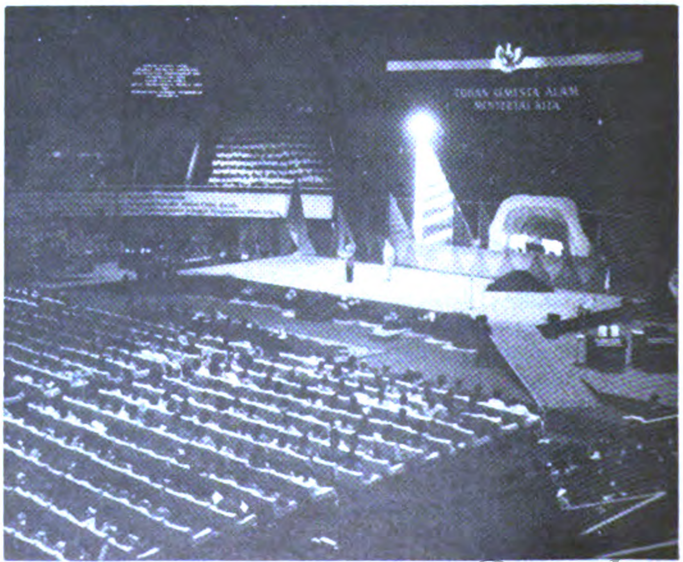

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

PETANI & PARTISIPASI MASYARAKAT

Setelah nelayan, giliran petani kini yang mendapat perhatian utama dari Presiden Soeharto. Kepala negara, dalam pertemuannya dengan para pemenang lomba Insus di Istana Negara pertengahan Desember lalu, mengingatkan kepada seluruh aparat pemerintah yang menangani pertanian agar benar-benar memberikan pelayanan dan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada petani.

Menurut Presiden, petani memerlukan rangsangan, dorongan dan suasana yang menggairahkan semangat kerja mereka, terutama di dalam tahun-tahun terakhir ini di mana dana bagi pembangunan pertanian jumlahnya terbatas. Dengan terciptanya suasana kerja yang menggairahkan, Presiden yakin bahwa Indonesia akan dapat mencapai kemajuan yang lebih jauh dalam pembangunan pertanian.

Hari berikutnya, 17 Desember lalu, di desa Arjasari—Pameungpeuk Garut, Presiden kembali tampil di tengah-tengah masyarakat desa untuk mengingatkan pentingnya usaha penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam kesempatan meresmikan Pekan Penghijauan Nasional (PPN) ke-26 itu, Kepala Negara mengatakan bahwa usaha tersebut sangat penting karena menyangkut nasib generasi kini dan generasi selanjutnya.

Pekan penghijauan nasional yang dimulai bertepatan dengan tibanya musim hujan itu memang mempunyai maksud tersendiri; "untuk mempertebal kesadaran kita mengenai mutlak perlunya langkah-langkah penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup. Kesadaran itu perlu dihidupkan terus karena setiap tahun masih saja terjadi bencana banjir, tanah longsor dan musibah lainnya," ujar Presiden.

Untuk mengatasi hal itu, menurut Presiden, partisipasi masyarakat perlu dibangkitkan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada. "Saya percaya," ujar Presiden," jika lembaga-lembaga masyarakat ini dapat tumbuh subur di mana-mana, maka bukan saja masalah penghijauan dan pemeliharaan lingkungan hidup dapat kita tangani sebaik-baiknya, tetapi juga masalah-masalah ekonomi dan pembangunan yang sedang menghadapi ujian berat akan dapat kita lampaui dengan selamat."

KESETIAKAWANAN SOSIAL

Dalam keadaan yang gawat bagi kelangsungan hidup negara, terasa bahwa kesetiakawanan merupakan faktor penentu keberhasilan perjuangan. Atas dasar kesadaran itu maka hari kebaktian sosial yang biasa diperingati setiap tanggal 20 Desember, kali ini dirubah namanya menjadi Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.

Hari kebaktian sosial itu sendiri diperingati — sebelumnya — untuk mengenang kembali lahirnya semangat pengorbanan masyarakat ketika terjadi penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Pada hari itu, perjuangan bangsa Indonesia — menurut catatan sejarah — mengalami apa yang disebut sebagai titik paling kritis sejak proklamasi 17 Agustus 1945.

Tetapi keesokan harinya, titik kritis itu berubah menjadi tonggak sejarah berkat rasa kesetiakawanan yang tiba-tiba saja muncul dengan kokoh, sehingga dalam waktu kurang lebih setahun bangsa Indonesia berhasil meraih kemenangannya.

Nah, situasi dewasa ini — menurut Wapres Umar Wirahadikusumah yang memimpin upacara peringatan tersebut di balai sidang Senayan — hampir persis sama dengan keadaan 38 tahun lalu, hanya masalah yang dihadapi saja yang berbeda. Keberhasilan pembangunan yang berhasil kita capai sejak Pelita I, menurut Wapres, kini menghadapi ujian yang cukup berat.

"Oleh karena itu, sekali lagi bangsa kita dituntut untuk menggalang kesetiakawanan yang kuat, yang didasarkan atas semangat membangun yang kita miliki bersama untuk mengejar tujuan tunggal dalam wujud kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.

Meskipun gemanya kurang dirasakan masyarakat, namun beberapa koran ibukota yang memandang betapa pentingnya kesetiakawanan nasional itu mengulas dalam tajuk rencana masing-masing, yang antara lain isinya menyerukan agar rasa kesetiakawanan itu dapat ditumbuhkan kembali. Harian Pelita misalnya, menulis bahwa tindak korupsi amat bertentangan dengan rasa kesetiakawanan karena korupsi mengandung makna kecongkakan sosial yang bisa mengundang kerawanan sosial.

Sementara harian Angkatan Bersenjata menganjurkan agar seluruh masyarakat dituntut keikutsertaannya dalam pembangunan nasional, berdasarkan kemampuan dan pengalaman masing-masing. Dengan mengamalkan kesetiakawanan sosial itu dapat diciptakan masyarakat egaliter yang digandrungi mayoritas orang kita, yaitu masyarakat yang tidak ditandai oleh kontradiksi yang tajam antara golongan berada dan yang tidak berpunya, tulis AB.

Digitized by Google

Kasus Dwimanda

Ketika dunia perbankan nasional sudah jauh lebih maju dan dipercayai masyarakat — terutama perbankan swasta — dibanding dengan belasan tahun silam, terjadilah kasus Bank Pasar Dwimanda. Nasabah dipanikkan karena menghilangnya pimpinan utama bank tersebut dan menurut dugaan sementara membawa kabur uang nasabah sekitar Rp. 20 milyar.

Mungkin karena bertepatan dengan akhir tahun, tampaknya tindakan mengatasi persoalan oleh yang berkompeten terlihat agak lamban. Maklum suasana serba cuti. Bank ini termasuk dalam pengawasan dan pembinaan Bank Rakyat Indonesia, maka tentu mata mengarah kepada bank pemerintah tersebut. Begitulah risiko pembina.

Lalu apa? Berpikir lebih jauh tentang masa depan perbankan, khususnya perbankan swasta, jelas perlu diambil langkah-langkah menyelamatkan kepentingan para nasabah. Sebab bila nasabah dikorbankan sebagai pihak yang merugi, efeknya akan luas dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap bank. Justru pada saat tingkat kepercayaan itu sudah berada pada tingkat yang memadai (Dan syukur, terakhir dikabarkan bahwa kepentingan nasabah akan dapat diselamatkan).

Tentunya, ini juga merupakan pelajaran dan pengalaman tambahan, bahwa mekanisme pengawasan dan pembinaan bank-bank pasar dan bank swasta pada umumnya masih dapat dan perlu ditingkatkan.

Arthaloka

Sengketa perdata PT MRE dengan Taspen, untuk tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimenangkan oleh PT MRE. Soal kalah menang dalam perkara perdata seperti ini semestinya bukanlah hal yang harus dianggap luar biasa. Akan tetapi, mendahului putusan perdata ini, ada vonnis pidana dijatuhkan oleh pengadilan yang sama terhadap dua anggota direksi PT MRE yang dianggap terbukti melakukan tindak korupsi. Maka, segera kedua putusan itu dipertentangkan dan dianggap kontroversial.

Dalam mata awam, keadilan dan kebenaran kali ini bermuka dua. Meskipun, juridis formal hal seperti itu mungkin saja terjadi, sebab majelis hakimnya berbeda — dan para hakim itu memutus suatu perkara berdasarkan kebenaran yang diyakininya. Belum soal teknis dan cara pembuktian yang memang berbeda antara peradilan pidana dengan peradilan perdata. Selain itu, memang selama ini masyarakat tak terbiasa dengan putusan tidak sinkron seperti itu, sebab selama ini sudah menjadi asumsi umum bahwa putusan perdata harus 'disesuaikan' dan bahkan 'tunduk' kepada putusan pidana.

Kembali kepada kasus Arthaloka, sepanjang yang dapat kita ikuti mata pisau ditujukan kepada peradilan perdatanya. Tegasnya, putusan perdata itu kini seolah-olah jadi 'terdakwa' dengan prasangka pasti ada yang tak beres di belakangnya. Mungkin saja, sebagaimana mungkin juga tidak. Tapi berpikir terbalik juga bisa. Kalau justru putusan perdatanya yang akurat? Tentu putusan pidananya yang harus dipersoalkan?!

Namun kita tentu tak ingin tergelincir terlalu jauh mengadili kedua putusan — pidana dan perdata — kasus Arthaloka ini. Riskan dan sekaligus tak pantas. Adalah lebih bijak — terutama para penegak hukum dan pihak-pihak Taspen serta PT MRE — untuk membatasi diri dalam melontarkan opini dan debat di luar pengadilan. Jangan dilupakan, dengan adanya banding terhadap baik putusan pidana maupun perdata, kedua putusan itu belumlah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adalah tak etis untuk adu argumentasi di luar forum peradilan, sementara proses peradilannya pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi masih akan berlangsung. Diharapkan kesabaran dan pengendalian diri semua pihak....

Asas Praduga Tak Bersalah

Di bulan Desember tahun yang baru silam, berita tertangkapnya tertuduh pembunuh peragawati ibukota Dietje — yang bersumber dari Polda Jaya — memenuhi halaman koran-koran ibukota dan bahkan koran daerah lainnya. Foto sang tersangka dengan nama lengkap terpampang jelas di banyak koran. Alur dan arah berita yang beraneka ragam juga tak kalah 'menarik', terutama karena terdapatnya pada beberapa di antara pemberitaan dan ulasan pers tersebut nada kesangsian terhadap kebenaran versi kepolisian.

Pemuatan foto dan nama lengkap tersangka seperti itu pada umumnya tidak menjadi kebiasaan mayoritas pers kita, karena dianggap bertentangan dengan kode etik pers. Tapi dalam hal kasus Dietje ini terjadi pengecualian yang agak massal. Maka pantaslah bila Dewan Kehormatan PWI mengingatkan kepada seluruh suratkabar masih adanya kode etik jurnalistik yang menyangkut asas praduga tak bersalah (sebelum ditentukan pengadilan). Dewan Kehormatan menyerukan agar tetap berpegang teguh pada asas tersebut. Seruan ini ditujukan kepada pers dan juga kepada para penegak hukum sendiri.

Sejumlah rekan pers mendalihkan ketergelinciran ramai-ramai ini karena pihak kepolisian memberi angin. Memang cukup aneh bahwa tersangka dalam kasus penembakan Dietje sangat diekspose oleh pihak kepolisian. Katakanlah ada semacam 'penanganan' istimewa (Kali ini pihak kepolisian juga tergelincir dan seperti lupa kepada asas praduga tak bersalah). Dan karena luar dari biasanya, maka pers pun tergoda dan beberapa di antaranya malah terpancing 'menganalisa' terlalu jauh — apalagi karena sebelumnya memang terlalu banyak desas-desus beredar mengenai kasus Dietje ini.

Dengan pengalaman ini, patut untuk menghimbau pihak kepolisian agar pada masa mendatang dapat lebih menegakkan asas praduga tak bersalah ini. Sebab bila justru aparat penegak hukum yang melanggar asas ini, akibatnya lebih fatal. Begitu juga rekan pers, diharapkan jangan mudah ikut tergelincir bila ada yang lain telah tergelincir duluan. Satu saja sudah terlalu banyak, apalagi dua. Sebab bukankah seperti kata Dewan Kehormatan PWI "wartawan bukanlah sekedar penyiar atau penyambung lidah sumber berita"?

Departemen Agama

Dalam suasana awal tahun yang segar, Menteri Agama RI mengucapkan hal-hal yang bernada mawas diri mengenai departemen yang dipimpinnya.

Menteri mengakui bahwa di departemen yang dipimpinnya masih terjadi sejumlah hal tak terpuji. Menteri menyebut antara lain: penyalahgunaan wewenang dan komersialisasi posisi dan promosi jabatan. Dan sejumlah hal lainnya yang perlu diluruskan dan ditertibkan. Menteri Agama dikutip mengatakan "Patut disesalkan mengapa di Departemen Agama, suatu departemen dengan predikat agama, hal-hal yang seperti itu dapat terjadi dan secara luas pula."

Semua pihak pasti sama menyesalnya dengan Menteri Agama. Karena bagaimanapun secara tak tertulis dari Departemen Agama orang mengharapkan teladan moral. Tapi pernyataan jujur dari Menteri Agama itu sendiri sudah mampu menawarkan dan menyejukkan hati. Apalagi bila pernyataan itu pada masa selanjutnya diikuti oleh pengawasan terus menerus dan penindakan tegas. Dan kendati tanpa predikat agama, tanggungjawab moral seperti yang ditunjukkan Menteri Agama, juga diharapkan ada pada seluruh departemen lainnya.

Digitized by Google

1000 & 1300

Setelah sukses dengan 1000 cc — *Kini tampil dengan 1300 cc*

Mesin 12 katup yang Tangguh dan Ekonomis

1000 Starlet 1000, terbukti paling banyak dipilih di kelasnya. Sedan pertama di dunia dengan mesin 1000 cc, 4-silinder, 12 katup, responsif namun ekonomis. Body yang aerodinamis, radius putar terkecil (4,3 m), interior luas dan kompak, menjadikan Starlet mudah dan aman dikendarai. Mantap di luar kota dan lincah di dalam kota. Starlet 1000 tersedia dalam 2 tipe: Standar (XL) yang menawan, dan Lisse, yang sesuai untuk wanita aktif.

PERTAMA DI DUNIA 1000 4 SILINDER 12 VALVE

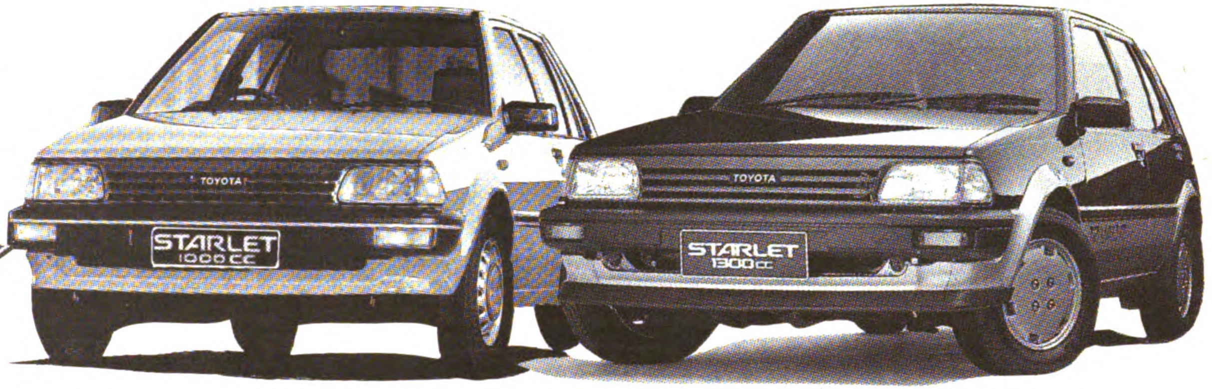

1300 Starlet 1300, memiliki tenaga yang lebih besar berkat mesin 1300 cc, 4-silinder, 12 katup. Karakteristik **ASRE** (**A**dvanced **S**uper **R**esponse **E**ngine) khas Toyota, yang juga dimiliki Starlet 1000, menjadikan Starlet 1300 sangat responsif namun tetap irit. Tidak seperti sedan sekelasnya, Starlet 1000 dan 1300, menggunakan mesin yang hanya didisain khusus untuk sedan, demi kenyamanan berkendara yang optimal. Starlet 1300 tersedia dalam 2 tipe: Standar (XL) yang menawan dan Si Ltd. (Sporty), untuk Anda yang berjiwa muda.

Starlet 1300 makin bergaya dengan perlengkapan standarnya, lebih mantap.

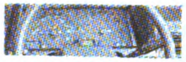

- **Tachometer,** menunjukkan putaran mesin secara tepat.
- **Jam digital** yang akurat.
- **AC,** menyegarkan perjalanan Anda.
- **Roda kemudi** dari bahan urethane, lebih mantap, lebih aman.
- **Tutup lingkar roda** tipe "half cap" yang tampan.
- **Lampu peringatan** batas minimal persediaan bahan bakar, makin aman.

- **Tuas pembuka bagasi** terletak di samping bawah tempat duduk pengemudi, lebih praktis.
- **Penahan lumpur pada keempat roda.**
- **Strip merah** (khusus tipe Si) pada: bemper dan lis pelindung samping, berkesan gagah.

Bergabunglah bersama para pemilik Starlet. Tanyakan alasan mereka. Dan hubungilah dealer Toyota terdekat.

TOYOTA **STARLET**

12 VALVE 4 CYLINDER 1000 cc & 1300 cc

KOMPAK DAN LINCAH

TOYOTA
TERPILIH KARENA TERPERCAYA

P.T. TOYOTA-ASTRA MOTOR JL. JEND. SUDIRMAN No. 5 Telp. 587551 – JAKARTA

Digitized by Google

Wilayah Kemenangan Yang Meyakinkan

Kampanye Golkar di Sulawesi Selatan nanti dengan senyum dan kegembiraan.

Ada dua puluh tiga kabupaten di Sulawesi Selatan. Sama banyak dengan jumlah itu, untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan tersedia 23 kursi untuk DPR-RI. Secara tradisional sejak pemilihan umum tahun 1971, Golkar senantiasa meraih terbanyak — hampir seluruhnya. Proyeksi 1987, berdasarkan pengalaman pemilihan umum yang lewat, diharapkan perolehan setidak-tidaknya 21 dari 23 yang tersedia.

Ke daerah yang merupakan salah satu kantong kemenangan Golkar itulah Ketua Umum DPP Golkar bersama pimpinan Golkar lainnya datang pertengahan Desember lalu. Dan ini merupakan kunjungan yang ketiga kali selaku Ketua Umum ke Sulawesi Selatan tapi pada kabupaten yang berbeda-beda. Kali ini, giliran Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidenreng Rappang. Semua dikunjungi dalam sehari (14/12) dengan heli. Sedang hari kedua digunakan untuk menghadiri Munas dan Seminar Hipiis serta kunjungan ke Pesantren Modern IMMIM di luar kota Ujung Pandang dan peresmian Gedung Perwakilan Arsip Nasional propinsi Sulawesi Selatan.

Hindari cara-cara yang menegangkan.

Pilih Yang Punya Program

Menyambut kedatangan Ketua Umum Golkar, pimpinan pesantren IMMIM H. Fadeli Luran memperkenalkan lembaga pendidikan yang dipimpinnya sebagai lembaga yang independen. Namun ia menegaskan bahwa warga pesantrennya bertekad mensukseskan Pemilihan Umum yang akan datang. Seraya itu ia memberi pengarahan kepada warga pesantrennya yang akan ikut memilih, untuk pada saatnya nanti mencari tanda gambar organisasi politik yang ada program pembangunannya.

Berbicara di depan warga pesantren yang memenuhi lapangan perguruan itu, Sudharmono SH menyatakan pendidikan kepada anak didik kita tidak hanya cukup dengan membekali mereka dengan ilmu dan teknologi, tetapi juga perlu bekal keimanan dan ahlak. GBHN pun mencantumkan bentuk pendidikan dalam arti yang luas, yang juga mencakup pendidikan keagamaan, perlu mendapat perhatian. Golkar sebagai kekuatan sosial politik juga memperjuangkan pendidikan dalam arti luas tersebut dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Golkar selalu memberi dukungan dan turut berjuang bersama setiap organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan.

Sudharmono SH menggarisbawahi seruan Ketua IMMIM untuk melaksanakan hak pilih sebaik-baiknya dan memilih peserta pemilu yang mempunyai program. "Tanpa mengurangi hak-hak perorangan saudara-saudara, dapat saya katakan di sini Golkar adalah organisasi yang mempunyai program. Apa yang diharapkan Ketua IMMIM, pada hakekatnya sama dengan program Golongan Karya."

Siang itu, Ketua Umum Golkar meresmikan sebuah gedung baru di kompleks perguruan tersebut — yang merupakan sumbangan salah seorang tokoh Golkar. "Insya Allah pada saatnya saya pun akan memberikan partisipasi dalam rangka pengembangan perguruan ini." Tapi di luar itu, Ketua Umum pada saat itu tergerak hatinya untuk menyumbangkan dua unit drumband — satu untuk putera dan satu untuk puteri.

Saat berikutnya selaku Mensesneg, Sudharmono SH meresmikan penggunaan Gedung Perwakilan Arsip Nasional, tak jauh dari IMMIM. Pengguntingan pita dilakukan oleh Ny. EN Sudharmono. Sebelumnya, Kepala Arsip Nasional Dra. Soemartini menyampaikan laporan mengenai pembangunan gedung tersebut, sedang Gubernur A. Amiruddin memberikan sambutan.

Acara pertama dalam rangkaian kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan ini adalah tatap muka dengan Komisaris Desa, Komisaris Kecamatan, Kader dan Fungsionaris Golkar se Kabupaten Soppeng di Gedung Pertemuan Masyarakat Watansoppeng. Dilapori angka-angka peredaran SPMAG dan yang kembali serta yang kemudian berhasil diselesaikan KAG-nya, Ketua Umum

Digitized by Google

Memperjuangkan pendidikan dalam arti luas.

menyatakan cukup terkesan. Tetapi Ketua Umum sekaligus mempertanyakan misalnya apa yang menjadi penyebab dari 97 ribu SPMAG yang masuk kembali baru 50 ribu yang diberi KAG- padahal sudah diterima 100 ribu blanko KAG. Ketua Umum meminta diteliti dan dipecahkan masalahnya. "Supaya pemberian KAG ini diperlancar," pesan Ketua Umum, "karena dengan memiliki KAG seseorang itu sudah menjadi pasti dan merasa sadar menjadi anggota Golkar. Dan tentunya merasa ada kewajiban moral untuk mensukseskan Golkar dalam pemilu yang akan datang."

Dalam dialog dengan sejumlah komisaris desa dan kecamatan maupun kader lainnya, selain menggali angka-angka aktivitas organisasi, Sudharmono SH juga menguji kemampuan dan pemahaman mengenai masalah-masalah keorganisasian. Ketua Umum juga menanyakan pemahaman para kader mengenai UU Keormasan dan implikasinya. Lalu Ketua Umum memberikan penjelasan-penjelasan pelengkap. Misalnya mengenai hubungan Golkar dengan organisasi kemasyarakatan seperti Ampi, HWK, Kukmi, Soksi, Kosgoro, MKGR, PGRI dan lain sebagainya setelah adanya UU Keormasan. Dan mengenai perbedaan Organisasi Politik dengan Orgasinasi Kemasyarakatan. Kepada mereka, Ketua Umum juga berpesan agar kader Golkar berdiri di barisan terdepan untuk mensukseskan program pembangunan di bawah bimbingan pemerintah.

Kepada masyarakat Soppeng Sudharmono menyatakan kegembiraan melihat kenyataan bahwa untuk penyelesaian Mesjid Agung Soppeng tidak mengajukan permintaan bantuan Presiden, melainkan dengan mengerahkan dana dan swadaya masyarakat sendiri. Tapi Sudharmono mengisyaratkan bahwa permohonan seperti itu dapat saja diajukan untuk memperoleh Banpres guna memperkuat apa yang telah dihasilkan melalui swadaya masyarakat. "Kita semua mengetahui bahwa masyarakat daerah ini adalah memang masyarakat yang religius."

Senyum

Di Sengkang, ibukota kabupaten Wajo, juga dilakukan secara tatap muka yang serupa. Di sini Ketua Umum menyatakan kebanggaan bahwa dari 200.000 orang calon pemilih tinggal 4000 orang yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota Golkar. Ini berkat makin terkonsolidasikannya para kader. Ketua Umum mengungkapkan bahwa saat ini di seluruh tanah air sekitar 25 juta orang telah mendaftarkan diri ingin menjadi anggota Golkar.

Tentang kampanye nanti, Ketua Umum memesankan untuk menghindari cara-cara yang menegangkan. "Kita mengadakan kampanye dengan senyum dan kegembiraan," ujar Ketua Umum, "Kader harus komunikatif terhadap masyarakat, jangan bersikap dan beranggapan pendapat sendiri yang paling benar."

Seperti halnya di Soppeng, di Sengkang berlangsung pula dialog dengan para kader. Seorang kader — kebetulan seorang dokter Puskesmas — tampil untuk memintakan perhatian mengenai masalah pengairan. Dengan tanggap Ketua Umum meminta kader yang kebetulan bertugas di dinas Pekerjaan Umum membantu memberi keterangan. Namun akhirnya Gubernur Sulsel yang memberikan keterangan singkat bahwa masalah pengairan memang menjadi perhatian utama.

Pangkajene Sidrap sebagai tempat ketiga yang dikunjungi, menyambut Ketua Umum tak kalah hangatnya. "Kedatangan saya yang pertama kali di sini bukan berarti daerah ini dibedakan dengan daerah lain," ujar Sudharmono SH, "melainkan karena luas dan besarnya negara kita ini." Ketua Umum kemudian lebih banyak menggunakan kesempatan untuk berdialog dengan komisaris-komisaris kecamatan. Dari dialog muncul antara lain angka-angka menanjak kemenangan Golkar dari pemilu ke pemilu. Tahun 1971 kemenangan mencapai 94%, tahun 1977 menjadi 94,70%, tahun 1982 naik lagi menjadi 95,44%. Tahun 1987, "kita perjuangkan tak kurang dari itu."

"Pada dialog tadi, saya lihat diutarakan berbagai hal seperti apa adanya, tidak dibikin-bikin," kata Sudharmono. "Maka saya yakin, bahwa tekad yang dinyatakan untuk memenangkan Golkar adalah tekad yang sebenar-benarnya." Ketua Umum menyampaikan "kami mempunyai kesan yang baik dan bangga, bahwa Golkar yang jauh dari Pusat, lebih-lebih Kabupaten Sidrap yang jauh dari Ujung Pandang, kualitasnya sama dengan yang di Jakarta — bahkan lebih baik. Mari kita lanjutkan berusaha agar memperoleh hasil sebaik-baiknya. Saya menyampaikan penghargaan."

Di ketiga kabupaten, Sudharmono SH juga meresmikan Listrik Masuk Desa. Untuk Sidrap meliputi 1 desa, untuk Soppeng meliputi 5 desa di 3 kecamatan dan untuk Wajo meliputi 3 desa di 2 kecamatan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Acara lain selama di Sulawesi Selatan, adalah temu muka Ketua Umum dan para pimpinan Golkar lainnya dengan kader dan simpatisan yang berprofesi di bidang usaha, Minggu malam di Ujung Pandang. Ramah tamah diselingi hiburan artis Golkar, Komar-Firman-Kimung-Ogut — yang juga sempat memberi hiburan meskipun singkat di tiga kabupaten yang dikunjungi. Malam itu, selaku Mensesneg, Sudharmono SH menyerahkan SK Presiden tentang bantuan untuk pembangunan mesjid Nurul Jihad Kotamadya Ujung Pandang sebesar Rp. 20 juta, untuk Mesjid Nurul Abrar Binanga kabupaten Majene sebesar Rp. 10 juta dan untuk pembangunan pesantren PPTI kabupaten Majene juga sebesar Rp. 10 juta. Dan selaku Sekretaris YAMP menyerahkan SK Ketua YAMP tentang pembangunan mesjid bantuan YAMP masing-masing di kompleks Pusat Komunikasi Pemuda Biringkanaya dan kompleks Perumnas Panakkukang (keduanya di Ujung Pandang) serta di desa Kanjilo Kabupaten Goa.

Turut serta dalam rombongan Ketua Umum adalah Ny. EN Sudharmono dan tokoh-tokoh Golkar Drs. Gatot Soewagio, Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Sukarton Marmosudjono SH, Zarlon Zaghlul SH, Ir. Akbar Tanjung, Andi Mochtar SH, KH Qodratullah, Tatto Pradjamanggala SH, fungsionaris Golkar Drs. Hasmoro, Sudarsono SH, R. Subono, anggota DPR-RI A. Baramuli serta Dra. H. Nasrah Effendi, Mubha Kahar Muang SE.□ **Rum Aly**

Digitized by Google

Tetap Di Barisan Terdepan

Ketua Umum Golkar sehari di Belitung

Warga Golkar harus tampil dan berperan dalam pembangunan.

Minggu pagi itu, dibulan Desember lalu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis. Tetapi hal itu tidak menghalangi Ketua Umum DPP Golkar dan Ibu Sudharmono serta rombongan untuk melakukan perjalanan silaturahmi di Kabupaten Belitung, Sumatra Selatan.

Ketua Umum Sudharmono dan rombongan termasuk artis Golkar dan wartawan mengunjungi daerah ini untuk bertatap muka dengan para kader, serta melihat sendiri kesiapan mereka menjelang pemilu yang sudah diambang pintu.

Perjalanan panjang memang harus ditempuh. Tapi bagi Sudharmono SH, perjalanan ke daerah-daerah sampai ke desa-desa terpencil adalah kewajiban dalam membangun dan membangkitkan semangat juang segenap warga Golkar seluruh pelosok tanah air, agar selalu siaga dalam menjabarkan amanat dan program-program Golkar yang tercermin dalam Tri Sukses Golkar dengan dilandasi oleh Panca Bhakti.

Tanpa kenal lelah, Ketua Umum melakukan perjalanan untuk kepentingan masa depan organisasi yang juga bagian dari masa depan bangsa. Sebab selalu dikatakan oleh Ketua Umum Sudharmono dimanamana, warga Golkar harus selalu tampil dan berperan dalam pembangunan dengan meningkatkan kualitas di bidang profesinya masing-masing. Karena itu tidak ada istilah pamrih untuk mencari keuntungan pribadi daripada kepentingan organisasi.

Perjalanan sehari kali ini juga di dalam rangka memantapkan untuk pertama kalinya bagi warga Golkar di Sumatra Selatan khususnya di kabupaten Belitung yang daerahnya satu sama yang lainnya sangat berjauhan. Memantapkan kepada semua warga Golkar agar terus semakin meningkatkan prestasi dan karya-karya nyatanya.

Pukul enam tiga puluh pagi hari, Ketua Umum beserta Ibu Sudharmono dan rombongan meninggalkan bandara Halim Perdana Kusuma untuk menuju kabupaten Belitung, Sumatra Selatan. Dan Alhamdulillah sampai di bandar udara Buluh Tumbang tepat pukul delapan, dimana para kader Golkar yang terdiri dari Ampi, FKPPI, MKGR, KOSGORO, menyambut kedatangannya dengan penuh semangat. Beberapa remaja dengan busana tradisional malu-malu memberikan kalungan bunga tanda ucapan selamat datang kepada Ketua Umum dan Ibu Sudharmono serta anggauta rombongan.

Dari sana rombongan Ketua Umum diantar untuk istirahat sejenak di kediaman Bupati Kepala Daerah Kabupaten Belitung, sambil menikmati hidangan selama 15 menit, untuk kemudian menuju stadion olahraga Pangkal Lalang, Tanjung Pandan, dimana telah menunggu masa Golkar, yang terdiri dari AMPI, MKGR, FKPPI, Pelajar, Guru, Tani dan rakyat Belitung. Mereka menjejali stadion Pangkal Lalang yang berkapasitas lebih kurang dua belas ribu orang. Tepuk tangan, yel-yel, lagu-lagu Golkar berkumandang secara spontan ketika Ketua Umum bersama rombongan memasuki stadion.

Melihat Langsung

Di stadion Pangkal Lalang, Sudharmono bertatap muka dan berdialog dengan para komisaris desa, komisaris kecamatan, kader Golkar dan fungsionaris Golkar Kabupaten Belitung. Mengawali sambutannya, Sudharmono memperkenalkan anggauta rombangan yang menyertainya, termasuk kelompok seniman Eddy Sud yang mendapat sambutan cukup meriah dan hangat.

"Saudara-saudara hari ini adalah hari Minggu, hari libur, hari istirahat. Marilah kita gunakan waktu istirahat ini dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menegaskan bahwa setiap kunjungan pimpinan Golkar ke daerah-daerah juga ke Belitung ini disamping untuk bersilaturahmi juga untuk melihat dari dekat, bagaimana warga Golkar untuk berpartisipasi terhadap pembangunan, pembangunan yang meliputi seluruh bidang kehidupan" kata Sudharmono menyapa para kader.

"Saya ingin melihat dari dekat bagaimana program-program Golkar dalam pelaksanaannya di daerah ini, yang ternyata dari laporan yang disampaikan, baik oleh Ketua DPD Golkar dan Ketua Dewan Penasehat Golkar Kabupaten Belitung, pada umumnya baik," ujarnya.

Peresmian proyek-proyek pembangunan yang didukung oleh segenap masyarakat Belitung, khususnya warga Golkarnya berjalan dengan baik.

"Saya sangat gembira dan bahagia terlebih-lebih setelah saya mendengar kebulatan tekat yang baru disampaikan, mudah-mudahan bukan saja merupakan show belaka, bukan hanya tekat belaka tapi benar-benar diperjuangkan dengan karya nyata dan memang itulah Golkar. Golkar akan maju bila

Digitized by Google

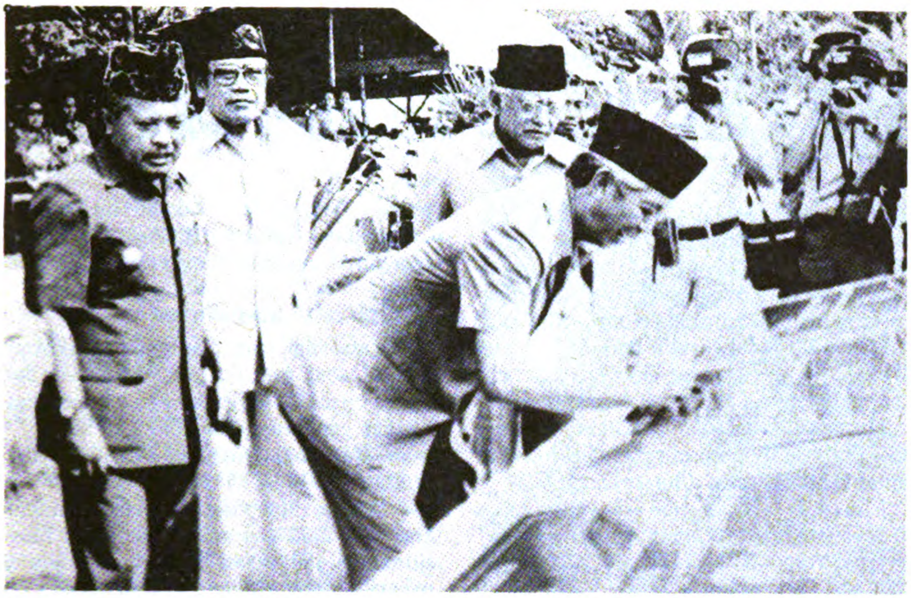

Menandatangani prasasti. Berkarya di segala bidang.

setiap warganya mampu berkarya secara terus menerus di segala bidang," tegas Sudharmono.

Selesai memberikan pengarahan, Ketua Umum diminta untuk menyerahkan sebuah mobil Toyoto Pick Up Super Kijang 1986 dari Indra Cahaya Purnama, seorang kader Golkar kepada DPD AMPI, Kabupaten Belitung. Sudharmono SH yang selaku Ketua Dewan Pembina Ampi saat ini didampingi ketua DPP Ampi M. Muas.

Setelah acara penyerahan secara simbolis mobil Toyota Pick Up Super Kijang, Sudharmono juga menyerahkan dua ribu batang bibit jeruk kepada Ketua DPD Golkar Tingkat II Kabupaten Belitung.

Usai dari tempat ini Ketua Umum beserta rombongan menuju mesjid Jami Kota Tanjung Pandan, yang sedang diperbaiki dengan mendapat bantuan dari Bapak Presiden. Di tempat ini Sudharmono atas nama DPP Golkar memberikan bantuan tambahan untuk perbaikan mesjid Jami tersebut sebesar lima juta rupiah.

Dari sana rombongan kemudian singgah sebentar di gedung DPD Golkar yang letaknya tidak berjauhan dengan mesjid Jami, untuk kemudian melanjutkan perjalanan sejauh delapan puluh kilometer melewati jalan yang berkelok dan sempit menuju dusun Batu Penyu, desa Jangkar Asam, kecamatan Gantung untuk meresmikan listrik masuk desa, yang meliputi kecamatan Manggar dan kecamatan Gantung.

Selain itu dalam kesempatan yang sama selaku Menteri Sekretaris Negara, Sudharmono SH meresmikan beberapa proyek lainnya antara lain: SMP Negeri V Parawas, SMP Negeri VI Sijuk, SMP Negeri Simpang Pesak, serta meresmikan jalan Padat Karya Baru Kelapa Kampit - Sejubuk yang ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti.

Namun menjelang peresmian listrik masuk desa menjadi tertunda satu jam, karena ada kecelakaan yang dialami oleh kendaraan yang ditumpangi Bapak Waskito, Edy Sud, M. Hatta BBA, tergelincir, sehingga beberapa kendaraan dalam rombongan berbenturan satu sama lainnya. Tapi syukur tidak ada kecelakaan yang serius dalam kejadian itu.

Walaupun terlambat hampir 1 jam, namun Ketua Umum tetap bersemangat ketika tampil berbicara meresmikan listrik masuk desa di Dusun Batu Penyu, dimana rakyat desa telah menunggu dua setengah jam sebelumnya.

Hujan yang semula turun rintik-rintik tiba-tiba menjadi reda sampai dengan acara selesai. Dalam sambutannya antara lain Sudharmono mengatakan, listrik masuk desa memang PLN sebagai pelaksananya, akan tetapi semua itu adalah merupakan program-program Golkar yang dilaksanakan oleh Pemerintah. "Sehingga selaku Ketua Umum Golkar saya anjurkan jangan ragu-ragu berjuang bersama Golkar, karena Golkar tetap akan berjuang untuk kepentingan pembangunan nasional bersama rakyat di seluruh pelosok tanah air, tegasnya.

Selesai memberikan pengarahan pada peresmian listrik masuk desa dan beberapa proyek lainnya, dalam kesempatan terakhir Sudharmono selaku Ketua Umum Golkar menyerahkan dua buah TV masing-masing untuk kecamatan Gantung dan kecamatan Manggar.

Usai dari tempat ini rombongan menuju bandar udara Buluh Tumbang untuk kembali ke Jakarta disambut hujan deras dan angin kencang. Tapi pada akhirnya semua kembali dalam keadaan selamat. Pesawat Dash-7 Pelita Air Service menyentuh kembali landasan Halim Perdana Kusuma, pada saat matahari sudah terbenam.□

Rendy MS

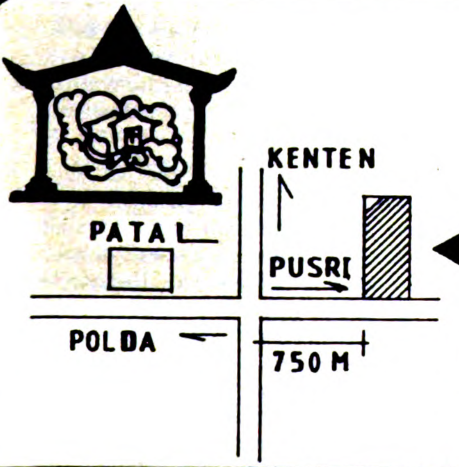

KEDAMAYAN PERMAI

MEMPERSEMBAHKAN KAWASAN PERUMAHAN MASA KINI DAN MENDATANG.

LOKASI PROYEK "KEDAMAYAN PERMAI" SANGAT STRATEGIS, IDEAL & PENUH KEDAMAYAN

HUBUNGI : P.T. KEDAMAYAN
JLN. KOL. ATMO No. 385 B. TLP. 21336
PALEMBANG

Digitized by Google

Membina Pemuda

Meskipun dianggap masih belum sempurna, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Departemen Pemuda DPP Golkar yang — diketuai Aulia Rachman SH dan Dra. Freddy Latumahina — yang berlangsung dari 19 hingga 23 Desember tahun lalu, sempat juga membuahkan hasil berupa rumusan pemikiran mengenai keterlibatan pemuda, khususnya kader Golkar, dalam pembangunan nasional serta Pemilu.

Rumusan pemikiran yang disusun oleh tiga komisi dari peserta Rakornas tersebut umumnya mengulas tentang pentingnya peranan dan keterlibatan pemuda, sehingga DPP Golkar diharapkan dapat memberikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan (juklak) khusus tentang pola kebijakan pembinaan dan pengembangan generasi muda Golkar, begitu pula dengan mekanisme koordinasi dan teknis operasionalnya.

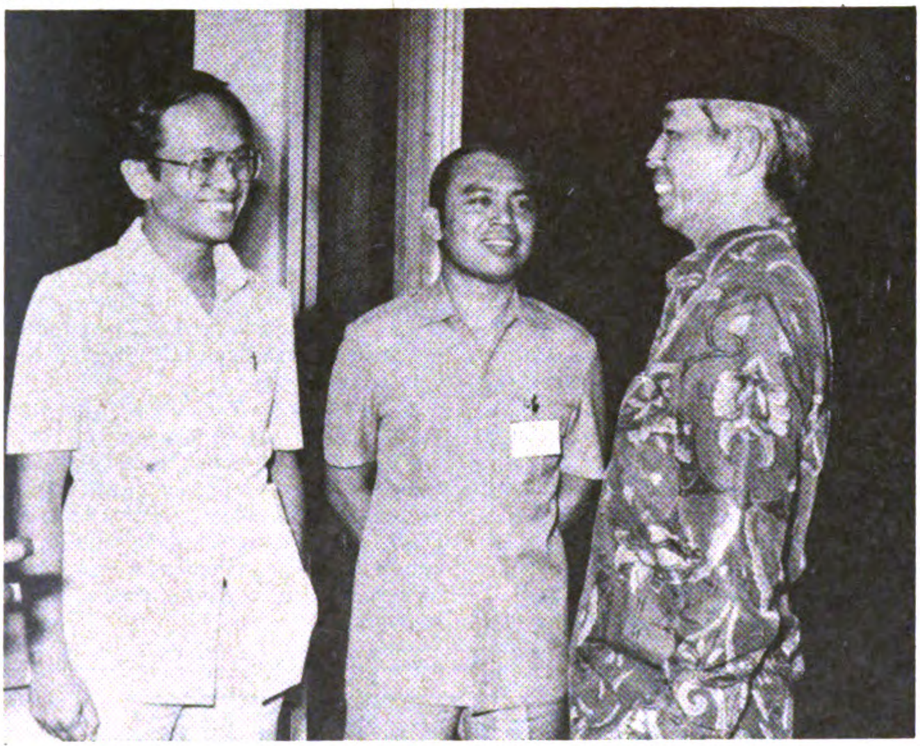

DPP Golkar diharap dapat memberi pedoman.

Pelaksanaan Rakornas itu sendiri dinilai agak terlambat, sehingga berakibat kurang lancarnya komunikasi dan belum tercipta suatu kesatuan pola pikir. Kendati demikian, sebagai langkah pertama Rakornas memang dirasa sangat efektif untuk menyatukan sikap dan pandangan." Paling tidak Rakornas telah menjadi forum dialog yang terbuka dalam menatap masalah-masalah yang timbul ke permukaan, serta melahirkan analisa, proyeksi dan perspektif ke masa depan" ujar Syamsul Mu'arif, ketua Komisi I Rakornas.

Tetapi untuk memenuhi harapan Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, agar Rakornas dapat menyusun program operasional yang realistik dan sesuai kemampuan, tampaknya masih perlu waktu dan pemikiran yang lebih dalam lagi. Mungkin akibat kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi kepemudaan Golkar selama ini, maka dari semua permasalahan yang muncul ke permukaan Rakornas, tidak seluruhnya mampu diakomodir dan dirumuskan menjadi hasil yang diharapkan.

Mungkin karena hal itu pula maka Komisi I Rakornas yang ditugaskan menyusun rumusan tentang masalah intern dan umum, memberikan rekomendasi kepada DPP Golkar untuk melaksanakan forum sejenis secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan, baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Kebutuhan ini terasa mendesak, terutama menghadapi Pemilu mendatang di mana Ketua Umum mengharapkan perlunya disusun program penggalangan dan program kampanye.

Program kampanye itu sendiri, menurut Ketua Umum, haruslah merupakan kelanjutan dari program penggalangan dan tidak merupakan kegiatan yang mengada-ada, apalagi sampai menimbulkan ekses-ekses yang tidak diinginkan. Di bagian lain dari pengarahannya, Ketua Umum juga mengajak seluruh organisasi pemuda di bawah panji Golkar untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mengundang simpati rakyat. Ini menjadi tugas dari Komisi III Rakornas yang mengurus masalah program bakti sosial.

Mekanisme koordinasi

Masalah lain yang disorot oleh Rakornas adalah soal mekanisme koordinasi dan teknis operasional pembinaan dan pengembangan generasi muda Golongan Karya, di mana hubungan dengan ORSOSMASINAL dan ORSINALMAS, menurut tim perumus, perlu dipandang sebagai hubungan antara Golkar dengan kader-kader fungsionalnya dan bukan hubungan struktural organisatoris, sehingga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Masalah ini pula yang oleh Ketua Umum diharapkan dapat dibahas dan dikukuhkan oleh Rakornas sehingga benar-benar menjadi program menyeluruh dan terpadu, serta dapat dilaksanakan secara operasional. Hasil sementara yang bisa dirumuskan adalah usulan untuk membentuk kelompok kerja dalam departemen/biro/bagian yang membidangi kepemudaan pada DPP/DPD Golkar, serta penempatan kader Golkar yang menjadi pimpinan ORSOSMASINAL dan ORSINALMAS Pemuda sebagai anggotanya di samping tokoh pemuda Golkar lainnya, yang; "mempunyai bobot, wawasan dan reputasi yang baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan," bunyi rumusan itu.

Di samping itu, masalah penataan organisasi kepemudaan juga mendapat perhatian khusus dari Rakornas, di mana diusulkan agar penataan kembali organisasi kepemudaan itu dapat dilaksanakan secara bijaksana, demokratis dan bertanggung jawab, serta dalam suasana dialogis yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan. Apalagi dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas oleh seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Indoensia.

Di bagian lain, Rakornas juga memandang perlunya peranan KNPI dimantapkan kembali sebagai wadah berhimpunnya organisasi sejenis di bidang kepemudaan. Setidaknya, ide dasar berdirinya KNPI yang menyangkut nilai-nilai, orientasi dan pola pikir yang mendasari kelahirannya harus tetap dipertahankan. Hal ini dipandang perlu agar pemuda Indonesia tidak kembali terjebak pada pola pikir dan orientasi lama yang berbentuk wawasan sempit dan pengkotakan politik seperti yang terjadi di masa Orde Lama.

Untuk mencapai maksud itu Rakornas mengusulkan agar sebelum dilaksanakannya kongres pemuda (KNPI) mendatang, perlu diadakan dulu suatu dialog nasional dengan berbagai unsur kemasyarakatan,

Digitized by Google

tokoh pendiri KNPI dan organisasi kepemudaan yang ada. Sejalan dengan tuntutan pemantapan koordinasi kepemudaan dalam tubuh Golkar sendiri, maka Rakornas mengusulkan agar AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) dijadikan sebagai "wadah pemersatu" generasi muda Golkar, yang perlu dipertegas dengan Juklak. Penegasan dimaksud adalah dalam bentuk bahwa seluruh kegiatan operasional pragmatis yang tidak bersifat politik praktis, dilaksanakan oleh AMPI dan dikoordinasikan secara terpadu dengan seluruh ORSOSMASINAL.

Kampanye Pemilu

Secara khusus, Rakornas tersebut membahas pula persiapan untuk kampanye Pemilu mendatang, di mana Ketua Umum DPP Golkar mengharapkan agar generasi muda Golkar dapat membantu terciptanya suasana kampanye yang bergairah, menyegarkan dan tidak menimbulkan ketegangan.

Dalam menciptakan suasana dimaksud, peranan pemuda dinilai amat penting sebab — sesuai dengan semangat kepemudaannya — mereka mudah terbakar emosi. "Karena itu saya ajak pimpinan-pimpinan organisasi pemuda keluarga besar Golkar dan seluruh kader pemuda Golkar untuk tidak mudah terpancing oleh provokasi dari pihak manapun," tegas Ketua Umum.

Peringatan ini dipandang perlu mengingat jumlah massa pemuda Golkar yang punya hak pilih dalam Pemilu nanti cukup besar, hampir mencapai 12 juta orang. Dengan jumlah yang sebesar itu, jika tak terkoordinir dan terarahkan dengan baik akan menimbulkan hal-hal negatif yang tak diinginkan. Seperti yang dikemukakan Menteri Sosial, Ny. Nani Sudarsono, yang juga anggota Pembina Golkar, di dalam pengarahannya antara lain mengharapkan agar Rakornas juga membahas tentang masalah kenakalan remaja yang disebutnya sebagai "kebringasan sosial".

Generasi muda dan remaja, menurut Nani Sudarsono, merupakan bantalan kondusif bagi kecintaan terhadap Orde Baru yang perlu dirintis dan dibina mulai dari lapisan organisasi yang paling bawah. Apabila pembinaan itu berhasil, maka generasi muda akan merupakan pagar yang tangguh dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya.

Rakornas yang berlangsung lima hari itu juga menampilkan beberapa pembicara penting di antaranya Menteri P dan K, Fuad Hassan yang mengupas tentang keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan. Keterlibatan pemuda, kata Mendikbud, tidak mungkin bersifat pasif sebab pasivisme hanya akan berakibat kehanyutan belaka dan tidak sesuai dengan jiwa kaum muda yang dinamis. Namun dalam melibatkan diri dalam pembangunan harus diusahakan pula keseimbangan antara idealisme dengan realisme yang tampil sebagai kondisi objektif, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana.

Suasana Rakornas itu. Diharapkan bisa berlanjut.

Sementara Menpora Abdul Gaffur menggunakan kesempatan itu untuk menghimbau organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan lainnya yang belum menyesuaikan diri dengan UU Keormasan nomor 8/1985, agar segera menyesuaikan dirinya. Dia juga banyak menjelaskan mengenai tata cara keterlibatan organisasi pemuda dalam Pemilu mendatang, misalnya soal atribut yang diatur dalam pasal 9 UU Keormasan.

Area kritis

Di samping masalah-masalah khusus yang langsung berkaitan dengan pengembangan generasi muda Golkar, Rakornas juga membahas beberapa masalah aktual di kalangan pemuda dan remaja yang perlu mendapat perhatian. Antara lain disorot masalah sempitnya lapangan kerja, kasus-kasus PHK, degradasi moral, kenakalan remaja, narkotika, serta masalah-masalah lain yang merupakan masalah nasional.

Komisi II Rakornas yang ditugasi merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan pemuda, menyimpulkan bahwa akibat masih adanya lapisan masyarakat muda yang tidak berkemampuan memperoleh pendidikan yang dicita-citakan dan belum cukup tersedianya lembaga pendidikan non-formal sebagai alternatif, telah menumbuhkan lapisan generasi muda yang tidak Siap Pakai di satu pihak serta kondisi frustasi di pihak lain.

Adanya kesenjangan sosial terutama di bidang perekonomian, menurut komisi II merupakan "area kritis" yang dirasakan kaum muda. Demikian juga kesenjangan yang terjadi akibat "apa yang dicita-citakan", "apa yang dikatakan" dan "apa yang dilakukan" berlainan dengan "apa yang menjadi kenyataan", yang dianggap merupakan sumber munculnya kondisi di mana kaum muda dapat berkurang kepercayaannya kepada Pemerintah. "Golkar hendaknya dapat menjelaskan hal-hal tersebut dengan melihat tahapan serta proses pembangunan yang tengah dilaksanakan, dan ketepatan dari keseluruhan strategi pembangunan nasional untuk mengatasi hal-hal tersebut dalam jangka panjang," demikian bunyi usulan Komisi II, yang diketuai Drs. H. Noerhadi Achmad.

Tantangan lain yang dihadapi — sehubungan dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas — adalah bagaimana mengoperasionalkan ideologi nasional tersebut secara kreatif dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari kaum muda. Selain itu, secara umum Rakornas juga menganggap perlu adanya penegasan mengenai masalah generasi muda di dalam GBHN 1987/1992, khususnya yang merupakan tindak lanjut dari hasil yang telah dicapai dalam GBHN sebelumnya.

Keperluan peningkatan pembinaan dan pemantapan peranan pemuda ini dilatarbelakangi masalah alih generasi dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang, yang menurut komisi I "dapat lebih terarah, terencana dan berkesinambungan". Dalam kaitan ini maka kader-kader Golkar diharapkan bisa berdiri di garis depan dengan membuktikan kepeloporannya dalam menumbuhkan aktivisme di kalangan pemuda dan mahasiswa, sesuai jiwa kepemudaannya yang dilandasi oleh kematangan gagasan dan wawasan nasional sebagai wujud pengalaman Pancasila.

Rakornas yang diikuti oleh sekitar 160 peserta dari seluruh Indonesia itu memang belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan, sehingga dirasa perlu tindak lanjut untuk lebih mematangkan perumusan pikiran-pikiran yang telah dengan susah payah diperas dalam pertemuan yang singkat itu. ☐ **Suwito/Apo**

Digitized by Google

Konsisten Di Manapun

Golkar tak menjanjikan yang muluk-muluk

Walaupun panas di siang hari tanggal 7 Desember 1986 itu cukup menyengat kulit, namun sekitar sepuluh ribu karyawan dari 29 perusahaan di daerah Tangerang—Jawa Barat itu tetap sabar menunggu kedatangan Ketua Umum DPP Golkar yang hari itu mengadakan acara pemantapan dan temu muka dengan para kader Golkar setempat.

Kunjungan ke Tangerang itu merupakan bagian dari safari Ketua Umum dalam rangka menghadapi pesta demokrasi yang sebentar lagi akan berlangsung. Sudah tentu Golkar akan berjuang untuk tetap menang dalam Pemilu nanti, namun menang dalam arti yang sehat dan tetap dicintai rakyat. Untuk itu, memang perlu terus dibina dialog langsung dengan para kader Golkar di daerah.

Seperti di daerah-daerah lainnya, pidato Ketua Umum dengan gayanya yang khas, selalu mendapat sambutan dan tepuk tangan meriah dari pengunjung. Di Tangerangpun hal itu berulang. Padahal, seperti biasanya, Sudharmono tak pernah memakai teks dalam memberikan sambutan ataupun pengarahan. Mungkin karena memang sudah menjiwai, maka sang Ketua Umum merasa tak perlu mempersiapkan pidato yang sudah disusun dari rumah. Tetapi ucapan-ucapannya selalu pas dan mengena kepada massa yang hadir.

Misalnya ketika di Tangerang itu, di hadapan 10 ribu karyawan dari berbagai perusahaan yang berkumpul di lapangan PT Damatex itu, Sudharmono mengajak para karyawan yang sudah menyatakan diri menjadi anggota Golkar agar menjaga citra Golkar dengan tetap bekerja secara tekun dan jujur. ''Ketekunan dan kejujuran adalah modal dan syarat utama keberhasilan pembangunan nasional di segala bidang,'' kata Ketua Umum.

Di bagian lain dari pengarahannya Ketua Umum mengingatkan agar mereka yang masuk anggota Golkar jangan didasari niat untuk mencari keuntungan pribadi. Misalnya masuk Golkar hanya karena ingin terpilih jadi anggota DPR, jadi pejabat atau apa saja. ''Golkar tidak menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, tetapi silahkan datang pada Golkar dengan kebulatan tekad untuk mengabdi demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,'' tegas Sudharmono.

Menurut Ketua Umum, sebagai kader Golkar tugasnya bukan sekedar demi memenangkan Pemilu 1987, tetapi harus tetap konsisten dan konsekwen dengan jiwa dan semangat Golkar di manapun kita berada.

Menyerahkan sumbangan Golkar untuk warga Tangerang.

Kader Golkar, kata Sudharmono di manapun dia berada dan sebagai apa saja, harus tetap tampil sebagai pelopor pembangunan. Sebab, Golkar adalah tempat bagi mereka yang mau mengabdi, tegasnya lagi.

Selesai upacara resmi, termasuk pemberian Kartu Anggota Golkar (KAG) secara simbolis kepada beberapa karyawan yang mewakili teman-temannya, Ketua Umum kembali pada kebiasaan khasnya, berdialog dengan para karyawan. Suasana dialog benar-benar terbuka, bebas dan bergairah. Sehingga tanpa terasa acara lain sudah menunggu.

Butuh Motivasi

Dari tempat upacara di PT Damatex, rombongan Ketua Umum beserta Nyonya Sudharmono meneruskan perjalanan ke desa Saga di kecamatan Balaraja-Tangerang, untuk meresmikan penggunaan Listrik Masuk Desa secara simbolis di desa tersebut.

Betapa hebat dan besarnya kecintaan rakyat terhadap sang Ketua Umum, tergambar dari wajah-wajah ceria lautan manusia yang berjejer sepanjang jalan yang dilalui Ketua Umum beserta rombongan sampai di tempat upacara. Kader-kader Golkar dengan seragam AMPI berbaris rapih sambil meneriakkan yel-yel yang menandakan kebesaran Golkar. Mereka itu, walaupun dengan keringat bercucuran, tetap setia menunggu sang Ketua dan Nyonya.

Tak pelak lagi, mereka butuh bertatap muka dengan Ketua Umumnya. Mereka butuh pengarahan, butuh motivasi yang mampu menggerakkan semangat juang dan pengabdiannya. Untuk itu semua maka Ketua Umum, meskipun lelah dan pusing kepala dengan urusan-urusan kenegaraan serta tetek-bengek lainnya, masih mau datang untuk berdialog. Bahkan ada kesan seolah-olah kegiatan seperti itu malah menjadi ''obat'' yang menghilangkan segala rasa capai, pusing, stress, dan sebagainya. Bagaimanapun, berhadapan langsung dengan yang dicintai dan mencintai, memang mengasyikkan.

Di desa Saga itu Sudharmono meresmikan penggunaan Listrik Masuk Desa. Dengan demikian berarti 111 desa di kabupaten Tangerang akan segera diterangi oleh lampu-lampu listrik. Itu semua adalah berkat perjuangan Golkar yang berhasil mengangkat aspirasi rakyat. Tetapi Ketua Umum tak mau bertepuk dada. Dia hanya berpesan pendek;'' Gunakan listrik ini dengan seefisien mungkin sehingga bermanfaat bagi putra-putri kita untuk belajar serta meningkatkan produktifitas.'' Matahari di atas Saga sudah hampir terbenam, tetapi warga Saga kini tidak risau lagi. Mereka sudah punya listrik! □ **RS/ape**

Digitized by Google

Membangun Sebatas Kemampuan

Swadaya masyarakat patut dihargai

Sudharmono SH ditengah kesibukannya baik sebagai Ketua Umum Gol-Negara maupun sebagai Ketua Umum Golkar, meluangkan waktu bersilaturrahmi dengan warga Cireundeu, Kec. Ciputat dan warga desa Karang Tengah, Kec. Cilandak, di kawasan pinggiran Jakarta bagian selatan. Kunjungan pada tanggal 13 Desember itu sekaligus juga meresmikan dua buah Masjid, yang masing-masing dibangun oleh Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP) dan hasil swadaya masyarakat.

Masing-masing kebagian waktu tigaperempat jam. Waktu yang sesingkat itu dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana dalam acara kunjungan-kunjungannya di daerah lain. Dalam bulan Desember yang lalu di mana DPP Golkar tengah disibukkan dengan kegiatan penataran juru kampanye Golkar tingkat nasional yang berlangsung selama sebulan penuh, Ketua Umum masih dapat memanfaatkan waktu untuk mengunjungi warganya di Indonesia bagian Timur dan Barat. Tepatnya, di Indonesia Timur di Sulawesi Selatan yang meliputi Kab. Soppeng, Bone, Wajo, dan Indonesia barat ke Kab. Belitung, Sumatera Selatan bagian utara. Walau masing-masing hanya mendapatkan waktu antara satu sampai satu setengah jam, selayang pandang memang, namun bagi daerah yang pandai memanfaatkan waktu itu rupanya cukup lega dan puas selama ini. Maka tidaklah heran jika pada suatu kunjungan kerjanya di Universitas Jayabaya baru-baru ini, Rektor yang Prof DR itu minta resep seninya membagi waktu, di mana Sudharmono SH sebagai Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Umum DPP Golkar dalam kurun waktu 3 tahun ini sering terdengar, di pagi hari masih memberikan pengarahan di Ujung Indonesia belahan barat, tapi di sore harinya telah terdengar mengadakan tatap muka dengan warganya di Indonesia belahan timur. Padahal jarak antara sabang—merauke jika dibandingkan panjangnya, sama dengan jarak antara San Fransisco di pantai barat dan Washington di pantai timur, dan luas Indonesia meliputi 5.193.250 km2.

"Pembangunan di Indonesia memerlukan kerja keras dengan terus menerus berkarya. Hal ini perlu disadari oleh kita semua," katanya ketika berada di tengah-tengah warga Karang Tengah, dalam meresmikan Masjid Nurul Falah yang hampir seluruhnya dibiayai oleh masyarakat.

Di tengah antusiasme warga setempat Sudharmono menuturkan bahwa salah satu hukumnya ialah bahwa pembangunan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat harus juga digerakkan daya dan dananya, karena pembiayaan bukan hanya pemerintah yang harus menyediakan. Dalam pada itu Sudharmono, SH selaku menteri Sekretaris Negara maupun sebagai pimpinan Golkar sangat menghargai kesadaran warga masyarakat yang dengan tulus berswadaya dalam pembangunan. Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah di bawah pimpinan Presiden mandataris diserahi tugas oleh rakyat untuk membimbing, memimpin jalannya pembangunan itu supaya berjalan lancar. Oleh karenanya dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan, mengingat pembangunan yang kita lakukan adalah pembangunan yang sangat luas sifatnya, pembangunan yang bukan hanya mengejar perkembangan materi, tapi juga mengejar pemerataan untuk kebutuhan materi dan spiritual termasuk keimanan, keagamaan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

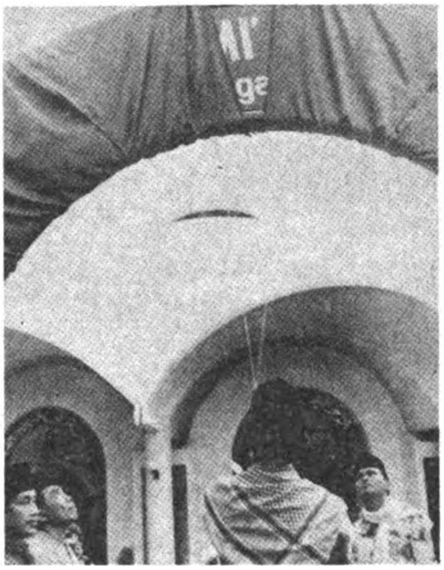

Membuka selubung nama mesjid.

Pembangunan Masjid modern mirip teater Keong Mas itu telah menelan biaya Rp. 160 juta; 90% dari itu adalah hasil pengerahan daya dan dana dari masyarakat. Masjid artistik tersebut meskipun sudah dikerahkan banyak dari masyarakat masih juga belum sempurna, belum tuntas selesai. Sedang sementara warga telah menanti Masjid dambaannya untuk cepat sempurna. Dalam menanggapi hal itu Sudharmono kembali menuturkan "tidak mengapa" karena memang pembangunan yang kita lakukan harus sesuai dengan batas kemampuan. Kita tidak boleh ngoyo, memaksa-maksa diri kita untuk membangun apa yang diluar kemampuan. Justru karena itu, pembangunan kita bertahap dan berkesinambungan. Jika terus ditekuni akhirnya pasti akan dapat diselesaikan. Seperti dikemukakan oleh Ketua Panitia Syarnubi, BA pembangunan Masjid Nurul Falah itu masih memerlukan dana ± Rp. 35 juta lagi. Jika ini telah selesai baru merupakan tahap pembangunan pertama, setelah itu masih akan dilanjutkan pembangunan tahap kedua yaitu mendirikan TK/SD dan perpustakaan. Pada pembangunan tahap selanjutnya lagi akan didirikan sekolah lanjutan pertama, lanjutan atas, sampai perguruan tinggi, yang kini sedang dipersiapkan pembebasan tanahnya seluas 4500 m2.

Sementara itu Sudharmono, SH pada kesempatan peresmian Masjid Yayasan Pendidikan Islam Ruhama (YPIR) bantuan dari Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP) menjelaskan bahwa Masjid yang diresmikan ini merupakan yang ke-86 yang selesai dibangun. Menurutnya YAMP semenjak berdirinya 4 tahun lalu, telah memberikan sumbangan Masjid sebanyak 200 di seluruh Indonesia. Dan masih banyak lagi pengajuan Masjid yang sedang diteliti kelayakannya untuk dapat dibangun. Syarat untuk dapat bantuan Masjid dari YAMP adalah masyarakat harus menyediakan tanah yang sudah matang, artinya tanah yang sudah siap untuk dibangun dan disertakan pembuktiannya (hak milik, wakaf atau tanah pemerintah) dengan luas 2000 m2 (40 x 50 m). Pengajuan permohonan hendaknya diketahui pemda setempat, sekurang-kurangnya Bupati/Walikota, Kanwil Dept Agama, DPD Golkar tingkat II, DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Tingkat II. Tipe Masjid, 15,17,19.

Pada kesempatan peresmian Masjid di kedua tempat itu Sudharmono memberikan sumbangan uang masing-masing sebesar Rp. 5 juta, sedang Ny. EN Sudharmono memperoleh kehormatan pengguntingan pita sebagai tanda mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada kesempatan itu pula diserahkan seperangkat drumband dari PT Timur Jauh kepada AMPI rayon Cilandak, melalui Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono, SH.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPP Golkar Ny AS Moerpratomo, Wakil Sekjen Ir. Akbar Tandjung, Ny Busiri, Nn Sri Redjeki, Soekarton Marmosudjono, Tantyo Sudharmono, Sudharsono dan Ketua DPP Golkar DKI Achmadi serta segenap fungsionaris Golkar setempat.☐ (wt)

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA ORGANISASI

PENATARAN JURKAM

Selama bulan Desember tahun lalu DPP Golkar menyelenggarakan penataran juru kampanye secara berturut-turut. Penataran jurkam tingkat nasional itu dibagi dalam tiga Angkatan, dan diikuti oleh 565 orang. Di antaranya, 470 orang adalah calon anggota DPR-RI.

Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, dalam pengarahannya selalu menekankan pentingnya peranan generasi muda yang dalam masa dekat ini akan lebih banyak terlibat dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

"Sikap kritis, dinamis serta keberanian yang dimiliki generasi muda itu memerlukan penjelasan yang terang dan tidak mengada-ada dalam pelaksanaan kampanye mendatang," kata Ketua Umum.

Selain itu, Ketua Umum juga mengingatkan agar dalam melaksanakan kampanye nanti, sesuai petunjuk yang telah diberikan oleh DPP Golkar, para jurkam harus mampu menciptakan suasana yang tenang, bergairah dan tidak tegang. "Saya harapkan kepada semua pihak agar tidak mudah terpancing emosi dan provokasi dari pihak manapun," tegas Sudharmono.

Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga, Abdul Gafur, dalam pengarahannya menjelaskan bahwa cara berkampanye yang baik adalah dengan tidak melakukannya secara sendiri-sendiri atau terpisah, seperti yang terjadi pada Pemilu yang telah lewat. Sebaiknya diatur oleh pimpinan Golkar setempat, katanya.

WANITA UMNO KE JAKARTA

Departemen Wanita DPP Golkar, baru-baru ini mendapat kunjungan dari Pergerakan Wanita UMNO wilayah Batu. UMNO adalah partai yang kini berkuasa di Malaysia.

Dalam pertemuan yang bersifat silaturachmi itu Ibu Busyiri, Ketua Departemen Wanita DPP Golkar, menjelaskan fungsi dan peranan wanita di Indonesia kepada tamunya. Rombongan Pergerakan Wanita UMNO—Batu itu berjumlah sekitar 35 orang dan dipimpin oleh Puan Zainun Suandi.

Pertemuan tersebut juga diisi dengan tukar pikiran mengenai kegiatan kaum wanita di negara masing-masing. Ibu Busyiri antara lain menerangkan bahwa kaum wanita di Indonesia tidak hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi ada juga yang duduk di parlemen dan menekuni dunia bisnis.

Dalam kunjungan singkatnya di Indonesia, Pergerakan Wanita UMNO itu juga mengunjungi kota kembang—Bandung. Kunjungan mereka ke Indonesia ini bersifat tour. **(BM)**

DIALOG DI SUKABUMI

Tak kurang dari sekitar sepuluh ribu pengunjung, Desember lalu, memadati gedung Gelanggang Generasi Muda Sukabumi, untuk menyaksikan malam hiburan yang diselenggarakan keluarga besar AMPI Sukabumi bekerjasama dengan rombongan DPP AMPI yang sedang bersafari ke daerah.

Penyelenggaraan malam hiburan itu sendiri bukannya mengada-ada, tetapi merupakan bagian dari program DPP AMPI yang menurut Agung Laksono sang Ketua Umum, sebagai upaya untuk memelihara dialog dengan massa AMPI di daerah.

Tak pelak lagi, malam hiburan itupun terasa bagai malam kekeluargaan yang penuh dengan keakraban. Baik antar sesama anggota AMPI maupun dengan organisasi-organisasi lain yang bernaung di bawah satu panji, Golkar.

Kunjungan DPP AMPI beserta beberapa aktifis AMPI DKI Jakarta yang memboyong pula artis-artisnya ke Sukabumi itu, memang dimaksudkan untuk membina dialog dengan massa AMPI di daerah. Sebab, dengan seringnya dialog akan timbul rasa turut memiliki serta tanggung jawab yang semakin besar, ujar Agung Laksono.

Dalam pertemuan tatap muka yang berlangsung sore hari sebelum malam hiburan berlangsung, terasa sekali antusiasme yang begitu besar dari massa AMPI Sukabumi untuk berbicara langsung dengan Ketua Umumnya. Walhasil, pertemuan itupun berlangsung hangat selama dua setengah jam dengan membuahkan hasil yang sangat positif.

Perhatian yang begitu besar dari massa AMPI Sukabumi tersebut membuat sang Ketua Umum sangat terkesan sehingga diapun berkata: "Tidak usah diragukan lagi, di mana ada baret kuning di situ panji Golkar berkibar," yang lantas disambut tepuk tangan meriah hadirin.

Bukan itu saja, sang Ketua Umumpun tak segan-segan mengeluarkan dari dompet pribadinya uang sejumlah Rp 250.000 untuk pembangunan madrasah yang dimotori oleh AMPI Sukabumi, di samping hadiah lainnya berupa jaket AMPI, jam tangan dan pena berlogo Golkar, kepada siswa madrasah Karang Tengah, Kampung Banda—Cibadak itu. **RS/ape**

Digitized by Google

Daftar Calon Sementara Golkar Untuk Pemilu 1987

2

GOLONGAN KARYA

DAERAH ISTIMEWA ACEH

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	H. BUSTANIL ARIFIN, SH (Jakarta)	8.	Drs. H.M. DIAH IBRAHIM (Banda Aceh)	16.	Drs. H. ASNAWI HUSIN (Banda Aceh)
2.	Prof. DR. SYARIF THAYEB (Jakarta)	9.	Drs. H. LOEKMAN (Jakarta)	17.	TGK. H. TEUKU USMAN FAUZY (Banda Aceh)
3.	H.A.MUZZAKIR WALAD (Banda Aceh)	10.	Ir. H.T. SURIANSJAH (Jakarta)	18.	H. MUHAMMAD NOER NEKMAT (Banda Aceh)
4.	Prof. DR. H. ISMUHA, SH (Banda Aceh)	11.	Ny. NURAINI SUBARDA (Jakarta)	19.	Drs. TEUKU SYAHRUL (Jakarta)
5.	Dr. H. YULIDDIN AWAY, DTPH (Jakarta)	12.	NASRUDDIN HARS (Jakarta)	20.	Dr. RASYIDI BDB (Jakarta)
6.	Ir. H. ABDULLAH PUTEH, BRE (Jakarta)	13.	H. ABDULLAH MAHDANI (Banda Aceh)		
7.	H. MOEHAMMADIYAH HADJI, SH (Jakarta)	14.	Drs. KAHARUDDIN SYAH (Jakarta)		
		15.	H. MUHAMMAD RAMLY MAHMOED (Langsa)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

SUMATERA UTARA

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	MARADEN PANGGABEAN (Jakarta)	15.	Drs. FAOZIDUHU HAREFA, SH (Jakarta)	29.	MUHAMMAD IMRAL NASUTION (Medan)
2.	ACHMAD TAHIR (Jakarta)	16.	T.A. LINGGA (Jakarta)	30.	NASRUL ZAHIRUDDIN TANDJUNG (Jakarta)
3.	DR. ARIFIN M. SIREGAR (Jakarta)	17.	Ir. ABDURACHMAN RANG-KUTI (Jakarta)	31.	Ny. H.T. MAS SJAHNAN (Medan)
4.	Prof. DR. H. SUHARDIMAN, SE. (Jakarta)	18.	Drs. OSMAN SIMANJUN-TAK (Medan)	32.	Ny. MAHARANI ALI GENO (Medan)
5.	DAVID NAPITUPULU (Jakarta)	19.	Drs. MULATUA PARDEDE (Medan)	33.	Ir. OESTARA WIRADINATA (Jakarta)
6.	HAJI MAS SUKARDI (Medan)	20.	Drs. H. SLAMET RYANTO (Medan)	34.	MANSEN PURBA, SH. (Medan)
7.	H. PROBOSUTEDJO (Jakarta)	21.	Ir. ERIE SOEKARDJA (Medan)	35.	Drs. BAGINDA SAGALA (Medan)
8.	Ny. LIKAS TARIGAN JAMIN GINTINGS (Jakarta)	22.	Drs. PALAR BATUBARA (Jakarta)	36.	Drs. MARCOS MANGISARA LUBIS (Jakarta)
9.	Ny. SITI ROOSTAMY RESPATININGSIH (Medan)	23.	AZMY PERKASA ALAM ALHAJ (Jakarta)	37.	Drs. H.A. RACHMAN PASARIBU (Jakarta)
10.	Drs. JAKOB TOBING, MPA. (Jakarta)	24.	Drs. HERAWATI TARIGAN (Medan)	38.	Prof. DR. ADIPUTERA PAR-LINDUNGAN, SH. (Medan)
11.	HAJI ABDUL MANAF LUBIS (Jakarta)	25.	DWIE RIAWENNY S. NA-SUTION, BA. (Medan)	39.	Drs. MAHADI SINAMBELA (Jakarta)
12.	H. DJAMALUDDIN TAM-BUNAN, SH (Jakarta)	26.	H. BURHANUDDIN NAPI-TUPULU (Medan)	40.	Drs. RIA RUMATA ARITO-NANG (Jakarta)
13.	Drs. H. BOMER PASARIBU, SH (Jakarta)	27.	ARIFIN S.S. TAMBUNAN, SH. (Jakarta)	41.	PINANTUN HUTASOIT (Jakarta)
14.	M.S. SITUMORANG, SH. (Jakarta)	28.	HAJI ZAINUDDIN TAN-JUNG (Medan)	42.	BANDJAR MARPAUNG (Jakarta)

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

SUMATERA BARAT

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Prof. DR. FUAD HASSAN (Jakarta)	10.	AHMAD MAKMUR RIDHWAN (Padang)	20.	S. WOORYONO WIDJOYO-DIPUTRO (Jakarta)
2.	Prof. Drs. HARUN AL RASYID ZAIN (Jakarta)	11.	ZULHARMAN SAID (Jakarta)	21.	H. ISMAEL HASSAN, SH. (Jakarta)
3.	Ny. JUSMEINI AZWAR ANAS (Padang)	12.	AULIA AMAN RACHMAN, SH (Jakarta)	22.	SOETAN MOEHAMAD TAUFIQ THAIB, SH. (Padang)
4.	Prof. DR. Ir. H. JURNALIS KAMIL, MSc. (Padang)	13.	H. DJOHARI KAHAR DT. BAGINDO, SH. (Jakarta)	23.	ZAINAL HAMID YUSUF, BSc. (Jakarta)
5.	Drs. H. SJOERKANI (Padang)	14.	NOVYAN KAMAN, SH. (Jakarta)	24.	AMINUZAL AMIN DT. RAJO BATUAH (Padang)
6.	DR. AMIR SYARIFUDDIN (Padang)	15.	DAMCIWAR, SH. (Jakarta)	25.	FAHMI IDRIS (Jakarta)
7.	Drs. H. HASAN BASRI DURIN (Padang)	16.	Drs. AKMAL SININ (Jakarta)	26.	Ny. RABIMAR JUZAR BUR (Jakarta)
8.	Ir. JANUAR MUIN (Padang)	17.	H. JAMARIS YOENOES (Padang)	27.	DJAJA PUTERA RACHMAN (Jakarta)
9.	Prof. Drs. JAMIL BAKAR (Padang)	18.	H. AHMAD HMS, SH. (Jakarta)	28.	Ny. REKNA DJUZIMA SADIKIN ADIKUSUMAH (Jakarta)
		19.	Ir. IRMA ALAMSYAH, MSc. (Padang)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : PARTAI DEMOKRASI INDONESIA.

RIAU

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	ISMAIL SALEH, SH (Jakarta)	6.	Drs. H. ISMAIL SUKO (Pekanbaru)	10.	Prof. DR. MUCHTAR LUTFI (Pekanbaru)
2.	Ir. HASJRUL HARAHAP (Jakarta)	7.	Ny. HJ. ROSMA JUPIN SARAGIH, BA (Pekanbaru)	11.	WAN GHALIB (Pekanbaru)
3.	H. MASNOER (Pekanbaru)	8.	Drs. ZAMHARIR, AR (Jakarta)	12.	Ny. THRESS SOELAKSI SOEDADI (Jakarta)
4.	R. SOETJIPTO, SH (Jakarta)	9.	Drs. K.H. MUHAMMAD YATIM. D (Pekanbaru)	13.	Drs. ASRUL JAAFAR (Pekanbaru)
5.	GOENARSO, SF (Jakarta)			14.	Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN (Pekanbaru)

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

JAMBI

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Dr. SUWARDJONO SURYA-NINGRAT (Jakarta)	5.	SUPOMO (Jambi)	9.	Ny. H. SITI RUBIAH AZHARI (Jambi)
2.	Drs. H. ABDURRACHMAN SAYOETI (Jambi)	6.	A. AZIES PULUNGAN (Jakarta)	10.	Drs. H. UMARRUDIN (Jakarta)
3.	Ir. USMAN HASAN (Jakarta)	7.	Z. ANSORI AHMAD, SH (Jambi)	11.	Drs. MUHYAN TAMBUSE (Jambi)
4.	NAWAWI JUFRI, BA (Jambi)	8.	Drh. MALIAN AHMAD (Jambi)	12.	Rd. BADARUDDIN, BA (Jambi)

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

BENGKULU

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	MARTONO (Jakarta)	4.	ZAINUL ASIKIN (Bengkulu)	7.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR (Jakarta)
2.	Drs. H. MUHAMMAD MURNI (Jakarta)	5.	Drs. NOOR MARWANSYAH HASAN (Bengkulu)	8.	MARZUKI ACHMAD, SH (Jakarta)
3.	Dr. H. ABU HANIFAH RACAMAN (Palembang)	6.	Ny. NURWILIS MOCHTAR, SH (Bengkulu)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

Digitized by Google

SUMATERA SELATAN

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA (Jakarta)	9.	Ny. W.M. SUDJOKO (Jakarta)	18.	Ny. NAIDHY ATIKA, SH (Palembang)
2.	MAKMUN MUROD (Jakarta)	10.	H. AHMAD NATAR (Palembang)	19.	Ir. SAIDI HARUN (Palembang)
3.	ROESMIN NURJADIN (Jakarta)	11.	Ir. H. INDRA BAMBANG UTOYO, SE (Palembang)	20.	Drs. LIPUR NAIM (Palembang)
4.	Ny. H. SITI RAHAYA SAINAN SAGIMAN (Palembang)	12.	HARRY SOEWONDO, SH. (Jakarta)	21.	Ny. H. NURLIA CHOLIL (Palembang)
5.	M. HATTA MUSTAFA, SH (Jakarta)	13.	H. MOHD. TASLIM IBRAHIM (Jakarta)	22.	Drs. RATNAWATI FUAD (Jakarta)
6.	H. CH. MUHAMMAD MUAS (Depok)	14.	SAIFUL MD (Palembang)	23.	RUSYDI ZEN (Palembang)
7.	Ny. R.H.A. TUTI ZAHRA HAMID, S.H. (Jakarta)	15.	H. SAUDIN SAGIMAN (Jakarta)	24.	Drs. H. NOVIARMAN KAILANI. H (Palembang)
8.	AMIR YUDOWINARNO (Jakarta)	16.	Dr. BURLIAN ABDULLAH (Palembang)	25.	Drs. H.M. ALHADY HAQ (Palembang)
		17.	JAHJA BAHAR (Palembang)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : PARTAI DEMOKRASI INDONESIA.

LAMPUNG

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	RACHMAT SALEH, SE (Jakarta)	8.	H A R D O Y O (Jakarta)	15.	H. DJAFAR AMID (Bandar Lampung)
2.	Dr. H. AMINO GONDO-HUTOMO (Jakarta)	9.	A.H. SAZILI. M (Jakarta)	16.	Ny. UTIAH HELMI, SH (Bandar Lampung)
3.	Ny. SITI MAEMUNAH ALAMSYAH (Jakarta)	10.	Ir. ZULKIFLI INDRA-KESUMA (Bandar Lampung)	17.	Drs. Hi. SYARIF ZULKARNAIN (Bandar Lampung)
4.	Ny. SUKIYAH YASIR HADIBROTO (Bandar Lampung)	11.	Dr. MP. PASARIBU (Jakarta)	18.	Drs. SURYA DARMA PALOH (Jakarta)
5.	ALBERT HASIBUAN, SH (Jakarta)	12.	Drs. Ny. CHOIRIYAH MOESTOFA (Jakarta)	19.	BAMBANG H. SAMUEL, SH (Jakarta)
6.	Drs. H. MUCHSIN RIDJAN (Jakarta)	13.	Ir. ABURIZAL BAKRIE (Jakarta)	20.	Ny. KOESOETYANINGSIH SOEPADMO (Jakarta)
7.	H.R.A. RIVAI (Jakarta)	14.	H.A. YAHYA MURAD, SH (Bandar Lampung)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

JAKARTA

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	SUDHARMONO, SH (Jakarta)	11.	K.H.A. SYARIFUDDIN SAPARI. (Jakarta)	20.	Drs. MOHD. KAHARUDDIN (Jakarta)
2.	Prof. DR. ALI WARDHANA (Jakarta)	12.	SOESENO (Jakarta)	21.	Ir. ROHALI SANI. (Jakarta)
3.	Ir. HARTARTO SASTRO-SOENARTO. (Jakarta)	13.	AGUNG LAKSONO (Jakarta)	22.	K.H. MUCHTAR LUTHFI ELANSHARY. (Jakarta)
4.	K.H. A. THOHIR WIDJAJA (Jakarta)	14.	Drs. FERDINAND MARULAM TUA RAJAGUK-GUK (Jakarta)	23.	Ir. FAUZI BOWO. (Jakarta)
5.	H. TJOKRO PRANOLO (Jakarta)	15.	SUKOTRIWARNO, SH (Jakarta)	24.	Ir. SOEKRISMAN. (Jakarta)
6.	Ny. HARTINI MOERDANI (Jakarta)	16.	SOEDARSONO (Jakarta)	25.	PONTJO SUTOWO (Jakarta)
7.	Ny. SOEPRAPTI SOEPRAP-TO. (Jakarta)	17.	Drs. SZS. PANGERAN ALHAJ. (Jakarta)	26.	SOFJAN WANANDI. (Jakarta)
8.	SARWO EDHIE WIBOWO (Jakarta)	18.	WIDJANARKO PUSPOYO, MA (Jakarta)	27.	Drs. DIDIET HARYADI PRIYOHUTOMO. (Jakarta)
9.	Ny. ANINDIYATI SULASI-KIN MURPRATOMO. (Jakarta)	19.	Ny. TUTI SUTIAWATI TRY SUTRISNO. (Jakarta)	28.	ERWAN SUKARDJA, SH. (Jakarta)
10.	EFFENDI JUSUF, SH. (Jakarta)			29.	BAMBANG SULISTOMO. (Jakarta)

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

JAWA BARAT

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	H. AMIRMACHMUD (Jakarta)	43.	Drs. AMINULLAH ADIWI-LAGA (ANDUNG) (Bandung)	85.	H. RACHMAT MUHAMMAD SAAD SULAIMAN (Bandung)
2.	Ir. ACHMAD AFFANDI (Jakarta)	44.	ENDANG DJUNAEDI (Bandung)	86.	Ny. KADARMANI ABDUL KADIR (Jakarta)
3.	Ny. KARLINAH UMAR WIRAHADIKUSUMAH (Jakarta)	45.	Ny. R.H. SARIKINKIN ACHMAD DIMJATI, BA (Bandung)	87.	H. HUDLY BAMBANG ARUMAN (Bandung)
4.	Ny. RATU R.N. SUDHAR-MONO (Jakarta)	46.	Drs. H. MASKA RIDWAN (Jakarta)	88.	R.H. LILY SUMANTRI (Bandung)
5.	M A S H U D I (Bandung)	47.	Drs. Ny. POPONG OTJE DJUNDJUNAN (Bandung)	89.	Drs. H. DJAUHARUDDIN. AR. (Bandung)
6.	Ny. E. YOGIE S.M. (Bandung)	48.	RATNA. S. SOEWITA AT-MADJA. R. (Bandung)	90.	HIKMAT RUCHIMAT, SmHk (Bandung)
7.	H.E. SUKMA (Bogor)	49.	Ny. H. GUNARIYAH K. MOCHDIE (Jakarta)	91.	Drs. EMAN SULAEMAN (Jakarta)
8.	K.H.A. SHOHIBUL WAFA TAJUL ARIFIN (Tasikmalaya)	50.	NANANG SUDJANA, Sm. Hk. (Bandung)	92.	Drs. ISHAK SOMANTRI (Bandung)
9.	Prof. DR. ANDI HAKIM NASOETION (Bogor)	51.	Drs. BAMBANG WAHYU-DI (Bandung)	93.	Ny. ELS SRIDJATI SOEPONO, SH. (Bandung)
10	YUYUN WIRASASMITA, M. Sc. (Bandung)	52.	H.M. NI'MAT RAHMATUL-LAH, Bc. Hk. (Bandung)	94.	DJUKARDI ODANG, SH. (Jakarta)
11.	Prof. DR. ACHDIAT DODDY TISNA AMIDJAJA (Jakarta)	53	Drs. ARDI PARTADINATA (Bandung)	95.	Dr. RUSTANDI, MPH. (Bandung)
12.	Prof. DR. Ir. TOJIB HADI-WIDJAJA. (Jakarta)	54.	EDDY SUDIHARDJO (Jakarta)	96.	YAYAT HENDAYANA (Bandung)
13.	Prof. DR. AWALOEDIN DJAMIN. (Jakarta)	55.	H. IRAWAN BRATAKUSU-MAH, SH (Jakarta)	97.	K.H.M. DJURDJIS IBRAHIM (Pandeglang)
14.	Ir. SARWONO KUSUMA-ATMADJA (Jakarta)	56.	H. MUBIEN ARSHUDIN (Lebak)	98.	H. OPON SOPANDJI (Bogor)
15.	Ir. RACHMAT WITOELAR (Jakarta)	57.	TJETJE HIDAYAT PADMA-DINATA. (Bandung)	99.	Dr. H. RACHMAN MAAS (Bandung)
16.	TATTO SUGIARTA PRA-DJAMANGGALA SH (Jakarta)	58.	Drs. H. MASHUD WISNU-SAPUTRA. (Jakarta)	100.	H. WASITA KUSUMAH (Tasikmalaya)
17.	K.H. SAKTI QUDRATUL-LAH (Jakarta)	59.	Ny. MARTINI SOEMALI (Bandung)	101.	H. Ir. IMAM TAUFIK (Jakarta)
18.	H. BASYUNI SURIAMI-HARJA (Jakarta)	60.	BRATAWINATA (Bandung)	102.	Drs. PONTAS HUTAGA-LUNG (Bandung)
19.	Ir. Ny. TATI SUNARTI SUMIARNO (Jakarta)	61.	MOHAMMAD HUZAINAL B. Sc. (Bandung)	103.	Drg. AVIP SYARFULLAH (Bandung)
20.	SRI REDJEKI LASMIDAR, SH. (Jakarta)	62.	ENDANG RUSMA (Bandung)	104.	Ir. HENDRO TRISULO (Bandung)
21.	Drs. NUGRAHA BESOES (Jakarta)	63.	K.H. TB. RASYAD ASNAWI. (Pandeglang)	105.	MOHAMAD SULEIMAN HIDAYAT (Bandung)
22.	H. ABDUL FIRMAN (Jakarta)	64.	DR. HARYANTO DHANU-TIRTO. (Bandung)	106	Ir. TB. IWAN ZOEHRA (Bandung)
23.	Drs. Ny. INNE ERNA ADRIANA SOEKARYO (Jakarta)	65.	Ir. Drs. LILI ASDJUDI-REDJA. (Bandung)	107	Drs. E. KOSIM SUKANDA (Jakarta)
24.	MARZUKI DARUSMAN, SH (Jakarta)	66.	DR. H. ATENG SYAFRU-DIN, SH. (Bandung)	108	Drs. Ny. R. LIENTJE SUHARTI SISWADI (Cirebon)
25.	H. ADJAT SOEDRADJAT (Bandung)	67.	H. MOHAMMAD HATTA, BBA. (Bogor)	109.	BAHRIYOEN SOETJIPTO (Jakarta)
26.	H. SULAEMAN TJAKRA-WIGUNA, SH. (Bandung)	68.	Drs. H.M. IRSYAD SUDIRO (Bogor)	110	Ny. ATTIE ANDJAR RACH-MAN, SH. (Bandung)
27.	Ny. SITI CHATIMAH SU-KAHAR. (Jakarta)	69.	Ny. SOERTANI SOETANTO WIRJOPRASANTO, BA. (Jakarta)	111	Ny. ASTRI WASKITO DJUANDA (Jakarta)
28.	H. OYON TAHYAN (Tasikmalaya)	70.	Ny. IDA AYU UTAMI PIDADA. (Jakarta)	112	Prof. DR. Ir. KUDRAT SOEMINTAPOERA (Bandung)
29.	Ny. H. RUKIAH SALKON WIGENA (Bandung)	71.	H. HARDI SUSILO (Bandung)	113.	ASEP SYARFUDIN HER-MAWAN (Bogor)
30.	Drs. H. HASANUDDIN (Bandung)	72.	BAMBANG PERMADI AMIRMACHMUD (Jakarta)	114	Ir. HERMINA SUJONO HADI (Bandung)
31.	Ny. SRI REDJEKI INDRO SOEBAGIO (Jakarta)	73.	R. ISA DANUBRATA (Jakarta)	115.	DADA ROSADA, SH. (Bandung)
32.	H. RAUF EFFENDI (Bandung)	74.	R.H. ABDUL RODJAK MUHAMMAD ALI (Bandung)	116	Drs. ZAINAL ARIFIN MANSUR (Cirebon)
33.	AWAN KARMAWAN BUR-HAN, SH. (Jakarta)	75.	MOH. SAPINGI (Bandung)	117	R. SOEPRAPTO JOEDO-SOETRO (Bandung)
34.	TAUFIK HIDAYAT, SH. (Bandung)	76.	HAYAT RUDIAT, SH. (Bandung)	118.	T. BURHANUDDIN (Bandung)
35.	Drs. YAN MOKOGINTA (Jakarta)	77.	Drs. H. AZHARI (Bandung)	119.	HARDI MAKSUD, BSc. (Bandung)
36.	WARNO HARDJO, SE (Jakarta)	78.	UU' RUKMANA (Bandung)	120.	ASEP RUCHIMAT SUDJANA (Jakarta)
37.	H. BAMBANG SUTISNA, SH (Jakarta)	79.	Drs. OKI HIDAYATI (Bandung)	121.	Ir. Drs. KUDRAT IKRA-SAPUTRA (Bandung)
38.	MOHAMAD SOELARDI HA-DISAPOETRO (Bandung)	80.	H. EEM RACHMAT, BcTT (Bandung)	122.	Ir. H. ADJAT SUDRADJAT SUDIRAHARDJA (Bandung)
39.	SOETRISNO (Bandung)	81.	H. AGUS TAGOR (Bogor)		
40.	GUSTAAF HENDRIK MANTIK. (Jakarta)	82.	H. ACHMAD ADNAWI-DJAJA (Bandung)		
41.	KADARUSMAN KADI (Bandung)	83.	Dr. MOCHAMMAD IMAM MOEDJONO (Bandung)		
42.	H. ABOENG KOESMAN SOMAWIDJAJA. (Bandung)	84.	Ir. SALMON MUSTOFA (Jakarta)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

Digitized by Google

JAWA TENGAH

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX (Yogyakarta)	40.	H. ASFOERI POERWOSASMITO (Semarang)	79	Drs. KUSMAHARDIJATI SOEBIJANTO (Jakarta)
2.	S U R O N O (Jakarta)	41.	ABDUL LATIEF, SH (Jakarta)	80.	TUMPAL S.P. SIANIPAR (Jakarta)
3.	DR. Ir. SOEYONO SOSRODARSONO (Jakarta)	42.	H. SUHADI HARDJO SUTARNO (Jakarta)	81.	Drs. HARI MULYONO (Semarang)
4.	DR. H. AMIR MOERTONO, SH (Jakarta)	43.	KH. DJOHAN MUHARI (Semarang)	82.	Drs. ABD. LATIEF NAWAWI, SH (Kudus)
5.	Ir. WARDOYO (Jakarta)	44.	Ir. S O E R A D J I (Jakarta)	83.	ZAHID HUSSEN (Jakarta)
6.	GPH. DJATIKUSUMO (Jakarta)	45.	Drs. SHRIYANTO (Semarang)	84.	FARIDA SYAMSI CHADARIA, SH (Jakarta)
7.	MASHURI, SH (Jakarta)	46.	Ny. CAYA SOEPANGAT (Jakarta)	85.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO (Jakarta)
8.	MANGKU NEGORO VIII SRI PADUKA (Surakarta)	47.	Ir. Ny. NIKENTARI MUSDIONO (Jakarta)	86.	H.A.M. EFFENDY, SH (Semarang)
9.	Ny. SUWARTI SURONO (Jakarta)	48.	DJOKO MURSITO HUMARDANI (Jakarta)	87.	Drs. SOETJIPTO (Jakarta)
10.	Ny. KARDINAH SOEPARDJO (Jakarta)	49.	KH. ZUHRI AL AMIN (Semarang)	88.	RAHAYUNI PRAMONO, SE (Semarang)
11.	Ny. SITI SUMARSI HENDRO PRAJOKO (Semarang)	50.	MARTIN HAMONANGAN HUTABARAT, SH (Jakarta)	89.	Drs. YAYAH MASKIYAH ZARKOWI SOEYOETI (Semarang)
12.	Ny. YAYU RULIA A. YANI (Jakarta)	51.	Ir. DANNY SOEDARSONO (Jakarta)	90.	TITIEK PUSPA (Jakarta)
13.	H. WIDARTO (Semarang)	52.	J. M O E L Y O N O (Semarang)	91.	S U S I L O, SH (Semarang)
14.	K.H. ZUBAIR (Semarang)	53.	TJAHJO KUMOLO, SH (Semarang)	92.	Ny. SRI HAYATI SOEWARNO DJOJOMARDOWO, BA (Semarang)
15.	H. M O E N A D I (Semarang)	54.	MASKAN SADJARWO (Semarang)	93.	Ny. POPPY S. SUKANTYO (Jakarta)
16.	H. SUKAMDANI S. GITOSARDJONO (Jakarta)	55.	Ny. SULASIH IMRON ARSYAD (Jakarta)	94.	H. ANOM SOEROTO (Surakarta)
17.	Prof. SOEHARDJO SASTROSOEHARDJO, SH (Jakarta)	56.	Drs. SOEHARJONO (Semarang)	95.	R. AY. SRI TARTINAH SOETARSO HD. (Surakarta)
18.	AGUS SUDONO (Jakarta)	57.	Drs. AL. SOELISTYA (Surakarta)	96.	DJOEMENO DARMODIDJOJO, SH (Semarang)
19.	Drs. MOERDOPO (Jakarta)	58.	S A Y I D A B A S (Semarang)	97.	Drs. H. CHOZIN HUSNIN (Jakarta)
20.	Ny. ANITA SUCI PITOYO MANGKOE SOEBROTO (Jakarta)	59.	Drs. S O E H A R D I (Semarang)	98.	Ir. SOEHARSOJO (Semarang)
21.	H. KARDIMAN (Semarang)	60.	Ir. H. HADITIRTO (Jakarta)	99.	Drs. Ny. SOEKATI MARWOTO (Jakarta)
22.	Drs. SOERATNO HS (Surakarta)	61.	Drs. S O E J A T T A (Semarang)	100.	Drs. DJOKO PURWONGEMBORO (Jakarta)
23.	KRISSANTONO (Jakarta)	62.	Prof. DR. MOELJONO S. TRASTOTENOJO (Semarang)	101.	Drs. Ny. TJETJE TRESNATI SOEDIHARTONO (Semarang)
24.	WARSITO PUSPOYO, SH (Jakarta)	63.	DR. WIRJONO EMAWAN (Kudus)	102.	PRASETYO DJOKO SASONGKO (Jakarta)
25.	Drs. H. OEMAR SAID DJOJOSAPOETRO (Jakarta)	64.	H.R.M. SOERYOSOEMPENO (Semarang)	103.	DR. Ir. ROEKMOWATI HARTONO, MA (Jakarta)
26.	Drs. HARUN RASYIDI (Ambarawa)	65.	SUDWIKATMONO (Jakarta)	104.	H. SJAMSUDDIN ZAHAR, SE (Jakarta)
27.	Drs. Ny. SOEDIARTINI SOEMARNO (Semarang)	66.	Ir. HARRIS ALI MOERFI (Jakarta)	105.	H. BASRI BERMANDA (Jakarta)
28.	Drs. MUSA DIMYATI (Pekalongan)	67.	BAMBANG WIRATMADJI SOEHARTO (Jakarta)	106.	Ny. H. IKE GATUT AMIR HAMZAH (Jakarta)
29.	SOEPARNO HENDRO WERDOYO (Semarang)	68.	Ir. Ny. KASTURIAH SISWOKO (Jakarta)	107.	ANTHON H. RIJANTO (Jakarta)
30.	Drs. MOZES ADI SOERJO SOENARYO (Semarang)	69.	AGUS SANTOSO (Jakarta)	108.	ANDREAS AVELINUS DJOERDJANI (Magelang)
31.	Drs. H. IMAN SUDARWO PS (Jakarta)	70.	DR. H. ADI TAGOR HARAHAP, DPH. (Jakarta)	109.	Ny. TIEN SOEPENO, SH (Semarang)
32.	S. SUHARDI, SH. (Jakarta)	71.	BOBBY SUHARDIMAN (SATRIYO HARDIWIBOWO) (Jakarta)	110.	Ir. JULIUS HASSAN (Jakarta)
33.	Ny. SRI SOENARTI SOEMARIO (Jakarta)	72.	DJOENARSA (Jakarta)	111.	Drs. M A H F U D (Semarang)
34.	Drs. H. ABUSAERI (Jakarta)	73.	ARIEF SOEMADJI (Jakarta)	112.	Drs. H. JOHAN MASRUHAN (Semarang)
35.	S O E G I Y O N O (Jakarta)	74.	PRANADJAJA PRANOWO DJOJODINOTO (Jakarta)	113.	H.M. AL BAEDLOWI (Semarang)
36.	Drs. WURYANTO (Semarang)	75.	H. MOKHAMMAD TOYIB (Magelang)		
37.	S O E H A R T O (Jakarta)	76.	M. SYAFAAT HABIB (Jakarta)		
38.	BENNY MOERDOKO, BA (Jakarta)	77.	H. UMAR MANSYUR SEDIYOPRANOTO (Jakarta)		
39.	SUMOHARMOYO (Wonogiri)	78.	Drs. WAHYONO (Semarang)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

JAWA TIMUR

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Prof. DR. WIDJOJO NITISASTRO (Jakarta)	44.	H. ESMAIL MOEHAMAD MAHMUD (Surabaya)	85.	Drs. MOH. SOBIRIN (Surabaya)
2.	S A P A R D J O (Jakarta)	45.	Drs. H. RACHMAD SOEBAGIO (Jakarta)	86.	Ir. HARJONO SIGIT, BS (Surabaya)
3.	Prof. Ir. SOEDARSONO HADISAPOETRO (Jakarta)	46.	Drs. MOCH. SUPADJAB (Ponorogo)	87.	HAPPY INDRA KELANA (Surabaya)
4.	Prof. DR. SUBROTO (Jakarta)	47.	MOELYADI DJAJANEGARA, SH (Surabaya)	88.	Drs H. ROZIQI (Surabaya)
5.	MOHAMAD NOER (Surabaya)	48.	SOESANTO BANGOEN NAGORO, SH. (Jakarta)	89.	Drs. SLAMET SUDARYO. (Jakarta)
6.	BLEGOH SOEMARTO (Surabaya)	49.	R.P.H. ACHMAD DAWAKI, BA. (Pamekasan)	90.	Drs. R. ROBIANTO KOESTOMO (Jakarta)
7.	Ny. MIENTARSIH WAHONO (Surabaya)	50.	Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH. (Sidoarjo)	91.	Drs. IRIS INDIRA MURTI (Jakarta)
8.	MOCH. SAID (Surabaya)	51.	Ny. H. SITI KOESLATINI SOESILASTOETI SUTOPO ISNOMO. (Jakarta)	92.	H.R. SOEWIGNJO (Malang)
9.	K.H. HASAN SAIFOURIDZALL. (Probolinggo)	52.	H. NANIEK AMIRMURTONO (Jakarta)	93.	M. MUCHLAS ROWI (Jakarta)
10.	R. SOEKARDI (Jakarta)	53.	Ny. MIEN SUGANDHI (R.A. SITI AMINAH) (Jakarta)	94.	SOENARJANTO (Blitar)
11.	R.H. SUGANDHI KARTOSUBROTO (Jakarta)	54.	H.A. BUDAN DARDIRI (Malang)	95.	BAMBANG WARIH KOESOEMA (Jakarta)
12.	H. MOCHAMMAD TARMOEDJI (Magetan)	55.	Drs. SOEDARMADJI (Jakarta)	96.	Ir. BAMBANG EKO WITONO (Surabaya)
13.	MOHAMAD KHARIS SUHUD (Jakarta)	56.	Ny. H. SRI ACHAETI SOEDARMAN (ONI) (Jakarta)	97.	H. MOCH. KOESNAN (Surabaya)
14.	Ir. AKBAR TANJUNG (Jakarta)	57.	IMAM SANTOSO, BA (Sidoarjo)	98.	Drs. EC. BAMBANG ISTAMAT, BS (Surabaya)
15.	Ny. TATI SUMIYATI DARSOYO (Jakarta)	58.	Drs. SOETRISNO R. (Surabaya)	99.	M. HADI SOESASTRO (Jakarta)
16.	Drs. SOEKARNO DARMOSOEKARTO, MPA (Jakarta)	59.	Drs. M. ARIEF DJAMIN (Surabaya)	100.	SOEKARMEN (Malang)
17.	R. KARTIDJO (Bandung)	60.	H. WANG SUWANDI, SH (Jakarta)	101.	MOCH. SUPARNI ALIAS MOCHAMAD, BA (Surabaya)
18.	Drs. SOEJOED BINWAHJOE (Jakarta)	61.	SITI AMINAH BAMBANG KOESBANDONO. (Madiun)	102.	SOEKARDI ADI PRANOTO. R/DIDIK (Surabaya)
19.	SUMARDJO PARTO SUDIRDJO (Jakarta)	62.	Drs. RIDUAN RAZMANY, SH (Malang)	103.	H. DARMORIYANTO (Bondowoso)
20.	H.R.S. SUBYAKTO (Jakarta)	63.	Ny. TETTY CHAYATIN SIHABUDIN (Magetan)	104.	Drs. POSTDAM HUTASOIT (Jakarta)
21.	Ny. ENDANG KUSUMA INTEN SOEWENO (Jakarta)	64.	Prof. DR. SOEDARSO DJOJONEGORO (Surabaya)	105.	FIRMAN HENNY SOERODJO (Surabaya)
22.	Ny. SUBANTINI SUKONO, SE (Surabaya)	65.	Prof. ABDOEL GANI, SH. MS. (Surabaya)	106.	Drs. WALOEJO (Surabaya)
23.	Ir. ACHMAD MOESTAHID ASTARI (Surabaya)	66.	ROTO SOEWARNO DARMOWIDODO (Jakarta)	107.	SOETJIPTO KERTODJOJO (Malang)
24.	DOEDOENG ABDOEL KARIM (Gresik)	67.	MOCH. ANWAR (Pasuruan)	108.	R.H. MOCH. SOEYOETI (Sampang)
25.	Drs. EC. SOEKOTJO BAID (Surabaya)	68.	TONY AGUS ARDIE (Jakarta)	109.	H.R. SOEWOJO (Madiun)
26.	IBNU SALEH (Malang)	69.	R. WIBOWO, BA (Pamekasan)	110.	DAHLAN ISKAN (Surabaya)
27.	Drs. THEO L. SAMBUAGA (Jakarta)	70.	Drs. H. AGIL H. ALI. (Surabaya)	111.	AMIR L. SIRAIT, MBA (Jakarta)
28.	Ny. H. DIDIK HADIDJAH HASAN (Bangkalan)	71.	Prof. DARDJI DARMODIHARDJO, SH (Malang)	112.	Ny. H. SRI MOERTI SOETARDJO (Probolinggo)
29.	Ny. H. SURYATI ATASTINAH LEGOWO (Jakarta)	72.	Ir. SUYOTO HARDJOSUTOWO (Jakarta)	113.	Drs. EK. HARIBOWO SOEKOTJO (Surabaya)
30.	DR. Ir. G.M. TAMPUBOLON (Jakarta)	73.	Ny. S. MOCH SAFTI ASARI, SH (Lamongan)	114.	Ir. SOELAIMAN HARDJOSOEDARMO (Surabaya)
31.	Ny. HARTINI SOESILO. W (Surabaya)	74.	SOEKARSONO KARTOWILASTRO (Surabaya)	115.	Drs. H. RB. MUHD. ROFIK KOESOEMODILOGO, SH. (Surabaya)
32.	Drs. SOEMARDJONO HADI KOESOEMO (Malang)	75.	Drs. JUWONO ASPARIN (Surabaya)	116.	SETO HARIANTO (Jakarta)
33.	Ny. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH. (Surabaya)	76.	Prof. DR. HARSONO (Malang)	117.	Drs. DARYONO WASITO (Jakarta)
34.	HAYONO ISMAN (Jakarta)	77.	Ny. H. JUMTYATIN MUSTA'IN, BA (Jombang)	118.	SOEKARWO, SH. (Surabaya)
35.	Drs. SOERJADI (Sidoarjo)	78.	Drs. OESMAN HADI (Surabaya)	119.	Ir. S. KADIONO (Surabaya)
36.	Drs. SOEDARMANTO (Sidoarjo)	79.	MUHAMAD HARI WAHYUDI, SH (Surabaya)	120.	SHARIF CICIP SUTARDJO (Jakarta)
37.	ANTON PRIJATNO, SH (Surabaya)	80.	Drs. NYOMAN NAYA SUJANA, MA (Surabaya)	121.	Drs. EDMOND DIRK KAPARANG (Surabaya)
38.	TRIHARDJO, SH (Jakarta)	81.	Ir. EFFENDI SALAM (Surabaya)	122.	H. SOEHARSO, MS (Jakarta)
39.	TOTO MOEDJIHARTO, RA (Jakarta)	82.	Ny. MASTOECHAJAH WIDJOJO SOEJONO (Surabaya)	123.	Ny. NUNUK MANOPO (RAY NUNUK WARSIKI T.S. PADMO KUSUMO) (Surabaya)
40.	Ir. SOEWARDJO ADIKOESOEMO, B. Sc. (Surabaya)	83.	SARWOKO SURJOHOEDOJO, B. Sc. (Jakarta)	124.	Drs. SUPOYO SLAMET (Surabaya)
41.	Ny. TONY SUMARDJO (Jakarta)	84.	SOEGIJATNO SOESILO (Tanggerang)	125.	R. JOHNY SUKIRMAN SURYADIBRATA, SH. MSc. (Jakarta)
42.	Drs. Ny. TOEMINATOEN MOEHNI (Surabaya)			126.	H. EDDY MASIADI (Kediri)
43.	BAGOES SARMITO (Surabaya)			127.	SOESOE HANDOKO. (Surabaya)

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

Digitized by Google

YOGYAKARTA

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Drs. RADIUS PRAWIRO (Jakarta)	6.	KI SOERATMAN. (Yogyakarta)	11.	GEORGE BUNGARAN LAURENZES PANGGABEAN (Yogyakarta)
2.	WIDODO (Jakarta)	7.	KGPH. H. MANGKUBUMI. SH. (Bantul)	12.	GBPH. JOYOKUSUMO. (Yogyakarta)
3.	Drs. WASKITO REKSO SOEDIRDJO (Jakarta)	8.	Drs. SOEWARDI POESPOJO (Yogyakarta)	13.	Nyi MOEDJONO PROBOPRANOWO, SH. (ALIP BARIAH) (Yogyakarta)
4.	BRAY RETNO MARTANI KUSUMONAGORO. (Yogyakarta)	9.	Ir. KPH. PROBOKUSUMO. (Yogyakarta)	14.	SOEWARTINI MARTODIHARDJO, SH. (SRI PAWENANG) (Yogyakarta)
5.	Prof. DR. KOESNADI HARDJA SOEMANTRI, SH. (Yogyakarta)	10.	R. TUBAGUS HAMZAH. (Yogyakarta)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

KALIMANTAN SELATAN

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	H. MUNAWIR SJADZALI, MA (Jakarta)	8.	H. SUBARDJO SUROSOROJO (Banjarmasin)	16.	Ny. ADJANG RATMINI SJAHRANIE (Banjarmasin)
2.	DARYATMO (Jakarta)	9.	H. SYAMSUL MU'ARIF, BA (Banjarmasin)	17.	Dr. IDA YUSI DAHLAN (Jakarta)
3.	Ny. SRI MURNI ALI SAID (Jakarta)	10.	Drs. H. ASFUL ANWAR (Banjarmasin)	18.	HAJI ALWIE ABDULLATIEF (Banjarmasin)
4.	ARSENIUS ELIAS MANIHURUK (Jakarta)	11.	HAJI RACHMATULLAH. (Banjarmasin)	19.	HAJI RAMONSYAH NOOR (Banjarmasin)
5.	HAJI ANANG ADENANSI (Jakarta)	12.	H. ABERANI SULAIMAN (Banjarmasin)	20.	H. RUDLF NICO CUMENTAS, SH (Banjarmasin)
6.	Drs. H.M. HOESNI THAMRIN ASSAAT, SH (Jakarta)	13.	H. JUSUF TALIB, SH (Jakarta)		
7.	HAJI MUHAMMAD ALI SRI INDERADJAJA. (Jakarta)	14.	MEDITERANSJAH, SH (Jakarta)		
		15.	UNCU MUHAMMAD NATSIR (Jakarta)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : PARTAI DEMOKRASI INDONESIA.

KALIMANTAN BARAT

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	SUDOMO (Jakarta)	6.	DJOKO SUDYATMIKO (Jakarta)	11.	SUGIHARSOJONO, SH (Jakarta)
2.	ZARLONS ZAGHLUL, SH (Jakarta)	7.	Drs. SYARIF SAID ALKADRIE (Pontianak)	12.	Drs. H. ABASSUNI ABUBAKAR (Pontianak)
3.	JUSUF WANANDI, SH (Jakarta)	8.	R. Ng. BAMBANG SOEPANGAT (Bandung)	13.	SAUD L. TOBING (Jakarta)
4.	SOEMADI, Bc. Hk. (Pontianak)	9.	Ir. BUDI HARIYANTO (Pontianak)	14.	HAMDHANI WIRYANA (Jakarta)
5.	Drs. ALOYSIUS ALOY (Jakarta)	10.	Drs. W.D.F. RINDORINDO (Jakarta)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

KALIMANTAN TENGAH

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Ny. L. SOETANTO, SH (Jakarta)	5.	ABDULLAH ZAINIE, SH (Jakarta)	9.	Drs. ADOLF DARDIN LEIDEN (Palangkaraya)
2.	Ir. REINOUT SYLVANUS (Jakarta)	6.	Drs. H. SOFYAN CHAIRUL (Palangkaraya)	10.	LEON KENAN AJI, Sm. Hk (Palangkaraya)
3.	HARSONO (Jakarta)	7.	Ny. HASTUTI PUTERA UTHARA (Jakarta)	11.	Drs. H. SJAMSUDDIN THOHIR (Palangkaraya)
4.	H. DARLAND A.M. ATJEH (Palangkaraya)	8.	WALMAN NARANG (Palangkaraya)	12.	Drs. BUDI SISWANTO (Palangkaraya)

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

KALIMANTAN TIMUR

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	SOEDJARWO (Jakarta)	5.	H. DARWIS ABDULLAH (Jakarta)	9.	ABDUL MANAP PULUNGAN (Jakarta)
2.	Ir. SISWONO YUDO HUSODO (Jakarta)	6.	Drs. Ny. EMILIA LUN HADAITULLAH (Jakarta)	10.	H. AWAN MOH. REINALDO THAMRIN (Balikpapan)
3.	Ir. SIMON TAMPUBOLON (Jakarta)	7.	Drs. AWANG FAROEK ISHAK (Samarinda)	11.	H. MOENADI ARIEF (Samarinda)
4.	Ir. H. KOTAN PASAMAN (Jakarta)	8.	H. ACHMAD TOHIR (Samarinda)	12.	Drg. RONNIE RIVANY (Jakarta)

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : PARTAI DEMOKRASI INDONESIA.

BALI

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Ny. NANI SOEDARSONO, SH (Jakarta)	7.	I GUSTI NGURAH ALIT YUDHA (Jakarta)	13.	KETUT ADISUDANA (Denpasar)
2.	Ny. IDA BAGUS MANTRA (Denpasar)	8.	I DEWA PUTU SUPARTHA NIDA, SH (Denpasar)	14.	I GUSTI NGURAH KETUT SINDHYA, BA (Denpasar)
3.	I GUSTI PUTU RAKA, SH (Denpasar)	9.	Ir. IDA BAGUS PUTERA (Denpasar)	15.	I WAYAN WAYA, SH (Denpasar)
4.	ANAK AGUNG OKA MAHENDRA, SH (Jakarta)	10.	Drs. DEWA PUTU TENGAH (Singaraja)	16.	Ny. TIENAWATI KARNA, SH (Denpasar)
5.	Drs. IDA BAGUS OKA PUNIA ATMAJA (Jakarta)	11.	TJOKORDA NGURAH MAYUN SAMIRANA, SH (Denpasar)		
6.	Drs. I WAYAN DHANA (Jakarta)	12.	SOEDHARTO SOETIRTO (Singaraja)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

NUSA TENGGARA BARAT

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Prof. DR. SALEH AFIFF (Jakarta)	6.	SUSATYO MARDHI (Jakarta)	11.	H. ABDULLAH TAHIR, SH (Mataram)
2.	Ny. H. HARTINI GATOT SUHERMAN (Mataram)	7.	H. IBRAHIM SALAM (Bima)	12.	LALU SAID, SH M.S (Mataram)
3.	H. ABDUL KAHIR (Bima)	8.	Dr. BAWADIMAN (Mataram)	13.	Drs. MACHFUD AHMAD (Mataram)
4.	Drs. M. BUSHAIRI NAJMUDDIN (Praya)	9.	Drs. H.M.L. PATREWIJAYA (Mataram)	14.	Ny. SITI MARYAM RACHMAT, SH (Mataram)
5.	Drs. ABDUL MUNIR (Mataram)	10.	H. MOHAMMAD DJUWAYNI (Selong)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : PARTAI DEMOKRASI INDONESIA.

NUSA TENGGARA TIMUR

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Prof. DR. J.B. SUMARLIN (Jakarta)	9.	MERCELLIUS ADANG DA GOMEZ (Jakarta)	17.	ANTON LESIANGI, SE (Jakarta)
2.	Dr. Ny. ANDI NAFSIAH MBOI WALINONO (Kupang)	10.	UMBU HARAMBURU KAPITA (Jakarta)	18.	ROBERT PUANG SUNUR (Jakarta)
3.	Dr. HENDRIKUS FERNANDEZ (Kupang)	11.	SAVRINUS SUARDI (Jakarta)	19.	Drs. GODLIEF EDUARD AGOHA (Kupang)
4.	JULIUS HENUHILI (Jakarta)	12.	DR. JOANES RIBERU (Jakarta)	20.	UMBU DAPASAPU, SH (Kupang)
5.	Drs. IMAM SOEDARWO (Jakarta)	13.	Ir. UMBU MEHANG KUNDA (Kupang)	21.	HERMAN YOSEF SERAN, MA (Kupang)
6.	BEN MESSAKH, SE (Jakarta)	14.	Drs. FRANSISKUS SKERA (Kupang)	22.	Ir. A.D. JOHN MANAFE (Kupang)
7.	Ny. NANNY DADING KALBUADI (Jakarta)	15.	Drs. H. MANSJOER SJAH ARKIANG (Kupang)		
8.	ALOYSIUS WIRATNO PUSPOATMODJO, SH. (Jakarta)	16.	Drs. PIET JOS NUWA WEA (Jakarta)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

Digitized by Google

SULAWESI SELATAN

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	M. YUSUF (Jakarta)	17.	Drs. SABAR KOEMBINO (Jakarta)	33.	Ny. ANDI BUNGA NANA NARUNDANA (Ujung Pandang)
2.	HARMOKO (Jakarta)	18.	OBOS SYABANDI PURWANA (Jakarta)	34.	Ny. NURHAJATI JASIN LIMPO (Ujung Pandang)
3.	H. ACHMAD LAMO (Jakarta)	19.	BACHTIAR (Ujung Pandang)	35.	Drs. MAPPATOEROENG PARAWANSA (Ujung Pandang)
4.	Ny. KUSUDARSINI AMIRUDDIN (Ujung Pandang)	20.	Drs. H. MUHAMMAD DAUD NOMPO (Ujung Pandang)	36.	Prof. DR. Ir. FACHRUDDIN (Ujung Pandang)
5.	Drs. GATOT SOEWAGIO (Jakarta)	21.	H. MUHAMMAD ARSJAD. B (Ujung Pandang)	37.	Prof. DR. H. PATURUNGI PARAWANSA (Ujung Pandang)
6.	ANDI MOCHTAR, SH (Jakarta)	22.	Dr. H. AISYAH RADJENG PANANRANG, SKM (Ujung Pandang)	38.	Drs. Ny. ANDI RASDIYANAH (Ujung Pandang)
7.	Drs. RIVAI SIATA (Jakarta)	23.	MOH. ROEM, SH (Ujung Pandang)	39.	Drs. H. AHMAD NURHANI (Jakarta)
8.	ABDUL MADJID EWA, SH (Jakarta)	24.	Drs. Ny. OELFAH A.S. HARMANTO (Jakarta)	40.	TANRI ABENG, MBA (Jakarta)
9.	Ir. H. ZAINUDDIN DAENG MAUPA (Jakarta)	25.	H. MUBHA KAHAR MUANG, SE (Jakarta)	41.	Dr. SJAMSI LILI (Ujung Pandang)
10.	Ir. SOENARYO HADDADE (Jakarta)	26.	Drs. Ny. H. NASYRAH M. EFFENDY (Jakarta)	42.	Drs. ARIFIN NOOR (Ujung Pandang)
11.	ARNOLD BARAMULI, SH (Jakarta)	27.	H. ACHMAD RACHMAN, MSc (Jakarta)	43.	M. ISKANDAR MANDJI (Ujung Pandang)
12.	Drs. H. HASANUDDIN (Jakarta)	28.	H. ANDI MATTALATTA, SH MH. (Ujung Pandang)	44.	Ir. ANTHON PONGREKUN (Ujung Pandang)
13.	Ir. TADJUDDIN NOER SAID (Jakarta)	29.	MUHAMMAD JUSUF KALLA (Ujung Pandang)	45.	Drs. SYUHADA HUSSEIN (Ujung Pandang)
14.	Ny. R.A. MADAHERA HERTASNING (Jakarta)	30.	SHIRATO SYAFEI, S. Th (Jakarta)	46.	Drs. AMBAS SYAM (Ujung Pandang)
15.	Dr. TAJUDDIN CHALID, MPH. (Jakarta)	31.	Ny. TILLY KASENDA (Jakarta)		
16.	MUHAMMAD SAID BETTA, SH (Jakarta)	32.	Ny. SITTI AMINAH MATTALATTA (Ujung Pandang)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

SULAWESI UTARA

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Drs. COSMAS BATUBARA (Jakarta)	5.	Drs. FRITS HENDRIK EMAN (Jakarta)	9.	Drs. Hi PARINDO RUSLI MOKOGINTA (Manado)
2.	ERIC SAMOLA, SH (Jakarta)	6.	Prof. DR. JOO HAROLD ALEX MANDANG (Manado)	10.	DR. Dr. INGRIANY GHANDA (Jakarta)
3.	Ny. LEONIE RADIUS PRAWIRO (Jakarta)	7.	J.G. WOWOR, SH (Jakarta)	11.	WINNY HENRY FREDERIK, SH (Manado)
4.	Prof. DR. J.A. KATILI (Jakarta)	8.	Drs. ADOLF JOUKE SONDAKH (Manado)	12.	BERNY TAMARA (Jakarta)

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

MALUKU

No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Prof. DR. J.H. HUTASOIT (Jakarta)	4.	Drs. FREDDY LATUMAHINA (Jakarta)	7.	Drs. DANIEL COSTANTINUS FAR-FAR (Ambon)
2.	Dr. ABDUL GAFUR TENGKU IDRIS (Jakarta)	5.	Ir. LUKAS NANLOHY (Jakarta)	8.	Drs. Ns. ETTY E.H. WOERSOK (Ambon)
3.	HERMAN PIETERS (Ambon)	6.	Drs. JOHNY ALWI BANYO (Ternate)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : PARTAI DEMOKRASI INDONESIA.

IRIAN JAYA

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	PONIMAN (Jakarta)	7.	Ir. HANOCH ELIEZER MACKBON. (Jakarta)	13.	ARNOLD MAMPIOPER. (Manokwari)
2.	SOEGIHARTO. (Jakarta)	8.	HERMAN MOTE, SH. (Bandung)	14.	HERMAN WAYOI (Jayapura)
3.	DARJONO, SH. (Jakarta)	9.	KRISNO DJUMAR. (Jayapura)	15.	JOHAN TETELEPTA. (Jakarta)
4.	Ny. ENNY ACHAYANI BUSYIRI (Jakarta)	10.	Ir. S.M. TAMPUBOLON. (Jakarta)	16.	Drs. SABAR MARTIN SIRAIT. (Jakarta)
5.	MOHAMMAD ZAINUDDIN WASARAKA (Jakarta)	11.	WILLEM W. MALOALI (Jayapura)	17.	ANTON DJARWADI. (Jakarta)
6.	Drs. DS. ISAAC SAUJAY (Jakarta)	12.	J. SUDARKO PRAWIROYUDO. (Jakarta)	18.	Ny. NOOR JULIJA HANDOGO. (Jakarta)

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

SULAWESI TENGAH

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Prof. DR. EMIL SALIM (Jakarta)	4.	Drs. Ny. H. SYAMSIAR LASAHIDO (Palu)	7.	Drs. ZAINUDDIN ARDULRAUF (Palu)
2.	Dr. H. ZAINAL UMAR SIDIKI (Jakarta)	5.	Prof. DR. H.A. MATTULADA (Palu)	8.	Drs. SAWIDAGO WOUNDE (Palu)
3.	Drs. ABDUL AZIS LAREKENG (Jakarta)	6.	Drs. LUKMAN HAKIEM BETHALEMBAH (Palu)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

SULAWESI TENGGARA

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Prof. DR. ING. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE (Jakarta)	5.	H. JAKUB SILONDAE (Kendari)		
2.	OETOYO OESMAN, SH (Jakarta)	6.	MOHAMAD RUSDY THAHIR, SH (Jakarta)		
3.	Ny. H. TITI ALALA (Kendari)	7.	LAODE MOHAMMAD SALEH, SH (Kendari)		
4.	H. SALIM ODE/LAODE SALIM (Jakarta)	8.	Prof. EDDY AGUSSALIM MOKODOMPIT, MA (Kendari)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

TIMOR TIMUR

No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No.	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon	No	NAMA CALON dan NAMA KOTA Tempat Tinggal Calon
7	8	9	10	11	12
1.	Prof. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, SH (Jakarta)	5.	Ny. SIS HENDARWATI HADIWITARTO (Jakarta)		
2.	CLEMENTINO DOS REIS AMARAL (Dili)	6.	CESAR CALDAS SARMENTO (Dili)		
3.	Ny. PETRONELLA MARIA INACIO (Dili)	7.	JOSE ANTONIO BONIFACIO DOS REIS ARAUJO (Dili)		
4.	SALVADOR JANUARIO XIMENES SOARES (Dili)	8.	J. KRISTIADI (Bogor)		

Kesepakatan Penggabungan Suara Dengan : ....

Digitized by Google

Oleh: Sarwono Kusumaatmadja

Kepemimpinan Politik

Konteks Masalah Politik Masa Mendatang

1. Konteks dasarnya adalah masalah regenerasi. Bukan dalam artian fisik karena hal semacam itu berlangsung setiap saat. Yang dimaksud adalah regenerasi di bidang alam pemikiran yang meliputi pembaharuan orientasi politik, sikap serta perilaku politik serta gagasan-gagasan di bidang politik. Demi terjaminnya kesinambungan format serta ide dasar politik Orde Baru maka regenerasi alam pemikiran di bidang politik tidak berarti adanya perubahan yang drastis dan total. Nilai-nilai asasi Pancasila tentunya harus dipertahankan. Pada dasarnya regenerasi alam pemikiran ini adalah transformasi ke depan dari format serta idee dasar Orde Baru sehingga cita-cita Orde Baru tetap bisa aktual dalam konteks masa depan. Dalam pengertian itu, setiap perubahan yang terjadi seharusnya bersifat gradual dan progressif. Regenerasi alam pemikiran ini amatlah aktual dewasa ini, karena dalam sepuluh tahun mendatang ini akan terjadi titik-titik penentu dalam kehidupan politik bangsa yang akan mempunyai arti penting bagi arah perkembangan selanjutnya.

2. Benih-benih transformasi ini telah ditanamkan melalui institusionalisasi serta sosialisasi gagasan-gagasan politik Orde Baru, yang pada asasnya adalah kehendak untuk memperlakukan prinsip-prinsip bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara seperti yang terumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara berencana dan bertahap. Melalui upaya-upaya ini, beberapa masalah politik yang besar, yang dizaman dulu menghantui kehidupan kebangsaan Indonesia, telah terlampaui. Bersamaan dengan itu telah timbul serta mengakar perangkat-perangkat politik baik dalam tatanan supra maupun infra struktur politik. Dengan asumsi diatas, yaitu bahwa yang diperlukan adalah transformasi kedepan dari format serta ide dasar Orde Baru, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tantangan masa depan bagi kepemimpinan Orde Baru adalah keharusan untuk bersikap serta bertindak konsisten dengan arahan pembaharuan yang telah terwujud untuk sekaligus menyesuaikan tindak lanjutnya dengan tantangan serta kebutuhan masa depan bangsa.

3. Keharusan transformasi tidak terelakkan karena timbulnya kenyataan-kenyataan baru baik yang bersumber dari keberhasilan Orde Baru sendiri maupun karena be-

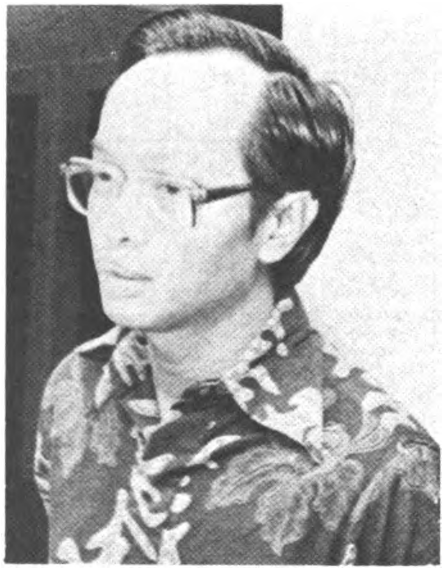

Sarwono Kusumaatmadja

lum tertanganinya seluruh permasalahan pembangunan secara baik, serta juga karena timbulnya kenyataan-kenyataan baru yang belum diperhitungkan di masa lalu. Di dalam menghadapi berbagai kenyataan ini, maka validitas dari orientasi, sikap, perilaku serta gagasan-gagasan politik yang kita kenal harus selalu kita hadapkan pada kajian-kajian ulang. Hal-hal yang selama ini terbukti secara asasi adalah benar dan merupakan sendi-sendi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya harus dipertahankan dengan sikap yang selalu terbuka pada keharusan untuk digunakannya aplikasi-aplikasi baru dari hal-hal yang mendasar tadi. Sebaliknya diperlukan keberanian politik untuk meninggalkan sikap, perilaku serta orientasi politik yang merupakan bagian dari masa lampau, dan yang tidak lagi layak untuk digunakan dalam menghadapi problema masa depan.

Masalah-masalah Pokok Masa Depan Di Bidang Politik

Banyak sekali masalah yang dapat di identifikasikan serta dibahas dalam kaitannya dengan masalah politik. Yang paling mendasar adalah masalah pemikiran di bidang ideologi, karena menyangkut nilai-nilai politik termasuk secara khusus masalah kelembagaan dan partisipasi.

1. Pemikiran Ideologi

Dalam menghadapi dinamika perubahan zaman terdapat kebutuhan yang mendesak untuk konsisten dengan nilai-nilai dasar kebangsaaan yang tercantum dalam Pancasila serta menterjemahkan nilai-nilai tersebut dalam tahapannya yang lebih konkrit dalam kehidupan politik. Urgensi ini amat dirasakan bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia yang senantiasa berada dalam suasana perbenturan berbagai nilai hidup yang berkembang baik karena interaksi budaya dengan dunia luar maupun karena kemajemukan nilai di dalam budaya bangsa. Dalam kaitan ini penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah amat strategis.

Sangatlah membesarkan hati bahwa dewasa ini terdapat pemahaman serta penerimaan yang meluas bahwa Pancasila adalah ideologi yang bersifat terbuka, yang memungkinkan perkembangan-perkembangan pemikiran dalam segala bidang kehidupan bangsa melalui konsensus-konsensus nasional yang dicapai melalui proses konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Dengan demikian maka dapat dihindarkan dogmatisme ideologis, sehingga keterbukaan, kreativitas serta dinamika pemikiran yang menjadi keharusan zaman dapat terwujud. Nilai-nilai kepancasilaan dapat dikembangkan dalam suasana kebersamaan sehingga menjadi hidup dan operasional dalam semua bidang kehidupan bangsa. Jika perkembangan ideologis dapat terjadi dalam pengertian ini di masa depan, maka Pancasila dapat menjadi acuan kebangsaan yang kuat dan berakar.

Pendalaman kepancasilaan sehingga mencapai tingkatnya yang konkrit dan operasional merupakan hal yang urgen di masa mendatang, karena betapapun besarnya kemajuan yang dicapai dalam bidang ideologi, namun penerimaan Pancasila sebagai asas barulah mencapai tahapnya yang formal dan dini. Dewasa ini terlihat gejala bahwa penerimaan pemikiran-pemikiran berdasarkan Pancasila dalam tingkatannya yang umum dan abstrak adalah relatif mudah. Namun jika pemikiran-pemikiran yang berbobot ideologis sudah sampai kepada hal-hal yang konkrit, maka masih terlihat adanya perbedaan persepsi yang cukup besar. Adanya perbedaan persepsi yang besar mengenai hal-hal yang konkrit, berbobot ideologis serta menyentuh hal-hal yang asasi tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena hal ini merupakan indikasi belum kuat berakarnya nilai-nilai kepancasilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu digarisbawahi bahwa penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas walaupun merupakan perkembangan yang amat penting, barulah merupakan langkah awal dari proses sosialisasi Pancasila, dan tidak dengan sendirinya menghapus sumber-

Digitized by Google

sumber kerancuan nilai maupun ancaman terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.

Dengan demikian kerangka pemikiran ideologi adalah penting dalam rangka pelestarian serta pengembangan nilai-nilai kebangsaan, baik dalam rangka menjaga konsistensi pembangunan nasional sebagai pembangunan manusia seutuhnya maupun dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan serta gangguan baik yang timbul dari dalam maupun yang muncul dari luar. Disamping itu perubahan-perubahan struktural di bidang perekonomian dunia sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi memerlukan pula tanggapan dalam kerangka idologis.

Kita berada dalam abad serba canggih dengan peranan ilmu dan teknologi yang demikian besarnya dalam membawa berbagai perubahan baik perubahan nilai maupun struktural. Kenyataan ini mengharuskan kita untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi modern, di mana azas-azas pikir yang bersandarkan pada penalaran perlu diberikan tempat dalam perkembangan pemikiran ideologis kita.

Menghadapi ini semua, pragmatisme tidaklah cukup karena keputusan-keputusan politik tidak bisa diambil dengan sikap "bebas nilai". Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan politik, ekonomi dan budaya harus jelas dalam tiap keputusan politik yang kita ambil. Kepemimpinan politik dimasa mendatang, selain harus mempunyai komitmen yang kuat pada modernisasi bangsa harus pula memiliki integritas ideologis yang tinggi.

Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan politik, ekonomi dan budaya harus jelas dalam tiap keputusan politik yang kita ambil. Kepemimpinan politik dimasa mendatang, selain harus mempunyai komitmen yang kuat pada modernisasi bangsa harus pula memiliki integritas ideologis yang tinggi.

2. Kelembagaan

Masih dalam kerangka masalah yang berbobot ideologi, kelembagaan politik merupakan sesuatu yang penting untuk mendapatkan sorotan. Peranan Pemerintah dalam penataan kelembagaan politik Orde Baru baik dalam tingkatan suprastruktur maupun infrastruktur, amatlah besar kendatipun dalam proses ini terdapat keterlibatan politis dari semua pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat dimengerti dan tidak dapat dielakkan sebagai ciri umum negara-negara berkembang, dimana Pemerintah acapkali merupakan lembaga yang dominan dan satu-satunya unsur kepemimpinan nasional yang effektif. Dimasa depan kita ingin modernisasi di bidang politik serta ingin juga mempertinggi tingkat demokrasi politik kita sesuai dengan hakekat Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan demokratis. Dengan demikian yang harus dijadikan titik berat perhatian adalah pertumbuhan serta perkembangan kelembagaan politik sehingga mampu mengemban fungsinya secara penuh serta mandiri. Kewenangan serta fungsi kelembagaan politik seperti yang tersurat dalam konstitusi serta dalam peraturan perundangan kita harus benar-benar terwujud bukan saja dalam pengertiannya yang formal, tapi juga dalam substansi.

Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa mutlak perlu.

Dalam konteks modernisasi maka tiap lembaga, apakah dalam tingkatan suprastruktur maupun infrastruktur harus menata fungsinya masing-masing sehingga tingkat kejelasan fungsi yang dituntut oleh proses pembaharuan dapat tercipta. Kejelasan fungsional amat diperlukan sehingga proses pengambilan keputusan serta administrasi dari keputusan dimasa mendatang akan terwujud dengan lancar, tertib serta berdisiplin serta taat asas terhadap norma, etika serta mekanisme politik. Dalam konteks ideologis, maka penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas mengharuskan adanya penyesuaian diri, misalnya dalam tubuh kekuatan-kekuatan sosial politik. Dimasa mendatang sikap, perilaku serta orientasi kekuatan-kekuatan sosial politik tidak bisa didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebelum kesepakatan tersebut dicapai. Tanpa adanya re-orientasi, maka proses sosialisasi politik dimasa mendatang akan sulit ditempuh, dan kekhawatiran sementara pihak bahwa Pancasila semata-mata adalah dalih bagi pelestarian status quo, akan mudah dipercaya oleh kalangan yang lebih luas.

Bagi kepemimpinan politik di masa mendatang, maka masalah-masalah kelembagaan dengan demikian akan berkembang sebagai masalah modernisasi politik serta juga peningkatan demokrasi politik, yang memerlukan tingkat kenegarawanan serta tingkat kecanggihan politik yang cukup tinggi untuk dapat menanganinya.

3. Partisipasi

Terdapat hubungan yang langsung dan timbal balik antara keharusan untuk menata kelembagaan politik dalam pengertian diatas dengan masalah partisipasi. Komitmen kita terhadap Pancasila sebagai ideologi yang demokratis mengangkat partisipasi politik sebagai masalah pokok. Fungsionalisasi serta peningkatan demokrasi dalam kelembagaan politik menuntut tumbuhnya partisipasi politik. Sebaliknya juga, tuntutan partisipasi yang meningkat akan mengharuskan fungsionalisasi lebih lanjut dari lembaga-lembaga politik. Peningkatan partisipasi akan menjadi kenyataan masa depan karena proses pembangunan nasional telah mewujudkan tuntutan serta harapan yang meningkat serta juga problem-problem yang makin kompleks. Cara-cara penyelesaian persoalan yang semata-mata instruktif serta penggunaan manusia dalam dunia politik untuk dijadikan obyek mobilisasi akan makin dirasakan bertentangan dengan nilai-nilai kepancasilaan. Penyesuaian-penyesuaian dalam pengorganisasian intern kekuatan sosial politik perlu ditempuh untuk menyediakan ruang partisi-

Cara-cara penyelesaian persoalan yang semata-mata instruktif serta penggunaan manusia dalam dunia politik untuk dijadikan obyek mobilisasi akan makin dirasakan bertentangan dengan nilai-nilai kepancasilaan.

Digitized by Google

pasi yang lebih besar serta untuk mempertinggi derajat keterlibatan dalam politik, termasuk dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tuntutan demokratisasi.

Problema kepemimpinan politik dimasa depan bukanlah terletak pada kelangkaan potensi kepemimpinan tersebut di Indonesia, melainkan terletak pada fase pertumbuhan sistim politik yang pada tahapnya sekarang mungkin masih terlalu dini untuk dapat memberikan keyakinan yang tak terbantahkan akan terwujudnya kepemimpinan mendatang setangguh yang dicita-citakan.

Pada gilirannya partisipasi kekuatan-kekuatan sosial politik dalam penentuan kebijakan nasional juga harus dapat tercermin secara fungsional serta semakin sesuai juga dengan asas-asas demokrasi.

Pentingnya masalah partisipasi mengharuskan kita untuk meninjau masalah politik ini dalam kaitannya yang lebih luas. Dalam pengertian itu, maka setiap pengelompokkan manusia yang terorganisir harus dinilai sebagai potensi politik, termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Peningkatan peranan mereka akan menumbuhkan kelompok-kelompok penekan terhadap kehidupan politik, yang tidak perlu ditafsirkan secara negatif, bahkan harus dilihat sebagai potensi partisipasi serta kontrol sosial.

Pengakuan terhadap partisipasi dalam artiannya yang luas mengharuskan terciptanya bentuk-bentuk pengorganisasian masyarakat yang terorganisir secara effektif dalam berbagai fungsi dan bentuknya. Terbukanya partisipasi merupakan sarana yang paling baik bagi rektrutmen kepemimpinan politik yang teruji. Tanpa dibukanya kesempatan partisipasi maka rekrutmen kepemimpinan politik akan selalu merupakan upaya yang penuh risiko kegagalan, karena kepemimpinan yang dihasilkan semata-mata melalui proses mobilisasi kurang dapat terjamin kualitas intrinsiknya.

Prospek Kepemimpinan Politik Masa Depan

Kualitas kepemimpinan politik di masa depan amat tergantung dari seberapa jauh ketiga masalah pokok diatas, yaitu ideologi, termasuk didalamnya masalah kelembagaan dan partisipasi dapat ditangani dengan menyesuaikan kebutuhan kita untuk berkembang menjadi negara yang demokratis dan modern berdasarkan Pancasila. Dalam masa transisi antar generasi seperti sekarang ini, maka kebutuhan untuk melaksanakan perbaikan yang gradual serta kualitatif terhadap tatanan yang berlaku terasa semakin mendesak. Setiap masa transisi merupakan masa yang kritis karena terdapat risiko terciptanya ambivalensi antara kecenderungan untuk bersikap konservatif disatu pihak dan kebutuhan mendesak untuk melaksanakan perubahan-perubahan di pihak lain, selain masih terdapatnya kerancuan nilai serta fungsi yang niscaya dapat berpengaruh pada proses pembentukan kepemimpinan politik.

Problema kepemimpinan politik dimasa depan bukanlah terletak pada kelangkaan potensi kepemimpinan tersebut di Indonesia, melainkan terletak pada fase pertumbuhan sistim politik yang pada tahapnya sekarang mungkin masih terlalu dini untuk dapat memberikan keyakinan yang tak terbantahkan akan terwujudnya kepemimpinan mendatang setangguh yang dicita-citakan. Masih terdapat kesulitan untuk mengidentifikasikan potensi-potensi kepemimpinan yang berserakan dimana-mana. Dengan perkiraan bahwa transisi generasi akan tuntas berlangsung dalam dasawarsa mendatang ini, maka masalah-masalah substantif yang menyangkut ideologi, kelembagaan dan partisipasi seharusnya dapat segera ditangani.

Dalam hal ini adalah penting bagi kepemimpinan politik dewasa ini yang merupakan perpaduan antara generasi pembebas dan generasi penerus untuk menampakkan kemauan politiknya untuk mengatasi masalah-masalah transisi serta menangani rekrutmen kepemimpinan politik di tengah sekian banyak bakat yang tersebar tadi seraya menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar seperti tersebut diatas. Para ilmuwan dapat memberikan sahamnya dengan membangun iklim pemikiran yang konsisten dan jernih dalam menumbuhkan apresiasi serta komitmen terhadap transformasi nilai kemasa depan. Dengan demikian dapat menjadi jelas bagi semua pihak bahwa persoalan-persoalan besar yang kita hadapi sebagai bangsa menghendaki timbulnya lapisan kepemimpinan politik di segala bidang dan tingkatan yang berorientasi modern, mempunyai integritas ideologis yang tinggi serta ditumbuhkan dalam suasana yang terbuka serta demokratis. □

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

Mengucapkan :

SELAMAT TAHUN BARU
1987

SEMOGA BANGSA DAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DITAHUN-TAHUN MENDATANG
SENANTIASA DIBERIKAN KEKUATAN
UNTUK MELANJUTKAN PEMBANGUNAN
MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD—1945

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

(H. SAINAN SAGIMAN)

Digitized by Google

A.R. SUTOPO

Peta Politik Pilipina Menjelang UUD Baru

Menjelang usia pemerintahan Presiden Corazon Aquino mencapai satu tahun, awal bulan Pebruari 1987 rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) akan ditentukan melalui pemungutan suara rakyat Pilipina. Karena itu Ny. Aquino berkampanye agar rakyat negerinya menentukan sikap terhadap rancangan UUD yang telah disusun oleh Komisi Konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara. Jika dalam plebisit tanggal 2 Februari nanti rakyat menerima rancangan UUD itu, Ny. Aquino akan meneruskan jabatan kepresidennya hingga tahun 1992 tanpa melalui pemilu sebab salah satu bagian dari rancangan UUD itu menentukan demikian. Dengan itu juga berarti bahwa pemerintahan Ny. Aquino akan mendapatkan dasar konstitusional yang teguh.

Sementara UUD yang baru belum diterima, pemerintahan Ny. Aquino kini masih menghadapi berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang akut. Sebagian dari masalah-masalah yang dihadapi Pilipina sekarang adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya (rezim Marcos) baik selama berlakunya Undang-Undang Darurat (September 1972 - Januari 1981) maupun sesudahnya hingga Marcos jatuh pada bulan Februari 1986. Sebagian lainnya disebabkan oleh perbenturan kepentingan politik dan ekonomi di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat Pilipina baik yang mendukung pemerintahan Ny. Aquino maupun yang beroposisi terhadapnya. Dari sebab itu stabilitas politik dan ekonomi Pilipina masih akan terus dipengaruhi oleh terselesaikan atau tidaknya masalah-masalah yang dihadapi negeri ini sekarang.

Ketika tampil sebagai Presiden Pilipina menjelang akhir Februari 1986 Ny. Aquino tampak mendapatkan dukungan kuat dari berbagai kalangan. Tetapi beberapa bulan setelah ia memerintah makin tampak adanya kelompok-kelompok yang saling bertentangan di antara para pendukungnya. Secara agak sederhana, kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam pemerintahan Aquino dapat dikelompokkan ke dalam lima golongan.

Pertama, adalah kelompok yang tergabung dalam UNIDO yang dipimpin oleh Salvador Laurel. Kelompok ini merupakan kelompok konservatif kanan yang sebagian anggotanya pernah menjadi pendukung Marcos pada awal berlakunya Undang-Undang Darurat. UNIDO merupakan

Corazon Aquino. Mendapat dukungan kuat dari berbagai kalangan.

gabungan dari beberapa partai politik yang beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Marcos, yang kemudian bersatu dengan kelompok-kelompok oposisi lainnya dalam menumbangkan rezim Marcos. Oleh kaum kiri UNIDO dianggap sebagai sisa-sisa politik lama Pilipina, suatu kehidupan politik yang didominasi oleh kelompok elite.

Kedua, adalah PDP-Laban *(Pilipino Democratic Party Lakas ng Bayan)* yang dianggap dekat dengan Cory Aquino. Almarhum Benigno Aquino yang terbunuh di lapangan terbang Manila tahun 1983 dan Aquilino Pimentel, Jr., adalah tokoh-tokoh penting dalam PDP-Laban. Pimentel kemudian menjadi pembantu dekat Ny. Aquino. PDP-Laban dan UNIDO saling bersaing untuk menempatkan orang mereka masing-masing pada jabatan-jabatan gubernur propinsi dan pemerintahan daerah lainnya. PDP-Laban dikenal se-

Digitized by Google

bagai kelompok politik yang beraliran reformis demokrat sosial dalam mengusahakan pembaharuan di Pilipina.

Ketiga, adalah kelompok yang terdiri dari para pengusaha besar dan teknokrat yang sering disebut sebagai *Mafia Makati.* - Kelompok ini umumnya dipandang sebagai berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian Pilipina tetapi tidak mempunyai dukungan massa yang kuat. Oleh kelompok-kelompok radikal *Mafia Makati* dianggap sebagai wahana Amerika Serikat dalam mempengaruhi Pilipina baik secara politik maupun ekonomi. Kelompok ini dianggap lemah pengaruhnya oleh karena sebagian dari mereka pernah terlibat dalam, atau dikaitkan dengan, pemerintahan rezim Marcos.

Keempat, adalah kelompok aktivis dan pengacara hak-hak asasi manusia yang oleh kaum kiri disebut sebagai *kekuatan progresif.* Pada masa pemerintahan Marcos mereka aktif dalam berbagai kegiatan politik dan pembelaan hak-hak asasi. Pengaruh mereka sulit diketahui karena tergantung pada dukungan dari "kalangan bawah", yaitu organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergabung ke dalam aliansi seperti BANDILA, *Independent Caucus* dan BAYAN. Oleh kelompok konservatif kanan mereka dianggap sebagai orang-orang yang dekat dengan Front Demokratik Nasional (NDF) yang dikuasai komunis. Di antara tokoh-tokohnya adalah Jose Diokno, Joker Arroyo, Augusto Sanchez dan Rene Saguisag.

Kelima, adalah kelompok yang dipimpin oleh Juan Ponce Enrile. Kelompok ini dianggap sebagai kelompok konservatif kanan tersendiri yang mendapat dukungan terutama dari beberapa unsur dalam tubuh Angkatan Bersenjata. Enrile ikut mempercepat tumbangnya Marcos karena penyeberangannya kepada kelompok pendukung Cory Aquino menjelang akhir Februari 1986. Kelompok Enrile tampaknya tidak terlalu kuat seperti terlihat dari tiadanya reaksi keras atas pemecatannya oleh Presiden Aquino dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.

Sebagai tambahan, tampaknya perlu dimasukkan sebagai salah satu kemungkinan kekuatan dalam pemerintahan Aquino adalah Jenderal Fidel Ramos. Ramos tampaknya mendapat dukungan yang cukup luas di kalangan Angkatan Bersenjata dan tampak berperanan penting dalam kehidupan politik Pilipina dewasa ini. Bersama Enrile ia turut berjasa mempercepat tumbangnya Marcos; dan ketika Presiden Aquino menghadapi saat-saat genting menjelang akhir tahun 1986 Ramos menunjukkan peranannya kembali. Dari sebab itu, meskipun Angkatan Bersenjata Pilipina dianggap tidak mempunyai pengalaman praktis dalam politik, bersama Ramos tampaknya Angkatan Bersenjata Pilipina harus diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan dalam percaturan politik negeri itu dewasa ini.

Sedangkan kekuatan-kekuatan politik yang berada di luar pemerintahan tampaknya juga cukup besar pengaruhnya terhadap stabilitas politik dan keamanan negeri itu. Kekuatan-kekuatan itu dapat dikelompokkan sebagai kekuatan ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Dalam kelompok ekstrem kiri antara lain terdapat Tentara Rakyat Baru *(New People's Army),* NDF dan Partai Rakyat *(Partido ng Bayan)* yang baru didirikan oleh Jose Maria Sison dan Bernabe Buscayno, dua tokoh Partai Komunis Pilipina *(Communist Party of the Philippines, CPP)* dan CCP sendiri. Sedangkan dalam kelompok ekstrem kanan dapat disebutkan kelompok KBL - *(Kilusang Bagong Lipunan)* pengikut Marcos dan para pemberontak Moro dengan organisasinya yang terbesar MNLF *(Moro National Liberation Front).* Selain NPA dan MNLF yang melakukan kegiatan-kegiatan perlawanan bersenjata, masih terdapat organisasi lain, Tentara Pembebasan Rakyat Cordillera pimpinan Conrado Balweg.

Jenderal Fidel Ramos. Didukung AB.

Sementara Ny. Aquino belum dapat menyelesaikan masalah-masalah keamanan tersebut, pada kuartal terakhir tahun 1986 pemerintahannya terancam krisis. Ia dihadapkan pada usaha kudeta kelompok tertentu dalam Angkatan Bersenjata, perubahan kabinet yang mencekam, tekanan-tekanan dari kelompok konservatif kanan dalam menggagalkan rencana dan perundingan gencatan senjata dengan NPA, dan perundingan-perundingan keras dengan pihak Dana Moneter Internasional (IMF). Masalah itu semua kemudian berakhir pada tindakan tegas Presiden Aquino. Ketegasan Ny. Aquino inilah tampaknya yang kini sedang diuji hasilnya di kalangan masyarakat luas, yaitu apakah rancangan UUD akan diterima pada bulan Februari nanti.

Beberapa tokoh kontroversial dalam kabinetnya diberhentikan (dipecat) atau digeser untuk menduduki jabatan lain. Menteri Pertahanan Enrile adalah orang pertama yang diberhentikannya dari jabatan. Kemudian di antara anggota kabinet yang oleh kelompok konservatif kanan (termasuk dan terutama Enrile) dituntut untuk dipecat, seperti Pimentel, Sanchez, Rogaziano dan Maceda, digeser atau diberhentikan. Tampaknya tindakan Ny. Aquino itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik terbuka di antara para pembantunya dan menghindari kemungkinan politik yang lebih luas di kalangan masyarakat. Kini tampaknya kabinet Ny. Aquino sudah terhindar dari krisis, sekurang-kurangnya untuk sementara waktu.

Selain itu Ny. Aquino juga melakukan ultimatum kepada para pendukung NPA untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan berunding dengan pemerintah mencapai gencatan senjata dengan tuntutan-tuntutannya yang keras, seperti masalah pangkalan Amerika Serikat di negeri itu dan - *landreform.* Gencatan senjata dengan NPA memang kemudian tercapai tetapi tampaknya pihak konservatif kanan dan militer tidak puas sehingga masa depan perdamaian di dalam negeri Pilipina dapat terancam lagi setiap waktu. Gencatan senjata selama 60 hari mulai 10 Desember 1986 itu masih akan tergantung pada keinginan kedua belah pihak terutama yang berkaitan dengan kekuasaan politik dan kebijakan-kebijakan lebih lanjut dalam mengelola negeri itu. Dapatkah kedua belah pihak dalam waktu singkat ini sepakat mengenai hal itu? Kalau tidak, maukah kedua belah pihak memperpanjang waktu gencatan senjata untuk sampai pada kesimpulan yang mengakhiri pemberontakan komunis itu?

Mengenai keinginan Presiden Aquino agar rakyat menerima rancangan UUD dalam plebisit yang akan datang, kelompok Enrile dan beberapa kalangan sayap konservatif kanan berusaha menolaknya. Di lain pihak, kelompok kiri, seperti ditunjukkan oleh sikap *Partido ng Bayan,* tampaknya cenderung menerimanya. Situasi ini tampaknya memberi gambaran bahwa jalan Pilipina untuk mempunyai UUD baru tidak terlalu mulus untuk dilalui. Ini berarti bahwa konflik antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan masih akan terus menjadi bagian kehidupan politik Pilipina di masa-masa mendatang. Kalau pada akhirnya UUD baru dapat terwujud, jalan panjang ke arah stabilitas politik, sosial dan ekonomi Pilipina masih panjang. Dan untuk mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapinya, Pilipina membutuhkan suatu pemerintahan yang kuat dan didukung oleh lapisan masyarakat luas. Karena itu memiliki pemerintahan yang kuat juga menjadi masalah yang mendesak bagi Pilipina.□

Digitized by Google

Jusuf Wanandi

Dunia Internasional Sepanjang Tahun 1986

(Bagian II Habis)

ASEAN

Selama tahun 1986 tidak terjadi perubahan dalam organisasi ASEAN ini. Papua Nugini berkeinginan untuk menjadi anggota ASEAN. Hal ini mungkin perlu dipertimbangkan secara lebih saksama.

ASEAN, yang sampai sejauh ini telah dijadikan sebagai tonggak penting politik luar negeri negara-negara anggotanya, sekarang tampaknya dipertanyakan dalam banyak hal, antara lain: mengenai amat lambannya kemajuan ASEAN dalam kerjasama ekonomi, dan apakah bijak mengikuti kebijaksanaan Thailand mengenai konflik Kamboja hanya untuk mempertahankan solidaritas ASEAN.

Perkembangan lain yang perlu diperhatikan adalah tidak dimilikinya komitment yang sama terhadap ASEAN antara generasi yang lebih muda dan kepemimpinan berikutnya dengan pemimpin-pemimpin sekarang yang amat terlibat di dalam proses pembentukan ASEAN. Hal ini tentu harus dipertimbangkan masak-masak kalau ASEAN ingin dipertahankan sebagai salah satu tonggak politik luar negeri negara-negara anggotanya di masa depan.

Jika ASEAN tetap dilihat sebagai sesuatu yang lebih vital bagi masa depan Indonesia, maka perlu secara serius dikaji beberapa skema kerjasama dan komitmen politik yang penting untuk memungkinkan pembaharuannya. Tampaknya ASEAN membutuhkan usaha-usaha serius dari pemimpin-pemimpinnya melalui suatu pertemuan puncak sesegera mungkin. Menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, suatu komitmen baru terhadap skema kerjasama negara-negara anggota yang lebih efektif mungkin lebih mudah dilakukan daripada jika menghadapi kesulitan-kesulitan politik. Sebab secara politis memang sulit untuk menyatukan pendapat di antara negara anggota ASEAN, apalagi terhadap permasalahan situasi regional seperti tersebut. Mungkin tidak berlebihan, jika orang mengatakan, "ASEAN kini berada di persimpangan jalan."

Perkembangan ZOPFAN

Usaha-usaha untuk merealisasi suatu tata regional di Asia Tenggara, yakni gagasan ZOPFAN, tampaknya tetap terus-menerus dilakukan. Pada asasnya, ZOPFAN adalah suatu tata regional di masa bangsa-bangsa Asia Tenggara mampu memelihara stabilitas dan perdamaian kawasan dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Gagasan ini mengandung pengertian penataan hubungan-hubungan di antara negara-negara Asia Tenggara sendiri maupun hubungan-hubungan dengan negara-negara di luar kawasan, khususnya negara-negara besar.

Komitmen yang sama terhadap ASEAN antar generasi muda.

Secara tersirat, gagasan ZOPFAN merancang suatu struktur hubungan di mana tak satu pun negara besar akan mempunyai posisi dominan di kawasan dan memperoleh kesempatan serta pembenaran untuk melakukan intervensi. Namun begitu, realisasi gagasan tersebut tetap tergantung pada keberhasilan pembangunan dan ketahanan nasional negara-negara Asia Tenggara dan tidak harus didasarkan pada pengakuan de jure oleh negara-negara besar.

Memang gagasan ZOPFAN sendiri menimbulkan beberapa pertanyaan, antara lain apakah tujuan itu merupakan sesuatu yang realistik. Namun beberapa kondisi umum nampaknya mendukung terealisasinya gagasan yang dicetuskan pada tahun 1971 itu. Dalam kaitan ini ASEAN merupakan penyumbang utama bagi terciptanya kondisi yang diperlukan untuk realisasi ZOPFAN. *Pertama*, di lingkungan negara-negara anggota ASEAN telah tercipta suasana damai dan stabil yang secara relatif memungkinkan terlaksananya pembangunan. Perkembangan politik di Filipina tampaknya tidak terlalu mengganggu terpeliharanya lingkungan yang demikian itu. - *Kedua*, ASEAN juga telah mencegah timbulnya konflik di antara negara-negara anggotanya. Setidak-tidaknya dengan ASEAN potensi krisis dapat di atasi, seperti masalah perbatasan antara Malaysia dan Thailand, dan masalah Sabah antara Malaysia dan Filipina. Demikian pula kesalingpengertian, kepercayaan dan saling membantu semakin besar peranannya dalam menciptakan suasana dan lingkungan yang damai dan stabil.

Salah satu kondisi yang menghambat realisasinya gagasan ini adalah penataan hubungan antara negara-negara Asia Tenggara yang lain yaitu negara-negara Indocina dan Birma. Dalam aspek ini, konflik Kamboja telah menjadi hambatan bagi realisasi tata regional itu. Sementara itu dimensi penghambat yang lain adalah adanya beberapa negara di kawasan yang tetap merasakan perlunya menggantungkan diri pada negara-negra besar tertentu dalam usaha mereka menjaga keamanan

Digitized by Google

nasionalnya.

Sisi lain dari gagasan ZOPFAN adalah upaya pembentukan NWFZ (Zona Bebas Senjata Nuklir). Dalam pertemuan tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, bulan Juni, telah disepakati gagasan itu sebagai komponen dari konsep ZOPFAN. Realisasi dari kawasan bebas senjata nuklir akan merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang bebas, netral dan damai.

Masalah Kamboja

Tampaknya komitmen terhadap gagasan ZOPFAN merupakan motivasi penting bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk melanjutkan usaha-usaha menemukan suatu penyelesaian politik atas konflik Kamboja. Sampai saat ini, masalah Kamboja tetap dalam keadaan "status quo". Keadaan ini disebabkan terutama oleh tidak adanya rangsangan keuntungan apa pun bagi sesuatu pihak yang bersengketa untuk mengubah status quo. Perubahan situasi dalam arti militer juga terlalu mahal, termasuk bagi Vietnam sendiri.

Tampak pula bahwa RRC dan Thailand, di lain pihak, juga cukup puas dengan status quo sekarang ini karena tidak menghadapkan mereka pada beban ekonomi yang berat. Mereka yakin, secara perlahan-lahan Vietnam pasti akan semakin merasakan beratnya beban yang harus ditanggung di Kamboja, baik secara ekonomi maupun secara politik. Namun bila keadaan status quo ini dibiarkan berlarut-larut, mungkin pada akhirnya ASEAN akan dihadapkan pada "fait accompli", yaitu berlangsungnya kehadiran militer Vietnam di Kamboja, setidak-tidaknya sampai pemerintahan Heng Samrin dipandang telah mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam mencegah kembalinya Khmer Merah untuk berkuasa.

Perkembangan Politik di Filipina

Sebagian besar analisa-analisa tentang Filipina selama satu tahun terakhir ini berisi prediksi-prediksi dan pujian-pujian tentang "keberhasilan" Ny. Cory Aquino memimpin negara tersebut. Namun selama 9 bulan pemerintahan Presiden Cory ini, Filipina terus-menerus berada dalam situasi "krisis", bukan saja karena masalah ekonomi tetapi juga (terutama) karena masalah-masalah ideologis dan politik. Situasi demikian ini kiranya amat penting bagi Filipina dalam proses menemukan kembali karakter, kepribadian dan kepercayaan dirinya sendiri sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan koreksi dan pembaharuan kebijakan-kebijakan di hampir semua bidang kehidupan.

Tantangan bagi Presiden Cory saat ini adalah menciptakan dan memelihara stabilitas nasional dalam negeri agar dapat menyelenggarakan pembangunan nasional, khususnya perbaikan-perbaikan kehidupan perekonomian. Dalam langkah-langkah perbaikan ekonomi nasional Presiden Cory secara relatif telah berhasil memperoleh dukungan dan bantuan yang amat penting dari luar negeri, khususnya Amerika Serikat dan Jepang. Dalam lingkup regional Cory juga telah berhasil merangkul negara-negara sahabat ASEAN. Ia pertama kali mengadakan kunjungan ke luar negeri justru bukan ke Amerika Serikat, tetapi ke Indonesia. Demikian pula ia merencanakan melepaskan masalah Sabah. Simpati dunia internasional terhadap Presiden Cory tampaknya akan tetap bertahan selama situasi dalam negeri Filipina tetap stabil.

Puncak krisis pemerintahan Cory, dan krisis stabilitas nasional untuk sementara waktu telah berhasil diselesaikannya, yakni dengan memperbaharui susunan Kabinetnya dan mengadakan gencatan senjata dengan gerakan Komunisme selama 60 hari. Namun masih merupakan tantangan pokok bagi Presiden Aquino, yang berusaha menghidupkan kembali demokrasi, apakah akomodasi-akomodasi — dari berbagai kepentingan — akan terus dilakukan dan selalu menjadi model penyelesaian konflik-konflik kepentingan di bawah Presiden Aquino, yang seharusnya bukan merupakan suatu penyelesaian yang pasti. Jika demikian halnya, bukan tidak mungkin Filipina akan selalu berada dalam "suasana dari krisis ke krisis".

Cory. Berada dalam situasi krisis.

Asia Timur: RRC, Jepang dan Korea

Bagian kawasan Asia Pasifik lain yang menjadi sangat penting adalah Asia Timur Laut. Perkembangan yang terjadi di kawasan itu sedikit banyak akan mempunyai pengaruh akan perkembangan di wilayah lain kawasan Asia Pasifik: demikian juga sebaliknya. Beberapa kejadian penting di kawasan ini perlu dicatat.

Semenanjung Korea

Masalah utama yang dihadapi saat ini baik di Korea Selatan maupun di Korea Utara adalah masalah suksesi kepemimpinan. Selama satu tahun ini, Korea Selatan dipenuhi oleh berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk menentang pemerintahan Presiden Chun Do Hwan. Aksi-aksi mahasiswa ini memang selalu dapat dipunahkan oleh Polisi Anti Huru Hara Pemerintah Chun, namun upaya menentang pemerintah sekarang ini telah dilakukan baik oleh mahasiswa maupun gerakan oposisi yang dipimpin Kim Dae Jung. Jika berlarut-larut, situasi demikian itu jelas dapat mempengaruhi terpeliharanya stabilitas baik di dalam negeri Korea Selatan maupun di kawasan semenanjung Korea: ditambah lagi dengan persoalan hubungan dua Korea yang akhir-akhir ini tampak semakin tegang yang terutama disebabkan karena isyu kematian Presiden Kim Il Sung dan rencana dibangunnya bendungan oleh Korea Utara di Sungai Han yang juga mengaliri wilayah Korea Selatan.

Di Korea Utara, meskipun tidak dapat diketahui secara pasti, dapat diperkirakan bahwa sedang terjadi "gejolak" politik di dalam sistem pemerintahan Korea Utara, khususnya berkenaan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Berita kematian Presiden Kim Il Sung yang dikabarkan oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan, memang secara tidak langsung telah dibantah dengan "sambutan Kim Il Sung terhadap kedatangan/kunjungan Presiden Mongolia." Nampaknya masalah suksesi ini hanya bisa berjalan melalui dua cara, yaitu sampai Presiden itu meninggal dunia atau digulingkan oleh lawan-lawan politiknya. Memang sulit diketahui secara pasti keadaan di dalam negeri Korea Utara. Namun dengan "simpang-siurnya" berita mengenai Korea Utara akhir-akhir ini dapat diperkirakan bahwa Korea Utara sedang berada dalam situasi di antara dua pilihan tersebut. Pergantian kepemimpinan nasional mungkin sekali akan memberi kemungkin-

Digitized by Google

an baru, baik di dalam negeri Korea Utara maupun dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Jepang

Dengan pengukuhan kembali Nakasone sebagai Perdana Menteri Jepang, nampaknya sifat dan arah politik luar negeri Jepang dalam tahun mendatang tidak mengalami banyak perubahan. Jepang sebagai sekutu terpenting Amerika Serikat akan tetap berusaha meningkatkan kemampuan pertahanan dirinya seperti yang selama ini telah dilakukan dan dikehendaki oleh Amerika Serikat. Namun di lain pihak, usaha peningkatan kemampuan militer Jepang itu juga tergantung pada hubungan Jepang dengan Uni Soviet dan persepsi rakyatnya terhadap Uni Soviet. Kemungkinan demikian ini, kiranya menuntut Jepang memberi perhatian pada arti pentingnya dialog dan konsultasi yang intensif antara Jepang dengan negara-negara tetangganya.

Salah satu faktor penting dalam hubungan Jepang dengan dunia adalah kesanggupan Jepang mengatur tantangan-tantangan internasionalisasinya, yang dengan cara yang fundamental telah dilakukan oleh PM Nakasone. Namun begitu, tetap harus dilihat apakah pergeseran dukungan dari sektor pedesaan dan pertanian ke sektor perkotaan dan kelas menengah terhadap Partai yang sedang berkuasa —LDP— akan memperlancar proses internasionalisasi itu.

Di kawasan Asia Pasifik peran ekonomi Jepang akan tetap dominan. Sebaliknya, ekonomi Jepang akan tetap dipengaruhi oleh perkembangan di Asia Pasifik. Hal ini mengharuskan Jepang untuk meningkatkan kerjasama ekonominya dengan negara-negara di kawasan, khususnya negara-negara ASEAN. Meskipun telah tercapai kemajuan besar dalam meningkatkan hubungannya dengan ASEAN selama 10 tahun terakhir ini, Jepang tetap memerlukan perluasan hubungannya dalam bidang IPTEK, dan juga kebudayaan, agar menjadi lebih terbuka dan berwawasan internasional, khususnya dengan negara-negara tetangga.

Republik Rakyat Cina

RRC, satu negara besar lain di kawasan Asia Pasifik, dengan segala perubahan dan kemajuannya akan tetap dilihat sebagai pihak yang memberikan tantangan baik dalam arti negatif maupun positif oleh negara-negara di kawasan, khususnya negara-negara Asia Tenggara. Terdapat banyak alasan bagi sikap ambivalensi Asia Tenggara terhadap Cina. Secara historis, RRC selalu menganggap kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah pengaruhnya. Laut Cina Selatan, misalnya, tetap diaku oleh Cina sebagai wilayah perairannya.

Di samping itu, kebijakan RRC terhadap keturunan Cina yang telah menetapkan status kewarganegaraannya di negara lain tetap diberi kemungkinan memperoleh kembali status kewarganegaraan RRC; Undangan RRC kepada keturunan Cina untuk melakukan investasi di daratan Cina juga menyebabkan kuatnya kecurigaan terhadap mereka di Asia Tenggara.

Namun begitu, kiranya perlu dicatat bahwa usaha-usaha Deng Xiao Ping untuk modernisasi Cina dapat memberikan implikasi positif bagi kawasan, termasuk Asia Tenggara. Salah satunya adalah memberi kesempatan-kesempatan baru bagi kawasan. Selain itu, keberhasilan pembangunan Cina mungkin akan mendorong RRC untuk masuk ke dalam masyarakat dunia sebagai anggota yang bertanggung jawab. Secara demikian, RRC dapat menjadi faktor stabilisasi bagi kawasan Asia Pasifik.

Apa pun tantangan yang dihadapkan RRC kepada Asia Tenggara, jika RRC menjadi bagian dari masyarakat internasional dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Barat dan ASEAN, ia akan menjadi faktor positif bagi stabilitas dan perdamaian kawasan, daripada jika Cina kembali ke radikalisme karena kegagalan pembangunannya. Selama satu tahun terakhir ini, politik luar negeri Cina nampak semakin independen dalam lingkup segitiga hubungan Amerika Serikat-RRC-Uni Soviet. Semakin Cina memerlukan masukan teknologi dan Ekonomi dari Amerika Serikat dan Barat, semakin besar kesadarannya tentang perlunya mengambil sikap yang lebih independen di percaturan internasional. Di samping itu, normalisasi hubungan dengan Uni Soviet dapat mengurangi ketegangan di sepanjang perbatasan dan yang lebih penting adalah mengurangi pengeluaran pertahanan. Tawaran normalisasi ini secara implisit telah disampaikan oleh Gorbachev dalam pidatonya di Vladivostock beberapa bulan yang lalu.

Selain persoalan di atas, hubungan RRC—Jepang menarik untuk diamati karena unsur-unsur sejarah, kebudayaan, maupun perekonomian mereka. Sejak normalisasi hubungan Cina—Jepang tahun 1974, peningkatan hubungan kerjasama antara keduanya semakin pesat. Kunjungan PM Nakasone ke RRC bulan November tahun ini, kiranya membuktikan hal tersebut, di samping juga menjernihkan persoalan-persoalan historis yang dapat mengganggu hubungan mereka. Kunjungan ini juga dapat dilihat sebagai upaya PM Nakasone untuk lebih mendekatkan hubungan Cina—Korea Selatan yang nampaknya semakin penting untuk pemeliharaan stabilitas dan perdamaian kawasan. Namun terlepas dari itu semua, faktor-faktor geopolitik maupun perbedaan-perbedaan sistem ekonomi dan politik, Cina dan Jepang kiranya akan tetap saling bersaing di kawasan Asia Pasifik.

Pasifik Selatan

Australia, Selandia Baru, Papua Nugini dan negara-negara di kepulauan Pasifik Selatan lainnya menjadi faktor yang semakin penting dalam percaturan Asia Pasifik. ASEAN, yang merupakan tetangga terdekat kawasan Pasifik Selatan ini, sangat berkepentingan dalam stabilitas kawasan tersebut. Instabilitas di Pasifik Selatan akan berpengaruh atas perkembangan di Asia Tenggara. Oleh karena itu langkah-langkah ASEAN adalah berusaha mempererat kerja sama dengan Forum Pasifik Selatan, dan dengan mengundang PNG sebagai peninjau di semua pertemuan-pertemuan ASEAN.

Tentu saja, di antara negara-negara ASEAN mungkin Indonesialah — karena posisi geografisnya — yang memberikan perhatian besar terhadap kawasan ini. Hubungan Indonesia dengan PNG, misalnya, tetap rawan karena masalah perbatasan dan perbedaan pola-pola pembangunan dalam wilayah perbatasan yang luas. Karena itulah, Indonesia berusaha mengembangkan kerjasama secara lebih erat dalam bidang ekonomi dan teknik dalam kerangka kerja ECDC dan TCDC dengan negara-negara Pasifik Selatan, khususnya PNG.

Perkembangan akhir-akhir ini Kawasan Pasifik Selatan menunjukkan semakin pentingnya kawasan tersebut dalam dinamika percaturan hubungan Internasional. Selandia Baru secara terang-terangan menolak kehadiran senjata nuklir Amerika Serikat di wilayah kedaulatannya. Akibatnya, ia tampaknya mulai disingkirkan oleh Amerika Serikat dan Australia, terutama dalam lingkungan ANZUS. Negara-negara kecil lainnya, seperti Kaledonia Baru, Polynesia Perancis, mulai bangkit menuntut kemerdekaan. Kenyataan menunjukkan bahwa Forum Pasifik Selatan yang seharusnya memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah ekonomi dan sosial, mulai digunakan sebagai ajang di kawasan.

Dalam kaitan dengan kompleksitas hubungan Timur-Barat, tampaknya negara-negara di kawasan lebih condong ke Uni Soviet daripada ke Amerika Serikat. Banyak negara-negara tersebut yang tidak senang dengan Amerika Serikat. Di satu pihak mereka tidak memperoleh perhatiannya yang cukup serius dari AS; di lain pihak mereka telah pula dilukai oleh Amerika Serikat karena menolak mengakui ZEE mereka. Kekecewaan ini mungkin menyebabkan beberapa negara berpaling ke Uni Soviet, Kuba dan bahkan ke Libia. Kribati, misalnya, telah menandatangani perjanjian perikanan dengan Uni Soviet — yang telah menandatangani Hukum Perjanjian Laut yang baru, sehingga secara langsung mengakui ZEE. Hal ini baru bulan Nopember yang lalu Amerika Serikat mengadakan kerjasama dan perjanjian dibidang perikanan dengan negara-negara Pasifik Selatan, sehingga karenanya perjanjian Kribati dan Uni Soviet terdahulu tidak diperpanjang. Vanuatu telah membuka hubungan diplomatik dengan Kuba. Partai Kanak di Kaledonia Baru dilaporkan telah mengirimkan kader-kadernya untuk latihan militer ke Libya.

Digitized by Google

Perkembangan itu tampaknya belum mempunyai implikasi yang serius saat ini, namun mungkin akan memberi pengaruh yang besar di masa mendatang. Oleh karena itu perkembangan politik di kawasan ini, meskipun menyangkut negara-negara kecil, perlu diperhatikan setiap saat.

Asia Selatan

Negara-negara di kawasan Asia Selatan selama satu tahun ini tetap disibukkan oleh sejumlah konflik tradisional. Masalah konflik tradisional ini pula yang mewarnai KTT II SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), November yang lalu, di Bangalore, India, KTT II ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali komitmen mereka pada kerjasama ekonomi dan pembangunan di kawasan yang termasuk paling miskin di dunia.

Selain bertujuan untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, Organisasi Negara-negara Asia Selatan yang terdiri dari India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan dan Maladewa ini juga bertujuan menciptakan stabilitas, perdamaian dan koeksistensi damai di wilayah yang sering diasosiasikan dengan kerusuhan. Namun begitu, sejak berdirinya, pelaksanaan kerjasama tersebut belum banyak berkembang, bahkan pertentangan bilateral belum mereda sama sekali. India dan Pakistan, misalnya, masih saja saling mencurigai yang berkenaan dengan masalah perbatasan dan bahkan menyangkut persaingan persenjataan. Hubungan India dengan Sri Lanka juga semakin tidak baik, karena tuduhan Sri Lanka mengenai keterlibatan India dalam gerakan separatis Tamil.

Tampaknya tidak banyak perubahan atau kemajuan yang dicapai dalam KTT II SAARC ini. Meskipun India dan Sri Lanka dapat memperbaiki hubungan, yaitu dalam mengatasi bersama gerakan separatis Tamil, keutuhan organisasi ini justru diancam dengan meningkatnya ketegangan/ hubungan bilateral India dan Pakistan. Dengan kuatnya gerakan-gerakan kesukuan di negara-negara Asia Selatan ini, dan karena secara geografis negara-negara tersebut hanya dipisahkan oleh batas demarkasi saja, kiranya sulit untuk membendung bentrokan-bentrokan antar suku di kawasan tersebut. Nampaknya masalah-masalah semacam ini akan tetap menjadi masalah utama yang harus diselesaikan oleh SAARC di masa mendatang. Minimal, dengan adanya SAARC, dapat selalu terjalin komunikasi antar pemimpin-pemimpin negara-negara tersebut guna memecahkan berbagai masalah bilateral maupun regional; suatu proses yang amat penting bagi terciptanya stabilitas kawasan.

India — Pakistan

Selama tahun ini hubungan India—Pakistan diwarnai ketegangan-ketegangan, khususnya insiden-insiden dan kontak-kontak senjata di sepanjang perbatasan kedua negara tersebut. Masalah Ini tidak sekedar berlatar belakang politis-militer semata, tetapi terutama karena persoalan etnis yang telah berlangsung sejak Pakistan menyatakan "pisah" dengan India dan berdiri sebagai negara sendiri. Usaha-usaha meredakan ketegangan memang dilakukan, antara lain melalui dialog dalam SAARC, tetapi kurang efektif. Bahkan dalam menutup lembaran tahun ini tanda-tanda perbaikan hubungan belum juga nampak; yang terjadi justru sebaliknya. Terakhir kontak senjata perbatasan terjadi pada minggu pertama bulan November, dua minggu sebelum Gorbachev mengadakan kunjungan ke India.

Diwarnai ketegangan dan kontak senjata

Kunjungan Gorbachev ke India tidak meredakan ketegangan hubungan India—Pakistan. Sebaliknya kunjungan 25-28 November itu malahan justru mempertinggi intensitas ketegangan hubungan kedua negara. Ada anggapan, kunjungan Pemimpin tertinggi Uni Soviet ini merupakan jawaban atas kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Casper Weinberger, ke Pakistan pada bulan Oktober 1986. Dua hasil kunjungan Weinberger itu memang dapat merisaukan India. *Pertama*, Amerika Serikat pada prinsipnya menyetujui penjualan AWACS kepada Pakistan. - *Kedua*, Amerika setuju untuk meningkatkan jumlah bantuannya sebesar 20% untuk periode 1987-1992, yaitu dari 3 milyar menjadi 4 milyar dollar Amerika.

Amerika selalu berdalih bahwa bantuannya kepada Pakistan tidak ditujukan untuk mengancam India melainkan sekedar untuk meningkatkan pertahanan Pakistan menghadapi serangan Afghanistan. Dalih semacam ini kiranya tidak dapat begitu saja diterima oleh India. Bahkan India yakin — yang didukung oleh Uni Soviet — bahwa tujuan Amerika adalah untuk meningkatkan superioritas militer Pakistan atas India. Sebelumnya Presiden Reagan pernah menegaskan kepada Gorbachev mengenai komitmennya yang tidak tergoyahkan pada keamanan Pakistan.

Kunjungan Gorbachev ke India dengan demikian lebih merupakan simbol dari tekad Soviet untuk memperbaharui komitmennya terhadap pertahanan India — yang telah dirumuskan kira-kira lima belas tahun yang lalu. Dalam wawancara dengan wartawan India sebelum kunjungannya itu, Gorbachev bertekad untuk membela India dari segala kemungkinan agresi dari luar.

Dalam situasi demikian, kunjungan Gorbachev tampaknya hanya akan mempertajam fragmentasi antara India—Uni Soviet di satu pihak dan Pakistan—Amerika di pihak lain. Kecuali itu, kunjungan itu mungkin juga akan mempertinggi persaingan kekuatan militer antara India—Pakistan dan memperbesar ancaman peperangan kedua negara; sesuatu yang jelas sangat bertentangan dengan dibentuknya SAARC.

Dinamika Politik di Timur Tengah

Secara umum, perkembangan di Timur Tengah menunjukkan bahwa kawasan ini memang dipenuhi oleh dilema-dilema yang sangat kompleks. Suatu usaha penyelesaian

Digitized by Google

masalah di kawasan ini pasti akan menimbulkan permasalahan lain yang dapat berlarut-larut. Kompleksitas inilah yang mewarnai perkembangan politik di Timur Tengah sepanjang tahun 1986.

Upaya Perdamaian Israel

Tercatat beberapa langkah perdamaian yang diambil oleh PM Israel, Simon Peres dengan negara-negara tetangganya yaitu Mesir dan Maroko. Di satu pihak, upaya perdamaian ini telah memperbaiki hubungan-hubungan antara Israel dan Mesir, dan antara Israel dan Maroko. Langkah PM Simon Peres ini dapat dimengerti, selain karena Simon Peres adalah seorang moderat dalam kaitannya dengan sengketa Israel—Palestina, ia juga melihat Mesir dan Maroko sebagai negara-negara yang mau diajak berunding. Secara bilateral, usaha Simon Peres ini mungkin akan memberikan keuntungan-keuntungan tertentu. Namun secara regional, upaya tersebut dapat lebih mempertajam kompleksitas hubungan internasional di Timur Tengah, khususnya persaingan pengaruh politik di Organisasi Liga Arab.

Upaya yang telah dirintis oleh Simon Peres untuk mendekati negara-negara anggota Liga Arab tersebut nampaknya akan menemui hambatan-hambatan yang disebabkan karena berakhirnya masa Simon Peres memegang jabatan Perdana Menteri, yang telah digantikan oleh Yitzhak Shamir. Yitzhak Shamir, dari partai Likud, mempunyai pendirian dan pandangan politik yang berbeda dengan Simon Peres. Ia terkenal sebagai tokoh yang memperjuangkan "kejayaan" Israel di Timur Tengah. Karena itu, mungkin sekali Yitzhak Shamir akan mengambil kebijakan "garis keras" dalam mengatasi masalah-masalah Israel di Timur Tengah. Secara demikian, upaya perdamaian Simon Peres bisa jadi akan menjadi sia-sia.

Amerika Serikat—Iran

Perkembangan baru berlangsung di kawasan Teluk Parsi, yakni terbongkarnya skandal penjualan senjata Amerika Serikat ke Republik Islam Iran. Di samping menggoncangkan stabilitas pemerintahan Presiden Reagan, skandal tersebut juga dapat mengubah perimbangan kekuatan di kawasan Teluk Parsi, khususnya dalam kaitannya dengan Perang Irak-Iran yang telah berlangsung selama enam tahun tersebut.

Bagi Amerika Serikat, bila dilihat dari sudut pandang strategi, memang sulit untuk melepaskan begitu saja hubungan dengan Iran. Dalam pertimbangan kompleksitas hubungan Timur-Barat, Iran sangat strategis bagi Amerika Serikat karena letak geografisnya yang paling berdekatan di antara negara-negara kawasan Teluk Parsi lainnya dengan posisi geografis Soviet. Setidak-tidaknya Iran merupakan wilayah di mana gerakan-gerakan militer Soviet di kawasan dapat dipantau secara lebih dini dan teliti. Maksimal, negeri Ayatollah ini merupakan benteng pertahanan terdepan bagi masuknya pengaruh Soviet di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itulah Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk selalu mendekati Iran kembali.

Bagi Uni Soviet, Iran juga mempunyai arti strategis tertentu. Sebagian besar penduduk Soviet di wilayah Timur Laut adalah suku-suku Persia. Pengaruh dari Iran dapat menyebabkan munculnya gejolak di wilayah Soviet Timur Laut tersebut. Karena itu, Uni Soviet selalu menjaga hubungan baiknya dengan Iran. Meskipun, untuk mengalihkan perhatian Iran atas warga sukunya yang berada di wilayah Uni Soviet itu, Uni Soviet mungkin pula memanfaatkan situasi perang Irak-Iran. Dengan memberikan bantuan senjata kepada Irak, setidak-tidaknya, Uni Soviet telah menumbuhkan ancaman terhadap Iran secara terus-menerus.

Hadirnya senjata-senjata Amerika Serikat ke Iran akan memperlarutkan perang Irak-Iran. Selain itu, berlebihnya kekuatan militer Iran akan mendorong negeri ini untuk memperluas "revolusinya" dari kawasan Asia Tengah meluas sampai kawasan Timur-Tengah. Kondisi demikian jelas tidak membantu penyelesaian persoalan-persoalan di kawasan.

Situasi Politik di Libanon

Selama tahun 1986 ini situasi politik di Libanon berkembang semakin kompleks. Hal ini terutama disebabkan masuknya kembali para pejuang Palestina (PLO) ke Libanon. Gerakan pejuang PLO di Libanon ini pada dasarnya sangat tidak disukai, bahkan ditentang oleh golongan Muslim Libanon khususnya golongan

BATUBARA

PERUM TAMBANG BATUBARA

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10
Kotak Pos 405 Kby.
Telex : BRAJAKIA
Facsimile : (021) 827642
Telepon : 825608

JAKARTA SELATAN

Digitized by Google

Amal Shiah. Amal Shiah menganggap bahwa dengan berpangkalnya PLO di Libanon jelas akan mengundang Israel melakukan gempuran-gempuran militer di Libanon, yang pada akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat Libanon. Hal ini akan mengganggu perjuangan golongan Amal Shiah dalam usahanya menjadi kekuatan dominan di Libanon dan dalam usahanya menekan pemerintahan Amin Gemayel untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam perimbangan kekuatan yang lebih adil di pemerintah.

Selama ini posisi dominan dalam kekuasaan pemerintah di Libanon diperoleh golongan Kristen Maronit. Dominasi ini sebenarnya adalah warisan dari tradisi penjajah Perancis tempo dulu. Sebagaimana diketahui, sebagian besar golongan Muslim Amal Shiah berada di Libanon bagian Selatan yang juga menjadi pangkalan-pangkalan gerakan para pejuang Palestina. Dengan sendirinya, serangan-serangan militer Israel ditujukan di wilayah Libanon Selatan ini. Sebenarnya, Israel telah membangun zona pengamanan di wilayah tersebut. Namun karena zona pengamanan ini seringkali menjadi sasaran serangan pejuang Palestina, maka tidak ada pilihan lain bagi Israel untuk melakukan gempuran-gempuran di markas-markas pejuang Palestina di Libanon Selatan tersebut. Jelas hal ini sangat mengganggu penduduk Libanon di wilayah itu. Maka tujuan utama dari golongan Amal Shiah adalah mengusir PLO keluar dari wilayahnya tersebut.

Pertempuran-pertempuran di Libanon dengan demikian berlangsung antara golongan Amal Shiah melawan PLO di satu pihak, dan Israel melawan PLO di lain pihak. Keadaan demikian ini sangat merugikan bagi perjuangan PLO sendiri.

Selain itu, pertempuran antara pejuang PLO dan golongan Amal Shiah tersebut sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh konflik kepentingan negara-negara Arab seperti Suriah, Libia dan Irian di Libanon. Secara demikian, kiranya penyelesaian masalah politik di Libanon hanya dapat dilakukan bila kekuatan-kekuatan asing itu melepaskan campur tangannya secara bersama-sama.

Afrika Selatan

Nampaknya sulit untuk mengharapkan segera terselesaikannya masalah Apartheid di Afrika Selatan. Bahkan selama tahun 1986 ini masalah di Afrika Selatan meluas ke tataran regional. Sementara itu sanksi-sanksi ekonomi yang dilakukan oleh dunia internasional kepada Afrika Selatan sangat sedikit pengaruhnya pada perubahan politik Apartheid yang dianut oleh Pemerintah Afrika Selatan. Bagi negara-negara di kawasan Afrika bagian Selatan, jelas perkembangan tersebut sangat tidak menguntungkan upaya-upaya pembangunan nasional yang sedang dilaksanakannya.

Intensitas kerusuhan di Afrika Selatan selama tahun 1986 semakin meningkat. Kerusuhan-kerusuhan tersebut pada dasarnya dipelopori oleh African National Congress (ANC), satu partai politik di Afrika Selatan yang dilarang oleh Pemerintah, dari beberapa pangkalan utamanya di luar negeri yakni di Bothswana, Zambia dan Zimbabwe. Dalam situasi yang demikian ini, Pemerintah Afrika selatan terdesak untuk kembali memberlakukan Undang-Undang Darurat Perang dan secara langsung mengadakan serbuan ke pangkalan gerakan ANC di ketiga negara tersebut, yakni pada tanggal 18 Mei 1986.

Kerusuhan tersebut.

Serbuan Afrika Selatan ke negara-negara tetangganya tersebut diprotes secara keras oleh mereka masing-masing dan mendapat kecaman dari kalangan dunia internasional, karena merupakan invasi militer terhadap kedaulatan wilayah negara lain. Secara langsung aksi militer Afrika Selatan ini tidak mendapat reaksi yang keras dari negara-negara tetangganya, yang berupa serangan militer. Hal ini terutama disebabkan karena ketergantungan negara-negara di kawasan terhadap Afrika Selatan, khususnya dalam hal pengadaan bahan bakar dan listrik serta "jalan masuk" kebutuhan impor dari luar. Alasan ini juga menjelaskan sikap negara-negara di kawasan terhadap politik apartheid yang berlangsung di Afrika Selatan.

Sanksi Internasional terhadap Afrika Selatan mungkin juga tidak memberi banyak pengaruh. Namun demikian kemungkinan Amerika akan mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Afrika Selatan terutama dengan menangnya Partai Demokrat mendominasi kursi di Parlemen. Di lain pihak, Inggris dan juga Amerika, sangat tergantung pada Afrika Selatan khususnya bagi pemenuhan bahan-bahan meneral untuk pengembangan industri otomotif dan juga uranium untuk pengembangan industri militer. Sikap Inggris ini pula yang menyebabkan terjadinya gejolak di organisasi negara-negara Persemakmuran.

Dengan kondisi demikian Afrika Selatan berada dalam posisi yang selalu menguntungkan sehingga pelaksanaan politik apartheid yang dilakukannya untuk sementara waktu akan tetap berlangsung terus, kecuali jika negara-negara besar mengambil tindakan drastis terhadap Afrika Selatan.

Catatan Penutup

Perkembangan percaturan internasional sepanjang tahun 1985 berjalan semakin dinamis. Meskipun kompleksitas hubungan Amerika Serikat — Uni Soviet atau Timur-Barat tetap disuasanai oleh Ketegangan, rangkaian dialog dan diplomasi yang dilakukan oleh dua negara adikuasa di dunia itu telah memberikan harapan-harapan baru yang lebih terang keamanan dan perdamaian internasional. Sebagai suatu proses yang penuh kompleksitas, maka wajar jika dialog yang dilakukan antar Amerika Serikat — Uni Soviet berjalan dengan sangat lamban. Yang terpenting dalam hal ini adalah terjalinnya komunikasi yang memungkinkan bagi pembicaraan-pembicaraan antara kedua negara adikuasa, dan sekutu-sekutunya, mengenai keamanan dan perdamaian internasional.

Sementara itu, di kawasan lain di dunia meskipun juga diwarnai oleh suasana kompetisi dan konflik bilateral maupun regional antar negara, usaha-usaha penyelesaian secara damai juga telah dilakukan. Kawasan Asia Selatan telah membentuk suatu organisasi yakni SAARC yang memungkinkan negara-negara di kawasan ini untuk meningkatkan hubungan kerjasama mereka yang dengan demikian akan memungkinkan terciptanya stabilitas regional yang sangat penting bagi usaha-usaha pembangunan nasional masing-masing negara di kawasan tersebut. Demikian pula di kawasan-kawasan lainnya seperti Timur Tengah, Afrika maupun kawasan Asia Pasifik pada umumnya.

Di antara berbagai persoalan tersebut, satu hal yang nampaknya perlu ditekankan dalam percaturan internasional ini, yaitu Era Pasifik akan mewarnai perkembangan dunia di masa yang akan datang. Berbagai peristiwa yang terjadi kawasan ini telah menunjukkan semakin pentingnya kawasan bagi hubungan-hubungan antar bangsa. Tidak kurang dari pemimpin tertinggi Soviet telah secara serius mulai memperhatikan perkembangan di kawasan ini; dan secara langsung menawarkan pertimbangannya untuk perdamaian dan keamanan di kawasan. Suatu langkah maju bagi satu negara adikuasa yang seharusnya juga diikuti oleh perubahan-perubahan kebijakan Amerika Serikat di kawasan ini.

Makin pentingnya kawasan Asia-Pasifik juga akan membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi Indonesia untuk mengembangkan peranya.□

Digitized by Google

oleh : Maria Sugiharto

RAMPOKAN

Mereka yang telah mengunjungi *Roma,* Italia, pasti pernah menyaksikan sebuah petilasan yang kini bernilai *turistik,* ialah sebuah tempat yang disebut Colosseum. Ini adalah sebuah petilasan dari ribuan tahun yang lalu, meskipun bangunannya masih nampak kokoh, sebuah arena untuk adu singa dan manusia. Sebuah lambang kekejaman, karena di sana diadu antara manusia dengan binatang buas, disaksikan oleh ribuan manusia di bawah pimpinan rajanya. Yang sangat terkenal ialah ketika kekaisaran Romawi di bawah kaisar *Nero,* seorang kaisar yang lalim yang membuat coretan sejarah yang kurang menyenangkan, membakar kota Roma yang indah untuk tujuan membangunnya kembali, serta aduan-aduan manusia-singa secara rutin. Manusianya adalah para tawanan (narapidana). Aduan manusia-singa ini pasti sangat sadis dilihat dari segi kemanusiaan. Tetapi adu mengadu binatang buas seperti macan, juga terjadi di Indonesia, tepatnya pulau Jawa, yang berakhir pada abad yang lalu. *Rampokan,* demikian nama adu macan tersebut.

Rampok macan atau rampokan, adalah suatu pertunjukkan yang bersifat rituil, dimana di sebuah arena terbuka, sejumlah macan (macan loreng, macan tutul atau macan kumbang) dibunuh. Rampokan mengandung suatu tradisi tempo dulu, suatu perjuangan antara manusia melawan kejahatan. Dan, kejahatan itu dilambangkan terkandung dalam diri binatang buas, dalam hal ini macan.

Sebenarnya pertunjukan macan ini merupakan sebuah tontonan yang kejam, tetapi pada zaman itu di Pulau Jawa, pertunjukan semacam itu toh menjadi sebuah tontonan yang spektakuler bahkan bagi para wanita dan anak-anak berkebangsaan Belanda (Eropa). Meskipun di dalam *peri kebinatangan* hal tersebut nampak bengis, tetapi orang memandang pertunjukan tersebut sebagai sebuah *ritus* (upacara) yang sangat berarti.

Pada abad ke-19, Rampokan lebih banyak merupakan sebuah rangkaian upacara dalam merayakan hari-hari besar di Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti berakhirnya masa puasa (Ramadhan), dan merayakan masa Lebaran (di dalam bahasa Jawa disebut *Bakdan*). Rampokan berasal dari sebuah tradisi adu antar macan loreng dengan kerbau atau banteng, di mana fihak macan yang harus menanggung hasil jelek, atau kalah. Roh-roh jahat yang terkandung dalam eksistensi macan, harus dimusnahkan. Banteng, yang adalah lambang rakyat Indonesia, harus mendapatkan tempat kemenangan. Kendati gerakan serta kecepatannya menyergap kalah dengan kekuatan macan, tetapi dalam diri banteng (menurut pengertian yang disimbulkan di dalamnya) terkandung kekuatan bathin serta kekuatan dari bentuk serta sikapnya.

Para korban rampokan yang terdiri dari macan loreng, macan tutul dan macan kumbang. Tidak berdaya.

Pengamat dan sejarahwan Eropa mencatat hal tersebut sebagai suatu *artian politis* yang istimewa. Dalam catatan disebutkan bahwa hal tersebut merupakan tindakan orang-orang Jawa yang *tidak Jawa*.

Tradisi Sakral

Aduan macan yang ramai pada pertengahan abad yang lalu, lama-lama terkristalisir menjadi pertunjukkan dari daerah Kabupaten. Dan, adu *macan-banteng* lama-lama menghilang. Hal ini menurut perkiraan disebabkan karena kurang realistis lagi serta besarnya biaya untuk pertunjukkan semacan itu membuat para Bupati menyederhanakan pertunjukkan yang sifatnya justru *sakral* tersebut. Lamakelamaan pertunjukkan adu macan-banteng tidak diadakan lagi, tetapi pertunjukan *Rampokan* yang sifatnya sakral masih tetap diadakan dengan pengertian yang secara tradisional sudah mengakar, ialah: pembersihan dari roh-roh jahat yang melingkupi kehidupan manusia. Dan, karena tujuannya adalah pemurnian dari roh jahat, maka Rampokan diadakan di alam terbuka serta disaksikan oleh seluruh masyarakat.

Tatacara Rampokan

Rampokan diadakan di alun-alun, disaksikan seluruh lapisan masyarakat. Alun-alun dikepung oleh orang-orang yang membawa senjata tajam (tombak, lembing) yang nantinya bertugas *membunuh* macan-macan yang menyerang. Pada pertengahan abad yang lalu Rampokan banyak diadakan di daerah-daerah seperti Kediri dan Blitar serta daerah-daerah Jawa Timur lainnya di mana masih terdapat hutan-hutan belantara, tempat bersemayamnya para macan, sehingga dapat ditangkap sejumlah macan untuk dijadikan korban di dalam upacara Rampokan.

D-Day Rampokan adalah merupakan sebuah *Hari Besar*. Rampokan yang dimaksudkan sebagai sebuah upacara keagamaan mengakhiri bulan suci Ramadhan serta merayakan hari Lebaran disaksikan para pejabat Kabupaten serta para pejabat dan para businessmen berkebangsaan Eropa, yang menjadi para pejabat perkebunan di tanah Jawa. Upacara dimulai dari pagi hari dengan sembahyang di mesjid dan tempat-tempat suci lainnya. Sementara itu, berbondong-bondong orang dari Kabupaten dan di luar Kabupaten datang. Ada yang jalan kaki, dan ada juga yang naik kuda sejak berhari-hari sebelumnya. Semuanya ingin menyaksikan Rampokan yang merupakan pertunjukkan yang spektakuler, di samping secara ritual mengandung makna keagamaan.

Para pejabat Belanda datang dengan mengenakan baju dinas kebesaran (bila sekarang, barangkali apa yang dinamakan PDL) serta mendapatkan tempat di *Tribune Kehormatan,* bersama tamu penting lainnya, seperti para pejabat Kabupaten.

Digitized by Google

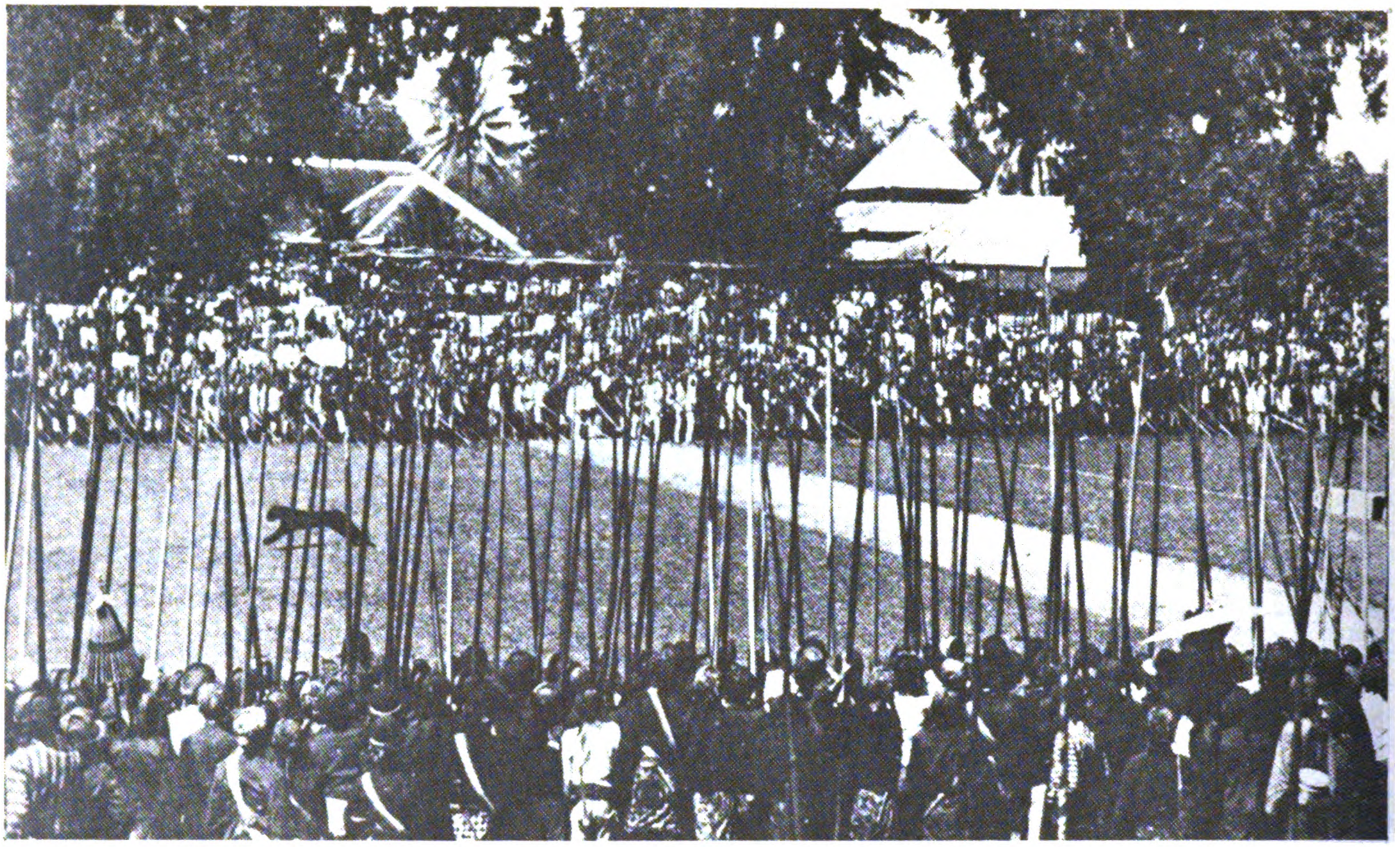

Suasana di alun-alun pada Rampokan. Para pembunuh macan sudah siap dengan tombak dan lembing mereka.

Residen, yang adalah pejabat berkebangsaan Belanda, datang belakangan, karena dia ini merupakan tamu yang ditunggu-tunggu dan menentukan. Begitu dia hadir, begitu upacara dimulai. Bila sang Residen yang mengenakan baju kebesaran datang, disambut oleh Bupati, berjalan menuju Tribune, gamelan pun mengiringi dengan suaranya yang mengalun. Gamelan itu selama bulan puasa juga ikut berpuasa, tidak boleh dibunyikan. Tuan Residen yang baru saja datang diikuti oleh Bupati, memberikan salam hormat kepada para tamu yang sudah ada, termasuk salam kepada para *Raden Ayu* yang hadir pada hari besar itu.

Sementara itu di alun-alun, para pembawa tombak sudah berderet dalam dua deretan yang ketat. Tombak-tombak itu sudah *dimandikan* (menurut upacara), diberi sesaji dengan diasapi oleh rempah-rempah (bahasa Jawa: dikutuki) dan dido'ai. Kadang-kadang tombak-tombak itu, seperti lazimnya keris, dibuat dari baja yang ampuh serta berharga mahal dan dibuat dengan berpuasa dan semedi. Di arena, telah berada kotak yang berbentuk bujur sangkar sebanyak delapan buah, kotak-kotak itu merupakan kandang macan-macan itu.

J. Sibinoa Mulder, seorang pemilik perkebunan kopi, yang menulis tentang Rampokan, antara tahun 1896-1906 mengatakan bahwa peti berbentuk bujur sangkar itu merupakan sebuah *Peti Mati,* karena pada hakekatnya para macan itu nanti mati setelah keluar dari kotak atau peti-peti itu.

Kemudian, seorang kyai atau pengemuka agama masuk ke dalam arena, untuk membuka peti-peti itu. Dengan anggun, kyai itu menari dengan gaya yang sedemikian rupa, menuju peti pertama, terus menyembah yang ke arah Bupati. Ketika sang Bupati memberikan persetujuannya, maka Kyai menuju ke kandang dan dengan setengah berjongkok dia mulai membuka peti, memberikan jalan dan memotong tali rotan yang menghubungkan kedelapan peti itu.

Dan akhirnya dengan tenangnya dia dengan menari-nari lagi, meninggalkan arena, tanpa melihat lagi ke belakang. Tidak seekor macanpun meninggalkan peti-peti yang telah terbuka itu. Hanya dengan asap-asap dari damen yang dibakar yang macan-macan di halau keluar, atau dengan menarik-narik tali rotan yang menghubungkan peti-peti itu, sehingga terbuka.

Macanpun keluar dari kegelapan, dan dalam kesilauan matahari pagi, dia berdiri di arena, menghadapi ribuan manusia, antara lain yang bersenjatakan tombak, siap tempur dengan mereka. Macan-macan itu berusaha menerjang dengan lompatannya yang dahsyat setelah kesilauan sejenak, tetapi yang kena adalah tombak dan lembing yang menjemputnya, sampai luka parah. Dan macan yang terluka lebih mengamuk lagi karenanya. Nasib memang menentukan macan-macan tersebut harus menjadi korban.

Setelah macan-macan yang mengamuk akhirnya berguguran, maka bangkainya diletakkan di tengah lapangan. Beberapa orang datang mendekati bangkai-bangkai macan itu. Dan seperti dituliskan *J.B. Ruziusk,* salah seorang amtenaar bangsa Belanda, mengatakan: ''Bertentangan dengan naluri saya, saya pun ikut menggabung dengan orang-orang lainnya mendekati bangkai-bangkai macan tersebut. Dan, sungguh merupakan pemandangan yang kurang menyedapkan, melihat orang-orang itu masing-masing ingin mendapatkan *kekuatan* dengan cara menyimpan - *relikwi* (peninggalan) yang diambil dari bagian tubuh macan yang mati itu. Ketika saya tanyakan kepada salah seorang dari mereka, yang mengambil bagian-bagian tubuh macan dengan merogoh luka yang menganga dari macan itu, maka jawabnya 'Kepercayaan kita ialah apabila kita bisa memiliki rambut, kuku misalnya, maka kita dapatkan suatu kekuatan yang bisa menolak macan'. Bisa dilihat di sini, betapa orang-orang ini merasa ngeri terhadap binatang buas macan tersebut, ketika menyimpan barang-barang dari anggota badan macan itu sebagai sebuah amulet. Sungguh suatu kekuatan *magis* yang kontradiktif, tetapi begitulah kepercayaan rakyat yang menganutnya. Tiada jawaban yang masuk akal tentu saja, tetapi demikianlah keadaannya.''

Bila di masa kini macan-macan itu masih menjadi alat atau sarana aduan untuk menciptakan kemurnian dari roh-roh jahat, maka saya yakin bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan lagi, sebab kendati buas dan bengis, binatang tersebut kini menjadi barang antik yang harus dilestarikan. □

Bahan dari majalah Orion, tulisan Roh Nieuwnhuys.

Digitized by Google

THE NEW MITSUBISHI
JETSTAR
PERFORMA BERIMBANG 1000cc

Konsep baru kendaraan penumpang 1000CC. **Minibus dengan "feeling sedan"**
Dirancang khusus oleh ahli-ahli Mitsubishi untuk menciptakan suatu standard baru bagi Minibus dikelas ini.
Mesin **53 PS** dengan performa lari yang mengagumkan, mantap dan stabil.

JETSTAR ROYAL, Minibus Semi Hi–Roof orisinil Mitsubishi. Tipe De Luxe (Foto VERSI DRESS UP).

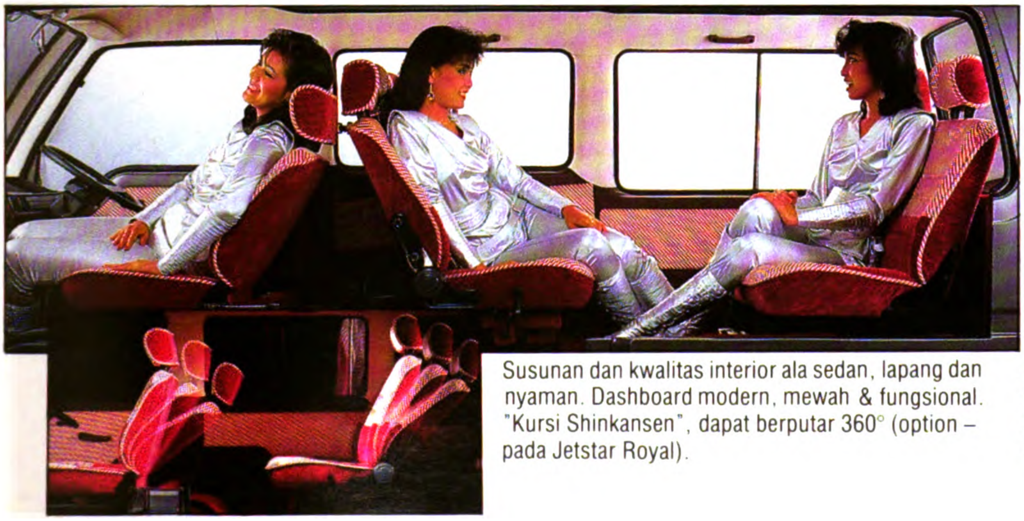

Susunan dan kwalitas interior ala sedan, lapang dan nyaman. Dashboard modern, mewah & fungsional. "Kursi Shinkansen", dapat berputar 360° (option – pada Jetstar Royal).

Sliding Door orisinil Mitsubishi yang eksklusif dengan step yang praktis, Langkah baru ke arah renovasi mutu, sangat memudahkan naik turun ditempat sempit.

PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
JL. JEND. A. YANI PROYEK PULOMAS JAKARTA Telp.4891608 (17 Saluran)

ANDALAN ANDA, TEKNOLOGI MITSUBISHI

Digitized by Google

Digitized by Google

No: 36 11 Pebruari 19

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

Antara Harapan dan Kesempatan

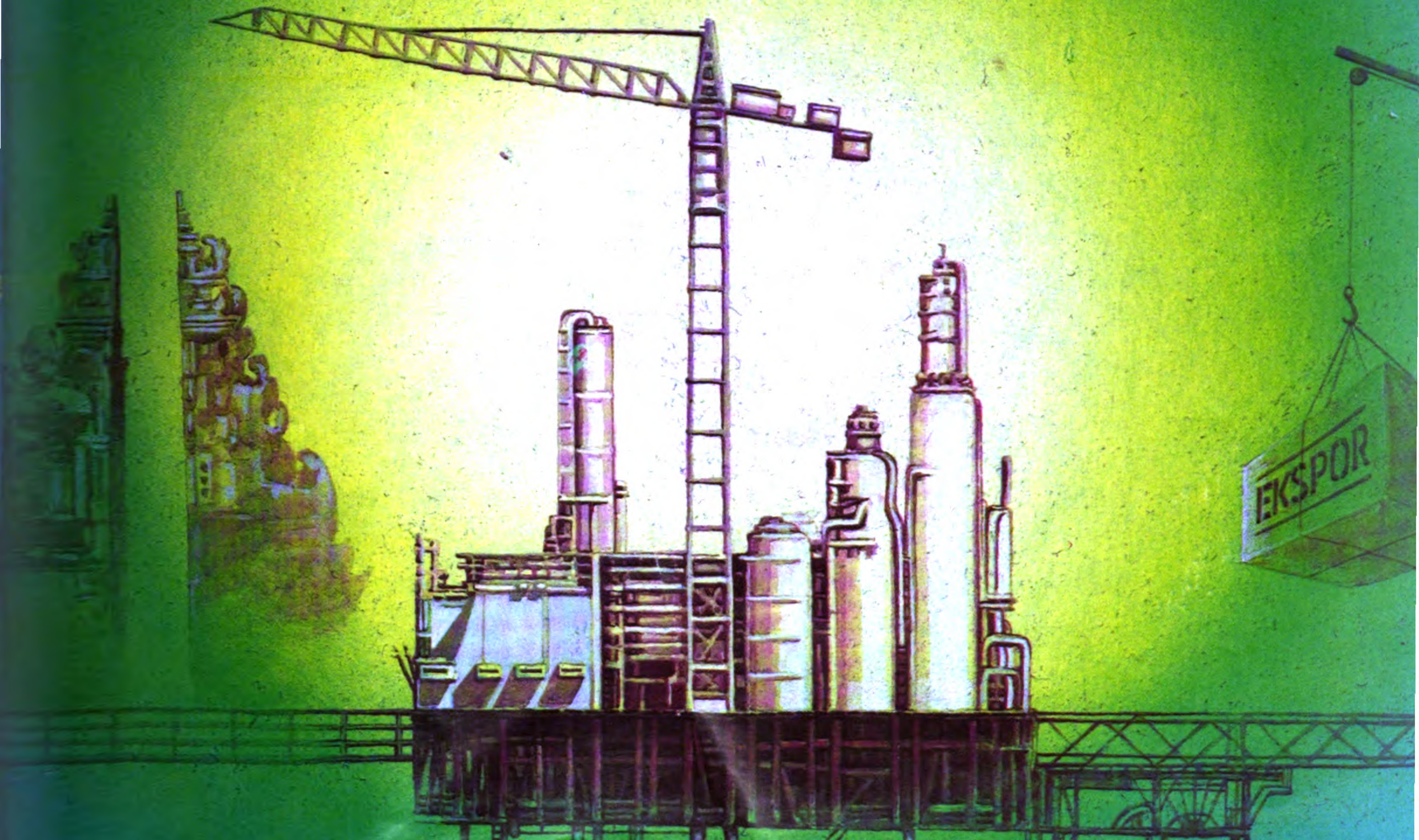

Laporan Khusus: Menegakkan Asas Praduga Tak Bersalah

SN 0216 — 2571

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

Bank Bumi Daya

Tempat dana berputar terus

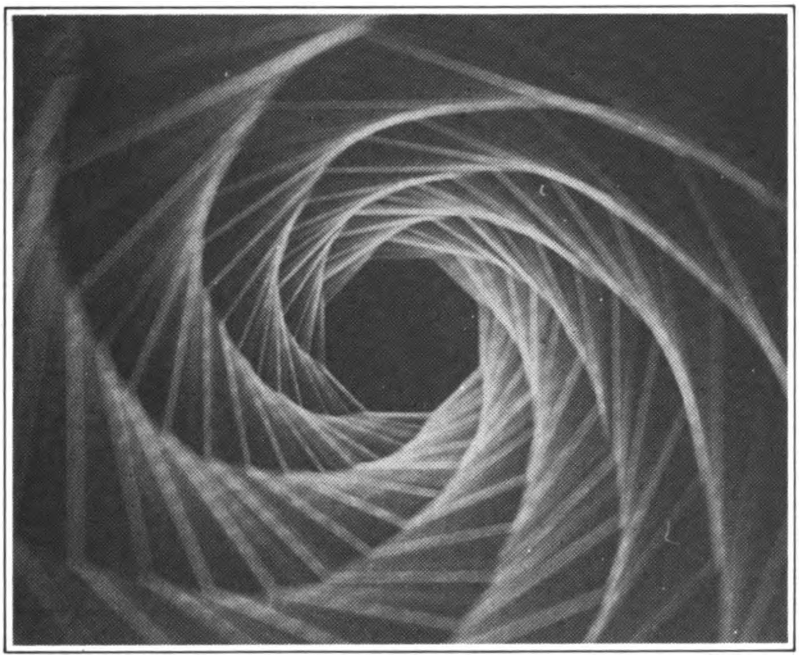

Deposito berjangka dengan bunga sebagai berikut :

A. DEPOSITO BERJANGKA

Jangka Waktu	Suku Bunga pertahun
1 (satu) bulan	13,00%
2 (dua) bulan	13,25%
3 (tiga) bulan	14,00%
6 (enam) bulan	14,50%
12 (dua belas) bulan	15,00%
24 (dua puluh empat) bulan	14,00%

Sertifikat dengan diskonto sebagai berikut :

B. SERTIFIKAT BANK BUMI DAYA

Jangka Waktu	Suku Bunga Per Tahun	
	Dibayar dimuka / diskonto	Dibayar Saat Jatuh Tempo
1 (satu) bulan	12,90%	13,00%
2 (dua) bulan	13,00%	13,30%
3 (tiga) bulan	13,50%	14,20%
6 (enam) bulan	13,50%	15,00%
12 (dua belas) bulan	13,00%	16,10%
24 (dua puluh empat) bulan	11,50%	17,40%

- Tingkat bunga se-waktu-waktu dapat berubah menurut keadaan pasar.
- Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Kantor Pusat Bank Bumi Daya dengan nomor telepon: 334508 - 330305 - 331893 - 332045 atau melalui cabang-cabang Bank Bumi Daya.

Bank Bumi Daya

Kantor Pusat :
Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat.
Telp.: 333721 (60 saluran).
Telex Kantor Pusat: 61876, 61400, 61896, 61277, 61355 BDPST IA
Telex Urusan Luar Negeri : 61117, 61765, 61896, 61760, 61395, 61297, 61421, 61122, 61423, 61624, 61425 BDULN IA
61891, 61759 BDFX IA

Marcon

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/
Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli.
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Ariono Poernomo.
Subandrio.
Djonharro.
Rum Aly.
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noerijathy.
Robert Puang Sunur.
Issidarto BA.
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO.: 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981.
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI

INSPIRASI MORAL BANGSA

FOKUS

PERS DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Dari Sudharmono SH tentang peran serta pers dalam pembangunan. Menyambut Hari Pers Nasional.

LAPORAN UTAMA

ANTARA HARAPAN DAN PELUANG. Apa saja harapan dan peluang yang dapat tercipta melalui Rancangan APBN 1987-1988 mendatang? pendapat dari pengamat dan tokoh FKP, serta pendapat F.Abri. Dilengkapi wawancara Dirjen Pajak Drs Salamun AT.

LAPORAN KHUSUS

MENEGAKKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH. Tokoh-tokoh kalangan penegakan hukum, pers dan ahli komunikasi angkat bicara.

NASIONAL

Mencari asset nasional dari ajaran Islam. Dan sejumlah peristiwa nasional lainnya.

KOMENTAR

Hakim dan cacat tubuh; BUMN.

ORGANISASI

Kunjungan DPP ke Kalimantan Selatan dan sejumlah kegiatan organisasi lainnya, serta sumbangan pikiran Rektor Universitas Jayabaya Dr H. Moeslim Taher SH. Rekaman persitwa organisasi.

KISAH SELINGAN

Uang kembalian

LUAR NEGERI

ASEAN Menjelang KTT Manila 1987

SPEKTRUM

Kemungkinan Realokasi Anggaran Kesehatan untuk Pelita V; Kebudayaan Indonesia dimasa mendatang

SENI BUDAYA

Sastra sebagai gambaran Kesadaran Intelektual; Dampak film di masyarakat

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

Ny. TS Darsoyo

Digitized by Google

Inspirasi Moral Bangsa

Banyak urun pendapat dan pemikiran diberikan kepada pers di sekitar Hari Pers Nasional 9 Pebruari. Dari kalangan masyarakat hingga kepada Kepala Negara. Dari yang awam hingga kepada berpengetahuan mendalam mengenai kehidupan-kehidupan pers. Presiden Soeharto misalnya, menyampaikan harapan agar pers nasional menyalakan obor di tengah masyarakat agar tetap bersikap realistik, penuh harapan dan setia kepada Pancasila. Esensi dari harapan ini adalah agar pers menjadi inspirasi moral bangsa.

Tanggungjawab untuk menjadi penyalur dan sumber inspirasi moral bangsa, merupakan suatu hal yang patut untuk dilimpahkan ke pundak pers nasional. Selain karena pengertian-pengertian universal mengenai peran pers adalah demikian, juga karena sejumlah pengalaman dalam perjalanan sejarah kehidupan pers nasional itu sendiri.

Dalam sejarah kemanusiaan, pers adalah pelembagaan baru dalam menjalankan fungsi-fungsi moral dan kebenaran yang telah dirintis oleh para rasul Allah dan filsuf-filsuf agung. Dalam wujud sosoknya, seperti pernah diutarakan seorang ahli komunikasi, pers adalah ibarat Janus — dewa dalam mitologi Romawi — yang berwajah dua sehingga mampu melihat ke belakang namun sekaligus mampu memandang ke depan. Akan tetapi, perlu ditekankan, bahwa dua wajah itu tak harus mencipta hati yang mendua.

Dalam sejarahnya, pers nasional, mengalami masa pasang surut. Namun seperti yang dikatakan Presiden Soeharto, bagaimanapun pers nasional pada hakekatnya tetaplah pers perjuangan. Hanya saja memang harus diakui ada saat — sangat menonjol pada masa pra Orde Baru — di mana pers nasional secara umum dan hampir merata menjadi pers yang tidak mampu dan tak berdaya. Konformis, sangat kompromistis, tidak berinisiatif, tidak kreatif dan tak berdinamika. Tapi ini bisa dimengerti, karena rezim yang ada pada waktu itu memang demikian mampu mencengkeram dan melumpuhkan kendali keberanian dan intelektualita dunia pers. Ini bukan apologi, tapi memang demikian adanya. Warisan psikologis masa Orde Lama ini kerap terasa hingga ke masa awal Orde Baru, dan bahkan secara insidental masih merupakan trauma bagi sejumlah tokoh pers senior hingga kini. Bahkan secara tak sengaja mewaris dalam penampilan mekanisme defensif dalam hubungan pers dengan pemerintah.

Meskipun bukannya tanpa perbenturan sama sekali, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, setidak-tidaknya suatu atmosfir baru telah tercipta dalam kehidupan pers nasional. Kendati tak segera memuaskan hati semua pihak, tapi setapak demi setapak, secara bersama dicapai langkah maju. Bila kita rajin mencatat, bukannya tak banyak lontaran sikap dan ucapan yang baik dan maju dari kalangan penentu kebijakan pemerintahan dan kekuasaan negara dari waktu ke waktu. Meskipun juga satu dua kali sempat mencuat terpaksa diambilnya tindakan-tindakan represif yang oleh kalangan pers dianggap sebagai langkah mundur, namun oleh penentu kebijaksanaan dianggap terpaksa diambil dalam rangka pengamanan cita-cita penciptaan pers yang bebas dan bertanggungjawab. Tapi terlepas dari beda anggapan seperti itu, adalah cukup menggembirakan bahwa semua pihak tak berkecenderungan aprioristis dan memasang harga mati atas sikapnya. Banyak contoh aktual dalam satu dua tahun terakhir ini. Pada waktu ada penindakan terhadap pers, dan kita mulai kecut dalam meraba bagaimana pembinaan pers lebih lanjut, apakah akan mengeras, ternyata sikap bijak dan lembut tampil kembali. Dan tercipta jalan keluar yang melegakan hati.

Hakekat dari perkembangan kehidupan pers nasional adalah bahwa meskipun tak tertulis, terdapat suatu mekanisme dialog antara pers disatu pihak dengan pemerintah pada lain pihak. Hanya, yang belum terpetakan dengan baik adalah hubungan segitiga antara masyarakat-pers-pemerintah. Baik pers maupun pemerintah memiliki itikad melindungi kepentingan masyarakat, namun tanpa disadari sering kepentingan masyarakat hanya dijadikan dalih. Pers bisa saja melakukan pengatasnamaan rakyat untuk menjalankan sosial kontrol, tapi tak semua pengatasnamaan itu betul-betul berdasar. Bahkan bukan tak pernah ada satu dua media pers tergelincir kepada sikap memukul langsung masyarakat maupun perorangan anggota masyarakat (pencemaran nama baik, pengabaian asas praduga tak bersalah, berpihakan dalam sengketa masyarakat dan sebagainya). Begitu pula mungkin tak semua dalih kepentingan umum yang dikenakan pemerintah dalam rangka penindakan terhadap pers dengan sendirinya tepat dan mengena.

Nyatalah bahwa dalam segitiga masyarakat-pers-pemerintah, kerap posisi masyarakat kurang menguntungkan, padahal secara idial prinsipial posisi masyarakat lah yang harus paling ke depan. Ini perlu menjadi pemikiran lebih lanjut bagi kedua pihak lainnya dalam segitiga tadi. Khususnya bagi kalangan pers, dalam posisi perannya sebagai inspirasi moral bangsa, bagaimana mengelola kepentingan masyarakat dalam dua arah — dari bawah ke atas dan sebaliknya — merupakan keharusan. Dari sudut subjektif, sumber eksistensi pers adalah berakar pada masyarakat, sedang pengesahan formal dalam rangka tatanan yang teratur berdasarkan hukum mengalir melalui pelaksana pemerintahan. Tapi dari sudut objektif, pers adalah jembatan komunikasi yang memelihara hubungan saling mengisi antara pemerintah dan masyarakat dalam dua arah yang sederajad. Di samping sebagai 'pendidik' yang ikut mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku positif di masyarakat serta sebagai 'sahabat' kritis namun jujur bagi pemerintah. Bila ini dijalankan, pers nasional kita akan bertambah tangguh dan semua pihak akan menaruh hormat.... •

Digitized by Google

Oleh: Sudharmono SH *

Pers Nasional Dalam Pembangunan Politik

Pers dapat berperan sebagai salah satu penegak moral nasional

Melalui pilihan apa yang akan dimuat, atau tidak dimuat, politik pers nasional mempunyai dampak politik terhadap pendapat umum tentang masalah yang kita hadapi.

Garis-garis Besar Haluan Negara menyadari peran politik dari pers nasional ini, sehingga menempatkannya dalam pembahasan mengenai Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa, serta Hubungan Luar Negeri. Kita semua pasti sudah memahami apa yang telah digariskan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara dalam hal ini.

Dalam kaitannya dengan sejarah pers dalam perjuangan kemerdekaan kita, amatlah tepat watak yang dipilih terhadap dunia pers nasional kita,yaitu sebagai "pers perjuangan".

Pers dan Politik sebagai institusi modern

Sebagai titik tolak dalam pembahasan ini, perlu melihat titik temu antara pers dan politik.

Mungkin tidak terlalu keliru jika kita menyatakan bahwa baik pers maupun kehidupan politik keduanya adalah institusi modern. Walaupun pemikiran mengenai politik ini sudah ada sejak awal sejarah manusia bermasyarakat, namun politik sebagai institusi, yaitu lembaga yang otonom dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, adalah merupakan fenomena moderen. Demikian juga halnya dengan pers. Keduanya merupakan bagian dari perkembangan dunia modern, yang dirintis oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke 18, di Eropa Barat.

Faham negara nasional, yaitu negara yang didasarkan kepada persamaan kehendak dari para warganya, terlepas dari ikatan primordial ras, suku atau pun agama, juga tumbuh dari sumber yang sama. Oleh karena itu amatlah menarik, jika kita amati bahwa munculnya faham negara nasional, kembangnya pemikiran politik yang otonom serta munculnya surat kabar seakan-akan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Ketiga-tiganya berkaitan dengan tahap perkembangan masyarakat yang makin besar dan maju, yang tidak lagi dapat dilayani oleh wujud hidup bermasyarakat kecil-kecilan yang ada sebelumnya.

Faham negara nasional, pengertian-pengertian politik serta pers nasional kita muncul karena kontak budaya dengan Eropa Barat. Kita tidak usah ragu mengakui kenyataan sejarah ini. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri kita menemukan bekas-bekasnya; dalam wujud istilah-istilah dan kalimat-kalimat bahasa asing. Hal itu adalah wajar mengingat sebagian terbesar perumus Pancasila dan UUD'45 adalah kaum intelektual berpendidikan Barat.

Sesuai dengan penjelasan pasal 32 UUD'45, tidaklah tercela untuk menerima bahan-bahan baru dari kebudayaan asing, yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kita tidak ingin hidup terisolasi dari dunia beradab lainnya.

Dalam perjuangan menuju Indonesia Merdeka, penguasaan warisan budaya Barat ini untuk menghadapi kaum kolonial Barat sangat besar manfaatnya, karena memungkinkan kita menghadapi mereka dengan nilai-nilai dan lembaga-lembaga mereka sendiri. Kita kalah kuat dalam bidang militer dalam abad-abad sebelumnya. Namun kita cukup tangguh dalam bidang perjuangan di bidang kultural dan politik serta hukum, yang kita pelajari dari kaum kolonial itu sendiri. Memang merupakan suatu ironi sejarah, bahwa kaum nasionalis Indonesia justru lahir dari anak didik kaum kolonialis itu sendiri, yang semula mereka rencanakan sebagai perpanjangan tangannya menghadapi rakyat kita.

Oleh karena faktor sejarah ini, dapatlah kita fahami bahwa para pemuka pergerakan nasional kita umumnya sekaligus merupakan kaum terpelajar, politisi serta tidak sedikit yang bergerak dalam bidang kewartawanan dan pers.

Sebagai kaum terpelajar, mereka mampu menganalisa keadaan dan memecahkan

Digitized by Google

masalah secara mendasar. Sebagai politisi mereka mampu menggerakkan masyarakat untuk mencapai sasaran bersama. Sebagai wartawan mereka mampu menjangkau dan menyatukan rakyatnya di tempat yang jauh, melalui tulisan-tulisannya.

Semangat yang tampil dalam seluruh kegiatan ini adalah semangat persatuan dan kesatuan. Sebagian hal itu, mungkin disebabkan oleh karena kesadaran berbahayanya politik pecah belah kaum kolonial, tetapi sebagian lagi karena yakin akan kekuatan persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama dengan cara dan atas dasar kepribadian Indonesia. Juga disadari sepenuh-penuhnya bahwa persatuan dan kesatuan bagi hidup bersama sebagai satu bangsa itu adalah mutlak, justru karena kita memiliki berbagai keragaman dan perbedaan yang mengandung kerawanan untuk berkembang menjadi perpecahan.

Keyakinan dan kesadaran akan mutlaknya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang memiliki keanekaragaman itu, akhirnya dapat diwujudkan dalam rumusan yang melembaga oleh para pendiri Republik ini pada tanggal 18 Agustus 1945, ialah Pancasila sebagai Dasar Negara.

Dengan pemilihan faham kenegaraan integralistik ini dan dengan menerima Pancasila secara bulat dan utuh, maka perkembangan kehidupan politik serta pers kita berbeda dengan negara-negara moderen lainnya di Eropa Barat, di mana filsafat liberalisme yang melatar belakangi Revolusi Perancis itulah yang justru dianut.

Hanya dengan latar belakang faham inilah baru bisa kita mengerti rumusan dalam GHBN mengenai pers dan media massa. Sekedar untuk menyegarkan ingatan kita, kita kutip angka 4 dalam Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan media massa Hubungan Luar Negeri, pada BAB IV GBHN.

"... penerangan dan media massa bertugas menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, memasyarakatkan kebudayaan dan kepribadian Indonesia, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembinaan dan pengembangan media massa nasional harus berdasarkan semangat dan jiwa Pancasila, agar media massa mampu menunjang pembangunan masyarakat Pancasila". Selanjutnya: "Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggungjawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini maka perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, Pemerintah dan masyarakat".

Jika arah kegiatan pers telah ditunjukkan, demikian juga halnya dengan bidang politik itu sendiri. Kita kutip beberapa arahan dalam bidang politik ini.

"Pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan demokrasi Pancasila. Dalam rangka memantapkan stabilitas politik yang dinamis serta pelaksanaan mekanisme demokrasi Pancasila, perlu lebih dimantapkan pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional serta dimantapkan berfungsinya dan saling hubungan antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memantapkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilanjutkan, ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dilaksanakan melalui pendidikan, penataran dan usaha-usaha lainnya, di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan politik lebih ditingkatkan, agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan, serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa".

Dengan tinjauan sejarah secara singkat tadi kiranya dapat kita simpulkan, bahwa walaupun tetap bersifat institusi modern, maka pers dan politik kita mempunyai ciri khas sebagai subsistem-subsistem yang terpadu dengan keseluruhan sistem nasional, dan tidak berdiri sendiri di luar kerangka hidup bernegara.

Faham kenegaraan integralistik yang dianut di tahun 1945 amat mudah kita fahami dewasa ini, dengan memandangnya dari segi pendekatan kesisteman. Seluruh negara adalah suatu sistem integral, sedang lembaga-lembaga di dalamnya terutama sistem kehidupan politiknya berperan sebagai komponen atau subsistemnya.

Masalah keanekaragaman masyarakat kita

Tekad persatuan dan kesatuan tersebut berhadapan dengan keanekaragaman masyarakat kita, baik secara etnis, ras,

La Taverna
BALI HOTEL

The big, airy rooms are decorated with art objects and batik, but for added comfort, the beds are large and baths, showers and all modern day facilities are *en suite.*

Our restaurant serves delicious Indonesian, Italian and Chinese food: freshly caught seafood, oven fresh pizzas and spicy Balinese satay.

Swimming pool with sunken bar

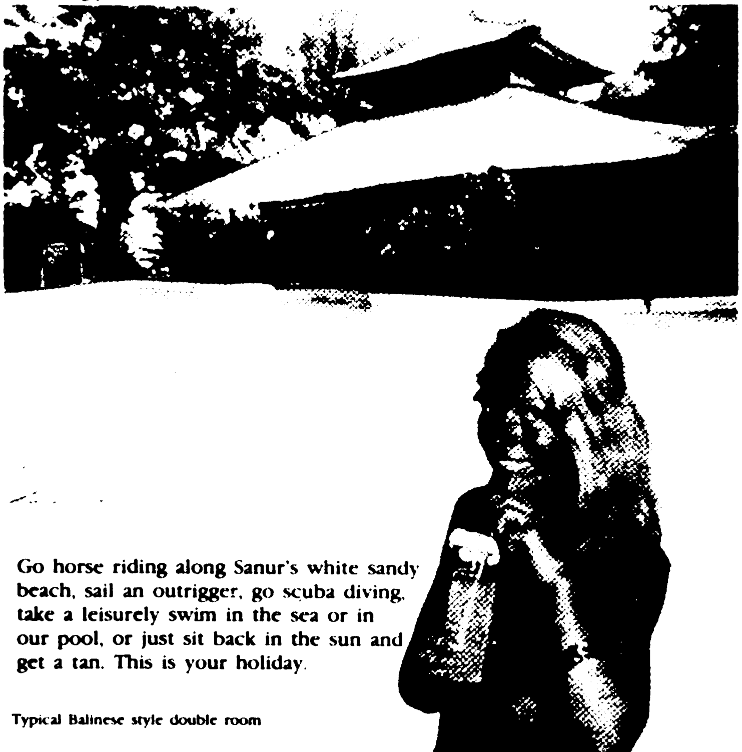

Go horse riding along Sanur's white sandy beach, sail an outrigger, go scuba diving, take a leisurely swim in the sea or in our pool, or just sit back in the sun and get a tan. This is your holiday.

Typical Balinese style double room

Digitized by Google

agama maupun kultural.

Karenanya satu dua kata perlu kiranya diutarakan dalam hal ini. Keanekaragaman masyarakat kita itu dapat merupakan satu potensi yang kaya, namun juga dapat merupakan kerawanan. Semuanya tergantung pada tahap perkembangan dan cara penanganannya.

Jika telah disiapkan dengan baik, maka keanekaragaman itu merupakan sumber dukungan yang tidak kunjung kering bagi kemajuan bangsa kita. Setiap golongan etnis, ras, agama, maupun lingkungan kultural mempunyai kemampuan khasnya sendiri, yang dapat didayagunakan untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh.

Potensi-potensi demikian ini dapat dan harus dikembangkan, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Beberapa tahun yang lalu Bapak Presiden Soeharto sendiri menyatakan bahwa keragaman kita sebagai bangsa tidak mungkin dihapuskan. Dan tidak boleh dihapuskan.

Namun sebaliknya, jika tidak ditangani dengan baik, dalam keadaan sulit, terutama di bidang ekonomi di mana harus ada persaingan yang keras dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas, maka keanekaragaman itu bisa menjadi sumber purbasangka dan kecemburuan. Dari purbasangka dan kecemburuan ini bisa muncul secepat kilat gejolak-gejolak sosial yang sukar dicegah dengan segera.

Hal itu akan semakin berbahaya jika ada unsur-unsur yang mengadu domba, baik karena kesempitan pandangannya maupun karena memang bertujuan mengacau stabilitas yang tercapai selama ini. Terdapat dokumentasi cukup mengenai kasus-kasus yang pernah terjadi mengenai masalah ini.

Dalam hubungan inilah kita perlu melakukan kegiatan pembinaan bangsa dan pembinaan watak bangsa secara terus menerus, sebagai "nation building" dan "charactor building". Perasaan kebangsaan, yaitu perasaan hidup sebagai satu bangsa di dalam masyarakat besar Indonesia tanpa mengenal perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kelompok atau golongan etnis, ras, budaya, agama dan lain sebagainya, menghendaki kemampuan abstraksi dan integrasi yang tinggi. Kemampuan abstraksi dan integrasi ini bisa dipupuk oleh pengalaman pahit bersama, tetapi juga bisa oleh pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, baik secara formal maupun secara nonformal. Yang jelas, perasaan kebangsaan itu tidaklah muncul sendiri melainkan harus dibina dan dipupuk terus. Perasaan kebangsaan itu menghendaki adanya lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu.

Perlu diperhatikan, bahwa walaupun kita sudah menerima Pancasila sebagai dasar negara di tahun 1945 dan setelah mengalami gejolak dan pengalaman pahit yang panjang dalam tahun 1966 — pada permulaan lahirnya Orde Baru — telah ditegaskan Pancasila sebagai sumber tertib hukum, namun dalam kenyataannya penghayatan dan pengamalannya dalam kehidupan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga di tahun 1978, tiga puluh tiga tahun kemudian sejak diterimanya Pancasila sebagai dasar negara baru kita sepakat untuk merumuskan dan membuat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai pedoman dan penuntun kita semua, setiap warga negara dan setiap penyelenggara negara dalam mengamalkan Pancasila Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian baru dalam tahun 1985, empat puluh tahun kemudian Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Dibutuhkan dua generasi sebelum konsensus nasional pertama itu mengakar dalam masyarakat kita secara luas; itupun setelah melalui penataran-penataran P4 sejak tahun 1978.

Penegasan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu telah menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk memperkokoh dan bahkan sebagai jaminan tetap kuatnya rasa kebangsaan kita. Namun penegasan itu sendiri baru merupakan langkah pertama, yaitu penerimaannya sebagai nilai dasar yang bersifat abstrak. Masih dibutuhkan penjabarannya secara sistemik ke dalam bidang kehidupan kita masing-masing sedemikian, sehingga kita bisa berfungsi sebagai satu bangsa yang bersatu padu, menuju tercapainya tujuan nasional kita.

Di bidang politik kita amalkan sebaik-baiknya dan kita kembangkan terus demokrasi Pancasila. Di bidang pers kita amalkan sebaik-baiknya dan kita kembangkan terus Pers Pancasila, pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Peranserta Pers Nasional dalam Pembangunan Politik Menuju Tahap Tinggal Landas

Di bagian awal telah diutarakan peranserta pers nasional dalam pembangunan nasional secara umum. Marilah kita lebih memusatkan perhatian kepada peransertanya dalam bidang politik menuju tahap tinggal landas, sesuai dengan topik yang kita bicarakan sekarang.

Sasaran yang ingin kita capai dalam jangka panjang, yaitu dalam tahap tinggal landas di bidang politik, menurut GBHN adalah sebagai berikut: "Dalam bidang politik dalam negeri dimantapkan kesadaran

Bali Intan Cottages

Jalan Melasti No. 1, P.O. Box 1002, Legian, Kuta, Bali, Indonesia
Telephone : 51770 - 51891 - 51469 Cable Binco
Telex : 35200 - BINCO DPS

Satu-satunya yang paling IDEAL untuk anda yang mengutamakan kenyamanan dan service yang memuaskan.

Setiap kamar dilengkapi dengan : Carpet, AC, Telephone, Music, Radio, Color TV + Video program. Kamar mandi dengan peralatan yang bertaraf Internasional.

Fasilitas Hotel : Swimming-pool + Sunken Bar, Coffee Shop, serta Room Service yang masing-masing buka 24 jam, Seafood Restaurant, Lobby Bar, Banquet 4 X Seminggu, Binatu, Travel Agent, Tennis Court, Safety Boxes, Shops, Boutique.

* Pertimbangkanlah "BALI INTAN COTTAGES" sebelum anda memilih Hotel yang lain.

AN INTAN HOTELS

Digitized by Google

kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi setiap warganegara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional."

Dalam rangka mencapai sasaran itu termasuk di dalamnya usaha-usaha untuk menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi untuk memungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharuan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional, mewujudkan Pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa, pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang semakin efektif serta terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin mantap.

Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera".

Dalam hubungan ini kita mencatat kenyataan bahwa pers nasional telah ikut berkembang maju dengan kemajuan pembangunan nasional kita. Bidang liputannya pun semakin beragam. Jika diwaktu yang lampau tema yang dominan adalah di sektor politik, maka secara mantap kita menyaksikan perkembangan ke bidang ekonomi, sosial budaya, bahkan hakam. Khusus untuk warganegara usia muda kita melihat kemajuan yang amat pesat, dalam layanan media massa bukan saja dalam jumlah tetapi juga dalam mutu. Hal ini adalah positif.

Dalam hubungannya dengan upaya mencapai sasaran pembangunan bidang politik tersebut, pers nasional dapat berperan banyak. Kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan, dukungan terhadap proses pembaharuan politik untuk terciptanya sistem politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien serta peningkatan peranan Indonesia di forum internasional, bisa ditanamkan melalui wahana pers.

Pelaksanaan peranserta pers ini seyogyanya benar-benar menyadari ciri dan sifat dari masyarakat yang bergerak dinamis dan berubah akibat proses pembangunan. Masyarakat demikian selalu ditandai oleh sikap mendua terhadap pembangunan itu sendiri. Di satu fihak, terdapat harapan akan perbaikan hidup di masa datang melalui keberhasilan pembangunan, sedang di lain pihak terdapat kekawatiran akan lunturnya nilai-nilai lama yang kita junjung tinggi. Sikap mendua itu adalah wajar, karena sangat manusiawi. Oleh karena itulah kita menganut faham bahwa proses pembangunan, termasuk pembangunan, termasuk pembangunan bidang politik, kita laksanakan dengan hati-hati secara demokratis. Kita percaya kepada demokrasi, kepada keikutsertaan rakyat secara sadar dalam merencanakan, menggerakkan dan mengawasi pembangunan nasional kita itu.

Jika sebagian rakyat kita belum cukup luas wawasannya mengenai pembangunan nasional sebagai institusi moderen, adalah kewajiban kita untuk melaksanakan pendidikan politik. Pada dasarnya tugas pendidikan politik ini terletak di atas bahu organisasi kekuatan-kekuatan sosial politik bersama Pemerintah. Kita sadar bahwa tugas ini tidak ringan. Namun terlihat fakta yang menggembirakan, bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang terbuka terhadap perubahan. Kemampuan menyesuaikan diri ini bukan saja terlihat sekarang, tetapi sejak berabad-abad. Bangsa kita mampu menyerap gelombang demi gelombang pengaruh baru yang datang dari luar, dan menjadikannya bagian dari keseluruhan kebudayaan kita sendiri.

Pers nasional jelas dapat ikut serta dalam proses besar transformasi bangsa kita ini menuju hari esok yang lebih baik.

Tentang arah secara khusus yang perlu ditempuh, berikut ini diajukan beberapa pokok pikiran.

Pertama: Oleh karena pembangunan politik menuju tahap tinggal landas adalah dalam rangka perwujudan masyarakat Pancasila, maka adalah mutlak agar nilai-nilai Pancasila itu diresapi benar-benar oleh bangsa kita. Dalam hubungan ini sudah barang tentu ada berbagai tingkat taraf pemahaman Pancasila itu. Namun mengingat mendasarnya peranan Pancasila, kita perlu mendorong agar taraf pemahamannya itu mencapai tingkat yang semakin tinggi, khususnya di kalangan kepemimpinan masyarakat.

Pendalaman ini bukan saja memahami risalah sidang-sidang BPUPKI dan PPKI di tahun 1945, tetapi juga penjabaran selanjutnya secara kritis, kreatif dan dinamis. Dalam hubungan ini saya garis bawahi kembali penegasan Bapak Presiden Soeharto dalam upacara penataran Calon Manggala bulan Nopember 1986 yang lalu di Istana Bogor, bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, yang memberi peluang untuk penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai dasarnya itu sendiri adalah tetap, tidak boleh dirobah lagi. Yang dapat kita kembangkan adalah apa yang disebut sebagai perangkat-perangkatnya, sekiranya memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan jaman.

Hidup kita berkembang dinamis, dan para perumus Pancasila dan UUD 1945

BIRO PERJALANAN UMUM

RAMA TOURS

(PT. RAMA WIRA PERDANA) LICENCE NO. 152/D.2/BPU/IV/79

HEAD OFFICE :
Jl. Raya Sanur 159
Tanjung Bungkak
Phone : (0361) 4972 & 27871 - 5
Telex : 35160, 35229 RAMA DPR
Fax (0361) 28868
P.O. Box 89
Denpasar — Bali
INDONESIA

COUNTER :
Hotel Bali Beach Arcade
Phone : (0361) 8511
ext. 748
Direct, Line : 8064
Telex : 35133 HBB DPR
Sanur — Bali
INDONRSIA

SEGENAP KARYAWAN / KARYAWATI

BIRO PERJALANAN UMUM *"RAMA TOURS"*

[PT. RAMA WIRA PERDANA]

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987
SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT
UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA
MASYARAKAT ADIL MAKMUR, SEJAHTERA LAHIR BATIN

RAMA TOURS LTD BALI INDONESIA

MRS. MAKIKO ISKANDAR
Managing Directress

Digitized by Google

cukup arif untuk memberi peluang kepada dinamika itu.

Tugas kitalah untuk memberi jawaban kepada dinamika itu, sesuai dengan kebutuhan kita di jaman ini dengan tetap berpijak kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasarnya Pancasila.

Tugas yang dapat diemban pers nasional dalam hubungan ini adalah memperkokoh pemahaman dan keyakinan terhadap pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, serta dasar negara kita ini; dan menolak pengaruh negatif yang dapat menggoyahkannya. Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa kita bersifat aksiomatis, dalil yang kita terima kebenarannya secara mendasar. Penalaran serta pengkajian yang kita lakukan terhadap nilai-nilai Pancasila tidak boleh menggoyahkan kepercayaan terhadap nilai Pancasila itu sendiri.

Pancasila adalah merupakan pilihan politik dan pilihan konstitusional bangsa kita yang bersifat mengikat, yang dianggap paling cocok bagi tetap tegaknya dan mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk.

Kedua: Sebagai pandangan hidup, ideologi dan dasar negara, Pancasila tentu saja berada di lingkungan berbagai pandangan hidup, ideologi dan dasar negara lain. Tidak bisa kita hindari bahwa masyarakat kita mengenal pandangan hidup, ideologi dan dasar negara lain itu, baik melalui proses pendidikan maupun komunikasi massa. Kita tidak berniat menutup pendidikan dan komunikasi massa itu. Pilihan yang kita ambil adalah meningkatkan kewaspadaan nasional kita dalam rangka ketahanan nasional. Sebagai program, kita melancarkan berbagai penataran kewaspadaan nasional sejak tahun 1982 yang lalu. Besar manfaatnya jika untuk kalangan pers nasional pada suatu ketika diselenggarakan penataran kewaspadaan nasional ini untuk menyamakan apresiasi terhadap ancaman, gangguan, hambatan serta gangguan yang kita hadapi. Sesuai dengan pandangan integralistik yang kita anut, kita harus memelihara kebersamaan sikap dalam melaksanakan tugas-tugas nasional yang pokok.

Pers nasional diharapkan dapat mendorong maju proses pembaharuan politik menuju terwujudnya sistem politik nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam proses pengembangan pembaharuan ini jelas belum seluruh hal sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Peranan pers dalam hal ini adalah ikut mendorong dan mengarahkan, agar yang sudah sesuai dapat makin dimantapkan dan yang belum serasi kita koreksi, kita benahi, kita mantapkan dan kita kembangkan lebih lanjut. Dalam hubungan ini jangan kita lupakan bahwa tubuh pers nasional itu sendiri merupakan bagian dari keseluruhan proses itu, sehingga dalam rangka proses mawas diri sebagai wahana kemajuan kita, hal itu juga berlaku bagi pers nasional.

Kehidupan politik tidaklah hanya berisi kritik dan keluhan seperti dalam jaman lampau, tetapi juga memuat dukungan dan persetujuan. Pers nasional perlu menampilkan kedua sisinya ini secara seimbang, sehingga masyarakat kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai gerak pembangunan itu. Itulah peran yang harus diemban dalam menyukseskan pembangunan nasional, sebagai pengamalan Pancasila.

Ketiga: Pembangunan politik harus menunjang tujuan akhir pembangunan nasional itu, yaitu pembangunan diri manusia Indonesia secara utuh dan semakin manusiawi. Pers nasional seyogyanya dapat mengembangkan citra kita mengenai manusia Indonesia yang utuh itu yang serasi penghayatan nalar, rasa dan karsanya. Dari rumusan kita mengenai hakekat pembangunan nasional, kita dapat menyimpulkan bahwa semangat moralis sangat kuat meresapi pemahaman kita mengenai pembangunan nasional itu.

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan politik kita juga harus diresapi oleh dimensi moral kita. Kehidupan politik kita harus dikendalikan oleh hikmat kebijaksanaan, oleh kearifan dan kenegarawanan, bukan oleh intrik, adu kekuatan atau kekerasan. Dalam hal ini pers nasional dapat berperan sebagai salah satu penegak moral nasional, memberikan dukungan terhadap gerak yang menuju dihayati dan diamalkannya nilai-nilai moral nasional, dan menolak kecenderungan negatif dilanggarnya nilai-nilai moral nasional itu.

Penutup

Jika arah kegiatan pers nasional tadi dapat kita wujudkan dalam tahun-tahun mendatang, tekad nasional untuk tinggal landas dalam Pelita VI nanti akan dapat terwujud, khususnya di bidang politik. Dewasa ini kita masih berada dalam gerakan besar membenahi kondisi-kondisi yang belum sesuai dengan hasrat kita atau belum memenuhi harapan kita itu.

Masih banyak masalah yang harus kita hadapi, baik yang tumbuh dari dinamika kita sendiri maupun sebagai imbas dari perkembangan dari luar.

Namun kita percaya bahwa dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa kita akan mampu mengatasi seluruhnya itu. Tingkat ketahanan nasional yang sudah kita capai selama ini cukup memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Dan dengan peranserta pers yang memadai akan memperlancar tercapainya apa yang kita inginkan bersama itu.☐

* Disampaikan sebagai ceramah dalam pertemuan Pemimpin Redaksi & Ketua PWI se Indonesia 7 Pebruari di Jakarta.

MANAGED BY KERATON HOTELS INTERNATIONAL

HOTEL
Bualu
NUSA DUA

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA,
SEGENAP WARGA/KELUARGA BESAR

HOTEL
Bualu NUSA DUA

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987
DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

P.O. Box 217 • Denpasar • Bali • Indonesia
Tel. (0361) 71310 - 71311 • Telex 35231 BUALU ND

Digitized by Google

Antara Harapan dan Kesempatan

"Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Enak sama dinikmati, derita ditanggung bersama"

Kata-kata hiburan kosong sangat dihindari saat ini. Pendekatan yang jujur dan objektif secara umum menjadi esensi yang menonjol dari sikap yang bertanggungjawab. Di DPR, membahas Rancangan APBN 1987-1988, Fraksi Abri mengemukakan bahwa keadaan dan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi kita pada tahun-tahun belakangan ini memberikan gambaran yang kurang menggembirakan. "Bahkan mungkin menimbulkan kesan, bahwa kita sedang menghadapi hari esok yang sulit dan belum terbayang masa cerah yang akan membawa harapan ke arah tercapainya keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan". Namun, Fraksi Abri berpendapat "dengan ketahanan yang telah kita miliki serta didorong oleh cita-cita perjuangan, semangat pengabdian dan kerja keras, kita akan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi dan selanjutnya dapat pula mencapai keadaan yang lebih baik". Jiwa dari pernyataan ini adalah: terdapat kesulitan, namun terdapat pula harapan dan peluang.

Apa harapan yang ada? Bagaimana menggapai harapan itu? Dan bagaimana mencipta peluang?

Ekonom dari UI Dr Dorodjatun Kuntjoro Jakti antara lain menunjuk pemandirian dunia usaha dan menoleh sektor informal sebagai salah satu jawaban yang tak terlepas dari upaya terobosan pasaran dalam negeri. Terhadap kalangan usaha dianggapnya penting disodorkan reorientasi sikap, yakni meninggalkan sikap mengandalkan APBN Pemerintah. Mereka harus mengkreasikan bisnis di antara mereka: Mengelola pasar dalam negeri dengan lebih baik dan mengelola pasar ekspor dengan lebih baik pula.

Sementara itu Ir Tadjuddin Noor Said, anggota FKP-DPR-RI, sepakat perlunya ada kemauan "merubah sikap". Ia menggarisbawahi pernyataan Presiden Soeharto agar kita berani melakukan penyesuaian-penyesuaian, perbaikan-perbaikan, pembaharuan-pembaharuan, dan apabila perlu melakukan koreksi-koreksi dalam pola pikir, pola kerja dan pola hidup kita serta lembaga-lembaga kita di berbagai bidang.

Untuk jawaban jangka pendek dalam setahun mendatang, Fraksi Abri menunjuk RAPBN 1987-1988 sebagai salah satu instrumen penting yang perlu didayagunakan seoptimal mungkin "sebagai jawaban terhadap kerawanan dan kesulitan ekonomi yang kita hadapi".

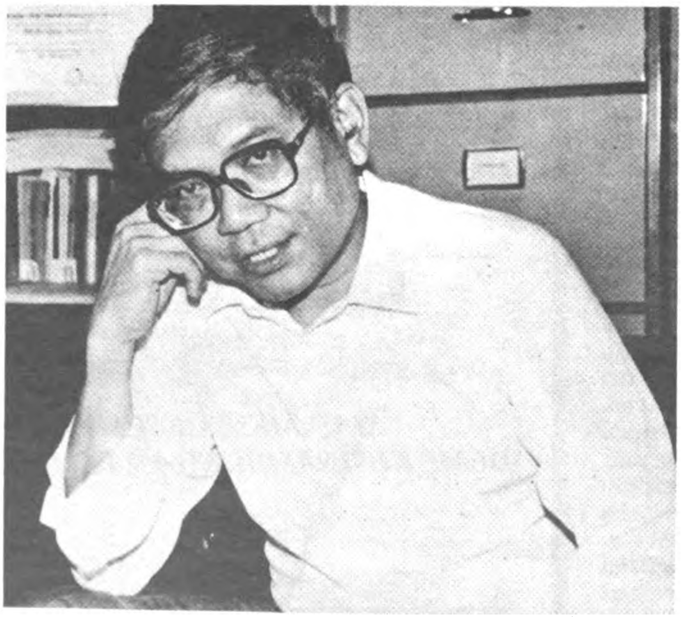

Dorodjatun Kuntjoro Jakti

Dalam babakan pemandangan umum pembahasan rancangan APBN 1987-1988 di DPR akhir Januari lalu, pemerintah memberikan gambaran keadaan yang kita hadapi dan sejumlah pemikiran melalui Menteri Keuangan Drs Radius Prawiro.

Menurut pemerintah, keterkaitan antara berbagai masalah perekonomian dunia serta ketergantungan antara berbagai negara di dunia, antara negara maju dan negara berkembang khususnya, menunjukkan adanya suatu kenyataan bahwa perekonomian dunia telah berkembang kepada suatu "dunia tanpa batas". Suatu kehidupan di dunia yang makin hari makin terasa menjadi satu. "Keadaan ini tak terhindarkan, dan kitapun tak ingin menghindarinya", ujar Radius Prawiro. "Dalam arti kita percaya bahwa hubungan dengan dunia luar dalam bentuk perdagangan dan hubungan ekonomi luar negeri akan dan tetap lebih memberikan manfaat daripada sikap menutup diri dari pergaulan internasional". Namun demikian asas pemenuhan kebutuhan sendiri, sampai batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan dari segala seginya, harus pula kita usahakan. "Demikianlah arah pembangunan dan kebijaksanaan sebagaimana yang tersirat dalam GBHN". Kegoncangan harga minyak haruslah dipandang sebagai batu ujian yang wajar dari perjuangan melaksanakan pembangunan. Demikian pula usaha mendorong dan mengembangkan ekspor di luar migas sejak Pelita I, merupakan bukti nyata akan besarnya perhatian Pemerintah kepada pentingnya peranan sektor tersebut dalam pembangunan.

Berbagai gejolak dan krisis ekonomi dunia, merosotnya harga minyak serta berbagai komoditi utama ekspor Indonesia, telah membawa pengaruh yang sangat berat bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan APBN kita, kepada neraca pembayaran, kegiatan dunia usaha, dan kepada perkembangan perekonomian umumnya. "Keadaan tersebut menuntut kita untuk lebih aktif dan dinamis dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada seberapapun kecilnya, melalui kerja keras dan usaha yang terus menerus untuk meningkatkan efisiensi perekonomian kita", ujar Menteri Keuangan Radius. "Sebagai bang-

Digitized by Google

sa yang besar, kita dapat mensyukuri kemajuan yang telah kita capai, tetap berjiwa besar, teguh dan tegar dalam menghadapi berbagai tantangan, tidak menyerah dan tidak bersikap skeptis meskipun berbagai perkembangan ekonomi di luar dan di dalam negeri telah menempatkan penyusunan RAPBN 1987/1988 pada situasi yang sulit".

Sebenarnya, menurut Tadjuddin Noor Said, apa yang terjadi saat ini pada hakekatnya sudah diantisipasi sejak awal Pelita IV. Dalam perencanaan, hal-hal yang tergantung kepada sektor migas sudah dicoba diantisipasi dengan upaya pengembangan di sektor non migas. "Kalau kita lihat, masalah yang cukup konkrit adalah reformasi dalam UU Perpajakan, yang secara diametral jelas berbeda dengan UU Perpajakan sebelumnya". Hal ini dibenarkan Dirjen Pajak Drs Salamun AT (Lihat: Pajak, salah satu tumpuan harapan).

Tapi memang, seperti dikatakan anggota FKP ini, ternyata kejadian-kejadian di bidang ekonomi akhir-akhir ini mengalami percepatan yang begitu tiba-tiba, "yang hampir sama sekali tak diduga sejak semula". Seperti, jatuhnya harga minyak bumi yang begitu drastis hanya dalam satu semester. "Saya kira, hal ini merupakan kejadian yang pertama kali dalam sistim perekonomian internasional. Padahal sebenarnya kita telah mengantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya".

Rakhmat Yang Terselubung

Namun dibalik kondisi yang kurang baik di bidang ekonomi yang dihadapi saat ini, kata Tadjuddin sebenarnya juga terkandung semacam blessing indisguise — rakhmat terselubung. "Dengan kondisi saat ini justru bisa diuji sejauh mana institusi-institusi ekonomi yang dibangun selama dua puluh tahun mampu berperan". Selama ini, ujarnya, kita tidak pernah mengujinya secara faktual, karena kita selalu memperoleh pendapatan dari sektor migas yang kebetulan mempunyai harga relatif tinggi. Dan inilah menurut Tadjuddin, gejala-gejala yang memberikan kesempatan dan alasan untuk reorientasi dalam bentuk penataan-penataan kembali terhadap institusi-institusi ekonomi di tanah air. "Inilah yang dimaksudkan pidato presiden, kita harus tetap melanjutkan kebijaksanaan yang bersifat deregulasi dan debirokrasi, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan".

Radius Prawiro

APBN mendatang secara nominal tidak menunjukkan kenaikan yang berarti dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi pemerintah telah mengusahakan agar tidak lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan sikap realistis melihat kemampuan yang ada. "APBN juga menunjukkan usaha mengerahkan sumber-sumber dana, serta apa yang dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang akan datang, tanpa meninggalkan pula fungsinya yang penting sebagai alat stabilisator dan pemerataan pembangunan", kata Drs Radius Prawiro. Di sinilah letak sulitnya penyusunan APBN dalam konstelasi perekonomian dewasa ini. Di satu pihak dihadapkan kepada kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat, dan di pihak yang lain terdapat keterbatasan dalam sumber dana, sedangkan stabilitas ekonomi harus diusahakan. Sementara itu struktur dari APBN selain mencerminkan jenis dan sumber dananya, harus pula mencerminkan distribusi manfaat atau alokasi sumber dana tersebut secara efisien dan efektif untuk pembangunan sektoral dan pengembangan regional. Di samping itu harus mampu pula menunjang kestabilan, pemerataan dan perluasan kesempatan kerja. Suatu sasaran yang tidak mudah dan ringan, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini. Pemerintah karenanya menghargai pendapat-pendapat yang telah menempatkan volume serta struktur APBN dalam perspektif tersebut di tengah suasana ekonomi yang berlangsung dewasa ini.

Dari sudut lain, melihat bahwa RAPBN mendatang ini lebih rendah kurs atau nilai rielnya dibanding APBN sebelumnya, maka terpantul kesimpulan bahwa RAPBN sekarang secara keseluruhan tak bisa sepenuhnya menjadi penggerak utama perekonomian nasional. "Oleh sebab itu, sektor swasta diharapkan mampu mengisi kekosongan-kekosongan dalam perekonomian kita", Tadjuddin berpendapat. "Sektor ekonomi swasta, hanya mampu mengisi kekosongan itu, jika mereka diberi iklim yang bisa mendorong untuk berkembang menjadi penggerak-penggerak ekonomi nasional". Tepatlah keinginan yang ditunjukkan pemerintah dengan deregulasi dan debirokrasi. Pihak swasta sendiri tentunya harus mampu menangkap dan menggunakan kesempatan yang diberikan kepada mereka.

Berkaitan dengan hal itu, kita memang tidak bisa menutup mata, pada proses pembangunan yang lalu, sebagian besar kegiatan dunia usaha swasta ditopang oleh perlindungan dan kemudahan yang diberikan pemerintah. "Kita lihat dalam Pelita I dan II, Pemerintah banyak memberikan proteksi dan kemudahan pada dunia usaha swasta". Kalau Pemerintah dalam kondisi saat ini tidak memberikan proteksi dan kemudahan — artinya meluncurkan tatanan perekonomian dalam bentuk deregulasi dan debirokrasi — lalu pihak swasta tak mampu mengantisipasi, barangkali hal ini perlu menjadi pemikiran semua pihak. "Saya melihat kepada dua dimensi. Disatu pihak pemerintah menciptakan iklim yang baik lewat deregulasi dan debirokrasi, di lain pihak swasta harus mampu menangkap kesempatan yang ada dalam iklim yang baik itu". Kalau salah satu pihak tak mampu menangkap adanya reorientasi tersebut, akan tercipta situasi tak menguntungkan dalam perekonomian di masa mendatang. Atau dalam bahasa Dorodjatun, "suatu kecenderungan yang tidak baik".

Pihak swasta menurut Dorodjatun, harus mulai meninggalkan anggapan pemerintah sebagai satu-satunya pasar. Mereka harus melakukan move mencari dan membuka pasaran lain, secara intensif di dalam negeri dan melalui ekspor. Pihak swasta yang dulu disinyalir sebagian besar usahanya digantungkan pada pemanfaatan sektor pemerintah, menurut Tadjuddin Noor Said, saat ini harus bisa merubah pola pikir, untuk misalnya mampu melihat potensi dan prospek penyediaan jasa dan barang bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya tergantung pada usaha penyediaan barang dan jasa sektor pemerintah. "Kalau hal ini tidak bisa dilakukan, pihak swasta akan mengalami kemacetan dalam bisnisnya di masa mendatang". Anggota DPR dari Komisi VI ini bahkan menunjukkan adanya kesempatan usaha di sektor jasa di

Digitized by Google

bidang migas maupun non migas yang angkanya cukup besar, yaitu 6.507 juta dollar AS. Kalau bisnis ini sebagian besar bisa diraih oleh swasta nasional, jelas merupakan suatu lahan usaha yang cukup besar. Tapi mengingat bahwa bisnis ini merupakan usaha yang punya saingan internasional, maka perlu peningkatan kualitas dunia usaha swasta nasional. Agar mampu bersaing.

Daya Tahan dan Langkah-Langkah

Sadar akan kerawanan ketergantungan pada penerimaan yang berasal dari minyak bumi serta tanggungjawab untuk meningkatkan peranan dan andil dalam meningkatkan dan melanjutkan pembangunan, seperti kata Radius, maka sebelum memasuki tahun awal Pelita IV yaitu sejak tahun 1983, pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah kebijaksanaan ekonomi yang penting dan mendasar untuk memberikan landasan dan daya tahan yang kuat serta bangkitnya lagi perekonomian Indonesia di masa mendatang. Undang-undang perpajakan diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dengan tetap berpegang pada aspirasi keadilan. Menurut Radius, tidaklah benar bahwa menurunnya penerimaan dari minyak mentah dan gas alam, berakibat makin bertambah beratnya beban yang ditanggung rakyat dalam membayar pajak. Karena prinsip perpajakan adalah berlandaskan asas keadilan, kesederhanaan dan kepastian. Kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983 diarahkan kepada upaya menghimpun dana masyarakat dalam menunjang pembiayaan pembangunan, sekaligus menciptakan suatu lembaga keuangan yang efisien dan profesional. Kemudian melalui kebijaksanaan penjadwalan proyek-proyek besar, Inpres no. 4 tahun 1985, kebijaksanaan 6 Mei 1986, devaluasi 12 September 1986, kebijaksanaan 25 Oktober 1986 serta kebijaksanaan 15 Januari 1987, dimaksudkan untuk terselenggaranya kelancaran roda kegiatan perekonomian secara efisien, meningkatnya produktivitas, mendorong kegiatan dunia usaha dan investasi, industri dan ekspor, serta kesempatan kerja, dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kestabilan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut tidaklah berdiri sendiri, tetapi terjalin secara padu, menunjang dan mengisi secara optimal.

Tadjuddin Noor Said

Dalam pada itu bagian yang cukup besar dari bantuan luar negeri dalam anggaran pembangunan, tidaklah dapat diartikan bahwa peranannya sebagai pelengkap telah berubah. Hal ini tiada lain karena relatif kecilnya tabungan Pemerintah sebagai akibat perkembangan perekonomian dunia dewasa ini, sedangkan di pihak lain diharapkan terselenggaranya sasaran investasi pada tingkat yang cukup memadai. Sungguhpun pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 1985 lebih rendah dari pertumbuhan penduduk, tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang kita laksanakan selama ini masih menempatkan kita pada golongan bangsa yang berpenghasilan menengah. Sementara itu tidak boleh dilupakan, betapa banyak sarana dan prasarana ekonomi, bendungan dan irigasi, sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, yang telah dibangun dan telah memberikan daya tahan sehingga mencegah perekonomian Indonesia ke arah perkembangan yang lebih buruk. Begitu pula berbagai program Inpres dan perkreditan yang tersebar ke seluruh pelosok tanah air memperkuat daya tahan ekonomi pedesaan dan masyarakat petani dari tekanan situasi ekonomi yang berat dewasa ini.

Inventarisasi berbagai aspek yang mendukung masalah daya tahan ini memang perlu dilakukan. Satu dan lain hal terkait dengan perkiraan tidak mudahnya tantangan yang masih harus dihadapi pada tahun-tahun

BIRO PERJALANAN UMUM

P.T. METRO BUANA SAKTI TOUR

Jalan Segara Ayu No. 7A, Sanur - Denpasar - Bali
P.O. Box : 192, DENPASAR 80001 — INDONESIA
Phone : (0361) 8142 - Telex : 35242 METRO DPR

SEGENAP KARYAWAN / KARYAWATI
BIRO PERJALANAN UMUM
PT METRO BUANA SAKTI TOUR
SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT
UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR,
SEJAHTERA LAHIR BATIN

Digitized by Google

mendatang ini. Kelesuan ekonomi dunia, menurut Dorodjatun, masih berlanjut di tahun 1987 ini. Suatu proyeksi yang paling optimistik menyebut bahwa perbaikan keadaan baru terasa pada awal 1988. Memandang dan menghitung dari sudut Indonesia, Dorodjatun memperhitungkan bahwa dalam tahun 1987 pasaran untuk nonmigas menyempit. Sedang mengenai sektor migas sendiri, masih tanda tanya. Kenaikannya diatur melalui quota Opec, dan "saya belum yakin bahwa quota itu sendiri akan dapat dipertahankan". Penyempitan pasar non migas sementara itu, tercipta karena kompetisi yang makin menggila.

Untuk memelihara daya tahan itu, Dorodjatun mengingatkan 80 persen masyarakat kita adalah petani. Maka kalau kemampuan berproduksi beras dan sebagainya dapat dipelihara, maka subsistensi itu sudah cukup baik. Untuk kepentingan pedesaan, proyek-proyek Inpres jangan sampai dipotong — jalan desa, irigasi desa, puskesmas. Kredit candak kulak jangan sampai dikurangi. Sementara itu terhadap masyarakat kota yang jumlahnya lebih sedikit tapi vokal, Dorodjatun menunjuk terobosan di sektor informal. Menurut Dorodjatun, untuk sementara waktu kita harus ikhlas melihat Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota besar lainnya lebih 'kotor' karena adanya kegiatan sektor informal. Biarlah mereka diberi keleluasaan di kaki lima. Paling tidak, dengan demikian mereka dapat menciptakan pekerjaan sendiri dan tidak harus menunggu di depan kantor pak Domo.

Dalam hal upaya memelihara ketahanan, pemerintah telah mengeluarkan paket-paket kebijaksanaan yang diharapkan menjadi penangkal. Makin berat kompetisi, makin kuat rangsangan yang diberikan untuk menggalakkan ekspor non migas dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Radius Prawiro menggambarkan pola kebijaksanaan tahun 1987-1988 tetap memberikan perhatian yang cukup kepada sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi langsung untuk meningkatkan ekspor non migas, maupun sektor-sektor lainnya yang turut menunjang. Meskipun dalam suasana keterbatasan dana, sektor pertanian dan pengairan, pertambangan dan energi serta sektor perhubungan dan pariwisata memperoleh anggaran di atas 1 trilyun rupiah. "Melalui berbagai program peningkatan produksi maupun penganekaragaman produksi di sektor pertanian terus diupayakan peningkatan ekspor hasil-hasil pertanian". Demikian pula berbagai kegiatan pengembangan dan diversifikasi di sektor pertambangan terus diupayakan untuk peningkatan produksi dalam rangka ekspor non migas. Pembangunan di bidang energi, prasarana perhubungan dan sebagainya diarahkan untuk mendukung. Di sektor migas, Radius menggambarkan kerja keras antara lain lewat forum Opec, agar harga minyak mentah dapat kembali naik antara lain dengan pembatasan quota produksi sehingga pendapatan ekspor migas dapat ditingkatkan.

Terlepas dari itu semua, di luar faktor teknis ekonomis, masih terdapat pula modal ketahanan: semangat dan mentalitas manusia-manusia pelaku pembangunan. Melalui T.A. Lingga, Fraksi Abri mengingatkan bahwa salah satu jiwa yang mempersatukan kita pada masa perjuangan kemerdekaan adalah keteladanan dan kesetiakawanan sosial yang tulus dan ikhlas. "Berat sama dipikul ringan sama dijinjing, enak sama dinikmati derita ditanggung bersama". Dimasa perjuangan kita selalu tabah dalam menghadapi kesulitan, sebab kesulitan kita atasi bersama dan kebanggaan sebagai pejuang kita miliki bersama pula. "Semangat juang, keteladanan, dan kesetiakawanan sosial patut dibangkitkan kembali dan dipelihara secara konsepsional sehingga dapat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang. Dalam kaitan ini, kepada mereka yang telah menikmati hasil pembangunan diharapkan dapat hendaknya bertenggang rasa kepada golongan masyarakat yang masih hidup berkekurangan".□

— **Wawancara: Badrul Mustofa, Mahmudi Romli, Subandrio**
— **Pemadu: Rum Aly.**

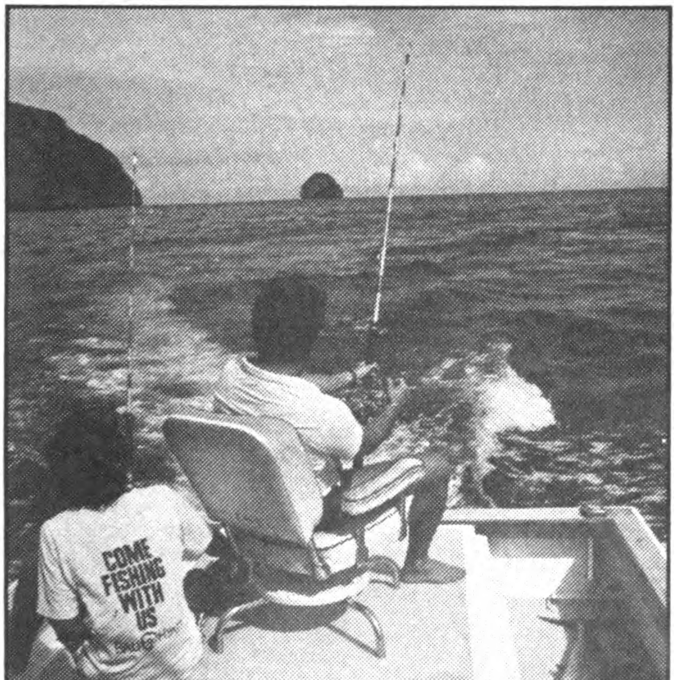

Di mana Anda bisa berolahraga air sepuas-puasnya di Bali?

Hanya ada satu hotel di Bali yang menyediakan fasilitas untuk hampir segala jenis olahraga air ... Bali Hyatt.

Berdayunglah di atas jukung atau perahu bercadik.
Tetapi bila anda ingin bertualang, pilihlah salah satu kapal penangkap ikan yang dimiliki Bali Hyatt, dan berlayarlah ke laut lepas ...

Laut, pantai dan olahraga air ... merupakan keistimewaan Bali Hyatt.

Tidakkah Anda ingin mencobanya ?

BALI ® HYATT

Digitized by Google

Pajak: Salah Satu Tumpuan Harapan

Dari Rancangan APBN 1987-1988 yang telah diajukan dan dibahas di DPR terlihat usaha keras Pemerintah mengerahkan berbagai alternatif sumber dana. Salah satu sumber yang mendapat perhatian utama — dan cukup menjadi tumpuan harapan — adalah sektor perpajakan. Secara objektif, betulkah sektor ini memang bisa diharapkan dan diandalkan? Untuk pertanyaan seperti ini, tanpa ragu Dirjen Pajak Drs Salamun AT menjawab: Bisa.

Dirjen yang tampaknya 'bertangan dingin' ini menguraikan bahwa di masa yang lalu komponen pendapatan dari sektor minyak memang lebih besar dibanding penerimaan dalam negeri — yang di dalamnya juga termasuk pajak. "Dalam tahun yang akan datang, komponen dalam negeri ini akan meningkat. Dan kalau nanti keadaan atau dewi fortuna ada di pihak kita, maka harga minyak akan meningkat lagi dan dengan sendirinya akan meningkatkan pula penerimaan dalam negeri yang dihasilkan oleh minyak itu". Tetapi yang pasti, penerimaan dalam negeri, "khususnya dari sektor perpajakan, akan meningkat". Mudah-mudahan sektor perpajakan ini bahkan terus melangkah maju. "Dan rasanya, untuk masa depan pajak mampu menjadi tumpuan bagi penerimaan dalam negeri". Di negara lain, kata Dirjen, pajak juga memang merupakan tumpuan.

"Pada waktu penerimaan minyak mengendor, pada waktu itu kita ikut terpukul dalam dua sektor". Karena penjualan minyak berdasarkan valuta asing, dan milik pemerintah itu ditukarkan dalam bentuk rupiah sebagai penerimaan pemerintah, berarti penerimaan rupiah juga menurun. "Jadi kurang lebih ada dua sektor, yaitu

Salamun AT

sektor penyediaan devisa yang menurun dan juga penerimaan rupiah menurun". Dapat dimengerti kalau pemerintah juga mengambil tindakan di dua sektor, yaitu meningkatkan ekspor non migas, dan yang berikutnya adalah mengefektifkan dan mengintensifkan pungutan-pungutan pajak.

Mengenai non migas ini, pada waktu harga migas turun, pemerintah segera mengambil ancang-ancang dan langkah untuk meningkatkan eskpor non migas. Kemudian dalam hal penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah membentuk team kerja mempersiapkan UU Perpajakan yang baru.

Turunnya harga minyak dengan demikian telah memukul dua front. "Dan dua front itu yang harus kita perbaiki". Dan terhadap pertanyaan, apakah ada kaitannya peningkatan ekspor non migas dengan perpajakan, dapat dijawab jelas ada. Sebab katakanlah kalau ekspor non migas itu dapat berkembang dengan baik, ini sebenarnya merupakan kesempatan yang baik sekali bagi sektor perpajakan. "Seandainya pada waktu itu UU perpajakan baru sudah ada, dan seandainya pula pada waktu itu aparat pajak itu sudah ditata dengan lebih baik lagi".

Dan sekarang ini bilamana ekspor non migas dapat berkembang baik, akan ada hikmahnya bagi pungutan pajak. Para eksportir yang berkembang karena ekspor non-migasnya baik, dengan sendirinya akan merupakan pembayar-pembayar pajak yang potensial. Belum lagi dengan berkembangnya ekspor non migas ini, maka kegiatan sektor-sektor yang lain tentunya juga berkembang. Inipun lalu merupakan sumber potensial bagi penerimaan pajak.

"Jadi, pada hakekatnya setiap pertumbuhan kegiatan ekonomi memberi pengaruh yang sangat baik untuk perpajakan". Sektor pajak akan berkembang baik sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi. Dan kalau dunia usaha menurun pajak tentunya juga kurang dapat berkembang baik.

Bukan Penambahan Beban

Bila kita melihat perundangan yang lama, lalu kita melihat UU Perpajakan yang baru, pada hakekatnya yang baru lebih ringan dari yang lama. Dan dalam tahun yang akan datang, khususnya dalam pajak penghasilan tidak ada hal-hal yang berupa perubahan yang memberatkan beban wajib pajak. Kemudian tentu timbul pertanyaan, lalu bagaimana pemerintah mengharapkan adanya kenaikan dari pajak untuk tahun depan ini. Letak masalahnya

RAMA BEACH COTTAGES

P.O. Box 32, Denpasar.
Phone: 51558. Telex: 35265 RBC Denpasar, 35149 IDT RBC.

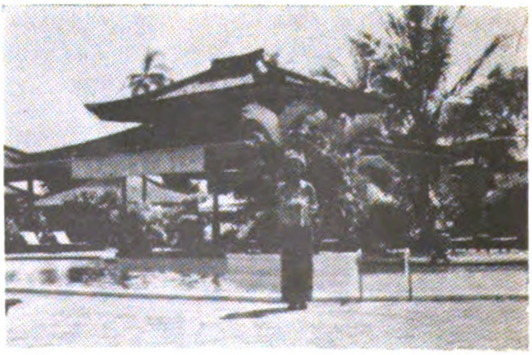

For the ultimate in comfort & service

Guests are welcomed with a traditional Balinese drink. Balinese styled bungalows, air-conditioned with hot & cold water and telephone. Excellent cuisine includes European, Japanese, Chinese and selection of local dishes. Free shuttle bus service to and from airport and Kuta. Tennis, swimming pool with cocktail bar.

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA, SEGENAP WARGA / KELUARGA BESAR PERUSAHAAN "RAMA BEACH COTTAGES" SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

tidak lain adalah pada masalah intensifikasi, dalam arti pembayar pajak, yang mempunyai nomor wajib pajak untuk tahun depan itu diharapkan untuk membayar pajak itu secara tepat dan sesuai. Dan agar pembayar pajak itu lebih tepat pada waktunya, akan digiatkan pemeriksaan-pemeriksaan, himbauan-himbauan. Bersamaan dengan itu dilakukan ekstensifikasi, artinya pembayar pajaknya diluaskan.

"Mereka yang selama ini lolos, kita giring supaya membayar pajak", ujar Drs Salamun. "Saya sendiri mempunyai harapan yang cukup besar terhadap ekstensifikasi tahun depan". Kemudian dapat pula timbul pertanyaan, bila penghasilan negara bertambah, apa betul tidak menambah beban? "Memang tidak ada penambahan beban, seperti dengan apa yang tertera di dalam UU. Yang ada adalah, mereka yang tadinya dapat menyelundupkan pajak nantinya tidak dapat lagi menyelundup. Sebenarnya yang menyelundup itu tak lain berarti menggunakan uang pemerintah. Dan kalau pemerintah itu diidentikkan dengan kekuasaan rakyat, maka berarti penyelundup itu menggunaan uang rakyat".

Kalau kita lihat, rencana penerimaan pajak dalam anggaran tahun depan itu 7,3 trilyun. Dalam tahun ini, kalau menurut APBN 5,3 trilyun. Diharapkan target yang 5,3 trilyun itu akan terlampaui.

Dalam situasi perekonomian yang kurang menguntungkan, sebenarnya tugas aparat perpajakan ini dapat dirasakan sangat berat. Bagi aparat perpajakan bukan hal mudah untuk mengejar target tersebut. Maka segala daya upaya dikerahkan . Dan yang menjadi pikiran, adalah bagaimana agar kita dapat mencapai itu tanpa menambah bebas rakyat, terutama dalam bidang penghasilan . Dalam pajak pertambahan nilai yang sekarang ini belum kena pungut, dan kemudian dikenakan pajak tersebut, "karena objek pajaknya adalah orang yang berada, saya kira tidak akan menjadi permasalahan".

Kalau saya hitung-hitung, bahwa satu tahun itu 300 hari kerja, "maka Direktorat Jenderal Pajak dalam tahun depan itu setiap harinya harus menghasilkan 24,4 milyar". Bandingkan dengan tahun ini sesuai APBN, itu adalah 18 milyar per hari.

"Jadi kalau kita setiap hari itu bekerja 24 jam, maka satu jamnya kita itu harus mendapat 1 milyar". Untuk itu kami ini tidak dapat bekerja sendiri. Dan karena kami ini aparat pemerintah, maka rekan-rekan, khususnya korpri, juga diharapkan untuk dapat membantu. Dan bagaimana cara membantunya, yaitu dengan cara memberikan data. Misalnya Departemen Perdagangan, dapat memberikan banyak sekali data. Departemen Perdagangan dapat membantu dengan memberikan data tentang pendaftaran ulang usaha-usaha dan lain sebagainya. Selain itu juga Bea Cukai, Imigrasi, serta Departemen Perindustrian yang dapat memberikan data tentang berapa perusahaan itu memproduksi dan lain sebagainya.

Kalau semua data tersebut masuk, "saya kira tidak satupun wajib pajak yang dapat lepas". Karena kami menggunakan komputer, maka setiap wajib pajak itu sudah ada master file-nya di komputer. Segala info mengenai mereka masuk. "Dan nanti pada akhir tahun, perusahaan itu kami cek. Apakah benar SPT nya itu".

Hal ini memang merupakan pekerjaan yang raksasa dan memerlukan bantuan dari aparat pemerintah lainnya. Presiden Soeharto sendiri pada rapat Kabinet paripurna yang lalu, juga dalam rapat-rapat menjelang APBN tahun-tahun sebelumnya mengatakan bahwa semua menteri, semua departemen perlu memberikan bantuan kepada sektor pajak.

Pengamanan

Dan bagaimana pengamanan-pengamanan di sektor pajak tersebut? Untuk pengamanan intern, adalah dengan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksana-pelaksana, yakni para petugas pajak sendiri. Apabila ada yang menyeleweng akan segera diambil tindakan. Tindakan ini merupakan hal yang paling ampuh. "Bila yang menyeleweng tidak segera ditindak, maka nantinya akan menular kepada yang lainnya". Penindakan terhadap para penyeleweng ini sangat penting sekali. Walaupun secara obyektif, harus diakui bahwa karena petugas pajak itu setiap hari melihat angka-angka, apalagi buat mereka yang bekerja dalam bidang pemeriksaan, maka godaannya luar biasa besarnya. Tapi tampaknya pada masa-masa terakhir ini para petugas dapat menahan godaan tersebut. "Percobaan untuk membeli mereka dengan uang yang cukup besar sering terjadi. Dan pernah saya ungkapkan bahwa uang 1 milyar telah ditawarkan sebagai uang komprомi. Kalau mereka itu menerima, itu tidak ada yang tahu. Saya merasa terharu sekali". Barangkali dengan membayar 1 milyar, mungkin bisa selamat 4 atau 5 milyar, tapi berarti kerugian bagi negara.

Untuk pengamanan keluar, aparat perpajakan sering mengalami, apabila perusahaan pembayar pajak kepepet, mereka itu mulai melancarkan perang urat syaraf. Misalnya saja bahwa di belakang perusahaan tersebut ada anggauta masyarakat atau tokoh yang berpengaruh. "Yang saya harapkan, kalau tokoh yang disebut itu tebal perasaan nasionalnya, jangan maulah diikutkan perusahaan-perusahaan yang diikutsertai atau yang diawasinya itu untuk mengurangkan atau menyelundupkan pajak". Terhadap kasus seperti ini, ujar Dirjen, nampaknya bapak Presiden sangat memperhatikan.☐ RA/BM

HOTEL
Putri Bali
NUSA DUA
Nusa Dua, Bali, Indonesia

SEGENAP KARYAWAN / KARYAWATI
HOTEL PUTRI BALI NUSA DUA
SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT
UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR,
SEJAHTERA LAHIR BATIN.

Digitized by Google

Menegakkan Asas Praduga Tak Bersalah

Berkait dengan Kesadaran Hukum

Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) tampaknya semakin sering dilakukan. Tidak hanya oleh masyarakat awam, kalangan intelektual seperti pengacara, pers dan bahkan aparat penegak hukum sendiri —secara sadar atau tidak— ada kecenderungan terpeleset dan melanggar asas tersebut.

Bentuk dan kecenderungan pelanggaran itu beraneka ragam. Sejumlah pengacara sepanjang yang dapat dicatat selama ini, mensinyalir adanya cara kekerasan yang menjurus intimidasi dalam pemeriksaan polisi terhadap seseorang tersangka. Penyebar luasan nama dan foto tersangka secara lengkap oleh pers, adalah contoh lainnya. Surat-surat somasi dari para pengacara terhadap lawan kliennya, pemasangan iklan yang bernada memvonis secara sepihak, dan sebagainya, merupakan contoh lainnya lagi.

Memprihatinkan memang, padahal kita ini negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, kata Teuku M. Radhie SH, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. Bahkan di dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tertera dengan jelas bahwa asas praduga tak bersalah itu diakui dan harus dihormati. Asas ini pun diakui secara internasional sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang dan deklarasi PBB.

Lantas mengapa terjadi pelanggaran? Bisa jadi karena pemahaman dan penghayatan terhadap asas itu masih sangat kurang pada masyarakat kita, kata Radhie. Dia juga mengakui bahwa upaya pembinaan dan penyuluhan hukum yang masih lemah sebagai salah satu faktor penyebabnya. Untuk hal ini Radhie kuatir jika dibiarkan terus berlarut-larut, akan membawa dampak negatif yang besar terhadap bangsa dan negara.

Lama kelamaan, jika kondisi semacam ini terus berlangsung, kepercayaan terhadap hukum akan merosot sebab masyarakat menganggap bahwa hak-hak asasinya sudah tidak dihormati, dan keputusan hakim sebagai pertimbangan keadilan tidak lagi diindahkan orang. Seseorang tersangka yang sedang dalam pemeriksaan, belum lagi diputuskan bersalah atau tidak oleh pengadilan, sudah di "vonis" oleh pers dan masyarakat (trial by the press/public).

"Orang yang diajukan ke pengadilan itu belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang tetap," tegas Radhie.

Tekanan-tekanan terhadap asas praduga tak bersalah ini, baik itu dilakukan oleh pers, masyarakat maupun penegak hukum sendiri, menurut Radhie sudah sedemikian hebatnya sehingga menempatkan para Hakim pada posisi yang serba sulit. Kendati pada prinsipnya Hakim itu berpegang pada kekuasaan yang bebas, tetapi jika asas yang esensial itu dilanggar maka sulit bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang objektif, ujar Radhie lagi.

benaran". Dalam pemeriksaan polisi misalnya, seseorang tersangka sering mengalami perlakuan yang kurang manusiawi, padahal belum tentu dia bersalah. Ini juga akibat pengaruh dari "warisan kolonial" di mana seseorang tersangka dipaksa —dengan kekerasan— mengakui kesalahannya ketika diinterogasi.

Cara-cara pemeriksaan ala kolonial yang disertai tamparan, tonjokan, pentungan, sundutan rokok, dan sebagainya itu juga ditentang oleh Teuku Radhie dan sejumlah pengacara serta anggota masyarakat lainnya. Di samping melanggar asas praduga tak bersalah, juga dinilai kurang berperikemanusiaan. "Kita ini adalah bangsa yang berbudaya tinggi. Dan kita ingin hukum lah yang berkuasa di negeri ini", tuturnya bersemangat.

Teuku M. Radhie

Soal pelik

Masalah asas praduga tak bersalah ini memang merupakan soal yang paling pelik dalam dunia hukum. Jangankan di Indonesia, yang menurut Haryono Tjitrosubono SH "masih sangat rendah tingkat kesadaran hukumnya", di negara-negara yang sudah maju pun pelanggaran terhadap asas ini masih saja terjadi.

Advokat kawakan yang ketua umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Pusat ini menyebutkan dua faktor penyebab seringnya orang, terutama aparat penegak hukum kita, melanggar asas tersebut secara tidak disadari. Pertama adalah faktor kesadaran terhadap prinsip hukum itu sendiri yang masih kurang, dan kedua adalah faktor psikologis.

Haryono yang lebih banyak menyoroti asas ini dari sisi penegak hukum, menyayangkan bahwa seringkali polisi, jaksa dan hakim lebih menempatkan dirinya sebagai "pencari kesalahan" daripada "pencari ke-

Cara menegakkan hukum itu tidak perlu dengan kekerasan. "Ada seninya", kata Radhie lagi. Tapi namanya manusia, ada saja oknum-oknum penegak hukum yang hanya karena ingin pekerjaannya cepat selesai, lantas main kayu. Menurut Radhie hal semacam ini perlu mendapat perhatian serius, sebab jika aparat negara atau penegak hukum itu luput dari pengawasan dan menerapkan hukum secara sewenang-wenang, maka Radhie mengkuatirkan masyarakat akan semakin jauh dari kesadaran hukum.

"Jangan sampai kita ini —aparat penegak hukum— memperlakukan hukum itu dengan asal-asalan saja", dia wanti-wanti berpesan. Perlu juga untuk me-

Digitized by Google

mahami dan menghayati paham dan semangat hukum atau Undang-Undang itu sendiri, katanya lagi.

Nah..., bagaimana memahami dan menghayati semangat dari hukum dan Undang Undang itulah yang merupakan soal paling pelik dari semua aspek yang ada, sekaligus pula merupakan "pintu gerbang" dari asas praduga tak bersalah.

Kontradiktif

Hampir senada dengan Haryono, RO Tambunan SH, pengacara yang juga politisi ini pun banyak menyoroti pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah yang dilakukan para penegak hukum, khususnya hakim di dalam persidangan. Dia menunjuk pasal 8 dari Undang Undang nomor 14 tahun 1970 mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang mengakui asas tersebut sebagai salah satu asas hukum yang dihormati.

Namun dalam prakteknya, menurut Tambunan, banyak hakim yang cenderung mengabaikan asas ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan hakim di dalam persidangan yang dianggapnya "sudah mengarah pada cara-cara interogasi". Hakim, katanya, seolah-olah berperan ganda sebagai jaksa juga. "Seakan-akan tugas hakim adalah membuktikan tuduhan polisi dan jaksa", tambahnya.

Menurut dia penyebabnya adalah karena sistem peradilan kita yang aktif memberikan peranan yang dominan kepada hakim. Sementara pembela hanya "kebagian sisa-sisa" dari pertanyaan jaksa dan hakim. Ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, kata Tambunan. Sebab, sebelum hakim bersangkutan mengadili sesuatu perkara, alam pikirannya sudah diisi dengan berkas perkara yang disiapkan polisi dan jaksa.

"Saya berani katakan bahwa sedikitnya 50% objektivitas hakim sudah terpengaruh oleh berkas perkara", ujarnya.

Tambunan berpendapat, jika asas praduga tak bersalah ingin ditegakkan di sidang pengadilan, maka sistem peradilan kita perlu dirombak menjadi sistem pasif seperti di Amerika. Hakim, katanya, adalah pencari kebenaran yang harus betul-betul mencerminkan citra keadilannya di dalam suatu persidangan. Untuk itu hakim tak perlu terlalu aktif bertanya. Biarkan jaksa dan pembela beradu pendapat. Kalau tokh hakim ingin mengusut juga, pergunakanlah kesempatan terakhir, katanya.

Pengacara-politisi ini sependapat dengan Kepala BPHN bahwa faktor utama penyebab seringnya asas tersebut dilanggar adalah karena masih tipisnya kesadaran dan penghayatan terhadap hukum di negeri ini. Biasanya orang baru menyadari betapa pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah itu, jika dirinya atau seorang anggota keluarganya terkena musibah dituduh melakukan tindak kejahatan.

"Ini bagi saya merupakan suatu hal yang kontradiktif dan memerlukan penanganan yang serius," ujarnya.

Haryono Tjitrosubono

Soal nama baik

Dari sudut pandangan lain, Palmer Situmorang SH, menyoroti soal pencemaran nama baik akibat pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah ini. Pengacara muda yang sering menangani kasus-kasus pidana besar dan hangat seperti Johny Sembiring dan Diece ini, menganggap soal nama baik adalah yang paling tinggi nilainya dan perlu dijaga dari kemungkinan pencemaran.

Dengan mengutip pasal 17 KUHAP dia menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada di dalam "kitab suci" ahli hukum itu, kata-kata yang memberikan wewenang kepada polisi misalnya, untuk mengumumkan nama tersangka. Namun demikian, ujarnya lagi, juga tidak ada larangan. Boleh jadi polisi mempunyai kebijaksanaan tersendiri dengan mengumumkan nama seseorang tersangka pelaku kejahatan, meskipun orang tersebut belum diputuskan bersalah oleh pengadilan. Entah itu demi kepentingan penyidikan polisi ataupun demi kepentingan-kepentingan lain. Politik misalnya.

Pencemaran nama baik memang bisa direhabilitir. Namun apakah lembaga rehabilitasi itu memang sudah berjalan baik? Palmer mempertanyakan. Bagaimanapun juga, seperti kata Teuku Radhie, bagi orang yang sudah tercemar nama baiknya di pemeriksaan polisi atau pengadilan, sulit untuk merehabilitasi dirinya secara sosial. Masyarakat kita masih dipenuhi oleh syak wasangka yang berlebihan. Bahkan para pembela perkara pidana sering dicemooh sebagai pembela kebathilan. Padahal belum tentu benar orang yang dibelanya itu bersalah.

Soal predikat atau status seseorang yang berada dalam pemeriksaan polisi sampai di persidangan, tampaknya begitu penting di mata Palmer. "Predikat tersangka, tahanan polisi dan terpidana itu punya arti yang berbeda. Oleh sebab itu pers hendaknya hati-hati dalam mencantumkan predikat ini, sebab ini menyangkut nama baik orang lain," katanya.

Pengacara muda yang mengakui selalu bersikap hati-hati dan menuruti kata hati dalam menangani sesuatu perkara ini, lebih jauh membuka diri dan mengatakan; "tidak mau sok bersih". Pengacara pun, katanya lagi, sering juga melanggar asas praduga tak bersalah secara sadar. Dia menyebutkan contoh surat somasi atau teguran kepada pihak lawan dari klien, yang —menurutnya— rata-rata bernada menuduh dan memvonis. Hal-hal semacam ini apakah karena memang kurang disadari, atau ada interest lain?

Soal nama baik ini dibenarkan juga oleh RB Soekardi, Jaksa Agung Muda bidang pidana umum, yang mengatakan bahwa seorang yang diduga sebagai tersangka tidak harus diberitahukan namanya kepada pers oleh penyidik. Cukup mengenai perkaranya saja, kata Soekardi. Penyidik bisa saja meminta pers untuk tidak memberitakan nama yang bersangkutan, dengan pertimbangan masih dalam penyidikan.

Menurut Soekardi, di dalam pasal-pasal KUHAP sudah diatur mengenai wewenang aparat penegak hukum untuk melindungi si tersangka, kendati perlindungan itu harus seimbang dengan kepentingan umum. Tidak jarang dalam kaitan demi kepentingan umum ini, seseorang tersangka dibatasi haknya untuk sementara, misalnya diamankan di kantor polisi agar terhindar dari amukan massa yang merasa yakin orang tersebut adalah si pelaku kejahatan.

Begitu pula dengan pers. Kendati pers itu bebas memberikan apa saja, namun kebebasan itu haruslah yang bertanggung jawab dan menghormati pula asas praduga tak bersalah. Menurut Soekardi, dalam hal ini pers harus bijaksana dan membatasi diri untuk tidak menulis nama lengkap dan

Digitized by Google

memuat foto jelas dari si tersangka, demi perlindungan terhadap kemungkinan pencemaran nama baik tersangka.

Tapi persoalannya bagaimana kalau pers nekad melanggar asas tersebut? Mengingat dalam masa penuh persaingan ini pers pun dituntut untuk menyajikan berita-berita yang lebih lengkap, aktual dan cepat? Menurut Soekardi memang tidak ada sanksinya secara hukum jika pers tokh memuat secara lengkap dan jelas nama serta foto tersangka. Tetapi ada pasal dalam KUHAP yang bisa dikenakan kepada pers jika pemberitaan itu bertujuan menistakan atau mencemarkan nama baik seseorang, sementara belum terbukti bahwa orang tersebut benar bersalah, katanya.

"Kalau benar pers kita sudah menghayati kode etik jurnalistiknya, ada atau tidak pasal pidana mengenai hal itu, dia tentu akan menghormati dengan penuh kesadaran terhadap asas praduga tak bersalah ini," ujar Soekardi lagi.

Bahkan terhadap seseorang yang telah dijatuhi vonis oleh pengadilan tetapi masih naik banding atau mengajukan kasasi, pers pun harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah itu, kata Muljadi Djajanegara SH, anggota DPR-RI dari Komisi III. Menurut anggota DPR dari FKP ini, sebenarnya — dipandang dari segi kepentingan umum — pemberitaan mengenai seorang pelaku kejahatan yang telah terbukti di pengadilan atau memang dia itu residivis, bisa dibenarkan. Tetapi, ujarnya lagi, dari segi hukum dan hak asasi, tidak tepat.

Pers harus arif

Pendapat yang senada juga dikemukakan Dr. Alwi Dahlan, pengamat masalah sosial, dengan menyitir kode etik jurnalistik yang antara lain menyebutkan bahwa penyiaran atau pemberitaan nama seseorang tersangka harus dengan penuh kebijaksanaan. "Dalam hal ini pers memang harus arif dan pandai menimbang," ujar ahli komunikasi sosial itu.

Namun, terkadang, ujarnya pula, pers lupa akan pertimbangan kebijaksanaan itu karena terlalu menitik beratkan pada nilai berita dan kepentingan komersial. Semakin masalahnya sulit diduga atau mengandung teka-teki, semakin menarik berita itu. Dia mengemukakan contoh kasus Diece yang masih hangat sampai saat ini, di mana si tersangka, MS yang biasa dipanggil Pak De di "blow up" sedemikian rupa sehingga menjadi bahan pembicaraan orang di mana-mana.

Jangan lupa, kata Alwi, pers itu mampu membentuk pendapat umum. Dan dalam masyarakat yang masih belum begitu tinggi daya tanggapnya, berita-berita yang berbau sensasi akan cepat sekali berkembang. Alwi menolak anggapan bahwa pers kita masih belum dewasa dalam hal ini. "Menurut saya pers kita wajar-wajar saja, akan tetapi mungkin pemahaman mengenai prinsip praduga tidak bersalah ini terlupakan atau memang sengaja dilupakan?", dia bertanya.

Alwi yang juga anggota kehormatan Dewan Pers ini wanti-wanti agar pers nasional mau dan mampu menimbang dengan penuh kearifan masalah ini. "Yang harus berbicara adalah hati nurani kita," katanya. Dia juga melihat masih banyaknya kekurangan pers nasional dalam keakuratan berita, meskipun pada hal-hal yang kecil tetapi sebenarnya prinsipil. Misalnya soal penulisan nama seseorang yang masih banyak salah tulis. Begitu pula status atau jabatan yang keliru. Padahal, nama itu adalah hal yang menurutnya paling "keramat".

faktor etika, yaitu tata laksana dalam menjalankan tugas kewartawanannya itu, kata Zulharmans. Tetapi dia juga memahami kenapa itu bisa terjadi," karena panduan etiknya memang sangat kurang sekali".

Panduan etik yang dimaksud Zulharmans itu harus dilihat juga dari siapa sumber berita si wartawan. Katakanlah si wartawan — dalam meliput kasus hukum — menjadikan masyarakat hukum seperti hakim, pembela, jaksa atau polisi sebagai sumber beritanya. Nah, seandainya informasi yang diperoleh si wartawan itu dianggapnya objektif, lantas diberitakan, dari kacamata hukum mungkin bisa dianggap salah.

Alwi Dahlan

Pers, ujarnya lagi, jangan mengarah pada pemberitaan-pemberitaan yang hanya memuaskan pembaca eceran dengan berita-berita sensasi, tetapi harus menjadi pers yang mapan yang memuaskan pembaca langganan. Jangan menjadi pers yang hidup dari hari ke hari, tetapi berusahalah menjadi pers yang hidup dari tahun ke tahun, pesannya. Untuk itu memang diperlukan keakuratan, kecepatan dan kebijaksanaan, katanya.

Pengamat sosial ini tidak sependapat atas anggapan bahwa sebenarnya masyarakat kitalah yang menuntuk pers menyajikan berita-berita "besar", "meledak", menyerempet—nyerempet, kendati berbau sensasi. Khususnya yang ada kaitan dengan asas praduga tak bersalah ini. Masyarakat bukanlah biang keladi dari pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, tegasnya. Barangkali, katanya lagi, pers sendiri yang —secara sadar atau tidak— terbawa oleh dinamika pemberitaannya sendiri.

Faktor etika

Mengenai apa yang dikemukakan Dr. Alwi Dahlan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Zulharmans, sependapat. Seringkali wartawan-wartawan kita meninggalkan

Ketua PWI Pusat ini mohon agar kecenderungan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah ini jangan dibebankan kepada pers semata, sebab dalam menyampaikan informasi pers tidak berdiri sendiri. Tetapi Zulharmans tidak menolak kenyataan bahwa pelanggaran terhadap asas ini memang sering dilakukan oleh pers. PWI sendiri telah berupaya mengingatkan wartawan-wartawannya kepada etik jurnalistiknya, katanya lagi.

Zulharmans tidak menolak pendapat tentang adanya kompetisi dalam pers sendiri yang mendorong terjadinya pelanggaran itu. Dari hasil pengamatan, ujarnya, terdapat kecenderungan bahwa kasus hukum, terutama kriminalitas, tindak kekerasan dan perkosaan (seks), merupakan berita-berita yang paling menarik masyarakat. Ini tentu saja mendorong pers yang belum mantap untuk terpancing ke arah pemuasan kebutuhan masyarakat pembacanya.

Di dalam mengembangkan liputan-liputan mengenai kasus hukum itu, menurut Zulharmans, masing-masing media punya

Digitized by Google

pendekatan sendiri-sendiri. Ada yang dengan pendekatan sensasional, ada pula yang memang berdasarkan penalaran secara hukum. Nah, di dalam pendekatan itu, yang menyangkut dan melibatkan banyak unsur maupun kepentingan, pers seringkali terjerumus atau terperangkap di dalamnya. Memang perlu kearifan dan ketajaman instink.

PWI tidak melihat perlunya menciptakan kendala-kendala baru yang mengatur mengenai masalah ini, kata Zulharmans. Tujuannya, agar setiap pers dapat dengan bebas menyajikan berita kasus hukum itu dengan bermacam ragam gaya bahasa maupun sudut pandang. Ini berkait pula dengan soal kompetisi tadi, baik dalam peliputan maupun aspek komersial. Hal itu menurut Zulharmans baik, sejauh tujuannya demi kesempurnaan penyajian berita dan kepuasan pembaca. Tetapi, terkadang, yang dianggap baik itu pun bisa menimbulkan efek, katanya.

Menurut Zulharmans, sebenarnya pers juga bergantung kepada masyarakat sendiri. Jika apresiasi masyarakat terhadap hukum tinggi, maka daya kritisnya akan semakin tinggi terhadap pelanggaran asas praduga tak bersalah. Sebaliknya, rendahnya apresiasi terhadap hukum ini menyebabkan masyarakat menyerap begitu saja berita-berita yang disajikan. Hal ini, kata Zulharmans lagi, merupakan tugas dari para wartawan untuk lebih memperhatikan tata laksana kewartawanannya.

Zulharmans;

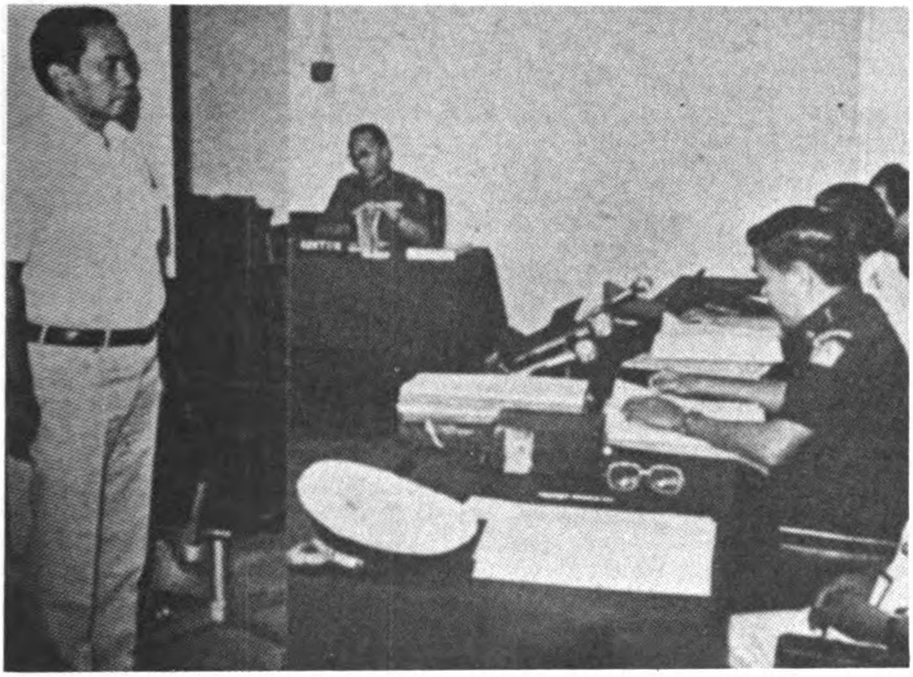

Meskipun dalam persidangan terbuka untuk umum.

Diakui oleh Zulharmans, sebenarnya ketentuan atau konsensus mengenai cara penyajian berita-berita pengadilan belum ada. Namun sebagai kebijaksanaan, pers sebetulnya tidak boleh menuliskan nama lengkap dari si tersangka. Maksimal inisial. Tetapi teknik-teknik penyajian berita lainnya seperti memuat foto si tersangka dengan mata yang ditutup, itu juga — oleh sementara pihak — dianggap sudah menunjukkan identitas.

Dalam hal ini memang perlu kearifan dari semua pihak. Seperti dalam kasus Diece. Yang memungkinkan foto si Pak De, tersangka pembunuh itu, siapa? Tanya Zulharmans. Kembali di sini masalah apresiasi tadi. Seharusnya, yang menjadi sumber berita juga menyadari hal itu dan mencegah jangan sampai terjadi penulisan atau pemuatan nama dan foto jelas si tersangka, sebelum kasus itu diputuskan pengadilan.

Tetapi lain halnya jika yang diberitakan itu memang seorang residivist, bromocorah yang dianggap bisa membahayakan masyarakat. Di sini prinsip kebebasan pers itu bicara. Ada kendalanya dalam kode etik jurnalistik, kata Zulharmans. Tentu saja kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang menjadi ciri khas pers nasional.

Meskipun di dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, jika pers menyiarkannya secara lengkap, tidak dianggap melanggar asas praduga tak bersalah itu, namun hendaknya pers sendiri tetap menghormati asas itu. Filosofi hukum yang harus mendasari pemberitaan-pemberitaan pers nasional adalah Pancasila, yang dikaitkan dengan kebebasan sebagai wartawan untuk menyiarkan atau memberitakan apa saja yang dianggap benar, ujar Ketua PWI Pusat itu.

Dari sekian wawancara yang telah dilakukan, tampaknya masalah kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap hukum dan asas praduga tak bersalah itu merupakan sumber penyebab utama terjadinya pelanggaran. Di samping memang tidak tertutup kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang turut berperan, entah itu dari kalangan penegak hukum sendiri, pers maupun masyarakat.

Bahwa ada kemajuan kemajuan dalam apresiasi terhadap hukum dan asas praduga tak bersalah, memang diakui juga oleh sumber-sumber Media Karya tersebut, meskipun masih terlampau sedikit. Mungkin dengan berjalannya waktu dan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat, hal ini akan semakin mendapat tempat dan apresiasi yang tinggi. Tinggal saja usaha-usaha para penegak hukum, pers dan pemerintah untuk meningkatkan pembinaan dan penyuluhan dalam bidang hukum.☐ **Badrul M, Subandrio, Nunung S, Pemadu: Alex P.**

Digitized by Google

Pada Dasarnya Adalah Persoalan Moral Kemasyarakatan

Asas praduga tak bersalah, yang di Barat disebut dengan istilah, Presumption of Innocence, sebenarnya lebih merupakan masalah moral sosial kemasyarakatan daripada persoalan hukum. Atau lebih jelas lagi, kata M. Adi Andoyo Sutjipto SH — Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung — asas praduga tak bersalah adalah masalah di luar pengadilan ketimbang di meja hijau.

Sehingga bila ditelusuri dan mau telaten, dalam masyarakat kita, setiap hari begitu banyak pelanggaran atas asas praduga tak bersalah ini terjadi. Dua orang yang ngobrol di warung kopi sambil menyebut nama seseorang yang diperkirakan mencuri atau merampok atau melakukan korupsi, sebenarnya sudah melanggar asas praduga tak bersalah.

Seorang suami yang tidak mau menikahi calon isterinya karena khawatir si dia sudah tidak perawan lagi, pun mengandung inti pelanggaran atas asas praduga tak bersalah. Demikian pula suatu diskusi dalam konteks seperti ini. "Saya mendengar si A melakukan korupsi, walaupun saya sendiri tidak percaya." Ini juga melanggar asas praduga tak bersalah.

Bila begitu banyak perbuatan dalam masyarakat bisa melanggar asas praduga tak bersalah, maka kapan pelanggaran itu mempunyai konsekuensi hukum? Artinya seseorang bisa diajukan ke pengadilan karena melanggar asas ini?

Bila menista, mencemarkan nama baik dan mencurigai seseorang tanpa bukti-bukti yang jelas, selama hal itu tidak digugat di pengadilan, tetap tidak mempunyai konsekuensi hukum, kendati yang bersangkutan telah melanggar asas praduga tak bersalah.

Konsekuensi hukum dalam kaitannya dengan pelanggaran asas ini, biasanya digugat dalam bentuk merugikan nama baik seseorang. Dan kasus ini adalah perdata, yang diganjar dengan membayar ganti rugi.

Dalam kasus pidana pun asas praduga tak bersalah bisa terjadi. Misalnya seseorang, yang tidak bersalah digugat ke pengadilan karena tuduhan membunuh. Sementara yang bersangkutan mendekam dalam penjara, ada bukti-bukti bahwa dia tidak bersalah. Nama baik dia bisa diganti dalam bentuk rehabilitasi.

Karena asas praduga tak bersalah ini bisa mempunyai konsekuensi hukum, ujar Adi Andoyo SH, maka perlu diatur undang-undang tersendiri. Dan mengenai hal ini sudah terdapat dalam pasal 6 UU No. 14/70 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang mengenai hal ini sebenarnya sudah jelas, namun pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah pun terus meningkat. Kenyataan ini tidak berarti kita menuding bahwa hukum tentang asas praduga tak bersalah tidak jelas, atau tidak sempurna.

Kesulitan dalam mengatur masalah yang satu ini justru karena dia menyentuh hal yang paling sensitif dari karakter manusia itu sendiri. Bagaimana orang digugat ke pengadilan karena dia curiga terhadap temannya yang mencuri sabun atau kertas, yang sulit dicarikan bukti-buktinya, walaupun mencurigai pun sudah melanggar asas praduga tak bersalah. Esensi dari asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang tidak bisa divonis bersalah, sebelum ada bukti yang memberi kepastian hukum atas perbuatannya.

Untuk ini, maka pelanggaran awal dari asas praduga tak bersalah harus ada perwujudannya, yang merupakan petunjuk awal dalam mengusut lebih lanjut. Orang berbicara tentang orang lain yang diduga melakukan korupsi, sudah ada perwujudannya. Berbicara itu sendiri merupakan perwujudan. Mencurigai pun merupakan perwujudan pelanggaran asas ini. Apalagi mencantumkan nama jelas dan foto seseorang tersangka yang belum diputuskan perkaranya di pengadilan secara jelas di surat kabar.

Jadi dengan kata lain, menciptakan vonis publik atas seseorang yang belum tentu bersalah, juga melanggar asas ini.

Jadi kasus pemasangan iklan oleh pengacara OC Kaligis tentang Direktur Bank Dwimanda Lobak Candra yang melarikan uang nasabah Rp 20 milyar juga merupakan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah? "Wah sebagai seorang hakim agung saya tidak boleh menjawab pertanyaan ini sebelum perkaranya diputuskan pengadilan."

Pada akhirnya, masalah asas praduga tak bersalah ini adalah persoalan moral kemasyarakatan. Budaya kita cukup kaya untuk tidak melanggar asas yang mengatur masalah psikologis sosial maupun individu ini. Bila kita mengerti dan memahami apa artinya tenggang rasa, maka asas ini pasti tidak dilanggar.

Hukum sebenarnya berperanan sangat minim dalam mencegah pelanggaran asas tersebut. Yang paling berperan adalah moral dan etika kemasyarakatan. Ada korelasi positif antara kesadaran menghormati hak asasi dan pelaksanaan asas tersebut. Dalam masyarakat di mana kesadaran akan hak asasi semakin tinggi, pelanggaran asas praduga tak bersalah semakin kecil.

Tapi perlu diketahui untuk menghilangkan pelanggaran terhadap asas yang satu ini sangat mustahil. "Asas praduga tak bersalah baru dihormati secara murni bila semua manusia di dunia diam dan tidak mau tahu apa urusan orang lain. Mungkin ini ada korelasi positif juga dengan fakta lain bahwa di masyarakat yang kesadaran hak asasi manusia begitu tinggi, muncul apatisme terhadap lingkungan.

Sejauh menyangkut masalah hukum, artinya bagaimana hukum melindungi orang yang tak bersalah, peranan hakim sangat menentukan. Kadang-kadang sebuah kasus begitu jelas dengan bukti dan petunjuk yang mengharuskan seorang

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DINAS PENDAPATAN
JALAN MENUH NO. 8, TELEPON : 22642
DENPASAR

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA, SEGENAP WARGA / KELUARGA BESAR "DINAS PENDAPATAN" DATI I BALI SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

bali mandira cottages

Jl. Padma, Kuta - Bali — Indonesia
P.O. Box : 1003 Dpsarp, Phone : (0361) 51381
Telex : 35215 Mandiradpr, Cable : Baliman

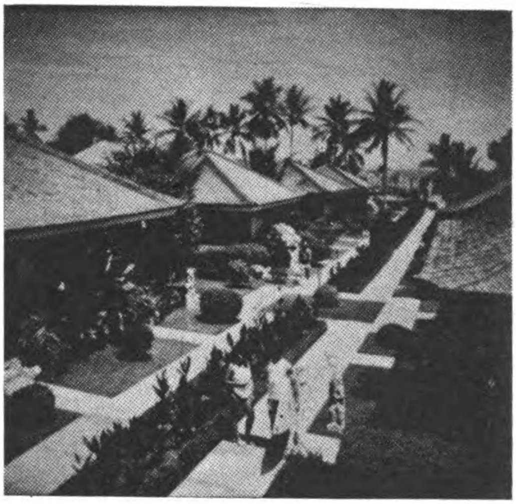

Bangunan dengan ciri khas Bali.
Masing-masing kamar dilengkapi dengan : pendingin ruangan, kamar mandi dengan air panas & dingin, kulkas, telepon dan musik.
Letak di pantai Legian - Kuta
Jarat 6 km dari lapangan udara internasional Ngurah Rai, Denpasar.

DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN
BEKERJA KERAS DAN BERKARYA
KITA SUKSESKAN PEMILU 1987
SEBAGAI PESTA DEMOKRASI UNTUK
MENJAMIN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN
DAN TETAP TEGAKNYA PANCASILA DAN UUD 1945

SEGENAP KARYAWAN / KARYAWATI "RESTU BALI COTTAGES"
SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT
UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT ADIK MAKMUR,
SEJAHTERA LAHIR BATIN

INN COTTAGES
restu - bali.

JL. LEGIAN - BR. PLASA - KUTA, DENPASAR — BALI
P.O. BOX : PHONE : 25601, 23783

P.T. FIRST INDONESIAN FINANCE AND INVESTMENT CORPORATION (FICORINVEST)

P.T. FICORINVEST JAKARTA

Direksi :

- Drs. Oey Beng To — Direktur Utama
- M. Hutagalung — Direktur
- D. Subowo — Direktur
- Michael P. Goco — Senior Advisor

PEMEGANG SAHAM :

- Bank Indonesia
- P.T. Bina Usaha Indonesia

POKOK - POKOK KEGIATAN

1. Pembiayaan perusahaan jangka pendek/modal kerja dan jangka menengah.
2. Pembentukan sindikasi kredit, pembiayaan proyek, pemberian adpis investasi serta promosi proyek.
3. Perdagangan surat-surat berharga dalam pasar uang.
4. Penjaminan emisi saham dan obligasi kepada masyarakat umum.
5. Pemberian jasa pengelolaan dana dan kegiatan pemberian nasehat keuangan.
6. Perantara perdagangan valuta asing.

Jl. H. R. Rasuna Said Kav C–18, Kuningan, Jakarta Selatan, P.O. Box 290/Jkt
Telp. 518048, Telex 62659 Ficor IA, 62748 Ficor IA, Cable : Ficorinvest

Digitized by Google

Mencari Asset Nasional Dari Ajaran Islam

Cendekiawan penalar dengan iman Islami dan semangat kebangsaan yang kukuh.

Bagaimanapun, tampilnya Sudharmono SH — Mensesneg yang juga adalah Ketua Umum DPP Golkar — di depan suatu forum alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan hal yang cukup menarik. HMI adalah salah satu ormas kemahasiswaan yang independen dengan mengambil posisi penting dalam berbagai kekuatan politik — kecuali dalam PDI barangkali — maupun dalam pemerintahan. Hampir dibubarkan di zaman Soekarno, sejumlah eksponen HMI kemudian ikut andil dalam barisan angkatan 1966.

17 Januari lalu, alumni HMI yang tergabung dalam Kahmi Jaya menyelenggarakan musyawarah — dan juga seminar. Musyawarah di Hotel Sahid Jaya itu dibuka resmi oleh Sudharmono SH selaku Mensesneg. Hadir dalam acara itu, sejumlah tokoh yang duduk dalam kabinet seperti dr Abdul Gafur, Bustanil Arifin SH dan sejumlah tokoh terkemuka lainnya dari kalangan eksekutif pemerintahan maupun dunia usaha yang tergolong alumni HMI. Seorang alumni lainnya, Ir Akbar Tanjung — kini Wakil Sekjen DPP Golkar dan Pemimpin Redaksi Harian Pelita — hadir mendampingi Sudharmono SH.

Memakan waktu sekitar 40 menit, Sudharmono SH juga memberikan kata sambutan dalam acara tersebut. Menyebut citra diri Kahmi sebagai cendekiawan penalar dengan iman Islami yang kuat dan semangat kebangsaan yang kukuh, ia menyambut baik kegiatan Kahmi Jaya. Yakni dengan citra diri itu mencoba menelusuri masalah-masalah sosial dan masalah ekonomi yang akan kita hadapi dalam meletakkan kerangka landasan dan memantapkan landasan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dalam Repelita IV dan Repelita V nanti.

Menurut Sudharmono SH, proses nation building dan proses character building tetap merupakan kemutlakan yang tidak dapat ditunda untuk ditangani, dipelihara dan dikembangkan terus. Merupakan proses yang berkesinambungan dan takkan pernah selesai. "Setiap lahirnya gelombang generasi baru, menghendaki pemantapan dan peningkatan proses itu". Kesulitan kita jelas bertambah jika ada pengaruh negatif

HMI adalah salah satu ormas kemahasiswaan yang independen.

dari luar, baik yang bersifat idiologis, politis, ekonomis, sosial budaya, apalagi hankam. "Dalam hubungan ini amatlah menarik sinyalemen para ahli tentang terjadinya perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dunia, yang disebabkan oleh kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana kita juga harus berusaha untuk mengejarnya dan mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan". Ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah bersama.

"Sehubungan denggan tantangan-tantangan baru yang kita hadapi di masa datang, ada suatu ciri khas ajaran Islam, yang jika kita kembangkan secara sistematis, akan dapat menjadi asset nasional kita. Ciri ajaran Islam yang saya maksud adalah: pentingnya suruhan agama kita untuk mencari ilmu pengetahuan, tidak kalah dari suruhan agama untuk beribadah; dan bahwa mencari kesejahteraan di dunia ini sama maknanya dengan mengupayakan kesejahteraan di hari akhirat nanti". Sudah barang tentu, ajaran itu hanya akan terwujud jika pemeluknya mewujudkannya secara sadar dalam kenyataan, baik untuk lingkungan dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. Hal ini akan berkenaan dengan pembinaan internal masing-masing umat dan kondisi lingkungan yang memungkinkan untuk menata diri itu.

Sudharmono SH menganggap pembinaan internal masing-masing umat ini semakin lama semakin mantap, walau masalah yang dihadapi tak kalah banyaknya. Umat beragama berada pada kondisi lingkungan yang amat baik untuk mengem-

Digitized by Google

Hidup ber-Pancasila merupakan rangkaian musyawarah untuk mufakat.

bangkan potensinya, bukan saja untuk kepentingan sendiri tetapi juga untuk masyarakat, bangsa dan negara. Antara umat beragama yang satu dengan yang lain dapat mengadakan 'perlombaan' rohaniah maupun amaliah dalam mencapai kehidupan yang semakin luhur bagi bangsa kita. "Keseluruhannya itu tidaklah akan berlangsung dengan mulus tanpa tantangan. Jika tidak disiapkan dengan baik, kemajuan dalam hidup lahiriah dapat menyebabkan runtuhnya nilai-nilai rohaniah". Untuk menghadapi kemungkinan dampak negatif yang tak kita inginkan itu, sebagai bangsa kita sudah merumuskan asas-asas pembangunan nasional dalam GBHN yang akan berperan sebagai tolok ukur bagi seluruh upaya yang akan kita lakukan.

Secara sadar kita menyatakan antara lain bahwa kita menginginkan hidup yang berkeseimbangan, ujar Sudharmono. Namun ada jarak yang harus kita jembatani antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita capai. Kita perlu mengadakan penilaian keadaan, perkiraan kecenderungan, perencanaan, penggerakan, koordinasi, pengendalian, serta penilaian secara terus menerus. Bukan saja dalam lingkungan kita sendiri, tetapi juga bersama golongan lainnya dalam masyarakat bangsa kita. "Hidup ber-Pancasila memang akan merupakan rangkaian musyawarah untuk mufakat, yang tidak akan putus-putusnya dalam masyarakat kita yang tumbuh dan berkembang secara dinamis ini". Sudharmono juga mengingatkan bahwa dikaitkan dengan pembangunan nasional, rencana kita sering berhasil, namun juga bisa meleset dari perkiraan. "Yang penting adalah kita tidak patah hati, putus asa apalagi menyerah. Ajaran Islam bahkan menyatakan putus asa itu merupakan dosa besar. Ajaran Islam adalah ajaran yang amat optimis terhadap hidup, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup di hari nanti".

Seminar dalam rangka musyawarah Kahmi Jaya itu membahas topik-topik secara terpadu yang meliputi masalah dampak modernisasi, masalah lapangan kerja yang layak dan operasionalisasi Pancasila. ☐ RS/RA

DENGAN JIWA SEMANGAT BERKARYA
SEGENAP WARGA / KELUARGA BESAR DPD AKLI BALI
SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987
DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

C.V. „TIARA"
INSTALATUR LISTRIK DAN TRANSFORMER SERVICE
Jl. Pattimura 59, Telp. 24047, Denpasar - Bali

MELAYANI : INSTALASI LISTRIK, AC & FIRE PROTECTION
SERVICE : AC, TRAFO 20 KV
PRODUKSI : BODY AC DAN KUNCI HEMAT LISTRIK UNTUK HOTEL

Industri, Perdagangan Umum & Kontraktor
P.T. EDI JAYA AGUNG
JALAN IMAM BONJOL TELEPON 28364 TELEX 35170 DENPASAR - BALI

PRODUKSI :
ACCESSORIES P.A.B., PANEL-PANEL LISTRIK TM/TR, TELEPON,
ARMATEUR LAMPU TL, KONSTRUKSI BAJA/PINTU AIR, HYDROPHUR/TANGKI
DAN PENGEBORAN SUMUR DALAM AIR TANAH

C.V. BALI KARYA UTAMA
Jalan Raya Hayam Wuruk No. 149 X, Telp. 25856, 26561
DENPASAR — BALI

PELAKSANA : Listrik, Telekomunikasi, Perpipaan, Sipil
LEVERANSIR : Alat-alat Listrik, Telekomunikasi bahan bangunan & Perdagangan Umum

Digitized by Google

Perlu Reorientasi Politik

Catatan kecil dari diskusi politik KNPI

Tampaknya ada sesuatu keinginan lain dari kalangan generasi muda terhadap pelaksanaan dan sasaran Pemilihan Umum mendatang. Keinginan, atau katakanlah cita-cita itu, tidak hanya sekedar harapan agar pemilu 1987 bisa berlangsung "luber" (langsung, umum, bebas dan rahasia) serta "jurdil" (jujur dan adil), namun lebih dari itu. Ada harapan yang lebih tinggi dan mulia.

Harapan itu, seperti yang dikemukakan oleh Ir Sarwono Kusumaatmadja, Sekjen DPP Golkar, dalam panel diskusi yang diselenggarakan DPP KNPI, Januari lalu, adalah agar Pemilu 1987 mendatang mampu menciptakan suatu kondisi budaya politik bangsa di masa depan. Cara-cara berpolitik dengan asumsi lama tampaknya sudah harus ditinggalkan, dan reorientasi pandangan perlu dilakukan di berbagai bidang, katanya.

Bagian integral dari kehidupan politik bangsa.

"Kita tidak bisa lagi bersikap klasik pada Pemilu mendatang dengan semboyan luber dan jurdil," kata tokoh politisi muda ini.

Memang cukup beralasan apa yang dikemukakan Sarwono itu. Sebab, jika hanya itu sasaran yang ingin dicapai dari Pemilu, orang tentu akan bertanya; di mana kemajuan berpikir kita? Sudah tiga kali Pemilu diadakan, sasaran kita hanya itu-itu saja.

Menurut fungsionaris Golkar tersebut, di dalam proyeksi ke depan dari perjalanan hidup bangsa muncul pertanyaan yang perlu mendapat jawaban segera, yakni; apa peran dan fungsi organisasi sosial politik kita di masa depan? Di masa mendatang, ujarnya, merumuskan kekuatan sosial politik dengan perlakuan adil saja sudah tidak tepat lagi". Masalah ini, menurutnya, berkaitan erat dengan sistem politik terbuka dan

BALI RAYA

PT BALI RAYA

JL. BENOA SANGGAN DENPASAR
TELEPHONE : 26423, TELEX : 35212 BAR DPR

SEGENAP KARYAWAN / KARYAWATI
PT BALI RAYA
SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT
UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR,
SEJAHTERA LAHIR BATIN

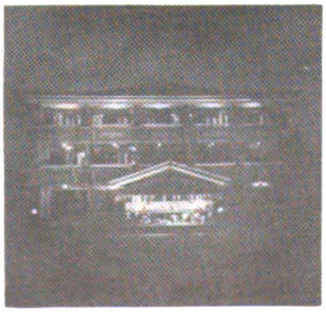

JANUR GARDEN

JANUR GARDEN hotel & restaurant

JL. I GUSTI NGURAH RAI - BY PASS SANUR - PHONE : (0361) 8155 - 8156
BALI — INDONESIA

MENSUKSESKAN PEMILU 1987
BERARTI IKUT MENEGAKAN NEGARA KESATUAN R.I.
YANG BERAZASKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DIBAWAH PEMERINTAHAN ORDE BARU

Digitized by Google

demokratis.

Di samping politik, bidang ekonomi pun perlu melakukan reorientasi. Harus diciptakan suatu kondisi dan situasi di mana bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang disiplin dan mau kerja keras. Untuk ini, kata Sarwono, diperlukan kebijaksanaan ekonomi yang terbuka dan juga demokratis. Kesemuanya itu bisa tercapai jika sejak dari sekarang diadakan reorientasi pada sasaran pemilihan umum, yang tidak hanya terpaku pada konsep klasik.

Pembicara lainnya, M Djafar Siddiq, ketua Lajnah Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengatakan dalam diskusi panel memperingati 21 tahun Tritura itu bahwa sistem politik yang perlu ditumbuhkan adalah yang bertumpu pada basis masyarakat luas, sehingga mampu menggerakkan rakyat untuk sepenuhnya berperan serta dalam pembangunan nasional.

Pemilu, menurut Djafar, harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan serta hak dan kewajiban. Konsekwensinya, pelaksanaan Pemilu tidak boleh diskriminatif, tetapi harus ditopang oleh budaya politik Pancasila, ujarnya. Semangat patriotik juga harus menjiwai pelaksanaan Pemilu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa. "Jangan sampai Pemilu menimbulkan keretakan dan kebringasan," dia mengingatkan.

Jangan terjebak

Ketua DPD PDI, Dudi Singadilaga SH MPA, pada gilirannya menyatakan keyakinannya bahwa dengan kesatuan asas Pancasila maka diharapkan Pemilu mendatang akan berlangsung dalam suasana tenang. Dikatakan, dengan pemilih yang semakin terdidik diharapkan mereka nanti tidak terombang-ambing dan terjebak oleh tema-tema yang tidak terpusat pada masalah program.

Sejalan dengan pemikiran Sarwono, Dudi juga mengharapkan agar jika Pemilu mendatang berlangsung dengan sukses, maka untuk selanjutnya perlu dipikirkan suatu konsep yang jelas dari kehidupan politik bangsa di masa depan. "Terwujudnya sistem politik ideal yang berdasarkan demokrasi Pancasila harus tetap kita usahakan, meskipun tidak harus jadi hari ini juga," ujarnya.

Mengenai pembinaan generasi muda dalam rangka proses regenerasi, Dudi berpendapat bahwa persiapan ke arah itu harus merupakan bagian integral dari kegiatan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sementara mengenai hal yang sama Sarwono Kusumaatmadja berpendapat bahwa regenerasi dan rekruitmen harus dibedakan antara lingkungan birokrasi dengan lingkungan politik.

Jika di kalangan birokrasi berlaku aturan mengenai jangka waktu promosi kenaikan pangkat dan golongan, maka di gelanggang politik, menurut Sarwono, terdapat mekanisme yang menuntut peranan seorang kader. "Peranan itu harus dirasakan," katanya.

Menko Polkan Soerono yang membuka diskusi tersebut, dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa Pemilu merupakan bagian integral dari kehidupan politik bangsa yang perlu dilembagakan. Melembagakan pemilu itu, menurutnya, sangat penting artinya dalam kaitan dengan proses budaya politik Pancasila. Kadar dan bobotnya sangat bergantung pada penghayatan masing-masing individu, sehingga untuk mencapainya memang diperlukan waktu dan proses yang cukup panjang.

Diskusi politik KNPI dalam rangka memperingati 21 tahun Tritura itu diikuti oleh pimpinan-pimpinan organisasi pemuda tingkat nasional dan para pendukung deklarasi pemuda. Diskusi yang berlangsung dalam suasana keterbukaan sesuai jiwa dan semangat pemuda itu, antara lain juga mendengarkan sambutan dari Ketua Umum DPP KNPI, Ir. Abdullah Puteh, dan dimpimpin oleh Drs. Postdam Hutasoit, Ketua Panitia diskusi.☐ spe

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

PRESIDEN KRITIK PERS

Pers yang biasanya dikenal sebagai tukang kritik, sekarang justru dikritik. Pengeritik itu adalah Presiden Soeharto. Dalam kesempatan beramah tamah dengan para pimpinan redaksi dan ketua PWI seluruh Indonesia di istana negara, Senin, 9 Pebruari lalu, Presiden menyatakan bahwa isi, ragam dan cara-cara penampilan berita dalam beberapa surat kabar dan majalah kita, dilihat dari sudut kualitas, etika dan moral, masih ada yang memprihatinkan.

Masih saja ada penampilan berita dan gambar yang memberi kesan sensasional dan mencerminkan naluri-naluri manusiawi yang dangkal, serta ada kecenderungan unsur-unsur komersial terasa mendesak unsur ideal, kata Presiden.

Menghadapi kenyataan yang tidak sehat itu, menurut Presiden, pers nasional lah yang pertama-tama harus mampu membersihkan dirinya sendiri. Segi kualitas harus semakin mendapat perhatian, sebab dalam tahun-tahun terakhir ini pers nasional telah berkembang pesat dari segi jumlah maupun jenisnya.

Kendati demikian pers nasional tak perlu berkecil hati. Sebab Kepala Negara juga menilai bahwa pers nasional telah mencapai kemajuan besar. Menurut Presiden, dia merasa tentram dan berbesar hati melihat bertambah bermutunya berita-berita, tulisan dan ulasan yang muncul pada halaman-halaman pers nasional. Presiden juga menghargai bahwa pers nasional sendiri telah merumuskan mengenai pers Pancasila.

Menteri Penerangan Harmoko yang juga memberikan sambutannya pada acara itu menyatakan bahwa dalam kurun waktu sekarang dan selanjutnya, pers nasional mempunyai komitmen yang sama untuk mengamalkan pers Pancasila. Pengamalan itu mengandung arti bahwa orientasi, sikap dan perilaku pers Indonesia senantiasa didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional III, yang menurut Ketua PWI Pusat, Zulharmans, di isi dengan seminar, pameran, dan berbagai kegiatan lainnya. □ apo

TANGGUNG JAWAB

Sebagai penguasa tunggal di daerah, Gubernur adalah orang yang paling bertanggung jawab atas baik-buruknya dan maju-tidaknya suatu daerah, ujar Presiden Soeharto ketika membuka rapat kerja para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, di balai Sidang Senayan—Jakarta, 19 Januari lalu.

Mengingat tanggung jawab yang begitu besar maka, menurut Presiden, seorang Kepala Daerah harus memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang tinggi untuk dapat membedakan kapan dia bertindak sebagai alat pemerintah pusat dan kapan sebagai alat pemerintah daerah.

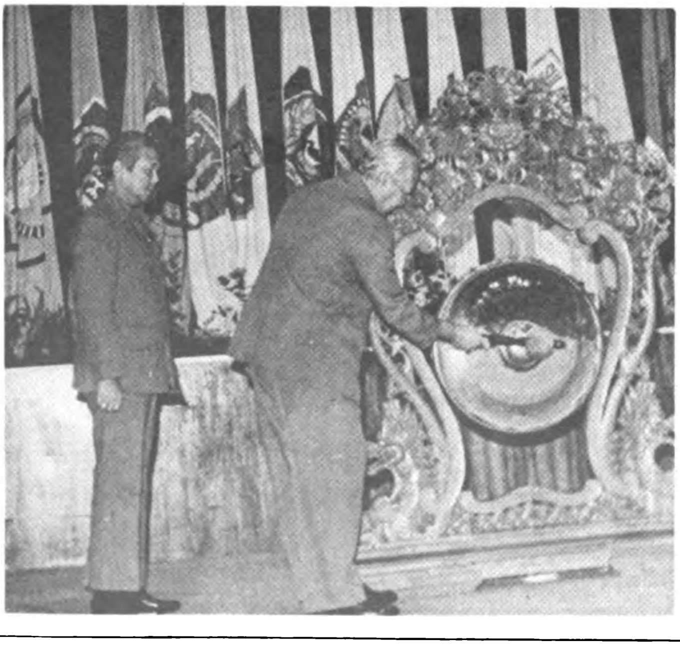

Kendati dapat dibedakan, namun kedudukan seorang Kepala Daerah sebagai alat pusat maupun alat daerahnya tidak boleh dipisahkan, tegas Presiden. Justru keserasian dari keduanya merupakan salah satu kunci penting untuk mewujudkan efisiensi dan produktifitas nasional yang dewasa ini dicanangkan sebagai gerakan Nasional.

Diingatkan pula oleh Presiden, sebagai penguasa tunggal di daerah, tidak berarti Gubernur bisa mengabaikan begitu saja pertimbangan dari aparat-aparat lainnya. Kepala Daerah yang baik, kata Presiden, harus bijaksana dalam menimbang secara masak dan menyaring dengan baik pertimbangan-pertimbangan dari aparat lain di daerahnya, dengan melandaskannya pada peraturan perundangan yang berlaku.

"Dengan demikian, Kepala Daerah akan mempunyai dasar yang kuat dan mendapat dukungan luas," ujar Presiden.

Di bagian lain pidatonya Presiden juga menyinggung masalah Pemilu dengan memberikan pengarahan kepada para Kepala Daerah dalam mengembangkan demokrasi politik. "Demokrasi politik kita saat ini sedang memasuki tahap penting karena memasuki Pemilu mendatang yang merupakan Pemilu pertama sejak ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas," kata Presiden.

Presiden juga menilai adanya kemajuan dalam kehidupan politik nasional, di mana Golongan Karya dan dua Partai Politik tidak lagi bersikap sebagai kekuatan-kekuatan yang saling berhadapan. "Semua kekuatan sosial politik adalah tiang-tiang penyangga utama dari demokrasi Pancasila dalam perumahan besar bangsa dan negara kita," demikian Presiden Soeharto.

Selesai membuka raker tersebut, Presiden Soeharto menandatangani perangko hari pertama seri Pemilu sebagai tanda diresmikannya penggunaan perangko tersebut. (apo)

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

ENAM TEMUAN WAPRES

Dari hasil pengawasan terhadap masalah sosial dan pembangunan selama tiga tahun terakhir ini, ada enam penemuan yang paling menonjol dan merata baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah di seluruh Indonesia, ungkap Wapres Umar Wirahadikusumah dalam rapat kerja Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, 22 Januari lalu.

Di bidang sosial, ditemukan krisis nilai-nilai sosial dalam masyarakat di mana nilai-nilai sosial tertentu mulai ditinggalkan dan diganti dengan nilai-nilai baru yang terasa kurang serasi. Penyebabnya adalah modernisasi. Kendati begitu, menurut Wapres, ditinjau dari latar belakang pengalaman bangsa, perubahan nilai sosial yang drastis itu tidaklah mengherankan.

Temuan kedua adalah kelemahan manajemen pengelolaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun pembangunan. Kelemahan ini, setelah dipelajari, ternyata tidak hanya bersumber pada kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, tetapi berpangkal pada sikap mental. Sikap mental ini belum memenuhi persyaratan modern yang dituntut oleh pembangunan nasional, apalagi untuk era tinggal landas, ujar Wapres.

Yang ketiga adalah temuan tentang kelemahan koordinasi, yang menurut Wapres, terjadi di hampir semua eselon di setiap instansi baik di pusat maupun di daerah. Keempat adalah temuan yang menyangkut kelemahan tindak lanjut pengawasan yang tidak tuntas. Pengawasan yang sudah tepat dan teliti pun akan kehilangan arti jika tidak diikuti dengan tindak lanjut yang tuntas, kata Wapres. Dalam hal ini, tindak lanjut pengawasan terhadap personel merupakan kelemahan yang serius, dia menambahkan.

Penemuan Wapres yang kelima adalah terdapatnya perbedaan pendapat dan selera dalam penerapan kontrol sosial, akibat dari perbedaan kondisi mental dan budaya. Aspek ini, ujar Wapres, memerlukan pemecahan yang tak menimbulkan guncangan-guncangan.

Sedangkan temuannya yang keenam adalah yang menyangkut masalah tanah, yang menurut Wapres masih merupakan permasalahan yang kronis. Tindakan pemerintah yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masalah ini sangat diperlukan, di samping perlunya kecepatan bertindak dalam menanggapi tuntutan kebutuhan pembangunan, demikian Wapres.

Pada kesempatan membeberkan hasil temuannya itu, Wapres Umar Wirahadikusumah juga mengingatkan kepada semua pimpinan satuan organisasi pemerintahan agar wajib menciptakan dan melestarikan sistem pengawasan melekat. Adanya pengawasan fungsional tidak boleh mengurangi pengawasan dari atasan terhadap bawahan atau pengawasan melekat tadi, katanya.□ (ape)

HARI PERS NASIONAL

Pers nasional diharapkan dapat berperan sebagai penegak moral nasional, dengan memberikan dukungan terhadap gerak ke arah penghayatan dan pengamalan nilai-nilai moral nasional, demikian antara lain pesan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono SH dalam pertemuan besar pemimpin redaksi seluruh Indonesia di Jakarta, Sabtu, 7 Februari lalu, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional III.

''Pers nasional'', kata Mensesneg, ''dapat berperan aktif memperkokoh pemahaman dan keyakinan pandangan hidup bangsa serta ideologi nasionalnya, serta membantu meningkatkan ketahanan bangsa terhadap pengaruh negatif yang menggoyahkan''.

Menurut Ketua Umum DPP Golkar itu, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan politik juga harus diresapi dimensi moral. ''Kehidupan politik harus dikendalikan oleh hikmat kebijaksanaan, kearifan dan kenegarawanan. Bukan oleh intrik, adu kekuatan atau kekerasan'', ujar Sudharmono, yang lantas menambahkan bahwa di sinilah pers nasional dapat memainkan perannya sebagai penegak moral tadi.

Pada kesempatan yang sama, Pangab/Pangkopkamtib Jenderal TNI L.B. Moerdani, mengharapkan agar pers nasional sebagai salah satu unsur dari sistem pembangunan dan ketahanan nasional, harus mampu berinteraksi secara positif dengan sistem-sistem lain yang ada serta berdiri di atas kepribadiannya sendiri.

Moerdani mengingatkan, kemampuan pers dalam membentuk pendapat umum hendaknya jangan disalahgunakan, melainkan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. ''Sikap dan pandangan pemerintah orde baru terhadap pers sebagai kekuatan nasional Bukan sekedar pandangan basa basi. Pemerintah benar-benar menganggap pers sebagai salah satu kekuatan nasional dan kekuatan perjuangan'', tegasnya.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam mengingatkan, dengan kekuatannya itu, pers mampu menyebarluaskan sikap-sikap integratif maupun disintegratif, yang membina ataupun merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, menurutnya, pers harus berpegang teguh pada wawasan persatuan dengan tidak membesarkan berita yang menjurus ke arah hal-hal yang bersifat disintegratif itu, tegasnya.

Hari pers nasional kali ini, selain diisi dengan kegiatan seminar dan pengarahan dari para pejabat tinggi negara, juga dimeriahkan oleh pameran pers nasional di arena pekan raya Jakarta. Pada akhirnya, muncul suatu kebulatan tekad yang dibacakan oleh ketua PWI Pusat, Zulharmans, berisi antara lain tekad untuk memantapkan kehidupan pers Pancasila serta dukungan terhadap Jenderal Purnawirawan Soeharto untuk dipilih kembali sebagai Presiden RI. (ape)

Digitized by Google

Mengenang Mahmudi Romli

Jum'at siang, Jakarta, hujan gerimis. Hari itu, keluarga Media Karya ditinggalkan oleh salah seorang wartawannya. Mahmudi Romli telah tiada, Dia telah dipanggil dan berpulang untuk selamalamanya. Kepergiannya begitu cepat, tidak seorangpun teman seprofesinya yang menyangka, bahwa hari itu Mahmudi harus meninggalkannya.

Hari Rabu, Mahmudi yang mempunyai potongan tubuh gemuk itu masih menjalankan tugas jurnalistiknya sehari-hari. Di DPR, Dia sempat meliput dan menurunkan berita yang berjudul "Kasus Penggusuran Tanah Milik Berok Solok diteliti FKP DPR-RI" untuk Harian Berita Buana. Dan siangnya dia datang di Kantor Media Karya, majalah bulanan yang diterbitkan oleh DPP Golkar untuk menyerahkan satu naskah hasil wawancara. Memang hari itu, dia sedikit agak lain dari biasanya. Pucat dan sedikit "agak kurus". Ketika salah seorang bertanya, "Habis sakit Mas?" (begitu teman-teman memanggilnya). "Tidak". Diet barangkali? "Juga tidak". Kok, kelihatannya sedikit agak kurus dan pucat. Kemudian dia diam dan duduk di kursi sambil menyalakan rokok kretek.

Setelah percakapan itu, kemudian Mahmudi menanyakan tugas-tugas yang dapat dikerjakannya. Karena untuk sementara, tugas wawancara masih belum ada, maka dia berinisiatip untuk menelpon salah seorang pengusaha kecil untuk laporan "Selingan". Untuk kolom selingan pada Media Karya, dialah yang biasa mengisinya.

Usai bercakap-cakap dengan temanteman yang lain, bahkan sempat bergurau, Mahmudi pamit pulang. Dengan wajah pucat, dia menuruni tangga dari kantor Media Karya di lantai dua itu. Esoknya Kamis, dia tidak datang di kantor, bahkan tidak menelpon. Ternyata penyakit yang diidapnya kambuh. Lever dan maag berat.

Memang dua penyakit itu dideritanya sudah cukup lama. Tapi penyakit itu seolah-olah tidak terlalu dirasakan. Bahkan Mahmudi terus saja menjalankan tugas jurnalistiknya. Teman-teman seprofesinya di DPR, baik para wartawan maupun para anggauta DPR, tidak pernah betul-betul tahu bahwa dia mempunyai penyakit lever dan maag berat itu.

Dan hari Jum'at siang datang telpon dari ruangan Sekjen, Golkar, yang memberitakan Mahmudi Romli sakit keras dan dirawat di rumah sakit Pelni Petamburan. Dan seperempat jam kemudian, datang telpon dari seorang rekan wartawan: Mahmudi telah pergi....

Memang berita itu mengagetkan. Rasanya seperti ada petir disiang bolong. Tapi itulah kenyataan, bahwa Mahmudi Romli telah tiada, dia telah dipanggil kepangkuan Maha Pencipta.

Seperti dikatakan Pak Liknya, hari-hari sebelumnya, Mahmudi tampak sehat seperti biasa. Namun Rabu malam, penyakit lama yang dideritanya kambuh. Dan bersama dengan Pak Liknya itu, Kamis subuh Mahmudi ke rumah sakit Pelni Petamburan menggunakan taksi. Bahkan, dia sempat turun sendiri dari taksi berjalan kaki menuju rumah sakit itu. Namun kesehatannya terusmenurun. Kemudian pada pukul 13.20 meninggal dunia.

Mahmudi Romli, yang luwes dan hangat dalam pergaulan itu dilahirkan di Solo, 20 Februari 1946. Dunia jurnalistik sudah digeluti puluhan tahun. Pertama pada harian Pedoman. Karena koran tersebut ditutup pada tahun 1974, dia kemudian bergabung di harian Berita Buana. Dan tahuntahun terakhir ini dia juga membantu mengisi penerbitan Media Karya.

Selama menggeluti dunia jurnalistik, Mahmudi beberapa kali mengikuti Karya Latihan Wartawan, di antaranya pendidikan jurnalistik yang diadakan oleh Press Foundation of Asia di Manila, Philipina tahun 1980. □ BM

"Dengan semangat pengabdian dan berkarya terus, kita sukseskan PEMILU 1987 demi terwujudnya MASYARAKAT ADIL DAN SEJAHTERA"

PERTAMINA COTTAGES
KUTA BEACH P.O. BOX 121 DENPASAR BALI INDONESIA
A Jaya HOTEL

Kuta Beach, P.O. Box 121 Denpasar, Bali, Indonesia.
Telpun : (0361) 51161, Telex : 35131, Cable : Percot Dpr.

Menginap di Pertamina Cottages menjamin kepuasan liburan anda sekeluarga di pulau BALI, karena fasilitasnya yang lengkap, letaknya di pantai KUTA yang indah serta pelayanannya yang menyenangkan dan ramah tamah.

Digitized by Google

Hakim dan Cacad Tubuh

Tampil dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR-RI, Menteri Kehakiman Ismail Saleh SH menjawab beberapa pertanyaan mengenai persyaratan jasmani seorang calon hakim. Menteri berpendapat, calon hakim harus bebas dari cacad jasmani. Memberi contoh, Ismail Saleh menyebutkan jika ada seorang hakim yang pincang (kakinya) dan kebetulan putusannya tidak memuaskan, bisa timbul komentar hakimnya saja pincang apalagi hukumnya. Beberapa contoh lainnya juga diutarakan dengan nada agak berkelakar.

Dan bisa diperkirakan akan ada reaksi, tak terkecuali dari kalangan penyandang cacad sendiri. Pernyataan menteri itu dianggap mencerminkan sikap diskriminatif.

Memang masalah cacad tubuh di masyarakat kita masih merupakan masalah yang mengandung kepekaan tertentu. Secara pahit harus diakui bahwa sebagian terbesar anggota masyarakat, sadar atau tidak, masih meletakkan pandangan tertentu yang tak terlalu menguntungkan para penyandang cacad. Banyak UU sampai kepada persyaratan kerja masih menempatkan sebagai hal penting keharusan "berbadan sehat", "tidak cacad jasmani dan rohani" dan sebagainya.

Bila Menteri Kehakiman menganggap syarat bebas cacad jasmani sebagai hal penting, pasti tidak atas dasar pikiran diskriminatif. Melainkan, karena keinginan untuk terciptanya gambaran hakim yang berwibawa secara fisik maupun non fisik (kualitas mental, kemampuan dan ketrampilan teknis penguasaan hukum). Dan keinginan itu merupakan refleksi pola sikap dan pola pandang sebagian terbesar masyarakat dan berlaku umum. Bila pola sikap dan pola pandang masyarakat ataukah apresiasi masyarakat terhadap potensi para penyandang cacad mengalami kemajuan dan pembaharuan, pastilah persoalannya menjadi lebih mudah.

Kita bisa memahami perasaan dan kekecewaan saudara-saudara kita penyandang cacad, tapi yah untuk sementara begitulah keadaannya. Diperlukan lebih banyak itikad, pikiran dan tindakan dari lebih banyak pihak bila ingin memperbaiki posisi para penyandang cacad di masyarakat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kerja keras dan kemauan kuat dari para penyandang cacad sendiri untuk menyatakan dan membuktikan eksistensi mereka di masyarakat.

BUMN

Apakah suatu BUMN perlu diteruskan atau diswastakan? Terhadap pokok pertanyaan seperti ini masih terdapat berbagai pendapat. Tapi yang jelas, atas petunjuk Presiden saat ini tengah disusun suatu kriteria untuk menentukan perlu tidaknya suatu BUMN diteruskan atau diswastakan.

Sepanjang yang dapat diamati, memang tak semua BUMN berhasil. Sejumlah BUMN dari tahun ke tahun, merugi tidak, untung pun tidak sehingga menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya yang terjadi. Dan tudingan pun banyak dilancarkan bahwa beberapa BUMN menjadi sarang sejumlah oknum untuk menguntungkan diri sendiri. Tuduhan semacam itu sendiri masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Tapi sementara itu, tak sedikit BUMN yang justru berhasil mendatangkan keuntungan. Tentu untuk yang masuk kategori terakhir ini harus dilanjutkan eksistensinya karena kegunaannya. Apakah tetap dalam bentuk BUMN ataukah sebagai institusi swasta, tidak terlalu menjadi soal. Karena baik ia BUMN ataukah ia berwujud badan swasta ia tetaplah merupakan asset nasional.

Di luar masalah untung rugi seperti itu, terdapat pula keluhan dari sektor swasta terhadap beberapa BUMN yang karena milik negara lalu 'menang' kesempatan. Tegasnya, ladang swasta dipersempit oleh BUMN. Terhadap gejala atau keluhan seperti ini disarankan penegasan perlunya perlakuan sama dan adil dari pemerintah. Dan ada pula saran agar BUMN lebih diarahkan di sektor-sektor usaha yang membutuhkan kepeloporan, katakanlah dalam rangka penggalakan ekspor non migas.

Namun yang terpenting di atas segalanya, apapun keputusan yang akan diambil nantinya mengenai BUMN ini, ia didasarkan kepada pertimbangan yang seobjektif dan secermat mungkin, sehingga tidak menimbulkan prasangka maupun persoalan baru....

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA
SEGENAP KARYAWAN DAN KARYAWATI
PERCETAKAN NEGARA RI SIAP MEMBERIKAN
PELAYANAN SEBAIK-BAIKNYA DALAM BIDANG
CETAK-MENCETAK DEMI SUKSESNYA
PEMBANGUNAN NASIONAL.

Digitized by Google

Yang Menentukan Adalah Rakyat Pemilih

Golkar menggugah kesadaran, tidak menempuh cara-cara paksaan

Disaat Pemilihan Umum 1987 tinggal berbilang puluhan hari saja seperti sekarang ini, setiap kunjungan Ketua Umum Golkar ke daerah-daerah lalu menjadi pusat perhatian. Bagi jajaran Golkar sendiri — di daerah yang dikunjungi — bahkan menjadi pusat perwujudan antusiasme. Dan itu bisa dimengerti. Selain bersemangat karena keinginan bertatap muka dengan Ketua Umum dan pimpinan Golkar lainnya, juga karena keinginan untuk memperoleh petunjuk langsung dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilihan umum.

Di Kalimantan Selatan, 10 dan 11 Januari, kader-kader Golkar memang memperoleh petunjuk langsung yang diinginkan itu. Mulai dari soal target minimum hingga kepada penampilan sikap dasar yang diinginkan dalam menghadapi kampanye dan pelaksanaan pemilihan umum 1987. Mengunjungi Kalimantan Selatan untuk kedua kalinya, Ketua Umum dan pimpinan DPP lainnya mendatangi kabupaten Banjar dan kota administratif Banjarbaru, kabupaten Tabalong, kabupaten Hulu Sungai Utara serta kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam perjalanan dua hari penuh.

Di tempat-tempat tersebut dihadapan fungsionaris, komisaris-komisaris kecamatan dan desa serta kader-kader Golkar lainnya Ketua Umum memberikan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan pemilihan umum yang akan datang. Tentang target, dengan melihat hasil pemilihan umum terdahulu, Ketua Umum mengatakan "Paling sedikit 7 kursi" dari Kalimantan Selatan untuk DPR tingkat pusat. Jajaran Golkar, mulai sekarang hingga 23 April mendatang diharapkan menanamkan sikap prihatin yang positif dalam dirinya, dalam artian siap sedia untuk membhaktikan diri melalui kerja keras untuk suksesnya pelaksanaan pemilihan umum.

Punya keinginan untuk memperoleh petunjuk langsung dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu.

Setelah bekerja keras dan berhasil, apa yang kita peroleh? "Nomor satu adalah kepuasan batin", ujar Sudharmono SH. Kepuasan batin bahwa kita telah menyelesaikan tugas dengan baik. Karena paling penting setiap kita menyelesaikan sesuatu, jangan sampai ada sesal kemudian. Sebab, menurut Ketua Umum, dengan melihat angka-angka yang kita hitung dan melihat apa yang telah kita lakukan selama ini memang kita patut optimis, namun perlu kita ingat bahwa "hasil yang jelas adalah hasil yang diperoleh pada tanggal 23 April itu". Dan menghindari sikap takabur, Ketua Umum Golkar mengingatkan bahwa yang menentukan hasil itu bukan kita, "tetapi rakyat pemilih". Ini berarti jajaran Golkar harus tetap bekerja keras melanjutkan penggalangan. Jangan lekas puas diri, laksanakan penggalangan sesuai petunjuk yang diberikan. Bagaimana? Dengan komunikasi yang baik, dengan ajakan yang baik, tidak dengan paksaan melainkan atas dasar kesadaran.

Menyambut kedatangan Ketua Umum Golkar dan para pimpinan Golkar Pusat lainnya, Ir H.M. Said — Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Kalimantan Selatan — menyatakan kunjungan ini akan lebih memantapkan tekad dan semangat untuk memenangkan Golkar di Kalimantan Selatan. "Keluarga Besar Golkar Kalimantan Selatan telah siap melaksanakan pemilihan umum dengan tekad memperoleh kemenangan bagi Golongan Karya". Dengan jujur, Ir H.M. Said mengakui memang masih terdapat kekurangan di sana sini, di antaranya masalah kualitas kader, tetapi "dengan pembinaan seluruh Keluarga Besar Golkar, kami yakin kekurangan itu akan bisa tertutupi".

Bahwa warga Golkar Kalimantan Selatan memiliki tekad besar, sebenarnya itu tercermin dari besarnya jumlah massa Golkar yang menghadiri setiap pertemuan tatap muka dengan para pimpinan Golkar yang datang dari Jakarta selama dua hari itu. Di Banjarbaru, kader Golkar memadati ruang pertemuan Wisma Haji Sabtu pagi 10 Januari. Dan malamnya, komisaris desa, komisaris kecamatan, fungsionaris dan Keluarga Besar Golkar kabupaten Tabalong pun memadati gedung bioskop Permata di kota kecil yang bernama Tanjung. Namun paling meriah adalah di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Di Amuntai, Ketua Umum dan rom-

Digitized by Google

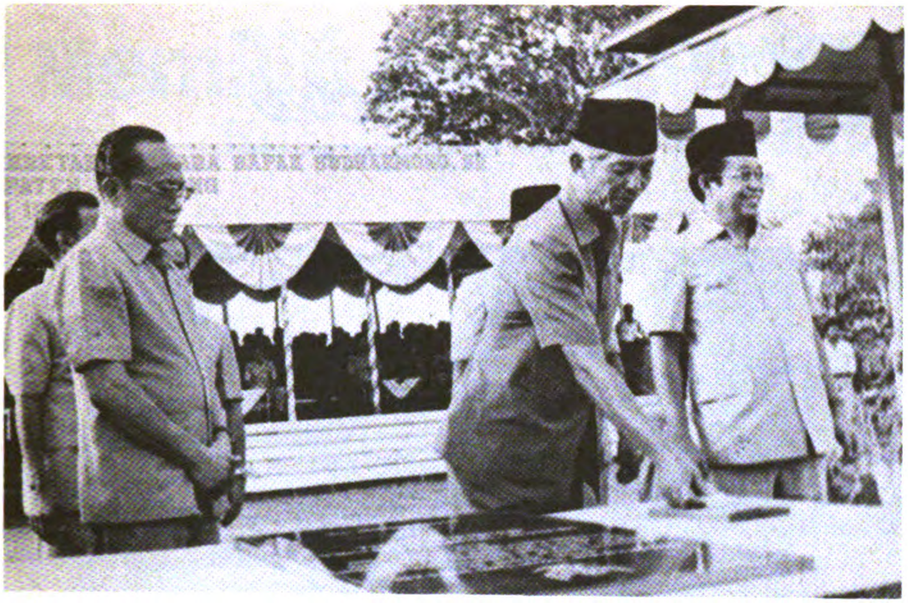

Kepuasan batin bahwa kita telah menyelesaikan tugas dengan baik.

bongan berjalan kaki kurang lebih 200 meter di tengah jubelan massa Golkar — dan amat menonjol, banyaknya massa dari kalangan usia muda — menuju tempat pertemuan di Gelanggang Remaja Lambung Mangkurat. Hal yang sama terjadi di Barabai. Berjalan kaki beberapa puluh meter menuju Gedung Olahraga, Ketua Umum dielu-elukan massa Golkar dan juga disambut dengan drumband pemuda dari dua ormas Islam — di antaranya dari Muhammadiyah. Memang cukup menarik.

Tapi adalah pula di dua tempat ini, Ketua Umum Golkar selain memberikan pengarahan mengenai masalah-masalah pembangunan yang kita hadapi saat ini, juga memberikan isyarat bahwa dalam kampanye Pemilihan Umum nanti Golkar cenderung untuk tidak melakukan pengerahan massa dan pawai besar-besaran atau yang semacamnya. Diinginkan cara-cara kampanye yang tertib dan teduh serta mengutamakan ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Kampanye bagi Golkar adalah kelanjutan dari konsolidasi dan program penggalangan yang telah dilaksanakan selama ini sesuai jiwa dan ketentuan dalam Undang-undang bidang politik yang ada.

Di Amuntai, Ketua Umum melakukan tatap muka dengan komisaris-komisaris desa dan kecamatan, fungsionaris serta keluarga besar Golkar lainnya. Dalam kesempatan itu, begitu pula di tempat-tempat lainnya, Ketua Umum menyempatkan melakukan dialog dengan para komisaris untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan tugas penggalangan di wilayah masing-masing serta kesiapan lain dan juga aspirasi maupun pemikiran mereka. Untuk Ampi setempat, Ketua Umum menyumbangkan drumband. Selaku Mensesneg, Sudharmono menyerahkan SK Presiden tentang bantuan pembangunan mesjid untuk Paringin Kota, untuk Padang Luar Amuntai Utara, dan untuk Masjid Raya Amuntai. Bersama dengan itu diserahkan pula SK Ketua Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila untuk pembangunan mesjid type 15 di desa Pelampitan. Sedang di Barabai, diserahkan SK Presiden untuk pembangunan mesjid di Labuan Amas Utara serta SK Ketua YAMP untuk pembangunan mesjid type 17 di desa Barabai Utara. Pada hari sebelumnya di Banjarbaru disampaikan 5 SK Presiden untuk pembangunan mesjid di beberapa kabupaten lain di Kalimantan Selatan serta sebuah SK Presiden tentang bantuan pembangunan pondok pesantren Darussalam Martapura. Dan diserahkan dua SK Ketua YAMP untuk pembangunan dua mesjid di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Masih di Banjarbaru, Ketua Umum mengunjungi pesantren Guppi dan sekaligus meresmikan penggunaan mesjid bantuan YAMP di sana.

Dua acara lainnya yang cukup penting selama di Kalimantan Selatan adalah kunjungan ke pesantren Rasyidiyah Halidiyah di Amuntai dan rangkaian peresmian listrik masuk desa di kabupaten-kabupaten yang dikunjungi.

Pesantren Rasyidiyah Halidiyah didirikan sejak 1922 dan kini mendidik 576 santri putera dan 463 santri puteri dengan 97 tenaga pengajar. Dalam kesempatan kun-

Digitized by Google

jungan ke pesantren tersebut, Ketua Umum Golkar mendengarkan pembacaan pernyataan yang disampaikan pimpinan pesantren mengenai pencalonan kembali pak Harto sebagai Presiden RI. Dinyatakan pula semoga beliau nantinya akan mengangkat kembali pembantu-pembantu beliau yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan banyak berbuat kebaikan untuk pembangunan bidang keagamaan. Terhadap pernyataan ini Sudharmono SH mengatakan bahwa pernyataan itu sendiri menunjukkan lembaga pendidikan keagamaan ini bukan saja mengutamakan masalah pendidikan keagamaan, tetapi juga telah memikirkan dan mengembangkan wawasan luas yang bersifat nasional tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional, ujar Sudharmono, memang milik kita semua. Pembangunan yang dapat memenuhi harapan kita, untuk mencapai kemajuan lahiriah maupun spriritual guna meningkatkan kehidupan keagamaan kita.

Listrik yang merupakan kebutuhan dalam kemajuan lahiriah — namun mempunyai dampak psikologis yang luas — tampaknya kini masuk ke desa-desa Kalimantan secara besar-besaran. Dalam acara di desa Tanta Kabupaten Tabalong, Sudharmono SH meresmikan penggunaan listrik di 11 desa yang tercakup dalam 4 kecamatan. Di masa mendatang masih akan 20 desa di Kabupaten Tabalong yang akan dimasuki listrik, ungkap Ir Aan Kusrani pemimpin wilayah VI PLN. Sedang untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara direncanakan 29 desa dan untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 18 desa. Tanggal 11 Januari, sehari sesudah acara di desa Tanta, listrik untuk desa-desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (18 desa di 3 kecamatan) dan di Kabupaten Hulu Sungai tengah (36 desa di 6 kecamatan) juga diresmikan penggunaannya di Amuntai dan Barabai.

Dalam kunjungan dua hari di Kalimantan, Ketua Umum disertai Ny. EN Sudharmono, dan pimpinan Golkar lainnya seperti AE Manihuruk, Ir Akbar Tanjung, Sukarton Marmosudjono SH, Zarlons Zaghlul SH, H. Anang Adenansi, Ir Siswono Yudohusodo, Aulia Rachman SH, Dra Nurhayati Yamas, Saud L. Tobing, Medi Teransah, Abdullah Zaini SH, H. Maksid, Yusuf Tahlib SH, dr Ruswan Dahlan, RH Subono, Sudarsono SH, HZ Abidin dan rombongan khusus seniman Golkar: Edy Sud, Bagyo, Diran, Darto Helm.

Rombongan seniman Golkar ini sempat menghibur keluarga besar Golkar di setiap tempat yang dikunjungi. Di Tanjung, secara khusus mereka menghibur masyarakat di lapangan terbuka. Sajian untuk masyarakat di Tanjung mendapat sambutan hangat — massa berlimpah ruah kendati hujan gerimis — dari masyarakat yang haus hiburan. □

Rum Aly

NATOUR ★★★ Bali hotel

JALAN VETERAN NO. 3 - P.O. BOX 3 - CABLE : BALIHOTEL. PHONE : (0361) 25681.
TELEX : 35166 BALIHOTEL. DENPASAR - BALI

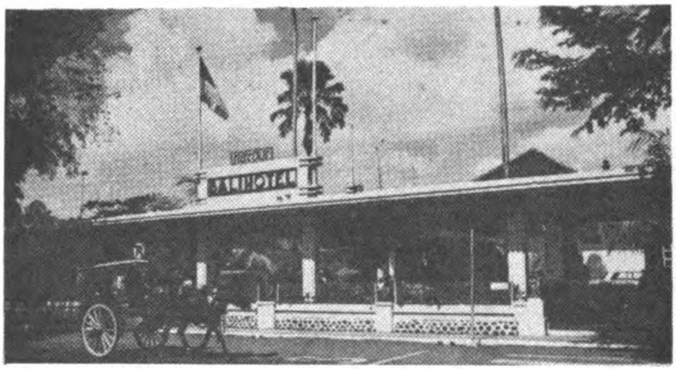

NATOUR ★★★
SINDHU BEACH HOTEL

P.O. BOX 181 SANUR, BALI - CABLE : SINDHUHOT. PHONE : 8351, 8352

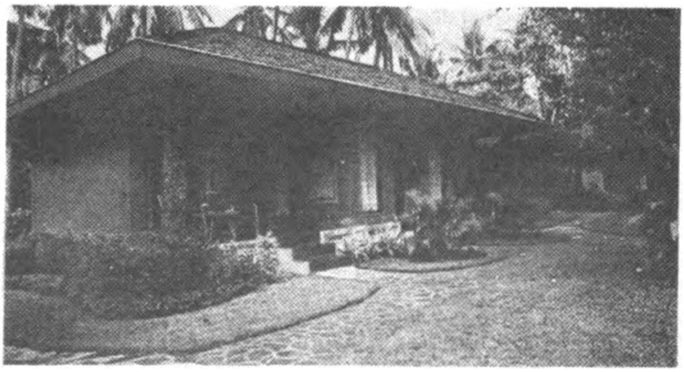

NATOUR
KUTA BEACH HOTEL

JL. PANTAI KUTA NO. 1, KUTA-DENPASAR-BALI-INDONESIA. P.O. BOX 393
CABLE : KUBEHOT. TELEX : 35166 (VIA BALI HOTEL). PHONE 51361, 51362 (2 LINES)

Digitized by Google

Memilih Berdasarkan Kesadaran

Kunjungan Akhir Pekan Ketua Umum di Wilayah Jakarta

Bukan atas dasar paksaan.

"Memilih Golkar bukan atas dasar paksaan, tetapi berdasarkan kesadaran, yaitu kesadaran setiap warga negara yang ingin ikut serta berjuang demi kelangsungan pembangunan Bangsa yang merupakan cita-cita perjuangan Golkar. Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH dihadapan sekitar enam ribu orang warga Golkar Departemen Pertanian bertempat di aula Departemen Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan, 17 Januari yang lalu.

Memberikan pengarahannya dalam pemantapan warga Deptan menghadiri Pemilu mendatang itu lebih lanjut Sudharmono mengatakan bahwa bulan April '87 merupakan saat yang menentukan bagi pembangunan di sektor pertanian, karena di bulan itu juga saat panen tiba. Keberhasilan panen mendatang merupakan tanggung jawab dari Departemen Pertanian. Keberhasilan panen ini mempunyai arti penting karena pada saat yang bersamaan berlangsung pula pesta demokrasi yakni Pemilu. "Sudah tentu bila panen berhasil para petani akan bergembira, Golkar pun akan bergembira," tuturnya. Diungkapkannya kembali bahwa dalam Pemilu yang akan datang Golkar mengharapkan kemenangan dengan meraih 70% suara pemilih. "Dengan demikian sektor pertanian mempunyai peran besar dalam mensukseskan kemenangan Golkar itu, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah kaum tani," ujarnya. Sudharmono juga mengungkapkan kegembiraannya akan kesadaran para warga Golkar Deptan seperti tercermin dalam kehadirannya pada acara hari itu guna mensukseskan Pemilu bagi kemenangan Golkar. Kesadaran dan kesiapan warga Golkar di lingkungan Deptan itu juga diungkapkan oleh Menteri Pertanian Ir. Achmad Affandi pada hari itu dalam sambutannya mengantar pengarahan Ketua Umum. Dengan bersemangat Ir. Achmad Affandi yang juga termasuk dalam DCS untuk daerah pemilihan Jawa Barat itu mewarnai sambutannya dengan meneriakkan yel-yel Golkar dan yel-yel perjuangan yang disambut gempita oleh para warga Deptan yang hadir. Mereka yang hadir itu adalah unsur Korpri dan Dharma Wanita Unit Deptan. Sebagian dari mereka adalah para peserta Tarpadnas dari Kanwil Deptan se Indonesia dan para Jurkam dari unsur Deptan.

Sebelum meninggalkan gedung pertemuan Deptan, Ketua Umum DPP Golkar menyerahkan kenang-kenangan berupa plaket, yang diterima oleh Ketua Korpri Unit Deptan Suwondo SH.

Setelah istirahat dan makan siang di rumah kediaman Ketua Umum di Jalan Senopati, safari akhir pekan dilanjutkan kembali dengan mengunjungi wilayah Jakarta Utara. Pertama-tama ketua Umum dan rombongan menghadiri acara penutupan diklat kader fungsional yang telah berlangsung 5 angkatan berturut-turut di lingkungan PT Sanyo Industries di Jl. Yos Sudarso. Di depan sekitar 2000 karyawan PT Sanyo Industries kembali Sudharmono SH dalam sambutannya menggugah semangat para kader di lingkungan perusahaan ini untuk memenangkan Pemilu yang akan datang bagi Golongan Karya, karena dengan kemenangannya itu Golkar akan dapat terus berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang kini berjumlah 160 juta jiwa. Juga oleh Ketua Umum diharapkan agar melalui kaderisasi

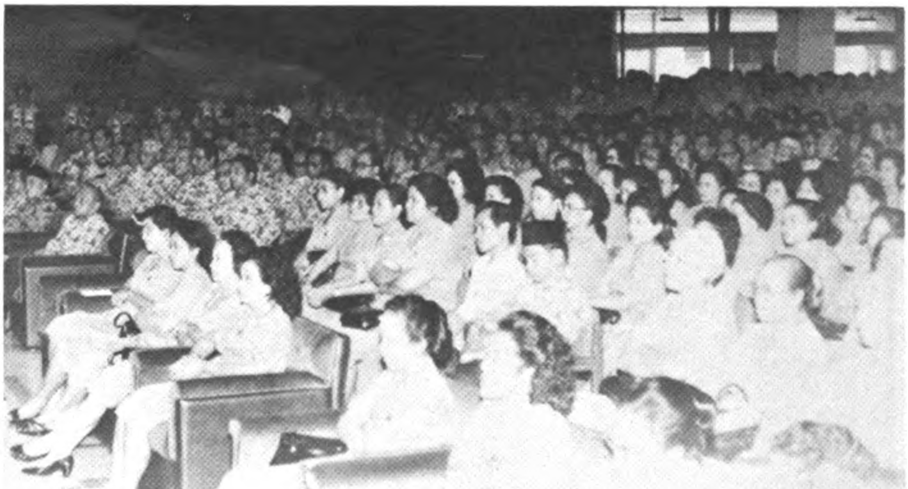

Mengharapkan kemenangan 70% suara.

Digitized by Google

seperti yang dilaksanakan itu akan mempererat hubungan antara para karyawan dan pimpinan perusahaan, di samping akan semakin menumbuhkan keyakinan dan kesadaran tentang keberadaan bersama dalam jajaran Golkar dalam ikut serta melangsungkan jalannya pembangunan. Dalam hubungan ini Sudharmono menekankan perlunya peningkatan prestasi dan karya-karya nyata dari seluruh warga PT Sanyo.

Kelurahan Koja Utara mendapat pula giliran kunjungan Ketua Umum hari itu, berkenaan dengan peresmian Proyek Perbaikan Kampung Moh. Husni Thamrin di tempat itu. Hadir dalam acara ini Gubernur DKI R. Soeprapto serta Walikota Jakarta Utara RH Mulyadi, beserta unsur keluarga besar lainnya seperti warga AMPI, FKPPI, KORPRI, Dharma Wanita, serta para pelajar setempat. Dalam sambutan singkatnya pada upacara ini Sudharmono SH mengatakan bahwa perjuangan Golkar bukanlah semata-mata untuk kepentingan dan kemenangan Golkar, melainkan untuk kelancaran serta kesinambungan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan Bangsa dan negara secara menyeluruh.

Masih di kawasan Jakarta Utara, Ketua Umum DPP Golkar lebih lanjut mengadakan kunjungan di kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing. Di tempat ini Sudharmono SH selaku Mensesneg meresmikan proyek kelistrikan yang meliputi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Guyuran air hujan tidak mengurangi kehangatan sambutan dari warga Golkar setempat untuk mengelu-elukan Ketua Umumnya yang hadir pada hari itu. Dalam sambutan peresmian, Sudharmono SH mengajak warga Golkar untuk terus berprestasi dalam bidang karya masing-masing. Dengan prestasi di bidang profesi ini kader Golkar akan terus mengisi jalannya pembangunan secara terus menerus

Tingkatkan prestasi!

sampai terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Dalam hubungan ini ditegaskannya bahwa keluarga besar Golkar harus memenangkan Order Baru dalam Pemilu mendatang, yakni dengan memenangkan Golkar dalam pemilu itu.

Selain meresmikan proyek kelistrikan, Sudharmono yang juga adalah Sekretaris Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila itu atas nama Presiden menyerahkan surat keputusan Presiden tentang bantuan untuk Mesjid dan Madrasah Al Muttaqin di Kelurahan Tugu. Pada kesempatan yang sama Sudharmono SH menyerahkan hadiah berupa sebuah pesawat televisi kepada pelanggan yang ke-satu juta di wilayah PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Menjelang Maghrib Ketua Umum DPP Golkar beserta Ny. EN Sudharmono meninggalkan kelurahan Marunda, kembali menuju kediaman di Jalan Senopati. Kunjungan Ketua Umum hari itu disertai oleh anggota DPP serta fungsionaris DPP Golkar yang lain, seperti Zarlons Zaghlul SH, Agung Laksono, Drs. Theo Sambuaga, Sudharsono SH dan R. Soebono. □ **Rendy MS**

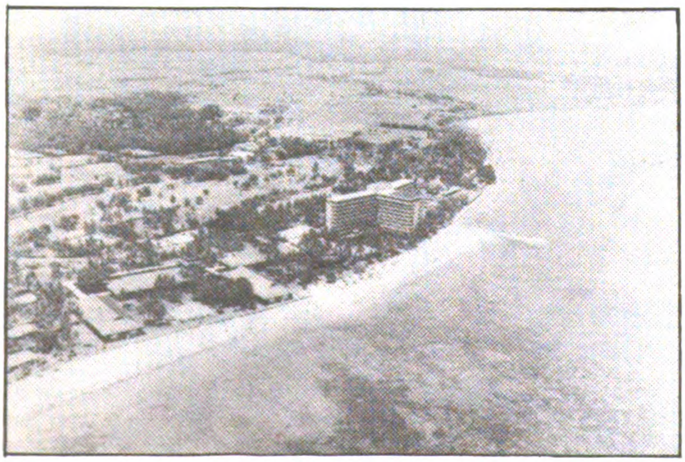

DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN

HOTEL BALI BEACH

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

HOTEL BALI BEACH

SANUR - BALI INDONESIA

PHONE : 8511 TELEX : 35129 & 35133

Golkar Wadah Manusia Yang Sanggup Berkarya Nyata

Ketua Umum DPP Golkar berkunjung ke Jawa Barat

Tanggal 24 dan 25 Januari yang lalu Ketua Umum DPP Golkar mengadakan kunjungan akhir pekannya di Jawa Barat, yakni di wilayah Kabupaten dan Kodya Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Seperti biasanya, kunjungan padat-acara itu diwarnai dengan pertemuan tatap muka dan dialog, peresmian-peresmian, pemberian bantuan dan lain-lain yang kesemuanya itu tidak terlepas dari upaya pensuksesan Tri Sukses Golkar.

Cukup menarik untuk dicatat bahwa dalam kunjungannya ke Jawa Barat kali ini, Ketua Umum DPP Golkar dapat bertatap muka langsung dengan seluruh pengurus Golkar se propinsi Jawa Barat, baik Dewan Pertimbangan maupun para Dewan Penasehat se Jabar, maupun pengurus DPD-I Jabar serta Pimpinan DPD-DPD tingkat II, bahkan sampai kepada para Komisaris Kecamatan se Jawa Barat. Semuanya berkumpul di Sukabumi menyambut kedatangan Ketua Umumnya.

Berkumpul di Sukabumi.

Meresmikan monumen Bojongkokosan.

Digitized by Google

Dalam hubungan ini Ketua Umum menyatakan rasa terharu sekaligus bangga, karena peristiwa seperti itu jarang terjadi dalam kunjungan-kunjungannya selama ini. "Hal ini merupakan bukti bahwa kita telah benar-benar siap mengabdi demi kelangsungan Pembangunan, dan siap mensukseskan Pemilu 1987 bagi kemenangan Golkar," ujar Ketua Umum. Dikatakan pula bahwa karena Golkar adalah kekuatan sosial politik terbesar yang ada dalam barisan terdepan dalam kelahiran Orde Baru, maka kemenangan Golkar berarti kemenangan Orde Baru.

Di tiap kesempatan dalam kunjungannya di Sukabumi maupun Cianjur, Ketua Umum DPP Golkar selalu menekankan pentingnya kerja keras. "Kita harus kerja keras, jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan isi Ikrar Panca Bhakti yang kita hayati bersama," tandasnya. "Perjuangan kita adalah perjuangan pengabdian, karena itu tidak dibayar. Semua pengurus dari pusat pun tidak dibayar. Semua itu karena semangat mengabdi kepada Nusa dan Bangsa, sebagai ungkapan rasa hormat kepada para pendahulu kita yang telah memerdekakan Negeri tercinta ini," ungkap Ketua Umum. "Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan manusia-manusia yang sanggup bekerja keras, jujur dan bertanggung jawab. Golkar tampil sebagai wadah manusia-manusia yang sanggup berkarya nyata demi kelangsungan pembangunan." Di Kabupaten Sukabumi Sudharmono SH meresmikan Monumen Bojongkokosan, disaksikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan dan para warga Golkar Jawa Barat bertempat di lapangan Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda. Pada kesempatan lain Sudharmono SH menyerahkan surat-surat Keputusan Presiden tentang bantuan untuk pembangunan Mesjid pondok pesantren Masarratul Muta'alimin di desa Banten Kecamatan Kaseman Kabupaten Serang sebesar 7 juta rupiah, pembangunan Mesjid Jamie Nurul Iman desa Barengkok Kabupaten Ciamis sebesar 10 juta rupiah, Mesjid Jami Al-Inayah di desa Kemiri Kabupaten Tangerang sebesar 7,5 juta rupiah, Mesjid Nurul Huda di Kabupaten Kuningan sebesar 8 juta rupiah, Mesjid Al Hidayah Kompleks Perumnas Sarijadi Bandung sebesar 10 juta rupiah, Mesjid Jiyatul Muttaqin di Kabupaten Pandeglang 10 juta rupiah, Mesjid Jami kampung Muhara Tasikmalaya 10 juta rupiah, Mesjid Al Hidayah Kabupaten Majalengka 7 juta rupiah, serta untuk pembangunan di bidang keagamaan di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor masing-masing sebesar 10 juta dan 15 juta rupiah. Surat-surat Keputusan bantuan Presiden itu diterimakan melalui Kepala Daerah masing-masing. Sebuah lembaga swasta yakni Asosiasi Penyalur Gula Pasir dan Terigu (APEGTI) Jawa Barat pada kesempatan itu melalui Ketua Umum DPP Golkar juga menyerahkan bantuan kepada DPD Golkar Jawa Barat berupa sebuah mobil L-300, sebuah mesin fotocopy, 24 buah mesin ketik, sebuah mesin stensil, serta ribuan bendera Merah Putih, bendera Golkar, kaos oblong, jaket kuning berlogo Golkar, di samping uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Pada hari yang sama di desa Cikaret Kecamatan Sukaraja Sukabumi Sudharmono SH selaku Menteri Sekretaris Negara meresmikan mesjid yang didirikan

N.V. PERCETAKAN BALI

ANGGOTA:

Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (P.P.G.I.)

DAERAH BALI

Alamat : Jl. Gajah Mada I/1 - Denpasar, Bali; Telepon : 22441, 26631

SEGENAP KARYAWAN / KARYAWATI

N.V. PERCETAKAN BALI

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR, SEJAHTERA LAHIR BATIN

Melayani kebutuhan anda akan barang-barang :
Cetakan (letter press & offset), Penjilidan, Alat-alat tulis/kantor dan foto copy kilat.

Digitized by Google

atas bantuan Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila, di samping menyerahkan bantuan Presiden untuk pembangunan Pondok Pesantren Miftahul Huda.

Seolah sudah menjadi acara melekat, dalam kunjungan-kunjungan Ketua Umum DPP Golkar di daerah-daerah, maka kehadiran Sudharmono SH di Jawa Barat kali ini juga dimanfaatkan untuk meresmikan proyek Listrik Masuk Desa, yakni di desa Cidadap Pelabuhan Ratu, dengan disaksikan oleh ribuan massa Golkar termasuk unsur KORPRI-nya. Pada kesempatan yang sama Sudharmono juga menyerahkan bantuan berupa sebuah pesawat TV dan 80 batang bibit pohon beringin kepada DPD Golkar Kabupaten Sukabumi.

Hari Sabtu malam itu Ketua Umum beserta Ibu EN Sudharmono dan rombongan beristirahat dan menginap di Samodra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu setelah bekerja keras menjalani acara yang padat seharian. Ikut serta dalam rombongan Ketua Umum kali ini antara lain Ny. Moerpratomo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu, Akbar Tanjung, Tato S. Pradjamanggala, Sukarton Marmosudjono, R. Subono, Sudharsono, dan tak ketinggalan Edy Sud dengan para artis Safari.

Ikrar Ulama NU

Minggu pagi bertempat di Gedung Juang Sukabumi, Ketua Umum DPP Golkar bersilaturahmi dengan kurang lebih lima ratus warga Tam'iyyah Nahdlatul Ulama Kabupaten dan Kodya Sukabumi. Di tempat ini disaksikan oleh para pengurus DPD-I Golkar Jawa Barat, DPD II Kodya maupun Kabupaten Sukabumi serta warga Golkar lainnya, Ketua Umum DPP Golkar menerima kebulatan tekad para ulama NU tersebut yang menyatakan menyalurkan aspirasi politik dalam Pemilu 1987 melalui Golongan Karya. Oleh Ketua Umum dalam sambutannya dikatakan bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa yang bersejarah dan mengharukan. Pada kesempatan yang sama Ketua Umum menyerahkan 1000 batang bibit pohon buah-buhan kepada warga Golkar setempat melalui Ketua DPD-I Golkar Kodya Sukabumi.

Dari Gedung Juang Sukabumi perjalanan dilanjutkan menuju Kabupaten Cianjur. Kibaran bendera-bendera Golkar serta lambaian tangan jajaran pemuda Golkar di sepanjang jalan memasuki wilayah Kabupaten Cianjur untuk menyambut Ketua Umum dan rombongan cukup menyemarakkan suasana hari itu. Gedung Generasi Muda Cianjur yang berkapasitas 5000 orang siang hari itu dipenuhi oleh para warga Golkar Cianjur. Termasuk di antara mereka adalah para Komisaris Kecamatan dan Komisaris Desa se Cianjur. Di Gedung ini Ketua Umum memberikan sambutan dan pengarahannya kepada warga Golkar Cianjur. Dalam sambutannya Ketua Umum menggugah kembali semangat para warga Golkar setempat untuk memenangkan Pemilu 1987, setelah mengalami kemerosotan prosentasi hasil Pemilu di Cianjur berturut-turut dalam 2 kali Pemilu yang lalu. Pada kesempatan yang sama Sudharmono SH menyerahkan Surat Keputusan Presiden tentang bantuan untuk pembangunan Mesjid Jami Darul Falah di Kecamatan Cibeber Cianjur.

Setelah istirahat untuk shalat dan makan siang di pendopo Kabupaten Cianjur, Ketua Umum dan rombongan berangkat menuju Sindanglaya Kecamatan Ciranjang untuk sekali lagi meresmikan proyek Listrik Masuk Desa yang meliputi 37 desa dari sepuluh kecamatan. Ribuan warga Golkar terdiri dari unsur-unsur KORPRI, PGRI, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, AMPI, AMS, serta para kader dan warga Golkar setempat menghadiri acara peresmian tersebut. Dalam sambutannya Ketua Umum menandaskan perlunya kita mensyukuri hasil yang dicapai, serta membantu program Pemerintah yang selalu menerima usul Golkar dalam melaksanakan prioritas pembangunan termasuk proyek listrik masuk desa ini. "Mensyukuri keberhasilan pemerintah Orde Baru harus diwujudkan dalam bentuk kerja keras dan berkarya nyata, sesuai dengan Ikrar Panca Bhakti yang telah kita hayati bersama," serunya. Kepada masyarakat Sindanglaya siang itu diserahkannya bantuan berupa sebuah pesawat TV.

Acara terakhir dari kunjungan Ketua Umum di Cianjur adalah peresmian penggunaan Mesjid As Suhada di desa Cibalagung Kecamatan Mande. Mesjid yang indah dan megah ini dibangun atas usaha swadaya masyarakat setempat yang diprakarsai oleh Dudung Kusmayadi. Biaya sebesar lebih 300 juta rupiah telah dikeluarkan untuk membangun mesjid tersebut. Ketua Umum Sudharmono mengungkapkan penghargaan dan rasa bangga atas hasil yang dicapai swadaya masyarakat dalam membangun tempat ibadahnya itu. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH.

Petang hari itu juga Ketua Umum DPP Golkar bersama rombongan berangkat kembali menuju Jakarta, dan berakhir pulalah safari akhir pekan di Jawat Barat bulan Januari itu. □ RENDY MS/TAP

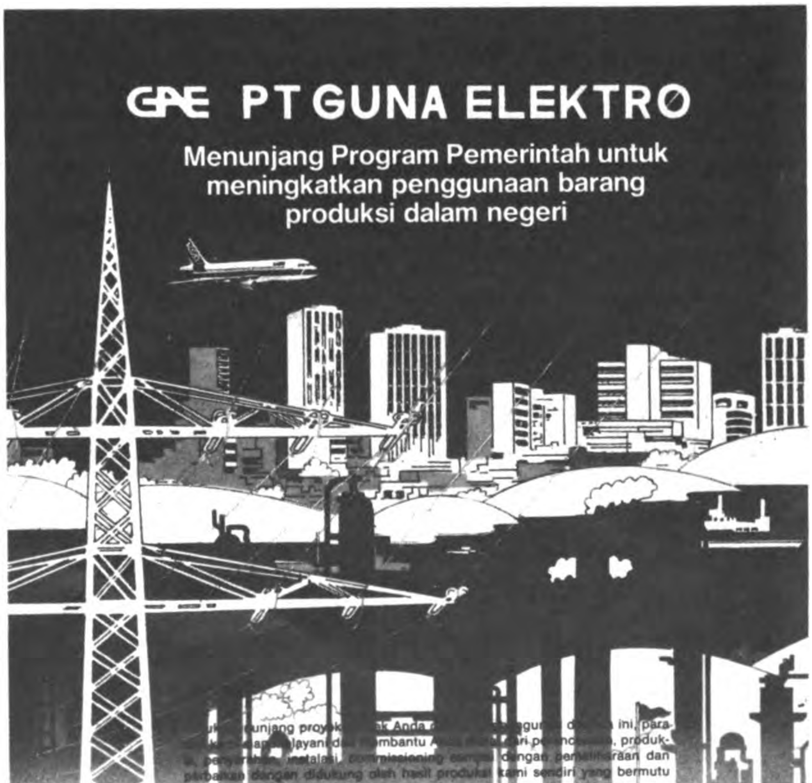

Untuk keterangan selengkapnya, hubungi :
• Jakarta : Jl. Hayam Wuruk 3, Telp. 3800014 (13 saluran) • Surabaya : Jl. Panglima Sudirman 16, Telp. 46579, 41046 • Medan : Jl. Pemuda 19 F&G, Telp. 326120, 327613

Digitized by Google

Mengintip Kesiapan Jateng

Pelaksanaan Pemilu tinggal dihitung puluhan hari lagi. Mendekati "pesta demokrasi" itu, para pengurus DPP Golkar kian disibukkan oleh berbagai kegiatan dalam rangka persiapan penggalangan dan pemantapan kader-kader di daerah. Salah satu kegiatan itu adalah penataran juru kampanye (jurkam) yang sekarang dilaksanakan di daerah-daerah tingkat satu dan dua di seluruh Indonesia.

Memonitor persiapan kader Jateng.

Dalam rangka memonitor sejauh mana pelaksanaan penataran jurkam dan persiapan kader Golkar di daerah untuk menyambut pesta demokrasi nanti, akhir bulan lalu, Ketua DPP Golkar, Ny. A.S. Moerpratomo beserta rombongan, mengadakan kunjungan kerja ke daerah Jawa Tengah. Kunjungan di mulai dari Salatiga, dengan acara penutupan penataran jurkam Golkar DT I Jateng.

Kepada sekitar 700 peserta penataran yang terdiri atas para pimpinan DPD II Golkar se-Jateng, para calon legislatif dan kader fungsional Golkar Jawa Tengah, Ny. Moerpratomo mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu mata rantai penting yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan Golkar dalam rangka menyukseskan Pemilu mendatang.

Menurut Ketua DPP Golkar ini, perlu disadari bersama bahwa perkembangan kesadaran politik masyarakat sudah sedemikian tingginya, sehingga usaha-usaha untuk memenangkan hati nurani rakyat dalam Pemilu tidak hanya dilaksanakan pada waktu kampanye saja, tetapi melalui proses pembinaan politik yang berkesinambungan. Oleh sebab itu, ujarnya lagi, penetapan materi kampanye harus memperhatikan kondisi dan situasi daerah setempat namun tetap tidak terlepas dari sasaran perjuangan.

Agar kegiatan kampanye dapat berjalan dengan baik, Ny. Moerpratomo berpesan agar para jurkam berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Kampanye harus dilaksanakan secara terbuka dan langsung, serta didasari oleh nilai-nilai moral, etika dan tanggung jawab yang berlandaskan pada falsafah hidup bangsa, yakni Pancasila, pesannya.

"Kegiatan kampanye", ujarnya, "hendaknya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Gunakan kata-kata sederhana untuk menyampaikan materi kam-

Agar berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Digitized by Google

panye sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh rakyat". Di samping itu, kampanye juga harus mampu menciptakan suatu pengaruh poltik yang kuat sehingga hal-hal yang diungkapkan menghasilkan keterkaitan dengan massa yang digalang, baik dalam fikiran maupun tindakan. Namun, pesannya lagi, sikap dan tingkah laku yang memancing antipati rakyat, seperti sikap *overacting* dan konfrontatif terhadap kampanye kontestan lain, perlu dihindari.

Bahkan Ny. Moerpratomo juga berpesan agar setiap anggota dan kader Golkar mampu menahan diri untuk tidak terpancing oleh provokasi pihak lain. Materi kampanye harus mampu menjawab permasalahan yang merupakan pengejawantahan dari harapan dan aspirasi rakyat banyak. Ajakan kepada masyarakat untuk memenangkan Golkar, jangan didasarkan pada pengobralan janji-janji muluk yang sukar dipenuhi, kata Ketua DPP Golkar itu.

Acungkan jempol

Dari Salatiga, Ny. Moerpratomo beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke

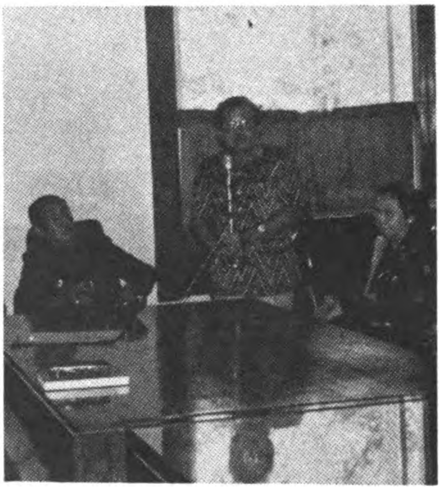

Mendapat acungan jempol.

Semarang untuk melihat persiapan dan kesiapan Golkar di daerah itu. Pada pertemuannya dengan para komisaris kecamatan se-Kodya Semarang, Ketua DPP Golkar itu memperoleh gambaran bahwa persiapan penggalangan di daerah ini telah dilakukan dengan mantap. "Untuk daerah Jawa Tengah ini saya pikir patut mendapat acungan jempol", ujarnya.

Penilaian sang Ketua ini rasanya bukan sekedar basa-basi. Jateng memang pantas mendapat salut, jika dilihat dari kesadaran politik rakyatnya yang telah mampu memahami dan mendukung perjuangan Golkar. Contoh kecil saja, dalam dialog dengan para komcat dan komdes se-Kodya Semarang itu, rata-rata mereka sanggup menerangkan dengan lancar hal-hal yang menyangkut jumlah penduduk, jumlah hak pilih, jumlah karakterdes, kader fungsioal, target perolehan suara, jumlah TPS, dan sebagainya.

Bermacam program seperti pasar murah, perang sampah, penghijauan, perbaikan jalan, dan lainnya yang termasuk dalam kegiatan "Operasi Simpatik", juga telah berjalan lancar dan berdayaguna. Ini, tentu saja, menggembirakan. Sehingga tak berlebihan kiranya jika Ny. Moerpratomo memperkirakan bahwa target perolehan suara yang ditetapkan pimpinan pusat untuk Kodya semarang sebesar 61,11%, akan terlampaui. Tentu saja ini merupakan harapan, namun bukan mustahil bisa terwujud.

Dari Kodya Semarang rombongan melanjutkan perjalanan ke kelurahan Gemah, Semarang Timur. Di sini Ketua DPP mengintip pelaksanaan rapat koordinasi tingkat pedesaan (rakordes) yang tengah berlangsung di pendopo kelurahan. Berbagai masalah aktual muncul ke permukaan. Dari soal devaluasi, harga minyak bumi, sampai ke tarif angkutan yang naik, dibicarakan dalam forum desa itu. Suasananya benar-benar demokratis. Pertanda kesadaran politik rakyat yang semakin meningkat.

Memang tidak semua daerah yang dikunjungi memberikan kesan yang menggembirakan. Seperti di kelurahan Wonodri—Sendang, yang menurut komisaris desa (komdes) Golkar di daerah itu; "agak rawan". Pasalnya, kontestan lain telah keburu masuk dengan membagi-bagikan kalendar gratis, kaos oblong dan "alat-alat kampanye" lainnya kepada generasi muda di daerah itu. Harus diakui bahwa Golkar "terlambat" masuk di sini. Meskipun belum tentu harus kalah. Sebab, menurut keterangan sang komdes, generasi tua di daerah ini telah berhasil digalang.

Sungguh menarik mengikuti perjalanan Ketua DPP Golkar ke Jawa Tengah itu. Setidaknya, kunjungan kerja itu telah memberikan masukan-masukan berharga yang diperlukan untuk membuat kebijaksanaan lain demi tercapainya kemenangan Golkar. Tidak hanya ketua DPP yang terkesan oleh persiapan dan kesiapan anggota serta kader Golkar Jawa Tengah itu, para fungsionaris Golkar lainnya yang menyertai kunjungan kerja ketua tersebut seperti Sukamdani Sahid Gito Sardjono, Drs. H. Abu Saeri, Martin Hutabarat SH, dan Ketua Dewan Pertimbangan, H. Ismail, juga menyatakan kekaguman dan rasa salut mereka.

Bravo Jawa Tengah! □ WT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGLI

JALAN BRIGJEN NGURAH RAI NO. 30, BANGLI

MENSUKSESKAN PEMILU 1987

BERARTI IKUT MENEGAKAN NEGARA KESATUAN R.I.

YANG BERAZASKAN PANCASILA

DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

DIBAWAH PEMERINTAH ORDE BARU

Digitized by Google

Jangan Membuat Masyarakat Anti Pati Terhadap Golkar

Minggu malam cuaca di Jakarta tidak menguntungkan. Menjelang magrib, hujan turun dengan kencang. Kendati demikian tidak menggoyahkan niat para kader Golkar bertemu dengan Ketua Umum Golkar Sudharmono.

Hingga pukul 8.00 Wib — waktu dimulainya acara. Hujan masih belum juga mau berhenti. Sementara kader-kader Golkar terus saja memenuhi gedung olahraga Jakarta Barat yang memang sudah disediakan. Tidak kurang dari 4000 kader Golkar meneriakkan yel-yel Hidup Golkar sewaktu Ketua Umum memasuki ruangan tersebut.

Hari itu, 8 Februari, dua pekan lalu, merupakan tindak lanjut dari serangkaian kunjungan Ketua Umum Golkar untuk dapat bertemu dan bertatap muka dengan warganya. Kunjungan Ketua Umum didampingi Ibu EN. Sudharmono, beserta para fungsionaris Golkar lainnya ke wilayah itu untuk mengadakan silaturahmi, bertatap muka secara langsung antara pimpinan dan anggautanya. Selain itu juga berkeinginan untuk melihat dari dekat persiapan dari pemilu dari daerah itu yang tinggal 74 hari lagi.

Dengan derasnya hujan yang mengguyur, serta berjubelnya masa Golkar di gedung tersebut, H. Eddy Ruchiyat Shoheh, Ketua Dewan Penasehat Golkar Tk II Jakarta—Barat, pantas membuat optimis. Bahwa target 65,65 persen dalam pemilu yang akan berlangsung tidak lama lagi itu dapat dicapai.

Untuk mengecek kebenaran dari hasil laporan yang diberikan ketua pelaksana tersebut, Sudharmono memanggil salah satu Komisaris kecamatan Kebon Jeruk. Dan komisaris itu mendatangi Ketua Umum kemudian bersalaman.

Dan sejumlah pertanyaan diajukan kepada komisaris tersebut. Misalnya, berapa jumlah penduduk Kebon Jeruk, berapa anggauta Golkar, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Umum itu dijawab dengan lancar.

Kemudian melalui Komcat, dipanggil pula, komisaris desa Meruya Udik. Dengan suara lantang, segala pertanyaan dari ketua Umum itu dijawab dengan lancar pula. Dan setelah itu Komdes tersebut diminta oleh Ketua Umum memanggil salah satu warganya yang hapal dalam mengucapkan Panca Bakti. Setelah dipanggil dan datang, ternyata adalah kader yang membaca Panca Bakti pada acara pembukuan tersebut. "Wah kalau yang ini tidak usah saja", kelakar Ketua Umum.

Setelah itu Ketua Umum memanggil Ketua Ampi wilayah tersebut dan juga salah satu dari anggauta Dharma Wanita. Dalam kesempatan itu Ketua Umum memberikan sumbangan seperangkat drumband kepada Ampi dan setelan baju untuk anggauta Dharma Wanita yang berjumlah 75 orang itu dengan bantuan 5 ribu rupiah per orang.

Mengajak Kompetisi

Laporan yang disampaikan Ketua Pelaksana malam itu, mengenai persiapan menjelang Pemilu yang tinggal sebentar lagi serta persiapan sampai ke TPS, cukup mengesankan Ke-

Digitized by Google

Perlu bukti.

tua Umum.

Meskipun persiapan yang dilakukan daerah itu sudah sedemikian rupa, Ketua Umum mengharapkan agar daerah tersebut tidak boleh lengah. Serta tidak boleh berpuas diri. "Pokoknya kita perlu bukti, yaitu pada tanggal 23 April nanti", ujar Ketua Umum.

Memang Jakarta Barat, dalam pemilu tahun lalu, menunjukkan hasil yang paling tinggi ketimbang wilayah lain. Melihat dari hasil yang dicapai oleh Jakarta Barat ini, Ketua Umum merasa iri. Kemudian dia mengajak semua wilayah yang ada di Jakarta untuk saling berlomba dalam pemilu nanti supaya mendapat jumlah suara yang sebanyak-banyaknya.

Saya yang ada di Jakarta Selatan, harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat mengejar hasil yang dicapai Jakarta—Barat. Pokoknya kita harus bekerja lebih keras lagi, yaitu bekerja sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang dimungkinkan", ujar Ketua Umum.

Dalam kesempatan itu, Sudharmono dihadapan kader-kader Golkar juga memberikan pandangan tentang keGolkaran. Golkar suatu organisasi politik yang berafiliasi kepada kekaryaan itu dalam berwawasan kebangsaan, tanpa membeda-bedakan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Misalnya tentang adat-istiadat, suku, agama, golongan dan yang lain sebagainya.

Golkar menampung dan memberi keleluasaan kepada siapa saja yang memberikan karya-karya nyatanya untuk berkembang. Hal ini sesuai dengan doktrin Golkar "Karya Siaga Gatra Praja" artinya, Golkar menghimpun karya-karya nyata di segala bidang, sehingga nantinya dapat digunakan untuk bekal hidup didunia dan persiapan yang lestari di akhirat.

"Untuk itu, buat apa kita mensukseskan Golkar?", tanya Sudharmono SH. Secara obyektif, Golkar dalam upayanya untuk mencapai cita-cita bangsa, dengan mengisi pembangunan, tidak saja mempertahankan ancaman dari ideologi lain, dan mengamalkannya, tapi Golkar juga menghimpun kekuatan-kekuatan pembangunan di segala bidang.

Selain itu di hadapan warga Golkar di wilayah Jakarta—Barat Sudharmono juga memberi pengarahan, agar di dalam pelaksanaan pemilihan umum nanti supaya bekerja sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Selain itu dalam pelaksanaan di lapangan nanti kader-kader Golkar jangan sampai merusak nama dan citra Golkar, serta membuat anti pati masyarakat kepada Golkar. □

Badrul Mustofa

KAMI MENAWARKAN
HARGA KHUSUS
UNTUK TAMU DOMESTIC

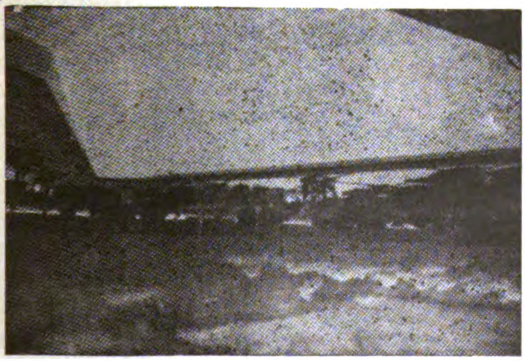

Bali Anggrek Inn

PANTAI KUTA, BALI - P.O. BOX : 435, DENPASAR
TELP. : (0361) 51265, 51266 - TELEX : 35256 BOI DPR

- LOKASI DI PANTAI KUTA, DENGAN 62 DELUXE ROOM
- SEMUA KAMAR DILENGKAPI AC, WATER HEATER, BATH TUB, REFRIGERATOR, DAN TELEPON UNTUK KENYAMANAN TAMU SEMUA.
- SATU-SATUNYA KOLAM RENANG DI TINGKAT ATAS DI BALI MEMBERIKAN PANDANGAN LEPAS KE LAUT SERTA PRIVACY UNTUK TAMU KITA.

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA,
SEGENAP WARGA/KELUARGA BESAR PERUSAHAAN *BALI ANGGREK INN*
SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987
DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

Kampanye Dan Pendidikan Politik

Salah satu kegiatan cukup penting dan menarik dari 12 kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebelum dilakukannya Pemungutan suara adalah Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirobah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1985 menegaskan bahwa : "Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum, 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 13 a mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia."

Kampanye Pemilihan Umum memang suatu kegiatan yang menarik, penuh warna dan nuansa. Bila membaca atau mendengar kata Kampanye Pemilihan Umum, maka terbayang hiruk pikuknya Rapat Umum dengan pidato yang berapi-api, pawai yang hingar bingar, keramaian umum, pesta umum dan pertemuan umum yang meriah diwarnai oleh simbul-simbul peserta Pemilihan Umum, poster-plakat, slogan/semboyan terpasang di mana-mana secara menyolok. Itulah antara lain bentuk kegiatan kampanye Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1971, 1977, 1982 yang lalu telah memperkaya pengalaman bangsa kita dalam melaksanakan pesta demokrasi dan dijadikan pelajaran berharga untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum tahun 1987 nanti.

Kampanye Pemilihan Umum 1987 nanti diharapkan lebih memberi makna kualitatif dalam mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila. Kampanye Pemilihan Umum nanti agar benar-benar merupakan salah satu sarana pendidikan Politik bagi rakyat, sehingga rakyat memiliki sikap politik yang semakin matang. Dan pilihan mereka nanti kepada peserta Pemilihan Umum benar-benar didasari oleh pertimbangan-pertimbangan rational dan penuh tanggung jawab bagi masa depan bangsanya.

Untuk itulah Undang-Undang menggariskan bahwa tema Kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Dengan demikian rakyat pemilih akan memperoleh gambaran yang terang mengenai pilihan-pilihan apa saja yang ditawarkan oleh masing-masing peserta Pemilihan Umum.

Selama 25 hari mulai tanggal 24 Maret dan berakhir tanggal 17 April 1987 yaitu waktu kampanye yang ditentukan dalam Keputusan Presiden nomor: 13 tahun 1986

Oka Mahendra.

yo Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1986, benar-benar akan diisi atau diwarnai oleh alternatif program yang menampilkan aliran pemikiran baru sebagai artikulasi dan agregasi aspirasi masyararkat maupun sebagai tanggapan dan arahan dalam menampung dinamika perobahan masyarakat yang menghendaki kehidupan lebih sejahtera di masa depan.

Kampanye Pemilihan Umum sebagai kegiatan formal yang dijamin Undang-Undang untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya bagi setiap peserta, memang tak lepas dari siasat, taktik dan strategi untuk mempengaruhi pemberi suara, merangsang perhatian mereka maupun untuk meningkatkan identifikasi dan citra peserta Pemilihan Umum di mata para pemberi suara, menyebar luaskan pandangan-pandangannya tentang berbagai masalah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semua itu hendaknya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, kelestarian Pancasila dan kesinambungan Pembangunan Nasional. Atau dengan kata lain kampanye Pemilihan Umum harus meningkatkan keterlibatan setiap warga negara terhadap aspirasi nasional bangsanya.

Sebab dengan demikian kampanye Pemilihan Umum sebagai sarana pendidikan Politik akan memperoleh maknanya yang nyata di mana rakyat semakin dibangkitkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa seperti digariskan dalam GBHN.

Kampanye Pemilihan Umum 1987 nanti yang dilaksanakan dalam suasana telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara tidak lagi diwarnai oleh pola-pola kampanye yang merangsang emosi dan kebringasan yang dapat melahirkan tindakan-tindakan yang merusak tujuan Pemilihan Umum itu sendiri. Tetapi Kampanye Pemilihan Umum yang benar-benar sebagai sarana pendidikan politik "yaitu pendidikan yang secara umum dimaksudkan untuk menanamkan pengertian bernegara dan memantapkan penghayatan terhadap Pancasila dan UUD 1945", sebagaimana ditegaskan oleh Bapak L.B. Murdany Panglima ABRI di depan Penataran Juru Kampanye Tingkat Pusat Golongan Karya Angkatatn II tanggal 8 Desember 1986.

Kampanye Pemilihan Umum membentuk kondisi politis psikologis tertentu yang secara positif dapat diarahkan untuk "penggalangan sikap ke Indonesiaan dalam arti menyeluruh, sehingga apa yang sehari-hari diungkapkan sebagai kepribadian Indonesia tidak akan mudah terkikis oleh arus budaya dan wawasan asing yang mungkin menyertai hasil-hasil kemajuan modernisasi", seperti ditegaskan oleh Prof. Fuad Hasan dalam pengarahannya berjudul Upaya Pendidikan Nasional dalam kaitan dengan Pembinaan Ketahanan dan Pertahanan Nasional tanggal 15 November 1986. Lebih lanjut Prof. Fuad Hasan menyatakan sebagai berikut: "Erat kaitannya dengan itu adalah dimantapkannya orientasi ideologis sesuai dengan Pancasila. Kesadaran kepribadian Indonesia yang tangguh dan mantapnya orientasi ideologis sesuai dengan Pancasila itu menjadi tujuan kebijakan pendidikan, karena dengan demikian setiap manusia Indonesia yang terdidik sekaligus terbina sebagai unsur-unsur ketahanan yang tegar dan pada gilirannya sebagai keseluruhan menyumbang pada ikhtiar peningkatan ketahanan nasioal secara kuantitatif dan kualitatif".

Pendidikan Politik bukan saja menjadikan setiap warga negara sebagai warga negara yang baik, tetapi warga negara yang terlibat pada kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kondisi dan tahapan-tahapan perjuangan bangsanya.

Golongan Karya sebagai kekuatan sosial politik yang selalu mendapat kepercayaan rakyat dalam 3 kali Pemilihan Umum yang telah lalu siap untuk menjadi pelopor dalam pelaksanaan kampanye sebagai sarana pendidikan politik. Golongan Karya menyadari arti pentingnya meningkatkan kesadaran politik rakyat. Sebab hanya dengan rakyat yang sadar politiklah yang akan menjadi kekuatan pendukung, pelaksana dan penjaga demokrasi. □

AA Oka Mahendra

Digitized by Google

Murah Meriah, Nasi Rp. 100,- Per Bungkus

Agar Masyarakat Kenal Golkar Lebih Dekat

Dengan uang Rp. 100.- masyarakat dapat menikmati nasi bungkus yang dijual murah oleh ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi Persatuan Istri Purnawirawan ABRI (PERIP). Sekitar 1500 bungkus nasi yang berisi telur, tempe, tahu dan osengan mihun, akhir bulan Januari pagi itu, dalam waktu sekejab habis "diserbu" masyarakat yang berkumpul di sekitar Pasar Cakung Jakarta Timur.

Sekitar pukul 10.00 pagi itu ibu-ibu yang berseragam ungu muda mulai mangkal di halaman Pasar yang becek karena hujan yang terus mengguyur Ibukota pada malam itu. Sementara ibu-ibu sibuk mempersiapkan dagangannya, masyarakat sudah antri berjubel akan membeli "Penjualan Nasi Murah" masakan ibu-ibu itu.

Penjualan nasi murah itu diselenggarakan oleh PERIP bekerjasama dengan keluarga besar Golkar dalam rangka penggalangan, guna mensukseskan Pemilu '87 mendatang, yang waktunya tinggal beberapa puluh hari lagi. Lain dari pada itu acara penjualan nasi murah ini merupakan kesempatan bertemu langsung kader-kader Golkar dengan warga, dengan maksud agar masyarakat bisa mengenal Golkar lebih dekat.

Dalam kesempatan itu Ketua Umum Perip Ny. Sumario, yang Istri Jenderal Purnawirawan yang kini Anggota DPR itu, menjelaskan cara-cara menggunakan hak pilih warga masyarakat secara tepat dan benar untuk dilakukan pada hari H 23 April mendatang. Ini bukan kampanye, katanya di tengah berjubelnya para pembeli dan pedagang lain yang tak kebagian membeli nasi murah, beginilah cara mencoblos yang benar, sambil diperagakan. "Ini merupakan salah satu perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila", ujarnya. Oleh karena itu, masyarakat harus berlomba mengamalkan Pancasila di semua bidang kehidupan, sehingga wujud nyata dari pengamalan itu dapat dirasakan.

Selama berkiprahnya orde baru di bawah pimpinan nasional Jenderal Purnawirawan Soeharto yang juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Golkar, kata Ny. Sumario, pembangunan dibidang Sandang, Pangan dan papan, selalu diutamakan demi kesejahteraan masyarakat luas. Semua itu sesuai dengan Doktrin Golkar "Karya Siaga Gatra Praja". Golkar ingin secara terus menerus melaksanakan pembangunan sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakyat.

Penyelenggaraan acara dengan penjualan nasi murah ini dilaksanakan di 5 wilayah DKI Jaya, dengan waktu bervariasi hingga berlangsungnya saat pemilu yang akan datang. Seperti halnya di Jakarta Pusat acara tersebut diselenggarakan dengan pasar murah, diperluas, yang melibatkan Pt Kedaung Group, Pt Unilever, Pt Industri Sandang, Kecap ABC, Koperasi DPD Tk II Golkar, Bhayangkari, PKK, berlangsung pada 7 Pebruari lalu, bertempat di Pasar Gunung Sahari Utara dan dibuka oleh Ketua DPP Golkar Ny. AS Moerpratomo. ☐ wt

Digitized by Google

Pejuang Afghanistan dan Golkar

Indonesia Konsisten Menolak Penyerbuan dan Pendudukan Wilayah Bangsa Lain

Indonesia tetap menyokong.

Indonesia tetap konsisten pada sikapnya, menolak segala bentuk penyerbuan dan pendudukan wilayah bangsa lain yang berdaulat. "Kita juga membela kepentingan serta perjuangan bangsa Afghanistan yang tengah membela kehormatan bangsa dan negaranya. Indonesia tetap menyokong penuh perjuangan kaum Mujahidin. Karena itu DPP GOLKAR akan segera mengadakan kontak dengan Pemerintah Indonesia, agar bantuan bagi para pejuang Mujahidin dapat lebih ditingkatkan".

Sekretaris Jenderal DPP Golongan Karya, Ir. Sarwono Kusumaatmadja mengatakan hal itu kepada pemimpin gerilyawan Mujahidin Afghanistan, H. Mangal Hussain, selaku Ketua Perwakilan Mujahidin untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Kualalumpur serta Wakil Ketua Bidang Politik Mujahidin di Peshawar, Yanbas Safaraz Mohammed Rasoul. Kedua tokoh Mujahidin itu menemui DPP GOLKAR yang diterima oleh Sekjen DPP GOLKAR Ir. Sarwono, didampingi oleh Akbar Tanjung, Anang Adenansi dan K.H. Qodratullah serta Marzuki Darusman dari FKP /Komisi I DPR, tanggal 2 Februari 1987 lalu.

Menurut Sarwono, sikap ini penting, soalnya jika Afghanistan jatuh, dampaknya secara geo-politis bagi Asia Tengah akan sangat luas. Masalah lain yang perlu diperhatikan, Soviet selalu dihadapkan pada ancaman es yang menutupi lautannya. Sehingga dengan segala cara mereka berupaya merembet ke Selatan, ujar Sarwono. Para pejuang Mujahidin itu, sependapat dengan Sarwono tentang ekspansi Soviet, sambil menguraikan tujuan pendudukan atas Afghanistan oleh Uni Soviet.

Mangal Hussain menjelaskan bahwa tujuan Soviet menduduki Afghanistan adalah, *pertama* karena mereka punya masalah dengan masyarakat Islam di negerinya sendiri, terutama wilayah Asia Tengah Soviet, yang berbatasan dengan wilayah Afghanistan. Untuk itu mereka berusaha menciptakan situasi aman di daerah perbatasan tersebut. Karena takut keadaan di Afghanistan yang berpenduduk Islam itu dapat mempengaruhi warga negara Soviet yang beragama Islam itu. *Kedua,* kekayaan alam Afghanistan cukup banyak, hanya Uni Soviet yang mengetahuinya. Karenanya, mereka ingin menguasai Afghanistan agar dapat mengeruk kekayaan alam tersebut. *Ketiga,* Uni Soviet ingin menjadikan Afghanistan sebagai basis ekspansinya ke Teluk Persia dan Samudra Hindia, daerah-daerah yang bebas dari ancaman pembekuan lautan oleh es.

Tolak tawaran Soviet

Mangal Hussain mengatakan, tawaran berunding oleh pihak Uni Soviet hanya alat propaganda yang bertujuan mengelabui serta mengalihkan pendapat umum dunia, yang terus mengecam tindakan Soviet itu. Itulah sebabnya, pihak Mujahidin tetap menolak tawaran perundingan pihak Soviet apapun dalihnya.

"Kami akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai Soviet angkat kaki dari bumi Afghanistan", kata Mangal Hussain. Perundingan dengan Soviet hanya suatu tipu muslihat belaka, katanya.

Menurut Mangal Hussain, selama 7 tahun pendudukan Soviet atas Afganistan, tidak kurang dari 1 juta penduduk Afghanistan cacat, dan sedikitnya 5 persen penduduk Afghanistan terbunuh, termasuk anak-anak. Ia mengatakan, di Afghanistan selama pendudukan Soviet, setiap keluarga pasti kehilangan satu anggotanya selama pendudukan tersebut. Tidak ada keluarga yang tidak kehilangan keluarganya, walau hanya satu sekalipun. Ini membuktikan, betapa kejamnya Soviet selama invasinya atas Afghanistan, katanya.

Kedua pemimpin Mujahidin itu menyampaikan terima kasihnya atas dukungan yang diberikan Indonesia bagi perjuangan mereka selama tujuh tahun ini. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan bersahabat itu diakhiri dengan penyerahan cendramata oleh Sekjen DPP GOLKAR, Ir. Sarwono Kusumaatmadja kepada para pemimpin Mujahidin itu. □

Anang.A

Digitized by Google

Golkar Dukung Keberhasilan Keluarga Berencana

Sebelumnya tidak pernah terbayang, bahwa nantinya mereka itu bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan Kepala Negara atau juga menteri. Dan tidak terbayang pula, bahwa mereka itu dapat datang ke Jakarta menggunakan pesawat serta tidur di hotel mewah dengan pelayanan yang menyenangkan.

Hal ini dapat terlaksana berkat keuletan mereka dalam menjalankan bagian program pembangunan. Mereka itu adalah peserta aktip Keluarga Berencana Lestari— mereka adalah peserta akseptor yang aktip dan ikut berpartisipasi dalam program kependudukan.

Kini upaya yang mereka lakukan dalam menjalankan program pemerintah, khususnya Keluarga Berencana dengan penuh semangat dan dedikasi yang tinggi, menghantarkan mereka untuk bertemu Kepala Negara sebagai tanda penghargaan.

Menjelang akhir Januari lalu, 300 pasang Keluarga Berencana (KB) Lestari dari daerah tingkat II seluruh Indonesia, diundang datang ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk mendapatkan penghargaan atas keteladanan mereka ikut berpartisipasi dalam menekan lajunya pertambahan penduduk.

Kemudian untuk satu hari berikutnya para peserta KB Lestari — yang kebanyakan dari kalangan petani, pedagang, serta sebagian pegawai negeri — Kepala BKKBN, Dr. Haryono Suyono meminta kesediaan Ketua Umum Golkar bisa memenuhi keinginan jumpa para peserta KB Lestari.

Mereka — peserta KB Lestari itu dengan menggunakan pakaian sederhana, sebagian lainnya menggunakan pakaian adat, diterima oleh Ketua Umum pukul 8.00 wib di Krida Bhakti. Kendati mungkin letih karena yang seharian melakukan perjalanan melihat kota Jakarta, namun pada malam itu para peserta KB Lestari, menunjukkan wajah gembira. Selain dapat bertemu dengan Ketua Umum Golkar, dan sekaligus dihibur artis-artis Golkar.

Dihadapan para peserta KB Lestari, Ketua Umum mengatakan merasa bangga. Dan tidak lupa mengucapkan selamat atas partisipasi mereka dalam ikut melaksanakan program pembangunan, khususnya dalam pengendalian masalah kependudukan.

Menyinggung upaya mensukseskan pelaksanaan Keluarga Berencana, Ketua Umum menegaskan dukungan Golongan Karya. Golkar sebagai salah satu kekuatan Orde Baru, memberikan penghargaan dan dukungan kepada para pelaksana-pelaksana di bidang tersebut.

Hanya akan berarti apabila lestari.

Dikatakan oleh Ketua Umum, kelihatannya program Keluarga Berencana itu sederhana, tapi dalam melaksanakannya diperlukan sarat-sarat manusiawi yang cukup tinggi. Untuk dapat menjadi akseptor yang baik, tidak cukup dilakukan dalam satu atau dua tahun saja. Tapi untuk seterusnya. "Kalau tidak untuk seterusnya, tentu sebutannya bukan lestari. Dan program pelaksanaan Keluarga berencana itu hanya akan mempunyai arti apabila lestari".

Lebih jauh dikatakan, program pengendalian kependudukan itu akan dapat dirasakan, apabila pelaksanaan dari Keluarga Berencana itu dapat lestari "Justru di sinilah arti dan pentingnya pelaksanaan dari program Keluarga Berencana Lestari itu", ujar Ketua Umum.

Untuk itu, lanjut Ketua Umum, program pelaksanaan Keluarga Berencana itu tidak hanya penting buat keluarga yang bersangkutan saja. Akan tetapi juga mempunyai arti yang penting bagi negara dan bangsa. Dengan demikian apabila keluarga berencana itu maju, maka kesejahteraanpun akan dapat meningkat.

Kemudian Ketua Umum yang menyebut para pelaksana dari program Keluarga Berencana Lestari ini sebagai pejuang pembangunan dalam bidang kependudukan itu, mengharapkan agar para peserta KB Lestari ini menjadi pelopor, panutan dalam bidang KB, dan dapat menjadi pejuang bangsa serta pejuang pembangunan yang diperjuangkan oleh Golkar.

Sementara itu, Kepala BKKBN Dr. Haryono Suyono ketika dimintai keterangannya mengatakan, keberhasilan dari pelaksanaan Keluarga berencana ini berkat partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Agar masyarakat tersebut dapat berpartisipasi, dilakukan upaya pendekatan terhadap orang-orang yang mempunyai pengaruh di lingkungannya. Misalnya para alim ulama. Kemudian orang-orang tersebut memberikan pengertian dan pengarahan kepada pengikutnya tentang arti pentingnya ikut dalam keluarga berencana.

Salurkan Aspirasi

Dalam kesempatan bertatap muka, 4 orang yang mewakili 300 pasang peserta Keluarga Berencana Lestari, menyalurkan aspirasinya di hadapan Ketua Umum, yang didampingi pula fungsionaris Golkar lainnya seperti Soekarton Marmoedjono, Zarlons Zaghlul, Sarwono Kusumaatmadja, Akbar Tanjung, Aulia Rachman. Pernyataan aspirasi itu di antaranya berisi dukungan sepenuhnya atas kepemimpinan Jenderal Purnawirawan Soeharto. Dan meminta kesediaan beliau untuk dicalonkan sebagai Presiden RI periode 1987-1992. Selain itu para peserta Keluarga Berencana Lestari itu juga bertekad untuk memenangkan Golongan Karya dalam Pemilu tahun 1987 nanti.

Menjawab keinginan para peserta KB tersebut, Ketua Umum menyatakan terima kasih dan rasa gembira. Kemudian Ketua Umum mengingatkan agar tekad itu jangan sampai menjadi sekedar tekad. Tapi tekad itu perlu disertai dengan kenyataan.

Selain itu, Ketua Umum coba menguji, para peserta Keluarga Berencana yang juga anggauta Golkar. "Apakah saudara sudah mempunyai KAG (Kartu Anggauta Golkar) dan sebagian dari mereka menunjukkan jarinya, punya. Berapa anda membeli KAG? Para peserta itu tampak diam. Memang KAG itu tidak dijual. Saya hanya ingin menguji", ujar Ketua Umum.☐

Badrul Mustofa

Digitized by Google

Oleh: Dr. H. Moeslim Taher, SH (Rektor Universitas Jayabaya)

Pemilu 1987: Rangkaian Kesinambungan Pelaksanaan Missi Orde Baru

Pada bulan April 1987, untuk keempat kalinya rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Orde Baru melaksanakan Pemilu (Pemilihan Umum). Bagi Orde Baru, Pemilu merupakan salah satu dari suatu keseluruhan missi melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Pemilu adalah sarana dalam mewujudkan demokrasi Pancasila. Dalam bahasa UUD 1945, demokrasi disebut dan diartikan sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai tiang teras Orde Baru dalam upaya perwujudan demokrasi sesuai hakekat Pancasila dan UUD 1945, Golongan Karya terikat komitmen dan karena itu bertekad mensukseskan setiap Pemilu. Karena suksesnya Pemilu dalam arti kemenangan Orde Baru, suatu kesinambungan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen dalam wujud Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila akan lebih terjamin dan lebih mantap. Karena memanglah, Pemilu tiada lain daripada rangkaian kesinambungan pelaksanaan missi Orde Baru. Itu sebabnya Golongan Karya senantiasa menempati bagian barisan terdepan dalam pelaksanaan keseluruhan missi Orde Baru.

Matarantai Penentu

Pemilu 1987 mempunyai arti tersendiri yang membedakannya dari beberapa kali Pemilu sebelumnya. Ada beberapa faktor yang menandai sifatnya sebagai mata rantai penentu yang memberi arti tersendiri tersebut.

Pertama, Pemilu 1987 akan menjadi tolok ukur dalam menjadikan pelita Kelima sebagai masa pemantapan kerangka landasan yang diletakkan pada Pelita Keempat, sehingga pada Pelita Keenam Pembangunan Nasional benar-benar dapat tinggal landas. Dengan demikian, hasil Pemilu 1987 akan merupakan penentu bagi konseptualisasi kelanjutan dan kelangsungan Pembangunan Nasional.

Kedua, Pemilu keempat dalam Era Orde Baru ini ditandai pula dengan bertambahnya peserta Pemilu, yang dalam hal ini ialah dari kalangan Generasi Muda. Itu berarti, semakin lebih kecil Peserta Pemilu Generasi angkatan 45 dibandingkan dengan generasi kemudian yang jumlahnya terus meningkat, dengan kata lain, dalam arti kwantitas, Generasi Muda lebih dominan mayoritas di antara kalangan peserta Pemilu.

Ketiga, sebagai konsekwensi dari hal kedua di atas, di samping lebih besarnya peserta Pemilu dengan hak memilih, bertambah besar pula Generasi Muda yang menggunakan haknya untuk dipilih. Dengan kata lain, perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, usai Pemilu 1987 sangat ditentukan oleh mayoritas Generasi Muda.

Keempat, bertalian dengan hal ketiga dan kedua, maka hasil Pemilu 1987 akan merupakan langkah dini dari suatu proses alih generasi dalam hal tanggung jawab kesinambungan dan kelanjutan Pembangunan Nasional, sebagaimana pula dalam hal pelestarian Pancasila dan UUD 1945.

Kelima, tahap Pembangunan Nasional usai Pemilu 1987 merupakan persiapan tinggal landas Pembangunan Nasional pada Pelita Keenam, yang identik dengan era industrialisasi yang memerlukan kesiapan mental spiritual menghadapi modernisasi dengan perubahan dan pergeseran nilai-nilai yang ditawarkan oleh industrialisasi berteknologi canggih. Ketahanan mental spiritual merupakan persyaratan pula bagi pelestarian Pancasila dan UUD 1945.

Lima hal tersebut di atas ini menunjukkan Pemilu 1987 sebagai mata rantai penentu dalam rangkaian kesinambungan pelaksanaan missi Orde Baru.

Peranan Golongan Karya

Untuk menjadikan Pemilu 1987 dalam keserasiannya sebagai mata rantai penentu, Golongan Karya secara doktriner telah menggariskan program nasional, yang disimpulkan dalam Tri sukses Golkar ialah: a. Suksesnya konsolidasi (pemantapan) Golkar yang meliputi: konsolidasi idiil, konsolidasi wawasan dan konsolidasi keanggotaan/kaderisasi; b. suksesnya Repelita IV dalam rangka menciptakan kerangka landasan Pembangunan Nasional yang kokoh, dan c. Suksesnya Pemilu 1987 dan Sidang Umum MPR 1988.

Masing-masing unsur Tri sukses Golkar bertalian secara inter dependensi antara yang satu dengan lainnya. Karena itulah Golongan Karya telah sukses dalam konsolidasi idiil, wawasan dan keanggotaan/kaderisasi meningkatkan peranannya pula melaksanakan Repelita IV termasuk di dalamnya Pemilu 1987. Suksesnya Pemilu 1987 dalam arti kemenangan Orde Baru yang bertiang teraskan Golongan Karya itulah mempersyaratkan suksesnya Sidang Umum MPR 1988. Sedangkan suksesnya Sidang Umum MPR 1988 ditandai dengan ditetapkannya konsepsi Orde Baru menjadi GBHN 1988/1993 yang senantiasa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta dipilih dan diangkatnya kembali Jenderal (Purn) Soeharto menjadi Presiden beserta seorang Wakil Presiden yang serasi dengan Kepemimpinan Nasional Orde Baru.

Berhasilnya Trisukses Golkar di atas ini, khususnya dalam hal memenangkan Pemilu 1987 akan ditunjang oleh beberapa faktor penting.

Pertama, setiap anggota dan kader Golkar tidak mengabaikan penggunaan hak pilihnya dan secara konsekwen mencoblos tanda gambar Golkar pada pemungutan suara yang bersangkutan.

Kedua, setiap anggota dan kader Golkar secara informatif-persuasif-argumentatif meraih pengikut untuk turut menggunakan hak pilihnya dengan menjatuhkan pilihan pada tanda gambar Golkar pada pemungutan suara.

Ketiga, setiap anggota dan kader Golkar, mampu meyakinkan para pendukung untuk meraih dan memboyong pengikut dan simpatisan Golkar ambil bagian menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos tanda gambar Golkar pada pemungutan suara.

Keempat, semua anggota, kader, pendukung, simpatisan dan pengikut Golkar memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wakil-wakil terpilih membawakan aspirasi rakyat banyak pada forum Sidang Umum MPR 1988, ialah aspirasi yang telah tertuang di dalam program politik Golongan Karya.

Kelima, wakil-wakil rakyat yang duduk atas keberhasilan Golongan Karya dalam pemilu 1987 benar-benar melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat yang tersimpul dalam Tri sukses Golkar mengantarkan Bangsa dan Negara Indonesia pada pengamalan Pancasila secara optimal.

Berlandaskan sukses Golongan Karya dalam mengemban missi Orde Baru selama ini, maka dalam hal Pemilu 1987 tidak ada alasan obyektif maupun subyektif untuk tidak mengharapkan peranan Golongan Karya yang lebih meningkat. Diyakini pula, setiap insan Golongan Karya teguh pada ikrarnya selaku kader maupun anggota, hal yang akan dipedomani pula oleh setiap pendukung, pengikut dan simpatisan. Kepercayaan kepada Golongan Karya berarti kepercayaan pula terhadap suksesnya missi Orde Baru pada setiap tahapnya.

Digitized by Google

Tidak hanya tertuju pada kader, anggota dan simpatisan Golkar saja.

Perlukah Kampanye?

Ada yang berpendapat, tanpa kampanye Golongan Karya akan meraih kemenangan pada Pemilu 1987. Pendapat ini tidak perlu dibantah. Namun, kendati telah diperkirakan Golongan Karya akan meraih kemenangan dalam arti mayoritas mutlak, tidak berarti tidak perlu kampanye. Karena, secara konstitusional melalui perundang-undangan yang bersangkutan, dalam rangka Pemilu 1987, terdapat masa kampanye.

Bagi Golongan Karya, kampanye itu tentulah pertama untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang menyangkut Pemilu, dan yang kedua serta yang amat penting ialah menjadikan kampanye sebagai sarana pendidikan politik rakyat. Semakin mantap pemahaman rakyat banyak terhadap program Golongan Karya yang sebenarnya identik dengan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, semakin mantap pula partisipasi politik seluruh lapisan masyarakat. Bagaimanapun juga, materi kampanye tidak hanya tertuju dan didengar oleh kader anggota, pendukung, pengikut dan simpatisan Golongan Karya, melainkan pula segenap lapisan masyarakat. Apa yang menjadi materi kampanye tidak sekedar untuk diketahui oleh setiap insan yang mempunyai hak pilih, melainkan pula segenap lapisan masyarakat, termasuk Generasi Muda remaja, yang oleh karena undang-undang belum atau tidak mempunyai hak pilih untuk Pemilu 1987.

Dengan demikian, kampanye adalah kegiatan memasyarakatkan program Golongan Karya. Yang belum mengetahui, agar memahami dan menghayati. Yang telah mengetahui agar lebih memahami serta menghayati semaksimal mungkin. Harus diakui, masih banyak di kalangan Generasi Muda yang haus terhadap pengetahuan mengenai program Golongan Karya, sebagaimana pula terhadap tingkah lakunya di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Kehausan itu dibuktikan oleh harapan-harapan yang dilontarkan oleh kalangan masyarakat akademik di lingkungan banyak Wawasan Almamater agar Ketua Umum Golkar Bapak Sudharmono SH terjun ke kampus-kampus memasyarakatkan program Golongan Karya. Ini merupakan pertanda, bahwa sebagian besar dari calon cendekiawan Indonesia gandrung terhadap partisipasi politik bersama-sama di atas biduk nasional yang dikayuh dan dikemudikan oleh Golongan Karya.

Demikian pentingnya aksi kampanye Pemilu bagi Golongan Karya, sehingga sejak dini telah dipersiapkan sejumlah besar "jurkam" (juru kampanye) dan terdapat di seluruh Indonesia. Melalui penataran di mana mereka ditempa menjadi penyambung lidah Golongan Karya kepada rakyat banyak, suatu ketrampilan optimal dapat diharapkan. Yang berarti, Golongan Karya tidak menghendaki suatu kampanye yang "mengada-ada", melainkan dalam rangka pendidikan politik rakyat. Kampanye menjadikan rakyat banyak memiliki "credendo" (kepercayaan) kepada Golongan Karya sebagai organisasi sosial politik penyalur aspirasi mereka serta pula yang memperjuangkan sesuai dengan missi Orde Baru.

Budaya Politik

Pemilu bukan sekedar suatu "stasiun" atau "halte" dari suatu perjalanan demokrasi. Meskipun ia dilaksanakan sekali dalam lima tahun, namun dalam fungsinya sebagai mata rantai penentu dari suatu rangkaian kesinambungan missi Orde Baru, memberi arti, makna dan hakekat padanya sebagai bagian dari suatu budaya politik Bangsa Indonesia. Yang berarti, merupakan bagian pula dari suatu kehidupan politik yang telah memasyarakat dan merakyat. Nilai-nilai dari suatu budaya politik dalam demokrasi ditentukan oleh partisipasi lapisan masyarakat secara sadar dan dibarengi idealisme.

Dari pengalaman Golongan Karya beserta seluruh anggota keluarga besar yang menempanya, diyakini semakin berakarnya budaya politik dalam lubuk hati para anggota, kader, serta yang diharapkan pula demikian pula di kalangan pendukung, pengikut dan simpatisan. Sehingga, tidak perlu diragukan, kemenangan menyolok Golongan Karya pada Pemilu 1987, baik dalam arti kwantitas maupun kwalitas, akan memantapkan kehidupan budaya politik yang telah ditanam, dipupuk, dibina dan dikembangkan sejak Era Orde Baru, dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen yang dipelopori oleh Golongan Karya. Ia pun akan menjadi fondasi bagi suatu tonggak sejarah sistem dan budaya politik yang lebih mantap seperti diamanatkan oleh UUD 1945.

Dengan demikian itu pula, Golongan Karya menjadikan Pemilu benar-benar sebagai kunci mata rantai penentu dalam suatu rangkaian kesinambungan pelaksanaan missi Orde Baru, yang senafas sebangun dengan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. □

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA ORGANISASI

KAMPANYE DENGAN TERTIB

Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, tak henti-hentinya mengajak para kader Golkar untuk berkampanye dengan tertib dan tidak terpancing provokasi dari pihak mana pun. Pada kesempatan melihat dari dekat persiapan para kader Golkar di DKI Jakarta, sekitar minggu pertama dan kedua bulan Pebruari lalu, Sudharmono sekali lagi mengulangi pesannya itu.

Harus diingat, kata Ketua Umum, selama masa pemerintahan Orde Baru sudah empat kali dilaksanakan Pemilihan Umum. Dan selama itu Golkar telah mendapat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu telah digunakan oleh Golkar dengan baik, ujarnya.

Buktinya, keadaan dari tahun ke tahun semakin membaik. Tahun '70-an keadaannya lebih baik dari '60-an. Dasawarsa ' 80-an juga lebih baik dibanding dasawarsa '70-an. Demikian pula, Insya Allah, jika rakyat masih memberi kepercayaan kepada Golkar, dasawarsa '90-an mendatang akan diusahakan lebih baik lagi dari sebelumnya, kata Ketua Umum.

Di DKI Jakarta, Ketua Umum mengadakan kunjungan antara lain ke Jakarta Pusat, Barat dan Utara. Selama kunjungan itu Ketua Umum mendapat kesan bahwa persiapan dan kesiapan para kader Golkar di Ibu Kota telah cukup baik. Kemenangan Golkar di DKI Jakarta, menurut Sudharmono, akan lebih meyakinkan sebab Jakarta adalah pusat negara dan segala kegiatan. ''Saya akan lebih bangga jika di Jakarta Golkar menang secara meyakinkan'', ujarnya.

Hasrat untuk meningkatkan jumlah perolehan suara di ibu kota itu, menurut Sudharmono, bukan semata-mata demi prestise, tetapi memang karena Golkar punya landasan untuk itu. Jakarta memberikan jaminan citra politik baik ke dalam maupun ke luar negeri. Untuk mencapai kemenangan itu, memang perlu berjuang lebih keras lagi, dan paling penting, menjaga persatuan, pesan Ketua Umum.

Berkampanye lah dengan tertib. Taati semua peraturan dan petunjuk aparat keamanan. Jagalah aturan permainan, jangan sampai menimbulkan kebringasan. Kalau toh Golkar menang juga di DKI Jakarta, maka kemenangan itu adalah kemenangan yang sehat, demikian pesan-pesan Ketua Umum.☐ BM

Hindarkan Adu Kekuatan Dalam Kampanye

Wakil Sekjen Golkar Sudarmaji, di depan peserta penataran juru kampanye (jurkam) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD I Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) belum lama ini mengingatkan agar dalam kampanye yang berlangsung akan dapat menghindarkan pertentangan, konflik dan adu kekuatan.

Dikatakan lebih jauh, bahwa di dalam kampanye nanti perlu dikemukakan program-program yang menyentuh kepentingan rakyat banyak, serta tetap menjaga rasa kesatuan dan persatuan. Selain itu dalam masa kampanye nanti, kata Sudarmaji, haruslah mendidik rakyat, dan jangan membodohi rakyat.

Untuk itu, kata Sudarmaji, tatanan yang sudah dibangun oleh Orde Baru, jangan sampai dirusak. Dan Golkar dalam menghadapi pemilu itu sudah jauh-jauh hari mengadakan kegiatan. Misalnya mengadakan pendaftaran anggauta. Hingga saat ini anggauta yang sudah tercatat 25 juta orang. Dan 8 juta di antaranya adalah karakterdes.

Sementara itu, Gatot Suherman, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar NTB, dalam sambutannya mengatakan, dengan penataran juru kampanye di daerah ini, menunjukkan kesiapan Golkar dalam melaksanakan tahap-tahap penyelenggaraan pemilu'' Secara keseluruhan Golkar NTB dapat dinyatakan telah melaksanakan program-program pokok yang terumuskan dalam Tri Sukses Golkar''

Dengan demikian, kata Suherman, Golkar daerah NTB dapat terpercaya dan benar-benar tampil di dalam usaha untuk mencapai suksesnya pelaksanaan pemilu yang akan datang.☐

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA ORGANISASI

PROGRAM HWK

Himpunan Wanita Karya (HWK), medio Januari lalu melanjutkan programnya, yaitu menyerahkan bantuan permodalan kepada golongan ekonomi lemah di Kelurahan Harapan Mulia, Jakarta, dan sekaligus mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat.

Sumbangan yang diberikan kepada sebagian warga Kelurahan Harapan Mulia itu telah memasuki periode yang ke 12. Dengan demikian jumlah orang yang menerima bantuan sumbangan dari HWK itu telah mencapai 1229 orang — setiap orang mendapatkan sumbangan bantuan Rp. 25.000 dengan jangka waktu pengembalian 5 bulan.

Selama program pemberian bantuan yang diberikan oleh Organisasi ini, Kelurahan Harapan Mulia dapat dijadikan contoh. Dari 50 orang peminjam telah dapat mengembalikan tepat pada waktunya. Melihat keberhasilan dari pengembalian tersebut, DPP HWK, tidak segan-segan untuk memperbesar jumlah bantuannya. Dari 50 orang untuk tahap pertama, kemudian ditingkatkan lagi menjadi 137 orang pada tahap ke dua.

"Kami dengan Ibu-Ibu RT, khususnya serta para warga umumnya selalu bekerja sama dalam melaksanakan program yang digalakkan oleh HWK, terutama dalam pengembalian bantuan permodalan untuk golongan ekonomi lemah", ujar Ny. Chaerani, tokoh PKK setempat.

Dalam kesempatan pemberian bantuan permodalan tersebut juga diberikan pengarahan-pengarahan tentang berbagai macam. Misalnya pentingnya akan kebersihan lingkungan, pendidikan terhadap anak, dan tidak ketinggalan suksesnya pemilu, khususnya untuk kemenangan Golkar. (BM)

YANG KE 18 DARI APEGTI

Bertempat di Kantor DPP Golkar, 3 Pebruari, Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH, untuk yang ke sekian kali menerima sumbangan dari Apegti (Asosiasi Penyalur Gula dan Trigu) dan Gapegti (Gabungan Penyalur Gula dan Trigu) Bulog, berupa 30 sepeda motor, satu buah mobil Colt L 300 dan 6 unit mesin foto copy. Bantuan tersebut, oleh Ketua Umum diteruskan kepada DPD Golkar Tk I DKI Jakarta dan DPP Ampi.

Dalam kesempatan itu Sudharmono mengatakan, kekuatan dan kehidupan Golkar pada dasarnya ditentukan kekuatan masyarakat dan kemampuan para anggota serta kader-kadernya. Bukan pada pemerintah. Oleh karenanya perjuangan politik Golkar yang dilandasi idealisme tinggi, membutuhkan sarana-sarana berupa perangkat keras maupun dukungan politis untuk melancarkan gerak perjuangan itu. Di sinilah masyarakat, dan terutama para pengusaha yang mempunyai sumber dana dan juga mempunyai kesamaan idialisme dengan Golkar, telah banyak menunjang perjuangan Golkar melalui berbagai bantuan sarana dan dana, seperti yang dilakukan Apegti.

Ketua Umum juga mengharapkan agar bantuan yang berupa perangkat keras itu, akan disusul dengan dukungan politis kepada Golkar pada pemilu mendatang, oleh seluruh jajaran Apegti maupun Gapegti, baik pengurus, anggota maupun seluruh karyawannya.

Sementara itu Ketua Apegti/Gapegti DKI Jaya, Drs. HT Zagloel, menyatakan bahwa sumbangan yang disampaikan itu sebagai perwujudan rasa simpati terhadap Golkar dari 605 pengusaha Apegti/Gapegti di Seluruh Indonesia yang sudah menjadi anggota Golkar. Menurutnya bantuan-bantuan serupa juga telah diberikan kepada 17 DPD Golkar, dan ini merupakan bantuan yang ke 18. Bantuan yang telah diberikan ke 18 propinsi itu berupa 9 mobil, 153 sepeda motor dan berbagai perlengkapan lainnya seperti atribut Golkar, peralatan olahraga, perangkat perkantoran, lampu petromax dan alat-alat pertanian. Daerah yang telah memperoleh bantuan tersebut adalah: propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kaltim, Sulut, Sulsel, Bali, NTT dan DKI Jakarta.☐ (wt)

Digitized by Google

Uang Kembalian

''Bang, kembaliannya uang limaratus,'' kata seorang lelaki yang usianya kutaksir sekitar 35 tahun, kepada kondektur bus kota jurusan Grogol—Pulo Gadung yang sore itu begitu sesak. Dia — dengan susah payah — menyelinap di antara penumpang pria dan wanita untuk bisa sampai ke pintu depan di mana sang kondektur berada. Tak urung makian orang lain sempat juga didengarnya.

Tapi, sesampainya di depan, apa jawab kondektur; ''Kembalian apaan. Semuanya sudah saya kembalikan, tidak ada yang tertinggal. Tuh Bapak yang baju putih itu, yang uangnya limaribuan juga sudah saya kembalikan,'' sahut kondektur dengan nada tinggi. Sementara itu bis terus melaju dengan kecepatan tinggi.

Si Bapak menyanggah dengan suara tak kurang tingginya: ''Kapan, saya belum pernah terima kembaliannya sejak bayar di Harmoni tadi. Jangan mengada-ada Bung. Masa untuk tigaratus limapuluh rupiah saja saya mau menipu? Di mana harga diri saya? '' dia bersungut sambil beranjak mendekati kodektur.

Sang kondektur yang melihat gelagat kurang baik lantas balik menggertak. ''Bapak mau apa, pokoknya saya sudah katakan saya sudah kembalikan. Mau apa lagi?,'' tukasnya dengan sikap siaga kalau saja si Bapak ringan tangan. Sementara itu sopir yang sedari tadi diam namun mengikuti perdebatan itu, kini bersuara: ''Kami sudah sering kena tipu pak. Yah kejadian seperti ini. Makanya kalau naik bis kota sediakan uang pas,'' ketusnya.

Si penumpang bersangkutan belum mau mengalah. Dia lantas mengeluarkan ballpoint dan merobek kertas bungkus rokok untuk dijadikan semacam catatan. ''Saya akan catat dan adukan peristiwa ini kepada manajemen perusahaanmu. Siapa nama kamu! '' katanya dengan mata melotot kepada si kondektur. Para penumpang lain, memperhatikan adegan itu dengan perasaan serba salah. Mau membela siapa? Si Bapak mungkin saja benar, tetapi bisa jadi juga kondektur yang jujur. Tidak ada saksi mata yang bisa memberikan kesaksian. Atau mungkin saja ada, tetapi warga metropolitan Jakarta ini biasanya tidak mau ambil perduli terhadap urusan orang lain.

Eh... apa jawab si kondektur: ''Silahkan catat dan adukan. Saya tidak takut. Baru uang tigaratus limapuluh saja sudah main ngadu kaya anak kecil,'' sahutnya setelah mendapat ''angin'' dari sopir dan seorang penumpang lain yang mengaku karyawan perusahaan bus kota tersebut. Yang disebut terakhir ini juga menyalahkan si Bapak karena tidak membayar dengan uang pas.

Si Bapak rupanya belum mau mengalah, atau mungkin saja karena uangnya memang pas-pasan sedangkan perjalanan belum berakhir. Dia masih mencoba membela diri. ''Bukan soal uangnya Bung, tetapi harga diri saya lho. Saya merasa dipermalukan di depan orang banyak ini. Tadi kan saya bertanya baik-baik, kenapa saudara jawab dengan kasar? '' sungutnya lagi sambil menoleh kiri-kanan seolah mencari dukungan. Tetapi semuanya diam. Tidak ada yang berusaha melerai.

Mengapa ini semua sampai bisa terjadi? Coba kalau peraturan batas muat penumpang diberlakukan dengan tegas, dan sopir serta kondektur tidak dikejar target setoran. Seandainya sistem kotak uang dan karcis diterapkan terus serta kesadaran masyarakat untuk membayar karcis dengan uang pas dan meminta karcisnya berjalan baik, pasti tidak akan ada kejadian seperti ini. Tapi siapa seharusnya yang menegakkan semua itu?

Si Bapak rupanya sudah diam. Kondektur pun demikian. Mungkin dua-duanya sudah merasakan dan menyadari bahwa mereka hanyalah korban dari suatu situasi dan kondisi tertentu, yang untuk saat ini masih harus diterima sebagai suatu realita yang pahit. Tidak beberapa lama kemudian, ketika bus minggir di halte Pangkalan Asem daerah Cempaka Putih, si Bapak pun turun dengan lunglai. Dia masih memegang ballpoint dengan kertas tapi tidak menuliskan apa-apa di sana. Dan kondekturpun berteriak: ''Gadung-Gadung '' padahal bus masih tetap sarat penumpang.

Bus pun melaju lagi. Si Bapak tertinggal di belakang dengan perasaan yang mungkin masih penasaran. Tapi apa daya, ini Jakarta! Begitukah?☐ **Alex Patty**

PT PELAT TIMAH NUSANTARA

TINPLATE INDUSTRY

Kantor Jakarta : Jl. Letjen S. Parman N-7, Jakarta Barat, Telp. 5480192 - 5483641, Telex : PTN JKT 45591 P.O. BOX 55/JABPM.

Kantor/Pabrik : Kawasan Industri Berat Cilegon Kav. D, Telp. 0254 - 21159, 348233, 348106 Pes. 1411. Telex : 48402 PTN CIA Cilegon.

TURUT SERTA MENSUKSESKAN

PEMILU 1987

Digitized by Google

Djisman S. Simandjuntak

ASEAN Menjelang KTT Manila 1987

Sebentar lagi ASEAN akan merayakan hari jadinya yang ke-20 dan sebagai bagian peringatan hari jadi ini sudah disetujui penyelenggaraan KTT yang ketiga di Manila bulan Desember 1987. Sehubungan dengan itu, berbagai persiapan di negara-negara anggota sedang berlangsung dan dalam persiapan ini Indonesia memikul tanggung jawab sebagai yang mengetuai panitia. Sebagian dari persiapan ini akan bersifat sebagai evaluasi atas apa yang sudah dan belum dicapai ASEAN selama ini, sedang sebagian lain akan berupa pencarian upaya-upaya baru untuk meningkatkan sumbangan ASEAN bagi penguatan ketahanan nasional masing-masing negara anggota seperti dikatakan oleh Presiden Soeharto ketika berkunjung ke Malaysia dan Singapura baru-baru ini.

Sejak berdirinya ASEAN dalam tahun 1967 sesama anggota sudah terjalin persahabatan yang erat. ASEAN yang kiranya memberi sumbangan yang besar pada kenyataan bahwa sub-kawasan yang diliput ASEAN bebas dari pertikaian politik dan militer selama 20 tahun terakhir. Padahal hanya dua tahun sebelum pendirian ASEAN Indonesia masih terlibat dalam suatu konfrontasi dengan negara-negara tetangganya. Dengan kata lain, sumbangan ASEAN pada pemulihan stabilitas politik di sub-kawasan ini kiranya tidak dapat diingkari walaupun sulit diukur. Dengan stabilitas politik ini masing-masing negara anggota dapat mencurahkan perhatian pada pembangunan ekonomi yang hasilnya memberi pamor bagi ASEAN sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi. Tetapi sumbangan ASEAN tidak terbatas hanya pada bidang politik. Dalam bidang sosial budaya sudah dijalin hubungan luas yang mendekatkan warga-warga ASEAN dan dapat menjadi modal besar dalam tahun-tahun mendatang. Serangkaian kerjasama fungsional seperti dalam pengembangan sumber daya manusia dalam banyak sekali sektor, sudah atau sedang dijalankan walaupun tidak selalu mendapat tepuk tangan publik karena sudah dianggap lumrah. Sebagian dari kerjasama fungsional ini melibatkan mitra-mitra dialog ekstern ASEAN yang pada pihaknya sudah mengakui ASEAN sebagai mitra yang patut diperhitungkan. Namun demikian, kerjasama ekonomi ASEAN tidak maju secepat seperti diharapkan.

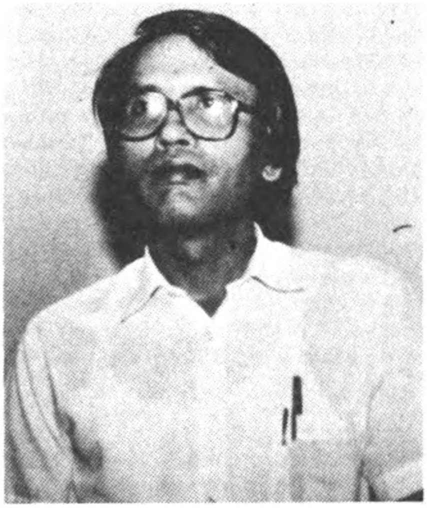

Djisman S. Simandjuntak

Di antara persetujuan-persetujuan kerjasama di bidang ekonomi yang ditandatangani bersamaan dengan penyelenggaraan KTT Bali 1976 atau sesudahnya, banyak yang tidak dapat diimplementasi atau diimplementasi dengan tidak memuaskan. Dari lima Proyek Industri ASEAN hanya dua, yaitu yang di Indonesia dan Malaysia, yang sudah memasuki tahap produksi. Dalam Proyek Komplementasi Industri ASEAN persetujuan dalam industri otomatif sebagai satu-satunya yang sudah pernah disetujui, sampai sekarang masih terbengkalai. Kemajuan dalam Usaha Patungan Industri ASEAN juga sangat lambat, sementara Tata Perdagangan Preferensial ASEAN masih dihantui oleh keengganan negara-negara anggota untuk memasukkan mata-mata dagang yang penting. Alhasil, Tata Perdagangan Preferensial ASEAN sampai sekarang baru meliput bagian yang kecil sekali dari perdagangan sesama ASEAN. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam kerjasama fungsional ternyata tidak dapat menutupi bahwa dalam program-program pokok yang disetujui dalam bidang ekonomi, yang dicapai oleh ASEAN masih jauh dari yang dijanjikan oleh persetujuan-persetujuan tersebut.

Tentu saja banyak alasan di belakang ketidakberhasilan relatif dalam kerjasama ekonomi ini. Penerusan sebagian dari proyek-proyek yang disetujui ternyata tidak menarik secara ekonomis setelah perubahan drastis dalam lingkungan internasional seperti penurunan harga pupuk superphosfat yang melatarbelakangi pelepasan proyek pupuk ini yang semula dialokasi pada Filipina. Ada juga yang menganggap ketidakberhasilan ini pada ketidakadaan komplementaritas antara ekonomi-ekonomi ASEAN dalam arti bahwa masing-masing negara anggota mempunyai susunan perdagangan yang pada dasarnya sama di samping mempunyai kebijakan industri yang sama dalam arti mendorong pertumbuhan industri yang sama. Tetapi semua alasan-alasan ini tidak cukup untuk menjelaskan ketidakberhasilan ASEAN melaksanakan persetujuan-persetujuan yang sudah ditandatangani dalam bidang ekonomi. Dalam analisa terakhir, masing-masing negara ASEAN belum memberikan komitmen riel yang diperlukan oleh pelaksanaan persetujuan-persetujuan kerjasama ekonomi. Kata kunci dalam hubungan ini adalah liberalisasi pertukaran sesama negara-negara anggota yang senantiasa diperlukan oleh kerjasama regional yang substantif. Manfaat dari berbagai kerjasama industri yang disetujui tidak dapat dipetik karena masing-masing negara anggota enggan membuka pasarnya.

Sebenarnya permintaan akan liberalisasi di masing-masing negara ASEAN sudah lama ada. Keperluan akan perbaikan daya saing internasional dalam perdagangan hasil-hasil industri yang menggunakan masukan-masukan impor, sudah menuntun negara-negara ASEAN termasuk Indonesia ke penurunan halangan-halangan perdagangan seperti tercermin dalam Kebijaksanaan 25 Oktober dan 15 Januari di Indonesia. Begitu juga keperluan akan akses ke pasar Amerika Serikat yang sejak awal 1980-an ini semakin penting bagi negara-negara ASEAN sudah menuntun negara-negara ASEAN ke suatu sikap yang ditandai oleh kesediaan untuk mengimbal apa yang dinikmati di pasar Amerika Serikat dengan pembukuan pasar sendiri bagi produk-produk luar negeri. Dengan kata lain, liberalisasi perdagangan bukan lagi sesuatu yang baru bagi negara-negara ASEAN. Tetapi sekali yang dibicarakan adalah liberalisasi perdagangan intra-ASEAN yang lebih cepat dari liberalisasi perdagangan secara umum, pemerintah-pemerintah ASEAN lantas menjadi enggan, apalagi kalau pembicaraan itu disangkut-

Digitized by Google

pautkan dengan salah satu bentuk integrasi ekonomi seperti Pasar Bersama ASEAN. Tetapi dapatkah ASEAN bertahan sebagai kelompok regional yang berbobot tanpa kemajuan substansial dalam kerjasama ekonomi?

Ketika lingkungan global tahun 1970-an sangat ramah bagi negara-negara ASEAN dan ketika ekonomi-ekonomi ASEAN menunjukkan kemajuan yang luar biasa dibanding kebanyakan ekonomi negara-negara sedang berkembang, adalah wajar kalau orang tidak merasa prihatin walaupun kemajuan kerjasama ekonomi ASEAN jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Tetapi lingkungan global 1980-an dan lebih-lebih lingkungan global 1990-an tampaknya adalah jauh daripada ramah bagi ASEAN. Kemajuan teknologi material negara-negara industri cenderung mengancam relevansi bahan-bahan andalan negara-negara ASEAN; kemajuan teknologi otomasi cenderung mengancam kelimpagan tenaga kerja sebagai andalan peningkatan ekspor hasil industri; dan kemajuan teknologi bio cenderung mengancam relevansi alam negara-negara ASEAN sebagai andalan peningkatan ekspor hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan dan sejumlah hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan dan sejumlah hasil-hasil laut. Dampak perubahan lingkungan global ini sudah sangat terasa di beberapa negara ASEAN dalam tahun-tahun terakhir. Dengan latar belakang baru ini adalah wajar kalau orang mengharapkan sumbangan yang lebih besar dari kerjasama ASEAN. Tanpa sumbangan nyata dari kerjasama ekonomi, tidak mustahil bahwa relevansi politik dan kultural ASEAN akan melemah di mata negara-negara anggota.

Dari KTT Manila diharapkan komitment terhadap kerjasama ekonomi yang sepadan dengan tantangan-tantangan penyesuaian yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Komitmen baru dan riel sangat diperlukan dalam liberalisasi perdagangan intra-ASEAN untuk mendorong spesialisasi antar negara-negara anggota dan atas dasar itu memperbaiki daya saing di pasar ASEAN sendiri dalam menghadapi impor dan di pasar di luar ASEAN. Langkah liberalisasi juga diperlukan untuk memperbaiki daya tarik ASEAN terhadap pedagang dan pemodal-pemodal, termasuk pemodal-pemodal ASEAN sendiri yang mungkin saja melihat kawasan lain lebih menarik daripada ASEAN sebagai tempat penanaman modal. Tetapi Presiden Soeharto sudah mengatakan baru-baru ini bahwa saatnya belum tiba bagi ASEAN untuk mendirikan misalnya Pasar Bersama. Namun di lain pihak juga ditekankan keperluan akan pendekatan-pendekatan baru.

Sementara pendirian Pasar Bersama masih dianggap terlalu dini, pendekatan-pendekatan baru tersebut perlu dijelajah, termasuk pendekatan-pendekatan baru yang dalam 10 atau 15 tahun dari sekarang perlu ditempuh ASEAN. Untuk KTT Manila masih terbuka berbagai opsi. Ia dapat berupa pelaksanaan Tata Perdagangan Preferensial ASEAN yang bersumber dari Deklarasi Kesepakatan ASEAN yang ditandatangani di Bali secara konsekuen dalam arti meliput semua mata-mata dagangan dan menyediakan margin preferensial yang lebih tinggi daripada yang disediakan selama ini. Memang dengan Tata Perdagangan ASEAN yang dibaharui pun perdagangan intra-ASEAN belum akan dapat menandingi perdagangan ASEAN dengan luar kawasan. Tetapi darinya sesedikitnya dapat diharapkan dorongan-dorongan spesialisasi yang memang sedang diperlukan oleh masing-masing negara anggota.

Di samping persoalan yang berhubunan dengan liberalisasi masih banyak persoalan yang sama-sama dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Hasil-hasil KTT Bali masih tetap relevan dan untuk perwujudannya diperlukan komitmen yang nyata. Ke dalam persoalan-persoalan yang perlu diberi prioritas termasuk harmonisasi kebijakan investasi, sikap menghadapi babak baru GATT, kemungkinan kebijakan bersama dalam pemilikan intelektual, penggalangan proyek-proyek penelitian bersama, pengembangan sumber daya manusia, perbanyakan usaha patungan dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber mineral, dan keuangan ASEAN atas dasar sumber sendiri. Tentu saja daftar persoalan ini juga menyinggung beberapa hal yang sensitif. Tetapi kalau ASEAN tetap menghindari pembicaraan ini, sumbangan yang dapat diberikan oleh ASEAN bagi penguatan ketahanan nasional masing-masing anggota tampaknya akan sangat terbatas. Dalam hubungan inilah perlu digarisbawahi relevansi KTT Manila. Darinya diharapkan suatu respon yang sepadan dengan tantangan global, regional dan nasional yang tidak selalu mendapat perhatian cukup dalam pertemuan-pertemuan tingkat menteri atau yang lebih teknis karena keterpakuan pada keperluan-keperluan sektoral atau segmenter.

Dari hari ini sampai saat penyelenggaraan KTT Manila masih membentang sepuluh bulan penuh. Dalam waktu sepanjang atau sependek itu masih dapat disiapkan langkah-langkah baru dalam kerjasama ekonomi untuk memaksimalisasi sumbangan KTT ini bagi penguatan ketahanan nasional negara-negara anggota dan melalui itu, penguatan ketahanan regional dalam lingkungan global yang sudah berubah dalam arti semakin tidak ramah bagi ekonomi-ekonomi ASEAN.☐

GEREJA KRISTEN PROTESTAN DI BALI
PROTESTANT CHRISTIAN CHURCH IN BALI

dhyana pura

SEMINYAK - KUTA - BALI - INDONESIA
P.O. Box 1010 Interport Ngurah Rai Bali - Indonesia, Phone : 2914

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987
SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT
UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA
MASYARAKAT ADIL MAKMUR,
SEJAHTERA LAHIR BATIN

SANGGAR MEDITASI, SANGGAR PEMBINAAN, SANGGAR BHAKTI TARUNA,
SANGGAR PERSAHABATAN, PESANGGRAHAN G.K.P.G.

MEDITATION CENTRE, TRAINING & YOUTH CENTRE, CENTRE FOR FRIENDSHIP
G.K.P.B. GUEST HOUSE

Digitized by Google

Oleh: dr Ronnie Rivany

Kemungkinan Realokasi Anggaran Kesehatan Untuk Repelita V

Suatu Konperensi Internasional di Alma Ata mencoba menyusun semacam kebijakan internasional untuk menanggulangi masalah kesehatan. Dan itu dituangkan dalam apa yang disebut 'Health for all in the year 2000' dan 'Primary health care'. Setidaknya ada tujuh tujuan dasar yang dinyatakan hendak dicapai.

Pertama, menurunkan angka kematian bayi menjadi 50/1000 kelahiran hidup dan meningkatkan berat badan bayi baru lahir menjadi minimal 2500 gram. Kedua, semua anak harus bebas dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Ketiga, penyediaan air minum bersih, fasilitas sanitasi yang memadai dan kadar fluor yang cukup. Keempat, menurunkan angka kematian untuk penyakit jantung dan penyakit kanker. Kelima, pengurangan luka disebabkan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan di rumah dan tempat kerja. Keenam, pencegahan kematian yang disebabkan pembunuhan, bunuh diri dan kekerasan lain. Dan yang ketujuh, meningkatkan kualitas hidup manusia lanjut usia.

Bagi kita sendiri di Indonesia terdapat sejumlah pengertian dalam bidang pembangunan kesehatan yang terkait dengan pengertian dasar pembangunan nasional. Hakekat pembangunan nasional kita adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional di bidang kesehatan yang merupakan bagian integral pembangunan nasional merupakan upaya bangsa untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan pembangunan nasional terpadu dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal itu, maka Pembangunan Nasional di bidang kesehatan disusun dan dilaksanakan sepenuhnya dalam rangka menciptakan Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dengan memanfaatkan modal dasar dan memperhitungkan faktor-faktor dominan Pembangunan Nasional. Telah tercakup dalam Garis-Garis Besar Haluan negara dan telah dijabarkan ke dalam petunjuk operasional sebagai Sistem Kesehatan Nasional dengan salah satu bagiannya yaitu Rencana Pokok Program Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (1983/1984 - 1998/1999).

Materi pokok dari RP3JPK ini dipertegas kembali dalam Pancakarsa Husada yang terdiri dari (1) peningkatan kemampuan masyarakat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan; (2) perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan; (3) peningkatan status gizi masyarakat, (4) pengurangan kesakitan dan kematian; (5) pengembangan keluarga sehat sejahtera dengan makin diterimanya norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan Pancakarsa Husada tersebut, diselenggarakan lima karya di bidang kesehatan yang disebut Pancakarya Husada yang meliputi (1) peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan; (2) pengembangan tenaga kesehatan; (3) pengendalian, pengadaan, dan pengawasan obat serta makanan, dan bahan berbahaya bagi kesehatan; (4) perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan lingkungan; (5) peningkatan dan pemantapan manajemen dan hukum.

Sebagai instansi yang berwenang dalam segi kesehatan, maka Departemen Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada tahun 1982/1983 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 211,4 milyar (34,5%) untuk anggaran rumah sakit, yang berintikan pelayanan kuratif — rehabilitatif. Anggaran ini ternyata lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran yang disediakan bagi pelayanan promotif — preventif dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan perbandingan: Anggaran untuk Puskesmas adalah sebesar Rp 172,9 milyar (28,1%) dari seluruh jumlah alokasi dana pada tahun periodik tersebut.

Apakah pola alokasi anggaran yang lebih menitik beratkan pelayanan kuratif — rehabilitatif dari Rumah Sakit ini dapat memecahkan masalah gangguan kesehatan seluruh penduduk Indonesia secara effektif dan effisien?

Tujuan Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan

Tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari Tujuan Nasional. Sedangkan pengertian sehat di sini adalah meliputi kesehatan jasmani, rohani, serta sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.

Dalam rangka menuju pengertian sehat seperti tersebut di atas, ternyata tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan masih dihadapkan pada berbagai macam tantangan yang cukup besar, terutama yang mencakup masih tingginya angka kematian bayi (Index Mortality Rate) yang besarnya 98 per 1000 kelahiran hidup; serta adanya penyakit-penyakit infeksi dan menular lainnya yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan, terutama di daerah pedalaman yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara ini.

Sesuai dengan pola pelaksanaan jangka panjang pembangunan kesehatan yang telah digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional tadi, maka telah ditetapkan beberapa indikator sebagai sasaran-sasaran untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat pada Pelita V mendatang sesuai dengan kebijaksanaan yang berlandaskan Trilogi Pembangunan, seperti yang dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel indikator sasaran dari RP3 JPK

	Pelita III - IV	Pelita V
1. Umur harapan hidup	56 tahun	65 tahun.
2. Angka kematian bayi	98/1000 lahir hidup	45/1000.
3. Angka kematian balita	19,6/1000	9/1000
4. Bayi lahir BB < 2500 gr	14%	7%
5. Diare	400/1000	200/1000.
6. Malaria:		
Jawa — Bali	82 kecamatan	20 kec.
Luar Jawa — Bali I	10%	2%
Luar Jawa — Bali II	20%	10%
7. Tuberkulosis	3/1000	2/1000.
8. Tetanus neonatorum	11/1000	1/1000.
9. Cakup imunisasi < 14 bln	40%	80%
10. Cakup tolong persalinan	40%	80%
11. Cakup sediaan air bersih	18%	100%

Sumber: Departemen Kesehatan R.I: RP3JPK, 1983

Digitized by Google

Di sini terlihat bahwa masalah utama yang kita hadapi adalah juga merupakan masalah pokok bagi negara-negara berkembang lainnya, yaitu masalah-masalah kesehatan yang banyak mengenai penduduk usia muda, seperti penyakit-penyakit infeksi dan menular, serta masalah kesehatan lingkungan lainnya.

Melihat tabel indikator sasaran dari RP3JPK, maka tampak bahwa pendekatan yang effektif adalah melalui usaha kesehatan pokok Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari (1) usaha pemulihan kesehatan atau pengobatan yang dilaksanakan di Balai Pengobatan; (2) usaha pemeliharaan kesehatan perseorangan dalam bentuk KIA dan KB yang dilaksanakan di Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak/Klinik Keluarga Berencana; (3) usaha kesehatan sekolah; (4) usaha kesehatan lingkungan; (5) usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; (6) usaha penyuluhan kesehatan masyarakat; (7) usaha perawatan kesehatan masyarakat; (8) usaha kesehatan gigi; (9) usaha kesehatan gizi; (10) usaha kesehatan jiwa; (11) usaha laboratorium kesehatan masyarakat; (12) usaha pencatatan dan pelaporan data.

Sehingga dengan demikian, walaupun penanggulangan masalah kesehatan di Indonesia berada di persimpangan jalan karena telah meningkatnya penyakit-penyakit kardio vaskuler; tapi seharusnya pola pelayanan kesehatan lebih mengarah ke bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat promotif-preventif, tanpa meninggalkan upaya kuratif-rehabilitatif dari rumah sakit; di mana Puskesmas sebagai satuan organisasi kesehatan terdepan yang merupakan inti di dalam penyelenggaraan pengembangan upaya pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sepantasnya mendapat prioritas yang tinggi di dalam skala prioritas alokasi dana dari Departemen Kesehatan.

Segi Ekonomi Kesehatan

Di pihak lain, bila ditinjau dari segi Ekonomi Kesehatan, di mana masalah sumber daya yang sangat terbatas khususnya di bidang sumber daya dana, maka dapatlah dibayangkan besarnya dana yang dibutuhkan untuk memelihara/membiayai kesehatan dari 165 juta penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh tanah air ini. Sehingga optimisasi pemanfaatan dana tersebut harus dapat mencakup prinsip ekonomi yang mengatakan bagaimana suatu komoditi dapat diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi oleh masyarakat secara effektif dan effisien dalam keterbatasan sumber daya.

Brotowasisto mencatat bahwa pada tahun 1981/1982, porsi pendapatan yang dipergunakan untuk biaya kesehatan adalah sebesar Rp 9.750,- per kapita per tahun, atau senilai dengan 2,7% dari GNP kita yang pada saat itu bernilai 450 US $;

Berdasarkan data dari WHO: Tables on Global Indicators, ternyata persentase tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Yemen, yang telah mengalokasikandana bagi sektor kesehatannya sebesar 4% dari GNP nya yang bernilai 420 US $; sedangkan Prof. Abel Smith memperkirakan jumlah maksimal daripada alokasi sektor kesehatan yang masih dapat dipikul oleh ekonomi nasional Indonesia adalah sekitar 4% dari GNP.

Dari Ascobat Gani dan kawan, yang juga selalu mengingatkan pentingnya segi ekonomi kesehatan diperhitungkan, maka perlu dipertimbangkan kembali dua hal berikut.

1. Economic benefit dari pada suatu anggaran yang akan dialokasikan pada suatu pelaksanaan program kesehatan; di mana dalam program kesehatan ini, yang dimaksud dengan benefit adalah kerugian yang dapat dicegah sebagai akibat daripada pelaksanaan program tersebut, dan hal ini dapat diperhitungkan dengan membandingkan kerugian yang terjadi bila program tersebut tidak dilaksanakan dengan kerugian yang akan terjadi bila program tersebut dilaksanakan.
2. Dalam proses perencanaannya, di mana sumber daya dana sangat terbatas, maka harus dipilih alternatif yang paling baik; dalam arti paling murah biayanya, namun paling effektif menghasilkan output yang diharapkan. Di mana pemilihan alternatif didasarkan pada pertimbangan bagaimana mencapai tujuan semaksimal mungkin untuk dapat diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi oleh masyarakat dengan biaya semurah mungkin.

Untuk ini ada beberap alat uji coba yang diketengahkan oleh Alan L. Sorkin yaitu Analisa Biaya manfaat dan Analisa Biaya Hasil yang berasal dari Sistem Perencanaan Program Anggaran dan dapat dipergunakan sebagai uji coba terhadap alternatif program kesehatan yang akan dilakukan; demikian juga halnya dengan Guy Carrin yang lebih menggaris bawahi mengenai penggunaan Analisa Biaya Hasil.

Dan bila kedua alat uji ini diterapkan pada pilihan alokasi dana dari Ditjen Yankes DepKes yang lebih berorientasi pada pola pelayanan kesehatan kuratif-rehabilitatif dari rumah sakit, maka terlihat bahwa inflasi biaya dari rumah sakit akan meningkat, karena beberapa faktor-faktor di bawah ini.

1. Besarnya biaya investasi untuk rumah sakit, terutama dengan adanya komponen-komponen non medis seperti: pemasangan TV, video, AC, karpet, dan telepon pribadi.
2. Adanya duplikasi peralatan antar bagian yang cenderung menuju ke model peralatan yang lebih sophisticated.
3. Sifat rumah sakit yang padat karya, sehingga sangat sensitif terhadap kenaikan gaji.
4. Khusus pada rumah sakit yang dipakai sebagai tempat pendidikan maka sering dilakukan prosedur medis yang relatif tidak diperlukan, di mana penanganan pasien cenderung dijadikan suatu studi kasus dalam dunia pendidikan, di mana ini akan berakibat meningkatnya biaya yang harus diupayakan oleh si pasien.
5. Inflasi biaya rumah sakit di USA memperlihatkan biaya rawat pasien per hari meningkat menjadi 9 - 18% per tahun, selama tahun 1967 - 1977; yang ternyata lebih besar bila dibandingkan dengan Inflasi ekonominya sendiri pada saat itu sebesar 5%; dan ternyata keadaan di Indonesia pun cenderung memperlihatkan hal yang sama, walaupun sampai sekarang belum ada data yang dapat dipegang sebagai patokan.

Yang secara detail, bila diuji satu persatu, akan memperlihatkan hasil sebagai berikut:

1. Pengujian dengan Analisa Biaya Manfaat, terlihat bahwa manfaat yang dihasilkannya cenderung menunjukkan inflasi daripada biaya rumah sakit, bila dihitung dengan nilai moneter.

Secara ringkas, dapat digambarkan perbedaan antara Analisa Biaya Manfaat (ABM) dan Analisa Biaya Hasil (ABH) ini:

Tehnik	Materi/Guna	Biaya	Manfaat/Hasil
ABM	Mengandalkan loss of production/ benefit foregone dalam mengukur nilai benefit. Untuk membandingkan program dengan tujuan berbeda.	dihitung dalam nilai uang.	dihitung dalam nilai uang.
Tehnik	**Materi/Guna**	**Biaya**	**Manfaat/Hasil**
ABH	Memperhitungkan hasil sesuai dengan unit output program dinilai. Untuk membandingkan program dengan tujuan sejenis. Untuk memilih program yang paling effektif.	dihitung dalam nilai uang.	dihitung dalam nilai satuan output program.

khusus pada ABH, maka "hasil" biasanya dihitung sesuai dengan unit output program yang dinilai, misalnya: jumlah anak yang berhasil divaksinasi, banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi dan sebagainya; di mana kedua alat uji coba ini juga dipengaruhi oleh: waktu, discount rate, dan interest rate.

Digitized by Google

2. Pengujian dengan Analisa Biaya Hasil, ternyata output yang dihasilkan, tidak mencerminkan satuan unit program yang dapat mengatasi masalah gangguan kesehatan di seluruh kepulauan nusantara secara effectif dan effisien, yang pada umumnya berhubungan dengan penduduk usia muda, masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan lainnya.

Realokasi Anggaran

Berdasarkan pendekatan masalah yang telah dilakukan di atas, khususnya di bidang ekonomi kesehatan, maka terlihat bahwa alternatif yang telah diambil oleh Direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan — Departemen Kesehatan selama Pelita III - IV, kurang mengena pada sasaran yang telah ditetapkan semula dalam RP3JPK seperti yang telah digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional.

Dengan ini, maka diharapkan bahwa alokasi anggaran Departemen Kesehatan berikutnya dapat lebih dititik beratkan pada pola upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dari Puskesmas, beserta pos-pos pelayanan kesehatan lainnya, agar distribusi pelayanan kesehatan dapat bersifat merata, baik dalam segi alokasi dana, maupun dalam segi jangkauan pelayanan kesehatan demi terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri, yaitu Manusia Indonesia seutuhnya. Dengan catatan: walaupun prioritas sektoral yang biasanya dalam neraca pembangunan dilihat dari besarnya kontribusi sektor yang bersangkutan dalam peningkatan GNP, turut menentukan alokasi dana; tapi khusus untuk sektor kesehatan persepsinya diharapkan berbeda. Di mana untuk jangka pendek sektor kesehatan adalah konsumtif, tapi untuk jangka panjang sektor kesehatan adalah produktif, yaitu sebagai alat dan sekaligus sebagai tujuan.

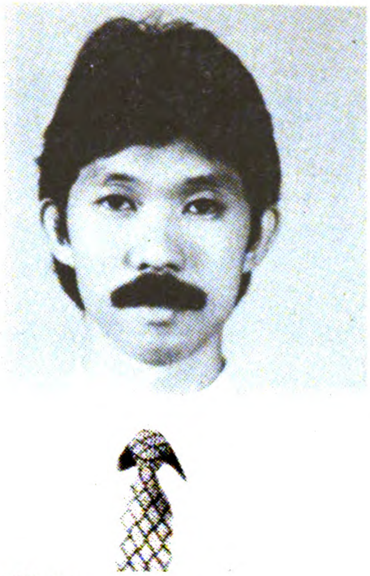

Ronnie Rivany.

di antara Rumah Sakit yang berdekatan.

Melibatkan peran serta swasta dalam upaya pelayanan kesehatan, terutama yang menuju ke arah pola pelayanan kuratif-rehabilitatif dari Rumah Sakit, agar realokasi dapat dilaksanakan untuk Pelitat V mendatang, di mana anggaran pemerintah dapat dialokir lebih banyak untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif-preventif.

Perlu dirancang lebih lanjut, cakupan upaya pelayanan kesehatan dari Puskesmas serta pos-pos pelayanan kesehatan lainnya, agar sesuai dengan program Pengembangan Kesehatan Masyarakat Desa dari Panca-Karsa Husada dan PancaKarya Husada, demi tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang di bidang kesehatan sampai tahun 2000, yang telah ditetapkan bersama dalam Sistem Kesehatan Nasional.

Perlunya peningkatan kwalitas dan kwantitas dari para penyusun kebijakan di Departemen Kesehatan, khususnya di

Demi tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Beberapa Pemikiran

Ditinjau dari segi ekonomi kesehatan dan sejalan dengan Gerakan Effisiensi Nasional, maka alokasi anggaran untuk sektor kesehatan harus dilakukan secara effektif dan effisien.

Secara umum perlu dipikirkan usaha peningkatan GNP, agar persentase GNP yang dipakai untuk sektor kesehatan dapat ditingkatkan pula; di mana negara maju lainnya seperti USA telah menghabiskan 7 - 8% dari GNP nya untuk sektor kesehatan, dibandingkan dengan Indonesia dan negara berkembang lainnya yang masih berkisar antara 2 - 5%.

Karena proporsi anggaran Ditjen Yankes DepKes selama Pelita III-IV telah dititik beratkan pada Rumah Sakit, maka perlu dilakukan Cost Containment untuk menurunkan biaya inflasi dengan jalan Cost Sharing terhadap beberapa materi seperti: pengadaan alat kedokteran yang mahal, pencucian, dapur umum, dan sebagainya; bidang perencanaan, dan atau yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan; tanpa melupakan kumpulan profesi dan masyarakat yang dapat menyalurkan konsep, pendapat dan kritik membangunnya, sebab Kebijakan Kesehatan adalah Kebijakan Nasional; dan bilamana Kesehatan Masyarakat dapat diterima sebagai suatu bagian dari pembangunan suatu negara, maka sejak itu pula dikatakan "Public Health is Politics".

Digitized by Google

Prof. Dr. Haryati Soebadio

Kebudayaan Indonesia Di Masa Mendatang

BILA kita ingat sejenak akan sejarah penelitian mengenai kebudayaan, maka jelaslah, bahwa semua definisi, mulai yang paling luas yang dibuat pada tahun 1871 oleh Tyler dan yang menyatakan, bahwa kebudayaan itu meliputi keseluruhan kemampuan manusia, termasuk keyakinan dan kepercayaan di samping seni, adat-kebiasaan, moral, etika, tatacara, hukum, perundang-undangan, pengetahuan dan lain-lain, sampai dengan rumusan singkat yang kini berlaku, yaitu bahwa kebudayaan berupa sistim nilai yang mengarahkan keseluruhan hidup manusia, maka jelaslah bahwa kebudayaan disadari sebagai kemampuan khas manusia. Selanjutnya bisa dipahami, bahwa timbul pendapat, bahwa kebudayaan karenanya berwujud sama dan serupa bagi keseluruhan umat manusia.

Akan tetapi, dengan berkembangnya ilmu-ilmu kemanusiaan seperti ethnologi (yang kemudian lebih banyak disebut antropologi budaya), dan sosiologi, disertai timbulnya negara-negara baru dalam abad ke-20 ini, disadari dimensi khusus dalam pengertian kebudayaan, yaitu bahwa kebudayaan secara intrinsik bersifat paradoxal dan sulit dikenakan kualifikasi menyeluruh atau merata. Di satu pihak, sebagai kemampuan khas seluruh umat manusia, tetap disadari dan juga terbukti kesamaan universal yang berlaku merata untuk semua masyarakat, keseluruhan umat manusia. Kesamaan universal tampak dalam berbagai prinsip dasar, tatanilai, pola atau struktur berbagai segi kehidupan manusiawi yang memungkinkan perkaitan antar budaya. Namun di pihak lain mesti diakui dan berupa kenyataan pula, bahwa kebudayaan berwujud aneka ragam dalam bentuk lahiriah serta memiliki isi yang tak terhingga variasinya menurut tempat kelahiran dan perkembangan dalam kawasan masing-masing. Artinya, wujud kebudayaan berbeda-beda mengikuti jenis masyarakat pendukungnya. Kemudian ternyata, bahwa justru unsur yang berbeda-beda itulah yang memberikan makna khusus serta sanggup mengembangkan kepribadian khas dan menjadikan kebanggaan setiap masyarakat pendukung, sehingga terjadi beda mutlak antar masyarakat dan antar budaya masing-masing kelompok masyarakat.

Selain dari itu disadari, bahwa justru karena kebudayaan itu berupa kemampuan khas umat manusia, maka kebudayaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang berkembang, artinya bersifat dinamis, mengikuti perkembangan umat manusia, yaitu masing-masing masyarakat pendukung bersangkutan. Namun demikian, justru karena mengikuti keadaaan masyarakat pendukung masing-masing, maka ada yang bisa berkembang cepat dan ada yang terasa sangat lamban hampir walau bukan pada hakikatnya tampak statis.

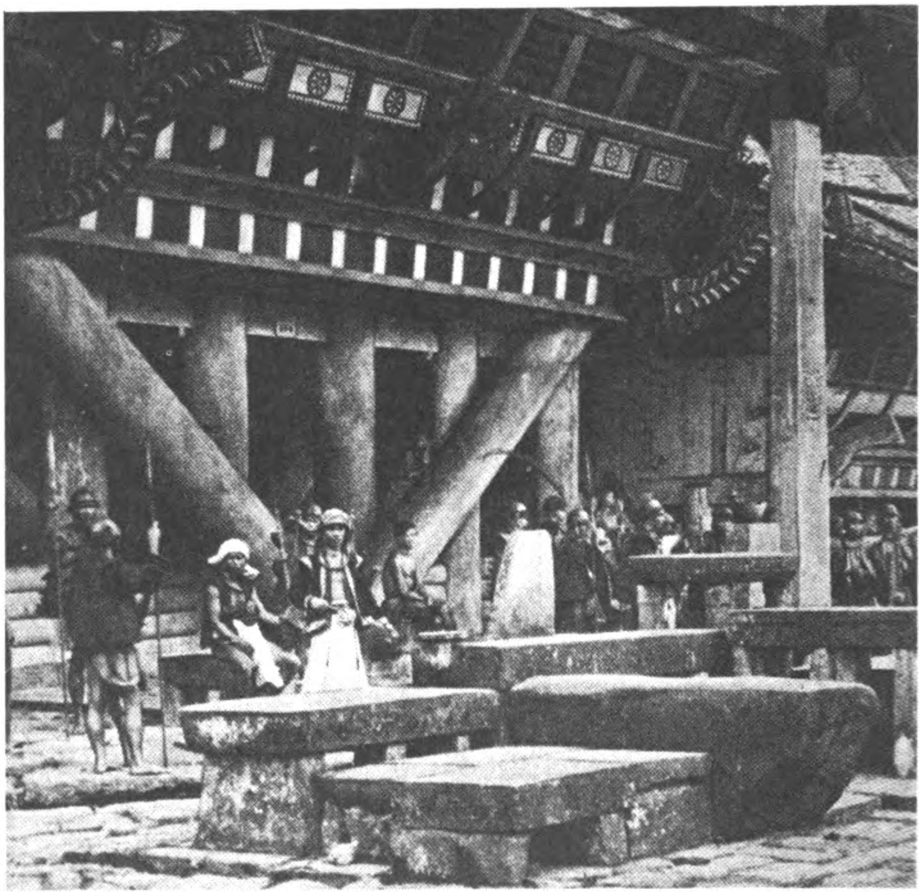

Termasuk keyakinan dan kepercayaan, di samping seni.

Adapun wujud bangsa Indonesia yang majemuk dan terdiri dari aneka macam sukubangsa, telah disadari dari saat awal diadakan penelitian terhadap kehidupan suku-sukubangsa kita dan bahasanya. Penelitian itu telah mulai dilaksanakan secara lebih sistematis sejak abad ke-19. Dan memang sifat bangsa kita itu sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu kemanusiaan seperti antropologi budaya, hukum adat, dan kemudian juga lingguistik modern terutama yang menyangkut bahasa-bahasa di wilayah Indonesia secara khusus dan rumpun bahasa Malayo-Polinesia atau Austronesia secara umum.

Maka tidak mengherankan bahwa sifat majemuk bangsa kita itupun disadari sepenuhnya dan dijadikan perhitungan oleh para Bapak kita yang menghadapi Kemerdekaan dan penyusunan Undang-Undang Dasar Negara pada tahun 1945. Pemikiran mereka tentang kebudayaan, terutama pengembangan kebudayaan nasional, karenanya cukup memadai dan tetap bisa dijadikan landasan dalam perkembangan sejarah.

Adapun, bila dikaji secara saksama, pemikiran-pemikiran tentang landasan ideologi negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama justru uraian mengenai Kebudayaan Nasional, pada hakikatnya berupa pemikiran tentang sistim nilai yang diharapkan dapat mengarahkan dan membentuk kehidupan bangsa Indonesia secara nasional. Artinya, bukan lagi terbatas sejauh keberadaan setiap warga budaya Indonesia sebagai anggota salah satu sukubangsa atau daerah tertentu, melainkan juga dan khususnya sebagai warga nasional negara Indonesia.

Hal itu dengan sendirinya jelas, apabila sistim nilai yang diharapkan bagi Kebudayaan Nasional Indonesia kita perinci sesuai bidang-bidang yang diketahui paling jelas menggambarkan wujud suatu kebudayaan serta kesanggupannya untuk menyerap perkembangan akibat jaman, yaitu ideologi, organisasi sosial dan teknologi. Dalam pada ini Pancasila dan UUD 1945 beserta uraian dalam GBHN dan juga lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, tampak memberi pengarahan secara cukup memadai atas ketiga segi budaya tersebut.

Digitized by Google

Di bidang ideologi, misalnya, Pancasila sanggup memberi landasan yang mempersatukan semua sistim ideologi, norma hidup, tatanan adat-istiadat dan lain sebagainya yang selama ini mengarahkan kehidupan sukubangsa di daerah-daerah secara terpisah-pisah. Dalam pada ini telah ditemukan bahwa Pancasila, baik dalam masing-masing sila, maupun secara keseluruhan tidak mengandung segi yang bisa dianggap diametral bertentangan dengan norma dan paham hidup sukubangsa, daerah maupun kelompok masyarakat manapun di Indonesia, sehingga mampu dijadikan landasan hidup dalam semua aspek budaya untuk keseluruhan bangsa Indonesia dalam jangkauan nasional pada setiap saat.

Dengan demikian Pancasila mampu dan mesti tercermin dalam kehidupan dan organisasi sosial bangsa secara nasional. Yang paling penting dalam hal ini ialah paham yang dalam GBHN disebut "manusia seutuhnya" yang sesungguhnya berupa manusia Indonesia sebagaimana dibayangkan

Pancasila, baik dalam masing-masing sila, maupun secara keseluruhan tidak mengandung segi yang bisa dianggap diametral bertentangan dengan norma dan paham hidup sukubangsa, daerah maupun kelompok masyarakat manapun di Indonesia, sehingga mampu dijadikan landasan hidup dalam semua aspek budaya untuk keseluruhan bang sa Indonesia dalam jangkauan nasional pada setiap saat.

dalam pembicaraan menjelang Kemerdekaan tahun 1945 itu. Yaitu manusia yang bukan mementingkan kehidupan dan perannya sebagai perorangan (individu) semata-mata ataupun dipandang sebagai hanya anggota masyarakat sukubangsa, daerah dan kelompok terbatas sendiri, melainkan sebagai manusia Indonesia yang mampu merasa diri terkait erat dengan keseluruhan bangsa secara nasional. Jelas, bahwa hal itu penting sekali untuk mengarahkan kehidupan dan seluruh tatanan sosial secara praktis, karena mesti digarisbawahi, bahwa manusia Indonesia sebagai individu maupun dalam kelompok terbatas sebagai minoritas bukan semestinya ditentangkan maupun merasa diri bertentangan dengan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya masyarakat Indonesia dalam keseluruhan bukan semestinya menekan individu atau minoritas hanya karena alasan jumlah.

Di sinilah pula tampak kearifan Penjelasan pada Pasal 32 UUD 1945, yang menyatakan kepentingan keikutsertaan seluruh bangsa dalam pengembangan Kebudayaan Nasional. Hal itu jelas pula dari lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Namun, sebaliknya penggarisannya mesti juga dilihat dari sisi sukubangsa, daerah, minoritas maupun individu, yang tidak diharapkan memaksakan pendapat atau memisahkan diri dari kehidupan bangsa secara keseluruhan.

Pancasila sanggup memberi landasan.

Sehubungan dengan organisasi kepemerintah hal itupun memberi pengarahan atas kaitan timbal-balik antara Pusat dan Daerah beserta segi-segi lintas-sektoral seperti yang selalu dihimbaukan. Dengan sendirinya pengarahan tersebut berlaku pula dalam hal hubungan antara pihak swasta dan pemerintah.

Sistim teknologi pun ada pengarahannya untuk mengembangkan modernisasi, apabila diingat penggarisan mengenai 'kemajuan adab' dalam Penjelasan pada Pasal 32 UUD 1945. Bangsa Indonesia, walaupun berpegangan pada kepribadian sendiri, bukan bermaksud kembali hidup dalam masa megah bagaimanapun di jaman jauh lampau, melainkan bermaksud mengambil tempat wajar dalam kehidupan internasional masa kini dan masa mendatang, sebisa-bisanya di samping negara-negara yang paling maju. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan demikian jelas mesti mendapat tempat yang layak, sekalipun tetap perlu diperhitungkan keadaan bangsa, bukan hanya yang hidup dalam kota-kota besar, melainkan juga dan justru yang berada di daerah-daerah yang hingga kini tetap bersifat agraris, termasuk juga yang disebut terbelakang dan hidup di daerah-daerah terpencil. Demikianlah pengembangan dan kemajuan (modernisasi) mesti diusahakan secara menyesuaikannya dengan tahap perkembangan masing-masing daerah dan keadaan lingkungannya, bukan dilaksanakan secara pukul rata dan sama rupa dalam bentuk maupun sifat untuk keseluruhan wilayah Indonesia. Hal itu kiranya penting dalam menangani pengembangan sukubangsa terbelakang dan daerah terpencil sebagaimana yang masih terdapat dalam wilayah kita dan telah disinggung di atas.

Ideologi negara dalam hal tersebut pun memberi pengarahan yang cukup jelas. Dalam memantapkan kepribadian dan ketahanan bersifat nasional, perlu diperhatikan keadaan 'bhinneka' bangsa yang tidak bisa tidak meliputi perbedaan horisontal maupun vertikal dalam hampir semua segi. Artinya, sifat budaya pribadi suku-suku bangsa di masing-masing daerah tetap mesti diberi kesempatan mengembangkan diri, sekalipun mesti menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman dalam hubungan kehidupan bernegara tunggal dalam suasana nasional, kesatuan dan persatuan. Hanya dengan cara memperhitungkan sifat pribadi budaya masing-masing sendiri itu Kebudayaan Nasional Indonesia bisa berkembang dalam kepribadian yang nasional pula dengan keseluruhan sistim budaya bertumpu pada, dan sebaliknya ikut mengembangkan, kepribadian dan ketahanan budaya yang nasional. Memang mesti digarisbawahi bahwa Ketahanan Nasional dan Sistim Kebudayaan Nasional berkembang bersama-sama dengan perkembangan bangsa secara keseluruhan.

Digitized by Google

Sifat Bhinneka Bangsa dan Kesatuan Nasional

Penggarisan dan pengarahan hukum dan perundang-undangan negara yang betapapun telah dirasakan memadai, namun dengan sendirinya belum sekaligus bisa menjadi fakta hidup. Karenanya selamanya perlu diadakan usaha praktis dalam kehidupan berbangsa. Dalam pada ini tidak mungkin diingkari, bahwa sifat masyarakat Indonesia memang bhinneka dan memiliki kebudayaan asli yang bhinneka pula. Dalam pada ini keadaan masyarakat kita itu bukan berupa keanehan atau kekecualian. Kebanyakan negara, khususnya juga yang hidup di kawasan Asia Tenggara ini, pada hakikatnya bersifat multikultural dan bahkan multirasial. Maka bila dikaji secara garis besar, maka sifat bhinneka budaya di Indonesia pertama-tama meliputi:

(a) Kebudayaan ethnik atau sukubangsa, yaitu kebudayaan yang didukung oleh masing-masing sukubangsa (grup ethnik) kita.

(b) Kebudayaan daerah, yang pada hakikatnya berupa gabungan ataupun pembauran antara berbagai kebudayaan sukubangsa yang kebetulan hidup dalam satu daerah tertentu secara berdekatan dan berhasil saling mempengaruhi sejak lama.

Kebudayaan-kebudayaan setempat itulah yang diharapkan bisa berkembang dan ikut membentuk Kebudayaan Nasional sebagai kerangka hidup nasional dalam persatuan di negara kesatuan.

Adapun bila diingat, bahwa suatu kebudayaan berupa hasil kemampuan manusia yang didukung oleh kelompok masyarakat tertentu, perlu disadari, bahwa baik kebudayaan sukubangsa tertentu, maupun kebudayaan yang berada di masing-masing daerah, tetap akan hidup dan berkembang sepanjang jaman, selama masih ada pendukungnya. Hal itu akan terjadi di samping berkembangnya Kebudayaan Nasional, yaitu yang mesti disifatkan sebagai kerangka hidup nasional.

Maka jelaslah, bahwa, supaya tidak terjadi saling menentang antara kebudayaan setempat dengan kebudayaan Nasional, perlu ada kesadaran mengenai kesatuan nasional, atau, dengan perkataan lain, perlu digalang perasaan solidaritas nasional. Dalam pada ini, sebagaimana diketahui, masalah solidaritas nasional sudah banyak dibicarakan dan telah juga menimbulkan berbagai penjelasan dan pengertian. Namun demikian, secara umum solidaritas nasional itu dapat diartikan sebagai rasa persaudaraan, tenggang rasa, antar kelompok masyarakat, sukubangsa maupun jenis minoritas lain, yang telah bertekad bersama untuk mencapai tujuan bersama pula. Tujuan bangsa Indonesia dengan sendirinya adalah hidup dalam persatuan di negara kesatuan atas dasar Pancasila dan UUD 1945.

Adapun, sebagaimana telah sering diungkapkan, dalam hubungan keadaan majemuk masyarakat Indonesia, pada hakikatnya bangsa kita memiliki kelebihan. Yaitu, bahwa, betapun bhinneka kenyataan praktis antar sukubangsa, namun ada kesatuan dasar budaya yang terutama terbukti dalam kesamaan rumpun bahasa, namun juga dalam berbagai segi budaya secara umum. Karena itu kalimat kedua dalam Penjelasan pada Pasal 32 UUD 1945 memang ada kenyataan sejarahnya, yaitu bahwa "Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia" memang dimungkinkan "terhitung sebagai kebudayaan bangsa", sekurang-kurangnya karena ada kesamaan dasarnya.

Mungkin tidak tampak langsung, namun kalimat itupun pada hakikatnya merumuskan landasan Kebudayaan Nasional dengan memberi penggarisan atas ciri-ciri khas yang dikehendaki, yaitu mesti berkepribadian bangsa. Sebagaimana telah disinggung di muka, justru segi-segi tradisional suatu kebudayaan, yaitu yang berkembang sesuai tempat asal dan keadaan lingkungan sepanjang sejarah, memberi makna khusus serta membentuk identitas, kepribadian, pada para pendukungnya. Karena itu, bila Kebudayaan Nasional memang diinginkan memiliki kepribadian khas Indonesia yang kuat dan berakar, maka Kebudayaan Nasional itu mesti berlandaskan kebudayaan di daerah dan sukubangsa yang menjadi anggota serta pendukung Kebudayaan Nasional.

Dalam pada ini perlu diperhatikan pula, bahwa dalam penggarisan bersangkutan jelas disebutkan "daerah-daerah di seluruh Indonesia". Artinya, dalam menilai "puncak-puncak kebudayaan lama dan asli" bukan semestinya ditonjolkan ciri-ciri khas suatu daerah atau sukubangsa yang tertentu saja. Semua daerah, semua sukubangsa, pendeknya, keseluruhan bangsa harus diberi kesempatan memberi masukan untuk pengembang Kebudayaan Nasional Indonesia. Di sini terletak kepentingan untuk meneliti, dan juga menyebarluaskan hasil penelitian, atas semua segi budaya di keseluruhan wilayah Indonesia, dengan tujuan memperkenalkannya dan dengan demikian memberi kesempatan untuk mengadakan pilihan. Dengan demikian peningkatan dari wilayah budaya terbatas pada daerah atau sukubangsa untuk menjadi wilayah budaya nasional dalam penggalangan persatuan dan kesatuan nasional, bisa berlangsung tanpa menimbulkan frustrasi yang kurang menguntungkan. Dasar kesamaan budaya yang memang ada, dalam hal ini justru akan bisa membantu banyak dalam menemukan relevansi kuat menggalang solidaritas dan menumbuhkan persatuan dalam kesatuan yang diinginkan.

Kebudayaan Indonesia dalam Interaksi Antar Budaya

Sebagaimana telah disebutkan di muka, kebudayaan secara umum berwujud aneka ragam dan majemuk dalam kenyataan masing-masing penampilan individual setiap kelompok masyarakat terbatas. Hal itupun berarti, bahwa pada prinsipnya setiap kebudayaan terbatas memiliki ciri-ciri yang memungkinkan masyarakat bersangkutan berkembang hanya sesuai dengan jalur khasnya sendiri.

Namun demikian, suatu kebudayaan khas atau terbatas seperti itu tidak mungkin dibayangkan dan dipahami sebagai sesuatu yang sama sekali tidak ada kaitan dengan, atau mengalami sentuhan sedikitpun dari, kebudayaan-kebudayaan lain. Suatu kebudayaan yang tertutup secara hermetis dan hanya bereksistensi dalam kalangan terbatasnya, lama-kelamaan akan mengering, menurun dan akhirnya mati dengan sendirinya pula.

Sebagaimana dapat disaksikan di seluruh dunia, justru hubungan terbuka antar budaya memberi dasar kuat dan gairah untuk mengembangkan diri bagi setiap kebudayaan sesuai dengan kepribadiannya, justru akibat saling memberi masukan dan terus-menerus mengadakan sintesis sehat antara

Kenyataan menunjukkan, bahwa memang dalam persimpangan jalan antar budaya masing-masing kebudayaan menjadi lebih sadar dan yakin akan kepribadian sendiri, dan malahan dapat memantapkan diri, sehingga dalam menerima masukan dari luar wilayah budaya sendiri dapat terjadi penggabungan yang wajar akibat penyaringan sadar maupun tidak-sadar terhadap masukan itu sesuai dengan kecocokan pribadinya.

sifat-sifat intern sendiri dengan masukan yang didapat. Kenyataan menunjukkan, bahwa memang dalam persimpangan jalan antar budaya masing-masing kebudayaan menjadi lebih sadar dan yakin akan kepribadian sendiri, dan malahan dapat memantapkan diri, sehingga dalam menerima masukan dari luar wilayah budaya sendiri dapat terjadi penggabungan yang wajar akibat penyaringan sadar maupun tidak-sadar terhadap masukan itu sesuai dengan kecocokan pribadinya. Dalam sejarah umat manusia memang juga ditemukan, bahwa, walau berbagai kebudayaan secara menyeluruh menyebar akibat perpindahan bangsa-bangsa pendukungnya (seperti misalnya terjadi dengan bangsa Mongol atau bangsa Huna), namun suatu jenis kebudayaan tertentu tidak pernah diterima oleh bangsa ataupun grup ethnik lain tanpa diadakan perubahan atau pemilihan unsur-unsur tertentu yang dianggap cocok. Dan justru dalam mengubah dan memilih itu tampak kepribadian dan ketahanan budaya bangsa bersangkutan.

Keadaan seperti itu dapat disaksikan da-

Digitized by Google

lam kontak-kontak budaya yang dialami oleh bangsa Indonesia, dalam masing-masing daerah dan dengan masing-masing sukubangsa sepanjang sejarah. Kenyataan dalam pada itu memberi gambaran bahwa sukubangsa dan daerah yang mengalami banyak hubungan dengan bangsa dan kebudayaan lain, justru bisa berkembang lebih pesat daripada masyarakat yang tertutup dan hidup terpencil dari arus lalulintas bangsa-bangsa.

Namun demikian, dalam hubungan antar bangsa dan interaksi antar budaya itu perlu juga diperhatikan berbagai masalah. Pertama-tama menjadi kenyataan pula, bahwa untuk berhasilnya kontak budaya dalam arti bisa menimbulkan interaksi budaya yang wajar dan seimbang, diperlukan adanya keyakinan mutlak akan kepribadian dan kedaulatan budaya sendiri. Disamping itu diperlukan juga keterbukaan terhadap, dan kesediaan untuk mengakui dan menghargai, kepribadian dan kedaulatan budaya bangsa lain.

Dengan perkataan lain, kontak budaya bisa menghasilkan interaksi budaya seimbang, apabila yang mengadakan kontak itu berupa dua pihak yang mampu merasa sama nilai, artinya di satu sisi memiliki keyakinan cukup akan kedaulatan budaya sendiri, dan di sisi lain bersikap terbuka dan bersedia mengakui dan menghormati kedaulatan budaya pihak yang dihadapi.

Telah dialami cukup sering dan di seluruh dunia pula, bahwa bila kontak terjadi antara dua pihak yang tidak sanggup merasa sama-sama berdaulat, maka timbul bahaya bahwa satu pihak menjadi ''kebudayaan pembina'' *(leading culture)*, dan akibatnya pihak yang lain menjadi ''kebudayaan yang dibina'' *(led culture)*. Dalam pada ini masalah kebudayaan pembina dan yang dibina itu hingga sekarang menjadi masalah psikologis terutama bagi bangsa negara-negara baru di benua Afrika dan telah menimbulkan gambaran tentang adanya 'kebudayaan kuat' dan 'kebudayaan lemah' yang saling berhadapan dengan hasil yang mudah dapat dibayangkan.

Untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan seperti itu, perlu dipupuk dan diperkuat terus-menerus rasa harga diri, kepercayaan terhadap diri dan bangsa sendiri, serta keyakinan akan kepentingan dan martabat kebudayaan dan kepribadian sendiri dalam menghadapi bangsa dan kebudayaan asing. Hanya dengan keyakinan itu, yang kita sebut Ketahanan Nasional, dapat dihindari bahaya yang selalu dikhawatirkan dalam seluruh dunia berkembang, yaitu bahwa kontak budaya terutama dengan negara-negara maju yang membawa modernisasi, mutlak akan memusnahkan kepribadian dan kebudayaan sendiri.

Dalam hubungan itu suasana yang menguntungkan bagi pengembangan kreativitas bangsa perlu ditingkatkan guna mempertahankan dan mengembangkan kepribadian budaya sendiri, suatu bangsa perlu merasa berkaitan erat dengan dan mendapat inspirasi dari, kreativitas bangsanya sendiri. Justru dengan gairah kreativitas itu dapat disuburkan dan diperkuat kepribadian bangsa liwat akar-akar budaya sendiri. Dan tanpa akar kuat tidak ada kebudayaan yang mampu berkembang secara sehat.

Bisa berkembang dengan pesat.

Kreativitas bangsa juga akan memberi rasa keaslian, ''authenticity'', yang menguntungkan bagi pemasukan kelengkapan struktural yang lahir dalam dialog antar budaya (termasuk yang terjadi di dalam batasan kemajemukan bangsa sendiri) dengan hasil memperkaya masing-masing kepribadian. Dalam pada itu dapat dideteksi secara awal dan ditanggulangi secara langsung pula titik-titik rawan dalam hubungan pengaruh masukan baru terhadap sifat-sifat khas dan inti bangsa, yaitu yang terwujud dalam ciri-ciri khusus, warisan budaya tradisional serta nilai hidup yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa.

Dengan demikian kontak antar budaya dan antar bangsa akan dapat dimanfaatkan secara maximal sambil memperkecil segi-segi negatif yang lazim dikhawatirkan dalam menghadapi setiap pengaruh yang datang dari luar, terutama yang datang dari pihak bangsa dan negara yang sudah lama maju. Dengan perkembangan komunikasi modern dewasa ini tidak ada bangsa atau negara satupun di bumi ini, yang akan sanggup menutup diri atau membendung masuknya pengaruh kebudayaan asing ke dalam wilayahnya. Indonesia, yang terletak di antara dua lautan dan dua benua, dan sepanjang sejarah telah mengalami pengaruh dari luar, dengan sendirinya pun sulit menangkal pengaruh asing, kecuali dengan keyakinan akan kedaulatan budaya sendiri dan ketahanan dari dalam.

Dalam kaitan pengaruh kebudayaan asing itu tidak mungkin diabaikan dan perlu diperhitungkan pula pengaruh dari warga negara Indonesia yang berasal dari wilayah budaya asing. Dengan sendirinya pengaruh mereka itupun perlu dihadapi dengan kekuatan pribadi dan ketahanan nasional yang sama, serta dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan budaya bangsa sendiri.

Pengembangan Kehidupan Nasional Indonesia

Kebudayaan-kebudayaan yang berada di wilayah Indonesia secara umum dapat dikatakan sudah mengalami perkembangan dari dalam dan sudah juga terkena pengaruh dari luar kawasannya sepanjang sejarah. Selain sudah terjadi hubungan antar pulau dan antar daerah sendiri, maka berupa kenyataan pula, bahwa wilayah Indonesia sejak cukup awal dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain terutama untuk kepentingan dagang. Peninggalan budaya bangsa dalam hal ini memberikan kenyataan. Dan kenyataan bukan hanya tampak secara fisik atau material dalam peninggalan berupa benda, melainkan juga terasa dalam peninggalan non material atau spiritual se-

Digitized by Google

perti berbagai kebiasaan ritual, isi sastra, dan lain-lain. Demikianlah dapat ditunjukkan bangunan lama yang jelas mengandung unsur budaya asing, seperti berbagai bangunan ibadah, bangunan umum dan perumahan, susunan pertamanan dan lain-lain, di samping ditemukan bentuk sastra, pandangan ritual dan filsafat ataupun kebiasaan tradisional yang menunjukkan suasana yang berasal dari luar kawasan aslinya. Dalam pengembang budaya setempat juga tampak pengaruh antar pulau dan antar daerah dalam wilayah Indonesia sendiri. Hal itu terasa, bila kita, misalnya, mendengar bunyi musik atau melihat gerak tari yang bersuasana, bahkan berbentuk, sama dengan berbagai daerah berdekatan atau yang diketahui telah mengadakan hubungan liwat laut sejak lama. Sebagai contoh dapat ditunjukkan pengaruh budaya Jawa terhadap kawasan pantai Kalimantan dan lain-lain.

Namun demikian, dalam menerima pengaruh antar budaya itu, di Indonesia jelas terjadi apa yang telah disinggung di muka, yaitu bahwa penerimaan dilakukan secara selektif dan sesuai dengan kecocokan pada kebudayaan sendiri. Malahan, bangsa Indonesia dalam hal ini terkenal sangat menunjukkan kepribadian sendiri yang kuat dan menonjol. Atas dasar penemuan arkeologi, misalnya, sarjana asing seperti Quaritsch Wales dan Bos telah memakai istilah "local genius" untuk sifat bangsa kita itu.

Memang telah dapat ditunjukkan secara nyata, betapa bangsa kita di masa lampau menerima pengaruh dari luar dengan kebebasan pribadi yang mandiri. Dalam disertasi Edi Sedyawati misalnya, kreativitas seniman patung Jawa berbicara jelas dalam pematungan kedewaan sekalipun, sedangkan menurut peraturan agama Hindu di India, pematungan kedewaan ketat sekali patokannya. Namun demikian, dalam hal pembangunan tempat pemujaan sudah sejak awal disadari kebebasan bangsa kita. Candi Borobudur dalam hal ini berupa contoh kongkrit paling menonjol yang terkenal di seluruh dunia. Borobudur adalah bangunan unik untuk dunia, walaupun tetap diakui, bahwa suasana keagamaan adalah Buddhisme, yang berasal dari benua India.

Justru karena kenyataan "local genius" itu, maka sangat penting untuk mempelajari ungkapan kebebasan watak dan kreativitas pribadi bangsa Indonesia. Warisan budaya bangsa dengan demikian mutlak perlu mendapat perhatian khusus, bukan untuk sekedar membangun kembali atau dengan tujuan pelestarian secara kering, melainkan terutama supaya dapat dipelajari dan dihayati makna "local genius" dan kedalaman kreativitas bangsa sendiri.

sebagai telah diuraikan di atas, justru kesadaran akan, dan rasa menyambung dengan, kreativitas bangsa sendiri, akan mampu memberi rasa keaslian, kepribadian, yang menguntungkan hubungan dan perkenalan dengan kebudayaan lain. Hanya dengan rasa kepribadian yang kuat, dan diyakini sepenuhnya, interaksi dengan kebudayaan lain akhirnya dapat terjadi tanpa frustrasi atau mengalami bahaya dilanda oleh masukan asing dengan akibat keaslian sendiri terkorbankan.

Hal itu penting juga, kiranya, dalam menghadapi segi lain dalam hubungan interaksi budaya, yang tampak kurang mendapat perhatian, yaitu peran kebudayaan kita sendiri dalam pengembangan peradaban global dunia.

Di atas telah disebutkan, bahwa setiap kebudayaan memiliki ciri-ciri khas di samping sifat-sifat universal, yang justru memungkinkan perkaitan antar budaya dan menunjukkan pola tumpang-tindih serta nilai-nilai yang berlaku secara umum untuk keseluruhan umat manusia. Keadaan itu memang justru berupa bukti, bahwa kebudayaan berupa ciri khas manusia yang mutlak membedakannya dari kehidupan dan dunia hewan. Konsekuensinya ialah, bahwa pada dasarnya keseluruhan umat manusia ikut serta dalam membentuk dan memajukan wujud kebudayaan khas umat manusia itu dan membawanya ke arah peradaban dunia secara menyeluruh.

Namun demikian, dalam pada ini berupa kenyataan pula, bahwa dengan perkembangan teknologi mutakhir yang sangat berperan dalam memberi informasi dan mengadakan komunikasi yang kini didominasi oleh negara-negara maju, seakan-akan tampak proses "globalisasi" budaya yang cenderung memeratakan hanya beberapa segi dalam gaya hidup dan ungkapan budaya yang tertentu, yaitu yang berasal dari bangsa dan negara maju tersebut. Globalisasi yang terasa sepihak itulah, yang kini sangat dikhawatirkan akan dapat memusnahkan kepribadian bangsa-bangsa dari negara berkembang, karena mereka itu jauh ketinggalan dalam memberi informasi dan mengadakan komunikasi mengenai kebudayaan sendiri, dengan akibat sulit menangkal atau melunakkan pengaruh yang datang dari negara-negara maju itu.

Meskipun demikian, sejauh ini dunia secara menyeluruh masih jelas memperlihatkan keaneka-ragaman budaya yang luar biasa kayanya. Mungkin sebab utamanya ialah, bahwa semua bangsa di seluruh dunia kini benar-benar sadar akan kepentingan kepribadian budaya, "cultural identity" sendiri. Tetapi perlu diperhitungkan pula, bahwa baik secara terbatas dalam wilayah kecil, maupun secara global di seluruh bu-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG

DENGAN SEMANGAT PENGABDIAN

DAN BERKARYA TERUS,

KITA SUKSESKAN PEMILU 1987

DEMI TERWUJUDNYA

MASYARAKAT ADIL MAKMUR DAN SEJAHTERA

Digitized by Google

mi, sulit terjadi atau dapat diusahakan kesama-rupaan mutlak. Dunia memang akan menjadi kaku dan sulit berkembang, andaikata tidak ada perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh kekhasan masing-masing kebudayaan setempat dan yang sepanjang sejarah umat manusia justru dialami sebagai melahiran pembaharuan. Sifat anekaragam dunia itulah yang ternyata essensial untuk kemajuan umat manusia. Liwat kontak antar budaya yang bermacam-macam itu lahir perubahan dan terjadi perkembangan akibat adaptasi, saling berpengaruh, saling meminjam dan memberi masukan. Kini sudah disadari bahwa perkembangan adab manusia yang relatif sangat cepat itu harus dilihat sebagai terutama disebabkan oleh kemampuan umat manusia secara umum untuk saling meminjam unsur masing-masing kebudayaan, mengintegrasikan serta mengembangkannya di dalam kebudayaan sendiri dan akibatnya mengalami kemajuan.

Dalam pada ini mesti disadari, bahwa semua kebudayaan yang berasal dari semua bangsa yang hidup, pernah hidup dan akan hidup di bumi ini pada hakikatnya memiliki potensi yang sama untuk ikut mengembangkan Peradaban Dunia.

Maka dalam pengembangan Kebudayaan Nasional yang berarti memantapkan dan mengembangkan kepribadian sendiri ke arah peradaban sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, perlu juga diadakan usaha untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang Kebudayaan Nasional keluar kawasan sendiri. Bagi bangsa-bangsa berkembang memberi informasi budaya itu mempunyai keuntungan ke dua arah. Pertama-tama ada keuntungan kedalam: Usaha informasi menambah pengetahuan tentang kebudayaan sendiri serta dapat memperkuat kesadaran dan keyakinan akan identitas sendiri. Hal itu umumnya memupuk gairah untuk memperkuat identitas budaya sendiri pula. Keuntungan kedua mengarah ke luar: Usaha memberi informasi dengan sendirinya berakibat memperkenalkan kebudayaan sendiri keluar batas-batas wilayah sendiri. Dengan demikian bangsa berkembang itu mau tak mau ikutserta dalam memberi sumbangan untuk perkembangan Peradaban Dunia.

Selanjutnya, dalam memberi dan sebaliknya menerima informasi budaya dari luar, pandangan mau tak mau akan meluas pula, sedangkan dengan mengadakan perbandingan antar budaya yang, sebagaimana telah dialami dalam sejarah dunia, acapkali justru menguntungkan pengembangan kebudayaan sendiri, akan dapat dimajukan dan dikembangkan lebih lanjut lagi kebudayaan sendiri itu. Dengan demikian sumbangan dari pihak bangsa-bangsa, termasuk yang kini sedang berkembang, ikut serta secara positif dalam pengembangan Peradaban Dunia.

Dalam Pendahuluan UUD 1945 secara jelas keikutsertaan bangsa Indonesia dalam perkembangan Peradaban Dunia digariskan.

Dengan sendirinya, usaha informasi dan komunikasi keluar sulit dilaksanakan, apabila tidak dibarengi dengan penelitian dan pengembangan pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan materi maupun sarana. Di samping perlu dikembangkan mutlak metodologi informasi dan komunikasi, mesti juga diadakan studi tentang sarana penyebaran supaya dapat terlaksana secara yang paling efektif dan efisien.

Dalam pada ini makin jelas, bahwa sikap terbuka, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir berupa syarat mutlak.

Pendidikan dalam hubungan Pengembangan Kebudayaan Nasional

Dalam arti paling luas pendidikan di satu pihak berupa upaya dan sarana untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi yang satu ke generasi berikutnya dan di pihak lain berupa sarana komunikasi untuk kepentingan kehidupan kemasyarakatan.

Dengan perkataan lain pendidikan berupa upaya enkulturasi di samping sosialisasi.

Pendidikan nasional dan pengembangan kebudayaan nasional bertujuan membentuk manusia Indonesia modern yang berkaitan erat dengan identitas budaya nasional sendiri, bukan perorangan yang merasa diri lepas akar dari masyarakat dan lingkungan hidup sendiri.

Demikianlah pendidikan penting, baik dalam pelestarian maupun sekaligus pula dalam pengembangan identitas budaya dalam hubungan kehidupan nasional. Dalam pada ini mesti digarisbawahi, bahwa identitas atau kepribadian budaya bukan berkaitan hanya dengan warisan budaya ataupun nilai-nilai tradisional sekalipun unsur-unsur tradisional itu penting dalam pemantapan ciri-ciri khasnya. Namun seperti juga kebudayaan terus mengikuti perkembangan bangsa. Demikianlah pendidikan mesti berkaitan, baik dengan memantapkan kepribadian nasional sesuai dengan nilai-nilai yang telah dianggap relevan sepanjang jaman, di samping mesti melihat ke depan dan mengaitkan diri dengan sifat dinamis perkembangan kebudayaan maupun bangsa.

Hal itu berarti, bahwa dalam menghadapi pendidikan nasional yang mesti relevan untuk masa mendatang, harus diusahakan penggabungan secara berimbang dari nilai-nilai bangsa yang dianggap relevan itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi modern dan tuntutan kehidupan di masa kini dan masa mendatang.

Adapun usaha komunikasi dan sosialisasi liwat pendidikan tersebar luas sebagaimana terjadi di masa kini, terutama akibat penyebarluasan kemahiran baca tulis (literacy) secara menyeluruh yang terjadi karena expansi kebudayaan Barat liwat kolonisasi dan penguasaan bumi oleh bangsa-bangsa Barat itu. Sejarah menunjukkan, bahwa dalam kebudayaan-kebudayaan lama, betapa pun tinggi taraf yang telah dicapai, terdapat semacam konservatisme terhadap pendidikan, sehingga kemahiran baca-tulis dan penguasaaan ilmu hanya terbatas pada elit tertentu. Demikian jelaslah, bahwa pendidikan liwat kemahiran baca-tulis sebagaimana yang kini terjadi di seluruh dunia, mesti diakui sebagai inovasi yang timbul akibat expansi dan gaya hidup Barat.

Di Indonesia pendidikan cara Barat itu dibawa masuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun sejak awal sudah mendapat kritik dan berbagai pihak. Ketrampilan intelektual yang tidak dibarengi dengan perkembangan mental-spiritual sesuai dengan kepribadian sendiri, apalagi dalam hubungan perubahan-perubahan sosio-kultural yang terjadi, terasa kurang menguntungkan bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dijajah. Dari pihak pemerintah kolonial Belanda sendiri akhirnya juga diusahakan penyesuaian dengan keadaan sosio-budaya bangsa Indonesia, sedangkan dari pihak bangsa Indonesia jelaslah, bahwa Taman Siswa berupa contoh yang paling menonjol.

Pandangan Ki Hajar Dewantoro pada dasarnya sejajar dengan pandangan yang masih berlaku sampai kini, yaitu bahwa pendidikan di Indonesia tidak bisa tidak mesti memperhitungkan latar belakang sosial-budaya masyarakat Indonesia sendiri. Tujuan pendidikan disepakati untuk meningkatkan kesanggupan dan kesiapan intelektual, di samping memantapkan dan memperkuat identitas budaya nasional. Sebagaimana telah disebutkan di atas, penerimaan terhadap materi budaya baru sebagai masukan dari kebudayaan luar kawasan, termasuk juga ide-ide dan pengetahuan praktis mengenai teknologi dan ilmu pengetahuan modern, hanya dapat terlaksanakan secara baik, bila ada keyakinan mantap mengenai identitas pribadi. Pendidikan nasional dan pengembangan kebudayaan nasional bertujuan membentuk manusia Indonesia modern yang berkaitan erat dengan identitas budaya nasional sendiri, bukan perorangan yang merasa diri lepas akar dari masyarakat dan lingkungan hidup sendiri.

Kiranya jelas, bahwa hasil penelitian yang diadakan sehubungan dengan pengembangan Kebudayaan Nasional relevan sekali dan perlu dimanfaatkan untuk penyusunan konsep maupun dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia pendidikan mesti relevan dengan keadaan masyarakat itu. Dengan demikian kebijaksanaan dalam pengembangan kebudayaan nasional tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan pendidikan nasional secara menyeluruh.□

Digitized by Google

Oleh: Abdul Hadi W.M.

Sastra Sebagai Gambaran Kesadaran Intelektual

Sastra, sebagaimana telah banyak digambarkan oleh ahli-ahli sejarah, ternyata merupakan bidang kajian yang menarik bukan saja bagi ahli-ahli bahasa dan sastra itu sendiri. Namun juga bagi ahli sejarah dan kemasyarakatan. Hal ini misalnya dikemukakan oleh dua sejarawan Indonesia terkemuka, Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo. Taufik Abdullah[1] mengatakan bahwa, walaupun sastra adalah hasil imaginasi kreatif pengarang namun ia tidak terlepas dari kenyataan empiris. Dan walaupun ia bersifat pribadi, namun sedikit banyaknya ia adalah pantulan dari pengalaman pengarangnya dalam kehidupan sosial.

Kuntowijoyo[2] lebih jauh mengatakan bahwa, sebagai bidang kajian sejarah intelektual sastra Indonesia menawarkan begitu banyak kemungkinan dari *internal dialectic*-nya, dengan membahas perkembangan, kontinuitas dan perobahan konsep-konsep kunci dari tema, proposisi dan posisi pikiran pengarangnya. Sebagai sistim simbol, menurut Kuntowijoyo, sastra mempunyai kaitan erat dengan sistem sosial yang melahirkannya. Karena itu mempelajari sastra dari segi intelektualnya sebenarnya sama dengan mempelajari kesadaran masyarakatnya.

Tentu saja pendekatan historis kedua sarjana ini tidak bisa disamakan dengan pendekatan kaum penganut historisisme atau Marxis, yang melihat sastra ditentukan oleh semata-mata faktor luar yaitu keadaan sosial, realitas sejarah atau malahan kesadaran kelas. Penganut aliran historisisme ini pada umumnya meletakkan pengarang dalam posisi pasif, yang kesadarannya ditentukan oleh faktor luar, sedangkan kedua ahli sejarah Indonesia itu tetap meletakkan pengarang dalam posisi aktif yang dengan kesadaran intelektualnya ikut menilai perkembangan masyarakatnya.

Dalam tulisan ini, saya ingin mengemukakan dua novel yang menarik sebagai contoh, yaitu *Belenggu* karya Armyn Pane dan *Atheis* karya Achdiat K. Hadimadja. Kedua novel ini menggambarkan bagaimana dengan daya kritis dan kemampuan imaginatif sanggup bukan saja melukiskan keadaan masa kini yang masih remang, namun juga memberi gambaran ke depan yang cukup jelas.

Novel Belenggu selesai ditulis oleh Armyn Pane pada tahun 1938 pada saat Polemik Kebudayaan yang mempermasalahkan Timur dan Barat belum reda benar. Pada waktu itu tekanan-tekanan politik kolonial semakin keras menjelang datangnya pendudukan Jepang. Gerakan-gerakan kebangsaan secara politis kegiatannya telah mulai surut, sehingga Sanusi Pane cenderung mengemukakannya sebagai mengalami kegagalan. Masyarakat menengah kota berada dalam transisi. Tidak ada kepastian hidup dan nilai-nilai. Dengan bagus, melalui novelnya itu, Armyn Pane menggambarkan situasi akhir masa kolonialisme Belanda itu dan dengan kritis dikecamnya peran sastra Pujangga Baru dan kelas menengah kota yang ternyata tidak mampu membawa perobahan sosial yang mendasar, kecuali di bidang politik.

Belenggu mengisahkan cinta segi tiga antara Tono, Tini dan Yah. Sebagai seorang dokter terpelajar yang mempunyai banyak kawan di kalangan pergerakan nasional, Tono sangat bangga memperoleh istri cantik seperti Tini. Namun rumah tangga mereka segera retak oleh kesibukan Tono sebagai dokter. Di tengah kesibukan suaminya, Tini merasa tak berarti dibandingkan dengan pengabdian Tono dalam melayani pasien-pasiennya. Mulailah Tini keluar malam, karena di rumah tak memperoleh kebahagiaan. Konflik semakin menjadi-jadi tatkala Tono memperoleh kedamaian dalam pelukan Yah, seorang penyanyi keroncong yang bisa melayaninya sebagai laki-laki. Tapi sebagaimana dengan Tini, dengan Yah pun akhirnya Tono harus berpisah karena juga tak memperoleh kebahagiaan.

Melalui novelnya ini Armyn Pane mempersoalkan bahwa tak ada kepastian dalam hidup ini, dan kebahagiaan tidaklah ditentukan oleh status sosial yang kita peroleh. Pandangan sempit kelas menengah Indonesia yang baru muncul digugat oleh Armyn Pane. Dia juga melukiskan gejala amoral yang muncul di kalangan kelas menengah bersamaan dengan tak pastinya nilai-nilai, suatu gejala yang muncul bersamaan dengan datangnya hedonisme material, yaitu gejala amoral bidang seksual yang kini sudah tak asing lagi di tengah masyarakat kita.

Taufik Abdullah memberi komentar bagus atas novel ini: "...*Belenggu* menanyakan apa yang selama ini tak perlu ditanyakan, memasalahkan apa yang tak biasa dimasalahkan... (ia) membayangkan masyarakat yang gelisah ketika kepastian hanyalah kemungkinan. Dan bayangkanlah betapa banyaknya pasangan konflik pendekatan kultural, agama dan politik pada waktu itu." Yang dimasalahkan oleh Armyn Pane bukan masalah baik buruknya nilai tradisional, karena sebagai Barat dan Timur telah membaur begitulah kebudayaan tradisional dan modern juga telah membaur. Yang dimasalahkan oleh Armyn Pane ialah kekosongan dan kegelisahan jiwa masyarakat kelas menengah menghadapi perobahan nilai-nilai dan ketakpastian hidup. Jika status dan kesibukan sosial belum tentu memberikan kebahagiaan, demikian pula halnya dengan pelampiasan kenikmatan-kenikmatan sesaat seperti pelampiasan nafsu di bidang seksual.

Ketika novel ini pertama kali muncul di tengah khalayak pembacanya, tak sedikit kecaman dan cacian dilontarkan pada pengarangnya. Pembaca wanita yang terpelajar mengecamnya sebagai amoral. Malahan Sutan Takdir Alisyahbana mengecam pula sebagai melemahkan semangat. Namun mereka tak membaca kemungkinan yang tersembunyi di dalam novel ini. Gambar keadaan kelas menengah kota yang dilukiskan Armyn bukannya memudar beberapa tahun setelah novel itu terbit, malahan sebaliknya novel ini menemukan relevansinya. Gejala hedonisme di kalangan kelas menengah kota makin tampak meluas, dan inilah rupanya yang membuat kemampuannya membawakan perobahan sosial yang mendasar kian memudar.

Di samping itu, novel yang muncul sepuluh tahun setelah Sumpah Pemuda ini, menjadi tanda dari perobahan radikal Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia. Tak terbayangkan perkembangan Bahasa Indonesia menjadi begitu cepat, seandainya tidak ada novel seperti ini yang ditulis dengan semangat dan gaya bahasa baru melangkahi tatabahasa yang konvensional masih berlaku di masanya.

Sesungguhnya di sinilah letak sumbangan yang bisa diberikan pengarang kreatif dan inovatif kepada kebudayaan dan masyarakatnya. Dia memberikan gambaran yang segar dan ke depan sifatnya mengenai kehidupan dengan kemampuan imaginatifnya, dan dengan kepekaan intuitifnya dengan tangkas dia mampu menunjukkan gejala-gejala perobahan yang masih tersembunyi, suatu hal yang terus berlaku hingga saat ini. Di samping itu, seorang pengarah yang kreatif dan inovatif, mampu memperbaiki dan memperbaharui bahasa, karena mereka tidak se-

Digitized by Google

kadar *memakai* bahasa, melainkan *menciptakan* bahasa.

Bagi pengarang, bahasa sebagai ekspresi budaya, bukan hanya suatu konvensi melainkan juga merupakan suatu *dimensi*. - Perobahan bahasa menandakan perobahan masyarakat, dan pengarang menawarkan perobahan itu melalui karyanya. Adalah berkat roman-roman seperti *Siti Nurbaya, Salah Asuhan* dan *Layar Terkembang* - bahasa Melayu memperoleh bentuk baru sebagai ekspresi budaya modern, yang menyebabkannya pantas dipilih menjadi Bahasa Indonesia yang modern pula. Roman *Salah Asuhan* karya Abdul Muis misalnya justru muncul setahun sebelum Sumpah Pemuda, dan karena bagus bahasanya maka kelak jadi model bagi bahasa Indonesia yang baik. Jadi tidak kebetulan apabila Bahasa Melayu (Riau) dipilih sebagai dasar Bahasa Indonesia oleh para pencetus Sumpah Pemuda, karena melalui *Salah Asuhan* dialek ini memang menunjukkan sebagai bahasa budaya yang cukup tinggi dibanding bahasa Melayu Pasar.

Kini kita beralih pada novel *Atheis*. - Gambaran masa depan yang dilukiskannya tak kalah menarik dari *Belenggu*. Dengan latar masyarakat kelas menengah terpelajar Sunda di masa pendudukan Jepang, Achdiat K. Hadimadja melalui Atheis mengeritik ketidakmampuan kelas menengah Indonesia dalam membendung pengaruh kebudayaan Barat dan ideologi Barat, sehingga menyebabkan kehidupan sosialnya porak poranda. Achdiat mengeritik bukan saja golongan santri terpelajar, namun juga golongan nasionalis dan masyarakat priyayi kota yang tercerabut dari akarnya.

Dilukiskan dalam novel itu seorang santri terpelajar bernama Hasan yang telah banyak mempelajari agama, namun tidak mendalam kecuali secara formal. Dia bertemu kawan lamanya Rusli yang telah menjadi atheis dan benar-benar mendalami ajaran Marxisme dan komunisme. Pertemuannya ini menyebabkan iman Hasan goncang, karena secara intelektual dia tidak mampu melayani logika-logika cemerlang Rusli. Pertemuannya dengan Kartini, seorang gadis kota yang bebas dan telah menyerap kebudayaan Barat, menambah parah kehidupan rohaninya. Di hadapan gadis yang intelektual ini pun Hasan terpaksa bertekuk lutut. Kesantriannya semakin goncang pula ketika dia mulai bergaul dengan Anwar, seorang yang anarkis dan liberal ide-idenya.

Atheis karya Achdiat ini dalam gambarannya telah mendahului kenyataan. Novel ini terbit tahun 1949. Ketakberdayaan golongan agama melawan golongan komunis dan ide-ide demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950'an dan 1960'an telah dibayangkan oleh novel ini. Begitu juga ketaksiapan golongan agama ini dalam menghadapi perobahan-perobahan besar dalam masyarakat modern, telah dibayangkan dengan jelas oleh novel ini. Ketakberdayaan itu disebabkan oleh kelemahannya yang mendasar, yaitu kemampuan intelektualnya yang rendah. Rendahnya kadar intelektual, juga berakibat fatal pada lemahnya struktur organisasi dan struktur sosialnya. Hasan, yang telah belajar agama dengan baik itu, ternyata tidak mampu menghadapi godaan-godaan hedonisme dan ideologi baru sehingga harus menderita karenanya, oleh sebab tak memiliki kesiapan mental dan intelektual yang cukup.

Setahun setelah novel Atheis ini muncul, pada tahun 1950 lahirlah *Surat Kepercayaan Gelanggang* yang menyatakan bahwa "Kami adalah ahli waris kebudayaan dunia." Gelanggang adalah himpunan para pengarang Angkatan 45 yang mencita-citakan Humanisme Universal dalam sastra. Pada tahun yang sama muncul pula Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang didirikan oleh tokoh-tokoh partai komunis. Tujuannya memajukan kebudayaan rakyat.

Munculnya kedua kelompok seniman yang kemudian menimbulkan konflik politik ini, bersamaan dengan kian kuatnya PKI, juga sebenarnya telah bisa dibayangkan dan Achdiat secara halus mampu pula menggambarkannya. Sebab, sebagaimana Armyn Pane, Achdiat adalah pengarang yang mengikuti dengan aktif perkembangan masyarakat intelektual, gagasan-gagasan yang hidup di kalangan mereka dan meneliti secara mendalam kelemahan-kelemahan dasar dari pemikiran mereka. Karena itu mereka mampu mengeritik kaum intelektual Indonesia dan kelemahan-kelemahannya, yang membuatnya tidak mampu membawakan perobahan sosial secara mendasar, kecuali di bidang politik.

Kini, di tahun 1970'an, dalam sastra telah muncul kecenderungan *anti-intelektualisme*. Ini bisa terlihat pada karya-karya Iwan Simatupang, Sutardji Calzoum Bachri, Budi Darma, Kuntowijoyo, Arifien C. Noer, Danarto, Putu Wijaya dan lain-lain. Tampaknya kelas menengah terpelajar dan kaum intelektualnya bukan saja dikritik di situ, melainkan malah *digugat* perannya dan realitas brengsek yang diciptakannya.

Betapa pun karya mereka terasa sulit dicerna karena kebaruan cara berkisah dan gaya bahasanya, namun agaknya kita tidak boleh mengecilkan artinya karena memang menawarkan banyak kemungkinan. Misalnya yang pokok, dalam karya-karyanya itu pengarang mutakhir mulai menggugat perkara materialisme yang berlebih-lebihan. Khususnya dalam sandiwara Arifien C. Noer *Umang-umang*, di situ dilukiskan bahwa materialisme yang berlebihan itulah yang merupakan sumber malapetaka kehidupan manusia.

Catatan

1) Lihat makalah Taufik Abdullah "Sastra dan Sejarah: Pantulan Historis Dalam Novel", disampaikan dalam ceramahnya di TIM 4 Oktober 1983.
2) Lihat makalah Kuntowijoyo 'Sastra Indonesia Mencari Arah', disampaikan dalam Pertemuan Sastrawan Nusantara V tanggal 21-25 November 1986 di Ujungpandang, dan dimuat di harian berita Buana, hari Selasa tanggal 16 Desember 1986, hal. IV.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TK II BADUNG

Jl. A. YANI NO. 92, TELP. 23901 (2 SALURAN) - KOTAK POS 133
DENPASAR

AIR MINUM

DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN,
BEKERJA KERAS DAN BERKARYA
KITA SUKSESKAN PEMILU 1987
SEBAGAI PESTA DEMOKRASI
UNTUK MENJAMIN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN
DAN TETAP TEGAKNYA PANCASILA DAN UUD 1945

Digitized by Google

Oleh: Maria Sugiharto

Kunjungan Rebecca Gilling :

Dampak Film Di Masyarakat

''Rebecca... Stephanie...'' demikian teriakan massa histeris, ketika Rebecca ''Stephanie'' Gilling keluar dari pemeriksaan imigrasi di Bandara Sukarno—Hatta, Jakarta. Siapa dia ini?

Rebecca Gilling adalah seorang bintang film (televisi) Australia, titik. Mengapa dikagumi massa di Indonesia? Inilah pertanyaannya, sehingga memerlukan pengamatan tersendiri.

Rebecca Gilling adalah pemeran utama di dalam seri film melo-drama *''Return to Eden''* yang masa penayangannya di Indonesia mendapatkan simpati dan sambutan yang sangat hangat. Mengapa? Film ini, kendati dalam kategori perfileman digolongan kepada *Soap Opera* — sebuah tontonan atau opera yang pemutarannya biasanya dibarengi oleh sponsor yang biasanya menawarkan bahan-bahan kosmetik dan sabun wangi untuk mandi — benar-benar memikat. Karena, jalinan ceritanya walau diwarnai banyak intrik serta kekerasan dunia business, mewakili sebuah kehidupan kompleks yang bisa saja terjadi kepada kita semua (tentu masyarakat yang sudah mengenal business). Sehingga, mereka yang ditokohkan benar-benar seolah-olah menjadi hidup dan menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Dan masyarakat dapat membandingkan keadaan mereka sendiri dengan apa yang digambarkan dalam film tersebut. Prosedur serta sutradara pasti bukannya orang yang bodoh, ketika memunculkan tokoh-tokoh yan berwajah ayu, simpati, ganteng, menarik, yang dapat menghanyutkan masyarakat penonton, sehingga dari sudut businessnya (film) dapat menjadi *box office* (istilah di dalam business film) atau meraih uang banyak sekali.

Mengapa Rebecca, Mengapa Stephanie?

Kedutaan Besar Australia di Indonesia serta dutabesarnya Bill Morison, sungguh jeli. Ketika mengetahui bahwa film seri TV dari negerinya ini mendapatkan sambutan yang hangat, pada hari nasional negerinya, mendatangkan bintang film yang sedang melejit ini untuk hadir di Indonesia, sebagai seorang *Duta* perdamaian antara kedua negara.

''Do you like Return To Eden?'', demikian pertanyaan seorang Amerika yang juga menyukai film seri tersebut, karena di negerinya sana, film Australia ini berkompetisi hebat dengan film-film sejenis dari Hollywood yang merupakan pusat para raja film.

Peranan Rebecca Gilling dalam Return To Eden sebagai Stephanie Harper sungguh memikat, sehingga orang lupa membedakan siapa Rebeca, dan siapa Stephanie, seorang tokoh yang diciptakan. Kehadirannya di Indonesia (lebih-lebih di Jakarta) mengundang para pecandu film seri dan pemimpi berebut untuk menyaksikannya dari dekat serta kalau bisa berdialog. Bahkan, beberapa di antara yang benar-benar terbuai dan terbius, berusaha merealisasikan mimpinya itu dengan mengirim bunga bagi sang Stephanie. Baginya, apakah Rebecca atau Stephanie, yang penting ya dia itu. ''Masih untung bisa mimpi'', demikian kata soerang pengagum muda. Mimpi juga bisa jadi konsumsi mewah pada saat ini'', demikian ia melanjutkan.

''Anda pernah baca novel-novel Harold Robbin? Ya seperti itulah film seri *Return To Eden.* Bahwa film itu disukai, itu soal lain'', kata seorang pengamat kebudayaan. Novel-novel Harold Robbin selalu men-

Digitized by Google

ceritakan tentang kehidupan yang melodramatis, di mana segi-segi kehidupan dengan segala aspeknya, ya romantis, ya menantang, ya kebencian, kalau perlu pembunuhan dan pembalasan dendam, dengan tokoh-tokoh yang dilukiskan simpatik dan ganteng bagi pria, serta ayu, menarik, pintar serta pandai bergaul, bagi tokoh wanitanya.

Sebuah film bagi kehidupan manusia mengandung unsur obyektif dan subyektif." Bagus itu belum tentu disukai," demikian kata seorang pengamat kebudayaan lainnya. "Saya bisa saja suka film itu. Tetapi belum tentu film yang saya sukai itu bagus", demikian lanjutnya. Film yang bagus, menurut pendapatnya adalah yang memiliki konotasi obyektivitas. Karena ia memiliki persyaratan estetika film. Bila seseorang suka akan sebuah film, tanpa syarat apapun dia akan menyukainya. Siapa bintangnya, tidak menjadi masalah, karena menyukai bisa tanpa syarat.

Return To Eden mengandung daya pikat, karena pertama-tama dia ini sebuah serial. Dan, di dalam serial orang cenderung akan menunggu cerita selanjutnya. Penayangan melalui televisi, merupakan unsur yang sangat kuat, karena televisi dapat membuat secara serentak orang menonton. Dan demikian ciri khas film-film yang melodramatis, karena mengandung unsur-unsur yang mirip cerita-cerita dari Timur, baik itu Indonesia, India, Jepang, Hongkong. Film-film yang agak sentimental, cengeng, sangat disukai. Retun to Eden pas sekali dengan kesukaan masyarakat timur. Tetapi seperti pertanyaan orang Amerika yang saya ceritakan di atas, terlihat gambaran bahwa orang Barat pun menyenangi cerita melodrama itu, karena memang demikianlah sifat sebuah kehidupan. Sebagai catatan kecil tentang kekuatan sebuah serial televisi, beberapa tahun yang lalu, bahkan satu dekade lewat, ada film yang sifatnya juga melodramatis *peyton place* buatan Hollywood, merajai hampir seluruh dunia. Serial yang berumur bertahun-tahun itu, saya ingat sekali di negeri Belanda pernah membuat rekor pengaruh terhadap masyarakatnya. Setiap hari Rabu jam tertentu, Negeri Belanda termasuk ibukotanya menjadi sepi, di jalanan, karena semua orang ingin berada di depan televisi mereka karena tak mau ketinggalan menyaksikan serial Peyton Place tersebut. Para pemegang peranannya menjadi sangat terkenal karena penayangan melalui televisi. Satu contoh lagi, meskipun bukan sebuah melodrama, tetapi film seri Bonanza yang penayangannya bisa makan waktu bertahun-tahun, memiliki rekor di kawasan negara-negara sosialis Eropa Timur. Penayangan bertahun-tahun di sana selalu mendapatkan waktu yang khusus dari penggemarnya yang meliputi hampir seluruh masyarakat di sana. Satu contoh lagi, serial The Persuaders yang dimainkan oleh tokoh James Bond yang terkenal, *Roger Moore*. Pada suatu hari Roger Moore berwisata ke Budapest Hongaria, dan ingin berbelanja di sebuah art shop di ibukota negara Eropa Timur tersebut. Semua orang ingin menyaksikan, berkenalan dan meminta *autograph*-nya (tanda tangannya), sehingga toko tersebut terpaksa ditutup untuk sementara karena banyaknya pengagum serta penggemar Roger Moore berada di sekitar toko tersebut, menunggu dengan sabar sang bintang yang ganteng serta menarik, bahkan menggemaskan di dalam membawakan peranannya bersama bintang film Hollywood lainnya *Tony Curtis*.

Kita masih ingat ketika serial The Chips yang mengisahkan kehebatan dan simpatiknya para polisi di California, ditayangkan di Indonesia. Peran utama yang diserahkan kepada aktor berdarah Meksiko Erik Estrada, sangat menggiurkan bagi publik Indonesia, sehingga ketika jam penayangan diganti agak malam muncul protes karena anak-anak pun suka menonton. Bagi mereka yang memiliki kemudahan-kemudahan tertentu seperti video tape recorder bisa saja meliput malam hari untuk diputar kembali pagi harinya bagi putera-puteranya yang mengidolakan *Ponche*, - bintang pujaannya. Jangan ditanyakan, ketika seorang impressario mendatangkan si Ponche ke Indonesia, sambutannya melebihi kedatangan seorang Menteri bahkan Presiden dari negara sahabat yang berkunjung ke Indonesia, sehingga acara khas disenangi oleh khalayak ialah Ponche mengendarai motornya dari suatu tempat ke tempat lainnya di Jakarta dibatalkan, karena publik yang tidak bisa diatur.

Eskapisme

Dan, masyarakat yang seperti dibuai mimpi-mimpi tentang Stephanie Harper? Mereka menonton pertunjukan apa saja untuk melupakan keseharian mereka. Mereka mau mimpi, dan hal ini dipenuhi lewat pertunjukan yang ditontonnya. Mimpi lewat dewa-dewi yang diimpikannya. Dan, dewi ini mengejawantah dalam tokoh yang bernama Stephanie Harper. Lewat pertunjukkan yang disukai, masyarakat membiarkan dirinya terbuai oleh mimpi, bermimpi tentang Rebecca Gilling, yang adalah Stephanie Harper. Gejala masyarakat yang mengimpikan ini sangat menonjol, dan ini yang dinamakan eskapisme. "Mereka merasa aman dengan impian-impiannya itu" kata seorang pengamat kebudayaan. Di negeri Barat pun ada hal-hal semcam itu dan film E.T. merupakan salah satu film yang dimimpi oleh masyara-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KLUNGKUNG

DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN,
BEKERJA KERAS DAN BERKARYA
KITA SUKSESKAN PEMILU 1987
SEBAGAI PESTA DEMOKRASI
UNTUK MENJAMIN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN
DAN TETAP TEGAKNYA PANCASILA DAN UUD 1945

Digitized by Google

kat sana. Saya ingat seorang anak Kanada menonton E.T. sampai belasan kali, dan setiap menonton bisa mengeluarkan airmata karena keterharuan yang mendalam terhadap nasib E.T. (Extra Terresterial, mahluk luar angkasa).

Ada yang berkomentar, tentu bagi yang merasa berpandangan obyektif, mengagumi Stephanie Harper, seperti kurang nasionalis, karena menyenangi dan mendambakan film Australia (luar negeri), di saat film-film Indonesia sedang digalakkan, dan notabene tidak kalah banyaknya yang bagus-bagus. Ada sesuatu yang sedang dicari oleh masyarakat, komentar seorang psikolog terkenal, Sartono Mukadis. "Mereka sedang mencari saluran untuk mengekspresikan diri, mengidentifikasi. Jadi, jangan melihat kekaguman masyarakat terhadap Rebecca Gilling sebagai pertanda turunnya nasionalisme. Itu tidak benar".

Dampak kunjungan Rebecca Gilling

Sambutan terhadap kunjungannya bisa dikatakan melimpah dan bergairah. Gejala ini mengundang banyak komentar. Kendati kunjungan itu singkat, masyarakat membicarakannya. Sebagai *duta muhibah* - kunjungan Rebecca bisa dikatakan sangat berhasil. Ini adalah bakti tesis yang selama ini dipegang oleh semua bangsa di dunia melalui *kesenian, kebudayaan,* hubungan antar bangsa dapat dipererat serta diperkaya.

Sambutan terhadap Rebecca sebagai seorang bintang film termasuk luar biasa, sebab banyak orang yang menyempatkan menelpon media massa, menanyakan serta mencari informasi tentang dirinya. Masyarakat Indonesia yang termasuk *letargis,* - tidak akan mudah bereaksi dan mengambil langkah sebagai reaksinya, sehingga kejadian demikian benar-benar merupakan pencerminan minat dan hubungan yang intensif.

Maka timbullah beberapa analisa mengenai hal tersebut. Perhatian besar itu suatu pertanda khalayak dihinggapi rasa jenuh dalam kehidupannya, dan kedatangan Rebecca Gilling adalah kejadian yang dapat menembus rasa jenuh itu, sehingga meledak.

Rebecca Gilling adalah orang Australia, sehingga ada anggapan bahwa masyarakat Indonesia kurang nasionalis karena mengagumi dan membuat identifikasi dengan orang asing? Tetapi, *Stephanie Harper* dikagumi pasti bukan karena dia orang Australia, melainkan karena peranannya mewakili tokoh kosmopolitan sehingga lebih mewakili *sebuah sosok* manusia.

Dan, Rebecca Gilling, Stephanie Harper dengan *Return to Edennya,* strata sosial manakah yang menggemarinya? Sejauh dia adalah seorang *bintang,* maka daya tariknya adalah terhadap kita semua. Setiap orang tertarik dan kagum terhadap *Bintang.* Kekaguman yang menggebu-gebu menjadi kegairahan untuk menyambut bintang serta mengelu-elukannya, lebih merupakan ekspresi khalayak golongan menengah. Salahkah mereka (golongan menengah) ini yang mencari identitas melalui tontonan yang kendati berupa *soap opera* tetapi memberikan serta menjelmakan sebuah impian? Pasti ada alasan tersendiri, mengapa mayarakat mencari hiburan melalui hal-hal itu, karena dirasakan bahwa hidup yang terkadang sulit ini, lebih baik diselesaikan dengan menghibur diri dengan buaian sandiwara atau teater yang mewakili aspirasi mereka.

Tidak ada salahnya, dan bahkan merupakan hal yang wajar, menggemari Return to Eden dengan Stephanie Harpernya. Hal yang perlu diperluas dan diperdalam kepada hal-hal yang lebih tinggi bobot kemanusiaan dan kebudayaannya.□

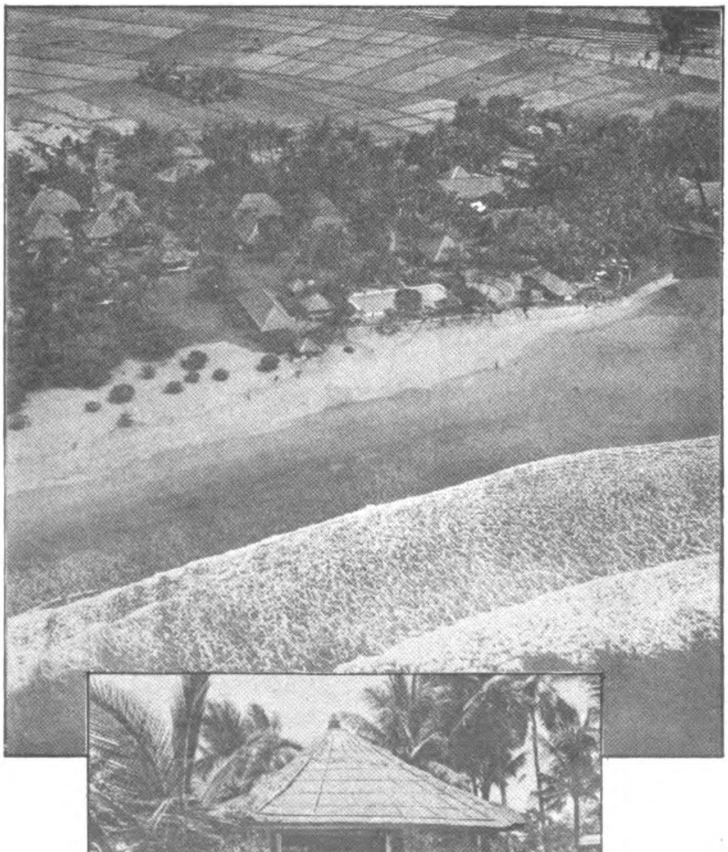

SEGENAP KARYAWAN / KARYAWATI

Bali Oberoi

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987

SEBAGAI SARANA

KEDAULATAN RAKYAT

UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA

MASYARAKAT ADIL MAKMUR,

SEJAHTERA LAHIR BATIN

Bali Oberoi

OBEROI HOTELS INTERNATIONAL
BALI, INDONESIA
A member of *The Leading Hotels of the World*

P.O. BOX 351, DENPASAR, 80001, BALI, INDONESIA
TEL. : 51061 TLX : 35125 OBHOTELDPR, CBL : BALIBEROI

Digitized by Google

1000 & 1300

Setelah sukses dengan 1000 cc

Kini tampil dengan 1300 cc

Mesin 12 katup yang Tangguh dan Ekonomis

1000 Starlet 1000, terbukti paling banyak dipilih di kelasnya. Sedan pertama di dunia dengan mesin 1000 cc, 4-silinder, 12 katup, responsif namun ekonomis. Body yang aerodinamis, radius putar terkecil (4,3 m), interior luas dan kompak, menjadikan Starlet mudah dan aman dikendarai. Mantap di luar kota dan lincah di dalam kota. Starlet 1000 tersedia dalam 2 tipe: Standar (XL) yang menawan, dan Lisse, yang sesuai untuk wanita aktif.

PERTAMA DI DUNIA 1000 cc 12 VALVE

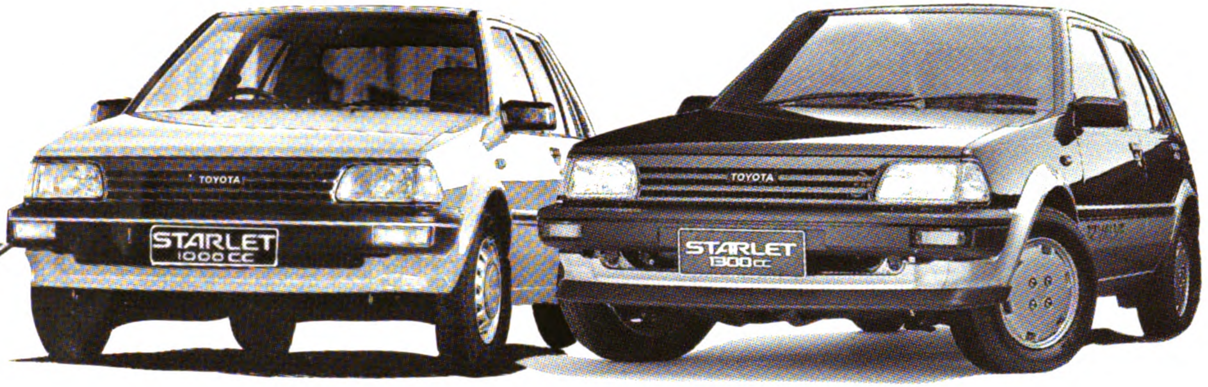

1300 Starlet 1300, memiliki tenaga yang lebih besar berkat mesin 1300 cc, 4-silinder, 12 katup. Karakteristik **ASRE** (**A**dvanced **S**uper **R**esponse **E**ngine) khas Toyota, yang juga dimiliki Starlet 1000, menjadikan Starlet 1300 sangat responsif namun tetap irit. Tidak seperti sedan sekelasnya, Starlet 1000 dan 1300, menggunakan mesin yang hanya didisain khusus untuk sedan, demi kenyamanan berkendara yang optimal. Starlet 1300 tersedia dalam 2 tipe: Standar (XL) yang menawan dan Si Ltd. (Sporty), untuk Anda yang berjiwa muda.

Starlet 1300 makin bergaya dengan perlengkapan standarnya, lebih mantap.

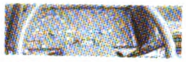

- **Tachometer,** menunjukkan putaran mesin secara tepat.
- **Jam digital** yang akurat.

- **AC,** menyegarkan perjalanan Anda.
- **Roda kemudi** dari bahan urethane, lebih mantap, lebih aman.
- **Tutup lingkar roda** tipe "half cap" yang tampan.
- **Lampu peringatan** batas minimal persediaan bahan bakar, makin aman.
- **Tuas pembuka bagasi** terletak di samping bawah tempat duduk pengemudi, lebih praktis.
- **Penahan lumpur pada keempat roda.**
- **Strip merah** (khusus tipe Si) pada: bemper dan lis pelindung samping, berkesan gagah.

Bergabunglah bersama para pemilik Starlet. Tanyakan alasan mereka. Dan hubungilah dealer Toyota terdekat.

TOYOTA **STARLET**

12 VALVE 4 CYLINDER 1000cc & 1300cc

KOMPAK DAN LINCAH

TOYOTA

TERPILIH KARENA TERPERCAYA

P.T. TOYOTA-ASTRA MOTOR JL. JEND. SUDIRMAN No. 5 Telp. 587551 – JAKARTA

Digitized by Google

Tradisi ketrampilan tinggi teliti dan rapi ...

Pesona pamor keris - perangkat adat karya Empu
Tatahan ratna mutu manikam - indah melingkar dihulu
Agung dan anggun.
Tradisi karya pusaka - berlangsung turun temurun

Kini ....
Ketrampilan tinggi, teliti dan rapi
menjadi tradisi Bank Rakyat Indonesia
dalam mengungkap karsa, cipta dan karya.

BRI dengan pengalamannya - lebih dari sembilan puluh tahun
memiliki jaringan luas diseluruh Nusantara
senantiasa mengutamakan pelayanan.

BANK RAKYAT INDONESIA
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 42-43 PO BOX 94 JAKARTA 10210
TEL. 586111, 587051, 587831, 587621. KAWAT : KANPUSBRI
TELEX . 44300, 44729, 45205, 44782 KAPEBRI IA

Piawai dalam karya, ramah tamah dalam pelayanan

Digitized by Google

No. 37 11 MARET 198

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

PILIH GOLKAR

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

SN 0216 — 2571

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

Bank kami bukan
sekedar memberi pelayanan,
tapi juga ......

KEUNTUNGAN

Cobalah tempatkan dana Anda pada :

- Rekg. Giro
- Tabanas/Taska
- Deposito Berjangka
  dan
- Sertifikat Deposito
  Bank Dagang Negara

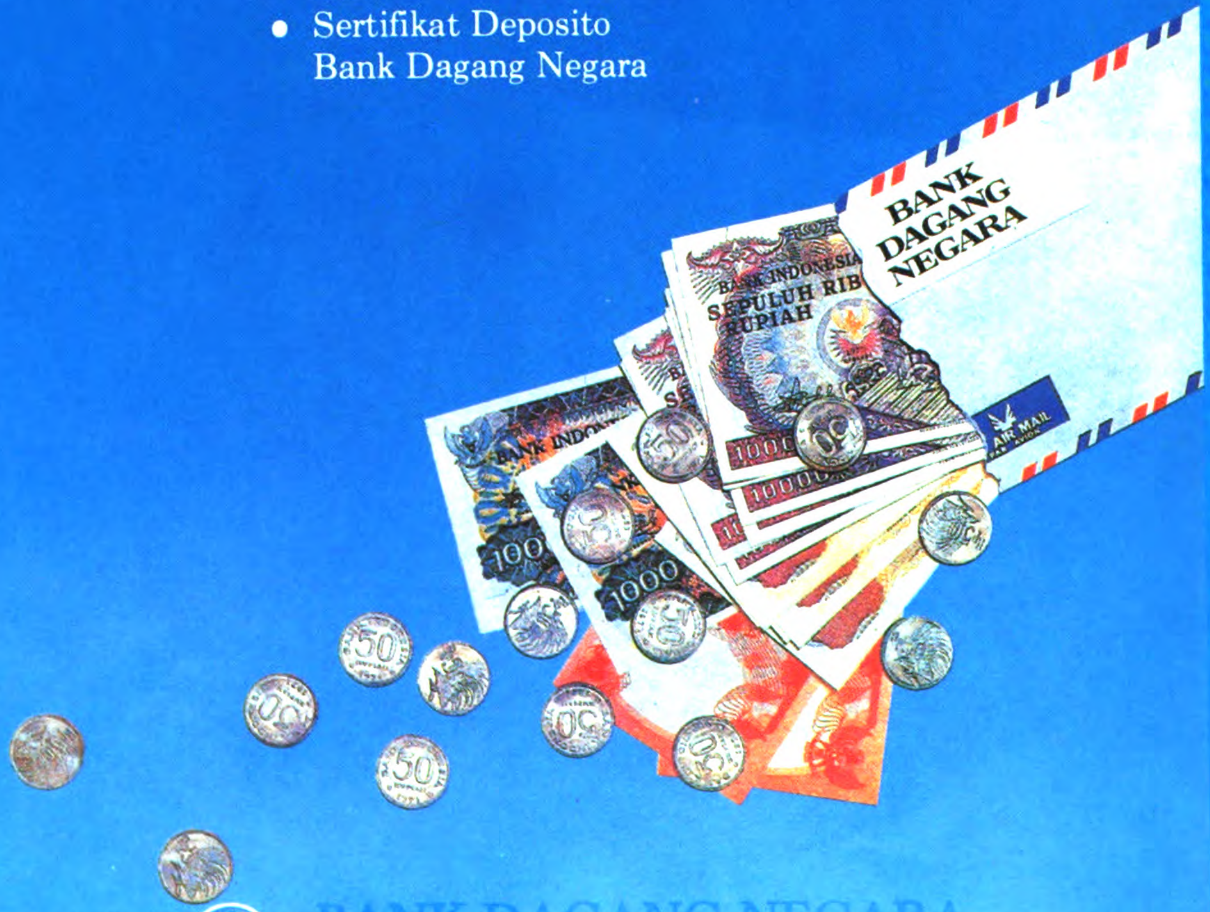

BANK DAGANG NEGARA

Kantor Pusat : Jl. M.H. Thamrin No. 5, Jakarta
Telepon : 321707 (18 saluran), Tromol Pos : 338 Jkt., Alamat Kawat : Stacopus.
Telex : 44149 BDNKP-JKT, 44148 BDNLN-JKT,
45372 BDNUDN-JKT, 46444 BDNLN-JKT.

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/ Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli.
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Anono Poernomo.
Subandrio.
Djonharro
Rum Aly
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noerijathy.
Robert Puang Sunur.
Issidarto BA.
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO.: 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981.
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asal-kan sesuai dengan missi penerbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI

Pemilu 1987 Dalam Semangat Pengalaman Pancasila.

FOKUS

Ciri Adil dan Beradab Dalam Pemilu 1987.
dari Maraden Panggabean, ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar.

LAPORAN UTAMA

Pemilu Ke-4 Orde Baru Harus Lebih Sempurna.
Wawancara dengan Ketua Umum Golkar, dan sejumlah tokoh-tokoh Golkar lainnya.

LAPORAN KHUSUS

Peningkatan Pelayanan Masyarakat, Soal Air Minum di Ibukota.

NASIONAL

Kualitas Hidup, Prioritas Esensial Dalam Pembangunan Nasional, dan sejumlah peristiwa nasional lainnya.

KOMENTAR

Dinamika Kampus, Kasus Bedah Plastik, Makam Diponegoro.

ORGANISASI

Supersemar Telah Memberikan Kekuatan Pembaharuan, dan sejumlah kegiatan organisasi lainnya.

LUAR NEGERI

Perjanjian Persahabatan Indonesia - Papua Nugini.

SPEKTRUM

Peranan Kekuatan Sosial Politik Dalam Pendidikan Politik Rakyat dan Pemilu, Pestisida Alami dari Tumbuhan sebagai Alternatif Pengendalian Hama Tanaman dan Gudang.

SENI BUDAYA

Valentine's Day oleh Maria Sugiharto.

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

David Napitupulu

Digitized by Google

Pemilu 1987 Dalam Semangat Pengamalan Pancasila

Merupakan tradisi di lingkungan keluarga besar Golongan Karya, teristimewa pada tahun-tahun terakhir ini, untuk selalu memperingati dengan khidmat lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Bagi Gologan Karya, peringatan itu bukan sekedar bermakna seremoni, akan tetapi lebih dari itu, dijadikan saat untuk bermawas diri dan merenungkan sudah sejauh mana Golkar berhasil mengemban misi dan cita-cita Orde Baru yang dicetuskan di tahun 1966 itu.

Bagi Golkar, peristiwa sejarah 11 Maret 1966 adalah penting. Karena bermula dengan pelimpahan Surat Perintah 11 Maret 1966 ke tangan pak Harto, Orde Baru terkristalisasikan dari akumulasi sejumlah aspirasi masyarakat kala itu sebagai satu tatanan alternatif. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret menjadi puncak dari segala peristiwa yang melahirkan Orde Baru. Suatu upaya bersama seluruh rakyat dalam tatanan baru dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Sedang Golkar sendiri, yang lahir 20 Oktober 1964 dan sejak awal kelahirannya itu berasas Pancasila dengan segera merupakan kekuatan Orde Baru yang berada di barisan terdepan dalam perjuangan mewujudkan pembaharuan dan pembangunan masyarakat Pancasila yang dicita-citakan Orde Baru. Kaitan historis maupun cita-cita seperti itu, merupakan sebab yang kuat bagi Golkar untuk memperingati peristiwa sejarah yang terkait dengan kelahiran Orde Baru ini setiap tahun. Sementara itu, dalam kaitan momentum, Golkar memfaedahkannya sebagai saat untuk secara batiniah lebih membulatkan lagi tekad meneruskan cita-cita perjuangan Orde Baru.

Dan adalah suatu fenomena yang menarik bahwa peringatan Surat Perintah 11 Maret tahun ini hanya terpaut waktu yang tak banyak dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum yang keempat dalam era Orde Baru — dan kelima dalam sejarah Indonesia merdeka. Lalu merupakan koinsidensi yang tak kalah menariknya bahwa Pemilihan Umum yang akan datang itu dilaksanakan untuk pertama kalinya dalam era Pancasila satu-satunya asas. Sehingga, tak pelak lagi menjadi salah satu puncak pencapaian dari apa yang menjadi cita-cita Orde Baru, khususnya di bidang ideologi sebagai bagian dari upaya besar untuk menegakkan Demokrasi Pancasila.

Dalam semangat kebersamaan, sejalan dengan pencapaian kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, patutlah untuk mengatakan semestinya Pemilihan Umum yang akan datang akan menjadi puncak penampilan dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila tersebut.

Dengan demikian, ada tuntutan-tuntutan tak tertulis, agar Pemilihan Umum keempat dalam masa Orde Baru ini harus lebih sempurna, harus diupayakan lebih baik keadaannya. Bagi Golkar ini sudah menjadi tekad sejak awal.

Di satu pihak, dengan subjektivitas yang dimilikinya Golkar akan mempertahankan tingkat kepercayaan rakyat yang dimilikinya agar mampu berperan memelihara kesinambugan Orde Baru. Tapi di pihak lain, merupakan pula tekad objektif Golkar untuk meraih pencapaian itu secara terhormat melalui suatu pemilihan umum yang betul-betul bersih dan demokratis. Sebab, suatu pemilihan umum dengan kualifikasi seperti itu — yakni yang bersih dan demokratis sebagaimana halnya dengan pemilu-pemilu yang lalu — merupakan pula prasyarat mutlak bagi terpeliharanya kesinambungan Orde Baru.

Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan rakyat maupun pelaksanaan pemilu yang bersih dan demokratis, bagi Golkar merupakan pencapaian yang bernilai sama tingginya. Karena, kedua-duanya bermuara kepada hasil akhir berupa kesinambungan Orde Baru.

Sikap dan tekad positif untuk melaksanakan pemilihan umum yang bersih dan demokratis tentunya diharapkan pula dari kekuatan politik peserta pemilihan umum lainnya. Beberapa pelajaran dapat kita simpulkan dari pengalaman kita bersama sebagai satu bangsa di masa-masa lalu. Tiga pemilihan umum Orde Baru telah berhasil kita laksanakan dengan kualitas yang senantiasa menunjukkan peningkatan dari pemilu ke pemilu. Peningkatan kualitas itu terjadi ketika berangsur-angsur dari pemilu ke pemilu cara-cara tak wajar dalam kampanye misalnya — di antaranya dengan mengobar-ngobarkan beberapa jenis sentimen yang peka atau Sara dalam masyarakat — makin ditinggalkan.

Bahwa ekses memang ada dalam setiap pemilihan umum, dan setiap peserta mengalaminya, bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Dalam pemilu manapun dan dimanapun, ekses selalu ada betapapun kecilnya. Tentu itulah pula sebabnya sehingga dalam setiap pemilu yang kita laksanakan diperlukan adanya Panwaslak yang bekerja dan berfungsi dengan baik. Namun tentunya semua pihak harus berusaha untuk menghindarkan terjadinya ekses dan mengupayakan suatu pemilu yang sesukses-suksesnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikaitkan dengan era Pancasila satu-satunya asas sebagai buah kesepakatan yang pencapaiannya pun tidak mudah, mungkin Pemilihan Umum bulan April 1987 mendatang ini akan menjadi kesempatan terbaik di antara segala kesempatan yang ada sebagai salah satu aspek dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional, sebagai Pengamalan Pancasila. Suatu kesempatan yang amat menentukan bagi seluruh insan politik dan warga bangsa ini untuk menunjukkan kearifan dan kedewasaan secara nyata sebagai satu bangsa yang telah merdeka hampir 42 tahun lamanya. Maka sikap dan penampilan peserta pemilihan umum yang mewakili aspirasi-aspirasi dalam masyarakat dengan dinamikanya masing-masing, nantinya akan menjadi warna dan penentu nilai tingkat peradaban politik kita sebagai satu bangsa.

Dan akhirnya, khusus kepada seluruh jajaran Golkar, kita ucapkan selamat berjuang untuk menegakkan cita-cita Orde Baru melalui Pemilihan Umum mendatang. Semoga Tuhan meridhoi perjuangan kita semua....•

Digitized by Google

Oleh: Maraden Panggabean — **Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar**

Ciri Adil Dan Beradab Dalam Pemilu 1987

Kampanye perlu kita masyarakatkan menjadi suatu lembaga sosial budaya yang dilaksanakan secara beradab

BEBERAPA hari lagi dari sekarang, bangsa kita akan menyelenggarakan Pemilihan Umum kelima dalam sejarahnya, atau Pemilihan Umum keempat dalam sejarah Orde Baru. Berbeda dengan pemilihan-pemilihan umum yang lalu, pemilihan umum mendatang mempunyai tiga arti penting yang perlu kita resapkan dalam-dalam.

Pertama, buat pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia kita menyelenggarakan pemilihan umum dalam suasana persatuan dan kesatuan yang utuh. Pada tahun 1983, kita sebagai bangsa telah mengukuhkan kembali ikrar nasional kita pada tahun 1945, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa masalah perbedaan ideologis tentang masalah-masalah yang mendasar dalam kebersamaan kita, telah kita tinggalkan di belakang. Masalah-masalah yang akan kita tampilkan dalam kampanye bukan lagi tentang masalah-masalah mendasar, tetapi yang berkenaan dengan pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut ke dalam program-program.

Kedua, Pemilu tahun ini dilaksanakan dalam Pelita IV yaitu tahap penciptaan kerangka landasan yang akan dimantapkan dalam Pelita V sebagai persiapan tinggal landas dalam Pelita VI. Hal ini mewajibkan kita semua untuk menyadari dampak jangka panjang dari setiap sikap, perilaku dan perbuatan yang dilakukan dalam tahun-tahun sekarang ini. Oleh karena itu perhatian kita, bukan saja dicurahkan guna memperoleh dukungan rakyat sebesar-besarnya, tetapi juga untuk mendayagunakan dukungan itu dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan makmur di masa mendatang.

Ketiga, kita semakin dekat dengan babak-babak akhir masa pengabdian aktif Angkatan 1945 yang bertekad untuk mewariskan Indonesia yang lebih stabil dan lebih

M Panggabean

maju kepada gelombang demi gelombang generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa di masa depan. Dalam tahun-tahun mendatang, kita bersama berkepentingan agar proses alih generasi di segala bidang berjalan aman tanpa goncangan-goncangan. Kita patut bersyukur bahwa sampai sedemikian jauh kita dapat melaksanakan proses alih generasi ini dengan lancar. Padahal setiap proses peralihan apapun selalu merupakan saat-saat yang mengandung kerawanan.

Pemilihan umum merupakan amanat rakyat yang harus kita junjung tinggi. Amanat ini tercantum jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Pemilihan umum bukan merupakan kegiatan politik yang berdiri sendiri. Pemilihan umum telah merupakan lembaga konstitusional yang berkembang dalam praktek penyelenggaraan negara, sebagai salah satu babak terpenting dalam mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan. Pemilihan umum merupakan momen pertanggungjawaban kepada rakyat, momen meminta mandat baru kepada rakyat dan momen penyegaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidaklah salah penyifatan pemilihan umum ini sebagai suatu "pesta demokrasi".

Saya ingin mengingatkan bahwa demokrasi kita adalah Demokrasi Pancasila yang mengenal kemanusiaan yang adil dan beradab, yang setiap kali akan membawa kemajuan bagi manusia Indonesia, sebagai tujuan pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila. Saya berharap agar ciri adil dan beradab ini lebih dapat kita tonjolkan dalam pemilihan umum mendatang untuk membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Republik Indonesia dapat memberikan suatu alternatif lain dari berbagai corak demokrasi yang pernah dikenal orang.

Manajemen Politik Nasional

Praktis segera setelah selesai Sidang Umum MPR tahun 1983, yang memerintahkan diselenggarakannya pemilihan umum dalam tahun 1987 ini, Golongan Karya telah mengambil langkah-langkah penting untuk menyiapkan diri menunaikan tugas nasional itu. Dengan kesadaran penuh bahwa pemilihan umum merupakan mata rantai penting dalam siklus dan mekanisme Kepemimpinan Nasional lima tahunan, kita telah membentuk Departemen Pemenangan Pemilihan Umum dalam jajaran kepengurusan Golongan Karya. Kita telah menyusun Rencana Operasi, menyiapkan berbagai Petunjuk Operasi dalam berbagai bidang, menyiapkan kader-kader yang sekaligus berperan sebagai Kader Pancasila, Kader Organisasi dan Kader Pembangunan, memantapkan konsolidasi ke dalam sambil berjuang menyukseskan Repelita IV dan mempersiapkan diri memenangkan Pemilihan Umum 1987 serta menyukseskan Sidang Umum MPR 1988.

Keseluruhan kegiatan ini kita laksanakan dengan semangat kekeluargaan yang bersifat integralistik yang dikandung oleh Pancasila dan UUD 1945. Makna terpenting dari semangat kekeluargaan yang bersifat integralistik ini adalah bahwa kita tidak menyelenggarakan seluruhnya itu demi kepentingan kita sendiri, kita melakukan se-

Digitized by Google

muanya itu demi seluruh masyarakat, seluruh bangsa dan seluruh negara. Kita menempatkan kepentingan kita sendiri sebagai bagian integral di dalam kepentingan seluruh masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini dan bukan di atasnya.

Walaupun sudah sekian kali kita menyatakan hal ini, namun kita perlu mengulanginya setiap kali. Bukan saja untuk meyakinkan orang lain, tetapi juga untuk menyegarkan paham kita sendiri. Secara perlahan tetapi mantap keyakinan politik kita ini dapat menarik simpati rakyat yang semakin luas. Atas keberhasilan itu sudah pada tempatnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam waktu yang akhir-akhir ini jajaran Golongan Karya menerima rangkaian pernyataan menggabungkan diri dari berbagai kalangan. Sudah barang tentu kita tidak boleh menolak kehendak rakyat ini, karena salah satu fungsi kekuatan sosial politik adalah untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kita menanggapi rangkaian pernyataan ini sebagai suatu pertanda bahwa Pancasila semakin memasyarakat dan bahwa Golongan Karya dipercaya sebagai kekuatan sosial politik yang mampu menunaikan amanat yang diembannya.

Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan rangkaian penataan bidang politik yang dilakukan dalam rangka melaksanakan mekanisme Kepemimpinan Nasional lima tahunan ini kita memperkenalkan satu gagasan baru yaitu gagasan Manajemen Politik Nasional. Kehidupan berpolitik tidak kita inginkan lagi sekedar merupakan kegiatan membangun kekuatan atau yang pernah disebut sebagai "machtsvorming en machtsaanwending". Kehidupan berpolitik adalah kehidupan kebersamaan kita sebagai bangsa yang seyogyanya direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dinilai dengan rapi. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan serta penilaian ini adalah aspek-aspek dari kemahiran manajemen modern yang bisa kita manfaatkan, bukan saja untuk mendukung kehidupan ekonomi, tetapi juga untuk menunjang kehidupan politik. Pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan misi Golongan Karya telah semakin lancar dengan semakin profesionalnya penanganan kegiatan politik kita.

Memang hampir tidak mungkin kita mengelola kehidupan politik bangsa kita yang besar dan amat beragam ini tanpa dukungan kemahiran manajemen modern. Keberhasilan pembangunan nasional dalam tahun-tahun yang lalu telah meningkatkan kesejahteraan bangsa kita, aspirasinya, serta memenuhi kepentingan-kepentingan lainnya. Peningkatan aspirasi dan kepentingan ini menghendaki peningkatan kemampuan organisasi kekuatan sosial politik untuk menanganinya. Oleh karena itu kita bukan saja harus tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, kita bahkan harus bergerak lebih cepat untuk meramalkan perkembangan di masa datang. Inilah sebabnya mengapa kita berteguh menyifatkan para kader Golongan Karya sekaligus sebagai kader Pancasila, kader Organisasi dan kader Pembangunan.

Sebagai kader Pancasila, kader Golongan Karya harus menghayati benar-benar nilai kekeluargaan yang bersifat integralistik seperti dikandung dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Nilai kekeluargaan ini bukanlah nilai statis, tetapi nilai yang membuka diri kepada dinamika dan perkembangan baru. Dalam pembukaan Penataran Calon Manggala VI bulan November 1986 yang lalu di Istana Bogor, Bapak Presiden Soeharto telah menegaskan lagi sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu ideologi yang membuka diri untuk berbagai wujud pengembangan konkret dari nilai-nilai dasar yang dikandungnya. Sudah barang tentu ideologi ter-

Kemenangan Golkar Dengan Ciri Kenegarawanan

Meraih kemenangan secara terhormat

Tampil berbicara pada Rapat Kerja Nasional Golkar untuk persiapan pemenangan pemilihan umum 1987 — yang berlangsung 8 hingga 11 Maret — Jenderal LB Moerdani kembali menyampaikan anjuran ABRI kepada Golkar untuk mencapai kemenangan dalam Pemilihan Umum dengan senantiasa memupuk terus ciri-ciri kenegarawanannya. Sedang pimpinan jalur Beringin keluarga besar Golkar Soepardjo Roestam menyerukan jajaran Golkar untuk lebih giat berjuang dan muncul sebagai peserta yang berhasil meraih kemenangan secara terhormat.

Dua tokoh nasional ini, selama ini memang senantiasa menjadi penganjur kuat untuk terlaksananya suatu pemilihan umum yang demokratis, aman dan tertib sesuai kehendak peraturan perundang-undangan. Dan jawaban pertama pun datang dari Ketua Umum DPP Golkar yang sejak awal — dalam berbagai kesempatan tatap muka dengan massa Golkar di seluruh penjuru tanah air — menyerukan jajaran Golkar untuk merebut kemenangan melalui jalan yang terhormat.

Berikut ini adalah bagian-bagian penting apa yang disampaikan Pangab Jenderal LB Moerdani dan Soepardjo Roestam di depan rapat kerja nasional yang dihadiri para pimpinan dan fungsionaris Golkar dari pusat, tingkat I dan II seluruh Indonesia.

Jenderal LB Moerdani Kemenangan Yang Wajar dan Berbobot

Kita semua menyadari bahwa telah banyak yang dilakukan oleh segenap keluarga besar Golongan Karya dan ABRI, baik dalam rangka menyukseskan Pemilu bulan April 1987 yang akan datang, maupun dalam rangka upaya Golongan Karya dapat mempertahankan posisi dan peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita menyadari, bahwa berbagai langkah keluarga besar Golongan Karya dan ABRI tersebut tentu masih mengandung segi-segi yang masih harus terus-menerus ditingkatkan dan dimantapkan bobot dan perwujudannya.

Kesadaran semacam itu perlu dan langkah-langkah untuk terus menyempurnakan upaya-upaya yang telah kita lakukan sangat penting, karena Pemilu yang akan dilaksanakan dalam bulan April 1987 mendatang, berada dalam perkembangan budaya bangsa Indonesia yang telah meningkat maju dan dalam perkembangan budaya dunia yang semakin canggih pula. Kita memaklumi, bahwa bangsa Indonesia dewasa ini telah semakin kritis dalam berfikir dan semakin dewasa di dalam bertindak. Demikian pula bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin melepaskan diri dari norma-norma demokrasi, hak-hak azasi manusia, lingkungan hidup dan ciri-ciri peradaban manusia lainnya yang semakin menjadi ukuran bagi tinggi-rendahnya tingkat budaya sesuatu bangsa di dalam upaya-upaya kenegaraannya. Untuk itulah Pemilu bulan April tahun 1987 dalam waktu dekat, perlu benar-benar dapat kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya.

Digitized by Google

buka bukan berarti terbuka untuk mengubah nilai-nilai dasar serta aturan-aturan pokoknya. Jika ada yang menafsirkan demikian, sudah jelas hal itu tidak tepat. Pernyataan Pancasila sebagai ideologi terbuka mengharuskan kita untuk menjaga kemampuan Pancasila dalam menjawab setiap masalah baru yang muncul, baik hari ini maupun di masa datang. Pancasila harus mampu memberikan jawaban yang tepat dan benar terhadap berbagai masalah kita bersama, karena ia merupakan satu-satunya asas yang kita anut. Sejak tahun 1985 kita sudah merumuskan hal ini sebagai suatu tantangan untuk merumuskan pokok-pokok operasionalisasi Pancasila itu di segala bidang.

Sebagai kader Organisasi, kader Golongan Karya harus mampu menggerakkan kemampuan jajaran Keluarga Besar Golongan Karya dalam menunaikan kegiatannya pada setiap bidang pengabdian, baik bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankamnas. Kita mengetahui bahwa jumlah dan jenis kemampuan yang dimiliki jajaran Golongan Karya amatlah besar. Oleh karena itu amatlah wajar jika kita menghendaki kader Golongan Karya memiliki kemampuan untuk mendayagunakannya secara efektif dan efisien.

Sebagai kader Pembangunan, kader Golongan Karya harus mampu mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, Rencana Pembangunan Lima Tahun serta berbagai wujud penjabarannya di setiap tingkat. Sebagai kader pembangunan ia bukan saja harus mampu menggerakkan warga Golongan Karya ke arah kegiatan yang konstruktif, tetapi harus cukup komunikatif untuk meyakinkan masyarakat di sekitarnya agar turut melaksanakan program-program pembangunan nasional itu.

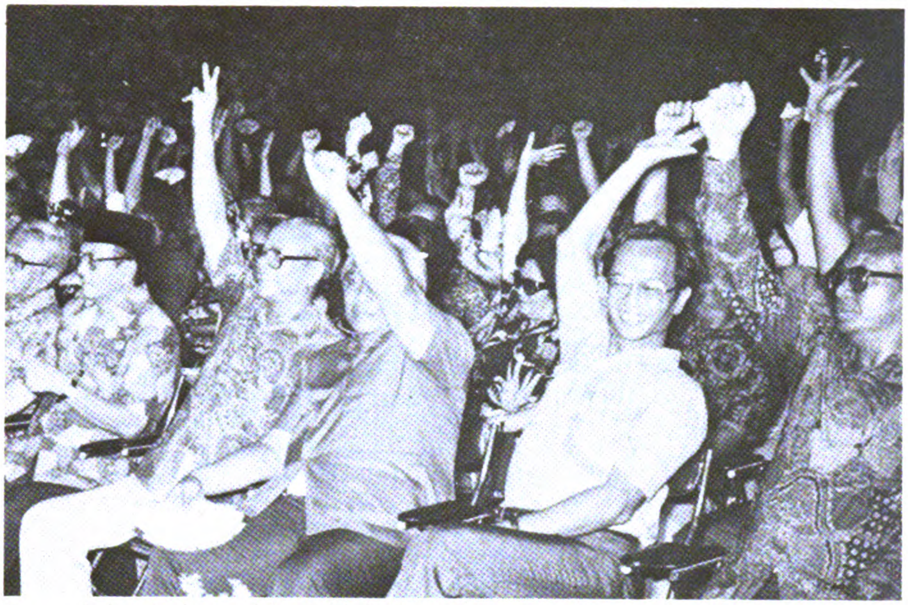

Bangsa Indonesia dewasa ini semakin kritis

Sebagaimana pernah saya kemukakan pada berbagai pertemuan semacam ini beberapa waktu yang lalu, bahwa Golkar dalam Pemilu 1987 ini perlu bekerja lebih tertib, sehingga tidak ada peluang untuk mendiskreditkan Golkar atas kemenangan yang pasti akan dicapainya nanti.

Demikian pula dalam kesempatan Rapim Golkar beberapa waktu yang lalu, ABRI menganjurkan agar di dalam upaya mencapai kemenangan dalam Pemilu tersebut, Golongan Karya senantiasa memupuk terus ciri-ciri kenegarawanannya.

Apa yang menjadi latar-belakang dari anjuran ABRI tersebut adalah, bahwa hasil dari Pemilu bulan April tahun 1987 nanti harus dapat menggambarkan budaya yang tinggi dari bangsa Indonesia di dalam kehidupan politik dan kenegaraannya. Di antara kriteria yang akan mewarnai gambaran budaya bangsa Indonesia dalam Pemilu tersebut, adalah justeru tingkah-laku Golongan Karya yang akan mempunyai peranan utama dan menjadi pemenang dalam Pemilu tersebut serta bagaimana perwujudan dari segenap perangkat kehidupan politik yang telah ditetapkan.

Dengan demikian hakekat dari anjuran ABRI adalah, bahwa citra Demokrasi Pancasila dinilai akan mempunyai nilai yang tinggi apabila berbagai bentuk perundang-undangan yang bersangkutan dengan pembinaan kehidupan politik di Indonesia benar-benar dapat diwujudkan. Kita semua mempunyai tanggung jawab untuk memenangkan Golkar karena hal tersebut akan merupakan jaminan, bahwa kepemimpinan nasional tetap akan berada di tangan Orde Baru, yang dengan demikian pembangunan nasional atas dasar Pancasila dan UUD 1945 akan tetap berlanjut. Namun kemenangan ini harus tetap disertai terjaminnya citra Demokrasi Pancasila yang kriterianya di antaranya adalah terwujudnya semua ketentuan yang ada di dalam segenap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pembinaan kehidupan politik di Indonesia tersebut. Adalah tanggung jawab kita semua untuk menjaga citra Orde Baru yang menjunjung tinggi demokrasi dalam kehidupannya. Demikianlah, dilandasi oleh pemikiran tersebut di dalam mendukung upaya-upaya Golongan Karya, ABRI selalu menganjurkan agar langah-langkah yang tertib, dewasa dan rasa tanggung jawab sebagai salah satu kekuatan utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga senantiasa menjadi pedoman Golongan Karya.

LB. Moerdani

Apabila hal ini dapat terlaksana, maka kemenangan yang akan dicapai Golkar adalah kemenangan yang selain wajar juga mengandung nilai, bobot dan kualitas yang dapat lebih memantapkan citra negara dan bangsa Indonesia setaraf dengan negara-negara yang telah maju lainnya.

Sebaliknya apabila hal tersebut tidak dapat terlaksana, tentu sekalipun kemenangan pasti tercapai, namun citra pemerintah Orde Baru yang kokoh dan berwibawa serta citra yang terhormat di dalam pergaulan antar bangsa akan banyak menemui hambatan dalam perwujudannya. Suasana semacam itu tentu tidak menguntungkan, karena periode-periode mendatang adalah justeru periode yang penuh dengan tantangan pembangunan yang tidak ringan, yang untuk mengatasinya sangat diperlukan adanya kemampuan dan kekuatan pemerintah Orde Baru yang disegani, dan dipercaya, bukan hanya dalam lingkungan bangsa Indonesia, tetapi juga di antara bangsa-bangsa di dunia.

Memberikan gambaran tentang kondisi keamanan dan ketertiban menghadapi Pemilu 1987 yang akan datang, ABRI/

Digitized by Google

Dengan tatanan demikian, sebagai penyelenggara negara di tingkat infrastruktur, Golongan Karya berharap dapat mengembangkan diri sebagai mitra kerja yang layak bagi Pemerintah serta lain-lain penyelenggara negara di tingkat suprastruktur pemerintahan. Golongan Karya menyadari benar-benar bahwa dalam negara kesatuan yang berdasarkan paham kekeluargaan yang bersifat integralistik itu, baik suprastruktur (pemerintahan) maupun infrastruktur (masyarakat) harus dapat saling menunjang dan saling melengkapi. Kita melaksanakannya dengan cara membangun Manajemen Politik Nasional yang mempunyai kualifikasi profesional.

Rencana Operasi Pemenangan Pemilu 1987

Tujuan kita memenangkan Pemilihan Umum 1987 dan menyukseskan Sidang Umum MPR 1988 adalah:

Menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan Wawasan Nusantara.

Meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional secara bertahap dan terus menerus dalam rangka usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan antara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meningkatkan dan memelihara stabilitas nasional yang dinamis serta makin memantapkan kepemimpinan nasional di tangan Orde Baru sebagai syarat mutlak untuk berhasilnya Pembangunan Nasional demi kepentingan rakyat banyak.

Sasaran nasional yang harus dicapai Golongan Karya adalah sekurang-kurangnya mempertahankan posisi seperti sekarang ini. Untuk ini kita harus dapat mencapai 280 kursi di DPR-RI atau 67,7 % dari seluruh suara pemilih.

Seluruh DPD GOLKAR Tingkat II diharapkan mampu mendayagunakan seluruh jajaran Golongan Karya yang ada di bawah kendalinya, bekerja sama dengan mitra kita dari jalur lainnya. Kemajuan yang kita capai dalam rangka Tri Sukses, khususnya dalam sukses konsolidasi, mudah-mudahan telah memberikan kemampuan yang diperlukan itu.

DPD GOLKAR Tingkat II mengemban banyak tugas penjabaran lebih lanjut rencana-rencana operasi yang berasal dari eselon organisasi di atasnya. Penyesuaian kepada kondisi nyata di lapangan adalah tugas DPD GOLKAR Tingkat II. Penyusunan Subtema-subtema kampanye dari tema serta tema induk kampanye juga merupakan tanggung jawab DPD GOLKAR Tingkat II. Juru Kampanye yang datang dari tingkat nasional serta Tingkat I memerlukan pengarahan-pengarahan dari DPD GOLKAR Tingkat II agar dapat menunaikan tugasnya secara tepat.

Tatanan seperti ini adalah wajar dalam setiap kegiatan berukuran besar. Kita memusatkan perencanaan, tetapi mendesentralisasikan pelaksanaannya. Dengan demikian akan dapat dimanfaatkan kesatuan gerak secara nasional tanpa mengorbankan kekenyalan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi daerah.

Diperlukan perkiraan keadaan terakhir secara realistis. Kita tidak mempunyai alasan untuk khawatir mengingat mengalirnya dukungan terhadap Golongan Karya. Namun hal ini tidak berarti bahwa penanganan secara manajemen politik profesional dapat kita tinggalkan, walaupun sekejap.

Pengorganisasian dan Penggalangan

Sampai bulan Januari 1987 yang lalu telah tercatat jumlah anggota Golongan Karya sebanyak 25.511.778 orang termasuk

---

Kopkamtib menilai bahwa situasi keamanan dan ketertiban cukup mantap dan diharapkan situasi ini akan terus dapat dipelihara, baik selama maupun setelah Pemilu nanti.

Gangguan keamanan yang masih ada maupun gangguan-gangguan kriminalitas yang mungkin terjadi condong sebagai gejala dinamika sosial yang masih wajar dan tidak mengarah pada bentuk-bentuk kriminalitas dengan arti yang serius.

Perlu saya tegaskan, bahwa unsur pengamanan langsung dan tidak langsung bagi Pemilu bulan April 1987 mendatang, sudah dengan mantap berfungsi dan mampu menguasai setiap bentuk gangguan apapun yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu berbagai peringatan Panglima Daerah Militer/Laksusda tentang pentingnya kewaspadaan, bukanlah gejala memburuknya situasi, namun sekedar sebagai himbauan agar Pemilu bulan April 1987 nanti benar-benar dapat berjalan dengan aman dan tertib.

Segenap kekuatan sosial politik peserta Pemilu umumnya dan Golongan Karya khususnya, memang perlu untuk selalu waspada, agar langkah-langkah yang dapat membuka terjadinya kerawanan-kerawanan dapat dihindari. Salah satu kegiatan yang perlu diawaspadai di dalam upaya-upaya menghadapi Pemilu nanti adalah kegiatan pengerahan massa, khususnya pada masa-masa kampanye.

Menyadari banyaknya peluang untuk terjadinya kerawanan-kerawanan di dalam pengerahan massa, maka dalam berbagai kesempatan Pangkopkamtib senantiasa menganjurkan agar segenap peserta Pemilu menghindari pengerahan massa yang luar biasa, yang sangat sulit pengendaliannya.

Oleh karena itu pada kesempatan inipun saya menganjurkan agar berbagai bentuk kampanye yang akan dilakukan yang kemungkinan akan dihadiri massa yang besar, agar benar-benar dipersiapkan dengan mantap.

Perlu pula saya mengingatkan, bahwa juga di dalam perwujudan citra kehidupan politik yang tertib dan dewasa, gambaran

Golkar dalam Pemilu 1987 perlu bekerja lebih tertib

Digitized by Google

Kader Penggerak Teritorial Desa (Karakterdes) sebanyak 8.149.310 orang dan Kader Fungsional (Karsinal) sebanyak 626.296 orang. Ditinjau dari angka-angka ini, tidaklah berlebihan jika kita menyatakan dan mensyukuri bahwa Golongan Karya telah semakin memasyarakat, semakin berakar, semakin matang dan semakin mandiri sebagai kekuatan sosial politik. Keanggotaan Golongan Karya didasarkan pada stelsel aktif, yaitu orang harus mengajukan permohonan secara perseorangan untuk menjadi anggota Golongan Karya, sehingga angka-angka ini adalah angka-angka yang riil, yang dapat digerakkan untuk menunaikan tugas-tugas Golongan Karya baik ke dalam maupun ke luar. Seperti terlihat dari angka-angka tersebut, sekitar 30 % adalah kader baik kader teritorial maupun kader fungsional, seperti pemuda, wanita, pemuka agama dan pendidik.

Para kader inilah yang terutama kita gerakkan untuk mengisi kebutuhan organisasi, baik ke dalam maupun untuk mengisi tugas-tugas dalam kepanitiaan pemilihan umum sampai ke tingkat TPS. Adalah nyata bahwa kita tidak kekurangan kader yang kita butuhkan. Yang perlu dilakukan adalah mengerahkan dan mengarahkannya sebaik-baiknya. Untuk itu selain buku-buku petunjuk mengenai Karakterdes yang telah ada, juga pada akhir November 1986 yang lalu telah diturunkan serangkaian petunjuk mengenai penggalangan.

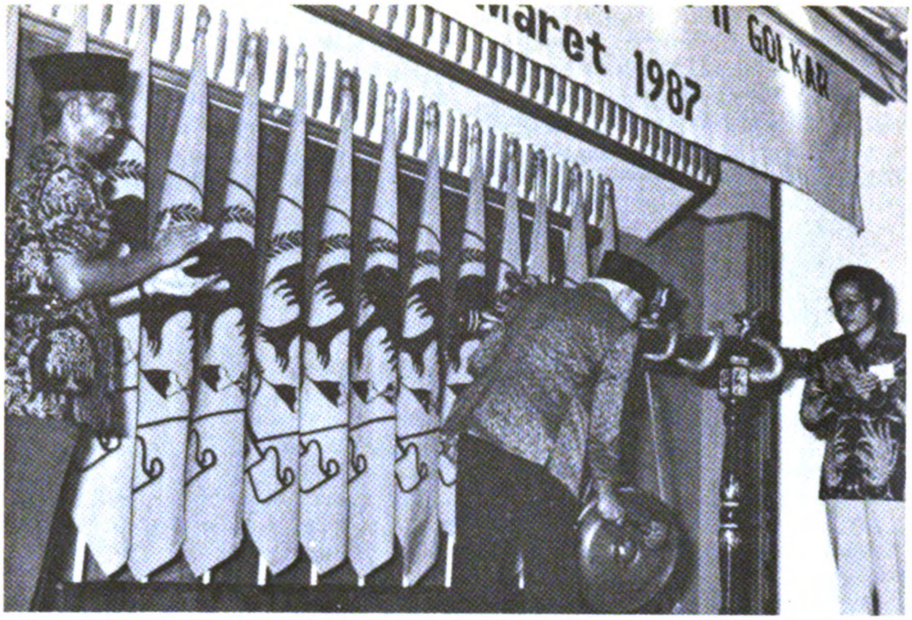

Pemilu merupakan amanat rakyat yang harus kita junjung tinggi

Kita mengenal ada tiga jenis penggalangan, yaitu penggalangan Teritorial, penggalangan Fungsional dan penggalangan Umum, yang merupakan suatu kesatuan sistem penggalangan.

Penggalangan bukanlah kampanye, tetapi merupakan bagian dari kegiatan pendidikan politik masyarakat yang ditugaskan kepada setiap organisasi kekuatan so-

tentang ketertiban dalam kegiatan kampanye sampai dengan pelaksanaan Pemilu nanti, akan merupakan pula unsur-unsur yang menjadi kriteria utamanya.

Untuk itulah saya ingin pula mengulangi pandangan ABRI, bahwa Pemilu bukanlah adu kekuatan dan bukan situasi konflik. Pemilu adalah kompetisi untuk menawarkan program pembangunan melalui cara-cara yang tidak sedikitpun menggambarkan permusuhan dan konfrontasi. Oleh karena itu penciptaan berbagai identitas dan atribut yang secara fisik dapat mengesankan dan merangsang terjadinya adu kekuatan massa, sebenarnya dalam tahap kehidupan politik yang dewasa ini tidaklah sesuai lagi.

Keadaan masyarakat kita sudah lain, mereka lebih menghendaki kehidupan politik yang tidak diwarnai agitasi serta terwujudnya kehidupan politik yang berjalan wajar dan tertib. Oleh karena itu pelaksanaan kampanye dan Pemilu dengan tenang dan tertib merupakan kondisi yang pada hakekatnya sangat diharapkan oleh masyarakat.

Untuk itu Golongan Karya sebagai salah satu kekuatan dan peserta Pemilu yang dominan perlu menjaga agar Pemilu tidak berubah menjadi situasi emosional yang rawan bagi timbulnya konflik.

Dalam kaitan ini apa yang juga perlu menjadi perhatian Golongan Karya di dalam kegiatan-kegiatan kampanye adalah pentingnya untuk diwujudkan penampilan yang wajar dan bersahaja dari segenap kader dan juru kampanye Golongan Karya. Lebih-lebih di dalam suasana keprihatinan dewasa ini, kehadiran kader-kader dan para juru kampanye Golongan Karya yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi kiranya akan lebih tepat.

Memberikan janji-janji sudah kita sadari sebagai tema kampanye yang tidak benar, justeru di dalam situasi dewasa ini, tema-tema untuk mengajak bekerja keras atas dasar program merupakan realisme yang sudah difahami masyarakat. Oleh karena itu kewajaran dan kesahajaan dalam penampilan kiranya akan lebih sesuai bagi Golongan Karya yang senantiasa mengindentitaskan diri dengan kondisi dan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya Golongan Karya, ABRI melalui jalur keluarga besar ABRI telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Upaya unsur-unsur keluarga besar ABRI dan segenap pendukung Golongan Karya lainnya harus dapat dipadukan sebagai kekuatan yang efektif dan efisien, baik dalam rangka Pemilu maupun dalam rangka perjoangan Golongan Karya selanjutnya.

Untuk itulah inventarisasi segenap kemampuan, kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang masih dihadapi kiranya perlu dilakukan. Kiranya suasana kegiatan Golongan Karya yang mencerminkan keterpaduan dan rasa tanggung jawab bersama dari semua unsur Golongan Karya perlu dapat diciptakan. Demikian pula perwujudan kordinasi tiga jalur melalui lembaga Bappilu Golkar perlu benar-benar efektif, sehingga semua permasalahan Pemilu dapat ditangani dengan tertib dan tuntas.

Soepardjo Roestam : Kemenangan Terhormat

Pemungutan suara yang akan dilangsungkan pada tanggal 23 April 1987 tinggal beberapa puluh hari lagi. Sedangkan kegiatan kampanye yang berlangsung antara tanggal 23 Maret sampai 17 April 1987 pun akan segera dimulai. Menghadapi tahap-tahap pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut, nampaknya ketiga Organisasi Peserta Pemilihan Umum sedang menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk tampil di dalam Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya. Kegiatan yang mulai dari konsolidasi organisasi sampai penyiapan Juru Kampanye masing-masing, yang akan diterjunkan dalamkegiatan kampanye untuk memenangkan opini dan memperoleh simpati masyarakat Pemilih sedang dan terus mereka mantapkan. GOLKAR telah mengadakan persiapan yang menyeluruh/mantap, atau boleh saya katakan sebagai yang paling siap. Ini merupakan perkembangan yang menggembirakan, sekalipun tidak perlu menjadikan warga GOLKAR boleh

Digitized by Google

sial politik oleh GBHN. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum, penggalangan memegang peranan yang jauh lebih penting daripada kampanye. Kita merencanakan agar setiap kader Golongan Karya khususnya Karakterdes, mampu menggalang 7 orang dan berkomunikasi dengan mereka yang telah digalanginya itu secara terus-menerus.

Dengan tugas demikian, dapatlah dipahami bahwa yang akan menentukan dalam pemungutan suara nanti adalah kegiatan kita di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, karena di tingkat itulah hubungan tatap muka antara para kader kita dengan masyarakat yang digalangnya itu terjadi secara nyata.

Kita perlu mendapat gambaran riil sampai di manakah kemajuan dalam penggalangan ini dan apa pula hambatan yang ditentukan dalam proses penggalangan itu. Kita juga perlu memberikan perhatian kepada masalah-masalah riil yang mungkin timbul dalam masyarakat. Dalam hubungan ini patut kita berikan penghargaan kepada DPP GOLKAR yang telah melengkapi kader-kader di lapangan dengan bahan latar belakang informasi untuk menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dari masyarakat yang kita galang. Bahan ini mudah-mudahan dapat menyatukan bahasa kita dalam menjawab masalah-masalah tersebut.

Kegiatan penggalangan yang bersifat kewilayahan ini didukung oleh para kader fungsional serta penggalangan umum melalui media massa. Bersamaan dengan upaya kita memperoleh dukungan serta memelihara dukungan ini, perlu dinetralisasikan kemungkinan dikaitkannya citra negatif dengan Golongan Karya yang timbul sebagai akibat ekses-ekses pembangunan tertentu. Kita berharap hal itu tidak terjadi, namun kita perlu waspada terhadap kemungkinan itu. Masalah-masalah di tingkat lokal cukup riil, yang di antaranya bersifat subyektif tetapi dapat mempunyai dampak yang kurang menguntungkan di bidang politik.

Jika penggalangan berhasil baik, maka sesungguhnya fungsi kampanye hanya tinggal memelihara hasil penggalangan itu. Akan tetapi apabila penggalangan tersebut belum mencapai sasaran, maka kita harus bekerja keras dalam dua bulan mendatang ini.

Data terakhir bulan Januari yang lalu menunjukkan bahwa secara nasional Operasi Eka-Sapta baru mencapai 93,4 % dari sasaran yang telah ditetapkan. Dirinci per daerah, ada daerah yang telah melebihi sasaran suara yang telah ditetapkan, namun ada pula daerah yang masih dibawah sasaran. Ini perlu mendapat perhatian.

Sasaran yang kita rumuskan adalah sasaran minimal untuk memelihara keseimbangan jumlah kursi yang sudah ada sekarang ini, syukur kalau kita dapat melebihi sasaran tersebut.

Sekarang ini unsur ABRI yang diangkat tidak lagi sebanyak sepertiga jumlah anggota MPR, sehingga perubahan ini harus diimbangi dengan upaya Golongan Karya untuk mampu meningkatkan perolehan jumlah suara dalam pemilihan umum mendatang.

Kampanye

Walaupun pengalaman menunjukkan bahwa kampanye tidak banyak mengubah sikap politik para pemilih, namun kampanye perlu kita laksanakan sebagai momen-momen terbuka pesta demokrasi. Oleh karena itu di samping sebagai lembaga politik, kampanye perlu dimasyarakatkan menjadi suatu lembaga sosial budaya, yang harus dilaksanakan secara beradab. Dalam hubungan ini ingin saya tekankan sekali lagi bahwa demokrasi kita adalah Demokrasi Pancasila yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab, dan oleh karena itu saya berharap agar ciri

bersantai dan berpuas diri karenanya.

Pelaksanaan Trisukses GOLKAR telah berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan kerjasama yang sangat mantap di antara tiga jalur, yaitu jalur A, jalur B dan jalur G. Memang kadang-kadang ada perbedaan pendapat di sana-sini; tetapi perbedaan pendapat itu hanyalah disebabkan oleh dinamika pemikiran di antara Keluarga Besar GOLKAR sendiri, perbedaan pendapat yang bukan merupakan prinsip kebijakan, sehingga tidak sulit untuk menyelesaikannya secara proporsional, dengan mengembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan konsensus. Di tingkat Pusat dengan tidak ada lagi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tiga Jalur dalam pertemuan yagn diadakan secara periodik. Saya harap, hal demikian juga dapat dikembangkan di tingkat Daerah, terus ke bawah sampai lapisan yang paling dasar.

Soepardjo Roestam

Pada masa-masa yang lampau, Pemilihan Umum selalu ditujukan untuk mengamankan dan memantapkan ideologi Pancasila dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga tahap-tahap yang lalu adalah merupakan tahap pengamanan ideologi Pancasila dari segala bentuk rongrongan dan penyimpangannya. Tahap yang mencakup dimensi pengamanan itu kiranya telah cukup berhasil meletakkan landasan yang kokoh bagi pengembangannya lebih lanjut, yaitu yang mencakup dimensi pemeliharaan dan pengembangannya, pelaksanaannya. Dengan demikian Pemilihan Umum 1987 adalah juga sebagai pengamalan demokrasi Pancasila. Hal itu telah mendapat landasan yuridis formal yang kokoh, dengan telah berlakunya Lima Undang-undang Bidang Politik pada tahun 1985.

Perkembangan dalam kehidupan politik tersebut kiranya juga memerlukan adanya perubahan dalam sikap dan perilaku politik yang ditampilkan oleh para pelaku politik, baik secara individual, maupun secara kolektif, demikian pula sikap dan perilaku organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun sosial politik. Sehubungan dengan itulah, perubahan dan perkembangan ini juga diharapkan dari para pelaku politik dan organisasi-organisasi Peserta Pemilihan Umum di dalam Pemilihan Umum tahun 1987 ini. Dibandingkan dengan Pemilihan Umum yang sudah-sudah, ada perbedaan mendasar dengan Pemilihan Umum 1987 ini. Dalam Pemilihan Umum sekarang ini, semua organisasi Peserta Pemilihan Umum telah meninggalkan asas cirinya masing-masing, dan semuanya telah mengacu pada asas Pancasila. Kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih singkat, dan pelaksanannya akan bernafaskan dan berorientasikan program pembangunan dalam rangka pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Melalui kampanye itulah nanti diletakkan preseden-preseden yang baik dalam upaya kita untuk mewujudkan cita-cita kehidupan politik nasional yang berorientasi kepada program. Kampanye Pemilihan Umum demikian pada dasarnya menghendaki ditinggalkannya tema-tema kampanye yang berpangkal pada primordialisme dan suasana yang emosional-konfrontatif. Tidak lagi diperlukan cara kampanye yang mengutamakan kekuatan massa yang sebesar-besarnya tanpa menampilkan kualitas organisasi Peserta Pemilihan Umum itu sendiri. Kampanye yang hanya menunjukkan "show of force" yang berlebihan semata-mata perlu dikurangi dan digantikan dengan cara kampanye yang benar-benar mencerminkan kualitas kekuatan

Digitized by Google

adil dan beradab ini lebih kita tonjolkan dalam kampanye pemilihan umum mendatang. harus dihindari sungguh-sungguh terulangnya kembali peristiwa-peristiwa sedih dalam kampanye-kampanye terdahulu. Untuk maksud itu, telah diinstruksikan kepada seluruh jajaran Golongan Karya agar bekerja sama yang sebaik-baiknya dengan aparatur penegak hukum, aparatur keamanan setempat dan Panwaslak.

Pemerintah telah menetapkan tema sentral kampanye yaitu 'Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila'. Terhadap tema ini telah kita kembangkan tema induk yaitu 'Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila Yang Bertumpu Pada Trilogi Pembangunan, Terutama Pemerataan Pembangunan Dan Hasil-hasilnya'. Tema induk ini kita kembangkan lagi menjadi tema dan subtema yang telah selesai dijabarkan dalam Keputusan DPP GOLKAR pertengahan Januari yang lalu. Kepada daerah masih diberikan peluang untuk menyusun subtema kampanye serta slogan yang bersifat lokal sebagai penjabaran lebih lanjut dan tentunya tidak boleh terjadi penyimpangan dari yang telah digariskan.

Sesuai dengan keadaan perekonomian negara dewasa ini, maka kegiatan kampanye harus dilaksanakan secara sederhana berdaya guna dan berhasil guna, serta menghindari kegiatan yang bersifat provokatif.

Sesuai dengan posisi Daerah Tingkat II sebagai ujung tombak, maka titik berat pelaksanaan kampanye berada di Daerah Tingkat II. Untuk itu kesiapan DPD GOLKAR Tingkat II dalam menunaikan tugas ini perlu diperhatikan sungguh-sungguh. DPD GOLKAR Tingkat II akan

Pemilu bukan merupakan kegiatan politik yang berdiri sendiri

organisasi dalam melaksanakan program pembangunan nasional.

Dengan demikian maka pelaksanaan kampanye dan Pemilihan Umum semakin jauh dari penampilan antagonisme yang menajam dan berlebih-lebihan, tidak pula terperosok pada pemikiran alternatif dan penajaman konflik yang sukar dipertemukan, tetapi kita membangun sistem politik yang berkebudayaan, berkebersamaan, serta berkekeluargaan. Bangsa Indonesia perlu menampilkan wajah Pemilihan Umum yang tidak merupakan ajang persaingan dan gontok-gontokan, tetapi sebagai arena dialog dan musyawarah di antara ketiga organisasi Peserta Pemilihan Umum yang berkedudukan sebagai anggota keluarga, kerabat-juang ataupun mitra-kerja yang fungsinya komplementer, saling melengkapi dan saling menggenapi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal-hal tersebut besar manfaatnya bagi pendidikan politik Rakyat.

Dalam suasana perkembangan demikian itu pasti GOLKAR telah siap dengan segala sesuatu yang diharapkan; dapat dikatakan tinggal "tancap gas", dan meluncur dengan mulus ke depan.

Namun dalam keadaan demikian itulah justru segenap warga GOLKAR dituntut untuk senantiasa dapat menjaga keseimbangan diri agar tidak bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang dari kewajaran. Warga GOLKAR hendaknya tetap bersikap dan berbuat wajar, dan menjauhkan diri dari rasa "overconfident" yang dapat mengakibatkan kelalaian dan kelemahan ke dalam, serta dapat mengakibatkan kendornya semangat perjuangan di dalam upaya memenangkan Pemilihan Umum sebagaimana diprogramkan. Untuk memelihara gairah kampanye dalam bertanding program memang tetap diperlukan semangat yang tinggi. Namun tingginya semangat itu tetap perlu terkendali dalam batas-batas keseimbangan yang wajar itu tadi, agar rasa maupun rasio tetap berfungsi penuh sehingga seluruh warga GOLKAR dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan dapat menghindari pancingan-pancingan yang justru dapat merusak citra GOLKAR di mata masyarakat Pemilih.

Kehadiran GOLKAR sebagai salah satu kekuatan sosial politik sejak kelahirannya, telah cukup mendapat tempat di hati rakyat, karena karya-karyanya telah dirasakan manfaatnya bagi bangsa Indonesia selama sekitar dua dasawarsa terakhir ini.

Dalam perkembangan lebih lanjut, nampak simpati yang semakin besar kepada GOLKAR. Oleh sebab itu hendaknya kenyataan ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk lebih giat berjuang, dengan tampil sebagai Organisasi Peserta Pemilihan Umum yang berhasil meraih kemenangan di dalam Pemilihan Umum secara terhormat, dengan senantiasa berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perilaku yang memancarkan tata susila politik yang luhur berlandaskan Pancasila.

Pada saat-saat menyongsong masa Kampanye dan Hari Pemungutan Suara yang akan datang, warga GOLKAR perlu terus mengembangkan pola perjuangan "Eka-Sapta" untuk memantapkan dan memperluas cakupan pengaruh.

Pendekatan-pendekatan yang bersifat pribadi perlu untuk semakin dikembangkan di kalangan-kalangan yang menjadi sasaran perluasan pendukung. Untuk itulah maka, operasi "senyum" dan "ajakan" yang simpatik, tanpa mengandung makna bujukan ataupun intimidasi, akan terasa semakin efektif dalam mengembangkan simpati yang diharapkan, tidak saja untuk jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang.

GOLKAR adalah organisasi kekuatan sosial politik yang telah menjadi besar dan kuat. Besar karena jumlah pendukungnya dan kuat karena kualitas kemampuan kader-kadernya, serta kemampuan organisatoris yang dapat diandalkan untuk melaksanakan fungsinya dalam pembangunan nasional dan kehidupan politik nasional.

Dengan kebesaran dan kekuatannya itu, dan dengan disertai sikap dan perilaku luhur Pancasila menjadi suri-teladan dengan tenggang rasa yang tinggi, khusus bagi lain Kontestan Pemilu.

Perspektif perjuangan seperti yang telah dicanangkan tadi, disertai kemampuan membaca perkembangan jaman, membaca situasi yang saling berjalinan itu secara kritis dan kreatif, tenggang rasa, saya harapkan GOLKAR akan dapat menunaikan dharma bakti politisnya, baik dalam jangka pendek ini, maupun dalam jangka panjang.□

Digitized by Google

dibantu oleh para Juru Kampanye yang sudah kita siapkan, baik dari tingkat naional, Tingkat I maupun di Tingkat II sendiri.

Masa kampanye selama 25 hari harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan merencanakan kapan dan di mana akan diadakan kegiatan kampanye dalam berbagai bentuknya serta siapa Juru Kampanye yang akan diturunkan untuk kesempatan yang dipilih itu.

Dalam Keputusan Presiden No. 27 tahun 1986 ditentukan bahwa bentuk-bentuk kampanye pemilihan umum antara lain adalah rapat umum, pawai, keramaian umum, pesta umum, pertemuan umum, penyiaran melalui RRI dan atau TVRI, penyebaran atau penempelan poster, plakat, surat selebaran, slide, film, radio, kaset, video kaset, slogan/semboyan, spanduk, brosur, tulisan, lukisan dan penggunaan media massa serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya, segala macam dan bentuk pertunjukan umum. Selanjutnya telah digariskan pula agar segala kegiatan kampanye pemilihan umum diselenggarakan dengan cara-cara yang bersifat mendidik, meningkatkan kesadaran politik rakyat, menggairahkan pembangunan nasional serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini harus dilaksanakan, baik menurut hurufnya maupun menurut semangatnya.

Betapapun baiknya persiapan yang telah dilakukan namun jangan dilupakan aspek psikologi massa, khususnya penduduk usia muda yang masih dalam taraf pancaroba. Perlu dipertimbangkan jumlah publik maksimum yang masih dapat dikendalikan oleh aparatur keamanan setempat. Lima tahun yang lalu kita mempunyai gagasan agar kampanye lebih banyak dilakukan di dalam gedung. Hal ini bisa kita coba sesuai dengan kondisi setempat. Namun jika persiapan cukup memadai dan kondisi memungkinkan, Golongan Karya dapat memanfaatkan peluang kampanye ini dengan sebaik-baiknya. Dalam saat kampanye itulah secara terbuka kita memasyarakatkan program Golongan Karya secara langsung kepada para pemilih. Kampanye Golongan Karya tidak harus dilaksanakan dalam bentuk pidato, tetapi dapat pula dalam bentuk pameran pembangunan ataupun keramaian umum.

Yang akan hadir dalam kampanye nanti sebagian besar mungkin para pemilih lama. Akan tetapi juga jelas akan hadir para pemilih baru yang masih memerlukan penjelasan mengenai apa Golongan Karya dan apa yang diperjuangkannya. Mereka mungkin sudah membaca poster atau spanduk kita. Mereka mungkin pula sudah digalang, namun secara terbuka mereka dapat menanyakan langsung kepada Juru Kampanye yang datang dari Pusat atau dari ibukota Propinsi mengenai hal-hal yang menarik perhatian. Kita harus pandai-pandai menunaikan tugas untuk menarik simpati para pemilih.

Hendaknya perhatian khusus dicurahkan pula kepada situasi perekonomian yang kurang cerah, yang dampaknya terhadap kehidupan politik menjelang pemilihan umum - terutama di daerah perkotaan - juga kurang menguntungkan. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan bahwa ketahanan nasional kita cukup tangguh untuk mengatasinya. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari tema kampanye kita yang ciri khasnya adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Masalah pemerataan dan masalah keadilan yang seiring dengan itu, demikian pula masalah kesenjangan sosial masih dirasakan oleh masyarakat kita, dan perasaan seperti itu merupakan hal yang wajar jika dihubungkan dengan semangat kekeluargaan di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kita perlu membekali diri dengan bahan-bahan informasi yang selengkap-lengkapnya agar dapat memberikan penjelasan yang benar dan realistis.

Dalam masa tenang menjelang pemilihan umum kita harus mengkonsolidasikan seluruh hasil yang telah dicapai. Upayakanlah secara maksimal agar sasaran suara yang telah kita tetapkan untuk diperoleh dalam masa kampanye dapat diwujudkan pada hari pemungutan suara.

Hari Pemungutan Suara & Tindak Lanjut

Seluruh persiapan yang kita lakukan akan diuji keberhasilannya oleh hasil perhitungan pemungutan suara. Oleh karena itu seluruh jajaran Golongan Karya harus melakukan kegiatan sedemikian rupa sehingga setiap pendukung Golongan Karya dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditentukan.

Sekurang-kurangnya tiga hari sebelum hari pemungutan suara formulir Model C sudah diterimakan kepada seluruh pendukung Golongan Karya. Jika belum diterima, hendaknya dapat segera diselesaikan dengan petugas yang bersangkutan. Ambillah langkah-langkah yang perlu agar para calon pemilih dapat diajak ke TPS-TPS oleh kader-kader kita untuk memilih Golongan Karya dengan cara-cara yang

UNIVERSITAS NASIONAL

Jl. Sawo Manila pejaten , pasar Minggu Jakarta 12510
Telp. 782700 - 782462 PO BOX. 742 Kby/Jakarta 12001

PIMPINAN DAN SEGENAP CIVITAS AKADEMIKA

UNIVERSITAS NASIONAL

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT
UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR,
SEJAHTERA LAHIR BATIN.

Digitized by Google

simpatik, etik dan penuh semangat kekeluargaan, serta tunjukkanlah rasa kesetiakawanan.

Selanjutnya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, hasil-hasil pemungutan suara di TPS-TPS agar segera dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini tidak berarti kita akan menyaingi hasil perhitungan suara yang dilakukan Pemerintah, namun kita perlu mendapatkan data yang cepat untuk kepentingan pengendalian di tingkat nasional.

Dengan selesainya pemberian suara oleh para pemilih, maka mulailah babak baru dalam tugas DPD dan DPP GOLKAR, yaitu menyusun komposisi lembaga-lembaga perwakilan serta aspirasi yang akan kita perjuangkan dalam MPR nanti. Sudah barang tentu esensinya telah kita siapkan, namun perlu dimatangkan lebih lanjut serta disesuaikan dengan perkembangan wawasan masa datang kita yang paling akhir. Seluruhnya itu hanya akan mungkin kita lakukan jika jumlah suara yang kita peroleh pada hari pemungutan suara benar-benar sesuai dengan rencana.

Pentahapan Perjuangan Golongan Karya

Sesuai dengan tahap-tahap pembangunan nasional, perjuangan Golongan Karya pun mengenal pentahapan melalui mekanisme lima tahunan. Sudah menjadi kebiasaan organisasi kita setiap lima tahun sekali mengadakan Musyawarah Nasional untuk membahas hasil Sidang Umum MPR dan untuk memilih DPP baru. Hasil pembahasan tersebut dijadikan bahan-bahan untuk menetapkan Program Umum dan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam tahap perjuangan Golongan Karya berikutnya. Mekanisme lima tahunan ini mencerminkan satu siklus perjuangan Golongan Karya di mana episode terpenting adalah pemilihan umum, karena hasil pemilihan umum ini akan menentukan perjuangan Golongan Karya tahap berikutnya. Kemenangan Golongan Karya dalam pemilihan umum berarti terjaminnya kesinambungan program-program perjuangan Golongan Karya yang dilaksanakan dalam rangka partisipasi nyata pada setiap tahap pembangunan nasional.

Tujuan setiap tahap perjuangan Golongan Karya adalah seirama dengan tujuan setiap tahap Pelita, yaitu meningkatkan pengabdian Golongan Karya dalam mengembangkan usaha-usaha pembangunan dan pembaharuan untuk mempertinggi taraf kesejahteraan rakyat serta meletakkan landasan yang kuat bagi kelanjutan tahap perjuangan Golongan Karya berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan kedua tujuan tahap perjuangan tersebut, Golongan Karya sekarang ini sedang melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sebagaimana telah saya uraikan tadi, yaitu:

1. Meningkatkan penyiapan kader-kader Golongan Karya yang sekaligus juga Kader Pancasila, Kader Organisasi dan Kader Pembangunan. Kader Pancasila kita dahulukan dalam skala prioritas karena Golongan Karya menyadari sedalam-dalamnya bahwa Pancasila mutlak harus makin memasyarakat secara luas, sehingga setiap insan Indonesia benar-benar menghayati nilai-nilai dasar Pancasila serta mengamalkannya secara kreatif sehingga mampu memenuhi tuntutan dinamika perkembangan masyarakat.
2. Memantapkan konsolidasi ke dalam sambil berjuang menyukseskan Repelita IV, Pemilihan Umum 1987 dan Sidang Umum MPR 1988.
3. Terus mengembangkan Golongan Karya sebagai organisasi kekuatan sosial politik agar semakin memasyarakat, semakin berakar, semakin matang dan semakin mandiri sehingga senantiasa tetap menjadi tumpuan harapan dan kepercayaan rakyat serta kian mampu menunaikan amanat yang diembannya.

Dalam tahap sekarang ini perjuangan Golongan Karya telah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang menggembirakan dan harus dapat kita jaga kesinambungannya dan kita manfaatkan sebagai momentum untuk terus meningkatkan pembangunan serta terus maju bersama menuju masa depan yang kita cita-citakan. □

Dengan Jiwa Dan Semangat Berkarya Segenap Warga/Keluarga Besar PT. Pelni Siap Mensukseskan Pemilu 1987 Demi Kesinambungan Pembangunan Nasional

PELNI

PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA

KANTOR PUSAT : JL. ANGKASA 18 JAKARTA TEL. 417817, 417713, 411963, 416262, 417136, 417319, 417317, 416169 (8 SALURAN), TELEX: 49121, 49387, 49360, KOTAK POS 115

Digitized by Google

KIJANG BARU

Menampilkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia

KIJANG BARU Makin Mewah

Sosok KIJANG BARU makin menawan. Dashboard semewah sedan, ventilasi segala cuaca pada kedua ujung dashboard, serta panel instrumen yang bebas silau.

KIJANG BARU Makin Nyaman

Interiornya sangat lapang. Bantalan tempat duduk dari bahan urethane yang dilengkapi per, nyaman dan tidak melelahkan. Pemasangan AC* ("SUPER KIJANG**") tidak mempersempit ruang kaki berkat saluran yang sudah terpasang (built-in).

KIJANG BARU Makin Aman Dikendarai

KIJANG BARU dirancang lebih aman. Pada model "SUPER KIJANG**", rem depannya tipe cakram berventilasi. Dilengkapi LSPV (Load Sensor Proportioning Valve), menyeimbangkan tenaga pengereman sesuai beban, agar kendaraan tetap stabil walau direm mendadak.

KIJANG BARU Makin Perkasa dan Makin Ekonomis

Mesin Toyota 5K – 1500 cc bertenaga besar, dilengkapi Fuel Saving System (sistem penghemat bahan bakar) untuk menghindarkan pemborosan.

KIJANG BARU Makin Mantap Dikendarai

Suspensi depan tipe Double Wishbone, lebih memantapkan pengemudian. Gigi kemudi yang variabel memudahkan pengendalian.

Tingkat aerodinamikanya lebih baik (CD = 0,45), sehingga hambatan angin lebih kecil, bahan bakar lebih irit, dan laju kendaraan semakin mantap.

** Dealer option ** Bertransmisi manual 5-kecepatan*

Ya, inilah mobil idaman kita semua

TOYOTA 1500 KIJANG

Saksikan Kijang Baru di ruang pamer berikut yang dibuka penuh pada hari Sabtu (8.30 – 17.00) dan hari Minggu (09.00 – 13.00)

Main Dealer : PT. ASTRA MOTOR SALES • JAKARTA
- Jl. Jend. Sudirman No. 5, Telp. 587123.
- Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Telp. 375008.
- Jl. Salemba Raya No. 67, Telp. 884025.
- Jl. Daan Mogot No. 146-147, Telp. 596110.
- Jl. Jagorawi-Lebak Bulus Cilandak, Telp. 760780.
- Jl. Kunir No. 7, Telp. 671829.
- Jl. Muara Karang Raya No. 15 (Pluit), Telp. 6697640.
- Jl. Garuda No. 84, Telp. 414235.

Dealer : • JAKARTA,
- **P T. TUNAS RIDEAN MOTOR I** Jl. Pecenongan No. 60-62, Telp. 359491(5 sal).
- **P T. TUNAS RIDEAN MOTOR II** Jl. Dewi Sartika No. 145, Telp. 801860.
- **P T. KUSUMA MOTOR** Jl. Batu Tulis No. 34, Telp. 366907.
- **P T. PROUNION INDO JAYA** Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 48, Telp. 354253.
- **P T. ASTRIDO JAYA MOBILINDO I** Jl. Batu Tulis No. 9, Telp. 352421-3.
- **P T. ASTRIDO JAYA MOBILINDO II** Jl. Panglima Polim No. 60-A, Telp. 715129.
- **P T. MOBILINDO SUMBER KARYA** Jl. Bandengan Utara No. 41-A, Telp. 673950.
- **PT. KUSUMA INDRA MOTOR** Jl. Raya Bekasi Timur Km. 19, Telp. 4891903.
- **PT. ANEKA MOBILINDO.** Jl. Balikpapan No. 32 A-B, Telp. 377913.

- **PT. SINAR INTI TELAGA,** Jl. H. Samanhudi No. 7, Telp. 350022.
- **BEKASI, PT. KUSUMA BEKASI MOTOR** Jl. Ir. H. Juanda No. 98-A, Telp. (99) 72938.
- **TANGERANG, PT. TUNAS RIDEAN MOTOR III** Jl. Raya Serang No. 80 (Cimone), Telp. (99) 24932,
- **SERANG, PT TUNAS RIDEAN MOTOR IV** Jl. K.H. Wachid No. 91, Telp. (0254) 81270

TOYOTA
TERPILIH KARENA TERPERCAYA

Ⓡ PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR Jl. JEND SUDIRMAN No. 5 Telp. 587551 - JAKARTA

Digitized by Google

Pemilu Ke-4 Orde Baru Harus Lebih Sempurna

Golkar tampil dengan tema memperkokoh hukum, demokrasi dan konstitusi

Kekuatan sosial politik terbesar hasil tiga pemilihan umum Orde Baru, Golongan Karya, akan memasuki gelanggang pemilihan umum ke-4 di era Orde Baru ini dengan tema pokok memperkokoh hukum, demokrasi dan konstitusi. "Tak ada lagi tema yang lebih mendasar dan lebih baik dari itu", Ketua Umum Golkar Sudharmono menegaskan. Berangkat dari tema pokok seperti itu, maka Golkar akan tampil dalam kampanye dengan perilaku yang selaras. Tanpa mengurangi dinamika, seperti kata Ketua Golkar Soekardi, Golkar berkecenderungan untuk tidak mengerahkan massa sebesar-besarnya sebagai suatu pameran kekuatan.

Sudharmono

Bila jejak sikap Golkar ini diikuti oleh dua peserta pemilihan umum lainnya, maka seperti yang dinyatakan oleh para pengamat dalam beberapa media massa, arena kampanye pemilihan umum era satu asas mendatang ini akan bergeser kepada adu program. Adu kebringasan akan ditinggalkan. Tapi bagaimana wujud adu program itu nantinya, tentu masih merupakan tanda tanya — yang akan memperoleh jawab dalam waktu tak lama lagi. Namun Golkar sendiri dalam hal ini telah mencanangkan untuk mengetengahkan program Golkar kepada masyarakat dengan sikap yang jujur dan realistis. Soekardi mengungkap, para juru kampanye Golkar tidak diperbolehkan membohongi rakyat dengan janji-janji yang tak masuk akal.

Bersandar kepada tema pokok, maka tema umum kampanye mendatang itu adalah mengenai pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Ketua Umum Sudharmono SH mengatakan isi Orde Baru ini adalah pembangunan dengan arah konsisten. Ini sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menghendaki pencapaian bentuk masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan untuk itu perlu membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apa dan bagaimana arah yang perlu diketahui oleh para kader Golongan Karya dalam menghadapi pemilihan umum mendatang, berikut ini diturunkan hasil wawancara dengan Ketua Umum Golkar Sudharmono dan beberapa Ketua Golkar lainnya R. Soekardi, Drs. Imam Soedarwo, Oetojo Oesman SH. Juga dengan salah seorang ketua departemen DPP Golkar yang membidangi kepemudaan, Aulia Rachman SH.

Sudharmono SH: Golkar Mesti Berpemikiran Dan mempunyai Komitmen Luas

Menghadapi Pemilihan Umum ke-4 di alam Orde Baru ini, kita perlu memperhatikan satu segi yang esensial berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Segi itu adalah kenyataan bahwa kini para peserta pemilihan umum itu telah sama memiliki asas yang sama, yakni Pancasila.

Ini berbeda dengan pemilihan umum 1971 misalnya. Waktu itu, 10 peserta tampil dengan asas maupun ciri yang berbeda seperti apa yang tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing. Di tahun 1977, memang telah ada penyederhanaan peserta pemilihan umum, sesuai konsep Orde Baru — dan bukan hanya konsep pak Harto sendiri atau Golkar sendiri. Namun karena asas peserta belum satu, maka belum juga tuntas.

Maka adalah beralasan untuk mengharapkan Pemilu 1987 dalam era satu asas ini akan lebih sempurna dan lebih baik keadaannya. Baik karena asas Langsung-Umum-Bebas-Rahasia akan benar-benar dilaksanakan, maupun karena trend pengutamaan orientasi untuk menawarkan program yang akan diperjuangkan dalam Sidang Umum MPR nanti.

Melalui kampanye pemilu nanti, Golkar sendiri menawarkan tema pokok untuk memperkokoh hukum, demokrasi dan konstitusi. Dan sebagai tema umum adalah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Tema-tema pokok dan umum ini terkait dengan pemikiran bahwa pemilihan umum merupakan salah satu mata rantai proses dalam rangka pengamalan Pancasila dan UUD 1945 dalam bentuk esensial. Tegasnya, ia merupakan salah satu mata rantai permulaan dari sistem Demokrasi Pancasila. Mata rantai yang menghasilkan wakil-wakil rakyat berbobot yang akan mentuntaskan program pem-

Digitized by Google

bangunan jangka panjang, serta memberikan arah lebih lanjut bagi pembangunan tahap berikutnya.

Dalam masalah pembangunan, khusus bagi Golkar persoalannya hanyalah bagaimana tetap menjaga konsistensi arah pembangunan nasional yang sudah ada. Arah makronya sudah ada. Jelas, konsep pembangunan sudah ada, tinggal lagi menentukan titik berat pembangunan secara mikro. Khususnya untuk masa lima tahun mendatang. Karena masa lima tahun mendatang ini merupakan lima tahun terakhir dari periode pembangunan jangka panjang (25 tahun) pertama.

Dalam posisinya selaku kekuatan sosial politik terbesar — melalui tiga pemilihan umum yang lalu — Golkar memang tidak hanya memikirkan dan memberikan perhatian kepada masalah-masalah spesifik, tetapi mau tak mau dituntut memiliki pemikiran yang luas. Ini berarti, selain pemikiran-pemikiran yang menyangkut masalah ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, juga pemikiran mengenai berbagai problema sosial ekonomi seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, masalah keadilan, lapangan kerja, partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta berbagai aspek peningkatan kualitas manusia itu sendiri. Semua permasalahan tersebut telah menjadi komitmen Golkar dan akan menjadi perhatian, terutama dalam kaitan upaya penyusunan GBHN dalam Sidang Umum MPR tahun depan.

Pancasila Dan Demokrasi

Tema pokok yang dipilih Golkar dalam pemilihan umum yang akan datang — yakni hukum, demokrasi dan konstitusi — merupakan tema berdasarkan pokok yang dianggap paling esensial. Apa lagi yang lebih penting dari itu? Agaknya tak ada lagi.

Beberapa waktu yang lalu seorang mahasiswa melontarkan pertanyaan, apakah ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak akan mengurangi demokrasi, dan apakah itu tidak berarti kita menuju sistim otoriter? Terhadap pertanyaan ini dapat balik ditanyakan, apakah arti Pancasila dalam hal ini cukup dimengerti?

Kelihatannya terdapat ketidakmengertian, padahal justru Pancasila itu sendiri adalah demokrasi. Jadi Pancasila satu-satunya asas dengan demikian justru akan menjamin demokrasi, tidak mungkin jadi otoriter. Dalam terminologi 'Pancasila satu-satunya asas', jangan berpegang secara harfiah terhadap kata-kata 'satu-satunya' melainkan pada makna Pancasila itu sendiri, sebagaimana terpancar melalui sila-silanya. Salah satu sila menyebutkan sistim demokrasi yang dianut adalah 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'. Secara empiris terlihat, tanpa Pancasila, negara yang bhinneka ini akan sulit bersatu.

Tentu timbul pertanyaan, mengapa Pancasila satu-satunya asas baru sekarang dapat dimasyarakatkan? Hal ini semata-mata karena Orde Baru di bawah kepemimpinan pak Harto justru berdasarkan demokrasi, konstitusi dan hukum. Penerimaan satu-satunya asas tidak kita inginkan tercapai dengan cara paksaan, dengan sistem buldozer. Demokrasi kita adalah demokrasi dengan musyawarah mufakat, bukan demokrasi lain. Maka segala sesuatunya diupayakan dengan asas kekeluargaan. Kita ingin ada suatu apresiasi yang sama tentang Pancasila. Jangan sampai Pancasila dianggap sekedar dasarnya negara, ideologinya negara dan bukan 'ideologi saya'. Yang tidak setuju, kita ajak bicara. Padahal, kalau tidak mau dengan cara buldozer, kita toh bisa saja menempuh cara voting. Tapi kita tetap mengutamakan cara-cara yang demokratis. Itulah sebabnya kita memerlukan waktu cukup lama untuk mencapai kesepakatan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu.

Komitmen terhadap hukum sama kuatnya dengan komitmen terhadap demokrasi. Kita tidak mungkin karenanya menuju ke sistim yang otoriter. Kalau pemerintah Orde Baru otoriter dan tidak menghormati dan menjamin demokrasi tentunya orang-orang Petisi 50 misalnya telah ditangkapi. Bila toh suatu waktu pemerintah Orde Baru menangkap orang-orang yang kebetulan tidak senang pemerintah, itu bukan atas dasar kesewenang-wenangan, melainkan karena yang bersangkutan melanggar hukum.

Keseimbangan

Bidang ekonomi tentu menjadi pula perhatian Golkar. Golkar menganggap pembangunan industri perlu terus ditingkatkan dan berlanjut. Untuk pengembangan industri sangat diperlukan kehadiran teknologi canggih. Karena itu, upaya penguasaan teknologi canggih harus dilakukan. Tapi tentunya, yang dipilih bukanlah teknologi canggih yang menghilangkan kesempatan kerja, melainkan teknologi yang mampu membantu kita meningkatkan kemajuan jangka panjang.

Konsep pembangunan nasional kita adalah melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang seimbang lahir dan batin, material dan spiritual, dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Segala kemajuan pembangunan di bidang material diimbangi dengan kemajuan di bidang spiritual. Sehingga dalam jangka panjang kita tidak sampai terjerumus pada menitikberatkan segi material saja. Manusianya, pendidikannya, kebudayaannya, semuanya perlu diberikan perhatian.

Masalah-masalah debirokratisasi, deregulasi, swastanisasi

PT. MUTIARA SAKTI UTAMA

OFFSET PRINTING, TRADING & GENERAL SUPPLIER

Jl. Cikini Raya 95 Room 311 Telp. 327045 Jak-Pus.

KITA SUKSESKAN PEMILU 1987!!

KEMENANGAN GOLKAR DALAM PEMILU 1987 MENJAMIN TERCIPTANYA IKLIM YANG LEBIH BAIK UNTUK MENINGKATKAN PENGABDIAN, PRESTASI DAN KARYA DITENGAH-TENGAH PEMBANGUNAN NASIONAL

Direksi & Staff

Digitized by Google

dengan tujuan umumnya yang berupa peningkatan efisiensi, efektivitas serta penciptaan iklim yang merangsang kreativitas dan prakarsa masyarakat, juga menjadi perhatian Golkar. Tentang Aparatur, Golkar mempunyai komitmen untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Golkar pun mempunyai komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat itu kini telah menjadi bagian kebijaksanaan pemerintah.

Maksud diadakannya kebijakan debirokratisasi tak lain agar jangan sampai gagasan atau swakarsa masyarakat yang konstruktif terhambat oleh birokrasi. Prosedur pelayanan masyarakat perlu dilaksanakan dengan cara yang mudah dan tak menyulitkan. Ini tidak lalu berarti birokrasi perlu ditiadakan. Birokrasi tetap diperlukan dan dilaksanakan secara sehat justru dengan tujuan tercapainya efisiensi aparatur.

Karena itu pula pemerintah mengadakan lembaga penertiban aparatur sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi aparatur tersebut. Jalur birokrasi yang bermanfaat jelas perlu berjalan terus, tetapi yang menjurus ke arah inefisiensi perlu disederhanakan. Pemerintah misalnya telah mengeluarkan Inpres 4 untuk menyederhanakan jalur birokrasi dalam arus lalu lintas barang di pelabuhan, serta penyempurnaan kebijakan perijinan penanaman modal. Kesemuanya ternyata berhasil memberi kemudahan-kemudahan kepada masyarakat.

Masalah debirokratisasi juga dapat menyangkut hal-hal kecil, bukan hal-hal yang besar saja. Karena, banyak hal-hal kecil yang justru langsung berhubungan dengan masyarakat banyak seperti pengurusan KTP, SIM dan sebagainya. Pengurusannya harus makin dipermudah, jangan dipersulit. Dalam hal ini kontrol sosial maupun kontrol atasan sangat berguna dan diperlukan. Untuk itu diperlukan kesiapan mental aparat maupun masyarakat.

Tak Boleh Lengah

Terhadap berbagai pernyataan mendukung kemenangan Golkar pada pemilihan umum mendatang, kita berterima kasih, tetapi kita tidak boleh lengah dan mengambil risiko kalah. Meskipun banyak dukungan yang telah disampaikan, tapi yang paling penting dalam menentukan tentu adalah apa yang diberikan oleh rakyat pada tanggal 23 April nanti. Bukan berarti pernyataan dukungan yang diberikan tidak dihargai. Bukan pula berarti kita takkan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kelompok yang telah menyatakan dukungannya kepada Golkar. Kita mengucapkan selamat datang kepada warga baru Golkar tersebut. Mereka kita persilahkan untuk terus mendaftarkan diri menjadi anggota dan kader Golkar. Bila yang menyatakan dukungan itu adalah kaum ulama NU, tentu saja Golkar akan memperjuangkan bagaimana agar kepentingan dan aspirasi ulama tersebut dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dapat tersalurkan.

Para kader Golkar sendiri harus sadar bahwa untuk memenangkan pemilihan umum perlu kerja keras. Jangan sampai lengah, jangan sampai terninabobokkan oleh hasil kegiatan selama ini. Karena semuanya nanti, rakyatlah yang menentukan melalui pemungutan suara.

Para kader dan aktivis Golkar yang akan terjun dalam kegiatan pemilihan umum, juga diharapkan jangan sampai terjerumus pada komitmen-komitmen yang tidak realistik. Penampilan mereka serta program-program Golkar yang diketengahkan haruslah dapat memberikan harapan kemajuan dan hari depan yang lebih baik kepada rakyat tapi harus tetap dalam batasan yang realistik dan wajar.

Tentu penting pula, warga Golkar sendiri ikut serta secara nyata memecahkan problema-problema yang dihadapi masyarakat, misalnya upaya meningkatkan lapangan kerja. Jangan menggantungkan segalanya kepada pemerintah. Kader-kader Golkar yang mampu, terutama yang berprofesi sebagai pengusaha diharapkan dapat ikut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Demikian pula dalam penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan swasta — terutama yang dilaksanakan kader-kader Golkar — dalam penyelenggaraan pendidikan dan kursus-kursus diberikan dukungan. Kita perjuangkan agar mendapat fasilitas, pengakuan ataupun izin pemerintah. Sekarangpun hal seperti itu telah kita lakukan, nantinya akan lebih ditingkatkan. Kegiatan pengembangan koperasi juga amat kita dukung, bahkan kader-kader kita sangat berperan di dalamnya. Kegiatan koperasi kita anggap penting karena koperasi pada hakekatnya adalah jalur pemerataan sekaligus peningkatan pendapatan.

Semuanya itu jelas berarti kerja keras. Dan memang kita semua telah bekerja keras selama ini. Namun sekali lagi, jangan lengah.

R. Soekardi: Tanpa Pameran Kekuatan

Golkar berkecenderungan untuk tidak mengerahkan massa sebanyak-banyaknya sebagai suatu pameran kekuatan dalam kampanye mendatang ini. Para juru kampanye Golkar juga tidak diperbolehkan untuk memberikan janji-janji yang tak wajar dan sloganistis. Adalah pasti bahwa Golkar akan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas luber.

Bentuk kampanye akan sangat berbeda dengan kampanye-

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
DINAS PARIWISATA
JALAN CIPAGANTI No. 151 — 153 TELEPON 81490 BANDUNG

KEPALA DAN SELURUH STAF DINAS PARIWISATA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT
UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR,
SEJAHTERA LAHIR BATIN

Digitized by Google

kampanye pemilihan umum yang lampau. Golkar akan menampilkan bentuk-bentuk kampanye yang tidak merangsang namun tidak kehilangan dinamika. Takkan ada yel-yel atau slogan yang sama sekali tak ada relevansinya dengan keperluan pemilihan umum itu sendiri. Golkar akan memperlakukan kampanye sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat.

Khusus untuk bidang pembangunan ekonomi, kepada para kader telah diberikan petunjuk agar setiap kader mampu secara sungguh-sungguh menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil-hasil pembangunan. Apa yang telah dicapai, dan apa pula yang masih perlu diperjuangkan bersama, guna memenuhi amanat rakyat yang diberikan melalui MPR yang dalam bentuk GBHN.

Dalam mengetengahkan program perjuangan Golkar, setiap kader dituntut untuk bersikap jujur dan realistis. Termasuk dalam mengetengahkan segala hambatan yang masih kita hadapi saat ini maupun gambaran tantangan dalam lima tahun mendatang. Namun sekaligus juga mampu memberikan penjelasan, bahwa kendati masih banyak hambatan dan tantangan, kita masih akan mampu membangun dan meletakkan kerangka landasan pembangunan seperti yang kita cita-citakan. Kerangka landasan itu kita letakkan dalam Pelita IV dan akan kita mantapkan dalam Pelita V.

Sikap jujur dan realistis itu menghindarkan sikap meninabobokkan masyarakat. Namun sebaliknya harus merangsang masyarakat untuk turut serta meningkatkan perekonomian kita.

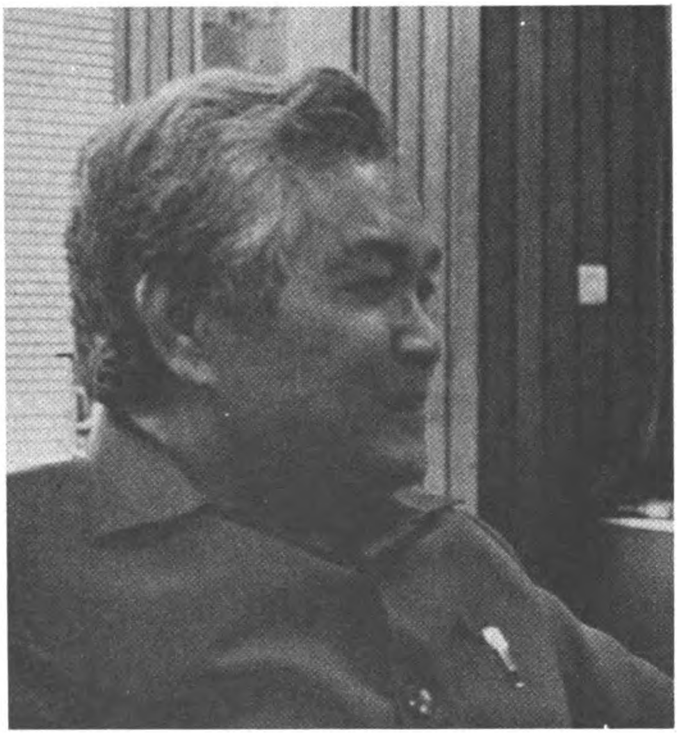

R. Sukardi

Kepada dunia usaha Golkar akan memberi rangsangan agar berperan lebih banyak dalam pembangunan. Dalam kaitan ini Golkar menyatakan Komitmen untuk berjuang secara bertahap sesuai kemampuan dan kondisi yang ada, dimulai dengan langkah deregulasi. Terutama yang ingin kita perjuangkan adalah menciptakan iklim yang sehat dan usaha mempermudah segala perizinan dan memperpendek jalur birokrasi perizinan tersebut.

Dalam kaitan itu pula, Golkar mencanangkan gerakan efisiensi nasional agar memperoleh perhatian yang lebih besar dan lebih luas. Golkar berpendapat, dengan dukungan gerakan efisiensi nasional dan disiplin nasional, kita akan lebih cepat mengatasi hambatan-hambatan. Gerakan efisiensi dan disiplin nasional, termasuk kesetiakawananan sosial, akan diketengahkan dalam kampanye Golkar. Tujuannya agar hal itu terimplementasikan secara nasional, secara penuh dapat dilaksanakan terutama oleh aparatur negara dan melalui pemimpin-pemimpin masyarakat sebagai panutan, sehingga masyarakat akan mengikutinya. Sehingga masyarakat mempunyai kesatuan bahasa: kendati memiliki hanya sedikit, tetapi menggunakan yang sedikit itu seefektif mungkin.

Sektor informal dalam pada itu, menjadi perhatian dan program Golkar. Golkar memperjuangkan agar pemerintah pun memberikan perhatian yang lebih besar lagi. Golkar sendiri secara langsung meningkatkan perhatian dan kegiatan di sektor informal ini melalui jalur organisasi yang bergerak di sektor informal. Kita mendorong sektor informal ini agar menjadi salah satu kelompok dan kekuatan ekonomi yang besar. Sebetulnya memang sektor informal ini mempunyai peran yang penting selaku salah satu mata rantai dalam jaringan distribusi produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri.

Golkar telah dan akan selalu bekerjasama dengan pemerintah, dan untuk tingkat pertama telah mensepakati bahwa sektor informal ini merupakan sektor penting dan dalam tingkat kedua perlu diberikan pembinaan secara aktif. Selain memberikan pembinaan, juga disepakati untuk diberi kemudahan-kemudahan usaha pengembangan. Yang penting adalah kaki lima ini diberikan lokasi yang aman dan tertib tanpa perlu ada kecemasan mengalami penggusuran. Hakekat dari program ini adalah kaki lima atau sektor informal ini akan tetap ada. Dan di dalamnya mereka yang ulet dan berjiwa entrepreneur akan tumbuh menjadi besar. Serta merupakan pula sektor penyediaan lapangan kerja baru.

Sementara itu, dalam masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masalah perbaikan ekonomi, kita melihat kenyataan betapa dengan kemajuan teknologi di satu pihak dan menyulitnya perekonomian dunia di lain pihak, tak mudah untuk menghindarkan PHK. Berbarengan dengan itu, belum terbuka kesempatan lebih banyak lapangan bagi para pencari kerja. Secara teoritis program ketenagakerjaan memang harus sesuai

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA, SEGENAP WARGA KELUARGA BESAR

Patra Jasa

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU - 1987
DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PT. PATRA JASA,

HOTEL - MOTEL -TURISME - REAL ESTATE - INDUSTRIAL - CATERING & PERDAGANGAN UMUM.
GEDUNG PATRA JL. GATOT SUBROTO 32 - 34 JAKARTA SELATAN, TELEPON 510503.

Digitized by Google

dengan kebutuhan pembangunan. Artinya, kita harus mampu membuat rencana ketenagakerjaan berdasarkan rencana pembangunan. Perencanaan pendidikan juga disusun sesuai kebutuhan pembangunan, dalam artian terdapat alokasi jenis pendidikan yang merangsang partisipasi dalam pembangunan. Tidak semata-mata menggantungkan harapan untuk dapat bekerja di instansi pemerintahan atau swasta, melainkan yang berkeinginan bekerja sendiri. Apakah itu sebagai montir, tukang jahit, tukang las dan sebagainya dengan sikap kemandirian.

Imam Soedarwo: Untuk Kaum Pekerja, Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Pemillihan Umum itu tidak terlepas dari sistem politik secara nasional. Kemudian dalam kerangka Orde Baru seperti yang sering dikemukakan oleh Ketua Umum Golongan Karya, bahwa Orde Baru itu pada hakekatnya adalah demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum.

Imam Soedarwo

Jadi kita sebagai infra struktur politik tentunya tidak dapat terlepas dari ketentuan tersebut. Maka atas dasar itu tentu kita harus kembali kepada perundang-undangan yang berlaku. Khususnya perundang-undangan yang menyangkut mengenai kampanye. Dan masalah kampanye ini sudah diatur di dalam Keputusan Presiden no. 27 tahun 1986.

Kemudian dari segi pengamatan empiris, kita ini sudah melaksanakan kampanye (pemilihan umum) sebanyak 3 kali. Yaitu tahun 1971, 1977 dan 1982. "Jadi kita sudah dapat diperkaya dengan pengalaman-pengalaman". Sehingga dalam kampanye tahun 1987 nanti ada yang mendasar, yaitu dengan sudah ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian maka keberadaan masing-masing peserta Pemilu nanti akan lebih jelas.

Jadi menurut saya, karena Golongan Karya sudah 3 tahun yang lalu melaksanakan kaderisasi baik teritorial maupun fungsional tentunya kita dapat memanfaatkan kader-kader tersebut. Dan pelaksanaan kampanye itu nantinya wajar-wajar saja — sesuai dengan Kepres. Misalnya: adanya rapat-rapat umum, pawai-pawai keramaian, penyiaran melalui RRI, TVRI dan yang lain.

Namun yang paling penting dalam pelaksanaan kampanye nanti itu dititik beratkan kepada daerah tingkat II saja. Ini sesuai dengan ketentuan UU. Untuk daerah koordinasi saya, yaitu Korwil IV, yaitu NTT & Timor Timur mungkin dalam pelaksanaan kampanye nanti tidak 25 hari. Soalnya ada hari yang bertepatan dengan hari Paskah. Barangkali pelaksanaan kampanye hanya 20 hari saja.

Yang penting dalam pelaksanaan kampanye nanti kita tidak menimbulkan atau berlaku provokatif. Tidak membuat kecemburuan sosial. Dan saya kira tema kampanye itu sudah ditetapkan dalam penataran jurkam belum lama ini. Sebab pada hakekatnya kampanye itu merupakan kegiatan untuk menarik simpati rakyat pemilih, dalam rangka usaha untuk memenangkan Golongan Karya dalam Pemilu yang akan datang. Tentunya dengan Pemilihan Umum yang baik dan terkendali.

P.T. TUGU PRATAMA INDONESIA
Gedung Patra, lantai 1 - Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta P.O. Box 3789/Jkt.
Telepon 512041 - 512293 - 512654 - 512468 - 511764
Telex : 44699 GUTAMA IA & 45337 GUTAMA IA

Digitized by Google

Kalau dikaitkan dengan dunia Pekerja, kebetulan saya sebagai ketua SPSI, dalam penggalangan terhadap para kader Golongan Karya saya manfaatkan yang berada di SPSI. Untuk penggalangan itu SPSI sudah banyak melakukan penggalangan di tempat-tempat kerja.

Misalnya saja penggalangan terhadap kader Golkar di beberapa perusahaan di Kalimantan Selatan. Selain di dalam penggalangan supaya tidak terlalu menyolok, upayanya ialah dengan mengadakan pertemuan untuk menerangkan mengenai hubungan perburuhan Pancasila. Sewaktu mengadakan penggalangan di 6 perusahaan di Kalimantan itu, saya tanyakan mengenai apakah kalian berani menjamin 100 persen untuk kemenangan Golongan Karya, mereka jawab sanggup.

Dan ini merupakan bukti nyata bahwa dalam tubuh SPSI juga dilakukan penggalangan-penggalangan dalam rangka untuk ikut mensukseskan Pemilu tahun 1987 bagi kemenangan Golongan Karya. Selain itu dalam rangka hari Ulang tahun SPSI, kami juga memanfaatkan kesempatan secara wajar untuk mengadakan penggalangan-penggalangan. Dan sekaligus sebagai bukti nyatanya, Kalimantan Selatan juga ikut menyatakan kebulatan tekad (di beberapa perusahaan) mendukung bagi kemenangan Golongan Karya dalam Pemilu tahun 1987 nanti.

SPSI itu milik semua golongan, baik oleh PPP, Golkar dan PDI. Itu tidak kami lupakan, maka dalam memilih masalah kepengurusan atau dalam rapat kami selalu sertakan berbagai kalangan tersebut.

Sedangkan upaya Golongan Karya di Banjarmasin supaya dapat memenangkan Pemilu tahun 1987 nanti, SPSI sudah melakukan himbauan kepada para pengusaha.

Untuk dunia pekerja, kita tidak membedakan tingkat pemuda dan tingkat yang tua. Ini jadi satu. Jadi yang jadi problematik yaitu yang untuk SLTP dan SLTA diperhatikan. Tentunya untuk kedua lapisan tersebut persoalannya ialah bagaimana dapat menyentuh emosi mereka. Mengenai hal tersebut untuk dunia pekerja sebenarnya mudah, misalnya mengenai masalah pengupahan, perlindungan, syarat-syarat kerja dan jaminan sosial.

Jadi kalau untuk kita itu lebih mudah. Karena organisasi kita sekarang ini kan sudah dimantapkan oleh DPP, DPC, DPD unit kerja kita. Dan unit kerja kita misalnya diperusahaan pabrik Sanyo, di pabrik itu semua orang SPSI semua. Dan dengan adanya demikian saya pun tidak semena-mena, dari kekuatan 3 unsur itu tetap akan saya pelihara dan perlakukan secara wajar.

Oetojo Oesman SH: Mengisi Mental Ideologis Menjawab Tantangan Zaman

Program Golongan Karya yang diajukan dalam Pemilihan Umum nanti. Pertama-tama Pemilihan Umum itu merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Dan penyelenggaraan dalam salah satu fase mekanisme demokrasi Pancasila yang 5 tahunan. Oleh karena itu adanya Pemilihan Umum melalui terbentuknya DPR/MPR pada sidang Umum MPR itu akan memberikan suatu arah dan kebijaksanaan dengan apa yang akan dilakukan bangsa ini dalam 5 tahun mendatang.

Dan Golongan Karya melalui wakil-wakilnya akan turut

Oetojo Oesman

DEWAN PIMPINAN DAERAH

GOLONGAN KARYA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Sekretariat Jalan Raya Klayan 94 - 95 Telp. 6028 Kecamatan Cirebon Utara

DENGAN SEMANGAT TRI SUKSES GOLKAR KITA SUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI BAWAH PEMERINTAHAN ORDE BARU

DEWAN PIMPINAN DAERAH

GOLONGAN KARYA TINGKAT II KABUPATEN CIREBON

Ketua Dewan Penasehat,
ttd.
Memed Tohir

Ketua,
ttd.
Murad Yusuf
NPAG. 10220000043

Digitized by Google

memperjuangkan program yang akan dijalankan oleh Golkar. Jadi dalam Sidang Umum MPR wakil-wakil Golkar akan mengajukan program tersebut.

Jadi sebelum wakil-wakil Golongan Karya ini mengajukan program-programnya, tentu ditawarkan dan dibicarakan melalui Lembaga Pemilihan Umum (LPU) ini dengan rakyat secara langsung. Dan calon-calon rakyat yang akan mewakili rakyat ini pada waktu masa atau sebelum kampanye ini bertemu dengan rakyat. Kemudian setelah memberitahu dan menawarkan program-programnya itu kemudian membawa program tersebut ke dalam Sidang Umum MPR.

Dan dalam mengajukan programnya itu, harus diterima apa yang menjadi kepentingan rakyat. Jadi wakil-wakil kita itu harus mampu menyerap, menyalurkan amanat rakyat guna untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Berdasarkan hal itulah maka program-program tersebut disusun. Dan dalam penyusunan suatu program, harus menurut prinsip-prinsip yang dipegang sejak kelahiran Golongan Karya dan keberadaan Golongan Karya yang sudah kita junjung, yaitu program-program yang tentunya harus dijiwai dan diwarnai oleh Pancasila.

Dan yang berikutnya adalah program itu disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan kehidupan rakyat secara nasional. Dan yang berikutnya lagi adalah penyusunan program dengan memperhitungkan perkembangan keadaan dan medan, baik nasional maupun di luar batas-batas nasional.

Jadi program tadi disusun juga menurut kebutuhan rakyat dan tuntutan medan. Dan ada lagi satu hal yang penting, program tersebut disusun berdasarkan prinsip kontinuitas yang dimintakan dari pembangunan jangka panjang untuk tahap pertama (Program 25 tahunan). Berdasarkan ini semua, maka program-program yang diajukan oleh Golongan Karya akan tetap konsekuen dan konsisten dengan konsep perjuangan Golkar, yaitu juga konsep dari perjuangan Orde Baru. Yaitu dengan pembangunan yang dilaksanakan secara demokrasi, konstitusional dan berdasarkan hukum.

Karena panggilan dari Orde Baru, yang juga merupakan Orde Pembangunan adalah bagaimana kita dapat melalui amanat rakyat, seperti yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 45, yaitu untuk mengisi kemerdekaan. Dan dalam mengisi kemerdekaan, tidak dapat tidak kita itu harus membangun. Dan di dalam pembangunan ini sudah tercakup pula di dalamnya konsolidasi dari tiap-tiap tahapnya. Artinya setiap pembangunan ini mencakup, baik penyesuaian, penegasan, penajaman-penajaman dan peningkatan-peningkatan, dalam pelaksanaan dan kebijaksanaan arah dari pembangunan.

Dan tentunya di dalam pembangunan tersebut terdapat unsur-unsur yang lestari, yang terdapat juga unsur-unsur yang berkembang. Dan yang berobah ini disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan dengan kebutuhan tahap pembangunan itu sendiri. Misalnya seperti sekarang ini, dengan apa yang kita hadapi yang tetap dan faktor-faktor yang berubah untuk disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan pembangunan tahun 1988/1999.

Dengan menyadari situasi dan kondisi yang ada kini untuk menjamin keberhasilan pola umum pembangunan jangka panjang pertama ini, diperlukan peningkatan kualitas untuk mengatasi kesenjangan kuantitas yang diperkirakan timbul pada tahun-tahun mendatang. Misalnya dengan merampingnya pendapatan dan anggaran belanja negara, hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan dan kualitas kerja dengan lebih berat pada penajaman prioritas serta upaya-upaya khusus lain yang dapat diharapkan membuat terobosan. Dan juga menyadari setidak-tidaknya dalam 5 tahun mendatang ini kondisi ekonomi internasional masih belum menunjukkan kecerahannya. Maka diperlukan peningkatan disiplin nasional, ketahanan, keuletan, kelugasan, pengabdian, ketrampilan dan keahlian. Sehingga nantinya dapat meningkatkan eksistensi dan produktivitas. Akan tetapi

p.t. Trisapta Matra

EKSPOR - PERDAGANGAN UMUM - JASA EKSPEDISI

Jl. Enggano No. 15 B 11 Tg. Priok Jakarta Utara Indonesia - Phone: (021) - 495161 - 491104 - 495441 TELEX

Berjuang Bersama GOLKAR Sebagai Benteng Pancasila

Kita Sukseskan Pemilu 1987

H.A. Kodrat

DIREKTUR UTAMA

Digitized by Google

sebagai prasyarat utama adalah semangat rasa kesatuan dan persatuan.

Kemudian di dalam program-program tersebut, program ekonomi yang diajukan akan tetap bertumpu kepada Trilogi Pembangunan dengan semakin meletakkan perhatian kepada segi pemerataan pembanguan dan hasil pembangunan melalui kedelapan jalur pemerataannya, dan untuk menuju terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu perlu tetap memandang pembangunan ekonomi sebagai titik berat, namun keserasian dan keterpaduan dengan pembangunan di bidang-bidang lain agar ditingkatkan.

Dalam hal ini pengembangan kemampuan sumber daya manusia akan ditingkatkan karena akan dijadikan andalan utama bangsa di dalam pembangunan yang akan datang. Oleh karena itulah maka perlu diciptakan iklim yang semakin mendorong kemungkinan untuk berprakarsa, meningkatkan kreativitas dengan mempertebal tanggung jawab dan memperluas motivasi menuju keberhasilan pembangunan.

Dan di sini tentu peranan utama akan diletakkan pada pembangunan di bidang pendidikan, sehingga akan dapat dilakukan pemantapan, pendidikan yang dapat mengisi mental idiologis, dan sekaligus ketajaman dalam profesional. Sehingga dapat diharapkan dapat menjadi faktor keunggulan komparatif bangsa.

Kemudian program-program yang diperjuangkan diharapkan pula dapat menjawab tantangan-tantangan masa depan dalam pembangunan ekonomi nasional dan tantangan nasional dan internasional yang tidak menentu di tahun-tahun mendatang. Perlu menjawab meningkatnya tuntutan pemenuhan rasa keadilan, karena masih adanya berbagai kesenjangan dari berbagai pengadaan, penyelenggaraan, pelayanan masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud upaya pemerataannya diberbagai bidang. Serta di sana-sini masih belum terselenggaranya peraturan· serta pelaksanaan hukum yang tuntas.

Sementara itu perlu disadari bahwa kualitas hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat semakin meningkat, komplek dan canggih. Hal ini akan membawa tuntutan dan aspirasi masyarakat yang meningkat sesuai dengan sistim percepatan kebutuhan dan harapan yang ditimbulkan pembangunan itu sendiri. Sementara sumber daya alam yang masih potensial relatip masih terbatas pengolahannya, sehingga masih memerlukan modal, tenaga trampil dan ahli, serta penerapan teknologi untuk menjadikan masalah yang potensial tersebut dapat menjadi efektip.

Dan juga penting mendorong tampilnya generasi baru dengan persepsi baru tentang kehidupan yang dapat dipengaruhi perkembangan zaman. Golkar mengambil peran dalam segala upaya ini.

Aulia Rachman

Aulia Rachman SH: Dengan Generasi Muda, Dialog

Golongan Karya dalam Pemilihan Umum tahun 1987 harus tampil dengan generasi muda itu sendiri. Dan harus kita ketahui bahwa golongan muda yang kita sebut dengan golongan perdana pertama diperkirakan sekitar 12 juta. Dan golongan muda perdana ini kita perkirakan lahir pada masa Orde Baru. Dan kita lihat dari golongan ini mereka itu masih belum punya banyak pengalaman-pengalaman dalam masa silam. Dan yang berikut mereka ini juga belum punya pengalaman mengenai bentuk pengalaman dalam masa depan itu sendiri.

Golongan ini juga tidak punya pengalaman-pengalanan tahun 45. Mereka ini masih mencari-cari bentuk. Dan wajarlah bila program Golkar untuk generasi muda itu dalam kampanye itu diarahkan untuk menarik pemuda itu. Dan saya lihat kontestan lain pun juga begitu.

Dan sekarang ini memang program Golkar itu diarahkan pula untuk menyentuh pikiran dan dunia mereka. Saya melihat ada 3 program dalam bentuk kampanye Golongan Karya yang dilakukan pada generasi muda. Dan kita ketahui bahwa generasi muda itu ada tiga; pemuda, mahasiswa dan pelajar.

Dan substansi dari program Golongan Karya dalam kampanye itu pada generasi muda itu, lebih mendekatkan kepada masalah lapangan kerja. Meningkatkan kesejahteraan mereka, karena masalah ini bukan masalah golongan kerja saja, tapi merupakan masalah yang dihadapi secara keseluruhan.

Pendekatan yang dilakukan kepada mahasiswa, sudah dilakukan oleh Golongan Karya. Dan pendekatan kepada manusia analisa, mahasiswa itu, kendati kecil, tapi mereka itu vokal, mempunyai pengaruh. Pendekatan kepada mahasiswa itu dilakukan dengan cara mengadakan diskusi-diskusi tentang masa depan itu sendiri. Dan dari diskusi itu kita gambarkan bahwa Golongan Karya itu sejak dari dulu itu memang komit dan konsisten dalam perjuangan sejarah bangsa itu sendiri.

Dan yang berikutnya adalah pendekatan kepada pelajar. Dalam program ini perlu pendekatan secara tersendiri. Misalnya masalah-masalah cinta kepada tanah air dan lain sebagainya.

Kampanye ini adalah lebih praktis ketimbang analitis. Bagi Golongan Karya kampanye itu merupakan penggalangan yang dilakukan selama ini. Untuk itu dalam kampanye nanti kita tidak menampilkan yang bersifat show of force, karena kampanye yang seperti ini akan dapat menimbulkan kampanye-kampanye seperti di 'lapangan Banteng'. Pemilu tahun 1987 ini merupakan yang pertama setelah ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas. Bagi Golkar hal ini bukan merupakan masalah, karena hanya akan merupakan aktualisasi dari apa yang telah diresapi sejak lama.

Dan seperti saya katakan tadi, para mahasiswa itu mempunyai keinginan untuk mengadakan dialog. Ingin didengarkan, bagaimana pikiran-pikiran mereka yaitu tentang masa depan. Maka, Golongan Karya harus mendengarkan. Program Golkar, khususnya mengenai generasi muda itu, telah diinventarisasi sedini mungkin. Selama ini terlihat di daerah-daerah tersebut kebutuhan itu ada. Seperti di Bandung, Yogya, Semarang. Dan memang pelajar-pelajar ini kelihatan sekali, masih bersih. Dan kewajiban kita itu mengadakan dialog dengan mereka apa adanya. Mereka itu cukup kritis. Pertanyaan mereka kadang-kadang lebih pragmatis. Untuk itu para kader-kader Golongan Karya perlu untuk mengetahui pola pikir mereka. □

Digitized by Google

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

"Harus peka terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat yang semakin kritis."

Masalah pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat belakangan ini kembali mendapat sorotan dari kalangan masyarakat luas. Berbagai keluhan sebagai perwujudan rasa ketidak-puasan masyarakat muncul dalam bentuk-bentuk tulisan maupun ucapan spontan. Ini menandakan bahwa masyarakat sekarang tidak sekedar hanya menerima apa yang datang dari pemerintah begitu saja.

Keluhan, bahkan terkadang umpatan, muncul di media massa dalam bentuk surat pembaca dengan atau tanpa mencantumkan nama terangnya. Apa yang mereka keluhkan menyangkut pelayanan pemerintah seperti pelayanan di bidang jasa transportasi, listrik, telepon, air minum, keagrariaan, keimigrasian, pelayanan kesehatan dan lain-lainnya. Kesemuanya itu menuntut perhatian dan peningkatan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan dengan masalah-masalah itu.

Upaya menciptakan citra aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa terus didengungkan. Seperti ditegaskan Menteri

Soelarso

Dalam Negeri Supardjo Rustam ketika melantik Dirjen Agraria, akhir Desember lalu. Di mana ditegaskan perlunya aparat agraria berupaya menciptakan citra sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bersih dan berwibawa. Bahkan oleh Mendagri diingatkan agar aparat agraria dalam menangani masalah keagrariaan tidak boleh terpaku pada masalah-masalah

Supardjo Rustam

yang sifatnya sangat teknis mengingat implementasi politik masalah pertahanan sangat menonjol.

Penegasan mengenai perlunya aparat pemerintah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat muncul pula dari Direktur Jenderal Imigrasi Soelarso. Kepada aparat imigrasi, Soelarso telah wanti-wanti agar tanggap dalam melaksanakan tugasnya, peka terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat yang sudah semakin kritis dan dewasa. Lebih tegas lagi dia mengatakan aparat imigrasi harus mampu memperlihatkan tanggung jawab dan peran sertanya dalam pemberian kemudahan-kemudahan pengeluaran perijinan keimigrasian. Secara khusus Soelarso memberikan petunjuk-petunjuk bagi peningkatan pelaksanaan tugas pelayanan keimigrasian. Dan bagi para petugas yang melanggar atau membuat citra yang tidak baik bagi Imigrasi akan ditindak dengan tegas.

Pengakuan bahwa pelayanan kepada masyarakat belum sempurna datang pula dari Dirjen Postel, Ir. Abdurrachman, menyangkut pelayanan di bidang pos. Tapi tidak terjadi peningkatan jumlah keluhan yang ada seperti dulu terjadi. Sekarang ini, menurut pengakuannya mulai berkurang. Hanya pada hari-hari raya akan ada kesibukan petugas pos, dan biasanya akan muncul keluhan atau kritikan dari warga masyarakat pemakai jasa pos.

Momok Birokrasi

Tekad pemerintah untuk melakukan debirokrasi di lingkungan departemen-departemen teknis merupakan upaya pula untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pelayanan bagi warga masyarakat. Selama ini apa yang disebut birokrasi lebih merupakan momok di sebagian masyarakat. Birokrasi diidentikkan sebagai macam-macam pungutan dan persyaratan-persyaratan tambahan yang harus ditanggung masyarakat. Kendati sebenarnya dengan kata birokrasi itu sendiri tidak seharusnya diidentikkan sebagai bentuk lain dari pungutan dan sebagainya.

Berkata Sawidago Wounde, Wakil ketua Komisi II DPR, sebetulnya dengan aturan-aturan yang sudah ada, kalau benar-benar diikuti semua pihak, baik aparat pemerintah sendiri sebagai pemberi layanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan, tidak akan timbul kesulitan atau menyebabkan sulitnya masyarakat.

Aturan-aturan yang sudah ada menurutnya merupakan birokrasi yang memang dibutuhkan dalam kaitan hubungan aparat pemerintah dan masyarakat. Namun dalam kenyataan sering pelayanan diembel-embeli dengan persyaratan tambahan di luar aturan yang sudah ada. "Hal-hal semacam ini yang pada akhirnya menjadi bahan keluhan masyarakat. Ini yang perlu dicarikan jalan pemecahannya".

Sawidago Wounde yang akrab dengan masalah atau kasus-kasus tanah, melihat dalam hal pelayanan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat, terlihat kesan adanya kesulitan bagi sementara masyarakat yang akan menguruskan pensertifikatan tanahnya kendati sebenarnya untuk mengurus sertifikat tidaklah sesulit itu kalau benar-benar aparat agraria memberlakukan atau memainkan aturan birokrasi yang sebenarnya.

Begitu pula dalam kasus pembebasan tanah, kalau semuanya itu sudah dipolakan tidak akan menimbulkan kesulitan. Tapi tidak jarang ada unsur kesengajaan sementara oknum aparat sendiri yang sebenarnya mengetahui aturannya, bersikap tidak mau tahu dengan peraturan yang ada. "Dan yang tidak mau tahu inilah yang kadang-kadang membuat hal-hal yang bisa mengecewakan masyarakat," ujarnya.

Kalau ada orang mengatakan birokrasinya yang menghambat, menurut dia yang namanya birokrasi sebenarnya tidak meng-

Digitized by Google

hambat, sebab melalui birokrasi itu masyarakat akan memperoleh kepastian hukum, bahkan dengan birokrasi pula segala sesuatunya seharusnya menjadi lancar. Tapi dalam pelaksanaan tugas tidak jarang ada orang/aparat yang sok birokratis, membuat mata rantai birokrasi menjadi panjang. Padahal untuk urusan tertentu sebetulnya tidak diperlukan waktu lama, tapi dengan dalih karena birokrasi, berlama-lama melakukan penelitian kebenaran surat-surat yang dibawa warga masyarakat, memenuhi syarat atau tidak. "Sebenarnya dengan menterapkan birokrasi kepada masyarakat yang berurusan diberi penjelasan harus kemana dan bagaimana." Biar mata rantainya panjang, yang penting ada kepastian dan tidak membuatnya sebagai hambatan. Pada umumnya orang menyalahkan birokrasi karena mata rantainya yang panjang sehingga ada kesan memperlambat urusan. Dalam kaitan ini, menurut Sawidago Wounde, bukan mata rantainya yang panjang yang menjadikan urusan jadi lambat, tapi sok birokrasi dari aparat itu sendiri yang menjadikan urusan berkepanjangan sehingga menimbulkan keterlambatan. Belum lagi adanya tuntutan persyaratan tambahan dari oknum itu, membuat pelayanan tidak lancar.

Perlu Pengertian Masyarakat

Keluhan yang tidak kalah gencarnya akhir-akhir ini menyangkut jasa telekomunikasi. Di kota sepadat Jakarta ini, kebutuhan akan sarana telekomunikasi semakin meningkat sementara kemampuan memberikan pelayanan oleh instansi bersangkutan masih dihadapkan kepada segala keterbatasan. Meningkatnya permohonan nomor telepon baru, keluhan mengenai penghitungan pulsa, pesawat telepon yang sering macet atau terjadi induksi, paling banyak muncul di mass media. Kesemuanya ini perlu mendapat jawaban yang pasti dari Perumtel.

Seperti ditegaskan oleh Dirjen Postel, Ir. Abdurrachman, bahwa pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme pemasaran. Mekanisme pemasaran ini menampung tanpa batas semua permintaan sambungan, artinya tidak ada yang ditolak permintaan yang datang dari konsumen atau masyarakat. Kepada masyarakat sendiri juga telah diberikan kemudahan dengan tidak perlu membayar untuk pendaftaran, hal mana memang sesuai dengan prinsip yang dianggap benar bahwa karena belum ada jasa yang diberikan kepada masyarakat tidak dibenarkan untuk mengadakan pungutan.

Namun perlu adanya pengertian dari masyarakat calon konsumen/pelanggan telepon, ujar Dirjen, bahwa untuk mendapatkan sambungan telepon paling tidak harus memperhatikan dua persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dalam suatu wilayah kantor telepon. Ada batasnya. Setiap daerah sentral telepon dan satu sentral telepon tidak dapat diisi penuh nomornya. Dapat digambarkan kalau

Sawidago Wounde

punya 1000 nomor tidak semuanya bisa digunakan. Karena kalau dalam daerah itu ada yang pindah ke daerah lain maka dia mendapat prioritas untuk dipindahkan ke tempat yang baru. Begitu pula sebaliknya.

Hal-hal lain yang perlu diketahui, harus ada cadangan nomor yang disediakan sebab kadang-kadang ada permintaan mendadak terutama dari pemerintah. Ini biasa terjadi kalau pemerintah membangun kantor baru di suatu daerah dan memerlukan sambungan telepon baru. Tapi tidak hanya permintaan pemerintah, kadang-kadang karena pertimbangan kebijaksanaan tertentu harus memberikan prioritas terhadap permintaan baru.

Cara lain untuk dapat memenuhi permintaan masyarakat, melalui pengembangan kabel. Tapi pengembangan kabel ini atas dasar informasi pasaran, tidak atas dasar urutan pendaftaran. Pelayanan melalui pengembangan kabel hanya bisa menurut daerah yang dikembangkan. Di sini biasanya timbul masalah. Karena pelayanan permintaan tidak didasarkan urutan pendaftaran, maka tidak jarang orang yang sudah lebih dahulu mendaftar tidak mendapat bagian. Dan ini adalah awal dari munculnya macam-macam kecurigaan, kenapa orang berseberangan jalan tidak bersamaan mendapat sambungan telepon.

Dirjen Postel menegaskan perlunya masyarakat memahami bahwa setiap wilayah kantor telepon itu hampir serupa dengan RT (Rukun Tetangga), juga dibagi dalam wilayah-wilayah. Sehingga satu jalan di mana RT-nya berbeda, untuk kabel telepon juga berbeda wilayah kabelnya. Pada saatnya untuk seberang jalan berbeda pelayanan kabelnya, begitu pula untuk wilayah di seberangnya. Sehingga menimbulkan perbedaan pelayanan kabel. Bagi mereka yang belum memperoleh nomor yang bebas harus menunggu giliran, dan menurut ketentuan selama ini akan diumumkan mana daerah-daerah yang sudah siap untuk dilayani.

Ada permasalahan lain menyangkut telepon ini, di mana pada saat diumumkan atau yang bersangkutan dikirimi surat mengenai permohonan teleponnya, sering kali tidak muncul. Tapi begitu tetangganya mendapat pelayanan penyambungan telepon, mulai mereka ini meributkan. "Cara seperti ini sebetulnya dimaksudkan agar konsumen terhindar dari praktek calo," ujar Abdurrachman.

Masalah lain yang menimbulkan kejengkelan pemakai jasa telepon, menyangkut cara penghitungan pulsa yang dinilai tidak beres. Menurut Dirjen Postel, kesan perhitungan pulsa yang tidak beres timbul karena tidak dibuka kesempatan dialog secara terbuka antara petugas yang khusus melayani loket dengan pelanggan yang merasa dirugikan karena adanya perhitungan yang tidak benar. Untuk peningkatan pelayanan maka dibuka loket khusus untuk melayani pengaduan mengenai perhitungan pulsa. Dengan cara ini sudah sangat membantu meyakinkan pelanggan, tapi belum seluruh kota memiliki loket khusus untuk melayani dialog dengan pelanggan. Mengapa belum bisa, Dirjen Postel menjelaskan peralatan yang digunakan di kota tertentu masih model lama sehingga tidak bisa menyajikan informasi secara cepat. Baru bisa dilakukan pengecekan/pengukuran pulsa kalau ada klaim dari pelanggan.

Abdurrachman

Menyinggung tentang upaya peningkatan pelayanan jasa pos kepada masyarakat, Dirjen Postel Abdurrachman mengemukakan bahwa keberhasilan yang terutama adalah dengan terus menerus bertambahnya titik pelayanan. Dalam bentuknya titik pelayanan ini bisa berupa kantor pos maupun kantor pos pembantu. Titik pelayanan di kantor pos berupa pelayanan pos keliling di kota maupun pos keliling di desa, juga ada istilah rumah pos yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Kemajuan lain yang bisa dicapai oleh jasa pos, dengan keikutsertaan pos melayani pihak ketiga, membantu instansi lain dalam pelaksanaan tugas, misalnya melayani pembayaran pensiun, pembayaran rekening listrik. Begitu pula pos dapat membantu pelaksanaan tugas seperti misal-

Digitized by Google

nya Universitas Terbuka.

Beberapa hal memperoleh perhatian Dirjen Postel, menyangkut kesadaran warga masyarakat sendiri sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi, seperti *telephone coin box* yang dipasang di jalanan. Ini sebetulnya suatu upaya membantu masyarakat untuk melakukan komunikasi dan merupakan suatu kemajuan tersendiri dari telekomunikasi.Tapi ternyata ada sebagian masyarakat atau anggota masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya jasa telepon ini. Ada tangan jahil merusak perlengkapan telepon umum sehingga menjadikan telepon itu tidak berfungsi. Akhirnya tumpuan kesalahan dijatuhkan kepada petugas telepon yang tidak secepatnya memperbaiki alat telepon yang tidak berfungsi.

Usaha meningkatkan pelayanan masyarakat terus dilakukan, di antara menambah titik pemasaran dan menempatkan pegawai yang trampil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pembayaran juga mulai ditambah, tidak terbatas di kantor telepon, tapi juga memanfaatkan jasa perbankan sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk membayar di tempat terdekat.

Kemudahan Pelayanan

Menyadari pentingnya fungsi pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai benteng terdepan penjaga pintu gerbang negara dituntut meningkatkan keluwesan dibalik ketrampilan dan kewaspadaan petugas imigrasi melayani baik tamu atau orang asing yang masuk ke Indonesia maupun melayani warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri.

Penggunaan perangkat keras seperti komputer untuk mendeteksi orang-orang yang tidak dikehendaki untuk masuk dan keluar, memungkinkan kecepatan pelayanan bagi masyarakat lainnya. Kalau dulu untuk melakukan pengecekan apakah seseorang itu masuk dalam daftar yang tidak boleh masuk atau keluar diperlukan cukup waktu sehingga dirasakan sangat menghambat pelayanan bagi orang-orang lain, maka kini dalam satu menit paling tidak bisa dilayani dua orang. Dari aspek penggunaan tenaga manusia pun terjadi penghematan. Kalau dulu diperlukan dua orang atau lebih, sekarang cukup satu orang sudah mampu melayani orang yang akan masuk maupun keluar dengan cepat.

Penampilan yang menawan dan pelayanan yang cepat tidak bertele-tele merubah citra baru keimigrasian Indonesia yang tadinya dikesankan seram dan menakutkan menjadi ramah tanpa meninggalkan sikap kewaspadaan. Di mata orang-orang asing citra yang menawan aparat imigrasi di Bandar Udara modal penting bagi promosi Indonesia di luar negeri.

Kendati sudah menampilkan wajah baru, Ditjen Imigrasi terus melakukan peningkatan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang ingin bepergian ke luar negeri. Sorotan yang tajam pernah ditujukan kepada instansi Imigrasi dengan terjadinya berbagai kasus, seperti kasus kepala kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan yang telah menerbitkan paspor asli tapi palsu, merupakan lembaran hitam dalam sejarah aparat imigrasi. Berbagai tindakan pencegahan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia bekerjasama dengan Opstibpus. Kendati tidak ditemukan kasus paspor asli tapi palsu, namun berbagai penyimpangan administratif berhasil diungkap. Kepada yang terkena pemeriksaan dilakukan penindakan berupa tindakan pendisiplinan mulai dari yang paling ringan sampai terberat.

Dalam hal ini, Dirjen Imigrasi Soelarso merasa yakin bahwa tidak semua aparat imigrasi melakukan tindakan tercela. Di antara mereka masih banyak yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas kewajiban sebagai aparat imigrasi, disiplin terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Oleh karena itu setiap ada kesempatan Dirjen Imigrasi selalu mengingatkan kepada bawahannya agar selalu percaya diri, tidak kehilangan semangat kerja, bahkan sebagai anggota jajaran imigrasi harus berbangga karena Imigrasi terbuka untuk dikoreksi.

Berkata Soelarso, "dengan adanya operasi Pura Yakhsa itu harus dijadikan sebagai momentum dimulainya kita melihat ke depan, selalu mawas diri, koreksi ke dalam, memperbaiki kekurangan atau kelemahan diri kita sendiri terutama bila dikaitkan dengan beratnya tantangan dan tugas yang semakin berat di masa mendatang. Imigrasi harus mampu memulihkan citra di mata masyarakat kalau ingin mendapat tempat yang terhormat di mata masyarakat. Dan kalau hal itu ingin dicapai, kata Soelarso, petugas atau aparat imigrasi harus profesional, dapat diandalkan dan terpercaya."

Tentunya dalam mengambil langkah-langkah untuk membenahi dan memperbaiki aspek yang menyangkut tugas-tugas keimigrasian, tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Ini memerlukan waktu, bahkan dana yang memadai mengingat beratnya tugas dan terbatasnya sarana dan personil. Dapat dibayangkan di seluruh Indonesia, imigrasi hanya memiliki 3000 personil (petugas administratif dan teknis). Sementara wilayah yang harus diawasi cukup luas serta banyak pintu gerbang bagi keluar-masuknya orang yang harus dijaga.

Dalam kaitan peningkatan pelayanan, Soelarso mengingatkan agar aparat imigrasi "tidak mengkomersialkan jabatannya dalam tugas." Mereka harus memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat yang mengurus paspor tanpa harus mengabaikan kewaspadaan. Bagi petugas yang kedapatan mempersulit pelayanan atau pengurusan paspor akan ditindak. Sementara itu kepada masyarakat sendiri diingatkan agar tidak sekali-sekali menggunakan jasa calo untuk segala pengurusan paspor. Sebab pada akhirnya nanti akan merugikan masyarakat sendiri. "Yang penting lengkapilah syarat-syaratnya. Bila menemui kesulitan karena ada persyaratan yang diada-adakan oleh aparat petugas, harap dilaporkan untuk diambil tindakan secara langsung." Menurut Soelarso untuk pengurusan paspor yang sudah lengkap syarat-syaratnya diperlukan waktu paling lama satu minggu.

Tampil dengan segala Keramahan

Betapa besar dan berat tugas yang dipikul aparat imigrasi dalam menjaga pintu gerbang masuk dan keluar negara Indonesia, menuntut penampilan aparat yang mampu memberikan pelayanan yang cepat tanpa mengabaikan faktor keamanan dan kewaspadaan. Proses lalu lintas manusia antar negara membawa dampak positif dan negatif. Yang membawa dampak negatif harus secepatnya kita tangkal, sedang yang membawa dampak positif harus kita imbangi dengan memberikan pelayanan yang cepat, ramah dan sopan, dalam arti yang sebaik-baiknya.

Aparat Imigrasi harus selalu tampil dengan segala keramahan dalam usahanya memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun tamu-tamu asing yang masuk ke Indonesia. Lebih-lebih dalam kaitan negara sedang meningkatkan pemasukan devisa. Ditunjang dengan uniform yang serasi, tidak memberikan kesan menyeramkan, serta penggunaan perangkat keras berupa komputer, diharapkan dapat menjadi daya penarik tersendiri bagi masuknya wisatawan asing ke Indonesia. Ini harapan yang tidak terlalu sulit untuk bisa diwujudkan. □ **Alex P/Badrul M/Rum Aly/Nunung Suprono**

Digitized by Google

Soal Air Minum Di Ibukota

Kebutuhan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun keperluan lainnya, bagi warga ibukota Jakarta, setiap hari terasa semakin meningkat. Ini berkaitan dengan tingkat pertumbuhan penduduk di Jakarta yang cenderung meningkat sementara kemampuan perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta perkembangannya tidak secepat pertambahan penduduk.

Ditambah lagi dengan pola perkembangan warga setiap saat tidak merata atau terkotak-kotak di satu lokasi tertentu sehingga menyulitkan bagi PDAM DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan yang sama pula. Ada lokasi perumahan yang padat, ada pula lokasi tempat pemukiman yang kosong dari penghunian manusia. Sehingga untuk melayani daerah yang kosong atau penduduknya sedikit dinilai sulit dan mahal. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penyediaan pipa-pipa distribusi tak sebanding dengan pendapatan yang diterima dari kontribusi para pelanggan.

Menyadari kenyataan itu, beberapa langkah konkret telah dan akan ditempuh pihak PDAM DKI Jakarta seperti dituturkan Direktur Utama PDAM DKI Jakarta, Ir HA Razak Manan kepada Media Karya. Dikatakan sesuai dengan kemampuan yang ada, PDAM DKI Jakarta berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan, misalnya dengan dibangunnya instalasi Pulogadung Tahap I dan II. Seperti diketahui pembangunan instalasi Pulogadung tahap I telah diselesaikan pembangunannya dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Mei 1982, yakni dengan kapasitas produksi 1000 liter per detik, guna meningkatkan usaha pelayanan air bersih dengan sasaran daerah pelayanan Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Kemudian, untuk tahap II, yang direncanakan akan menghasilkan kapasitas sekitar 3000 liter per detik, dewasa ini masih dalam proses penyelesaian, dan diharapkan pada tahun 1988/1989, instalasi ini sudah dapat beroperasi.

Di bagian lain dikemukakan adanya keluhan yang dilontarkan warga masyarakat pelanggan air bersih dari PDAM Jakarta. Disadari bahwa kesemuanya itu bermula dari faktor keterbatasan yang dimiliki PDAM DKI Jakarta dalam hal produksi air per liter per detik, sehingga belum semua warga masyarakat dapat menikmati air bersih sebagaimana mereka dambakan selama ini. Keluhan masyarakat mengenai air yang menetes terlalu kecil bahkan nyaris mati (tak mengalir), hal ini biasanya disebabkan karena adanya gangguan teknis, seperti pipa-pipa air minum yang sudah tua, perbaikan maupun penambahan jaringan distribusi atau hal-hal lain, yang kesemuanya itu merupakan masalah teknis.

Namun Razak Manan menolak anggapan bahwa air yang pelanggan terima dari fasilitas PDAM DKI Jakarta tidak memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan. Kesemuanya itu menurutnya sudah melalui tahap pemeriksaan laboratorium. Air yang akan didistribusikan harus lolos pemeriksaan laboratorium. Kalau toh ada air yang tercemar, seperti yang dikeluhkan masyarakat, hal itu bisa terjadi misalnya karena adanya kotoran yang masuk dalam pipa yang sudah tua (keropos). Dengan begitu tidak tertutup kemungkinan kotoran mencemari air bersih yang dialirkan melalui pipa-pipa PDAM DKI Jakarta. Untuk mengatasinya, kata Razak Manan, secara bertahap PDAM merehabilitasi dan mengganti pipa-pipa yang sudah tua sesuai dengan kemampuan yang ada pada PDAM.

Peningkatan Produksi

Menyadari arti penting air bersih bagi keperluan manusia, PDAM DKI Jakarta berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan produksinya. Usaha ini sebagai jawaban atas perkembangan jumlah penduduk maupun dampak dari pesatnya pembangunan, yang memerlukan tersedianya sarana air bersih, seperti sektor pariwisata, industri dan sebagainya. Dilukiskan jumlah pelanggan air minum dari PDAM DKI Jakarta, yang pada tahun-tahun 1980-an jumlahnya mencapai 116.605 pelanggan, maka hingga Desember 1986, jumlah itu meningkat menjadi 156.504 pelanggan atau rata-rata naik sekitar 5.699 pelanggan

PATRA TANI

Patra Tani

Jl. Senopati No. 43A Telp. 582746 – 714668
Kebayoran Baru. JAKARTA – SELATAN

Jl. Tlg. Kerangga No. 12
Telp. 22356 – 20581
PALEMBANG

Jl. Prawatan
Jagonalan Klaten
JAWA TENGAH

Jl. Yos Sudarso No. 179
Telp. 21843.
JAWA TIMUR

„ DENGAN SEMANGAT PERSATUAN & KESATUAN "

KELUARGA BESAR PATRA TANI
SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987

Digitized by Google

...mlah pelanggan berkaitan ...ingkatan kemampuan ber... terus bertambah pada ...Jakarta. Misalnya, kalau ...oduksinya mencapai sekitar ...r detik, tapi setelah 1982, ...a penambahan instalasi pipa ...u, produksi air minum ber...ir 8000 liter per detik. Tapi ...ab tantangan tahun 2000, di ...penduduk DKI diperkirakan ...juta jiwa, maka paling tidak ... mengangkat kemampuan ...ya menjadi 38 ribu liter per ...pakan tantangan yang tidak ...ikaitkan dengan kebutuhan ...mperluas jaringan instalasi ...aupun distribusinya.

...ka memenuhi kebutuhan air ...berapa program baik jangka ...un jangka panjang telah di... jangka pendek menurut ..., PDAM mentargetkan da... ini, sekaligus dikaitkan de... Dasa Warsa Air Bersih dan ...ngkungan, tahun 1981-1990, ...yani 75% warga ibukota de...h. Sementara untuk jangka ...uai dengan kebijaksanaan ... pembangunan DKI Jakarta ...ir bersih (1985-2005), ke... pelayanan untuk memenuhi ...ir bersih warga kota, akan di...lasi Buaran I dan II, dan di...akan meghasilkan kapasitas se...ter per detik. Diharapkan pembangunan kedua instalasi itu selesai pada 1990.

Fungsi Pembinaan

Menyinggung peranan PDAM DKI Jakarta dalam memberikan pembinaan kepada instalatur, Ir Razak Manan mengemukakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (Akaindo) DKI Jakarta. Sejauh ini, menurutnya, pembinaan yang sudah berjalan misalnya melaksanakan pendidikan dan latihan yang menyangkut bidang keinstalaturan, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Ditambahkan, jumlah instalatur (rekanan) yang menangani proyek fisik di lingkungan PDAM saat ini meliputi 203 rekanan.

Praktek-praktek percaloan dalam jasa air minum, masalah lain yang dihadapi PDAM DKI Jakarta. Seperti ditegaskan Razak Manan, pihaknya tidak segan-segan menindak praktek-praktek percaloan sesuai hukum yang berlaku dan sesuai pula jenis pelanggaran yang dilakukan. Begitu pula dengan praktek-praktek uang pelicin sehubungan dengan permohonan pemasangan sambungan pipa air minum, akan terus menjadi perhatiannya. Namun dia yakin, praktek uang pelicin di lingkungan petugas PDAM tidak benar. Yang ada sekarang ini, oknum-oknum yang mengatas namakan petugas PDAM, seperti juga yang terjadi pada PLN atau instansi pemberi pelayanan umum lainnya.

Kenyataan yang ada setelah dilakukan pengecekan terhadap oknum tersebut terbukti mereka adalah karyawan gadungan. Tapi, kata Razak Manan, kalau nanti terbukti ada karyawan PDAM yang melakukan praktek uang pelicin, akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yakni PP Nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri.

Dalam kaitan penertiban pemakai jasa air minum, beberapa langkah diambil untuk memberikan kesadaran masyarakat pelanggan tentang perlunya menggunakan air minum secara efisien dan benar. Di samping itu perlunya ditanamkan kesadaran terhadap pemakaian sambungan liar yang dapat merugikan kepentingan orang banyak.

Terhadap sambungan liar ini, menurutnya pihak PDAM sejak Juli 1983 hingga April 1984 telah mengadakan penertiban sambungan air minum di lima wilayah DKI Jakarta, yakni dengan mengerahkan satuan khusus yang dinamakan Operasi Tirta I/1984. Hasilnya cukup menggembirakan dan dampak dari kegiatan tim operasi tirta I/1984, secara berangsur-angsur dapat menyadarkan masyarakat. Operasi sejenis dilanjutkan dan dimulai sejak tahun 1986 yang dikenal dengan operasi pengendalian konsumen 1986 (Opek '86).

Upaya lain yang ditempuh PDAM dalam rangka menyadarkan masyarakat pelanggan, adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronika (radio dan TVRI). Sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat dapat menghemat air bersih dari PDAM yang kondisi kapasitasnya masih terbatas ini.☐ Nung S

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA, SEGENAP WARGA/KELUARGA BESAR PERUM TAMBANG BATU BARA SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

HARI DEPAN BATUBARA UNTUK KEMAJUAN BANGSA

BATUBARA

PERUM TAMBANG BATUBARA

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10
Kotak Pos 405 Kby.
Telex : BRAJAK IA
Facsimile : (021) 827642
Telepon : 825608

JAKARTA SELATAN

Digitized by Google

Kualitas Hidup, Prioritas Esensial Dalam Pembangunan Nasional

Daya beli rendah jangan sampai mengorbankan lingkungan hidup

Jumlah penduduk yang terus bertambah meningkatkan permintaan terhadap berbagai kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain keperluan hidup manusia. Semua kebutuhan manusia itu memerlukan sumber daya alam sehingga pemenuhannya memberi tekanan dan mengancam kerusakan lingkungan hidup. Masalahnya sekarang ialah bagaimana memenuhi kebutuhan itu tanpa merusak alam?

Ungkapan di atas dikemukakan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungkan Hidup Emil Salim di depan Seminar Sehari tentang Perumahan Berwawasan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Real Estate Indonesia (REI) dalam memperingati HUT yang ke 15 di Semarang Jawa Tengah pertengahan Februari yang lalu.

Dikatakan oleh Menteri Negara KLH bahwa pada umumnya masyarakat dan semua pihak menyadari akan arti pentingnya lingkungan hidup. Namun, kesadaran ini belum sepadan dengan *action* atau tindakan konkrit yang dilakukan untuk memelihara dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat itu.

Beban Siapa?

Lingkungan hidup bukanlah sesuatu yang gratis. Usaha penanggulangan kerusakan serta pelestarian lingkungan hidup memerlukan dana yang besar. Pembangunan perumahan yang dilakukan dalam rangka mengatasi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal tidak terlepas dari kewajiban pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Namun demikian, menurut pengamatan Menteri Negara KLH, komposisi struktur biaya investasi pembangunan perumahan selama ini tidak memberi peluang pada pengembangan lingkungan hidup yang memadai. Diperkirakan bahwa biaya investasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup (seperti jalan, saluran, bak sampah, septic tank, dan lain sebagainya) hanya mencakup sekitar 36% dari biaya keseluruhan. Belum termasuk keperluan dana operasional dan pemeliharaan lingkungan tersebut. Permasalahannya ialah: siapa yang harus menanggung beban biaya ini? Dari pengamatan tampak bahwa konsumen perumahan tidak secara eksplisit tergambar dalam beban pemeliharaan tersebut. Bila dibebankan kepada pengusaha real estate atau para developer perumahan, akan berakibat menekan keuntungan marginal para pengusaha, apalagi bila keadaan pasar tidak menguntungkan. Bila dibebankan kepada konsumen, maka biaya akan terlalu tinggi baginya mengingat bahwa sasaran terbesar pengadaan perumahan rakyat adalah bagi mereka yang berpenghasilan rendah sampai menengah. Bila dibebankan kepada Pemerintah (Daerah), berarti memperbesar anggaran Pemerintah, sedangkan saat-saat ini anggaran pemerintah justru dalam keadaan menciut. Tapi yang jelas, masalah ini perlu ditangani. Kalau tidak, akibatnya ialah terbengkelainya lingkungan hidup. "Dan akhirnya, Real Estate akan tumbuh berkembang bersamaan dengan kerusakan lingkungan hidup," cetus Emil Salim.

Ir. Siswono Yudohusodo sebagai pembahas utama terhadap makalah Menteri KLH membenarkan konstatasi bahwa kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup sudah tumbuh, tetapi belum diimbangi dengan langkah-langkah konkrit. Salah satu hambatan adalah daya beli atau dana masyarakat yang terbatas. Sebagai jalan keluar Siswono mengusulkan disisihkannya sebagian dari hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk digunakan bagi pemeliharaan lingkungan permukiman. Sedangkan Dirut PT Papan Sejahtera Prayoga Mirhad dalam tanggapannya cenderung bahwa biaya pemeliharaan lingkungan dibebankan kepada Pemda, mengingat adanya ketentuan bahwa pengelolaan lingkungan perumahan yang dibangun oleh developer dengan sistem KPR nantinya juga diserahkan kepada Pemda. Menanggapi hal ini Menteri Negara Perumahan Rakyat Cosmas Batubara menjelaskan di depan seminar bahwa Pemerintah sudah mencoba membangun perumahan yang berwawasan lingkungan hidup itu pada proyek-proyek Perum Perumnas. Disebutkannya contoh proyek Perumnas di Cirebon dan di Tangerang. Biaya investasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak terlalu membebani masyarakat pembeli, karena pembangunan perumahan Perumnas dilakukan dalam skala besar yang mencakup areal ± 300 hektar. Oleh karena itu Cosmas Batubara juga menganjurkan para pengusaha real estate untuk membangun perumahan dalam skala besar. Kalau perlu dengan mengadakan gabungan beberapa pengusaha sekaligus, atau dengan mengambil areal berdampingan dengan lokasi proyek Perum Perumnas.

Digitized by Google

Daya Dukung Lingkungan

Masalah lain yang dikemukakan oleh Emil Salim adalah pengadaan tanah. Biaya pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan harus bersaing dengan pengadaan tanah dan biaya fasilitas sosial seperti shelter bis, terminal, pemadam kebakaran, sekolah, pasar, puskesmas, tempat ibadah, kantor dan lain-lain, yang umumnya diminta oleh Pemda. Akibatnya, luas tanah dan biaya pengadaannya mendesak biaya keperluan lingkungan seperti sistem *sewerage,* persampahan dan lain-lain. Dengan perkataan lain, yang dibangun hanyalah yang tampak secara lahiriyah saja, tanpa disertai membangun investasi guna memperkuat daya dukung lingkungan yang memang tidak tampak di mata itu. "Saya tidak melihat bahwa lingkungan sungguh-sungguh ditangani dalam biaya pembangunan perumahan," ujar Emil Salim.

Pertambahan penduduk merupakan segi lain dari masalah lingkungan dan pembangunan permukiman. Laju pertumbuhan penduduk juga akan mengurangi daya dukung alam. Kenaikan jumlah penduduk meningkatkan permintaan terhadap berbagai kebutuhan hidup termasuk perumahan. Masalahnya dewasa ini ialah bahwa peningkatan permintaan tersebut harus ditunjang oleh Pemerintah, yang kemampuan dana dan anggarannya justru sedang menciut.

Secara tajam Menteri Negara KLH mengecam pola konsumtif yang dianut oleh masyarakat, misalnya pemilik rumah lebih memilih melengkapi rumahnya dengan marmer daripada mengeluarkan biaya bagi pemeliharaan lingkungan hidup. Memang, dampak lingkungan sering baru muncul di kemudian hari; daerah permukiman yang saat ini tidak banjir, mungkin 10 tahun kemudian baru mengalami banjir. Itu dapat terjadi karena faktor daya dukung lingkungan diabaikan, dan orang hanya mau berpikir jangka pendek saja. Di samping itu masalah lingkungan juga merupakan masalah yang kait mengait antar sektor, yang harus ditangani secara lintas sektoral. Dalam pelaksanaannya, ini tidaklah mudah. Indikator lain bahwa masyarakat juga belum *committed* benar-benar dengan langkah-langkah pemeliharaan lingkungan ialah belum tumbuhnya *interest group* di bidang ini. Berbeda misalnya dengan di bidang usaha yang memiliki berbagai interest group termasuk REI.

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Dikemukakan oleh Menteri Negara KLH bahwa pemerintah Indonesia telah committed dengan pola pembangunan berwawasan lingkungan. Garis Garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesamanya, serta dengan alam sekitarnya. Pola pembangunan seperti ini akan memadukan pembangunan material dan non-material, jasmaniyah dan rokhaniyah. Pola ini dipilih, sebab kualitas hidup merupakan prioritas esensial dalam pembangunan nasional. Diharapkan agar pengusaha Real Estate juga berorientasi pada pola tersebut.

Selanjutnya Menteri Negara KLH menekankan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perumahan hendaknya selalu diadakan pendekatan-pendekatan lintas sektoral, dengan menanggapi pengembangan perumahan dalam satu sistem mencakup segi-segi pengembangan tata ruang, sumber daya, permukiman, prasarana/sarana fisik serta sosial ekonomi. Pendekatan ini harus didukung oleh mekanisme kerja 'multi-agency' yang mencakup berbagai lembaga pemerintahan, pengusaha serta lembaga swadaya masyarakat. Di samping itu juga disertai pelembagaan ketentuan-ketentuan hukum tentang lingkungan, seperti halnya PP no. 29 th. 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan yang diberlakukan bulan Juni mendatang.

Menanggapi penanganan lintas sektoral ini peserta seminar Prayoga Mirhad (Dirut PT Papan Sejahtera) maupun Drs. Sasonotomo (Dirut BTN) sama-sama sependapat bahwa yang penting terlebih dulu adalah pelaksanaan lintas sektoral antar Departemen. Bila hal ini terlaksana dengan konsekuen, tentu pengusaha akan mengikutinya.

Terhadap pendapat bahwa pelestarian lingkungan sulit dilaksanakan karena terbatasnya daya beli konsumen, Emil Salim menegaskan hendaknya jangan sampai pendapatan rendah konsumen dijadikan alasan tidak terciptanya lingkungan hidup yang sehat. Kalau perlu biaya untuk kualitas standard rumah dikurangi, misalnya dengan menggunakan dinding *gedeg* - (anyaman bambu). "Daya beli rendah jangan sampai mengorbankan lingkungan hidup," tandasnya.

Tahun Papan Internasional

Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah mencanangkan tahun 1987 sebagai Tahun Papan Internasional bagi Tunawisma *(International Year of Shelter for the Homeless).* Direktur Jenderal Cipta Karya Ir. Soenaryono Danudjo dalam makalahnya menguraikan bahwa maksud dan tujuan dari Tahun Papan Internasional 1987 adalah memberikan fokus dan perhatian dunia, serta mencari pemecahan dari isyu-isyu yang timbul di bidang perumahan dan pemukiman. Untuk mencapai maksud tersebut program Tahun Papan Internasional diarahkan untuk memantapkan komitmen politis dan program kegiatan membantu jutaan manusia yang kurang mampu dalam pembangunan, memperbaiki rumah dan lingkungan permukimannya, sehingga diharapkan dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Adapun sasaran pokok Tahun Papan Internasional adalah meningkatkan dan memperbaiki papan dan lingkungan permukiman, paling tidak bagi sebagian masyarakat yang tidak mampu, serta mengusahakan adanya strategi, kebijakan dan program nasional di bidang perumahan serta permukiman menyongsong tahun 2000. Demikian pula penyelenggaraan seminar ini menurut Ketua Umum DPP REI Drs. Ferry Sonneville adalah dalam rangka usaha menetapkan *blueprint* bagi pembangunan perumahan di Indonesia untuk kurun waktu 15 tahun mendatang.

Tahun Papan Internasional 1987 telah digunakan sebagai tema peringatan HUT REI ke 15. Sehubungan dengan itu Menteri Negara Perumahan Rakyat yang membuka seminar ini mengatakan dalam sambutannya bahwa pemilihan tema ini sangat tepat sebagai manifestasi sekaligus aspirasi kemanusiaan asosiasi profesinya. Disebutkan oleh Menpera bahwa masih kira-kira seperlima penduduk bumi bertempat tinggal dalam kondisi yang kurang layak dari segi kesehatan dan kesejahteraan. Sebagian dari mereka bahkan sama sekali tidak punya tempat berteduh. Pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang semakin pesat dan tingkat urbanisasi yang semakin besar memperburuk kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat daerah perkotaan terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan perumahan terutama di daerah perkotaan kini sudah waktunyalah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman dalam skala besar dan secara terpadu, baik secara lintas sektoral maupun dalam bentuk kerjasama antar instansi-instansi Pemerintah dan unsur-unsur swasta, yang terintegrasi secara konsisten dengan rencana kota.

Seminar yang diikuti oleh sekitar 200 anggota REI dari berbagai wilayah tanah air itu juga menampilkan pembicara dari unsur perguruan tinggi, yakni Drs. Budi Rahardjani dari Fakultas Kedokteran UNDIP. Dijelaskan oleh fisiolog ini tentang pengaruh-pengaruh fisik lingkungan terhadap penghuni rumah seperti faktor kebisingan, getaran atau vibrasi, suhu dan kelembaban, kualitas dan aliran udara, warna dan pencahayaan. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ismail dalam sambutannya menekankan bahwa dalam membangun perumahan, hendaknya pengusaha Real Estate tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan belaka, tetapi juga harus selalu berorientsi kepada kepentingan rakyat banyak.

Dengan bahan masukan dari berbagai sumber tersebut Seminar secara luas telah membahas bagaimana melaksanakan pembangunan perumahan sebagai salah satu bagian integral dari pembangunan nasional. Langkah-langkah konkrit sebagai tindak lanjut kini ditunggu, agar masyarakat Indonesia nanti dapat memenuhi kebutuhan perumahannya, yang benar-benar layak-huni dan dalam lingkungan hidup yang sehat. Kondisi permukiman yang sedemikian itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup manusia Indonesia sebagaimana bunyi tema Seminar, yaitu 'Peran Perumahan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Membentuk Manusia Produktif'.☐ TA PURNOMO

Digitized by Google

Pengrajin Diharapkan Membangkitkan Energi Sosial

Enam tahun lalu, tepatnya tanggal 17 Februari 1981 Himpunan Pengrajin Indonesia (HIMPI) dilahirkan. Kehadirannya yang diprakarsai oleh Golkar itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengrajin industri kecil dan meningkatkan peranannya dalam pembangunan nasional. Kini, HIMPI telah mempunyai 23 Pengurus Daerah Tingkat I, Pengurus tingkat II di berbagai Kabupaten, serta tersebar hingga ke sentra-sentra pengrajin. Dalam bulan Maret tahun lalu HIMPI juga telah melaksanakan MUNAS nya yang pertama.

Peranan strategis

Menteri Perindustrian Ir. Hartarto dalam sambutannya pada acara HUT ke VI HIMPI mengatakan bahwa tujuan pembangunan industri adalah membangun masyarakat industri secara luas, utamanya melalui pengembangan industri kecil dan industri menengah, kewiraswastaan, kemampuan manajemen, ketrampilan, rancang bangun dan perekayasaan serta perangkat lunak lainnya. Oleh sebab itu peranan industri kecil sangat penting dan strategis dalam kerangka membangun masyarakat industri tersebut. Dalam hubungan ini Menteri Perindustrian mengharapkan agar HIMPI dapat menunjang upaya pembinaan dan pengembangan industri kecil, antara lain agar kemampuan kewiraswastaan demikian pula kemampuan perangkat lunaknya secara bertahap semakin berkembang, serta agar kesejahteraan pengrajin secara bertahap meningkat pula.

Oleh menteri disebutkan bahwa jumlah wiraswasta yang bergerak dalam industri kecil cukup banyak yakni kurang lebih 1,6 juta, dengan tenaga kerja yang terserap sekitar 5,3 juta. Nilai produksinya yang tercatat pada tahun 1985 sebesar kurang lebih Rp. 7,8 trilyun. Diungkapkannya bahwa di tahun 1986 perkembangan industri kecil menunjukkan indikasi yang menggembirakan, baik untuk memenuhi keperluan dalam negeri, sebagai pemasok bagi industri lainnya, maupun untuk keperluan ekspor.

Kopinkra

Selanjutnya Ir. Hartarto menguraikan bahwa pembinaan dan pengembangan industri kecil dilaksanakan melalui sentra-sentra industri kecil, yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk memantapkan posisi pengrajin, baik dalam pemasaran maupun dalam bidang produksi, maka industri kecil yang berada pada sentra-sentra tersebut mengorganisir dirinya dalam kelompok-kelompok, yang kemudian berkembang

Ir. Hartarto.

menjadi Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan atau Kopinkra. Disebutkannya bahwa praktis di seluruh Indonesia telah terwujud KUD bidang industri atau Kopinkra ini. Dan dengan berkembangnya Kopinkra-kopinkra, kata Menteri, maka secara bertahap pelaksanaan amanat UUD 1945 khususnya pasal 33, di mana para pelaku ekonomi terdiri dari BUMN, dunia usaha swasta, dan Koperasi itu, akan dapat diwujudkan secara mantap. Dalam pelaksanaan pembangunan industri, maka antara ketiga pelaku ekonomi tersebut secara kontinyu akan selalu didorong dan dimantapkan hubungan dan keterkaitan yang saling menunjang, saling melengkapi atas dasar-dasar ekonomi.

Energi Sosial

Sementara itu Ketua Umum DPP HIMPI Drs. Imam Soedarwo dalam sambutan HUT menyebutkan kembali program perjuangan HIMPI yang telah dirumuskan di dalam MUNAS tahun 1986 yang telah dirangkum menjadi Tri Bhakti HIMPI, yakni untuk mewujudkan pengrajin yang manunggal, mampu serta maju.

Dengan manunggal dalam wadah HIMPI para pengrajin bertekad meningkatkan kemampuannya mengubah struktur ekonomi secara demokratis agar lebih berimbang dan berkeadilan. Dengan demikian, tutur Ketua Umum DPP HIMPI, diharapkan para pengrajin mampu mandiri, mampu membebaskan diri dari belenggu struktur-struktur sosial ekonomi yang tidak menguntungkan dalam situasi perekonomian yang penuh persaingan dan berubah cepat. HIMPI berjoang untk membangun masyarakat pengrajin industri kecil yang memiliki kemampuan kreatifitas otonom untuk mengembangkan kerajinan yang bernilai ekonomis dan bernilai seni dalam rangka pelestarian budaya bangsa. Di samping itu para pengrajin industri kecil juga diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi sehingga mereka tidak ketinggalan dalam dunia usaha yang semakin maju.

Lebih lanjut Ketua Umum DPP HIMPI mengemukakan, bahwa bila dalam GBHN dengan tegas ditentukan bahwa pengembangan industri juga diarahkan untuk lebih meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat dengan tujuan memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, maka makna yang terkandung di dalam kebijaksanaan tersebut ialah bahwa pengrajin industri kecil bukan saja untuk menjadi lebih produktif, melainkan juga lebih efektif secara sosial. Oleh Imam Soedarwo, hal ini diartikan bahwa pengrajin industri kecil diarahkan menjadi semakin mampu memainkan peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki daya tahan dan memiliki kegiatan mencari terobosan baru guna mengatasi kelesuan perekonomian yang sedang di hadapi Bangsa. "Pengrajin industri kecil diharapkan mampu membangkitkan "energi sosial" dalam membangun kekuatan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pasal 33 UUD 1945", tandas Soedarwo.

Menanggapi program pemerintah dalam pembinaan industri kecil, Ketua Umum DPP HIMPI mengatakan bahwa HIMPI mendukung sepenuhnya pengembangan koperasi Industri Kerajinan sebagai bangun usaha yang sesuai dengan semangat kegotongroyongan para pengrajin industri kecil. Dalam hubungan ini DPP HIMPI menyerukan kepada seluruh pengrajin industri kecil untuk menjadi anggota Kopinkra, dan secara aktif memajukan Kopinkra di daerah masing-masing. Sebab, melalui wadah Kopinkra maka segala permasalahan yang ada akan lebih mampu di atasi, di samping dapat dipetik manfaat antara lain sistem pemasaran, metode pengontrolan kualitas, pembaharuan teknologi, permodalan dan lain-lain. Untuk itu semua DPP HIMPI menyampaikan terima kasihnya kepada Pemerintah.

Menghadapi Pemilu 1987 mendatang, baik Ketua Umum DPP HIMPI maupun Ir. Hartarto di depan sekitar 1500 pengrajin yang menghadiri peringatan HUT-VI HIMPI di Gedung Graha Purna Yudha itu mengharapkan agar warga HIMPI memenangkan Golkar dalam Pemilu tersebut. Hal ini sesuai dengan kebulatan tekat jajaran HIMPI yang telah dicetuskan dalam MUNAS-I yang lalu.□ TA Purnomo

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

TEDAK SITEN CUCU PRESIDEN

Presiden Soeharto, Minggu 22 Februari lalu di tempat kediamannya jalan Cendana mengadakan upacara keluarga, ''Tedak Siten'' cucu yang ke-8.

Cucu laki-laki yang lahir 22 Juni 1986 ini adalah putra dari Bambang Trihatmodjo. Acara sederhana yang dilakukan di tempat kediaman kepala negara ini hanya dihadiri oleh kalangan keluarga.

Dalam upacara itu Ibu Tien Soeharto, membimbing cucunya Adhi Kusumoro, untuk dimasukkan dalam 'kurungan'. Dan sebelumnya Adhi menapaki 7 tumpeng, 7 macam juadah yang berwarna 7 macam. Dan berikutnya menaiki anak tebu dan pisang. Setelah itu Adhi dimandikan air kembang.

Presiden Soeharto yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar, hari itu memakai baju batik pohon beringin dan menjadi 'Mat Kodak' yang gesit dan rajin membidikkan kameranya kepada sang cucu. Sedangkan Ibu Tien siap untuk membimbing. Sementara para keluarga yang ada disamping menyaksikan dengan gembira. **(BM)**

KONDOM PRODUKSI BATUKARUT

Desa Batukarut, 15 Km dari kota Bandung mulai memproduksi kondom sendiri. Jum'at 25 Februari lalu dari daerah itu sudah mengalirkan produksi Perdana kondom dalam negeri. Dan bahkan Presiden Soeharto sendiri yang meresmikannya.

Dengan diresmikannya pabrik tersebut, maka kebutuhan akan kondom dalam negeri sudah dapat dipenuhi. Sebelumnya kebutuhan kondom ini masih banyak didatangkan dari beberapa negara lain. Misalnya Kigtex buatan Korea, dan Netro Super Thin buatan Jepang.

Presiden Soeharto dalam sambutannya mengatakan, agar alat-alat pengendali kelahiran itu pada hakekatnya untuk melaksanakan dan meningkatkan program KB. Untuk itu ujar, Presiden alat kontrasepsi itu harus digunakan sesuai dengan tujuannya. ''Kita semua harus waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan agar alat-alat tersebut tidak disalahgunakan. Dan lebih baik tidak menjadi alat yang merusakkan moral, etika yang kita junjung, ujar Presiden.

Selain itu, kata Presiden penyebarluasan dan cara memperkenalkan alat-alat kontrasepsi itu yang diperlukan untuk mensukseskan Keluarga Berencana nasional harus dilakukan dengan hati-hati dan waspada, agar nantinya jangan sampai memberi pengaruh yang buruk terhadap masyarakat dan anak-anak.

Sementara itu, Kepala BKKBN Haryono Suyono melaporkan kepada Kepala Negara bahwa pabrik yang terletak di atas tanah seluas 3,1 hektar ini dibangun dari pinjaman pemerintah Jepang yang disampaikan melalui Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) senilai 2,250 milyar yen. Serta dana rupiah dari pemerintah Indonesia senilai 1,520 milyar. Sedangkan pelaksanaan untuk pembangunan pabrik tersebut telah dibicarakan dalam perundingan dengan IGGI tahun 1981 di Amsterdam. Dan pelaksanaan yang peresmiannya dilakukan Presiden Soeharto itu menelan biaya sekitar 2,175 milyar Yen atau 2,198 milyar rupiah.

Selain itu, kata Haryono, pabrik yang dibangun di atas tanah milik PT Kimia Farma itu setelah diadakan uji coba pada bulan Oktober sampai Desember 1986 lalu, dengan menggunakan bahan baku lateks pekat dari PTP XI Pasir Waringin Pandeglang, Jabar, menurut Haryono telah dapat menghasilkan kondom yang baik dan mempunyai kwalitas internasional, ujarnya.

Sedangkan untuk produksi tahun 1987 ini direncanakan dapat memproduksi sekitar 72 juta kondom (0,5 juta gros). Dan kemudian akan dapat ditingkatkan lagi menjadi 129,6 juta (900.000 gros) per tahun. **(BM)**

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

PRESIDEN RESMIKAN PABRIK BAJA LEMBARAN

Indonesia selangkah lebih maju lagi di bidang industri baja dengan diresmikannya pabrik baja lembaran canai dingin oleh Presiden Soeharto 23 Februari 1987 di kawasan industri Cilegon Jawa Barat. Pabrik baja lembaran yang dikelola PT CRMI (Cold Rolling Mill Indonesia) yang merupakan industri terpadu dibangun dengan biaya Rp 1,4 trilyun atau 825 juta dolar AS. Di antaranya dengan fasilitas kredit ekspor Prancis senilai 240 juta dolar AS dengan suku bunga 8,75% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun

PT CRMI yang merupakan usaha patungan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, juga mendapat bantuan dari pinjaman sindikasi bank senilai 218 juta dolar AS (tahun 1983), yang meliputi 19 buah bank. Bank-bank itu di antaranya adalah BNI 1946, Asia Pacific Capital Corp., Banco Exterior de Espana, Credit Commercial de France, Banque Paribas, Mitsubishi dan State Bank of India. Suku bunga 1,25% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun.

Dalam sambutannya, Presiden Soeharto menegaskan, sebagai industri yang baru berdiri, wajar apabila mendapatkan perlindungan. Dan perlindungan yang diberikan kepada industri tersebut merupakan pengorbanan dari masyarakat, yang pada hakekatnya tidak dapat dipikul terus-menerus.

Untuk itu, kata Presiden, kepada jajaran industri nasional diajak untuk terus menerus bekerja lebih keras serta penuh keuletan dan kegigihan. Kerja keras, ulet serta gigih, menurut Presiden sangat diperlukan pada saat sekarang di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian di bidang ekonomi yang sangat sulit. Masa-masa sulit ini oleh Presiden dianggap sebagai suatu cambuk untuk merangsang tekad, akal dan pikiran agar dapat mengatasi tantangan dan permasalahan dengan sebaik-baiknya. (BM)

COSMAS, DARI MASA KE MASA

Dalam kunjungannya ke Bandung Jawa Barat pertengahan bulan lalu, Menteri Cosmas Batubara dikunjungi secara spontan di tempat penginapannya oleh sekelompok mahasiswa ITB yang terdiri dari berbagai unsur Himpunan Mahasiswa Fakultas. Mereka menemui Cosmas dalam kedudukannya sebagai bekas tokoh mahasiswa yang kini duduk dalam pemerintahan, guna menyampaikan isi hati serta berdialog tentang kehidupan mahasiswa dewasa ini. Dalam tatap muka itu seorang mahasiswa dengan lantang mengutarakan kekecewaannya karena Cosmas Batubara yang sekarang bukan seperti yang dikenal tatkala masih sebagai tokoh mahasiswa. Dikatakannya bahwa yang kini ada ialah Cosmas yang menyuarakan suara Pemerintah. "Mahasiswa punya sikap dan cara berfikir sendiri," ujar si mahasiswa, "Karena itu hendaknya mahasiswa jangan dipaksa untuk berpikir dan bersikap seperti Pemerintah."

Menanggapi pernyataan itu Cosmas Batubara tidak menjawab secara langsung. Cosmas hanya menceriterakan pengalamannya semasa menjadi mahasiswa dulu. Diungkapkannya bahwa waktu masih menjadi tokoh mahasiswa, ia pernah berbicara dan mengajukan resolusi di depan para anggota DPR-GR. Pada waktu itu, tutur Cosmas, ia merasa sebagai seorang yang paling tahu tentang segala hal. Namun setelah dirinya kemudian diangkat dan menjalankan tugas-tugas sebagai anggota DPR-GR, betapa dirasakannya bahwa ternyata apa yang diketahuinya semasa mahasiswa itu masih sangat sedikit untuk dapat digunakan sebagai bekal dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga masih perlu belajar banyak.

Mendengar jawaban Bung Cosmas serupa itu, si penanya cuma tersenyum-senyum, entah apa reaksinya yang timbul di dalam hatinya.

Mengenai isi dialog, pada umumnya mahasiswa yang hadir mengungkapkan rasa 'sesak napas' dengan pengaturan dan pembinaan kehidupan kampus dewasa ini, serta menginginkan wadah pembinaan yang memungkinkan mahasiswa untuk lebih berkreativitas. Cosmas Batubara dapat mengerti keluhan para mahasiswa dan mengajak mereka untuk memikirkan lebih lanjut tentang alternatif bentuk pembinaan yang paling tepat, meskipun Cosmas sendiri condong agar para mahasiswa menyelesaikan dulu program S1 dan baru kemudian terjun ke bidang politik atau kemasyarakatan yang diminatinya. □ (TAP)

Digitized by Google

Dinamisasi Kampus

Ketika bekas menteri agama Prof Dr Mukti Ali — kini rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogya — tampil berceramah dalam suatu seminar budaya di Jakarta beberapa waktu yang lalu, ia melontarkan gagasan untuk menghidupkan kembali organisasi kemahasiswaan. Untuk apa dan bagaimana? Melalui suatu konsep baru secara nasional yang mampu menjamin kualitas kehidupan mahasiswa sebagai salah satu unsur masyarakat ilmiah perguruan tinggi.

Keinginan Mukti Ali itu diterjemahkan oleh beberapa pihak yang menanggapi, sebagai keinginan untuk mendinamisir kembali kehidupan kampus.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Fuad Hassan dapat mensepakati dinamisasi kampus. Namun ia beranggapan tak perlu dengan cara berorientasi ke masa lampau. Dan bukan soal wadah yang penting, tapi isinya — yang perlu dirancang dengan baik lebih dulu. Prof Takdir Alisyahbana pun beranggapan dinamika kampus terletak di tangan para mahasiswa sendiri. Untuk meraih masa depan, tidak perlu dengan berputar-putar pada suasana kehidupan masa lalu, katanya dalam sebuah wawancara pers.

Pendapat untuk mendinamisir kampus yang dilontarkan Mukti Ali kiranya dapat disepakati, tapi bila harus dengan memikirkan wadah lebih dulu, tentu harus dipertanyakan. Bila toh kita ingin belajar dari kehidupan kampus di masa lalu, dinamisasi bukanlah karena bentuk dan wujud dari wadah yang ada, melainkan karena suasana yang mampu diciptakan sendiri oleh para mahasiswa secara kreatif.

Bila di zaman Orde Lama yang relatif penuh tekanan, dinamika kampus tidak padam, bahkan hidup, kenapa di masa Orde Baru harus sebaliknya? Sejauh ini, tak ada keinginan pihak manapun mencegah kampus berdinamika. Yang dikehendaki hanyalah bahwa kampus jangan sampai menjadi arena politik praktis. Tapi tidak berarti mahasiswa dilarang berpolitik, karena bagi mereka yang punya minat terjun ke politik praktis tak ada larangan untuk memasuki organisasi-organisasi politik yang ada. Dan kiranya ada satu pertanyaan yang perlu direnungkan: Apakah dinamika harus selalu berhubungan dengan politik dan apakah dinamika hanya muncul lewat wadah organisasi? Seperti kata, Takdir Alisyahbana, segala sesuatunya terletak di tangan para mahasiswa itu sendiri....

Kasus Bedah Plastik

Kematian Ny. S — isteri sorang pejabat bidang hukum — setelah mengalami suatu rangkaian bedah plastik, selain sekedar menjadi bahan 'menarik' dalam pemberitaan pers, kini agaknya juga akan menjadi masalah hukum. Sekaligus, untuk kesekian kalinya, dunia kedokteran menjadi sorotan dalam kaitan apa yang untuk sementara ini disebut malpraktek.

Begitu banyaknya arah sorotan, membuat kasus ini seolah-olah penuh warna warni. Cara pemberitaan sebagian pers yang menonjolkan kematian Ny. S karena menjalani operasi plastik mengencangkan kulit perut dan vaginoplasty (pembenahan vagina), dengan segera menimbulkan imajinasi dan latar belakang kegenitan. Tetapi dari penyajian pemberitaan yang lebih teliti terungkap bahwa agaknya almarhumah memutuskan menjalani operasi ini karena gangguan sakit yang kronis sejak mengalami kesulitan ketika melahirkan beberapa tahun silam. Pembenahan yang tidak tuntas sesudahnya menimbulkan keluhan yang rupanya cukup menyiksa selama bertahun-tahun. Timbul pertanyaan: Tidak bisakah pers untuk lain kali lebih cermat dalam mendudukkan esensi pokok pemberitaannya dengan benar, tepat dan lebih manusiawi?

Dari kasus ini terungkap pula bahwa klinik yang menangani almarhumah, ada indikasi melanggar beberapa ketentuan. Mulai dari masalah izin klinik sampai pada kualifikasi dokter yang melaksanakan operasi. Timbul pertanyaan: Tidak bisakah para dokter ini yang tergolong lapisan masyarakat terhormat, menjaga martabat dan memberi teladan mengenai ketaatan kepada hukum dan peraturan serta kode etik kedokteran di atas kepentingan komersial?

Dan karena kasus ini telah ditangani secara hukum, adalah lebih baik menunggu hasilnya tanpa melanjutkan segala hasrat sensasi.

Makam Diponegoro

Sekali lagi nama dan makam Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro dibawa-bawa dan dijadikan bahan pemberitaan dalam pers. Bermula dari keterangan seorang pengacara ibukota, dan kemudian dimuat oleh beberapa suratkabar begitu saja tanpa keinginan untuk meneliti persoalan lebih dalam.

Pengacara tersebut menyatakan akan (telah) melapor kepada Komisi III DPR-RI bahwa Pengadilan Negeri Ujung Pandang telah menyita Makam Pangeran Diponegoro.

Padahal, masalah makam ini sebenarnya telah memperoleh kejelasan sesudah diributkan beberapa bulan silam. Pihak Pengadilan Negeri yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa adalah tidak benar makam itu ikut tersita dalam kaitan kasus perdata antara dua WNI di kota itu. Beberapa mass media ibukota waktu itu mengungkapkan bahwa berita tersitanya makam, adalah karena sebuah koran daerah memberitakan secara tidak proporsional penyitaan tanah dan bangunan yang kebetulan terletak dekat makam. Pokok kesimpangsiuran terutama adalah karena ada semacam 'manipulasi' pemberitaan dengan menghilangkan kata-kata 'jalan kecil' dalam berita acara mengenai batas objek sitaan. Selain dari itu, berita acara itu sendiri telah disempurnakan sehingga jelas bahwa memang makam itu tidak ikut tersita.

Lalu kenapa disodorkan lagi suatu keterangan bahwa Makam itu disita? Ini merupakan tanda tanya besar. Anehnya, ketika klien yang dibela oleh pengacara yang bersangkutan memenangkan perkara di tingkat Pengadilan Negeri, tidak ada persoalan. Tetapi begitu di tingkat banding di Pengadilan Tinggi terjadi sebaliknya — dikalahkan — pengacara bersangkutan mendadak muncul dengan upaya pengaduan yang membawa-bawa nama makam pahlawan nasional tersebut.

Tanpa maksud mencampuri perkara perdata ini, kita ingin mengingatkan agar semua pihak dapat berperkara sesuai dengan jalur hukum yang tersedia. Kebiasaan untuk sebentar-sebentar menggunakan pers maupun melibatkan DPR untuk perkara yang sedang dalam proses, akan berkonotasi lain dan terasa kurang sehat. Apakah segala cara perlu dihalalkan untuk memenangkan suatu perkara? Bukankah masih tersedia jalan berupa kasasi, bagi mereka yang tak puas di tingkat banding?

Dan terlepas dari itu, kiranya pihak yang berwenang sudah saatnya untuk turun tangan mengusut lebih jauh latar belakang dilibat-libatkannya nama makam seorang pahlawan nasional untuk suatu perkara perdata. Bila didiamkan, dapat berkembang ke arah yang tidak diinginkan. Karena, pada saat pemberitaan yang lalu saja sempat timbul keresahan dan reaksi, antara lain dari pihak keluarga pahlawan nasional itu! Berperkara ya berperkara. Tapi apa perlu bermain api?

Digitized by Google

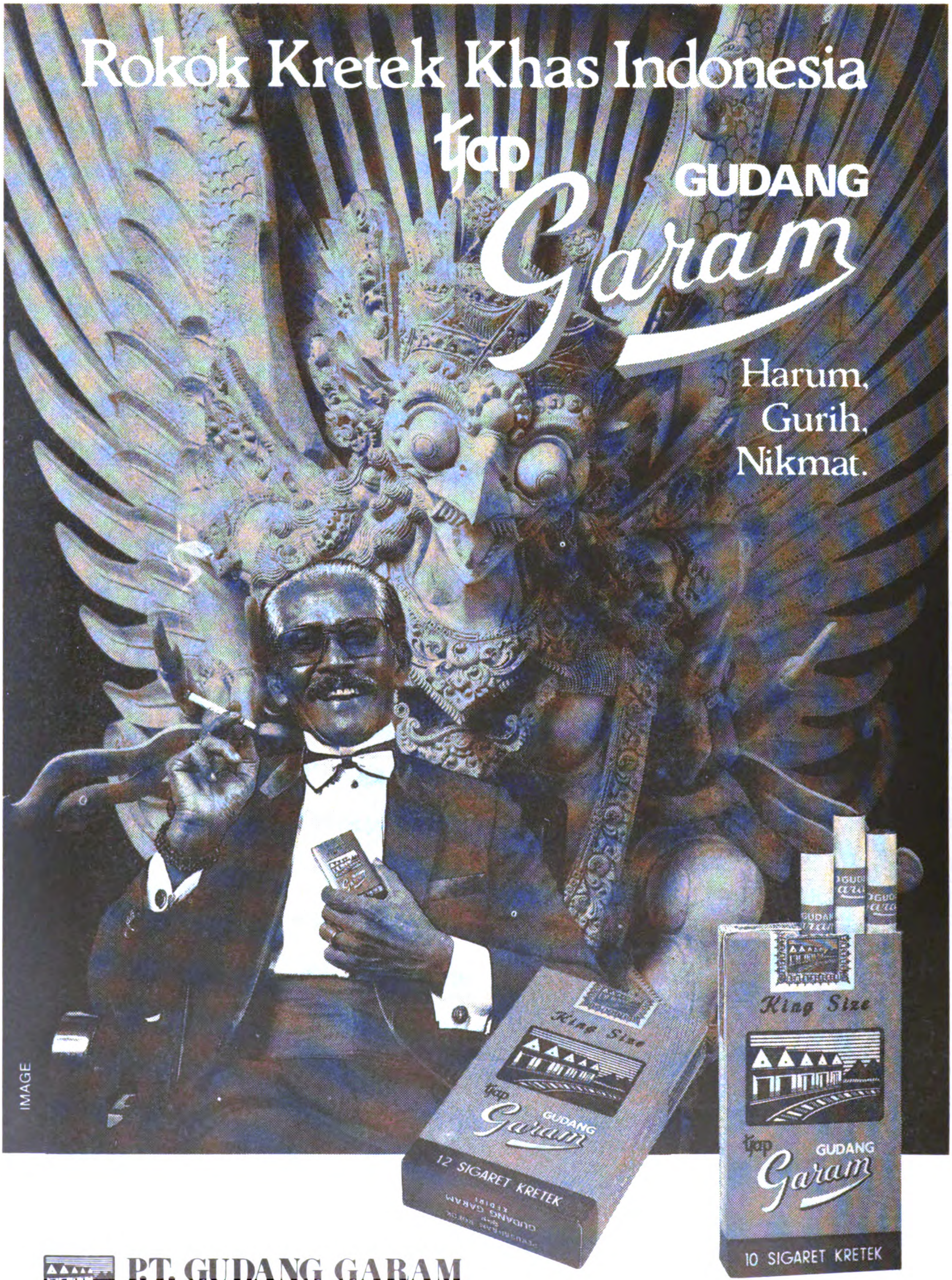

P.T. GUDANG GARAM
KEDIRI - INDONESIA

Digitized by Google

Supersemar Telah Memberikan Kekuatan Pembaharuan

"Siap berjuang memenangkan Pemilu 1987 bagi Golkar"

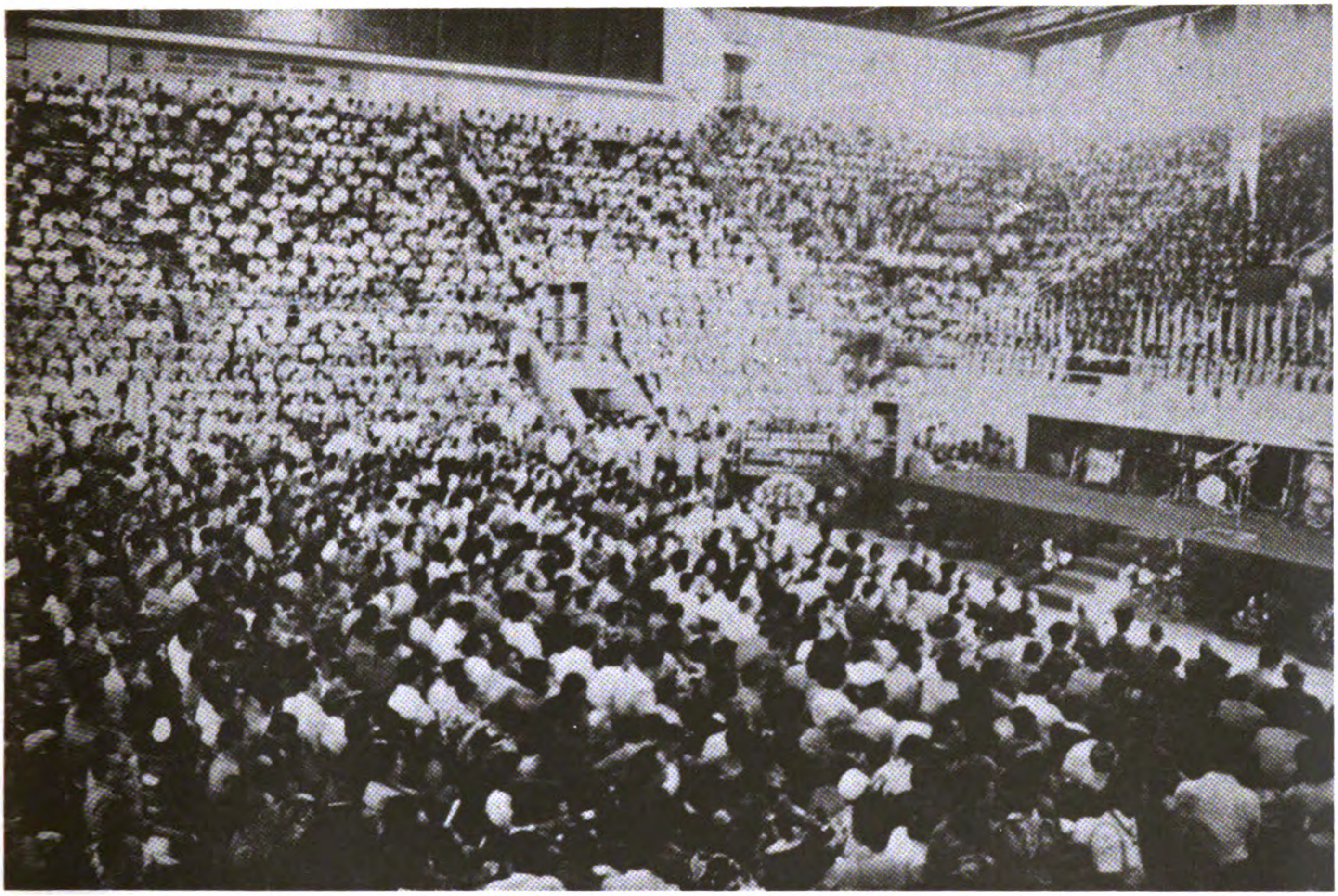

Istora Senayan yang sebenarnya hanya mampu menampung 12.000 orang, bergelora oleh 20.000 lebih massa Golkar yang memenuhi seluruh penjuru hingga bagian luar bangunan yang berusia seperempat abad itu. Memperingati 21 tahun Surat Perintah 11 Maret — Supersemar — sebagai tonggak sejarah Orde Baru, kehadiran massa Golkar sekaligus menunjukkan kesiapan organisasi politik pendukung utama Orde Baru ini menghadapi Pemilihan Umum April 1987.

Ketua Umum Golkar Sudharmono SH menyatakan kegembiraan dan kebanggaannya berada di tengah-tengah keluarga besar Golkar DKI serta tokoh-tokoh Golkar tingkat pusat hari itu. Acara meriah penuh gelora peringatan lahirnya Supersemar kali ini memang istimewa. Selain karena besarnya jumlah massa Golkar — termasuk para pimpinan Golkar tingkat I dan II seluruh Indonesia yang baru saja mengikuti Rakernas 8 hingga 11 Maret pagi — juga terutama karena peringatan kali ini berlangsung hanya beberapa hari menjelang awal kampanye Pemilu.

Kader Golongan Karya DKI menyampaikan suatu kebulatan tekad dalam kesempatan ini, yang menyatakan "siap berjuang memenangkan Pemilihan Umum 1987 bagi Golongan Karya". Pernyataan itu dibacakan oleh salah seorang tokoh generasi muda Golkar, Drs. Bambang Sulistomo — putera almarhum Bung Tomo — yang menjadi calon Golkar daerah pemilihan DKI untuk DPR-RI.

Terus menerus digelorakan semangatnya oleh Ketua DPD I Golkar DKI H. Achmadi, massa Golkar tambah menggelora ketika tokoh perjuangan 1966 bekas komandan korps baret merah Letnan Jenderal purnawirawan Sarwo Edhie Wibowo tampil. Dengan gaya retoris yang memikat Sarwo Edhie menguraikan kembali catatan sejarah masa awal perjuangan Orde Baru di tahun 1966. Beberapa bagian uraian tokoh yang juga dicalonkan oleh Golkar untuk DPR dari daerah pemilihan DKI ini berulang-ulang diselingi oleh pekik semangat massa Golkar. Ketika ia merasa uraiannya agak memakan waktu ia minta izin kepada Ketua Umum untuk memenuhi permintaan massa yang menyerukan "Terus, teruuss....".

Dihadiri pula oleh para anggota Dewan Pembina, dalam acara peringatan ini Ketua Dewan Pertimbangan Golkar DKI R. Soeprapto tampil sesudah Sarwo Edhie memberikan sambutan. Namun Soeprapto lebih memilih untuk menanyakan kesiapan

Digitized by Google

dan kesanggupan massa Golkar DKI untuk memenangkan Pemilu 1987 mendatang. Dan mendapat jawaban "Siap!" dan "Sanggup!"

Puncak acara tercapai ketika pada akhirnya Ketua Umum Golkar Sudharmono SH tampil. Berbicara di podium yang berlatar belakang gambar beringin Golkar berukuran besar, Ketua Umum dengan gayanya yang khas menyampaikan sambutannya yang untuk sebagian berisi petunjuk bagi jajaran Golkar untuk memenangkan Pemilihan Umum 23 April 1987. Dan pada bagian lain, Ketua Umum juga menggambarkan latar belakang kelahiran Supersemar, pembubaran PKI 12 Maret dan beberapa uraian lain yang mengisi apa yang telah disampaikan Sarwo Edhie Wibowo sebelumnya.

Makna Yang Mendalam

Menurut Sudharmono SH, bagi Golkar memperingati peristiwa lahirnya Supersemar, bukan kegiatan basa-basi, bukan kegiatan hura-hura, melainkan karena Supersemar itu mempunyai makna yang sangat dalam dan mendasar bagi pelurusan kembali jalannya perjoangan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang menjadi kehendak rakyat bangsa Indonesia sejak kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945.

"Surat Perintah 11 Maret, yang berisi perintah dari Presiden Soekarno waktu itu kepada Letnan Jenderal Soeharto Men Pangad waktu itu untuk atas nama Presiden mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan dan kestabilan jalannya pemerintahan serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden, pada hakekatnya adalah pemberian kepercayaan dan pemberian kuasa oleh Presiden kepada Men Pangad Letnan Jenderal Soeharto".

Surat Perintah itu telah digunakan oleh pengemban Supersemar, Pak Harto sebaik-baiknya, yang sesuai dengan harapan rakyat banyak, yaitu membubarkan PKI dan ormas-ormasnya, karena PKI telah nyata-nyata melakukan kejahatan yang kejam dan keji dan telah dua kali melakukan pemberontakan terhadap negara yang sedang berjoang dengan tujuan untuk merubah negara Pancasila dengan negara yang berideologi komunis. "Keputusan Pak Harto sebagai pengemban Supersemar itu tentu saja memperoleh sambutan yang spontan dan gegap gempita dari seluruh rakyat, karena keputusan yang demikian itu telah sangat ditunggu oleh rakyat".

Dengan lahirnya Supersemar itu maka keinginan dan dambaan rakyat Pancasilais ialah pembubaran PKI dan ormas-ormasnya telah dapat menjadi kenyataan, ujar Sudharmono. "Dengan lahirnya Supersemar itu terbuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kehidupan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum". Dengan lahirnya Supersemar itu terbuka jalan yang licin untuk melaksanakan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan menuju cita-citanya yang sekarang kita sebut sebagai melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Begitu penting dan mendasar Supersemar itu bagi kemajuan dan keberhasilan

Hari Esok Akan Lebih Baik

"Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk memperingati 21 tahun lahirnya Surat perintah 11 Maret", ujar Sarwo Edhie ketika tampil berbicara dalam peringatan lahirnya Supersemar di Istora Senayan 11 Maret lalu.

"Ingatan kita kembali ke suasana 21 tahun yang lalu. Tatkala para pemuda, pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong untuk kesekian kalinya menuju ke arah Istana Negara, guna menunjukkan perasaan. Bahwa rakyat merasa tidak puas dengan sikap Pimpinan Nasional pada waktu itu, yang tetap masih membiarkan PKI sebagai partai yang legaal; padahal ia telah terang-terangan mengkhianati bangsa Indonesia sampai 2 (dua) kali. Yakni pada bulan September 1948, tatkala Muso dengan kawan-kawannya mendirikan Negara Soviet Indonesia berpusat di Madiun; dan yang kedua G. 30S/PKI yang mengadakan Coup detat, dengan lebih dahulu menculik dan membunuh secara keji tujuh Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani Cs".

Seterusnya, Sarwo Edhie menguraikan bahwa gerakan yang dicetuskan pada tanggal 30 September 1965 itu, dan ditumpas oleh ABRI bersama Rakyat yang setia kepada Pancasila, telah berlarut-larut menyeret kita ke dalam konflik antara Orde Baru dan Orde Lama.

Tuntutan Rakyat untuk membubarkan PKI sejak bulan Oktober 1965, dengan lahirnya KAP GESTAPU dan lain-lain telah berpuncak pada tanggal 10 Januari 1966, ketika para Mahasiswa mencetuskan Tritura yang sudah terkenal bunyinya, yakni: "Bubarkan PKI; Susun kembali Kabinet Dwikora dan; Turunkan Harga Sandang Pangan".

Sarwo Edhie Wibowo

"Ingatan saya masih segar tatkala saya diminta naik di atas meja praktikum di halaman Salemba, untuk berpidato mengobarkan semangat. Ini wujud komunikasi ABRI/Rakyat. Ini adalah bukti manunggalnya ABRI dan Rakyat dalam cita-cita dan perjuangan".

Kesatuan Aksi dan ABRI

Penghargaan tinggi memang sewajarnya kita berikan kepada kesatuan-kesatuan aksi Mahasiswa, atas keberanian mereka untuk berdemonstrasi dan memperjuangkan Tri Tuntutan Rakyat pada saat Orde Lama masih sepenuhnya berkuasa. Antara Kesatuan Aksi dan ABRI telah terjalin suatu *partnership* tanpa perjanjian tertulis atapun ikatan resmi. ABRI dan Rakyat, yang ketika itu dipelopori oleh Kesatuan-kesatuan Aksi, bahu-membahu memperjuangkan tercapainya tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI. Di mana ABRI terikat oleh suatu disiplin yang ketat, tentu tidak mungkin ia terang-terangan turut berdemonstrasi. Namun hal-hal yang prinsipiil selalu dikoordinasikan dan dikonsultasikan antara sesama Exponen Orde Baru, agar tidak timbul kesalah-fahaman yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban-korban yang sia-sia. Maka konsultasi-konsultasi semacam itu sering dilakukan, baik antara Kesatuan Aksi dengan KOSTRAD maupun antara Kesatuan Aksi dengan Cijantung.

Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan berdemonstrasi adalah bagian dari para pemuda, mahasiswa, pelajar dan lain-lainnya, sedangkan ABRI bersifat "tutwuri handayani".

"Lahirnya Supersemar pada tanggal 11 Maret, 21 tahun yang lalu, memang patut kita peringati bersama; karena Supersemar sangat besar hikmahnya bagi Bangsa Indonesia".

Letnan Jenderal Soeharto ketika itu mendapatkan kepercayaan dari Presiden Soekarno untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu sebagaimana yang disebutkan dalam diktum pertama Surat Perintah 11 Maret untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi "Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Revolusi, (serta menjamin ke-

Digitized by Google

kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga rakyat melalui Sidang Umum MPR(S) tahun 1966 menjadikan Supersemar itu sebagai produk konstitusional dengan mengukuhkannya dalam Tap IX/MPRS/1966 dan melalui Tap no. XX/MPRS/1966 dinyatakan sebagai kunci tonggak sejarah, babak baru perjalanan bangsa kembali mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan adanya Tap no. XX inilah maka dimasyarakatkan lah hari lahirnya Supersemar itu sebagai lahirnya Orde Baru, orde atau tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

"Sekarang, 21 tahun kemudian sejak lahirnya Supersemar atau lahirnya Orde Baru, Bangsa Indonesia telah mencapai banyak kemajuan; kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan juga hankam".

Demikian juga organisasi kita Golongan Karya yang 21 tahun yang lalu masih merupakan Sekretariat Bersama dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tidak berafiliasi pada suatu partai telah tumbuh dan berkembang dan sekarang telah menjadi satu organisasi kekuatan sosial politik yang makin dewasa, memiliki kader-kadernya dimana-mana dan di berbagai bidang profesi yang berakar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Golongan Karya telah menjadi kekuatan pembangunan yang diandalkan.

Meskipun perjuangan Orde Baru tidak selalu berjalan mulus, meskipun masih banyak kekurangan dan tidak selalu dapat memuaskan semua pihak, namun secara keseluruhan dan pada umumnya, Orde Baru dengan kekuatan mujijat Supersemar telah memberikan kekuatan pembaharuan serta membawa hasil yang sangat besar bagi Bangsa Indonesia. Orde Baru sebagai orde pembangunan telah dapat mencapai hasil-hasil yang cukup besar dan bahkan mengesankan banyak bangsa-bangsa lain.

Bahkan menurut Sudharmono karena kemajuan dan hasil-hasil pembangunan itu begitu cepat dan mencakup segala segi kehidupan dan lapisan masyarakat, maka tanpa kita sadari muncullah harapan-harapan baru, tantangan-tantangan baru dan masalah-masalah baru, terutama terjadinya perubahan nilai-nilai dan norma-norma hidup yang terus berkembang, yang apabila tidak dapat ditampung atau disalurkan dengan baik dapat menimbulkan kekecewaan atau keresahan batin. Karena itulah Orde Baru dan kita semua harus terus mawas diri dan terus berusaha memperbaiki diri. Dengan tetap berpegang kuat-kuat pada landasan perjoangan Orde Baru: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kita terus mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berdasarkan demokrasi, konstitusi dan hukum.

"Inilah yang harus terus kita ingat dan kita hayati. Kita harus terus berusaha untuk melaksanakan sebaik-baiknya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

selamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi"). Kewenangan itu kemudian telah dimanfaatkan oleh pengemban Supersemar, untuk atas nama Presiden/Panglima Tinggi membubarkan PKI dan segala mantel organisasinya.

Dan bangsa Indonesia dengan demikian telah dapat diselamatkan dari kemungkinan kehancuran, sebagai akibat dari adanya konfrontasi antara pejuang Orde Baru dan pendukung-pendukung Orde Lama.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Bangsa Indonesia telah bersatu kembali, berkat digunakannya Supersemar tepat pada waktunya.

Dan ingatan kita masih segar akan pawai yang kacau, yang saya pimpin, dimulai dari Parkir Timur Senayan yang kita lakukan pada esok harinya, sebagai pernyataan "dukungan kepada pemegang Supersemar" dan segala tindakan yang diambilnya.

Kemajuan-kemajuan

Pemerintahan Orde Baru telah berjalan selama 20 tahun dan banyak kemajuan yang telah dicapai.

Dengan tekad Orde Baru sebagai Orde Konstitusi, maka telah diadakan koreksi-koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan konstitusional di masa lampau. Kesemuanya dilakukan, sesuai ketentuan UUD 1945. Yakni antara lain:

Menegakkan kehidupan Demokrasi Pancasila.

Menegakkan kehidupan Konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Menegakkan Kepemimpinan 5 tahunan.

Menegakkan Hukum dan keadilan yang mengayomi masyarakat.

Menjamin kesinambungan pembangunan secara berencana dan bertahap, yang makin meningkat dan merata, ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan tekad Orde Baru sebagai Orde Pembangunan, maka telah dilakukan pentahapan-pentahapan pembangunan, sesuai Garis-garis Besar Haluan Negara. Selama 22 tahun perjuangan Orde Baru kita telah memperoleh kemajuan-kemajuan di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial budaya, Pertahanan — Keamanan.

"Hambatan-hambatan tentu saja ada di mana-mana, namun yang jelas kita tetap survive". Dengan tekad membaja, dengan disiplin yang kuat dengan meningkatkan effisiensi dan dengan kesediaan mengencangkan ikat pinggang kita telah berusaha mengatasi semua hambatan-hambatan Pembangunan.

Dalam dua dasawarsa ini kita telah memasuki tahap pembangunan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemajuan berkesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat Pancasila yang ingin kita bangun. Sejak tahap Repelita pertama hingga sekarang, pusat perhatian dan medan juang kita yang utama tertuju pada pembangunan ekonomi. Namun, bersamaan dengan itu kita sama sekali tidak mengabaikan pembangunan bidang-bidang lain, malahan kita tetap terus memantapkan dan meningkatkan Pembangunan di bidang-bidang lain itu. Pembangunan bidang Politik telah kita laksanakan berdasarkan pada kehendak rakyat yang pengejawantahannya telah jelas dalam bentuk GBHN dan ketetapan-ketetapan MPR lainnya.

Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa setelah 37 tahun Indonesia merdeka, seluruh rakyat Indonesia telah bersepakat bulat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, sebagai ideologi Nasional. Dengan demikian berarti, bahwa kita semua sekarang sudah bisa lebih memfokuskan perhatian kita kepada Pembangunan. Kita tidak lagi bergulat mengenai Ideologi Nasional. Ormas, Orpol kini dapat secara lebih nyata ikut serta dalam proses pembangunan, ikut serta menyusun program-program pembangunan dan pelaksanaannya.

Dengan adanya Undang-undang tentang ke-Ormasan, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, maka Ormas akan dapat lebih meningkatkan dan menyempurnakan pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara mencapai cita-cita Nasional, mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsekuensi daripadanya, jelaslah bahwa setiap anggota Ormas/Orpol haruslah seorang Pancasilais, sebab hanya manusia dan insan-insan Pancasilais yang dapat membangun masyarakat berdasarkan Pancasila.

Kita dewasa ini bisa berbangga diri karena produksi padi kita telah melebihi kebutuhan konsumsi rakyat kita, maka kita perlu mencamkan pernyataan Presiden Soeharto di Forum Internasional beberapa waktu yang lalu pada peringatan 40 Tahun F.A.O, yang menyatakan jika pembangunan pangan dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan; mulai dari Keputusan-keputusan Politik yang diambil oleh Lembaga-lembaga Politik dalam rangka yang demokratis, alokasi anggaran yang konsekuen, pembangunan bendungan-bendungan besar sampai jaringan irigasi tersier, pembangunan pabrik-pabrik pupuk, dan Industri lain

Digitized by Google

bernegara yang berasaskan Pancasila, sehingga Pancasila benar-benar terasa dan memancar dalam kehidupan sehari-hari kita".

Golkar sebagai salah satu kekuatan Orde Baru diharapkan ketangguhan dan kepeloporannya dalam mengamalkan sebaik-baiknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Golkar sebagai kekuatan pembangunan dituntut untuk terus bekerja keras melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. "Dalam rangka ini maka pada saat-saat kita memperingati lahirnya Supersemar atau lahirnya Orde Baru ini saya ajak seluruh hadirin, seluruh keluarga besar Golkar dan seluruh bangsa Indonesia untuk merenungkan kembali saat-saat kelahiran Supersemar itu dan membayangkan kebulatan tekad kita dalam melaksanakan konsepsi serta tekad Orde Baru, bersama-sama dan bersatupadu menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang stabil dan dinamis yang penuh keseimbangan dalam suasana aman, tenteram, maju, sejahtera lahir batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Juga dalam saat-saat yang penuh khidmad ini, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah yang telah kita lakukan sebagai sumbangan demi terwujudnya suasana dan keadaan yang kita cita-citakan itu suasana stabilitas yang dinamis, suasana pembangunan yang menggairahkan, suasana yang cerah menyongsong hari depan yang lebih baik". Dan inilah makna hakiki daripada acara peringatan lahirnya Supersemar yang kita selenggarakan siang hari ini.

Mengembangkan Demokrasi Pancasila

Saya telah mendengarkan dengan cermat pernyataan kebulatan tekad kader-kader Golkar DKI, yang dibacakan oleh tokoh muda kita tadi. Saya bangga dan sangat menghargai tekad yang jelas dan tegas itu, kata Sudharmono, yang mencerminkan keyakinan dan kesanggupan generasi penerus kita untuk meneruskan nilai-nilai perjoangan Orde Baru dan mensukseskan pelaksanaan perjoangan Golkar sebagai kekuatan utama pembangunan Bangsa.

"Dalam hubungan ini ingin saya menyerukan dan mengajak seluruh hadirin, seluruh keluarga besar Golkar dan seluruh masyarakat Bangsa Indonesia untuk tidak menyia-nyiakan dan turut serta aktif dalam mensukseskan Pemilu yang akan datang sebagai bagian dan usaha penegakan dan pengembangan kehidupan yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum, sebagai bagian dari usaha kita untuk menjamin kesinambungan pembangunan lahir batin, sebagai bagian dan pelaksanaan yang setepat-tepatnya konsepsi Orde Baru yang lahir bersamaan dengan lahirnya Supersemar".

Dengan mensukseskan Pemilu setiap 5 tahun sekali dengan menggunakan hak demokrasi kita sebaik-baiknya berarti kita turut aktif dalam mengembangkan demokrasi Pancasila dan dengan demokrasi Pancasila yang terus kita kembangkan, berarti kita turut serta membangun bangsa

yang menunjang pembangunan pertanian, kerja tekun dari pekerja-pekerja ilmiah di lembaga-lembaga penelitian yang menghasilkan bibit-bibit unggul, bekerjanya aparatur pemerintahan dari Pusat sampai ke daerah-daerah yang menangani pembangunan pertanian. Dan yang paling penting dan menentukan ialah: Kerja keras, cucuran keringat, semangat dan kegairahan berjuta-juta petani Indonesia sendiri.

Di bidang sosial budaya, hasil-hasil yang kita capai pada umumnya sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh rakyat. Walaupun sudah banyak yang telah kita capai, namun masih banyak lagi hal-hal yang harus diperjuangkan. Melalui delapan jalur pemerataan di bidang sosial dan budaya kita telah meningkatkan pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat di bidang perumahan dan pemukiman, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangun dan pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh pelosok tanah Air.

Peningkatan peran Wanita di bidang pembangunan tidak bisa kita kesampingkan. Di segala aspek kehidupan telah muncul tokoh-tokoh wanita. Sebutan Wanita karier dewasa ini sudah populer sebagai pengusaha, sebagai ABRI, sebagai Dokter, sebagai Insinyur, sebagai peneliti, sebagai Pegawai Negeri, sebagai politisi, sebagai Wartawan, sebagai Antariksawan, bahkan sebagai menteri pun sudah bukan hal yang aneh lagi.

Generasi Muda

"Sejak tahun 1966, kita telah melihat, bahwa generasi muda kita telah menjawab tantangan jaman Orde Baru dengan baik". Tentu kita tidak bisa mengharapkan dapat melihat generasi muda Orde Baru, Angkatan '66 melakukan hal yang sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Usaha-usaha generasi yang lebih tua untuk meneruskan cita-cita Orde Baru kepada generasi yang lebih muda telah mendapat tanggapan yang tidak mengecewakan.

Berbagai indikator tentang hal itu, dapat secara nyata kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain dengan adanya kehidupan Kampus yang semakin mantap, makin banyaknya para pemuda melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan Penataran P-4, kegiatan Karang Taruna, Pramuka, KKN, Menwa, Siskamling, Olahraga, Kesenian, Keagamaan dan lain-lainnya. Kalau ada kenakalan-kenakalan remaja yang sering dianggap sebagai salah satu tolok ukur menilai penghayatan cita-cita Orde Baru oleh generasi muda kiranya hal itu kurang tepat.

Pada generasi manapun juga, pasti ada apa yang disebut "kenakalan" itu. Tentu saja "kenakalan" yang sudah mengarah kepada hal-hal di luar batas kewajaran, harus mendapat perhatian kita secara proporsional. Tidak perlu hal itu membuat kita panik atau gempar. Tidak perlu dibesar-besarkan. Mari kita atasi menurut tanggung jawab dan wewenang masing-masing.

Generasi yang lebih tua secara terencana telah melakukan persiapan-persiapan membentuk kader penerus cita-cita. Sedangkan generasi yang lebih muda tidak henti-hentinya menggembleng diri, mempersiapkan diri meneruskan tongkat estafet Generasi meneruskan cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 1945 berusaha mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perjuangan Orde Baru sekarang ini telah mengantarkan kita kepada tahap pelaksanaan Repelita IV. Posisi dan peranan Pelita IV sungguh sangat penting, bahkan menentukan bagi kesinambungan dan kelangsungan perjuangan Orde Baru, karena dalam Pelita IV harus diciptakan kerangka landasan yang kuat di segala bidang kehidupan. Kerangka landasan ini akan dimantapkan dalam Pelita V, sehingga dalam Pelita VI bangsa Indonesia sudah dapat tinggal landas untuk melanjutkan perjuangan dengan kemampuan sendiri menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sejak era Orde Baru, ternyata kita telah berhasil melaksanakan 3 (tiga) kali Pemilihan Umum bahkan beberapa minggu lagi kita akan kembali melaksanakan salah satu sendi kehidupan kita bernegara, melaksanakan Demokrasi Pancasila, melaksanakan Pemilihan Umum ke 4 (empat) dalam Orde Baru. Sebagai komponen Orde Baru yang terpercaya seluruh keluarga besar Golkar harus menyiapkan diri untuk menyukseskan Pemilihan Umum demi tegaknya Orde Baru.

Semangat 1945

Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai seorang bekas Komandan Pasukan dalam Palagan Ambarawa, yang turut menyerbu kota Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 (yang sekarang ini dijadikan Hari Infantri); dan sebagai bekas Komandan Sub-Sektor yang bergerilya di lereng-lereng Gunung Merapi dan Merbabu, melawan Belanda pada tahun 1948/1949; perkenankan saya untuk mengingatkan kita sekalian akan nilai-nilai luhur perjuangan 1945, antara lain:

Pancasila, sebagai Dasar Negara, pandangan hidup dan Ideologi nasional Pancasila sudah berulang kali dicoba hendak dikhianati, dihapuskan atau diganti.

UUD 1945, sebagai UUD yang bersifat flexibel dan luwes, singkat dan padat, yang

Digitized by Google

(nation building) dan membangun kepribadian bangsa (character building) yang berdasarkan Pancasila.

"Kepada para Kader-kader Golkar, para fungsionaris Golkar dari tingkat Pusat maupun Daerah sampai di desa-desa saya harap untuk mengajak rakyat di lingkungannya masing-masing untuk turut mensukseskan Pemilu 1987 ini, yang bagi Golkar berarti suksesnya Golkar dalam Pemilu". Secara khusus saya ingin mengingatkan kepada seluruh kader-kader Golkar dan seluruh warga keluarga besar akan keputusan Rapim Golkar yang dituangkan dalam pernyataan politik Golkar pada tanggal 20 Oktober 1986, di mana kita bertekad bulat dan siap sedia untuk mensukseskan Pemilu 1987 dan mensukseskan Sidang Umum MPR tahun 1988, di mana di dalamnya telah dinyatakan ketetapan hati Golkar mengenai pokok-pokok konsepsi GBHN dan pencalonan Pak Harto sebagai Presiden Mandataris MPR tahun 1988-1993. Dalam hubungan ini sungguh amat relevant antara peringatan Supersemar kali ini dengan suksesnya Pemilu 1987 yang akan datang dan suksesnya Sidang Umum MPR tahun 1988. "Marilah kita lanjutkan perjoangan dan kerja keras kita dan marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga perjoangan Bangsa Indonesia selalu mendapat taufik dan hidayahNya"□

Pernyataan Kebulatan Tekad Kader Golongan Karya DKI Jakarta

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

I. Menyadari bahwa sebagai warga bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat wajib bersikap teguh dalam memelihara, mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang luhur seperti pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, keberanian menegakkan keadilan dan kebenaran, berjuang tanpa pamrih, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai pancaran yang bulat dan utuh dari nilai-nilai Pancasila.

II. Menyadari sepenuhnya bahwa tantangan masa depan adalah memenuhi tuntutan serta harapan akan hari esok yang lebih baik, dengan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi seluruh bangsa seperti kesempatan memperoleh keadilan, memberantas keterbelakangan dan kebodohan.

III. Menyadari sedalam-dalamnya bahwa tantangan masa depan yang berat di atas perlu di atasi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan luhur bangsa Indonesia yang merdeka berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

IV. Menyadari pula bahwa Golongan Karya sebagai pengemban hakekat Orde Baru selama ini tampil mantap dalam rangka memelihara, mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum.

V. Memperhatikan dan mendukung sepenuhnya pernyataan politik Golongan Karya tanggal 20 Oktober 1986. Kami kader Golkar DKI Jakarta khususnya bersama seluruh keluarga besar Golongan Karya pada umumnya: demi pengembangan demokrasi Pancasila; demi makin mantapnya stabilitas nasional yang dinamis; demi kesinambungan dan peningkatan pembangunan yang adil dan merata lahir bathin, dengan ini menyatakan siap berjuang memenangkan Pemilihan Umum 1987 bagi Golongan Karya.

Semoga Tuhan Yang maha Esa meridhoi dan melindungi Golongan Karya dan seluruh bangsa Indonesia.

Jakarta, 11 Maret 1987

---

dapat menampung dinamika dan aspirasi Rakyat.

Semangat pantang menyerah.

Keberanian menegakkan keadilan dan kebenaran.

Perjuangan yang tanpa pamrih. (Bukti-buktinya dapat kita saksikan dengan banyaknya Makam Pahlawan *tanpa nama*).

Lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

Nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemerdekaan Bangsa, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dipertahankan, dengan pengorbanan ribuan jiwa para Pahlawan Bangsa yang gugur di medan bakti, dan pengorbanan harta yang tak ternilai jumlahnya.

Kalau Generasi '45 telah menjawab tantangan jaman dengan merebut, memproklamirkan dan mempertahankan kemerdekaan; dengan patriotisme dan heroisme, yang menyala berkobar di setiap dada; dengan bersemboyan merdeka atau mati, maka, generasi penerus dengan semangat yang sama, harus pula menjawab tantangan jamannya, mengisi kemerdekaan yang telah kita capai itu dengan pembangunan di segala bidang. Pada masa kini, bentuk dan wujud patriotisme dan heroisme memang berbeda dengan patriotisme dan heroisme pada masa kita mengusir dan melawan penjajah.

Oleh karena itu apabila ada pendapat yang menganggap bahwa *patriotisme dan heroisme* itu sudah luntur di tengah masyarakat kita; yaitu adanya penilaian bahwa generasi muda hidup santai, kurang serius di dalam menghadapi masalah-masalah nasional dan kurang mempersiapkan diri untuk mengisi kemerdekaan, sehingga seolah dikatakan bahwa kecintaan kepada tanah air luntur dan jiwa nasionalnya telah kendor; saya dalam hal ini menyatakan berbeda pendapat. Menurut hemat saya, panggilan jaman bagi setiap generasi memang berbeda-beda.

Generasi Muda sekarang yang berada di segala lapisan dan kalangan masyarakat, dibandingkan dengan generasi yang kita kenal sebagai Generasi 45 dan Generasi'66, tentulah tidak sama. Karena problema yang dihadapi tidak sama dan sikonnyapun berlainan, maka dengan sendirinya strategi maupun taktik yang diterapkan menjadi berbeda pula. Jadi tidak berarti, generasi yang sekarang ini boleh merasa dirinya menjadi melempem atau kalah semangat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.

Patriotisme dari Generasi '45 ditunjukkan dengan mengangkat senjata, melawan Belanda dan pihak penjajah yang mau kembali ke bumi Indonesia. Wujud kepahlawanannya adalah berani mati membela kemerdekaan dan membela tanah air. Itulah situasi di tahun 1945, yang dihadapkan kepada musuh Belanda, yang mau menjajah kita kembali. Semboyan kita waktu itu Merdeka atau Mati.

Haruslah disadari betul bahwa bentuk perjuangan antara masa silam masa sekarang dan masa yang akan datang, jelas berbeda. Namun, hakekat tantangannya tetap sama, yaitu mengemban amanat penderitaan rakyat. Kalau dahulu kita menggenggam senapan, samurai, bambu runcing dan geranat tangan, maka saat ini generasi muda harus siap bekerja dengan teknologi canggih yang mutakhir dengan tetap dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila dan UUD 1945, kata Sarwo Edhie Wibowo.

Kepada Generasi Muda tokoh perjuangan Orde Baru ini menyerukan, "Teruskan, teruskanlah perjuangan kami ini. Teruskan jiwa dan semangat perjuangan 1945". Tidak lagi dengan senjata melainkan dengan seluruh tenaga, fikiran, dan ilmu serta kemampuan yang ada pada kita, untuk mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan ini dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila. Mari kita dukung dengan penuh kesadaran perjuangan Golongan Karya yang konsisten menegakkan Orde Baru dalam mencapai cita-cita Bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

"Hanya melalui jalur Golongan Karya inilah kita yakin akan terwujudnya kesinambungan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila", ujar Sarwo Edhie.

"Perjalanan kita masih jauh. Kita harus bekerja keras dengan penuh keyakinan; bahwa hari esok akan lebih baik dari hari kemarin".□

Digitized by Google

Surat Perintah 11 Maret Tonggak Sejarah Orde Baru

11 Maret 1987. Rentang waktu 21 tahun telah dilalui sejak terjadinya suatu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia merdeka, yakni lahirnya Surat Perintah 11 Maret di tahun 1966. Suatu momen yang kemudian akan dicatat sebagai tonggak sejarah RI waktu itu kepada Letnan Jenderal Soeharto. Dan Surat Perintah 11 Maret itu, yang diserahkan melalui tiga Jenderal Angkatan Darat — M. Jusuf, Amirmachmud dan Basuki Rachmat — telah merubah dan menentukan corak baru bagi separuh kurun waktu berikutnya dari Indonesia merdeka, menjadi berbeda dengan separuh waktu sebelumnya.

Dalam rentang waktu hampir 42 tahun Indonesia merdeka, 21 tahun terakhir dilalui sebagai kurun waktu Orde Baru. Sedang hampir 21 tahun sebelumnya untuk sebagian, khususnya antara tahun 1959 - 1963 mendapat penamaan sebagai era Orde Lama.

Meskipun dalam konsep waktu tak ada detik, menit, jam, hari, bulan atau tahun yang tak berharga, tetapi kesia-siaan waktu bisa saja terjadi. Ada tahun-tahun tertentu dalam masa yang semestinya difaedahkan sepenuhnya untuk pengisian kemerdekaan, justru telah terisi berbagai kesia-siaan karena kegagalan pembangunan politik dan kegagalan pembangunan sosial ekonomi. Puncak kegagalan itu kemudian ditandai dengan pecahnya Peristiwa G-30-S sebagai makar yang dilakukan oleh PKI.

Peristiwa G-30-S itu sendiri pada akhirnya menciptakan situasi konflik antara rakyat anti komunis di satu pihak dengan pimpinan negara waktu itu. Rakyat yang anti komunis, menghendaki suatu tindakan yang segera dan tegas berupa pembubaran PKI.

Figur Penyelamat

Ketidaktegasan Presiden Soekarno mengenai PKI ini memperluas situasi konfliknya dengan massa rakyat ke arah hal-hal lain mengenai pola Politik dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang dijalankannya selama ini dikecam secara luas. Dianggap menyimpang dari rel pancasila dan UUD 1945. Kecaman-kecaman dan aksi-aksi menentang yang ditampilkan terutama oleh kalangan generasi muda di tahun 1966, membuat Presiden Soekarno kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Dan pada akhirnya Presiden Soekarno mengakui suatu realitas baru yang terwakilkan dalam figur Letnan Jenderal Soeharto.

Tokoh yang pada waktu pecahnya peristiwa G-30-S ini menjabat sebagai Panglima Kostrad, adalah seorang tokoh yang tak punya kepentingan politik kala itu, kecuali keterikatan moral pada keselamatan bangsa dan negara. Tindakan PKI baginya tiada lain adalah pengkhianatan. Dan setiap pengkhianatan harus dibasmi. Karena sikapnya yang tegas itu, figur Soeharto mendapat tempat di hati masyarakat sebagai figur penyelamat. Dan karenanya didukung oleh rakyat. Niscaya Soekarno menyadari kenyataan ini. Dan bila ia kemudian memutuskan melimpahkan Surat Perintah 11 Maret atas kehendaknya sendiri kepada Letnan Jenderal Soeharto, justru pada saat Letnan Jenderal Soeharto sedang berada di rumah karena sakit, setidak-tidaknya ia mempunyai kepercayaan bahwa tokoh yang telah diangkatnya sebagai Menteri Panglima AD ini akan dapat memulihkan keadaan dari situasi konflik.

Dalam Surat Perintah 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memberi wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto atas namanya untuk "Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi". Serta "menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi".

Pemulihan Sekaligus Pembaharuan

Pada dasarnya segala hakekat yang terkandung dalam Surat Perintah 11 Maret, kemudian dapat dipenuhi oleh Letnan Jenderal Soeharto dengan baik dan kreatif. Dengan kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri yang cukup, Jenderal Soeharto secara bertanggungjawab dan dengan mengindahkan apa yang dapat dibacanya dari aspirasi rakyat, mampu mendayagunakan SP 11 Maret sebagai instrumen penyelesaian berbagai persoalan bangsa yang dihadapi waktu itu.

Tindakan pertama adalah dengan menggunakan wewenang dari surat perintah tersebut, Jenderal Soeharto membubarkan PKI. Berarti salah satu sumber konflik telah terpecahkan. Dan tindakan-tindakan berikutnya adalah tindakan-tindakan strategis yang meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Sebab salah satu sumber konflik lainnya memang adalah karena rakyat menganggap bahwa pemerintahan di bawah Presiden Soekarno waktu itu telah menjalankan Pancasila dan UUD 1945 dengan cara-cara yang justru akan menghancurkan Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

Tetapi lebih dari sekedar menerobos dan membuka jalan penyelesaian konflik yang ada, SP 11 Maret di tangan Jenderal Soeharto ternyata mampu dikembangkan sebagai instrumen pembaharuan kehidupan politik yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan SP 11 Maret dapat ditumbuhkan kehidupan demokratis, konstitusional dan tegaknya hukum sebagai koreksi total terhadap kehidupan politik sebelumnya yang dalam dirinya terdapat banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Wewenang yang ada berdasarkan SP 11 Maret diarahkan untuk menyegarkan, mendukung dan memperkuat MPRS sehingga dapat berfungsi dengan baik menuju arah yang dikehendaki UUD 1945. Dengan MPRS yang telah berfungsi, kemudian berhasil disodorkan konsep dan program untuk memulai kembali pembangunan di segala sektor kehidupan bangsa secara demokratis dan konstitusional. Untuk pada akhirnya mewujudkan bangunan sistim yang kemudian disepakati di bawah penamaan Orde Baru.

Memang amatlah menarik bahwa di tangan Jenderal Soeharto SP 11 Maret dapat didayagunakan sebagai instrumen Orde Baru untuk menjawab panggilan sejarah. Mengoreksi Orde Lama untuk kembali kepada isi dan semangat Proklamasi Kemerdekaan.

Bagi Golkar peristiwa sejarah pelimpahan Surat Perintah 11 Maret kepada Letnan Jenderal Soeharto — yang kini adalah juga Ketua Dewan Pembina Golkar — adalah penting. Karena bermula dengan Surat Perintah 11 Maret lahirlah Orde Baru yang mencetuskan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sedang sebagai kekuatan Orde Baru, Golkar berada di barisan terdepan dalam perjuangan mewujudkan pembaharuan dan pembangunan masyarakat Pancasila yang dicita-citakan. Oleh karena itu setiap jajaran Golkar harus sadar dan memahami sejarah kelahiran Orde Baru, dan melaksanakan cita-cita Orde Baru itu dengan sikap yang membangun dan penuh idealisme, agar tekad Orde Baru yang dicetuskan di tahun 1966 tetap hidup sepanjang masa....☐ **RUM ALY**

Digitized by Google

Jangan Tonjolkan Perbedaan Ciptakan Rasa Kesatuan

Penting, peranan pemuka agama

Berlangsung tiga hari, di minggu pertama Maret, rapat koordinasi nasional Departemen Kerohanian DPP Golkar, menghasilkan sejumlah keputusan yang arahnya mendukung sukses pelaksanaan pemilihan umum bagi kepentingan Golongan Karya.

Rakornas yang diikuti oleh hampir dua ratus tokoh pemuka agama Islam, Kristen-/Katolik, Budha, Hindu dan Penghayat, pada garis besarnya menghasilkan dua pokok keputusan. Yang pertama berupa program pemantapan penggalangan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, pemikiran mengenai peranan pemuka agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memenangkan Golkar dan mensukseskan Pemilu 1987.

Menurut H. Moh. Tarmoedji, Ketua DPP Golkar yang membidangi koordinasi kerohanian, Rarkornas memandang penting kebersamaan dan keakraban dipupuk dan ditingkatkan terus menerus, sebagai cerminan dari ikrar Golkar dan sebagai perwujudan pelaksanaan program Golkar. Rakornas juga memandang penting peranan para pemuka agama dan penghayat dalam upaya Golkar memenangkan Pemilu 1987, karena untuk meyakinkan rakyat pemilih tak saja diperlukan pendekatan nalar melainkan juga pendekatan kerohanian.

Ini semua agaknya merupakan pemenuhan harapan yang diutarakan Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH dalam pengarahan di malam pembukaan Rakornas 2 Maret. Sudharmono mengatakan dalam rangka memantapkan program pembangunan bidang kerohanian, tanpa membeda-bedakan, peranan pemuka itu merupakan kekuatan untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Apalagi untuk bangsa Indonesia yang sehari-hari tak dapat dipisahkan dari kehidupan keagamaan dan kerohanian. Para pemuka dengan demikian diharapkan peranannya dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dan tatkala menutup Rakornas dua hari kemudian, Ketua Umum mengingatkan bahwa demi kepentingan bersama, tidak perlu untuk menonjol-nonjolkan perbedaan yang ada. Justru harus selalu dicari titik-titik temu yang dapat membuahkan segala sesuatu untuk kepentingan bersama. Titik temu dan persamaan-persamaan itu akan dapat menyinari jalan menuju kemajuan bersama, ujar Ketua Umum.

Hasil Rakornas yang telah dirumuskan, menurut Ketua Umum hendaknya tidak sekedar menjadi rumusan mati, akan tetapi dilaksanakan dalam kegiatan nyata. Baik untuk mensukseskan pemilihan umum, maupun untuk tujuan lebih jauh yakni menggalang keutuhan ke-Pancasila-an kita. Sehingga dengan demikian, Golkar betul-betul menjadi pelopor perwujudan kebhinnekatunggalikaan.

Ulama Penyumbang Aspirasi Pendidikan Bangsa

Rakornas juga sempat mendapat ceramah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Fuad Hassan Senin sore menjelang upacara pembukaan.

Dr Fuad Hassan mengutarakan bahwa tugas membangun manusia yang beramal, berakhlak serta beradab itu diliput oleh ikhtiar pendidikan. Pendidikan dalam artinya yang hakiki lebih luas misinya daripada pengajaran. Pendidikanlah yang bertujuan membangun manusia seutuhnya, sebagai kepribadian yang mandiri dan sekaligus sebagai anggota masyarakat yang bermartabat. Pengajaran lebih bertujuan pada upaya pengembangan potensi-potensi manusiawi demi dikuasainya ilmu pengetahuan dan teknologi, kejuruan dan keakhlian tertentu. Tujuan pendidikan bukanlah sekedar membuat seseorang mampu dan mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau terampil dan tangkas dalam sesuatu kejuruan dan keahlian. Lebih dari sekedar penguasaan ilmu (science) yang bisa menunjang prestasi manusia, pendidikan juga mencakup usaha membentuk fungsi nurani (conscience) sebagai pengatur akhlaknya.

"Dalam upaya pembangunan nasional, maka pendidikan merupakan salah satu tugas dengan nilai strategis. Pendidikan mempersiapkan kaum muda-mudi kita untuk menerima kelanjutan tanggungjawab hidup bermasyarakat dan berbangsa secara terhormat. Untuk itu maka tidak cukup hanya kecerdasan dan kemahiran saja yang harus kita alihkan kepada kaum muda-mudi kita, melainkan juga kemampuan berperilaku dengan ciri kebijakan dan kebajikan (wisdom and virtue). Orientasi pendidikan kepada agama sebagai sumber ajaran ilahi seharusnya digali dan dimanfaatkan untuk menghasilkan manusia-manusia yang "wise & virtuous" itu; dan ini hanya bisa dicapai bila agama tidak sekedar disajikan sebagai himpunan penghafalan melainkan terlebih-lebih sebagai muatan penghayatan ".

Jelaslah kata Fuad Hassan bahwa para pemuka agama punya peran yang sangat penting artinya untuk menyumbang pada tercapainya aspirasi pendidikan bangsa pada umumnya, khususnya kaum muda-mudinya. Dalam dunia modern yang seringkali digoncangkan oleh temuan-temuan terobosan dalam ilmu dan teknologi, seiring dengan terjadinya kegoyahan nilai kehidupan dan norma perilaku yang adakalanya mendekati kondisi anomi, maka akan semakin beratlah tugas para pemuka agama umumnya. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional, maka para pemuka agama harus mampu berjalan seiring dengan perubahan-perubahan sosial, sebab ketertinggalan bisa jadi akan disalahtafsirkan sebagai pertanda keusangan nilai-nilai religius. Maka menjadi kewajiban para pemuka agama, bahkan kewajiban bagi setiap Muslim dan Muslimah, untuk terus-menerus berusaha memutakhirkan diri sesuai perkembangan zaman, seraya tetap teguh berpedoman pada ajaran-ajaran agama.

"Para pemuka agama niscaya bisa menjadi pendukung ke arah kemajuan masyarakat dan bangsanya, bila sambil memutakhirkan dirinya mereka mampu meresapkan penghayatan nilai religius dalam setiap tahap kemajuan termaksud". Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia memberikan keleluasaan bagi diresapkannya nilai religius itu dalam setiap tahap kehidupan bangsa kata Prof. Fuad Hassan. "Ketuhanan Maha Esa" bukan saja tercantum dalam Pancasila, akan tetapi juga ditegaskan sebagai dasar kehidupan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam fasal 29 UUD-1945. Beranjak dari landasan ini, maka peran para pemuka agama jelas, landasannya serentak dengan tujuannya, dalam cita-cita kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Maka dalam perjalanan zaman, Insya Allah, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita tidak perlu dihinggapi kekuatiran akan lepas-akar lantas terbang tinggi tanpa-arah, ibarat layang-layang putus talinya dan hanya bertahan pada ketinggian selama angin mengawangkannya. □

Digitized by Google

Mempersiapkan Pemenangan Pemilihan Umum 1987

Golkar tampil dengan 25 juta anggota dan penggalangan satu untuk tujuh pemilih Kita membutuhkan pemikir-pemikir. Intelegensia Nasional harus tumbuh

Kalau ada rapat kerja nasional Golkar yang istimewa, mungkin itulah yang telah diselenggarakan 8 hingga 11 Maret ini. Sebab berbeda dengan semua Rakernas sebelumnya, kali ini pesertanya adalah pimpinan-pimpinan Golkar di tingkat nasional — dari DPP dan Dewan Pembina serta para jurkam yang tinggal di ibukota — sekaligus Ketua-ketua DPD I dan DPD II seluruh Indonesia. Rakernas-rakernas sebelumnya, biasanya tidak dihadiri oleh Ketua-ketua DPD II.

Tapi kehadiran para pimpinan Golkar hingga daerah tingkat II ini, dianggap penting karena rapat kerja nasional ini adalah untuk "persiapan pemenangan pemilihan umum". Apalagi, tinggal berbilang hari lagi masa kamanye yang dimulai 24 Maret segera dimasuki.

Tiga Tujuan

Setidak-tidaknya, seperti diutarakan Ketua Umum Golkar Sudharmono SH maupun Ketua Panitia Penyelenggara AE Manihuruk, ada tiga hal yang menjadi tujuan penyelenggaraan rapat kerja nasional ini.

Yang pertama, untuk mengukur derajat kesiapan organisasi dalam menghadapi tugas-tugasnya dengan mengadakan pengecekan akhir terhadap pelaksanaan rencana operasional pemenangan pemilihan umum. Sekaligus, untuk merumuskan petunjuk-petunjuk akhir yang diperlukan dalam rangka mempertinggi derajat kesiapan jajaran Golkar di seluruh Indonesia, khususnya dalam menghadapi masa kampanye dan pemungutan suara tanggal 23 April.

Tujuan yang kedua, ialah memadukan pembagian tugas di antara tokoh-tokoh Golkar dari berbagai profesi dan fungsi yang menyediakan diri untuk berpartisipasi aktif mensukseskan pemilihan umum maupun Sidang Umum MPR tahun depan.

Dan yang ketiga, untuk mengenal pelbagai masalah yang memerlukan pemecahan yang mendesak serta merumuskan upaya dan petunjuk yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah.

Sejumlah petunjuk akhir diperoleh peserta yang berjumlah sekitar 800 orang, terutama melalui pengarahan Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar yang dilengkapi pengarahan dari pimpinan jalur beringin Golkar Soepardjo Roestam, serta Pangab LB Moerdani di malam pembukaan Rakernas 8 Maret (Lihat: Fokus). Lalu, pada akhir Rakernas, 11 Maret pagi masih ada acara tanya jawab langsung dengan Ketua Umum DPP untuk hal-hal yang dianggap masih memerlukan kejelasan lanjut.

Ketua Umum mengatakan, menyadari pentingnya tugas politik Golkar, maka DPP beserta seluruh jajarannya sejak awal telah bekerja keras, dengan tidak membuang-buang waktu. "Serta dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melaksanakan Program Umum Golongan Karya, yang kita rangkum dalam Tri Sukses, yang salah satu tolok ukur keberhasilannya akan ditentukan oleh sukses atau tidaknya Pemilihan Umum 1987 ini". Perlunya kerja keras dan keterpaduan usaha itu lebih-lebih disadari pimpinan Golkar karena dalam menghadapi Pemilu yang akan datang ini — Pemilu yang ke-4 dalam Orde Baru — kita menghadapi berbagai faktor yang tidak ringan, seperti "pertambahan pemilih baru yang besar jumlahnya, ditiadakannya ketentuan mengenai pengangkatan bagi Golkar dalam DPR dan MPR; dan keadaan ekonomi dewasa ini yang tidak menguntungkan bagi jalannya pembangunan".

Angka-angka

Dari Ketua Golkar lainnya AE Manihuruk, peserta Rakernas disuguhi angka akhir berdasarkan laporan terbaru hingga 7 Maret, mengenai profil Golkar menjelang kampanye. Terungkap angka 25 juta mengenai keanggotaan — dihitung dari SPMAG yang masuk, yang untuk sebagian terbesar telah diberi Kartu Anggota — serta angka-angka lain mengenai jumlah Karakterdes dan Kader Fungsional yang telah selesai dididik.

Dan yang paling menarik, tentu adalah perkiraan — yang lebih tepat disebut sebagai perhitungan — hasil operasi eka sapta, yakni kegiatan menggalang calon pemilih Golkar sebanyak 7 orang untuk setiap kader atau anggota. Dikaitkan dengan target yang ditetapkan organisasi, perhitungan menunjukkan telah terlampauinya target di beberapa daerah, sementara beberapa daerah lainnya rata-rata telah mencapai di atas 90 persen. Angka-angka yang dipaparkan terperinci hingga ke tingkat kecamatan itu merupakan angka berdasarkan laporan dan laporan ulang serta pengecekan ulang. Namun terlepas dari angka-angka yang ada, Ketua Umum Golkar tetap mengingatkan segenap jajaran Golkar untuk tidak terlena dan mengendorkan kerja keras.

Agaknya Ketua Umum menghendaki stamina dijaga sebaik-baiknya hingga hari penentuan 23 April. Dan tanpa ingin menyaingi LPU, perangkat organisasi Golkar pun telah disiapkan dalam suatu jaringan sistim pelaporan hasil penghitungan suara di TPS-TPS pada tanggal 23 April itu, sehingga DPP dapat segera mengetahui hasil penghitungan jumlah suara.

Dari para Ketua DPD I, sebaliknya diterima laporan selama hampir sehari penuh di hari kedua Rakernas. Laporan ini melengkapi angka-angka yang telah terkumpul hingga 7 Maret, sehingga diperoleh gambaran lebih aktual. Selain itu, DPP memperoleh pula masukan-masukan lain yang bersifat teknis, termasuk beberapa masalah yang memerlukan penanganan akhir agar lebih sempurna.

Usai dengan babak laporan daerah, berlangsung rapat-rapat koordinasi wilayah — 27 propinsi dibagi dalam delapan Korwil — yang melakukan pembicaraan yang lebih rinci dan spesifik sesuai kebutuhan masing-masing. Rapat-rapat Korwil ini dihadiri oleh votegetters maupun jurkam tingkat nasional sesuai wilayah penugasan masing-masing.

Ditutup 11 Maret menjelang tengah hari, sore harinya peserta Rakernas juga menghadiri acara peringatan 21 tahun Supersemar di Istora Senayan.☐ **Rum Aly**

Digitized by Google

Kemenangan Golkar Tidak Hanya Untuk Golkar

Di Jawa Timur, alim ulama menyatakan dukungan bagi Golkar

Ketika pemilihan umum akan berlangsung tak lebih dari 67 hari lagi, Jawa Timur — termasuk Madura — dikunjungi lagi oleh Ketua Umum DPP Golkar, 14 hingga 16 Pebruari lalu. Makin dekat ke hari penentuan, maka sambutan massa Golkar sekali ini jauh lebih menggelora. Dan lebih dari separuh adalah kalangan generasi muda.

Kunjungan Ketua Umum dan pimpinan Golkar lainnya ke Jawa Timur ini merupakan bagian perjalanan menjelajah pulau Jawa non stop dalam beberapa pekan terakhir.

"Siapa yang tidak bangga dan bahagia, warga golkar dari seluruh pelosok Kabupaten Mojokerto, pagi ini bisa bertatap muka langsung dengan Ketua Umumnya", ungkap spontan dari beberapa kader Golkar pendidik yang ikut serta memadati halaman Pendopo Kabupaten Mojokerto. Mojokerto memang mendapat giliran pertama.

Di hadapan lima ribu warga Golkar Mojokerto yang terdiri dari para Komisaris Desa, Komisaris Kecamatan, Fungsionaris dan Kader Golkar Karakterdes dan kader Fungsional Kotamadya dan Kabupaten Mojokerto Sudharmono mengatakan merasa terharu, bangga dan berbahagia. Dikatakannya, keharuan dan kebanggaannya itu karena melihat kesetiaan warga Golkar di Kabupaten dan Kotamadya Mojokerto yang dengan setia menunggu pengarahan Ketua Umumnya walau dipanggang matahari dan keringat jatuh bercucuran.

Selanjutnya Sudharmono mengatakan, bertemunya pimpinan tingkat pusat dengan warga Golkar di daerah-daerah secara langsung begini semata-mata adalah demi terjalinnya silaturahmi, hingga akan mampu membangkitkan daya juang kita semua dalam melanjutkan perjuangan. Meskipun gaya pidato Sudharmono tidak menunjukan tanda-tanda seorang orator, tapi suara dan amanatnya secara serius diresapi oleh kader-kader Golkar yang digemblengnya. Kata seorang pelajar dan beberapa kader Golkar, Pak Dhar, memang bukan seorang agitator, tapi gema suaranya meneduhkan hati bagi yang mendengar, berhadapan dengan anak-anaknya.

"Kita semua akan lebih bangga bila di dalam Pemilu nanti Golkar menang", sebab kemenangan Golkar, tegas Sudharmono, bukanlah hanya untuk Golkar, tapi demi kesinambungan pembangunan yang sedang dilaksanakan Bangsa Indonesia. Karena Golkar akan tetap konsisten dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam melaksanakan Pembangunan Manusia Indo-

Bangga bila Pemilu nanti Golkar menang

Digitized by Google

nesia seutuhnya.

Pembangunan itu sendiri akan memperkecil jurang antara si kaya dengan si miskin. Karena pada dasarnya Pembangunan yang kita laksanakan adalah amanat rakyat yang dirumuskan melalui GBHN yang kita laksanakan melalui program Pelita.

Hal itu ditegaskan berulang-ulang oleh Ketua Umum Golkar di hadapan massa Golkar dalam perjalanan kerjanya di daerah; Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Jombang, Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, Kediri, serta dua Kabupaten di P. Madura, Pamekasan dan Sampang. Bagi Ketua Umum Perjalanan yang selalu padat dengan acara tiga hari penuh secara berturut-turut tidak nampak melelahkan. Bahkan Ketua Umum selalu hadir di tengah-tengah masa Golkar penuh semangat dan gairah.

Golkar akan konsisten dengan Pancasila dan UUD'45

Bersatu, Berkarya, Berdo'a

Di semua tempat Ketua Umum selalu di elu-elukan massa Golkar yang jumlahnya puluhan ribu. Juga ketika berada di tengah keluarga besar Golkar di Desa Pandemawu Timur, Kecamatan Pandemawu, Pamekasan maupun di Desa Torjun, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang juga dihadiri oleh tokoh-tokoh NU setempat. Pada Pemilu yang lalu warga NU masih menyalurkan aspirasi politiknya kepada PPP.

Pembangunan itu, kata Ketua Umum di Madura, mesti ditentukan dan diarahkan oleh rakyat. "Rakyat yang menentukan melalui GBHN".

Sejak tiga kali pelaksanaan Pemilu Golkar mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan amanat rakyat itu yang dilaksanakan oleh Orde Baru di mana Golkar menjadi pendukung utamanya. Menurut Sudharmono SH, amanat yang dititipkan oleh rakyat itu sudah kita laksanakan dan kita saksikan bersama-sama bagaimana hasilnya. Hasil itu, tentu saja merupakan hasil dari semangat kegotongroyongan, semangat persatuan, semangat untuk berprestasi dan karena dikabulkannya do'a kita oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu ajak Sudharmono, setiap warga Golkar dalam melaksanakan Pembangunan harus bersatu, berkarya, berdo'a.

Tatap muka dan membangun.

Pada setiap kunjungannya Ketua Umum selalu mengutamakan acara tatap muka dengan kader-kadernya dan bahkan lebih dari itu memberikan kesempatan bagi kader-kader di daerah yang ingin berdialog langsung dengan Ketua Umumnya. Setiap mengakhiri dialognya, Ketua Umum sambil tertawa secara spontan memberikan kenang-kenangan berupa pulpen golkar atau jam tangan Golkar.

Di dalam bertatap muka, Ketua Umum selalu menganjurkan kepada warganya agar setiap warga Golkar harus kerja keras dan selalu tampil sebagai tauladan yang positif di bidangnya masing-masing. Itulah ciri-ciri kader Golkar yang juga kader Pancasila dan sekaligus adalah kader Pembangunan. Jadi kader Golkar harus mampu membangun di dalam bidangnya masing-masing.

Selain Sudharmono sebagai Ketua Umum Golkar dalam kunjungannya juga berfungsi sebagai Mensesneg yang adalah Sekretaris Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP) yang diketahui oleh Pak Harto. Atas nama Sekretaris YAMP dan selaku Mensesneg Ketua Umum Golkar Sudharmono SH, dalam kunjungan tiga hari Sabtu, Minggu, Senin itu melakukan penyerahan sumbangan pembangunan Mesjid dan melakukan peresmian Listrik

CBI

P.T. CBI INDONESIA
A PERTAMINA JOINT VENTURE

PERTAMINA

INDUSTRIAL SERVICES :
Consulting, Designing, Manufacturing
Constructing & Erection of Heavy Steel
Plate, Storage Tanks, Spheres and
Structures for the oil, LNG Gas and
Geothermal Industries.

HEAD OFFICE :
Summitmas Tower, 4th floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62
Jakarta 12190 – Indonesia
Telex : 46480 CBI IA
Telephone : 511422 (5 lines)
Facsimile : 511445

Digitized by Google

Menyerahkan bibit kelapa hibrida

Masuk Desa. Di Kabupaten Mojokerto Sudharmono menyerahkan bantuan untuk pembangunan Mesjid Alfalah Mojokerto sebesar seratus lima puluh juta rupiah dan untuk mesjid Alfattah tujuh belas setengah juta rupiah. Selain menyampaikan bantuan untuk pembangunan sarana keagamaan, Ketua Umum Golkar dalam kunjungan kerjanya ke daerah-daerah seringkali menerima kebulatan tekad dari para Alim Ulama, tokoh-tokoh Agama setempat. Di Mojokerto Sudharmono selaku Ketua Umum DPP Golkar menerima pernyataan Pimpinan Pondok Pesantren Roudlotun Nasyi'in di Desa Beratkulon, Kecamatan Kemlagi yang menyatakan akan menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar pada Pemilu 1987. Tak hanya para Kyainya bahkan semua santrinya yang berjumlah kurang lebih dua ribu lima ratus akan menyalurkan aspirasi politiknya pada Golkar pada Pemilu mendatang.

Bagi Ketua Umum hal semacam ini sangatlah menggembirakan, tapi ditegaskan oleh Ketua Umum lebih lanjut perjuangan dalam melanjutkan Pembangunan tidak hanya cukup dengan kebulatan tekad demi kebulatan tekad. Kesemuanya itu harus kita buktikan dengan karya-karya nyata yang bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Selain Mojokerto, Mensesneg menyerahkan bantuan untuk pembangunan mesjid Al-Mubarok di Desa Banjarkejen Kabupaten Pasuruan sebesar dua belas juta rupiah, dan untuk mesjid Al-Muttaqin di desa Pagerwojo, Kabupaten Sidoarjo sebesar sepuluh juta rupiah. Hampir pada setiap kunjungan kerja Ketua Umum menyampaikan sumbangan untuk pembangunan sarana keagamaan. Karena sarana keagamaan merupakan prioritas utama dalam melaksanakan pembangunan manusia seutuhnya, tegas Ketua Umum di setiap kunjungannya.

Sudharmono dan Alim Ulama

Di Desa Pademawu Timur selain meresmikan Listrik Masuk Desa yang meliputi dua puluh dua desa dari enam Kecamatan Kabupaten Pamekasan, Ketua Umum juga menyerahkan tujuh ribu lima ratus batang bibit kelapa hibrida kepada Ketua DPD II Golkar. Pamekasan. Sedangkan di Desa Torjun Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang Ketua Umum meresmikan Listrik Masuk Desa yang meliputi delapan belas Desa dari lima Kecamatan. Juga menyerahkan lima ribu batang bibit kelapa hibrida Kepada Ketua DPD II Golkar Sampang.

Di Kediri selain memberikan bantuan untuk pembangunan Masjid dan Madrasah Baiturrahim, Desa Sebet Kecamatan Plemahan, Ketua Umum juga menyerahkan bibit kelapa hibrida seribu batang kepada Ketua DPD II Golkar Kodya dan Kabupaten Kediri.

Halaman pendopo Kabupaten Kediri malam itu diselimuti hujan namun semangat warga Golkar tetap terpatri dalam mendengarkan pengarahan dari Ketua Umum Golkar. Menjadi semakin meriah acaranya ketika artis-artis Golkar di bawah pimpinan Edy Sud mulai menghibur. Dan meskipun tidak secara langsung, malam itu Blitar mendapat bantuan dari Mensesneg untuk pembangunan Pondok Pesantren "Al-Tarbiyah" Sukorejo Kotamadya Blitar.

Madiun

Malam yang penuh dengan warna warni, balon-balon umbul-umbul serta sepanjang kota penuh dengan bendera merah putih dan panji-panji Golkar, menyambut kehadiran ketua Umum Golkar dan seluruh rombongannya di Madiun. Di halaman pendopo Kabupaten Madiun dalam suasana yang gembira cerah tanpa curah hujan kurang lebih tiga ribu keluarga besar Golkar menyaksikan sebuah tarian peragaan pencoblosan tanda gambar yang dibawakan dalam bentuk tarian kreasi modern. Peragaan itu sangat memukau hadirin bahkan Ketua Umum dan Nyonya EN Sudharmono nampak amat terkesan. Tetapi yang lebih menggembirakan adalah hadirnya dua ratus tokoh alim ulama se Kotamadya Madiun dan Kabupaten Madiun yang menyatakan kesiapannya di hadapan Ketua Umum Golkar untuk ikut mensukseskan Pemilu 1987 demi kemenangan Golkar.

Meskipun suasana tatap muka antara Ketua Umum dan Warga Golkar Madiun terbatas sifatnya, namun ada banyak kaum muda yang sengaja datang untuk berpartisipasi untuk mendengar isi pengarahan yang disampaikan Ketua Umum Golkar Sudharmono SH.

Sampai akhir acara langit dan cuaca tetap terang benderang tak ada tanda-tanda yang menunjukkan akan turun hujan, meski sore hari Madiun di kepung mendung, ungkap beberapa kader Golkar yang menghadiri acara tatap muka itu. Juga seperti biasanya Group lawak Tom Tam dan bahkan Ratno Timur, ikut memeriahkan acara silaturahmi pimpinan pusat Golkar dengan para kader-kader andalan Kodya dan Kabupaten Madiun.

Perjalanan Ketua Umum Sudharmono dan Nyonya yang disertai rombongan DPP sesungguhnya terasa sangat panjang. Tapi, perjalanan semacam ini adalah perjalanan perjuangan dalam mengaktualkan arti kerja keras dan bertanggung jawab di tengah masyarakat luas khususnya keluarga besar Golkar di seluruh pelosok Tanak Air, ungkap beberapa fungsionaris Golkar yang selalu menyertai. Dan setelah Jawa Timur masih banyak lagi yang menunggu-nunggu kehadiran Ketua Umum Golkar di tengah-tengah warganya secara langsung tak hanya bisa melihat dan membaca di koran-koran saja.☐ **Rendy MS.**

Digitized by Google

Kebulatan Tekad Perlu Disertai Karya Nyata

Senin, 23 Februari bulan lalu, Menteri Sekretaris Negara Sudharmono mendampingi Presiden Soeharto meresmikan pabrik baja lembara Canai dingin untuk yang pertama dan merupakan satu-satunya di Indonesia di Cilegon, Jawa Barat. Kemudian selaku Ketua Umum Golongan Karya, Sudharmono melanjutkan kunjungan kerjanya di Serang.

Dengan menggunakan kendaraan darat dari Cilegon ke Serang yang ditempuh lebih kurang dua jam itu, Ketua Umum tiba di Serang dan disambut oleh para kader-kader Golkar yang sudah siap berada di stadion siang itu.

Di tempat ini di depan Ketua Umum DPP Golkar keluarga dari Pendekar persilatan setempat menyatakan kebulatan tekad untuk mendukung dan memenangkan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum tahun 1987.

Selain itu, Keluarga Pendekar persilatan di daerah tersebut yang mengatasnamakan 1,5 juta pendekar persilatan yang tersebar di belahan nusantara ini juga mendukung pencalonan kembali Presiden Soeharto dalam masa kepemimpinan untuk 5 tahun mendatang.

Agar mewujudkan apa yang menjadi tekadnya

Dihadapan Keluarga besar Golongan Karya yang siang itu banyak menggunakan pakaian serba hitam, Ketua Umum naik mimbar untuk memberikan sambutan pengarahan dan sekaligus menjawab keinginan para pendekar persilatan yang telah menyatakan kebulatan tekad tersebut.

Dikatakan, menyatakan kebulatan tekad itu saja masih belum cukup dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Lebih lanjut dikatakan, kebulatan tekad itu memang penting, apabila disertai dengan karya-karya nyata. Artinya, kata Ketua Umum, apa yang telah diucapkan dalam kebulatan tekad itu harus bisa dibuktikan dalam berbagai kegiatan, khususnya perbuatan dalam pemilihan umum yang akan datang.

Selain itu, Ketua Umum DPP Golkar mengharapkan kepada para pendekar persilatan dan juga para alim ulama yang hadir dalam acara tersebut, agar sebagai kader-kader Golongan Karya dapat lebih meningkatkan lagi upaya sehingga nantinya dapat mewujudkan apa yang telah menjadi tekadnya.

Pada awal acara siang hari itu, Ketua DPD Golkar tingkat II melaporkan kepada Ketua Umum mengenai kesiapan dan persiapan warga Serang dalam menghadapi Pemilu tahun 1987, yang tinggal beberapa hari lagi itu. Dikatakan, bahwa daerah ter-

TASPEN

PT TASPEN (PERSERO)

Memberikan jaminan ASURANSI HARI TUA dan ASURANSI KEMATIAN pada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Perusahaan Negara ex. IBW. – ICW. (Peserta TASPEN) :

1. Bila berhenti dengan Hak Pensiun.
2. Meninggal dunia pada masa aktif atau setelah Pensiun (pensiun sesudah Januari 1975).
3. Istri/Suami dan Anak meninggal dunia.

TASPEN juga menyelenggarakan Program ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA (ASTEK) bagi Perusahaan Negara dan Bank Milik Negara.

TASPEN juga menyelenggarakan Pembayaran Pensiun Pegawai Negeri/ABRI di Propinsi BALI, NTB dan NTT sejak 1 Januari 1987.

Jika ada kesulitan hubungi :
HUMAS TASPEN Jl. Letjen. Suprapto Jakarta 10520
Telepon 411808 Kotak Pos 378 Jakarta 10002.

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA,
SEGENAP WARGA/KELUARGA
PT TASPEN (PERSERO) SIAP MENSUKSESKAN
PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

PT TASPEN (PERSERO)

Jalan Letjen. Suprapto Jakarta 10520
Kotak Pos 378 Jakarta 10002
Telepon 411808
Telex 49452 Taspen IA.

Digitized by Google

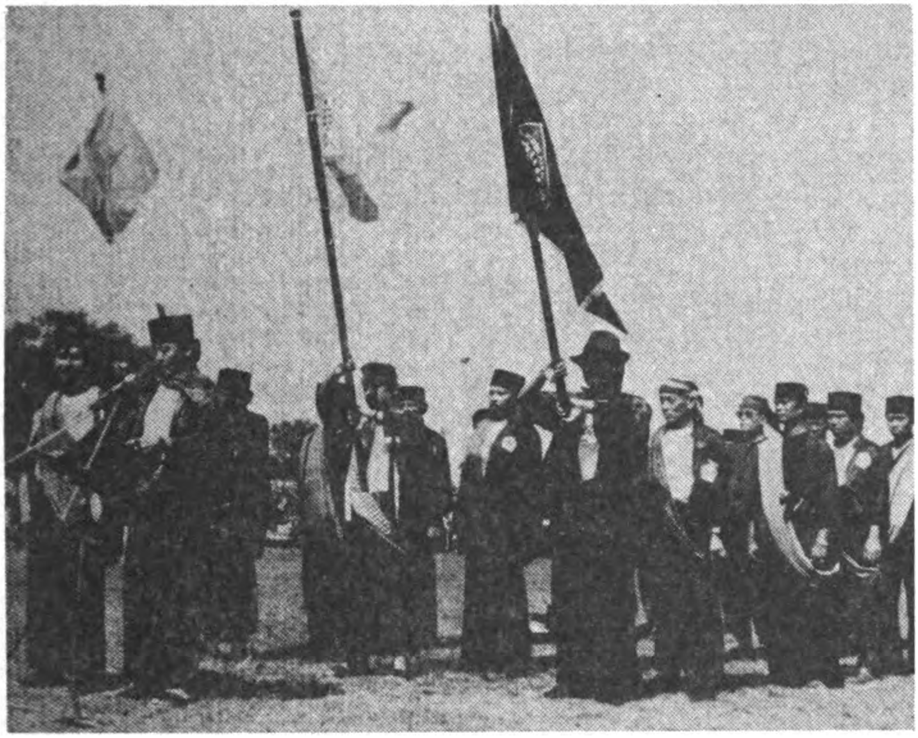

Perlu mengadakan komunikasi dengan kader

sebut dalam Pemilu tahun 1987 nanti mentargetkan 60 persen.

Sedangkan dalam Pemilu sebelumnya, walau Golongan Karya wilayah tersebut menduduki urutan teratas, namun nilainya masih 40 persen.

Menanggapi laporan yang disampaikan oleh Ketua DPD tingkat II tersebut Ketua Umum mengatakan, bahwa laporan yang disampaikan itu masih di atas kertas. Untuk dapat membuktikan kebenaran laporan tersebut perlu dibuktikan dan diperjuangkan dalam Pemilihan Umum yang akan datang, ujar Ketua Umum.

Namun Ketua Umum yakin, bahwa target yang dicanangkan oleh Ketua DPD tingkat II dapat dicapai, melihat kegigihan dan kehebatan warga Banten yang memang sudah kesohor itu. Untuk dapat mencapai target itu, Ketua Umum mengharapkan kepada warga Golongan Karya daerah tersebut untuk selalu mengadakan komunikasi, pengecekan antara anggota dengan para kadernya. "Saya yakin, dengan jiwa patriotik, masyarakat Banten akan dapat memenangkan Golongan Karya", ujar Ketua Umum.

Dan dalam kesempatan itu pula, Sudharmono selaku Menteri Sekretaris negara meresmikan listrik masuk desa di 24 desa yang tersebar di wilayah Serang, Jawa Barat. Dengan demikian warga setempat telah menikmati hasil dari pembangunan yang berupa listrik itu.

Pada kesempatan itu oleh Sudharmono Surat Keputusan Presiden berupa bantuan "Al Qur'an Wasiyah Kasmen, di Banten, Jawa Barat. Sebagai Ketua Umum Golongan Karya, diserahkan pula 1000 bibit buah-buahan kepada masyarakat Banten yang diterima oleh Ketua DPD-nya.

Turun dari mimbar seusai memberikan pengarahan dan penjelasan di depan pendekar dan para ulama itu Ketua Umum diserbu oleh para kader yang ingin dapat berjabat tangan. Tidak semua bisa berjabat tangan, karena melubernya masa yang mempunyai keinginan yang sama. Dan mereka yang tidak dapat berjabat tangan dengan Ketua Umum harus puas melihat dari dekat wajah Ketua Umumnya.

Dalam kesempatan kunjungan kerja sehari di Serang Jawa Barat ini Ketua Umum disertai antara lain, Ibu EN Sudharmono, Ny. S. Murpratomo, Sukarton Marmosudjono, Sarwono Kusumaatmadja, Zarlon Zaghlul, Akbar Tanjung, Sudarmadji, David Napitupulu, Basyuni Suryamihardja, Ny. Tati Sumiarno, Efendi Jusuf, Waskito, Rachmat Witular, Aulia Rachmat, Freddy Latumahina, Sri Redjeki, K.H Qodratullah, Hatta Mustafa, Muzajin Arifien, Gunariyah K Muchdie, Maska Ridwan, H Mubin Asrudin, Ny. Sukahar, RH Soebono, Sudarsono, HZ Abidin, Robert Puang Sunur.

Tidak ketinggalan pula artis-artis Golkar seperti Eddy Sud, Ratno Timoer, Firman, Komar, Kimung dan Ogut.□(BM)

Universitas 17 Agustus 1945

JL. TEUKU CIK DITIRO 46 TELP. 335600-343901 JAKARTA PUSAT

1. Fak. ISIP
2. Fak. Ilmu Administrasi
3. Fak. Hukum

PIMPINAN

DAN SEGENAP CIVITAS AKADEMIKA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

4. Fak. Teknik
5. Fak. Farmasi
6. Fak. Ekonomi

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR, SEJAHTERA LAHIR BATIN

Digitized by Google

Pemilu Jangan Dianggap Enteng

Bandung, dikenal juga sebagai kota Kembang. Berdampingan dengan kota bandung, adalah Kabupaten Bandung. Kabupaten ini penduduknya paling besar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia. Dalam tahun ini, jumlah penduduk yang sudah tercatat mencapai tiga juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus satu orang.

Di Kabupaten Bandung ini dalam 3 kali Pemilihan Umum, Golongan Karya terus menduduki peringkat atas. Dan dalam Pemilihan Umum tahun 1987 yang berlangsung tidak lama lagi, daerah tersebut akan tetap mempertahankan kemenangannya. Hal ini terlihat dari target yang dicanangkan oleh Ketua DPD tingkat II, bahwa Pemilu tahun 1987 nanti daerah tersebut untuk dapat mencapai 61,9 persen. Atau target ini hampir sama dengan pemilu tahun 1982 yang mencapai 60,70 persen. Dan perolehan suara tahun itu hampir sama pula dengan yang dicapai pada tahun 1977 yang mencapai 61,96 persen.

Menanggapi target itu, Ketua Umum menggugah semangat agar warga kabupaten Bandung untuk bekerja lebih keras lagi. Dan Ketua Umum mengharapkan agar target tersebut dapat tercapai.

Terhadap target yang dicanangkan daerah tersebut, yaitu 61,9 persen atau sama dengan pencapaian suara pada tahun sebelumnya Ketua Umum menilai bahwa target itu dilukiskan sebagai pas-pasan. Artinya dalam 5 tahun yang lalu, sewaktu belum diadakan pengkaderan hasilnya juga mencapai 60,70 persen.

"Sekarang masih ada sisa waktu 58 hari, saya harap daerah Jawa Barat, kabupaten Bandung dalam melaporkan angka-angka nantinya akan bisa berkembang lagi. Yaitu data yang riil dan didukung dengan realitas", ujar Ketua Umum.

Selanjutnya dikatakan oleh Ketua Umum, dalam mencapai sasaran yang kita inginkan, agar mengandalkan para kader. Dan para pemegang Kartu Anggota Golkar (KAG) supaya dapat mengajak masyarakat di lingkungannya. Ketua Umum juga mengharapkan agar para kader mengadakan penggalangan, agar sasaran maksimum yang dicanangkan itu dapat terwujud.

Selain itu, Ketua Umum Golongan Karya mengingatkan agar pelaksanaan Pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun sekali itu tidak dianggap enteng. Karena, pelaksanaan Pemilu yang 5 tahun sekali itu akan dapat menentukan hari depan kita, "bahkan lebih jauh dari itu", ujar Ketua Umum.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Pemilihan Umum yang dilakukan 5 tahun sekali itu adalah kesinambungan untuk hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai. Baik pembangunan yang berskala nasional maupun daerah.

"Selama empat kali Repelita, kita sudah dapat menikmati hasil pembangunan. Baik pembangunan materiel maupun spiritual. Dan setiap hari dan setiap saat kita dapat menikmati hasil-hasil pembangunan itu, ujar Ketua Umum.

Untuk itu, kata Ketua Umum, pembangunan yang sudah dicapai itu merupakan awal dari hasil pembangunan itu sendiri. Sehingga tuntutan dan tantangan dari rakyat itu masih jauh serta masih banyak lagi.

Paling Depan

Dalam sambutannya di hadapan kader Golkar di pabrik tekstil Banjaran Bandung, lebih kurang satu jam ini, disinggung pula oleh Ketua Umum mengenai Keluarga Berencana.

Mengenai suksesnya pembangunan di bidang kependudukan ini, Golongan Karya sangat mendukung, bahkan berdiri paling depan. Sebab Golongan Karya tahu persis tujuan program pelaksanaan Keluarga Berencana ini, yaitu untuk mengendalikan pertambahan penduduk.

Seperti dikatakan Ketua Umum, yang mengutip perkataan Presiden Soeharto, bahwa apabila lajunya pertambahan penduduk, lebih besar dari pembangunan yang dihasilkan, maka pembangunan dihasilkan itu akan terkejar oleh pertambahan penduduk, dengan demikian pembangunan itu sendiri tidak mempunyai arti.

Untuk itu, kata Ketua Umum, agar pelaksanaan program Keluarga Berencana ini dapat berhasil, maka hasil Pemilu tahun yang lalu itu harus dipertahankan. Kepada daerah-daerah kabupaten yang dalam pemilihan Umum tahun yang lalu mendapatkan 60 persen suara, supaya dipertahankan. Kemudian bagi daerah dalam tahun yang sama mendapatkan di bawah 60 persen, supaya berusaha untuk bisa mencapai 60 persen.

Untuk dapat mencapai itu, Ketua Umum mengharapkan kepada para kader Golkar supaya bekerja lebih keras lagi. Bila keinginan tercapai maka program Keluarga Berencana ini, akan berhasil pula.

Supaya bekerja lebih keras lagi

Dalam kunjungan kerja di wilayah Jawa Barat ini, selain mengunjungi kader Golkar di pabrik Tekstil Banjaran ini, Ketua Umum juga melakukan kunjungan kerjanya untuk meninjau pengerukan sungai Citarum.

Dan ikut dalam kunjungan kerja Ketua Umum di Jawa Barat ini antara lain; Ibu EN Sudharmono, Ny. AS Murpratomo, Sukarton Marmosudjono, Sarwono Kusumaatmadja, Zarlon Zaghlul, Akbar Tanjung, David Napitupulu, Tato S Pradjamanggala, Basyuni Suryamihardja, Ny. Tati Sumiarno, Waskito, Rachmat Witular, Aulia Rachman, Freddy Latumahina, Sri Rejeki, Albert Hasibuan, Nugraha Besoes, Mochammad Hatta, Bambang Permadi, Gunariyah K, Muchdie, Asep Sudjana, Maska Ridwan, Taufik Hidayat, H. Rauf Efendi, Agus Togar, RH Subono, Sudarsono, HZ Puang Sunur, Eddy Sud, Ratno Timur, Firman, Komar, Kimung, dan Ogut.☐ BM

Digitized by Google

Agar Para Kontestan Bersama Menyejukkan Keadaan

Usai mendampingi Presiden Soeharto meresmikan pabrik penggunaan alat kontrasepsi di Banjaran, Jawa Barat, Ketua Umum Golkar Sudharmono melanjutkan perjalanan kerjanya di daerah yang sama. Kemudian malamnya, selaku Menteri Sekretaris Negara memberikan ceramah di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Universitas Padjadjaran — salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia sengaja mengundang Mensesneg, yang juga Ketua Umum Golongan Karya itu, untuk memberikan ceramah mengenai "Pembangunan Nasional yang Dilaksanakan Oleh Orde Baru"

Di hadapan para mahasiswa dan dosen, Mensesneg memberikan ceramahnya dengan jelas dan gamblang, tentang pokok masalah yang dibawakan tersebut. Dalam forum yang berlangsung lebih kurang 2 jam itu Sudharmono SH juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dan dosen untuk mengadakan dialog.

Sejumlah pertanyaan yang menarik dan aktual diajukan oleh Mahasiswa dan dosen, kepada Sudharmono secara langsung, dan semuanya memperoleh jawaban. Dari lebih kurang 6 pertanyaan yang diajukan, tidak satupun yang tersisa.

Ceramah di Universitas Padjadjaran Bandung

Para mahasiswa maupun dosen itu menanyakan berbagai hal, baik mengenai penguasaan materi dari pada juru kampanye, masalah vote getter, maupun sistim distrik dan yang lainnya. Beberapa di antara pertanyaan yang diajukan itu memang tampak cukup kritis, bahkan ada yang cukup menggigit, serta ada pula yang mengritik.

Menjawab pertanyaan, Ketua umum dengan gamblang memberikan jawabannya. Misalnya mengenai kemungkinan dilakukannya sistim distrik. Dengan tegas, Mensesneg yang juga Ketua Umum Golongan Karya itu mengatakan, sejak tahun 1966, yaitu saat dicetuskannya sistim itu, Golongan Karya dan Abri mendukung bahkan termasuk penganjur sistim itu. Tapi partai-partai pada umumnya belum merasa siap.

PERUM ANGKASA PURA I

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA
SEGENAP KELUARGA BESAR PERUM ANGKASA PURA I
SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Kantor Cabang :
1. Bandar Udara Ngurah Rai
2. Bandar Udara Polonia
3. Bandar Udara Juanda
4. Bandar Udara Hasanuddin

Kantor Pusat :
Jl. Angkasa, Kemayoran
Jakarta Pusat (10720)
Telp. 410908
Telex 49262 PERAP IA.

Digitized by Google

Dan apabila, sistim itu diterapkan, Golongan Karya sudah siap untuk melaksanakan. Meskipun demikian, menurut Ketua Umum itu tidak berarti Golkar menginginkan sistim itu diberlakukan dengan segera. Biarlah kita mencoba untuk menjalankan dulu sistim yang sekarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Menurut pengamatan Sudharmono sistim distrik hingga saat ini masih belum dapat diterima atas berbagai pertimbangan. Misalnya, bila ditinjau dari jumlah penduduk, hingga saat ini sekitar 60 persen jumlah penduduk itu ada di Pulau Jawa, sedangkan sisanya tersebar di kepulauan lain. Selain itu juga adanya jumlah kabupaten yang ada di Jawa ini hampir sama dengan yang ada di luar Jawa. Dengan demikian, bagi penduduk yang ada di luar Jawa tidak akan memilih sistim ini. Akan tetapi akan lebih senang untuk memilih sistim proporsional.

Di samping beberapa alasan tersebut di atas, juga ada alasan yang idiel. Yaitu negara kita ini adalah negara kesatuan. Dan jangan sampai dengan adanya sistim distrik itu nanti terdapat kerawanan-kerawanan. Dan jangan sampai dengan adanya sistim itu nanti para wakilnya akan lebih akrab dengan daerahnya saja, dan kurang memperhatikan kepentingan nasional.

"Karena itu sikap yang diambil ratarata, pada umumnya kita ini ingin melihat pelaksanaan sistim sesuai UU yang berlaku sekarang. Dan apabila sistim itu sudah berjalan dengan baik, saya kira kita tidak perlu untuk bersitegang merobahnya. Tetapi, kalau toh semua sudah siap untuk merobahnya tentu akan diperhatikan untuk merobah sistim tersebut" ujar Sudharmono SH.

Penguasaan Materi

Menjawab pertanyaan berikut tentang penguasaan materi kampanye yang akan dibawakan oleh para juru kampanye dalam Pemilu 1987, dilukiskan oleh Mensesneg, bahwa dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa dan bernegara, baik bagi partai politik maupun organisasi kemasyarakatan, pasti ada implementasinya. Yaitu, bahwa dalam kampanye yang akan dilakukan itu tidak akan dan tidak perlu terjadi benturan-benturan yang keras. Karena semua — PPP, Golkar dan PDI — sudah berprinsip dan berpijak kepada Pancasila.

Dengan demikian kampanye yang akan diadakan tahun ini mestinya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya — waktu itu semua kontestan juga sudah menerima Pancasila sebagai asas, hanya saja masih berprinsip pada asas yang lain. Misalnya PPP, selain mempunyai asas Pancasila juga mempunyai asas ciri agama Islam. PDI, selain mempunyai asas Pancasila juga kerakyatan atau Marhaenisme. Dan tidak ketinggalan Golongan Karya begitu pula, selain berasaskan Pancasila juga mempunyai asas kekaryaan. Dengan adanya prinsip yang mendua itu, selain Pancasila, maka hal ini dapat menimbulkan implementasi yaitu apa yang disebut dengan kebringasan karena fanatisme.

"Saya kira dalam Pemilihan Umum yang akan datang, setiap kontestan akan berusaha untuk mewujudkan citra ke Pancasilaannya. Dan hal ini berarti para peserta Pemilu nanti akan dapat menahan diri, menguasai diri, agar tidak merawankan kesatuan dan persatuan bangsa, dan adanya noda-noda yang tertinggal akibat pelaksanaan kampanye"

Selain itu dengan sudah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, memang masih perlu juga adanya penonjolan-penonjolan program yang ditawarkan kepada rakyat. Dan program inilah yang diharapkan dapat berorientasikan kepada pembangunan. Paling tidak program umum, ataupun program strategis. Dan dalam menjalankan program tersebut semua pihak harus dapat mengendalikan diri jangan sampai terlalu muluk dan membohongi rakyat. Misalnya ada yang menawarkan apabila menang dalam pemilu nanti, maka pajak akan bebas. "Ini tidak mungkin" ujar Mensesneg. Dan dalam kampanye dengan menawarkan program-program seperti itu sudah tidak realistis.

Belum lama ini ketiga kontestan PPP, Golkar dan PDI telah mengadakan penataran-penataran juru kampanye. Dan siapa yang nantinya akan menjadi juru-kampanye, hal tersebut sepenuhnya tergantung dari organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan untuk Golongan Karya yang akan menjadi juru kampanye nanti akan lebih mengutamakan para calon-calon yang nantinya bakal menjadi wakil rakyat. Dan juga tidak tertutup kèmungkinan yang akan menjadi juru kampanye itu, bukan calon tapi orang yang pandai berbicara.

Sedangkan mengenai kampanye lewat media massa milik pemerintah sudah ada aturannya. Setiap peserta pemilu mempunyai jatah yang sama. Namun untuk media elektronik dan cetak, milik swasta apabila ada ijin, media tersebut dapat dimanfaatkan. Sebab, kata Mensesneg, materi dari kampanye itu perlu ada persetujuan.

Selain itu, Mensesneg berharap agar semua kontestan yang telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas itu, dalam berbangsa dan bernegara bersama-sama berupaya lebih menyejukkan keadaan dari pada masa yang lalu.☐ **Badrul**

PT. WIKARTA KENCANA
Jl. Kalipah Apo No. 62 Tilp. 50322 – Bandung

CV. WIKARTA PUTRA
Jl. Pengampon No. 11 Tilp. 5887 - 6439 – Cirebon

CV. DARMA KENCANA
Jl. Kalipah Apo No. 62 Tilp. 50322 – Bandung

Bergerak di bidang :
- INSTALATUR LISTRIK PENERANGAN DAN TENAGA
- AIR / SANITAIR
- PETIR
- DIESEL
- BANGUNAN
- DAN PERDAGANGAN UMUM

Digitized by Google

Golkar Takkan Gunakan Kampus Untuk Perjuangan Politiknya

Kampus tak boleh jadi arena politik praktis

Adalah hak setiap mahasiswa, bahkan suatu keharusan bagi setiap warga negara sejak umur tujuh belas tahun, untuk mengetahui perkembangan politik bangsanya. Tapi adalah tidak boleh menggunakan kampus sebagai wadah perjuangan politik praktis. Sudharmono SH mengemukakan hal tersebut menjawab pertanyaan seorang mahasiswa Universitas Diponegoro yang menganggap kehadirannya membawa aspirasi politik ke dalam kampus. Suasana menjadi cukup hangat ketika tanya jawab berlangsung antara mahasiswa dari berbagai fakultas dengan Sudharmono yang hadir memberi ceramah di Universitas Diponegoro Semarang selaku Menteri Sekretaris Negara Sabtu malam 28 Pebruari.

Sudharmono yang malam itu memberikan kesempatan kepada semua civitas academica Universitas Diponegoro untuk bertanya jawab cukup kewalahan memilih di antara banyaknya mahasiswa yang unjuk jari untuk mengajukan berbagai soal yang menyangkut judul ceramah "Pemilu sebagai mekanisme demokrasi Pancasila". Dan sayang, keluh sebagian besar peserta diskusi, justru pada kesempatan yang seperti inilah kita semua boleh bicara. Tapi waktu memang terbatas. Mereka antusias sekali untuk bertanya, berarti mereka juga menaruh perhatian, apalagi selama ini kesempatan semacam ini sulit didapatkan.

Ketika diajukan pertanyaan yang didahului dengan uraian oleh seorang mahasiswa Kedokteran, bahwa apakah kehadiran Pak Dharmono juga mencerminkan Mekanisme Demokrasi Pancasila, "sebab kita semua tahu bahwa bapak Sudharmono malam ini memberikan ceramah selain Mensesneg kan juga Ketua Umum Golkar?". Sang mahasiswa melanjutkan lagi apakah diperkenankan dalam jam kerja, dosen ataupun karyawan mengikuti program kaderisasi yang justru diselenggarakan oleh Undip sendiri, apakah ini juga merupakan pencerminan mekanisme demokrasi Pancasila?

Dengan tegas Sudharmono menyatakan bahwa Golkar tidak bermaksud menggunakan kampus untuk perjuangan Golkar. Tetapi yang pasti, ujar Sudharmono SH lagi, Golkar tidak membentuk mahasiswa Golkar di kampus, di Universitas. Ditegaskan pula adalah menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan politik yang benar. Jadi kalau mahasiswa ingin tahu apa itu Golkar, apa itu PDI atau PPP maka hal itu adalah wajar. Dan setiap warga negara sejak umur tujuh belas tahun boleh menjadi salah satu anggota kekuatan sosial politik sesuai dengan undang undang, sebagai perorangan. Dan karena saya Golkar saya senang kalau banyak mahasiswa masuk menjadi anggota Golkar tetapi Golkar tidak akan menggunakan kampus ini untuk perjuangan Golkar.

Tentang Undip menyelenggarakan karaknal, sepanjang tidak mengganggu jalannya proses belajar mengajar dan pihak akademi mengijinkan saya kira tidak jadi soal. Di sela-sela Sudharmono berhenti bicara, secara spontan Rektor Undip Prof.Dr. Moelyono S. Trastotenoyo, mem-

UNIVERSITAS JAYABAYA

Jl. Jend. A. Yani – By Pass Jakarta, Telp. 414904 (4 Saluran)
P.O. Box 4174. Cable : JAYABAYA.

REKTOR BESERTA KELUARGA BESAR SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS JAYABAYA BERTEKAD MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DENGAN MENGGUNAKAN HAK PILIH SEBAIK-BAIKNYA UNTUK MENJAMIN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI BAWAH PEMERINTAHAN ORDE BARU, SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA.

Jakarta, Maret 1987.

REKTOR UNIVERSITAS JAYABAYA
ttd.

DR.H. Moeslim Taher, SH,-

Digitized by Google

bantah tuduhan mahasiswa tentang penggunaan kampus Undip untuk penyelenggaraan Penataran Kader Fungsional. Kalau memang ada, itu di luar jam kerja serta hanya untuk para karyawan saja jelas Rektor kepada Mensesneg Sudharmono. Diskusi yang berjalan cukup hangat itu berlangsung hingga tengah malam.

Tapi yang paling penting bagi civitas akademika menurut Sudharmono, adalah benar benar menghayati Tridharma perguruan tinggi sehingga dunia Unversitas menjadi sumber dinamika yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Sudharmono juga berharap kepada staf pengajar Universitas Diponegoro maupun IKIP Semarang yang hadir malam itu, agar di samping mengajarkan ilmu dan teknologi, juga dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif mengenai cita-cita kepribadian dan perkembangan bangsa di mana kelak para mahasiswa akan mengabdikan diri.

Dan kepada mahasiswa diharapkan di samping harus selalu tekun belajar ilmu dan tehnologi, hendaknya juga berusaha agar tidak buta dan terasing dari perkembangan masyarakat dan bangsa, khususnya menyangkut masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

Menyinggung sistem distrik, baik dihadapan civitas academica Undip ataupun IKIP Negeri Yogyakarta esok malamnya Sudharmono mengatakan, tidak berasumsi bahwa sistim distrik lebih baik dari sistem proporsional seperti yang diterapkan selama beberapa kali pemillihan umum yang lalu. Namun untuk melakukan perubahan perlu dilakukan pengkajian yang mendalam sistem mana yang baik atau yang tidak baik.

Sudharmono mengakhiri ceramahnya di UNDIP dengan pernyataan merasa terkesan akan penampilan sikap kritis para mahasiswa. Tapi mohon maaf, kata Sudharmono, karena waktu telah malam. "Besok masih banyak lagi acara-acara kerja yang harus saya selesaikan. Sampai di sinilah pertemuan kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama semua civitas academica yang menyelenggarakan acara ini".

Pada malam itu Mensesneg menyerahkan surat-surat keputusan Presiden untuk bantuan pengadaan pesawat *Whole Body CT Scanner* untuk RS. Dr. Karyadi Semarang. Kemudian bantuan untuk penanggulangan bencana alam di Jateng, bantuan untuk pembangunan Masjid Qobul Sidomulyo kabupaten Semarang, lalu yang terakhir adalah bantuan untuk pembangunan Mesjid Taqwa Glagahombo Tawang, kecamatan Susukan, kabupaten Semarang.

IKIP Yogya: Demokrasi Pancasila

Dihadapan civitas academica IKIP Yogyakarta yang tak kurang dari seribu orang memenuhi Gedung Pertemuan Minggu malam, Sudharmono SH juga menyampaikan ceramah umumnya dengan mengambil judul "Konsep pembangunan politik menurut UUD 1945". Kesempatan tanya jawab yang diberikan oleh Mensesneg sehabis ceramah yang memakan waktu dua jam, lebih banyak di manfaatkan para dosen dibandingkan mahasiswa. Sehingga, suasana malam itu nampak tenang-tenang saja. Menjawab pertanyaan salah seorang dosen, Sudharmono menegaskan, Ide demokrasi Pancasila harus dikembangkan terus menerus dan penggunaan satu satunya asas Pancasila dalam kehidupan sosial politik tidak bertentangan dengan Demokrasi Pancasila karena yang hendak dikembangkan adalah Demokrasi Pancasila itu sendiri. Sudharmono SH menolak anggapan munculnya kebulatan tekad akhir-akhir ini dapat mengrogoti demokrasi. "Hal itu tidak benar", katanya, "karena kebulatan tekad tersebut muncul dari bawah dan bukan dari atas". ☐ **Rendy MS**

Digitized by Google

Golkar Harus Jadi Kekuatan Bangsa

Pelaksanaan Pemilihan Umum semakin dekat, semakin padat pula kunjungan kerja Ketua Umum Golkar Sudharmono SH ke daerah-daerah di seluruh pelosok tanah air. Mengawali bulan Maret 1987 yang baru lalu secara berturut-turut, dari tanggal 28 Februari sampai dengan 2 Maret 1987 Ketua Umum Golkar yang disertai rombongan DPP Golkar, melaksanakan perjalanan kerjanya di tiga daerah, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

Acara demi acara selama mengikuti perjalanan padat dan panjang ketua Umum Golkar berjalan sukses dan meriah di masing-masing daerah. Di Demak, Sragen, Semarang, Jogyakarta dan Pacitan. Semuanya adalah dalam rangka pemantapan langsung kepada jajaran Golkar daerah-daerah yang dikunjunginya di dalam rangka persiapan menghadapi Pemilihan Umum yang makin mendekat.

Ketua Umum Golkar Sudharmono SH, di dalam setiap pengarahannya di hadapan warga Golkar yang terdiri dari para komisaris desa, komisaris kecamatan, fungsionaris dan kader Golkar (kader teritorial dan kader fungsional) menegaskan dan berharap, agar setiap kader Golkar, harus mampu berkarya nyata dan berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena dengan karya-karya nyata, ujar Sudharmono, Golkar akan semakin diterima keberadaannya di tengah masyarakat, "Karya-karya nyata yang sudah tentu berguna bagi kepentingan banyak orang". Meskipun hal itu telah dibuktikan oleh Golkar, sehingga pada tiap Pemilu yang lalu Rakyat selalu memberikan kepercayaannya terhadap Golkar, namun Golkar harus bekerja keras. Penegasan-penegasan Ketua Umum selalu disambut dengan penuh semangat oleh massa yang berpuluh-puluh ribu jumlahnya di setiap daerah yang dikunjungi itu. Di halaman Pendopo Kabupaten Pacitan Ketua Umum Golkar memuji massa Golkar, yang tertib dan tetap disiplin meskipun matahari siang itu sangat panas. "Saya sangat terkesan." Ujar Sudharmono menyaksikan secara langsung massa Golkar yang dengan sabar mendengar amanat yang diberikan oleh ketua Umumnya.

Kepada para kader Golkar se Kabupaten Pacitan, Sudharmono menyatakan, tidak ada kepuasan bathin yang lebih besar selain menjadi kader bangsa yang mampu berjuang untuk nusa dan bangsanya, dan kepada saudara saudaralah tanggung jawab itu kita pikul bersama. "Untuk itulah Golkar harus terus mengadakan konsolidasi organisasi agar terus mendewasakan diri sehingga Golkar benar-benar mampu menjadi kekuatan bangsanya". Karena itulah, lanjut Ketua Umum, 23 April 1987. "Tetap mencoblos tanda gambar beringin". Dan sisa waktu yang masih tinggal beberapa hari ini agar benar-benar dimanfaatkan untuk memantapkan konsolidasi, melakukan konsultasi antar keluarga besar dan terus melaksanakan operasi eka sapta.

Di tempat ini, di tengah masa Golkar Pacitan, setelah Ketua Umum berdialog dengan kader Golkar wanita dari unsur pendidik, menyatakan diri menjadi Bapak asuh dari "dua ratus anak sekolah dasar" untuk jangka waktu satu tahun. Ketua Umum juga menjanjikan memberi satu unit drum band lengkap kepada SMP Muhammadiah Pacitan, selain juga memberikan satu set drum band untuk AMPI Kabupaten Pacitan. Di situ Ketua Umum Golkar yang juga Mensesneg meresmikan penggunaan Listrik masuk desa Kecamatan Kota Pacitan yang meliputi lima desa, Ploso, Kembang, Sirnoboyo, Sumberharjo, dan Mentoro.

Marathon demi kemenangan Golkar

Selain memberikan pengarahan di hadapan warga Golkar di Kabupaten Demak, Ketua Umum dan rombongan juga meninjau pemugaran mesjid Agung Demak yang peresmiannya akan dilakukan Presiden Suharto. Dari Demak rombongan menuju Semarang. Di sana, malam harinya selaku Mensesneg, Sudharmono SH memberikan Ceramah Umum di depan Civitas Academi Universitas Diponegoro.

Minggu pagi 1 Maret 1987 pukul delapan dengan helikopter Puma Ketua Umum dan rombongan tinggal landas menuju Kabupaten Sragen. Selain untuk tatap muka dengan kader-kader warga Golkar se-Kabupaten Sragen yang mengambil tempat di Stadion Taruna, Ketua Umum Golkar selaku Mensesneg juga meresmikan Mesjid Raya Kabupaten Sragen yang diberi nama Alfatah. Mengakhiri kunjungan kerja di

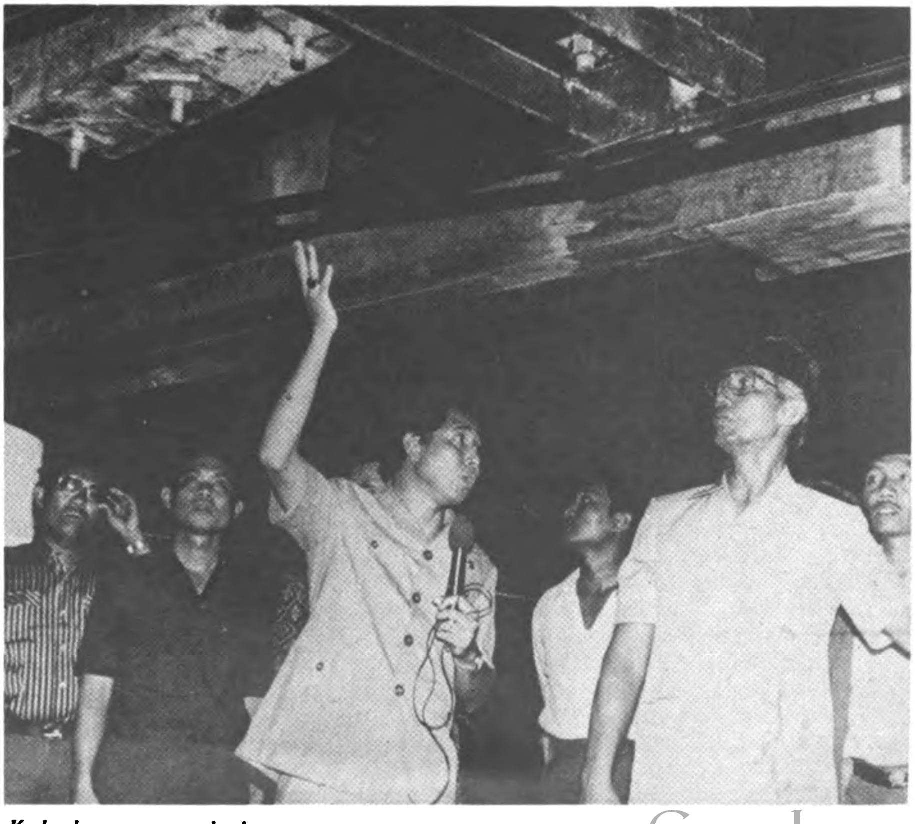

Kader harus mampu berkarya nyata

Digitized by Google

Golkar semakin diterima di tengah-tengah masyarakat

Sragen, Ketua Umum sempat singgah lebih dulu di cagar Budaya Sangiran untuk meninjau Musium Purbakala yang juga akan diresmikan sebentar lagi oleh Presiden Suharto. Pukul empat belas tiga puluh Ketua Umum dan rombongan meninggalkan Lapangan Jetis Sragen tinggal landas menuju Yogyakarta. Pukul lima belas, Ketua Umum Golkar dan rombongan tiba di bandar Udara Adisucipto Jogjakarta yang disambut oleh Ketua DPD Golkar DIY KGPH Mangkubumi SH dan pengurus Golkar Tingkat I DIY lainnya.

Dari Bandara Adisucipto Ketua Umum dan rombongan langsung menuju Komplek Perguruan Islam Republik Indonesia untuk meresmikan penggunaan gedung yang mendapat bantuan Presiden sebesar lima puluh juta rupiah. Gedung yang dibangun untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar ini terletak di Jalan MT Haryono dan pada kesempatan tersebut selaku Ketua Umum Golkar, Sudharmono memberikan bantuan uang sebesar lima juta rupiah. Selesai acara peresmian pukul tujuh belas, Ketua umum dan rombongan menuju gedung Agung untuk beristirahat, karena pada malam harinya Sudharmono selaku Mensesneg akan menyampaikan ceramah Umumnya di hadapan Civitas Academica IKIP Negeri Yogyakarta. Sebelum meninggalkan Yogyakarta untuk melanjutkan perjalanan ke daerah Jawa Timur di Kabupaten Pacitan, Ketua Umum dan rombongan meninjau Benteng Vredenburg Yogyakarta yang sedang dipugar.

Dari Bandara Adisucipto, Ketua Umum Golkar dan rombongan menuju Kabupaten Pacitan dengan menaiki Heli Puma. Selesai acara di Pacitan Ketua Umum dan rombongan dengan pesawat yang sama tinggal landas menuju Bandar Udara A. Yani Semarang, tanpa istirahat hanya pindah pesawat, Ketua Umum dan rombongan dengan Pesawat Garuda GA 425 tinggal landas menuju jakarta.☐ **Rendy MS.**

pertani

DIREKSI BESERTA STAF DAN KARYAWAN/ KARYAWATI

PT. PERTANI (PERSERO)

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR, SEJAHTERA LAHIR BATIN

Kantor Pusat :
Jalan Pertani No. 1 s/d 6 Durentiga, Kalibata
PO Box 247 KBY Jakarta Selatan
Telepon 7993108 (5 saluran)
Telex 47249 PERTANI IA

Digitized by Google

Jangan Salah Pilih Dalam Pemilu 1987

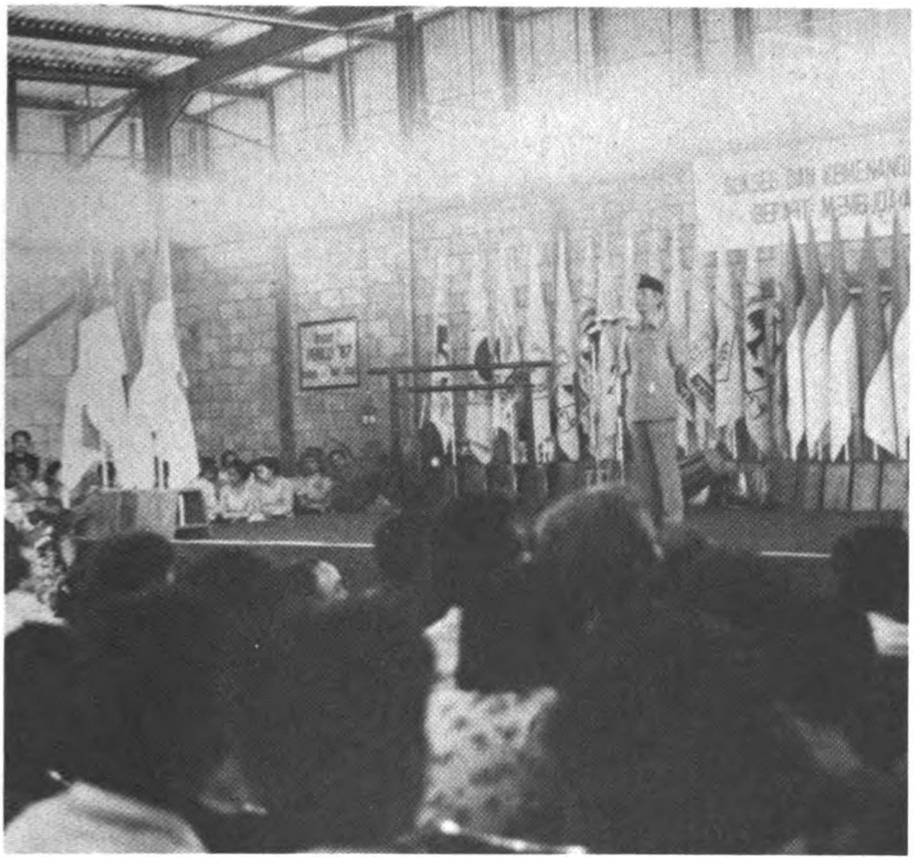

Rakyat yang menentukan arah pembangunan.

Pemilihan Umum sudah ada diambang pintu. Perayaan demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun itu tinggal kurang dari 2 bulan di depan kita.

Untuk melihat kesiapan dan persiapan kader Golkar dalam menghadapi perayaan tersebut, Ketua Umum Golkar Sudharmono sudah melihat dari dekat beberapa daerah. Baik wilayah DKI Jakarta, maupun daerah-dearah lain di belahan Nusantara ini.

Selama masa kepempimpinan Sudharmono, sebagai Ketua Umm Golkar sudah lebih dari separuh daerah tingkat II dikunjungi.

Sekembali dari kunjungannya di beberapa daerah di wilayah Jawa Timur bulan lalu, beberapa hari kemudian Ketua Umum mengunjungi Jakarta Timur.

Di wilayah ini, Ketua Umum di hadapan kader Golkar yang bekerja di beberapa perusahaan di lingkungan kawasan industri Pulo Gadung memberikan penjelasan dan petunjuk tentang berbagai hal. Baik yang menyangkut mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan Golkar, maupun masalah perekonomian.

Dalam masalah perekonomian, khususnya perekonomian yang sulit saat ini, Ketua Umum mengharapkan kepada para pengusaha yang hadir pada acara itu, maupun manager dan karyawan untuk dapat bekerja lebih keras lagi. Yaitu agar para pengusaha, manager, dan karyawan dapat berusaha untuk dapat menciptakan terobosan-terobosan.

Dan Golkar sebagai salah satu kekuatan sosial politik terbesar saat ini juga berusaha untuk dapat mencari terobosan-terobosan dengan menciptakan kondisi yang stabil dan dinamis. Sehingga para pengusaha dapat meningkatkan produksinya.

Mengenai kampanye, Ketua Umum di hadapan para kader Golkar itu menegaskan, bahwa Golkar akan mempelopori kampanye dan pemilihan umum yang berbobot dan tertib. Yaitu dengan kampanye yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut telah diupayakan berbagai cara misalnya dengan memberikan petunjuk-petunjuk kepada daerah-daerah.

Dalam kampanye nanti Ketua Umum mengharapkan agar warga Golkar tidak terpancing oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab. Serta diharapkan pula agar para kader Golkar untuk tetap waspada. Ketua Umum yakin bahwa dengan suksesnya Golongan Karya, bangsa Indonesia akan dapat menuju kesejahteraan antara lahir dan bathin.

Ajak Mengamalkan

Ketua Umum yang berbicara hampir satu jam dihadapan para kader Golkar di kawasan industri Pulo Gadung itu juga menyebutkan tentang tekad dan keinginan Golkar untuk dapat menuju kepada kehidupan yang lebih baik.

Untuk dapat mewujudkan itu, Ketua Umum mengingatkan bahwa dalam agama Islam terdapat ajaran yang mengatakan, bahwa nasib kita itu tidak akan berubah apabila kita sendiri tidak mau merobahnya. Dalam hubungan ini Ketua Umum mengatakan bahwa tidak mungkin kita dapat meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan hanya dengan ikut-ikutan atau dengan diam saja.

Untuk mencapai kemajuan, warga Golkar jangan hanya menunggu saja. Karena bila demikian, perbaikan nasib itu tidak akan datang tegas Ketua Umum.

Jangan Salah

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum melemparkan pertanyaan tentang pelaksanaan Pemilihan Umum. Kenapa Pemilihan Umum itu dilakukan dalam 5 tahun sekaligus, kenapa tidak terus saja membangun?

Pertanyaan yang dilemparkan itu, kemudian dijawab sendiri oleh Ketua Umum, dikatakan bahwa negara kita itu adalah negara yang demokratis, yang berkedaulatan rakyat. Dan kedaulatan itu punya rakyat, sehingga rakyatlah yang menentukan arah negara dan isi dari pembangunan.

Dan bagaimana caranya rakyat untuk memegang kedaulatan, menentukan hari depan. Rakyat menggunakan kedaulatan itu dengan memilih wakil-wakilnya. Menurut hukum dan aturan yang berlaku. Penggunaan hak dan kedaulatan rakyat tersebut dilakukan dalam setiap 5 tahun sekali.

Dalam menggunakan hak pilih, kata Ketua Umum, tentu rakyat telah menilai, organisasi mana yang mengajukan wakilwakilnya dan yang dapat mewakili aspirasi mereka.

Dan selama 3 kali Pemilihan Umum, Kata Ketua Umum, Golongan Karya telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Yaitu dalam Pemilu tahun 1971, 1977 dan 1982.

Kemudian Ketua Umum di hadapan masa Golkar itu mempertanyakan lagi "Apakah Golkar yang sudah 3 kali Pemilu itu memperoleh hasil, manfaat atau tidak?" dengan secara serentak para kader itu mengatakan "Ada!" "apakah pembangunan itu maju?" Dijawab "Maju!"

Dan inilah yang merupakan tolok ukur dalam penggunaan hak pilih kita benar atau tidak. Bila benar, kata Ketua Umum, dalam Pemilihan Umum tahun 1987 nanti, jangan sampai salah pilih. □ (BM)

Digitized by Google

Ulang Tahun Disesuaikan Dengan Tuntutan Dan Situasi

Diam-diam Himpunan Wanita Karya mengadakan ulang tahun. Ini merupakan hari ulang tahunnya yang ke-6 bagi organisasi wanita itu. Di Aula DPP Golkar yang dipakai sebagai tempat perayaan tidak banyak terlihat adanya spanduk-spanduk, atau tulisan-tulisan lain yang menyebutkan bahwa organisasi itu mengadakan ulang tahun. Hanya ada tulisan yang menyebutkan kalimat tersebut terpampang di dinding kanan dan kiri gedung.

Bahwa HWK menyelenggarakan hari ulang tahunnya ini, memang banyak yang tidak tahu, bahkan publikasi sebelumnya juga tidak banyak terdengar. Acara itu memang dilakukan secara sederhana, yang hanya dihadiri oleh kalangan anggota serta beberapa fungsionaris Golkar saja. Misalnya Sekjen, Sarwono Kusumaatmadja yang mewakili Ketua Umum Golkar. Dan Ibu Nani Soedarsono, sebagai Ketua Umumnya. Ketidak hadiran Ketua Umum Golkar dalam acara tersebut disebabkan waktunya itu bersamaan dengan kunjungan kerja di beberapa daerah Jawa Timur.

Kelahiran HWK melalui suatu proses

Hari ulang tahun yang diadakan kali ini memang tidak dipusatkan. Tetapi juga dilakukan di tingkat-tingkat daerah. Di samping itu, dalam perayaan hari ulang tahun ini juga dilakukan serangkaian kegiatan secara kongkrit misalnya saja mengadakan program kebersihan di Rawa Badak, Tanjung Priok dan di Jakarta Timur, serta mengadakan lomba gerak jalan yang diikuti oleh beberapa lapisan di antaranya wanita itu sudah tentu, juga para penyandang cacat.

Juga kegiatan kongkrit lainnya seperti mengadakan lomba desain tekstil, dan juga kegiatan-kegiatan yang langsung dapat menyentuh kebutuhan dan hajat dari masyarakat kecil misalnya memberi bantuan permodalan bagi ekonomi lemah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum HWK menguraikan bagaimana mulai terbentuknya Himpunan. Wanita Karya itu, di samping berbagai masalah lain. Dikatakan bahwa kelahiran HWK ini melalui suatu proses dan puncaknya, adalah dimulai dengan tekad bersama dari wanita-wanita Golkar tingkat pusat tanggal 28 Februari 1981 untuk menghimpun diri. Sedangkan kebulatan tekad itu sendiri dapat tercetus pada tanggal 2 April 1981. "Oleh sebab itu, perayaan hari ulang tahun Himpunan Wanita Karya ini dilakukan di antara tanggal tersebut," ujar Ibu Nani.

Hari ulang tahun yang diselenggarakan kali ini disesuaikan dengan tuntutan keadaan dan situasi saat ini. Karena waktunya berdekatan dengan pemilihan umum, maka kegiatannya pun disesuaikan dengan hal tersebut. Untuk itu, program prioritas dari hari ulang tahun lebih ditujukan kepada usaha untuk ikut memantapkan penggalangan terhadap rakyat pemilih dan kepada usaha untuk lebih memantapkan citra Golongan Karya di tengah-tengah masyarakat.

Manusia Pembangunan

Menyinggung mengenai ikut meningkatnya kadar ketangguhan internal kaum wanita agar semakin berdaya mampu melaksanakan fungsinya sebagai "Manusia Pembangunan" dikatakan oleh Ibu Nani, bahwa masalah tersebut tidak saja hanya tergantung oleh cita-cita HWK, tapi lebih ditentukan oleh berbagai faktor.

Di antaranya, sampai seberapa jauh kegiatan HWK itu dapat menyentuh langsung hajat hidup dan kepentingan masyarakat, wanita pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan faktor berikutnya adalah ditentukan oleh penampilan para pengurus HWK dari tingkat daerah. Selain itu, juga kultur bangsa dapat menempatkan para tokoh sebagai panutan dan sekaligus juga sebagai obyek sorotan.

Maka dengan adanya dasar pola pikir tersebut, dalam perayaan Himpunan Wanita Karya yang ke-6 ini, Ketua Umum HWK mengajak seluruh jajaran keluarga besar HWK untuk melaksanakan penggalangan terhadap rakyat pemilih, untuk mempersiapkan diri dalam menopang pelaksanaan kampanye. Dan bagi Himpunan Wanita Karya tidak ada pilihan lain, dalam Pemilu 1987 ini untuk memenangkan Golkar. Karena, ujar Ibu Nani kemenangan Golkar itu bukan saja merupakan jaminan bagi kesinambungan pelaksanaan konsepsi Orde Baru, tetapi juga merupakan jaminan untuk membuka peluang bagi berhasilnya Himpunan Wanita Karya dalam mengemban misinya.

Selain itu, dengan lebih intensifnya Himpunan Wanita Karya dalam membina, mengembangkan ketangguhan internal para anggotanya, simpatisan HWK pada khususnya dan kaum wanita pada umumnya. Untuk itu, lanjut Ibu Nani, dalam kehidupan masa kini dan seterusnya hanya mereka yang memiliki ketangguhan internal yang akan mampu mengenal dan mendaya-gunakan peluang kerja dan peluang usaha. Maka dengan ketangguhan internalnya tersebut, maka kaum wanita akan dapat berdaya mampu melaksanakan secara seimbang segala fungsi yang melekat pada dirinya.

Lebih lanjut dikatakan, apabila kita mampu mengantarkan setiap wanita memiliki ketangguhan internalnya, maka hal itu merupakan salah satu pertanda telah dekatnya bangsa ini kepada kondisi kehidupan bangsa yang dicita-citakan. □ BM

Digitized by Google

Bantarto Bandoro

Perjanjian Persahabatan RI-PNG

Indonesia dan Papua Nugini membuka hubungan diplomatik setelah Papua Nugini memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975. Sejak itu delegasi kedua negara sering tergabung dalam kelompok regional yang sama dalam pertemuan-pertemuan internasional. Tetapi hubungan antara kedua negara tidak selalu berjalan dengan lancar akibat masalah perbatasan, termasuk kasus lintas batas. Masalah-masalah ini berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan, sejarah dan geopolitik serta perbedaan-perbedaan persepsi.

Papua Nugini memiliki kebudayaan Melanesia atau Papua yang merupakan dasar negara dan kebangsaan mereka. Oleh sebab itu terdapat ketakutan di pihak Papua Nugini bahwa program transmigrasi Indonesia yang melibatkan pemindahan orang-orang Jawa menimbulkan ancaman terhadap kebudayaan Melanesia. Selanjutnya, perasaan semacam itu semakin dipertajam oleh tiadanya pengertian tentang kebijakan dan sikap Indonesia terhadap kebudayaan Melanesia seolah-olah Indonesia menentang kebudayaan itu dan berusaha untuk menyingkirkannya. Salah satu masalah yang dieksploitasi oleh orang-orang Papua Nugini yang anti Indonesia adalah bahwa transmigrasi dari Pulau Jawa akan berarti okupasi wilayah Papua Nugini.

Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, termasuk Melanesia yang tidak hanya terdapat di Irian Jaya tetapi juga di Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Unsur-unsur kebudayaan itu telah memperkaya kebudayaan Indonesia. Akan tetapi bangsa Indonesia tidak bersumber dari identitas kebudayaan. Tetapi sebaliknya. Konsep kebangsaan Indonesia itu sendiri sebenarnya suatu konsep yang baru, diawali dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ketika pemimpin-pemimpin pemuda gerakan nasionalis Indonesia untuk kemerdekaan membuat sumpah untuk memiliki satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Jadi, berbeda dari konsep Papua Nugini tentang kebangsaan yang didasarkan pada kebudayaan Melanesia, konsep kebangsaan Indonesia bersifat politik dan bukan kebudayaan. Perbedaan-perbedaan apresiasi mengenai masing-masing kebudayaan merupakan penghambat hubungan yang baik dan bersahabat antara Indonesia dan Papua Nugini.

Perjalanan sejarah yang berbeda telah membuat Indonesia menjadi koloni Belanda yang di dalam kerangka neokolonialisme tetap berusaha untuk memperoleh kembali wilayah Irian Jaya sebagai wilayah koloninya. Pada pertengahan tahun 1950-an, melalui suatu referendum, muncul suatu gagasan di pihak pemerintah Belanda dan Australia untuk menyatukan bagian Irjan dari Papua Nugini dengan membentuk negara merdeka. Gagasan ini menimbulkan obsesi di kalangan beberapa pemimpin Papua Nugini dan Australia untuk memajukan lebih jauh solidaritas kebudayaan Melanesia untuk seluruh pulau. Akan tetapi Indonesia pada tahun 1963 berhasil memperoleh kembali Irian Jaya melalui tekanan-tekanan diplomatik. Kedaulatan Indonesia atas wilayah itu diperkuat oleh aksi bebas memilih rakyat Irian Jaya yang dilakukan tahun 1969 di bawah naungan PBB.

Papua Nugini di lain pihak memiliki sejarah yang berbeda. Ia baru memperoleh kemerdekaan tahun 1975 setelah melalui persiapan. Karena hubungan sejarah ini, Papua Nugini menerima bantuan berlimpah dari Australia. Papua Nugini merupakan negara penerima bantuan Australia terbesar dan mempekerjakan ahli-ahli Australia sebagai penasihat dan manajer di berbagai bidang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai tingkat tertentu sejarah dan tradisi suatu bangsa membentuk sikap dan tingkah laku negara itu. Tiadanya pengertian antara negara-negara mengenai perbedaan-perbedaan dalam faktor-faktor penentu sikap dan tingkah laku nasional itu dapat memperburuk hubungan antara negara-negara yang bersangkutan.

Indonesia adalah kekuatan menengah kalaupun tidak secara potensial suatu negara besar. Sebaliknya Papua Nugini adalah negara kecil yang mempunyai perbatasan yang sama dengan salah satu bagian Indonesia, yaitu Irian Jaya. Oleh karenanya, Indonesia memberikan perhatian yang lebih besar kepada sebelah utara Asia Tenggara yang dianggap sebagai kemungkinan sumber ancaman bagi ke-

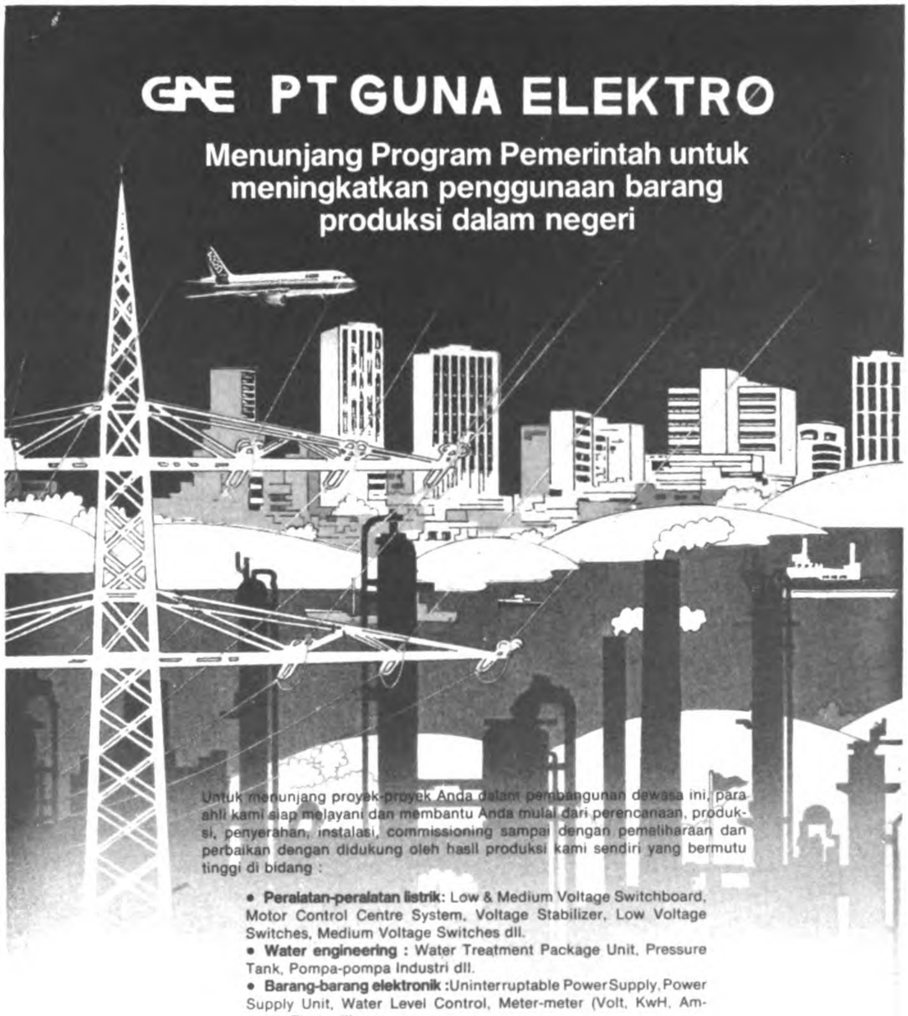

Untuk keterangan selengkapnya, hubungi :
• **Jakarta** : Jl. Hayam Wuruk 3, Telp. 372209 (10 saluran) • **Surabaya** : Jl. Panglima Sudirman 16, Telp. 45579, 41045 • **Medan** : Jl. Pemuda 19 F&G, Telp. 326120, 327613

Digitized by Google

amanannya maupun kawasan secara keseluruhan. Tampaknya sulit untuk menempatkan Papua Nugini dalam urutan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Sebaliknya, untuk Papua Nugini, Indonesia (dan Australia) dianggap sebagai negara tetangga yang paling penting. Faktor-faktor ini dan tiadanya pengetahuan dan pengertian mengenai masing-masing pihak merupakan faktor-faktor yang sering menyebabkan timbulnya ketegangan dalam hubungan antara kedua negara.

Dengan latar belakang itulah kita menilai pentingnya Perjanjian Persahabatan Indonesia-Papua Nugini yang ditandatangani di Port Moresby 27 Oktober 1986 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, Mochtar Kusumaatmadja dan Legu Vagi. Perjanjian ini penting untuk pengaturan jangka panjang zone perbatasan dan untuk hubungan Indonesia-Papua Nugini. Perjanjian ini, yang merupakan hasil negosiasi dan konsultasi berbulan-bulan, akan berfungsi sebagai dasar untuk semua kegiatan bilateral di masa depan. Perjanjian persahabatan itu mewajibkan kedua negara untuk mengekang diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap masing-masing pihak, dan untuk melakukan konsultasi dan negosiasi bila terjadi sengketa antara kedua negara tetangga itu. Dalam perjanjian itu terdapat pengakuan terhadap kepentingan nasional masing-masing pihak atas perbatasan yang sama.

Penandatanganan perjanjian itu mencerminkan tidak hanya sikap sehat Indonesia dan Papua Nugini dalam mengatasi segala macam masalah-masalah bilateral yang ada, tetapi juga pendekatan yang realistik terhadap masa depan bersama Indonesia dan Papua Nugini. Perjanjian itu merupakan kerangka konsepsional untuk mengembangkan hubungan dengan cara yang efektif, bertanggung jawab dan saling menguntungkan.

Pada saat penandatanganan perjanjian itu, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Legu Vagi, mengatakan bahwa perjanjian itu akan berfungsi sebagai dukungan terhadap prinsip internasional yang tinggi, yaitu penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial. Ia juga menekankan bahwa perjanjian itu bukan persetujuan perbatasan. Para pembuat keputusan Papua Nugini tidak ingin memfokuskan hubungannya dengan Indonesia pada masalah-masalah perbatasan. Mereka telah berusaha menempatkan masalah-masalah semacam itu dalam kerangka kepentingan bersama yang lebih luas yang dikembangkan melalui kerjasama yang konstruktif. Mitranya, Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan dasar untuk memupuk kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini. Pernyataan Mochtar itu menunjukkan bahwa Indonesia berniat untuk mempertahankan kebijakan bertetangga baik.

Umumnya disadari di Indonesia bahwa masih sering terdapat kecurigaan di pihak Papua Nugini mengenai kekuatan militer dan ambisi Indonesia ke arah ekspansionisme. Akan tetapi, penandatanganan perjanjian itu merupakan suatu indikasi yang kuat bahwa Port Moresby telah menerima itikat baik Indonesia untuk memupuk hubungan yang kooperatif. Perjanjian itu bukan saja merupakan petunjuk kebulatan tekad kedua negara untuk bekerja keras membangun masa depan bersama tetapi juga mencerminkan penghormatan atas kedaulatan, integritas dan kemerdekaan masing-masing pihak.

Masih banyak yang harus dilakukan untuk memajukan hubungan baik, erat dan bersahabat antara Indonesia dan Papua Nugini. Hubungan yang lebih erat dan intensif membantu menciptakan saling pengertian dan membantu meningkatkan kematangan hubungan. Tingkat kematangan hubungan pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan Indonesia dan Papua Nugini untuk mencegah kemungkinan munculnya kembali ketegangan dan salah pengertian, oleh karena kedua negara mempunyai taruhan yang lebih besar dalam hubungan dan kerjasama yang baik dan berkelanjutan daripada hubungan yang tegang dan buruk.□

1946

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA.
SEGENAP KELUARGA BESAR
BANK NEGARA INDONESIA 1946
SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987
DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KB. BANK NEGARA INDONESIA 1946
Jl. Lada No. 1
JAKARTA - KOTA

Digitized by Google

Oleh: Akbar Tanjung

Peranan Kekuatan Sosial Politik Dalam Pendidikan Politik Rakyat Dan Pemilu

I

Berbicara tentang peranan, sebenarnya berbicara tentang pengalaman empirik dan peranan yang diharapkan. Sehingga, jika kita berbicara tentang peranan kekuatan sosial politik dalam pendidikan politik rakyat dan pemilihan umum (pemilu), maka hal itu juga dapat diartikan berbicara tentang pengalaman empirik dan peranan yang diharapkan dari kekuatan sosial politik tersebut.

Dengan pendekatan yang demikian, maka jelas sekali bahwa peranan kekuatan sosial politik yang ada sekarang tidaklah berdiri sendiri. Ia terkait erat dengan berbagai pengalaman masa lalu yang kemudian dijadikan acuan untuk menata dan meningkatkan peranannya dalam perspektif ke depan.

Sedangkan makna dari peranan kekuatan sosial politik dalam pendidikan politik rakyat, pada dasarnya adalah upaya meningkatkan pemahaman warga masyarakat tentang sistem politik demokrasi Pancasila. Kemudian, makna dari peranan kekuatan sosial politik dalam pemilu, adalah meningkatkan pemahaman warga masyarakat tentang arti penting pemilu dalam rangka mewujudkan cita-cita sistem politik tersebut.

Itulah sebabnya, kekuatan sosial politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pendidikan politik rakyat dan pemilu. Peranannya menjadi lebih penting, karena melalui peranan ini antara lain dapat diukur sejauh mana keikutsertaan warga masyarakat itu dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tolok ukur yang kita anut, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

II

Kondisi obyektif kehidupan dan peranan kekuatan sosial politik pada masa sebelum lahirnya pemerintahan Orde Baru, menjadi saksi sejarah bahwa dengan sistem politik demokrasi liberal, maupun dengan sistem politik demokrasi terpimpin, ternyata tidak mampu untuk memberikan peranan yang diharapkan dari kekuatan sosial politik. Jika kekuatan sosial pada dasarnya merupakan perwujudan keikutsertaan warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa

Ir. Akbar Tanjung

dan bernegara dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia ini, maka kenyataan yang kita jumpai malahan sebaliknya.

Pada masa berlangsung praktek sistem politik demokrasi liberal misalnya (1950-1959) kita menyaksikan pertarungan sengit antar kekuatan-kekuatan sosial politik. Isu sentral dari pertarungan itu nampaknya berkisar sekitar soal bentuk negara, yang kemudian berakhir dengan menculnya berbagai pertikaian. Begitu pula halnya, tatkala secara verbal kita menyatakan kembali pada UUD 1945 pada 5 Juli 1959; yang kita jumpai justru adanya ancaman dan konflik ideologis terhadap ideologi bangsa dan negara kita Pancasila, yang selanjutnya bermuara pada pemberontakan G 30 S/PKI.

Sehingga jika bercermin pada kedua kurun sistem politik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua sistem tersebut tidak bisa menjawab realitas permasalahan yang dihadapi, serta harapan kita dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bangsa yang dibangun di atas berbagai ragam latar belakang, sosial, agama, budaya dan etnis, kita mengakui kenyataan obyektif ini sebagai suatu kebhinekaan. Akan tetapi keberhasilan kita memproklamasikan negara ini sebagai negara kesatuan, juga merupakan bukti bahwa di sini juga tumbuh suatu kekuatan keekaan, yang tercermin melalui keinginan kita untuk hidup bersatu dalam satu wadah negara kesatuan RI.

Itulah sebabnya, dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak bisa lepas dari akar kebhineka tunggalikaan itu.

Dan andaikata kedua sistem politik itu dapat kita petik sebagai pengalaman dan pelajaran sejarah di mana secara empirik kita menemukan berbagai konflik yang muncul dan tidak dapat segera diselesaikan lewat semangat musyawarah — mufakat yang kita punyai, maka hal itu tak lain dari konsekwensi logis saja dari kegagalan membangun suatu format politik yang relevan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

Kelahiran Orde Baru, sebenarnya jika dilihat dalam konteks di atas, tak lain merupakan suatu alternatif yang diharapkan mampu membangun kembali suatu kelembagaan politik yang sudah porak poranda akibat berbagai pertikaian kepentingan dan ideologi pada masa-masa sebelumnya.

Orde Baru, kemudian memilih dan bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Dengan pilihan dan tekad Orde Baru tersebut, maka berbagai perbedaan yang mungkin terjadi, tidak akan mengarah lagi pada pertikaian dan perbedaan yang menyangkut soal-soal ideologis. Persoalannya tinggal bagaimana kita mengaktualisasikan Pancasila yang telah kita tekadkan itu dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nyata.

Ini berarti pula bahwa Orde Baru, mengemban suatu misi yang luhur. Berangkat dari misi luhur itu, Orde Baru telah berhasil membangun kelembagaan politik, baik supra maupun infra struktur, serta berhasil pula menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lahirnya Undang-Undang No. 3 dan No. 8 tahun 1985, yang antara lain menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial-politik dan organisasi kemasyarakatan, selain memberikan legitimasi sekaligus merupakan bukti nyata dari keberhasilan pembangunan politik di Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru.

Dalam kaitan pengalaman masa lalu, di-

Digitized by Google

terimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik, dapat diartikan juga sebagai jaminan bagi semakin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan dalam kaitan perspektif ke depan, dengan keadaan yang demikian itu akan terciptalah suatu kondisi yang memungkinkan kita membangun secara bersama tanpa membedakan latar belakang masing-masing guna mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila.

III

Pendidikan politik pada dasarnya, merupakan suatu proses peningkatan pemahaman tentang kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang hendak dibangun. Dalam hal ini, sistem politik yang hendak kita bangun adalah sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi nasional kita, yaitu sistem politik demokrasi Pancasila. Melalui kegiatan pendidikan politik ini, kekuatan sosial politik diharapkan bisa berperan penuh meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran rakyat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab politiknya.

Lewat proses pendidikan politik dapat pula diciptakan suatu kondisi kehidupan politik yang lebih demokratis, kreatif, stabil dan dinamis.

Dengan kata lain, melalui proses pendidikan politik rakyat, kita bisa lebih meningkatkan kualitas pemahaman dan keikutsertaan masyarakat — dalam rangka mengamalkan Pancasila dalam pembangunan, serta mempersiapkan diri menuju tahap tinggal landas pada Pelita VI mendatang.

Melalui proses pendidikan politik rakyat, kita bisa lebih meningkatkan kualitas pemahaman dan keikutsertaan masyarakat — dalam rangka mengamalkan Pancasila dalam pembangunan, serta mempersiapkan diri menuju tahap tinggal landas pada Pelita VI mendatang.

IV

GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik yang sejak awal berdirinya 22 tahun yang lalu telah bertekad untuk berjuang menegakkan, memperkokoh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pendidikan politik ini.

Konsepsi GOLKAR tentang pendidikan politik, tidak lain diarahkan kepada peningkatan kesadaran anggotanya tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Itulah sebabnya, dalam pendidikan politik yang diselenggarakan GOLKAR lewat program kaderisasi, baik dalam kurikulumnya maupun dalam arahnya selalu mengutamakan materi yang berkaitan dengan pengembangan wawasan yaitu wawasan idiil, wawasan kebangsaan, dan setelah itu baru diberikan materi tentang wawasan keorganisasi GOLKAR itu sendiri.

Konsepsi GOLKAR tentang pendidikan politik, tidak lain diarahkan kepada peningkatan kesadaran anggotanya tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Itulah sebabnya, dalam pendidikan politik yang diselenggarakan GOLKAR lewat program kaderisasi, baik dalam kurikulumnya maupun dalam arahnya selalu mengutamakan materi yang berkaitan dengan pengembangan wawasan yaitu wawasan idiil, wawasan kebangsaan, dan setelah itu baru diberikan materi tentang wawasan keorganisasi GOLKAR itu sendiri.

Dengan peningkatan kualitas pemahamannya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka anggota tersebut dapat ditingkatkan kwalitasnya menjadi kader, yang tak lain adalah kader Pancasila, kader pembangunan, dan sekaligus kader organisasi.

Jadi, dapat dipastikan bahwa program pendidikan politik yang diselenggarakan GOLKAR selama ini, adalah program pendidikan yang bermakna penting bagi penumbuhan kesadaran politik dan pengetahuan rakyat yang pada gilirannya akan menjadi faktor pendorong bagi partisipasi rakyat.

Lebih jauh lagi program pendidikan politik GOLKAR tidak lain, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang program umum GOLKAR yang dikenal sebagai Tri Sukses GOLKAR, yaitu Sukses Konsolidasi, Sukses Pelita IV dan Sukses Pemilu 1987.

Sasaran yang hendak dicapai GOLKAR melalui program Tri Sukses ini, tak lain terciptanya kerangka landasan di berbagai bidang sesuai dengan amanat GBHN.

Sukses pertama, yaitu sukses konsolidasi meliputi konsolidasi idiil, konsolidasi wawasan dan konsolidasi organisasi. Konsolidasi idiil telah berlangsung sejak awal mula lahirnya GOLKAR dan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui Sidang Umum MPR tahun 1983, serta melalui pembaharuan terhadap Undang-Undang tentang Parpol dan GOLKAR dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, telah mempunyai saham yang amat besar dalam pemasyarakatan Pancasila di badan-badan Perwakilan Rakyat kita, serta memasyarakatkan P4 melalui pendidikan-pendidikan kader.

Dalam bidang konsolidasi wawasan, bahwa wawasan GOLKAR mengenai kepentingan nasional dan keterbukaan mempunyai dampak yang nasional, karena dewasa ini pada umumnya masyarakat politik di Indonesia sudah meyakini pendapat bahwa kekuatan sosial politik memang harus terbuka dan tidak lagi eksklusif. Bagi perkembangan politik di Indonesia, perkembangan ini sungguh menggembirakan, karena kita masih ingat masa lampau yang penuh gejolak, yang antara lain disebabkan oleh terkotak-kotaknya masyarakat kita menurut faham-faham politik yang lahir karena perbedaan ideologi, etnis, agama serta perbedaan asal usul, yang pada gilirannya pernah melahirkan pertikaian-pertikaian politik yang nyaris merobek-robek persatuan dan kesatuan bangsa.

Konsolidasi ketiga, adalah konsolidasi organisasi, khususnya dalam rangka meningkatkan kaderisasi. Hal ini merupakan bagian penting, dari tanggung jawab GOLKAR sebagai kekuatan sosial politik yang terbesar, tanggung jawab untuk mempersiapkan kader-kader kepemimpinan, agar jika saatnya tiba nanti mereka mampu dan matang memikul tanggung jawab menjadi pemimpin-pemimpin bangsanya yang setia dan teguh berpijak pada cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan masalah kaderisasi ini menjadi semakin penting artinya, karena kita makin mendekati perampungan proses alih generasi.

Dalam hubungan konsolidasi organisasi, GOLKAR menyadari sepenuhnya bahwa organisasi tidak pernah menjadi tujuan, tetapi organisasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Berhubung dengan itu, maka susunan organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dalam rangka pencapaian tujuan. Dan konsolidasi organisasi meliputi, konsolidasi kelembagaan, keanggota, dan kaderisasi.

Berdasarkan Keputusan MUNAS III GOLKAR 1983, maka sejak bulan Januari 1984 telah diadakan pendaftaran keanggotaan GOLKAR dan sampai sekarang hal itu masih berlangsung. Menurut catatan, anggota GOLKAR sudah mencapai 25 juta orang lebih, sedangkan kader GOLKAR baik Karakterdes maupun kader fungsional telah mencapai jumlah lebih 8 juta orang. Angka-angka itu, akan terus bertambah mengingat kegiatan pendaftaran anggota masih terus berlangsung hingga kini.

Sukses kedua, yaitu sukses Pelita IV. Sebagai amanat rakyat yang tertuang dalam GBHN 1983, antara lain ditegaskan bahwa dalam Pelita IV harus diusahakan tercipta-

Digitized by Google

nya kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang terus, untuk kemudian dimantapkan landasan tersebut melalui Pelita V. Sehingga dalam Pelita VI nanti bangsa Indonesia sudah benar-benar dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pelaksanaan Pelita IV, bukan hanya tugas pemerintah, tapi adalah menjadi tugas segenap rakyat Indonesia di bawah pimpinan Pemerintah. Dalam pelaksanaannya Pelita IV ini tidak boleh gagal, karena apabila gagal akan menimbulkan akibat-akibat yang sangat merugikan bangsa kita secara keseluruhan. Oleh sebab itu, harus dilaksanakan dengan jujur, bersungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab.

GOLKAR sebagai organisasi sosial politik yang terbesar dewasa ini, mempunyai peranan yang besar dalam merumuskan GBHN dan bahkan sebagian besar konsepsi pembangunan GOLKAR tertuang dalam GBHN. Oleh sebab itu GOLKAR berkewajiban untuk mensukseskan pelaksanaan Pelita IV, dengan cara,

(a). Menjamin adanya kesinambungan stabilitas politik, sehingga pemerintah dapat dengan tenang merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

(b). Mengerahkan anggota GOLKAR untuk turut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing.

(c). Mengadakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dana pembangunan benar-benar digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan pembangunan.

Sedangkan sukses ketiga, sebagai sukses terakhir GOLKAR dalam Tri Sukses ialah Sukses Pemilu 1987. Bagi GOLKAR, Pemilu adalah sebagai sarana demokrasi untuk membentuk kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dalam permusyawaratan/perwakilan sebagaimana digariskan dalam UUD 1945.

Kekuasaan yang lahir berdasarkan Pemilu, adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan digunakan sesuai dengan keinginan rakyat pula, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan/perwakilan. Hanya kekuasaan negara yang demikian akan benar-benar memancar ke bawah sebagai kewibawaan yang mampu memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan yang luhur.

Dalam mewujudkan tata kehidupan yang dijiwai semangat dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dengan tegas dan jelas tersurat dan tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945, Pemilu adalah suatu sarana demokrasi yang melembaga untuk memilih anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat (MPR, DPR, DPRD). Melalui wakil-wakil di MPR, rakyat menetapkan GBHN berdasarkan UUD 1945, sedangkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR dan DPRD, rakyat bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan.

Sehingga perlu pula diingatkan bahwa Pemilu tidaklah sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga perwakilan/permusyawaratan saja, dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan falsafah dan ideologi baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pemilu adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi atau menimbulkan hal-hal menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin tetap tegaknya Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, dalam menghadapi Pemilu yang akan datang, ada tiga faktor yang mendapat perhatian.

Pertama, permasalahan ideologi sudah tidak menjadi persoalan lagi, karena Pancasila sudah diterima sebagai satu-satu asas perjuangan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, adanya pemilih baru yang berusia muda. Terhadap pemilih baru ini perlu diadakan penanganan dan pendekatan yang tepat mengingat para pemilih baru ini mempunyai sikap yang lebih kritis dan mempunyai tingkat pendidikan yang rata-rata lebih baik daripada generasi sebelumnya. Sedangkan faktor ketiga, keberhasilan pembangunan nasional yang selama ini telah dilaksanakan oleh Orde Baru mengakibatkan perkembangan masyarakat semakin kompleks. Di dalamnya terjadi perubahan-perubahan tata nilai dan makin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan kepastian hukum, hak-hak asasi, keadilan, kesempatan kerja, pendidikan yang lebih tinggi, pemerataan dan lain-lain.

GOLKAR memandang setiap Pemilu merupakan tugas nasional yang penting dan bagian dari siklus kepemimpinan

GRESIK PORTLAND CEMENT INDONESIA

Lambang Semen Bermutu

Semen dengan daya rekat yang kuat menghasilkan beton yang kokoh

Pengalaman lebih dari seperempat abad di bidang industri semen, menjadikan Semen Gresik semakin mantap dalam memproduksi Portland Cement dengan mutu tinggi.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan pada saat ini dan mendatang, untuk menunjang kemajuan teknologi beton yang pesat, Semen Gresik disamping memproduksi semen type I juga memproduksi semen-semen type lain untuk pekerjaan bangunan-bangunan yang memerlukan persyaratan khusus.

Melalui sistem pengendalian mutu yang intensip oleh para ahli persemenan yang berpengalaman, P.T. Semen Gresik (Persero) saat ini telah memproduksi type-type semen berikut, yang mutunya memenuhi persyaratan Standar Industri Indonesia (SII 0013/1981), yaitu :

PORTLAND CEMENT TYPE I
Lebih dikenal sebagai semen abu-abu, dan dipakai untuk keperluan umum seperti : konstruksi bangunan yang tidak memerlukan persyaratan khusus.

PORTLAND CEMENT TYPE II
Digunakan untuk bangunan ditepi laut, irigasi, dam serta untuk pengecoran beton masa yang memerlukan ketahanan terhadap pengaruh sulfat dan panas hidrasi sedang/rendah

PORTLAND CEMENT TYPE III
Untuk pekerjaan betun yang memerlukan kekuatan tekan awal tinggi setelah pengecoran dilakukan.

PORTLAND CEMENT TYPE V
Dipakai dalam bangunan di lingkungan asam/tahan terhasp pengaruh sulfat, seperti : bangunan kolam pengolahan limbah industri kimia, bangunan di laut dna lain-lain

dan

PORTLAND POZZOLAN CEMENT (PPC)
Jenis semen khusus yang hanya diproduksi P.T. Semen Gresik (Persero) ini sesuai untuk pengecoran beton masa, dam, irigasi, bangunan di tepi laut an tanah rawa yang memelukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi rendah.

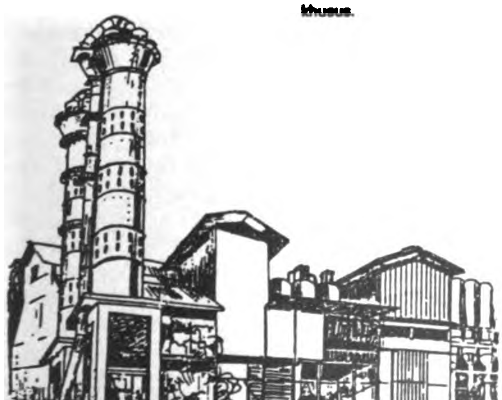

SEMEN GRESIK
mutu semen menjamin mutu bangunan

Digitized by Google

nasional lima tahunan dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Nasional Jangka Panjang. Itu pulalah sebabnya, guna menyukseskan Pemilu 1987 GOLKAR telah melakukan persiapan dengan berbagai kesungguhan. Karena, bagi GOLKAR pemilu tidak hanya berarti mendapat dukungan suara terbanyak dari pemilih, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan politik yang makin segar, mantap, dinamis, serta sesuai dengan semangat kekeluargaan yang dikandung Pancasila dan UUD 1945.

GOLKAR memandang setiap Pemilu merupakan tugas nasional yang penting dan bagian dari siklus kepemimpinan nasional lima tahunan dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Nasional Jangka Panjang. Itu pulalah sebabnya, guna menyukseskan Pemilu 1987 GOLKAR telah melakukan persiapan dengan berbagai kesungguhan. Karena, bagi GOLKAR pemilu tidak hanya berarti mendapat dukungan suara terbanyak dari pemilih, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan politik yang makin segar, mantap, dinamis, serta sesuai dengan semangat kekeluargaan yang dikandung Pancasila dan UUD 1945.

Bagi GOLKAR, pemilu 1987 yang akan datang barulah dapat dikatakan sukses, apabila hasilnya;

(a). Menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

(b). Meningkatkan dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan wawasan nusantara.

(c). Meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional secara bertahap dan terus menerus dalam rangka usaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan RI, dan

(d). Meningkatkan dan memelihara stabilitas nasional yang dinamis serta makin memantapkan kepemimpinan nasional di tangan Orde Baru sebagai syarat mutlak untuk berhasilnya pembangunan nasional untuk kepentingan rakyat banyak.

V

Dengan telah berhasilnya kita meletakkan kerangka landasan pembangunan di bidang politik, antara lain tercermin dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka hal itu bukan berarti bahwa masalah-masalah dalam pembangunan politik sudah selesai. Berbagai masalah yang erat kaitannya dengan pembangunan bidang politik ini masih memerlukan pemahaman kita secara bersama.

Pemahaman bersama itu, antara lain bagaimana upaya kita untuk lebih mendayagunakan organisasi kekuatan sosial politik agar lebih kuat, tanggap dan mandiri, serta lebih mampu menyalurkan aspirasi rakyat sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat itu sendiri. Selain itu, termasuk juga di dalamnya, kemampuan dari organisasi kekuatan sosial politik untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang diperkirakan akan muncul atas dasar kecenderungan-kecenderungan yang ada.

Pemahaman bersama itu, antara lain bagaimana upaya kita untuk lebih mendayagunakan organisasi kekuatan sosial politik agar lebih kuat, tanggap dan mandiri, serta lebih mampu menyalurkan aspirasi rakyat sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat itu sendiri. Selain itu, termasuk juga di dalamnya, kemampuan dari organisasi kekuatan sosial politik untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang diperkirakan akan muncul atas dasar kecenderungan-kecenderungan yang ada.

Sementara itu, sebagai bangsa yang tengah membangun dan melaksanakan modernisasi, timbul berbagai perubahan-perubahan dalam masyarakat, seperti misalnya semakin terorganisirnya kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai organisasi profesi serta berkembangnya berbagai lembaga swadaya masyarakat.

Sehubungan dengan berbagai macam perkembangan tersebut, maka kedudukan dan peranan organisasi sosial politik terasa semakin penting dalam kaitan sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat. Persoalannya sekarang adalah, bagaimana organisasi kekuatan sosial politik ini menumbuhkan dan mengembangkan dirinya sebagai suatu kekuatan yang lebih mandiri, tanggap, berakar, mampu mengantisipasi masa depan, serta mempunyai kapasitas yang besar dan kualitas yang tinggi guna menjawab berbagai permasalahan dan tantangan bangsa.□

KERTAS PRODUKSI BASUKI RACHMAT
MENJAMIN KEPUASAN KONSUMEN

MUTU BERTAHAN
HARGA MELAWAN

PT KERTAS BASUKI RACHMAT (PERSERO)

KANTOR PUSAT
JLN. JENDRAL BASUKI RACHMAT
TILP. 21021, 21022, 21023, 21024
TELEX : 31287 PKBR BW
BANYUWANGI

KANTOR PERWAKILAN
JLN. KEMAYORAN BARU NO. 47
TILP. 23801
TELEX : 31145 PKBR SB
SURABAYA

JLN. KALIBESAR TIMUR NO. 31
TILP. 673017
JAKARTA

Digitized by Google

Oleh: Soemantri Wirjahardja *)

Pestisida Alami Dari Tumbuhan Sebagai Alternatip Pengendalian Hama Tanaman Dan Gudang

Adalah suatu kenyataan yang sunguh membanggakan, bahwa Indonesia telah betul-betul dapat mencukupi kebutuhan beras sejak akhir PELITA III. Produksi beras pada tahun 1984 adalah 25,8 juta ton untuk sekitar 160 juta jiwa, yang berarti tidak kurang dari 440 gram per jiwa setiap harinya. Namun kita harus menyadari, bahwa produksi sebesar tersebut harus tetap dipertahankan, dan harus perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun sebanding dengan pertumbuhan penduduk Indonesia.

Suatu hukum ekologi yang tidak dapat kita hindari, semakin besar hasil yang kita inginkan, yang kita ambil dari suatu ekosistem, semakin besar pula subsidi energi yang harus kita berikan kepada ekosistem tersebut. Meskipun hukum termodinamika pertama menyatakan, bahwa materi tak dapat dibuat dan tak dapat dihancurkan, hukum termodinamika kedua menyebutkan, bahwa dalam suatu proses akan terjadi enthropi positip — dalam bentuk buangan — yang tidak mungkin kita ambil kembali. Satu-satunya energi (materi) yang diterima bumi adalah energi surya, itupun hanya satu persen dari seluruh energi surya, dan yang kemudian dibuang kembali ke atmosfer dalam bentuk gas hasil metabolisme manusia, hewan, tumbuhan dan jasad renik. Jadi pada hakekatnya energi di bumi adalah tetap.

Bertolak dari kenyataan tersebut, produksi bahan makan yang kita ambil dari suatu ekosistem di bumi, tak lain adalah hanya bentuk konversi energi ekosistem yang satu ke dalam ekosistem yang lain, dalam bentuk energi manusia dan mesin, pengairan, bibit unggul, pupuk dan pestisida. Adalah suatu kenyataan pula Indonesia telah menyediakan subsidi energi yang cukup dalam bentuk tenaga peneliti, pengairan dan pupuk guna menunjang swasembada pangan, berkat kerja keras selama Orde Baru. Tetapi dalam masalah pestisida, Indonesia masih tetap rawan, karena sebagian besar pestisida masih kita import. P.T. Kayaku Pestisida, suatu usaha patungan Petrokimia Gresik hanya dapat menyediakan: diazinon 800 ton/tahun, Isoprocarb/MIPC 150 ton/tahun, BPMC 400 ton/tahun dan Penthoate 650 ton per tahun.

Kebutuhan pestisida di Indonesia

Di Indonesia belum terkumpul data berapa besar subsidi energi guna menunjang keberhasilan swasembada pangan, yang harus kita pertahankan. Suatu penelitian komparatip di Amerika Serikat, Jepang dan India menunjukkan, bahwa untuk meningkatkan hasil pangan dua kali lipat, diperlukan penggunaan sepuluh kali lipat subsidi energi dalam bentuk masing-masing tenaga mekanisasi, pupuk dan pestisida. Dalam pidato Bapak Presiden Suharto di sidang ke 23 FAO, Roma pada tanggal 14 Nopember 1985 yang lalu disinggung oleh beliau bahwa produksi beras kita sekarang adalah dua kali lipat dibanding produksi beras sepuluh tahun lampau, dan penggunaan pestisida pada tahun 1969 adalah 1.000 ton, dan pada tahun 1984 adalah 14.000 ton. Hal ini juga terbukti untuk menaikkan produksi beras dua kali lipat, diperlukan pestisida 14 kali lipat.

Masalah pestisida

Selain efektivitas pestisida sebagai pengendali hama tanaman dan gudang, terdapat beberapa masalah yang perlu diketahui, yang ditimbulkan oleh penggunaan pestisida, karena pestisida adalah racun. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatip pestisida.

Pengamanan yang ketat pabrik pestisida. Pada tanggal 3 Desember 1984, terjadi kebocoran tangki penyimpanan bahan pestisida (methyl isocyanate) di Bhopal, negara bagian tengah India (Madya Pradesh), India, yang menyebabkan sekitar 2.500 orang mati, korban yang masih hidup mengalami kebutaan, keguguran kandungan, impotensi, ketidak teraturan haid, menurunnya daya konsentrasi, dan menyebabkan pula cacad yang diwariskan.

Masalah pencemaran lingkungan. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyatakan bahwa seluruh muka bumi telah tercemari oleh DDT, dan menurut laporan Lembaga Ekologi UNPAD (Universitas Pajajaran, Bandung) seluruh perairan Indonesia telah mengandung sisa pestisida, meskipun masih di bawah ambang kesehatan. Manusia dan hewan tidak ada yang aman terhadap pengaruh pestisida, meskipun tidak sampai menimbulkan keracunan. Di Indonesia tidak ada data yang terkumpul, kematian manusia dan hewan karena pestisida. Tetapi di Propinsi Neuva Ecija, Philippina tercatat kematian karena pestisida rata-rata 30-40 orang setiap tahun antara tahun 1973-1976.

Kekebalan (resistensi) hama dan kematian musuh alaminya. Banyak contoh tentang kekebalan hama terhadap suatu jenis pestisida yang digunakan secara terus menerus. Sebagai contoh, hama wereng coklat *(Nilaparvata lugens Stal)* dan hama wereng hijau *(Neplatellix cinctipes),* hama padi yang cukup dikenal, telah menjdi kebal terhadap pestisida seperti DDT, BHC, Diazinon, Carbofuran dan sebagainya, setelah penggunaannya secara terus menerus sepanjang 15 tahun.

Semua organisme selalu mempunyai musuh-musuh alami. Selama kesetimbangan populasi hama dengan musuh alaminya terjaga, populasi masing-masing akan tetap. Menurut laporan IRRI (International Rice Research Institute) Philippina terdapat sejumlah musuh alami hama wereng, a.l. 17 jenis parasit, lebih dari 20 jenis predator (pemakan serangga tsb.), 2 jenis jamur dan 1 jenis nematoda. Sejak digunakannya pestisida untuk mengendalikan hama, terjadi ledakan hama wereng, dan pada tahun 1976-1977, terjadi kerusakan padi di Jawa sekitar 347.000 ha dan kerugian ditaksir sekitar US $ 100 juta.

Contoh masalah kerugian karena penggunaan pestisida cukup terdokumentasikan dalam kepustakaan budidaya kapas di luar negeri. Dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan penggunaan pestisida nampaknya merupakan "biaya terselubung" (resurgence) yang mengurangi nilai efektifitas pestisida.

Bahan penghambat nafsu makan dan penghambat pertumbuhan serangga

Mulai tahun 1970, bahan penghambat nafsu makan dan pertumbuhan serangga mulai menarik perhatian para peneliti. Cukup banyak bukti, bahwa tumbuhan adalah gudang besar yang memproduksi

Digitized by Google

dan menggunakan zat antifeedant guna melindungi dirinya dari serangan hama dan penyakit. Jika bahan-bahan tersebut diisolasi dapat digunakan mengendalikan serangan hama tanaman, dan musuh alami hama tidak dimusnahkan, selama musuh alami ini tidak juga memakan antifeedant. Selain hal tersebut, terbukti cukup aman bagi binatang menyusui (mammalia) dan manusia. Suatu hal yang penting, dengan membudidayakan tumbuhan yang mengandung antifeedant tersebut, akan selalu dapat diperoleh kembali bahan aktif tersebut tidak seperti bahan kimia yang berasal bahan galian.

Di Indonesia cukup banyak jenis tumbuhan yang telah diteliti ahli-ahli di luar Indonesia yang berpotensi sebagai antifeedant dan penghambat pertumbuhan serangga. Salah satu contoh adalah *azadirachtin*, yang diberitakan dalam *Kompas*, 17 Nopember 1985 (halaman sebaiknya anda tahu). Bahan ini diisolasi dari pohon *Azadirachta indica* A. Juss. dan pohon sekerabatnya *Melia azedirachta* L. yang banyak tumbuh di Indonesia. Selain azadirachtin, masih terdapat pada pohon tersebut bahan triterpenoida lain yang juga aktif, seperti salannin, meliantriol dan masih banyak lagi turunannya. Menurut daftar dalam pustaka, oleh penulis dapat diidentifikasi lebih dari 100 jenis tumbuhan yang terdapat di Indonesia, yang berpotensi sebagai antifeedant yang kebanyakan justru adalah hama gudang, yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk mengamankan hasil beras kita. Tumbuhan tersebut telah banyak diteliti oleh peneliti Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Inggris, Perancis, Togo Afrika, Nigeria, dan sepanjang pengetahuan penulis, Indonesia sendiri belum banyak menelitinya. Di antaranya yang potensial sebagai antifeedant dapat disebut di sini: biji *Srikaya (Annona squamosa* L.*), lombok (Capsicum* spp.*), daun kayu putih (Eucalyptus* spp.*) racunan (Euphorbia pulcherrima Wildd. ex Klotzsch) petcoli (Pogostemon heynenianus* Bth.) yang banyak terdapat di sekitar kita.

Peranan ahli kimia dan lingkungan sangat diharapkan

Peranan ahli-ahli taksonomi tumbuhan, taksonomi dan fisiologi serangga, ahli kimia dan ahli lingkungan sangat diharapkan bersama-sama untuk menggali potensi sumber alam Indonesia dan memanfaatkannya.□

*)Kepala Laboratorium Proses Industri Kimia. Akademi Teknologi Industri AKPRIND, Jl. I Dewa Nyoman Oka 32, Kotabaru Yogyakarta.

P.T. DHARMA NIAGA (Ltd.)

JL. ABDUL MUIS NO. 6 - 8 - 10, JAKARTA - P.O. BOX 2028

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA. SEGENAP WARGA/KELUARGA BESAR P.T. DHARMA NIAGA SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KANTOR CABANG:

MEDAN-PADANG-PEKANBARU-PALEMBANG-TELUKBETUNG-BENGKULU-BANDUNG-CIREBON-SEMARANG-YOGYAKARTA-SURABAYA-MALANG-JEMBER-DENPASAR-CAKRANEGARA-KUPANG-BALIKPAPAN-SAMARINDA-PONTIANAK-BANJARMASIN-UJUNG PANDANG-KENDARI-MANADO-AMBON-UNIT COLDSTORAGE-DHARMASTEEL.

Digitized by Google

Maria Sugiharto

VALENTINE'S DAY

Budaya dari mana?

Tidak jelas darimana asal usulnya dan bagaimana caranya, ketika tiba-tiba hari dan tanggal 14 Februari jadi memiliki arti penting bagi sebagian penduduk Jakarta, lebih-lebih para remajanya.

Yang jelas, hari tersebut dipergunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan seperti toko-toko buku penjual kartu Valentine, pemilik hotel berbintang, pengusaha restoran.

Beberapa hotel berbintang di Jakarta memasang tarif dari 30.000 per orang, sampai 55.000. Dan karcis-karcis itu terjual habis oleh kebanyakan para remaja SLTP, SLTA, juga mahasiswa dan orang tua. Tidak hanya di hotel-hotel. Di restoran-restoran yang memiliki klas, juga menyelenggarakan hari Valentine dengan musik yang berdetam-detam, serta lampu yang menor, dengan di bawahnya para remaja berdansa sampai dinihari. Bagi mereka yang "kurang" mampu berdinner a la Valentine di hotel-hotel atau di restoran-restoran, telah menghabiskan uang jajannya untuk kartu-kartu Valentine impor yang bertuliskan kata-kata cinta kasih, bahkan cinta kasih di dalam gaya yang komik, untuk saling ditukar dan dikirim kepada sahabat-sahabatnya. Kartu-kartu tersebut yang harganya dimulai dari 2.000 rupiah sampai 5.000 bahkan ada yang di atas 10.000, laris terjual.

Apa itu Valentine's Day?

Secara pribadi saya mulai mengenal Valentine's Day kira-kira hampir dua dekade yang lalu, ketika saya mengunjungi negerinya Corry Aquino. Di negeri ini yang notabene agama Katholik dominan, setiap tanggal 14 Februari masyarakat merayakan Hari Valentine dengan saling tukar kartu atau merayakan dengan meriah di hotel-hotel atau restoran. Ketika saya tanyakan apakah itu Hari Valentine, dikatakan bahwa ini adalah hari penting bagi kita semua, bahkan juga bagi yang tidak beragama Katholik, karena hari itu merayakan sebuah manifestasi cinta kasih antar sesama, lebih-lebih bagi mereka yang sedang bercinta. Valentine atau Valentinus adalah nama seorang yang disucikan (Santo) pada masa *martyrdom* (kesyahidan atau mati syuhada) di Roma pada tahun 269. Dia, Valentinus, adalah seorang pendeta Katolik di Roma dibunuh sebagai martir ketika negeri ini di bawah pemerintahan Kaisar Claudius II (268-270). Dia meninggal sebagai syuhada tepat pada tanggal 14 Februari. Dan hari Valentine yang selalu dirayakan pada tanggal 14 Februari, dimulai pada abat ke-7. Tetapi, menjelang abad ke-14, makna religiusnya dibayangi oleh makna non religius serta tradisi yang dihubung-hubungkan dengan hari tersebut. Diterimanya pendapat bersama santo Valentinus sebagai pelindung bagi mereka yang saling mencintai merupakan hal yang kebetulan.

Dari banyak teori yang masuk diakal adalah kepercayaan bangsa Eropa pada abad pertengahan, bahwa burung mulai kawin tepat pada tanggal 14 Februari di musim semi. Hal tersebut memberikan semacam sugesti bahwa pria dan wanita dapat memilih jodohnya serta mengadakan tukar menukar hadiah pada hari tersebut.

Kemudian, kata *Valentine* diartikan sebagai kedua-duanya, ya orangnya, serta hadiahnya. Setelah sistim pos mulai ditemukan, praktek-praktek saling kirim mengirim surat dengan pesan-pesan yang dibuat sendiri mulai dikembangkan. Pesan-pesan pribadi itu berbentuk syair atau tamsil dalam gaya kata yang halus serta romantis. Di belakang hari, syair-syair itu berkembang menjadi syair-syair yang komik serta kata-kata mutiara baik yang indah maupun yang humor, dan kadang-kadang juga cenderung kasar. Di Amerika Serikat sebelum Perang Dunia I jutaan kartu Valentine dicetak dan laris. Kini, hari-hari tersebut di AS dijadikan hari untuk aksi sosial serta semacamnya.

Naik"klas"baru

Informasi darimana, sehingga para remaja tiba-tiba saja demam merayakan apa yang dinamakan Hari Valentine, dan informasi apa? Selama ini mass media TV yang paling 'galak' sifatnya, tidak pernah menayangkan hal tersebut. Pada hal media TV adalah media yang paling cepat sampai kepada khalayak.

Seorang ahli psikologi sosial mengkomentari hal ini dengan mengatakan bahwa ini merupakan suatu gejala aneh. Menurut pengamatan, mereka yang berduyun-duyun ke toko-toko penjual kartu Valentine, adalah dari klas menengah ke bawah, ditinjau dari cara berpakaiannya. Bisa dipastikan bahwa mereka ini telah menyisakan uang jajannya yang tidak banyak, untuk sekedar dapat menempatkan dirinya kepada suatu posisi yang baru. Berpartisipasi dengan suatu khalayak yang memiliki satu "klas" tersendiri, dan dianggap lebih tinggi. Ini adalah suatu gejala sosial. Bagi mereka, remaja menengah kebawah, memandang sesama-sama remaja dari kalangan yang lebih "tinggi", memiliki suatu ciri kekhasannya, ialah berpaling kepada segala sesuatu yang berbau *asing*. Dan Valentine's Day yang menjadi perayaan tahunan di Eropa dan Amerika dan beberapa negara Asia yang "merasa" erat dengan negara-negara Barat seperti Filipina, kini mau dijadikan oleh para remaja untuk menjadi pijakan naik peringkat atau *naik klas*.

Dan pendapat bahwa apa-apa yang berbau *"asing"* adalah *milik klas* sudah menjadi cara pemikiran bahkan budaya berfikir. Contoh-contoh mengenai hal ini banyak sekali. Bercelana *jeans* atau sebangsanya, merasa berada di suatu klas yang lebih tinggi, karena jeans tersebut merupakan barang impor. Padahal itu tidak benar, karena jeans yang datang ke Indonesia sebagai barang impor tersebut, dibuat di Cijantung. Khusus bagi para remaja, menyenangi lagu-lagu jazz dan mengerti disko (discotheque) seperti sesuatu yang mengangkat kelas kehidupan mereka. "Tetapi gejala ini masih positif", demikian tambah ahli psikologi terkenal mengenai kasus tersebut, "karena remaja masih mencari *Panutan baru*". Mengapa panutan harus berbau asing?

Masalahnya bagaimana pengarahan yang baik yang harus diberikan kepada para remaja tersebut. Seorang kepala sekolah dari sebuah SLTP dan SLTA swasta di Jakarta Pusat, ketika saya tanyakan tentang hal ini menjawab bahwa dia mendengar satu pengorganisasian di luar sekolah tentang hari Valentine ini di sebuah hotel berbintang. Dia tidak berhak melakukan larangan, karena pengorganisasian ini diadakan ekstra sekolah. Meskipun demikian dia memberikan semacam pengarahan yang ditujukan kepada mereka (para murid) yang ingin ber Valentine's Night, diingatkan masih banyak orang lain yang kelaparan dan bencana-bencana banjir yang menimpa serta menyengsarakan sebagian masyarakat, sementara itu pada hari Sabtu malam mereka mengadakan hura-hura. Dan, hasilnya menurut penelitiannya sangat positif, karena beberapa orang tua dari anak-anak yang ingin ber-Valentine sempat berdialoog dengan Kepala Sekolah, dan agak keberatan mereka (orang tua) itu terhadap rencana mereka itu, serta harapan para orang tua bahwa Kepala Sekolah yang bisa menjadi *Panutan* para murid, dapat berbuat sesuatu sehingga demikianlah hasilnya himbauan kepala se-

Digitized by Google

kolah terhadap para muridnya.

Gejala aneh mencari cara baru untuk naik peringkat atau naik klas, nampak dengan adanya para remaja yang melakukan tindakan homoseksual. Bagi mereka itu, homoseksual merupakan simbol dari kalangan atas, sehingga merekapun ingin menirunya. Meskipun belum ada riset yang mendalam, tetapi sinyalemen ini diakui oleh beberapa orang ahli, dan mereka (para ahli) itu masih akan lebih mengamati secara lebih mendalam mengenai gejala tersebut.

Berbagai Pendapat

Seorang pejabat tinggi negara yang tugasnya berhubungan dengan pendidikan menjawab ketika saya ajukan pertanyaan mengenai gejala aneh Valentine's Day ini. "Wah, saya sendiri kok kurang jeli ya. Benar sekali kata anda ini merupakan gejala aneh", demikian komentar pertama. Dikatakannya pula bahwa ketika dia menempuh sekolah tinggi di sebuah negeri Barat, dia mengalami pula hari-hari semacam itu. "Memang menyenangkan, tetapi yang penting kita tahu motivasinya, dan jangan verpolitiseerd" (dipolitikkan), demikian jawabnya. Hampir sama pendapatnya dengan pendapat beberapa ahli yang terdahulu, yang penting ialah bagaimana pengarahannya, karena bila hal tersebut merupakan panutan para remaja, hendaknya kita arahkan ke arah yang positif, dan pelan-pelan kita masuki unsur-unsur yang tidak berbau impor.

Beberapa remaja yang sempat saya wawancarai mengenai hari Valentine, dan notabene remaja ini menggebu-gebu ingin ikut merayakan hari tersebut dengan teman-teman remajanya yang lain di sebuah hotel berbintang mengatakan bahwa sepanjang yang mereka ketahui Valentine's Day adalah hari cinta kasih. "Kan kita harus memperlihatkan cinta kasih terhadap sesama", jawabnya polos. Tetapi darimana asal usulnya, dan bagaimana terjadinya melanda di negeri kita, mereka tidak perduli, bahkan tidak tahu menahu. "Yah, kita tahunya dari teman-teman saja, kalau hari itu pantas dirayakan karena itu adalah hari kasih sayang". Ketika saya desak bahwa peringatan cinta kasih tersebut dapat lebih dimanifestasikan dengan aktivitas sosial yang juga merupakan gerakan cinta kasih, mereka terperangah, karena tidak pernah memikirkan sejauh itu. Yang mereka ketahui dan harapkan ialah bahwa mereka, dengan membayar sejumlah harga tiket yang tidak sedikit bisa beramai-ramai dengan teman-temannya berdansa disko. Cinta kasih?

Pengelola Hotel berbintang yang menyelenggarakan perayaan Valentine, agak keberatan ketika saya tanyai tentang maksud dan tujuan menyelenggarakan pesta hari Sabtu tanggal 14 Februari tersebut. Tetapi setelah saya tanyakan apakah itu merupakan salah satu promosi hotelnya, dia tidak mengingkari. "Resiko?" demikian pertanyaan saya seandainya nanti ada resiko remaja bermabuk-mabukan, serta termasuki remaja yang nakal dengan rombongan pengisap ganja, bila yang penting bagi hotel tersebut adalah lakunya tiket dengan harga aduhai. "Oh kita sediakan Satpam yang cukup kuat, bahkan pada hari tersebut kami melebihi petugas satpam", jawabnya komersial. Siapa dapat mendeteksi siapa pengisap ganja atau bukan, bila pesta itu diselenggarakan sampai dinihari tanpa pengamatan orang tua?

Beberapa remaja dari kalangan menengah ke bawah yang sibuk membeli kartu Valentine untuk saling dikirimkan kepada pacar atau kawan dekatnya, memberikan komentar bahwa apa yang mereka lakukan adalah merupakan tindakan meniru-niru saja, karena apa salahnya memberikan tanda cinta kasih kepada mereka yang mereka simpati. "Harga kartu yang aduhai, karena impor?" tanya saya, yang dijawab bahwa mereka untuk hal tersebut kalau perlu menyisihkan sebagian uang jajannya dari beberapa waktu sebelumnya. Suatu pengorbanan yang dilakukan oleh mereka yang secara ekonomis pas-pasan, adalah suatu hal yang perlu diselidiki mengapa. Satu kesimpulan kecil yang saya dapat ialah bahwa dengan cara-cara begitu yang dilakukan oleh remaja menengah sampai bawah itu, ialah di samping ada gejala ingin naik kelas, adalah mencari suatu bentuk tersendiri dari suatu *rasa aman* karena memiliki teman akrab atau mendapatkan simpati dari teman lain. Padahal kartu-kartu yang bertuliskan bahasa Inggeris (karena impor) itu, tidak seluruhnya mereka ketahui artinya.

Komersial dan Sosial

Sebelum tanggal 14 Februari, pedagang jeli telah memanfaatkan kesempatan dengan penawaran komoditinya, komputer. Dalam rangka hari Valentine mereka tawarkan harga komputer yang jauh lebih murah dengan alasan barangkali orang akan memberi kado kepada teman atau pacarnya atau relasinya sebuah komputer di dalam hari yang baik itu. Konon gaetan ini cukup berhasil.

Bila di Indonesia ramainya hari Valentine baru-baru saja, di Jepang hari tersebut telah dirayakan semenjak 30 tahun yang lalu. Pada peringatan tahun ini tercatat jumlah sekitar 40.000 milyar yen (sekitar 450 milyar rupiah) dibelanjakan oleh remaja dan wanita Jepang, terutama untuk membeli coklat. Di Amerika Serikat dan Eropa Barat hari itu dirayakan besar-besaran di hotel-hotel berbintang, lebih-lebih di kota-kota besar seperti New York. Dokter-dokter di Kanada cenderung berbuat sosial pada hari tersebut dengan memberikan pelayanan murah bagi kaum miskin. Di Bangkok, oleh tokoh program KB hari tersebut ditandai dengan operasi vasektomi gratis bagi para suami sebagai *"bukti kasih sayang kepada isteri mereka".*

Dan kata-kata pesan di dalam kartu Valentine yang menjurus kepada suatu ugal-ugal antar remaja berbunyi: Valentine's Day is always be special day for everyone; I am going to keep saying that until I can do it without giggling; Happy Valentine's Day, Stud. maksudnya: Hari Valentine selalu merupakan hari yang khusus untuk siapa saja. Akan selalu kukatakan bahwa sampai aku bisa mengerjakannya tanpa cekikikan. Selamat Hari Valentine. □

Digitized by Google

Digitized by Google

BINTARO JAYA

LANGKAH AWAL MENUJU KOTA SATELIT BARU

BINTARO JAYA ...
Dibangun dalam rencana Kota Satelit

Tengoklah Kebayoran Baru 20 tahun yang lampau, Ia merupakan kota satelit dari Jakarta.

Dengan luas 1000 Ha, Bintaro Jaya akan menjadi tempat permukiman paling luas dan paling lengkap dikawasan Ibu Kota Jakarta Raya.
Ia akan menghubungkan Jakarta dengan pusat-pusat industri baru seperti: Serpong dan Tangerang dengan jalan raya dan kereta rel listrik (KRL) yang melintas melalui Bintaro Jaya.

Fasilitas yang akan dibangun pun paling lengkap. Bukan sekedar sebuah Super-market, Sekolah Dasar atau PUSKESMAS.

Tetapi seperti Kebayoran Baru sekarang. Bintaro Jaya akan membangun kompleks pusat perbelanjaan, sekolah-sekolah, rumah sakit, hotel-hotel, tempat rekreasi, olahraga dan fasilitas lainnya seperti layaknya sebuah kota besar.

Lebih dari itu, Bintaro Jaya dibangun dalam lingkup rencana tata kota modern, yang memperhatikan segala aspek sosial, budaya dan lingkungan dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang ini.

Bintaro Jaya ... Sebuah lingkungan segar dan nyaman. Tempat permukiman paling ideal, tidak hanya bagi Anda sekarang tapi juga bagi keturunan Anda di masa depan.

BINTARO JAYA ... Langkah awal menuju Kota Satelit Baru

Daftar harga rumah :

TIPE	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	HARGA
Pipit II	90 (6x15) m2	81,5 m2	Rp. 28.510.000,-
Parkit	120 (8x15) m2	87,5 m2	Rp. 34.860.000,-
Punai	135 (9x15) m2	108 m2	Rp. 40.400.000,-
Camar	180 (9x20) m2	109 m2	Rp. 48.360.000,-
Perkutut	180 (9x20) m2	120 m2	Rp. 50.310.000,-
Pelikan I	250 (10x25) m2	122 m2	Rp. 58.875.000,-
Pelikan II	250 (10x25) m2	155 m2	Rp. 65.530.000,-

Dapat diangsur melalui KPR PAPAN SEJAHTERA selama 5-15 tahun dan melalui KPR BANK DUTA selama 2-7 tahun

hidup nyaman di alam segar
BINTARO JAYA

Developer Anggota REI No. 1

P.T. PEMBANGUNAN JAYA

GEDUNG JAYA Lantai 11. Jl. M.H. Thamrin 12. Telp. 323203, 323554
KANTOR TAMAN BINTARO JAYA. Gedung A. Lantai 2. Jl. Bintaro Raya. Jakarta 12330. Telp. 736898. 737674 ext.: 244, 245, 246

Digitized by Google

No. 38 11 April 1987

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

UNIV. OF MICH.
JAN 10 1990
Current Serials

GOLKAR, KEMENANGAN STRATEGIS

''Peningkatan Mutu Kehidupan Mengharuskan Kita Untuk Terus Menerus Melakukan Pembaharuan Mental''

0216 — 2571
Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat G

Digitized by Google

BINTARO JAYA

LANGKAH AWAL MENUJU KOTA SATELIT BARU

BINTARO JAYA ...
Dibangun dalam rencana Kota Satelit

Tengoklah Kebayoran Baru 20 tahun yang lampau, Ia merupakan kota satelit dari Jakarta.

Dengan luas 1000 Ha, Bintaro Jaya akan menjadi tempat permukiman paling luas dan paling lengkap dikawasan Ibu Kota Jakarta Raya.
Ia akan menghubungkan Jakarta dengan pusat-pusat industri baru seperti: Serpong dan Tangerang dengan jalan raya dan kereta rel listrik (KRL) yang melintas melalui Bintaro Jaya.

Fasilitas yang akan dibangun pun paling lengkap. Bukan sekedar sebuah Super-market, Sekolah Dasar atau PUSKESMAS.

Tetapi seperti Kebayoran Baru sekarang. Bintaro Jaya akan membangun kompleks pusat perbelanjaan, sekolah-sekolah, rumah sakit, hotel-hotel, tempat rekreasi, olahraga dan fasilitas lainnya seperti layaknya sebuah kota besar.

Lebih dari itu, Bintaro Jaya dibangun dalam lingkup rencana tata kota modern, yang memperhatikan segala aspek sosial, budaya dan lingkungan dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang ini.

Bintaro Jaya ... Sebuah lingkungan segar dan nyaman. Tempat permukiman paling ideal, tidak hanya bagi Anda sekarang tapi juga bagi keturunan Anda di masa depan.

BINTARO JAYA ... Langkah awal menuju Kota Satelit Baru

Daftar harga rumah :

TIPE	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	HARGA
Pipit II	90 (6x15) m2	81,5 m2	Rp. 28.510.000,-
Parkit	120 (8x15) m2	87,5 m2	Rp. 34.860.000,-
Punai	135 (9x15) m2	108 m2	Rp. 40.400.000,-
Camar	180 (9x20) m2	109 m2	Rp. 48.360.000,-
Perkutut	180 (9x20) m2	120 m2	Rp. 50.310.000,-
Pelikan I	250 (10x25) m2	122 m2	Rp. 58.875.000,-
Pelikan II	250 (10x25) m2	155 m2	Rp. 65.530.000,-

Dapat diangsur melalui KPR PAPAN SEJAHTERA selama 5-15 tahun dan melalui KPR BANK DUTA selama 2-7 tahun

hidup nyaman di alam segar
BINTARO JAYA

Developer Anggota REI No. 1

P.T. PEMBANGUNAN JAYA

GEDUNG JAYA Lantai 11, Jl. M.H. Thamrin 12. Telp. 323203, 323554
KANTOR TAMAN BINTARO JAYA, Gedung A, Lantai 2, Jl. Bintaro Raya. Jakarta 12330. Telp. 736898, 737674 ext.: 244, 245, 246

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/
Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli.
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Ariono Poernomo.
Subandrio.
Djonharro.
Rum Aly.
Ibnu Sawamo.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noerijathy.
Robert Puang Sunur.
Issidarto BA.
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO.: 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981.
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi peherbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI

Terhormat dan Elegan

FOKUS

Pembangunan politik hadapi problematik yang kompleks, wawancara khusus dengan Mempera Cosmas Batubara; Tercapai dengan upaya berkesinambungan.

LAPORAN UTAMA

Golkar, Kemenangan Strategis
Golkar memperjuangkan kemenangan untuk ke-4 kalinya, melalui pemilu yang jujur dan adil.

NASIONAL

Disiplin nasional melalui pendidikan politik; Kehidupan beragama memperoleh keleluasaan untuk berkembang; Abdurachman Wachid ceramah di Golkar; dan sejumlah peristiwa nasional lainnya.

ORGANISASI

Laporan-laporan tentang kiprah kampanye Golkar di seluruh penjuru tanah air.

KOMENTAR

Anti monopoli; Polonia; Lembaga Pemasyarakatan.

SPEKTRUM:

Manusia dan Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja

SENI BUDAYA

Musik jazz. yang bagaimana?

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

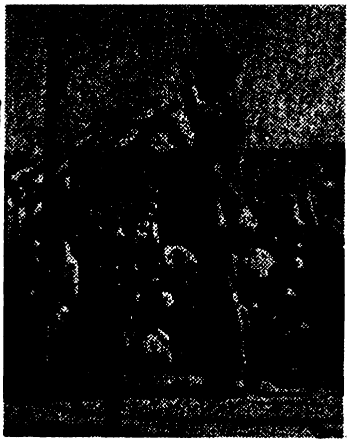

AA OKA MAHENDRA

Digitized by Google

Terhormat Dan Elegan

Dalam suatu pertemuan di sela-sela hari kampanye, seorang pemimpin suratkabar terkemuka di ibukota berkata: Bahwa Golkar akan menang dalam Pemilihan Umum 1987 ini, tak perlu disangsikan lagi. Dengan demikian, tak perlu dipermasalahkan lagi. Yang jadi persoalan, hanyalah bagaimana agar kemenangan itu dicapai dalam bentuk terhormat.

Agaknya, kebanyakan orang akan sependapat bahwa kemenangan Golkar bukan lagi sekedar suatu hal yang metaforis atau sekedar pengandaian. Kemenangan itu, memang akan tercapai, sebagaimana kemenangan serupa telah dicapai dari pemilu ke pemilu di masa Orde Baru ini.

Akan tetapi, adalah sungguh menarik, bagaimana Ketua Umum Golkar menanggapi pernyataan tentang kepastian kemenangan Golkar itu. Ketua Umum sepakat tentang keharusan pencapaian kemenangan itu secara terhormat dan elegan. Tapi Ketua Umum Golkar berbeda sikap dalam hal lainnya. Pimpinan organisasi politik yang kini memiliki tak kurang dari 12,5 juta anggota dan 12,5 juta calon anggota ini, mengutarakan tak pernah punya pretensi menyatakan Golkar pasti menang. Ketua Umum membatasi diri dengan hanya mengatakan Golkar memperjuangkan target memperoleh 70 persen suara pemilih melalui pelaksanaan pemilu tanggal 23 April 1987.

Bila dikaitkan dengan angka-angka hasil konsolidasi organisasi selama 4 tahun terakhir ini, pernyataan Ketua Umum Golkar ini akan dianggap agak merendah untuk tidak dikatakan terlalu merendah. Tapi bila dinilai dari sudut pikir yang demokratis, dihubungkan pula dengan asas langsung-umum-bebas-rahasia yang akan diterapkan dalam pemilihan umum itu, memang adalah kurang patut untuk mengklaim angka suara sebelum pemungutan suara itu sendiri berlangsung. Mengklaim angka kemenangan adalah satu hal dan mentargetkan angka kemenangan adalah hal lain yang sangat berbeda. Yang pertama adalah tidak wajar karena spekulatif dan dapat menjerumuskan, sedang yang kedua adalah hal yang amat wajar dan bermakna ajakan untuk bekerja keras dan memperjuangan apa yang diinginkan.

Tapi terlepas dari itu, keyakinan mereka yang bertindak sebagai pengamat bahwa Golkar akan memenangkan kembali perolehan suara melalui Pemilu Orde Baru yang ke-4 ini, bagaimanapun mempunyai dasar-dasar yang objektif. Golkar memang memiliki persyaratan-persyaratan melebihi OPP lainnya dalam segala hal, sehingga mempunyai harapan dan mencipta peluang lebih besar. Dalam konteks ini, cetusan tokoh pers tadi di satu pihak dan pernyataan Ketua Umum Golkar pada pihak lain, lalu mempunyai titik temu. Yang satu mewakili harapan rakyat banyak agar Golkar menang secara terhormat, dan yang satunya lagi mewakili tekad organisasi politik yang terbesar saat ini untuk mencapai target kemenangannya secara terhormat.

Bila kita jeli membaca hasrat dan dambaan mayoritas rakyat kita — yang telah merdeka lebih dari 41 tahun lamanya, dengan beberapa pengalaman traumatis di sana sini — sebenarnya mudah disimpulkan bahwa yang dikehendaki adalah suatu kehidupan politik yang bercakrawala cerah dan damai tanpa kehilangan aspek-aspek dinamis. Dan kehidupan politik yang bercorak positif seperti itu diharapkan berkemampuan menyodorkan suatu masa depan yang lebih berpengharapan dalam segala sektor kehidupan.

Alur hasrat dan dambaan akan kehidupan politik bercorak positif itu, sebenarnya dapat tertampung dan terpenuhi dengan amat baiknya dalam sistim dan tata cara berpolitik yang disodorkan oleh perangkat undang-undang bidang politik yang kita miliki saat ini. Ketentuan satu asas — yakni asas Pancasila — misalnya akan mendorong pola kompetisi program. Lalu ketentuan sistim keanggotaan perorangan dan sifat terbuka semua kekuatan politik, semestinya akan mengarah kepada dijauhinya pengelompokan berdasarkan hal-hal eksklusif yang berpotensi desintegratif dalam kehidupan sebagai satu bangsa.

Lalu sejauh mana itu semua sudah tercerminkan dalam masa kampanye menjelang hari pemungutan suara 23 April 1987 ini?

Di hari-hari menjelang selesainya masa kampanye, terasa bahwa di sana sini mulai muncul sikap tak terkendali di antara organisasi peserta pemilihan umum. Baik dalam penampilan perilaku tak terpuji maupun ucapan-ucapan yang melanggar ketentuan yang ada. Di beberapa tempat bahkan terjadi bentrokan fisik — yang dapat segera diatasi oleh aparat-aparat keamanan. Ketua Panwaslakpus menyatakan tak satupun di antara OPP yang luput dari pelanggaran.

Akan tetapi, sepanjang yang dapat diamati, Golkar lebih berhasil dalam pengendalian diri, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pun tidak berdampak negatif lebih jauh. Konsolidasi yang dilaksanakan Golkar selama beberapa tahun terakhir ini, besar peranannya dalam hal ini. Dan bila massa Golkar di daerah ada yang terlibat dalam bentrokan fisik, semata-mata karena keterpaksaan yang lebih mengarah kepada bela diri. Namun para pimpinan Golkar telah bergerak cepat menginstruksikan jajarannya untuk mampu menahan diri dan meningkatkan pengendalian diri tanpa menyurutkan dinamika. Adalah pula sejak awal pimpinan Golkar telah menyerukan seluruh kader dan jajaran keluarga besar Golkar melaksanakan tugas sebaik-baiknya agar simpati dan kepercayaan rakyat tetap tertumpu kepada Golongan Karya. 'Jagalah perasaan tenteram di kalangan rakyat. Jagalah persatuan dan kesatuan rakyat'.

Sikap brutal dan agresif hanyalah milik mereka yang merasa tak mampu mencapai kemenangan atau meraih suara pemilih dengan baik dan jujur. Sehingga masih tergelincir menggunakan pola dan cara-cara keras ala pra era satu asas. Sedangkan kekuatan politik seperti Golkar yang mengemban misi pembaharuan dan pembangunan politik sesuai cita-cita Orde Baru, ada dalam kondisi objektif dan keterikatan moral untuk menjauhi perilaku seperti itu. Bahwa Golkar memperjuangkan targetnya secara mati-matian, itu betul. Tapi adalah pula tekad Golkar untuk mencapai kemenangan itu secara terhormat! •

Digitized by Google

Wawancara dengan Drs Cosmas Batubara

Tercapai Dengan Upaya Berkesinambungan

Tema kelanjutan pembangunan didasari kesadaran untuk tetap konsisten

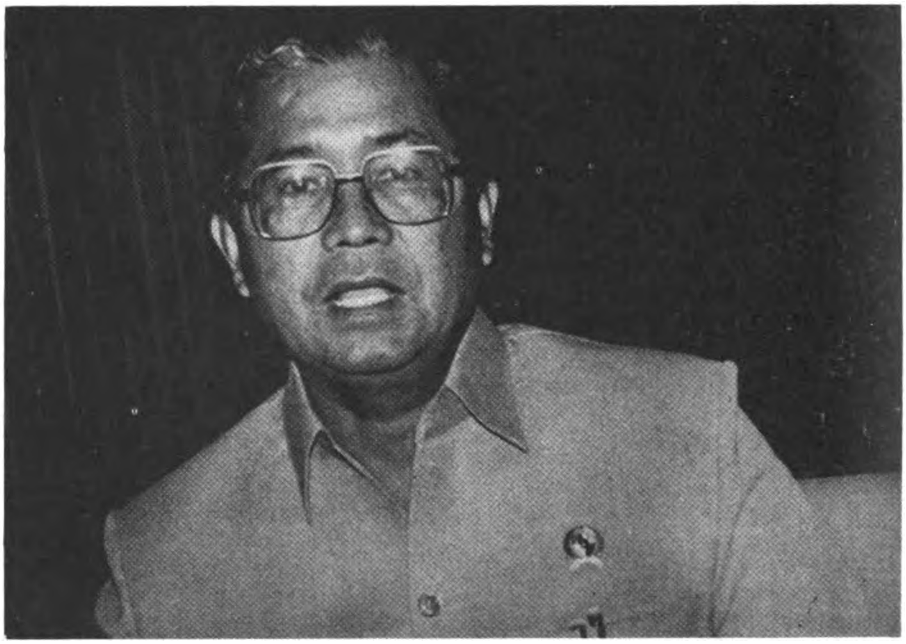

Dalam pandangan Golkar, kegiatan Pemilu berikut kampanye yang kini tengah berjalan tidak dapat dilepaskan dengan usaha untuk menegakkan Orde Baru. Pemilu merupakan bagian kegiatan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, yang selaras dengan falsafah Pancasila.

Pendapat itu dikemukakan fungsionaris Golkar, Drs Cosmas Batubara dalam wawancara khusus dengan Media Karya, di Jakarta, pada saat masa kampanye tengah berlangsung.

Cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945 itu ingin dijabarkan oleh Golkar untuk dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa yang meliputi kesejahteraan material dan spiritual.

Menurut Cosmas, hal itu terumuskan dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) organisasi Golkar.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Golkar bertekad untuk mencerdaskan bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah. Dalam kaitan itu pula Golkar ingin membangun suatu kehidupan politik yang berfungsi dengan baik.

Sebagai perwujudan upaya pembangunan politik yang berfungsi dengan baik, Golkar secara konseptual berusaha melakukan pembaharuan di bidang infrastruktur politik, yang meliputi kekuatan sospol, seperti Partai Politik dan Golkar, dan sekaligus melakukan pembangunan dan pengembangan di bidang suprastruktur politik yang meliputi berbagai lembaga kenegaraan.

Tahap pembangunan politik yang ditempuh Golkar, pertama-tama menyadarkan kepada masyarakat betapa penting sistem politik yang didasarkan pada UUD 1945, dan tahap kedua meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan itu. Pemilu adalah salah satu wujud partisipasi rakyat dalam pembangunan di bidang politik. "Kita mungkin masih ingat, betapa masyarakat bersikap sinis terhadap gagasan Pemilu pada 1971 yang lalu. Ada orang yang mengatakan bahwa suasana, kondisi dan situasi saat itu belum matang untuk kegiatan Pemilu. Tetapi justru dalam keadaannya seperti itu, Golkar bertekad untuk melaksanakan pemilu karena sadar bahwa melalui pemilu itulah dapat diwujudkan partisipasi rakyat dalam menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka dan program apa yang dapat mereka harapkan.

Setelah dasar-dasar pembangunan politik diletakkan, tahap berikutnya adalah menyusun program pembangunan berjangka panjang. "Masih diingat ungkapan Pak Harto yang mengatakan, kita memerlukan pembangunan setidaknya 25 tahun", kata Cosmas. Atas dasar petunjuk dan pandangan Pak Harto itu disusunlah suatu program dan berbagai kegiatan oleh sejumlah tokoh kader Golkar. Bahkan lahirlah suatu kerangka berpikir tentang pembangunan yang kemudian dikenal dengan 'Akselerasi Pembangunan 25 tahun, kata Cosmas.

Dalam pelaksanaan pembangunan, apabila diamati, titikberat pembangunan dalam bidang ekonomi. Pembangunan bidang ekonomi itupun mengutamakan bidang pertanian dengan perhitungan bahwa bidang itulah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh bangsa.

Di samping pembangunan bidang pertanian, sektor industri pun memperoleh perhatian dengan pengutamaan mengolah hasil-hasil pertanian yang kemudian secara bertahap ditingkatkan menjadi industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Dewasa ini pembangunan bidang industri mencapai tahap pengembangan dan penggunaan teknologi tinggi.

Dengan menyadari kerangka berpikir itu, menurut Cosmas kegiatan kampanye berikut Pemilu tahun ini perlu diarahkan agar kelanjutan pembangunan tidak terhambat.

Atas dasar pemikiran itu pula tema utama Golkar dalam memasuki kancah kegiatan Pemilu 1987 adalah kelanjutan pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan, dan sekaligus memantapkan stabilitas nasional. "Hasil Pemilu mendatang diharapkan Golkar mampu memberikan peningkatan kualitatif bagi pelaksanaan pembangunan selama ini", katanya.

Betapa penting kelanjutan pembangunan, Cosmas mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan usaha yang konsisten dan berkesinambungan.

Digitized by Google

Program pembangunan yang tiap kali berubah pola tidak akan dapat menjamin tercapainya tujuan. "Jadi kalau Golkar mengambil tema kelanjutan pembangunan, itu benar-benar didasari atas kesadaran untuk tetap konsisten. Bukan karena tidak ada inovasi dalam diri Golkar", kata Cosmas.

Langkah-langkah inovatif Golkar dalam usaha melanjutkan pembangunan adalah kesediaan untuk mengadakan langkah korektif terhadap pelaksanaan pembangunan selama ini. Dalam rangka persiapan masuk ke Pelita V, perlu diadakan pengkajian mengenai pelaksanaan Repelita IV. Hal-hal yang kurang baik perlu dikoreksi, sedangkan yang sudah baik perlu dilanjutkan.

Tindakan koreksi itu terlihat dari kemauan politik yang tumbuh di kalangan Golkar berupa pemikiran tentang langkah-langkah debirokratisasi, deregulasi serta peningkatan peranan swasta.

Langkah ini mencerminkan bahwa dalam merencanakan pembangunan Golkar menempuh pendekatan dari segi hukum ekonomi. Menurut Cosmas, langkah itu berbeda secara mencolok dibandingkan dengan kebijakan Orde Lama. Saat itu perencanaan pembangunan lebih didukung oleh keinginan-keinginan terutama keinginan politis, dan bukan oleh suatu perencanaan ekonomi yang mantap berdasarkan keadaan dan potensi nyata. "Golkar tidak menyusun daftar keinginan dalam menyajikan program, tetapi ingin menjabarkan sesuatu yang memang bisa dan perlu direalisir".

Tindakan koreksi lainnya adalah keteguhan sikap untuk memberantas berbagai bentuk penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, serta upaya meniadakan kebocoran. Golkar sadar bahwa kualitas pembangunan yang tinggi hanya akan tercapai bila pelaksanaannya bebas dari segala bentuk penyelewengan.

Upaya koreksi terhadap penyelewengan ini hanya dapat ditempuh melalui pembinaan mental para pelaksana, perbaikan tata administrasi, dan penegakan hukum.

Masalah Aktual

Selain masalah-masalah strategis, Golkar juga tetap memperhatikan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat banyak, misalnya kesulitan ekonomi dewasa ini, yang kadang-kadang mengakibatkan timbulnya kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kesulitan ekonomi yang terjadi dewasa ini menurut Cosmas tidak dapat dilepaskan dari keadaan ekonomi keseluruhan, baik nasional maupun internasional.

Perekonomian nasional memang menghadapi tantangan berat, yaitu ketimpangan antara pertambahan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.

Keadaan itu dirasakan makin berat karena turunnya pendapatan negara dari sektor minyak. Namun gambaran optimistis akhir-akhir ini timbul karena terdapat kecenderungan bahwa pendapatan nasional dari sektor non-minyak berkembang pesat. Ini dapat dinilai sebagai titik terang dalam usaha perbaikan ekonomi. "Sekaligus merupakan bukti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara konsisten", katanya.

Masalah lain yang juga mendapat perhatian Golkar adalah upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum. Perjuangan di bidang ini tidak lepas dari prinsip dasar perjuangan Golkar yang ingin melindungi seluruh tumpah darah. "Golkar berusaha memperjuangkan seluruh rakyat, agar sekecil apapun kelompok masyarakat merasa terlindungi dan merasa sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa tanpa perbedaan suku, ras, agama, ataupun kelompok sosial lainnya", katanya. "Asalkan semuanya dalam kerangka Pancasila, Golkar pasti melindungi mereka".□ **Sugyanto/LT**

Koran Daerah yang Terbesar di Indonesia

Paling Berpengaruh di Jawa Barat

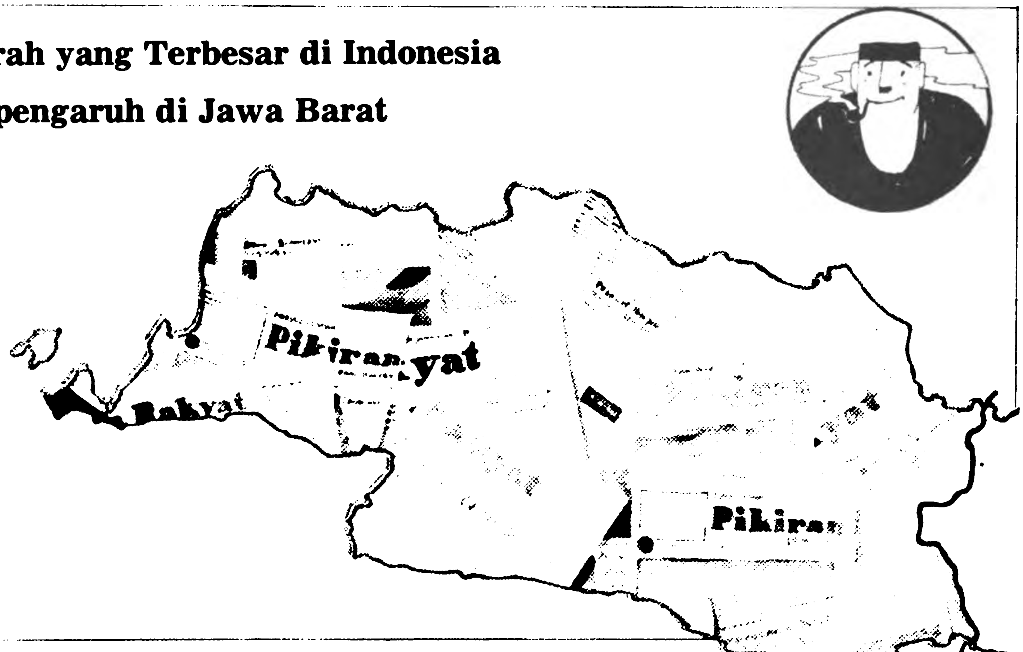

beritanya dapat dipercaya

Pikiran Rakyat

DARI RAKYAT – OLEH RAKYAT – UNTUK RAKYAT

Redaksi, Tata Usaha, Sirkulasi, dan Periklanan: Jln. Asia Afrika No. 77. Telepon 51216 - 51269 - 52210. Telex 28385 - 28516 PR BD. Kotak Pos 219 Bandung 40111.

Perwakilan: JAKARTA - Jl. Gajah Mada No 101. Telepon 6296853 - 632521. Telex 41453 PR JKT. Jakarta. JAWA TENGAH - Jl. Brigjen. Slamet Riyadi No 222 C. Telepon 7092. Sala. JAWA TIMUR - Jl. Jimerto No. 42. Telepon 43843. Surabaya. CIREBON - Jl. Kartini No. 7. Telepon 4440. Cirebon. CIAMIS - Jl. Jend. Sudirman No. 67. Telepon 323. Ciamis.

Digitized by Google

Pembangunan Politik Hadapi Problematik Yang Kompleks

Dengan adanya paket Undang-undang bidang Politik tahun 1985, dimana Pancasila sudah disepakati sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik, diharapkan tidak ada lagi pertentangan ideologi yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan bagi iklim politik di Indonesia. Kehidupan politik nantinya akan lebih diwarnai rasa kebersamaan, solidaritas dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan nasional.

Dan melalui berbagai perjalanan pemilihan umum yang berjalan secara teratur, ini membuktikan bahwa pemilu itu suatu bagian integral dari kehidupan politik di Indonesia. Begitu pula telah berjalannya persidangan MPR lima tahun sekali maka mekanisme demokrasi Pancasila sudah mulai berjalan, dan, masalahnya sekarang, bagaimana lebih memantapkan lagi.

Gambaran tersebut dikemukakan Dr Alfian, pengamat politik, dalam percakapannya dengan Media Karya. Namun, bagaimana mengembangkan kehidupan politik yang lebih baik lagi di masa mendatang, ini merupakan persoalan lain yang menurut Alfian perlu pengkajian secara lebih mendalam. Banyak problematik-problematik yang menghadang di depan kita dalam upaya mengembangkan kehidupan politik yang serasi. Pertama masih berkembangnya suasana saling curiga-mencurigai, syak wasangka di kalangan masyarakat, yang antara lain disebabkan karena pertentangan ideologi dalam politik. Di sini diperlukan adanya suatu keberanian untuk berbuat, menghilangkan kecurigaan atau syak wasangka. Perlu keberanian mengembangkan sikap saling percaya satu sama lain. Melalui satu-satunya asas Pancasila, diharapkan secepatnya berkembang dan tumbuh sikap solidaritas, kebersamaan, memecahkan semua persoalan secara bersama-sama, dan saling memperhatikan kepentingan masing-masing.

Demokrasi di manapun di dunia ini, menurut Alfian, sangat ditentukan oleh adanya suasana dan rasa saling mempercayai. Hanya melalui keberanian mengembangkan saling percaya dapat dibangun demokrasi Pancasila itu. Kita harus mengembangkan budaya politik saling percaya, yang merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan sebagai problematik pembangunan politik selanjutnya setelah pemilu 1987.

Problematik lain, perlunya apresiasi fungsional dari berbagai lembaga, karena selama ini terdapat kesenjangan di dalam berfungsinya berbagai supra struktur. Ada yang sudah berfungsi sebagaimana mestinya, tapi ada juga yang belum. Seperti lembaga eksekutif, nampak sekali telah berfungsi dengan baik, sementara yang lain masih kurang berfungsi, sehingga terkesan eksekutif terlalu kuat, dan yang lainnya terlalu lemah. Melalui apresiasi fungsional, lembaga-lembaga itu mengetahui apa fungsinya sekaligus melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Pada waktu yang sama lembaga-lembaga yang ada mengetahui apa fungsi dari lembaga-lembaga lain, menghargai lembaga-lembaga lain dan tidak akan mencampuri fungsi dari lembaga lain, bahkan memberi kemungkinan agar lembaga itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. "Ini pentingnya kita mengembangkan apresiasi fungsional di antara lembaga-lembaga yang ada, termasuk orang-orang yang duduk dalam lembaga itu," ujar Alfian.

Alfian

Problematik lain yang ditemui Alfian, menyangkut lemahnya lembaga-lembaga infrastruktur, yang pada umumnya lembaga-lembaga politik, lembaga sosial kemasyarakatan, seperti ormas dan orpol. Nampak sekali bahwa lembaga-lembaga itu belum sepenuhnya mandiri. Campur tangan pemerintah masih terasa bahkan sangat terasa. Sebagai contoh dalam proses pemilihan pengurus bukan didasarkan aspirasi murni daripada anggota tapi ditentukan oleh, barangkali, pihak-pihak lain di luar orpol dan ormas. Dan juga dalam masalah penyusunan daftar calon anggota DPR/DPRD, terdengar kritikan masyarakat terjadinya hal-hal yang kurang demokratis, bahkan terjadi hal-hal yang cenderung mencerminkan suasana nepotisme atau cara-cara lain yang kurang dianggap sehat.

Kemandirian orpol dan ormas belum lagi nampak selama faktor birokrasi masih dominan dalam kehidupan politik. Kalau dijamin orde lama politik adalah panglima, dewasa ini terlihat kecenderungan bahwa birokrasi sudah demikian dominan dan kalau dibiarkan dapat menjadi panglima pula dan kehidupan berpolitik kita.

Tantangan dimasa depan bagaimana realitas daripada pelaksanaan lima Undang-undang politik itu bisa terwujud. Hal-hal yang membuat orpol dan ormas tidak mampu mengembangkan inisiatif dan kreatifitas harus dihilangkan. Harus ada keberanian untuk membangun budaya politik baru yang dilandasi satu-satunya asas yaitu Pancasila.

Peta Politik

Sementara itu, direktur CSIS, Harry Tjan Silalahi SH, dalam percakapannya dengan Media Karya, menyimak sisi lain dari pelaksanaan pemilu 1987, setelah diakuinya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil Pemilu ini pada dasarnya belum banyak merubah peta politik, karena para pelakunya masih sama, dasar utama para pemimpin masih sama, dari orang-orang yang dilahirkan atau dibesarkan dalam suatu kurun waktu pemikiran yang sama.

Lima tahun mendatang, menurutnya, belum terjadi perubahan yang besar. Sebab GBHN sendiri masih melanjutkan kerangka landasan. Kendati ada pembaharuan, tapi pembaharuan tersebut tidak terjadi secara spektakuler. Bagaimana orang akan melaksanakan program-programnya setelah adanya kesamaan asas, dalam lima tahun mendatang masih perlu diamati. Sebab ini penting sekali, sebab dalam lima tahun mendatang generasi sudah berganti, dimana generasi 45 tidak ada lagi, sementara yang dulu berangkat dari era orde baru, sebagian nantinya hanya sebagai pengamat.

Mengenai bagaimana bentuk atau format politik dimasa mendatang, Harry Tjan Silalahi berkata itu sulit untuk dijawab, karena format politik nantinya sangat tergantung kepada dinamika masyarakat. Tapi yang jelas nantinya anggota-anggota DPR akan lebih banyak berbicara tentang program secara lugas, karena tidak dibebani lagi masalah-masalah ideologis. Pada saatnya nanti tidak ada lagi saling curiga.

Kalau orang bicara tentang keadilan, yang mereka akan berkata perlu keadilan yang lebih, pemerataan yang lebih, tidak dengan pertimbangan ideologis. Kalau kita

Digitized by Google

berbicara tentang perlunya perbaikan, karena memang ada yang belum baik, maka kita lakukan perbaikan, tidak karena ideologis. Begitu pula kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, ya kita lakukan pemberantasan.

Pelaksanaan Kampanye

Gambaran tentang pemilu 1987, dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka nantinya orang memilih salah satu kontestan tidak lagi karena ideologinya, tapi sudah berbicara tentang bagaimana mereka membuat program.

Menurut pengamatan Harry Tjan, para pemilih ingin melihat pelaksanaan semboyan Pancasila dalam program yang kongkrit. Ini berbeda pada masa-masa sebelumnya. Mereka berkumpul atau memilih tidak karena kesamaan, setidak-tidaknya, ideologi yang sempit. Mereka memilih karena pertimbangan program. Bagaimanapun Pemilu tahun ini mempunyai arti penting, sebagai babakan baru dalam proses demokrasi Pancsila, dimana masyarakat ikut partisipasi.

Ada semacam kekhawatiran dari Dr Alfian melihat kampanye yang menurut pengamatannya tidak semeriah tahun 1982. Barangkali hal itu disebabkan pemilu terlalu diatur sedemikian rupa sehingga untuk inovasi, inisiatif maupun kreatifitas sedikit terbatas. Memang ini baik kalau dikaitkan

dengan upaya mencegah keberingasan massa. Tapi kalau sampai ada sikap acuh tak acuh atau apatis menyambut pemilu, hal ini merupakan gejala yang tidak baik untuk perkembangan demokrasi. Kita harus prihatin, sebab demokrasi berkembangnya antara lain tergantung kepada partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Kita harus mengembangkan agar masyarakat tidak apatis. Pada tahap sekarang perlu diperlonggar aturan-aturan yang dapat menghambat tumbuhnya kreatifitas dan inisiatif masyarakat, kendati tidaklah mungkin menghapus atau mengurangi scara drastis aturan permainan yang dibuat pemerintah demi terciptanya ketertiban dan keamanan naisonal. □

(SB/Laurens/Nung)

KENDARAAN MITSUBISHI

PEMILU 1987
ADALAH SARANA DEMOKRASI
UNTUK MENJAMIN TETAP TEGAKNYA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945

ANDALAN ANDA. TEKNOLOGI MITSUBISHI
MITSUBISHI MOTORS

Digitized by Google

Golkar, Kemenangan Strategis

"Peningkatan mutu kehidupan mengharuskan kita untuk terus menerus melakukan pembaharuan mental"

Gegap gempita dan tampil perkasa di arena kampanye di seluruh pelosok tanah air. Golkar juga terasa lebih menawan dan mantap dalam kampanye melalui TV dan RRI. Ketua Umum dan enam tokoh Golkar lainnya, melontarkan wawasan dan program yang menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, melalui pidato kampanye di media elektronik itu. Tapi adalah amat menonjol bahwa pidato kampanye itu sama sekali tanpa nada janji muluk.

Bahkan, Ketua Umum Golkar Sudharmono SH, selain mencatat kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan, juga mengingatkan tantangan yang dihadapi di masa depan yang menuntut kerja keras.

Digitized by Google

"Pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional yang menjadi Trilogi Pembangunan, yang merupakan kesepakatan nasional benar-benar sedang berkembang", ujarnya. "Tetapi Golongan Karya menyadari sedalam-dalamnya bahwa semuanya itu masih jauh dari apa yang kita damba-dambakan". Golongan Karya juga merasakan, bahwa jutaan orang muda masih menginginkan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Jutaan lainnya masih berjuang keras mencari lapangan kerja. Banyak keluarga masih memerlukan rumah tinggal yang sederhana tetapi membahagiakan. Kaum cerdik cendekia masih ingin mengembangkan pikiran-pikirannya yang terbaik bagi bangsanya. Kita semua menginginkan aparatur pemerintahan yang makin jujur, bersih dan berwibawa yang melayani masyarakat. Dan banyak deretan panjang aspirasi dan keinginan. "Kita semua menginginkan peningkatan mutu kehidupan. Semua keinginan itu adalah wajar. Semua keinginan itu adalah tantangan yang berada di hadapan kita semua, yang harus kita berikan jawaban yang setepat-tepatnya".

Menjangkau ke masa depan, menjawab tantangan, adalah Sekjen Golkar Ir Sarwono Kusumaatmadja yang menyatakan "Dunia yang akan datang, adalah dunia yang dibentuk oleh kesadaran kaum muda hari ini, dan diisi oleh karya pemuda tersebut pada saatnya kelak". Selain mengajak untuk belajar dan bekerja keras, Sarwono juga mengajak kaum muda untuk ikut menciptakan kesempatan-kesempatan baru. Dan peluang untuk itu, seperti dikatakan Drs Freddy Latumahina dalam kampanye melalui RRI, cukup terbuka. Alam Orde Baru telah memberikan banyak kesempatan dialog antara unsur-unsur masyarakat. Cukup menonjol dalam hal ini keikutsertaan generasi muda dalam dialog dengan para penentu kebijaksanaan. "Cukup banyak hasil yang dicapai yang berupa ditemukannya jalan keluar bagi banyak permasalahan yang tadinya tampak pelik".

Kesempatan dan peranan juga banyak diberikan kepada kaum wanita. Dua tokoh wanita Golkar Ny. AS Moerpratomo dan Sri Redjeki SH menggambarkan keikutsertaan kaum wanita Indonesia dalam pembangunan bangsa, melalui pidato kampanye di TVRI dan RRI.

Tak kalah pentingnya adalah keseimbangan lahir batin dalam pembangunan. Pencapaian maupun wawasan Golongan Karya dalam hal ini diutarakan oleh KH Tarmoedji dan KH Sakti Qodratullah - dua tokoh bidang rohani dari Golkar.

Secara menyeluruh, pengutaraan tujuh tokoh Golkar itu, merupakan satu kesatuan lengkap yang mampu menggambarkan secara umum pokok-pokok perhatian perjuangan dan program Golkar yang ditawarkan kepada rakyat melalui Pemilihan Umum 1987 ini. Sehingga, bila perjuangan Golkar mencapai targetnya sukses, maka kemenangan Golkar kali ini mempunyai makna yang amat strategis.

Secara lengkap, pidato kampanye itu diturunkan dalam laporan utama ini.

Kekuatan Pokok Pembangunan Yang Memuliakan Kerja Keras

Sudharmono SH, RRI & TVRI 26 Maret 1987

Sebulan lagi, tanggal 23 April 1987, bangsa kita akan melaksanakan pekerjaan besar. Kita akan mengadakan pesta demokrasi, dengan menyelenggarakan pemilihan umum.

Pemilihan umum itu adalah wujud yang paling nyata dari kedaulatan rakyat, karena pada saat itulah rakyat akan menggunakan hak kedaulatannya untuk menentukan wakil-wakil yang dipercayainya, untuk memperjoangkan aspirasinya dan mewakili kepentingannya dalam MPR, DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Dengan ikut menentukan pilihan dalam pemilihan umum, kita semua tanpa kecuali melaksanakan hak dan kewajiban demokrasi kita yang sangat penting.

Karena itu kita semua yang cinta demokrasi, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, akan ikut serta dalam pemilihan umum itu dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Pemilihan umum yang akan datang adalah pemilihan umum keempat yang kita selenggarakan dalam zaman Orde Baru,

Ketua Umum di Jakarta Timur

Digitized by Google

Orde Pembangunan sekarang ini.

Setelah pemilihan umum itu, kita menyelenggarakan Sidang Umum MPR sebagai hasil Pemilu itu, dan selama ini Sidang Umum MPR itu dapat menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara dan memilih Presiden sebagai Mandataris yang akan melaksanakan GBHN itu, serta memilih Wakil Presiden; maka hal ini merupakan bukti yang senyata-nyatanya dari tekad kita semua untuk menegakkan kehidupan konstitusional.

Pelaksanaan demokrasi dan kehidupan konstitusional dengan penuh kesungguhan ini lah, yang menjadi kunci penting dari stabilitas nasional yang dinamis, yang kita nikmati bersama selama dua dasawarsa yang terakhir ini.

Karena itu lah sikap dasar Golongan Karya adalah berusaha sekuat tenaga untuk terus memberi kekuatan segar bagi berkembangnya kehidupan demokrasi yang sehat, kuatnya pelaksanaan konstitusi dan tegaknya hukum.

Pengalaman selama dua dasawarsa Orde Baru, yang dapat memantapkan stabilitas nasional yang dinamis, yang memungkinkan bangsa kita membangun dirinya sampai pada tingkat kemajuan yang kita rasakan sekarang ini, menambah keyakinan Golongan Karya untuk terus menegaskan sikap dasar itu dalam perjuangan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, saya atas nama segenap jajaran keluarga besar Golongan Karya, menyampaikan rasa haru dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, yang dalam tiga kali pemilihan umum yang terakhir telah memberi kepercayaan yang demikian besar kepada Golongan Karya.·

Kepercayaan itu kami rasakan sebagai amanah rakyat yang berdaulat. Kepercayaan itu kami junjung tinggi. Kepercayaan itu juga akan kami emban dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya dan akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tanpa kepercayaan rakyat, Golongan Karya tidak ada artinya. Itulah keyakinan kami. Kepada rakyat itulah tujuan pengabdian Golongan Karya.

Golongan Karya mendengarkan dengan seksama perasaan rakyat Indonesia yang mendambakan persatuan dan kesatuan dalam suasana kekeluargaan. Karena itu Golongan Karya mengabdikan diri demi persatuan dan kesatuan bangsa tadi.

Itu lah sebabnya Golongan Karya menyediakan diri sebagai wadah penampungan dan penyaluran isi hati rakyat Indonesia: dari semua lapisan, semua kalangan, semua golongan dan semua generasi. Karena itu pula sejak semula Golongan Karya membuka diri bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan asal usul, keturunan, suku, warna kulit, kekayaan, pendidikan, kedudukan, agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing dan segala perbedaan-perbedaan lainnya.

Dengan rendah hati, Golongan Karya menangkap suara hati rakyat, bahwa semuanya itu lah yang menjadi kekuatan utama, mengapa Golongan Karya mendapat amanat kepercayaan rakyat yang sangat besar dalam tiga kali pemilihan umum seperti yang tadi kami kemukakan.

Golongan Karya akan memegang teguh semua itu dalam memasuki pemilihan umum yang akan datang dan dalam pe-

Ketua Umum di Jakarta Barat

Digitized by Google

ngabdian Golongan Karya selanjutnya, karena persatuan dan kesatuan bangsa dalam semangat kebangsaan harus terus menerus kita bina dan kita mantapkan sepanjang zaman, dari generasi ke generasi.

Golongan Karya bertekad untuk menjadi kekuatan pokok pembangunan. Ini tidak dapat lain karena rakyat memang gandrung pembangunan, giat membangun dirinya dan berhak menikmati jerih payah cucuran keringatnya sendiri.

Golongan Karya merasa sangat berbahagia menyaksikan kemajuan-kemajuan pembangunan yang dicapai oleh bangsa ini sampai sekarang.

Golongan Karya lebih berbahagia lagi karena tokoh-tokoh dan kader-kadernya duduk dalam Pemerintahan, menjadi wakil-wakil rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan dan tersebar di mana-mana di berbagai bidang profesi dan fungsinya menyumbangkan karya-karya nyata dalam pembangunan tadi.

Pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional yang menjadi Trilogi Pembangunan, yang merupakan kesepakatan nasional benar-benar sedang berkembang.

Tetapi Golongan Karya menyadari sedalam-dalamnya bahwa semuanya itu masih jauh dari apa yang kita damba-dambakan.

Golongan Karya juga merasakan, bahwa jutaan orang muda masih menginginkan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Jutaan lainnya masih berjuang keras mencari lapangan kerja. Banyak keluarga masih memerlukan rumah tinggal yang sederhana tetapi membahagiakan. Kaum cerdik cendekia masih ingin mengembangkan pikiran-pikirannya yang terbaik bagi bangsanya. Kita semua menginginkan aparatur pemerintahan yang makin jujur, bersih dan berwibawa yang melayani masyarakat. Dan banyak deretan panjang aspirasi dan keinginan.

Golongan Karya juga sadar, bahwa semuanya itu adalah perjuangan pembangunan yang memang harus kita alami.

Kita semua menginginkan peningkatan mutu kehidupan. Semua keinginan itu adalah wajar. Semua keinginan itu adalah tantangan yang berada di hadapan kita semua, yang harus kita berikan jawabannya setepat-tepatnya.

Dengan mengamati kembali hasil-hasil yang kita capai selama ini dan dengan memandang secara realistis tantangan dan kemampuan yang dapat kita kembangkan di masa datang, maka Golongan Karya berkesimpulan bahwa pola dasar pembangunan nasional dan pola umum pembangunan jangka panjang yang selama ini telah menjadi kesepakatan nasional dalam GBHN 1983 dapat tetap kita pertahankan. Yang perlu kita lakukan adalah makin menajamkan prioritas dan meningkatkan pendayagunaan segenap kekuatan bangsa kita sehingga semuanya secara adil mendapatkan kesempatan dan hak untuk ikut serta menyumbangkan peranan yang sebesar-besarnya dalam pembangunan.

Dalam rangka melanjutkan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, Golongan Karya bertekad untuk tetap mengembangkan pelaksanaan trilogi pembangunan dengan lebih menekankan segi-segi pemerataan dan keadilan dalam arti yang seluas-luasnya dengan terus mendorong pertumbuhan. Secara realistis Golongan Karya bertekad untuk menjembatani kesenjangan-kesenjangan sosial yang masih ada dalam masyarakat kita. Dengan semangat Pancasila dan secara realistis Golongan Karya bertekad untuk mengurangi sejauh mungkin keresahan rakyat kecil.

Karena itu di masa datang Golongan Karya bertekad untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kehidupan, membangun manusia pembangunan yang mandiri, bebas dan bertanggungjawab. Dengan demikian wajah pembangunan kita akan lebih jelas menggambarkan pembangunan yang penuh keseimbangan lahir dan batin, pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat nanti.

Untuk itu semua, Golongan Karya ingin memelopori sikap yang memuliakan kerja keras, kejujuran dan tanggung jawab. Golongan Karya ingin memelopori tegaknya disiplin nasional, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial. Golongan Karya juga akan terus memperjuangkan pembangunan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa, menerapkan sistim birokrasi yang makin sederhana, berdayaguna dan berhasilguna, sehingga fungsi pelayanan terhadap masyarakat makin terasa lancar.

Itulah yang akan diperjuangan oleh Golongan Karya dalam Sidang Umum MPR tahun 1988 yang akan datang. Itulah konsepsi pokok Golkar sebagai bahan GBHN tahun 1989-1994, sebagai Pelita terakhir dalam pola pembangunan jangka panjang, yang mempunyai sasaran memantapkan landasan bagi tinggal landas me-

Prof Fuad Hassan di Sumatra Barat

Digitized by Google

nuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tugas dan tantangan di hadapan bangsa kita dalam menciptakan landasan yang kokoh kuat itu memang besar dan berat. Dengan penuh kepercayaan diri, kita yakin bahwa tugas itu dapat kita selesaikan dan tantangan itu dapat kita kalahkan.

Beratnya tugas dan tantangan itu menyadarkan Golongan Karya bahwa bangsa ini harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang menghayati impian rakyat, yang sarat dengan bobot kenegarawanan, yang kaya dengan kebijaksanaan, yang mengayomi seluruh rakyat dengan sifat kebapaan dan sanggup mengambil keputusan yang tepat pada keadaan yang sangat sulit sekalipun.

Semua syarat tadi tampil dengan kokoh dalam diri Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia kita yang sekarang. karena itu Golongan Karya dengan penuh keyakinan akan mencalonkan kembali dan berjuang untuk terpilihnya Bapak Soeharto sebagai Presiden dalam masa jabatan 1988-1993 dalam Sidang Umum MPR yang akan datang.

Demikianlah arah yang ditawarkan oleh Golongan Karya kepada rakyat Indonesia dalam melanjutkan perjalanan pembangunan bangsa kita di masa depan. Kami menawarkan program-program yang kami anggap terbaik untuk rakyat.

Kami berterima kasih atas kepercayaan dan partisipasi aktif dari kalangan luas bangsa kita kepada Golongan Karya selama ini : dari kalangan petani, nelayan, pekerja, pendidik, cerdik cendekia, pegawai negeri, usahawan, budayawan dan seniman, para pemuka agama dan kaum ulama, para ibu dan wanita pada umumnya, kaum muda dan kalangan-kalangan luas lainnya.

Kami juga mendengar dengan penuh minat semua kritik yang ditujukan kepada kami. Untuk itu kami menyampaikan rasa terima kasih yang sama dalamnya. Kritik itu merupakan bahan bagi kami untuk selalu mawas diri dan memperbaiki diri dengan penuh kesadaran. Adanya kritik yang membangun itu kami terima sebagai keterbukaan dan kepercayaan rakyat yang tetap mendalam pada Golongan Karya.

Kepada semua kader Golongan Karya dan seluruh anggota keluarga besar Golongan karya saya serukan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya agar simpati dan kepercayaan rakyat tetap tertumpu pada Golongan Karya. Jagalah perasaan tenteram di kalangan rakyat. Jagalah persatuan dan kesatuan rakyat.

Kepada seluruh rakyat Indonesia saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan selamat dalam menggunakan hak pilihnya dalam hari pemungutan suara yang akan datang.

Semoga Saudara-saudara semua menjatuhkan pilihan yang setepat-tepatnya berdasarkan suara hati Saudara-saudara, yang hasilnya tetap memberikan kepercayaan yang besar kepada Golongan Karya seperti dalam Pemilu-pemilu yang lalu, karena suksesnya Golongan Karya dengan dukungan yang besar dari rakyat dalam pemilu itu lah, yang merupakan jaminan kesinambungan pembangunan yang akan membuka pintu yang lebar kepada hari depan yang lebih cerah.

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab Golongan Karya akan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang dilimpahkan oleh rakyat pemegang kedaulatan negara kepada Golongan Karya. Sebaliknya Golongan Karya menyadari sepenuhnya harapan dan tuntutan seluruh rakyat ini akan kepeloporan dan kesungguh-sungguhan Golongan Karya dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan bangsanya.

Marilah kita sukseskan Pemilu 1987 ini!

Marilah kita sukseskan Golongan Karya dalam Pemilu tersebut!

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua seluruh Bangsa Indonesia.

Masa Depan Dibentuk Oleh Kesadaran Kaum Muda Hari Ini

Sarwono Kusumaatmadja
TVRI, April 1987

Kesempatan serta kehormatan berharga yang saya peroleh malam ini untuk berbicara hendak saya gunakan untuk mengemukakan berbagai pokok mengenai Golongan Karya, dalam rangka menyambut Pemilihan Umum pada tanggal 23 April 1987 yang akan datang, sehingga baik hakekat keberadaan Golongan Karya, perjuangannya selama ini serta apa wawasan masa depannya dapat menjadi lebih jelas bagi kita semua.

Golongan Karya adalah pengemban hakekat orde baru, yaitu suatu orde yang berkehendak agar seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia diletakkan dan dilandaskan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 45. Hakekat Orde Baru adalah

Ir Hartarto di Jakarta

Digitized by Google

sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan terus menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 45 dan karenanya, Golkar terpanggil untuk senantiasa meningkatkan karyanya untuk melaksanakan pembaharuan di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan bathin. Usaha-usaha pembaharuan dan pembangunan bangsa dilaksanakan oleh Golkar melalui perikehidupan kebangsaan yang konstitusional, demokratis dan berlandaskan hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berencana, bertahap dan berkesinambungan.

Mewakili tekad Orde Baru untuk menyelenggarakan penataan disegala bidang kehidupan dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, maka Golkar sebagai kekuatan Pancasilais melaksanakan tugas serta fungsi politiknya secara konsisten. Kemenangan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum demi Pemilihan Umum merupakan bukti dari kepercayaan rakyat terhadap Golkar, serta merupakan pula bukti akan makin berakarnya kehadiran Golkar Golkar ditengah-tengah rakyat.

Kehadiran Golkar selama ini merupakan sumbangsih yang besar bagi upaya pembangunan nasional. Golkar tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan padanya untuk berperan dalam kehidupan politik yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Melalui kaderisasi Golkar meningkatkan kesadaran politik bangsa melalui perannya dalam badan permusyawaratan/perwakilan rakyat. Golkar bersaham menghasilkan berbagai produk hukum baik yang merupakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan-ketetapan MPR lainnya maupun Undang-undang yang kesemuanya mencerminkan tekad, semangat serta program untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan secara berencana, bertahap serta berkesinambungan. Semua produk hukum di atas, mencerminkan perwujudan program Golkar secara utuh, berkat kepercayaan rakyat yang menyebabkan Golkar tumbuh menjadi kekuatan sosial politik yang terbesar dewasa ini. Kerja keras serta dedikasi pada kader Golkar termasuk yang berada dalam lembaga legislatif maupun dalam lembaga eksekutif telah menghasilkan prestasi besar bangsa Indonesia, yang tidak perlu saya sebut disini, karena sudah pasti diketahui dan dirasakan oleh semua pihak, dan yang juga merupakan prestasi kita semua sebagai anggota masyarakat Indonesia.

Dengan menyatakan prestasi besar bangsa Indonesia sebagai akibat langsung dari kehadiran Golkar, tidaklah terkandung maksud saya untuk menutupi permasalahan-permasalahan yang kita sedang hadapi sebagai bangsa. Disamping berbesar hati atas keberhasilan bangsa, Golkar merasakan keprihatinan yang mendalam bahwa berbagai masalah besar seperti kesempatan kerja serta kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan dan tinggi belum sepenuhnya teratasi. Disamping itu, tantangan-tantangan baru muncul di tengah-tengah bangsa kita. Usaha-usaha untuk lebih meningkatkan taraf hidup rakyat, mengalami hambatan baik karena hal-hal yang diluar kendali kita seperti kelesuan ekonomi internasional yang berkepanjangan, maupun karena berbagai keterbatasan dan kekurangan yang masih

Digitized by Google

melekat pada diri kita. Disamping itu, justru karena hasil pembangunan nasional itu sendiri, telah timbul tuntutan serta harapan baru, yang dicerminkan oleh perhatian yang lebih besar dari rakyat akan hal-hal yang bersifat kualitatif seperti keteladanan, demokrasi, keadilan, etika, kejujuran, disiplin serta produktivitas. Oleh karena itu di masa mendatang hakekat pembangunan nasional sebagai pembangunan manusia seutuhnya, akan dituntut untuk lebih menampakkan wujudnya. Kini dan dimasa mendatang, keberhasilan pembangunan fisik bukanlah ukuran keberhasilan yang terpenting; demikian juga terpenuhinya kebutuhan pokok telah dan makin dirasakan sebagai kewajaran yang tidak perlu dibanggakan. Oleh karena itu pula tantangan pembangunan dimasa-masa mendatang akan lebih berat serta menuntut adanya peningkatan mutu kehidupan disegala bidang yang berarti pula menuntut peningkatkan kualitas manusia Indonesia. Perlu pula kita sadari bahwa semua tantangan ini, muncul dalam suatu situasi dunia yang penuh ketidakpastian, dimana perkembangan ilmu dan teknologi yang luar biasa pesatnya telah mengakibatkan perubahan-perubahan disegala bidang kehidupan manusia.

Menyadari tingkat kecanggihan masalah yang kita hadapi bersama sebagai bangsa, Golkar menghindari rumusan-rumusan yang serba mudah, serba enak didengar namun lebih merupakan janji muluk dan omong kosong belaka. Bagi Golkar, kampanye berdasarkan program berarti memberikan kepastian mengenai hal-hal pokok, karena kepastian demikian perlu dalam rangka penyusunan konsep pembangunan dimasa depan. Namun konsep atau program pembangunan selanjutnya, tidaklah boleh digambarkan dalam bentuk-bentuk yang mentah. Adalah tidak mungkin dalam kesempatan yang terbatas malam ini, untuk menguraikan berbagai program Golkar dimasa mendatang dalam rangka membangun hari esok yang lebih baik. Bukan berarti program Golkar belum sempat terurai. Kesempatan seluas-luasnya untuk bertukar pikiran serta menguraikan berbagai program Golkar, telah terjadi dalam masa kampanye ini melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Golongan Karya di seluruh tanah air. Melalui dialog-dialog itulah, program Golkar di segala bidang dibahas dan dimasyarakatkan secara bertanggung jawab dan dewasa oleh sekian banyak tokoh Golkar yang berwawasan luas dan yang dibekali banyak pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, dialog yang terjadi dalam masa kampanye ini, adalah amat berharga dalam melengkapi pemahaman-pemahaman kita semua mengenai hakekat tantangan yang kita hadapi bersama dan amat bermanfaat dalam memperkaya program Golkar. Dengan demikian program Golkar bukanlah program yang diciptakan sepihak oleh Golkar sendiri, namun merupakan program yang berdasarkan aspirasi masyarakat yang terus menerus ditampung, disalurkan dan diperjuangkan, termasuk aspirasi yang tampak selama masa kampanye.

Saya ingin berbicara mengenai para pemuda Indonesia.

Kenyataan kaum muda sebagai mayoritas bangsa Indonesia tampak dalam kehadiran mereka dalam segala kegiatan Golkar sebelum maupun selama kampanye. Menyadari pentingnya kaum muda sebagai potensi masa depan bangsa, jauh-jauh hari Golkar telah mempersiapkan diri berdialog dengan mereka. Saya amat bangga dan berkesan dengan penampilan kaum muda ini. Adalah tidak benar sinyalemen sementara pihak yang menyatakan kaum muda sebagai sekumpulan manusia yang apatis dan tidak mempunyai idealisme.

Justru sebaliknya yang terlihat, yaitu semangat, dinamika, gairah serta perhatian yang mencerminkan idealisme kaum muda terhadap masalah-masalah kualitatif tadi disamping perhatian terhadap kepentingan langsung kaum muda seperti kesempatan kerja.

Melalui dialog-dialog yang ditandai dengan pertukaran pikiran yang bebas dan hangat, saya berkeyakinan bahwa kaum muda Indonesia, yang hampir seluruh pengalaman hidupnya dibentuk dalam masa Orde Baru, sepaham dengan Golkar akan hakekat tantangan masa depan, yaitu peningkatkan mutu kehidupan disegala bidang.

Peningkatan mutu kehidupan tersebut mengharuskan kita untuk terus menerus melakukan pembaharuan mental sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Hal ini berarti bahwa mentalitas bangsa yang membangun harus makin ditumbuhkan melalui berbagai upaya. Kita harus mengembangkan mental manusia Indonesia yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi; kita harus mengembangkan mental manusia Indonesia yang mengejar prestasi, tidak sekedar mendambakan gelar dan kedudukan; kita harus menghormati serta mendahulukan kepentingan umum, karena dengan cara demikian kepentingan diri sendiri dapat lebih terjamin; kita harus menumbuhkan mental demokrat yang mandiri, dan membuang jauh kebiasaan untuk mendewakan kekuasaan. Selain menciptakan lapangan kerja, kitapun harus menciptakan mental

Ismail Saleh di Pulau Batam

Digitized by Google

manusia Indonesia yang mampu menciptakan pekerjaan. Dengan perkataan lain, kita harus mampu mengembangkan iklim yang mendorong tumbuhnya sifat-sifat terbaik bangsa Indonesia. Dunia yang akan datang, adalah dunia yang dibentuk oleh kesadaran kaum muda hari ini, dan diisi oleh karya pemuda tersebut pada saatnya kelak. Oleh karena itu GOLKAR mengajak kaum muda seluruh Indonesia untuk bekerja keras, belajar dengan tekun bukan saja dari bangku sekolah namun dari pengalaman hidup, untuk tidak membuang waktu serta menyia-nyiakan kesempatan yang ada, dan yang tidak kalah penting, untuk menciptakan kesempatan-kesempatan baru. Kita berada dalam tahapan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dimana Pancasila sebagai ideologi kebangsaan yang terbuka dan demokratis memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk mengembangkan gagasan, pikiran serta program yang positif bagi masa depan bangsa. Yang dituntut dari kita adalah kesediaan untuk menumbuhkan keterbukaan, untuk menampilkan sikap-sikap kreatif, kritis mandiri dan dinamis, untuk senantiasa percaya diri menghadapi tantangan, untuk selalu berpikir positif. Kita patut bersyukur bahwa para pendiri Republik Indonesia telah merumuskan Pancasila sebagai asas yang demikian tahan uji dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, dan yang telah menciptakan aturan-aturan pokok yang sedemikian luwes dalam UUD 45, sehingga kita telah berada dalam suatu tatanan kehidupan yang memungkinkan terwujudnya keleluasaan bagi pembentukan hari esok yang lebih baik.

Masa kampanye beberapa hari lagi akan berakhir. Perkenankanlah saya menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan terima kasih serta penghargaan kepada para kader dan pendukung Golkar maupun masyarakat luas yang telah berpartisipasi dan memberikan bantuan dalam segala macam bentuknya, yang memungkinkan terselenggaranya semua kegiatan kampanye Golkar dengan sukses. Golkar menyatakan penghargaan pula kepada seluruh jajaran Pemerintahan baik Sipil maupun ABRI yang telah melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya sehingga kampanye telah berlangsung sebagai kegiatan yang kita cita-citakan bersama yaitu sebagai wahana pendidikan politik bagi semua pihak.

Para pirsawan diseluruh pelosok Tanah Air yang saya muliakan.

Akhirnya saya mengajak para pirsawan sekalian menggunakan hak pilihnya dalam rangka memberikan jaminan yang sebaik-baiknya bagi masa depan seluruh bangsa. Sebagai warga Golongan Karya saya yakin bahwa Golkar tetap merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa kita, baik dari segi ideologis, maupun dari segi kesiapannya menyongsong tugas masa depan. Oleh karena itu saya memohon kesediaan Bapak Ibu serta Saudara sekalian agar pada tanggal 23 April 1987 nanti beramai-ramai menggunakan hak pilihnya masing-masing dan menusuk tanda gambar beringin, lambang Golongan Karya peserta Pemilihan Umum nomor urut dua. Atas segala perhatian dan kesabaran pirsawan sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih.

Menghubungkan Masa Sekarang Dengan Masa Depan

Drs. Freddy Latumahina
RRI, April 1987

Sebentar lagi akan berlangsung suatu peristiwa nasional yang penting, yakni Pemilihan Umum. Pada tanggal 23 April mendatang, kita akan menggunakan salah satu hak kita selaku warga negara. Mungkin banyak di antara kita, dari kalangan generasi muda yang berada di kota-kota maupun di desa-desa, baru pertama kalinya melaksanakan hak pilih di bidang politik itu.

Pagi ini saya tampil menemui Saudara-saudara mewakili satu diantara tiga organisasi peserta pemilihan umum mendatang ini, yakni Golongan Karya. Suatu organisasi politik yang telah Saudara-saudara kenal sebagai organisasi yang disemangati oleh cita-cita pembaharuan dan pembangunan serta berwawasan ke masa depan.

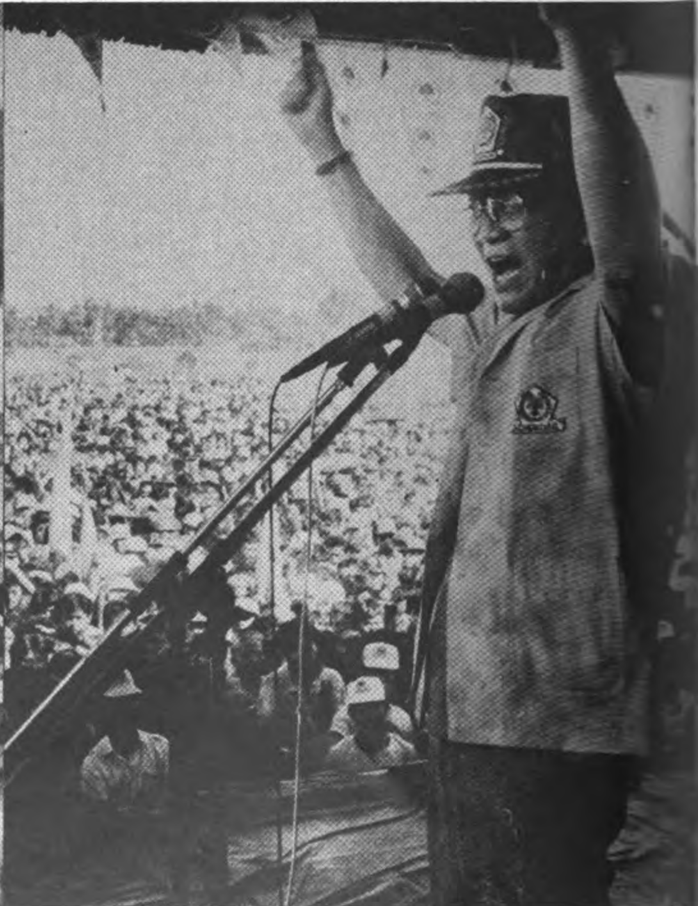

Alamsyah Ratuperwiranegara di Sumsel. GH Mantik di Jabar

Digitized by Google

Dalam rangka lebih meyakini pilihan saudara kepada Golongan Karya, pada kesempatan ini, saya ingin mengemukakan berbagai pengalaman dan bahkan memberikan pemikiran yang kiranya dapat menjadi masukan bagi Saudara-saudara untuk direnungkan secara mendalam. Karena pilihan itu akan merupakan pilihan yang sadar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama terhadap hati nurani kita masing-masing.

Dalam kaitan ini, pada umumnya sebagai generasi muda, kita selalu melihat ke masa depan, baik pikiran maupun tindakan. Salah satu ciri yang menjadi landasan kita, adalah berpikir rasional, dinamis dan kreatif, bukan sekedar emosi dan perasaan-perasaan yang tidak dapat terumuskan secara jelas. Bagi Golongan Karya, bila Saudara memilihnya dalam pemilihan umum nanti, agar itu berdasarkan pertimbangan yang rasional dan dengan suatu kesadaran.

Mengapa demikian? Karena sebagai bangsa, kita terus berusaha membawa kenyataan kearah pemikiran, dan menterapkan pemikiran kearah kenyataan. Kita dituntut untuk dituntun oleh pandangan masa depan yang jelas. Kepada Saudara-saudara lebih-lebih untuk generasi muda, dari lapisan manapun saudara berasal, maka cara saudara mengambil keputusan akan sangat menentukan kualitas dari masa depan yang kita inginkan bersama sebagai satu bangsa. Memang takkan ada yang menyaksikan apa dan bagaimana cara Saudara-saudara mengambil keputusan dan menentukan pilihan, kecuali diri Saudara-saudara sendiri. Tetapi dari situlah Saudara dapat menguji tingkat kesadaran dan tanggung jawab Saudara-saudara sendiri bagi bangsa dan negara.

Sebagai generasi muda, kita telah beruntung bahwa kebanyakan dari kita telah dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik dari banyak generasi terdahulu tatkala seusia kita pada zamannya.

Apabila sebagian dan kita, ada yang belum berhasil mengenyam pendidikan setinggi apa yang dicita-citakan dan diharapkannya, setidak-tidaknya alam kemerdekaan dan alam Orde Baru ini telah memberi cakrawala yang lebih terbuka dalam pembentukan dirinya.

Kita pasti menginginkan bahwa adik-adik kita nanti akan mengalami keadaan yang lebih baik lagi. Disinilah kita dapat mulai menyusun beberapa pokok pikiran tentang bagaimana agar keadaan selalu lebih baik. Sebagai generasi muda, pada ruang dan waktu saat ini, kita merupakan mata rantai yang menghubungkan masa sekarang dan masa depan. Dalam kedudukan yang strategis ini generasi muda akan merupakan penggerak jalannya sejarah bangsa. Dengan ilmu yang kita peroleh kita telah mengetahui bahwa dimasa depan, kita makin dituntut untuk memiliki pikiran yang maju dan memiliki cakrawala yang luas.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia kita memikul tanggung jawab nasional untuk turut serta mensukseskan pembangunan demi masa depan bangsa yang sejahtera. Semua yang kita pikirkan dan lakukan hari ini pada dasarnya kita lakukan demi dàn dalam rangka perspektif di masa depan. Perspektif di masa depan dengan sendirinya menuntut pembangunan masa depan itu sendiri, yang berarti bahwa secara sadar dan sistimatik kita berusaha menguasai perkembangan faktor-faktor yang membentuk masa depan tersebut. Memandang ke masa depan, kita melihat gambaran yang penuh harapan, tetapi kita sadari pula mengandung berbagai tantangan yang tidak mudah.

Dari catatan sejarah republik ini, kita mengetahui bahwa pembangunan pada 20 tahun pertama masa kemerdekaan tidak tertangani dengan baik. Wujud keberhasilan barulah nampak secara bertahap pada masa 20 tahun berikutnya. Dan apa yang telah dicapai kurang lebih 20 tahun terakhir ini sepenuhnya merupakan prestasi Orde Baru. Hal tersebut merupakan hasil pembangunan berencana dengan belajar dari pengalaman sejarah masa lampau. Kebanyakan dari kita pada saat ini, tidak pernah mengalami masa pedih dalam kehidupan politik dan ekonomi, lebih 20 tahun yang silam itu. Sungguh dramatis dan getir bila itu semua harus diungkapkan kembali. Tetapi itulah kenyataan sejarah, yang betapapun pahitnya perlu kita ketahui sebelum dapat memahami, mengapa pembangunan yang tidak kenal henti, harus terus menerus kita laksanakan.

Memandang ke depan, pertama-tama harus kita sadari bahwa kehidupan manusia di seluruh penjuru bumi ini, pada saat ini sudah demikian saling tergantungnya, sehingga suatu kemunduran dibagian dunia ini akan berpengaruh ke bagian dunia lainnya. Tak ada lagi bangsa yang dapat hidup sepenuhnya dalam isolasi. Namun bangsa-bangsa yang semata-mata hidup dalam pola dan alam ketergantungan tanpa melengkapi diri dengan ketahanan-ketahanan yang dikembangkan secara kreatif dari akar-akar kebudayaan nasional, akan lebih mudah terpojok dan gagal dalam persaingan hidup ini.

Dalam konteks Indonesia, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Sepanjang masa Orde Baru yang bernafaskan pem-

Harmoko di depan massa

Digitized by Google

baharuan - satu danlain hal berkaitan dengan pemberian banyak peluang keikutsertaan unsur generasi muda sebagai kelanjutan peranan generasi muda sebelumnya dimana telah tercapai dasar-dasar pembangunan nasional yang menguntungkan.

Alam Orde Baru telah memberikan banyak kesempatan dialog ini antara unsur-unsur masyarakat. Banyak dari rangkaian dialog dan pernyataan pendapat itu diutarakan tidak untuk sekedar menyenangkan hati melainkan dalam semangat guna menemukan jalan keluar atas berbagai permasalahan nasional. Cukup menonjol dalam hal ini ialah dialog antara generasi muda dengan para penentu kebijaksanaan. Cukup banyak hasil yang dicapai yang berupa ditemukannya jalan keluar bagi banyak permasalahan yang tadinya tampak pelik.

Jalan keluar yang paling mendasar yang menjadi landasan bagi keberhasilan pembangunan, terutama adalah mampu dikembangkannya pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang diikuti dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menegakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang luhur ialah : berkembangnya kehidupan demokrasi yang sehat, kuatnya pelaksanaan konstitusi dan tegaknya hukum. Kemudian diikuti dengan tercapainya kesepakatan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan. Pelaksanaan yang murni dan konsekuen, Pancasila dan UUD 1945 pada gilirannya telah menumbuhkan iklim yang mendukung suatu pembangunan nasional yang berencana dan berkesinambungan, terutama dalam peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi bangsa. Sehingga dalam batas tertentu, bangsa ini telah memiliki daya tahan ekonomi yang memadai untuk menghadapi masa-masa sulit yang diakibatkan oleh pengaruh dari luar.

Pada saat ini, telah berkembang pemikiran-pemikiran penting mengenai peranan sumber daya manusia dengan semangat kemandirian. Hakikat dari pemikiran yang ada ialah bahwa pemerintah tak dapat dibiarkan sendiri sebagai tumpuan satu-satunya dalam pembangunan. Masyarakat harus mampu mengembangkan segala potensinya untuk menciptakan tumpuan-tumpuan baru pembangunan bangsa dan negara. Dalam hubungan ini Pemerintah dan Golongan Karya melalui kader-kadernya, telah mengambil peran aktif dalam pembinaan sumber daya tersebut.

Keberhasilan petani Indonesia dalam swasembada beras, menambah keyakinan dan rasa percaya diri masyarakat dan potensinya sendiri selaku sumber daya. Sementara itu di kota dan di desa telah dikembangkan unit-unit perekonomian rakyat, yang merupakan unit usaha berskala kecil, yang memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa, dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan, yang lazim kita kenal dengan Sektor Informal. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal menjadi salah satu sektor penampilan potensi masyarakat dalam bidang perekonomian. Sektor itulah telah banyak digeluti oleh generasi muda, sehingga telah menumbuhkan harapan-harapan baru.

Pengalaman diberbagai negara sedang berkembang menunjukkan bahwa kegagalan mengintegrasikan kaum muda ke dalam sistem politik dan kemasyarakatan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, semata-mata karena kegagalan menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi kebanyakan generasi mudanya. Mengalirnya kaum muda ke sektor-sektor informal merupakan jawaban yang memadai saat ini dan untuk masa-masa mendatang.

Akan tetapi masalah lapangan kerja dan salah satu jawaban sementaranya yang berupa pengembangan sektor informal, barulah satu diantara contoh permasalahan dan jawabannya. Ada banyak tantangan masa depan yang masih harus dicatat dan diberi jawaban-jawabannya secara jitu. Bagaimana dengan kompetisi antar bangsa yang di masa depan akan tertumpu kepada kemampuan menguasai teknologi? Bagaimana kelanjutan dari upaya pemerataan memperoleh kesempatan kerja, dan pendapatan di masa depan? Bagaimana pula pemenuhan aneka kebutuhan masyarakat yang berkembang dan menjadi lebih rumit dan sebagainya.

Itu semua memerlukan rumusan jawaban kita saat ini. Karena kitalah nantinya generasi muda yang akan menghadapi, dan memikul tanggung jawab nasional masa depan itu. Ini semua mengisyarakatkan kepada kita keharusan untuk menyiapkan diri dengan sikap-sikap inovatif dan tidak beku, membiasakan diri dengan penggunaan ilmu dan teknologi, ketajaman wawasan

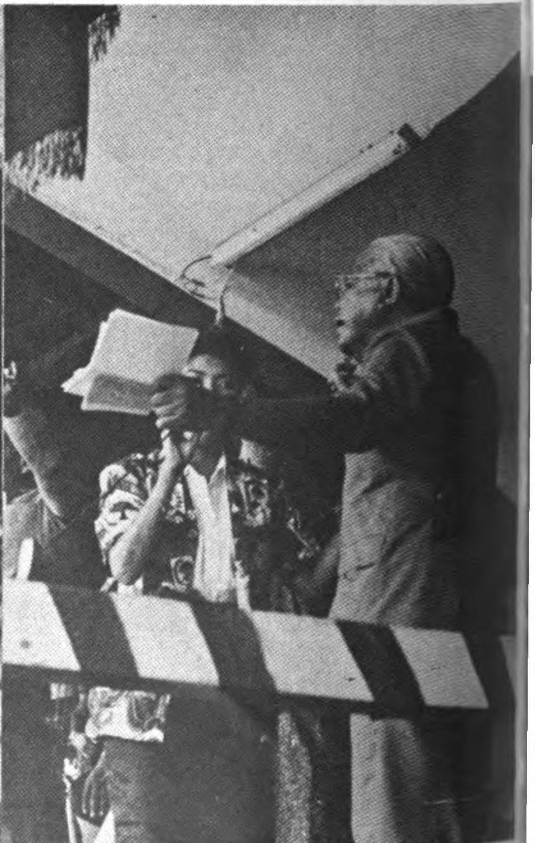

Sudomo di Kalimantan Barat

Digitized by Google

dan pengenalan budaya yang bisa mendukung kesadaran dan kemampuan kepemimpinan. Dan yang pokok adalah ketakwaan yang mendalam terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini berarti bahwa sejak saat ini, kita telah harus terbiasa mengorganisasikan diri secara rapi dalam wawasan pembaharuan. Pemikiran kita sudah harus menjangkau pantulan-pantulan kepentingan masa depan itu. Salah satu cara adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga politik maupun kemasyarakatan yang telah nyata-nyata mempunyai wawasan pemikiran kemasa depan itu.

Apabila hal ini dikaitkan dengan pemilihan umum, dimana setiap warga negara dihadapkan oleh undang-undang untuk melaksanakan hak politiknya, kiranya wawasan masa depan sudah dijadikan pertimbangan pokok. Dan bila Saudara-saudara sesama generasi muda bertanya kepada saya apa yang patut kita pilih, jawaban saya akan jelas dan terus terang : Golongan Karya dengan tanda gambar Pohon Beringin, Nomor 2.

Golongan Karya bertekad untuk menjadi kekuatan pembangunan kearah masa depan itu. Tekad itu berupa; meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kwalitas kehidupan, membangun manusia pembangunan yang mandiri, bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian wajah pembangunan masa depan kita, akan lebih jelas menggambarkan pembangunan yang penuh keseimbangan lahir dan batin. Golongan Karya sadar sepenuhnya, terhadap tantangan masa depan itu, bahwa semuanya itu adalah perjuangan pembangunan. Untuk itu Golongan karya ingin memelopori sikap yang memuliakan kerja keras, kejujuran dan tanggungjawab, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, serta tegaknya disiplin nasional.

Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sesama generasi muda;

Pada akhirnya penentuan pilihan itu menjadi hak politik Saudara-saudara sendiri secara pribadi. Namun saya menyarankan kepada Saudara-saudara untuk mendasarkan pilihan secara rasional berdasarkan wawasan masa depan itu. Karena kepada rakyat dan masa depan itulah tujuan akhir pengabdian Golongan Karya.

Untuk itulah Golongan Karya menyediakan diri sebagai wadah penampungan dan penyaluran isi hati rakyat Indonesia : dari semua lapisan, semua kalangan, semua golongan dan semua generasi, termasuk Saudara-saudara generasi muda Indonesia, karena suksesnya Golongan Karya dengan dukungan yang besar dari rakyat termasuk generasi muda dalam pemilihan umum itulah, akan merupakan jaminan kesinambungan pembangunan yang akan membuka pintu yang lebar kepada masa depan yang lebih cerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian serta memberkati seluruh bangsa Indonesia.

Sejarah Telah Membuktikan

Ny. A. Sulasikin Murpratomo, TVRI, Maret 1987

Tidak lama lagi, tepatnya tanggal 23 April mendatang dua hari setelah Hari Kartini, kita akan melaksanakan Pemilihan Umum yang keempat kalinya dalam masa Orde Baru.

Pada tanggal 23 April itu, kita semua, baik wanita maupun pria, akan melaksanakan hak pilih kita sebagai warga negara yang akan menentukan wakil-wakil yang dipercayakannya untuk memperjuangkan aspirasi dan mewakili kepentingannya dalam MPR, DPR, DPRD Tk.I dan DPRD Tk.II. Dengan pilihan ini, kita akan menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Kaum wanita yang merupakan lebih dari separuh penduduk Indonesia dan menurut undang-undang mempunyai kedudukan yang sama dengan pria akan turut menentukan masa depan kita bersama dengan melaksanakan hak dan kewajiban demokrasi yang penting ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tegaknya demokrasi, tegaknya konstitusi dan tegaknya hukum yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan merupakan kunci bagi stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, yang kita nikmati bersama selama dua dasawarsa yang terakhir ini. Stabilitas nasional tersebut sangat diperlukan bagi suksesnya Pembangunan demi tercapainya cita-cita bangsa.

Sikap dasar Golkar adalah berusaha sekuat tenaga untuk terus memberi kekuatan segar bagi berkembangnya kehidupan demokrasi yang sehat, kuatnya pelaksanaan konstitusi dan tegaknya hukum.

Pilihan dan penentuan yang terkait dengan penciptaan masa depan yang lebih baik, telah kita lakukan tiga kali dalam masa 21 tahun Orde Baru ini. Dan sebagaimana kita ketahui semua, kaum wanita dan warga negara Indonesia lainnya telah melakukan pilihan dengan baik dan tepat.

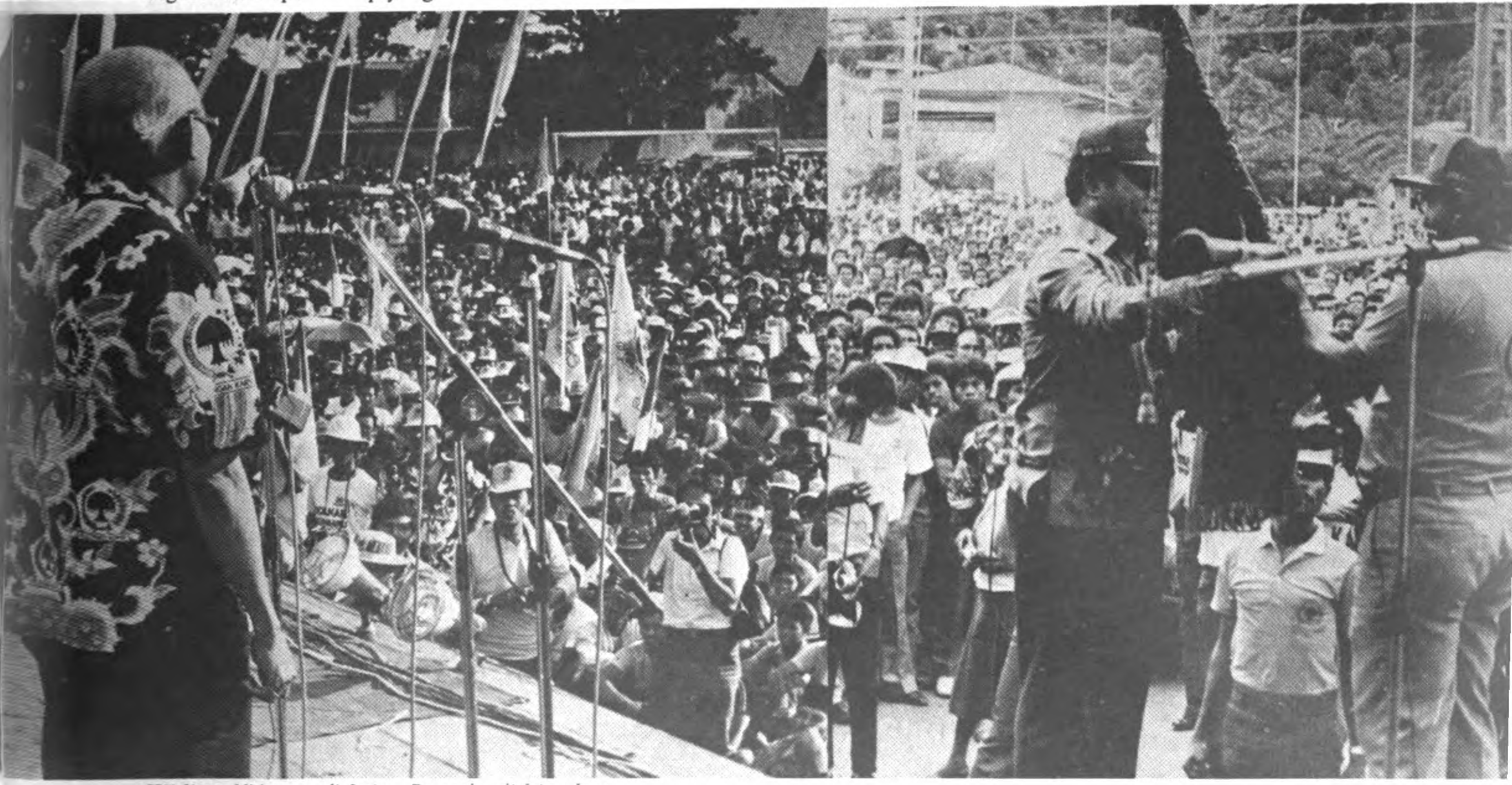

Widjoyo Nitisastro di Jatim. Bassaebu di Irian Jaya

Digitized by Google

Telah banyak keberhasilan yang kita capai dan rasakan selama 21 tahun terakhir ini melalui pembangunan yang penuh keseimbangan lahir dan batin, pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat nanti.

Tanpa mengecilkan peranan kekuatan sosial politik yang lain, sejarah telah mencatat kenyataan bahwa selama tiga kali Pemilihan Umum rakyat memberikan kepercayaan yang besar kepada Golkar, sehingga Golkar dengan penuh tanggung jawab dapat berperan dalam penegakan dan pengisian Orde Baru selama 21 tahun terakhir ini. Kepercayaan rakyat kepada Golkar dalam tiga kali Pemilihan Umum yang lalu, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Golkar sesuai dengan amanat rakyat yang berdaulat, dalam mewujudkan konsepsi pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah kita nikmati selama ini. Dalam kesempatan ini Golkar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan itu.

Sesungguhnyalah, mempertahankan kesinambungan dan peningkatan pembangunan dalam usaha menjamin terpenuhinya tuntutan dan harapan rakyat yang mendambakan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, dan pengabdian diri sepenuhnya untuk membela dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan perjuangan Golkar sejak semula.

Golkar menyadari bahwa peranserta dan tanggung jawab wanita merupakan suatu hal yang mutlak dalam mensukseskan pembangunan nasional kita. Oleh karena itu, Golkar selalu mendorong dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk berperanserta secara lebih berarti dalam pembangunan nasional. Hal ini semua dimungkinkan berkat tercapainya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, suatu kondisi yang mutlak diperlukan untuk melaksanakan pembangunan dengan sukses di segala bidang.

Di bidang kesejahteraan keluarga telah banyak yang diperjuangkan Golkar dengan hasil-hasil yang telah dapat kita rasakan semua. Kegiatan wanita melalui 10 program pokok PKK dan organisasi wanita yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan keluarga selalu mendapat dukungan Golkar dan akan terus didorong perkembangannya karena Golkar menyadari bahwa kesejahteraan keluarga didambakan oleh setiap wanita dan merupakan sendi utama dari kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan nasional kita.

Sebagai pendidik alami, wanita merasa dirinya terpanggil untuk sedini mungkin menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri anak-anaknya dan untuk membina mereka secara optimal segala potensi fisik, mental, intelektual dan sosial yang dikaruniakan padanya. Golkar menyadari bahwa untuk melakukan fungsi itu diperlukan peningkatan kemampuan wanita. Pendidikan formal dan non-formal yang selalu didorong oleh Golkar telah menunjukkan peningkatan pesat partisipasi wanita.

Pemerataan pendidikan juga untuk wanita akan terus diusahakan oleh Golkar di samping usaha peningkatan mutu pengajar dan sarana pendidikan. Dengan demikian wanita akan lebih mampu membangun dirinya untuk dapat membangun keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Dalam waktu yang tidak lama, Indonesia diharapkan dapat menampilkan ilmuwan ulung wanita yang dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Wanita Golkar juga selalu berusaha memupuk dan menggalang persatuan dan kesatuan serta mengembangkan nilai-nilai, sikap, perilaku, cara berfikir dan cara bekerja yang menjangkau kepentingan nasional. Selain itu kegiatan dalam pembinaan kehidupan beragama akan makin ditingkatkan. Makin bergairahnya kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama sungguh sangat terasa selama masa Orde Baru ini.

Kebutuhan dasar manusia lainnya yang perlu dipenuhi ialah kesehatan. Pembangunan yang dilaksanakan Orde Baru dibidang ini telah berhasil mendirikan Puskesmas di setiap kecamatan — ribuan Posyandu — hampir seluruhnya dilayani oleh wanita, — telah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kesehatan rakyat, khususnya wanita dan anak-anak semakin membaik, dengan Keluarga Berencana makin berkembang Golkar akan terus mengusahakan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan itu sehingga betul-betul "Kesehatan bagi semua menjelang tahun 2000" akan tercapai.

Di bidang ekonomi, Pembangunan yang dilaksanakan oleh Orde Baru, telah berhasil menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan hidup sehari-hari kita rasakan cukup tersedia. Bahkan dari negara yang mengimpor beras, kita telah menjadi swasembada, dan bahkan, Insya Allah akan menjadi pengekspor beras. Cukup pangan, cukup sandang disertai tempat tinggal yang memadai membuat kehidupan kita lebih tentram, bebas dari segala keresahan. Peningkatan ekonomi kehidupan kita membuat wanita lebih percaya pada dirinya sendiri dan lebih mandiri.

Tak henti-hentinya Golkar berjuang pula untuk meningkatkan kondisi dan situasi para pekerja, khususnya wanita. Perluasan kesempatan kerja, peningkatan ketrampilan, kesejahteraan, keselamatan dan keamanan kerja telah diusahakan dan akan tetap diperjuangkan oleh Golkar Khusus bagi wanita diusahakan persamaan kesempatan untuk mengembangkan karir. Peningkatan pendidikan seperti dikemukakan lebih dahulu akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi wanita untuk memperoleh pekerjaan dan upah yang lebih baik.

Ny. AS Murpratomo di Jateng

Digitized by Google

Tidak lengkap kiranya apabila saya tidak kemukakan program perjuangan Golkar dibidang hukum — Kedudukan wanita Indonesia dalam hukum jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Tak ada satu pasalpun dalam segala peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi terhadap wanita. Status ini menjadi makin sempurna setelah atas usaha Orde Baru disahkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan P.P. No. 10 tahun 1983. Menjadi perjuangan Golkar agar pengetrapan segenap peraturan perundang-undangan itu dilaksanakan secara konsisten. Makin banyak tersedia pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi wanita. Golkar juga bekerja keras untuk membuat wanita sadar akan hak dan kewajibannya menurut hukum, sehingga wanita tidak mudah menjadi korban ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Golkar sejak berdirinya, mempelopori peningkatan peranan wanita Indonesia di segala bidang bidang pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan banyak wanita Golkar berperan di dalam aspek pembangunan, sebagai menteri dan jabatan tinggi lainnya. Jumlah wanita Golkar yang duduk dalam MPR, DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II makin meningkat dan merupakan persentase yang tinggi dibandingkan dengan kedua fraksi lain.

Dalam rangka melanjutkan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, Golkar bertekad untuk tetap mengembangkan pelaksanaan Trilogi Pembangunan dengan lebih menekankan segi-segi pemerataan dan keadilan dalam arti yang seluas-luasnya dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Itulah hasil-hasil perjuangan Golkar dan konsepsi-konsepsi perjuangan Golkar yang akan datang. Kami percaya setelah menikmati hasil pembangunan ini di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto yang arif dan bijaksana dan penuh kenegarawanan, kita tetap menginginkan kesinambungan dan peningkatan pembangunan. Kesinambungan dan peningkatan pembangunan ini dapat terlaksana apabila Golkar mendapat kepercayaan kembali dari rakyat dalam Pemilu 1987. Dengan kepercayaan inilah Golkar akan memperjuangkan konsepsi pembangunan sesuai kehendak rakyat dan mencalonkan serta memperjuangkan terpilihnya kembali Bapak Soeharto sebagai Presiden/Mandataris MPR masa bhakti 1988-1993 dalam Sidang Umum MPR yang akan datang demi kepentingan bangsa dan Negara yang kita cintai.

Tak ayal lagi, Golkar memang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kedudukan wanita Indonesia. Oleh sebab itu janganlah ragu-ragu untuk mencoblos tanda gambar Beringin tanda gambar nomor 2 pada pemungutan suara tanggal 23 April yang akan datang. Dengan pilihan yang tepat itu, Insya Allah keadaan kita wanita dan rakyat Indonesia akan lebih baik lagi.

Marilah kita bersama-sama mensukseskan Pemilu 1987. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kita Menghendaki Masa Depan Generasi Baru Yang Lebih Baik

Sri Redjeki, SH, RRI, Maret 1987

Tidak lama lagi, tepatnya 23 April mendatang, hampir bertepatan dengan hari yang setiap tahun dirayakan, sebagai hari lahir Ibu kita Kartini, kita akan melaksanakan Pemilihan Umum yang keempat kalinya dalam masa Orde Baru.

Pada tanggal 23 April itu, kita semua tanpa ada perbedaan, baik wanita maupun pria, tua maupun muda, akan melaksanakan hak pilih sebagai warga negara yang akan menentukan siapa yang akan mewakili kita dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Dan sebenarnya dengan pilihan itu, kita pun telah menentukan masa depan bangsa dan negara. Sebagai kaum wanita, kita pun perlu turut menentukan arah kemana masa depan kita akan dibawa, karena kita kaum wanita adalah separuh lebih dari bangsa. Bahkan sesuai dengan kodrat, kita juga menjadi Ibu yang melahirkan generasi baru bangsa dari masa ke masa. Oleh karena itu amat terkait lahir batin dengan bagaimana bentuk masa depan bangsa nanti. Dan sesuai dengan naluri kaum Ibu, pastilah menghendaki bahwa masa depan putera-puteri generasi baru akan jauh lebih baik daripada keadaan sekarang.

Pilihan dan penentuan yang terkait dengan penciptaan masa depan yang lebih baik, telah dilakukan tiga kali sebelumnya dalam masa 21 tahun Orde Baru ini. Dan sebagaimana kita tahu bahwa semua kaum wanita bersama warga negara Indonesia lainnya, telah melakukan pilihan dengan baik dan tepat. Secara langsung maupun tidak langsung dirasakan adanya kemajuan selama 21 tahun terakhir ini.

Dan memang demikianlah, bahwa kemajuan selama 21 tahun melalui pembangunan-pembangunan ini, yang juga ditujukan untuk dan ikut dilaksanakan oleh kaum wanita, mampu menciptakan kehidupan yang baik dalam suasana yang penuh kedamaian dan ketentraman. Walaupun belum semua mampu hidup berkelebihan, tetapi makin banyak di antara kita yang telah hidup lebih layak daripada masa-masa sebelumnya. Kebutuhan hidup

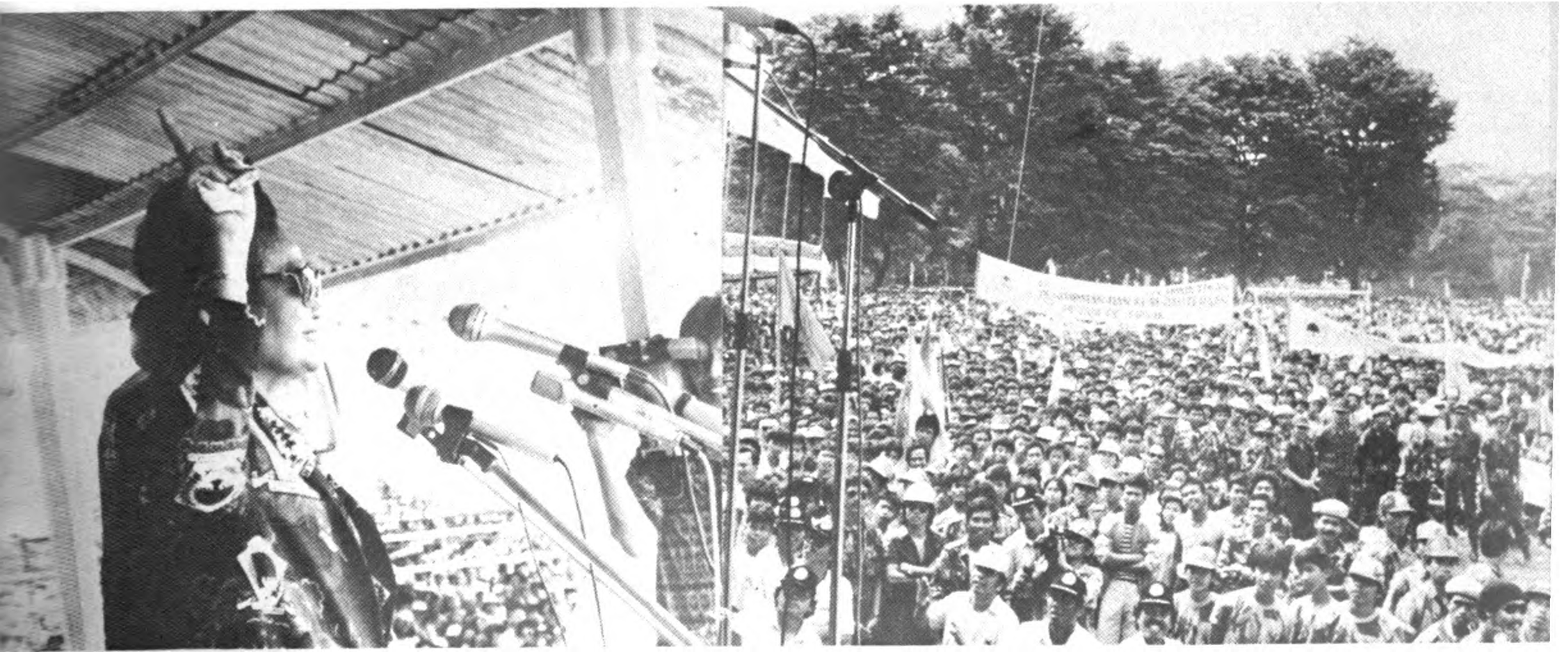

Ny EN Sudharmono di Jabar

Digitized by Google

sehari-hari, dirasakan cukup tersedia. Mudah kita beli di pasar-pasar dimana-mana. Kepada suami dan anak-anak bisa dihidangkan makanan yang sehat bahkan sempurna mutu dan gizinya. Dengan makanan yang bergizi baik, anak-anak Indonesia tumbuh dengan baik dan memiliki kecerdasan yang makin memadai. Remaja putera tumbuh makin tegap, remaja puteri tumbuh makin sehat dan ceria. Kebutuhan dan keperluan anak-anak telah dapat kita cukupi. Hal ini disebabkan karena industri telah tumbuh dan berkembang dimana-mana. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih terbuka bagi mereka generasi baru ini. Dokter dan Puskesmas ada dimana-mana dan siap melindungi anak-anak dari berbagai penyakit.

Dari televisi kita melihat, dari radio kita mendengar, dan dari surat kabar kita dapat membaca bahwa ketahanan ekonomi bangsa bertambah dengan baik. Banyak sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, bendungan dan irigasi telah dibangun. Berbagai program Inpres dan perkreditan telah merata dilaksanakan di seluruh tanah air untuk memperkuat daya tahan ekonomi pedesaan, khususnya para petani. Banyak dari kaum wanita di pedesaan ditingkatkan kecerdasan dan kemampuannya melalui pendidikan kesejahteraan keluarga. Itu semua secara menyeluruh telah berhasil menciptakan ketahanan ekonomi sehingga dalam menghadapi keprihatinan yang melanda perekonomian dunia beberapa waktu belakangan ini yang juga melanda negara kita, kita mampu mencegah perekonomian kita ke arah perkembangan yang lebih buruk.

Saya yakin bahwa dengan ketahanan yang telah ada, kita semua akan berhasil mengatasi kesulitan dan malahan pada waktunya keadaan akan menjadi lebih baik lagi. Kaum wanita telah terbiasa menghadapi masa suka maupun duka, karena sudah menjadi takdir kehidupan — seperti yang biasa dialami dalam kehidupan rumah tangga — bahwa suka dan duka memang silih berganti. Bila dibutuhkan untuk prihatin, wanita Indonesia pasti siap, bahkan wanita Indonesia dikenal sebagai yang paling tahan terhadap keprihatinan. Apalagi yang hanya bersifat sementara. Lebih-lebih bila di balik keprihatinan itu terbayang secercah harapan.

Sementara itu pula kita membaca, mendengar dan melihat betapa langkah-langkah dalam rangka pembangunan politik telah menyumbang pembangunan menyeluruh yang telah dilaksanakan bersama. Sebagai kaum wanita yang juga telah maju dan mempunyai hak yang tak berbeda dengan kaum pria, perlu mengetahui masalah-masalah dan perkembangan politik. Meskipun barangkali tidak semua dari kita berkeinginan terlalu mendalaminya, namun tetap perlu tahu beberapa hal. Saya akan mencoba menguraikan beberapa hal yang saya tahu kepada para Ibu dan semua kaum wanita sebagai berikut.

Pemantapan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat merupakan langkah maju bagi bangsa untuk meninggalkan cara politik yang lama yang berdasarkan perbedaan ideologi. Kini kita telah beralih ke cara politik yang berdasarkan program atau rencana-rencana untuk kesejahteraan masyarakat. Kompetisi (persaingan) atau perlombaan bekerja berdasarkan program atau rencana akan membawa kita ke arah kemajuan. Sedangkan kompetisi atau perlombaan berdasarkan perbedaan ideologi hanya akan membawa kepada berbagai perpecahan dan pertengkaran. Padahal kaum wanita lebih senang kepada ketentraman daripada hal-hal yang mencemaskan. Lebih menyenangi suasana penuh damai dalam kehidupan keluarga, di lingkungan masyarakat. Kita menginginkan cara kehidupan yang berkepastian bagi suami yang menjadi pencari nafkah, atau bagi diri sendiri bila kita harus terjun membantu keluarga mencari nafkah. Kehidupan politik yang baik, akan membawa kehidupan yang baik pula dalam bidang-bidang lainnya, terutama dalam kehidupan ekonomi.

Itulah tadi beberapa hal yang dapat kita catat sebagai kemajuan-kemajuan yang dicapai Orde Baru. Orde Baru adalah tatanan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat bangsa, termasuk bagi kaum wanita. Pada kesempatan ini, saya ingin pula menyampaikan beberapa hal mengenai Orde Baru yang saya anggap penting perlu diketahui oleh seluruh kaum wanita di Indonesia. Orde Baru mencakup seluruh kekuatan sosial politik yang ada.

Tetapi, dengan tetap menghormati peranan kekuatan politik yang lain, sejarah telah mencatat pula kenyataan peran besar

Ny Suprapti Suprapto di DKI Jakarta

Digitized by Google

yang disumbangkan Golkar dalam penegakan dan pengisian Orde Baru dalam 21 tahun terakhir ini. Bukannya Golkar ingin menjalankan peran itu sendiri, akan tetapi dalam banyak hal Golkar memikul lebih banyak beban dan tanggung jawab, karena memang Golkar telah mendapat kepercayaan sebagian terbesar rakyat.

Melalui Golkar dapat diharapkan bahwa kehidupan politik akan lebih terpaut dengan usaha-usaha pencapaian kesejahteraan masyarakat, yang dalam bentuk terkecilnya akan berwujud sebagai kesejahteraan keluarga.

Golkar, sedia berbagi tanggung jawab dengan siapa pun yang mampu. Karena tujuan Golkar ini memang tidaklah untuk memupuk kepentingan golongan atau kepentingan pribadi, namun mengutamakan kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Kaum wanita, separuh dari kekuatan bangsa ini, perlu menjangkau pula dengan pikiran-pikiran dan hal-hal yang penting. Kenapa kita harus ikut memikirkan? Perundang-undangan telah mengatur kesamaan kita dengan kaum pria, sehingga kepada kita pun dihadapkan hak dan kewajiban untuk melakukan pilihan-pilihan dalam kehidupan demokrasi untuk menentukan masa depan bersama. Untuk itu, saya sampaikan apa yang diinginkan oleh Golkar untuk dilakukan oleh kaum wanita. Golkar menyadari bahwa peranserta dan tanggung jawab wanita merupakan sesuatu yang mutlak dalam mensukseskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila. Oleh karena itu Golkar selalu mendorong dan mengandalkan keikutsertaan wanita dalam pembangunan.

Dalam kenyataan, dapat saya ungkapkan kepada saudara-saudara bahwa Golkar memang bersungguh-sungguh dengan apa yang dinyatakannya itu. Golkar telah memperjuangkan kedudukan kaum wanita Indonesia. Maka itu kita telah melihat adanya kaum kita yang mendapat kepercayaan memikul tanggung jawab besar. Ada yang dipercayakan menjadi Menteri serta jabatan-jabatan tinggi lainnya. Ada yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, dan jumlahnya akan bertambah melalui pemilihan umum yang akan datang ini bila kesempatan yang dibukakan oleh Golkar dapat kita bantu dengan dukungan semua sesama kaum wanita.

Tempat dan peranan yang lebih baik bagi kaum wanita seperti yang telah kita lihat bersama tak henti-hentinya diperjuangkan oleh Golkar, terutama nasib kaum wanita di pedesaan. Baik melalui pendidikan-pendidikan ketrampilan dan kesejahteraan maupun penciptaan suasana yang lebih baik yang membahagiakan kaum wanita. Kaum wanita pun diperjuangkan memperoleh kesempatan kerja seperti apa yang mereka inginkan, di segala tingkat, di pabrik-pabrik dan di kantor-kantor. Kaum wanita yang menghendaki bekerja di negara lain, tidak dilarang, namun kepada mereka diingatkan adanya juga risiko-risiko yang perlu dipikirkan di samping sekedar pemikiran mengenyam pendapatan yang besar. Kita memaklumi bahwa pemerintah tak dapat mengekang kebebasan dan keinginan yang bersangkutan untuk bekerja di luar negeri. Tetapi karena mereka itu bagaimanapun tetaplah warga bangsa, maka pemerintah mengupayakan jalan tengah berupa usaha perlindungan melalui perjanjian-perjanjian dengan pemerintah negara-negara tujuan. Namun terlepas dari itu semua, masalah tenaga kerja wanita ke luar negeri ini perlu kita kaji terus menerus untuk memperoleh pemecahan lebih baik di masa-masa mendatang. Dan untuk itu Golkar telah meng-

Sudharmono di Jakarta Utara

Digitized by Google

ingatkan kepada rekan-rekan yang ada di pemerintahan untuk secara seksama menangani masalah ini dan mengutamakan pertimbangan harkat dan martabat manusia di atas segalanya.

Demikianlah, Saudara-saudaraku sesama kaum wanita, saya telah mencoba menyampaikan beberapa pandangan dan sumbangan pemikiran saya bagi Saudara-saudara sekalian. Semoga hal itu semua dapat menjadi bekal pemikiran untuk direnungkan lebih jauh oleh kita masing-masing. Sebagai warga negara yang tak berbeda kedudukan, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang, kita semua akan melaksanakan hak pilih dua hari setelah peringatan hari lahir R.A. Kartini, untuk menentukan masa depan bangsa. Saya berpendapat masa depan tersebut perlu dijamin melalui upaya bersama sehingga terwujud apa yang menjadi keinginan dan cita-cita Ibu Kartini, yakni masa depan yang cerah bagi kaum wanita dan kehidupan seluruh bangsa. Semangat Ibu Kartini adalah semangat pembaharuan. Semangat kita pun adalah semangat pembaharuan. Dan Golkar sebagai kekuatan sosial politik peserta pemilu juga bersemangat memperjuangkan pembaharuan dan pembangunan. Apabila demikian, dengan semangat seperti itu, akan mudahlah bagi kaum wanita untuk menentukan pilihan secara tepat dan sebaik-baiknya, yakni memilih Golkar, dengan mencoblos tanda gambar beringin, bernomor dua. Semoga Tuhan senantiasa meridhoi segala niat baik kita semua.

Kepribadian Religius Mendapat Kesempatan Tumbuh

KH. Moch. Tarmoedji, TVRI, April 1987

Dengan iringan rasa syukur Alhamdulillah, kita semua kini telah berada kembali dalam rangka melaksanakan tugas nasional menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1987.

Pemilihan Umum tahun 1971, 1977 dan 1982, Alhamdulillah Golongan Karya telah memperoleh kepercayaan yang cukup besar dari Rakyat. Sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu bangsa yang religius, kita lebih meyakini bahwa kemenangan demi kemenangan yang diperoleh Golkar adalah berkat rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa serta berkat keteguhan pendirian dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Kemenangan tiga kali PEMILU itu yang diiringi dengan penuh tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, Golongan Karya sebagai pengemban amanat dan hakekat Orde Baru selama ini telah di anugerahi kemampuan menunjukkan bukti-bukti keberhasilan perjuangannya untuk secara bertahap tetapi pasti meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara yang demokratis, konstitusional dan berdasarkan hukum.

Siapa pun kiranya tak dapat menyangkal bahwa peri kehidupan dan peri penghidupan bangsa kita dewasa ini, telah jauh berbeda dengan keadaan enam belas tahun yang lalu. Dalam kurun waktu hampir dua dasawarsa terakhir ini, di bawah pimpinan Bapak Soeharto yang arif bijaksana kita semua telah berhasil menggegap gempitan derap langkah pembangunan di seluruh pelosok tanah air, meskipun diakui masih banyak hal yang belum sempat tersentuh sepenuhnya oleh proses pelayanan pembangunan, namun kenyataan menunjukkan bahwa selama ini kita telah mampu mengukir banyak kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan bangsa. Kemajuan yang kita capai bukan saja dalam bidang fisik semata tetapi simultan dan seimbang dengan kemajuan dalam aspek non fisik yang diwujudkan dalam berbagai kemajuan dalam bidang rohaniah. Salah satu kemajuan yang dicapai dalam kurun waktu hampir dua dasawarsa terakhir ini, ialah adanya semakin tumbuh suburnya kehidupan beragama. Syiar Agama semakin menggema di seluruh persada tanah air, seiring dengan itu semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, rasa kesetiakawanan sosial, persatuan dan kesatuan bangsa serta keserasian sosial dalam suasana kerukunan hidup antar warga negara semakin lebih mantap. Semuanya itu wajib kita syukuri, mengingat barang siapa yang tidak menyukuri hasil karya

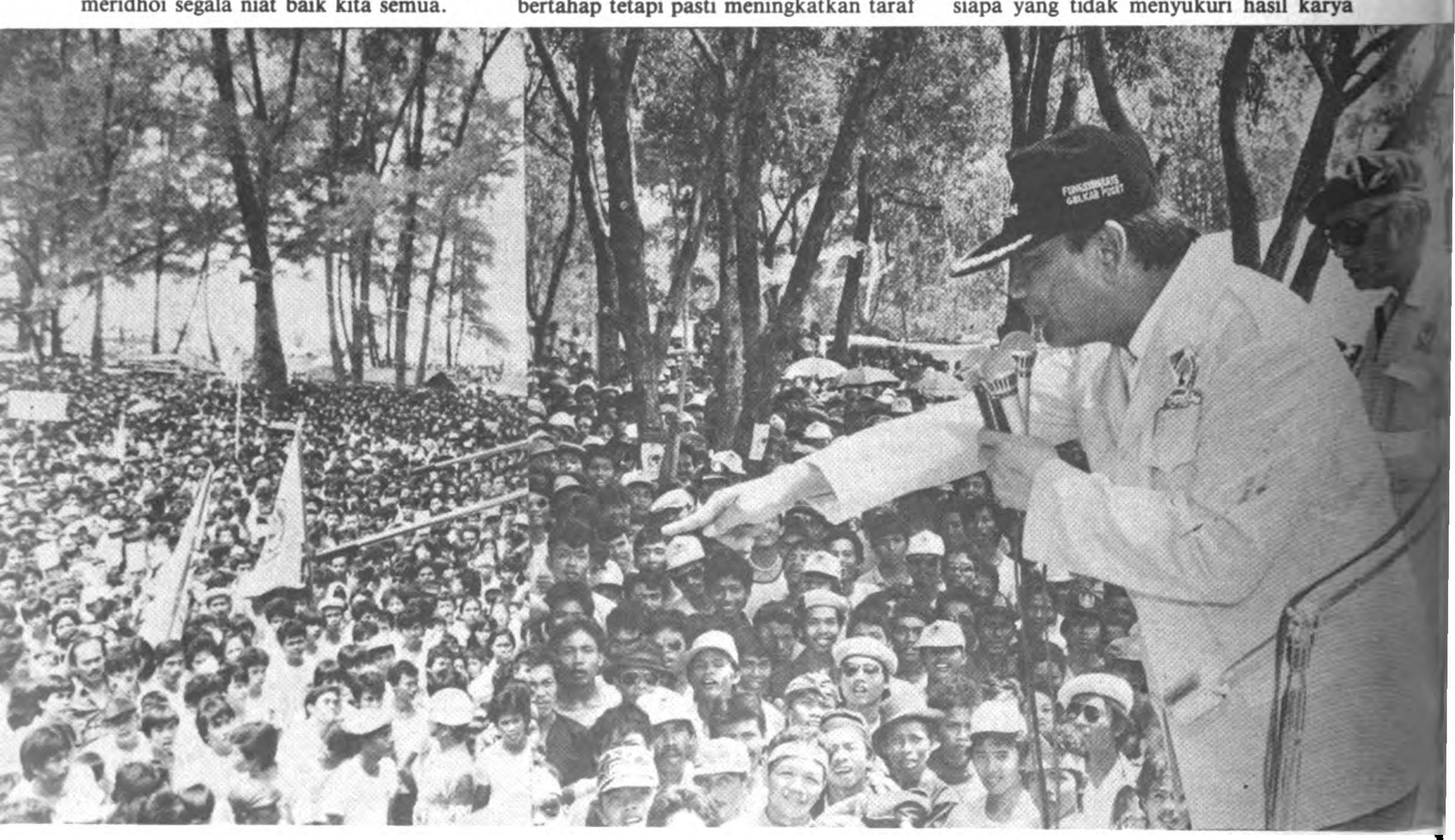

Sukamdani Sahid Gitosardjono dan H Amir Moertono di Jawa Tengah

Digitized by Google

manusia berarti sama halnya tidak menyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT.

Berkat limpahan rahmat Tuhan yang sebesar itu menambah kemantapan dan keyakinan Golkar dalam memandang betapa pentingnya kehidupan beragama ditumbuhsuburkan. Bagi Golongan Karya yang mendasarkan cita-cita perjuangannya pada Pancasila dan melaksanakan karya-karyanya sebagai pengamalan Pancasila, Agama mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, bukan saja karena bangsa kita kuat rasa keagamaannya, tetapi bangsa kita meyakini bahwa antara lain:

1. Agama berperan besar untuk meningkatkan ketaqwaan pribadi-pribadi bangsa kita. Kita meyakini bahwa insan yang taqwa akan mendapat tempat yang paling mulia di sisi Tuhan.

2. Agama menyerukan kepada semua manusia untuk saling hormat-menghormati tanpa memandang suku, bangsa, agama dan bahasa.

3. Agama menyerukan dan mengajarkan pemeluknya untuk selalu memelihara kerukunan, persatuan dan kesatuan. Demi untuk memperoleh keserasian dan keseimbangan dunia akherat, Agama mengajarkan pemeluknya untuk memelihara hubungan antar manusia dengan Tuhannya dan hubungan baik antar sesama manusia serta berkasih sayang dalam suasana kebersamaan.

4. Nabi tidak membenarkan adanya fanatisme kelompok/golongan yang berlebihan sehingga melebihi daripada pengabdiannya kepada Allah. Beliau mengajarkan bahwa pada hakekatnya manusia adalah merupakan keluarga besar yang satu. Citra keluarga menurut agama harus diresapi dan dihayati bersama sesuai dengan kodrat/fitrah manusia dengan budayanya.

5. Agama jelas dapat memberikan motivasi pada moral pembaharuan dan pembangunan bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila.

6. Agama adalah merupakan fitrah Tuhan yang harus diamalkan. Agama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Pancasila jelas tidak bertentangan dengan Agama. Kedua-duanya bahkan saling mendukung.

7. Agama mempunyai norma yang tinggi untuk membangun moral dan mental bangsa.

Sejak awal Golkar bertekad, berjuang dan berkarya dengan sungguh-sungguh dan penuh makna karena bagi Golkar pada dasarnya Agama adalah sesuatu yang amat sakral, penting dan menentukan sebagai sumber keluhuran budi dan keindahan akhlaq, sumber inspirasi dan sumber motivasi pembangunan bagi setiap warga negara dan bagi setiap penyelenggara negara yang pada hakekatnya merupakan sumber ketahanan mental dan spiritual. Faktor ketahanan mental dan spiritual merupakan sendi dasar ketahanan nasional. Semakin meningkatnya ketahanan nasional akan memberikan peluang bagi tumbuh suburnya kehidupan beragama dan makin pesatnya laju pembangunan nasional.

Atas dasar itulah dalam memasuki PEMILU 1987, Golkar tetap konsisten dalam tekad, perjuangan dan karya-karyanya untuk melanjutkan, meningkatkan, dan memperluas pembangunan nasional sebagai suatu sistem pembangunan yang merupakan pengamalan Pancasila dalam rangka membangun Manusia Indonesia seutuhnya dan Masyarakat Indonesia seluruhnya sehingga setiap warga negara mau dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai taraf kesejahteraan yang seimbang dan harmonis baik lahiriah maupun batiniah.

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan bangsa bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara spekulatif melainkan memerlukan perjuangan dan pengabdian yang ikhlas, program-program yang realistik, disertai usaha-usaha yang nyata. Selain daripada itu tidaklah cukup dilaksanakan hanya melalui suatu bidang pembangunan, melainkan perlu melibatkan keseluruhan aspek pembangunan sebagai suatu sistem. Dan sistem pembangunan yang telah terbukti hasilnya selama ini adalah sistem pembangunan sebagai *pengamalan Pancasila.*

Dengan sistem pembangunan nasional sebagai amalan Pancasila kita yakin sifat dan sikap kepribadian religius bangsa kita bukan saja tetap terpelihara bahkan akan dapat lebih dikembangkan dengan sebaik-baiknya yang merupakan program Golkar dalam lima tahun mendatang.

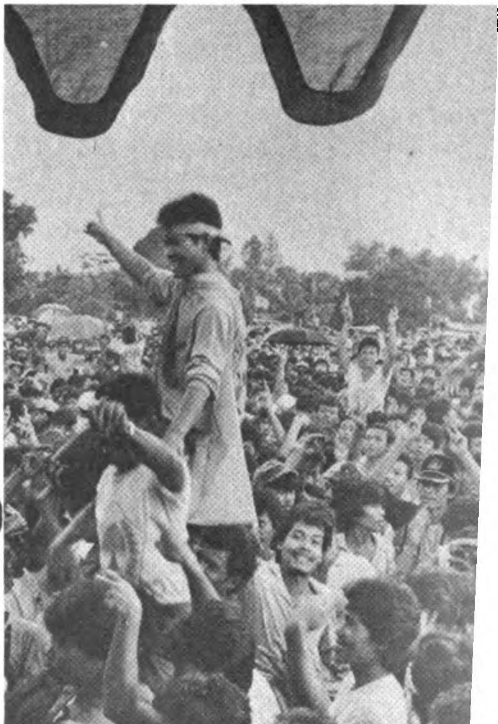

Eny Haryono di Jatim

Digitized by Google

Selain bangsa kita memang memiliki kepribadian yang religius, bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Kita bersyukur bahwa budaya bangsa kita adalah sangat mementingkan kerukunan yang meliputi semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Nilai-nilai ini dalam sejarah perjuangan bangsa kita telah membuktikan keampuhan sebagai suatu sistem ketahanan sosial yang dapat diandalkan.

Dengan penuh kesadaran Golkar akan tetap berjuang dan berusaha untuk selalu tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar sesama warga negara.

Memperhatikan perkembangan masyarakat dunia selang lintas waktu lima tahun mendatang yang sulit diramalkan, apabila kita tetap ingin kokoh berdiri sebagai suatu bangsa yang bermartabat di jalan ridho Tuhan Yang Maha Esa dan bertekad ingin mendapatkan hasil-hasil yang telah kita capai selama ini, jalan satu-satunya adalah meneruskan pembangunan nasional dalam suasana persatuan dan kesatuan bangsa yang terjalin dengan hidup rukun antar warga negara.

Atas dasar kerangka pikir seperti itu Golkar akan memperjuangkan melalui Sidang Umum MPR 1988 agar MPR dengan penuh kearifan menetapkan berbagai amanat yang akan lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta akan lebih mendorong tumbuh — suburnya kehidupan keagamaan.

Ketauladanan Bapak Soeharto yang disamping telah memprakarsai berdirinya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, juga dalam membangun dan memakmurkan sarana ibadah akan mewarnai karya-karya Golkar dalam lima tahun mendatang dan seterusnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka dalam menghadapi pemungutan suara pada tanggal 23 April 1987 mendatang, Golkar mengajak kepada segenap lapisan masyarakat dengan niat meluhurkan asma Tuhan Yang Maha Esa, kita tetapkan hati kita untuk memilih Golkar — dengan menusuk tanda gambar : "Pohon Beringin".

Kemenangan Golkar pada hahekatnya adalah kemenangan warga negara yang menyintai persatuan dan kesatuan bangsa, menyintai pembangunan dan yang menyintai makin menggemanya Syiar Agama dan makin semarak serta tumbuh suburnya kehidupan keagamaan. Kemenangan Golongan Karya adalah kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap meridhoi perjuangan kita bersama.

Jalan Lurus Dalam Dimensi Duniawi

KH. Sakti Qodratullah,
RRI, April 1987

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena, hanya dengan kodrat dan iradatNya-lah pada pagi hari ini dapat bersambung kata melalui RRI ini. Kehadiran saya disini untuk mewakili Golkar dalam rangka menjelaskan kepada Saudara-saudara tentang rencana-rencana dan pemikiran Golkar dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan bangsa baik lahir maupun bathin baik material maupun spiritual.

Saudara-saudara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pembangunan kesejahteraan manusia itu sesungguhnya tidak terlepas dari hakikat ajaran Allah SWT kepada manusia, bahwa mencari kesejahteraan di dunia ini seolah-olah akan hidup lama, sedangkan kesejahteraan di dunia dapat dipergunakan untuk mencapai kesejahteraan di akhirat nanti.

Namun upaya mencapai kesejahteraan itu tetap harus berimbang, antara keduanya yaitu berimbang lahir dan batin menempatkannya secara tepat sehingga keduanya searah dan tidak bertentangan satu sama lain. Dengan jiwa raga yang dimilikinya, manusia memanglah mahluk Tuhan yang dikaruniai dimensi-dimensi yang mulia. Kedudukannya dihadapan Tuhan mengandung makna-makna kemuliaan. Memang manusia adalah hamba Tuhan yang tunduk kepadaNya. Namun, manusia bukanlah tanpa arti di hadapan Tuhan. Manusia adalah juga kecintaanNya, sahabatNya dan pemegang amanat-

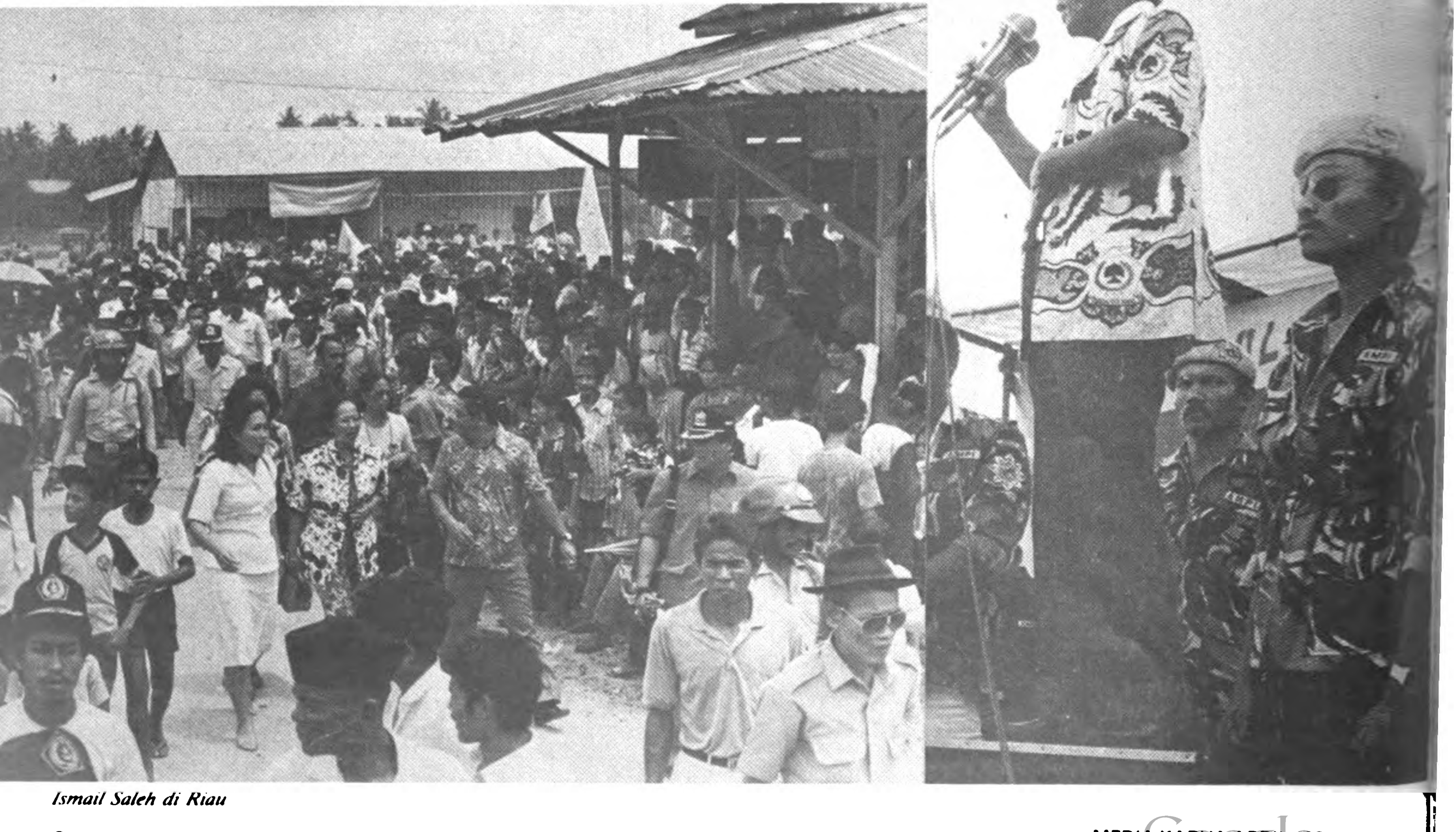

Ismail Saleh di Riau

Digitized by Google

Nya. Dengan keluruhan kedudukan seperti itu, manusia membutuhkan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memelihara keseimbangan tujuan-tujuan keakhiratan di satu pihak dengan tujuan-tujuan keduniaan pada pihak yang lain.

Kita, segenap insan Tuhan yang memenuhi belahan bumi Nusantara ini, bersyukur kepadaNya bahwa dari hari ke hari kita makin mampu menempatkan keseimbangan kepentingan lahiriah dan kepentingan batiniah kita dengan lebih baik.

Dalam dimensi duniawi, kitapun telah mampu berada di jalan yang lurus menuju hubungan yang makin baik antara sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga malapetaka sebagaimana yang dialami oleh banyak bangsa lain di dunia dihindarkan. Sementara perkembangan yang maju seperti itu telah dicapai bangsa Indonesia, di negara-negara lain masih terdapat kekacauan-kekacauan. Baik itu berupa perang antar bangsa, perang antar saudara dan pertikaian antar umat beragama. Agaknya, di belahan dunia yang lain itu, bahkan kesamaan agama tidak menjadi jaminan akan suatu kerukunan. Dan betapa menyedihkan, pertentangan-pertentangan itu telah meminta korban dan kesengsaraan umat manusia. Wanita dan anak-anak yang tak berdosa menjadi korban yang sia-sia.

Dan segala yang dipikul manusia di dunia ini bagaimanapun adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Sebagai manusia, kita, selalu melihat dunia ini sesuai keadaan kita. Dan pemahaman serta penafsiran kita tentang dunia itulah yang akan menentukan cara hidup kita dimuka bumi ini.

Dengan dasar negara Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka umat beragama di Indonesia berada pada suatu keadaan lingkungan yang amat baik. Di dalamnya, umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang juga adalah warga masyarakat bangsa ini, dapat mengembangkan dirinya sebaik-baiknya ia mampu mencapai. Bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam suasana lingkungan yang semakin segar itu, umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kita bebaskan mengembangkan dan menampilkan aspek amaliah maupun rohaniah dalam mencapai tingkat kehidupannya semakin luhur.

Dalam sejarah kehidupan bangsa kita, terlihat jelas betapa keimanan dan ketaqwaan telah menciptakan ketahanan mental bangsa dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan duniawinya. Itulah makna yang ditangkap oleh Golkar sehingga masyarakat semua warganya sebagai insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia Golkar menempatkan upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di tempat teratas.

Di alam Orde Baru selama 21 tahun terakhir ini, terbuktilah perpaduan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketrampilan serta kemampuan fisik, telah menuntun bangsa ini menuju tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemajuan-kemajuan ekonomi telah dicapai secara layak. Kebutuhan beras dan bahan-bahan makanan rakyat lainnya telah dapat dipenuhi. Bahkan negara kita menjadi negara yang mampu menjadi negara swasembada beras. Begitu pula kebutuhan dasar sandang, dengan memiliki industri tekstil sendiri, dapat dipenuhi lebih baik dari masa-masa yang lalu.

Memang sementara itu masih terdapat lapisan masyarakat yang perlu ditingkatkan taraf hidupnya, tetapi kendatipun belum semuanya dapat kita tangani, namun mereka tidak dilupakan. Berbagai usaha pemerataan pembangunan telah dilakukan untuk segera dapat menjangkau keperluan mereka.

Syukur alhamdulillah bahwa masyarakatpun tidak tinggal diam sekedar menonton penderitaan-penderitaan sesamanya, Golkar pun senantiasa menggelorakan semangat kesetiakawanan sosial secara nyata di antara anggota masyarakat sesama insan Tuhan.

Pembangunan disegala bidang yang kita laksanakan bersama melalui Pelita demi Pelita telah membuahkan hasil-hasil yang menggembirakan. Dengan tidak menutupi diri dari kemajuan ilmu dan teknologi, kita telah mengolah alam kita sebaik-baiknya, dan telah pula membangun industri-industri dan berbagai sektor lainnya sebagai penunjang pembangunan ekonomi kita. Yang kesemuanya itu tiada lain bertujuan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin manusia Indonesia.

Insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah insan yang dibuka mata-hatinya lebar-lebar oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga mereka mampu mengupayakan apa yang baik bagi kehidupannya sesuai dengan ketentuan Tuhan bahwa insan yang iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dimuliakan derajatnya.

Kita bersama telah memperoleh hasilnya, sebagaimana diajarkan oleh agama kita, siapa yang menanam maka mereka akan memperoleh hasilnya, dan menikmati buahnya.

Sebagai satu kekuatan sosial politik dalam masyarakat, Golkar senantiasa mendukung semua pihak dan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang memperjuangkan

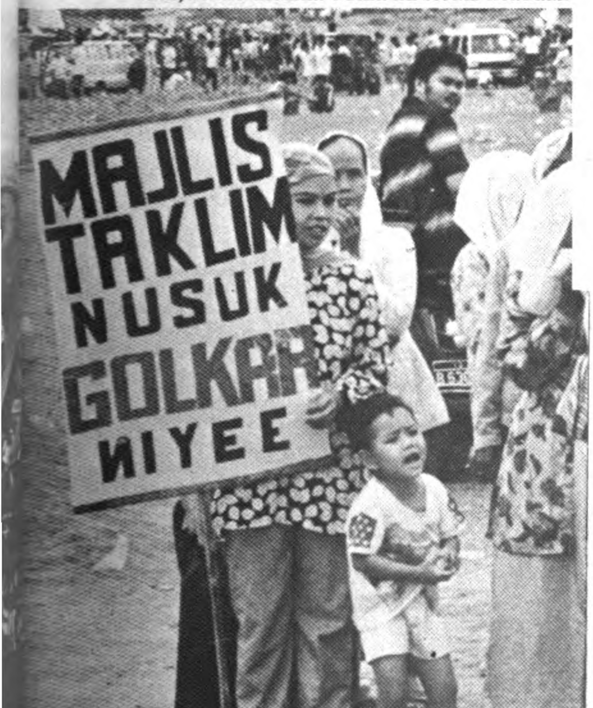

Jawa Barat

Digitized by Google

peningkatan mutu pendidikan dan kualitas kehidupan beragama di negara kita.

Mutu kehidupan umat beragama sebagai satu bangsa, sangat menjadi perhatian Golkar. Dalam rangka peningkatan mutu kehidupan umat beragama itu, Golkar mengajak saudara-saudara sebagai insan yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengarahkan nilai-nilai keagamaan kita dengan seksama. Dan kemudian nilai-nilai itu kita persegar dan perkuat sehingga menjadi kekuatan yang kreatif guna membangkitkan gerak dan dinamika masyarakat.

Kita semua secara bersama-sama mempunyai kewajiban membangun citra kehidupan beragama yang kokoh dan kuat sehingga agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia mampu berperan sebagai pondasi moral dan spiritual dalam mengembangkan peradaban bangsa ini.

Bagi bangsa Indonesia, kekuatan moral yang terkandung dalam agama dan Pancasila, kita yakini akan mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun.

Pancasila tidak bertentangan dengan moral agama. Moral Pancasila yang berintikan kebersamaan dan kekeluargaan itu justru memungkinkan berbagai moral agama didayagunakan oleh para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama sebagai satu bangsa yang berpengharapan dan bermasa depan.

Sebagai insan yang beragama, dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita semua juga adalah insan yang menjadi bagian dari masyarakat dan bangsa ini dan dalam kedudukan selaku warga bangsa dan masyarakat Indonesia, kita telah menjalankan dan menikmati karunia Tuhan melalui upaya kita bersama dengan melaksanakan pembangunan. Suatu pembangunan yang dijalankan secara berencana dengan asas kebersamaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai warga negara, asas itu kita amalkan dalam suasana demokratis, dalam kehidupan politik dan masyarakat sehari-hari maupun melalui penentuan-penentuan sekali dalam lima tahun melalui Pemilihan Umum. Sudah tiga kali dalam masa Orde Baru ini, Pemilihan Umum kita laksanaan bersama dengan baik dan teratur. Dan dalam tiga kali Pemilihan Umum itu, telah tiga kali pula Golkar mendapat kepercayaan sebagian besar umat beragama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penyalur aspirasi politiknya untuk melaksanakan tanggung jawab memperjuangkan pencapaian cita-cita kesejahteraan lahir batin bagi bangsa ini. Untuk itu Golkar menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dalam hubungan dengan Pemilu tanggal 23 April yang akan datang Golkar masih terus memerlukan dukungan dari sebagian besar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk kemudian bersama-sama pemerintah meneruskan laju pembangunan.

Pastilah dukungan itu adalah dukungan yang dengan tulus ikhlas. Terhadap dukungan ini, kami tak dapat menjanjikan apa-apa, selain dengan ketulus ikhlasan selaku insan Allah dimuka bumi ini, Golkar berusaha bekerja lebih keras dan lebih tekun untuk membangun bangsa dan negara yang menjadi ladang kehidupan kita di dunia seperti apa yang menjadi kehendakNya.

Dengan dukungan para umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti Saudara-saudara sekalian pada saatnya nanti akan memberikan suaranya kepada Golkar, dengan mencoblos tanda gambar Beringin, bernomor dua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan taufik dan hidayahNya kepada cita-cita kita bersama.□

Asyik juga

Digitized by Google

Disiplin Nasional Melalui Pendidikan Politik

Pada hakikatnya disiplin nasional berkaitan erat dengan sikap pribadi serta kelompok terhadap tujuan-tujuan nasional. Disiplin nasional dinyatakan ada, jika pribadi dan kelompok manusia Indonesia menghayati tata nilai nasional yang pada gilirannya menciptakan sikap memahami, menghargai, taat dan patuh terhadap norma, etika serta peraturan permainan yang bersifat nasional, demi tercapainya tujuan-tujuan nasional.

Ungkapan di atas merupakan bagian dari ceramah Sekjen DPP Golkar Ir Sarwono Kusumaatmadja di depan Seminar Pembinaan Disiplin Nasional yang diselenggarakan oleh IKIP Semarang pertengahan bulan lalu.

Lebih lanjut Sarwono mengemukakan bahwa ditinjau secara hakiki maka persoalan disiplin berawal dari penghayatan nilai. Disebutkannya contoh bahwa demokrasi sebagai norma pemerintahan bermula dari nilai persamaan hak. Pada gilirannya persamaan hak sebagai nilai dan demokrasi sebagai norma melahirkan etik politik bahwa perbedaan pendapat haruslah dihargai. Namun demikian, tutur Sarwono, supaya perbedaan pendapat tidak menciptakan kekacauan dan tidak melanggar kepentingan bangsa, maka diciptakan aturan permainan politik, sehingga terciptalah kehidupan politik sebagai suatu instrumen bangsa untuk meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dengan mengambil makna penjelasan Pangab LB Moerdani pada penataran calon manggala di Istana Bogor tahun lalu, Sarwono mengatakan bahwa disiplin nasional tidak dengan sendirinya ada, namun harus ditanamkan melalui proses pendidikan dan sosialisasi.

Pendidikan politik menjadi instrumen penting dari sosialisasi nilai-nilai politik.

Konflik Nilai

Di depan seminar yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke XXII IKIP Semarang itu dikatakan oleh Sarwono bahwa disiplin nasional merupakan masalah yang aktual dan amat relevan setidak-tidaknya karena dua hal. Pertama, bahwa Pancasila sebagai perangkat nilai yang bersifat nasional telah diterima. Tapi, masih dihadapi kenyataan terdapatnya heterogenitas budaya yang ditandai oleh keragaman etnis, agama, dan latar belakang sosial, di samping adanya komitmen untuk berhimpun menjadi bangsa yang satu. Dengan demikian sering terdapat masalah bagi anggota masyarakat tentang bagaimana menyesuaikan diri antara disiplin sosial kelompoknya dengan disiplin sosial yang harus berlaku dalam suatu negara bangsa yang secara ideologis terikat pada kesatuan dan persatuan nasional. Yang kedua, menurut Sarwono, Indonesia adalah suatu negara berkembang dimana proses pembaruan dalam masyarakat

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BADAN PENGELOLA AIR MINUM (BPAM)
KABUPATEN JAYAPURA
Jln. Kabupaten Telp. 22338 Telex 76132 Pab Irja Jayapura.

SEGENAP KARYAWAN/KARYAWATI DAN DIREKSI BADAN PENGELOLA AIR MINUM KABUPATEN JAYA PURA SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 SEBAGAI SARANA KEDAULATAN RAKYAT UNTUK MENJAMIN TERCAPAINYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR, SEJAHTERA LAHIR BATIN

Digitized by Google

sedang berlangsung. Penyesusian diri yang merupakan konsekuensi pembaruan membawa serta juga penyesuaian bahkan transformasi nilai-nilai dalam masyarakat. Kedua hal tersebut di atas dikatakan oleh Sarwono dapat menimbulkan kemungkinan konflik dan kerancuan nilai. "Kepastian akan nilai-nilai amatlah perlu dalam rangka membentuk disiplin nasional," tegasnya. "Dengan sendirinya masyarakat yang membangun dan berubah dengan problema nilai yang tak dapat dielakkan itu akan juga berhadapan dengan masalah serius dalam pembentukan disiplin nasionalnya."

Pendidikan Politik

Mengenai kehidupan politik yang berada dalam konteks budaya, konteks ideologi, dan konteks pembaharuan itu oleh Sarwono dikatakan bahwa posisinya amatlah sentral sebagai suatu bidang kehidupan dimana berbagai kemungkinan konflik dicarikan penyelesaiannya, dan dimana berbagai kepentingan yang beragam harus dipadukan. Oleh karena itu disiplin dalam bidang politik adalah aktual dan relevan, karena melihat konteksnya dunia politik tidak bisa terlepas dari konflik dan kerancuan nilai yang selalu menyulitkan pembentukan suatu disiplin yang konsisten dan jelas.

Diuraikan oleh Sarwono bahwa tujuan pendidikan politik dalam konteks disiplin nasional adalah upaya penanaman nilai-nilai politik sehingga dihayati dan diyakini secara nasional dan dengan demikian mampu mewujudkan ketaatan dan kepatuhan akan norma, etik serta aturan permainan politik demi terwujudnya tujuan-tujuan nasional. "Pendidikan politik menjadi instrumen penting dari sosialisasi nilai-nilai politik," katanya. Tanpa adanya pendidikan politik yang mengacu pada nilai-nilai ideal kehidupan politik bangsa, maka kehidupan politik akan selalu menampilkan cerminan dari konflik serta kerancuan nilai yang masih merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa dewasa ini. Ketiadaan penghayatan nilai-nilai politik nasional selalu mencerminkan kerancuan nilai yang pada gilirannya menimbulkan kekacauan tata pikir, kerancuan perilaku politik, tidak satunya kata dengan perbuatan, serta berbagai bentuk resistensi baik yang terbuka maupun yang terselubung. Menegaskan hal ini Sarwono mengajak memahami ucapan Presiden Soeharto dalam berbagai kesempatan yang menyatakan bahwa pembangunan politik adalah amat sulit malah mungkin yang paling sulit.

Lalu bagaimana menumbuhkan disiplin nasional melalui pendidikan politik? Oleh Sarwono dikatakan bahwa secara sederhana hal itu dapat dirumuskan dengan dilakukannya upaya pendidikan yang sadar serta konsisten agar nilai-nilai Pancasila dapat tersosialisasikan serta operasional, sehingga terwujud dalam kehidupan politik. "Kepatuhan serta ketaatan yang didukung oleh kesadaran politik akan mampu menampilkan sosok kehidupan politik yang utuh, baik secara ideologis, struktural maupun kultural," ungkap tokoh muda Golkar ini. Dalam pengertian yang terbatas, pendidikan politik telah dilaksanakan, namun belum secara ideal berada dalam tingkatan yang memadai yang mampu menciptakan disiplin nasional dalam kehidupan politik. Menurut Sarwono, kunci untuk melaksanakan pendidikan politik yang bernilai strategis tidak terletak pada upaya-upaya memperkenalkan nilai-nilai Pancasila saja, namun harus diiringi pula dengan upaya-upaya nyata untuk menciptakan suasana ideologis, tatanan struktur maupun tatanan budaya yang diperlukan agar nilai-nilai yang ingin ditanamkan tersebut mendapatkan lahan persemaiannya untuk kemudian tumbuh dan berkembang.

Tugas besar bangsa

Di hadapan sekitar 500 peserta seminar, Sarwono mengatakan lebih lanjut bahwa mengingat luas ruang lingkup pendidikan politik maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyamakan persepsi tentang hakikat kehidupan politik, serta fungsi dan mekanisme kehidupan politik itu. Pendidikan politik dengan berbagai aspeknya tadi merupakan tugas besar yang harus dipikul oleh seluruh komponen kehidupan bangsa. Dalam kaitan ini disebutkan oleh Sekjen DPP Golkar bahwa pemeliharaan serta pengembangan hakekat perguruan tinggi sebagai lembaga yang mempunyai fungsi keilmuan akan memberikan sumbangannya pada dunia politik karena dapat memasyarakatkan nilai obyektivitas serta disiplin berfikir. Tanpa tumbuhnya kemampuan bersikap obyektif serta disiplin berfikir, bangsa kita akan selalu mengalami kesukaran mencari jalan keluar dari sekian banyak kepentingan subyektif yang secara wajar akan selalu ada dalam masyarakat.

Mengenai peranan lembaga infrastruktur, dikemukakan bahwa walaupun perannya dalam pendidikan politik penting, namun ia akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah politik praktis, dimana kepentingan-kepentingan yang bersifat jangka panjang dan strategis akan selalu bercampur baur dengan kepentingan taktis berjangka pendek. Dalam hubungan ini ditekankannya bahwa aspek-aspek idiil dari kehidupan politik harus dipelihara bersama sebagai suatu komitmen nasional. Dengan demikian dapat ditumbuhkan kepastian-kepastian nilai, sehingga keyakinan kita akan nilai-nilai yang bersifat nasional tadi akan melahirkan disiplin nasional yang tumbuh dari kesadaran, bukan disiplin mati yang tumbuh dari kekosongan wawasan serta ketakutan atau ketergantungan pada kekuasaan. Demikian Sekjen DPP Golkar. □

Rendy MS/TAP

PT. BENTENG MAS AGUNG

Jl. Tugu No. 99 Telp. 21420 JAYAPURA

Jl. Ratulangi No. 26 A–B Telp. 84814 UJUNG PANDANG

Kemenangan Golkar dalam pemilu 1987

menjamin kesinambungan pembangunan

Digitized by Google

Kehidupan Beragama Memperoleh Keleluasaan Untuk Berkembang

Isra Mi'raj, perintah shalat 5 waktu dalam sehari semalam dari Tuhan kepada umat Muhammad, senin malam 6 April lalu diperingati di DPP Golkar.

Acara yang dilangsungkan di halaman DPP Golkar itu dihadiri lebih kurang dari 2000 jamaah, yang memadati halaman. Hadir pada malam itu Ketua Umum Sudharmono, Gubernur DKI Soeprapto dan KH. Abdurachman Wahid, sebagai penceramah.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Golkar, Sudharmono dalam sambutannya mengatakan, adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita, Bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar dan penuh kemajemukan ini, yang telah mampu membina tradisi memperingati hari-hari besar keagamaan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dalam suasana persaudaraan.

Peringatan semacam ini bahkan makin hari dirasakan makin semarak dengan menarik minat yang semakin luas dari kalangan masyarakat kita yang memang bersifat agamis.

Dan yang amat menarik dan menggembirakan adalah peringatan-peringatan hari-hari besar agama itu dilaksanakan dalam suasana ketenteraman dan kegairahan. Setiap kelompok agama mempunyai kesempatan yang luas untuk memperingati dan merayakannya sesuai dengan keyakinan penganut agamanya masing-masing, sementara kelompok agama yang lain mengikutinya dengan penuh rasa hormat, meskipun berbeda keyakinan agamanya.

Ini menandakan bahwa bukan saja kehidupan beragama memperoleh keleluasaan berkembang sesuai dengan amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN, tetapi juga suatu pertanda bahwa kerukunan hidup dan saling hormat-menghormati antara umat beragama yang berbeda makin terasa dan telah menjadi kesadaran Bangsa kita.

Menurut pandangan saya hal ini dapat terus dikembangkan karena Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang memberikan kekuatan dan tuntunan kita semua sebagai bangsa, bagaimana dapat hidup bersatu, rukun dan saling menghormati, sekalipun kita berbeda-beda, khususnya dalam keyakinan agamanya.

Apalagi setelah bangsa Indonesia dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab menerima dan menjadikan Pancasila itu sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bangsa, bernegara dan bermasyarakat, dan setelah Pancasila itu benar-benar kita masyarakatkan melalui penataran-penataran P4. Maka makin terang dan jelaslah hubungan kita masing-masing sebagai pribadi-pribadi, insan Pancasila sebagai wargan negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai umat beragama menurut keyakinan masing-masing.

Pancasila pasti tidak bertentangan dengan agama manapun dan bahkan Pancasila menjamin berkembangnya dan pengembangan kehidupan beragama oleh pemeluk-pemeluknya masing-masing sepanjang cara-cara pengembangannya itu sendiri tetap dilaksanakan dalam batas-batas semangat dan jiwa Pancasila itu sendiri. Adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari kita semua terutama para pemimpin pemerintahan, pemimpin masyarakat, termasuk para Ulama dan pemuka agama untuk menjelaskan dan memasyarakatkan pengertian dan sikap yang sangat konstruktif dan etis semacam itu, agar supaya suasana persaudaraan yang aman dan tenteram dalam pengamalan agama kita masing-masing dapat makin terbina dengan baik.

Malam ini kita, keluarga besar Golkar tidak ketinggalan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dalam suasana negara dan bangsa kita sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan diri melaksanakan tugas besar di bidang politik, ialah Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia tanggal 23 April yang akan datang.

Seperti halnya dalam peringatan-peringatan hari besar lainnya, seperti hari besar nasional, maka dalam memperingati Isra Mi'raj ini perlu kita gali makna atau hikmahnya yang dalam yang dapat kita pakai sebagai sarana mental mempersiapkan diri untuk mensukseskan tugas-tugas yang sedang kita hadapi.

Dari uraian-uraian yang disampaikan oleh Bapak H. Abdulrahman Wahid tadi, juga dari uraian maupun tulisan-tulisan Islam yang ada, maka kita dapat mengambil hikmahnya antara lain: bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan suatu keajaiban; suatu mujijat yang hanya mungkin terjadi berkat kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Kita hanya dapat memahaminya dengan kepercayaan dan keyakinan kita yang tulus dan mendalam atas keber-

Pancasila tidak bertentangan dengan agama

Digitized by Google

Isra Mi'raj perlu digali hikmahnya

adaan Allah dan kebenaran agama yang diajarkannya melalui utusannya yang tidak lain adalah Muhammad SAW.

Sebagai seorang muslim, kita sungguh-sungguh percaya atas adanya kodrat, mujijat dan keajaiban atas kehendak Allah SWT yang maha kuasa dan maha mengetahui. Apa saja dapat terjadi dan dapat dijadikan kalau dikehendakiNya.

Dalam pada itu agama kita juga mengajarkan kepada kita bahwa jika kita menghendaki perubahan apalagi perubahan menuju perbaikan, maka perubahan itu hanya dapat terjadi apabila kita, manusia mengusahakannya. Tanpa usaha kita sendiri, tanpa karya nyata kita sendiri perubahan menuju perbaikan itu tidak mungkin diberikan kepada kita oleh Allah SWT, sekalipun kita secara terus menerus memohonnya.

Karena itulah maka dalam kesempatan kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Besar kita Muhammad SAW, dimana kita mencoba untuk memetik hikmahnya yang penuh manfaat bagi perjoangan bangsa kita yang sedang menghadapi tugas-tugas besar, khususnya tugas besar untuk mensukseskan Pemilihan Umum 23 April 1987 ini, maka saya ingin mengajak kepada seluruh warga Golkar khususnya dan warga bangsa Indonesia pada umumnya agar kita bersama-sama turut serta secara aktif dalam kegiatan Pemilihan Umum itu. Marilah kita gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya dan bersamaan dengan itu kita dengan penuh rasa syukur terus mendekatkan diri kita, mempertebal kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Hanya dengan usaha dan karya nyata, dibarengi dengan selalu memanjatkan doa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, —dengan pengamalan nyata dan keimanan—, Insya Allah Pemilihan Umum 1987 ini akan benar-benar sukses dalam arti: berlangsung dengan aman, tertib dan lancar sesuai peraturan yang berlaku; diikuti oleh sebagian terbesar warga bangsa Indonesia yang berhak memilih dan hasilnya akan makin memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, memantapkan stabilitas nasional yang dinamis, dimana kehidupan demokrasi, konstitusi dan berdasarkan hukum makin berkembang dan pelaksanaan pembangunan menuju kesejahteraan lahir batin, dunia-akhirat dapat terwujud dan berjalan lancar. Kiranya tidak perlu dijelaskan lagi bahwa hasil yang menjamin kesinambungan keadaan yang saya gambarkan di atas adalah apabila Golkar tetap memperoleh kepercayaan dari rakyat yang menentukan seperti hasil-hasil Pemilu yang lalu.

P.T "TEGUH KARYA PRATAMA"

Jln. Nona Saar Sopacua 21 Ambon

Telp. Kantor : 2257

PEMBORONG : BANGUNAN - JALAN - JEMBATAN

Kemenangan Golkar dalam pemilu 1987
menjamin kesinambungan pembangunan

Digitized by Google

Abdurachman Wahid Ceramah Di Golkar

Peringatan Isra Mi'raj tahun ini waktunya bersamaan dengan hari-hari kampanye pemilihan umum. Bagi umat Islam Isra Mi'raj diperingati di berbagai masjid, surau atau tempat-tempat yang lain.

Pada 6 April lalu, peringatan ini juga diselenggarakan di DPP Golkar. Untuk memberi arti dan makna dari peringatan Isra, DPP Golkar mengundang tokoh yang sudah beken di kalangan masyarakat. Dia adalah KH Abdurachman Wahid, Ketua Umum PB. NU.

Keberadaan Abdurachman Wahid, yang lebih akrab dengan panggilan Gus Dur itu, bukan hanya sekali ini saja. Tapi sudah seringkali. Dalam satu bulan ini saja, Gus Dur sudah dua kali masuk di lingkungan Golkar. Pertama memberi ceramah pada peringatan yang sama di Surabaya, Jawa Timur, yang diselenggarakan oleh DPP tingkat I.

Peringatan yang diselenggarakan di daerah tersebut, tidak saja dihadiri oleh warga beringin dan simpatisan, tapi juga warga Nahdatul Ulama, dari beberapa kabupaten di daerah Jawa Timur. Di DPP Golkar pun juga demikian, tidak hanya dari warga Golkar, tapi organisasi kemasyarakatan yang lain seperti NU, Muhammadiyah, pengajian Al Hidayah, serta Satuan Karya Ulama Golkar juga hadir.

Dalam ceramah Isra Mi'raj di DPP Golkar, gus Dur mengupas arti dan makna dari peringatan itu cukup mendalam. Selain itu juga disinggung tentang wawasan Islam dalam bernegara.

Dikatakan, Agama Islam tidak pernah memberikan corak pemikiran khusus tentang politik. Islam itu hanya memberikan pemikiran secara umum dan Global. Dan Islam itu hanya memikirkan tujuan hidup yang mulia. Jadi jelas, bahwa Islam itu juga memikirkan soal politik, ekonomi, kemasyarakatan dan yang lain.

Dengan demikian lebih jelas bahwa kalau ditanyakan tentang konsep politik Islam itu secara langsung akan tertuju kepada konsep bernegara. "Kalau ditanyakan tentang konsep bernegara? saya jawab, yang dimaksud dengan konsep adalah meliputi bentuk-bentuk negara dan proses pengalihan kekuasaan. Maka Islam tidak mempunyai konsep Negara, tapi mempunyai wawasan tentang negara," ujar gus Dur.

Lebih lanjut dikatakan, agama Islam itu tidak mengembangkan yang baku dan tuntas tentang negara. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengembangkan sendiri apa yang menjadi keinginannya. "Hal ini bukan berarti Islam kurang," tegasnya.

Kemudian dia memberi contoh. Pada jaman Rasulullah mengembangkan agama, beliau mula-mula hanya memimpin masyarakat keluarga dalam suku Qurais. Setelah itu beliau pindah di Madinah dan memimpin suku Qurais dan yang lain. Setelah itu, Abubakar, kalifah pertama mengembangkan lagi menjadi masyarakat antar bangsa. Dan pada kalifah berikutnya, Umar bin Chatab, hal ini diperluas lagi menjadi masyarakat antar bangsa dan yang beliau pimpin terdiri dari bangsa Mesir, Arab, Persia dan yang lain.

"Jadi jelas, kaum muslimin sekarang ini hidup dalam negara bangsa. Bahkan sekarang ini sudah kembali kepada siklus kota seperti jaman Rasulullah di Madinah. Timbul pertanyaan, yang mana sekarang ini yang menjadi bentuk negara baru dalam konsep Islam?"

"Contoh, sekarang ini ada negara Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, Kerajaan Saudi Arabia. Di antara negara-negara Islam tersebut, tidak satupun yang dapat mewakili negara Islam. Begitu pula dengan Indonesia yang menganut sistem Pancasila berhak juga untuk mewakili pandangan Islam tentang negara," ujarnya.

Sedangkan dalam proses pengalihan kekuasaan begitu pula. Waktu nabi wafat, diganti dengan Kalifah Abubakar dengan cara dibaiat. Kemudian waktu Abubakar akan meninggal, beliau meminta kepada semua orang agar dapat digantikan oleh Umar bin Chatab. Dan penggantian untuk menjadi kalifah berikutnya dari Umar ke Usman bin Affan, penggantian tidak boleh dilakukan secara diangkat.

Saat Umar akan meninggal beliau meminta, supaya penggantiannya dilakukan secara musyawarah. Dalam musyawarah tersebut terdiri dari 7 orang dan satu di antaranya adalah anak dari Umar sendiri, Abdullah. Namun Umar memberikan catatan, agar Abdullah tidak dijadikan penggantinya. Dan akhirnya Usman bin Affan menggantikan kedudukan Umar bin Chatab untuk menjadi kalifah. "Barangkali, kalau pada kita, seperti MPR," ujarnya.

Bahkan dalam pengalihan kekuasaan di abad modern di negara-negara kerajaan yang pimpinannya juga dilakukan secara pemilihan umum — seperti yang dilakukan di MPR kita — di Indonesia yaitu yang memegang amanat kekuasaan adalah Presiden. Dan ada pula sistem seperti di Saudi Arabia, Iran. "Nah disinilah tampak lebih jelas bahwa Islam tidak menentukan cara pemilihan Kekuasaan. jadi kalau bentuk negara dan pengalihan kekuasaan tidak ada resepnya yang khusus, bagaimana kita

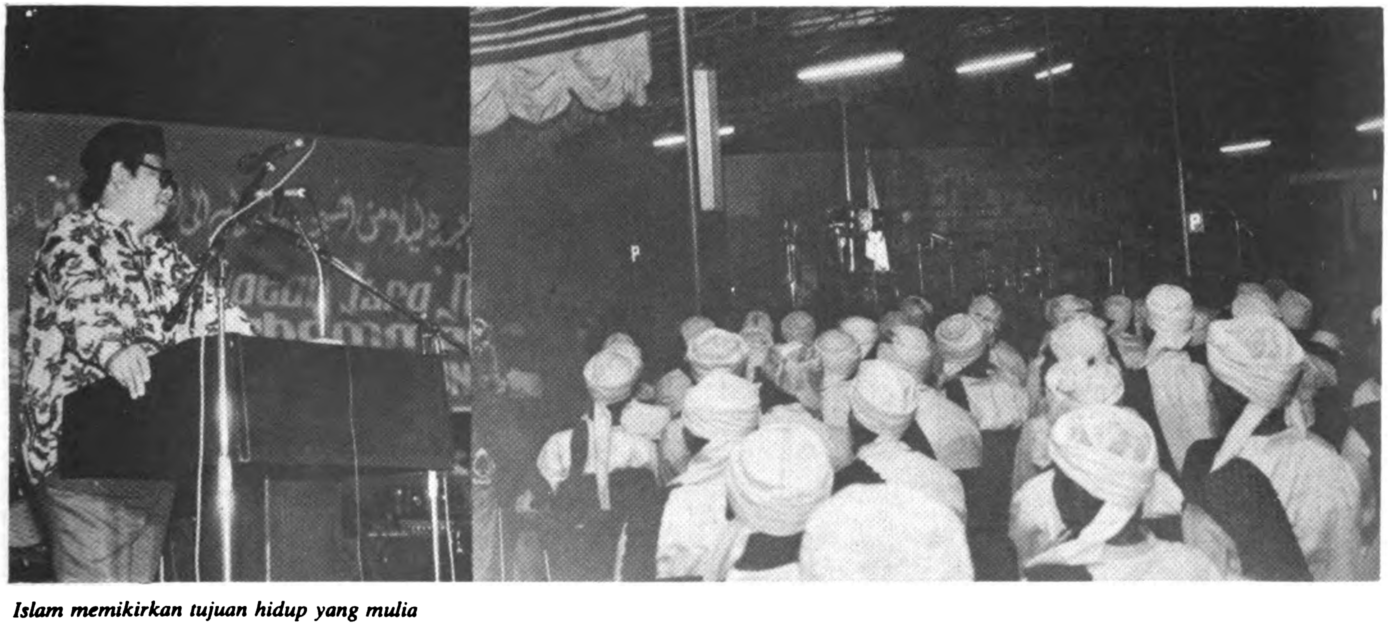

Islam memikirkan tujuan hidup yang mulia

Digitized by Google

Isra Mi'raj di DPP Golkar

dapat mengatakan bahwa Islam mempunyai.

Karena itu, lanjut gus Dur, bahwa Islam dalam mengembangkan kenegaraan yang baik, luhur tidak akan berkurang dengan adanya tidak berdiri negara Islam. Karena Islam dalam mengembangkan wawasan kenegaraan itu sebagai agama yang meyakinkan kehidupan kolektip.

"Inilah yang membuat mengapa kita harus menentukan bentuk negara sendiri. Dan untuk Indonesia sudah diputuskan untuk menjadi negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Dan ini yang harus diratakan. Dan jangan sampai ada orang yang terpancing untuk menganggap penting adanya kelompok-kelompok politik yang memakai baju Islam," tegasnya.

Menyesatkan

Apabila dalam kampanye Pemilu ada orang yang mensitir ayat suci Al Qur'an mengenai kulil amri, dinilai oleh Abdurahman sangat menyesatkan. Menurut Abdurachman, Kulil Amri didasarkan atas Munas Ulama tahun 1926, adalah Presiden Republik Indonesia mandataris MPR.

Karena itu, Presiden Republik Indonesia itu adalah amirul Amri. Maka, kata Abdurachman, kalau ada orang yang memberontak kepada dia dengan menggunakan nama Islam itu harus di basmi.

"Kita tidak dapat terus menerus dapat dibohongi. Kita harus berani mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Kalau kita tidak berani mengatakan dalam forum terbuka seperti saat ini, berarti kita membenarkan upaya untuk menyimpangkan pemahaman rakyat tentang Islaın di negara Indonesia. Di negara kita mengenai hal itu dapat berbahaya. Karena hal ini merupakan kuman-kuman yang akan terus berlangsung hidup sampai pada masa yang akan datang. Untuk itu, apabila ada orang yang mengatakan demikian, Abdurachman Wahid menghimbau agar tidak usah didengarkan.

"Saya rasa semua organisasi Islam yang besar telah menyatakan membebaskan warga mereka untuk memilih kontestan secara terbuka. Ini tentu sudah dipikirkan dengan cara yang masak-masak. Karena bagaimanapun juga organisasi Islam tidak akan berani menyimpang dari ketentuan Al Qur'an," tegasnya.☐ BM

PERUSAHAAN DAERAH
IRIAN BHAKTI
IMPORTER EXPORTER DISTRIBUTOR
HEAD OFFICE ADDRESS, 24, JL. A. YANI – JAYAPURA IRIAN JAYA
PHONE : 21165, 22265
CABLE : IRIAN BHAKTI

PHARMACEUTICAL TRADE (PBF) : LICENCE NO. 153/67.
BRANCHES : JAYAPURA BIAK MANOKWARI SORONG FAK FAK MERAUKE NABIRE SERUI WAMENA

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA, SEGENAP WARGA/KELUARGA BESAR PERUSAHAAN DAERAH (PD) IRIAN BAHKTI IRIAN JAYA SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

Wawancara khusus dengan Prof Fuad Hassan

Stabilitas Kurikulum Harus Rela Kita Pertahankan

Kita membutuhkan pemikir-pemikir. Intelegensia Nasional harus tumbuh

Pendidikan di Indonesia masih saja menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat luas. Masalah kemampuan daya tampung, kualitas guru, kurikulum atau mata pelajaran, dan yang masih tetap menjadi bahan pergunjingan yaitu menyangkut apa yang disebut sistem pendidikan nasional itu sendiri.

Ledakan murid yang akan memasuki jenjang perguruan tinggi setiap tahun selalu mewarnai bidang pendidikan. Begitu pula peralihan dari tingkat SD ke SLTP, dari SLTP ke SLTA, merupakan masalah tersendiri yang tidak kalah membuat pusing setiap orang tua maupun pemerintah. Ini menandakan bahwa sektor pendidikan masih tetap primadona yang harus ditangani secara terpadu, penuh kesadaran dan kebesaran jiwa semua pihak. Tidak terkecuali para orang tua yang selalu mendambakan anaknya akan memperoleh porsi pendidikan yang memadai guna bekal kehidupan mereka di masa mendatang.

Bagaimana sosok pendidikan di Indonesia sebenarnya, problematik macam apa yang selalu melekat di dunia pendidikan di republik ini, dan bagaimana pula usaha pengambil keputusan dalam mengupayakan terciptanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga seperti yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, merupakan bagian dari percakapan Media Karya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Fuad Hassan berikut ini.

Pembangunan di sektor pendidikan tidak terlepas dari kerangka pembangunan secara nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan lima tahun, yang setiap lima tahun sekali mendapat penajaman prioritas. Pembangunan pendidikan selalu dihadapkan kepada tututan-tuntutan kuantitatif dan terjaminnya aspek kualitatif. Di sini terjadi kejar-kejaran antara tuntutan kuantitatif dan terjaminnya aspek kualitatif yang oleh Prof Fuad Hassan dilukiskan sebagai pekerjaan yang tidak mudah untuk di atasi.

Masalah lain yang terkait dengan pemenuhan tuntutan kuantitatif, tersedianya sarana pendidikan secara merata di seluruh tanah air. Di pulau-pulau yang tadinya tidak terpikir ada Sekolah Dasar sekalipun, kini ada tuntutan minta dibangun Sekolah Menengah Atas. Bahkan di tengah-tengah

Fuad Hassan

hutan pun yang tadinya tidak terpikir ada sekolah, sekarang ada tuntutan minta disediakan sarana untuk sekolah. Dari kenyataan ini, tercermin bahwa tuntutan tersedianya sarana pendidikan tidak berhenti di pulau Jawa atau di kota-kota besar saja. Aspek pemerataan pembangunan sarana pendidikan sisi lain yang tidak boleh diabaikan sebagaimana aspek pemerataan pembangunan ekonomi.

Sistem Pendidikan

Ada kecemasan yang mencuat di kalangan masyarakat bahwa mutu pendidikan di Indonesia terjadi kemerosotan. Benarkah terjadi kemerosotan? Prof Fuad Hassan lebih cenderung mengatakan ada penurunan. Untuk itu perlu adanya suatu evaluasi atas pendidikan di segala jenjang sebagaimana di setiap sistem pendidikan harus selalu ada review (tinjauan ulang) di mana saja.

Dalam kaitan ini, Menteri Fuad Hassan mengingatkan dalam menilai kembali pelaksanaan pendidikan di Indonesia, kita tidak terlepas dari orientasi kemana-mana kecuali kepentingan sendiri. Bisa saja kita membuat perbandingan-perbandingan dengan negara lain, apakah itu Amerika Serikat atau Jepang.

Dan, katanya lagi, setiap masyarakat, apakah mereka sudah maju atau negara industri atau mugkin belum, selama dia terbuka untuk perkembangan dan perobahan, dia akan terus menerus membutuhkan penyesuaian, sesuai dengan tuntutan sosial yang ada. Seperti Amerika Serikat, katanya, kini dibentuk suatu panitia untuk meninjau kembali sistem pendidikan. Dan salah satu di antaranya mempertanyakan kenapa Jepang bisa maju, Amerika tidak. Sebaliknya Nakasone (PM Jepang) juga mempertanyakan, kenapa Jepang mundur sementara Ameri-

Digitized by Google

ka bisa maju.

Menurut dia proses penyesuaian dalam sistem pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan kondisi kita sendiri dan demi kepentingan kita sendiri pula. Studi perbandingan itu perlu, tapi kita tidak dapat mengambil contoh sistem pendidikan model Jepang atau Amerika. Tiap jenjang harus dicari jalan keluarnya bagi usaha penyesuaian itu.

Dikatakan bahwa selama ini orang salah mengartikan pengertian pendidikan dasar seolah-olah hanya pendidikan SD. Pendidikan dasar atau basic education, menurutnya meliputi SD dan SMP atau primary dan secondary. Tapi ini tidak berarti bahwa nantinya SMP hapus digabung dengan SD sehingga menjadi 9 tahun. SD tetap SD dan SMP juga tetap SMP. Hanya kalau menyiapkan ketenagakerjaan nantinya anak sudah barusia 15 tahun sudah dibekali pendidikan dasar, perpaduan dari SD dan SMP ditambah pendidikan non sekolah sehingga nantinya mereka ini trampil.

Masalah Kurikulum

Memberikan penjelasannya menyangkut kurikulum pendidikan di Indonesia, Menteri Fuad Hassan menegaskan kurikulum kita harus memberikan peluang untuk mengembangkan potensi karakteristik di suatu daerah, atau dengan kata lain dalam kurikulum itu ada yang disebut muatan lokal (kira-kira 20%). Apa yang disebut muatan lokal ini, misalnya kalau suatu daerah itu terkenal dengan ukirannya, kenapa tidak menambahkan pelajaran mengukir kepada siswa.

Menurut Menteri Fuad Hassan, ide muatan lokal ini bukan hal yang baru. Di tahun 1950-an ide muatan lokal ini pernah didiskusikan di lingkungan departemen. Namun waktu itu timbul pro-kontra apakah sistem kurikulum seratus persen tunggal (nasional) atau dapat dimasukkan unsur-unsur karakteristik daerahnya. Dan ternyata pada waktu itu banyak yang tidak setuju kalau masuk kreasi daerah, karena sistem pendidikan kita adalah nasional.

Namun dalam perkembangan sekarang, setelah memperhitungkan beberapa seginya, dianggap perlu untuk menyediakan sebagian kurikulum dengan muatan lokal kendati sistemnya tetap nasional. Titik tolak pemikiran ini, apakah anak yang lulus SMP masih bisa terus ke SMA atau berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan, di sini perlu mereka ini dibekali ketrampilan kejuruan.

Realitanya, menurut Menteri Fuad Hassan, banyak masalah melekat dalam kehidupan masyarakat menyangkut anak sekolah. Kemampuan finansial yang terbatas tidak memungkinkan anak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kenyataan lain, ada anak yang tidak bisa terus ke jenjang perguruan tinggi mengingat kemampuan keuangan sehingga mereka lebih cenderung bekerja mencari

nafkah daripada sekolah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. "Ditambah lagi yang berkaitan dengan kegiatan keluarga, kegiatan-kegiatan di masyarakat agraris masih mengikut-sertakan anak-anak. Ini karena tidak ada tenaga lain, dan sudah menjadi watak masyarakat agraris. Anak tidak dieksploitir, tapi anak dalam kegotongroyongan dalam masyarakat, ini kenyataan yang berkembang di negara agraris", tutur Menteri Fuad Hassan.

Di bagian lain, prof Fuad Hassan melihat gejala yang cukup memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan, yaitu apa yang terjadi dengan perguruan tinggi. Gambaran bahwa perguruan tinggi mampu menjanjikan gelar dan harapan masa depan lebih baik, sehingga setiap spanduk yang memamerkan kesempatan untuk mendaftar di perguruan tinggi pasti ada pendaftarnya.

Ada sementara orang menganggap perguruan tinggi tempat mencari gelar. Pada hal, kata menteri, perguruan tinggi tempat menuntut ilmu dan ketrampilan pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, perguruan tinggi membentuk cendekiawan, intelektual, yang sangat dibutuhkan dalam alam pembangunan bangsa. "Kita membutuhkan pemikir-pemikir di tingkat atas. Intelegensia nasional ini harus tumbuh. Mereka bukan berfungsi sebagai profesional, tapi berfungsi sebagai intelektual yang berpikir dalam jangka panjang", ujarnya.

Upaya Pengembangan

Setiap orang bisa mengatakan ada kelemahan dalam kurikulum pendidikan kita. Menurut pandangan Prof Fuad Hassan, semua pendahulunya, tidak ada kecualinya, tentu berniat membuat kurikulum sebaik mungkin. Stabilisasi dan kurikulum sampai akhir Pelita IV harus rela kita pertahankan. Kalau mengobati penyakit, jangan sampai malah lebih parah bagi si sakit, ujar Menteri Fuad Hassan.

Yang penting menurut pandangannya, perlu pembenahan apa yang tidak benar dalam penyelenggaraan pengajaran. Sebagai contoh pelajaran olahraga pada SD dinilai kurang tepat. Lebih tepat kalau digunakan istilah pendidikan jasmani, bukan sport, di mana ditekankan kepada pelajaran senam (gymnastic). Kalau senam diberikan kepada anak SD sesuai dengan perkembangan tubuh maka anak itu memiliki badan yang elastis. Kenapa prestasi olahragawan kita mundur, karena persiapan pendidikan jasmani kurang baik.

Begitu pula tentang sistem pengajaran ilmu bumi yang sekarang diintegrasikan dalam PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) di SD. Ini tidak benar. Negeri kita tidak seluas Malvinas yang dipelajari sehari jadi. "Ini pembenahan-pembenahan yang perlu dilakukan tanpa merubah sistem dan kurikulum, cukup kita sempurnakan saja", ujar Mendikbud.

Di lingkungan perguruan tinggi, perlu dikembangkan politeknik, karena lewat politeknik ini akan menjawab langsung pada kebutuhan pembangunan. Swasta boleh saja mengembangkan atau membuka fakultas hukum silakan saja, tapi jangan sampai nanti begitu lulus menyandang gelar SH, pekerjaannya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Misalnya, bekerja sebagai tata usaha, atau menjadi sopir taxi. "Sayang kalau investasi begitu lama, belajar di ingkel-ingkel setengah mati lalu hanya untuk pekerjaan seperti itu", tuturnya, sambil memberi contoh lain, buat apa masuk akademi kalau akhirnya menjadi juru tik. Juru tik cukup tamatan SD atau SMP. Ini yang disebut over-qualification.

Menteri Fuad Hassan mengingatkan perguruan tinggi hendaknya melakukan pengembangan melalui penyempurnaan mutu. Antara lain melalui pengembangan staf di dalamnya, dan mengharuskan sivitas akademika untuk melaksanakan latihan-latihan akademis, diskusi-diskusi akademis yang terarah. Perguruan tinggi harus mampu menjadi penyumbang pada pemikiran-pemikiran baru. Kampus harus menumbuh-kembangkan berbagai kegiatan, apakah itu simposium, seminar, workshop, ceramah maupun diskusi.

Menyinggung sarjana siap pakai, Prof Dr Fuad Hassan memberi gambaran, seumpama seorang lulusan fakultas hukum dengan gelar SH, belum tahu dia di mana akan dipakai. Apa mau jadi notaris, biro hukum, jaksa atau hakim. Mesti ada perseneling satu dulu yang membuat dia siap jalan. Ini hanya merupakan kesiapan saja.

"Jadi, sekolah mendidik orang untuk siap dilatih, sementara melalui program-program khusus mereka siap untuk dipakai", tambahnya. □

Digitized by Google

Pendidikan adalah tiang utama Pembangunan Bangsa

Kampus IKIP Muhammadiyah di Jalan Limau Kebayoran Baru adalah satu di antara beberapa kampus perguruan tinggi di tanah air yang dikunjungi Mensesneg Sudharmono SH. Kunjungan itu terjadi di awal April ini.

Selain meresmikan Laboratorium Bahasa bantuan Presiden, Mensesneg yang juga Ketua Umum Golkar juga memberikan Kuliah umum di depan Civitas Akademika IKIP Muhammadiyah. Tak kurang dari lima ratus peserta hadir: mahasiswa, dosen, pengurus Yayasan Perguruan Muhammadiyah.

Kuliah umum Mensesneg yang sangat mendapat perhatian itu memakan waktu hampir dua jam, sehingga sebagian peserta merasa amat sedikit mendapatkan kesempatan untuk berdialog, karena waktu yang tersisa tinggal tiga puluh menit.

HS Projokusumo atas nama Yayasan Perguruan Muhammadiyah dalam kata sambutannya menyebutkan, Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya azaz, sebagai azaz kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah secara historis adalah gerakan Islam yang berkaidah Islam bersumber dari Al Qur'an dan sunnah Rasul. Dikatakan lebih lanjut, sebagai organisasi kemasyarakatan dan gerakan Islam Muhammadiyah mengadakan kegiatan dalam bidang keagamaan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Sedang Rektor IKIP Muhammadiyah Dr. Agustiar MA menegaskan dan mengesankan betapa besar perhatian Pemerintah terhadap kegiatan Muhammadiyah dan khususnya di bidang pengembangan dunia pendidikan karena memang pendidikan sangatlah penting dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan kreatif.

Sedangkan Mensesneg Sudharmono SH memberikan kuliah umum yang diberi judul Pesta Demokrasi dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila". Telah disepakatinya Pancasila sebagai satu-satunya oleh ketiga kekuatan sosial politik menurut Sudharmono SH, berarti seluruh Bangsa Indonesia dituntut untuk kreatif menjabarkan dan mewujudkan program-program pembangunan. Dan salah satu pembangunan yang penting antara lain adalah Pembangunan di bidang Pendidikan, karena pendidikan merupakan tiang utama pembangunan Bangsa.

Karena itu, tandas Mensesneg, melalui pesta demokrasi kali ini ketiga peserta pemilu harus mampu menawarkan program-program yang secara langsung ada kaitannya bagi kepentingan pembangunan. Apakah pemilu atau pesta demokrasi dirasakan semakin sehat atau tidak, tentu tidak terlepas dari tingkat pendidikan warga negara Indonesia secara menyeluruh. Pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan cara-cara berfikir seseorang dan pada akhirnya akan berpengaruh bagi perkembangan kemajuan bangsa yang sedang membangun ini. Bila bangsanya cerdas, bila masyarakatnya cerdas tentu karena pendidikannya cukup maka segala program-program yang ditawarkan Pemerintah Orde Baru akan dapat terlaksana dengan lebih baik dan penuh tanggung jawab. Pesta demokrasi Pancasila yang merupakan milik seluruh bangsa Indonesia terasa semakin dekat dan semua kekuatan sospol peserta pemilu sedang berpacu menawarkan program-programnya kepada rakyat. Dan semua program-program yang ditawarkan semestinya adalah bukan adu ideologi tapi program yang disemangati oleh prinsip-prinsip pembangunan Pancasila.

Sekarang tak ada lagi pertentangan idiologi dan masyarakatpun menerima dengan sadar tanpa terpaksa. Kita tidak mau lagi mengulang pengalaman masa lalu dimana perbedaan golongan dan perbedaan parpol, selalu menimbulkan kontroversi dan bencana. Sehingga, semuanya menjadi terhambat, termasuk bidang pendidikan.

Dalam kuliah umumnya Ketua Umum Golkar Sudharmono sesekali berseloroh. "Saya tidak berkampanye disini, tapi kalau civitas akademika secara perorangan mau memilih Golkar dalam Pemilu mendatang itu lebih baik. Dan selaku Ketua Umum saya berterimakasih". Seloroh ini disambut tepuk tangan hadirin yang sebagian besar adalah mahasiswa. Menteri juga menjelaskan sebagai ciri-ciri Negara Demokratis, Pemilu merupakan sarana pesta Demokrasi

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 326000

M E D A N

DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BEKERJA KERAS DAN BERKARYA

KITA SUKSESKAN PEMILU 1987
SEBAGAI PESTA DEMOKRASI UNTUK
MENJAMIN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN
DAN TETAP TEGAKNYA PANCASILA DAN UUD 1945

Digitized by Google

bagi Bangsa Indonesia yang dilakukan dengan penuh kesadaran dengan jaminan pelaksanaannya langsung umum bebas dan rahasia. Setiap anggota masyarakat yang memiliki hak suara berhak menentukan sendiri akan memilih apa sesuai yang dikehendaki.

Kehidupan demokratis konstitusionil yang tercermin dalam data otentik UUD 1945 perlu dibina dan dikembangkan terus menerus kelompok cendekiawan civitas akademika di seluruh tanah air mempunyai tanggung jawab moral untuk mengembangkan wawasan ini kepada masyarakat luas dimanapun berada.

Mensesneg Sudharmono SH dalam mengakhiri kuliah umumnya berharap agar semua civitas akademika IKIP Muhammadiyah menjadi insan Pancasila yang kreatif di tengah masyarakat. Kepada mereka diserukan untuk menggunakan hak pilih secara tepat dan benar pada pesta demokrasi Pancasila yang sebentar lagi akan tiba waktunya.

Menjawab pertanyaan mahasiswa tentang adanya referendum, Sudharmono mengatakan referendum adalah alat pengaman (pengamanan) untuk mengupayakan pelaksanaan tekad Pancasila dan UUD 1945. Ketetapan yang ada, berasal dari suara rakyat, yang diputuskan melalui MPR, ini yang dinamakan referendum. Jelas melihat hal ini, referendum dilakukan secara demokratis dan konstitusional. Selama ini Indonesia telah dua kali menjalankan referendum, yang pertama tahun 1963 dalam masalah Irian Barat. Dan yang kedua tahun tujuh puluhan saat menawarkan rakyat Timor Timur masuk ke wilayah RI. Referendum itu harus membawa suara dan aspirasi rakyat Indonesia. □ Rendy Ms.

PT. TRIPATRA ENGINEERING

lebih dari lima belas tahun pengalaman dalam menyelesaikan proyek-proyek berteknologi tinggi
jasa enjiniring dan manajemen projek untuk :
power enjiniring
telekomunikasi
minyak & gas bumi

• studi kelayakan • enjiniring disain
• manajemen proyek

Gedung Cipta lantai 5,6,7 JL. H.R. Rasuna Said-Kav. C10 Telp. : 516512 (7 line) – Jakarta
Telex : 62251 TPE IA

P.T. INDRA KARYA
CONSULTING ENGINEERS

JAKARTA : JL. DR. SAHARJO NO. 204 A PHONE : (021) 8292824 & 8298346 TELEX : 48336 IKA IA
MALANG : JL. SURABAYA NO. 3 A PHONE : (0341) 51311 & 51463 TELEX : 31083 IKA ML

BIDANG USAHA :
JASA TEKNIK (ENGINEERING).
- SISTEM KETENAGAAN LISTRIK (PEMBANGKITAN TRANSMISI, DISTRIBUSI)
- PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR (BENDUNGAN, IRIGASI, PERBAIKAN SUNGAI)
- BANGUNAN SARANA PERHUBUNGAN (JALAN, JEMBATAN, PELABUHAN)
- BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT & PABRIK.
- PERTAMBANGAN DAN INDUSTRI

MANAJEMEN :
- MANAJEMEN PROYEK, MANAJEMEN UMUM, SISTEM INFORMASI, SISTEM KEARSIPAN

LINGKUNGAN / PENGAMATAN PROYEK :
- ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN, PENGAMATAN LINGKUNGAN, PENGAMATAN & EVALUASI - MANFAAT PROYEK.

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA, SEGENAP WARGA / KELUARGA BESAR PERUSAHAAN PERSERO P.T. INDRA KARYA SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

PRESIDEN RESMIKAN BENDUNGAN DAN JEMBATAN

Presiden Soeharto Sabtu 4 April 1987 telah meresmikan bendungan Gondang di Lamongan Jawa Timur dan sebuah jembatan sepanjang lebih satu kilometer.

Dalam sambutannya Presiden menegaskan bendungan Gondang mempunyai arti penting mengingat daerah Lamongan selalu dilanda banjir setiap kali musim hujan dan kekeringan setiap kali musim kemarau. Dengan bendungan ini masyarakat tidak perlu khawatir lagi sehingga lebih mampu mencurahkan perhatiannya pada pekerjaan masing-masing.

Adanya bendungan ini sejumlah waduk akan mendapat air secara teratur, sehingga jika saluran-saluran yang menghubungkan bendungan dan waduk-waduk lain selesai dibangun seluruhnya, akan mampu mengaliri lahan pertanian lebih sepuluh ribu hektar.

"Bendungan Gondang memiliki arti penting bagi pembangunan bangsa kita sebab bendungan ini merupakan bagian dari usaha besar kita mengembangkan dan memanfaatkan salah satu sumber daya alam yang banyak kita miliki, yaitu air," tegas Presiden Soeharto.

Sementara itu ketika meresmikan jembatan terpanjang dan terlebar seluruh Indonesia, yang diberi nama Jembatan Suryo, yang menghubungkan Tanjung Perak-Dupak, Presiden mengatakan jembatan ini akan mampu mendorong meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah Jatim." Pembangunan yang kita lakukan memang merupakan perjuangan besar untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Karena itu, marilah kita usahakan agar kita dapat terus meningkatkan perjuangan pembangunan kita itu," tegas Presiden Soeharto. □ (N.S)

BINTANG GERILYA UNTUK IBU TIEN

Bertempat di kediaman jalan Cendana Menteng Jakarta Pusat, Ibu Tien Soeharto telah menerima penganugerahan Bintang Gerilya dari pemerintah RI sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan dalam berjuang dan berbhakti terhadap negara dan bangsa Indonesia selama perjuangan fisik antara tahun 1945-1950.

Bintang gerilya tersebut diserahkan Panglima ABRI Jenderal LB Moerdani, dihadiri para kepala staf angkatan dan Kapolri serta pejabat teras ABRI, pada hari Kamis 2 April 1987. □ (N.S)

Digitized by Google

KOMENTAR

Anti Monopoli

Diantara berbagai cetusan di hari-hari kampanye, adalah menarik pengutaraan fungsionaris Golkar Ismail Saleh SH tentang pentingnya kehadiran suatu UU anti monopoli. Dengan suatu undang-undang seperti ini, diharapkan takkan ada lagi segelintir orang memiliki kekuasaan mengatur jalannya perekonomian berdasarkan keinginannya sendiri saja.

Seraya itu ia juga mengatakan pembentukan perangkat hukum yang aspiratif merupakan komponen penting di samping aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Gagasan tentang undang-undang anti monopoli ini, bila dikaitkan dengan aspirasi yang terdapat di masyarakat, merupakan permasalahan yang aktual.

Dan adalah menarik pula bahwa sebelum ini terjadi pula semacam polemik mengenai swastanisasi BUMN. Di antara pendapat yang ada, cukup menarik adanya pendapat yang menyatakan perlunya mempertahankan BUMN. Salah satu argumentasi adalah diambilnya dukungan dari penjelasan pasal 33 UUD 1945, yang antara lain menyebutkan "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara". Kalau tidak, "tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya". Kalimat terakhir ini agaknya dilajuri semangat anti monolopi.

Gagasan yang dilontarkan Golkar melalui fungsionarisnya yang kebetulan adalah Menteri Kehakiman RI, kiranya perlu didukung. Hanya tentu perlu pula digarisbawahi agar kita tetap menjaga bahwa semangat anti monopoli yang terkandung di dalamnya tidak perlu terbelokkan menjadi semangat anti swasta. Sebagaimana kritik-kritik terhadap inefisiensi dan salah manajemen dibeberapa BUMN, tidak perlu mendorong generalisasi dan ketergesa-gesaan menghapuskan eksistensi BUMN. Karena, ketergesa-gesaan dalam hal ini juga bukannya tanpa kemungkinan ekses. Belum lagi pertimbangan tentang kemungkinan pemberian peran positif bagi BUMN dalam kaitan Pasal 33 UUD 1945.

Tata perekonomian kita sesuai dengan jiwa UUD 1945, harus ditopang secara seimbang oleh tiga kekuatan ekonomi yang ada di masyarakat: koperasi, swasta dan negara....

Polonia

Dunia penerbangan kita, kembali mengalami musibah. DC 9 Garuda jalur Banda Aceh-Medan, pekan pertama bulan April ini mengalami kecelakaan ketika hendak mendarat di bandar udara Polonia Medan.

Apa yang menjadi penyebab pasti kecelakaan itu, belum dikonfirmasikan. Tapi yang jelas tak sedikit jiwa melayang dalam peristiwa yang menyedihkan ini.

Takdir dan kematian ada di tanganNya. Namun, dalam hal kecelakaan di Polonia ini, setidak-tidaknya terdapat beberapa hal yang dapat disesali.

Tatkala musibah terjadi tak jauh dari salah satu ujung landasan, dikabarkan betapa reaksi petugas bandara serba terlambat. Salah satu yang paling fatal, adalah terlambatnya petugas pemadam kebakaran. Pesawat berkobar setidak-tidaknya sepuluh menit, begitu saja, tanpa pertolongan. Dan lebih sedikit penumpang dapat terselamatkan.

Hal mendasar lainnya adalah keadaan Polonia yang mempunyai area keamanan landasan pacu yang begitu minim. Bangunan-bangunan, tiang listrik dan sebagainya, mengepung area polonia begitu rapatnya sehingga spasi aman untuk mendaratan dan lepas landas boleh dikatakan paspasan. Keadaan serupa juga terdapat pada beberapa bandar udara di Indonesia.

Memang, sekali lagi, nasi telah menjadi bubur. Tapi kapankah kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman pahit yang telah kita alami?

Lembaga Pemasyarakatan

Selain kabar-kabar tentang kaburnya napi-napi dari beberapa LP, tak kurang sering muncul berita tentang sering terlihatnya beberapa napi atau tahanan 'terkenal' — karena terlibat kasus-kasus besar dan disorot masyarakat.

Sebenarnya, seorang napi atau tahanan bisa saja sewaktu-waktu mendapat izin keluar dengan alasan-alasan yang cukup dan kuat. Tapi sepanjang yang diberitakan, tak jarang beradanya napi atau tahanan itu di luar tembok LP melalui cara-cara yang tak wajar dan perlu dipertanyakan.

Pihak LP dan para penegak hukum lainnya sepatutnya untuk mawas diri. Bila kejadian serupa terlalu sering tanpa dapat diatasi, akan menimbulkan krisis kepercayaan. Apalagi bila oknum napi atau tahanan itu dikategorikan 'punya duit'.

Kejadian seperti itu jadinya seakan-akan menguatkan tuduhan yang ada di masyarakat dengan pengandaian 'maling ayam....' Bahwa penindakan terhadap yang kecil dijalankan begitu tegas dan cepat tanpa tawar menawar, tetapi hal sebaliknya bagi yang 'besar'....

Digitized by Google

Berkapal-kapal Di Satal

Berbatasan dengan negara tetangga Filipina terletak bagian paling utara dari propinsi Sulawesi Utara, yakni Kabupaten Sangihe Talaud (Satal). Wilayah ini merupakan daerah kepulauan dengan pulau-pulau antara lain Sangir Besar. Talaud, Salibabu, Kaburuan, Siau, dan Tagulandang. Perhubungan antar pulau-pulau tersebut sebagian besar dilakukan dengan menggunakan kapal motor.

Awal bulan April yang lalu Fungsionaris Golkar Drs. Cosmas Batubara yang merupakan calon utama anggota DPR-RI untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara telah melakukan safari di daerah kepulauan Sangihe Talaud guna melakukan tugas kampanye. Karena harus berpindah dari pulau ke pulau sesuai dengan lokasi kampanye yang telah dijadwalkan, tak ayal lagi Bung Cosmas yang didampingi Bung Eric Samola dan rombongan harus pula mengarungi laut dengan menggunakan kapal motor. Tujuan pertama adalah pulau Talaud yang ditempuh dari Manado dengan pesawat terbang CASA milik maskapai penerbangan MNA. Pendaratan di lapangan rumput Melangguane di pulau ini dirasakan kasar bagi mereka yang tidak biasa. Dari lapangan terbang rombongan harus berjalan kaki tak kurang dari satu kilometer menuju dermaga setempat, guna melanjutkan perjalanan ke lokasi kampanye dengan kapal motor. Rupanya memang lagi ada 'rezeki', karena belum sampai setengah kilometer berjalan kaki hujan lebat pun turun. Terpaksa kopor, tas atau apa saja yang memungkinkan, digunakan sebagai payung penadah basah air hujan. Terkecuali tentu saja Sekretaris Dewan Pembina Gokar beserta Ibu Cosmas Batubara yang segera memperoleh naungan payung betulan dari para penjemputnya. Akhirnya sebagian besar anggota rombongan dengan basah kuyub masuk ke kapal yang sudah siap menunggu di dermaga.

Sesuai dengan program, dalam perjalanan ini ada 4 lokasi kampanye yang harus disinggahi kapal motor yang berisikan Drs. Cosmas Batubara dan rombongan, sebelum bertolak kembali ke Manado. Keempat lokasi tersebut adalah Kecamatan Beo di pulau Talaud, Kecamatan Lirung di pulau Salibabu, Kecamatan Tahuna di pulau Sangir Besar, dan Kecamatan Siau Timur di pulau Siau. Kesemua tempat itu ditempuh dengan menggunaan kapal motor milik perusahaan angkutan laut "Agape Jaya", yang menurut keterangan seorang awaknya, kapal itu berukuran 100 ton dan mampu mengangkut lebih dari 150 orang penumpang. Karena kurangnya sarana angkutan, maka kapal motor yang digunakan rombongan kampanye Drs. Cosmas Batubara ini sekaligus juga dimanfaatkan untuk mengangkut penduduk atau penumpang umum yang memerlukannya, lengkap dengan barang-barang bawaan mereka berupa beras dan hasil-hasil pertanian lainnya, termasuk ternak seperti ayam dan lain sebagainya. Drs. Cosmas Batubara dan rombongan di kapal ini mendapatkan tempat yang terbaik yaitu di kamar-kamar yang biasanya diperuntukkan bagi kapten serta para awak kapal, lengkap dengan tempat tidur berkasur.

Mungkin bila menggunakan kapal ini hanya sebatas waktu satu atau dua jam saja akan dirasakan sebagai perjalanan wisata yang cukup nyaman. Namun untuk perjalanan yang memakan waktu tak kurang dari 27 jam itu kiranya cukup memerlukan ketabahan dan daya tahan fisik. Pertama karena guncangan ombak yang terkadang mampu membuat perut mual bahkan muntah-muntah. Kedua, keadaan kapal yang dipenuhi penumpang umum dengan berbagai barang bawaannya itu menjauhkan perjalaan ini dari suasana pesiar. Satu hal yang dirasakan berat adalah bagaimana mengatur hajat buang air kecil dan besar. Kamar kecil terletak di lantai bawah dari kapal. Terdapat dua buah kamar kecil dengan air terbatas yang digunakan bagi puluhan penumpang yang ada. Untuk mencapai kamar kecil ini di malam hari, harus melewati dulu gang dan dek yang dipenuhi penumpang yang tergeletak tidur pulas di lantai. Beruntunglah bahwa rombongan ada cukup membawa bekal air minum 'Aqua', yang kali ini dirasakan benar-benar sebagai komoditi berharga karena keserbagunaannya. Buat air minum oke; buat air kumur atau air cuci-muka pun jadi; dan tentu juga untuk keperluan lain... khususnya bagi kaum wanita. Bagi mereka yang tidak sampai hati untuk sering ke kamar kecil, terpaksa harus mengubah kebiasaan sehingga sesedikit mungkin melakukan hajat ke belakang itu. Rupanya banyak di antara anggota rombongan yang berhasil mengatasi keadaan ini. Tak kurang dari Bung Cosmas berkomentar heran bahwa dirinya bisa tahan tidak 'berhajat besar' selama perjalanannya itu, padahal biasanya 'budaya' itu dilakukannya tiap pagi. Terhadap hal ini Cosmas mengatakan terpaksa hati-hati serta selektif memilih makanan dan minuman, walaupun dijamu beragam makanan selama kunjungan di lokasi kampanye.

Kesulitan lain dialami oleh Bung JG Wowor. Calon kita yang dalam rombongan cukup sabar menjadi pamong artis ini mengeluh susah tidur dalam kapal yang diayun gelombang. Tidak demikian halnya dengan calon lain AJ Sondakh yang justru terlalu nyenyak tidur di kapal. "Seperti dalam buaian," katanya. Ombak besar di malam hari pun sempat menggangu Ny. Cosmas Batubara. Putri Yogya ini suatu saat pernah repot minta dicarikan kantong plastik buat tadah muntah. Hal itu terjadi karena kapal terlalu lama berhenti di tempat, diombang-ambingkan ombak sambil menunggu selesainya pemuatan barang-barang khususnya peralatan band, sementara para penumpangnya sudah siap berada di atas kapal.

Suasana ceria tergambar di kala ombak sedang tenang dan cuaca baik. Di saat-saat seperti ini anggota rombongan dapat berkumpul santai di geladak anjungan kapal; bahkan Bung Cosmas dan Bung Eric, ditemani oleh Bupati sangihe Talaud dan ADC Menpera sempat beberapa kali main gaple, atau juga main catur untuk membunuh waktu.

Demikianlah sekelumit kisah perjalanan di sela-sela kampanye Golkar di ujung utara wilayah Nusantara ini. Satu hal patut dicatat, yakni bahwa bagaimanapun kelelahan muncul akibat perjalanan itu akhirnya dapat terobati setelah menyaksikan semangat yang membara dan kegembiraan yang meluap dari massa Golkar yang menyambut dan membanjiri setiap arena kampanye. ☐ (TA PURNOMO)

Digitized by Google

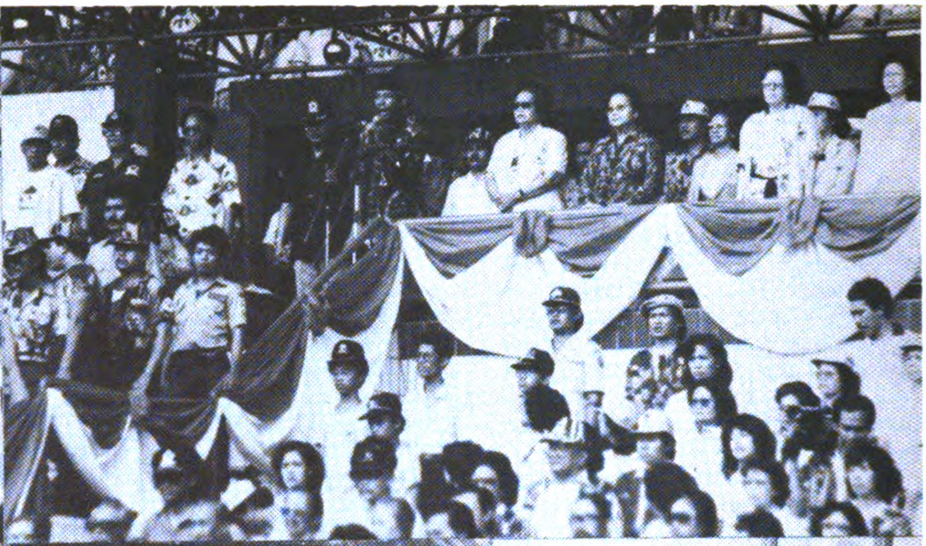

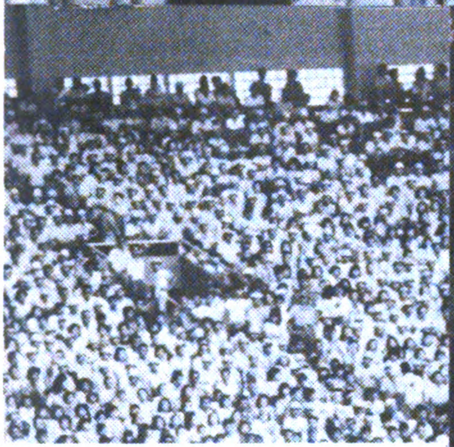

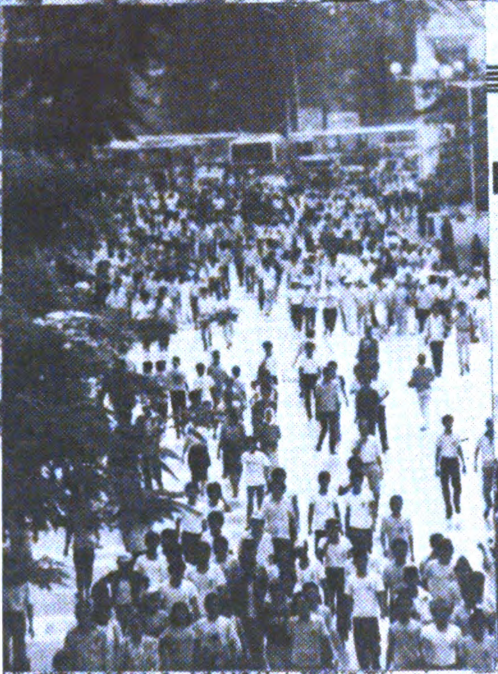

HARI-HARI TERAKHIR: *Stadion Utama Senayan, digunakan Golongan Karya untuk mengakhiri massa kampanyenya di Jakarta. Tribun stadion yang berkapasitas 100 ribu orang, tidak lagi mampu menampung massa dan simpatisan Golkar yang berjumlah lebih kurang 175 ribu orang. Sehingga ditengah-tengah lapangan sarat dengan massa Golkar yang memakai kaos warna kuning. Tidak itu saja, di jalan-jalan, warna kuning juga menghias Ibukota. Di Yogyakarta juga demikian, 200 ribu massa menyemut di alun-alun utara daerah itu. Jawa Timur juga tidak ketinggalan, Ketua Umum yang mengakhiri masa kampanyenya di 3 kota Malang, Bangil, Pasuruan dan Surabaya, 15 April lalu mampu menyedot 450 ribu massa. Golkar selama masa kampanye mampu mengakumulasi massa terbanyak di beberapa tempat dibanding kontestan lainnya dan juga mampu mengendalikan diri dari emosi. Kemudian setelah mengakhiri massa kampanyenya di DKI Jakarta, Ketua Umum malamnya mengadakan konperensi pers. Dalam kesempatan itu Ketua Umum mengesankan, bahwa dalam kampanye tahun ini ABRI benar-benar bersikap netral serta tidak membantu langsung Golkar seperti masa-masa lalu. "ABRI harus bersikap demikian", ujar Ketua Umum. Dikatakannya, sebagai alat pertahanan keamanan, ABRI tidak boleh pandang bulu. Karena hukum itu berlaku sama untuk semuanya.*

Digitized by Google

Kenapa Golkar Kuat? Karena Kerja Keras!

POHON yang tinggi menjulang akan menonjol. Dan mudah tampak dari segala penjuru. Dalam peta politik masa Orde Baru, Golkar adalah ibarat pohon yang tinggi itu. "Semua meramal Golkar pasti menang dalam Pemilu 1987. Bahkan ada yang meramal Golkar akan menang mutlak". Sudharmono SH waktu itu sedang menjawab sebuah pertanyaan - yang menggambarkan kekuatiran akan dampak negatif akibat kemenangan mutlak itu - dalam acara tanya jawab dengan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi dan Ikip Manado (28 Maret 1987). Lalu Sudharmono balik melontarkan suatu pertanyaan yang menggelitik "Tapi kenapa tidak ada yang bertanya, kenapa Golkar menjadi kuat?". Dan kemudian menjawabnya sendiri "karena Golkar selalu bekerja keras".

Esensi dari pertanyaan balik dan jawaban yang dilontarkan anggota Kabinet Pembangunan IV yang dikenal pula sebagai Ketua Umum Golkar ini: Dalam menilai diperlukan sikap positif. Kekalahan partai-partai politik dalam tiga kali pemilihan umum tidak harus dicari pada keberhasilan Golkar meraih kemenangan karena etos kerja keras yang dimilikinya, melainkan kepada sebab musabab internal partai-partai politik itu sendiri - termasuk ketidakmampuan menjalankan kerja keras secara teratur.

Sudharmono menggambarkan, setelah SU MPR 1983, Golkar mengkonsolidasikan diri melalui Munas. Dalam Munas itu Golkar memikirkan baik-baik, bagaimana dapat mengkonsolidasikan diri agar dapat berperan terus dalam pembangunan. "Sehingga sudah dari pagi-pagi, yaitu mulai 1 April 1984 kita mengadakan pendaftaran anggota. Yang lain belum melakukan pendaftaran". Padahal, konsep politik menurut undang-undang kita adalah menganut sistem keanggotaan perorangan. Golkar juga sejak awal telah siap dengan program Tri Sukses, sehingga konsolidasi Golkar berjalan lancar. "Yang lain, tidak melakukan hal-hal seperti ini".

Kerja Keras Dan Pemerataan

Kesiapan dan keteraturan organisasi Golkar ini, setidaknya memang tercermin dengan baik dalam kiprah kampanye Golkar di Sulawesi Utara yang diterjuni langsung selama dua hari (28 dan 29 Maret) oleh Ketua Umum Golkar. Secara akumulatif sejak Bitung, Manado, Kotamobagu dan Tondano, kampanye Golkar dihadiri sekitar 150.000 massa. Untuk Sulawesi Utara, ini yang terbesar dan amat sukar tertandingi oleh OPP lainnya. Kampanye Sabtu sore di lapangan Sario Manado dihadiri lebih dari 50.000 orang. Sedang kampanye di Kotamobagu dan Tondano menyerap masing-masing tak kurang dari 35.000 orang.

Gaya kampanye Ketua Umum Golkar mempunyai ciri khas, yaitu mengajak sejumlah orang naik ke panggung untuk berdialog. Paling menarik adalah di Kotamobagu. Seorang puteri siswi sekolah menengah swasta yang akan melakukan hak pilihnya secara perdana tanggal 23 April, mampu menjelaskan dengan baik alasan-alasannya untuk menentukan pilihannya terhadap Golkar.

"Setelah lulus SMA, cita-citanya apa, mau jadi apa?"

"Jadi sarjana hukum"

"Semoga cita-cita anda dapat tercapai, menjadi sarjana hukum yang dapat membela kepentingan rakyat", ujar Ketua Umum Golkar. "Dan terima kasih atas semangat yang menyala-nyala untuk kemenangan Golkar, agar pembangunan jalan terus".

Penampilan siswi yang bernama Lina ini lalu menjadi berkah bagi sekolahnya, karena secara spontan Ketua Umum yang merasa terkesan, menyatakan menyumbangkan satu set drumband untuk sekolah sang siswi - SMA PGRI setempat.

Kepada massa Golkar Bolaang Mongodow yang hadir di Kotamobagu Minggu pagi itu, Ketua Umum juga menanyakan apakah mereka sanggup mempertahankan kemenangan Golkar yang telah dicapai pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dan massa menjawab "Sanggup!!".

Sudharmono mengadakan tanya jawab di Universitas Sam Ratulangi dan IKIP Manado

"Baik", kata Ketua Umum, "sekarang tinggal membuktikannya". Agar kita semua dapat membuktikannya, apa yang harus kita lakukan? "Ya, kita semua harus kerja keras, berusaha agar semua rakyat di Bolaang Mongondow ini terus menggunakan haknya sebaik-baiknya, memilih tanda gambar nomor dua". Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah kantong kemenangan Golkar. Pada pemilihan umum 1982 Golkar mencapai perolehan suara sebesar 93% di sana.

Kampanye di Tondano Kabupaten Minahasa, tadinya tidak dijadwalkan dihadiri oleh Ketua Umum Golkar. Tapi atas permintaan Golkar setempat, Sudharmono

Digitized by Google

SH tampil bersama Sekretaris Dewan Pembina Golkar Drs Cosmas Batubara. Puluhan ribu massa Golkar tampak terpuaskan oleh kehadiran Ketua Umum.

Kepada massa segala usia yang hadir, Sudharmono menyentuh masalah pemerataan. "Pembangunan kita memperhatikan aspek pemerataan", ujarnya. "Sekarang ini langkah-langkah untuk pemerataan dan keadilan telah dan terus diusahakan. Memang belum selesai, tapi akan terus diusahakan". Masih banyak rakyat kita yang meskipun telah mencapai kemajuan, tapi harapannya masih lebih besar lagi. "Setiap warga", apalagi generasi muda kita, pasti mempunyai harapan masa depan yang lebih baik. Ada yang ingin menjadi sarjana, ada yang ingin meningkatkan kedudukannya. Sebagai manusia kita memang ingin maju. Karena itu Golkar ingin mendukung, menjadi pelopor dari gerakan pembangunan". Lalu Ketua Umum menyampaikan ajakan "Sekarang masih ada yang belum tercapai cita-citanya, maka Golkar mengajak untuk terus bekerja keras agar cita-cita itu tetap terlaksana".

Baik di Tondano maupun di Kotamobagu, ditampilkan pula hiburan seniman-seniman Golkar Eddy Sud serta Ateng, Iskak, Sup Yusup dan Teten. Begitu pula di Bitung sehari sebelumnya.

Acara di Bitung bukan acara kampanye. Tetapi tatap muka Ketua Umum dan para pimpinan Golkar lainnya dengan komisaris desa, komisaris kecamatan, fungsionaris dan kader-kader teritorial dan fungsional Golkar setempat. Kepada mereka, Ketua Umum memberikan sejumlah pengarahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas mensukseskan pemilihan umum dan kemenangan Golkar.

Seperti Pawai

Sesudah Bitung, sebelum menghadiri acara kampanye di lapangan Sario Manado, Sudharmono SH sempat meresmikan pasar Bersehati di kelurahan Calaga di Manado. Nama Bersehati merupakan akronim dari bersih-sehat-aman-tertib-indah. Sedang pada hari Minggu di Tampusu Remboken, Sudharmono SH sempat meresmikan Listrik Masuk Desa yang meliputi 26 desa dari 10 kecamatan.

Awal kampanye Ketua Umum Golkar - yang didampingi Ny. EN Sudharmono, Ketua DPP Golkar Drs Gatot Suwagyo, Wakil Bendahara Golkar Andi Mochtar SH dan tokoh DPP Eric Samola SH serta sejumlah fungsionaris Golkar lainnya - memang di Lapangan Sario Mando. Massa Golkar, tak semuanya berhasil masuk ke lapangan yang berpagar ini sehingga memenuhi jalan-jalan sekitar.

Yang ada di lapangan diperkirakan tak kurang dari 50.000 orang, sedang yang tak sempat masuk ke lapangan agak sulit ditaksir namun jumlahnya cukup besar sehingga ada yang menyebut angka 25.000 untuk yang terakhir ini. Yang jelas, setelah kampanye usai, radius beberapa kilometer dari Sario mengalami macet total oleh mereka yang berjalan kaki ke rumah masing-masing, sehingga mengesankan ada pawai massa Golkar. Yang unik di Manado ini, bendera-bendera dan spanduk Golkar tak terbatas pada warna tertentu. Segala warna kain bisa jadi bendera Golkar: Hijau, biru, merah, putih. Bahkan ada yang mirip-mirip bendera negara lain, tapi ditimpa gambar beringin.

Sabtu malam, Sudharmono SH tampil selaku Mensesneg memberikan ceramah umum di depan civitas akademika Universitas Sam Ratulangi dan Ikip Manado. Tema yang disampaikan "Pembangunan Politik Menurut Undang-undang Dasar 1945". Mahasiswa menyampaikan beberapa pertanyaan yang cukup kritis dan semuanya dijawab dengan baik oleh Sudharmono SH. ☐ Rum Aly

Digitized by Google

Dari Banda Aceh Hingga Ke Padang, Demi Kemenangan Golkar

Wawasan kita bukan ikatan primordial, tapi wawasan Nusantara

Bagaikan di tengah lautan manusia, itulah ungkapan yang tepat ketika menyaksikan rapat akbar Golongan Karya di Gelanggang Olah Raga H. Agus Salim Padang, Senin 13 April lalu.

Gegap gempita untaian yel berirama "tusuk... beringin!", "tusuk... beringin!" diiringi tabuhan gendang ketipung, aneka pakaian pengunjung yang nyaris didominasi warna kuning, warna-warni ribuan balon, tenda-tenda dan layang-layang yang bergambar pohon beringin di angkasa stadion yang padat pengunjung, betul-betul mencerminkan bangsa Indonesia sedang berpesta demokrasi.

Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH, beserta Ibu E.N. Sudharmono, Ketua DPD Golkar Tk. I Sumatera Barat H. Djohari Kahar SH Dt. Bagindo, Gubernur H. Azwar Anas tampak tertegun menyaksikan luapan antusiasme massa.

"Belum pernah saya melihat rapat sehebat ini," kata seorang lelaki tua yang mengaku warga Golkar seraya merapatkan badannya lebih mendekat tribun stadion.

Meskipun warga Golkar meluap, yang jumlahnya ditaksir lebih dari 50.000 (kapasitas stadion), namun rapat umum berjalan dengan tertib, aman dan berkesan. Apalagi setelah massa sempat diajak bercanda dengan H. Benyamin S, seniman Golkar.

Acara ini hanya sekuntum saja di antara untaian melati yang ditebarkan Ketua Umum Golkar dalam rangkaian perjalanannya ke wilayah-wilayah propinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh dan propinsi Sumatera barat dari 11 s/d 13 April lalu.

Waspada

Di hari yang cerah itu, Ketua Umum DPP Golkar mengingatkan kepada massa, bahwa hidup yang tertib, dinamis, penting dalam rangka upaya melanjutkan kesinambungan pembangunan.

Dalam era Orde Baru ini, kita telah membangun tata kehidupan yang tertib, teratur, berkonsepsi ke arah menuju tercapainya cita-cita kesejahteraan rakyat, material maupun spiritual, kata Ketua Umum.

Golkar, dalam kiprahnya, senantiasa melaksanakan program-program yang nyata, yakni program pembangunan yang menjadi keinginan rakyat, menuju tercapainya masyarakat sejahtera lahir dan bathin.

Oleh karena itu, meskipun Golkar telah menang dalam tiga kali pemilu (1971, 1977, 1982), namun menjadi kewajiban setiap warga Golkar untuk meyakinkan rakyat, bahwa Golkarlah yang sanggup melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan rakyat, tegas Ketua Umum.

Di sini, di tengah munculnya berita-berita tentang "persinggungan" fisik antar Organisasi Peserta Pemilu (OPP), Ketua Umum menghimbau seluruh warga Golkar, agar tetap waspada, tidak terpancing emosi yang dikobarkan oleh siapapun, sebab Golkar berwatak setia kawan.

Ketua Umum menegaskan, pemilu memang peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, karena merupakan bagian dari pembangunan bidang politik, yang harus disukseskan demi kesinambungan pembangunan.

Tetapi, Golkar dalam ikrar "Panca Bhakti"nya, yakni bhakti ketiga menyebutkan "warga Golkar adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan."

Mesjid Banuaran

Setiba di Padang kota Tercinta, Ketua Umum dan rombongan dijemput oleh Gubernur Sumatera Barat H. Azwar Anas.

Dari Bandara Tabing, sekitar pukul 15.10 WIB, Ketua Umum langsung menuju desa Banuaran, di kecamatan Lubuk Begadung, guna menyerahkan secara resmi Mesjid Banuaran yang dibangun atas bantuan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila.

Ibu E.N. Sudharmono melakukan pengguntingan pita, sebelum Ketua Umum dan rombongan meninjau mesjid YAMP tipe 17 ini.

Pada upacara peresmian yang diguyur hujan lebat ini, hadir pula segenap ninik-mamak, bundo kanduang, para alim ulama serta pemuka-pemuka masyarakat setempat, termasuk Walikotamadya Padang H. Syahrul Udjud SH.

Di sini, Mensesneg Sudharmono selaku Sekretaris YAMP menegaskan tidak benar bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru tidak memperhatikan pembangunan bidang spiritual keagamaan.

Yang terbukti, justru sebaliknya, kita memberikan perhatian yang cukup besar untuk lebih mengembangkan kehidupan bidang keagamaan, kata Sekretaris YAMP.

Sudharmono menjelaskan, YAMP selama ini sudah membangun lebih kurang 200 mesjid di seluruh Indonesia. Setiap bulan, Yayasan yang menghimpun dana dari para dermawan muslim itu, memberi bantuan lima sampai enam pembangunan mesjid di seluruh tanah air.

Pada acara yang sama, Mensesneg berkenan untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan daerah senilai Rp 12,5 milyar, dan sebagai Ketua Umum DPP Golkar memberikan sumbangan Rp 5 juta untuk pembangunan lapangan sepakbola di Lubuk Bagelang.

Bukan Primordial

Di depan sivitas akademika Universitas Andalas, IKIP Padang dan IAIN Imam

Digitized by Google

Bonjol pada malam harinya, Mensesneg memberikan ceramah umum berjudul "Pembangunan Politik Menurut Undang-Undang Dasar 1945" dengan pengantar Prof.Dr.Ir. Yurkalis Kamil, Rektor Universitas Andalas.

Mensesneg, yang juga pucuk pimpinan golkar menjelaskan proses perkembangan politik di tanah air sejak zaman Orde Lama hingga Orde Baru sekarang, yang berakhir dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kesempatan tanya-jawab, mahasiswa S. Matondang dari Fakultas IPA menanyakan resep apa yang diterapkan Orde Baru dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan.

Mensesneg menjelaskan, sebenarnya yang kita bangun adalah sistem, yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sistem itu berinti pada kedaulatan di tangan rakyat, melalui permusyawaratan dalam perwakilan.

"Jadi, yang kita bangun dan wariskan adalah sistem, dengan sistem yang mantap, kita harapkan tidak timbul gejolak. Oleh karena itu, jangan bikin konsep-konsep yang lain," jawab Sudharmono.

Aceh — Sumatera Utara

Sebelum tiba di Padang, Ketua umum DPP Golkar dan rombongan terlebih dulu mengadakan kunjungan kerja di wilayah propinsi Sumatera dan Daerah Istimewa Aceh.

Di Medan, Sabtu 11 April, Ketua Umum selaku Mensesneg meresmikan penggunaan Laboratorium Bahasa Universitas Islam Sumatera Utara bantuan presiden dan memberikan ceramah umum di depan sivitas akademika UISU serta sivitas akademika perguruan-perguruan tinggi swasta di Medan.

Dalam ceramah berjudul "Pemilu Sebagai Mekanisme Pelaksanaan Demokrasi Pancasila" Sudharmono menjelaskan, selama era Orde Baru kita berusaha mengembangkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila dan melaksanakan pembangunan sebagai pengalaman Pancasila.

Demokrasi Pancasila, menurut Sudharmono adalah demokrasi universal, namun dengan ciri-ciri khusus kepribadian Indonesia. Dengan demikian kedaulatan adalah di tangan rakyat, bukan di tangan sekelompok orang. Hal ini jelas disebutkan pada sila keempat dari Pancasila.

Demokrasi Terpimpin di masa Orde Lama, menurut Sudharmono, sebenarnya juga tidak ada salahnya, jika dikaitkan dengan sila keempat Pancasila. Demokrasi Terpimpin, mestinya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tapi di masa lalu, ternyata perkembangannya tidak sesuai dengan Demokrasi Pancasila yang dicita-citakan.

Dalam ceramah ini, pucuk pimpinan Golkar juga menyebutkan, bahwa pemilu merupakan bagian dari mekanisme kepemimpinan lima tahunan yang harus disukseskan.

"Kita berharap pemilu 23 April nanti berjalan lebih luber dan jurdil. Sebab setelah kita satu asas, kita bersyukur kampanye berjalan lebih tertib dan masyarakat bebas memilih sesuai dengan keinginannya," ujarnya.

Asrama Mahasiswa

Siang itu pula, Ketua Umum dan rombongan terbang ke D.I. Aceh untuk meresmikan penggunaan Asrama Mahasiswa di Universitas Syiah Kuala.

Asrama Mahasiswa yang terdiri lima unit gedung bertingkat tiga terdiri dari 235 kamar yang dapat menampung 588 orang mahasiswa itu dibangun dengan biaya Rp 1,197 juta.

Asrama yang sama, yang dibangun berdasarkan Keputusan Presiden, juga dibangun di Universitas Brawijaya Malang, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Ambon, Universitas 11 Maret di Surakarta dan Universitas Syiah Kuala.

Pada malam harinya, Ketua Umum memberikan ceramah dan mengajak dialog dengan para mahasiswa universitas tersebut.

Menjawab pertanyaan seorang mahasiswa Sudharmono membantah jika dalam pelaksanaan pembangunan ada suatu daerah/wilayah yang dianak-tirikan.

"Tidak ada bagian wilayah yang dianaktirikan dalam pelaksanaan pembangunan, semua daerah dianggap sama", tegasnya.

Mensesneg memberi contoh dalam rangka pemerataan pembangunan sampai ke desa-desa, pemerintah memberikan dana Rp 1,35 juta kepada setiap desa setiap tahun untuk merangsang pembangunan di semua desa di seluruh Indonesia.

Mensesneg juga membantah tidak betul, bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah justru menyengsarakan rakyat. Yang terjadi, justru sebaliknya, bangsa Indonesia kini mencapai kemajuan, antara lain di dalam pengadaan sandang dan pangan.

"Bahkan, dunia mengakui Indonesia adalah salah satu di antara sedikit negara yang berhasil membangun, meskipun dunia sedang dilanda resesi," ujarnya.

Ketika seorang mahasiswa menanyakan tentang adanya ikatan primordial dan ikatan-ikatan sejenis yang dinilainya justru bisa menguras nilai-nilai luhur UUD 1945 Mensesneg menegaskan, dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, justru hendak kita hilangkan ikatan-ikatan primordial itu, apakah itu agama, suku, dsbnya.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

KANTOR PUSAT JALAN BRAGA NO. 12 BANDUNG

Telp. Hunting System : (10 Saluran) 022 – 436553 Pesawat Telex : 28379 BPD BD, 28624 – 28640 BPD PST IA

Dengan Cabang-cabangnya tersebar di seluruh Jawa Barat.

"DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA DIREKSI BESERTA KARYAWAN/KARYAWATI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL"

Digitized by Google

Diakui oleh Mensesneg, dalam hal ini, praktek yang membuktikan segera jalan atau tidak tekad itu. Tapi, setidak-tidaknya, sudah ada landasan hukumnya, sehingga harus dilaksanakan, dan yang tidak melaksanakan bisa terkena sanksi, ujarnya.

Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, kita tidak inginkan pembentukan kekuatan/kekuasaan berdasarkan ikatan-ikatan primordial. Jika kebetulan ada keluarga pejabat yang jadi, itu bukan karena sistem famili, tapi memang karena orang yang bersangkutan mampu.

Yang jelas, kata Mensesneg, wasasan kita bukan ikatan primordial, tapi wawasan Nusantara, Wawasan Kebangsaan, Wawasan Bhineka Tunggal Ika, tegasnya.

Di bidang pembangunan spiritual, seorang mahasiswa dari Fakultas sastra berpendapat pembangunan spiritual melalui penataran P-4 kurang berhasil, karena terbukti masih ada pejabat-pejabat di kalangan elite politik di Indonesia yang melakukan komersialisasi jabatan.

Mensesneg menegaskan, bahwa pembangunan mental spiritual yang kita lakukan bukan hanya melalui penataran P-4, tapi melalui juga pendidikan dalam arti yang luas, termasuk di madrasah-madrasah, mesjid-mesjid, sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi.

"Jangan harapkan dengan penataran kita menjadi malaikat semua. Itu tidak mungkin. Tapi kalau tidak ada pendidikan mental spiritual, maka keadaannya akan lebih kacau lagi," ujarnya.

Sudharmono menyatakan tidak sependapat, dengan adanya penataran P-4 kejahatan justru kian merajalela. Itu tidak betul, bahwa sekarang masih ada kejahatan korupsi itu bukan hanya di Indonesia saja, tapi di mana-manapun ada. Namun yang jelas, pemerintah tidak mentolerir adanya korupsi. Siapa yang ingin memberantas korupsi, mari bersama-sama pemerintah,

kata Sudharmono, mendapat tepukan para mahasiswa.

Ketika seorang mahasiswa dari fakultas teknik menanyakan tentang kebijaksanaan politik pemerintah dalam menangani alih teknologi, Mensesneg menjelaskan, sebagai negara berkembang Indonesia memerlukan alih teknologi, baik dengan cara belajar, membeli atau kerjasama dengan negara-negara yang lebih maju teknologinya.

Dalam memilih teknologi didasarkan prioritas dan diusahakan diperoleh tanpa mengorbankan pembangunan secara keseluruhan, misalnya mengorbankan integritas nasional atau kepentingan rakyat.

Jadi, dalam memilih teknologi harus dilakukan secara selektif dan tidak merugikan, kata Sudharmono.

Atas pertanyaan seorang mahasiswa, Mensesneg menyatakan tidak betul, bahwa konsep pembangunan politik di Indonesia mengarah kepada terbentuknya partai tunggal.

Selama Undang-Undang tentang Parpol dan Golkar masih berlaku, kita tetap punya dua parpol dan satu Golkar, tegas Sudharmono.

Sabtu petangnya, Ketua Umum DPP Golkar menghadiri rapat umum di Lapangan Universitas Abul Yatama di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Aceh Besar.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU

BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Raya Patimura No. 7 Amboina 97124

Kantor Pusat : A m b o n, TELEX 73100 AB Alamat kawat BPDAM

"DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN WARGA
WARGA BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU
SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL"

Digitized by Google

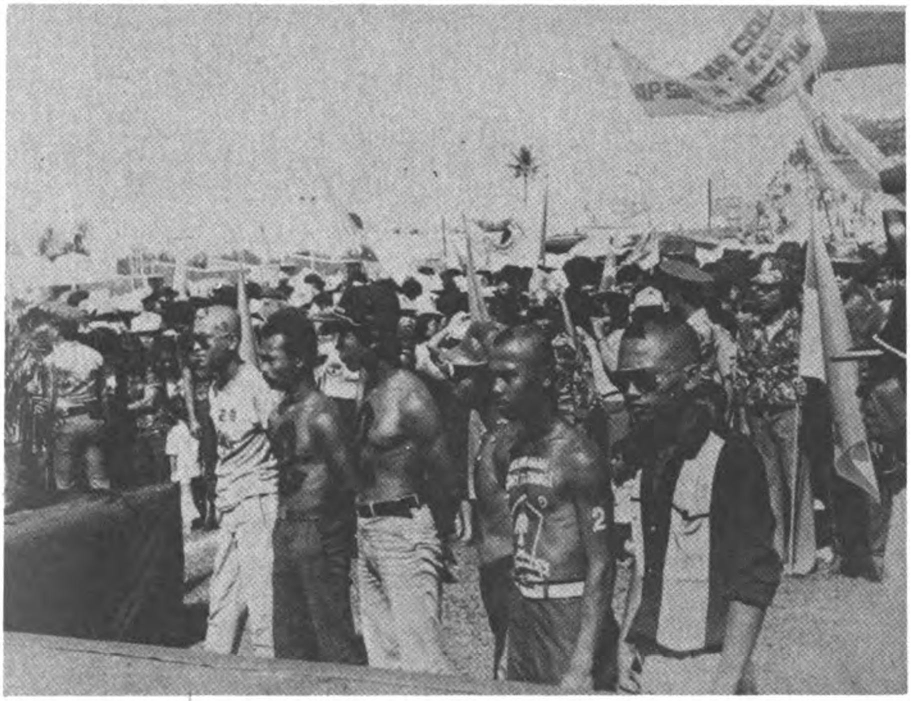

Di hadapan puluhan ribu massa Golkar yang berjubel di lapangan yang sempit dan ditimpa hujan, Ketua Umum mampu membangkitkan gairah semangat massa untuk berketetapan teguh memenangkan Golkar pada pemilu 23 April mendatang.

Seperti di rapat-rapat umum lainnya, Ketua Umum dalam kesempatan itu juga mengajak dialog dengan beberapa orang, termasuk pemuka masyarakat setempat H. Mohammad Arsyad (63 tahun) yang menyampaikan permohonan bantuan untuk yayasan pendidikan/pesantren yang hendak didirikan. Ketua Umum dengan tulus ikhlas mengulurkan bantuan spontan Rp 2,5 juta, yang disambut dengan gegap gempita tepukan tangan massa.

Jembatan Krueng Teunom

Pada hari kedua kunjungan kerjanya di D.I. Aceh, Ketua Umum DPP Golkar Mensesneg Sudharmono SH meresmikan penggunaan jembatan Krueng Teunom sepanjang 204 meter berikut jembatan Babah Pinto, Jembatan Paket II, III dan IV dan beberapa jembatan kecil yang semuanya berjumlah 19 jembatan sepanjang 410 meter pada ruas jalan yang menghubungkan Banda Aceh—Meulaboh: yang pembangunannya menelan biaya Rp 2.341.163.000,-

Di tempat yang sama, Mensesneg juga meresmikan listrik masuk desa di 33 desa meliputi enam kabupaten (Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan) yang seluruhnya menelan biaya Rp 1.594.617.000,-

Mensesneg dalam sambutannya di hadapan puluhan ribu massa yang membludag hingga di jembatan yang diresmikan mengatakan, meskipun hasil pembangunan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun pemerintah menyadari bahwa keinginan rakyat terhadap pembangunan masih besar.

Oleh karena itu, ia menghimbau, rakyat harus turut berpartisipasi dalam pembangunan, jika memang menginginkan kesinambungan pembangunan.

Mendengar himbauan Mensesneg,yang juga Ketua Umum Golkar, massa serentak meneriakkan "hidup Golkar", "hidup Orde Baru", "pembangunan... terusss!"

Mensesneg juga menghimbau, agar seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih turut ambil bagian dalam menyukseskan pemilu, demi kesinambungan pembangunan. Pembangunan yang hasilnya bukan saja untuk masa sekarang, tapi juga untuk anak-cucu kita kelak, ujar Ketua Umum DPP Golkar yang mendapat sambutan hangat masyarakat, yang sebagian besar berbaju kuning bertanda gambar beringin.

Rangkaian perjalanan Ketua Umum DPP Golkar ke tiga propinsi ini, menurut pemuka-pemuka masyarakat setempat bagaikan menguak jalan bagi usaha meraih kemenangan Golkar di wilayah-wilayah propinsi yang masih dianggap rawan.

Melihat kenyataan sekarang, setidak-tidaknya Golkar mampu memperbaiki perolehan suaranya di tempat-tempat yang dianggapnya rawan, kata seorang pemuka masyarakat Banda Aceh.

Sejumlah pimpinan DPP serta fungsionaris Golkar menyertai Ketua Umum dalam kunjungan di tiga propinsi Sumatera ini.□ ASKAN KRISHNA/RA

BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU

KANTOR PUSAT : JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 245 PEKANBARU, RIAU

DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN,
BEKERJA KERAS DAN BERKARYA
KITA SUKSESKAN PEMILU 1987
SEBAGAI PESTA DEMOKRASI
UNTUK MENJAMIN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN
DAN TETAP TEGAKNYA PANCASILA DAN UUD 1945

Digitized by Google

Lambaian Tangan Sudharmono, Massa Golkar makin Gairah

Tampil dengan pakaian safari dengan hiasan gambar beringin, ketua umum DPP Golkar Sudharmono SH sempat menggoyang warga ibukota di lapangan Urip Sumohardjo Jakarta timur. Kehadiran pertama kali dalam rangkaian kampanye Golkar di Jakarta, Sudharmono menggugah semangat massa Golkar yang sudah berdesak-desakkan sejak pukul 12.00 dari acara pukul 15.00 yang direncanakan penyelenggara.

Yel-yel hidup Golkar, Pembangunan Terus, Pancasila Saksi, tidak henti-hentinya mengumandang menyertai penampilan Sudharmono di arena kampanye saat itu. Dengan penuh kesabaran Sudharmono terus mengimbangi pekik-pekik massa Golkar, dan saat dia melambaikan tangannya, sesaat massa terdiam, membisu menunggu apa yang akan terucap dari mulut ketua umum Golkar itu. Sudharmono, kali ini tampil dengan sederetan fungsionaris Golkar baik tingkat pusat maupun daerah DKI, di antaranya H Achmadi, ketua DPD Golkar DKI Jakarta.

Tidak biasanya seperti juru kampanye lainnya, Sudharmono mengawali kampanyenya dengan sebuah pertanyaan kepada massa, untuk apa kalian berkumpul di lapangan ini. Dijawab sepontan oleh massa Golkar yang sebagian besar didominasi generasi muda dengan pekikan kampanye memenangkan Golkar dalam Pemilu 1987. Apa yang kalian harapkan dari kemenangan Golkar dalam pemilu 1987, massa menjawab untuk menjaga kelangsungan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, bapak pembangunan. Belum puas dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Sudharmono seperti biasa dilakukan di daerah lain, mengundang beberapa pengikut kampanye untuk naik panggung berdialog langsung dengan ketua umum.

Apa kata mereka? Kami generasi muda mengharapkan Golkar menang, pembangunan berjalan terus dan lapangan kerja semakin banyak tercipta kaum muda yang belum kebagian pekerjaan. Itu pasti, kata Sudharmono menimpali rajukan salah seorang generasi muda di panggung. Golkar selalu berusaha keras bagi terciptanya lapangan kerja. Sebab kesempatan kerja itu tidak datang dengan sendirinya, harus diwujudkan dengan usaha kerja keras dari segenap bangsa Indonesia. Pilihan saudara untuk mencoblos beringin tanggal 23 April 1987, tidak salah lagi. Pembangunan akan memberikan harapan bagi kehidupan yang lebih baik bagi warganya, tegas Sudharmono yang disambut pekikan hidup Golkar bertalu-talu, seolah tidak hendak berhati sebelum naiknya tangan Sudharmono ke atas sebagai isyarat agar massa diam. Perjuangan Golkar, bagaimana kehidupan hari esok lebih baik dari hari ini. Pendidikan lebih banyak lagi dapat dinikmati segenap lapisan masyarakat baik di kota-kota maupun di daerah pedesaan. Kita harus membulatkan tekad bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan di bawah pemerintahan orde baru, sebagai jawaban daripada amanat penderitaan rakyat.

Massa yang menyemut, tidak hanya terjadi di lapangan Urip Sumohardjo Jakarta Timur, tapi di tempat dimana setiap kali ketua umum berkampanye, luapan massa yang datang berbondong-bondong dengan menggunakan berbagai macam kendaraan rasanya tidak terbendungkan lagi.

Digitized by Google

Memasuki putaran kampanye tingkat kota, Golkar tampil lebih semarak, tertib dan penuh antusias dari sambutan warga beringin di ibukota Jakarta. Bahkan dalam kampanye di lapangan JBR Kuningan Jakarta Selatan, di depan puluhan ribu massa Golkar dan ketua umum DPP Golkar Sudharmono SH, tokoh NU Jakarta H Syahmanaf bersama 12 ulama lainnya telah menyatakan tekad bulatnya untuk mendukung Golkar dalam Pemilu 1987. Kalangan ulama ini berpendapat memenangkan Golkar dalam pemilu ini, berarti kehidupannya yang lebih layak bagi mereka akan terwujud. Kebulatan tekad ini telah mendapat sambutan massa Golkar yang menyemut sejak pukul 12.00, menunggu pimpinan tertinggi Golkar untuk memberikan gemblengan semangat bagi kemenangan Golkar. Yel-yel hidup Golkar, Pancasila sakti, tidak pelak lagi menggema memekakkan telinga akibat dukungan sound system yang baik yang disediakan oleh panitia penyelenggara.

Sudharmono sendiri yang nampak senyum, mengingatkan kepada massa Golkar bahwa apa yang telah diucapkan dalam kebulatan tekad ulama di Jakarta itu, tidak berarti mereka telah kejangkitan kutu loncat. Ini hanya sebagai bukti bahwa Golkar-lah satu-satunya kekuatan yang bisa memperjuangkan semua aspirasi dan kepercayaan rakyat banyak. Barisan NU yang dulu belum masuk ke dalam jajaran beringin telah menyadari betapa pentingnya berjuang bersama Golkar. Dan Golkar mengajak berjuang bersama-sama untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik. Sebab itulah inti perjuangan Golkar selama ini.

Di lapangan JBR itu, ketua umum Golkar disertai pula sederetan nama beken seperti ketua DPD Golkar Achmadi, nyonya Hartini LB Moerdani, Muochtar Luthfi dan sejumlah artis yang bernaung dibawah panji-panji pohon beringin. Artis penyanyi Lies Saodah dengan goyangnya mengajak massa berjoget di lapangan becek, sementara sejumlah seniman grup kesenian tradisional menampilkan kebolehannya di lapangan yang sama seperti kesenian reog Ponorogo serta gendang rampak Jabar dan kelompok Qasidah. Dan sebagaimana biasa setiap kali berlangsung kampanye Golkar, sebelum dimulai kampanye dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam putaran lain kampanya Golkar di Jakarta, Sudharmono sempat pula menggebrak massa Golkar di lapangan Tanjung Duren Jakarta Barat, dan sekitar 60.000 warga beringin dibuat histeris meneriakkan yel-yel hidup Golkar, Golkar menang. Sementara deretan mobil truk, pick up dan jenis kendaraan lainnya yang tidak dapat masuk ke lokasi kampanye Golkar harus puas nongkrong di jalan S Parman menunggu massa lainnya yang akan meninggalkan lapangan dimana kampanye berlangsung.

Sejumlah tokoh ulama di wilayah Jakarta Barat, seperti juga di tempat lain di Jakarta, menyatakan kebulatan tekadnya untuk menusuk beringin. Bahkan dari sederetan pengunjung yang secara khusus diundang ketua umum Golkar itu, tampaknya tokoh pemuda Anshor, yang dengan lantangnya menyatakan sikap akan memenangkan Golkar. Golkar telah mampu membuktikan dirinya sebagai kekuatan politik yang bisa menampung seluruh aspirasi rakyat demi terlaksananya pembangunan nasional.

Di depan massa yang sudah tidak sabar lagi meneriakkan yel-yel Golkar menang, Sudharmono mempertegas apa yang menjadi tekad Golkar untuk terus menerus mengupayakan terciptanya kehidupan yang lebih baik dari masa yang sudah-sudah. Program pembangunan yang selama ini dicanangkan Golkar selama ini selalu bertumpu kepada Pancasila dan UUD 1945. Medan perjuangan Golkar adalah pembangunan masyarakat adil, makmur dan merata serta terlaksananya amanat penderitaan rakyat. Tentang lapangan kerja yang selalu diimbau oleh warga beringin, Sudharmono mempertegas bahwa lapangan kerja tidak tercipta begitu saja tanpa usaha keras untuk menciptakannya. Untuk itu, kata Sudharmono, pembangunan harus berlanjut terus tidak boleh terhenti di tengah jalan. Selesainya Repelita IV, diteruskan dengan Repelita V dan repelita-repelita selanjutnya.

Kepada generasi muda, Sudharmono tidak lupa mengingatkan bahwa kampus bukan tempat untuk perjuangan politik. Kampus tempat menimba ilmu pengetahuan yang nantinya disumbangkan kepada masyarakat. Namun demikian, kepada mahasiswa tidak dilarang untuk ikut aktif dalam kegiatan politik. Sebagai mahasiswa justru diharapkan agar selalu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan kepada seorang anak muda yang diundang naik panggung oleh Sudharmono, diingatkan agar sebagai generasi muda tetap mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan politik bangsa, dan sebagai warga negara Indonesia, generasi mempunyai hak pula untuk berbicara.

Gelora semangat penuh gairah warga Golkar tidak hanya menyebar di wilayah Jakarta saja, di beberapa daerah Indonesia lainnya, semangat itu juga tampil dengan penuh semarak tanpa meninggalkan sikap simpatik, tertib dan teratur dari warga Golkar yang merayakan pesta demokrasi tahun 1987, kecamatan Dolopo Kabupaten

Seperti di Madiun Jawa Timur, di depan lebih dari 30.000 massa beringin, Theo Sambuaga, tokoh muda Golkar di DPR, tampil memukau mengiringi yel-yel warga beringin. Theo berkata, pembangunan dilaksanakan bersama-sama pemerintah dan rakyat Indonesia. Tapi dalam melaksana-

KERTAS PRODUKSI BASUKI RACHMAT
MENJAMIN KEPUASAN KONSUMEN

MUTU BERTAHAN
HARGA MELAWAN

PT KERTAS BASUKI RACHMAT (PERSERO)

KANTOR PUSAT
JLN. JENDRAL BASUKI RACHMAT
TILP. 21021, 21022, 21023, 21024
TELEX : 31287 PKBR BW
B A N Y U W A N G I

KANTOR PERWAKILAN
JLN. KEMAYORAN BARU NO. 47
TILP. 23801
TELEX : 31145 PKBR SB
S U R A B A Y A

JLN. KALIBESAR TIMUR NO. 31
TILP. 673017
J A K A R T A

Digitized by Google

kan ada yang memimpin, dan selama ini Golkarlah yang memimpin baik dalam konsepsi, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan itu. Kendati demikian tidak dipungkiri bahwa ada beberapa kekurangan dari pembangunan itu. Masih ada rakyat yang memakai sandal jepit, dan Golkar akan berjuang lebih keras agar rakyat itu secepatnya mengenakan sepatu. Golkar selama ini tidak mengeksploitasi kemiskinan dan kebodohan yang masih ada. Justru dimana masih ada rakyat yang belum mengenyam pendidikan yang cukup disitu Golkar menancapkan tekadnya berjuang dan berkarya nyata.

Sementara itu, di lapangan Dwi Windu Bantul Yogyakarta, Letjen (Pur) Sarwo Edhie berkiprah di depan massa Golkar sekitar 60 ribu orang. Sarwo Edhie yang punya jalinan erat dengan perjuangan menegakkan orde baru, mengingatkan massa Golkar untuk tidak mudah terpancing provokasi. Golkar bukan anak kemarin, tapi organisasi politik yang besar dan sudah banyak makan garam. Kita tidak ingin kembali ke jaman sebelum gestapu, kita telah bosan dengan pertikaian, ujarnya. Ia mengingatkan pula bahwa Golkar pasti menang dan akan terus berkarya. Oleh karenanya, katanya, berikan mandat kepada Golkar untuk tampil memimpin pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Memasuki kota buaya, Surabaya, tepatnya di lapangan Prapatkurung, puncak penampilan awal Golkar berkampanye dengan mengerahkan massa sekitar 100 ribu lebih. Jurkam Prof Dr Widjojo Nitisastro, berbicara program Golkar tentang tenaga kerja, pendidikan, pemerataan pembangunan. Golkar telah siap dengan program untuk lima tahun mendatang, dan hanya Golkarlah yang siap dengan program dibanding OPP lainnya. Di depan massa yang sebagian besar pegawai negeri (korpri) Widjojo Nitisastro menegaskan Program-program Golkar lahir dari keinginan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Menurut pengamatan, kampanye disini merupakan yang terbesar dari seluruh rangkaian kampanye pada putaran keempat.

Di Banjarmasin, tampil pula fungsionaris Golkar AE Manihuruk, selain pelawak Bagio Cs tampil juga penyanyi beken Iis Sugiyanto. Dalam kampanyenya yang hanya berlangsung sebentar setelah turunnya hujan lebat, Manihuruk mengajak sekitar 5000 warga beringin memenangkan pemilu 1987, yang disambut pekikan hidup Golkar dari massa yang memadati halaman GOR Hasanuddin EM, Banjarmasin.

Sementara di Semarang, pada putaran kelima tampil nyonya Kardinah Soepardjo, Suyono Sosrodarsono, yang keduanya Jurkam tingkat nasional Golkar membakar semangat warga beringin 25 ribu lebih yang menyemut di lapangan Banyumanik daerah Semarang Selatan. Hampir tiga jam lebih jurkam nasional Golkar memaparkan program-program Golkar yang jelas dan sudah menjadi kenyataan, dimana program itu harus diteruskan dan dipertahankan agar pelaksanaan pembangunan cepat mencapai sasaran yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Di kota Semarang, suara-suara jurkam itu nyaris larut dalam yel-yel hidup Golkar yang tidak ada henti-hentinya. Bahkan massa Golkar yang sebagian besar generasi muda itu sudah tidak sabar lagi untuk secepatnya turun ke jalan-jalan, menampilkan warna kuning di tengah-tengah padatnya lalulintas kendaraan umum, yang kesemuanya itu menunjukkan Golkar menyatu dengan warga semarang. Ketika itu jurkam nasional Surono, hampir-hampir kehilangan kesempatan untuk menggembleng massa yang sudah tidak sabaran itu.Tapi masih ada sisa-sisa disiplin yang ditunjukkan oleh massa Golkar.

Sementara itu anggota Dewan Pembina Golkar, Rachmat Saleh SE, yang juga ikut meramaikan kampanye memenangkan Golkar sebagai jurkam tingkat nasional, menyempatkan menghadiri kegiatan sunatan yang diselenggarakan DPD Golkar Lampung Utara. Di daerah itu, Rachmat Saleh menyempatkan berdialog, dan dari ketua DPD Golkar setempat diperoleh keterangan bahwa sekitar 4000 Jurkam tingkat I dan II diturunkan ke desa-desa.

Sesuatu yang unik dalam masa kampanye 1987, disuguhkan oleh sekjen DPP Golkar Ir Sarwono Kusumaatmadja, ketika berkampanye di bilangan Karet Tengsin. Kampanye mini model sekjen Golkar, lebih mengarah kepada bentuk dialog dari hati ke hati generasi muda Karet Tengsin Jakarta Pusat dengan Sarwono. Masalah yang dibicarakan pun hal-hal yang kongkrit, tidak ada spanduk, slogan, juga tidak terdengar program-program besar dan muluk-muluk. Di depan sekitar anak-anak muda yang duduk beralaskan kertas koran pada halaman sebuah keluarga di bawah rindangnya pohon, suasana sejuk namun penuh keakraban. Bersama Sarwono, tampil juga beberapa kader Golkar, di antaranya Otje Sudioto SH yang pernah menjadi nominasi calon Golkar di DPR, Muochtar Abbas, pimpinan pondok pesantren Pabelan Magelang (Jateng) dan Untung Sumadi SH, seorang Karyawan DPR. Tema diskusi masih saja masalah kesempatan kerja yang sampai saat ini merupakan tantangan bagi mereka. Dan melalui Golkar dambaan mereka gantungkan dengan harapan Golkar mampu mengatasi persoalan tersebut. ☐

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA, SEGENAP WARGA KELUARGA BESAR

Patra Jasa

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU - 1987
DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PT. PATRA JASA,

HOTEL - MOTEL -TURISME - REAL ESTATE - INDUSTRIAL - CATERING & PERDAGANGAN UMUM.
GEDUNG PATRA JL. GATOT SUBROTO 32 - 34 JAKARTA SELATAN, TELEPON 510503.

Digitized by Google

Kemenangan Akan Teraih

Berkat militansi dan kerja keras Kader-Kadernya

Golkar merupakan komponen Orde Baru

Diawali dengan pertemuan slagorde pimpinan orsosmasinal wanita Golkar se Kodya Semarang, dengan mengambil tempat di Aula Gedung DPD Golkar Tingkat I Jawa Tengah, tiga hari menjelang pelaksanaan Kampanye Ketua DPP Golkar Ny Moerpratomo, masih berkesempatan memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kader-kader wanita Golkar Jawa Tengah, tidak saja di Kodya Semarang, waktu tersisa tiga hari itu dimanfaatkan untuk arahannya yang meliputi Kabupaten Tegal, Kodya Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kodya Pekalongan. Arahan yang diberikan menyangkut masalah-masalah konsolidasi kedalam maupun keluar dan sampai pada pelaksanaan teknis kampanye yang hendak dilakukan.

Pelaksanaan kampanye merupakan serentetan program Golkar

Ditegaskan olehnya bahwa pelaksanaan kampanye pada dasarnya menurut Ny Moerpratomo, merupakan kelanjutan dari serentetan tahapan program Golkar yang telah dirintis sejak empat tahun lalu, tepatnya dimulai pada MUNAS III Golkar 1983. Golkar telah berturut-turut telah menyelesaikan tugas tahap demi tahap program yang telah diputuskan oleh segenap jajaran Golkar. Berawal dengan kaderisasi, konsolidasi yang menyangkut konsolidasi idiil dan wawasan. Dan kini giliran saat memasuki tahapan kampanye. Untuk itu ia berpesan kepada segenap warga Golkar, dalam pelaksanaan kampanye kita harus tetap waspada terhadap segala kemungkinan oknum yang tidak bertanggungjawab yang mereka itu tidak ingin melihat suksesnya pemilu itu bagi kemenangan Orde Baru.

Golkar merupakan komponen Orde Baru, dan telah dengan bekerja keras berperan serta dalam pembangunan nasional, yang keberhasilannya telah dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari seluruh penjuru tanah air, ujar Moerpratomo. Kondisi yang demikian itulah yang akan terus ditingkatkan Golkar bersama-sama rakyat dimasa datang lanjutnya. Oleh karenanya pemilu '87 punya arti yang sangat mendasar untuk kelanjutan pembangunan tersebut. Jaminan untuk itu, kata Ketua DPP Golkar, salah satu prasyaratnya Golkar harus dapat memenangkan pemilu 23 April '87. "Siapkah saudara-saudara untuk memenangkan Golkar dalam pemilu '87? tanya Ny Moerpratomo, "Siap" jawab 8000 kader dan warga Golkar secara serentak. Yang memadati halaman Gedung Krida Bhakti, Aula pertemuan DPD Golkar tingkat II Pemalang yang pada saat itu diresmikan Ketua Golkar itu. Gedung berkapasitas 2000 orang tersebut bertengger di sebelah kiri DPD Golkar dan berhadapan dengan Masjid YAMP yang peresmiannya dilakukan Ketua Umum DPP Golkar 6 bulan berselang, saat peresmian itu Ketua Umum memberikan pancingan uang sebesar 5 juta rupiah sebagai awal penghimpunan dana dari warga Golkar dan masyarakat yang mendambakan gedung pertemuan, dengan waktu relatif singkat 6 bulan gedung yang diharapkan dengan nilai ratusan juta itu telah dapat digunakan, kata Laswadi Ketua DPD Golkar Pemalang dengan semangat, dan tidak kalah semangat dan aplaus dari warganya mengelu-elukan Laswadi di tengah terik sengat matahari dan nampak tertib duduk bersila di halaman berpasir.

Semangat dan ketertiban warga Golkar merupakan modal utama dalam rangka pelaksanaan pesta demokrasi pemilu, ujar

Digitized by Google

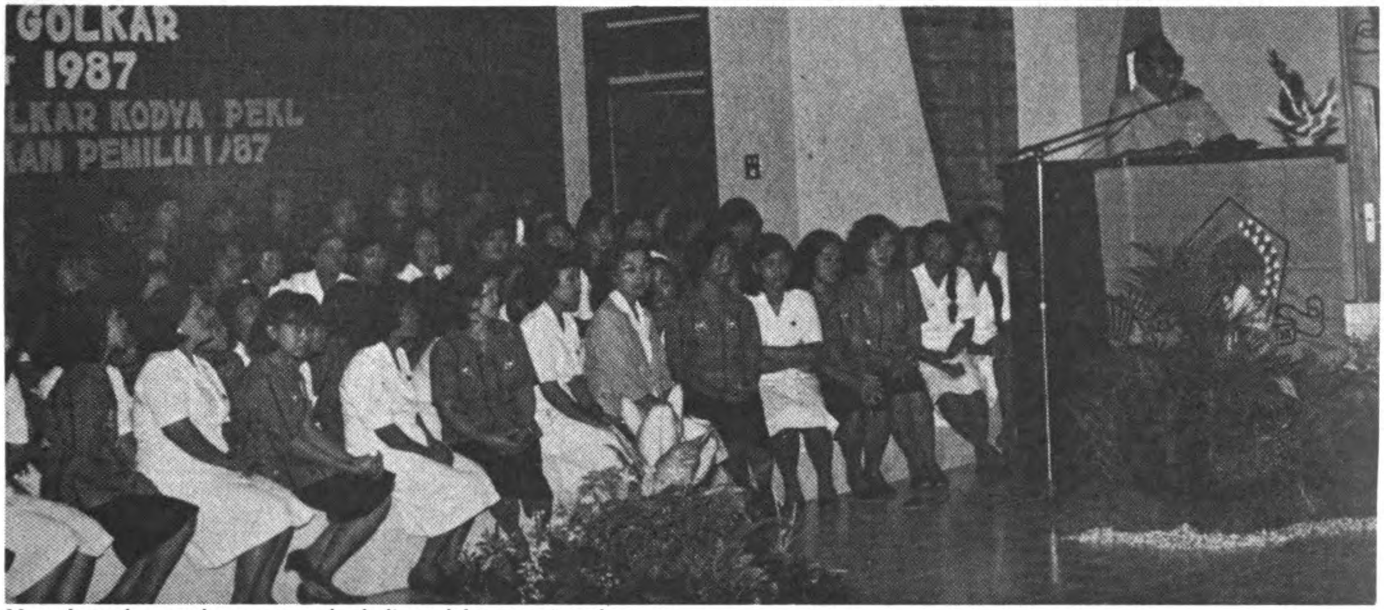

Masa depan bangsa dan negara terletak di pundak generasi muda

Ketua Golkar Ny. Moerpratomo dengan haru, terlebih yang hadir siang hari itu terbesar adalah generasi muda, ini merupakan indikasi ketertiban warga Golkar dalam pelaksanaan pemilu. Jika demikian halnya Generasi muda telah sadar akan arti penting pemilu sebagai pelaksanaan mekanisme demokrasi pancasila, generasi muda harus lebih bertanggung jawab akan suksesnya pemilu itu. Karena di pundak generasi mudalah tampuk pimpinan masa mendatang negara dan bangsa ini. Generasi angkatan 45 sebentar lagi sudah harus mundur karena faktor usianya, Sadar akan hal itu, Golkar telah mempersiapkan diri melalui kaderisasi. Ini suatu bukti bahwa Golkar sejak dini telah mempersiapkan kader-kadernya, untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara, tegasnya.

Oleh karenanya melalui kesempatan kunjungan kerja selama tiga hari yang meliputi 4 Kabuapten, Ketua DPP Golkar Ny. Moerpratomo, yang disertai pula fungsionaris Golkar Pusat Drs H Abusairi, Ny Sumario, Nn Farida SH, Drs Mesri Pasaribu, mengajak segenap jajaran warga Golkar untuk lebih meningkatkan kerja keras dan makin memantapkan penggalangan dengan mengerahkan segala potensi yang ada pada seluruh jajaran keluarga besar Golongan Karya hingga diseluruh pelosok desa, untuk dapat benar-benar mensukseskan perjuangan Golkar yang telah diyakini kebenarannya, dengan cara-cara yang simpatik, etik dan terhormat.

Dalam kesempatan checking terakhir kesiapan warga Golkar dalam rangka memasuki masa kampanye itu Moerpratomo juga menyerahkan beberapa bantuan antara lain berupa, Al Qur'an untuk Kodya Tegal, Kab Tegal, Kodya Pekalongan masing-masing 200 buah, dan 500 pohon buah-buahan, serta menyerahkan bantuan finansiil untuk keperluan kampanye.

Checking terakhir yang dilakukan Ketua DPP Golkar ke daerah-daerah tersebut tidak saja dilakukan di kota-kota, tetapi juga sampai pada pelosok-pelosok kecamatan, seperti halnya di Kecamatan Tarub, Kab Tegal, bertempat di Kediaman Kader Golkar dilakukan sampai larut malam pukul 1 dini hari. Diperoleh indikasi bahwa persiapan warga Golkar telah betul-betul mantap, kiranya kemenangan akan diperoleh berkat militansi dan kesungguhan dan kerja keras pada kader-kader Golkar, termasuk juga daerah-daerah rawan Golkar seperti halnya Kodya Pekalongan, yang oleh DPD Golkar tingkat I Jawa Tengah dijuluki sebagai Acehnya Jawa Tengah akan memperoleh kemenangan. Tapi agaknya telah diperoleh keyakinan seperti yang terlihat dari kesempatan dialog-dialog Ketua Golkar dengan warga setempat yang telah begitu menguasai materi-materi petunjuk penggalangan. □

Wt

Regina's
BAKERY

KAMI MENYEDIAKAN DAN MENERIMA PESANAN
MACAM-MACAM KUE DAN ROTI

- PASTRIES
- SNACKS
- INDONESIAN SNACKS / KUE BASAH ROTI TAWAR DAN MANIS
- FRENCH – RAISIN AND ALL KINDS OF ROLLS
- NASI TUMPENG
- NASI RAMES
- KUE-KUE DI DALAM BOX UNTUK RAPAT, ULANG TAHUN DLL. ACARA.

OPEN : 7.00 AM – 21.00 PM

- 72, JL. H.O.S. COKROAMINOTO JAKARTA PUSAT, PHONE 334977, 335488.
- 110 B, JL. MELAWAI RAYA JAKARTA SELATAN, PHONE: 770473
- GEDUNG PUSAT KEHUTANAN MANGGALA WANA BAKTI LT. II JL. GATOT SUBROTO – SENAYAN – JAKARTA PUSAT. PHONE: 583881, 584641 EXT. 5269.
- DWIMA PASAR SWALAYAN – PONDOK INDAH PLAZA, JL. METRO PONDOK INDAH KAV. 42 - 47, JAKARTA SELATAN, PHONE: 761958.

Digitized by Google

Sarwono, Dan Ikatan Moral Dengan Pemuda Karet Tengsin

Memberi kesempatan pada pemuda dan pemudi untuk mengeluarkan unek-uneknya

Sekitar 50 pemuda dan pemudi, Jum'at malam 20 Maret datang berbondong-bondong mendatangai rumah H. Abdurachman, warga Karet Tengsin. Mereka duduk bersila di atas lantai dengan menggunakan alas tikar serta koran-koran bekas.

Mereka berkumpul sengaja menunggu kedatangan Sarwono Kusumaatmadja, Sekjen Golkar. Mereka duduk berkelompok membicarakan berbagai hal. Baik mengenai dunia mereka maupun masalah-masalah yang hangat dibicarakan masyarakat.

Malam itu pemuda dan pemudi di daerah tersebut tidak hanya sekedar berkumpul. Tapi mereka mempunyai hajat, yaitu mengadakan malam sarasehan dengan mengundang Sarwono.

Sarwono ketika mengawali sambutannya mengisahkan, bahwa suatu ketika sekretarisnya memberitahu ada undangan misterius. Setelah ditanya sekretaris itu, mengatakan dari Karet Tengsin. "Katakan saya akan datang, tapi cari waktu yang tepat," ujarnya. Dan pada Jum'at malam 20 Maret lalu, Sarwono benar-benar datang di tengah-tengah mereka.

Bagi Sarwono, daerah Karet Tengsin yang terletak di kecamatan Tanah Abang ini tidak dapat dilupakan. Pasalnya, "saya mempunyai ikatan moral dengan para pemuda di daerah tersebut," ujar Sarwono.

Kemudian Sarwono, Sekjen Golkar yang insinyur itu mengisahkan panjang lebar mengenai hal itu. Dikatakan pada tahun 1982 — waktu Golongan Karya mengadakan kampanye di lapangan Banteng, Golkar menampilkan Ali Murtopo (Alm) sebagai juru kampanyenya. Tapi terjadi kerusuhan sebelum acara dimulai. Peristiwa dikenal dengan "Peristiwa lapangan Banteng" membuat shock warga Golkar untuk mengikuti kampanye pada hari-hari berikutnya. Dan setelah peristiwa itu, kampanye yang diselenggarakan oleh Golongan Karya tidak semeriah seperti massa yang terdapat di lapangan Banteng. "Mudah-mudahan peristiwa lapangan Banteng ini merupakan yang pertama dan terakhir," ujar Sarwono mengenang masa lalu.

Diakui bahwa peristiwa itu membuat catatan sejarah buruk bagi warga Golkar yang akan mengikuti kampanye pada hari-hari selanjutnya. Namun dalam keadaan yang demikian, saya melihat Ampi dari Karet Tengsin muncul dipermukaan dengan menggunakan pakaian lengkap. Dan pada saat itu saya merasa timbul lagi ikatan moral dengan para pemuda di Karet Tengsin. Maka ketika sekretaris saya memberitahu ada surat misterius dari Karet Tengsin, maka saya janjikan untuk datang," tegas Sarwono.

Usai memberikan lintasan singkat sejarah keterikatan moral itu, moderator tampil di depan untuk memberikan kesempatan kepada para pemuda dan pemudi yang duduk dengan santai itu menanyakan berbagai hal unek-uneknya, serta memberi tanggapan atas keterangan yang disampaikan Sarwono dalam awal kata sambutannya.

Dalam acara singkat dan terbuka itu oleh para pemuda lebih banyak digunakan untuk bertanya daripada menyanggah keterangan yang disampaikan. Berbagai pertanyaan muncul mulai dari apakah kesempatan kerja itu ada setelah Golongan Karya menang dalam Pemilu nanti, bahkan masukan-masukan yang berarti dapat diperoleh dari acara tersebut.

Sarwono yang berdiri di depan para pemuda dan pemudi itu dengan kalem menjawab, setelah Golongan Karya menang dalam Pemilu nanti kesempatan kerja itu mungkin ada dan mungkin juga tidak. Dan kesempatan itu ada kalau mau dicari. Dan sebaliknya. Kemudian Sarwono mengharapkan agar dalam mencari pekerjaan pembentukan sikap diperlukan.

Dikemukakan contoh beberapa tahun lalu, saat dia masih menjadi sekretaris Fraksi Karya Pembangunan di DPR RI. Suatu saat ada salah seorang keamanan lapor pada dirinya, bahwa ada anak umur belasan tahun tidur di pos keamanan. Kemudian Sarwono meminta kepada keamanan tersebut untuk menghadapkan anak itu kepadanya. Dan kepada anak itu ditanyakan mengenai berbagai hal. Dan akhirnya Sarwono bersedia menampung anak tersebut untuk membantu di FKP dalam menyediakan minum para anggauta dewan. Melihat semangat serta keuletan dalam bekerja, anak tersebut diminta untuk belajar mengetik.

Bekerja di DPR sudah berjalan sekian tahun, secara diam-diam anak tersebut juga meningkatkan pengetahuannya. Melanjutkan sekolah di tingkat SLTA tanpa sepengetahuan Sarwono. Saat menghadapi kesulitan, baru anak tersebut memberanikan diri untuk berbicara langsung dengannya, minta dibantu dalam hal pembiayaan sekolahnya. Setelah dibantu, anak tersebut dapat menyelesaikan pendidikannya. Dan setelah itu anak tersebut melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi swasta. Sampai akhirnya dia dapat menyelesaikan kuliahnya dan mendapat ijasah kesarjanaannya. Dan hingga kini anak tersebut mengajar di perguruan tinggi tersebut. Namun siapa nama anak tersebut, Sarwono tidak menyebutkannya.

Untuk itu, kepada para pemuda dan pemudi di bilangan Karet Tengsin, Sarwono meminta bila dalam mencari pekerjaan, perlunya sikap. Dan bila sikap itu sudah terbentuk, maka pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya. Artinya pekerjaan apa saja yang halal.

Mengenai kampanye, Sarwono meminta agar warga Karet Tengsin dapat melakukan kampanye dengan karya-karya nyata. Misalnya kampanye dengan menarik perhatian masyarakat. Di antaranya, dalam kampanye tsb melakukan pembersihan got-got yang mampet, mengapur tempat-tempat ibadah di lingkungannya.☐ BM

Digitized by Google

KAMPANYE GAYA SEORANG DIPLOMAT

Kebetulan Dubes RI untuk Kerajaan Spanyol dijabat oleh seorang Purnawirawan Laksamana TNI A.L. . Kebetulan ia berasal dari Solo. Kebetulan ia berhobby fotografi. Maka ia diam-diam secara diplomatis mengajak masyarakat Indonesia di Spanyol menentukan pilihan kontestan yang mana dalam pemilu nanti. Maka dipotretlah patung penari Bali nan indah, yang dengan dinamik kehalusan gerak dan bahasa tangannya menyampaikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat kita di Spanyol, pilihan nomor kontestannya nanti.

Jawa Barat Sekali Lagi

Dalam jadwal Ketua Umum Golkar, tak kurang dari tiga kali Jawa Barat dikunjungi Ketua Umum dalam masa kampanye ini. Pertama, 5 April di Ciamis, Tasikmalaya Garut. Kedua, Subang dan Pamanukan empat hari sesudahnya. Dan 14 April, Rangkasbitung dan Pandeglang. Termasuk intensif dibanding dengan ibukota yang hampir setiap putaran kampanyenya untuk Golkar dihadiri oleh Ketua Umum. Sementara propinsi lain rata-rata hanya sekali bahkan tidak sempat dikunjungi di masa kampanye ini.

Dalam kunjungan pertama, di Ciamis-Tasikmalaya-Garut, Ketua Umum Golkar seakan melakukan sapu bersih. Akumulatif hampir dua ratus ribu massa menghadiri kampanye di ketiga tempat itu. Dijumlahkan dengan Subang-Pamanukan dan Rangkasbitung-Pandeglang angka itu mencapai tiga ratus ribu lebih. Tapi ini tak mengherankan karena Jawa Barat merupakan salah satu wilayah kemenangan Golkar dalam tiga kali pemilihan umum sebelumnya.

Di Ciamis-Tasik-Garut, Ketua Umum Golkar ini menyinggung masalah SPP. Bila ada OPP lain menjanjikan SPP hapus, Golkar sebaliknya dengan tegas dengan sikap realistis menyatakan takkan memprakarsai pembebasan SPP. "Keadaan belum memungkinkan", kata Sudharmono, "kita masih harus mengerahkan daya dan dana untuk berbagai bidang pembangunan". Jika ada partai politik yang mendorong penghapusan SPP, Golkar tidak setuju. Golkar menolak yang muluk-muluk. "Golkar akan membangun sesuai dengan kemampuan. Kita jangan berkecil hati, tapi kita jangan berbicara dan menjanjikan diluar kemampuan, kita harus membangun secara realistik".

Sambutan massa ratusan ribu yang menggelora membuat kampanye awal Ketua Umum Golkar di Jawa Barat ini dapat dicatat sebagai suatu sukses.

Dalam perjalanan ke Jawa Barat, Ketua Umum yang didampingi Ny. EN Sudharmono, tak semata-mata melakukan kampanye politik, melainkan juga melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan. Di Ciamis, Sudharmono SH meresmikan Listrik Masuk Desa untuk 27 desa di 10 kecamatan. Dan di Tasikmalaya, selaku Mensesneg, Sudharmono menyerahkan bantuan Presiden sebesar Rp. 50 juta untuk pembangunan Gelanggang Remaja, Rp. 10 juta untuk pembangunan Mesjid Al Ikhlas Cipari dan masing-masing Rp. 8 dan 7 juta rupiah untuk Mesjid Sukasirna dan Mesjid Kawalu. Juga disampaikan SK pembangunan mesjid dari Ketua YAMP yang bernilai Rp. 103 juta.□-

(Rendy MS)

Digitized by Google

Tidak Mengejar 100%, Cukup 70% Saja

Sebelum masa kampanye dimulai, seakan tak kenal lelah, Ketua Umum Golkar melakukan rangkaian kunjungan kerja yang padat. 17 Maret misalnya, Ketua Umum ada di Sumatera Utara. Beberapa hari sebelumnya antara lain ke Bogor, Demak-Grobogan-Semarang di Jawa Tengah dan di Kalimantan Barat.

Di Medan dan di Bogor, Sudharmono SH tampil memberikan ceramah umum di kampus Universitas Sumatera Utara dan Universitas Pakuan. Sementara di tempat-tempat lainnya melakukan tatap muka dengan jajaran keluarga besar Golkar.

Di Demak usai mengikuti peresmian pemugaran Mesjid Agung Demak oleh Presiden Soeharto, Ketua Umum Golkar dan rombongan melakukan ziarah ke makam Sunan Kalijaga di Kadilangu. Memasuki pintu gerbang makam, massa Golkar mengelu-elukan kedatangan pimpinannya. Begitu pula sepanjang jalan Purwodadi-Grobogan generasi muda dan kader-kader Golkar lainnya tumpah ruah hingga ke halaman pendopo Kabupaten.

Grobogan bagi Ketua Umum adalah sebuah nostalgia, karena masa kecilnya selaku murid SMP dilalui di kota kecil yang kini dianggapnya "telah menjadi kota yang maju dan indah menyenangkan".

Adalah di Grobogan itu Sudharmono SH meresmikan Listrik Masuk Desa untuk 32 desa di Kabupaten Grobogan dan Demak. Sedang di Palagan Ambarawa, Sudharmono SH meresmikan Mesjid sumbangan YAMP. Mesjid itu diberi nama "Mesjid Agung Palagan Ambarawa" sesuai pesan almarhum Bupati/KDH Tk II Semarang yang meninggal dunia malam hari menjelang peresmian mesjid tersebut.

Sudharmono SH selalu meminta agar seluruh warga Golkar mencerminkan tekad pembangunan dan Orde Baru, ketika berbicara di Kabupaten Semarang maupun di Purwodadi Grobogan. Secara teratur setiap lima tahun Golkar menampilkan program-program pembangunannya. Karena itu, ujar Sudharmono, kepercayaan yang diberikan rakyat selama Orde Baru ini bukan karena Golkar pandai merayu. Rakyat sudah kritis, merayu saja tidaklah cukup. Apa yang diungkapkan kepada rakyat harus ada bukti dan selama ini Golkar memang mampu membuktikannya.

Kepercayaan Rakyat Karo

Di Kabanjahe Kabupaten Karo, Ketua Umum Golkar berpesan kepada ribuan massa Golkar yang memadati suatu lapangan terbuka, agar bekerja lebih keras untuk mensukseskan pembangunan dan juga mengsukseskan Pemilihan Umum 1987. Apabila berhasil dalam dua hal itu, kata Ketua Umum, maka Kabupaten Karo yang penduduknya 250.000 ini akan lebih

semarak lagi.

Hari itu, 30 desa di Karo menikmati listrik melalui LMD yang diresmikan Sudharmono SH. Mensesneg yang juga adalah Ketua Umum Golkar ini menyebutkan bahwa masih banyak proyek pembangunan yang telah sedang atau dalam rencana untuk masyarakat Karo. Perjuangan kita, memang adalah perjuangan pembangunan. Mengsukseskan pembangunan memang merupakan cita-cita Golkar. Golkar bertekad memperjuangkan apa yang diinginkan rakyat. Golkar menyadari tak ada artinya apabila tidak memperoleh kepercayaan rakyat.

Disamping meresmikan Listrik Masuk Desa, Sudharmono SH menyampaikan pula sumbangan untuk 6 gereja masing-masing sebesar Rp. 2,5 juta.

100% Dan Demokrasi

Suatu sektor pembangunan lainnya, menjadi bahan diskusi menarik dalam suatu acara lainnya di Medan, yaitu pembangunan bidang politik.

Sudharmono SH tampil memberikan suatu kuliah umum dan terlibat dalam tanya jawab menarik dengan mahasiswa 16 perguruan tinggi di Sumatera Utara di gelanggang mahasiswa USU. Tak kurang dari 6000 mahasiswa menghadiri ceramah dan diskusi yang di-moderator-i oleh Rektor USU Prof Dr M. Yusuf Hanafiah.

Seorang penanya, Ohia Ohalawa, yang mengaku belum lama diwisuda sebagai sarjana, dan juga mengaku seorang jurkam PDI, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan menghangatkan diskusi.

"Saudara jurkam PDI ya?", Sudharmono mengawali dengan bertanya dan disambut tawa meriah hadirin.

Sang jurkam bertanya: Apakah kalau Golkar menang 100%, itu merupakan kemenangan Orde Baru?

Menjawab pertanyaan itu, Sudharmono SH lebih dulu menformulasikan suatu pertanyaan baru: Bila salah satu peserta pemilihan umum meraih 100%, apakah itu merupakan kemenangan Orde Baru? Kalau yang menang tetap menjunjung demokrasi dan konstitusi, Orde Baru tetap menang. Pemilihan umum adalah salah satu sub sistim dari Demokrasi Pancasila yang ingin ditegakkan Orde Baru. Pemilihan Umum itu diselenggarakan dengan langsung-umum-bebas-rahasia yang diikuti tiga organisasi peserta sesuai undang-undang. Kalau salah satu peserta menang melalui pemilu yang demikian, demokrasi tetap ada. Itu hasilnya demokrasi, rakyat yang menghendaki. Rakyat yang mempunyai hak pilih telah menentukan suaranya dan kebetulan memilih salah satu peserta saja, sehingga hasilnya 100%. Demokrasi tetap jalan. Toh yang tidak dapat suara tetap exist, kendati tidak mendapat kursi DPR, tetap mendapat 5 kursi di MPR untuk memenuhi ide bahwa negara ini mengikutsertakan seluruh golongan. Persoalan bagi yang kalah, hanyalah bagaimana ia menjawab tantangan pada pemilihan umum berikutnya. Harus bekerja keras, memperbaiki keadaannya.

Akan halnya Golkar sendiri, Sudharmono SH menyatakan di forum tersebut bahwa pada hakekatnya Golkar tidak mengejar kemenangan 100%. "Golkar hanya ingin mempertahankan posisinya yang sekarang dan untuk itu Golkar mentargetkan meraih suara 70%. Apakah itu berhasil, tergantung para kader. Saya sendiri, memang aktif karena ingin mengejar target itu. Tapi sebenarnya itu tidak gampang". Bahwa itu tidak gampang, "Lihat saja di USU, ada kader PDI".

Pertanyaan serupa tentang kemenangan 100% juga muncul di Universitas Pakuan Bogor. Seorang mahasiswi, Rika Lestari, kuatir kemenangan mutlak akan memacetkan demokrasi. Sudharmono pun menggambarkan disini bahwa mencapai target 70% pun bukanlah mudah. Kader-kader Golkar harus kerja keras. Kalaupun seandainya kerja keras itu menghasilkan angka 100%, karena rakyat simpati terhadap Golkar, bagaimana melarangnya? "Kalau kita larang, malah tidak demokratis". Tapi apakah pengandaian 100% itu mungkin, yah, kita tunggu hasil 23 April saja.

Kepada para mahasiswa di Pakuan, Ketua Umum Golkar menceritakan sedikit betapa di dalam dirinya Golkar betul-betul menterapkan cara-cara yang demokratis. Terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi. "Makin dewasa kita ber-Pancasila, maka kita akan makin mengutamakan kepentingan yang lebih besar".

Di Pakuan, Mensesneg meresmikan penggunaan Laboratorium Bahasa, dan sejumlah ruang baru untuk kuliah dan dosen.☐

Subandrio/Rendy/RA

Digitized by Google

Masuk Golkar Menjadi Kebanggaan

Pancasila, setelah diterima menjadi satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik oleh ke-3 kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan, bukan lagi menjadi suatu berita yang besar, bila ada warga yang dahulunya mendukung salah satu kontestan kini mendukung kontestan lain. Dan yang masih banyak menjadi perhatian apabila pindahnya seorang kemudian diikuti dengan para pengikutnya.

H. Sulaimanah, warga Tanjung Priok, merupakan suatu contoh dari peristiwa itu. Dia yang pada tahun-tahun sebelumnya adalah pendukung fanatik dari salah satu kontestan, kini kontestan yang pernah didukungnya itu ditanggalnya. Dan Selasa 7 April lalu, Sulaimanah, yang bertubuh kecil itu tampak didalam kerumunan masa yang menyemut di lapangan Dewa Kembar Tanjung Priok, ketika Ketua Umum Sudharmono mengadakan kampanye putaran ke-3 di daerah tersebut.

Dia tampak antusias, dengan meneriakkan yel-yel Hidup Golkar, ketika Ketua Umum Sudharmono memberikan kampanye. Ketika ditemui Media Karya, seusai kampanye, Sulaimanah yang lebih akrab dipanggil Pak Haji, itu mengatakan, "saya masuk Golkar karena kesadaran".

Diakui, dalam kampanye tahun-tahun sebelumnya, Pak Haji ini sangat getol dan fanatik bila kontestan pilihannya mengadakan kampanye. Bahkan dia termasuk orang yang gigih mengumpulkan massa untuk suksesnya kampanye kontestan itu.

Pak Haji yang dianggap sebagai panutan di kampungnya itu, kini meletakkan bajunya yang lama dan mengibarkan diri untuk menjadi anggauta Golkar. "Ketika saya menyatakan diri masuk menjadi anggauta Golkar di dalam suatu pertemuan kampung, masyarakat banyak yang tidak percaya. Bahkan ucapan saya ini dianggap sebagai lelucon. Namun ketika saya tegaskan bahwa saya masuk Golkar ini tidak main-main, saya masuk Golkar ini seratus persen. Maka setelah saya tegaskan pernyataan tersebut, warga mulai terperangah dan percaya".

Dan lain lagi dengan Syamsugara, salah seorang pemuda, juga warga Tanjung Priok itu, "Saya masuk Golkar setelah membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)-nya," ujar Samsu, yang dahulunya juga salah satu pendukung kontestan tertentu, dan ikut juga menggerakan massa waktu kontestan tersebut mengadakan kampanye.

Seperti dikatakan oleh Sulaimanah, bahwa keberadaannya dalam memperkuat jajaran barisan Golongan Karya, dikarenakan kesadaran. Selain itu, pembangunan

yang dilakukan oleh Golkar itu, dirasakan tidak hanya untuk kepentingan Golkar, tapi untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

"Dan bukan itu saja, sekarang yang masuk Golongan Karya itu bukan saya saja, tapi anak dan istri saya juga masuk Golkar;" tegasnya.

Dulu, katanya, kalau ada orang yang menyatakan masuk dalam jajaran Golkar masih timbul rasa malu dan was-was. Tapi sekarang ini, masuk Golkar itu sudah menjadi kebanggaan, ujar Syamsu, yang Betawi asli itu menimpali.

Dan baik Sulaimanah maupun Syamsu, dalam kampanye di lapangan Dewa Kembar, Cilincing, Tanjung Priok itu tampak ikut larut dalam gemuruh massa. Dan tidak hanya itu saja, dalam kampanye yang diselenggarakan, Selasa 7 April lalu yang berbarengan hujan yang deras, mereka ini tidak datang sendirian, tapi datang disertai dengan massanya. Yaitu dengan 5 buah kendaraan Colt yang sarat dengan pengikutnya.☐ BM

INOTEK

THE MOST RELIABLE COMPANY
IN THE OIL AND GAS INDUSTRY SERVICES

- Engineering Design & Drafting
- Field Survey, Topography & Polygon
- Radiographic Inspection
- Ultrasonic Test
- Magnetic Particle Test
- Eddy Current Test
- Pipeline Inspection
- Tank Calibration Inspection
- Hydrostatic Test
- Boiler & Vessel Inspection
- Maintenance (General Overhaul)
- Corrosion Engineering
- Environmental Study & Services
- Computer Services (IBM CMAP)
- Contract Personnel Services Expatriates & Indonesian

PT INOVASI TEKNIK

IRTI BUILDING LT. 4 KM. 401 KOMP. TAMAN RIA MONAS
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN JAKARTA-10110
TELP. 346630, 347485 TLX. 46197 IRTI IA

Digitized by Google

Koperasi Dapat Menjembatani Kesenjangan Di Bidang Ekonomi

Enam bulan lalu, Menteri Koperasi Bustanil Arifin, menggelindingkan 100 buah taksi "Kosti Jaya" dari Departemen Koperasi. Kemudian Rabu siang 1 April lalu, giliran ketua Umum Golongan Karya, Sudharmono SH, yang juga Menteri Sekretaris Negara, melepas lagi 60 buah taksi dari jenis yang sama.

Pelepasan 60 buah mobil taksi secara simbolis oleh ketua Umum itu merupakan pengembangan dari Kosti Jaya untuk memperluas jaringan operasinya. Kini dengan dioperasikan kendaraan pada tahap kedua, Kosti Jaya telah memiliki 160 armada. Sedangkan pada tahap pertama, 6 bulan lalu baru dioperasikan 100 kendaraan. Berarti 540 lagi yang harus menunggu giliran berikutnya.

Dengan dilepaskannya 60 taksi dari Kosti Jaya ini, belum berarti kebutuhan untuk pertaksian di Jakarta dapat dipenuhi. Dari jumlah 8.350 buah mobil taksi yang beroperasi di Jakarta digunakan untuk melayani 7,5 juta penduduk di Jakarta. Menurut Gubernur DKI Soeprapto, dari jumlah taksi yang ada itu 75 persen dalam keadaan kurang baik dan perlu peremajaan.

Setoran Lebih Tinggi

Sementara itu Ketua I Kosti Jaya Datubara dalam laporannya kepada Ketua Umum mengatakan, bahwa keinginan untuk merealisasikan 700 kendaraan itu ada. Namun sampai saat ini masih terbentur dengan masalah kredit. Diuraikan waktu peluncuran 100 taksi pada tahap pertama itu telah diberikan kemudahan kepada sopir taksi dari Kosti Jaya dalam pembelian mobil jenis sedan Stansa dan Ford Laser dengan mendapat keringanan separuh dari harga komersial. Dengan demikian setoran harian untuk para pengemudi juga menjadi relatif ringan.

Sedangkan dengan taksi yang dioperasikan pada tahap kedua ini lain. Setoran untuk para pengemudi lebih mahal dibandingkan dari taksi yang pertama. Dari taksi yang diresmikan oleh ketua Umum Sudharmono itu, para pengemudi harus dapat menyetor Rp 37.100 setiap hari. Karena taksi yang 1 April dioperasikan ini tidak mendapat bantuan dari Presiden, melainkan kerjasama dengan PT. Udatimex. Dimana perusahaan tersebut memberikan kredit 60 buah dengan masa kredit 5 tahun.

Sementara itu Ketua Umum Golongan Karya yang juga Menteri Sekretaris Negara, dalam memberikan sambutannya dihadapan para pengemudi dan pengurus kosti mengatakan, keberhasilan koperasi juga merupakan keberhasilan di bidang pembangunan nasional. "Untuk mencapai itu, Golongan Karya berjuang agar koprasi terus dikembangkan, di dalamnya termasuk koperasi taksi," ujar Ketua Umum.

Dan perhatian Golkar dalam ikut mengembangkan majunya koperasi itu ditandai pula dengan kehadiran Ketua Umum Golongan Karya pada peresmian pengembangan armada taksi. Dikatakan Ketua Umum, bahwa Golongan Karya menganggap koperasi itu merupakan tolok ukur dari pembangunan nasional. "Pembangunan jangka panjang itu dapat sukses apabila pengembangan dari koperasi makin lama tampak lebih menonjol dan dapat berperan," ujar Ketua Umum.

Keberhasilkan Koperasi tidak ditentukan dari luar

Pengembangan Koperasi

Dalam kesempatan itu Ketua Umum mempertanyakan, kenapa koperasi perlu dikembangkan? Karena dalam Pancasila dan UUD'45, koperasi itu yang paling cocok dalam mengembang-tumbuhkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasayarakat.

Selain itu koperasi memperhatikan kepentingan bersama dan tidak menimbulkan kesenjangan, perbedaan tingkat kehidupan antara yang kaya dan yang miskin, dan koperasi itu dapat menjembatani kesenjangan, keadaan kedudukan perbedaan dalam bidang ekonomi.

Menyinggung tentang kesejahteraan rakyat, Ketua Umum mengatakan, untuk dapat mencapai itu, tidak mungkin dengan cara-cara ekstrim. "Untuk mencapai itu kita harus berpijak pada kenyataan," tegasnya.

Karena itu pembangunan adalah untuk meningkatkan yang kecil dan memanfaatkan yang besar guna untuk meningkatkan yang kecil. Maka dalam hal ini Golongan Karya sangat mendukung koperasi. Dan mengenai hal ini Golongan Karya sudah mempunyai konsepsi, bagaimana caranya mengembangkan koperasi tersebut.

Selain itu Golongan Karya, telah memberi perhatian terhadap tumbuh dan berkembangnya koperasi. Secara politis Golkar mendukung koperasi, tapi tidak harus dengan memanjakan koperasi.

Menurut Sudharmono, yang menentukan apakah koperasi itu berhasil atau tidak bukan ditentukan dari luar. Tapi ditentukan oleh para anggota dan pengurusnya. Sedangkan dari unsur lain itu sifatnya hanya memberikan dorongan, agar koperasi itu dapat maju.

Dalam kesempatan itu, segenap pengurus serta anggota meminta kesediaan Pak Dhar untuk dijadikan anggota kehormatan. Dan pak Dhar pun menerima, tapi dengan catatan, agar para pengemudi dan pengurus dapat menjaga nama baiknya. Setelah menjadi anggota kehormatan, Pak Dhar menerima baju serta topi Kosti Jaya. ☐ BM

Digitized by Google

Kampanye Pertama Ketua Umum Golkar Di Bumi Lampung

Pekikan 'Hidup Golkar' menggema menggelora di gedung olahraga Saburai dan lapangan kampus Metro Lampung. Massa penuh antusias menyambut kampanye pertama yang dilakukan Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH. Tak ada satu sudutpun tempat kampanye yang tidak terisi massa yang mulai menyemut siang hari.

Kesemuanya sudah dipersiapkan dengan rapih oleh penyelenggara. Misalnya saja dalam hal pemasangan bendera beringin di kanan-kiri jalan utama, juga persiapan penyambutan Ketua Umum Golkar diupayakan semeriah mungkin untuk menyemarakkan rangkaian kampanye ketua umum guna kemenangan Golkar dalam Pemilu 1987.

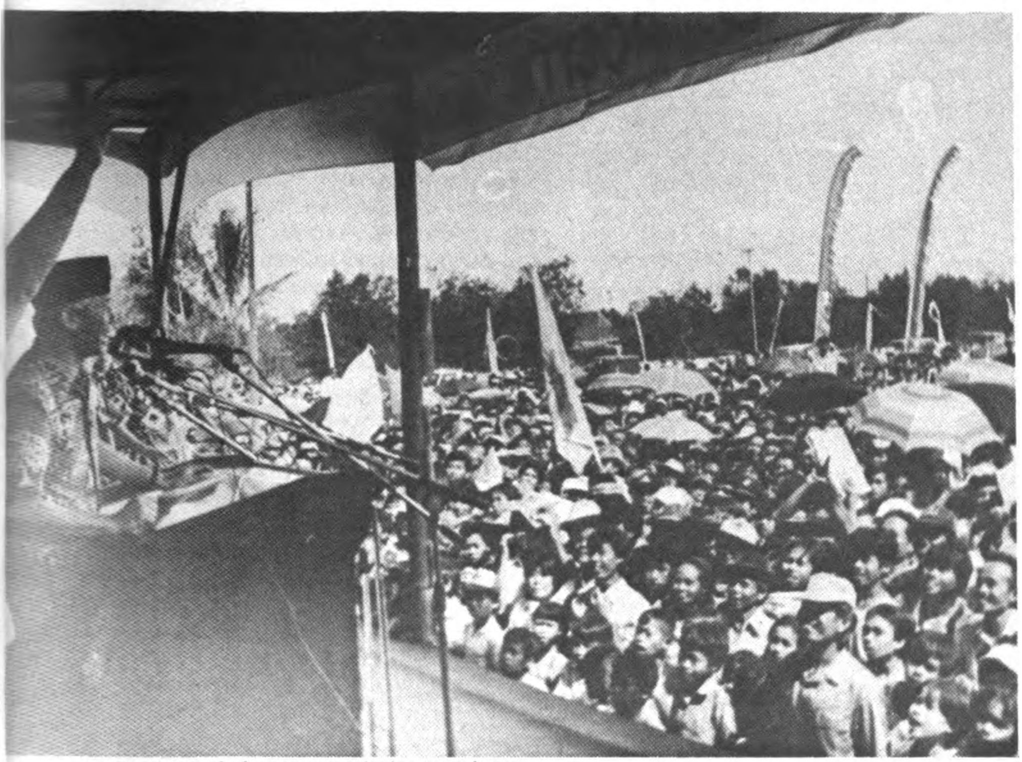
Pemilu itu bukan hanya sekedar hura-hura

"Mungkin Tuhan telah membimbing saya untuk melakukan kampanye pertama di daerah Lampung ini," ujar ketua umum yang disambut pekik hidup Golkar dari ribuan massa Golkar. Selama hampir 45 menit berbicara di depan massa di lapangan kampus Metro, dan setengah jam kemudian di gedung olahraga Saburai, Sudharmono menggugah semangat warga beringin untuk siap memenangkan pemilu 1987 bagi kemenangan Golkar.

Ketua Umum Golkar mengingatkan kembali arti penting pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali, dan janji Golkar kalau nanti berhasil meraih kemenangan. Mengenai Pemilu, ketua umum mempertegas bahwa pemilu merupakan pengejawantahan atau manifestasi dari penggunaan kedaulatan rakyat. Dan melalui pemilu, bisa diwujudkan demokrasi secara kongkrit. Apa itu demokrasi? Bahwa yang punya negara ini adalah rakyat, bukan orang lain. Dan bagaimana dapat mewujudkan kedaulatan rakyat itu, ya melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dimana setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena makna pemilihan umum, adalah pemilihan oleh rakyat, maka kewajiban kita semua untuk mensukseskannya.

Fungsi pemilu setiap lima tahun sekali itu bagaikan ujian bagi organisasi peserta pemilu yang dilakukan oleh rakyat, dimana rakyat akan menguji keadilan dan kejujuran. Selain itu rakyat akan menguji apakah kepercayaan yang diberikan dalam pemilu sebelumnya telah digunakan sebaik-baiknya oleh OPP. Begitu pula apa program yang akan ditawarkan OPP bersangkutan dalam masa kampanye ini.

Oleh karena itu, kata Sudharmono, para peserta pemilu harus mempersiapkan diri, menunjukkan prestasi sebaik-baiknya termasuk program yang ditawarkan. "Inilah yang dibutuhkan rakyat, pemilu bukan hanya sekedar hura-hura dan bukan pula sekedar formalitas. Pemilu merupakan pengejawantahan daripada pelaksanaan demokrasi dan merupakan ujian terhadap wakil-wakil rakyat yang terpercaya," ujarnya.

Siapa yang ingin mendapatkan kepercayaan itu, lanjut Ketua Umum Golkar, harus bekerja keras serta dapat menunjukkan prestasi serta dapat menawarkan program ke depan sesuai dengan prinsip perjuangan Golkar yaitu kerja keras, menunjukkan prestasi dan menawarkan program ke depan.

Janji Golkar

Kepada massa pendukung Golkar, ketua umum mengedepankan pula bahwa kalau nanti Golkar meraih kemenangan, Golkar hanya dapat menjanjikan untuk jadi pelopor kerja keras, pelopor untuk meningkatkan produktivitas, dan pelopor dalam kesetikawanan. "Diharapkan dengan kepeloporan ini, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan utuh," tegasnya.

Selain itu, Ketua Umum Golkar dalam nada yang lantang menegaskan sekali lagi bahwa Golongan Karya tidak mengklaim bahwa pembangunan itu adalah hasil dari Golkar. Pembangunan yang berhasil ini bukan semata-mata hasil Golkar, tapi merupakan hasil kerja keras seluruh rakyat. Dari pembangunan yang sudah dicapai itu, Golkar mengharapkan rakyatlah yang menikmati.

Dengan nada penuh kejujuran, Sudharmono SH mengakui dalam pelaksanaan pembangunan banyak kendala yang ditemui. Begitu pula masih adanya kekurangan yang harus tetap diusahakan secepatnya dicapai, misalnya masih adanya kesulitan orang mencari pekerjaan, sulitnya di bidang pendidikan, sulitnya mendapatkan perumahan, yang kesemuanya itu merupakan tantangan yang harus dijawab dan di atasi bersama-sama. Untuk itu, lanjut ketua umum, kita harus melanjutkan pembangunan, meningkatkan gerak pembangunan dan momentum pembangunan, sekaligus memelihara apa-apa yang sudah ada.

Golkar dalam program pembangunan lebih menitikberatkan kepada segi pemerataan. Dengan adanya pemerataan, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin kecil.

Perhatian Golkar lainnya, pembangunan manusia seutuhnya, dan untuk dapat tercapainya usaha itu, pendidikan mendapat perhatian, termasuk perhatian kepada pendidikan agama. Selain itu tidak luput dari perhatian Golkar adalah pembangunan terhadap aparat bangsa akan semakin meningkatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. □ BM

Digitized by Google

Golkar Tidak Dapat Dipisahkan Dari Ulama

Mengenakan kopiah hitam serta stelan baju safari warna abu-abu dan di dada sebelah kanan tertera gambar pohon beringin, Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono, Senin malam dua pekan lalu menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di mesjid Al Mubarok, Cipulir, Jakarta Selatan.

Al Mubarok, sebuah masjid yang letaknya di tengah-tengah perumahan penduduk, tidak mampu lagi menampung jumlah jamaah yang hadir dan ikut memperingati Isra dan Mi'raj nabi Muhammad SAW. Di samping dihadiri Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono, juga mengetengahkan penceramah yaitu Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Tohir Wijaya. Sehingga masjid yang tidak begitu besar itu, seolah larut oleh kerumunan manusia. Dan terpaksa bagi para jamaah yang belakangan datangnya, harus puas mendengarkan isi ceramah ataupun sambutan ketua Umum dari luar masjid.

Bukan Tempat Kampanye

Sudharmono, yang lebih akrab dipanggil dengan Pak Dhar malam itu dengan menggunakan Sorban yang dikalungkan di leher pada awal sambutannya menegaskan bahwa Golongan Karya tidak menggunakan masjid dalam berkampanye. Selain itu, Ketua Umum menegaskan bahwa Golongan Karya dalam berkampanye tidak menggunakan agama.

Kedatangan Ketua Umum ke masjid Al Mubarok itu atas undangan dari Satkar, suatu organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari para ulama dimana organisasi ini

menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya.

Selain itu Ketua Umum yang dalam sambutannya mengaku tidak ahli dalam bidang agama ini mengharapkan agar umat Islam tidak lagi mempersoalkan tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidrotil Muntahar, dengan menggunakan kendaraan Bouraq. Kendaraan ini sering salah dilukiskan oleh sebagian dari masyarakat yaitu sebuah kendaraan yang berbadan kuda dan berkepala wanita cantik.

Perjalanan Nabi dari Masjidil Harom ke Sidrotil Muntahar itu ditempuh dalam waktu semalam. Yaitu suatu jarak yang cukup jauh dan sulit untuk dijangkau dengan rasio. "Kita tidak usah mempersoalkan apakah itu mungkin atau tidak. Sebab Isra Mi'raj itu merupakan suatu Mukjijat dari Nabi Muhammad. "Dan kita sebagai seorang muslim yang baik tidak usah lagi mempersoalkan apakah itu mungkin atau tidak mungkin. Karena semua itu adalah kehendak dari Allah," ujar Ketua Umum.

Yang penting lanjutnya, setiap kali peringatan keagamaan diadakan apakah itu Isra dan Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Maulud Nabi dan yang lain, hendaknya diambil hikmahnya.

"Dalam memperingati Isra Mi'raj kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, kita harus memperdalam keimanan kita, yaitu melaksanakan kewajiban shalat 5 waktu dalam sehari semalam, atau 17 rakaat dalam waktu yang sama," tambahnya.

Peranan Ulama

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum juga menyinggung mengenai ulama. Dilukiskan, bahwa ulama itu mempunyai peranan sama penting dengan tokoh-tokoh di bidang lain. Bahkan, kata Pak Dhar, yang sekarang ini banyak akrab dengan para ulama, Golongan Karya tidak dapat dipisahkan dari para ulama.

Dikisahkan, sejak berdirinya Golongan Karya, yang sudah tiga kali mendapat kepercayaan dari rakyat dalam Pemilihan Umum tidak terlepas dari ulama. Sebab dalam tubuh Golongan Karya itu juga terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan di antaranya dari para ulama. Misalnya Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam, Persatuan Tarikat Islam, Lemkari, Al Hidayah serta yang lainnya. "Dan semua itu adalah organisasi kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat para ulama," ujar Pak Dhar.

Dikatakan lebih lanjut, terjalinnya hubungan yang sangat akrab antara Ulama dan Umara serta Golongan Karya itu didasarkan atas saling pengertian. Misalnya pengertian tentang Pancasila yang sudah diakui sebagai satu-satunya asas dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu saling pengertian ini juga didasarkan pada tidak adanya saling kecemburuan antara agama dan Pancasila.

Sehingga, kata Pak Dhar, dengan diterimanya Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara itu, telah dapat menjamin setiap warga negara untuk dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan sebaik-baiknya bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, kehidupan dari bangsa Indonesia ini dapat tenang dan damai.☐

BM

Setiap perayaan keagamaan hendaknya diambil hikmahnya

Digitized by Google

Selalu Waspada Terhadap Bahaya Yang Ancam Pancasila

Kemenangan Golkar ditentukan oleh kerja keras dan kehendak rakyat

Gedung Olah Raga (GOR) Pontianak, Kalimantan Barat, Medio Maret lalu penuh sesak kader Golkar. Suara pekik "Hidup Golkar" menggema di ruangan gedung ketika Ketua Umum Golongan Karya, Sudharmono SH, memasuki ruangan.

Gedung megah yang berkapasitas lima ribu orang tidak mampu lagi menampung arus kader Golkar yang datang untuk memperingati lahirnya "Supersemar". Bagi para kader Golkar yang datang ke gedung sedikit agak terlambat, maka harus puas mengikuti jalannya upacara melalui saluran TV yang ditempatkan diluar gedung.

Suara pekik Hidup Golkar terdengar pula di kampus Universitas Panca Bhakti dan di Kabupaten Ketapang, saat Ketua Umum mengunjungi daerah itu untuk bersilaturahmi, mengadakan tatap muka, untuk mempererat tali persaudaraan antara Ketua dan para kader.

Keberadaan Ketua Umum di Kalimantan Barat selama dua hari pertama atas undangan DPD tingkat I untuk memperingati hari yang bersejarah, yaitu lahirnya Surat Perintah 11 Maret. Kedua memenuhi undangan Universitas Panca Bhakti untuk memberikan ceramah mengenai "Pemilu sebagai mekanisme Demokrasi Pancasila". Sekaligus mengadakan tatap muka dan meresmikan listrik masuk desa di Kabupaten Ketapang.

Selama kunjungannya di Kalimantan Barat di hari-hari sebelum masa kampanye, Ketua Umum didampingi oleh Ketua Dewan Penasehat Golongan Karya tingkat I H. Soedjiman, Ketua DPD I, sejumlah fungsionaris Golkar dan Ny. EN. Sudharmono.

Selain itu kunjungan kerja yang padat acara ini digunakan pula oleh Ketua Umum untuk melihat dari dekat perkembangan pembangunan yang ada di Kalimantan Barat dan juga untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah tersebut dalam menghadapi Pemilu 1987.

Dihadapan kader-kader Golkar Ketapang, yang memadati gedung bioskop serta pejabat Golkar setempat, Ketua Umum memberikan petunjuk bagaimana supaya Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1987 dapat sukses dan menang secara terhormat.

Untuk dapat mencapai itu, Ketua Umum mengajak kepada seluruh jajaran keluarga besar Golongan Karya, dalam Pemilu 1987 ini menyiapkan diri sedini mungkin. Artinya, kata Ketua Umum, Golkar menyiapkan pendaftaran keanggotaan, mengadakan kaderisasi, mengadakan penggalangan untuk mengisi setiap kelembagaan Pemilu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping itu, Golongan Karya dalam Pemilu 1987 harus mampu melaksanakan tugas Pemilu dengan sebaik-baiknya — yaitu Pemilihan Umum yang Bebas, umum, langsung dan rahasia (Luber). "Bila petunjuk ini dapat dilaksanaan dengan baik, maka kemenangan Golkar yang terhormat dapat terlaksana", ujar Ketua Umum.

Dihadapan para kader Golkar yang memadati gedung bioskop di Kabupaten Ketapang, Ketua Umum juga menyinggung tentang target Golongan Karya dalam Pemilu 1987. Dikatakan bahwa dalam Pemilu 1987, Golongan Karya tidak mengkaitkan target dengan keadaan peserta Pemilu yang lain (PPP, PDI) dalam perolehan suara. "Apakah dalam perolehan suara (PPP, PDI) naik atau turun itu bukan urusan kita, itu adalah urusan mereka sendiri. Sedangkan dalam perolehan suara dalam pemilu itu ditentukan oleh rakyat", tegas Ketua Umum.

Untuk itu, kata Ketua Umum, apakah sasaran Golongan Karya dalam Pemilu 1987 untuk mencapai 70 persen tercapai atau tidak tergantung dari usaha kita sendiri. Supaya sasaran yang dicanangkan itu dapat tercapai, maka Golongan Karya harus bekerja lebih keras lagi.

Tidak Dapat Dipisahkan

Pada bagian lain saat mengawali kunjungan kerjanya di daerah Kalimantan Barat, untuk memperingati hari lahirnya Supersemar, Ketua Umum menegaskan,

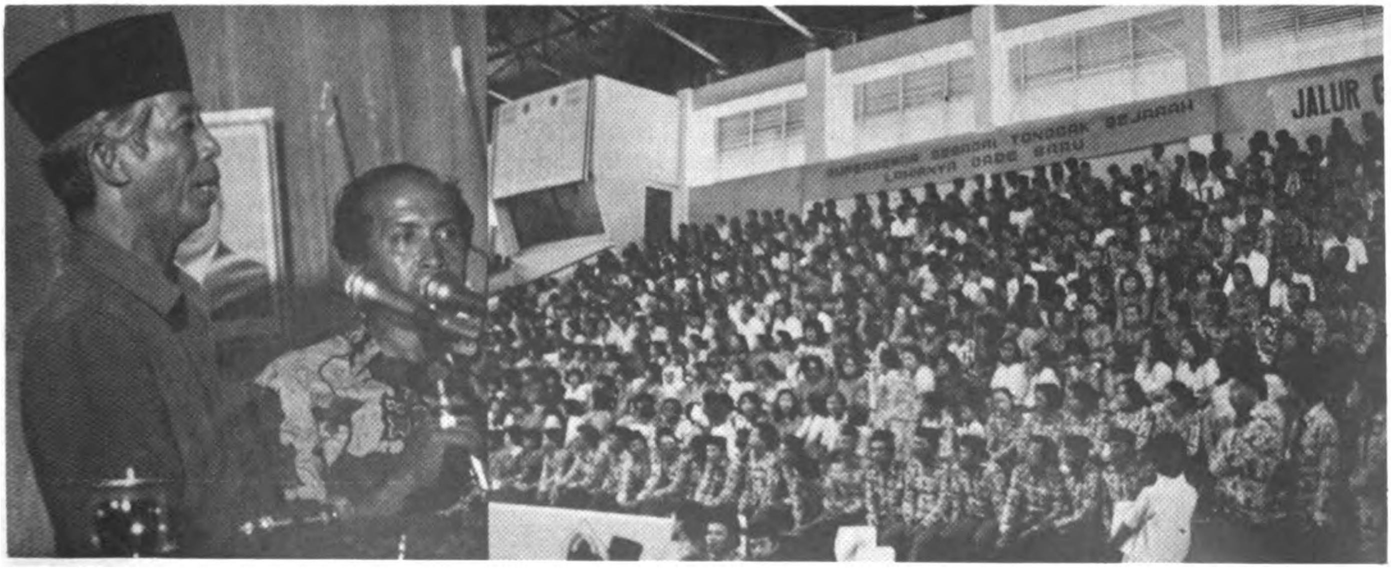

Sudharmono dialog dengan kader

Digitized by Google

Golkar dan Super Semar tidak dapat dipisahkan

bahwa Golongan Karya dan Supersemar itu tidak dapat dipisahkan.

Hal ini akan tampak terlihat dengan jelas, apabila bunyi dari ikrar Panca Bhakti kita renungkan, ujar Ketua Umum.

Supersemar adalah surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jendral Soeharto — waktu itu masih sebagai Menpangad. Kemudian Soeharto atas nama Presiden telah mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan, kestabilan jalannya pemerintahan serta menjamin keselamatan pribadi Presiden serta kewibawaannya.

Dan Surat Perintah 11 Maret itu, oleh pengembannya telah dilakukan sesuai dengan harapan rakyat, yaitu dengan membubarkan PKI dengan segala ormas-ormasnya. Karena dengan jelas dan nyata bahwa PKI telah berjuang untuk merobah Pancasila dan mengganti dengan idiologi Komunis.

"Bukan berarti hubungan antara Golkar dan Supersemar yang tidak dapat dipisahkan ini, kemudian Golkar yang membuat SP 11 Maret. Tidak. Hubungan yang erat antara SP 11 Maret dengan Golkar, karena pelaksanaan SP 11 Maret itu yang menyatu dengan Golkar", ujar Ketua Umum.

Kemudian Ketua Umum menggambarkan, bagaimana Golkar itu ada dan kenapa lahir 20 Oktober 1964. Dikatakan, bahwa Golkar itu lahir karena melihat Pancasila dalam keadaan bahaya. Dan Golkar berkeinginan untuk menyelamatkan Pancasila serta berkeinginan untuk mengamalkan Pancasila itu dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan Surat perintah 11 Maret itu lahir juga ada kaitannya yang erat dalam mengamankan Pancasila. Dan sejarah juga telah membuktikan, setelah 1 tahun Golongan Karya lahir PKI telah mengkhianati negara dan bangsa, yaitu dengan melakukan Gerakan 30 September, yang juga lebih dikenal dengan "G 30 S PKI"

"Sukur Alhamdulilah, bahwa Tuhan masih melindungi bangsa Indonesia untuk menggagalkan G 30 S PKI. Sehingga kekuatan Pancasila yang digunakan untuk menggagalkan pemberontakan G 30 S PKI, yaitu antara rakyat dan Abri, bersama-sama dapat menggagalkan gerakan tersebut. Dan setelah itu rakyat menghendaki agar PKI dibubarkan", ujar Ketua Umum.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pembubaran PKI beserta para mantel organisasi itu tidak datang dengan sendirinya. Hanya dengan lahirnya SP 11 Maret, maka tuntutan rakyat untuk bisa membubarkan PKI, melalui pengembannya dapat dilaksanakan.

"Lahirnya Supersemar itu perlu kita kenang. Karena Golkar itu lahir untuk Pancasila. Maka dengan lahirnya 11 Maret Golkar siap sedia untuk mengamalkan, mempertahankan Pancasila dengan segala resiko sampai kapanpun" tegas Ketua Umum.

Dengan demikian hubungan antara Supersemar dan Golkar sudah jelas, yaitu untuk mengamalkan Pancasila. Dan hubungan Golkar dengan SP 11 Maret ini akan terus berlanjut. Di dalam Pancasila terkandung maksud yang luhur, yaitu untuk terciptanya rasa persatuan dan kesatuan, serta untuk mencapai kemajuan lahir dan bathin. Untuk mencapai hal itu, maka Golkar harus membangun.

Maka dengan lahirnya SP 11 Maret, berarti kita membangkitkan tekad kembali. Maka setiap kita memperingati lahirnya SP 11 Maret, kita harus selalu waspada terhadap bahaya yang mengancam Pancasila. Dan juga Golkar bertekad untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk membangun bangsa Indonesia. □ BM.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Percetakan Negara No. 42 Kotak Pos 375. Telp. 22173 — 22372 — 22672

TELEX 76196 "BEPEDE" IA Jayapura.

"DENGAN SEMANGAT JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA, SEGENAP WARGA/KELUARGA BESAR BANK PEMBANGUNAN DAERAH IRIAN JAYA SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL"

Jayapura, 14 Maret 1987

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
IRIAN JAYA

DIREKSI

Digitized by Google

Sudharmono: Jangan Terbius Janji Kosong

Golkar membangun secara realistis dan jujur

Golongan Karya dalam putaran terakhir masa kampanyenya di tiga kota, masing-masing Rangkas Bitung, Pandeglang dan Serang (Jabar) tampil meyakinkan. Warga dan simpatisan Beringin Golkar pada tanggal 14 April lalu memberikan sambutan yang hangat terhadap kampanye yang dilancarkan ketua umum DPP Golkar Sudharmono yang tidak pernah ketinggalan selalu disertai nyonya EN Sudharmono.

Sekurang-kurangnya 150 ribu massa Golkar memadati alun-alun Serang. Ini merupakan peningkatan dari kampanye yang pertama di kota yang sama yang saat itu hanya mencapai 100 ribu warga Golkar. Fungsionaris Golkar lainnya, seperti Sri Redjeki, Basyuni Suriamihardja, Effendi Yusuf, Tatto Pradjamanggala, serta seniman-seniman Golkar yang dikoordinir Eddy Sud membaur dengan massa yang menyemut sejak siang hari.

Alun-alun yang digunakan untuk kampanye serasa tidak mampu menampung massa dan simpatisan Golkar. Dan alun-alun yang tempatnya bersebelahan dengan alun-alun utama sarat dengan massa Golkar. Tidak itu saja, hampir disepanjang jalan kota juga penuh dengan kerumunan massa.

Di Pandeglang juga demikian. Namun kabupaten yang disinggahi Ketua Umum kurang menguntungkan. Pasalnya, ketika Ketua Umum yang datang bersama rombongan dari Rangkas Bitung disambut hujan cukup deras. Namun guyuran hujan itu tidak membuat kendor niat para kader mendatangi alun-alun yang sudah tergenang air. Diperkirakan massa yang hadir mencapai 20 ribu orang.

Rangkas Bitung, sebagai tempat awal kampanye di tiga kota 14 April lalu tidak kalah meriahnya. Saat Ketua Umum dan rombongan datang dari Jakarta menggunakan Kereta Api disambut massa dengan meriah setibanya di stasiun daerah tersebut. Kemudian dengan menyambung kendaraan darat, Ketua Umum langsung menuju alun-alun, dimana puluhan ribu massa telah menunggunya. Di tengah teriknya matahari, saat Ketua Umum berada di tengah-tengah mereka, yel-yel hidup Golkar dan Hidup Sudharmono menggema di seantero lapangan. Dan suara yel-yel itu semakin lantang saat Ketua Umum memanggil orang paling dekat, yaitu nyonya EN Sudharmono untuk tampil di depan massa pendukung Golkar. Dengan menggunakan dialek Sundanya, nyonya EN Sudharmono mengajak massa Golkar ikut mensukseskan Pemilu 1987 dan menusuk tanda gambar beringin pada tanggal 23 April.

Dialog

Seperti biasa dalam setiap kampanye atau mengadakan konsolidasi dengan kader-kader Golkar Ketua Umum Golkar selalu mengadakan dialog. Di Serang, acara temu dialog itu juga dilakukan oleh Ketua Umum. Setelah Ketua Umum mengadakan penjelasan, dipanggil seorang ibu dari dua anak yang ikut berdesak-desakan diantara ribuan massa untuk naik ke panggung. Ditanyakan, kenapa Ibu ini memilih Golkar? dengan nada yang sedikit agak gugup, Ibu itu menjawab, karena Golkar membangun.

Dan dipanggil lagi seorang wanita. Ketika ditanyakan kenapa memilih Golkar, dengan agak malu-malu, Ibu itu menjawab karena Golkar membangun. Kemudian satu lagi dipanggil untuk naik ke panggung. Yang satu ini, adalah seorang pemuda yang belum bekerja dan tamatan SMP tahun 1981. Ketika ditanya Ketua Umum, kenapa memilih Golkar? dengan tenang anak ini menjawab karena ingin ikut membangun dan ingin maju.

Pertanyaan berikutnya juga dilontarkan, kalau saat ini menganggur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagaimana?, ikut orang tua. Lebih lanjut dikatakan bahwa usaha untuk mencari pekerjaan sudah dilakukan, yaitu melamar di sebuah pabrik, tapi sampai saat ini belum ada panggilan, katanya.

Mengenai kesempatan kerja. Ketua Umum dihadapan massa Golkar ini tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Dikatakan kalau Golkar menang dalam Pemilu 1987, lapangan kerja itu tidak datang dengan sendirinya. Dan lapangan kerja itu harus kita ciptakan. Untuk itu, kata Ketua Umum, dalam menciptakan lapangan kerja, diharapkan dari kalangan generasi muda untuk dapat meningkatkan keahliannya.

"Kita sadari hingga saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan pekerjaan, perumahan yang layak. Itulah tantangan perjuangan yang harus dijawab. Dan untuk itu tidak ada pilihan lain bahwa pembangunan itu harus dilanjutkan", ujar Ketua Umum.

Lebih lanjut dikatakan, dalam pembangunan yang dilakukan mulai dari Repelita

Digitized by Google

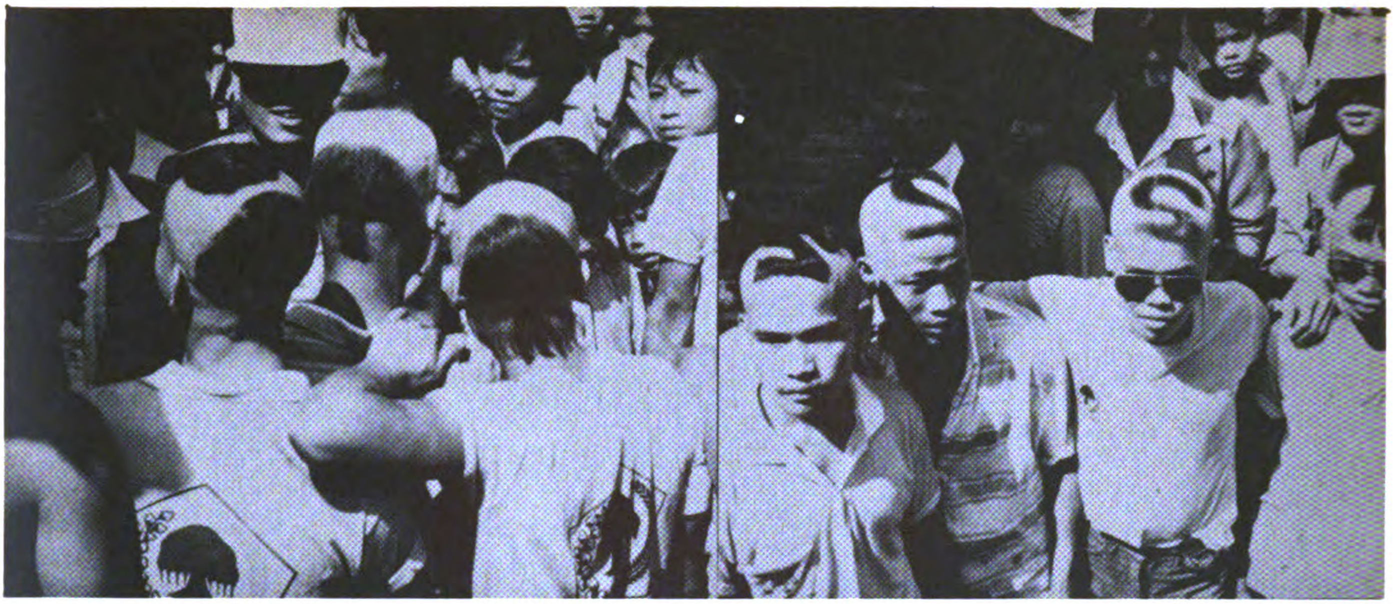

Lapangan kerja tidak datang dengan sendirinya

I sampai IV, kemajuan pembangunan itu telah terbukti. Kendati kemajuan telah dicapai, Golkar masih belum puas. Sebab, bangsa Indonesia masih ketinggalan dengan negara-negara maju.

Untuk mencapai tingkat kemajuan seperti di negara-negara maju, maka roda-roda perekonomian, pendidikan dan pembangunan dengan teknologi tinggi, harus dipacu. Sehingga upaya yang dilakukan ini dapat digunakan untuk membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Baik kemajuan lahir maupun bathin, yang nantinya digunakan sebagai bekal di akhirat.

''Ketahuilah, hanya dengan Golongan Karya pembangunan di bidang agama, khususnya bidang spiritual pada umumnya memperoleh prioritas yang tinggi'', ujar Ketua Umum.

Mengenai hari pemungutan suara yang jatuh tanggal 23 April, Ketua Umum mengingatkan kepada seluruh jajaran Golongan Karya untuk tidak terbius dengan janji-janji kosong serta himbauan yang tidak masuk akal. Untuk itu, Ketua Umum mengajak kepada massa supaya membangun bersama-sama dengan Golkar. Karena Golkar itu membangun secara realistis, jujur yaitu dengan cara kerja keras.

Resmikan Masjid

Di tengah-tengah kesibukannya dalam mengadakan kampanye, Ketua Umum Golkar Sudharmono, dalam perjalanan kampanyenya di tiga kabupaten di Jawa Barat, 14 April lalu atas nama Menteri Sekretaris Negara meresmikan sebuah Masjid bantuan dari Yayasan Amal Bhakti Pancasila di kelurahan Cigadung, kecamatan Cadasari.

Di tempat yang sama, Menteri Sekretaris Negara juga meresmikan listrik masuk desa yang meliputi sembilan desa dari delapan kecamatan. Selain itu juga di Kabupaten Serang, atas nama Ketua Umum DPP Golkar, Sudharmono meresmikan kantor DPD Golkar tingkat II, yang menelan biaya Rp. 130 juta.

Dalam kesempatan kunjungan kerja di daerah Jawa Barat, juga telah diserahkan bantuan dari Presiden sebesar Rp 32 juta. Bantuan sebesar itu Rp 17 juta untuk dua buah masjid dan Rp 15 juta untuk pembangunan madrasah. Dan sebuah TV untuk desa Cigadung dari Ketua Umum Golkar. ☐ BM

Digitized by Google

NU Dan Keluarga Haji Di Subang Dukung Golkar

Golongan Karya, salah satu dari tiga organisasi kekuatan sosial politik terbesar dan juga sudah tiga kali mendapat kepercayaan dari rakyat, telah membubuhkan lembaran tambahan dalam agendanya tangal 9 April lalu. NU salah satu organisasi kemasyarakatan yang bernafaskan Islam dan sebagai pendukung utama salah satu partai politik pada Pemilu sebelumnya, telah menggeser arahnya untuk menjadi pendukung Golkar. Tidak seluruhnya warga NU mendukung Golkar. Namun kali ini dukungan datangnya dari NU Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Dukungan NU dalam memperkokoh jajaran tubuh Golkar untuk memenangkan Pemilu yang jatuh pada tanggal 23 April, tidak hanya datang dari Subang. Dua bulan lalu dukungan serupa juga datang dari para Ulama NU Sukabuni, Jawa Barat.

Dukungan dari Sukabumi maupun Subang dalam memenangkan Golkar dalam Pemilu 1987, sama momentumnya, yaitu saat Ketua Umum Golkar mengadakan kunjungan kerja di daerah, yang bertujuan untuk melihat kesiapan dan persiapan para kader Golkar di daerah dalam Pemilu 1987.

Di Kabupaten Subang, dukungan dari warga NU diberikan saat Ketua Umum Golkar meresmikan sebuah Masjid Jami' Al Muchlisin, yang dibangun di atas tanah seluas satu hektar dengan menelan biaya Rp 120 juta dan mampu menampung 1000 jamaah.

Penyampaian dukungan kepada Golongan Karya ini ditandatangai oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten daerah tingkat II Subang, Jawa Barat di antaranya Busthomi Jaelani (Ketua), M. Karsyim Ibnu Sanras, BA (Sekretaris), K. Mujahiddin Fatawai (Syuriyah), dan K. Emon Bratadiwijaya (Mustayar).

Busthomi, dalam pernyataannya yang disampaikan secara tertulis dihadapan Ketua Umum dan para kader Golkar yang memadati halaman Masjid itu mengatakan, pernyataan dalam mendukung Golkar dalam Pemilu 1987, didorong atas rasa tanggung jawab demi terciptanya rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Dukungan serupa juga datang dari keluarga besar Haji di daerah yang sama. Namun penyampaiannya tidak diberikan secara terbuka seperti halnya NU. Tapi dukungan yang diberikan para Haji disampaikan melalui poster besar dan mereka dengan berpakaian seragam Haji berdiri di belakang poster yang mereka bawa.

Lahir Bathin

Kalender acara Ketua Umum Golkar, Sudharmono, 9 April lalu adalah Subang, Jawa Barat. Selama 12 jam kunjungan kerjanya di daerah tersebut, 3 proyek diresmikan. Dari jumlah proyek itu, dua di antaranya adalah sarana tempat ibadah berupa masjid dan yang satu lagi adalah listrik masuk desa. Kemudian pada hari berikutnya, 10 April, Ketua Umum juga meresmikan satu lagi sarana ibadah, berupa Masjid, Al Kamal, di bilangan Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam kesempatan di Subang, Ketua Umum Golkar Sudharmono, mengemukakan bahwa, Golkar sebagai pendukung utama pemerintah Orde Baru di dalam melaksanakan pembangunanmengutamakan keseimbangan antara lahir dan bathin.

Selama masa pemerintahan Orde Baru, berbagai proyek juga telah diresmikan. Baik jalan raya, sarana pendidikan, sarana ibadah berupa Masjid, atau pondok-pondok pesantren dan yang lain-lain dilakukan secara simultan. "Di Indonesia pembangunan yang seimbang antara lahir dan bathin benar-benar dilaksanakan," ujar Ketua Umum.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang selaras itu, dua Masjid dan listrik masuk desa diresmikan dalam satu hari. Masing-masing Masjid Al Muchlisin di kecamatan Pamanukan dan Al Kamal di desa Cigadung, Subang. Dari perjalanan 12 jam di daerah Subang, Jawa Barat, Sudharmono, yang Ketua Umum Golkar dan juga Menteri Sekretaris Negara menyerahkan sejumlah bantuan untuk sarana ibadah maupun pendidikan, yang bernilai Rp. 46 juta. Jumlah sebesar itu didapatkan dari Bantuan Presiden yang disampaikan oleh Mensesneg Sudharmono masing-masing kepada madrasah dan aliyah sebesar Rp. 8 juta, pondok pesantren Miftahul Ulum di desa Kebon Nanas Rp 8 juta, Masjid Jami' Darussalam di desa Binong dan Rp 10 juta untuk PGRI.

Selain itu, atas nama Ketua Umum Golongan Karya, Sudharmono menyerahkan bantuan untuk penyelesaian kantor NU, Subang, Rp 5 juta, dan Rp 5 juta lagi untuk Masjid Al Muchlisin. Dan tidak ketinggalan Tantyo Sudharmono, pimpinan Asuransi Timur Jauh, menyumbang genteng yang diresmikan oleh Ketua umum.

Listrik Masuk Desa

Dalam mengakhiri kunjungan kerja di Subang, Jawa Barat, Ketua Umum meresmikan listrik masuk desa, yang meliputi 14 desa di kabupaten Subang. Sedangkan dana yang digunakan dalam pembangunan listrik masuk desa itu mencapai Rp 1,4 milyar.

Dengan demikian, jumlah desa yang sudah mendapat penerangan berupa listrik di daerah Subang, sudah bertambah lagi.

Digitized by Google

Golkar berusaha untuk melanjutkan pembangunan

Dalam tahun 1986/1987, yaitu selama 11 bulan, PLN dari distribusi Jawa Barat hanya dapat melistriki 384 desa, 759.271 pelanggan, atau telah mencapai 32,6 persen.

Namun dengan diresmikannya listrik masuk desa oleh Mensesneg Sudharmono, di desa Gambarsari, kecamatan Pagaden, 9 April lalu, listrik masuk desa di wilayah Jawa Barat, Subang khususnya, menjadi terus semakin meningkat. Kini daerah tersebut telah dapat melistriki 69,3 persen dari keseluruhan listrik di kabupaten tersebut.

Diakui oleh Mensesneg, bahwa pembangunan pelistrikan, belum seluruhnya selesai. Namun Golkar sebagai pendukung pemerintah Orde Baru, terus berusaha untuk melanjutkan pembangunan itu.

Dalam Repelita IV, yang sudah berjalan ini, pembangunan pelistrikan telah maju dengan pesat dan bahkan telah masuk ke desa-desa. Pembangunan listrik masuk desa selama Repelita IV jumlahnya hampir sama dengan Pelita I, II, dan III dengan waktu 15 tahun itu, ujar Mensesneg. Sudharmono.

Lebih lanjut dikatakan, pembangunan yang dilaksanakan berupa listrik masuk desa ini merupakan amanat dari rakyat. Dan pembangunan ini juga digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Meskipun, kata Sudharmono, pembangunan itu jalannya sudah dipercepat, tapi pembangunan yang dilaksanakan itu masih jauh dari selesai.

Dengan demikian, menurutnya pembangunan itu harus terus dilanjutkan, tetapi harus dengan syarat, yaitu pembangunan itu harus disetujui oleh rakyat karena rakyatlah melalui wakil-wakilnya yang menentukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan yang menentukan hari depan bangsa Indonesia.

"Bila rakyat masih gandrung terhadap pembanguan, sama dengan Golkar, maka rakyat harus dapat mensukseskan Pemilu 1987 yang jatuh pada tanggal 23 April dengan memberikan kepercayaannya atau memberikan suaranya kepada Golongan Karya. Diharapkan dengan kemenangan Golongan Karya dalam Pemilu 1987, pembangunan jalannya akan lebih lancar.

Mengenai jalannya pembangunan, Mensesneg menegaskan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia ini adalah menganut sistem prioritas dan realistis. Artinya mana-mana pembangunan yang harus diprioritaskan, dan pembangunan yang mana yang masih belum memungkinkan.□ BM

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

Jalan Pattimura Nomor 1 Telepon 2466
AMBON

PEMUDA DAN RAKYAT MALUKU BERTEKAT MENSUKSESKAN PEMILU 1987

DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

KAMPANYE MODEL LAIN

Kampanye yang dilakukan Ny Tati Sumiarno, fungsionaris DPP Golkar lain dari yang lain. Dia tidak mengumpulkan massa dengan jumlah ratusan ribu orang. Baru-baru ini Ny Tati, yang juga salah satu Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengunjungi daerah basisnya di Muara Angke, Jakarta Barat untuk mengadakan penyuluhan dan sekaligus kampanye. Kampanye yang dilakukan Ny Tati ini tidak hanya di lingkungan nelayan, tapi juga dilakukan terhadap tukang becak dan tukang delman.

Digitized by Google

Oleh: Mochtar Kusumaatmadja

Manusia Dan Pembangunan

Kita telah menjalani tiga masa Pelita dan separuh daripada Pelita keempat dalam melaksanakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Setiap orang mengetahui dan mengakui bahwa dalam kurun waktu itu telah banyak yang tercapai dalam pelaksanaan pembangunan nasional menurut pola semesta berencana ini. Ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa angka pendapatan nasional rata-rata per-orang kini telah mencapai kurang lebih US$ 560.00 per tahun, suatu angka yang jauh lebih tinggi daripada angka yang tercatat ketika proses ini dimulai ± 18 tahun yang lalu.

Keuntungan yang tercapai tidak saja dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional yang bertambah, pembangunan phisik yang telah terjadi dimana-mana baik berupa jalan-jalan, waduk air, bangunan, dan lain-lain sebagainya, kehidupan pedesaan yang telah meningkat termasuk kesejahteraan sosial dimana kesejahteraan ibu dan anak di pedesaan pun mendapat perhatian, tetapi tidak kurang pentingnya adalah kenyataan bahwa cara berpikir yang didasarkan perhitungan dan perencanaan telah pula memasuki daerah pedalaman dan pedesaan melalui pelbagai proyek dan rencana yang dilaksanakan di pedesaan. Pendek kata telah banyak yang telah dilakukan dan dicapai dalam usaha untuk membawa daerah pedalaman dan pedesaan yang sejak zaman kolonial seolah-olah hidup terpisah dan terasing dari kehidupan ramai dunia untuk membawanya ke tengah-tengah atau setidak-tidaknya ke pinggiran dunia sekeliling.

Disamping kenyataan-kenyataan tersebut dibidang pembangunan dalam arti pembangunan ekonomi di atas, usaha pembangunan semesta nasional berencana telah pula mencatat hasil yang positip dibidang non-ekonomi.

Kita telah berhasil dalam kurun masa yang sama membina suatu sistim politik yang mantap. Sistim politik itu telah dibina dengan menggunakan segala kenyataan dan unsur politik didalam masyarakat termasuk pengalaman masa lampau yang pernah mengenal keadaan multi partai.

Perobahan ini telah dicapai tidak dengan mendadak melainkan secara gradual. Pertama-tama dengan mengurangi jumlah partai dari sekitar 20 kini menjadi 1 Golongan Karya dan 2 Partai Politik. Selain dalam pengurangan jumlah, juga telah tercapai keseragaman didalam azas yang dianut oleh kehidupan kepartaian di Indonesia dengan telah diterimanya azas tunggal Pancasila. Ada pendapat disementara

kalangan politik bahwa kini tinggal kita memantapkan adanya tiga kekuatan sosial politik ini karena walaupun kita telah menganut sistim azas tunggal didalam bidang politik, tidak dikandung maksud untuk membina suatu negara dengan partai tunggal.

Apabila cita-cita kehidupan politik dengan azas tunggal namun partai politik berjumlah lebih dari satu ini terwujud, maka telah pula diletakkan dasar-dasar yang cukup baik untuk pembinaan kehidupan politik sebagai bagian daripada pembangunan semesta berencana.

Sukses yang sama telah pula dicapai didalam kehidupan agama dimana telah merupakan kenyataan bahwa berdasarkan azas Ketuhanan Yang Maha Esa, hak warganegara untuk memenuhi naluri ke-agamaannya, telah dipenuhi dengan pengakuan bahwa setiap orang berhak menganut agamanya masing-masing tanpa gangguan dari anggauta masyarakat atau oleh orang yang beragama lain atau tidak beragama.

Kita juga telah menyaksikan kehidupan seni dan budaya cukup berkembang dalam kurun masa yang sama. Yang menarik perhatian adalah mulai diperhatikannya dan hidupnya kembali kesenian dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam itu. Hal ini menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin melaksanakan moto nasional "Bhineka Tunggal Ika".

Dari uraian selintas kilas tentang apa yang telah dicapai dalam kurun masa 3 Pelita tersebut di atas, kiranya jelas bahwa usaha pembangunan nasional kita telah cukup berhasil dan tidak saja meliputi pembangunan di bidang ekonomi dan phisik, tetapi juga meliputi kehidupan politik dan kemasyarakatan, kehidupan kesejahteraan, ke-agamaan dan seni budaya.

Jelas kiranya bahwa kita kini sedang tengah berada dalam suatu usaha besar pembinaan bangsa (a great nation building effort). Dalam usaha ini, Pemerintah sebagai pimpinan politik daripada masyarakat nasional telah memegang peranan yang penting. Karena ruang lingkupnya yang nasional dan besarnya usaha pembinaan bangsa dalam segala segi kehidupan ini, serta tekanan yang diberikan kepada usaha pelembagaan (institutionalization) daripada proses ini, timbul kesan atau perasaan seolah-olah orang perorangan (individu) kurang mendapat perhatian. Ada orang yang bahkan beranggapan bahwa orang perorangan itu sudah tenggelam didalam proses pembinaan bangsa ini. Sebaliknya ada suara yang menganggap orang perorangan dan ekspresi daripada individualitas itu merupakan suatu hal yang kurang baik.

Saya berpendapat bahwa pandangan-pandangan demikian itu belum tentu benar bahkan saya ingin mengatakan merupakan pandangan yang keliru. Memang betul seperti saya telah katakan bahwa pada masa-masa nation building ini terutama pada tahap-tahap pertama tekanan akan diberikan kepada pelembagaan daripada usaha-usaha atau proses ini sehingga orang perorangan mungkin terdesak, namun tidaklah bijaksana kiranya apabila individualitas dari orang perorangan ini tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Karena pada analisa terakhir masyarakat dan satuan-satuan masyarakat akhirnya terdiri dari perorangan.

Dengan tidak usah mengulangi kesalahan beberapa bentuk masyarakat dimana individualitas perorangan terlalu menonjol sehingga merugikan kehidupan kemasyarakatan, namun kiranya perlu kita menjaga agar supaya orang perorangan sebagi individu tidak tenggelam dalam proses pembinaan bangsa dan masyarakat ini, karena hal itu hanya akan merugikan kita pada akhirnya. Kita harus tetap memelihara dan memupuk individualitas dalam orang perorangan ini demi mempertahankan kreativitas dalam kehidupan masyarakat. Soalnya lalu menjadi: orang perorangan atau manusia macam apa yang kita perlukan di Indonesia didalam masa pembangunan ini?

Sampailah kita dengan demikian kepada persoalan manusia didalam pembangunan Indonesia. Dorongan-dorongan apakah yang menjadi dasar daripada kegiatan dan

Digitized by Google

tindakannya dan sifat-sifat apakah yang sebaiknya ia miliki. Penulis akan mencoba dibawah ini untuk memberikan sumbangan pikirannya mengenai persoalan yang sangat penting ini. Ia melakukannya dengan beberapa pra-anggapan atau asumsi yaitu bahwa berbicara tentang manusia Indonesia dalam pembangunan ini, kita menerima sistim politik Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini sebagai suatu kenyataan dan landasan berpikir dan bertindak. Dengan demikian maka Penulis berpendapat bahwa manusia Indonesia itu sebaiknya menganut prinsip-prinsip serta memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Selain percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, manusia Indonesia harus percaya pada diri sendiri dan hari depan Indonesia. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tersimpul dalam azas Pancasila. Apabila tidak disertai oleh kepercayaan pada diri sendiri, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa ini bisa berakibat manusia Indonesia dihinggapi fatalisme, suatu ciri yang memang sudah ada pada kebanyakan orang Indonesia.

Bagi kehidupan masa kini justru yang harus ditekankan adalah kepercayaan kepada diri sendiri dan keyakinan bahwa banyak dalam kehidupan dan di dunia ini tergantung pada diri kita sendiri dan usaha kita sendiri. Kepercayaan pada diri sendiri dan usaha sendiri inilah yang telah membawa kemajuan pada kebanyakan bangsa-bangsa yang maju. Memang ada baiknya kepercayaan pada diri sendiri dan kemampuan manusia ini dibatasi dengan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya bahwa didalam kita mengusahakan segala sesuatunya dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri itu kita tidak boleh takabur.

Unsur ketiga yaitu kepercayaan pada hari depan Indonesia sangat penting bagi manusia Indonesia dalam pembangunan karena hanya dengan adanya kepercayaan pada hari depan Indonesia, kita akan didorong oleh semangat untuk berprestasi sebaik-baiknya demi hari depan bangsa kita dan kehidupan lebih baik bagi anak cucu kita.

2. Sebagai insan politik "committed" pada sistim politik negara RI. Sudah menjadi konsensus kita pada dewasa ini bahwa sistim politik yang telah diletakkan dasarnya dalam 3 Pelita yang baru lalu dan mencapai titik puncaknya dengan diterimanya Pancasila sebagai azas tunggal, merupakan sistim politik yang cocok bagi bangsa Indonesia. Apabila ada kekurangan dirasakan, misalnya kurangnya ada kesempatan menyatakan pendapat atau kesempatan mengambil inisiatip, maka kekurangan-kekurangan itu kiranya dapat diperbaiki dalam rangka sistim politik yang telah kita bina dengan banyak susah payah dan berdasarkan pengalaman pahit dimasa yang lalu.

3. Sadar akan hak dan kewajibannya sebagai perorangan dan anggauta masyarakat. Selama ini kita selalu diingatkan akan kewajiban seseorang sebagai warganegara dan anggauta masyarakat, kurang sekali dikemukakan bahwa perorangan itu sebagai anggauta masyarakat juga mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yang satu tidak mungkin ada tanpa yang lain.
Manusia Indonesia perlu disamping sadar akan kewajibannya juga mengetahui hak-haknya sebagai perorangan dan anggauta masyarakat. Sengaja disebut disini sebagai perorangan dan anggauta masyarakat karena disatu pihak seseorang itu baru berarti didalam penampilannya sebagai individu, sebaliknya seseorang itu hanya dapat merealisasikan potensi dan bakat-bakatnya secara sepenuhnya dalam masyarakat sehingga ia tidak pula lepas dari kewajibannya sebagai anggauta masyarakat. Pengertian perorangan (individu) jadinya tidak bisa dilepaskan dari pengertian masyarakat tempat seseorang itu mendapat kesempatan berkembang dengan sepenuh-penuhnya.

4. Setelah menguraikan kedudukan, hak dan dorongan-dorongan bagi seseorang sebagai anggauta masyarakat, marilah sekarang kita perhatikan sifat-sifat apa yang sebaiknya dimiliki manusia Indonesia masa kini secara pribadi.

Sifat pribadi pertama yang perlu dimiliki seseorang adalah sifat *cermat*. Kecermatan sebagai lawan arti kecerobohan atau "asal saja" adalah satu sifat yang perlu sekali dimiliki dalam masyarakat masa kini (moderen). Orang yang cermat kemungkinan majunya lebih besar daripada orang yang tidak cermat. Kecermatan didalam segala hal merupakan suatu sifat yang mutlak harus dimiliki dalam masyarakat masa kini.

Sifat pribadi kedua yang diperlukan adalah sifat *Hemat*. Salah satu sebab mengapa orang Indonesia sering kalah dalam persaingannya dengan bangsa lain adalah karena dia tidak hemat, artinya kurang bisa mengatur kekayaannya untuk tujuan-tujuan yang produktip. Hemat tidak berarti kikir melainkan berarti tidak mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu atau yang tidak ada manfaatnya. Hemat tidak saja dapat diterapkan pada kekayaan, tetapi juga pada tenaga, pikiran dan waktu.

Sifat pribadi ketiga yang diperlukan manusia Indonesia masa kini adalah sifat *rajin*. Didalam dunia yang bersaing sudah tidak ada tempatnya lagi bagi orang yang malas. Sikap yang malas atau tidak suka bekerja memang tidak menjadi soal dalam masyarakat yang tertutup dimana tidak terdapat banyak kegiatan selain kegiatan berburu atau bercocok tanam dan kegiatan lainnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer. Didalam masyarakat kini yang penuh persaingan, sifat malas akan mengakibatkan kerugian pada kita.

Sifat pribadi lainnya yang perlu dimiliki dalam masa kini adalah sifat *jujur*. Kejujuran memang merupakan suatu sifat yang dianjurkan oleh agama dan etika sejak nenek moyang kita. Tetapi didalam pergaulan masa kini sifat jujur juga merupakan suatu keharusan. Lepas daripada apakah itu sifat yang dititahkan agama atau secara etika sifat yang terpuji, orang yang jujur didalam perdagangan atau pinjam meminjam akan mendapatkan kepercayaan dan kepercayaan adalah modal, didalam kita berusaha. Dengan perkataan lain, dalam pergaulan masa kini kejujuran itu perlu demi kemajuan lepas daripada dianjurkan tidaknya sifat ini oleh agama atau norma-norma etika.

Sifat manusia Indonesia masa kini yang lain yang perlu diperhatikan adalah sifat *bertepat waktu*. Orang yang bertepat waktu selain bisa menggunakan waktunya lebih hemat, juga menunjukkan hormatnya kepada partner pergaulannya. Segala hubungan akan dipermudah dan berjalan lebih effisien apabila orang-orang bertepat waktu. Bertepat janji sangat penting bagi pemeliharaan kepercayaan orang pada diri kita. Hal ini menjadi dasar yang penting didalam bidang usaha dan perdagangan.

Tegas tetapi bijaksana. Sifat lain yang perlu dimiliki oleh manusia Indonesia masa kini adalah untuk bersikap tegas mengenai sesuatu. Sikap yang tegas akan menghilangkan keragu-raguan pada pihak ketiga tentang keinginan kita atau langkah-langkah yang akan kita ambil. Dengan demikian bisa dihindarkan pemborosan waktu dan salah paham yang mungkin timbul karena tidak adanya ketegasan. Karena sikap tegas menyangkut pihak ketiga didalam pelaksanaannya ketegasan harus disertai dengan sikap yang bijaksana, terutama terhadap orang yang menjadi sasaran daripada sikap tegas itu.

Sifat lain yang juga baik dimiliki oleh manusia Indonesia masa kini adalah sifat *berani*. Keberanian diperlukan dalam hal-hal kita menghadapi resiko atau persoalan yang baru. Tanpa sifat berani tidak mungkin bisa terjadi perobahan atau perbaikan. Seperti juga halnya dengan sifat tegas, keberanian, juga harus disertai sifat lain yaitu sifat berhati-hati. Terlalu berani atau terlalu banyak mengambil resiko tanpa perhitungan yang matang tidak membawa keuntungan bahkan merugikan.

Sifat teguh memegang prinsip atau prinsipiil. Sifat teguh memegang prinsip mempunyai keuntungan bahwa kita tidak mudah tergoyahkan atau tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, bahkan bisa menjerumuskan. Namun seringkali dalam menghadapi orang lain yang tidak memiliki sikap ini, ada baiknya kita menunjukkan sikap yang mau mengerti atau toleran. Yang penting adalah bahwa terhadap sesuatu yang tidak baik, kita sendiri untuk diri sendiri bersikap prinsipiil atau memegang teguh prinsip. Kita harus memiliki pengertian bahwa orang lain mungkin tidak dapat bersikap demikian.

Demikianlah beberapa sifat pribadi yang menurut Penulis harus dimiliki oleh manusia Indonesia masa kini, apabila ia hendak berhasil dalam persaingannya dengan manusia bangsa lain. Karena sifat-sifat

Digitized by Google

yang tadi diuraikan merupakan sifat-sifat yang universal berlaku didalam pergaulan antara bangsa.

Kami tidak berpretensi bahwa telah diuraikan semua sifat yang diperlukan didalam pergaulan masa kini. Yang diuraikan di atas hanya merupakan beberapa saja diantara sifat pribadi yang terpenting. Penulis juga tidak bermaksud mengatakan bahwa belum banyak diantara kita yang memiliki sifat-sifat pribadi di atas dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari, namun juga merupakan kenyataan bahwa dalam masyarakat kita masih cukup banyak toleransi untuk mereka yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut di atas tadi. Perbedaannya adalah bahwa pribadi-pribadi yang memiliki sifat-sifat ideal di atas lebih berhasil didalam pergaulan masyarakat. Lebih banyak manusia Indonesia memiliki sifat-sifat yang kami uraikan di atas, maka akan lebih berhasil kita sebagai bangsa.

Karena didalam pergaulan masa kini bangsa Indonesia tidak dapat lagi memencilkan dirinya atau mencegah pergaulan atau kompetisi dengan bangsa lain, maka mau tidak mau kita harus sedapat mungkin berusaha memiliki sifat-sifat yang berlaku umum (universal) dimana-mana itu.

5. Indonesia mempunyai keadaan yang tersendiri atau unik dalam arti bahwa walaupun pada satu pihak manusia Indonesia tidak dapat mengisolasikan dirinya dari pergaulan dengan bangsa lain sebagai akibat daripada perhubungan dan komunikasi antara bangsa yang sudah intensip sekarang, dipihak lain ia masih dekat sekali bahkan dalam beberapa hal masih terikat oleh adat kebiasaan dan tradisi-tradisi tempat asalnya. Dengan perkataan lain dilihat secara budaya orang Indonesia masa kini sering merupakan seseorang yang ber-

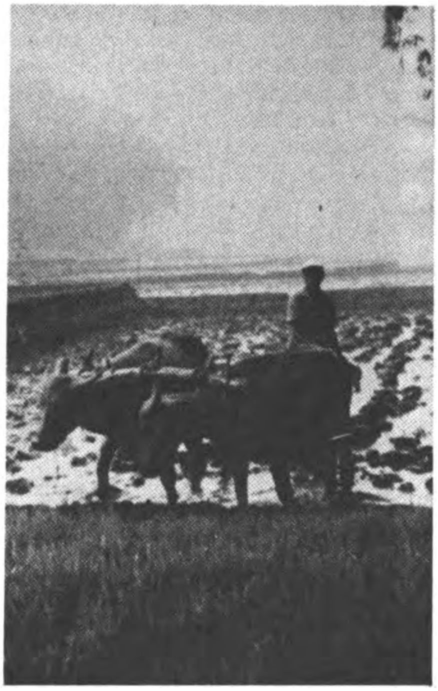

ada di tengah-tengah atau di pinggiran dua kebudayaan yang berlainan dengan tuntutan-tuntutan yang berlainan pula. Disatu pihak kebudayaan dunia masa kini (moderen) dan dilain pihak kebudayaan tradisional atau kebudayaan masa silam.

Kenyataan ini menjadikan hidup di Indonesia sangat menarik (interesan) untuk diamati, tetapi sekaligus juga menempatkan manusia-manusia Indonesia sering dalam keadaan yang sulit. Ia harus pandai-pandai tidak saja menempatkan dirinya tetapi juga mengadakan pilihan yang tepat dalam suasana dan pada saat tertentu.

Manusia Indonesia masa kini benar-benar merupakan seorang manusia yang mengalami tarikan dari dua arah yaitu ikatan dan tarikan-tarikan dari masyarakat tradisional tempat asalnya dan masyarakat masa kini dimana ia sekarang berada dan berfungsi. Karena itu didalam kita sebagai manusia Indonesia masa kini ingin menerapkan sifat-sifat yang diperlukan didalam pergaulan masa kini (moderen) seperti apa yang telah diuraikan dalam paragrap ke-4 di atas, kita sebaliknya harus dapat menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang ada demikian pula tradisi dan sejarah sebagai manifestasi kebudayaan dan jiwa bangsa kita.

Hanya dengan perpaduan antara memenuhi dan menerapkan sifat-sifat yang diperlukan dalam pergaulan masa kini dengan penghormatan adat kebiasaan serta tradisi dan sejarah kita, kita sebagai manusia Indonesia yang merupakan anggauta darimana masyarakat yang sedang dalam masa perobahan, bisa berhasil.

Kesulitan-kesulitan sering timbul dan situasi konflik sering terjadi apabila didalam usaha menerapkan sifat-sifat atau tuntutan-tuntutan masyarakat masa kini kita bersikap kurang dapat menghormati adat kebiasaan atau tradisi sejarah yang masih berlaku dan dianut oleh masyarakat di sekeliling kita. Itulah tantangan yang dihadapi oleh manusia Indonesia masa kini tetapi itu pulalah yang membuat manusia Indonesia seorang mahluk yang menarik.

Bahwa orang bisa mengatasi atau mencari jalan keluar dari tarikan antara masyarakat masa kini dan alam tradisional telah ditunjukkan oleh bangsa lain. Bangsa Jepang misalnya merupakan contoh yang baik daripada suatu bangsa yang dapat menyerap dan menerapkan teknik dan teknologi masa kini tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat melakukan yang sama. ☐

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
Kotak Pos 95. Jalan Jenderal Achmad Yani Ambon. Telp. 2189 - 3560.

'DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN, BEKERJA KERAS DAN BERKARYA KITA SUKSESKAN PEMILU 1987 SEBAGAI PESTA DEMOKRASI UNTUK MENJAMIN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN DAN TETAP TEGAKNYA PANCASILA DAN UUD 1945

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
Jln. Sentani, Abepura Jayapura Telp. 151/Abe Telp. Otomat : 21786 TELEX: 76138
P. O. Box 422
WARGA UNIVERSITAS CENDERAWASIH BERTEKAD MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DENGAN MENGGUNAKAN HAK PILIH SEBAIK-BAIKNYA UNTUK TETAP MENJAMIN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL DIBAWAH PEMERINTAH ORDE BARU

Digitized by Google

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

Pemilu 1987 adalah wujud kedaulatan rakyat untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

Jayapura, Maret 1987
ttd
GUB. KDH. TK. I IRIAN JAYA

(IZAAC HINDOM)

Digitized by Google

Oleh: Maria Sugiharto

Musik Jazz, Yang Bagaimana?

Bagi yang awam, maka sebutan *musik jazz* diidentikkan dengan musik pop biasa, yang cepat digemari oleh khalayak, lebih-lebih kaum muda. Padahal musik jazz merupakan suatu aliran musik tersendiri, yang lain dari musik klasik. Bila orang menyebut musik jazz, konotasinya adalah musik yang sama sekali tidak klasik. Padahal, musik jazz memiliki suatu keindahan yang eksklusif, dan dari masa kemasa berkembang, menjadi populer seperti ada kristalisasi tentang pengertiannya. Sehingga, bila orang mempelajari musik jazz, adalah suatu studi yang sama seriusnya dan sama beratnya dengan mempelajari musik klasik di konservatorium.

Pada periode *tempo doeloe* banyak kumpulan musik yang bernama *jazz-band* dengan dominasi instrumen tiup, perkusi dan contra bass. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh biduan serta biduanita (biasa mendapatkan julukan *Miss*) biasanya lagu berbahasa Inggeris, karena pada dasarnya musik jazz berasal dari negeri Paman Sam.

Menjelang tahun enampuluhan, banyak kaum muda (juga para mahasiswa di kampus-kampus) menggemari apa yang dinamakan musik jazz, serta bila memainkan piano, yang telah mahir memainkan lagu *In the Mood,* dia sudah bisa dikategorikan dengan pemain jazz yang unggul. Lagu In the Mood yang identik dengan musik jazz karena nadanya yang *rag time* melanda dimana-mana, dan lagu ini dapat disertai dansa yang disebut *Jive*.

Menjelang tahun tujuhpuluhan, band musik terkenal diibukota dengan para pemain unggulan seperti *Benny Mustafa* pada perkusi, *Maryono* pada terompet serta pemain piano kaliber internasional *Bill Saragih* dan penyanyi yang kini tidak asing lagi bagi kita, meniti karirnya melalui musik jazz, *Brury Marantika*. Lokasi bermain band musik ini juga ditempat-tempat yang cukup eksklusif dengan penonton yang eksklusif pula, ialah di Bali Room Hotel Indonesia Internasional.

Kini, Band Musik Bhaskara yang sudah mendapatkan reputasi internasional dengan pemain biola tunggal unggulannya, Luluk Poerwanto menjadi pusat penilaian banyak pengamat musik jazz.

Apakah Musik Jazz itu?

Jazz merupakan hasil adonan dari musik Afro-Amerika yang berkembang di Amerika Serikat pada permulaan abad ke-20. Meskipun melodi dan harmoninya banyak dipengaruhi musik Eropa, rytmenya pada dasarnya adalah asli Afrika.

Nama *jazz* itu sendiri sebenarnya agak kabur bahkan mungkin tidak ada hubungannya dengan musik, yang pertama kali diperkenalkan dalam musik di Chicago tahun 1915.

Tenaga penggerak pertama dalam kelahiran jazz adalah orang-orang Negro yang bangkit dari perbudakan dalam pertengahan kedua abad ke-19. Sekalipun mereka telah terpisah dua abad dari tanah asal mereka di Afrika, mereka masih mempertahankan dan memelihara warisan lagu serta irama Afrika.

Warisan irama jazz itu semula merupakan lagu-lagu yang didendangkan dalam upacara agama atau dalam sprituil yang dianggap suci, dicampur dengan lagu-lagu yang bersifat keduniawian. Ini, merupakan campuran musik Afrika dan Eropa yang dibawa ke Amerika oleh para *"pemeluk"* nya serta keturunannya. Kota New Orleans merupakan kota pertama yang mengembangkan musik ini pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, dan bercabang menjadi dua irama musik pokok, ialah *rag time* dan *blues*.

Yang dimaksud dengan *rag time* ialah irama yang dimainkan pada piano dengan nada yang setengah-setengah agak cepat (contohnya lagu In The Mood) sedangkan lagu yang berirama blues merupakan lagu-lagu yang dimainkan dengan instrumen tiup, terompet, yang menghasilkan irama yang meliuk-liuk.

Perkembangan irama blues inipun kurang jelas kapan dimulai, tetapi kira-kira dikembangkan sebelum Perang Saudara Amerika, yang bersifat nyanyian yang sekuler. Namun nada-nada blues yang secara alamiah dimiliki kaum Negro ternyata tidak begitu gampang didapatkan oleh musisi Eropa (kulit putih). Nada yang dimainkan dengan pukulan yang lebih banyak bergerak dan terpenggal-penggal, kemudian dikenal sebagai *jazz Dixieland.*

Pada tahap-tahap awal, jazz mengiringi serta merangsang situasi yang meriah dan gembira ria. Pertama-tama merupakan musik untuk dansa, jazz dianggap rendah dan murahan. Pada hakekatnya memang memiliki hubungan-hubungan yang rendah dan murah. Di New Orleans, Jazz menyubur dikota Storyville, sebuah daerah yang dikhususkan bagi pelacuran yang dilegalisir, dimana sepanjang jalanan berderet bar-bar dan kabaret-kabaret yang menghidupkan rombongan-rombongan jazz.

Dikota ini, Storyville- muncul generasi pertama para pemain jazz ulung, seperti ahli terompet *Joe Oliver,* pemain trombone Kid Ory, dan dalam band yang dibentuk, *Louis Amstrong* (raja jazz legendaris) mendapatkan pekerjaan pentingnya yang pertama kali. Sidney Bechet, meliuk-liukkan terompetnya melagukan lagu-lagu perkasa. Tahun 1917, pada waktu PD I, pemerintah Amerika Serikat menutup Storyville, dan para musisi jazz mulai bermigrasi kelain tempat untuk bekerja. Banyak yang pergi kesebelah Utara naik kapal menyusuri sungai dengan tujuan Chicago. King Oliver, mencapai Chicago, dan segera mendapatkan pekerjaan didalam dua band. Disinilah nanti peranan Louis Amstrong menjadi lebih besar, serta dibesarkan disini. King Oliver memanggil anak didiknya ialah Louis Amstorng untuk bergabung dengannya. Kedatangan Louis Amstrong di Chicago cukup menggemparkan. Kaum musisi setempat terkagum-kagum atas permainannya improvisasinya serta ide-idenya yang menciptakan irama yang mentakjubkan, seperti *double cornet breaks* yang dimainkan olehnya pada instrumen terompet bersama Oliver. *Breaks* adalah bagian-bagian dimana ritme berhenti, diselingi oleh permainan satu selingan singkat, hal mana merupakan sesuatu yang digemari oleh pemain-pemain jazz New Orleans. Dua pemain terompet melaksanakan breaks secara serentak (berbarengan), permainan mana begitu menggigit dan sempurna, tanpa saling menoleh tanpa teks tanpa saling menjegal sedikitpun sehingga membuat para penonton dan dengan terpukau menahan napas.

Jazz Big Band

Dalam musik jazz, biasanya dimainkan oleh tujuh orang. Hal ini bisa dimengerti karena didalam musik jazz tidak ada partitur. Bila kumpulan musik (Band) terdiri satu rombongan besar, maka akan dibu-

Digitized by Google

tuhkan aransemen-aransemen tertulis, hal mana dianggap akan merusak *spontanitas* yang merupakan jantung dari musik Jazz. Suatu usaha untuk *"membakukan"* musik jazz dengan aransemen-aransemen teratur dan terdiri dari lebih dari tujuh orang oleh Don Redman- seorang saxofonist alto yang pernah belajar di Konservatorium -- sesuatu hal yang jarang dijalani oleh kaum Negro, mengembangkan permainan solo terompet, solo yang bersifat kebebasan. Tetapi Don Redman kurang berhasil dengan usaha ini, karena apa yang ditertibkan sangat berbeda dengan aransemen para musisi jalanan dari sepanjang lorong-lorong di New Orleans, dibelakang tempat-tempat minum murahan. Untuk hal tersebut, maka Louis Amstrong lebih diorbitkan lagi, serta dipanggil oleh para musisi kulit putih "berpendidikan". Dan peranan Amstrong sangatlah menonjol, karena solo terompet Amstrong yang melambung dan bebas, yang merupakan asal usul musik tersebut. Para musisi kulit putih dari malam kemalam mendengarkan Louis Amstrong, dan akhirnya didalam keasyikannya meresapi semangat jazz yang terpancar dari permainan ahli terompet itu. Dan, teladan Amstrong ini telah menghasilkan suatu rombongan yang cukup mampu memainkan jazz dalam permainan ensemblenya, sekaligus penuh permainan solo jazz yang telah mereka pelajari secara cemerlang dari teladan Louis Amstrong. Muncullah generasi baru pemain jazz Negro seperti *Duke Ellington* pianis ragtime yang berasal dari Harlem (suatu daerah di New York dimana merupakan kawasan bagi orang-orang Negro), yang memainkan nada-nada ringan dengan

Duke Ellington

tangan kanannya, mulai meluaskan bandnya dengan enam orang pemain. Band ini mengembangkan nada-nada baru yang menghasilkan sebuah musik yang baru, karena perpaduan dengan permainan terompet Bubber Miley yang bergaya menggeram dan menggigit yang memiliki sifat-sifat yang eksotik, menghasilkan sebuah musik yang terdengar amat baru. *Percy Grainger,* pianis klasik mengelu-elukan Ellington dengan mengatakan bahwa Ellington adalah *satu-satunya otak*

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Jalan Slamet Riyadi Telp. 41931 Ambon
TIRTA DHARMA

"DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN KELUARGA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) AMBON
SIAP MENSUKSESKAN PEMILU DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL"

DENGAN JIWA DAN SEMANGAT BERKARYA, SEGENAP WARGA/KELUARGA BESAR PERUSAHAAN

1. Fa. Jakarta Baru
2. PT. Pelayaran Lokal Rajawali
3. Aneka Pembangunan

SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MALUKU – AMBON, Februari 1987
ttd.
JONI SUCAHYA
Dirut

Digitized by Google

Louis Armstrong

musik Amerika asli.

Jaman Swing

Dimulai tahun 1929, muncullah band-band jazz yang terdiri dari orang-orang kulit putih. Casa Loma Orchestra yang menggunakan aransemen jazz penuh sebagai dasar repertoirnya. Dorsey Bersaudara, mendirikan band yang khusus memainkan jazz Dixieland. Dan sejarah mencatat tahun 1934 *Benny Goodman* yang sampai kini masih sangat populer bahkan di Indonesia adalah pemain klarinet terkenal dari Chicago, yang membentuk band dengan menggunakan beberapa aransemen Fletcher Henderson. Tour musik Benny Goodman sampai pantai Barat (Los Angeles) mendapatkan sambutan yang sangat hangat dan dari saat itu para hadirin di Palomar, pantai Barat Amerika itu, menandai dimulainya jaman Swing., ialah antara tahun 1936 sampai awal PD II. Swing mengutamakan musik jazz yang disertai dansa-dansa. Dan peranan band-band jazz Negro mendapatkan tempat kedua didalam masa itu, meskipun sebuah band Negro Count Basie, tetap bisa bertahan didalam urutan atas didalam jajaran musik jazz, kendati swing melanda.

Perkembangan jazz yang ditentukan oleh para pemain yang kemudian merekrut bermacam-macam pemain dengan bermacam-macam aliran, cenderung kepada suatu permainan yang menuju kearah harmonis, ritmis dan melodis baru bagi jazz, sehingga menghasilkan sebuah musik yang resah, tergagap-gagap serta berurat panjang, musik mana segera mendapatkan julukan serta dikenal sebagai *Bebop* atau *Bop*. Bebop menyubur pada waktu yang singkat setelah PD II. Musik Bop ini menderita karena sedikitnya bakat-bakat yang kreatif, serta banyaknya penjiplakan-penjiplakan. Meskipun didalam waktu yang singkat dan lebih bersifat mode, Bebop telah mempengaruhi perkembangan jazz dengan dua jalan, ialah (1) mengembalikan grup-grup kecil jazz pada kedudukan utamanya yang pada suatu saat Swing mengaruhi pertumbuhannya. Dan ke (2) memberikan fungsinya yang sesungguhnya ialah untuk didengarkan daripada untuk iringan dansa. Dengan bepob jazz telah sama sekali melepaskan diri dari asal usulnya yang fungsionil dan telah menyatakan diri sebagai suatu *musik seni.*

Periode Cool Jazz & Jazz Baru

Sudah sejak semula musik jazz dianggap serta digolongkan kepada musik "hot" - musik dari emosi yang memproyeksikan hangatnya perasaan, baik yang diungkapkan secara gembira maupun yang berbentuk blues, secara lambat dan muram. Menjelang tahun-tahun 1950 lahirlah bentuk baru yang dikenal sebagai *jazz teduh* atau *cool jazz.* Istilah ini timbul karena ada pendekatan terhadap jazz yang menghasilkan gaya yang tenang dan tertahan (suspensi). Pemunculan ini datang pada saat dimana semangat penggemar musik jazz yang baru yang kurang setuju dengan irama bebop yang tergagap-gagap serta tertindih-tindih.

Coll jazz sempat mendapatkan banyak pengikut lebih-lebih band-band orang kulit putih sehingga dengan penampilan band terkenal pimpinan kwarted Gerry Mulligan yang mengkhususkan permainan terompet yang tertahan dan bergetar, dan memberikan ciri tersendiri didalam perkembangannya, ialah timbulnya *West Coast Jazz* atau Jazz Pantai Barat.

Generasi baru musisi jazz- ialah musisi yang tidak atau sedikit saja memiliki pengalaman dalam bentuk awali jazz - adalah Cecil Taylor., seorang pianis pendidikan Konservatorium. Pendekatan Taylor nampaknya diturunkan dari Duke Ellington, tetapi para pendengar serta pengamat merasakan adanya jejak-jejak Bella Bartok, Igor Straviosky, Anton Weber serta Charles Ives, para pianis klasik terkenal. Taylor merupakan salah seorang musisi jazz yang meninggalkan pedoman-pedoman musik yang lazim.

Sampai 1959, Taylor seorang diri merupakan gerakan *avant garde* jazz. Lalu datanglah Ornette Coleman peniup saxophone dari New York ke California. Dengan saxophone plastiknya dia mendengking, mengembik dan menggerit. Hal ini menimbulkan kelompok yang pro dan kontra dengan cara-cara menamakan Coleman seorang genius ataupun Coleman reformis. Tetapi khalayak mengakui bahwa Coleman tidak konvensionil.

Jaman terus berlalu dan roda berputar terus, demikian juga musik jazz mengalami penggerakan-penggerakan. Bunyi-bunyinya, susunannya, tehnik serta bentuknya dari tahun ketahun, dari dasawarsa kedasawarsa mengalami perubahan. Bukan karena cara-cara lama tidak berlaku lagi, tetapi karena jazz akan selalu menarik pikiran-pikiran hidup dan bakat-bakat cemerlang.

Kini, di Indonesia disamping band-band yang memainkan jazz yang menjalin kontrak dengan hotel-hotel berbintang lima (karena disanalah musik tersebut disenangi serta dihargai oleh para pendengarnya yang terdiri dari orang-orang yang tahu dan intelek, termasuk orang-orang asing) telah timbul juga grup-grup band yang mengkhususkan pada musik jazz dengan segala thema dan tehnik permainan serta gaya yang tidak terlepas dari bentuk aslinya. □

Digitized by Google

ASOSIASI KEDELAI INDONESIA

d/a

P.T.P.P. BERDIKARI

Jl. M. Ikhwan Ridwan Rais
No: 7. Gambir
Jakarta Pusat

**SEGENAP ANGGOTA ASOSIASI KEDELAI INDONESIA
SIAP BERJUANG BERSAMA GOLKAR
MENYUKSESKAN PEMILU 1987
MENJAMIN KESINAMBUNGAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
DI BAWAH PEMERINTAHAN ORDE BARU
DEMI MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH**

Digitized by Google

Digitized by Google

GOLONGAN KARYA

No. 39 11 Mei 19

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS 611 .M48

UNIV. OF ... JAN 10 1990 Current Serials

SETELAH KEMENANGAN GOLKAR

Beban Golkar Setelah Menang

N 0216 — 2571

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

KIJANG BARU

Menampilkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia

KIJANG BARU Makin Mewah

Sosok KIJANG BARU makin menawan. Dashboard semewah sedan, ventilasi segala cuaca pada kedua ujung dashboard, serta panel instrumen yang bebas silau.

KIJANG BARU Makin Nyaman

Interiornya sangat lapang. Bantalan tempat duduk dari bahan urethane yang dilengkapi per, nyaman dan tidak melelahkan. Pemasangan AC* (SUPER KIJANG**) tidak mempersempit ruang kaki berkat saluran yang sudah terpasang (built-in).

KIJANG BARU Makin Aman Dikendarai

KIJANG BARU dirancang lebih aman. Pada model "SUPER KIJANG**", rem depannya tipe cakram berventilasi. Dilengkapi LSPV (Load Sensor Proportioning Valve), menyeimbangkan tenaga pengereman sesuai beban, agar kendaraan tetap stabil walau direm mendadak.

KIJANG BARU Makin Perkasa dan Makin Ekonomis

• Mesin Toyota 5K – 1500 cc bertenaga besar dilengkapi Fuel Saving System (sistem penghemat bahan bakar) untuk menghindarkan pemborosan.

KIJANG BARU Makin Mantap Dikendarai

Suspensi depan tipe Double Wishbone, lebih memantapkan pengemudian. Gigi kemudi yang variabel memudahkan pengendalian.

Tingkat aerodinamikanya lebih baik (CD = 0.45), sehingga hambatan angin lebih kecil, bahan bakar lebih int, dan laju kendaraan semakin mantap.

* Dealer option ** Bertransmisi manual 5 kecepatan

Ya, inilah mobil idaman kita semua

TOYOTA 1500
KIJANG

Saksikan Kijang Baru di ruang pamer berikut yang dibuka penuh pada hari Sabtu (8.30 – 17.00) dan hari Minggu (09.00 – 13.00)

Main Dealer : PT. ASTRA MOTOR SALES • JAKARTA
- Jl. Jend. Sudirman No. 5, Telp. 587123
- Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Telp. 375008
- Jl. Salemba Raya No. 67, Telp. 884025
- Jl. Daan Mogot No. 146-147, Telp. 596110
- Jl. Jagorawi-Lebak Bulus Cilandak, Telp. 760780
- Jl. Kunir No. 7, Telp. 671829
- Jl. Muara Karang Raya No. 15 (Pluit), Telp. 6697640
- Jl. Garuda No. 84, Telp. 414235
- Jl. Prof. Dr. Supomo SH. No. 37 Tebet, Telp. 8290176

Dealer : • JAKARTA,
- P.T. TUNAS RIDEAN MOTOR I Jl. Pecenongan No. 60-62, Telp. 359491(5 sal)
- P.T. TUNAS RIDEAN MOTOR II Jl. Dewi Sartika No. 145, Telp. 801860
- P.T. KUSUMA MOTOR Jl. Batu Tulis No. 34, Telp. 366907
- P.T. PROUNION INDO JAYA Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 48, Telp. 354253
- P.T. ASTRIDO JAYA MOBILINDO I Jl. Batu Tulis No. 9, Telp. 352421-3
- P.T. ASTRIDO JAYA MOBILINDO II Jl. Panglima Polim No. 60-A, Telp. 715129
- P.T. MOBILINDO SUMBER KARYA Jl. Bandengan Utara No. 41-A Telp. 673950
- PT. KUSUMA INDRA MOTOR Jl. Raya Bekasi Timur Km. 19, Telp. 4891903
- PT. ANEKA MOBILINDO, Jl. Balikpapan No. 32 A-B, Telp. 377913
- PT. SINAR INTI TELAGA, Jl. H. Samanhudi No. 7, Telp. 350022
- BEKASI, PT. KUSUMA BEKASI MOTOR Jl. Ir. H. Juanda No. 98-A Telp. (99) 72938
- TANGERANG, PT. TUNAS RIDEAN MOTOR III Jl. Raya Serang No. 80 (Cimone) Telp. (99) 24932
- SERANG, PT TUNAS RIDEAN MOTOR IV Jl. K.H. Wachid No. 91 Telp. (0254) 81270

TOYOTA
TERPILIH KARENA TERPERCAYA
PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/ Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH
Ny TS Darsoyo
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto
Widjanarko Poespoyo MA
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa
HM Irsyad Sudiro
Sugyanto
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli.
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Anono Poernomo
Subandrio.
Djoniharro
Rum Aly
Ibnu Sawarno
Tata Usaha :
Sudarsono SH
Rd Pand Dv Noensjathy.
Robert Puang Sunur
Isaidarto BA
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Maan Pasaribu.

STT NO.: 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

Diperbanyak dan dicetak
oleh PT. GRANESIA BANDUNG
berdasarkan surat dari
Ka Perwakilan Prop. Jabar
No.3248/MK/VI/PJB/87
Tgl: 15 Juni 1987.

MEMO REDAKSI

Akhir Dari Suatu Permulaan

FOKUS

Golkar Takkan Sia-siakan Kepercayaan Rakyat. Dalam program pembangunan mendatang, Golkar akan memberikan aksentuasi pada terwujudnya keadilan sosial.

LAPORAN UTAMA

Beban Golkar Setelah Menang; Yang Muda Angkat Bicara; Pers Gugah Kesadaran Politik Masyarakat.

NASIONAL

Musibah Beruntun Di Bulan Ramadhan; Presiden Soeharto Ajak Menutup Celah-celah Kebocoran dan Keborosan; Menteri Agama: Mensyukuri Nikmat Allah SWT. Boedi Oetomo Punya Rentang Sejarah Perjuangan Bangsa.

ORGANISASI

Golkar Raih Mayoritas Kursi Di DPR RI; Meledak, Massa Kampanye Di Riau; Dan catatan peristiwa organisasi.

KISAH SELINGAN

Suara Dari Desa.

IN MEMORIUM

Djuhartono, Bidan Golkar Telah Tiada.

SPEKTRUM

Sejarah Lahirnya Orde Baru; Relevansi Dilemma Pers Barat Dengan Perkembangan Pers Nasional; Peningkatan Perluasan Lapangan Kerja.

SENI BUDAYA

Filem Indonesia Di Tengah Krisis Sosial Budaya; Fable.

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

Drs Soedarmadji

Digitized by Google

Akhir Dari Suatu Permulaan

PEMILIHAN UMUM keempat dalam masa Orde Baru, telah terlaksana dengan baik, 23 April yang lalu. Secara relatif, meskipun ada sejumlah keluhan kecil dari para peserta pemilihan umum, dapat dikatakan pemilihan umum yang baru lalu itu adalah yang terbaik dan paling lancar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Baik dari sudut teknis maupun iklim atau suasananya. Kalau ada hal yang tetap perlu dipertanyakan - setidak-tidaknya dari sudut pandang Orde Baru - itu tak lain mengenai penonjolan tokoh Soekarno dengan latar belakang persepsi dan pemahaman sejarah secara tak utuh.

Dan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil itu, kembali menampilkan Golkar sebagai peraih suara terbesar. Dari hasil penghitungan sementara, diketahui bahwa Golkar meraih suara diatas 70%. Melebihi apa yang menjadi target Golkar sendiri. Di dua daerah yang prestigeous - karena pertarungan ketat selama beberapa pemilu - yakni DI Aceh dan DKI, Golkar kali ini mencatat keunggulan perolehan suara. Sementara itu, baik di Jawa Barat, maupun Jawa Tengah dan Jawa Timur, Golkar mencatat peningkatkan mengesankan. Begitu pula pada beberapa daerah lain, secara umum Golkar mempertahankan prestasi 1982 kalau tidak meningkat.

Tanpa bermaksud menampilkan sikap berpuas diri, prestasi Golkar dalam Pemilihan Umum 1987 tak boleh tidak harus dinyatakan cukup memberi kepuasan batin karena makna positif yang dihasilkannya. Banyak hal yang dapat dinyatakan disini. Setidak-tidaknya ada dua hal perlu diutarakan dalam kaitan tersebut.

Pertama-tama, prestasi Golkar itu telah membuktikan adanya hubungan antara perencanaan serta kerja keras yang teratur dan terus menerus selama hampir lima tahun dengan apa yang dicapai. Dan bahwa masa kampanye yang singkat bukanlah proses penentu tunggal dalam mengakumulasi dukungan. Merobah pendapat orang yang telah terbentuk selama beberapa tahun - katakanlah demikian - hanya dalam sekian minggu adalah terlalu berlebihan untuk diharapkan. Apalagi dengan kenyataan betapa kesadaran politik dan kemampuan berpikir masyarakat secara umum sudah jauh lebih maju - dan akan selalu bertambah maju karena iklim politik dan kehidupan kenegaraan yang ada membuka peluang pengembangan tersebut. Mereka takkan mudah lagi 'dimanipulasi'kan dengan hal-hal emosional semata. Cara-cara kampanye yang terlalu menekankan aspek hura-hura, tak cukup efektif dan hanya mampu menggerakkan sebagian kecil anggota masyarakat dan itupun terbatas pada kalangan usia spesifik. Lima tahun mendatang, tampaknya sentuhan yang lebih rasional akan lebih tepat dan cara hura-hura seperti yang masih sempat tampil pada masa kampanye yang lalu akan ditinggalkan.

Hal yang kedua, semacam tuduhan yang dilancarkan selama tiga pemilihan umum sebelum ini, bahwa kemenangan Golkar ditopang oleh ABRI, terjawab secara jernih. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1987, ABRI menampilkan sikap adil dan tak memihak kepada organisasi peserta pemilu manapun - sikap yang sebenarnya telah ditunjukkan ABRI sejak awal, sejak Pemilihan Umum 1971. Suatu sikap mengayomi setiap kekuatan Pancasilais yang baru mampu terbaca jelas dan dimengerti dengan baik oleh semua pihak setelah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teristimewa terhadap Golkar, tak ada tanda-tanda perlakuan yang dapat diartikan sebagai dukungan subjektif. Bahkan amat jelas betapa ABRI jauh lebih zakelijk dan lebih tinggi kadar ketegasannya kepada Golkar ketimbang kepada dua organisasi politik lainnya. Dan bagi Golkar sendiri fenomena ini tidak menjadi soal, karena memahami fungsi stabilisator dan dinamisator yang dijalankan ABRI itu. Malahan, dihubungkan dengan cita-cita pembaharuan dan pembangunan politik yang diemban Golkar sendiri, sikap ABRI itu merupakan blessing indisquise di era satu asas ini. Akan menambah keyakinan diri dan kemampuan mandiri Golkar dalam kancah pembangunan politik.

Bagaimana kita semua - segenap jajaran Keluarga Besar Golkar - patut mengappresiasi sukses Golkar dalam Pemilihan Umum 1987 yang baru lalu ini? Di halaman-halaman pertama media komunikasi kita ini, dimuat hasil wawancara dengan Ketua Umum Golkar. Pada dasarnya, dari wawancara tersebut tersimpulkan makna bahwa kemenangan dalam pemilihan umum yang lalu itu tak lain akhir dari suatu permulaan. Persiapan menghadapi lalu mengsukseskan suatu pemilihan umum hanyalah babak awal dari suatu proses berkesinambungan. Perjuangan Golkar tidaklah selesai bersamaan dengan selesainya suatu pemilihan umum.

Tampil sebagai peraih suara terbesar untuk kesekian kalinya, Golkar segera memasuki suatu tahap baru dari mata rantai pembaharuan dan pembangunan yang tak kenal henti. Di bidang politik, kita justru baru akan memulai pengamalan yang sebenarnya dari cara berpolitik yang tak ideologistis. Kita dihadapkan kepada tugas untuk membuktikan bagaimana kehidupan politik yang baik dan benar - sesuai konsep Orde Baru - akan menciptakan kemampuan dan peluang yang lebih baik pula dalam pembangunan segala aspek kehidupan. Dan pada gilirannya hasil pembangunan segala aspek itu kembali memperkokoh sistim politik yang ada menjadi lebih sehat, dan seterusnya, dengan hasil akhir yang senantiasa bersifat saling mengangkat.

Bagi Golkar - yang sejak mula menempatkan diri sebagai pelopor penegakan Orde Baru - itu semua tak lain berarti melanjutkan kerja keras. Mengoptimalkan apa yang diperolehnya melalui pemilihan umum, terutama mayoritas kerja yang diperoleh dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta mendayagunakan potensi anggotanya yang berskala terbesar saat ini dalam berbagai perjuangan kekaryaan ......•

Digitized by Google

Golkar Takkan sia-siakan Kepercayaan Rakyat

Dalam Program Pembangunan Mendatang, Golkar Akan Memberikan Aksentuasi Pada Terwujudnya Keadilan Sosial

Kampanye yang penuh gegap gempita sudah berlalu. Pawai dan rapat raksasa yang hingar binggar tidak ada lagi. Pemungutan suara yang berlangsung tenang, khidmat yang membuat bangsa seolah-olah berada dalam keheningan kontemplasi tinggal kenangan. Hasil sementara Pemilu menjawab teka-teki yang sempat dinanti-nanti, Golkar tampil sebagai pemenang.

Kini era pasca Pemilu. Masyarakat luas ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh golkar setelah menang, apa komitmen dan kesanggupan Golkar terhadap rakyat, bangsa dan negara.

Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH menjawab pertanyaan itu, menjawab keinginan tahu dengan menegaskan komitmen Golkar terhadap bangsa dan negara. "Bagi Golkar, kemenangan yang berhasil diraih dalam Pemilu 1987 bukan hal yang semata-mata cukup disyukuri, tetapi memberikan konsekuensi tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Golkar tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat", demikian ditegaskan oleh Ketua Umum dalam wawancara khusus dengan 'Media Karya' dan sejumlah wartawan di Jakarta, baru-baru ini. Apa komitmen Golkar terhadap aspirasi yang telah disalurkan oleh rakyat, Sudharmono mengatakan, "Pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila".

Untuk tahapan sekarang, dalam mewujudkan konsep pembangunan, Golkar akan menitikberatkan upaya-upaya yang mengarah kepada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu antara lain diusahakan melalui peningkatan pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya. "Golkar menyadari, meski pembangunan berikut hasil-hasilnya telah dirasakan, namun rakyat masih mendambakan peningkatan pemerataan untuk memperoleh lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih tinggi, pendapatan, keadilan dan keikutsertaan dalam pembangunan. Ini semua menjadi perhatian Golkar dan akan diusahakan untuk dijabarkan lebih lanjut dalam GBHN mendatang", demikian dikatakan oleh Sudharmono.

Program pemerataan tidak lepas dari program Trilogi Pembangunan — Pemerataan — Pertumbuhan ekonomi — Stabilitas nasional — serta Delapan Jalur Pemerataan yang telah menjadi pedoman bersama selama ini. Aksentuasi pada keadilan sosial mengandung makna bahwa Golkar bertekad untuk meningkatkan intensitas bagi usaha pencapaian program Trilogi Pembangunan, khususnya mengenai pemerataan dengan Delapan Jalur Pemerataan.

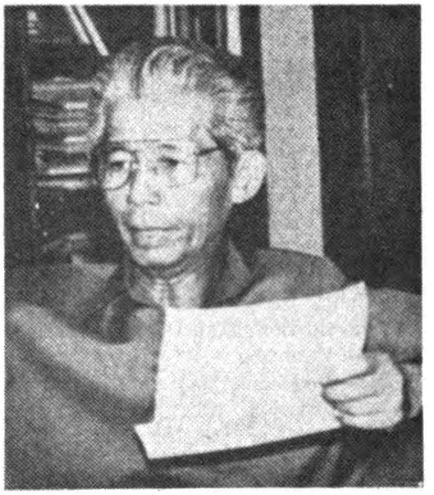
Sudharmono SH

Atas pertanyaan, Sudharmono menjelaskan, penekanan pada aspek keadilan sosial pada tahap pembangunan berikut merupakan tindak lanjut dari "mission" utama yang diemban Golkar dan kini telah terlaksana, yakni konsensus nasional tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Golkar merasa "concern" untuk mewujudkan keadilan sosial antara lain dengan program pemerataan. Namun Golkar juga menyadari, pemerataan hanya dapat bermakna, terutama bagi kesejahteraan, apabila kemampuan ekonomi nasional meningkat. Apabila kemampuan ekonomi tidak berkembang, pemerataan di bidang ekonomi hanya berarti membagi kemiskinan.

Dikatakannya, dengan program pembangunan yang telah disusun, Golkar akan meningkatkan pengabdiannya kepada rakyat dalam berbagai forum dan kesempatan, baik dalam forum legislatif, eksekutif maupun dalam masyarakat.

Tentang GBHN mendatang, Sudharmono mengatakan, GBHN yang akan diputuskan oleh MPR nanti diharapkannya benar-benar menjadi landasan yang kokoh bagi bangsa untuk mencapai tahap tinggal landas menuju masyarakat adil dan makmur.

Dalam pelaksanaan GBHN nanti, Golkar akan memberikan masukan-masukan bagi pemerintah yang dipercaya oleh rakyat, terutama dalam Repelita. Golkar tidak hanya akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif tetapi juga melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan program oleh pemerintah.

Duduknya wakil-wakil Golkar di lembaga perwakilan dalam posisi mayoritas, sebagai konsekuensi kemenangan Golkar dalam Pemilu, diharapkan oleh Sudharmono agar mampu mendorong kelancaran tercapainya berbagai konsensus nasional yang menjamin kelangsungan dan peningkatkan pembangunan. "Memang, konsensus tentu menyangkut berbagai pihak. Tetapi dengan posisi Golkar yang mantap di lembaga perwakilan diharapkan akan lebih memudahkan pencapaian konsensus yang menyangkut pembangunan dan kepentingan seluruh bangsa", katanya.

Ia juga yakin, kelancaran pencapaian konsensus nasional yang berorientasikan kepentingan nasional merupakan sumbangan yang berharga bagi usaha untuk makin memantapkan stabilitas nasional.

Selain GBHN, Golkar sejak jauh-jauh hari juga sudah mempersiapkan tokoh yang diyakininya mampu memimpin bangsa sekaligus memimpin pelaksanaan GBHN, yaitu Bapak Soeharto. Golkar akan mengusulkan Pak Harto sebagai Presiden/Mandataris MPR untuk periode 1988 - 1993 karena yakin bahwa kepemimpinannya dapat menjadi jaminan akan terlaksananya dan berkesinambungannya pembangunan nasional.

Kerja Keras

Tentang Pemilu sendiri, Sudharmono mengatakan, kemenangan yang diraih Golkar tidak terjadi begitu saja. Kemenangan itu tercapai berkat kerja keras seluruh jajaran Golkar yang dilaksanakan sejak jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan sejak Munas III tahun 1983 yang lalu. "Keme-

Digitized by Google

nangan itu memang kami syukuri tetapi sebenarnya tidak lepas dari langkah persiapan yang telah ditempuh oleh jajaran Golkar," kata Sudharmono.

Ia mengatakan, meski pelaksanaan Pemilu yang lalu ada kemajuan tetapi masih ada yang perlu dihayati dan disempurnakan lagi, terutama yang menyangkut aturan main dan pelaksanaannya oleh peserta pemilu. Golkar sudah berusaha untuk memelopori pelaksanaan kampanye yang betul-betul berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Golkar juga berorientasi pada program sehingga tidak sekedar mengerahkan massa dan menjelekkan pihak lain dan sebagainya, tetapi benar-benar menjabarkan program-program yang dimilikinya untuk ditawarkan kepada rakyat. Bahkan golkar begitu hati-hatinya dalam kampanye sampai ketika dicaci maki dan diolok-olok oleh simpatisan kontestan lain, diam saja. "Syukurlah, meksi demikian, hasilnya tidak mengecewakan. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda bahwa rakyat sudah mulai kritis, rasional dan obyektif, bisa membedakan mana yang baik dan bisa diterima, mana yang tidak", katanya.

Dari semula Golkar berusaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya antara lain dengan langkah konsolidasi yang mencakup pendaftaran anggota dan kaderisasi. "Kami tidak pernah mengandalkan kemenangan pada kelembahan pihak lain", katanya.

Secara umum dapat dikatakan, program kaderisasi selama ini berjalan efektif, bukan saja untuk memperkokoh Golkar, tetapi juga menyukseskan Pemilu. Karenanya, kaderisasi ini perlu dilanjutkan dan nanti diarahkan agar dapat menjadi kekuatan yang efektif untuk pembangunan.

Golkar tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan rakyat

Berkat konsolidasi dan persiapan itu, Golkar berhasil meraih sekitar 63 juta suara dari sekitar 93 juta pemilih, yang berarti Golkar memperoleh tambahan 15 juta pemilih dibandingkan Pemilu 1982 sebanyak 48 juta suara.

Diakuinya, tambahan suara itu mungkin ada yang disebut "protest votes" dari kekuatan sospol lain yang tidak puas dengan keadaan intern organisasi favoritenya, dan kemudian masuk ke Golkar. "Itu mungkin bisa saja terjadi", katanya sambil menjelaskan bahwa Golkar dari semula berpijak pada program yang ditawarkan kepada masyarakat. Tetapi ia menolak bahwa jumlah tambahan itu semata-mata dari protest votes. Ia yakin bahwa suara diberikan kepada Golkar karena para pemilih merasa aspirasi mereka sesuai dengan program Golkar atau program Golkar setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan aspirasi mereka.

Sudharmono bahkan juga memperkirakan, sebagian generasi muda pemilih baru juga memberikan dukungan kepada Golkar. "Tidak seluruh generasi muda yang berjumlah 12 juta memilih Golkar, tetapi dari suara yang masuk dapat diperkirakan, sebagian besar dari mereka memilih Golkar, tidak saja yang di desa-desa tetapi juga di kota-kota besar", katanya.

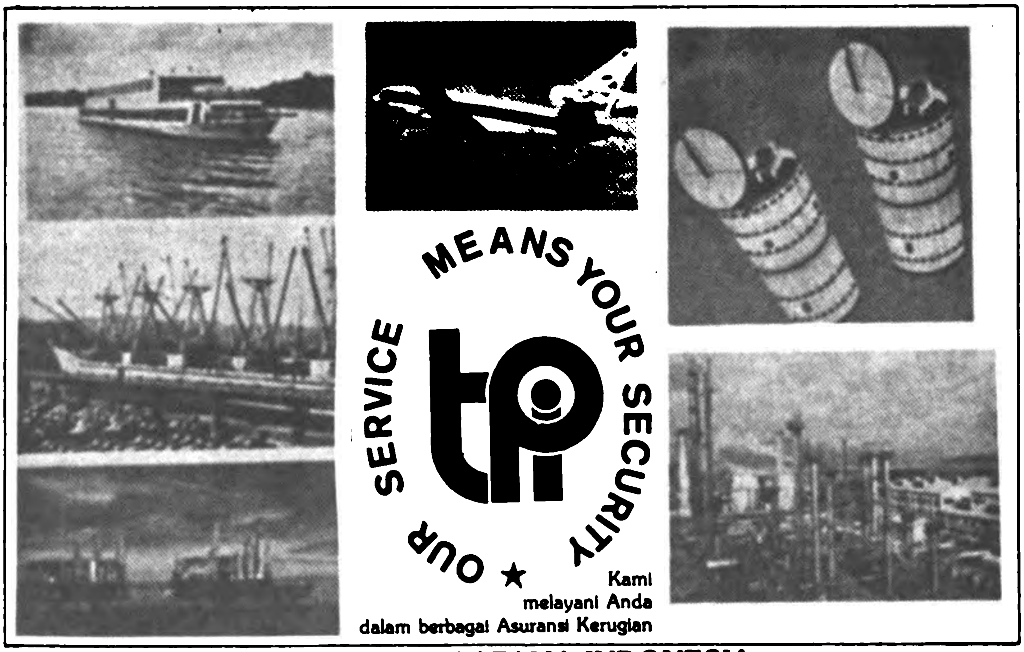

P.T. TUGU PRATAMA INDONESIA
Gedung Patra, lantai 1 - Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta P.O. Box 3789/Jkt.
Telepon 512041 - 512293 - 512654 - 512468 - 511764
Telex : 44699 GUTAMA IA & 45337 GUTAMA IA

Digitized by Google

Program pemerataan tidak lepas dari program Trilogi Pembangunan

Tentang Generasi muda ini, Ketua umum mengatakan bahwa posisi mereka sangat penting terutama dalam usaha memantapkan konsep Orde Baru, yaitu membangun kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mereka perlu diajak, diberi penjelasan tentang konsep bangsa yang ditegaskan selama ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berikut pengalaman bangsa sejak sebelum dan sesudah merdeka. "Pelajaran yang baik yang perlu dicontoh, dan pelajaran kurang baik yang perlu dihindarkan perlu dijelaskan kepada mereka secara jujur", katanya.

Ketua Umum juga mengatakan, Pemilu memiliki nilai etis dan filosofis yang tidak begitu saja gampang dikorbankan hanya sekedar untuk menang.

Sukses yang diraih Golkar hanya tercapai berkat dukungan tulus dari masyarakat luas. Apabila tidak ada ketulusan, mana mungkin Golkar dapat meraih 63 juta suara.

Apabila seluruh jajaran birokrasi, yakni pegawai negeri mendukung Golkar, itu baru 3 juta suara. Dengan istri mereka pun paling-paling baru 6 juta, dengan asumsi tiap pegawai negeri mempunyai istri, tetapi kan tidak semuanya telah kawin.

Dikatakannya pula, meski sebagian besar anggota Korpri - sebagai warganegara, bukan sebagai aparat birokrasi - mendukung Golkar, dukungan mereka didasari atas kesukarelaan. Dan ternyata tidak semua anggota Korpri masuk Golkar. Ada anggota Korpri yang nusuk bukan Golkar dalam pemilu.

Kemenangan yang diraih oleh Golkar merupakan hasil kerja bersama dan partisipasi masyarakat luas, termasuk pemuda, wanita, ulama, seniman, usahawan dan sebagainya. Partisipasi masyarakat dinilainya cukup besar. "Coba siapa yang memaksa radio swasta ikut menyiarkan lagu-lagu Golkar. Kan tidak ada, dan nyatanya mereka melakukan itu. Itu kah ketulusan mereka", katanya.

Identitas Golkar

Mengenai identitas Golkar, Sudharmono menegaskan bahwa Golkar bukan organisasi milik segolongan tertentu. Golkar adalah organisasi sosial politik yang menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda dan wanita. Golkar memberikan perhatian kepada seluruh potensi masyarakat yang ada.
Dalam melaksanakan aspirasi masyarakat, Golkar sangat memperhatikan golongan yang lemah yang disebut rakyat kecil, meski tidak pula mengesampingkan potensi pembangunan lainnya. Melalui usaha pemerataan pembangunan, Golkar akan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

Dalam Golkar, baik yang kuat maupun yang lemah diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pembangunan. Yang kuat juga diberi kesempatan untuk berkembang dengan maksud agar dapat membantu kepentingan yang lemah.

Dikatakannya, Golkar juga berusaha menjalankan fungsi mekanisme organisasi agar tetap demokratis dan dinamis. Dengan mekanisme itu Golkar tidak akan terjerumus ke dalam konservatisme.

Kampanye Dan Bung Karno

Menyoroti kembali masa kampanye yang lalu,
Ketua Umum menyatakan bahwa dengan segala kekurangannya yang ada seluruh OPP telah berusaha melaksanakan aturan permainan yang berlaku sebaik mungkin. Semuanya bertekad untuk melaksanakan kampanye dan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan semangat Pancasila sebagai satu-satunya asas. Tetapi memang pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. "Syukur alhamdullillah meski dengan pengerahan massa yang sampai-sampai sulit dikendalikan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan", katanya.

Pengerahan massa besar-besaran sulit menghindarkan ekses. Tetapi peristiwa seperti tahun 1982 disyukuri tidak terjadi. Menurut hematnva, pengerahan massa ini perlu menjadi bahan telaahan untuk selanjutnya serta masa kampanye pun perlu dipertimbangkan lagi, apakah 25 hari terlalu panjang atau tidak, untuk di kemudian hari. Penyelenggaraan pemilu sendiri dinilainya lebih mantap dibanding sebelumnya, apalagi dilihat dari jumlah peserta. Tahun ini peserta pemilu 93 juta jiwa, sedangkan sebelumnya 65 juta jiwa. Beban anggaran ternyata dapat dipertahankan sama.

Petugas Pemilu pun dinilainya lebih mantap. Para aparat pemerintah ternyata lebih siap dalam menghadapi Pemilu ini.

Suatu hal yang cukup merisaukannya dan perlu mendapat perhatian adalah tampilnya gambar Bung Karno dalam kampanye PDI yang lalu.

Bung Karno menurut Sudharmono memang tokoh yang perlu dihormati karena jasanya yang sangat besar bagi bangsa. Tetapi ia khawatir, tampilnya gambar Bung Karno jangan-jangan merupakan bentuk penunggangan kekuatan tertentu yang ingin menghidupkan kembali Sukarnoisme. Ia bersyukur bahwa pimpinan PDI telah menegaskan bahwa organisasi itu tetap akan melaksanakan Demokrasi Pancasila dan tidak menginginkan hidupnya kembali Sukarnoisme. "Mau menghidupkan kembali PKI dengan konsep Nasakom yang diajarkan oleh Bung Karno tentu tidak mungkin", katanya.

Karenanya, kepada masyarakat, khususnya generasi muda, perlu dijelaskan sejarah perjuangan bangsa. Bung Karno memang perlu dihormati karena jasa-jasanya, tetapi juga perlu diperhatikan kegagalan beliau dengan konsep Nasakom. "Selain itu, kehadiran gambar tersebut perlu dikaji apakah sesuai dengan alam Pancasila sebagai satu-satunya asas. Yang diadu dalam kampanye kan program, bukan kultus individu", demikian Sudharmono sambil menambahkan "Ini bahan pelajaran yang perlu kita renungkan".

☐ Sugyanto/Subandrio

Digitized by Google

Beban Golkar Setelah Menang

Empat kali memenangkan kepercayaan rakyat dalam pemilihan umum, tentu bukan prestasi sederhana. Golkar sadar akan hal itu. Golkar tentu lebih sadar lagi bahwa kemenangan dalam pemilu 1987 yang mencapai 73 persen dari jumlah suara pemilih yang 90 juta lebih — naik 11 persen dari prestasi 1982 — bukan demi kemenangan itu sendiri.

Kemenangan Golkar kali ini disambut oleh Golkar sendiri sebagai tantangan dan tanggungjawab yang semakin berat yang diserahkan rakyat kepadanya. Itulah kiranya esensi terdalam dari sebuah kemenangan Golkar kali ini.

Esensi ini dilukiskan secara manis oleh Ir JC Kana dosen senior pada Institut Teknologi Bandung. Dia mengatakan, merebut 73 persen suara dalam satu pesta demokrasi dengan persaingan begitu ketat, adalah kemenangan yang luar biasa. Tapi dia mengingatkan: "kemenangan itu bukan hanya disyukuri tetapi yang lebih penting harus dianggap sebagai tantangan." Artinya Golkar harus melihat kemenangan ini sebagai bukti rasa kepercayaan rakyat yang harus dibalas dengan tanggungjawab. "Itulah tantangan dari sebuah kemenangan." Senada dengan Kana adalah ungkapan rektor Universitas Diponegoro (UNDIP) Prof Dr. Mulyono Trastotenoyo. "Kemenangan Golkar tidak lain harus diakui karena rakyat masih menganggap Golkar adalah pilihan terpercaya yang belum bisa digantikan oleh kekuatan lain yang ada."

Sedangkan Rektor Universitas Gajah Mada Prof Dr Kusnadi Hardja Soemantri — masih senada dengan Kana dan Mulyono — menilai kemenangan Golkar dalam pemilu yang baru lalu karena rakyat pemilih memahami keadaan yang lalu dan sekarang. "Rakyat punya kematangan politik pada saat sekarang. Atau dengan kata lain rakyat punya kemampuan untuk melihat dan menilai keberhasilan pembangunan."

Menurutnya andaikata pembangunan ini tidak sukses, betapapun Golkar memiliki kader-kader militan, mungkin hasil pemilu baru lalu akan lain. Artinya tanpa apresiasi rakyat akan sukses pembangunan yang selama ini dilancarkan Golkar, tema pembangunan selama kampanye yang dilontarkan para juru kampanyenya, tidak akan menggugah simpati pemilih.

Juga senada adalah kata Rektor IKIP Negeri Semarang, Dr Retmono. "Kemenangan Golkar bagi saya tidak lain adalah wujud kepercayaan yang makin besar dan mantap. Juga bukti makin mantapnya kehidupan politik di negara kita." Wujud lain tentu saja bahwa pelaksanaan dan kehidupan demokrasi di negara kita makin baik.

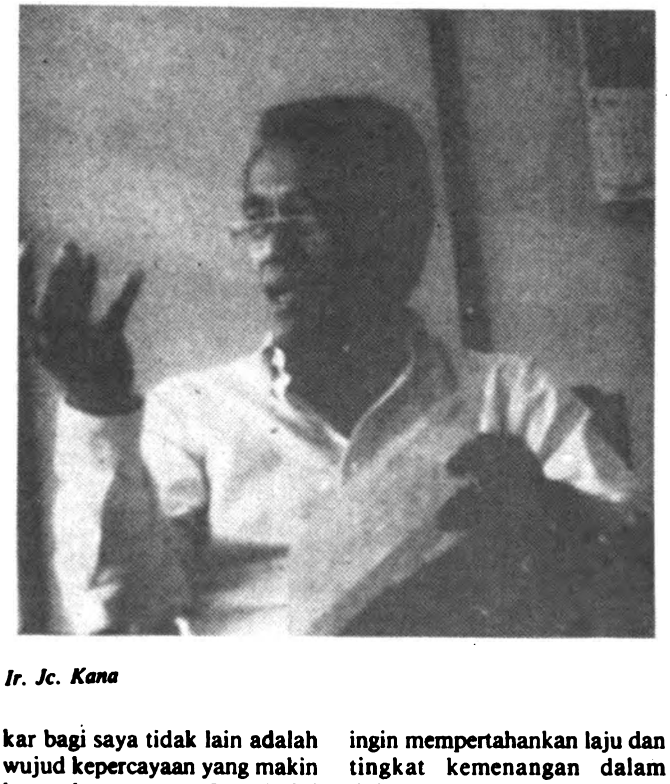

Ir. Jc. Kana

Tapi sebagaimana dikatakan oleh para cendekiawan dari lingkungan kampus ini kemenangan Golkar, tidak harus disyukuri dalam bentuk tawa ria dan pesta pora. Kemenangan harus diterima dengan renungan dalam tentang tantangan berat yang menanti di masa depan.

Tantangan itu menurut Kana adalah tumbuhnya sinisme di kalangan kaum muda, kelompok yang akan menjadi asset di masa depan. Rakyat, katanya, semakin kritis dalam menilai setiap program yang ditawarkan. "Mereka tidak menerima begitu saja."

Tentu — tanpa mengabaikan kelompok lain — kaum muda harus mendapat perhatian serius Golkar di masa depan bila ingin mempertahankan laju dan tingkat kemenangan dalam dukungan. Untuk bisa begini, Kana menganjurkan apa yang dia sebut pendidikan politik. Secara lebih gamblang dia menginginkan dialog yang lebih terbuka antara Golkar dengan kaum muda.

Dengan pendidikan politik dan keterbukaan dalam suasana dialogis, kaum muda diharapkan akan memiliki wawasan yang benar mengenai apa dan bagaimana sebetulnya berpolitik itu. "Dengan cara ini juga pemahaman dan wawasan seorang kader akan semakin luas," katanya.

Jadi pendidikan politik yang dianjurkan bekas ketua Dewan Mahasiswa ITB ini tidak berarti Golkar harus mendidik para kader agar menjadi politisi semua, "tapi menyangkut berbagai aspek tentang politik itu sendiri." Tapi juga tidak betul kalau kaum muda hanya dididik untuk berhura-hura seperti sekarang ini "kalau cara ini yang terus dipakai Golkar lama-lama bisa repot" katanya.

Sedangkan bagi Mulyono, bila Golkar ingin memenangkan simpati kaum muda atau mempertahankannya, maka paling tidak harus sejak sekarang melakukan konsolidasi kembali.

Selain itu menurut penilaiannya, kaum muda Indonesia sekarang ini memiliki perilaku politik yang semakin solider. Kedatangan mereka pada kampanye PDI atau PPP, bukan karena pilihan politik mereka memang kesana, tapi sekedar solidaritas terhadap yang lemah. Kalau benar sinyalemen bahwa kaum muda menjauhi Golkar, tidak mungkin Golkar meraih 60 juta lebih suara pemilih dalam pemilu baru lalu. "Bagaimana pun juga kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa kaum muda toh lebih banyak datang ke Golkar," katanya.

Hanya saja Golkar harus mampu menjawab tantangan bahwa pemuda sekarang semakin kritis. Golkar harus mampu menerjemahkan bahasa mereka. Saya bantah kalau dibilang PDI adalah partainya kaum muda. Bahwa mereka adalah asset masa depan, tak seorang membantah karena

Digitized by Google

"pada kelompok inilah kita mempercayakan kesinambungan cita-cita perjuangan bangsa."

Agar bisa menjawab dan mengatur ini semua secara pas, — dia sebagaimana Kana — menganjurkan dialog. "Golkar harus sering membuka forum dialog untuk mencari titik temu dengan kaum muda tentang berbagai persoalan. Hanya saja dialog semacam ini tidak boleh hanya digencarkan pada masa menjelang pemilu saja," katanya.

Kemenangan dalam pemilu, dari sisi organisasi, merupakan puncak dari semua kegiatan konsolidasi Golkar sebelum ini. Dari pemikiran seperti itu, para pengamat politik mungkin akan mengatakan, "semua perjuangan Golkar sia-sia, bila tidak terwujud dalam kemenangan pesta demokrasi."

Sekarang kemenangan telah diraih. Pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab adalah, "Bagaimana setelah menang?" Seperti telah disimpulkan Kana, jawaban yang paling kena mungkin adalah kemenangan dalam pemilu baru lalu bagi Golkar adalah tanggungjawab yang begitu besar untuk berkarya demi bangsa dan pembangunan. Dengan demikian kemenangan yang diraih itu, tentu bukan untuk masa kini tapi demi masa depan.

Prof.Dr. Mulyono Trastotenoyo

Selain mengandalkan program, kelangsungan kemenangan Golkar di masa depan adalah kepercayaan yang diberikan para pendukungnya. Salah satu segment pemilih yang menjadi perhatian Golkar tentu saja adalah kaum muda. Dalam pemilu baru lalu, diperkirakan 12 juta pemilih baru muncul ke pentas. Untuk pemilu mendatang, 1992, jumlah mereka mungkin bisa mencapai 20 juta-an.

Untuk merangkul simpati kaum muda, Kana menganjurkan pendidikan politik yang memperluas wawasan berpikir. "Ini harus menjadi perhatian serius Golkar. Rakyat tidak bisa terus-menerus dididik dengan hura-hura."

Untuk itu dia mengingatkan, "Bila Golkar tidak bisa menghindari cara-cara pendidikan politik seperti ini, maka wawasan dan kematangan dalam berpolitik tidak bisa tumbuh di kalangan kader."

Simpati kaum muda terhadap Golkar, kendati di mata rektor UNDIP Mulyono tetap tinggi, namun dia mengingatkan hal serupa seperti yang dilambungkan Kana. Golkar memang boleh berbangga karena perolehan suara yang naik 10 persen dari pemilu 1982. Tapi Mulyono mengungkit sebuah gejala, bahwa ada rasa sinisme yang kian tinggi di kalangan orang muda terhadap ketiga kontes-

Pers Gugah Kesadaran Politik Masyarakat

Meningkatkan Partisipasi Dalam Kampanye

Pemilihan umum 1987 telah usai. Proses pelaksanaan pemilu mulai dari kampanye sampai dengan saat pencoblosan 23 April 1987, relatif berlangsung tertib, aman, lancar tanpa dibumbui praktek-praktek kebrutalan massa. Ini semua mencerminkan kesadaran masyarakat akan berpolitik sudah semakin mantap, masyarakat telah mampu mewujudkan pesta demokrasi dengan cara-cara wajar sehingga tercipta rasa aman pada setiap warga negara Indonesia.

Namun, dibalik keberhasilan pelaksanan kampanye sampai dengan Pemilu 1987, ada pihak-pihak yang perlu mendapat acungan ibu jari karena keberhasilannya menggiring warga masyarakat memadati setiap ajang kampanye bagi ketiga organisasi peserta pemilu (OPP). Dan acungan tersebut selayaknya ditujukan kepada peranan pers (mass media) yang dengan tekun mengikuti dan memberitakan setiap peristiwa kampanye dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap OPP yang menjadi favoritnya semakin besar memenangkan pemilu 1987.

Dua orang tokoh pers, masing-masing Jakob Oetama, pemimpin redaksi Kompas dan Syamsul Basri, pemimpin redaksi Suara Karya, berhasil ditemui Media Karya secara terpisah di ruang kerja masing-masing. Kesimpulan yang dapat ditarik dari keduanya, bahwa pers telah mampu berperan membangkitkan gairah masyarakat untuk turut aktif mensukseskan jalannya pemilu yang didahului kampanye oleh masing-masing OPP.

Media massa menurut Jakob Oetama telah dapat memberi warna, membangun citra pada benak orang selama berlangsungnya kampanye. Begitu pula media massa telah dapat mengangkat dan memberi bobot pada isyu-isyu penting, mengangkat begitu banyak permasalahan dalam setiap kampanye sehingga dapat membuat tertariknya orang untuk menentukan pilihannya, partai mana yang cocok dengan aspirasinya atau partai mana yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Lebih daripada itu, menurut Syamsul Basri, pers telah mampu meningkatkan hasrat masyarakat untuk ikut mensukseskan pemilu dibanding pemilu tahun-tahun sebelumnya. Terbukti dengan sedikitnya suara-suara yang menyatakan sebagai golongan putih (golput) baik secara terbuka maupun terselubung. Bahkan, yang tidak kalah pentingnya, pers telah mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berpolitik. Namun untuk mengetahui apakah pers telah mampu merubah sikap politik pada masyarakat, ini perlu penelitian dan pemikiran lebih mendalam lagi.

Terbatas

Lebih lanjut Jakob Oetama mengemukakan teori bahwa pers dalam masa kampanye mempunyai peranan terbatas hanya pada pemberian informasi, menyerap aspirasi, menciptakan iklim dan memberi arah. Dari penelitian yang dilakukan para ahli ilmu komunikasi, diperoleh kesimpulan bahwa orang akan menentukan pilihannya dalam pemilu banyak ditentukan oleh berbagai faktor. Dan faktor yang paling menentukan agar seseorang dapat menjatuhkan pilihannya kepada salah satu OPP, adalah melalui komunikasi tatap muka (face to face communication).

Dijelaskan pula bahwa dulu dalam

Digitized by Google

tan, khususnya terhadap Golkar.

Selain solidaritas terhadap yang lemah, seperti yang diamati oleh tokoh kampus ini, kaum muda sekarang memang makin kritis. Kritis dan sinisme mereka, tentu saja mengarah pada masalah-masalah kualitatif, seperti pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mutu pendidikan, pemerataan, keadilan dan demokrasi dan sebagainya.

Menurut Mulyono, dalam pemilu lalu terkesan seolah-olah kaum muda gencar mempertanyakan kesungguhan Golkar memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. "Rakyat nampaknya mulai ngotot dalam hal ini. Hanya sayang, dalam kampanye baru lalu, tema ini sangat jarang disinggung Golkar," ujarnya.

Memahami perilaku politik kaum muda, mungkin menarik apa yang disinggung Prof Kusnadi. Rektor UGM ini melihat bahwa kaum muda kita mulai jenuh terhadap pendekatan-pendekatan yang terlalu birokratis. Golkar sebagai partai yang memerintah, tentu sangat terkena kecenderungan itu. Anak muda sekarang menurutnya lebih senang yang praktis.

Prof.Dr. Kusnadi Hardja Soemantri

Dia memberi contoh, pendekatan yang terlalu birokratis terlihat dari alur pembinaan kaum muda sekarang. "Kalau orang hanya bisa dinyatakan Golkar lewat KNPI atau AMPI, ini yang membuat kebosanan itu."

Membutuhkan orang berkualitas

Untuk menerobos keengganan pemuda mengidentifikasi diri dengan Golkar, maka perlu diperbanyak saluran ke arah itu. "Terus terang ada kecenderungan tidak senang di kalangan anak muda, terutama mahasiswa kalau saluran mereka ke Golkar hanya dimonopoli oleh KNPI atau AMPI."

AMPI dan KNPI menurutnya menjadi tidak menarik karena terlalu menekankan aspek formal, seperti keharusan memakai jacket, badge dan pet serta slogan-slogan yang terasa mulai membosankan. Apalagi kedua organisasi pemuda ini nampaknya mulai terjerumus pada formalitas protokoler, satu kebiasaan yang mulai dijauhi kaum muda.

Karena itu bagi orang nomor satu UGM ini, apresiasi kaum muda terhadap Golkar harus disalurkan lewat banyak jalur, seperti pramuka, pencinta alam, kelompok diskusi dan sebagainya. Sejalan dengan ini tentu menarik apa yang dianjurkan Mulyono, agar Golkar memperbanyak forum-forum cerdik cendekia." "Untuk menjadi Golkar yang penting bagi generasi muda bukan atribut Golkar, tapi bagaimana kita membawa mereka kepada pemikiran Golkar," kata Kusnadi.

Prakarsa Sekjen Golkar Sarwono yang duduk bersila bersama masyarakat di Karet Tengsin, Jakarta, dalam kam-

---

pemilu 1955, ada sejumlah koran independen mencoba untuk condong kepada PSI. Namun apa hasilnya, partai tersebut tetap sebagai partai gurem, tidak cukup mendapat tempat di hati masyarakat. Sebaliknya, empat besar tampil pada waktu itu, masing-masing PNI, NU, Masyumi dan PKI. Ini membuktikan partai tersebut tidak akan menjadi lebih besar karena didukung oleh media massa. "Disini, pada saat-saat terakhir, siapa yang mampu meyakinkan calon pemilih, dan hal itu dapat dilakukan melalui komunikasi tatap muka," tegasnya.

Koran atau media massa menurut Jakob Oetama hanya meliputi apa yang terjadi selama berlangsungnya kampanye. Sedang peranan pers dalam masa pasca pemilu sama juga dengan OPP, yaitu pers secara kritis menyaring tentang persoalan apa yang terungkap, arus perubahan apa yang nampak. Ini semua harus dianalisa, dijadikan masukan, baik masukan untuk kebijakan pokok, maupun untuk persiapan bagaimana menghadapi pemilu yang akan datang. Kendati dalam hal menghadapi pemilu yang akan datang, masih harus ditentukan oleh perkembangan yang terjadi selama lima tahun.

Fungsi lain yang tidak lepas dari pengamatan Jakob Oetama, adalah fungsi image building. Masalahnya sekarang image building itu bagaimana? Irigasi, sandang pangan yang cukup, itu harus dijadikan image building, dan ini perlu melalui proses yang bagaimana? Pers kiranya dapat berperan membantu menciptakan image tersebut melalui interaksi dengan organisasi politik yang ada.

Bebas Bertanggungjawab

Di luar negeri pers itu dapat memberikan tekanan kepada pemerintah. Tapi kalau di Indonesia apakah hal itu mungkin atau tidak? Jakob Oetama melihat untuk menciptakan hal tersebut yang pertama harus dilihat adalah kondisi, dimana dalam kondisi tersebut pertama harus tersedia cukup kebebasan bagi pers, sehingga pers dapat menyuarakan tentang apa yang diyakininya. Dan yang kedua, pers harus mempunyai kemampuan bahwa kesetiaannya kepada persepsi yang dipunyai dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai. Tidak ngawur. Dan ketiga, kendati pers itu mempunyai kebebasan, tapi bebas disini dalam artian bebas yang bertanggungjawab. Apabila kesemuanya itu dapat berkembang sebagaimana mestinya maka pers itu akan dapat berkembang secara memadai.

Dan dalam era orde baru ini, pers dituntut untuk semakin profesional, yaitu menitik-beratkan kepada pengembangan mutu pemberitaannya. Pada massa mengambang (floating mass) dalam perkembangan masyarakat, pers semakin cenderung untuk independent. Koran menyajikan semuanya, yaitu berita yang dianggap mempunyai nilai berita dan pantas untuk diberitakan serta menunjang ke arah pembangunan. Bila koran dalam pemberitaannya mempunyai ikatan politis tertentu, itu merupakan langkah mundur dan sulit untuk berkembang, karena mereka berlawanan dengan arus perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Masih dalam pembicaraan peranan pers selama kampanye dan pemilu, Syamsul Basri secara terpisah menggaris-bawahi bahwa pers mempunyai peranan besar mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu 1987. Sehingga tidak ada lagi kelompok yang menganjurkan masyarakat untuk tidak ikut pemilu. "Pers telah mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak memilih dalam kehidupan demokrasi Pancasila. Ini dapat dilihat dari kenyataan dimana generasi muda yang semula dikawatirkan akan menjadi kelompok yang apatis ternyata mereka dengan penuh kesadaran melakukan coblosan," ujarnya.

Mungkin saja motivasi yang melandasi mereka ikut serta meramaikan kampanye tidak semata-mata untuk politik, tapi sekedar berhura-hura, namun hal itu sudah merupakan suatu hal yang baik. Dan ini tentunya tidak terlepas dari peranan pers yang telah mengajak masyarakat mensukseskan pemilu, karena hal itu merupakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan segenap warga negara, dan erat kaitannya dengan kesadaran politik masyarakat.

Menurut Syamsul Basri, kalau dilihat

Digitized by Google

panye baru lalu, merupakan contoh pendekatan yang dianjurkan Kusnadi maupun Mulyono. "Hanya pendekatan seperti itu harus berkesinambungan, jangan hanya hangat di musim kampanye saja," pinta keduanya.

Namun diakui Kusnadi, cara kampanye yang nampak sederhana dan gampang ini, membutuhkan orang-orang berkualitas yang memiliki kapasitas intelektual yang tidak diragukan lagi.

Sedangkan Dr Retmono, rektor IKIP Negeri Semarang, bahwa untuk menarik simpati kaum muda, Golkar harus menjamin kepastian tentang masa depan yang cerah. "Praktek janji muluk dalam kampanye yang tidak tahu kapan realisasinya, merupakan contoh buruk yang menjauhkan orang muda dari organisasi peserta pemilu," katanya. Atau dengan kata lain, untuk membangkitkan kecintaan orang muda kepada Golkar, maka harus dijamin kepastian kualitas hidup yang lebih baik di masa depan, serta idealisme yang harus ditumbuhkan dengan cara-cara kreatif.

"Bila Golkar mampu menyajikan dua syarat ini secara baik saya yakin Golkar akan tetap menjadi pilihan orang muda sampai kapanpun," katanya.

Kalau ada yang memproklamirkan bahwa kaum muda sekarang menjadi pemilik salah satu OPP, Retmono melihat itu lebih sebagai pernyataan politik, ketimbang faktual. Betul bahwa dalam musim kampanye dulu kaum muda seolah-olah tumpah ruah di jalan-jalan mengikuti setiap kampanye yang disajikan oleh ketiga OPP, sehingga ada OPP yang serta merta mengklaim pemuda sebagai miliknya.

Dr. Retmono

Namun setelah hasil pemilu diumumkan, ternyata kaum muda sebagian besar masih menyalurkan aspirasi politiknya lewat Golkar. "Ini adalah kenyataan yang menggembirakan sekaligus menantang."

Berbicara tentang segmen orang muda dalam masyarakat, tentu tidak sempurna bila tidak menyorot kehidupan mahasiswa dan pelajar di sekolah dan kampus-kampus. Dalam kampanye baru lalu, penataan dan pemantapan kehidupan politik kampus, mulai ramai dibicarakan orang maupun tokoh-tokoh pemikir.

Pembicaraan mereka umumnya menuding satu hal pokok dalam satu dasawarsa terakhir yaitu apa yang dikenal dengan konsep NKK dan BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Adalah Prof Dr Mukti Ali, bekas Menteri Agama yang kini menjadi Rektor IAIN Yogyakarta yang meminta agar konsep NKK dan BKK ditinjau kembali sehingga

---

dari kenyataan itu, mungkin muncul pertanyaan apakah sudah cukup proporsional atau belum peranan pers dalam mensukseskan pemilu. Jawabannya adalah ya. Artinya pers sudah berhasil ikut membangkitkan kegairahan masyarakat untuk berpolitik. Cuma masih perlu ditingkatkan lagi bagi kalangan generasi mudanya, agar keikutsertaan dalam berpolitik tidak sekedar pencerminan daripada sikap berhura-hura belaka, tapi betul-betul dilandasi sikap politik yang lebih mantap.

"Dari segi ini pers nampaknya belum berperan. Bahwa pers telah berhasil meningkatkan kegairahan berpolitik di kalangan masyarakat khususnya generasi mudanya harus diakui ada, tapi perlu ditambah lagi dengan peranannya memberi isi kepada kesadaran berpolitik di kalangan masyarakat, sehingga pilihan politik itu jelas arahnya," tutur Syamsul Basri lebih terinci.

Tergantung Jurkam

Di bagian lain Syamsul Basri mengemukakan penilaian sejauh mana keterkaitan koran dengan salah satu OPP, apakah masih dipandang perlu atau tidak. Syamsul Basri mengkaji ulang apa yang disebutkan dengan fungsi pokok pers. Yaitu memberikan informasi yang obyektif dan koreksi yang positif untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam komunikasi. Kalau ditinjau dari segi ini, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pers yang dikaitkan secara langsung dengan salah satu organisasi politik, karena sekalipun suatu pers itu berafiliasi dengan salah satu Orpol, dengan bertitik tolak kepada GBHN yang sudah kita sepakati bersama maka bagaimanapun pers harus mampu memberikan informasi yang seobyektif mungkin tentang fakta kegiatan dari setiap Orpol.

Dalam kaitan masa kampanye yang lalu, soal bagaimana OPP itu mendapat tempat yang banyak dalam koran pemberitaan, itu sangat tergantung dari bagaimana para jurkamnya menampilkan program-programnya. Menarik atau tidak, cukup baru atau tidak. Lebih-lebih bagi masyarakat kita yang masih berpikiran tradisional faktor bagaimana tokoh yang ditampilkan juga sangat menentukan untuk dapat menarik minat masyarakat mengikuti kampanye OPP yang bersangkutan.

Pers juga akan menilai, dari sekian banyak tokoh yang ditampilkan mana yang berbobot dan berisi materi kampanyenya. Karena pemberitaan dalam koran sangat tergantung bagaimana tokohnya, cukup berbobot atau tidak, menarik bagi masyarakat atau tidak begitu pula bagaimana tema kampanye.

"Ini semua yang menjadi tolok ukur bagi pers untuk menjadikan peristiwa kampanye dapat diangkat sebagai berita. Kalau tokohnya tidak cukup menarik, begitu pula materi atau tema yang dibawakan tidak menarik masyarakat, kenapa mesti diberitakan?" ujar Syamsul Basri.

Mewarnai Kehidupan Berpolitik

Mengenai apa yang bisa dilakukan pers dalam upaya memberi pewarnaan dalam kehidupan berpolitik masyarakat, dilihatnya sudah semakin nampak khususnya bagi generasi mudanya. Generasi muda sudah mulai berantisipasi dalam kancah politik selama masa kampanye. Turun ke jalan dengan menyandang simbol-simbol OPP yang diminati, merupakan bentuk kesadaran berpolitik walaupun masih perlu dipertanyakan apakah mereka sadar betul tentang politik itu sendiri.

Kendati upaya pendidikan politik sangat banyak dituntut dari Orpol, namun pers kiranya dapat turut berperan secara aktif menggarapnya bersama-sama pemerintah. Pihak-pihak ini harus mampu mengembangkan potensi generasi muda yang sudah mulai terbuka terhadap kehidupan berpolitik itu. Sebab mereka itu calon-calon kader yang potensial dan mempunyai keberhasilan untuk menampikan pribadi masing-masing.

Pers bisa menyelenggarakan semacam forum diskusi melalui kerjasama dengan ketiga kekuatan sosial politik maupun teknokrat politik, untuk lebih memompa kesadaran generasi muda itu akan arti penting berpolitik. Pers melalui research and polling dapat memberikan masukan bagaimana kampanye itu bisa dilaksanaan dengan baik, serta memberi arti bagi pembentukan kehidupan politik nantinya yang lebih baik. □. **Subandrio, Badrul M, Nunung.**

Digitized by Google

memungkinkan orang muda khususnya mahasiswa bisa berperan lebih banyak dalam politik praktis.

Banyak suara pro dan kontra dalam masalah yang satu ini. Ada yang setuju NKK dan BKK dihapus saja karena mematikan kreativitas dan sense of belonging para mahasiswa terhadap persoalan-persoalan masyarakat di sekitarnya. Tapi ada yang menolak kalau NKK dan BKK dinilai sebagai biang kelesuan aktivitas atau lebih tepat partisipasi politik mahasiswa?

Tidak berkomentar banyak, Kana agaknya mengambil alur pemikiran sebagai seorang bijaksana. "Soal NKK dan BKK, memang harus dilihat dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat kita, terutama dunia akademis dewasa ini. Kita harus mempertahankan mana yang masih relevan dan mana yang tidak lagi dan harus ditanggalkan."

Kearifan ini perlu, agar jangan sampai istilah normalisasi ditafsir sebagai pemandulan kreativitas mahasiswa, kelompok pemuda yang menjadi andalan bangsa di masa depan.

Agak detil adalah apa yang dikemukakan Prof Mulyono. Konsep yang dulu ditentang mati-matian itu, menurutnya kini menjelma menjadi wawasan almamater. Kreativitas seorang mahasiswa menurutnya tidak boleh dihitung dengan kadar keterlibatannya dalam politik praktis, tapi bagaimana dia melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam kampus.

Nah bila mahasiswa yang memang mempunyai bakat dan kemauan untuk berpolitik praktis, silahkan menggunakan wadah yang ada di luar kampus, yaitu ketiga OPP yang tersedia dan sah menurut undang-undang. Jadi sungguh naif kalau sekarang ini NKK dan BKK dianggap menghambat perkembangan seorang mahasiswa. Berkembang atau tidaknya seorang mahasiswa, sangat tergantung pada pribadi mahasiswa itu sendiri. Dalam usia mahasiswa, kemajuan mereka akhirnya sangat ditentukan oleh integritas individu terhadap dunia ilmu dan politik. Keduanya bisa bekembang sama baik, karena sarana dan peluang yang disiapkan pun sama baiknya.

Bukan Politik Praktis

Lain dengan Kusnadi. Bekas orang penting pada kantor KLH ini menyoroti NKK dan BKK dari dua sisi, yaitu keluar dan kedalam. Bila ke dalam peranan dosen dan almamater harus lebih besar, sedangkan keluar peranan mahasiswa yang justru diperbesar. Jadi pelaksanaan BKK itu secara keluar, harus diberi porsi yang lebih besar kepada mahasiswa.

Yang mungkin menarik untuk ditelaah, adalah kenyataan

Yang Muda Angkat Bicara

Ir Daryatmo Mardiyanto, 36

Pemuda asal Solo yang pernah menjadi Ketua Dewan Mahasiswa ITB periode 1975-1976 ini, aktif berkampanye untuk Golkar di daerah pemilihannya, Jawa Tengah. Menurutnya, penyaluran aspirasi politiknya lewat Golkar, bukan spekulasi, tapi keputusan matang lewat perenungan panjang dan dalam.

"Setelah merenung-renung, pilihan saya jatuh pada Golkar, dan saya berkampanye untuk pilihan itu, kendati saya yakin saya bukan calon jadi," katanya. Yang membuatnya tertarik berkampanye, karena di dalam Golkar dilihatnya ada keanekaragaman yang memungkinkan dialog untuk mempertajam wawasan.

Lantas bagaimana mengajak kaum muda berpadu dalam cita-cita Golkar? Menurutnya ada beberapa cara. Yang pertama mungkin menumbuhkan visi ke-Golkaran. Untuk ini bisa disalurkan lewat FKPPI, Pemuda Pancasila, AMPI dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Dalam proses pengenalan dan pendalaman visi ini akan terlihat faktor-faktor positif dan negatif. Yang positif dikembangkan, sedangkan yang negatif dihilangkan.

Pada saatnya nanti akan dituntut dari pemuda spesialisasi yang makin tinggi sesuai dengan perkembangan jaman. Tetapi harus disadari spesialisasi ini tidak boleh mengingkari sendi-sendi landasan yang telah didirikan oleh pelopor-pelopor bangsa ini.

Kita tidak boleh naif bahwa pengkelompokan akan menimbulkan keretakan-keretakan. Kita melakukannya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan itu. Proses-proses alkulurasi, pembauran-pembauran, butuh waktu panjang dan itu justru bisa dimulai oleh generasi baru, dengan silang tempat tinggal, sekolah, transmigrasi dan sebagainya.

Jadi perhatian terhadap kaum muda ini tidak boleh dipandang dari jangka pendek, dan jangan ikut-ikutan mencap, mengurus anak muda membosankan. Untuk menghadapi soal-soal tadi, kita harus intim dengan persoalan-persoalan mereka.

Mengamati sikap kaum muda dalam menyongsong pemilu yang baru lalu, cukup menggembirakan, bisa betapa kegairahan kaum muda besar sekali, namun ada baiknya bila kegairahan itu bukanlah kegairahan sesaat, tapi yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan akomodasi dari semangat idialisme mereka dalam berbagai bidang.

Kemenangan Golkar yang hampir tujuh puluh lima persen menurutnya berarti besarnya harapan yang diletakkan oleh pemilih-pemlihnya.

Pada saat situasi ekonomi Indonesia sulit seperti sekarang Golkar harus berada paling depan, untuk merealisir harapan-harapan pemilih. Dan saya yakin itu.

Potensi itu ada pada kaum muda Golkar. Tinggal bagaimana Golkar lebih meningkatkan perhatiannya pada kaum muda dengan sedikit melemaskan birokrasi yang membatasi munculnya inovasi. Kaum muda kurang suka pada hal-hal yang terlalu birokratis. Mereka butuh keterbukaan, sebab dengan demikian akan terjadi dialog yang akrab.

Bila hal ini tidak dilakukan adalah wajar bila orang muda mencari pengakuan dari tempat lain. Ini adalah gejala psikologi umum yang memang dimiliki oleh anak-anak muda.

Digitized by Google

bahwa sejak tahun 1966, hampir tidak ada lagi tokoh masyarakat yang mencuat dari kalangan mahasiswa. Tetapi apakah ini merupakan dosa NKK dan BKK?

Menurut Kusnadi, orang mengeluh seolah masyarakat kita ketiadaan lagi tokoh dari kalangan kampus, karena persepsi mereka tentang tokoh adalah orang yang mampu menggerakkan demonstrasi dan keonaran. Sekarang di tengah sepinya demonstrasi dan keonaran itu, "apakah sudah tepat kita menuding kampus mulai kering dengan kader-kader masyarakat."

Sangat banyak tamatan perguruan tinggi sekarang yang terjun ke dunia karya sebagai pegawai atau pengusaha, tanpa perlu publisitas. Mereka banyak yang sukses di tempat-tempat kerja dimana mereka diterima. Kusnadi menganut anggapan bahwa bila seseorang mempunyai prestasi akademis yang gemilang, pasti dia juga adalah tokoh yang bakal baik di masyarakat kelak. Karena itu, kampus memang harus dijadikan persemaian ilmiah, bukan politik praktis.

Pemimpin Mesir, Gamal Abdulnaser, adalah orang yang semasa belajar di perguruan tinggi tidak terkenal sama sekali. Tetapi dia kemudian menjadi pemimpin yang dikenal di seluruh dunia. Dia adalah produk lingkungan perguruan tinggi yang memisahkan secara jelas peranan ilmiah kampus dan politik praktis mahasiswa yang harus diadakan di luar kampus.

Untuk konsekuen dengan keharusan kampus bukan arena politik praktis, Kusnadi mengungkapkan selama kampanye tempo hari, tidak ada jurkam OPP manapun yang diperbolehkan masuk berkampanye di kampus, "walaupun saya sendiri orang Golkar." "Kalau kampus jadi ajang politik praktis, akan jadi ngaco," ujarnya.

Jadi persoalan sekarang adalah bila Golkar ingin memenangkan simpati kaum muda, dan harus, maka tanganilah mereka sesuai dengan persepsi kaum muda yang berkembang dalam kurun tertentu. "Jangan sekali-kali memaksakan persepsi yang terasa asing bagi mereka," ujarnya meminta. Yang penting kaum muda tidak suka segala sesuatu yang serba formal dan birokratis. Mereka butuh pendekatan terbuka, bukan pendekatan penguasa. "Golkar harus mulai menyadari itu setelah kemenangan yang kesekian kalinya dalam pemilu kali ini," katanya.

Sedangkan bagi Retmono, NKK dan BKK tidak menjadi persoalan di lingkungan IKIP yang rata-rata mahasiswanya adalah calon guru. Konsisten dengan keharusan kampus ti-

Farida Samsi Chadaria, SH, 28

Wakil Sekjen DHN.45 ini adalah calon anggota DPR RI dari Golkar untuk daerah pemilihan Jateng.

Tidak benar, Golkar dianggap kurang mampu merekrut kaum muda seperti yang disinggung oleh banyak orang. Pendukung kegiatan Golkar di Klaten selama berlangsungnya kampanye adalah kaum muda. "Saya tidak melihat kebenaran dari ungkapan itu," ujarnya.

Kaum muda selalu meninggikan sesuatu yang baru. Mereka menginginkan kejutan atau lonjakan-lonjakan kreativitas, mereka butuh wadah buat dialog.

Kaum muda selalu ingin lebih menonjol dan ingin membela yang lemah. Kesadaran itu bukan kesadaran menentukan aspirasi politiknya, tapi bisa disebut sekedar coba-coba. Namun demikian Golkar harus memahami kecenderungan ini agar menemukan resep tepat dalam pembinaan politik di masa depan nanti. Kaum muda tak begitu suka hal-hal yang terlalu bertele-tele, birokratis. Mereka butuh dialog.

Untuk Golkar hal semacam ini tidak boleh dianggap sederhana. Coba-coba pada OPP tertentu lama-kelamaan bisa menjadi kesadaran politik. Untuk itulah Golkar dituntut lebih peka terhadap keinginan kaum muda. Memang Golkar dituntut lebih peka terhadap keinginan kaum muda. Golkar telah punya banyak perangkat untuk menampung aspirasi kaum muda, seperti AMPI, FKPPI, tapi semuanya itu kan musti ada proses, nah kepekaan dalam menyerap aspirasi kaum muda itu dibutuhkan waktu, baik secara formal maupun tidak formal. Untuk menyalurkan uneg-uneg misalnya harus ada komunikasi secara terus menerus, bukan yang bersifat sesaat, seperti karena menjelang pemilu. Nah jadikanlah dialog dengan kaum muda sebagai kebutuhan. Ini bukan hanya berlaku bagi AMPI tapi juga bagi Golkar.

Kaum muda adalah potensi besar yang tidak boleh diabaikan, begitu Golkar mengabaikan kaum muda maka kita khawatir, di masa-masa mendatang Golkar kesulitan. Padahal secara riil kaum muda adalah kaum masa depan. Di tangan mereka segala soal kehidupan Bangsa akan diletakkan. Golkar kekuatan sospol yang terbesar, semestinya segera meningkatkan porsi dalam memberikan tempat berkreasinya kaum muda.

Bagai AMPI yang merupakan wadahnya aktivitas kaum muda Golkar, harus mewujudkan rasa kebersamaan mengabdi untuk kepentingan organisasi tanpa pamrih pribadi yang berlebihan sehingga lupa pada kewajiban organisasi.

Adi masa yang akan datang Golkar harus lebih fleksibel dan khusus kepada kaum muda hendaknya diberi kesempatan untuk bertemu berdialog supaya kesenjangan tak terjadi seperti yang sekarang agak menggejala.

Cahyo Kumolo, SH, 28

Wakil Ketua AMPI TK I Jateng ini berpendapat, kemenangan Golkar bukan untuk mencari menang menangan. Artinya sebagian besar rakyat pemilih masih menghendaki Golkar. Hal itu juga didorong oleh kerja keras Golkar jauh-jauh sebelum pelaksanaan Pemilu, seperti Karakterdes, Kader Fungsional, dan pola ekasapta, kemenangan Golkar adalah hasil kerja maximal dari segenap jajaran Golkar di seluruh tanah air.

Kemenangan Golkar yang tujuh puluh dua persen ini diharapkan oleh semua pihak tapi, Golkar perlu mawas diri.

Setelah kemenangan ini, sektor informal pembinaan generasi muda harus mendapat prioritas yang lebih luas, sehingga kemenangan Golkar tidak bisa dikesankan karena pegawai negeri. Kemenangan sekarang jangan membuat kita terlalu bergembira dan terlena, karena tantangan yang menanti semakin berat.

Digitized by Google

dak menjadi ajang politik praktis, dalam musim kampanye tidak ada satupun orang partai maupun Golkar yang masuk kampus.

NKK atau BKK adalah konsep yang didasari oleh kemauan baik untuk memperbaiki dan mempersiapkan pemuda untuk kehidupan yang lebih cemerlang di masa depan. "Saya tidak percaya kalau para perancang NKK dan BKK sengaja merusak masa depan orang muda," ujarnya.

Untuk itu konsep ini pun sifatnya fleksibel. Artinya bisa diperbaiki dimana perlu, dan kalau memang tidak relevan lagi tentu tidak ada guna mempertahankannya. Ternyata setelah berjalan sekian lama, NKK dan BKK tidak mengurangi integritas kampus maupun mahasiswa terhadap dunia ilmu maupun lingkungan.

Membina atau menumbuhkan citra ke-Golkaran di kalangan mahasiswa IKIP, tidak terlalu sulit seperti di lingkungan kampus lain atau universitas. Di IKIP mayoritas mahasiswanya sudah mengetahui bahwa mereka adalah calon guru yang otomatis akan menjadi anggota KORPRI. "Mereka sadar betul hal itu. Oleh karena itu dalam masa kampanye baru lalu, kampus tetap penuh mahasiswa bila bukan Golkar yang kampanye. Tapi bila giliran Golkar, kampus saya menjadi sepi," ujarnya.

Golkar memang telah memenangkan suara rakyat untuk keempat kali berturut-turut. Kemenangan ini tidak dianggap Golkar bahwa organisasi ini telah tampil tanpa cacat. Golkar yakin masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam kurun lima tahun mendatang. Kemenangan kali ini, tidak diproklamirkan oleh Golkar bahwa sekarang saatnya menjadi kampiun demokrasi dan pembangunan.

Melihat berbagai tantangan kualitatif dalam masyarakat yang harus disembuhkan lewat pembangunan, kemenangan Golkar dalam pemilu baru lalu, tidak disambut Golkar dengan rasa puas diri. Golkar yakin bahwa kemenangan itu adalah kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh rakyat dengan pesan, "kemenangan dalam pemilu tidak dimaksudkan rakyat untuk mengukuhkan Golkar sebagai jagoan, tetapi agar Golkar tampil sebagai pahlawan dalam memecahkan masalah-masalah besar bangsa ini." Kemenangan baru lalu, walaupun adalah yang keempat kali berturut-turut, tetap dianggap Golkar sebagai awal dari perjuangan panjang mengemban hati nurani rakyat.☐ Rendy MS/TG

Dan untuk masa-masa yang akan datang Golkar harus memberikan jawaban bahwa pendidikan politik bukan nyanyi-nyanyi dan sorak-sorai tapi pendidikan politik adalah meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsanya, melalui perluasan wawasan berfikir. "Nyanyi-nyanyi itu kan hanya merupakan salah satu sarana saja untuk meraih masa tapi bukan identifikasi pendidikan politik," ujarnya.

Betapapun juga Golkar harus memberikan rangsangan pada Generasi muda, lewat konsep pendidikan politik yang bertanggungjawab. Pendidikan politik tidak bisa diberikan hanya sesaat ketika menjelang pemilu, tapi harus secara terus menerus. Untuk itu perlu diperlonggar media komunikasi yang tidak terlalu birokratis antar generasi dan antara Golkar dengan kaum muda.

Kenapa harus selalu kaum muda yang di utamakan? Karena filosofisnya begini: pemuda adalah pemimpin hari esok. Di tangan generasi mudalah nasib bangsa dan negara di pertaruhkan. Gejolak kaum muda jangan dikekang. Berilah dia kebebasan untuk kreatif. Tidak ada alternatif lain bagi Golkar kecuali memberikan kesempatan untuk kaum muda berprestasi dan berkarya.

Golkar punya kemampuan itu. Dengan demikian bisa tercapailah masyarakat masa depan yang profesional, bukan spesialisasi tapi generalisasi. Sektor informal pendidikan politik harus mendapat perhatian utama, untuk tidak menimbulkan kesenjangan pendapat dan persepsi. Juga kesempatan belajar baik yang menyangkut masalah ketrampilan atau ilmu pengetahuan harus diperluas. Sebab nonsens tanpa majunya pendidikan, masyarakat akan mampu menerima pembaharuan terlebih menerima konsep-konsep pendidikan politik.

DR. dr. Ingriany Gandha, 33

Nona kelahiran Ujung Pandang ini adalah pegawai negeri di RS Cipta Mangunkusumo. Dia juga Sekretaris IDI wilayah DKI.

Calon anggota DPR dari pemilihan Sulsel ini terbiasa aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Resiko dan konsekuensi, adalah hal yang logis bagi seorang kader Golkar. Di masa-masa yang akan datang wadah generasi muda seperti AMPI harus lebih menggiatkan diri lagi dalam meraih masa usia muda, khususnya di DKI, yang merupakan barometer secara politis, yang harus digarap sejak dini.

Di daerah-daerah Golkar tetap menonjolkan mayoritas generasi muda. Ciri-ciri ini patut kita akui. Generasi muda yang memilih Golkar justru kebanyakan kelompok terpelajar, atau mereka yang merasa tersentuh pembangunan. Karena itu harus kita akui, pemerataan pembangunan mulai membaik di desa-desa dan kota-kota besar. Indikasi ini sangat positif untuk kita jadikan perbandingan di masa-masa mendatang.

Untuk itu Golkar harus mengimbangkan antara program yang ditawarkan dengan kenyataannya. Sekali lagi di daerah-daerah Golkar tidak mengalami masalah, karena mereka bangga atas keberhasilan yang dicapai Golkar.

"Kalau dibilang bahwa di daerah masyarakat lebih sederhana dalam menentukan politiknya, saya rasa kurang tepat, karena yang saya lihat kenyataan di lapangan, bahwa mereka pilih Golkar bukan karena kharisma seseorang semata-mata, tapi kesadaran yang didukung oleh kenyataan yang ada, bahwa tidak bisa dipungkiri Golkar yang berhasil membawa setoran pembangunan."

"Memang bisa kita akui masyarakat di perkotaan lebih kritis, karena tantangannyapun jauh lebih besar. Kita jangan kaget di DKI misalnya, tidak akan bisa seperti di daerah."

Golkar sudah menjadi sedemikian besarnya. Tapi tantangan juga semakin besar. Untuk itu dalam setiap perjalanan kader-kader kita harus tanggap terhadap harapan dan aspirasi masyarakat, terutama kaum muda.

Secara kuantitas kaum muda telah ada di pihak Golkar "Masalah selanjutnya adalah soal kualitas tentunya," katanya.

Perangkat-perangkatnya kan sudah ada, antara lain AMPI dan banyak lagi yang lain. Ada dua cara yang bisa ditempuh: yang satu ditampung dalam wadah formal dan yang satu lagi dalam wadah informal, agar supaya Golkar dapat menampung aspirasi generasi muda secara utuh. Wadahnya itu sendiri harus mampu membaur dengan generasi muda dan terutama yang nonformal itu. Lalu dibutuhkan keterbukaan wadah-wadah itu sendiri, yang sampai sekarang kelihatan masih sulit.

Caranya barangkali kita harus mulai memberikan kepercayaan pada mereka secara individu, bahwa mereka punya kemampuan. Berikanlah kesempatan mereka untuk berkarya.☐ Rendy MS/TG

Digitized by Google

Musibah Beruntun Di Bulan Ramadhan

Sumbangan untuk meringankan korban bencana di Tarutung dan Sipoholan.

Belum ada tiga pekan, beberapa daerah di bilangan Sumatera terkena bencana musibah. Kota Tarutung dan Sipoholan menjelang akhir April lalu diguncang gempa. Tidak lama kemudian bencana itu merambat di daerah tetangganya Kelurahan Tanah Hitam, Koto Panjang, dan Sungai Andok, Kodya Padangpanjang, Sumatera Barat, yang berupa tanah longsor.

Musibah yang melanda beberapa daerah di bilangan Sumatera ini bagai gayung bersambut. Hampir bersamaan dengan terjadinya musibah di tiga desa di Sumatera Barat itu juga melanda beberapa desa di Kabupaten Ogan Komering Kodya Palembang Sumatera Selatan, berupa banjir.

Namun dalam serangkaian musibah yang melanda beberapa daerah pulau Sumatera, tiga desa di Padangpanjang, Sumatera Barat itu merupakan yang paling parah. Pasalnya bukan karena jumlah materi yang menjadi korban. Tetapi musibah yang berupa tanah longsor telah merenggut banyak korban manusia. Dari cacatan hingga hari Minggu 10 Mei lalu sudah tercatat 129 korban manusia. Dan hal ini belum termasuk mereka yang masih dirawat di rumah sakit.

Musibah di Sumatera Barat yang terjadi awal Mei lalu bukan untuk yang pertama kalinya. Enam puluh satu tahun lalu peristiwa yang sama juga melanda di daerah tersebut. Bahkan lebih besar dan lebih tragis dari peristiwa 1987 itu, sehingga 4000 jiwa manusia mati tertindih oleh longsoran tanah.

Korban manusia yang disebabkan oleh musibah itu tidak hanya terjadi di Sumatera Barat saja, di Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Kodya Palembang Sumatera selatan. Akibat banjir yang melanda di kecamatan tersebut 6 penduduk desa menjadi korban. Sedangkan kerugian yang disebabkan oleh ulah banjir itu diperkirakan mencapai Rp 160 juta.

Sedangkan dua kota Tarutung dan Sipoholan yang merupakan awal adanya musibah hingga di Sumatera April lalu terdapat dua korban manusia. Musibah yang melanda di dua kota telah menimbulkan banyak kerugian berupa harta benda yang ditaksirkan mencapai Rp 12,6 milyar. Kerugian yang disebabkan oleh banjir tersebut belum termasuk biaya untuk perbaikan dan rehabilitasi gedung pasar Harugguan, yang mengalami rusak berat. Dan gedung pasar yang baru diresmikan 1986 itu menelan biaya Rp 2,5 milyar. Menurut bupati Tapanuli Utara Gustav Sinaga, kerusakan gedung pasar itu dilukiskan sebagai "total lost"

Lebih lanjut Bupati itu memperinci kerugian yang diakibatkan oleh gempa tektonik yang berkekuatan 6,3 skala Riechter dan merupakan gempa terbesar selama di Sumatera Utara di antaranya; rumah dinas untuk SD Rp 268 juta, rumah dinas untuk kepala sekolah Rp 91 juta, bangunan berupa gedung SD Rp 170 juta, bangunan SD swasta Rp 115 juta, rumah petugas sekolah Rp 45 juta, bangunan gedung untuk SMTP Rp 220 juta, SMTA Rp 108 juta, gedung perkantoran pemerintah Rp 824 juta, jalan-jalan Rp 402 juta, tanggul Aek Sigeon Rp 500 juta, perbaikan instalasi listrik dan air minum Rp 275 juta, bangunan rumah penduduk Rp 3,7 milyar, pertokoan Rp 214 juta, rumah ibadah/gereja Rp 450 juta dan bangunan lainnya Rp 450 juta.

Untuk meringankan beban korban musibah bencana alam di beberapa daerah di bilangan Sumatera itu datang dari beberapa kalangan masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok. Dan tidak hanya itu saja beberapa koran di Jakarta maupun koran daerah juga membuka dompet amal untuk meringankan beban para korban.

Tidak itu saja, Presiden Soeharto ketika memimpin sidang Ekuin, Rabu 6 Mei lalu memberikan perhatian cukup besar atas terjadinya musibah yang melanda dua daerah tersebut. Bahkan Presiden Soeharto mengutus Team ke tempat terjadinya bencana untuk melihat dari dekat, mengadakan evaluasi, dan sekaligus supaya mendapat gambaran untuk memungkinkan bantuan apa yang akan dapat diberikan pada pemerintah.

DPP Golkar juga tidak ketinggalan, dengan terjadinya musibah yang melanda dua daerah yang bertetangga itu juga ikut membantu untuk meringankan para korban. Bustanil Arifin, selaku fungsionaris

Digitized by Google

Bencana di beberapa daerah Sumatera

Golkar saat meninjau lokasi terjadinya musibah di Sumatera Barat itu membawa Rp 228 juta untuk disumbangkan kepada para korban. Dari bantuan sebesar itu 50 juta berasal dari Jendral (Purn) Soeharto, selaku Ketua Dewan Pembina Golkar pusat sebesar Rp 50 juta.

Sumbangan yang diberikan Golkar untuk ikut meringankan korban musibah bencana tanah longsor dan gempa tektonik di Sumatera Sabtu, 9 Mei lalu mengirimkan 20 orang dokter, 3 dokter gigi dan 15 tenaga paramedis untuk diterjunkan secara langsung di tempat lokasi. Menurut rencana Team Kesehatan Karya Bhakti DPP Golkar itu akan berada 10 hari di tempat lokasi.

Mengenai musibah yang terjadi di Tarutung dan Sipoholan menurut menteri Pertambangan dan Energi Soebroto, tidak ada kaitannya dengan musibah tanah longsor di tiga desa, Kodya Padangpanjang, Sumatera Barat.

Menurut Soebroto, gempa yang terjadi di Tarutung akibat pergerakan kerak bumi sebagai akibat aliran isi petahan "Semangko" yang terdapat disepanjang pegunungan bukit barisan. Sementara itu musibah tanah longsor yang terjadi di Padangpanjang itu diakibatkan oleh hujan yang secara terus menerus turun di daerah tersebut. Sementara lapisan tanah yang terdapat di daerah terjadinya musibah itu mengandung kapur dan pasir.

Kronologi Peristiwa

Dua peristiwa dari musibah yang terjadi di dua daerah tersebut berlainan waktu dan harinya. Di Kota Tarutung dan Sipoholan gempa tektonik itu terjadi pada waktu tengah malam dan lagi lelap-lelapnya penduduk di dua kota tersebut sedang tidur nyenyak.

Pada pukul 02.13, Minggu 26 April lalu penduduk dari masyarakat tersebut dikejutkan dengan guncangan yang amat dahsyat dan kencang. Sehingga guncangan itu membuat bangunan dan kepanikan di kalangan penduduk Tarutung yang berjumlah 45.500 jiwa dan Sipoholan sekitar 18.800 jiwa, bergegas untuk keluar dari tempat tinggalnya.

Guncangan yang pertama dan terjadi tengah malam tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Gempa-gempa berikutnya terus berlanjut dan saling menyusul. Dari catatan Meteorologi dan Geofisika wilayah-I Medan seperti dikatakan kepala Subseksi, Yanuar guncangan yang melanda gempa tektonik di kota tersebut telah mencapai 150 guncangan gempa.

Merasakan guncangan yang tidak kunjung henti, kedua masyarakat dari kota tersebut mengungsi untuk mencari tempat yang aman. Mereka berbondong-bondong menyelamatkan jiwa dan hartanya, dengan menggunakan berbagai angkutan. Berbondongnya penduduk di kota tersebut secara besar-besaran, selain akibat terjadinya musibah dan akibat tersebarnya isyu yang cepat meluas terdengar oleh masyarakat, bahwa gunung Dolog (Martimbang) akan meletus.

Untuk meredam rasa kepanikan dari penduduk yang terkena musibah karena tersebarnya isyu, mobil dinas penerangan mencoba membujuk agar warga tetap tenang. Namun usaha yang dilakukan itu tidak membawa hasil, karena para penduduk sudah dipengaruhi oleh rasa takut. "Kita tinggal menunggu hari kiamat saja kalau mau bertahan," kata Kapolres, menirukan ungkapan rasa takut penduduk.

Tapi peristiwa yang mengerikan di tiga desa, Kodya Padangpanjang lain waktunya dengan yang terjadi di Sumatera Utara. Tiga desa yang terdapat di Kodya Padangpanjang, yang umumnya beragama Islam, yang terkena gempa akibat tanah longsor itu terjadi menjelang magrip dengan didahului oleh hujan kencang, saat masyarakat desa tersebut sedang menunggu datangnya magrip untuk bisa berbuka puasa.

Waktu yang ditunggu-tunggu belum tiba Senin 6 Mei lalu, pada pukul 17.00 bukit yang terdapat di bukit Tui, longsor. Sehingga musibah yang mendadak datangnya itu mengubur hidup-hidup sebagian dari warga desa Tanah Hitam, Kota Panjang, dan Sungai Adok. Dari pencarian jenasah yang tertimbun akibat tanah longsor hingga Minggu 10 Mei lalu telah mencapai 130 jiwa.

Hampir bersamaan waktunya, Rabu, 6 Mei lalu di Tasikmalaya juga diguncang gempa. Gempa yang mengguncang kota tersebut selama satu menit itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kejadian itu sempat membuat panik warga Tasikmalaya, Jawa Barat, karena masyarakat teringat peristiwa lima tahun lalu, ketika gunung Galunggung meletus dan memporak-porandakan perumahan, masjid, sarana pendidikan dan yang lain.

Dan belum dua pekan serentetan musibah yang melanda beberapa daerah pulau Sumatera, mulai dari Tarutung dan Sipoholan usai, kemudian pekan berikutnya musibah ini melanda daerah Bengkulu. Musibah banjir yang melanda daerah tersebut hingga 14 Mei lalu telah menewaskan 14 korban jiwa. Dari catatan yang dapat dihimpun, kerusakan yang diakibatkan banjir tersebut meliputi 500 hektar sawah, 39 lumbung padi, 750 ternak dan ratusan rumah penduduk rusak. Dan ditaksirkan kerugian akibat ulah air yang tidak diundang itu mencapai Rp 1,2 milyar.☐ BM

Digitized by Google

Presiden Soeharto Ajak Menutup Celah-celah Kebocoran dan Keborosan

Pidato Presiden Soeharto Pada Peringatan Nuzulul Qur'an

Al Qur'an diturunkan untuk mengadakan perubahan, pembaharuan dan pemuliaan dalam kehidupan

Presiden Soeharto dalam kesempatan memberikan sambutan pada malam peringatan Nuzulul Qur'an telah mengajak bangsa Indonesia untuk menutup celah-celah kebocoran dan keborosan baik di sektor negara, di sektor swasta, di kalangan masyarakat maupun perorangan, mengingat pada saat sekarang sebagai bangsa kita sedang berada dalam tahun-tahun yang penuh ujian sulit dan tantangan yang berat. Berikut ini Media Karya menurunkan selengkapnya pidato Presiden Soeharto pada Malam Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid Istiqlal, Kamis 14 Mei 1987.

Malam ini, dengan penuh rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berkumpul lagi di masjid Istiqlal ini untuk memperingati Nuzulul Qur'an.

Peristiwa yang kita peringati malam ini adalah peristiwa yang sangat penting, sebab ia menandai awal perkembangan agama kita. Ia menandai permulaan kehidupan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang membawa dan menyiarkan agama Islam. Nuzulul Qur'an adalah tonggak sejarah kelahiran zaman baru.

Tuhan menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa kitab suci ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat derajat manusia dari lembah kegelapan menuju kehidupan yang terang. Dan sejarah memang membuktikan bahwa dengan ajaran Al-Qur'an itu Nabi kita berhasil mengangkat kaumnya yang hidup dalam alam jahiliah ke suatu kehidupan yang beradab. Sesungguhnyalah, Al-Qur'an diturunkan untuk mengadakan perubahan, pembaharuan dan pemuliaan dalam kehidupan kita.

Karena itu setiap kali kita memperingati turunnya Kitab Suci kita ini, maka kita merenungkan sedalam-dalamnya: apakah kita sudah berusaha untuk membuat kehidupan kita dan kehidupan masyarakat kita bertambah mulia. Kehidupan kemuliaan ini tidak diukur dengan harta dan kedudukan, melainkan dengan iman dan taqwa, dengan akhlak dan budi pekerti, dengan tingkah laku dan amal perbuatan.

Sebagai penganut ajaran Al-Qur'an kita bertekad untuk selalu mengadakan perubahan dalam kehidupan kita, untuk selalu memajukan dan memuliakan kehidupan kita. Sebagai umat dan sebagai bangsa, kita pun telah bertekad memajukan umat dan bangsa kita. Kita mencita-citakan suatu kehidupan yang adil, makmur dan berakhlak. Inilah cita-cita pembangunan nasional bangsa kita, yang kita rumuskan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Kita tidak henti-hentinya bersyukur karena sebagai bangsa kita telah mengalami berbagai peningkatan dan kemajuan. Peningkatan dan kemajuan itu kita rasakan di berbagai bidang kehidupan. Kita, misalnya baru saja melangsungkan pemilihan umum. Pemilihan umum yang baru berlangsung itu membuktikan bahwa kehidupan politik bangsa kita sudah makin mantap. Kita sudah mampu melaksanakan pemilihan umum sebagai sarana utama kehidupan demokrasi secara berkala. Yang lebih menggembirakan lagi adalah, bahwa dari pemilihan umum yang satu ke pemilihan umum berikutnya terasa ada kedalaman suasana batin dan makin bermutu.

Peningkatan dan kemajuan itu menggembirakan dan membesarkan hati kita. Memang kita tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan. Sebab, seperti pernah saya katakan, demokrasi bukanlah suatu barang jadi. Kehidupan demokrasi adalah suatu proses. Yang penting adalah; proses kehidupan politik bangsa kita itu berjalan menuju masyarakat yang makin demokratis dan makin demokratis lagi.

Kemajuan besar yang benar-benar kita rasakan dalam pemilihan umum yang baru lalu adalah bahwa dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas kita telah dapat menghindarkan diri dari kerawanan pertentangan ideologis antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita.

Bagi umat Islam dan bagi semua umat beragama umumnya juga terbukti bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas itu sama sekali tidak menjadi penghambat kehidupan beragama. Syiar agama tidak menjadi kurang karenanya. Bahkan kita melihat kehidupan beragama justru menjadi lebih merata, lebih memasyarakat dan makin menyejukkan hati kita semua.

Telah sering saya katakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beragama. Karena itu kita memajukan dan meningkatkan kehidupan beragama bangsa kita itu. Sebab kita yakin bahwa kehidupan beragama yang mantap akan menjamin ketahanan mental bangsa kita dalam menghadapi berbagai perubahan yang akan terus kita alami dan bermacam-macam tantangan yang kita hadapi.

Masyarakat kita akan terus berubah. Perubahan-perubahan itu ada yang sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan kita, tetapi ada pula yang merupakan akibat samping yang tidak menjadi tujuan pembangunan kita.

Di bidang ekonomi, membangun bangsa yang besar dengan segala macam perbeda-

Digitized by Google

an dan tingkat kemampuan, bisa mengakibatkan kemajuan-kemajuan yang tidak merata bagi semua daerah, bagi semua bidang, bagi semua golongan maupun bagi semua orang. Ada yang dapat maju dengan pesat, ada yang dapat maju dengan sedang dan ada pula yang tertinggal di belakang.

Semuanya ini dapat menimbulkan kerawanan sosial yang harus kita tanggulangi dengan rasa tanggungjawab yang sebesar-besarnya. Jawaban pokoknya telah kita miliki, ialah Delapan Jalur Pemerataan yang kita tetapkan sejak beberapa tahun yang lalu. Tugas kita sekarang adalah melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan secara lebih nyata lagi pelaksanaan Delapan Jalur Pemerataan itu sehingga benar-benar terasa di tengah-tengah masyarakat kita.

Di samping kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah kita gariskan dalam melaksanakan Delapan Jalur Pemerataan ini, maka yang tidak kalah penting adalah sikap hidup kita. Dalam mengembangkan sikap hidup ini, maka ajaran agama mengenai keadilan, kemanusiaan, kepantasan dan akhlak memegang peranan yang sangat besar.

Adalah bertentangan dengan etika dan moral, jika di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh lapisan terbesar masyarakat kita, ada di antara kita yang berpunya justru hidup secara berlebih-lebihan. Padahal, Allah SWT tidak menghendaki segala sesuatu yang berlebih-lebihan.

Sebagai bangsa kita sedang berada dalam tahun-tahun yang penuh ujian sulit dan tantangan berat. Hal ini sekejap pun tidak boleh kita lupakan. Sekejap saja kita lengah, maka mungkin kita akan terjerumus ke dalam kesulitan besar yang tidak terbayangkan. Karena itu kita harus mengerahkan segala kekuatan kita sebagai bangsa dalam pergulatan menghadapi segala ujian dan tantangan berat tadi. Kita harus mengerahkan segenap daya dan dana yang ada pada bangsa kita untuk bersama-sama membangun masyarakat. Kita harus menutup segala celah-celah kebocoran dan keborosan baik di sektor negara, di sektor swasta, di kalangan masyarakat maupun perorangan.

Jika dalam bulan Puasa ini umat Islam berpuasa dan menahan segala nafsu, marilah kita isi puasa kita itu dengan sikap menahan diri dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk menahan diri dari sikap boros dan mewah. Dengan itu puasa kita akan terasa lebih bermakna bagi pembangunan masyarakat kita, yang juga kita anggap sebagai ibadah kemasyarakatan kita.

Hidup boros dan mewah mungkin saja bisa dipikul oleh beberapa orang yang berpunya, mungkin masih bisa dipikul oleh segolongan masyarakat yang berada; akan tetapi pasti tidak bisa ditanggung oleh bangsa yang sedang membangun seperti bangsa kita.

Al-Qur'an mengajarkan kepada kita agar mereka yang berpunya selalu memperhatikan dan membantu mereka yang tidak berpunya, sehingga mereka mampu keluar dari penderitaan. Al-Qur'an menetapkan kewajiban membayar zakat bagi mereka yang tidak berpunya. Karena itulah seorang muslim yang telah terkena kewajiban zakat akan membayar hak orang miskin yang ada dalam harta kekayaannya.

Makna yang dapat kita tanggap dari kewajiban membayar zakat ini adalah tugas keagamaan kita untuk memerangi kemiskinan dan kesetiakawanan sosial. Makna yang juga dapat kita tangkap dari ujian menahan diri dalam berpuasa adalah sikap kesahajaan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Kesetiakawanan sosial dan kesahajaan ini merupakan kekuatan bagi bangsa kita untuk menanggulangi tahun-tahun yang penuh ujian dan tantangan berat dalam bidang ekonomi dewasa ini.

Karena itu marilah kita tempa terus menerus dalam diri kita masing-masing rasa kesetiakawanan sosial dan kesahajaan itu, yang kali ini kita latih kembali dalam bulan Puasa sekarang.

Apabila nanti kita selesaikan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan bertambah kuatnya iman dan taqwa kita, marilah kita sambut Hari Raya Idul Fitri dengan tetap memperkuat rasa kesetiakawanan sosial dan kesahajaan tadi.

Marilah kita sambut lebaran nanti dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dalam batin kita masing-masing, karena kita telah melampaui bulan yang penuh dengan tempaan lahir batin itu.

Marilah kita resapkan sedalam-dalamnya di lubuk hati kita sabda Nabi Muhammad s.a.w. bahwa Idul Fitri kita sambut sebagai hari yang menandai peningkatan taqwa kita kepada Tuhan Yang Maha Besar; dan bukan hari yang kita tandai dengan pesta yang berlebih-lebihan.

Apabila ada kelebihan rezeki atau kekayaan kita, marilah kelebihan itu kita pakai untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat banyak.

Dengan jalan itu kita memberi makna yang dalam kepada puasa kita. Dengan cara itu kita memberi arti yang positif dalam kita menyambut hari lebaran.

Demikianlah ajakan-ajakan saya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.□

MANDIRI GROUP

Distributor : Construction & Foresty Equipment
Manufacturing : Segala Jenis Trailer – Bus Bodies – Container – Dump Bodies – Tanks Bodies
Perbengkelan : Sedan – Bus – Truck - Alat-alat Besar
Bekasi : Jl. Raya Bekasi, Buaran – Bekasi Tel. : (99) 71109, 71149, 72013
Jakarta : Tel. : 6294967, 6296624, 6597671. Telex : 63969 HMU IA.

Direksi, Staff dan seluruh Karyawan
mengucapkan :

Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1407 H.
Mohon Maaf Lahir & Bathin

Digitized by Google

Menteri Agama H. Munawir Sjadzali : Mensyukuri Nikmat Allah SWT

Dalam kesempatan memberikan sambutan pada peringatan Nuzulul Qur'an Kamis 14 Mei 1987, Menteri Agama H Munawir Sjadzali MA mengatakan agar kita sebagai bangsa Indonesia pandai mensyukuri rahmat, pandai-panai memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk usaha-usaha mulia dan terpudji serta bertujuan luhur.

Salah satu nikmat dan rahmat yang harus disyukuri menurut menteri agama adalah keberhasilan bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum baru-baru ini, dan keberhasilan meletakkan fondasi yang kuat bagi kemantapan atau stabilitas politik sehingga secara simultan bangsa Indonesia bisa melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Bagi menteri agama keanekaragaman pemeluk agama di Indonesia tidaklah merupakan penghalang bagi adanya kesatuan dan persatuan, tetapi justru merupakan penunjang bagi terwujudnya persatuan, hal mana menurut menteri berkat adanya kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia.

Menyimak keberhasilan bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum dengan tertib, aman dan lancar, menteri agama Munawir Sjadzali menilai hal itu sebagai nikmat yang diberikan Tuhan. Sehingga sudah sepantasnyalah bangsa Indonesia mensyukurinya. "Suksesnya pemilu yang baru lalu merupakan pertanda makin matangnya bangsa Indonesia dalam bernegara," ujarnya.

Hal yang menggembirakan dalam pelaksanaan pemilu yang baru lalu, antara lain disebut banyaknya rakyat Indonesia yang menggunakan hak pilihnya, dan dalam memberikan suara para pemilih cenderung untuk lebih rasional dan jauh dari emosional. Itu berarti semakin meningkatnya kesadaran berpolitik di kalangan bangsa Indonesia.

Menteri Agama tidak mengelak bahwa salah satu faktor yang membuahkan kemajuan dan perkembangan politik bangsa Indonesia adalah dengan dikukuhkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, Menteri Agama mengingatkan, makin matangnya rakyat bernegara makin besar pula tantangan bagi para pemimpin. Dalam hal ini Menteri Munawir mengingatkan para pemimpin agar memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT dalam menghadapi tantangan tersebut, seperti yang tersebut dalam Al Qur'an surat Attaubah ayat 105 yang berbunyi: "Dan katakanlah (hai

Munawir Sjadzali

Muhammad): hendaklah kamu bekerja! Allah, Rasul-Nya, dan orang mukmin akan melihat (hasil) kerjamu (itu). Nanti kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang lahir, lalu diberitakanNya kepadamu apa yang kamu kerjakan. Secara garis besar artinya bahwa setiap orang supaya berkarya dengan ikhlas, sebab Allah akan menilai semua karya seseorang walaupun karya yang tersembunyi.

Ditambahkan oleh Menteri Agama, bahwa penilaian Allah dalam arti yang utuh baru diterima pada Hari Peringatan di Padang Mahsyar. Artinya penilaian Allah terhadap karya-karya manusia walaupun ada pasti tetapi tidak terlalu cepat kita rasakan. "Tetapi penilaian dari rakyat terhadap prestasi para pemimpin akan lebih cepat, yakni tiap lima tahun," kata menteri Agama.

Perlu Pengembangan

Sementara itu Dr H Rachman Maas, dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung, dalam uraian hikmah Nuzulul Qur'an mengatakan, pendekatan Al Qur'an sangat perlu dikembangkan agar manfaat membacanya dapat menimbulkan semangat mental rohani keagamaan yang bernilai, yaitu di samping keteladanan dan contoh juga sekaligus pengembangan potensi lahiriah yang selalu mencari perbaikan dalam berbagai inovasi yang selaras keadaan zaman.

Menurutnya jika agama Islam ditekuni tampak satu titik cerah hasil pendekatan manusia pada Al Qur'an yaitu keberhasilan dalam perjuangan dari segala perbuatan salah yang pernah dikerjakan, kembali ke dalam kemenangan rohani yaitu bebas dari efek godaan setan. Dalam keadaan itu manusia dinyatakan menemukan fitrahnya.

Fitrah menurut Dr Rachman Maas adalah suatu kondisi dimana manusia dinyatakan secara lahiriah (puasalah agar sehat) dan secara rohani dinyatakan bertaqwa (2:183). Sedangkan dosa menjadi nihil seperti waktu ia dilahirkan oleh ibunya. semangat rohani dilengkapi dengan perisai (puasa itu Sunnah) dan lebihnya ditambah dengan sifat sabar (puasa itu sabar) yang berarti ia terbiasa melaksanakan segala yang baik.

Menyinggung pengamalan agama secara konsekuen sebagai ajaran agama yang menjunjung tinggi perilaku yang luhur, adalah merupakan hal yang mutlak bagi perwujudan kualitas manusia Indonesia yang sesuai dengan filsafat Pancasila.

Manusia yang berkualitas atau bermutu, katanya, adalah manusia yang sehat-bulat, manusia yang tahan bantingan untuk hidup di kota atau desa. "Untuk mewujudkan kualitas manusia Indonesia tersebut maka cara yang paling utama adalah dengan meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan," kata Dr H Rachman Maas.

Dalam hal ini, lanjutnya, pendidikan yang berdasarkan pancasila harus bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan serta penguasaan ilmu dan teknologi, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Ditambahkan pula dalam uraian hikmah Nuzulul Qur'an yang berjudul "Nuzulul Qur'an merupakan landasan peningkatan kualitas umat dan persatuan bangsa", Manusia Indonesia yang dicita-citakan oleh hakikat pembangunan adalah manusia fitrah. "Sesungguhnya hanya manusia yang mencari serta mengerti fitrahnyalah yang mampu hidup mementingkan kebutuhan orang banyak, dengan cara mengurangi tetapi tidak meninggalkan kebutuhan diri sendiri (28:77)".

Menurutnya tidak ada yang dan perlu dikorbankan apakah itu kepentingan akhirat atau kepentingan dunia. Dan untuk dapat meraih dua kepentingan itu, maka dunia ibarat ladangnya sedang akhirat laksana tempat menuainya. "Manusia perlu menemukan dirinya dalam fitrahnya yang berketangguhan agar mampu mencari kebaikan dunia untuk meraih kebaikan akhirat," tuturnya.☐ NS

Digitized by Google

Boedi Oetomo Punya Rentang Sejarah Perjuangan Bangsa

Tujuh puluh sembilan tahun lalu, organisasi dari kumpulan pemuda, yang dikenal dengan "Boedi Oetomo" lahir. Tepatnya tahun 1908. Kelahiran dari organisasi yang oleh Presiden Soeharto, ketika memberikan sambutannya di silang Monas dua tahun lalu, dilukiskan sebagai mempunyai tali rentang sejarah dengan tahun-tahun berikutnya.

Kalau dalam tahun 1908, yang merupakah hari lahirnya Boedi Oetomo, mencerminkan kesadaran bahwa perjuangan nasional hanya dapat dicapai dengan perjuangan yang bersifat nasional, maka pada rentang waktu selanjutnya, seperti tahun 1983, adalah tahun pemantapan Pancasila sebagai satu-satu asas dalam kehidupan bernegara berbangsa dan bermasyarakat.

Kemudian Menteri Penerangan Harmoko, saat membuka seminar untuk memperingati hari Kebangkitan Nasional di gedung Dewan Pers, 18 Mei lalu, menguraikan arti pentingnya sejarah Kebangkitan Nasional. Kata, Harmoko, sejarah lahirnya hari Kebangkitan Nasional itu harus dimengerti dan dipahami.

Dua tahun lalu peringatan yang diketuai oleh Menteri Penerangan dipusatkan di silang Monas Jakarta, dengan menyuguhkan beberapa atraksi, yang dapat mengingatkan serentetan sejarah pada masa lalu. Misalnya peragaan tentang beberapa perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah.

Tapi peringatan tahun ini, lain dengan tahun lalu. Deppen sebagai penyelenggara dalam peringatan hari Kebangkitan Nasional kali ini menyelenggarakan seminar sehari untuk dapat mengupas makna yang lebih dalam lagi tentang Hari Kebangkitan Nasional itu.

Untuk dapat memberi arti yang lebih dalam tentang Kebangkitan Nasional penyelenggara menampilkan tokoh-tokoh di antaranya; Dr Alfian, Tribuana Said MDS, dan Dr Sarlito Wirawan. sedangkan dalam seminar sehari itu bertindak sebagai moderator adalah Drs Dja'far H. Assegaf. Hadir dalam seminar itu di antaranya dari tokoh-tokoh persuratkabaran dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam pengarahannya Harmoko mengatakan, Harkitnas itu mempunyai dua nilai pokok. Pertama, bersedia untuk berkorban dan menderita apabila perjuangan menghendaki itu. Kedua, kemampuan untuk menghayati puncak-puncak keberhasilan bangsa sepanjang sejarahnya.

Kesadaran Kebangsaan

Mengenai kesadaran kebangsaan seperti yang disinggung oleh Alfian dalam makalahnya disebutkan bahwa, kesadaran kebangsaan baru rakyat Indonesia bersumber pada paradigma atau wawasan yang lahir dan berkembang bersamaan dengan munculnya kaum cendekiawan baru hasil pendidikan agama dan umum.

Alfian, pengamat masalah-masalah politik, mengatakan dalam proses kecendekiawanan mereka itu mengalami transformasi diri yang antara lain ditandai oleh orientasi, sikap dan tingkah laku politiknya. Di samping sebagai pemikir, sekaligus juga menjadi pejuang nasionalis yang anti

Harkitnas mempunyai dua nilai pokok

Digitized by Google

Kegandrungan terhadap nilai-nilai kerakyatan sudah mulai tampak dikalangan cendekiawan.

kolonialisme.

Pada bagian lain dalam makalahnya yang berjudul "Makna Kebangkitan Nasional Dalam Perjuangan politik Indonesia" Alfian mengemukakan, kebangsaan Indonesia ditinjau dari segi politik, itu bukan hanya merupakan cita-cita untuk membangun kehidupan bersama dan bersatu, tapi sekaligus juga demokratis. Dan, kata Alfian lebih lanjut melalui sejarah perkembangan pemikiran bangsa Indonesia sejak kebangkitan nasioal, kedua nilai tersebut, yaitu persatuan dan demokrasi menjadi topik yang hangat dalam dialog dan perdebatan.

Untuk itu kata Alfian, sejak lahirnya Boedi Oetomo, kegandrungan terhadap nilai-nilai kerakyatan dan demokrasi sudah mulai tampak jelas terlihat di kalangan cendekiawan dan masyarakat. Kemudian Alfian memberikan contoh, bahwa di antara salah satu pendiri dari Boedi Oetomo, Gunawan Mangkusumo, dikenal sebagai salah seorang yang getol dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Meskipun, lanjut Alfian, uraian yang lebih luas dan mendalam tentang demokrasi yang terutama dalam kaitannya dengan tradisi musyawarah mufakat yang hidup di berbagai masyarakat pedesaan Indonesia dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang datang kemudian. Sebagai contoh tokoh Bung Hatta.

Namun, kata Alfian lebih lanjut, obsesi terhadap nilai-nilai demokrasi saja dapat dan mudah mengarah muncul dan berkembangnya sikap dan tingkah laku anarkis. Untuk menghindarkan hal itu, maka nilai-nilai persatuan dapat dipakai sebagai pengontrolnya.

Kendala

Dr Sarlito Wirawan mengungkapkan kendala untuk lebih menumbuhkan rasa kebangsaan generasi muda, antara lain ketidaksesuaian antara nilai-nilai kebangsaan generasi muda, antara lain ketidaksesuaian antara nilai-nilai kebangsaan yang diberikan oleh guru PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan praktek kehidupan seharihari.

Kemudian Sarlito mengambil contoh, dikemukakan sikap sementara oknum polisi dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas "Habislah PMP" Kata Sarlito. Untuk itu Sarlito menyarankan perlunya dilakukan perbaikan disegala bidang secara terus menerus.

Ketika menyinggung mengenai sikap dan pandangan remaja di berbagai daerah di Indonesia, Sarlito mengatakan, ada perbedaan tapi banyak pula kesamaannya. Dari kunjungannya di berbagai daerah dan wawancara dengan para remaja di berbagai daerah, Dia berpendapat, bahwa wawasan Nusantara sudah cukup efektip dipahami generasi muda. Dia kemudian mengambil contoh dalam keluarga kecil? mereka berpendapat sama, menginginkan keluarga kecil yang bahagia. Dan contoh lain istilah "jorok" yang dikenal oleh para remaja di Jakarta, ternyata juga diketahui oleh rekannya yang ada di NTT.☐ BM

P.T. CHIPDECO

WOOD CHIP PRODUCER AND DEVELOPMENT COMPANY

PERUSAHAAN JOINT VENTURE ANTARA P.T. KARYASA KENCANA DARI INDONESIA DENGAN MANGROVE DEVELOPMENT INDUSTRY COY LTD. DARI JAPAN.

DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN WARGA / KELUARGA / PERUSAHAAN P. T. CHIPDECO SIAP MENSUKSESKAN PEMILU 1987 DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

KANTOR PUSAT :
Jl. Kemuning 14, Tomang, Jakarta Barat.
Tilp : 592267.
Kawat : CHIPKA JAKARTA.

PABRIK :
Juata Laut, Tarakan, Kalimantan Timur.
Kawat : CHIPKA TARAKAN.
P.O. BOX : 55 Tarakan.

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

Ulang tahun ke 90 Ibu Sumoharyomo, Ibunda Ny Tien Soeharto

Keluarga Presiden Soeharto, Senin malam 11 Mei 1987 telah merayakan hari Ulang Tahun ke 90 Ibunda Ibu Tien Soeharto, Ibu Sumoharyomo, bertempat di kediaman Ibu Sumoharyomo Jalan Kalitan Solo. Peringatan Ulang Tahun Ibu Sumoharyomo ini berdasarkan perhitungan penanggalan Jawa, yang merupakan perayaan genap 90 Tahun atau jangkep juswo dalam bahasa jawa. Perayaan tersebut dihadiri oleh putera-puteri, para cucu, cicit serta keluarga dekat lainnya dan para tetangga Ibu Sumoharyomo di Jalan Kalitan.

Perayaan Genap Usia 90 tahun Ibu Sumoharyomo ini diadakan dengan kenduri sederhana yang diprakarsai oleh putera-puterinya, sebagai ungkapan rasa syukur dan penghargaan setinggi-tingginya atas asuhan dan bimbingannya selama ini sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna dan keluarga yang sehat serta saleh dan taat kepada agama.

Kata-kata sambutan disampaikan oleh Ibnu Hartomo yang mewakili Keluarga dan Walikota Solo mewakili masyarakat sekitarnya. Selesai sambutan dilanjutkan dengan pembacaan Doa Al-Fatihah dan ayat-ayat suci Al-Qur'an lainnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan karunianya dan Umur yang panjang serta kesehatan yang baik.

Selesai pembacaan Doa dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng nasi kuning yang berjumlah sembilan buah yang diberikan kepada Puterinya nomor dua yaitu Ibu Tien Soeharto, dan dilanjutkan kepada Pak Harto. Selesai memotong tumpeng dilanjutkan dengan memotong kue yang diberikan kepada para cucu dan cicit yang diiringi oleh lagu selamat ulang tahun, Kicir-kicir, Suwe Ora Jamu dan Syair syair dalam bahasa Jawa yang berisi ucapan rasa syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta Doa panjang umur serta kesejahteraan.

Ibu Sumoharyomo dilahirkan tanggal 13 Bulan Puasa Tahun Jawa 1832 atau tahun Jimawal., yang jatuh pada hari Senin Legi, Puteri dari Almarhum Panji Atmohandoyo, Letnan satu artileri Tentara Legiun Mangku Negaran. Dari perkawinannya dengan Tumenggung Sumoharyomo dianugrahi 11 orang putera-puteri, 37 orang cucu dan 21 cicit. Ibu Tien Soeharto merupakan puteri kedua dari 11 orang putera-puteri dari Ibu Sumoharyomo.☐ NS

Digitized by Google

Golkar Raih Mayoritas Kursi Di DPR RI

Perhitungan suara dalam Pemilu 1987, sudah dapat dikatakan final, kendati Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU), baru akan mengumumkan hasilnya secara resmi antara tanggal 6 - 10 Juni yang akan datang. Dan hasil Pemilu 1987, yang selesai belum lama ini hampir sudah dapat dipastikan Golongan Karya, akan tampil sebagai pemenang dan mendapatkan mayoritas kursi dalam DPR-RI sebanyak 298, PPP 63 dan PDI 39 kursi. Sampai berita ini diturunkan 12 Mei lalu jumlah suara yang sudah tercatat masuk sebanyak 85.875.714, dari 93.965.953 suara terdaftar. Sedangkan jumlah suara selebihnya yang belum masuk 8 persen itu merupakan suara rusak atau hangus.

Hasil perhitungan suara hampir dapat dipastikan, tidak akan mempengaruhi lagi dalam penambahan kursi untuk masing-masing Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Dari perolehan suara hasil Pemilu yang baru lalu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan 13.753.847 suara, atau mencapai 16,02 persen, Golkar 62.672.798 suara atau 72,98 persen dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) memperoleh suara 9.449.069 suara atau 11.00 persen. Dari hasil perolehan suara itu PPP memperoleh kursi di dalam DPR sebanyak 63 kursi, Golkar 298 kursi dan PDI 39 kursi. Dengan demikian jumlah kursi 500 yang tersedia sudah dapat diraih seluruhnya. Yaitu 400 kursi diperebutkan melalui Pemilu oleh PPP, Golkar dan PDI sedangkan selebihnya 100 buah kursi sudah menjadi jatah Abri yang diperoleh melalui pengangkatan Presiden.

Golkar Naik

Dari hasil Pemilihan Umum yang selesai belum lama ini dan hasilnya secara resmi juga akan diumumkan tidak lama lagi itu, sudah dapat dipastikan Golkar akan memperoleh tambahan kursi di DPR-RI sebanyak 56 buah. Berarti Golkar dalam Pemilu 1987 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan perolehan kursi hasil Pemilu tahun sebelumnya. Hasil perolehan kursi di DPR tahun 1982 tercatat 242 kursi sedangkan hasil Pemilu 1987 sudah dapat dipastikan 298 kursi berada di tangan.

Sedangkan untuk Partai Persatuan Pembangunan, dalam Pemilu tahun ini mengalami penurunan secara drastis. Kalau pada Pemilu 1982 memperoleh 94 kursi, kini melorot menjadi 63 kursi, atau dalam Pemilu 1987, PPP kehilangan 31 kursi.

Kemudian Partai Demokrasi Indonesia, dalam Pemilu 1987 ini justru mengalami kenaikan. Dari 24 kursi dari hasil Pemilu 1982, kini melonjak naik menjadi 39 kursi, atau mendapat tambahan kursi di DPR-RI sebanyak 15 buah.

Lihat tabel perhitungan suara di bawah ini.

Perolehan suara ke tiga OPP (Setelah Steembusaccord)

NO.	DAERAH TINGKAT I	YANG DIPEREBUTKAN PADA PEMILU '87: SUARA MSK	YANG DIPEREBUTKAN PADA PEMILU '87: KURSI	B P P: SUARA DIBAGI KURSI	Hasil yang diperoleh P P P: PROSEN	P P P: SUARA	P P P: KURSI	Hasil yang diperoleh GOLKAR: PROSEN	GOLKAR: SUARA	GOLKAR: KURSI	Hasil yang diperoleh P D I: PROSEN	P D I: SUARA	P D I: KURSI	SISA KURSI
***	INDONESIA	85875714	400		16.02%	13753847	63	72.98%	62672798	298	11.00%	9449069	39	0
1	DAISTA ACEH	1527444	10	152744	43.37%	662494	4	51.49%	786428	5	5.14%	78522	1	0
2	SUMATERA UTARA *	4421304	21	210538	13.58%	600268	3	72.62%	3210892	15	13.80%	610144	3	0
3	SUMATERA BARAT *	1918553	14	137040	19.77%	379215	3	78.31%	1502470	11	1.92%	36868	0	0
4	RIAU	1349241	7	192749	15.14%	204238	1	79.50%	1072688	6	5.36%	72315	0	0
5	JAMBI	906025	6	151004	8.46%	76609	1	88.56%	802370	5	2.99%	27046	0	0
6	SUMATERA SELATAN *	2670612	13	205432	18.96%	506364	2	69.05%	1844162	10	11.99%	320086	1	0
7	BENGKULU	507388	4	126847	10.44%	52979	1	83.79%	425165	3	5.76%	29244	0	0
8	LAMPUNG	2667969	10	266797	7.44%	198545	1	86.81%	2316099	9	5.75%	153325	0	0
9	DKI JAKARTA	4003461	15	266897	21.37%	855399	3	50.37%	2016359	8	28.27%	1131703	4	0
10	JAWA BARAT	16072627	61	263486	13.82%	2221416	9	70.80%	11379082	43	15.38%	2472129	9	0
11	DAISTA YOGYAKARTA	1570208	7	224315	14.47%	227283	1	70.23%	1102738	5	15.30%	240187	1	0
12	JAWA TENGAH	14351420	58	247438	18.23%	2616493	11	68.19%	9785711	39	13.58%	1949216	8	0
13	JAWA TIMUR	17160527	64	268133	20.80%	3569316	13	71.19%	12216143	46	8.01%	1375068	5	0
14	KALIMANTAN BARAT	1451249	7	207321	15.73%	228343	1	68.55%	994806	5	15.72%	228100	1	0
15	KALIMANTAN TENGAH	667617	6	111270	8.57%	57217	1	89.06%	594587	5	2.37%	15813	0	0
16	KALIMANTAN SELATAN*	1222183	10	122218	24.66%	301443	2	71.97%	879574	7	3.37%	41166	1	0
17	KALIMANTAN TIMUR *	764058	6	127343	20.91%	159741	1	68.04%	519834	4	11.06%	84483	1	0
18	SULAWESI UTARA	1296220	6	216037	5.65%	73175	0	87.00%	1127647	5	7.36%	95398	1	0
19	SULAWESI TENGAH	783926	4	195982	12.01%	94188	1	83.03%	650870	3	4.96%	38868	0	0
20	SULAWESI SELATAN	3354320	23	145840	8.99%	301564	2	89.86%	3014174	21	1.15%	38582	0	0
21	SULAWESI TENGGARA	608319	4	152080	1.96%	11905	0	97.17%	591115	4	0.87%	5299	0	0
22	BALI	1529878	8	191235	1.71%	26098	0	87.77%	1342770	7	10.52%	161010	1	0
23	NUSA TENGGARA BRT *	1475850	7	210836	11.84%	174741	1	82.61%	1219178	6	5.55%	81931	0	0
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1626633	12	135553	1,31%	21308	0	94.75%	1541265	11	3.94%	64060	1	0
25	MALUKU *	820265	4	205066	13.30%	109100	1	81.31%	666981	3	5.39%	44184	0	0
26	IRIAN JAYA	787554	9	87506	2.76%	21751	0	92.90%	731644	8	4.34%	34159	1	0
27	TIMOR TIMUR	360863	4	90216	0.74%	2654	0	93.68%	338046	4	5.59%	20163	0	0
***	INDONESIA	85875714	400	---	16.02%	13753847	63	72.98%	62672798	298	11.00%	9449069	39	0

*)steembus-accord dengan PDI

Sasaran dan Hasil yang dicapai

Berdasarkan hasil suara yang masuk terdapat 11 daerah yang tak dapat mencapai target yang telah ditetapkan DPP Golkar meskipun demikian dari 8 di antara 11

Digitized by Google

daerah tetap dapat meraih sasaran kursi yang diharapkan. Sedangkan tiga di antaranya harus rela melepas satu kursi dari sasarannya, masing-masing Sumut, NTT dan Irian Jaya. Tetapi secara keseluruhan semua daerah tidak ada yang mengalami penurunan dibandingkan Pemilu 1982. "Semua daerah naik".

Lihat tabel sasaran yang ditetapkan oleh DPP Golkar jauh sebelum Pemilu dan hasil yang dicapai.

Tambahan kursi MPR

Berdasarkan penghitungan sementara sebagaimana tertera label di atas, maka dapat diperkirakan tambahan kursi bagi Golongan Karya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebanyak 150 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 32 kursi, Partai Demokrasi Indonesia 20 kursi. Dan ABRI 51 (50) kursi, sedang untuk utusan daerah disediakan 147 (146) kursi, dan untuk utusan Golongan-golongan 100 kursi.

Dengan demikian jumlah 1.000 kursi MPR sesuai yang ditetapkan peraturan perundang undangan telah dapat terbagi habis, termasuk kursi-kursi yang dikhususkan bagi setiap anggota DPR yang setiap anggota DPR adalah juga anggota MPR, dan jumlah seluruh anggota DPR 500 orang.

Pencapaian sasaran GOLKAR dalam PEMILU 1987 (sesudah steembus-accord dgn PDI.)

NO.	DAERAH TINGKAT I	YANG DIPEREBUTKAN PADA PEMILU '87: SUARA MSK	KURSI	B P P: SUARA DIBAGI KURSI	SASARAN: PROSEN	SUARA	KURSI	HASIL YANG DICAPAI: %=SASARAN	SUARA	%=PEMILIH	KURSI	TERHA-DAP -> TARGET
888	INDONESIA	85875714	400		68 %	58395486	283	107.32%	62672798	72.98%	298	15
1	DAISTA ACEH	1527444	10	152744	50 %	763722	5	102.97%	786428	51.49%	5	0
2	SUMATERA UTARA	4421304	21	210538	76 %	3360191	16	95.56%	3210892	72.62%	15	1
3	SUMATERA BARAT	1918553	14	137040	72 %	1381358	10	108.77%	1502470	78.31%	11	1
4	RIAU	1349241	7	192749	72 %	971454	5	110.42%	1072688	79.50%	6	1
5	JAMBI	906025	6	151004	85 %	770121	5	104.19%	802370	88.56%	5	0
6	SUMATERA SELATAN	2670612	13	205432	59 %	1575661	8	117.04%	1844162	69.05%	10	2
7	BENGKULU	507388	4	126847	75 %	380541	3	111.73%	425165	83.79%	3	0
8	LAMPUNG	2667969	10	266797	70 %	1867578	7	124.02%	2316099	86.81%	9	2
9	DKI JAKARTA	4003461	15	266897	54 %	2161869	8	93.27%	2016359	50.37%	8	0
10	JAWA BARAT	16072627	61	263486	65 %	10447208	40	108.92%	11379082	70.80%	43	3
11	DAISTA YOGYAKARTA	1570208	7	224315	72 %	1130550	5	97.54%	1102738	70.23%	5	0
12	JAWA TENGAH	14351420	58	247438	65 %	9328423	38	104.90%	9785711	68.19%	39	1
13	JAWA TIMUR	17160527	64	268133	61 %	10467921	40	116.70%	12216143	71.19%	46	6
14	KALIMANTAN BARAT	1451249	7	207321	72 %	1044899	5	95.21%	994806	68.55%	5	0
15	KALIMANTAN TENGAH	667617	6	111270	85 %	567474	5	104.78%	594587	89.06%	5	0
16	KALIMANTAN SELATAN	1222183	10	122218	70 %	855528	7	102.81%	879574	71.97%	7	0
17	KALIMANTAN TIMUR	764058	6	127343	67 %	511919	4	101.55%	519834	68.04%	4	0
18	SULAWESI UTARA	1296220	6	216037	90 %	1166598	5	96.66%	1127647	87.00%	5	0
19	SULAWESI TENGAH	783926	4	195982	82 %	642819	3	101.25%	650870	83.03%	3	0
20	SULAWESI SELATAN	3354320	23	145840	92 %	3085974	21	97.67%	3014174	89.86%	21	0
21	SULAWESI TENGGARA	608319	4	152080	99 %	602236	4	98.15%	591115	97.17%	4	0
22	BALI	1529878	8	191235	89 %	1361591	7	98.62%	1342770	87.77%	7	0
23	NUSA TENGGARA BARAT	1475850	7	210836	72 %	1062612	5	114.73%	1219178	82.61%	6	1
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1626633	12	135553	99 %	1610367	12	95.71%	1541265	94.75%	11	-1
25	MALUKU	820265	4	205066	76 %	623401	3	106.99%	666981	81.31%	3	0
26	IRIAN JAYA	787554	9	87506	93 %	732425	8	99.89%	731644	92.90%	8	1
27	TIMOR TIMUR	360863	4	90216	99 %	357254	4	94.62%	338046	93.68%	4	0
888	INDONESIA	85875714	400	---	68 %	58395486	283	107.32%	62672798	72.98%	298	15

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI BESERTA STAFF
DAN KARYAWAN / KARYAWATI

PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL
(d/h BAPEMIL)

mengucapkan :

SELAMAT ATAS TERSELENGGARANYA PEMILU 1987 DENGAN AMAN TERTIB DAN LANCAR SERTA MENYAMBUT GEMBIRA SUKSES DAN KEMENANGAN YANG DICAPAI G O L K A R.

Alamat Kantor Pusat, Kantor-kantor Cabang PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL :

1. Kantor Pusat : Jl. Cikapundung Timur No. 1 (atas) Tlp. (022) 59758-50896 Bandung
2. KC. Bandung : Jl. Cikapundung Timur No. 1 (bawah) Tlp. (022) 56802 Bandung
3. KC. Jakarta : Jl. Pintu Air No. 8 Tlp. (021) 370892-348097 Jakarta Pusat
4. KC. Tegallega : Jl. Oto Iskandardinata No. 392 Tlp. (022) 56367 Bandung
5. KC. Malang : Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 63 (0341) 23267 Malang
6. KC. Magelang : Jl. Sultan Agung No. 5 (Terusan Semarang-Purworejo) Tlp. (0293) 2116-3431 Magelang
7. KC. Semarang : Jl. Taman Sari Gunting No. 14 Tlp. 23763 Semarang
8. KC. Yogyakarta : Jl. Bintaran Wetan No. 2 Tlp. (0274) 2830 Yogyakarta
9. KC. Surakarta : Jl. Slamet Riyadi No. 338 Tlp. (0271) 7207 Surakarta
10. KC. Madiun : Jl. Letjend. Haryono No. 83 Tlp. (0351) 2974-3211 Madiun
11. KC. Salatiga : Jl. Jend. Sudirman/Pasar Baru Atas No. 9-B Tlp. (0298) 81683 Salatiga
12. KC. Ambarawa : Jl. Mgr. Sugiyopranoto No. 192-A Tlp. (-) 173-174 Ambarawa
13. KC. Purworejo : Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Tlp. (-) 451 Purworejo
14. KC. Surabaya : Jl. Indrapura No. 1 E-F-G. Tlp. (031) 278234-22305 Surabaya
15. KC. Medan : Jl. Prof.H.M. Yamin,SH. No. 26-26A Tlp. (061) 515874 Medan
16. KC. Pati : Jl. Diponegoro No. 145 Tlp. (0295) 81251-81359 Pati
17. KC. Sumedang : Jl. Pangeran Geusan Ulun No. 66 Tlp. (0261) 81428 Sumedang
18. KC. Purwakarta : Jl. Ibrahim Singadilaga No. 27 Tlp. (0264) 21701 Purwakarta
19. KC. Bogor : Jl. Pemuda No. 6/E Tlp. (0251) 23893 Bogor
20. KC. Sukabumi : Jl R.E. Martadinata No. 53 Tlp. (0266) 81184 Sukabumi
21. KC. Cianjur : Jl. Dr. Muwardi No. 118-A, Tlp. (0263) 81044 Cianjur
22. KC. Cirebon : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 72 Tlp. (0231) 5737 Cirebon
23. KC. Cimahi : Jl. Raya Timur No. 433 Tlp. (99) 2263 Cimahi
24. KC. Majalaya : Jl. Stasion No. 8 Tlp. (-) 565 Majalaya
25. KC. Garut : Jl. Haur Panggung No. 84 Tlp. (0262) 81949 Garut
26. KC. Tasikmalaya : Jl. Mayor Utaryo No. 40 Tlp. (0265) 41434 Tasikmalaya
27. KC. Banjar : Jl. Pamarican No. 21-C Tlp. (-) 680 Banjar

Digitized by Google

Ucapan Terima Kasih Dewan Pimpinan Pusat · Golongan Karya

Dengan berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, Pemilihan Umum tanggal 23 April 1987 telah berlangsung dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasilnya telah menunjukkan hasil-hasil sesuai perkiraan dan harapan kita, yang mudah-mudahan juga merupakan hasil yang sebaik-baiknya bagi seluruh bangsa Indonesia.

Hasil-hasil tersebut — terutama bagi Golkar — dapat dicapai berkat keterpaduan upaya, kerja keras yang dilandasi oleh kesadaran dan rasa pengabdian dari seluruh jajaran Golkar di pusat maupun daerah, baik dari Dewan Pembina Golkar, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I, dan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Golkar, demikian pula para fungsionaris Golkar, Juru Kampanye Golkar dan Kader-kader Golkar dari ketiga jalur Keluarga Besar Golkar.

Juga sangat besar peranan dan peran serta aktif para kader, anggota dan simpatisan Golkar yang telah memberikan bantuan berupa apapun yang secara langsung memberikan dukungan demi suksesnya Golkar dalam Pemilu 1987 ini, seperti yang diperankan oleh para Ulama/pemuka agama, usahawan, seniman, media masa cetak dan elektronika dan pendukung Golkar lainnya.

Atas itu semua maka tiada kata-kata lain yang dapat disampaikan oleh DPP Golkar, kecuali ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak/Ibu/Saudara yang secara bersama-sama ataupun perseorangan telah turut ambil bagian dan memberikan sumbangan yang tak ternilai harganya bagi suksesnya perjoangan Golkar dalam rangka pangabdian Golkar kepada pembangunan negara dan bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan pahala yang setimpal kepada Bapak/Ibu/Saudara dan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Amin.

DEWAN PIMPINAN PUSAT GOLONGAN KARYA

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
SUDHARMONO, SH	SARWONO KUSUMAATMADJA

DEWAN PIMPINAN GOLONGAN KARYA PUSAT

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA ORGANISASI

KEBAKARAN DI SAMPING DPP GOLKAR

Selasa malam, 28 Maret lalu, 64 rumah yang terletak lebih kurang 100 meter dari kantor DPP Golkar, tertimpa musibah kebakaran. Kebakaran yang melanda Kampung Sawah, Kelurahan Kemanggisan itu menelan 3 korban manusia, dan mengakibatkan 250 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya.

Untuk meringankan beban para korban, empat hari setelah terjadinya peristiwa itu, DPP Golkar, melalui DPD Tingkat II, memberikan bantuannya. "Ini merupakan perwujudan partisipasi Golkar dalam ikut mengemban amanat penderitaan rakyat," kata ketua DPD Golkar, Jakarta Barat saat memberikan bantuannya kepada para korban.

Bantuan yang diberikan DPP Golkar kepada para korban kebakaran itu mencapai Rp 2,5 juta, yang meliputi Rp 100 ribu buat janda Abdul Latip, Rp 50 ribu untuk 4 orang dari janda lanjut usia, dan masing-masing Rp 25.000 dari 64 rumah yang terkena musibah kebakaran. Selain itu, DPP Golkar juga menyumbangkan 1 ton beras, supermi, ikan asin, dan minyak goreng.

AMBULANCE UNTUK ACEH

Golongan Karya setelah meraih kemenangannya dalam Pemilu 1987 yang baru lalu, menyerahkan bantuannya kepada DPD Tingkat I Golkar Daerah Istimewa Aceh, berupa Ambulance.

Mobil yang diserahkan DPP itu merupakan partisipasi dari warga Golkar dari PT. Satmarindo, yang disampaikan oleh Direkturnya, Kris H Sulisto, kepada Sekjen Golkar, Sarwono Kusumaatmadja. Kemudian mobil bantuan tersebut, oleh Sekjen, disumbangkan buat rumah sakit Lhoksumawe, Daerah Istimewa Aceh.

Dalam kesempatan itu, Sekjen, atas nama DPP Golkar menyatakan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan. "Dan ini merupakan partisipasi nyata dari warga Golkar PT. Satmarindo," ujar Sekjen. Dan bantuan berupa mobil dari PT tersebut merupakan yang pertama setelah Golkar meraih kemenangan dalam Pemilu 1987.

LOMBA DESAIN TEKSTIL DARI HWK

Himpunan Wanita Karya (HWK), setelah dua kali berhasil dalam menyelenggarakan lomba desain tekstil berturut-turut, medio Mei lalu, Orsosmasinal yang berorientasi kepada karya dan kekaryaan ini, tampil dalam acara yang sama.

Penyelenggaraan yang berlangsung selama tiga hari mulai dari tanggal 15 - 17 Mei di Balai Sidang Senayan itu mengambil tema "Batik dan Ikat". HWK dalam lomba desain ini sengaja mengambil tema itu karena, organisasi ini berkeinginan untuk ikut melestarikan dan mengembangkan salah satu faset budaya bangsa, termasuk batik.

Nani Sudharsono, Ketua Umum DPP Himpunan Wanita Karya, yang juga Menteri Sosial itu dalam sambutan tertulisnya mengatakan, lomba desain tekstil 1987 ini dimaksudkan untuk menciptakan desain batik dan ikat yang menarik, baru, dengan suasana warna yang serasi, mampu memberikan kesan anggun, eksekutif, serta sesuai dan cocok dengan lingkungan Indonesia. Pada hakekatnya, kata Ibu Nani lebih lanjut, hasil kreasi desain tekstil ini mampu memberikan kepuasan bagi mereka yang menggunakannya seraya menimbulkan kebanggaan tersendiri karena kreasi nasional ini mampu mendukung kepribadian mereka.

Kemudian Ibu Nani berkeyakinan, kreasi dari bangsa Indonesia bila diwujudkan dengan sungguh-sungguh akan mampu dan dapat bersaing di arena internasional. Dan bila hal ini sudah dapat tercapai, lanjut dengan sendirinya produk kita (bangsa Indonesia) akan selalu dicari dan diminta kehadirannya dimana saja.☐ BM

Digitized by Google

Meledak, Massa Kampanye Di Riau

Jurkam Golkar tingkat pusat, Zarlons Zaghlul, SH nyaris tak sempat berada di Jakarta selama masa kampanye yang 25 hari lalu. Jadwal utama kampanyenya adalah ke Kalimantan Barat, karena ia calon untuk daerah pemilihan itu. Tetapi, mungkin karena ia adalah juga Bendahara DPP Golkar atau mungkin karena pribadinya yang menarik, banyak daerah pemilihan lain meminta kesediaannya untuk datang berkampanye. Karena waktu yang terbatas, tentu saja tak semua daerah itu sempat disinggahinya.

Sehari sebelum masa kampanye dimulai, ia dan rombongan dari Jakarta sudah tiba di Pulau Batam. Di sana Zarlons Zaghlul mewakili DPP Golkar menyerahkan Piala DPP Golkar untuk para pemenang pertandingan sepakbola antar instansi, desa dan ormas se Kodya Administratif Batam, malam sebelum mulainya kampanye. Para artis seperti Rinto Harahap dan Diana Nasution menambah kegembiraan keluarga besar Golkar bersama masyarakat Batam yang hadir di Lapangan Beringin ketika Zarlons Zaghlul dan para Jurkam setempat berkampanye.

Hampir 11 hari, Zarlons Zaghlul berada di Kalimantan Barat antara tanggal 29 Maret hingga 7 April lalu. Lapangan Khatulistiwa dan lapangan kraton Pontianak Utara, keduanya di ibukota propinsi itu penuh dengan penduduk ketika Zarlons bersama para jurkam lain serta para artis Ibukota berkampanye. Sama halnya dengan lapangan kota Kecamatan Sekadau di Kab. Sangau, lapangan kota Kecamatan Sei Duri dan Kodya Administratif Singkawang. Para artis Ibukota seperti Rinto Harahap, Tina Sanusi, Albert Sumlang, Eddy Silitonga dan Titi Dwijayati juga berkeliling ke kabupaten-kabupaten Kalbar, seperti Sintang, Putusibau, Sambas, dan lain-lain.

Warga Golkar Sumatera Utara juga memintanya untuk hadir. Sebagai putra daerah ini, ia sulit untuk menolak. Selama 4 hari Zarlons bersama tokoh Golkar lain diantaranya Ir. H. Lumban Gaol yang Asisten Menko Ekuin, H. Abdul Rachman Pasaribu, H. Nasjrul Tanjung, H. Napitupulu, Saut Tobing, Drs. M. Siambaton dan Drs. S.B. Ido Sianturi beserta sejumlah artis Golkar Ibukota berkampanye di Pinangsori dan Stadion Horas Sibolga, di lapangan Makodim Padang Sidempuan Tapanuli Selatan, di Sorkam dan Barus serta di lapangan Sei Agul Kodya Medan.

Hanya dua hari di Jakarta, Jurkam ini kembali harus memenuhi permintaan DPD I Golkar Riau untuk berkampanye di daerah ini, pada putaran terakhir masa kampanye. Kembali Stadion Pekanbaru dan lapangan Pertamina Dumai seperti "meledak" karena begitu banyaknya massa yang hadir dalam kampanye yang dihadiri oleh Jurkam dari Jakarta ini. Tentu saja peran para artis yang juga turut dalam rombongan membantu kelancaran jalannya kampanye. Sayang Kota Kabupaten Bangkinang tak sempat menerima kunjungan rombongan kampanye ini kendati izin untuk itu sudah dikeluarkan pihak berwajib. Soalnya, tak jauh dari sana ada OPP lain yang sedang berkampanye, sehingga atas saran pihak Laksusda setempat, acara tersebut dibatalkan. Yang jelas, menurut pemantauan yang dilakukan, di setiap tempat yang dikunjungi rombongan kampanye Golkar yang dipimpin Zarlons Zaghlul SH, angka kemenangan Golkar dalam Pemilu lalu meningkat dibanding tahun 1982.☐ D. Robin Saragi.

CBI

P.T. CBI INDONESIA
A PERTAMINA JOINT VENTURE

INDUSTRIAL SERVICES :
Consulting, Designing, Manufacturing
Constructing & Erection of Heavy Steel
Plate, Storage Tanks, Spheres and
Structures for the oil, LNG Gas and
Geothermal Industries.

HEAD OFFICE :
Summitmas Tower, 4th floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62
Jakarta 12190 – Indonesia
Telex : 46480 CBI IA
Telephone : 511422 (5 lines)
Facsimile : 511445

Digitized by Google

Suara Dari Desa

Di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terdapat tujuh desa yang dalam pemilihan umum baru lalu memenangkan Golkar seratus persen. Ketujuh desa ini tentu bukan sendirian. Di Kabupaten Kuningan malah lebih lagi: 54 desa. Tidak hanya itu. Di Kabupaten Majalengka terdapat 10 desa yang mencatat prestasi yang sama.

Tanpa mengurnagi rasa syukur kepada desa-desa yang telah berjuang dan sukses memenangkan Golkar seratus persen, Media Karya berkesempatan mengunjungi dua dari tujuh desa di Kabupaten Sumedang yang telah seratus persen memberikan suara mereka kepada Golkar itu. Kedua desa itu adalah Desa Bugel, Kecamatan Tomo dan Desa Bangbayang, Kecamatan Situraja.

Tidak sulit mencapai desa Bugel, karena letaknya yang strategis di pinggir jalan utama Bandung—Cirebon. Tapi ironis dengan letaknya yang di pinggir jalan, desa ini belum menikmati listrik dan air minum. Padahal lampu-lampu penerangan jalan raya bersinar sepanjang malam untuk mempermudah mobil-mobil yang berseliweran.

Kondisi faktual seperti ini menyebabkan nada bicara yang terungkap dari masyarakat desa di sini agaknya ironis dengan semangat juang mereka yang tak kenal lelah dalam memenangkan Golkar. Mereka yang dalam kampanye tampil sebagai pejuang-pejuang yang tidak mengenal pamrih, akhirnya berbicara tentang harapan kepada Golkar setelah kemenangan ini.

Harapan yang lebih merupakan keluh kesah itu, justru terungkap dari komcat dan komdes Bugel, masing-masing S Samsudin dan D Suma. Walaupun dengan nada tidak merengek, apa yang dikeluhkan kedua pejuang Golkar di desa ini merupakan kebutuhan yang sangat manusiawi.

Lewat Golkar mereka menyampaikan keinginan rakyat desanya akan listrik dan air bersih. "Mungkin belum saatnya barangkali," ujar D Suma dalam gaya khas orang timur.

Melebur lebih jauh ke dalam lingkup orang desa di Bugel ini, keluh kesah mereka lebih banyak lagi. Selain listrik dan air bersih yang angat vital, seorang ibu, Nung namanya, yang mengaku penggerak wanita MKGR, meminta perhatian Golkar soal praktek-praktek menyebalkan dalam bidang pendidikan.

Ibu ini menyebut suap yang sering dipraktekkan para pendidik dalam penerimaan murid baru. Bahkan anaknya yang telah lulus Sipenmaru, tidak bisa diterima karena dia tidak sanggup memberi sejumlah uang, begitu ceritanya.

Lain lagi adalah cerita Bung Zam. Suami Guru SD yang dalam pemilu 1982 masih berkampanye untuk kontestan lain ini, mengaku balik ke Golkar dalam pemilu yang lalu. Dia bahkan menyumbangkan spanduk bagi Golkar. "Setelah melihat-lihat dan merenung, ternyata Golkar lebih sesuai bagi saya," ujarnya.

Di Desa Bangbayang yang berjarak 37 km selatan Sumedang, juga Golkar menang seratus persen. Sebagaimana desa Bugel, desa ini juga belum menikmati listrik dan air bersih. Tetapi yang menjadi

Golkar lebih sesuai dengan saya

Digitized by Google

tekad para pemuda dan tokoh masyarakat di desa ini adalah bagaimana membangun desa mereka di masa depan agar bisa keluar dari keterpencilan.

Tekad seperti ini terungkap dari seorang guru SD, Ros namanya. Tinggal di desa baginya, bukan malapetaka. Terungkap dari pembicaraannya bahwa semangat pulang ke desa di kalangan anak muda Bangbayang sangat tinggi. Mereka menuntut ilmu di kota-kota, dan setelah lulus, kembali ke desanya untuk mengabdi. "Peranan para pemuda dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik itulah yang menyebabkan Golkar bisa menikmati kemenangan 100 persen di Bangbayang," ujar Ros yang telah setahun menjadi guru tapi belum diangkat jadi pegawai negeri ini.

Satu-satunya harapan mereka (mungkin lebih tepat disebut keluhan) adalah buruknya sarana jalan ke desa ini, yang untuk mencapainya harus jalan kaki selama tiga perempat jam lagi dari ujung jalan aspal. Jembatan-jembatan di sepanjang jalan menuju desa ini pun sangat sementara sifatnya. Oleh karena itu salah satu yang ingin diminta perhatian adalah bagaimana membuat jembatan permanen di desa ini.

Bangbayang dan Bugel mungkin mewakili suara ribuan desa di seluruh Indonesia yang bersuara serupa. Dan dalam memenangkan Golkar dua desa ini juga mungkin hanya sebagian dari ribuan desa yang bangga dengan prestasi mereka membela kemenangan Beringin.

Apa yang mereka keluhkan kepada Golkar, adalah program Golkar yang karena hambatan dana, belum bisa menjangkau semua desa di seluruh Indonesia, yaitu listrik dan air minum. Tapi satu hal patut diperhatikan bahwasanya, yang mereka keluhkan adalah kebutuhan terpokok yang tumbuh dalam skala prioritas mereka karena deru pembangunan yang didukung ketat oleh Golkar.

Dalam konteks kader pejuang, keluh kesah mungkin sikap yang harus dibuang jauh-jauh. Tetapi bila berpikir bahwa kader Golkar adalah cermin yang memantulkan kondisi obyektif di daerahnya, keluhan akan air minum dan listrik adalah bukti respons dan kepekaan para komcat dan komdes akan kebutuhan terdasar warga Golkar di desa mereka. Sebagai kader, menterjemahkan fakta-fakta dalam daftar kebutuhan, membutuhkan kemampuan tersendiri.

Bahka setelah memenangkan Golkar 100 persen ada sejumlah desa menyampaikan daftar keluh kesah, pun wajar. Mereka tidak berlebih-lebih dalam meminta. Sedikit merengek, bagi para serdadu yang pulang dari medan perang membawa kemenangan mungkin bagian dari sikap patriotik.

Bugel dan Bangbayang adalah contoh yang pas dari pengandaian itu. □ **Rendy MS**

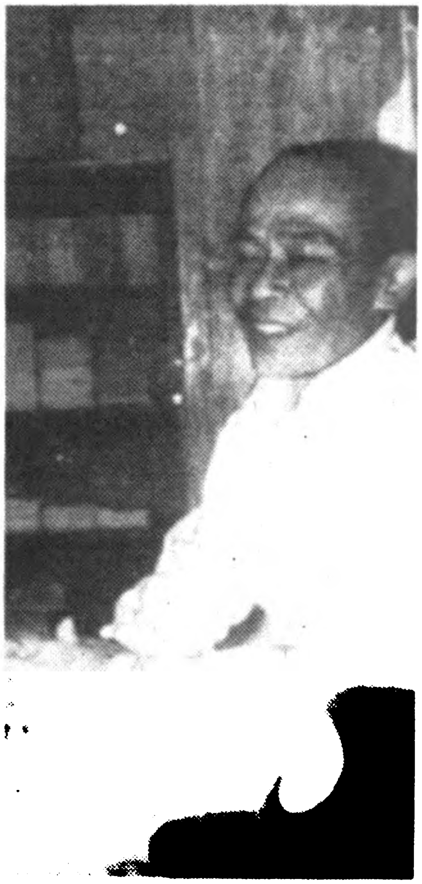

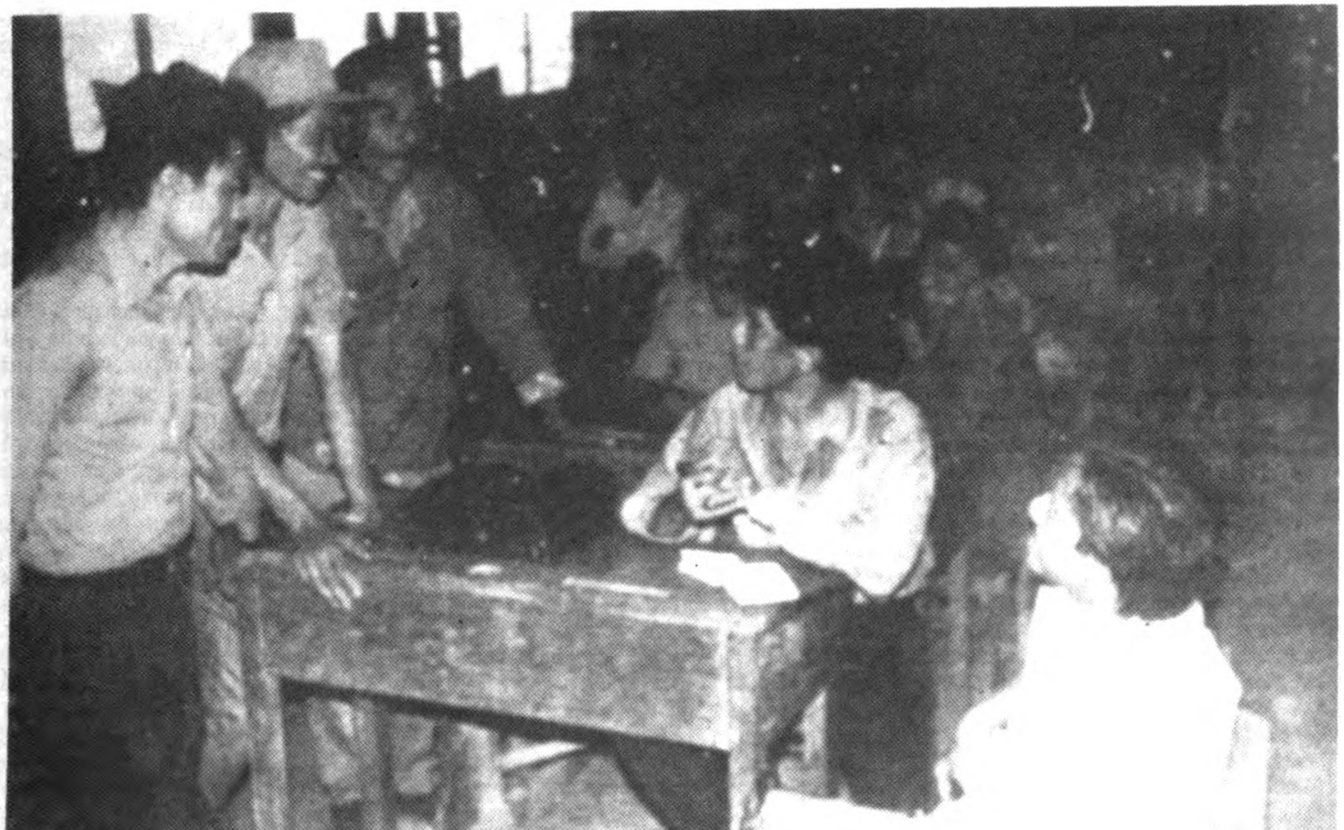

Bugel dan Bangbayang adalah contoh yang pas dari Pengandaian

Digitized by Google

Djuhartono, Bidan Golkar Telah Tiada

Pak Ju telah tiada (kanan)

Golongan Karya, salah satu kekuatan sosial politik terbesar di Indonesia saat ini dan telah 4 kali mendapat kepercayaan dari rakyat, ditinggal oleh salah seorang tokohnya. Djuhartono, yang lebih akrab dengan panggilan Pak Ju, Ahad, dua pekan lalu meninggal dunia di RSPAD, Jakarta. Pak Ju, meninggal setelah enam hari dirawat di rumah sakit akibat pendarahan pada otaknya.

Sebelumnya, kabar tentang sakit sampai beliau dirawat di rumah sakit, banyak warga Golkar yang tidak mengetahui. Dan, setelah beberapa koran Ibu kota memberitakan kepergiannya, Senin 12 Mei lalu, baru warga Golkar mengetahui, bahwa Pak Ju telah tiada.

Kepergiannya yang begitu mendadak, tidak pernah disangka oleh siapa saja, termasuk juga keluarganya. Hari-hari sebelumnya tanda-tanda akan kepergiannya tidak tampak. Hanya saja beberapa hari menjelang kepergiannya, Pak Ju merasakan sakit pening pada bagian kepalanya. Dan sakit ini merupakan sakit yang juga biasa dirasakan. "Sakit kepala yang dirasakan Pak Ju, itu sering dialami, namun penyakit yang menyerang itu biasanya diobati dengan obat tertentu," ujar Ny Siti Rohanah, istrinya. Namun, kata istrinya lebih lanjut, sakit yang dirasakan kali ini lain dari biasanya. Seperti dikatakan Pak Ju kepada istrinya bahwa sakit kepala yang diderita kali ini lain dari biasanya dan bahkan semakin menjadi-jadi.

Sehingga keesokan harinya, Pak Ju dibawa ke rumah sakit RSPAD untuk berobat. Selama enam hari dirawat, keadaannya belum juga baik. Badannya semakin lemah kemudian tidak sadarkan diri. Sehingga Ahad, pukul 23.40 dua pekan lalu Pak Ju, meninggal dunia.

Semenjak sakit hingga meninggalnya Pak Ju, pada keluarganya tidak pesan apa-apa, termasuk juga pada Golkar yang pernah dirintisnya. Hanya saja, seperti diutarakan istrinya, mengenang saat Pak Ju masih bersamanya, bersama anak-anaknya di dalam satu meja makan. Pada saat-saat seperti itu Pak Ju selalu berpesan pada anak-anaknya, agar menjadi orang yang mempunyai jiwa besar, disiplin dan bertanggung jawab seperti beliau. Dan pesan ini selalu di ulang-ulang ujar, Ny Siti Rohanah.

Pak Ju, yang meninggal di RSPAD, itu kemudian diterbangkan di Yogyakarta, untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, di kota tersebut. Dan sebelumnya ucapan bela sungkawa datang dari berbagai kalangan, dan tampak pula dalam rumah duka, Ketua Umum Golkar Sudharmono.

Bidan Golkar

Membicarakan Golkar dengan keberadaannya yang sekarang itu tidak terlepas dari nama Djuhartono. Dia merupakan salah satu arsitek dan cikal bakal yang ikut membidani lahirnya Sekber Golkar. Dan sekarang organisasi ini telah menjadi besar dan bahkan telah dipercaya oleh rakyat didalam penyaluran aspirasinya.

Kebidanan dari Pak Ju, terhadap Sekber Golkar, itu timbul dari rasa kekhawatiran terhadap bahaya ancaman Komunis. Untuk membendung gerak dan langkah dari organisasi itu, Pak Ju mengajak teman-teman yang seaspirasi untuk menghadapi dengan secara fisik maupun dengan cara organisatoris. Di dalam Front Nasional dia bersama-sama pejuang-pejuang Abri dan rakyat, antara lain Mas Isman, Sukowati dan lain-lainnya.

Kegigihan perjuangan yang dilakukan oleh Pak Ju, tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Dalam masa Orde Baru, cita-cita untuk memperjuangkan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, terus saja dilakukan. Dan kesetiaan terhadap Orde Baru, seperti yang diungkapkan Sugandhi, sangat menonjol. Hampir dalam setiap kesempatan dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh Golkar, Pak Ju selalu hadir. Dan beliau, dalam suatu kesempatan selalu mengingatkan akan perlunya sikap dan konsitensi terhadap perjuangan cita-cita Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kekuatan Pancasila

Dalam wawancara dengan Media Karya, untuk memperingati hari ulang Tahun Golongan Karya, Oktober dua tahun lalu, Pak Ju, yang juga salah satu dari pendiri Sekber Golkar, merasa kagum atas perkembangan Golkar yang luar biasa saat ini. Dan bahkan keadaan yang seperti sekarang ini tidak pernah terbayang sebelumnya.

Kekaguman Pak Ju tidak hanya itu saja, malahan Pak Ju terkesan akan kegiatan Golkar dalam melakukan kaderisasi yang kini telah dapat mampu menjangkau desa-desa. "Kaderisasi ini memang merupakan cita-cita saya, sebab organisasi itu akan dapat berkembang, apabila mempunyai kader-kader yang tangguh," katanya.

Kader-kader tangguh memang dimiliki oleh Golkar sejak kelahirannya. Meski pada saat-saat awal kelahirannya, kata Pak Ju, jumlah kader itu tidak terlalu besar, tapi berani dan gigih menentang PKI yang akan mengelimir Pancasila.

Djuhartono, tokoh yang mengaku telah pensiun itu mengatakan, sejak semula Golkar itu tampil sebagai pembaharu. Bahkan beberapa saat setelah diresmikan, berani menantang partai-partai yang hidup dalam suasana "Orde Lama" untuk mengadakan pemilihan umum. Tentu saja, partai-partai yang saat itu merasa "mapan" mengecam usulan Golkar, yang saat itu bernama "Sekber Golkar" dan usul organisasi yang masih ingusan itu dianggap sebagai tindakan "avonturir politik yang membahayakan".

Pak Djuhartono, pensiunan Abri dan dengan pangkat terakhir Brigjen, merasa senang melihat perkembangan Golongan Karya saat ini. Apalagi dalam tubuh Golkar saat ini adanya tokoh-tokoh muda yang mempunyai pandangan luas dan telah tampil dalam kepemimpinan Golkar.

Dan untuk saat sekarang, Pak Ju berharap Golkar harus mampu mendewasakan diri, menjaga kesatuan dan persatuan, serta tetap aspiratip. Selamat jalan Pak Ju.☐ BM

Digitized by Google

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

Pemilu 1987 adalah wujud kedaulatan rakyat untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

Jayapura, Maret 1987
ttd
GUB. KDH. TK. I IRIAN JAYA

(IZAAC HINDOM)

Digitized by Google

KOMENTAR

Bencana Alam

SELAIN tentang gempa di Tarutung, berturut-turut terjadi pula sejumlah bencana alam di beberapa daerah lain di tanah air. Tanah longsor di Padang Panjang Sumatera Barat. Banjir di Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Setiap bencana, bagaimanapun menimbulkan keprihatinan. Bukan hanya yang mengalami langsung, tetapi juga sesama masyarakat di berbagai penjuru tanah air. Namun di tengah keprihatinan, selalu pula ada rasa terhibur dan kelegaan, karena rasa setia kawan masyarakat Indonesia tetap menonjol. Untuk bencana alam Tarutung, Padang Panjang dan lain-lain, mengalir bantuan spontan, baik dari unsur dalam pemerintahan, maupun organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan serta sesama anggota masyarakat sendiri.

Terhadap mekanisme penyampaian sumbangan itu, memang ada saja kritik, antara lain adanya ketidakmudahan prosedur dan kelambatan tibanya sumbangan ke tujuan. Kritik dan keluhan seperti ini tentu perlu ditampung dan kalau memang mengandung kebenaran, kiranya dapat dibenahi oleh pihak-pihak yang berwewenang. Pasti bukan hal yang disengaja, jadi tentu tidak ada halangan untuk menerima koreksi.

Lepas dari soal itu, dengan melihat bentuk bencana yang terbanyak, yakni banjir, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya bencana tersebut berasal mula dari perlakuan manusia sendiri terhadap alam. Banjir yang terjadi pada umumnya merupakan akibat pengrusakan hutan di masa-masa sebelumnya. Dan selama gejala pengrusakan hutan ini tak dapat dikekang, bencana serupa masih akan terjadi di masa depan. Perhatian dan tindakan perlu lebih ditingkatkan lagi terhadap masalah lingkungan ini !

Memberantas Korupsi

USAI pemilihan umum, beberapa tokoh kembali membicarakan masalah pemberantasan korupsi. Ada yang menyumbangkan pemikiran perlunya penterapan asas pembuktian terbalik, ada pula yang menganggap perangkat undang-undang yang ada sudah memadai. Lalu ada pula yang mengatakan yang lebih penting adalah tindakan nyata, bukan sekedar debat.

Semua pendapat, kelihatannya ada benarnya. Dan sementara itu adalah benar pula bahwa aparat-aparat pengawasan maupun aparat yang menangani tindak pidana khusus, juga terus menerus bekerja. Ini perlu disadari pula, karena setiap kali ada pembicaraan atau debat mengenai masalah korupsi, sering dikesankan bahwa aparat penegak hukum kurang berfungsi, kurang giat dan sebagainya. Memang apa yang menjadi harapan selalu lebih besar dari apa yang dicapai. Tapi toh tidak berarti harus tergesa-gesa memvonnis bahwa aparat pengawasan kita sama sekali tidak bekerja melakukan prevensi dan aparat penegak hukum segan melakukan tindakan represif.

Mereka bekerja. Dan mereka perlu diberi dukungan semangat, bahkan partisipasi yang lebih aktif secara positif. Untuk yang terakhir ini, anggota masyarakat manapun dapat melakukannya. Katakanlah dengan sekedar memberi informasi. Atau bila ingin lebih bersusah payah, jangan mau turut serta dalam kegiatan yang menyuburkan mental korupsi: jangan ikut menyuap, memberi uang semir, denda damai dan sebagainya dalam berurusan dengan aparat pemerintah di bidang pelayanan masyarakat dan sebagainya.

Korupsi memang adalah masalah kita bersama. Akar-akarnya berpijak dan tumbuh di tengah-tengah kita - sadar atau tidak - dan untuk mengakhirinya sedikit banyaknya membutuhkan peran kita bersama-sama pula ......

Pendaki Jayawijaya

Empat mahasiswa pendaki gunung dari Jakarta, tewas dalam upayanya mendaki puncak Cartensz pegunungan Jayawijaya di Irian Jaya. Kematian maupun sebab-sebab kematian — atau paling tidak dugaan penyebabnya — tidak cepat dikonfirmasikan. Akibatnya, timbul berbagai desas-desus diseputar masalah tersebut.

Dan bila desas-desus terlanjur beredar, sulit untuk membendungnya. Apalagi bila jawaban-jawaban yang berkompeten juga sama kurang jelas dan pastinya. Jawaban-jawaban yang juga kurang jelas pada akhirnya memperkuat spekulasi.

Bila memang yang berwajib belum dapat memastikan peristiwa dan latar belakang kematian pendaki gunung itu, setidak-tidaknya bisa diberikan keterangan berdasarkan visum. Suatu sistim informasi terbuka — apapun duduk persoalannya — agaknya tetap lebih baik....

Digitized by Google

GOLONGAN KARYA

Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Mengucapkan

Selamat Idul Fitri

1 Syawal 1407 H

Mohon Maaf Lahir & Bathin

Semoga Tuhan YME memberkahi Kita semua

Digitized by Google

Oleh : Drs Cosmas Batubara

Sejarah Lahirnya Orde Baru

Hasil dan Tantangan

Orde Baru tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia sejak diproklamasikannya negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Orde Baru lahir dan tumbuh dalam rangka penegakan kembali tatanan kehidupan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari rel Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti bahwa Orde Baru bertekad tetap melaksanakan cita-cita Proklamasi 1945 sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dinyatakan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Oleh sebab itu menjadi komitmen bagi Orde Baru untuk terus menerus mengupayakan agar Pancasila dapat benar-benar terrealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Uraian di bawah ini akan mengetengahkan kembali perkembangan kehidupan bangsa Indonesia sejak tahun limapuluhan sampai dengan tumbuhnya Orde Baru, tentang hasil-hasil yang dicapai Orde Baru, juga gambaran tentang tantangan-tantangan yang dihadapi di masa datang.

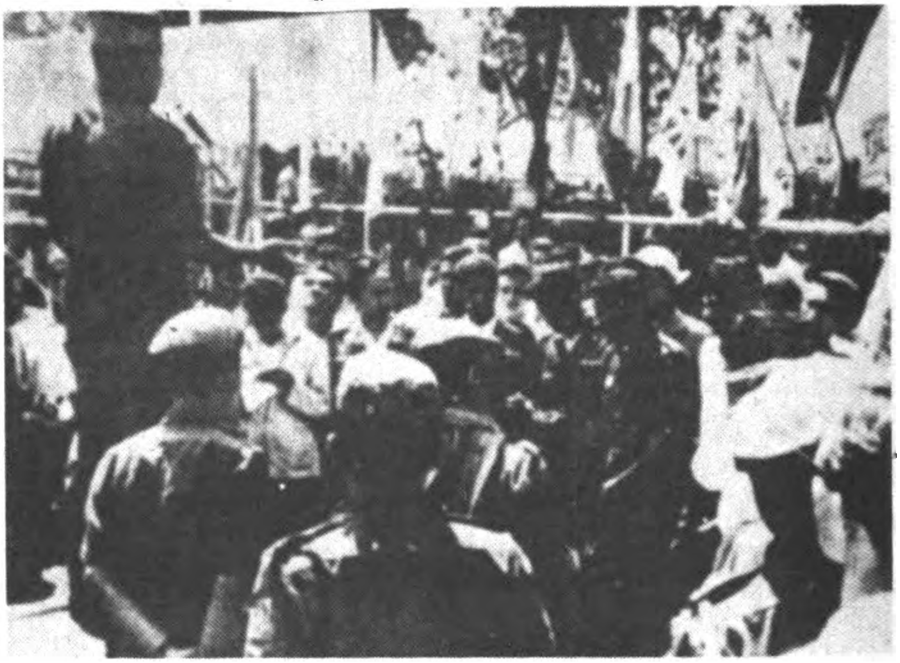

Orde Baru, mempunyai komitmen untuk terus mengupayakan agar Pancasila dapat terolisir dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan Tahun Limapuluhan Sampai Dengan Kembali Ke UUD 1945

Kehidupan kenegaraan Indonesia yang sebenarnya dapat dikatakan baru dapat berlangsung sejak tahun limapuluhan, karena pada periode tersebut kehidupan kenegaraan dapat berjalan tanpa adanya gangguan perang melawan pihak asing.

Perkembangan pada periode ini dimulai dengan berlakunya sistim politik yang lazim disebut Demokrasi Parlementer. Perkembangan politik sejak sistim Politik Demokrasi Parlementer sampai dengan periode berikutnya yang lazim disebut Demokrasi Terpimpin sangat diwarnai oleh tingkah laku partai-partai politik, Soekarno, Angkatan Perang dan timbulnya pergolakan-pergolakan daerah.

Dalam sistim Politik Demokrasi Parlementer peranan partai-partai politik sangat dominan. Partailah yang menentukan Kabinet. Partai pula yang mengatur anggota-anggotanya di Parlemen untuk mendukung Kabinet yang dibentuk partainya.

Partai-partai politik pada waktu perjuangan kemerdekaan sudah ada. Pada zaman pendudukan Jepang semua bubar, dan baru hidup kembali sewaktu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1945. Segera setelah itu tumbuhlah banyak partai-partai politik. Setelah Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, maka peralatan negara menurut UUD ini dibentuklah. Parlemen terbentuk. Anggota-anggota Parlemen berasal dari bekas anggota DPR RIS sejumlah 148 orang, bekas anggota Senat RIS 29 orang, bekas anggota Badan Pekerja KNIP 46 orang, bekas anggota DPA-RI 13 orang, seluruh anggota Parlemen 236 orang. Karena tidak ada satu partaipun yang mayoritas mutlak di Parlemen, maka Kabinet selalu dibentuk dalam bentuk koalisi. Kabinet pertama yang dibentuk ialah Kabinet Natsir. Kabinet ini merupakan koalisi dari Masyumi, PSI, Kristen Katholik, PIR dan beberapa partai lagi. Koalisi ini sifatnya tidak mempunyai satu pendirian. Sebagai contoh dapat dilihat sewaktu ada Mosi dari Hadikusumo dari PNI. Mosi ini meminta agar Peraturan Pemerintah tentang pembentukan DPRD ditinjau. Sewaktu Mosi ini dibicarakan di Parlemen, banyak partai yang duduk dalam Kabinet menyokong Mosi dari Hadikusumo, yaitu PIR, Parkindo dan Parindra.

Mosi ini menyulitkan posisi dari Kabinet. Kabinet jatuh karena PIR menarik seluruh menteri-menterinya. Koalisi di atas tidak dapat bertahan lama karena masing-masing partai hanya melihat dari sudutnya.

Suatu yang menarik dari Kabinet Natsir adalah hubungan yang baik dengan pimpinan Militer. Dalam program Kabinet tercantum salah satu program untuk menyempurnakan Organisasi Angkatan perang dan memulihkan bekas Anggota tentara dan Gerilya ke dalam masyarakat. Bahkan dalam rapat-rapat Kabinet Pimpinan Militer sering-sering hadir dan mempengaruhi putusan-putusan Kabinet.

Kerjasama Kabinet Natsir ini baik dengan militer karena Kabinet ini mengerti apa yang akan dikerjakan Pimpinan Militer. Dengan dimulai perbaikan disegala bidang, maka pimpinan militer tidak mau ketinggalan. Mereka mau menjadikan Angkatan perang yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan tulisan Herbert Feith yang mengatakan: "Tujuan mereka membangun Angkatan Perang yang kuat, kompak, memiliki kemampuan yang tinggi dan mempunyai nama yang harum di masyarakat."

Kegiatan dari Pimpinan Angkatan Perang untuk memperbaiki Angkatan Perang semuanya dapat dimengerti mengingat ke-

Digitized by Google

adaan Angkatan Perang selama revolusi pisik banyak yang tidak mempunyai tingkat pendidikan yang sebanding dengan posisi yang dipegang. Kesehatan kurang mencukupi, di setiap negara-negara sedang berkembang Pimpinan-pimpinan Angkatan Perang selalu ingin memodernisir Angkatan Perangnya; Lucian W. Pye menulis: "Jadi Angkatan Perang di negara-negara baru secara instinct tertarik dengan kemajuan-kemajuan tehnologi."
Sebagai Pimpinan Angkatan Perang yang mengetahui juga perkembangan angkatan perang di negara-negara yang sudah maju tentu tidak mau ketinggalan.

Memang di setiap negara yang sedang berkembang selalu terjadi perlombaan memodernisasi dari Angkatan Perang dengan lembaga-lembaga modern lain seperti partai politik. Lucian W. Pye lebih lanjut menulis mengenai Angkatan Perang sebagai berikut:

"Akan tetapi, militer selalu melihat keluar negeri dan membandingkan organisasinya dengan organisasi militer di luar negeri." Militer gandrung akan standard internasional dan sangat peka terhadap kelemahan-kelemahan masyarakat."

Hubungan yang baik antara Kabinet Natsir dengan Pimpinan Militer barangkali karena pribadi Natsir yang dapat memahami bagaimana Angkatan perang di negara yang sedang berkembang.

Sesudah Kabinet Natsir jatuh, maka formateur dipilih dari Masyumi juga. Dalam pemilihan ini Sukarno melakukan tindakan yang membuat Masyumi agak pecah. Sukarno memilih Sukiman menjadi formateur. Dipilihnya Sukiman jadi formateur tanpa persetujuan dari Natsir sebagai Ketua Eksekutip Masyumi. Herbeth menulis mengenai reaksi dari Natsir sebagai berikut:

"Hanya beberapa jam sebelum formateur menyampaikan susunan kabinet kepada Presiden, Dewan eksekutip Masyumi (Pimpinan Natsir) mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan Sukiman sebagai formateur tidak atas nama Masyumi"

Tindakan Sukiman tetap mau menjadi formateur tanpa ada persetujuan Natsir sebagai eksekutip Partai, menunjukkan kurangnya disiplin partai-partai. Kenyataan ini memperlihatkan pula bahwa di dalam Pimpinan Masyumi ada beberapa kelompok. George McT. Kehin membagi pengelompokan dalam Pimpinan Masyumi atas tiga kelompok. Yang disebut kelompok Religious, socialist terdiri dari Natsir, Moh. Roem, Burhanuddin Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara. Sukiman digolongkan Partai Masyumi yang dekat dengan Sukarno. Isa Anshary adalah orang yang dogmatis dalam approach.

Tingkah laku politik dari tokoh Masyumi ini menentukan bagaimana hari kemudian dari Masyumi sebagai partai. Sikap dari Isa Anshary terang tidak mendapat tempat di hati Sukarno dan Pimpinan Angkatan Perang.

Kalau hubungan Kabinet Natsir dengan Pimpinan Angkatan Perang baik, maka tidak demikian dengan Kabinet Sukiman meskipun sama-sama dari Masyumi. keretakan Angkatan Perang dengan Kabinet Sukiman berpangkal dari sikap dari Sewaka sebagai Menteri Pertahanan.

Usaha-usaha dari Pimpinan Angkatan Perang untuk mengadakan demobilisasi, latihan militer, pendidikan-pendidikan bagi anggota-anggota Angkatan Perang tidak mendapat sambutan dari Menteri Pertahanan.

Selain Menteri Pertahanan tidak memberikan sambutan yang baik tehadap usaha-usaha Pimpinan Angkatan perang untuk mengadakan perbaikan, Menteri Pertahanan malahan mengadakan hubungan dengan tokoh Angkatan Perang yang tidak senang kepada Pimpinan Angkatan Perang.

Sikap Menteri Pertahanan ini ditambah lagi perbedaan-perbedaan pendapat dalam menghadapi daerah yang bergolak, menyebabkan Pimpinan Angkatan Perang mengambil langkah-langkah sendiri.

Herbert Feith menulis:

"Sebagai konskwensi pimpinan Angkatan Perang makin lama makin bertindak tanpa konsultasi dengan anggota-anggota kabinet."

Rupanya keretakan antara Pimpinan Angkatan Perang dengan para Pimpinan Partai tidak berhenti pada waktu Kabinet Sukiman. Pimpinan Angkatan Perang tetap meneruskan program reorganisasi latihan-latihan dan pendidikan di mana tujuannya ialah menjadikan Angkatan Perang Indonesia sebagai Angkatan Perang modern. Instruktor-instruktor dari Belanda dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Angkatan perang di negara-negara sedang berkembang pada umumnya menyesuaikan organisasinya dengan organisasi Angkatan Perang di negara modern.

Perbedaan pandangan untuk memodernisir Angkatan Perang antara Pimpinan Angkatan Perang dengan partai Politik berpindah ke Parlemen.

Di Parlemen timbullah suara-suara mengeritik usaha-usaha Pimpinan Militer. Suara ini dimulai oleh Ketua Komisi Pertahanan Parlemen. Kritik terhadap usaha-usaha perbaikan Angkatan Perang ini sampai pula menuduh Menteri Pertahanan yaitu Sultan Hamengkubuwono dalam Kabinet Wilopo sebagai orang a nasional pro Belanda.

Dalam Parlemen timbul Mosi dari Zainul Baharuddin (PRN) disokong oleh Murba. Isi mosi menuntut perobahan Pimpinan Angkatan Perang dan bentuk suatu komisi untuk meneliti administrasi dan keuangan Angkatan Perang.

Mosi dari Zainul Baharuddin demikian ini dicounter oleh Mosi dari J. Kasimo (Partai Katolik) didukung oleh Masyumi, Partai Buruh, Parkindo dan Parindra. Suasana dalam Parlemen mulai makin panas, PNI sebagai partai besar belum mengeluarkan suara apakah mendukung mosi yang pertama atau yang kedua.

Pimpinan PNI belum mengambil sikap Pimpinan PNI ini terdiri dari kelompok-kelompok juga. Kehin menulis tentang Pimpinan PNI sebagai berikut:

"Sesungguhnya, Pimpinan dari salah satu partai besar terdiri dari dua kelompok besar, yaitu kelompok irrasionil nasionalist yang emosionil dan kelompok nasionalist yang rasionil".

Di kalangan PNI situasi Parlemen menjadi perdebatan. Kelompok Sidik yang boleh dikatakan termasuk kelompok irrasional nasionalist yang emosionil bersikap keras. Kelompok ini tidak khawatir akan adanya krisis kabinet. Manai Sophian (PNI) mengeluarkan mosi yang didukung

Digitized by Google

Ucapan Terima Kasih

Dalam rasa duka kami mengucapkan terimakasih yang tulus, atas segala perhatian dan bantuan baik moril maupun materiil yang telah diberikan pada waktu sakit, wafat hingga dimakamkannya Anak, Suami, Ayah, Eyang dan Saudara kami:

May.Jend. TNI (Purn.) DJUHARTONO

Pinisepuh GOLKAR
dalam usia 62 tahun

Yang telah meninggal dunia dengan tenang pada hari Minggu 10 Mei 1987 pukul 23.47 WIB di RS Gatot Subroto Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 1987.

Terimakasih kami sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Presiden R.I. dan Ibu Suharto
2. Bapak Wakil Presiden R.I. dan Ibu Umar Wirahadikusumah
3. Menteri Sekretaris Negara dan Ibu Sudharmono
4. Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam
5. Menteri Keuangan Radius Prawiro
6. Menteri Pertahanan Keamanan Poniman
7. Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal TNI L.B. Moerdani
8. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Try Sutrisno
9. Sekretaris Militer Presiden May.Jen. Syaukat beserta Ibu
10. Aspers Kasum Abri Marsekal Muda TNI Sudarma
11. Panglima Kodam V Jaya May.Jen. TNI Sugito
12. Kapolda Metro Jaya May.Jen. Pol Drs. M. Poedy Syamsudin S.
13. Panglima Kodam IV Diponegoro May.Jen. TNI Setijana
14. Wakil Ketua DPR RI Hardjanto Sumodisastro
15. Pimpinan dan seluruh Keluarga Besar Golongan Karya
16. KGPH H. Mangkubumi S.H.
17. Rektor UGM Prof.Dr. Koesnadi Hardjosoemantri S.H.
18. Para dokter dan perawat I.C.U. RS. Gatot Subroto Jakarta
19. Segenap warga RT 01 Jalan Praja, Tanah Kusir Jakarta Selatan
20. Segenap warga RK Langenastran Yogyakarta
21. Seluruh organisasi, Lembaga Pemerintah/Swasta, kerabat dan handai taulan yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu

Semoga Allah Subhana Wa Taala melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada bapak/Ibu/Sdr. sekalian. Kami mohon keihlasan untuk memaafkan segala kesalahan Almarhum semasa hidupnya. Amin.

Kami yang berdukacita:

Ny. Dayati Imam Muhni	Ibu
Ny. Siti Rachma Djuhartono	Istri
Nuranto Djuhartono & Ida Yustina	anak
Nurharianto Djuhartono & Meity Inaray	anak
Nurhardianto Djuhartono & Srikunmaryati	anak
Nurhendarto Djuhartono & Desy Meryana	anak
Rony Indra Tjahyana & Nurachmaningrum	anak
Letnan Dua Pol Nursaptono Djuhartono	anak
Mardiadi Hery Wibowo & Nur Dewi Irianti	anak
Adi, Adri, Danti, Aryo, Ayu, Yani, Tanto, Yana, Maya, Oky	cucu
May. Jen. Pol (purn.) Drs. Djunarsa M.A. dan keluarga	Kakak
Sumarti Sukowinadi dan keluarga	Kakak
Djuretno Adi M.A.	Adik
Djumaryo Imam Muhni dan keluarga	Adik
Dr. Indro Said dan keluarga	Adik
Dra. Djuhertati M.A.	Adik
Gotaman B.A. dan keluarga	Adik
Goeder Bc Hk. dan keluarga	Adik

Digitized by Google

oleh PSII, NU, yang isinya lebih keras dari mosi sebelumnya. Menurut Herbert Feith mosi ini mengarah pula kepada penggantian Pimpinan tertinggi dari Angkatan Perang.

Perbedaan pendapat di kalangan PNI ada. Wilopo sebagai Perdana Menteri berusaha agar mosi Manai Sophian ini ditarik. Adanya dua pendapat di kalangan PNI menyebabkan campur tangannya Sukarno. Sukarno meminta PNI (Sartono Suwirjo) untuk menyokong mosi Manai Sophian. Dengan sikap Sukarno ini, maka mosi ini diterima dengan suara terbanyak di Parlemen. Dari kenyataan ini kelihatan bagaimana tergantung PNI kepada Sukarno. Ini adalah salah satu kelemahan PNI.

Mosi Manai Sophian ini lebih menegangkan lagi hubungan pimpinan Angkatan Perang dengan Partai-partai Politik. Peristiwa ini lebih menebalkan rasa ketidakpuasan Pimpinan Angkatan perang kepada Partai-partai Politik. Puncak dari mosi Manai Sophian ini terjadilah Demonstrasi ke Parlemen dan tuntutan Pimpinan Angkatan Perang kepada Presiden untuk membubarkan Parlemen. Peristiwa ini terkenal dengan sebutan peristiwa 17 Oktober 1952. Selama Kabinet Wilopo ini rasa kedaerahan makin bertumbuh pula.

Keadaan ekonomi pada waktu ini memang paling jelek jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keadaan ekonomi yang jelek ini menambah lagi bertumbuh rasa kedaerahan.

Timbullah issue kekurangan biaya untuk daerah-daerah, terlalu banyak untuk Pusat.

Kabinet Wilopo diganti oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini merupakan koalisi dari PNI, NU, PIR, PSII, BTI, Partindo, Partai Buruh dan ada yang tidak berpartai. Dalam kabinet ini tidak duduk Masyumi, PSI, Parkindo, Katolik.

Kalau dipakai istilah dari Herbert Feith, maka Kabinet ini termasuk Kabinet dari "Solidarity-maker".

Terhadap Masyumi rupanya sudah dimulai isolasi dari Kabinet. Rupanya suara yang dikemukakan Isa Anshary menimbulkan kekhawatiran pula di kalangan PNI dan Partai-partai kecil lain:

Bagi NU dan PSII dengan tidak ikutnya Masyumi mendapat kesempatan pula untuk menjadi kelompok Islam di Kabinet. Usaha-usaha Masyumi untuk menjadi pelopor mempersatukan Partai-partai Islam tidak berhasil. Kalau dilihat dari susunan Kabinet, maka terlihat yang menonjol adalah PNI dan Partai yang beraliran nasional. Meskipun PKI tidak masuk, tapi ada pendapat mengatakan bahwa anggota Kabinet ada yang dekat ke PKI. Bagi PKI rupanya hal itu sudah cukup, yang jelas dalam Kabinet ini tidak duduk dua lawan utama PKI, yaitu Masyumi dan PSI.

Kabinet Ali walupun mendapat dukungan dari Sukarno tidak dapat melawan tekanan dari Angkatan perang. Peristiwa

Soekarno & Cosmas Batubara

17 Oktober menyebabkan keretakan di kalangan Angkatan Darat.

Semasa Kabinet ini dihilangkanlah jabatan Kepala Staf Angkatan Perang. Usaha-usaha untuk mempertemukan kelompok-kelompok pro dan kontra peristiwa 17 Oktober dikerjakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Di dalam pertemuan di Yogyakarta yang dihadiri oleh 270 perwira berlangsung dari 17 - 25 Februari 1955, menghasilkan kesimpulan yang merupakan pegangan dari Angkatan Darat.

Herbert Feith menulis hasil pertemuan sebagai berikut:

"Resolusi dari pertemuan itu juga meminta agar ada kejelasan pengaruh politik kepada Angkatan Perang. Ditekankan bahwa kemampuan tehniklah merupakan persyaratan pimpinan militer."

Kalangan militer sudah mengkonsolidasikan diri lebih rapih dari sebelumnya. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf Angkatan Darat mengundur diri, sebagai pengganti dari Bambang Sugeng Kabinet mengusulkan nama dari perwira yang anti peristiwa 17 Oktober kepada sukarno dan Hatta. Pertemuan dari para Panglima Territorial berpendapat harus berdasarkan senioritas.

Ketegangan antara Kabinet dengan Angkatan Darat makin meruncing karena ditunjuknya Bambang Utojo sebagai Kepala staf yang tidak merupakan perwira yang paling senior. Pelantikan Bambang Utojo tidak mendapat sambutan dari perwira Angkatan Darat. Karena persoalan Kepala Staf Angkatan Darat ini kemudian Kabinet jatuh. Kabinet Ali segera diganti Kabinet Burhanuddin Harapan. Dalam kabinet ini selain Masyumi duduk pula NU, PSII, PIR Hazairin, PSI, Katolik, Parkindo dan lain-lain. Dalam pembentukan Kabinet ini kembali Masyumi mencoba menarik semua partai-partai islam. Kalau dilihat dalam komposisi ini kelihatan sekali bahwa koalisi ini tidak jauh berbeda dengan koalisi Kabinet Ali dalam jumlahnya.

Kabinet Ali jatuh karena persoalan Angkatan Darat. Kabinet ini menghadapi persoalan pengisian Kepala Staf Angkatan Darat. Usul dari kalangan Angkatan Darat sesuai dengan senioritas adalah Kolonel Simbolon, Kolonel Nasution dan Gatot Subroto. Setelah mengalami perdebatan yang berbagai segi, pada tanggal 27 Oktober 1955 Kolonel Nasution disetujui oleh Kabinet menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Nasution tampil memimpin Angkatan Darat. Pengalaman peristiwa 17 Oktober 1952 sangat besar pengaruhnya kepada tingkah laku politik dari Nasution. Herbert Feith menulis:

"Kejadian ini merubah pemikiran-pemikiran Nasution, sekarang ia tampil dan berusaha berbaik-baik (reconciliation) dengan Presiden."

Usaha Nasution mendekati Sukarno tentu berdasarkan atas realitas. Meskipun Sukarno secara Konstitusionil tidak besar kekuasaanya, tetapi secara riil ia sangat berpengaruh. Pengaruh Sukarno tentu berdasarkan kepemimpinannya selama perjuangan kemerdekaan.

Pendekatan yang dilakukan Nasution kepada Sukarno tidak begitu diperhatikan oleh tokoh Partai Politik. Kelihatan kalau ada conflict antara Kabinet dengan Presiden. Nasution berpihak kepada Presiden. Kekompakan Angkatan Darat dengan Sukarno merupakan suatu kekuatan yang besar. Memang kenyataan ini sukar diterima oleh partai-partai. Dalam Demokrasi Parlementer partailah seharusnya yang paling menentukan. Tetapi dalam banyak hal partai-partai tidak dapat berbuat.

Pemilihan Umum dianggap akan banyak menolong ketidakstabilan politik. Dalam kampanye ini Partai Masyumi tampil dengan issue Negara Islam. Partai-partai berusaha sekuat mungkin untuk mendapat suara sebanyak mungkin. Hasil dari Pemilihan Umum ini keluarlah 4 Partai besar, yaitu Masyumi 57 kursi, PNI 57 kursi, NU 45 dan PKI 39 kursi. Mengenai kemenangan dari keempat partai besar ini karena penguasaan terhadap tokoh-tokoh penting di desa atau kampung.

Rosihan Anwar berpendapat sebagai berikut:

"Pemilihan Umum tahun 1955 memperlihatkan ada 4 macam pemimpin di desa, baik pemimpin formil maupun informil. Pertama, ulama, guru agama atau kiyai. Kedua, lurah, kepala desa. Ketiga, apa yang dinamakan "Al Capone". Keempat, guru-guru di desa.

Masyumi dan Nahdatul Ulama (terutama partai-partai Islam) bekerja melalui ulama-ulama, PNI bekerja melalui lurah, PKI bekerja melalui "al capone" dan terakhir partai kecil PSI dimana saya bekas anggota bekerja melalui guru-guru dan kalah total".

Kalau dianalisa kemenangan PKI, maka bukan karena menggunakan "al capone"

Digitized by Google

seperti pandapat Rosihan Anwar, tetapi karena issue PKI cocok dengan rakyat di pedesaan, khususnya petani-petani dan buruh. selain itu organisasi PKI jauh lebih rapi bila dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Kader PKI lebih memberikan seluruh perhatiannya kepada partai. Dan yang lebih pokok lagi tokoh-tokoh PKI belum pernah masuk Kabinet, jadi lebih mudah bagi mereka menuduh yang lain korupsi.

Dengan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Umum, hasil Pemilihan Umum 1955, maka Kabinet Burhanuddin mengembalikan mandat kepada Presiden.

Untuk membentuk Kabinet baru sebagai hasil dari Pemilihan Umum, Presiden menunjuk Ali Sastroamidjojo sebagai formateur. Ali Sastroamidjojo mengalami kesulitan karena perbedaan pendapat tentang komposisi dan personalia di antara partai-partai. Pimpinan PNI menugaskan kepada Ali supaya membentuk koalisi PNI, Masyumi dan NU daripada PNI, NU dan PKI; PKI meminta agar dibentuk Kabinet yang memuat semua kekuatan yang ada.

Rupanya di kalangan partai-partai politik pada waktu itu yang penting masuk Kabinet. Kelihatan tidak ada partai yang berani dengan sukarela menjadi Oposisi di Parlemen. Padahal untuk timbulnya suatu persaingan yang sehat harus ada yang berani jadi oposisi di Parlemen.

Komposisi Kabinet Ali ke II kemudian tersusun yang merupakan koalisi dari PNI, Masyumi, NU, PSII, Parkindo, Katolik, Partai IPKI, dan tidak berpartai; PSI dan PKI tidak masuk. Kabinet ini menghadapi persoalan ekonomi yang semakin lama semakin merosot. Persoalan kedaerahan lebih berkembang lagi. Banyak barter terjadi di daerah-daerah dan didukung serta dilakukan oleh Panglima-panglima Daerah. Alasan karena kurang anggaran dari Pemerintah Pusat.

Suatu tindakan yang berani dari Panglima Jawa Barat ialah menahan Menteri Luar Negeri. Perintah penahanan ini kemudian dibatalkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Meskipun ada kegoncangan di kalangan Angkatan Darat tetap Kepala Staf masih berani bertindak membatalkan usaha menangkap seorang Menteri. Nasution kembali menyusun Angkatan Darat dengan mengganti beberapa Panglima Daerah. Usaha Lubis untuk menggeser Nasution tidak berhasil. PKI sebagai partai di luar Kabinet selalu berusaha mendukung Sukarno. Kelompok Chairul Saleh tampil mendukung segala ide-ide Sukarno. Pidato-pidato Sukarno yang mengritik Partai Politik mendapat sambutan dari kelompok ini. Sukarno mengeluarkan ide Demokrasi Terpimpin untuk mengatasi semua hal, termasuk pergolakan daerah dan ketidakmampuan partai-partai politik.

Anggota-anggota Parlemen mengadakan interpelasi untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh Presiden dengan Demokrasi Terpimpin. Menurut catatan Sekretariat DPR, keterangan yang diminta tidak pernah diberikan.

Presiden malahan memberi keterangan di Istana kepada tokoh-tokoh partai dan masyarakat. Sikap Sukarno ini berarti memberi penilaian sangat rendah kepada parlemen.

Di kalangan Kabinet Ali ke II tidak ada kesepakatan terhadap Konsepsi Sukarno, memang sudah dapat diperhitungkan mengingat komposisi dari Kabinet antara Masyumi dan PNI pasti tidak dapat bersatu pandangannya terhadap gagasan Sukarno. Kabinet ini kemudian menyerahkan mandatnya.

Kalau diteliti seluruh Kabinet koalisi selalu jatuh karena tidak ada kekompakan. Masing-masing partai masih hanya melihat kepentingan partai sendiri. Hal ini sesuai apa yang ditulis oleh Prof. Dr. Ismail Sunny tentang Kabinet Koalisi:

"Untuk sebagian besar dari pemimpin-pemimpin partai, kepentingan partainya adalah lebih primer daripada bekerja sebagai satu team dalam kabinet".

Kejatuhan Kabinet Ali bersama pula dengan diumumkannya Keadaan Bahaya Perang (SOB) di seluruh Indonesia. Keadaan Bahaya Perang berarti peranan Militer lebih besar daripada partai politik. Meskipun negara berdasarkan Demokrasi Parlementer, tetapi peranan Parlementer hampir tidak ada artinya.

Presiden Sukarno menunjuk Suwirjo dari PNI untuk membentuk Kabinet. Diinstruksikan agar Kabinet merupakan koalisi dari partai-partai besar. Karena Suwirjo tidak berhasil membentuk Kabinet seperti yang diharapkan Sukarno, maka sekali lagi ditugaskan membentuk Kabinet dari orang-orang ahli tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan Partai-partai. Ini juga gagal, kalau dipelajari tahapan-tahapan sikap Sukarno terhadap partai-partai, pada tahap pertama dia masih memberi tempat, tapi pada tahap yang terakhir ia tidak begitu menilai lagi. Kegagalan Suwirjo sebagai tokoh partai membentuk Kabinet menyebabkan Sukarno bertindak sendiri

PEKAN RAYA JAKARTA

sarana yang tepat untuk mempromosikan hasil-hasil produksi anda

HUBUNGI

SEKRETARIAT
BADAN PENGURUS PRJ
JL SILANG MONAS
JAKARTA PUSAT
TELP 347200: 359221
TELEX 44557, 44558 PRJ IA

Digitized by Google

membentuk Kabinet. Tindakan ini di luar kebiasaan.

Banyak kritik, tapi tidak ada yang berani menghadapi. Sejak Nasution kembali menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ia sangat dekat kepada Sukarno. Sikap Angkatan Darat seperti ini sudah merupakan hal yang logis mengingat pertentangan-pertentangannya dengan partai-partai politik.

Kabinet yang dibentuk Sukarno dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda dan beberapa dari PNI, NU dan yang tidak berpartai.

Kabinet karya ini mempunyai program 5 pokok, Daniel S Lev menulis bahwa program ini ditentukan oleh Sukarno, yaitu:

''1. Mendirikan Dewan Nasional. 2. Menormalisir keadaan Republik Indonesia, 3. Melanjutkan pelaksanaan pembatalan perjanjian KMB, 4. Melanjutkan perjuangan Irian Barat, 5. Mempergiat pembangunan''.

Suatu kelemahan dari partai politik yang ada di Parlemen waktu Pemerintah memberikan keterangan di Parlemen, di Parlemen tidak ada yang mengajukan usul resolusi atau mosi. Di dalam buku seperempat abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditulis sebagai berikut:

''Setelah Pemerintah memberikan jawaban pada tanggal 7 Jui 1957 tersebut pembicaraan program kerja Kabinet Djuanda ini dianggap selesai karena tidak ada suatu usul resolusi maupun mosi yang masuk''.

Banyak penilaian diberikan kepada partai politik dengan terbentuk dan disetujui secara diam-diam Kabinet Djuanda.

Kehin menulis: ''Dengan pelantikan kabinet ini telah dihilangkan peranan parlemen dan partai politik, dan meningkatkan peranan Presiden dan Angkatan Perang''.

Pada 12 Mei 1957 Kabinet Karya membentuk Dewan Nasional dengan Ketua Sukarno, Wakil Ketua Ruslan Abdul Gani. Dewan ini bertugas memberi nasehat kepada Kabinet. Masyumi sejak semula tidak menyetujui pembentukan Dewan Nasional.

Keanggotaan Dewan Nasional: ''a). Golongan fungsionil di dalam masyarakat. ''b). Orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah. c) Pejabat-pejabat militer dan sipil yang dianggap perlu, d). Menteri-menteri yang dipandang perlu''.

Dewan Nasional ini kemudian banyak membicarakan masalah kenegaraan. Yang paling lama dibahas adalah soal Demokrasi Terpimpin.

Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin salah satu eksponen adalah Golongan Karya. Golongan Militer sangat banyak berbicara di Dewan Nasional ini. Usul dari Nasution agar militer termasuk Golongan Karya, diterima.

Dalam usul Dewan Nasional kepada Kabinet dirumuskanlah mengenai Golongan Karya sabagai berikut:

''Golongan fungsionil adalah alat demokrasi berupa penggolongan Warganegara Indonesia menurut tugas pekerjaan dalam lapangan produksi dan jasa dalam melaksanakan pembangunan masyarakat adil, makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia''.

Dengan diterima usul perumusan Golongan Karya di Dewan Nasional berarti memberi tempat kepada kegiatan politik dari Angkatan Bersenjata di segala bidang.

Adanya tuntutan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, setelah tidak ada persesuaian pendapat di antara partai-partai dan golongan tentara mengenai besarnya perwakilan golongan fungsionil di Parlemen.

Kabinet Djuanda menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan perasaan setengah-setengah dari NU seperti apa yang ditulis Daniel S. Lev.:

''Dengan perasaan setengah-setengah (reluctantly) Idham menyetujui NU menyokong putusan Kabinet menerima UUD 1945, meskipun hal ini berarti kemenangan Pancasila di Konstituante''.

Usul kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 datang dari Nasution, sebab dengan Undang-Undang Dasar 1945 akan ada tempat bagi Golongan Karya, ini berarti akan ada tempat bagi Angkatan Bersenjata secara formil ikut dalam politik.

Dengan Dekrit Presiden dinyatakanlah berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Keputusan. Presiden Nomor 4 tahun 1960 dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan komposisi sebagai berikut: Golongan Nasionalis 99 orang, Golongan Islam 95 orang, Golongan Komunis 30 orang, Kristen Katolik 13 orang, Golongan Karya 163 orang. Dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dibentuk Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana Golongan Karya masuk, ditambah pula dalam sistim Undang-Undang Dasar 1945 posisi Presiden lebih kuat, maka terlihat dalam kehidupan politik selanjutnya peranan Sukarno dan Angkatan Darat makin menonjol dan menentukan.

PKI meskipun tidak masuk dalam Kabinet, tetapi dengan hancurnya peranan dari Masyumi dan PSI (Karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat diakui sebagai partai politik) maka posisinya lebih baik lagi jika dibandingkan dengan posisinya pada tahun-tahun limapuluhan.

Perkembangan Tahun Enampuluhan Sampai Dengan Meletusnya G 30 S PKI.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada awal tahun enampuluhan dalam kehidupan politik kenegaraan terdapat tiga buah pusat kekuatan politik. Yang pertama adalah Sukarno, kedua ABRI dan ketiga adalah PKI.

Pada periode ini sistim politik yang berlaku ialah apa yang disebut Demokrasi Terpimpin, dan pada masa itu revolusi dijadikan thema sentral dari kehidupan politik dan kenegaraan.

Sebagai konsekwensinya maka kepentingan revolusi dijadikan titik sentral pertimbangan di dalam memecahkan problematika-problematika nasional dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan Hankam. Karenanya sering kita dengar ungkapan-ungkapan yang sloganistis revolusioner seperti sesama kekuatan progresif revolusioner berporoskan NASAKOM harus disatupadukan untuk kepentingan revolusi dan wadahnya adalah Front Nasional.

MANIPOL-USDEK serta seluruh pidato-pidato Presiden Sukarno (almarhum) pada peringatan Proklamasi setiap tahun merupakan keseluruhan doktrin-doktrin untuk menuntun jalannya revol

Digitized by Google

Demonstrasi KAMI/KAPPI/KAPI di muka Istana Merdeka.
Tanggal 01 Oktober 1966

bawah pimpinan satu komando yaitu Pemimpin Besar Revolusi yang berada di tangan Presiden Soekarno.

Dalam keadaan yang demikian dirasakan bahwa peranan Pancasila dan UUD'45 semakin hari semakin tergeser oleh TUBAPI (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi).

PARPOL/ORMAS yang dianggap tidak progresif revolusioner apalagi menghambat jalannya revolusi dibubarkan. Parpol Murba juga dibubarkan karena juga dianggap menghambat jalannya revolusi.

Sementara itu keadaan perekonomian kita pada masa itu menunjukkan keadaan yang cukup sulit. Laju inflasi telah mencapai angka sekitar 400-650%. Akibatnya harga barang termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok telah melonjak dengan tak terkendalikan. Keadaan ini tentunya memukul mereka yang relatif berpenghasilan tetap seperti buruh, petani, pegawai negeri dan ABRI. Defisit anggaran belanja semakin membesar yang ditutup dengan pencetakan uang. Hal ini menyebabkan tingginya angka inflasi di samping persediaan barang yang sangat kurang dibandingkan dengan permintaan. Pada waktu itu sering kita menjumpai rakyat antri untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Persediaan devisa juga menunjukkan angka menipis sekitar US$ 140 juta (atas dasar US$ 1 = Rp. 45.-) pada akhir 1965. Karena persediaan devisa yang sangat terbatas maka import barang dari luar negeri termasuk untuk kebutuhan yang vital seperti: beras, tekstil, mesin-mesin dan spare parts juga sangat terbatas. Akibatnya persediaan barang-barang di dalam negeri sangat terbatas dan produksi tidak dapat berjalan secara penuh karena kurangnya mesin-mesin dan spare parts. Karena terdapat perbedaan yang besar antara kurs resmi dan kurs di luar untuk mata uang asing, maka terbentuk pasar gelap.

Konsep ekonomi Berdikari yang dilihat dari sudut gagasannya adalah sehat, karena keadaan ekonomi yang demikian itu tidak berjalan sehingga hanya menjadi slogan belaka. Sebagai sumber pembiayaan non budgetair telah diciptakan Dana Revolusi untuk membiayai proyek khusus yang diputuskan oleh Presiden Soekarno.

Di bidang luar negeri dijalankan politik luar negeri yang bebas aktif tetapi dengan mengenal poros Jakarta — Hanoi — Pyongyang — Peking. Politik konfrontasi dengan Malaysia dijalankan karena Malaysia merupakan proyek NEKOLIM yang melakukan pengepungan terhadap Indonesia. Indonesia keluar dari PBB karena PBB merupakan pencerminan OLDEFO dan tidak sesuai dengan gagasan pembentukan NEFO. NEFO perlu didirikan yang berintikan rakyat negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan blok negara Sosialis. Dalam bidang Hankam dilontarkan pembentukan gagasan Angkatan ke V oleh Presiden Soekarno dan Angkatan ke V ini terdiri daripada rakyat yang patriotik yang berintikan buruh dan tani yang dipersenjatai.

Demikianlah pokok-pokok gambaran umum situasi di masa prolog G 30 S/PKI.

Dari bukti-bukti yang kemudian diungkapkan dalam sidang MAHMILUB (antara lain bekas ex. Waperdam I Dr. Subandrio dan ex. Men Pangau Umar Dani) ternyata bahwa banyak dari gagasan di atas berasal dari PKI.

Dalam Sidang MAHMILUB bekas Waperdam I Dr. Subandrio diperoleh fakta bahwa gagasan pembentukan Angkatan ke V berasal dari PKI yang memperolehnya dari RRT. Selanjutnya ternyata bahwa latihan-latihan para sukarelawan di Lobang Buaya dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia merupakan cikal bakal pembentukan Angkatan ke V dan para sukarelawan ini telah ikut serta dalam penculikan dan pembunuhan beberapa PATI Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965 dinihari.

Demikian pula dalam sidang MAHMILUB ex. Waperdam I Dr. Subandrio, Presiden Soekarno telah memberikan surat

Digitized by Google

[redacted]an bahwa Nyoto (sebagai salah seorang anggota CC PKI) yang menyusun naskah Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1965.

Berbagai gagasan kebijaksanaan politik yang dilakukan pada masa itu banyak menguntungkan PKI atau telah dieksploitir oleh PKI untuk kepentingannya dalam rangka persiapan melancarkan pengambil-alihan kekuasaan Negara yang ternyata kemudian dilakukan dengan gerakan G 30 S/PKI[redacted]

Dengan [redacted] pengertian kompartemensasi (pengkotak-an) golongan-golongan maka PKI dianggap mewakili golongan Komunis memperoleh legalitas untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Penolakan NASAKOM dalam pengertian yang demikian ini berarti NASAKOM phobi dan ini berarti kontra revolusi. Keadaan ekonomi yang makin merosot terutama dilihat dari sudut kurangnya persediaan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari telah dipergunakan oleh PKI untuk menjalankan proses pemelaratan rakyat.

Dengan demikian maka dilakukan doktrin teori pemelaratan (Verelendung Teorie) dan hal ini guna lebih mematangkan situasi revolusioner.

Politik luar negeri bebas aktif dengan mengenal poros Jakarta — Hanoi — Pyongyang — Peking memberikan keuntungan kepada PKI dalam arti memberikan posisi menawar (bargaining position) yang lebih kuat kepada PKI. Dengan dalih konfrontasi terhadap Malaysia di Lobang Buaya telah dilakukan latihan-latihan militer bagi sukarelawan yang terdiri dari Ormas PKI.

Untuk memperkuat daerah perbatasan dan kepungan NEKOLIM maka ABRI telah dikirim ke daerah-daerah perbatasan. Hal ini secara militer akan menguntungkan PKI jika pada waktu D-D nya perlu melakukan operasi militer di pusat-pusat pemerintahan. Gagasan pembentukan Angkatan ke V dengan jalan mempersenjatai rakyat yang patriotik (yang ada didominir oleh PKI) merupakan langkah strategis yang akan memperlancar perebutan kekuasaan dengan mempergunakan kekuasaan senjata. Jika gagasan ini dapat diwujudkan tentu sekurang-kurangnya akan sangat mempersulit operasi penumpasan kekuatan fisik G 30 S/PKI.

Demikianlah sepintas kilas gambaran Tanah Air kita menjelang meletusnya G 30 S/PKI yang mengakibatkan lahirnya Orde Baru, yaitu suatu tatanan kehidupan yang menghendaki dilaksanakannya kembali kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen yang sekaligus merupakan koreksi total dari segala yang penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD'45 di segala bidang kehidupan.

G 30 S/PKI

Keadaan tanah air pada prolog G 30 S/PKI sekitar tahun-tahun 1963-1965 ter[redacted] dibandingkan dengan kekuatan politik lainnya termasuk ABRI. Karenanya akhir tahun 1965 menurut penilaian PKI keadaan ini cukup matang bagi PKI untuk mengambil alih kekuasaan negara dengan jalan kekerasan. Hal ini jelas terungkap oleh ucapan seorang tokoh PKI Anwar Sanusi bahwa keadaan tanah air sudah dalam keadaan hamil tua. Dengan demikian maka G 30 S/PKI merupakan perpaduan antara situasi objektif sebagaimana digambarkan di depan dengan kehendak subjektif dari PKI untuk merebut kekuasaan negara.

Pengambilan kekuasaan negara ini dimulai dengan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa PATI Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965. Jam 6.00 pagi melalui RRI telah diumumkan adanya Dewan Revolusi sebagai sumber dari segala kekuasaan Negara RI dan selain itu dilakukan pula pendemisioner Kabinet DWIKORA. Dewan Revolusi dipimpin oleh Letkol Oentoeng yang pada waktu itu menjabat selaku Komandan Kawal Kehormatan pada Resimen Cakrabirawa.

Di dalam Keputusan Presiden Dewan Revolusi Nomor 1 mengenai susunan Dewan Revolusi tidak tercantum nama gembong-gembong PKI seperti Aidit, Nyoto, Sudisman. Demikian pula nama Presiden Soekarno tidak tercantum dalam Dewan Revolusi tersebut.

Didudukkannya Letnan Kolonel Oentoeng sebagai Komandan Kawal Kehormatan mungkin untuk memberikan kesan bahwa G 30 S/PKI merupakan usaha pengamanan Presiden dari Coup Dewan Jenderal sebagaimana diisukan PKI. Selain itu didudukkannya Letnan Kolonel Oentoeng adalah untuk memberikan kesan bahwa masalah G 30 S/PKI direncanakan dan digerakkan oleh CC PKI.

Dalam hubungan ini perlu kiranya di[redacted] waktu itu terhada[redacted] kemukakan bukan [redacted] mengungkit-ungk[redacted] yang lalu tetapi fakta [redacted] mengingat G 30 S/PKI [redacted] pemerintahan Soekarno. [redacted]

Selain itu sejarah menc[redacted] sikap Presiden Soekarno pada waktu itu terhadap G 30 S/PKI menunjukkan hal-hal yang sangat kontroversiil sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai interpretasi mengenai hubungan antara G 30 S/PKI dengan Presiden Soekarno. Lagi pula membicarakan Orde Baru tidak mungkin dapat dilepaskan dari G 30 S/PKI serta masa-masa terakhir kekuasaan Presiden Soekarno, karena Orde baru itu sendiri lahir dari kesadaran dan tekad kita yang menghendaki agar penyelewengan terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi di masa-masa itu tidak akan terulang lagi. hal itu telah terbukti dengan bersatunya semua kekuatan yang tidak setuju dengan PKI menghadapi G 30 S/PKI.

Mengenai hubungan antara Presiden Soekarno dan G 30 S/PKI, kami akan mengutip dua dokumen resmi yang telah diketahui umum yaitu:

1. Memorandum DPRGR tanggal 9 Pebruari 1967.
2. Keterangan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/Panglima KOPKAM di depan Sidang MPRS tanggal 7 Maret 1967.

Dengan sengaja kami mengutip dua dokumen di atas karena kedua dokumen ini mempunyai kekuatan konstitusional.

Di dalam kesimpulan Memorandum DPRGR tersebut di atas sebagaimana tercantum pada angka VII.3 dikemukakan sebagai berikut: "terdapat adanya petunjuk-petunjuk (aanwijzingen) bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam G 30 S/PKI yang

Digitized by Google

fakta-faktanya perlu dilengkapi keterangannya oleh Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dalam Sidang Istimewa MPRS".

Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/Panglima KOPKAM di depan Sidang Istimewa MPRS tanggal 7 Maret 1967 di dalam kesimpulan keterangannya mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

Dari uraian hubungan antara fakta-fakta ini, yang menghubungkan Presiden Soekarno dalam rangkaian G 30 S/PKI, dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa Presiden Soekarno dapat dinilai melakukan dua bidang kesalahan ialah: 1. Di Bidang Politik. Presiden yang didorong oleh keyakinan politiknya untuk mempersatukan dan men-Pancasila-kan seluruh Rakyat Indonesia dengan mengikutsertakan semua golongan dan aliran yang ada (termasuk PKI) dengan konsepsi NASAKOM ternyata disalahgunakan dan dikhianati oleh PKI, yang mempunyai iktikad tidak baik terhadap Pancasila. Dengan demikian Presiden Soekarno menunjukkan kurang kewaspadaannya dalam mengamankan Pancasila. 2. Di Bidang Hukum. Kebijaksanaan tersebut merupakan suatu kenyataan (feit) yang menunjukkan adanya pelanggaran pidana (strafbaarfeit), sekalipun tujuan pokoknya bukan membantu G 30 S/PKI, tetapi untuk mengamankan kebijaksanaan politiknya.

Dari kedua dokumen tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Presiden Soekarno telah melakukan kesalahan dalam bidang politik dan yuridis dalam kaitannya dengan G 30 S/PKI. Kami mengemukakan hal ini tidak dengan maksud sedikitpun untuk mengurangi atau menghilangkan jasa-jasa bekas Presiden Soekarno di dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan kita.

Tetapi almarhum Soekarno sebagaimana manusia tidak akan luput dari kesalahan atau kealpaan. Bung Karno sebagaimana halnya pejuang-pejuang Nasional lainnya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Di dalam riwayat perjuangan Bung Karno setelah kemerdekaan kami menilai bahwa puncak prestasi almarhum dicapai dengan kembalinya Irian Barat dalam pengakuan Ibu Pertiwi. Kita tidak perlu tertegun masa-masa yang silam, kita akan terus berjalan ke depan sambil sekali-sekali menengok masa yang silam sebagai bahan pelajaran agar supaya kita lebih bijaksana di dalam menata kehidupan hari ini dan hari esok.

Langkah-langkah Orde Baru

Pada saat-saat lahirnya Orde Baru dikenal apa yang dinamakan program TRITURA yang merupakan cetusan perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan "66/KAMI.

Program TRITURA tersebut adalah: Pembubaran PKI, Perombakan Kabinet Dwikora, Penurunan harga.

Tuntutan pembubaran PKI dilakukan karena PKI telah mendalangi dan menggerakkan G 30 S.

Perombakan Kabinet Dwikora dituntut karena terdapat Menteri-menteri dalam Kabinet ini yang anggota PKI atau dari tindakan-tindakan selama ini telah menguntungkan G 30 S/PKI. Selain itu Kabinet Dwikora dirasakan kurang effektif dan effisien karena sebagai akibat inflasi yang tinggi maka harga-harga terutama kebutuhan pokok telah melonjak harganya sehingga tidak terjangkau oleh daya beli rakyat pada umumnya. Aksi-aksi TRITURA semakin hari semakin meninggi dan mengeras dan hal ini antara lain disebabkan karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi TRITURA terutama mengenai pembubaran PKI.

Sikap-sikap Presiden yang demikian ini terlihat di dalam berbagai kesempatan dan pidato yang beliau kemukakan antara lain:

Pidato di depan siswa LEMHANAS tanggal 11 Desember 1965.

Pidato pada peringatan HUT TRIKORA di Istora Senayan tanggal 21 Desember 1965.

Pertemuan dengan PPMI, MMI dan Germindo di Istana tanggal 15 Januari 1966.

Sebagai akibatnya maka situasi keamanan dan ketertiban terutama di Jakarta hampir tidak terkendalikan.

Dalam keadaan yang demikian ini akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret kepada Jenderal Seoharto selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Dengan demikian maka dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret merupakn bagian rentetan daripada aksi-aksi TRITURA. Selain itu perlu dicatat pula bahwa pada waktu-waktu berlangsungnya Sidang Kabinet Dwikora (yang disempurnakan) di Istana Jakarta tanggal 11 Maret 1966 di sekitar Istana telah berkeliaran sejumlah tentara yang bersenjata tetapi tidak mempunyai identitas. Akibatnya Sidang Kabinet tidak berlangsung terus dan kejadian ini dapat disebut pula sebagai penyebab khusus lahirnya Surat Perintah 11 Maret.

Dengan bersenjatakan Surat Perintah 11 Maret maka Pengemban Supersemar telah membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Selanjutnya telah dilakukan pula penangkapan/penahanan terhadap beberapa orang Menteri yang berindikasi terlibat di dalam G 30 S/PKI.

Dalam Sidang Umum ke IV MPR bulan Juli 1966 Surat Perintah 11 Maret telah dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS Nomor IX.

Dalam Sidang Umum yang ke IV telah pula diputuskan pembentukan Kabinet AMPERA untuk menggantikan Kabinet DWIKORA yang lebih disempurnakan. Pembentukan Kabinet AMPERA ini tertuang di dalam TAP MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 dimana salah satu programnya adalah perbaikan perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.

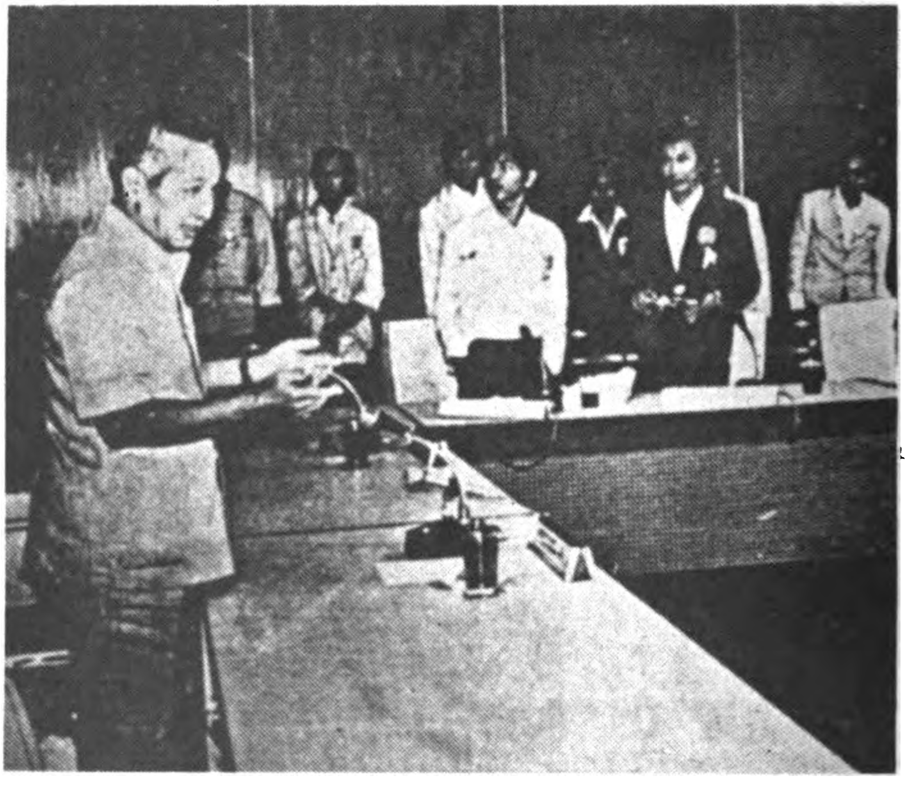

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa aksi-aksi TRITURA telah memperoleh kekuatan hasil Sidang Umum ke IV.

Keberhasilan aksi-aksi TRITURA terutama disebabkan karena memperoleh dukungan dari masyarakat dan ABRI.

Meskipun PKI telah dibubarkan, Kabinet Dwikora (yang lebih disempurnakan) telah diganti dengan Kabinet AMPERA dimana program utamanya adalah perbaikan ekonomi rakyat sehari-hari,

Digitized by Google

namun ternyata aksi-aksi Angkatan 66 tetap dilancarkan. Ada sebab-sebab obyektif yang menyebabkan mengapa aksi-aksi ini tetap dilancarkan. Berdasarkan surat Perintah Soekarno kepada MENPANGAD Letnan Soeharto tanggal 14 Maret 1966 dapat disimpulkan bahwa Presiden Soekarno telah menegor Pengemban Surat Perintah 11 Maret yang telah membubarkan PKI. Presiden Soekarno menghendaki dalam surat tersebut agar penggunaan Surat Perintah 11 Maret hanya mengenai melaksanakan keputusan di luar bidang tekhnis.

Berdasarkan fakta di atas mereka berpendapat jika demikian maka selama Presiden Soekarno masih memegang kekuasaan formil maka tidak ada garansi obyektif PKI tidak akan dihidupkan kembali.

Di bidang kekuasaan eksekutif telah terjadi dualisme kekuasaan di antara Presiden Soekarno di satu pihak dengan Pengemban TAP Nomor IX/MPRS/Ketua Presidium Kabinet AMPERA dipihak lain.

Dualisme kekuasaan eksekutif dengan segala akibatnya ini dikenal pada waktu itu dengan istilah konflik situasi. Konflik situasi yang demikian ini menjadi sumber instabilitas nasional dan karenanya perlu diakhiri secara konstitusionil.

Dalam hubungan ini maka aksi-aksi dilancarkan guna mempercepat pengakhiran konflik situasi secara konstitusionil. Ada hal lain lagi yang menyebabkan dilanjutkannya aksi-aksi mahasiswa dan pelajar setelah 11 Maret 1966 yaitu pertanggungan jawab Presiden Soekarno/Mandataris MPRS di depan Sidang Umum MPRS yang ke IV bulan Juni 1966 yang beliau berikan nama NAWAKSARA.

Pertanggungan jawab ini berikut pelengkapan (pelengkap NAWAKSARA) tidak memenuhi harapan MPRS yang menghendaki keterangan dan kejelasan tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra revolusi G 30 S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak. Dengan demikian telah timbul konflik konstitusionil di antara Presiden/Mandataris MPRS dengan Lembaga tertinggi MPRS. Sebagai hasil dari keadaan Negara yang gawat sebagaimana dikemukakan di atas maka terhitung sejak tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/66 Jenderal TNI Soeharto. Keputusan Presiden ini merupakan keputusan yang bijaksana dan menunjukkan sikap kenegarawanan beliau pada masa-masa akhir kekuasaanya yang secara konstitusionil masih beliau miliki. Rentetan peristiwa selanjutnya adalah berlangsungnya Sidang Istimewa MPRS bulan Maret 1967 di mana Pengemban TAP Nomor IX Jenderal Soeharto telah diangkat selaku pejabat Presiden berdasarkan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

Dengan hancurnya PKI dan lemahnya partai-partai yang lain dan jatuhnya Soekarno sebagai Presiden, maka Soeharto yang mendapat dukungan dari ABRI dan generasi muda tampil memimpin Negara Republik Indonesia memerlukan partner. Dalam memilih partner ini Dr Alfian menulis sebagai berikut: "Di samping karena kejatuhan Soekarno dan pembubaran PKI tampilnya ABRI sebagai pelaku utama di arena politik antara lain disebabkan pula oleh keadaan dimana tidak ada kekuatan politik lainnya (sipil) yang mampu menandingi kerapian organisasi dan bahkan kepopuleran kesan keluar ("image") ABRI pada waktu itu dapat menuntut pembagian ("share") kekuasaan politik yang jauh lebih berarti daripada mereka perdapat yaitu ditepi-tepi. Mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda masih terlampau

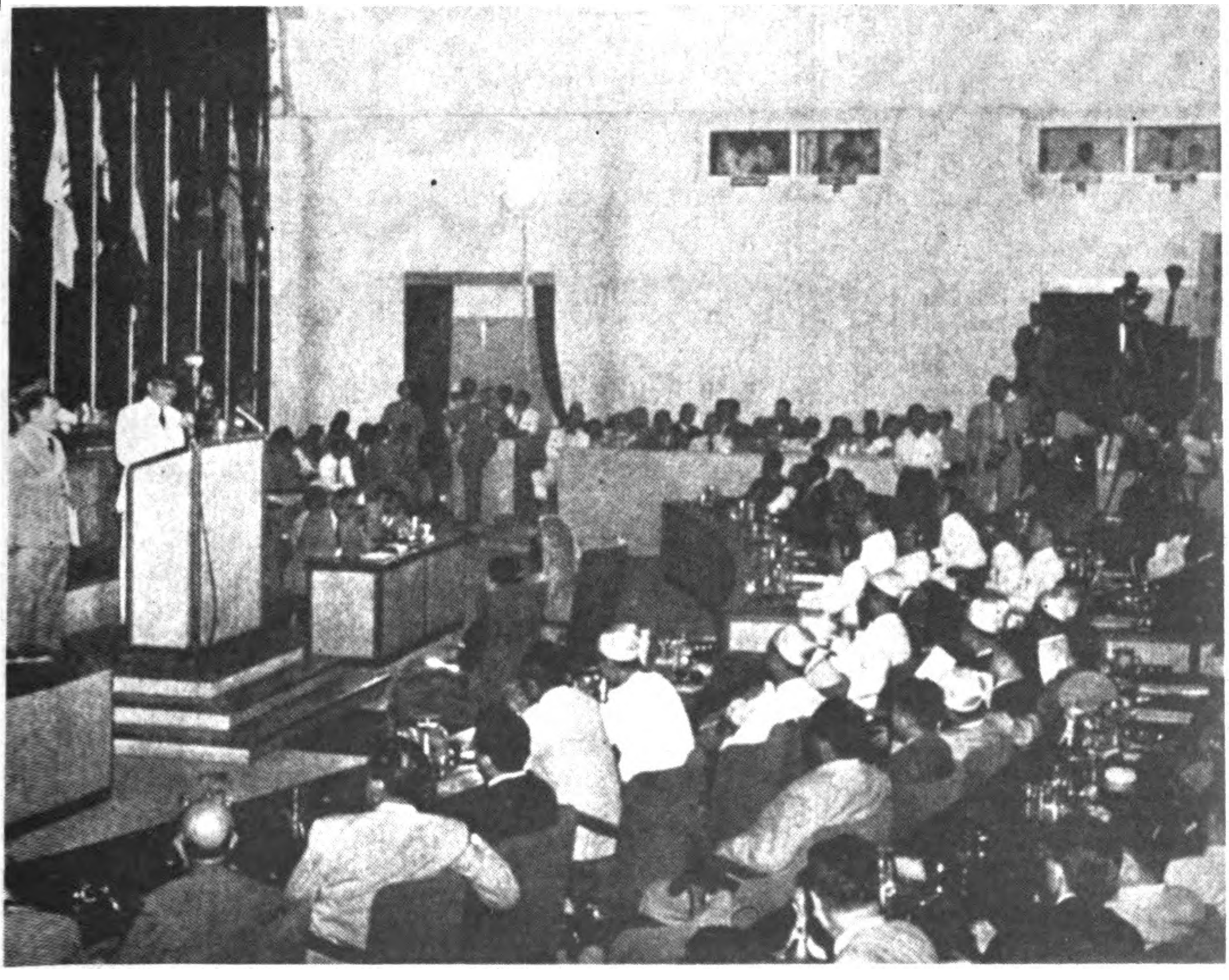

Digitized by Google

muda untuk diajak memerintah, PNI tengah mengalami krisis hebat akibat adanya oknum-oknum yang terlibat dalam peristiwa Gestapu, sedangkan NU yang walaupun merupakan satu-satunya partai besar yang mendapat angin pada waktu itu rupanya mempunyai kelemahan tertentu untuk bisa diajak seperti ketidakmampuan partai tersebut menonjolkan orang-orang yang dibutuhkan ABRI buat bekerjasama secaralebih intim dan luas. Di samping itu perlu kelihatannya lebih banyak memberi kesan negatif daripada positif kealamat partai-partai. Akibatnya ABRI merasa lebih aman dan yakin bekerjasama dengan beberapa cendekiawan dan teknokrat terkemuka yang relatif jauh lebih bersih dan mempunyai keahlian yang dibutuhkan ABRI sendiri."

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Jenderal Soeharto tampil memimpin bangsa menerima warisan keadaan ekonomi-politik yang sangat buruk. Dengan demikian perlu diambil langkah-langkah utuk mengatasi keadaan yang demikian itu.

Langkah pertama adalah membenahi kehidupan ekonomi. Sejalan dengan pembenahan di bidang ekonomi dilakukan pula langkah-langkah pembenahan kehidupan politik. Uraian ini lebih menitik beratkan kepada segi pembaharuan kehidupan politik. Berbicara mengenai pembaharuan politik perlu lebih jelas dulu pengertian segi apa yang akan diperbaharui.

Pada permulaan Orde Baru, para pemuda dan politisi selalu mengetengahkan perlunya azas perombakan struktur politik. Pada bulan Juni 1967 telah dilangsungkan RAKER KAMI, RAKER ini berhasil memutuskan strategi dan program KAMI selanjutnya. Mengenai tujuan/strategi perjuangan dirumuskan sebagai berikut:

1. Melancarkan pembangunan ekonomi secara pesat berencana yang mengarah pada proses kemajuan materiil dan spirituil kehidupan rakyat.

2. Membangun suatu bangunan politik dan sistim Demokrasi Pancasila yang lebih merangsang gairah dan dinamika masyarakat untuk kreatif berusaha dan membangun. Lebih menjamin dan melembagakan proses dan nilai-nilai Demokrasi serta hak-hak azasi manusia, dan sistim atau bangunan politik yang paling memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan.

3. Melancarkan proses modernisasi di segala bidang dengan menempatkan mahasiswa sebagai "Agent of Modernization" (unsur pembaharuan) yang selalu berorientasi pada pembangunan masyarakat desa, dan Universitas/Perguruan tinggi sebagai pusat gerakan modernisasi yang berusaha melakukan sosialisasi kurikulumnya.

Untuk melaksanakan tujuan di atas telah disusun program dalam berbagai bidang yaitu:

Program konsolidasi dan pembinaan intern organisasi serta hubungan dan koordinasinya dengan partner-partner Orde Baru.

Program untuk memajukan struktur politik yang baru.

Program pembangunan masyarakat desa.

Program pendidikan dan kebudayaan.

Program hubungan internasional.

Dalam kaitan dengan struktur politik ini ada baiknya kami uraikan pengertian Orde Baru dan Struktur Politik sebagai berikut:

1. Orde Baru adalah tatanan kehidupan rakyat — politis, ekonomis, spirituil, yuridis dan socio-kulturil, yang diletakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD '45. Dengan definisi tersebut maka dalam bentuk normatipnya, Orde Baru adalah Orde Pancasila dan UUD '45. Akan tetapi dalam bentuk realisasinya ia terikat kepada kondisi dan situasi dimana ia berada. Ini berarti, bahwa Orde Baru merupakan suatu proses sosial yang panjang yang bergerak dari suatu bentuk realisasi ke bentuk realisasi lain yang lebih maju menuju kepada bentuk normatip Orde Baru yang disebutkan tadi. Dalam bidang kehidupan politik, Orde Baru tidak lain adalah orde atau sistim politik Demokrasi Pancasila. Perwujudan dari orde atau sistim politik Demokrasi Pancasila inipun sebagai suatu bentuk normatip yang masih harus dicapai mengenal bentuk-bentuk antara yang terus menerus bergerak maju, mengikuti perkembangan kondisi dan situasi yang terjadi di dalam masyarakat, yakni perkembangan di dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya yang keseluruhannya bersama-sama dengan bidang kehidupan politik berada di dalam suatu titik keseimbangan (equilibrium).

2. Kehidupan politik sebagai satu sistim tidak lain adalah kesatuan antar unsur-unsur dari struktur politik dalam interaksi dan interrelasinya satu sama lain, atau dengan perkataan lain sistim politik adalah kesatuan antara struktur dan proses (fungsi-fungsi) politik. Dengan demikian maka struktur politik merupakan "mesin" dari kehidupan politik, sehingga suatu kehidupan politik yang sehat banyak pula tergantung kepada struktur politik yang mendukungnya. Struktur politik NASAKOM dimasa lalu adalah struktur politik yang sengaja diciptakan untuk mendukung Orde (sistim) politik Demokrasi Terpimpin, apa

PT. TRIPATRA ENGINEERING

lebih dari lima belas tahun pengalaman
dalam menyelesaikan proyek-proyek
berteknologi tinggi
jasa enjiniring dan
manajemen projek untuk :
power enjiniring
telekomunikasi
minyak & gas bumi

• studi kelayakan • enjiniring disain
• manajemen proyek

Gedung Cipta lantai 5,6,7 JL. H.R. Rasuna Said - Kav. C10 Telp. : 516512 (7 line) — Jakarta
Telex : 62251 TPE IA

Digitized by Google

yang kemudian disebut sebagai Orde (politik) Lama. Karena itu bila berbicara tentang orde atau sistim politik Demokrasi Pancasila, dengan sendirinya harus pula dibicarakan tentang struktur politik baru yang dibutuhkan untuk mendukungnya yang lebih jauh membawa akibat bahwa struktur politik yang kita miliki pada waktu ini masih perlu terus menerus diperbaharui sejalan dengan tingkat perkembangan dari perwujudan sistim politik Demokrasi Pancasila di dalam kehidupan politik kita.

3. Seperti halnya mengenai kehidupan politik yang dapat dibedakan antara kehidupan politik dalam suasana masyarakat (social sphere) dan kehidupan politik dalam suasana pemerintahan (govermental sphere), maka struktur politik pun bisa dibagi dalam dua kelompok, yakni: (1). Struktur politik dalam suasana masyarakat yang sering pula disebut infra-struktur-politik. (2) Struktur politik dalam suasana pemerintahan yang sering pula disebut supra-struktur-politik.

Di dalam infra-struktur politik termasuk komponen-komponen partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang di Indonesia dikenal dengan nama "golongan fungsional", kelompok-kelompok desak (pressure groups) media komunikasi massa dan bentuk-bentuk strukturil lainnya, baik yang melembaga maupun yang kurang melembaga sepanjang berpengaruh dalam kehidupan (sistim) politik. Sedangkan yang termasuk dalam supra-struktur politik adalah lembaga-lembaga kenegaraan yang legal formil, yaitu lembaga-lembaga legislatif eksekutif, judikatif dan administratif.

4. Kehidupan politik dalam suasana masyarakat yang didukung oleh infra-struktur politiknya senantiasa mempengaruhi kehidupan politik dalam suasana pemerintahan. Setidak-tidaknya menentukan dan mempengaruhi supra-struktur politik atau lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan tugasnya. Hubungan ini secara fungsional dapat diterangkan sebagai hubungan input dan output di dalam suatu sistim, yakni: (1) Infra-struktur politik menjalankan fungsi-fungsi input berupa social support dan social participation yang lebih jauh dapat diperinci ke dalam fungsi-fungsi pendidikan politik (political socialization), pengajuan kepentingan (interests articulation), pemaduan kepentingan (interest anggregation) dan komunikasi politik (political comunication). Fungsi-fungsi pendidikan dan komunikasi politik berlangsung di dalam setiap unsur dari struktur politik, fungsi pengajuan kepentingan titik beratnya dijalankan melalui kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok desak, sedangkan pemaduan kepentingan secara khusus dikerjakan oleh partai politik/ Golongan Karya, (2) Supra-struktur politik menjalankan fungsi-fungsi output berupa pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang dapat diperinci ke dalam fungsi-fungsi pengambilan keputusan (decision atau rule making) yang dijalankan oleh lembaga-lembaga legislatif, pelaksanaan keputusan (rule application) yang dijalankan oleh lembaga-lembaga eksekutip dan administratip dan fungsi pelaksanaan keputusan (rule ajudication) yang dikerjakan oleh lembaga judikatip.

Tetapi sebaliknya supra-struktur politik yang menjalankan fungsi-fungsi output pada gilirannya mempengaruhi pula infra-struktur politik dalam menjalankan tugasnya. Apa yang dihasilkan oleh supra-struktur politik sebagai output akan dikembalikan kepada infra-struktur politik, sebagai feedback yang selanjutnya akan diolah dalam menghasilkan input oleh infra-struktur politik.

5. Kembali kepada pembaharuan struktur politik, maka pembaharuan itu dengan sendirinya mencakup baik infra-struktur politik maupun supra-struktur politik. Masalahnya adalah dalam hal apa struktur politik itu harus diperbaharui. Di sini kita dibatasi oleh apa yang ditetapkan oleh UUD '45 baik pada pembukaannya, batang tubuhnya maupun penjelasannya yang secara langsung atau tidak langsung telah menetapkan komponen-komponen dari struktur politik yang dibutuhkan yang dimaksudkan telah terwujud dan ada dalam struktur politik kita pada waktu ini, sehingga oleh karenanya pembaharuan itu tidaklah tertuju kepada komponen-komponen dari struktur politik tetapi lebih banyak bersifat meluruskan pelaksanaan fungsi-fungsinya atau dengan perkataan lain bagaimana memfungsionalkan struktur politik secara efisien dan efektif. Dengan demikian maka pembaharuan struktur politik yang dibicarakan di sini lebih tertuju kepada: 1. Pembaharuan semangat dan jiwa dari struktur politik yang berarti pembaharuan pola dan orientasi kepada pola dan orientasi Pancasila. 2. Mendudukkan komponen-komponen struktur politik pada tempatnya yang semestinya sebagaimana yang dituntut oleh Pancasila dan UUD '45. 3. Dalam hal-hal lain yang dituntut oleh Pancasila dan UUD '45 seperti penyederhanaan kepartaian dan kekaryaan.

Langkah-langkah Pembaharuan Struktur Politik

Sejalan dengan tuntutan angkatan '66 untuk mengadakan pembaharuan Struktur Politik, maka dapat kita ikuti bahwa Pemerintah dan masyarakat melakukan langkah-langkah pembaharuan baik di bidang Infra Struktur Politik maupun di bidang Supra Struktur Politik.

Sejak DPR hasil Pemilihan tahun 1971 mulai berfungsi, maka di DPR telah terbentuk pengelompokan terdiri dari: 1. Fraksi ABRI. 2. Fraksi Persatuan Pembangunan (NU, Parmusi, PSII, Perti). 3. Fraksi Demokrasi Pembangunan (PNI, Perkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba). 4. Fraksi Karya Pembangunan (Golongan Karya).

Dari hasil pengelompokan ini, maka dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1975 ditetapkanlah adanya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Di samping itu organisasi buruh, tani, nelayan dan banyak lagi organisasi fungsional menyederhanakan organisasinya, sehingga lahirlah FBSI, HKTI, HNSI dan lain-lain organisasi. Langkah usaha memperbaharui di bidang Supra Struktur Politik dimulai dengan lahirnya Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1975, serta Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian diubah jadi Undang-undang No. 5 tahun 1975.

Kemudian Dewan Pertimbangan Agung dibentuk dengan Undang-undang No. 3 tahun 1967, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1978. Badan Pemeriksa Keuangan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1973. Dan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lainnya mempunyai landasan kerja yaitu Undang-undang No. 14 tahun 1970. Selama itu hubungan kerja antara Presiden sebagai Lembaga Tinggi Negara dengan Badan Perwakilan Rakyat sebagai Badan Perwakilan Rakyat, makin lebih tertib dan teratur.

Setiap permulaan tahun Presiden menyampaikan RAPBN dan DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa selama Orde Baru ini kita ikuti kegiatan-kegiatan sebagai berikut: MPR hasil Pemilu mengadakan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun, MPR dalam sidang umumnya menetapkan: GBHN, Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Presiden memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. DPR melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Presiden, menetapkan Undang-undang APBN bersama Presiden, menghasilkan berbagai Undang-undang. Lembaga tinggi lainnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang yang ada.

Tantangan

Angkatan '66 dalam pengertian sempit ialah para mahasiswa, pemuda, pelajar yang ikut serta atau sekurang-kurangnya yang menyetujui atau bersimpati terhadap perjuangan dan aksi-aksi tahun 1965-1967.

Dalam arti luas semua yang terlibat dan menyetujui perjuangan dan aksi-aksi pada waktu itu tanpa melihat apakah ia mahasiswa, pemuda atau pelajar.

Setiap angkatan menghadapi tantangan-tantangan. Oleh karena itu kalau kita kembali menoleh ke belakang, maka akan kita lihat ada pendapat yang mengatakan bahwa angkatan 08 menghadapi masalah

Digitized by Google

pendidikan.

Angkatan 28 merupakan persatuan dan kesatuan bangsa yang menonjol dan angkatan 45 masalah kemerdekaan nasional dengan ciri anti imperialisme dan kolonialisme. Angkatan '66 mencoba mengkonsolidasikan hasil-hasil yang dicapai oleh angkatan 45 dan sekaligus ia harus dapat berbicara menghadapi tantangan bangsanya.

Untuk ini ada baiknya kami mengungkapkan isi pokok-pokok pikiran eksponen '66 yang disampaikan kepada Bapak Presiden pada tanggal 10 Maret 1978 tentang regenerasi yangisinya mengandung berbagai tantangan yang kita hadapi ke depan sebagai berikut:

Orde Baru telah menegaskan sendi-sendi dasar kehidupan bangsa dan negara kita ini. Orde Baru menegaskan bahwa kelangsungan sejarah bangsa dan negara ini haruslah berdasarkan atas Proklamasi, Pancasila, UUD '45 dan Pembangunan yang ber-Keadilan Sosial. Proklamasi adalah ungkapan yang menegaskan bangsa dan negara kita ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas daripada semangat dan isi Sumpah Pemuda 1928. Pancasila mengungkapkan nilai-nilai dasar yang dihayati oleh bangsa Indonesia, yang kemudian dinyatakan menjadi Dasar Negara dan oleh karenanya Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan Dasar Negara. Undang-undang Dasar memberikan kerangka konstitusionil perkembangan hidup bangsa dan negara kita itu.

Dengan sendi-sendi dasar tersebut, maka bangsa Indonesia mengembangkan hidupnya di dalam sejarah.

Indonesia yang sudah merdeka harus diberi isi yang nyata. Dan untuk itulah maka pembangunan merupakan konsekwensi lebih lanjut dari Proklamasi, dari Pancasila dan UUD '45. Hanya dengan pembangunanlah maka ketegasan kita di dalam Proklamasi Kemerdekaan, ketegasan kita di dalam cita-cita nasional dapat diwujudkan secara terus menerus, sepanjang sejarah, dari angkatan ke angkatan.

Mengemban kelestarian sejarah bangsa dan negara, mengemban kelestarian Pancasila, dan UUD '45, berarti memberikan jawaban kepada tantangan-tantangan sejarah berdasarkan atas sendi-sendi pokok di atas itu.

Untuk ini maka seyogyanyalah kita membuat perkiraan mengenai kemungkinan-kemungkinan perkembangan di masa depan.

Dalam satu-dua dasawarsa mendatang diperkirakan kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan besar yang cukup rumit (kwantitatif dan kwalitatif) dalam bidang: ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dalam bidang ekonomi sosial antara lain:

Perbedaan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja. Dalam tahun 1985 jumlah angkatan kerja diperkirakan 61,95 juta sedangkan kesempatan kerja yang tersedia sebanyak 56,32 juta. Dalam tahun 2.000 jumlah angkatan kerja mencapai 89,93 juta sedangkan kesempatan kerja yang tersedia sebanyak 85,44 juta.

Masalah swasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang semakin banyak, mengingat usaha intensifikasi dalam bidang pertanian sudah hampir mencapai titik jenuh maka usaha-usaha ekstensifikasi pertanian perlu lebih ditingkatkan. Jumlah penduduk Indonesia dalam tahun 1985 diperkirakan mencapai 167.46 juta di antaranya 100,36 juta bermukim di Jawa dan dalam tahun 2.000 mencapai 234.49 juta, di antaranya 126.74 juta bermukim di Jawa.

Selain pangan diperlukan pula fasilitas-fasilitas: perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan serta perhubungan. Angka-angka tersebut di atas menunjukkan akan terjadi pengangguran dan karenanya diperlukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Selain usaha-usaha seperti transmigrasi dan proyek-proyek padat karya kiranya perlu dipikirkan kemungkinan mengaitkan pemberian fasilitas-fasilitas dalam rangka PMA/PMDN dengan jumlah tenaga kerja yang diserap proyek-proyek tersebut.

Ketimpangan di dalam pendapatan dan kekayaan. Keadaan ini tentunya sangat memprihatinkan dan perlu ada usaha-usaha yang maksimal untuk meningkatkan pendapatan bagi mereka yang berpenghasilan paling rendah dalam rangka merealisir azas Keadilan Sosial.

Golongan yang berpenghasilan rendah terutama terdiri dari para petani buruh tani, pedagang-pedagang kecil (pedagang keliling) serta karyawan-karyawan rendah di perusahaan-perusahaan. Untuk mengatasi ketimpangan di atas diperlukan berbagai usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, antara lain: untuk meningkatkan pendapatan riil kaum tani, dengan menentukan harga dasar padi.

Selanjutnya perlu diterapkan prinsip bahwa tanah di daerah pedesaan adalah untuk para petani (pengecualian untuk ini hanya untuk kepentingan Pemerintah). Penemuan upah minimum bagi karyawan-karyawan di perusahaan selalu disesuaikan dengan harga kebutuhan sembilan bahan pokok.

Ekstensifikasi pemberian kredit KIK/KMKP dan Candak Kulak. Permasalahan sebagaimana diuraikan di atas perlu diintegrasikan ke dalam suatu kebijaksanaan untuk mengfungsikan KUD sesuai dengan jiwa pasal 33 UUD '45. Penentuan tarif pajak yang lebih progresif sehingga tarif pajak yang lebih tinggi dari yang berlaku sekarang akan dikenakan untuk mereka yang berpenghasilan tinggi di dalam pajak pendapatan dan pajak kekayaan.

Kemungkinan pemilikan saham-saham bagi para karyawan baik di perusahaan-perusahaan swasta maupun Pemerintah. Dengan pemilikan ini para karyawan akan merasa ikut memiliki perusahaan tersebut dengan demikian tingkat produktivitas karyawan diharapkan dapat meningkat.

Cukup beralasan kiranya untuk disampaikan bahwa salah satu ukuran berhasilnya pembangunan ekonomi adalah sampai sejauh mana dapat meningkat pendapatan riil bagi mereka yang berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum (KPM) sehari-hari.

Keterbatasan dana baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk membelanjai anggaran rutin dan anggaran pembangunan untuk pengeluaran-pengeluaran di dalam negeri serta impor. Keterbatasan ini akan semakin jelas karena kita harus menanggulangi permasalahan-permasalahan sosial ekonomi sebagaimana yang digambarkan di atas.

Berkurangnya cadangan kekayaan alam: pertambangan, energi, hasil-hasil hutan dan laut. Gambaran yang kurang menyenangkan perlu dikemukakan justru agar generasi yang akan datang lebih bekerja keras dan lebih produktif utuk menciptakan hari esok yang lebih cerah dan harapan-harapan untuk itu tetap ada.

Di bidang budaya kita masih menyaksikan antara lain: perbedaan antara nilai-nilai tradisional dan modern: semua ini akan mewarnai situasi sosial budaya kita.

Di bidang politik jelas masih akan terdapat tantangan bagaimanakah menata kehidupan politik yang makin sesuai dengan garis-garis Orde Baru. Dengan berdasarkan atas dua Partai Politik dan Golongan Karya serta ABRI, kiranya akan terdapat tantangan penataan kehidupan politik yang sifatnya lebih kwalitatif.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, terutama berkaitan dengan perkembangan regional dan internasional, jelas akan terdapat tantangan-tantangan besar. Krisis-krisis dunia (energi, ekonomi, angka, tata dunia baru) kiranya belum selesai, persaingan antara bangsa-bangsa yang makin keras, perkembangan Asia Tenggara pada umumnya dan ASEAN pada khususnya, perkembangan dialog Utara Selatan, perkembangan di dalam hubungan antara kekuatan-kekuatan besar, semuanya ini masih merupakan tantangan yang kita hadapi.

Pembangunan itu sendiri akan berarti perubahan. Karenanya pembangunan akan selalu membawa masalah perubahan. Pembangunan juga akan mengakibatkan gelombang-gelombang perpindahan, sehingga di tempat-tempat tertentu akan terjadi konsentrasi kepadatan. Pembangunan juga akan membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam bentuk perbedaan-perbedaan sosial, ekonomi dan politik yang benar-benar memerlukan pemecahan.

Gambaran sebagaimana yang dipaparkan di atas perlu dikemukakan justru agar generasi yang akan datang lebih bekerja keras dan lebih produktif untuk menciptakan hari esok yang lebih cerah serta tetap berwajah Indonesia.

Harapan-harapan itu tetap ada. □

Digitized by Google

pimpinan
beserta segenap
karyawan

PT. UJUNG LIMA

mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITHRI
1 SYAWAL 1407 H

PARTNER TERPERCAYA DALAM USAHA ANDA

BERGERAK DI BIDANG JASA :
*** E.M.K.L * Angkutan Darat * Angkutan Laut * Pergudangan**

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
*** TRANSPORTERS * WAREHOUSING**

Melayani atas dasar :
* DOOR TO DOOR SERVICE DALAM DAN LUAR NEGERI
* DASAR USAHA EFFISIENSI
* UNTUK MENCAPAI MOTTO PELAYANAN CEPAT AMAN DAN BIAYA YANG WAJAR

hubungilah alamat kami:

PT. UJUNG LIMA
Jl. Yos Sudarso No. 3 – 11 Tanjung Priok – Jakarta Utara Phone : 491934 – 491946 – 495520 – 495332
Telex : 49391 ULJKT.

CABANG :
SURABAYA * PT. UJUNG LIMA TIMUR Jl. Perak Timur No. 254 Telp. 291523 – 295330
UJUNG PANDANG * PT. UJUNG LIMA RAYA JL. Nusantara 122 Telp. 7043
MANADO * PT. UJUNG LIMA UTARA Jl. Babe Palar Madidir Bitung Telp. 21748
PARE–PARE * PT. UJUNG LIMA SELATAN Jl. Andi Makassau No. 59 Telp. 21750

PERWAKILAN :
PALEMBANG * Jl. Veteran No. 395 E Telp. 20632. MEDAN * Jl. Prof. Moch Yamin SH No. 28 D Telp. 25578

KORESPONDENSI LUAR NEGERI :
* SINGAPORE * BELANDA * YUNANI * KOREA SELATAN * INGGERIS * JERMAN BARAT * JEPANG
* PERANCIS * AMERIKA SERIKAT

Digitized by Google

Oleh: DR. Janner Sinaga (Ph.D)

Relevansi Dilemma Pers Barat Dengan Perkembangan Pers Nasional

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan pers nasional kita, tidak ada ruginya, jika kita menyoroti sejenak dan mencoba mengambil hikmah dari pengalaman orang lain, dalam hal ini pers Barat umumnya pers A.S. khususnya yang begitu besar pengaruhnya dalam pembentukan opini publik, maupun opini dunia.

Memang, dalam era teknologi mutakhir ini, di mana kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi telekomunikasi berkembang demikian pesatnya, maka peranan media massa umumnya, pers khususnya bukan saja teramat penting, tetapi sering amat menentukan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan antar-negara.

Oleh karena dinamika perkembangan pers Barat dalam hal ini Eropah Barat umumnya, Amerika Serikat khususnya, berdampak menjangkau semua negara di dunia, maka dinamika itu dengan segala aspek positif dan negatifnya ada baiknya kita soroti dari perspektif relevansinya dengan peranan dan tanggung-jawab pers dalam pembangunan bangsa kita. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengkritik sistim atau nilai-nilai pers dan Demokrasi Barat, karena itu adalah urusan "intern" dunia Barat itu sendiri, tetapi ia dimaksudkan sebagai bahan referensi dan dimana mungkin melihat agar aspek-aspek yang negatif atau yang tidak cocok untuk pengembangan pers nasional kita dapat lebih difahami dan dihindari, karena perbedaan tingkat kemajuan latar-belakang sejarah, sistim ketatanegaraan sosial budaya dan perbedaan nilai-nilai umumnya.

Untuk itu perlu kita tilik terlebih dulu berbagai latar belakang yang bertalian erat dengan perkembangan pers Barat tersebut termasuk latar-belakang filosofis dan idiologis, latar belakang historis, latar belakang konstitusional, dan latar belakang Politik ekonominya.

Sistim Dan Nilai Yang Melahirkan Kebebasan Dan Peranan Pers Barat.

Tidaklah mungkin memisahkan perkembangan peranan dan kebebasan pers Barat atau pers manapun dari nilai-nilai yang dihasilkan oleh falsafah, Idiologi serta sistim ketata-negaraan dan proses kemajuan masyarakatnya.

Yang terutama sangat relevan dalam hal ini ialah perkembangan sistim demokrasi Barat yang pada hakekatnya didasarkan kepada falsalah individualisme. Diantara falsafah hidup atau idiologi yang mendasari sistim ketatanegaraan "Demokrasi

Barat" ialah falsafah John Locke dari Inggeris yang terkenal dengan bukunya "The Two Treatises of Government" tahun 1602, yang intisarinya ialah pengutamaan: "life, liberty and property", yaitu: kehidupan (hidup), kebebasan dan hak milik. Hak milik di sini adalah hak milik pribadi yaitu "private property", hak milik individu, yang pada hakekatnya melandasi falsafah "Individualisme".

Thomas Jefferson, filosoof dan negarawan Amerika Serikat yang terkenal itu, dan otak dari "Declaration of Independence" yaitu pernyataan kemerdekaan dari penjajahan Inggris tahun 1776 merobah sedikit falsafah John Locke tersebut menjadi "life, liberty dan the pursuit of happiness", yaitu "kehidupan (hidup), kebebasan dan pencarian kebahagiaan", namun tetap mempertahankan falsafah hidup Individualisme bahkan menekankan pentingnya kebebasan setiap individu mencari dan menemukan kebahagiaan individu tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan A.S., dalam dekade-dekade awal, falsafah "life, liberty and the pursuit of happiness" tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan apa yang sudah lazim dikenal dengan "survival of the fittest", yaitu secara populer disebut "siapa kuat dia menang". Dengan demikian, yang lemah ditelan yang kuat. Maka berkembanglah kelompok-kelompok bisnis atau usaha swasta atas dasar "survival of the fittest" ini. Monopoli-monopoli dan "trust" (sindikat-sindikat) berkembang merajalela.

Lingkungan yang seperti inilah dengan semua sistim nilainya yang melahirkan kebebasan dan peranan pers Amerika Serikat. Dalam pertumbuhannya pers sering menjadi alat perusahaan-perusahaan atau sindikat, monopoli-monopoli besar.

Thomas Jefferson sendiri berpendapat bahwa demikian mutlak pentingnya peranan pers demi kebebasan individu yang merupakan hak azasi bagi falsafah "life, liberty and the pursuit of happiness" tersebut, sehingga baginya lebih penting existensi dan peranan serta kebebasan pers itu daripada existensi Pemerintah. Secara extrimnya jika perlu pemerintah boleh hapus, tetapi pers harus hidup terus. Jefferson berkata jika ia harus memilih antara Pemerintah tanpa pers atau pers tanpa Pemerintah, maka ia memilih yang terakhir.

Prinsip "kebebasan pers" yang tak terbatas yang bermuara dari falsafah liberalisme ini dipandang demikian mutlak pentingnya, sehingga hal itu dituangkan dan dijamin dalam Undang-undang Dasar A.S. seperti yang tertera dalam Amandemen Pertama ("First Amendment") UUD A.S. yang ditetapkan dalam tahun 1789, yaitu 208 tahun yang lampau yang berbunyi sbb:

"KONGRES tidak akan mengadakan perundang-undangan mengenai didirikannya sesuatu agama atau melarang kebebasan penyelenggaraan peribadahan, atau mengurangi kebebasan mengeluarkan pendapat atau kebebasan pers; atau hak dari Rakyat untuk berkumpul secara damai dan untuk mengajukan petisi kepada Pemerintah bagi penyelesaian keluhan-keluhannya".

Teks itu adalah terjemahan bebas penulis. Teks asli berbunyi sebagai berikut: "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances".

Jadi 208 tahun yang lalu, KONGRES, yaitu lembaga legislatif yang amat berkuasa itu telah menetapkan membatasi dirinya untuk tidak mengeluarkan produk legislatif yang "mengurangi kebebasan mengeluarkan pendapat atau kebebasan pers" ("abridging the freedom of speech, or of the press"). Dan inilah landasan dan falsafah hidup dari dunia pers A.S. sampai dewasa ini. Patut dicatat, bahwa pers A.S. itu sendiri sudah berusia 300 tahun sejak benua itu masih dijajah oleh Inggris, tetapi jika dihitung dari saat deklarasi kemerdekaannya dalam tahun 1776, maka pers A.S. sudah berusia 211 tahun. Tentunya tidak dapat dibandingkan dengan usia pers nasional kita yang sejak 1945, proklamasi

Digitized by Google

kemerdekaan R.I. baru berusia 42 tahun.

Oleh karena ekses dari falsafah "survival of the fittest" ("siapa kuat dia menang") sebagai akibat Idiologi Individualisme telah menghasilkan monopoli, sindikat dan bentuk-bentuk dan manifestasi seperti itu di bidang ekonomi dan bisnis, maka Kongres melalui perundang-undangan telah berusaha membatasi ekses-ekses tersebut dengan Undang-undang "anti-monopoli" yaitu Sherman Anti Trust Act (1890) dan Clayton Act (1914). Namun, sebagai falsafah atau Idiologi dasar, faham Individualisme yang secara intrinsik dan hakiki mengandung semangat liberalisme (kebebasan yang hampir tak terbatas) mengenai pers itu tetap berkembang sampai dewasa ini, karena dijamin oleh Undang-undang Dasarnya dalam "First Amendment" yang dikutip di atas.

Dan dalam dunia yang semakin kecil akibat kemajuan teknologi dewasa ini, di mana pers dan media massa, tv, radio dlsb memainkan peranan yang amat penting, maka pengaruh dan dampaknya jelas melampaui batas-batas nasional, sehingga menjangkau seluruh dunia internasional, termasuk Indonesia.

Jika tadinya pers diperalat oleh perusahaan-perusahaan komersiil besar, ia kini telah berkembang menjadi perusahaan komersiil raksasa sendiri yang mempunyai "vested interest" sendiri, dan merupakan "pressure group" sendiri yang berkuasa pula, sehingga ada kalanya berkemampuan untuk menciptakan sikon sampai-sampai menumbangkan pemerintah (contoh: tumbangnya Nixon). Ia mampu mempengaruhi opini Pemerintah dan Kongres yang berkuasa itu dalam berbagai masalah nasional dan internasional, sehingga kebijaksanaan Pemerintah danproduk legislatif Kongres mempunyai gema dan dampak langsung di berbagai penjuru dunia, termasuk di Tanah Air kita, Indonesia. Sebagai misal tentang relevansinya dengan kepentingan kita, tulisan-tulisan dan pemberitaan-pemberitaan di media massa di pers Barat umumnya A.S. khususnya dapat menciptakan kondisi psikologis sehingga mempengaruhi sikap negara-negara Barat yang tergabung dalam IGGI secara positif atau negatif, yaitu menambah, mengurangi, bahkan menghapuskan bantuan tahunannya terhadap R.I, hal mana tentu mempengaruhi jalannya pembangunan nasional kita.

Ini hanya suatu misal. Dengan singkat, sesuatu tulisan oleh koresponden kantor berita, surat kabar atau majalah di Jakarta, yang dimuat di pusatnya, katakanlah Tokyo, Bonn, London, Paris, Washington, New York, dan sentra politik-ekonomi lainnya di berbagai negara, pasti akan mempunyai dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap kepentingan kita, dalam bentuk positif atau negatif. Itulah sebabnya pembinaan pers asing di Indonesia amat penting.

Dilemma Demokrasi Dan Pers Barat

Secara singkat : pers di A.S., dan dalam pengertian "pers" di sini mencakup media massa lainnya seperti TV, Radio dan media komunikasi lainnya, dewasa ini telah menjadi perusahaan komersial yang amat berkuasa ("powerful"), sehingga bagi masyarakat A.S. ia kadang-kadang merupakan suatu "monster" yang merupakan tekateki dan dilemma. Teka-teki atau dilemmanya ialah: di satu pihak ia jelas merupakan sarana positif yang secara objektif dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa untuk memperoleh berbagai ragam berita lokal, nasional dan internasional, serta pendapat-pendapat umum, tetapi di pihak lain ia telah menjadi suatu lembaga komersial swasta yang amat berkuasa, yang mempunyai "vested interest" sendiri, yang karena sifat alamiahnya membentuk opini individu, masyarakat dan para perancang dan pembuat kebijaksanaan dari hari ke hari, menurut warna, orientasi dan kehendak pers yang bersangkutan, yang tidak selalu mesti sejalan atau baik bagi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negaranya.

Hal inilah yang menyebabkan timbulnya semacam ekspolsi protes dari masyarakat Barat itu sendiri, yang menuduh dan memberontak terhadap adanya "the dictatorship of the press" ("kediktatoran pers"), sebab sering-sering cara pemberitaan, kalimat-kalimat dan tekanan-tekanan yang dipakai dalam pemberitaan atau komentar media massa itu, pada hakekatnya mendikte si pembaca atau pendengar untuk menerima begitu saja berita atau opini yang disuguhkan secara halus, secara humor,

PERUMTEL

PENYELENGGARA
JASA TELEKOMUNIKASI
UNTUK UMUM DI DALAM NEGERI

dengan fasilitas :

- TELEPON
- TELEGRAP
- TELEX
- FACSIMILE
- SIRKIT SEWA

siap menunjang keberhasilan
ANDA

Digitized by Google

secara sinis atau secara serius oleh si penulis, sipemberita, si pembaca atau komentator TV yang bersangkutan, yang semuanya adalah manusia biasa belaka dengan segala kekurangan-kekurangannya.

Sehingga pertanyaan timbul di masyarakat Barat sendiri: apakah sistim ketatanegaraan Demokrasi Barat sudah berobah dari "trias politika" dengan tiga unsur utama itu: Eksekutif, Legislatif dan Judikatif menjadi "quarto politika" (empat unsur), di mana pers/media massa merupakan unsur yang keempat ("fourth estate")?

Pertanyaan berikut yang timbul ialah, jika dalam "trias politika" ada "check and balance" antara lembaga Eksekutif yang di "check" oleh lembaga Legislatif dan keduanya dibalans oleh lembaga Judikatif, di mana fungsi dan tempat unsur keempat ini yaitu pers/media massa? Siapa yang mengontrol atau men"check"nya? Maka pertanyaan: kalau pers/media massa mengclaim sebagai alat "kontrol sosial", siapa yang mengontrol dia, benar-benar beralasan kuat dan sangat relevan.

Dalam era teknologi, pers sering menentukan dalam aspek kehidupan masyarakat

Dilemma selanjutnya yang dihadapi oleh sistim DEMOKRASI BARAT dalam hubungannya dengan peranan pers ini ialah: di satu pihak falsafah dan sistim ketatanegaraan "DEMOKRASI BARAT" itu menjagoi atau membela prinsip-prinsip kebebasan individu secara liberal dan ini dianggap sebagai "hak azasi manusia", ("basic human rights") dan karenanya menentang kediktatoran dalam segala bentuk atau manifestasi politik atau sistim sosial ekonomi (misalnya Komunisme dan sistim kediktatoran non-Komunis lainnya), di lain pihak, di dalam masyarakat Demokrasi Barat itu sendiri telah berkembang apa yang oleh masyarakat Barat itu sendiri dinamakan "the dictatorship of the press" ("kediktatoran pers") sebagaimana digambarkan di atas, bahkan telah menimbulkan keresahan dan protes atau pemberontakan kejiwaan masyarakat luas terhadapnya. Bagaimanakah kemurnian nilai-nilai DEMOKRASI BARAT itu sendiri hendak dipertahankan, dibela dan dijagokan dalam arena internasional dalam kondisi dilemma yang demikian? Pertanyaan ini timbul dari para negarawan dan para pemikir Barat sendiri.

Ini adalah benar-benar suatu dilemma dari sistim nilai ("value system") demokrasi itu sendiri.

Jika menyangkut ekses dari falsafah "life, liberty and the pursuit of happiness" di dunia usaha (bisnis), lembaga legislatif

Segenap Pimpinan & Karyawan
TEATER IMAX KEONG EMAS

Mengucapkan

Selamat Atas Terselenggaranya Pemilu 1987 Dengan Aman Tertib Dan Lancar
Serta Menyambut Gembira Sukses Dan Kemenangan Yang Dicapai GOLKAR

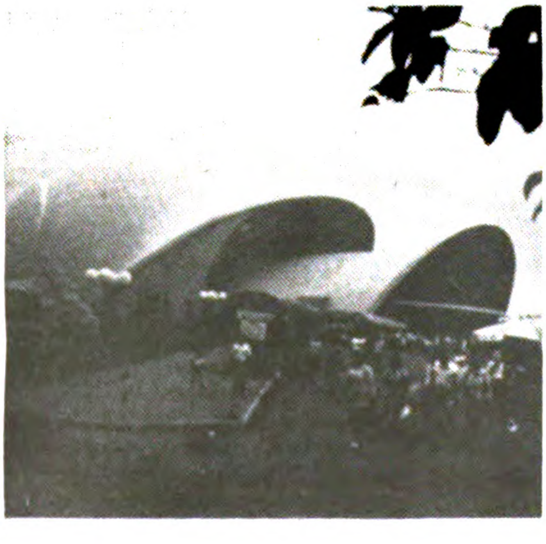

TEATER IMAX KEONG EMAS
di Taman Mini Indonesia Indah

Sekarang terbuka kesempatan untuk menyaksikan film yang lebih banyak pada satu hari yang sama yaitu :

Film : 1. Anak-anak Indonesia - Diputar tiap hari
2. Indonesia Indah I - Diputar tiap hari
3. The Dream Is Alive - Diputar hari Sabtu dan Minggu
4. To Fly } Diputar tiap hari Senin s/d Jumat secara
5. Speed } bergantian tiap Minggu.

Untuk mengetahui jam pertunjukan dan film yang dipertunjukkan juga untuk booking hubungi telp. 8401021 & 8401036. Rombongan 50 orang ke atas diberikan discount.

Digitized by Google

(Kongres A.S.) telah berusaha membatasinya dengan perundang-undangan "anti monopoly" dan "anti trust laws", maka terhadap kekuasaan "kediktatoran pers" itu sendiri lembaga legislatif dan eksekutif sepertinya tidak berdaya, karena akan dapat dituduh bertentangan dengan Undang-undang Dasar (First Amendment) mengenai "freedom of the press" (kebebasan pers), dan motto "the people have the right to know" ("Rakyat berhak mengetahui"). penulis pernah memperoleh kesempatan sebagai Congressional Fellow mendalami sistim Kongres A.S. langsung di gedung Kongres tersebut, selama satu tahun yaitu 6 bulan mendalami House of Representatives dan 6 bulan lagi mendalami sistim Senat A.S. dan berdasarkan pendalaman tersebut menyimpulkan bahwa Kongres A.S. benar-benar mempunyai kekuasaan yang amat luas. Namun, dalam hubungan dengan peranan, fungsi dan kebebasan pers A.S. lembaga yang berkuasa itu tidak berdaya menghadapinya atau membatasinya, akibat dari Amandemen Pertama UUD A.S.

Bahkan di A.S. sendiri berkembang pendapat, bahwa pers telah mencapai tingkat yang sedemikian rupa sehingga telah menjadi lebih berkuasa dari lembaga: Eksekutif, Legislatif dan Judikatif, ketiga-tiganya.

Dalam relevansinya dengan peranan dan perkembangan pers nasional kita tentu timbul pertanyaan: bentuk pers seperti inilah yang kita kehendaki? Tentu tidak.

Di lain pihak, telah banyak dipertanyakan di kalangan pers A.S. sendiri apa peranan dan tanggung-jawab pers itu sendiri mencegah perkembangan ekses nilai-nilai yang dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai azasi yang melahirkan republik yang menjagoi faham demokrasi itu. Sampai dewasa ini, perdebatan masyarakat tentang hal ini masih terus berjalan.

Patut dicatat, bahwa kritik, introspeksi dan tinjauan yang mempertanyakan peranan dan tanggung jawab pers Barat ini telah berulang kali dan meluas terdapat di kalangan pers Barat itu sendiri, di majalah, suarat kabar dan buku-buku Barat.

Salah satu buku yang populer di kalangan pers dan banyak menyoroti secara tajam masalah peranan dan tanggung-jawab pers Barat ialah "Responsibility in Mass Communication" ("Tanggung-jawab Dalam Komunikasi Massa") oleh 3 penulis: William Rivers, Wilbur Schramm dan Clifford G. Christians (1980, 378 halaman).

Relevansi Dilemma Pers Barat Dengan Perkembangan Pers Nasional

Pertama-tama landasan falsafah atau idiologi bangsa dan negara Republik Indonesia berbeda dari falsafah Demokrasi Barat. (Tentunya juga berbeda, bahkan bertentangan dengan falsafah Komunis. Aspek Komunis memang sengaja tidak dibahas dalam artikel ini, karena dalam masyarakat yang bernilaikan falsafah Komunis, peranan pers sederhana sekali, yaitu sebagai alat Pemerintah, titik).

Jika Barat menganut nilai Individualisme yang bersumber dari "life, liberty and the pursuit of happiness", kita menganut falsafah PANCASILA, yang tidak mengutamakan kepentingan Individu, tetapi keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, bahkan kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi menurut nilai-nilai P4.

Falsafah atau idiologi yang menjadi dasar dari sesuatu negara, menentukan corak, sifat dan kedudukan persnya.

Kalau Demokrasi Barat umumnya menganut sistim "trias politika" (dan sekarang dihadapkan kepada dilemma karena pengaruh dan kedudukan pers yang dominan yang menjelma menjadi unsur keempat), R.I. tidak mengenal sistim yang memisahkan secara kaku lembaga Eksekutif, Legislatif dan Judikatif satu dari yang lain. Tekanan di sini ialah pada ke "kaku"-an.

Dalam sistim Demokrasi Barat, tidak dikenal adanya suatu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang di dalam sistim ketatanegaraan Indonesia ditetapkan oleh lembaga tertinggi negara, yaitu MPR sekali dalam 5 tahun dan mencakup semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Jadi semua apparat Negara, bahkan semua kekuatan sosial politik di Negara ini wajib melaksanakan GBHN, karena ia merupakan keputusan lembaga tertinggi di negara ini, dimana semua kekuatan sosial politik diwakili. Itulah sebabnya tidak dikenal sistim opposisi, seperti yang lazim dikenal dalam sistim ketatanegaraan Demokrasi Barat.

Dalam hal ini, pers di Indonesia pun terikat pada komitmen untuk melaksanakan isi GBHN, sedangkan dalam sistim ketatanegaraan Barat, tidak demikian halnya. Undang-undang Dasar A.S. malahan melarang Kongres membuat Undang-undang atau produk legislatif yang "mengurangi kebebasan pers". Jadi pers benar-benar mempunyai kebebasan tak terbatas, hal mana telah banyak menimbulkan kritik-kritik tajam di A.S. sendiri, walaupun Negara-negara Bagian masih mempunyai hak untuk mengatur persnya.

Sistim politik antar negara-negara demokrasi Barat saling berbeda antara yang satu dengan yang lain. Misalnya sistim politik A.S. sangat berbeda dengan sistim politik demokrasi parlementer di kebanyakan negara-negara Eropah Barat. A.S. menge-

PERUM PENGERUKAN
Jl. Seram No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia
Telp. (021) 490430, 490447, 491041, 491152, 490448
Telex : 49496 KERUK IA

DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERSELENGGARANYA PEMILU 1987 DENGAN AMAN, TERTIB DAN LANCAR SERTA MENYAMBUT GEMBIRA SUKSES DAN KEMENANGAN YANG DICAPAI GOLKAR

DAN

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITHRI 1 SYAWAL 1407 H

Digitized by Google

nal sistim presidensial, di mana Presiden sebagai Kepala Lembaga Eksekutif tidak dapat ditumbangkan oleh lembaga legislatif selama periode pemerintahannya yaitu 4 tahun, dan masa jabatannya maksimum ialah 2 kali 4 tahun.

Sedangkan di negara-negara demokrasi parlementer, pemerintah dapat ditumbangkan oleh "mosi tidak percaya" parlemen jika mencapai suara yang diperlukan.

Sistim demokrasi parlementer pernah kita praktekkan di Indonesia dalam tahun 1945-1959, periode mana kita sebut sebagai Zaman Liberal. Periode ini penuh dengan kekacauan, gontok-gontokan antara satu kekuatan politik dengan yang lain, pemberontakan bersenjata dan gerakan separatisme (DI/TII, PRRI, Pemberontakan PKI Madiun, RMS, Kahar Muzakar, Andi Azis, dlsb). kabinet tumbang bangun dengan mudah. Dalam 14 tahun itu tumbang-bangun 17 buah Kabinet. Tidak mungkin membangun negara, karena tidak ada kestabilan nasional.

Pers pada waktu itu kebanyakan diperalat oleh partai-partai politik. Hampir tiap partai mempunyai surat kabar sendiri, sehingga opini Rakyat Indonesia benar-benar dikotak-kotakkan. Pengalaman zaman "liberal" ini yang pada dasarnya meniru sistim demokrasi parlementer a la Belanda, karena para pemimpin kita waktu itu lebih mengenal sistim itu akibat penjajahan Belanda, telah membuat orang tidak menyukai, bahkan menentang "liberalisme". Jadi "liberalisme" pada hakekatnya dikaitkan dengan latar-belakang pengalaman di zaman liberal dengan sistim demokrasi parlementer a la Belanda, yang penuh dengan ketidak-stabilan, ketidak-amanan, dan kekacauan itu.

Sedangkan dalam sistim politik A.S. istilah "liberal" untuk seorang Senator atau Anggota Kongres misalnya yang berpandangan "liberal" biasanya adalah kebalikan dari pandangan "konservatif", bahkan mengandung konotasi "progressif", ada kalanya kalau "terlalu progressif" malah menjurus agak ke "kiri". Misalnya ia akan mati-matian membela prinsip "hak azasi manusia", sampai-sampai membela hak dari orang-orang Komunis yang dipenjarakan, walaupun ia secara idiologi menentang faham Komunis.

Jadi kalau dalam sistim politik Demokrasi Barat sendiri terdapat perbedaan-perbedaan dasariah, maka perbedaannya dengan sistim Demokrasi Pancasila pun adalah hal yang wajar. Sebab nilai-nilai Demokrasi itu sendiri dapat diaplikasikan sesuai kondisi setempat. Tidak harus mengikuti pola tertentu, misalnya pola A.S. atau pola Demokrasi parlementer Eropa Barat, walaupun para penyusun UUD 1945 juga telah mengambil sebagian aspek-aspek positif dari pengalaman negara-negara demokrasi di A.S. dan Eropah Barat.

Kalau sistim politik Demokrasi Barat umumnya menganut doktrin "civilian supremacy", yaitu supremasi sipil, artinya Angkatan Bersenjatanya merupakan alat belaka dari pemerintahan sipil, maka sistim politik R.I. tidak demikian halnya. Memang sistim pemerintahan kita sesuai UUD 1945 adalah pemerintahan sipil. Bahwa seorang Jendral purnawirawan kebetulan menjadi Kepala Negara, itu sama saja dengan Jendral Eisenhower misalnya pernah menjadi Presiden A.S., tetapi pemerintahannya bukan pemerintahan militer. Aturan permainan seperti pemilu dan proses demokrasi semuanya ditempuh.

Sejak perjuangan kemerdekaan (1945-49), ABRI mempunyai peranan yang khas, bukan sebagai alat politik dari sesuatu kekuatan politik, tetapi sebagai tentara pejuang. Pada saat-saat genting di negara kita, misalnya akibat praktek yang kacau dalam "zaman liberal" (1945-1959), yang penuh dengan kekacauan, pemberontakan bersenjata, gerakan separatisme, dan tumbang-bangunnya Kabinet, maka ABRI-lah yang tampil ke depan menyelamatkan Republik ini. Pemberontakan-pemberontakan bersenjata ditumpas, dan keamanan diciptakan, dengan pengorbanan jiwa yang tidak kecil.

Di zaman "Demokrasi Terpimpin" pun, (1959-1965), yang memungkinkan PKI melancarkan kup G-30-S/PKI itu, maka ABRI kembali tampil menyelamatkan Republik ini dengan didukung oleh Rakyat. Keamanan dan kestabilan diciptakan, sehingga pembangunan dapat diutamakan. Jadi ada kestabilan politik bangsa kita yang khas di mana ABRI berperan sebagai stabilisator dan dinamisator, yaitu sebagai kekuatan sosial politik dan kekuatan HANKAM, sehingga "dwifungsi ABRI" ini adalah realita historis dan kemudian merupakan realita konstitusional dengan dikukuhkannya "Dwifungsi ABRI" di dalam ketetapan-ketetapan lembaga tertinggi di negara kita, yaitu MPR.

(Pandangan penulis yang lebih lengkap tentang "Dwifungsi ABRI" dapat dibaca dalam Harian Angkatan Bersenjata tanggal 29 Oktober 1966 berjudul "Dwifungsi ABRI : Realita Historis dan Realita Konstitusional").

Jadi hal ini berbeda dengan sistim "civilian supremacy" yang dianut oleh demokrasi Barat, di mana Angkatan Bersenjatanya "tinggal di barak", bergerak kalau diperintahkan oleh aparat sipil.

Sistim ini pun tentunya mempengaruhi persepsi dan peranan pers, yang di Indonesia merupakan bagian integral dari sistim nasional kita, sedangkan di A.S. misalnya pers-nya sesuai latar-belakang sejarah, falsafah dan UUD-nya seperti telah dibahas tadi, mempunyai posisi yang berbeda. Sehingga persepsi tentang sesuatu masalah politik yang akan diberitakan atau di analisa oleh seorang wartawan Barat di Indonesia misalnya tentu dipengaruhi oleh seluruh latar-belakang sistim politik negaranya, terutama kalau ia tidak mempelajari dan memahami dengan baik latar-belakang sejarah dan sistim politik negara kita. Faktor inipun merupakan alasan, mengapa pembinaan pers asing di Indonesia amat penting.

Nilai-nilai budaya antara masyarakat Barat dan masyarakat Timur umumnya secara alamiah berbeda. Namun, tidak dapat dihindarkan bahwa yang satu memperoleh masukan dan pengaruh dari yang lain dalam proses hubungan antar-bangsa atau antar-manusia akibat kemajuan teknologi yang membuat hubungan antar-bangsa semakin intensif dan dunia menjadi semakin kecil.

Nilai-nilai budaya antara masyarakat Barat dan masyarakat Timur umumnya secara alamiah berbeda. Namun, tidak dapat dihindarkan bahwa yang satu memperoleh masukan dan pengaruh dari yang lain dalam proses hubungan antar-bangsa atau antar-manusia akibat kemajuan teknologi yang membuat hubungan antar-bangsa semakin intensif dan dunia menjadi semakin kecil.

Walaupun dunia semakin kecil, tetapi perbedaan yang alamiah itu mengakibatkan tidak cocoknya mengambil alih dan menerapkan sistim nilai sosial budaya Barat begitu saja di masyarakat Timur umumnya, termasuk di masyarakat Indonesia. Jika ada aspek-aspek positif, biasanya ia tersaring dan tersesuaikan dengan kondisi setempat. Namun ini tidak berarti, bahwa aspek-aspek negatif dari budaya Barat itu tidak bisa menembus ke budaya Timur. Hal inilah justeru yang perlu dihindari.

Di bidang pers pun, ini tidak terkecuali. Kesalahan pengertian sering dapat terjadi. Seorang Indonesia yang diajak bicara oleh seorang wartawan Barat, misalnya dapat bersikap sangat ramah, dan sering tersenyum dan mengangguk-angguk, sikap mana diartikan atau disalah-mengertikan seolah-olah yang bersangkutan sependapat dengan teman bicaranya tersebut. Padahal orang Indonesia tersebut hanya ingin bersikap hormat, walaupun ia di dalam hatinya sama sekali tidak setuju terhadap hal-hal yang diajukan si penanya.

Ini hanya contoh insidentil, tetapi menunjukkan adanya perbedaan nilai budaya.

Pada hakekatnya, nilai-nilai sosial budaya tidak dapat dipisahkan dari falsafah bangsa, dalam hal ini falsafah Pancasila bagi bangsa Indonesia, dan falsafah liberalisme bagi dunia Barat, sebagaimana telah dibahas tadi.

Kenyataan-kenyataan lainnya yang secara langsung menunjukkan perbedaan antara sikon pers Barat dan pers nasional, ialah kenyataan yang menyolok, bahwa usia pers Barat itu sudah ratusan tahun, dalam hal ini A.S., 211 tahun sejak deklarasi kemerdekaannya, sedang pers nasional kita baru 42 tahun sejak proklamasi kemer-

Digitized by Google

Reportase dari perwakilan pers asing akan mempunyai dampak dimana perwakilan itu pers itu berasal

dekaan R.I. Karenanya kemajuan teknologi komunikasinya dan menejemennya pun dan taraf penghidupan para warga persnya jelas bukan bandingan. Penghasilan para wartawan dari persurat-kabaran seperti New York Times, Wall Street Journal, Time, Newsweek, dan yang besar-besar lainnya dan jaringan Televisi seperti CBS, NBC, ABC dan lain-lain di A.S., tentu tidak dapat dibandingkan dengan penghasilan para wartawan kita, karena seperti dibahas tadi, perusahaan media massa di A.S., telah berkembang menjadi perusahaan komersial raksasa yang mempunyai "vested interest" sendiri, sedangkan di Indonesia situasi dan kondisi serta fungsi dan posisi pers berbeda dengan di Barat.

Patut dicatat, bahwa perusahaan-perusahaan surat kabar kita di Indonesia sesuai dengan sikon kita sudah mulai semakin meningkat penghasilannya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para wartawan dan para pegawainya.

Adanya perbedaan-perbedaan hakiki yang telah disebutkan di atas, bukannya untuk mempertentangkan atau menunjukkan bahwa kita lebih baik dari mereka atau sebaliknya, sama sekali bukan. Tetapi sekedar menunjukkan apa adanya supaya pers nasional kita menyadarinya.

Pembinaan Pers Asing Dan Dampak Pers Barat Terhadap Pers Nasional

Sementara itu, reportase dari perwakilan pers asing di Indonesia, baik ia perwakilan surat kabar, majalah, kantor berita maupun radio dan televisi, akan mempunyai dampak di negara dari mana perwakilan pers itu berasal, bahkan jika sirkulasi surat kabar atau majalah dan berita bahan untuk

NV PD SOEDARPO CORPORATION
Jl. Let. Jen. S. Parman 35 – Jakarta 11480 Indonesia
Tlp. (021) 596701 - Fax. 62 21 591594 - Tlx. 45867 DARCO IA

Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1407 H.
Minal Aidin Wal Faidin

COMPUTER SYSTEMS BUSINESS UNIT
Phone : 593278, 596701
Authorized distributor for :
- SPERRY Computer Systems
- TELEX Computer Products
- DECISION DATA Computer Corporation
- TARTAN Data Entry Systems

SOFTWARE BUSINESS UNIT
Phone : 596701
- Sperry 1100/71 Mainframe running
- Scientific and Business Packages :
  - STRUDL, ChemShare, SPSS, IFPS
- Information Systems Development :
  - General Ledger
  - Payroll
  - etc.
- Data Preparation Services :
  - GCS
  - Tartan Terminal Systems
- Dial - up communication facility

Authorized sole distributor for :
- Design II (Process Flowsheet Simulation Package Software) on PC-AT & mainframe, Chemtran on PC & mainframe from ChemShare Corporation.

ELECTRICAL & ELECTRONIC BUSINESS UNIT
Phone : 596701
- HF-SSB Tranceiver
- VHF-UHF FM Radio :
- • Handy Talky
  • Mobile
  • Base/Repeated
- Microwave :
  • Point to point
  • Point to multipoint
- Radio Link
- Safety & Security Systems.
- Army Equipment

PHARMACEUTICAL BUSINESS UNIT
Phone : 596701
Authorized distributor for :
- MERCK (Sole)
- SANBE (Sole)
- MEIJI INDONESIA
- BIOMED PRODUCTS
- ORGANON
- PT MEPROFARM INDONESIA

Digitized by Google

radio dan televisi itu bersifat internasional, maka dampaknya tentu bersifat internasional pula.

Kita tidak dapat mengatakan, peduli amat terhadap opini publik internasional atau opini publik di negara-negara besar terhadap kita, karena dalam dunia yang interdependen karena kemajuan teknologi komunikasi dan telekomunikasi ini, pembentukan opini itu sangat cepat berantai dan pada akhirnya akan mempunyai dampak yang langsung atau tidak langsung terhadap kepentingan nasional kita, secara positif atau negatif, tergantung kepada isi pemberitaan tersebut.

Karena itu, pembinaan pers asing di Indonesia amatlah pentingnya. Penting, agar mereka juga sadar dan faham benar-benar tentang perbedaan-perbedaan idiologis, konstitusional, historis, politis dan perbedaan-perbedaan riil lainnya, di samping pentingnya membina mereka agar persepsi tentang sesuatu masalah yang diberitakan itu benar-benar balans dan objektif. Dalam rangka pemahamannya tentang perbedaan-perbedaan itu, kita tentunya harus menguasai sistim dan latar-belakang mereka, agar pembinaan itu mencapai sasarannya.

Pendekatan informal, pertukaran-pikiran yang sifatnya pribadi dan santai sering lebih efektif daripada pendekatan resmi.

Jika pers asing itu benar-benar yakin tentang apa yang dijelaskan kepadanya dengan baik dengan argumentasi yang masuk akal, maka ia dapat merupakan sahabat yang ampuh dalam reportase atau pemberitaannya dalam membentuk opini dunia internasional. Lain halnya, jika ia memang a priori sudah mempunyai motivasi tertentu untuk mendiskreditkan Pemerintah dan Negara kita.

Sudah jelas, bahwa akibat kemajuan teknologi komunikasi, dampak dari pers Barat di forum internasional, termasuk di negara kita, umumnya terasa dalam bentuk yang langsung maupun tidak langsung. Terutama aspek "kebebasan pers yang tak terbatas" itu sering ingin ditiru dengan segala kemudahannya, tetapi jika dikaji secara teliti, sebenarnya orang sering tidak sempat mendalami untuk memahami secara tepat latar-belakang yang mendasari kebebasan pers Barat itu sebagaimana telah di bahas di atas.

Latar-belakang filosofis, sejarah, politis, konstitusional, ekonomi, sosial-budaya dan perbedaan-perbedaan riil lainnya seperti telah dibahas tadi, adalah sedemikian rupa, sehingga tidaklah mungkin mengambil alih begitu saja nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat lain untuk diterapkan di masyarakat yang sikon-nya lain pula.

Lagi pula pers Barat itu sendiri mengakui ketidak-sempurnaannya, terutama karena dihadapkan kepada dilemma antara fungsinya sebagai alat "kontrol sosial" dan "kediktatoran pers" dalam suatu sistim di mana Undang-undang Dasarnya melarang lembaga legislatif-nya untuk mengeluarkan produk legislatif yang "mengurangi kebebasan pers", sistim mana pun menentang "kediktatoran" dalam bentuk atau manifestasi apapun, termasuk tentunya "kediktatoran pers".

Ironi-nya ialah, di satu pihak ada kalangan yang ingin meniru kebebasan tak terbatas dari pers Barat itu, tetapi di lain pihak, pers Barat atau Pemerintah negara Barat yang bersangkutan sendiri, yang sadar akan kekurangan dan dilemma yang dihadapi oleh persnya dan yang memahami perbedaan-perbedaan riil sikon yang ada antara pers Barat dan pers setempat sebenarnya tidak terlalu antusias mendorongkan sistim pers yang berlaku di negaranya untuk ditiru.

Dari uraian di atas dapatlah dilihat relevansi dilemma pers Barat dengan perkembangan pers nasional di mana yang penting ialah agar kedua belah pihak, yaitu pers Barat itu sendiri dan pers nasional sama-sama sadar dan memahami perbedaan-perbedaan fundamental yang ada antara kedua sistim sesuai dengan apa adanya. Oleh karena itulah pembinaan terhadap pers asing seperti dibahas di atas perlu dilakukan secara sistimatis, demikian pula pembinaan terhadap pers nasional secara menyeluruh.

Beberapa Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Kebebasan pers yang dipraktekkan di dunia Demokrasi Barat yang bersumber dari falsafah Individualisme "life liberty and the pursuit of happiness" tidak cocok untuk dipraktekkan di Indonesia, karena perbedaan-perbedaan yang fundamental yang sudah dibahas di atas, antara lain perbedaan: falsafah/idiologi, karena kita berdasar atas Palsafah PANCASILA, perbedaan sistim ketatanegaraan, sistim politik, ekonomi/bisnis, nilai-nilai sosial budaya, sejarah, tingkat kemajuan, sikon menejemen dan penghasilan para jurnalis, dan kenyataan-kenyataan riil lainnya.

2. Kalau dalam konstitusi A.S. "kebebasan pers" yang praktis tak terbatas itu dijamin oleh Amandemen Pertama ("first Amendment") dengan melarang Kongres mengeluarkan undang-undang yang "mengurangi kebebasan pers", sesuai dengan falsafah yang mengatakan "lebih baik memilih pers tanpa Pemerintah dari pada memilih Pemerintah tanpa pers", maka di Indonesia pers merupakan bagian daripada perjuangan dan pembangunan nasional, dan terikat kepada komitmen untuk mensukseskan pembangunan nasional. Pers bukan berada di luar sistim ketatanegaraan atau sistim politik dan idiologi nasional.

3. Oleh karena hal-hal di atas, maka tepatlah isi dari Undang-Undang No. 21 tahun 1983 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (yang merupakan perubahan atau UU No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967), yang "menjamin pertumbuhan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung-jawab"

Istilah "bertanggung-jawab" di sini amat penting jangkauannya.

Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Pers Nasional bertugas dan berkewajiban:

Melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila;

Memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berlandaskan Demokrasi Pancasila;

Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung-jawab;

Menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, membantu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta menggairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan;

Memperjuangkan terwujudnya tata internasional baru di bidang informasi dan komunikasi atas dasar kepentingan nasional dan percaya pada kekuatan diri sendiri dalam menjamin kerjasama regional, antar regional dan internasional, khususnya di bidang pers".

Dengan demikian pers nasional, mempunyai missi yang khusus dalam kerangka yang tidak terpisah dari sistim ketatanegaraan nasional dan merupakan bagian integral daripada seluruh perjuangan dan potensi nasional, dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sudah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Pokok Pers tersebut.

Atas dasar kesimpulan-kesimpulan di atas, maka pers di Indonesia mempunyai corak, sifat, peranan dan tanggung-jawab yang unik sebagai pers pejuang, yang secara fundamental berbeda dengan corak, sifat, peranan dan tanggung-jawab pers Barat atau pers di negara-negara yang menerapkan sistim dan praktek pers Barat umumnya.

Pers di Indonesia mempunyai corak, sifat, peranan dan tanggung-jawab yang unik sebagai pers pejuang, yang secara fundamental berbeda dengan corak, sifat, peranan dan tanggung-jawab pers Barat atau pers di negara-negara yang menerapkan sistim dan praktek pers Barat umumnya.

Dirgahayu pers nasional, dan dengan semakin dewasanya pers nasional, diharapkan pers nasional akan terus meningkatkan dirinya mencapai kemajuan-kemajuan bagi dirinya dan bagi Nusa dan Bangsa di masa depan. Semoga sumbangan pikiran dalam tulisan ini bermanfaat adanya. □

Digitized by Google

Sayuti Hasibuan

Peningkatan Perluasan Lapangan Kerja

Diperlukan Reorientasi Kebijaksanaan Investasi

Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1985, Presiden Soeharto mengemukakan: "Dihadapan kita masih ada masalah besar dan berat yang belum terpecahkan secara mendasar sampai sekarang, ialah masalah lapangan kerja dan masalah tenaga kerja". Apa yang dikemukakan oleh Presiden tersebut terbukti setiap hari disekeliling kita. Besarnya arus pencari kerja di bandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia merupakan salah satu contoh konkrit masalah ini. Dilain pihak investasi yang ada belum sepenuhnya dapat menghasilkan lapangan kerja. Investasi baru juga semakin mengecil.

Bilamana masalah lapangan kerja ingin dipecahkan secara mendasar di akhir abad ini maka salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi adalah adanya arus investasi yang cukup memadai. Untuk itu perlu ada perubahan kebijaksanaan investasi dari apa yang telah dilaksanakan sampai sekarang.

Kebutuhan reorientasi kebijaksanaan investasi & beberapa fakta

Bahwa dibutuhkan reorientasi kebijaksanaan investasi dapat dijangkau dari pengamatan umum bahwa selama tahun-tahun 1970-an kesempatan yang menguntungkan bagi investasi terbuka besar dengan adanya kebijaksanaan pembangunan industri substitusi impor berikut kebijaksanaan proteksi yang diberikan oleh Pemerintah. Dilain pihak dana yang berasal dari harga minyak yang relatif tinggi memungkinkan pemanfaatan kesempatan investasi substitusi impor yang terbuka ini. Pada saat sekarang dan ditahun-tahun akan datang kedua unsur kemudahan ini tidak akan tersedia lagi. Kesempatan mudah bagi investasi yang menguntungkan untuk pengganti impor sudah tidak tersedia oleh karena relatif jenuhnya pasar bagi barang-barang industri demikian. Bahkan di sektor pertanian, kesempatan bagi investasi mudah untuk menggantikan impor juga telah selesai dengan dicapainya swasembada pangan. Dilain pihak dana investasi yang berasal dari minyak dan gas bumi, terutama yang disalurkan melalui anggaran belanja negara sudah tidak akan tersedia lagi dengan menurunnya harga minyak bumi.

Kejenuhan dalam investasi yang relatif mudah baik di sektor industri maupun pertanian yang didukung oleh sumber dana yang besar yang relatif mudah dihimpun dan diarahkan berlangsung bersamaan dengan tibanya resesi ekonomi dunia melanda Indonesia. Hal inipun menambah urgensi dilaksanakannya reorientasi kebijaksanaan investasi secepat mungkin.

Secara lebih nyata, mendesaknya dilaksanakannya reorientasi ini dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

Data-data pada Tabel 1 menggambarkan kesenjangan yang ada diantara yang membutuhkan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Angka-angka pada kolom 1 memperlihatkan jumlah tenaga kerja yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor Departemen Tenaga Kerja. Dari Tabel 1 ini dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara yang membutuhkan lapangan kerja dan penyediaan lapangan kerja semakin besar. Kalau pada akhir Repelita I permintaan dibandingkan pendaftaran adalah 44,2%, maka pada akhir Repelita II perbandingan ini menurun menjadi 16,4%, pada akhir Repelita III menurun lagi menjadi 14,2%, dan pada tahun pertama Repelita IV menurun lagi menjadi 9,7%. Angka-angka ini belum menunjukkan masalah bagi seluruh ekonomi oleh karena tidak semua tenaga kerja yang membutuhkan lapangan kerja mendaftar. Juga tidak semua lowongan yang ada terdaftar di Departemen Tenaga Kerja. Namun kecenderungan kesenjangan yang meningkat seperti tercermin pada kolom 4, memperkuat dan membenarkan pengetahuan umum mengenai kekurangan lapangan kerja.

Kalau diperhatikan mengenai kemampuan pencipta lapangan kerja, khususnya dari segi investasi, maka dapatlah dikemukakan beberapa hal pokok. Pertama, terlepas dari masalah intensitas tenaga kerja, maka investasi yang ada secara efektif banyak yang tidak menghasilkan lapangan kerja. Kedua, adanya gejala bahwa arus investasi melemah, terutama PMA. Mengenai yang pertama hal ini dapat dilihat dari besarnya kapasitas yang ada yang belum dimanfaatkan seperti yang tercermin pada Tabel 2. Angka-angka pada kolom 2 Tabel 2 mengemukakan jumlah komoditi yang kapasitasnya telah terpasang. Untuk Aneka Industri tercatat 76 jenis komoditi yang masing-masing komoditi mempunyai kapasitas terpasang pada tahun 1984/85. Untuk industri kimia dasar tercatat 50 jenis komoditi dan industri mesin dan logam dasar tercatat 167 komoditi. Angka-angka pada kolom 3 mengemukakan jumlah komoditi yang produksinya pada tahun 1984/85 kurang dari 60% dari kapasitas yang tersedia. Sebagai contoh adalah pembekuan udang, ikan dan sejenisnya. Kapasitas yang tersedia adalah 287.145 ton. Produksi adalah 45.000. Pemanfaatan kapasitas adalah 45.000 ton dibagi 287.145 ton = 15,67%. Dapatlah diartikan bahwa untuk aneka industri dari 76 jenis komoditi dengan kapasitas tertentu, 31 jenis mengalami produksi pada tahun 1984/85 kurang dari 60% kapasitas terpasang. Untuk industri kimia dasar 29 dari 50 komoditi mengalami produksi dibawah 60% dari kapasitas terpasang dan industri mesin dan logam dasar 127 dari 167 komoditi yang produksinya dibawah 60% kapasitas terpasang.

Kalau diperhatikan kolom 4 Tabel 2, maka dapat dikemukakan bahwa industri mesin dan logam dasar mengalami pe-

Investasi di bidang pertanian

Digitized by Google

Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya beserta jajarannya

Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya:

Bapak Djuhartono

(Pinisepuh Golkar)

Semoga arwah almarhum diterima disisi Tuhan sesuai dengan amal ibadahnya.

Digitized by Google

makaian kapasitas yang terkecil dari berbagai jenis industri. Sebagai contoh jenis-jenis komoditi yang mengalami kelebihan kapasitas adalah traktor mini, traktor besar, traktor tangan, huller, dan lain-lain. Komoditi yang produksinya pada tahun 1984/85 melebihi 60% kapasitas terpasang antara lain adalah mesin industri pembuat gula, bagian-bagian mesin pengolah kopi, dan lain-lain. Belum optimalnya penggunaan kapasitas industri yang ada berkaitan bukan saja dengan resesi yang sedang melanda tetapi juga dengan berbagai faktor dalam industri itu sendiri. Umpamanya, hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi perusahaan seperti struktur modal, manajemen, skala ekonomi, tingkat teknologi dan hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintah seperti sistem proteksi dan pentarifan dan masalah-masalah perizinan.

Apapun alasannya, dapatlah dikemukakan bahwa dari 293 komoditi, 187 atau 63,8% dari seluruh kapasitas yang dicatat mengalami pemanfaatan kurang dari 60% kapasitas terpasang. Keadaan ini menjadi penting untuk diperhitungkan dimasa depan oleh karena ternyata kapasitas industri yang telah menyerap sebagian besar investasi dalam masa Repelita I, Repelita II dan Repelita III sebagian besar belumlah optimal pemanfaatannya.

Selanjutnya pemanfaatan kapasitas yang kurang optimal pada tahun 1984/85 telah meningkat dibandingkan dengan tahun 1983/84. Pada tahun 1983/84 dari 250 komoditi yang kapasitasnya dicatat, 151 atau 60,4% produksinya dibawah 60% dari kapasitas. Pada tahun 1984/85, persentase ini adalah 63,8%. Jadi ada kecenderungan pemanfaatan kapasitas terus berkurang. Tetapi apakah hal ini bukan masalah dalam tahun 1983/84 dan 1984/85 saja? Jawabannya juga tidak oleh karena apa yang terjadi dalam tahun 1983/84 dan 1984/85 kelihatannya merupakan kelanjutan dari kecenderungan kejenuhan pasar dalam negeri bagi produk tertentu disektor industri. Kejenuhan ini dapat diperhatikan bila dibandingkan peranan perluasan permintaan domestik barang-barang manufaktur sebagai sumber pertumbuhan output domestik bruto untuk ekspor tersebut dalam tahun 1970-an. Dalam tahun 1971/75, perluasan permintaan domestik berperanan 81,47% dalam mendorong pertumbuhan sektor manufaktur. Dalam tahun 1975/80, peranan ini menurun menjadi 68,85%. Jadi selama dekade 1971 - 80 ada kecenderungan kejenuhan pasar bagi produk-produk manufaktur.

Kejenuhan ini tidak sama untuk semua jenis barang-barang manufaktur, bahkan untuk jenis produk-produk tertentu perluasan pasarnya meningkat. Yang menurun secara menyolok selama dekade 1971 - 80 antara lain adalah produk-produk logam dasar dari 130,06% pada tahun 1971/75 menjadi 5,29% pada tahun 1975/80, non logam dasar dari 239,71% pada tahun 1971/75 menjadi 75,59% pada tahun 1975/80, bahan kimia dari 223,22% pada tahun 1971/75 menjadi 37,74% pada tahun 1975/80. Penurunan perluasan pasar domestik bagi produk-produk ini sebagai motor pertumbuhan manufaktur dalam dekade 1970-an rupanya berkelanjutan dalam belahan pertama dekade 1980-an sebagaimana tercermin dalam pemakaian kapasitas yang semakin kurang optimal dalam tahun 1983/84 dan 1984/85 bagi produk kelompok industri kimia dasar dan logam dasar. (Lihat Tabel 3). Produk-produk yang peranan permintaan domestiknya meningkat sebagai sumber pertumbuhan di sektor manufaktur adalah produk-produk makanan, minuman, dan tembakau dari 93,32% pada tahun 1971/75 menjadi 116,12% pada tahun 1975/80. Produk ini bergabung ke dalam kelompok aneka industri yang pemakaian kapasitasnya semakin optimal dalam belahan pertama dekade 1980-an. Permintaan bagi produk mesin sebagai sumber pertumbuhan juga meningkat dari 38,90% pada tahun 1971/75 menjadi 134,43% pada tahun 1975/80 tetapi kelihatannya menjadi melemah dalam belahan pertama dekade 1980-an.

Kejenuhan tidak sama dengan semua jenis barang-barang manufaktur

Dapatlah disimpulkan bahwa pemakaian kapasitas nasional sektor industri yang rendah dan semakin rendah bukanlah gejala sesaat tetapi gejala struktural yang ditimbulkan oleh kejenuhan pasar dalam negeri bagi produk-produk industri secara keseluruhan.

Mengenai hal yang kedua yaitu adanya kecenderungan melemahnya arus investasi, dapatlah diperhatikan dari Tabel 4 dan Tabel 5. Di bidang Penanaman Modal Dalam Negeri (Tabel 4), kalau dikesampingkan kenaikan khusus yang terjadi pada tahun 1983/84, yaitu kenaikan yang disebabkan oleh keinginan memanfaatkan fasilitas pajak yang tersedia sebelum diberlakukannya Undang-undang Pajak baru pada bulan Januari 1984, maka kenaikan investasi rata-rata per tahun memperlihatkan kecenderungan yang melemah. Dalam tahun 1979/80 s/d 1984/85, kenaikan dana investasi yang disetujui Pemerintah secara komulatif adalah 55% pertahun dalam harga yang berlaku. Dalam Repelita II kenaikan per tahun adalah 76% dan dalam Repelita I 113%.

Dalam hal penanaman modal asing kecenderungan menurun juga terlihat terutama sejak tahun 1982/83. Pada saat itu investasi PMA yang disetujui Pemerintah US $ 2.328,3 juta, menurun menjadi US $ 1.328,5 juta pada tahun 1983/84 dan US $ 982,7 juta pada tahun 1984/85.

Kecenderungan menurunnya PMA ini berkaitan dengan semakin kuatnya persaingan di antara berbagai negara untuk menarik investasi luar negeri. Di Asia, umpamanya dalam menarik penenaman modal Jepang, Indonesia harus bersaing dengan RRC. PMA yang sudah ada di dalam negeri dilaporkan cenderung untuk tidak mengadakan perluasan dan re-investasi. Dilaporkan, umpamanya, bahwa dari beberapa ratus PMA Jepang di Indonesia dewasa ini, hampir separuhnya melaporkan kerugian dan sebagian di antara mereka menginginkan untuk pull out, artinya keluar dan mencari tempat lain di dunia (Business News, 14 Maret 1986, hal. 3).

Meningkatkan pemasukan arus dana luar negeri bukan saja penting sebagai komponen investasi bagi perluasan lapangan kerja produktif dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dari segi neraca pembayaran luas negeri. Kalau ekspor migas tidak meningkat, ekspor hasil pertanian juga tidak meningkat secara menyolok yaitu hanya sekitar 2 - 3% per tahun maka besarnya kebutuhan pemasukan modal ini akan sangat tergantung kepada hasil ekspor barang-barang olahan. Dengan ekspor industri naik hanya dengan 1,4% selama 1985 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka usaha pemasukan modal asing baik dengan alasan investasi maupun ne-

Digitized by Google

raca pembayaran jelas perlu ditingkatkan secara berarti dalam sisa masa Repelita IV. Hal inipun menunjuk kepada urgennya reorientasi kebijaksanaan di bidang investasi.

Kalau reorientasi dibutuhkan apakah ciri-ciri daripada kebijaksanaan baru ini? Dari uraian terdahulu dapatlah kiranya dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, kebijaksanaan investasi secara dasar diarahkan untuk mendukung tercapainya perubahan-perubahan fundamental dalam ekonomi Indonesia dalam Repelita VI, yaitu mulai berkurangnya secara absolut jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dan terus berkurangnya secara relatif produksi nasional yang berasal dari pertanian dan meningkatnya terus angkatan kerja dan produksi nasional di luar sektor pertanian, segala sesuatu dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadani.

Kedua, kebijaksanaan investasi perlulah diciptakan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri sebesar-besarnya. Penanaman modal asing juga di dorong dalam jumlah dan ragam yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pokok yaitu bahwa modal asing merupakan bagian yang semakin kecil dari seluruh investasi.

Ketiga, kebijaksanaan investasi perlu memperhatikan bahwa kesempatan investasi yang mudah melalui subtitusi impor sebagian besar sudah selesai. Dimasa depan, kesempatan investasi tidak mudah diketahui, kemungkinan kegagalan lebih besar, efisiensi dan daya saing mutlak diperlukan, selama Indonesia masih menganut sistem ekonomi campuran.

Keempat, sumber investasi dalam negeri akan semakin bergeser dari sektor Pemerintah ke sektor masyarakat.

Kelima, kegiatan investasi akan semakin bergeser dari kegiatan di sektor pertanian ke kegiatan-kegiatan di sektor non pertanian.

Beberapa komentar terhadap rancangan kebijaksanaan investasi

Dalam rancangan akhir DSP Bidang Usaha Penanaman Modal 1986, terdapat berbagai kebijaksanaan yang kiranya kurang sesuai dengan kebutuhan meningkatkan investasi baik dalam maupun luar negeri. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kurang seusai ini terlihat dalam hal banyaknya keharusan dan pengarahan-pengarahan yang perlu dipenuhi oleh para investor sebelum melaksanakan investasinya. Keharusan-keharusan ini ada yang bersifat umum yaitu yang menyangkut sesuatu sektor atau sub sektor seperti sub sektor tanaman pangan, sub sektor peternakan, sektor industri, sub sektor aneka industri, sub sektor pertambangan, sub sektor perhubungan laut, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dan keharusan-keharusan ini juga menyangkut produk-produk tertentu secara langsung, seperti ketentuan-ketentuan investasi yang menyangkut padi, jagung, sorghun, ubi kayu dan atau ubi jalar, mesin perkakas yang meliputi mesin bubut, mesin bar, mesin drilling, mesin milling, dan lain-lain. Contoh dari keharusan-keharusan dan pengarahan-pengarahan ini antara lain umpamanya adalah, harus berlokasi di daerah tertentu, bentuk usaha diarahkan dengan pola usaha PIR, harus bersedia menampung produksi ubi kayu dan ubi jalar petani di sekitarnya, harus bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk Pemerintah untuk mengembangkan industri mesin perkakas, harus bekerjasama dengan perusahaan yang telah ada, hanya untuk perluasan, dan lain-lain.

Kebijaksanaan investasi perlu diciptakan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri

Ketentuan-ketentuan ini, walaupun mungkin dikehendaki sebagai sesuatu yang sesuai dengan sasaran-sasaran pengembangan dunia usaha dalam negeri mengandung suatu anggapan yang implisit bahwa minat berinvestasi adalah begitu besar sehingga perlu diarahkan dan diberi pembatasan-pembatasan tertentu. Dengan lain perkataan, pengarahan-pengarahan, keharusan-keharusan dan ketentuan-ketentuan ini hanyalah akan efektif bilamana arus investasi cukup kuat. Semakin lemah arus investasi, semakin sedikit dari keharusan-keharusan ini akan dapat dipenuhi. Sebaliknya semakin kuat arus investasi semakin banyak ketentuan-ketentuan dan pengarahan-pengarahan ini yang dapat dipenuhi.

Seperti telah dikemukakan arus investasi ini tidaklah cenderung bertambah kuat tetapi sebaliknya bertambah lemah. Oleh karena itu sasaran-sasaran yang baik yang terkandung dalam berbagai keharusan dan ketentuan-ketentuan akan sulit dicapai.

Salah satu kebijaksanaan pokok investasi yang terkandung dalam konsep DSP ialah adanya apa yang disebut "negative list". Dalam rancangan akhir DSP terdapat 284 jenis investasi yang tergolong kategori IV yaitu yang tertutup sama sekali bagi penanaman modal baru. Adapun jenis-jenis komoditi yang investasi barunya ditutup adalah sub-sektor aneka industri 141 jenis komoditi, sub-sektor industri farmasi 5 jenis komoditi, sub-sektor pertambangan 3 jenis komoditi dan sektor pekerjaan umum 1 jenis komoditi. Secara dasar, kebijaksanaan menutup kemungkinan investasi tidak sesuai dengan usaha menarik dan mendorong jumlah investasi yang besar dan efisien. Mekanisme pasar yang ada harus diberi kesempatan untuk menyaring yang efisien dari yang tidak efisien dan yang produktif dari yang tidak produktif. Saat konjungtur ekonomi sedang berada di bawah seperti saat ini adalah saat yang tepat bagi penyaringan ini sehingga nanti bilamana konjungtur ekonomi meningkat, maka kesempatan yang terbuka mampu dimanfaatkan oleh para pengusaha yang sudah tersaring secara alami, baik kesempatan dalam negeri maupun kesempatan luar negeri. Saat ini adalah saat dimana banyak perusahaan diberbagai cabang industri mengalami banyak masalah struktural, baik intern maupun ekstern.

Menutup kemungkinan investasi baru pada produk-produk tertentu sesungguhnya mematikan kreativitas para pengusaha lain yang melihat cara-cara lebih baik untuk menghasilkan barang yang sama dengan mutu yang lebih tinggi dan harga yang lebih murah dan dengan demikian akan meningkatkan efisiensi nasional.

Apakah tidak akan terjadi pemborosan dengan adanya investasi baru sedangkan kapasitas yang ada belum seluruhnya terpakai? Kalau para pengusaha melaksanakan investasi dalam suatu cabang produksi dengan pengetahuan mengenai keadaan pasar termasuk pengetahuan mengenai kapasitas yang ada, maka investasi yang ada tetapi tidak efisien mungkin menjadi mubazir. Hal ini wajar dan dapat dianggap sebagai suatu biaya yang harus dipikul dalam rangka meningkatkan efisiensi melalui investasi baru dan kreativitas.

Secara singkat dapatlah dikemukakan

Digitized by Google

bahwa kebijaksanaan menutup investasi secara prinsip harus dihapus karena berlawanan arah dengan usaha menarik investasi baru yang amat dibutuhkan bagi perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang mendesak, mematikan kreativitas dan upaya pembaharuan industri dan peningkatan efisiensi.

Rancangan akhir DSP Bidang Usaha Penanaman Modal 1986, sebagaimana DSP dalam tahun-tahun sebelumnya berisikan pengarahan dan keharusan-keharusan yang begitu terinci. Terlepas dari isi subtantif pengarahan dan keharusan itu, maka keterincian itu sendiri menimbulkan masalah ketidakpastian dan distorsi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang investasi. Semakin terinci kebijaksanaan investasi maka semakin banyak pula unsur-unsur kebijaksanaan yang dapat berubah. Ditinjau dari segi investor tentu hal ini meningkatkan unsur ketidakpastian dalam hal kebijaksanaan Pemerintah. Lagi pula pengetahuan pemerintah mengenai potensi pasar dan lain-lain informasi mikro yang menyangkut investasi amat terbatas dan bilamana kebijaksanaan investasi dilaksanakan atas dasar informasi yang amat terbatas ini, maka distorsi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut investasi akan terjadi.

Selanjutnya tidaklah jelas apa yang diartikan sebagai prioritas. Prioritas dapat diartikan pengerahan sumber-sumber lebih besar bagi pencapaian sasaran-sasaran yang diberi prioritas dibandingkan dengan sasaran-sasaran yang tidak diberi prioritas. Dalam kaitan ini tentu para calon investor di bidang tanaman pangan umpamanya dapat bertanya: bantuan, dorongan dan fasilitas apakah yang disediakan Pemerintah sehubungan dengan ketentuan bahwa "penanaman modal yang mengikutsertakan koperasi atau kelompok-kelompok petani sebagai pemilik saham mendapat prioritas?" Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak terdapat dalam konsep DSP.

Jelaslah kiranya bilamana dipergunakan tolok ukur seperti yang sudah dikemukakan terdahulu dalam merekayasa kebijaksanaan investasi, maka kebijaksanaan yang dibutuhkan berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam rancangan akhir DSP 1986. Di bawah ini dikemukakan pemikiran mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan kebijaksanaan investasi.

Beberapa pemikiran pokok kebijaksanaan investasi

Kebijaksanaan investasi dirobah orientasinya dari yang terutama bersifat memberikan pembatasan-pembatasan kepada yang bersifat mendorong dan memberi insentif. Dalam kaitan ini maka diusulkan agar kebijaksanaan "negative list" ditiadakan kecuali bagi bidang-bidang yang benar-benar diyakini langsung menyangkut kepentingan nasional. Produk-produk yang sekarang tergolong kepada kategori IV (tertutup) agar ditinjau kembali dan dinyatakan dicabut dalam waktu secepat mungkin.

Kegiatan investasi akan semakin bergeser ke sektor pertanian

Untuk menggantikan "negative list" diciptakan "positivie list" berisi nama produk dalam rangka perluasan lapangan kerja produktif dan pertumbuhan ekonomi yang efisien yang diberi prioritas untuk dikembangkan dalam periode tertentu. Bagi para pengusaha yang ingin melaksanakan investasi pada produk-produk prioritas ini diberi bantuan dan fasilitas. Bantuan dan fasilitas dapat berupa, umpamanya informasi pasar, informasi teknologi, latihan bagi tenaga kerja, kredit, partisipasi modal Pemerintah, dan lain-lain bentuk bantuan dan fasilitas dibidang investasi yang bukan bersifat "proteksi" tetapi "promosi" atau pengembangan.

"Positive list" disusun setelah mempelajari sebaik-baiknya produk-produk yang ingin dipromosikan, masalah-masalah yang dihadapi dan bantuan dan fasilitas yang wajar diberikan.

Sejalan dengan perlunya diciptakan "positive list" untuk mendorong investasi, maka perlu ditinjau kembali semua peraturan, ketentuan, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menghambat terlaksananya investasi. Khususnya pengarahan-pengarahan yang bersifat terinci dan yang bersifat menggantikan "judgement" pengusaha bersangkutan perlu dihindarkan. Demikian juga keharusan-keharusan yang perlu diikuti oleh pengusaha seperti "harus bersedia menampung produksi ubi kayu dan ubi jalar petani disekitarnya" lebih tepat bilamana ditiadakan dalam bentuk yang negatif.

Semua "keharusan" dan "pengarahan" yang menyangkut investasi perlu ditinjau kembali dan yang dianggap sesuai perlu dirumuskan kembali untuk dimasukkan sebagai bagian dari daftar positif. "Sesuai" diartikan sebagai mendorong perluasan lapangan kerja produktif sebesar mungkin dan pertumbuhan ekonomi yang efisien dalam rangka mencapai titik balik dalam Repelita VI.

Demikian pula kebijaksanaan lain yang menyangkut investasi perlu dikaji ulang baik materi maupun aplikasinya agar sesuai dengan usaha meningkatkan arus investasi. Umpamanya, aplikasi dari kebijaksanaan di bidang perdagangan sebagaimana yang termuat dalam Bab II Pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 1977 yang antara lain berbunyi "Menteri menetapkan bidang usaha perdagangan tertentu yang terbuka bagi perusahaan asing di bidang produksi..." dapat diaplikasikan secara ketat, dapat juga secara longgar. Aplikasi secara longgar akan lebih sesuai dengan usaha menarik investasi asing daripada aplikasi secara ketat.

Menarik dan mendorong investasi ke arah yang diinginkan menghendaki pelayanan dari berbagai instansi Pemerintah yang juga bersifat mendorong, melayani dan membantu. Hal ini membutuhkan penyederhanaan sejauh mungkin, umpamanya, yang menyangkut perizinan; juga reorientasi daripada karyawan-karyawan yang langsung berurusan dengan investasi.

Apa yang dikemukakan dalam makalah ini hanyalah sebagian dari perubahan kebijaksanaan, dan tinjauan ulang yang dibutuhkan dalam rangka reorientasi kebijaksanaan investasi. Adanya "positive list", dan dihilangkannya "negative list" membutuhkan dilaksanakannya kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu di sektor industri, perdagangan, tenaga kerja dan perbankan. Misi dan tugas dari berbagai bagian departemen yang berhubungan dengan investasi perlu dirumuskan kembali. Hal-hal ini belum ditinjau secara memadai. Namun, penting untuk dikemukakan bahwa dalam tinjauan ulang dan reorientasi ini kiranya perlu dihindarkan pengutamaan kemenangan taktis tetapi bersifat mengorbankan sasaran strategis jangka panjang, yaitu memecahkan secara mendasar "masalah besar dan berat yang belum terpecahkan sampai sekarang, ialah masalah lapangan kerja dan masalah tenaga kerja." Pemecahan secara mendasar artinya pergeseran struktur lapangan kerja dan produksi secara konsisten sehingga terlaksana titik balik pada akhir Repelita VI.□

Digitized by Google

GOLONGAN KARYA

Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya
beserta jajarannya

Turut berduka cita yang
sedalam-dalamnya atas
wafatnya :

Bapak Sunardi DM

Semoga arwah
almarhum diterima disisi
Tuhan sesuai amal
ibadahnya.

Digitized by Google

Oleh N. Syamsuddin Ch. Haesy

Filem Indonesia Di Tengah Krisis Sosial Budaya

Fenomena sosial dan kultural yang mencuat belakangan ini dalam bentuk-bentuk aktivitas masyarakat yang memutar kembali jarum jam sejarah peradaban manusia untuk surut ke belakang, agaknya merupakan fenomena menarik yang patut dikaji secara intens oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Terutama kaum cendekiawan, agamawan, dan teknokrat. Munculnya 'Seminar Tuyul', 'Lomba Senyum', 'Lomba Merayu' dan berbagai peristiwa keanehan lagi, adalah tanda-tanda suatu krisis sosial dan budaya telah masuk ke dalam rongga kehidupan kita. Apapun motivasi, pretensi dan semangat penyelenggaraannya. Ada sesuatu arus yang tengah bergerak, melalui suatu proses sublimasi sosial yang tak teraba oleh kasad mata, lalu mencuat sebagai gambaran telah mengepulnya asap kenisbian. Sesuatu yang bukan mustanil, peran perang akan merambati masing-masing pribadi manusia, secara *gethok tular.*

Praduga Prof Dr Sutan Takdir Alisjahbana, Rektor Universitas Nasional beberapa waktu silam menyangkut berlangsungnya krisis sosial dan budaya itu, mulai menjelmakan gejalanya yang kuat. Dewasa ini, bahkan kita melihat, bahwa oleh karena pengaruh logika, tujuan, metoda ilmu dan ekonomi yang sedemikian rupa bergelindan, nilai kebudayaan yang lain, yang mewakili cabang-cabang kebudayaan yang terpenting kehilangan orientasinya, kestabilannya dan integrasinya. Dengan demikian, benar juga apa yang pernah dilontarkan Takdir, dalam berbagai hal kita kehilangan dan kekurangan pengaruh. Malahan, perilaku kultural kita, secara kurang tersadari secara intens, menjadi tonggak-tonggak penghambat kemajuan yang sewajarnya, untuk mencapai suatu masyarakat dan kebudayaan yang lebih luas lingkungan maupun kesetimbangannya.

Fenomena yang muncul dari perilaku sosial dan kultural yang aneh-aneh seperti yang dilakukan sementara kalangan masyarakat kita — antara lain di Semarang, itu —, nampak merupakan wujud dari suatu bentuk perlawanan diam-diam terhadap proses sekularisasi atau penduniaan yang sejalan dengan kemajuan ilmu, ekonomi dan teknologi, yang berkecenderungan membuat hidup manusia bersifat keduniaan, dengan tanda-tandanya berupa sikap dan perilaku hidup yang materialistis, dangkal, malahan — menurut Takdir — sering hanya mencari kesenangan dan ke-

Deddy Soetomo dalam adegan Sunan Kalijaga

Digitized by Google

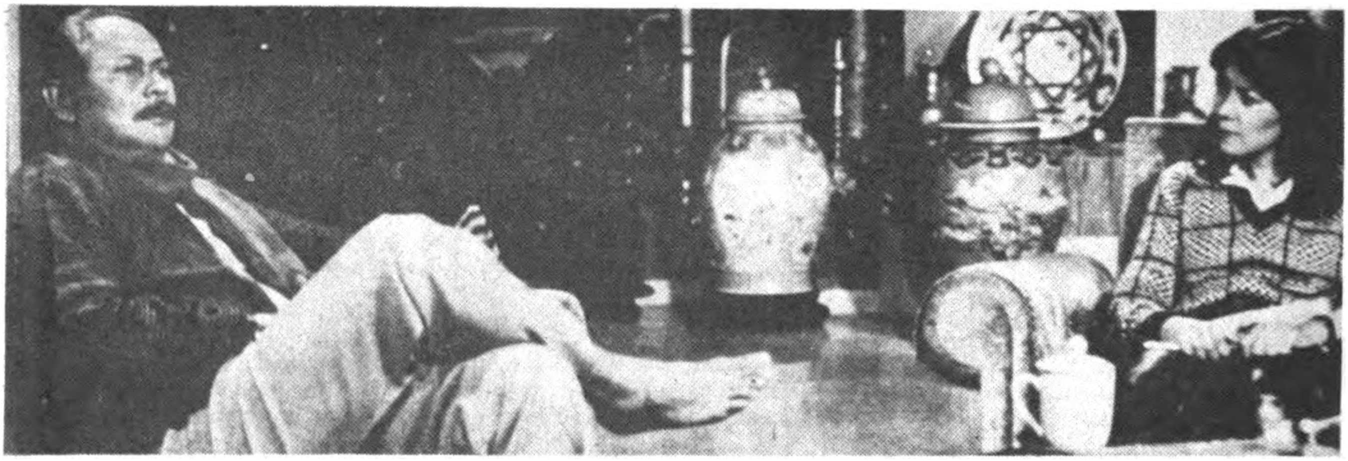

Orang butuh ruang-ruang baru

nikmatan hidup. Ini, barangkali, merupakan akibat langsung dari sangat berkuasanya sikap dan pikiran yang berasio dan pragmatik, yang menggenjot proses penilaian budi manusia yang berdasarkan intuisi dan perasaan. Termasuk menggenjot proses penilaian budi manusia yang berdasarkan imajinasi, seperti proses penilaian agama, kesenian, dan moral. Bahkan, menggenjot solidaritas sosial dan solidaritas kultural, yang pelan-pelan terpelanting karena kekeringan dan kemiskinannya.

Menghadapi fenomena yang sedemikian itu, serta-merta, mencuatlah rencengan pertanyaan yang gencar di setiap hati nurani manusia-manusia yang sadar: benarkah kita sedang berenang dalam dunia yang sungsang?

Posisi Filem

Di tengah kekumuhan hidup yang digelimangi krisis sosial budaya semacam itu, orang butuh ruang-ruang baru, yang setidaknya, mampu menawarkan suatu kesadaran baru, yang tetap menjaga keseimbangan, antara kemeranggasan rasio dan kedalaman akal budi manusia. Mereka mencari wahana paling canggih yang tidak hanya menampilkan kekumuhan dan kejumuhan. Yang mampu memberikan tuntunan-tuntutan baru, yang sekurang-kurangnya mampu memberikan suatu sentuhan kesadaran diri pribadi dan solidaritas sosial mereka yang semakin kering dan miskin itu, karena disodok mekanisme hidup yang bagai mesin dengan segenap rutinitasnya. Tentu saja, yang sejalan dan seimbang, dengan porsi dan tingkat kebutuhannya.

Film, dalam kapasitasnya sebagai produk budaya dan produk teknologi, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai artistika dan aestetika serta punya sentuhan peran diri sebagai sarana komunikasi massa — yang di dalam dirinya mengalir serta peran komunikasi sosial dan komunikasi kultural —, dipandang banyak ahli sebagai wahana yang paling efektif dan efisien untuk berperan sebagai celah perenungan dan penemuan kembali hakekat-hakekat kedalam insani manusia. Untuk menemukan kembali, apa yang oleh *J. Gebser* — seorang humanis yang membicarakan evolusi kesadaran manusia sepanjang sejarah — dikatakan sebagai suatu struktur analitik mental kesadaran budi kita, yang telah tiba kepada batas tenaga ciptanya, yang tengah terancam oleh berdirinya suatu struktur integral yang bertentangan dengan struktur mental, bersifat a perspektivistik. Untuk merangsang kembali kreasi-kreasi kemanusiaan yang menyeluruh dan menyentuh segenap dimensi kedalaman insani.

Bagi kita, Indonesia, postur filem, sudah jelas sosoknya. Sebagai salah satu sarana massa, produk dan perangkat komunikasi. Dengan demikian, maka cukup beralasan, apakala kita berharap hendaknya filem Indonesia dapat berposisi lebih jelas di tengah keterkaitannya dengan keseluruhan sistem dan tata kehidupan masyarakat kita. Baik secara sosiologis, kultural, politis, maupun ekonomis. Posisi yang paling pas, adalah pada titik temu segenap keterkaitannya itu, yang dari posisinya yang sedemi-

Universitas 17 Agustus 1945

JL. TEUKU CIK DITIRO 46 TELP. 335600-343901 JAKARTA PUSAT

1. Fak. ISIP
2. Fak. Ilmu Administrasi
3. Fak. Hukum
4. Fak. Teknik
5. Fak. Farmasi
6. Fak. Ekonomi

MENERIMA MAHASISWA BARU UNTUK TAHUN AJARAN 1987-1988

Tempat pendaftaran di Kampus UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
- Jl. Cik Ditiro No. 46 Jakarta Pusat, Telp. 335600 - 343901
- Jl. Lodan Raya No. 9 Ancol Barat Jakarta Utara, Telp. 671330

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DITANYAKAN PADA BAGIAN PENDAFTARAN

KETUA YAYASAN
ttd
Prof. DR. IR. R. ROOSSENO

REKTOR
ttd
SADJARWO. SH

Digitized by Google

kian itu, maka filem Indonesia, dapat diharapkan tumbuh dan berkembang sebagai pengemban mision secara multifungsi. Ya informatif, ya inovatif, ya edukatif dan sekaligus mencerminkan hakekat nilai dirinya secara kultural. Sehingga akhirnya produk filem Indonesia, berkemampuan menjadi bahagian tak terpisah dari keseluruhan usaha proses pembentukan kualitas manusia Indonesia yang utuh. Dalam artian, berkemampuan secara ekonomis, tanpa harus kehilangan kedalaman insaninya, yang tetap mempunyai denyut kehidupan spiritual dan imani. Sehingga tetap memiliki kecanggihan etis dalam gelinjang kehidupannya.

Langkah Strategis

Banyak hal dapat ditempuh dan dilakukan untuk menjadikan produk filem nasional kita, sebagai suatu produk budaya dan teknologi yang mampu menyerap kebutuhan hidup manusia terhadap nilai-nilai yang berkeseimbangan dan manusiawi. Suatu produk budaya yang kultural edukatif. Namun, langkah strategis yang paling tepat untuk dilakukan di tengah alternatif-alternatif itu adalah membebani kesadaran sosial dan kesadaran kultural segenap insan perfileman Indonesia — tak terkecuali producer dan kritikus filem — untuk menempatkan filem tidak hanya dari sisi tematis dan sinematografisnya semata, seperti tidak menempatkannya hanya dari sisi ekonomis politis semata. Melainkan harus secara keseluruhan. Ini mengandung makna, bahwa segenap pihak yang terlibat dalam proses penciptaan suatu produk/karya filem Indonesia, harus sudah terlebih dahulu memiliki kesamaan sikap, langkah dan pandangan, untuk mendayagunakan serta menghasilgunakan filem, utuh sebagai pangan ruhani masyarakat.

Melalui karya-karya filem Indonesia yang sedemikian itulah kita berharap, dapat diperkembangkan dan dikembangkan secara sadar upaya-upaya konkret kita untuk selalu memberikan daya kepada khalayak, untuk tidak kehilangan gravitasi sosial dan kulturalnya, justeru di tengah zaman yang sedang berubah dan melahirkan ekses peradaban berupa krisis sosial budaya itu. Kesadaran serentak segenap kita yang berkaitan langsung dengan proses kreatif pengkaryaan produk-produk filem nasional kita itulah pada akhirnya yang akan menentukan, mampu atau tidaknya filem Indonesia berperanan sesuai dengan porsi dan proporsinya sebagai telah diisyaratkan secara tersirat dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/'83 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selain kesadaran itu pula yang kelak akan menilai, sejauhmana kedewasaan masyarakat dan insan filem Indonesia dalam memandang fungsi eksistensi dirinya sebagai bahagian tak terpisahkan dari keseluruhan sistem dan tata kehidupan masyarakat.

Untuk itu pula, agaknya, perlu senantiasa difikirkan upaya-upaya lebih jelas dan konkret untuk memberikan suatu kondisi afektif dan efektif dalam pembinaan dan pengembangan perfileman nasional. Terutama dalam kerangka mewujudkan semangat profesionalisme, yang memungkinkan tumbuhnya kembali idealisme keprofesian di kalangan insan perfileman nasional kita. Untuk itu, jelas, pemerintah perlu membuka ruang lebih gres bagi tumbuhnya kemerdekaan kreatif yang lebih memungkinkan tumbuhnya kesadaran dan tanggungjawab sosial serta kultural insan-insan perfileman kita. Karena seringkali, idelaisme keprofesian, justeru mandeg akibat tersendatnya kemerdekaan kreatif yang bertanggungjawab itu. Mari! □

Bank Bumi Daya

Tempat dana berputar terus

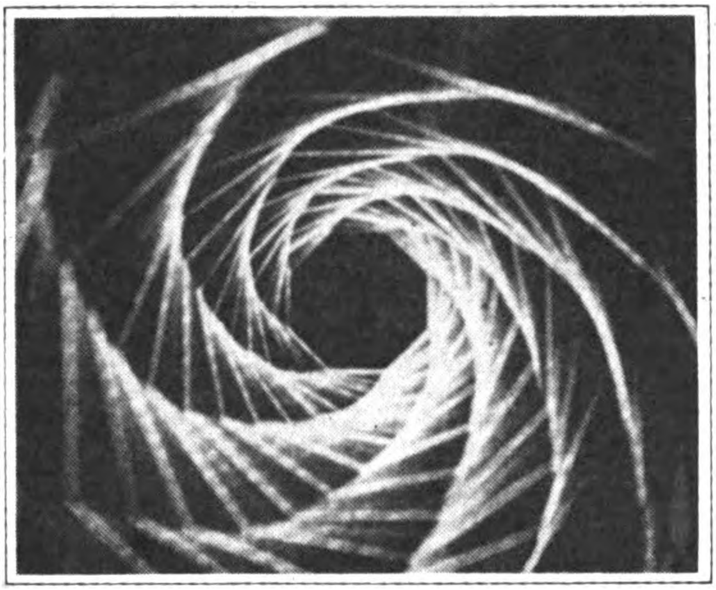

Deposito berjangka dengan bunga sebagai berikut :

A. DEPOSITO BERJANGKA

Jangka Waktu		Suku Bunga pertahun
1 (satu)	bulan	13.00%
2 (dua)	bulan	13.25%
3 (tiga)	bulan	14.00%
6 (enam)	bulan	14.50%
12 (dua belas) bulan		15.00%
24 (dua puluh empat) bulan		14.00%

Sertifikat dengan diskonto sebagai berikut :

B. SERTIFIKAT BANK BUMI DAYA

Jangka Waktu	Suku Bunga Per Tahun	
	Dibayar dimuka diskonto	Dibayar Saat Jatuh Tempo
1 (satu) bulan	12.90%	13:00%
2 (dua) bulan	13.00%	13.30%
3 (tiga) bulan	13.50%	14.20%
6 (enam) bulan	13.50%	15.00%
12 (dua belas) bulan	13.00%	16.10%
24 (dua puluh empat) bulan	11.50%	17.40%

- Tingkat bunga se-waktu-waktu dapat berubah menurut keadaan pasar.
- Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Kantor Pusat Bank Bumi Daya dengan nomor telepon: 334508 - 330305 - 331893 - 332045 atau melalui cabang-cabang Bank Bumi Daya.

Bank Bumi Daya
Kantor Pusat
Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat
Telp. 333721 (60 saluran)
Telex Kantor Pusat 61676. 61400 61886. 61277 61365 BDPST IA
Telex Urusan Luar Negeri 61117. 61765. 61886. 61760. 61386. 61297. 61421. 61122 61423 61624. 61425 BDULN IA 61881 61759 BDFX IA

Marcon

Selamat Idul Fitri

1 Syawal 1407 H

Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Semoga Tuhan YME memberkahi Kita semua

Redaksi & Staff Majalah Media Karya

Digitized by Google

Maria Sugiharto

FABLE

Bila kita mendongeng kepada anak-anak mengenai binatang seperti *Kancil Mencuri Timun. Burung Gagak dan Serigala, Kelinci dan Harimau,* dan masih banyak lainnya lagi, maka cerita-cerita demikian disebut *Fable,* atau dongeng mengenai binatang. Di dalam cerita-cerita mengenai binatang itu, selalu terselip moral bagi kehidupan. Akhir dari dongeng itu selalu bersifat *crime does not pay* atau kejahatan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Juga diperlihatkan moral bahwa yang kuat secara fisik tidak harus selalu menang, karena yang lemah pun selalu dapat mencari akal untuk mempertahankan eksistensinya. Contohnya Kancil, si kecil tetapi yang selalu banyak akal, sehingga harimau yang sang rajapun bisa terkecoh.

Kapan Asal-usul Fabel

Kebiasaan secara umum untuk mempersonifikasikan binatang di dalam kehidupan manusia, telah terjadi lama sebelum sejarah manusia dibentuk, ialah pada jaman pra sejarah. Kebudayaan yang belum tertulis, banyak dituangkan di dalam pengertian-pengertian simbul binatang, yang menggambarkan moral tertentu. Satu binatang membohongi binatang yang lain, dan beberapa saling menipu. Tetapi, karena unsur binatang tidak selalu menempati secara dominan di dalam fabel, banyak teori mengatakan bahwa dongeng-dongeng semacam itu adalah merupakan cerita kepahlawanan binatang serta merupakan cerita-cerita atau dongeng yang canggih sebagai penonjolan karakter seperti yang terdapat di dalam kumpulan dongeng Sansekerta *Panchatantra.*

Ada juga teori yang mengatakan bahwa asal-usul fabel dimulai dari dongeng-dongeng rakyat dari tingkatan bawah yang di dalam mengutarakan kritik-kritik terhadap masyarakat atau pimpinan kelompok tidak berani berterus terang, tetapi mempergunakan bahasa cerita binatang.

Fabel dikatakan berasal dari negeri Timur Tengah, yang berkembang sesuai dengan berkembangnya kebudayaan *Sumeria dan Babylonia.* Ada contoh fabel yang berdasarkan cerita Injil, seperti misalnya cerita tentang seorang yang kaya raya yang mencuri anak kambing milik seorang yang miskin. Hal ini diungkapkan oleh *Nabi Nathan* kepada *Nabi Daud,* kepada siapa dia ingin memarahi karena Daud telah mencuri isteri Huriah.

Sebuah fabel yang berasal dari jaman kuno yang ditulis oleh Hesiod ialah dongeng mengenai burung elang yang memarahi burung nightingale yang berani

membantah kepada atasannya.

Fabel-fabel kuno yang terkenal ditulis oleh *Aesop,* fabel-fabel itu kebanyakan merupakan cetusan hati dari pengarangnya. Fabel sebenarnya adalah suatu cabang dari *retorika* klasik (kepandaian berbicara atau berpidato). Fabel yang bersifat puitis telah ditulis oleh sastrawan Perancis terkenal yang hidup pada jaman Raja Lodewijk XIV, *Jean De La Fontaine.*

Fabel dari AESOP

Penulis fabel tertua ini hidup kira-kira lima abad sebelum Masehi. Apakah nama Aesop benar-benar ada atau hanya ciptaan saja, sejarah membuktikan bahwa Aesop merupakan orang yang dekat dengan cerita-cerita rakyat jaman prasejarah, cerita-cerita mana mengandung kebijaksanaan. Tidak ada data yang jelas tentang penulis dongeng-dongeng itu pada jaman prasejarah, kecuali beberapa yang ditulis oleh *Hemetrius Phalreus* menjelang 300 tahun SM.

Contoh-contoh fabel yang klassik berupa cerita-cerita yang terjalin di dalam bait-bait puisi yang ditulis oleh Phaedrus, yang merupakan penghalusan fabel milik Aesop. Salah satu di antaranya adalah seperti dibawah ini:

Dua Orang dan Beruang

Pada suatu hari, dua orang sejawat sedang berjalan bersama melalui hutan, ketika tiba-tiba seekor beruang menyergapnya. Salah seorang yang berada di depan langsung bergayut pada pohon dan bersembunyi di antara daun-daunan pada pohon itu. Sedang temannya, karena tidak melihat kemungkinan adanya pertolongan, bertiarap ketanah dengan menelungkupkan wajahnya pada tanah. Beruang, mendekatinya seraya mengenduskan moncongnya dekat sekali dengan teliganya, dan mengendus serta mengendus. Tetapi akhirnya dengan lolongannya dia menggelengkan kepalanya serta membalik dan menghindar, karena seperti diketahui beruang tidak akan menyentuh daging mati. Kemudian seorang yang bergayut pada pohon turun menemui temannya, tertawa-tawa seraya bertanya: Apa yang dibisikkan oleh raksasa itu?

"Dia katakan kepadaku", kata yang satunya, "Jangan Sekali-kali Percaya Kepada Teman Yang Meninggalkanmu Pada Waktu Kau Menghadapi Bahaya".

Dari sini bisa dibaca moral dari dongeng atau fabel yang sudah berumur ratusan tahun itu. Setiap dongeng akan berakhir dengan moral yang eksplisit. Karena pada jaman Yunani atau Romawi tidak ada yang mengadakan semacam kondifikasi tentang fabel ini untuk dijadikan semacam budaya atau nyanyian rakyat, maka fabel yang sifatnya *Aesopis* (menurut gaya Aesop) menjadi suatu cara untuk pendidikan serta memiliki tujuan-tujuan yang retorik.

Fabel dimaksudkan untuk memberikan pandangan kepada kelakukan manusia, moral yang terkandung di dalamnya mula-mula bersifat implisit (mutlak). Fabel-fabel ciptaan Phaedrus banyak mengandung satire-satire sosial dan politis dalam dongeng-dongeng yang naif serta syair-syair yang santai, tidak sangat terikat dan bebas.

Jean de La Fontaine

Bisa dikatakan bahwa La Fontaine adalah bapaknya fabel. Dialah yang tercatat di dalam sejarah sebagai sastrawan penulis fabel, karena fabel-fabel itu dirupakan di dalam syair-syair yang indah.

Dilahirkan di Chateau Thierry, Perancis pada 8 Juli 1621 dan meninggal di Paris 1695. Dia hidup pada jaman sebelum Revolusi Perancis, ialah pada periode Raja Louis XIV, seorang Raja yang absolut menamakan dirinya Le Roi Saleil atau raja matahari. Dia yang mula-mula bercita-cita menjadi seorang pastur, dikemudian harus mengurungkan maksudnya. Dalam perkawinan pertamanya dengan Marie Hericart, dia kurang bahagia, dan sang isteri dengan lembut mengusulkan bahwa sebaiknya mereka itu berpisah saja demi kebaikan

Digitized by Google

une separation des biens.

La Fontaine berhasil mengangkat dirinya menjadi penyair istana, karena gurunya yang telah menjadi penyair istana, meninggal.

Sebagai seniman, sastrawan dan penulis syair yang bersifat fabel, dia telah sangat berhasil. Ini adalah merupakan kerja yang paling sedikit memakan waktu selama duapuluh tahun. Dari enam bukunya yang diterbitkan, ada kira-kira 124 fabel yang dibuatnya. Meskipun ada beberapa fabel yang merupakan terjemahan dari fabelnya Aesop, tetapi dia ini bukannya menyontek. Dia menciptakan, karena Aesop yang hidup ratusan tahun sebelum Masehi, pasti karya-karyanya tidak akan sedemikian jelas, bila tidak ada seseorang yang menciptakan kembali seperti La Fontaine.

Di bawah ini contoh fabel tulisan La Fontaine di dalam bentuk syair, judulnya *LE LOUP ET L'AGNEAU — Serigala dan Domba*. Begini, kira-kira terjemahannya:

Alasan yang paling kuat, selalu merupakan keputusan yang terbaik (hampir sama dengan Machiavelisme, ialah menghalalkan cara untuk sesuatu tujuan)

Akan kami tunjukkan sejenak lagi
Seekor domba sedang melampiaskan hausnya
Dalam arus air yang bening
Seekor serigala yang kelaparan sedang mencapai stori
Dan kelaparan ini membuat sang domba sangat menarik
"Betapa kau berani membuat kesulitan di

Jean
de La Fontaine

tempat minumku?"
Demikian sang serigala berkata :
"Kau akan mendapatkan hukuman karena kebandelanmu"
"Tuanku," jawab sang domba, "Yang Mulia,"
Janganlah tuanku gusar, bila tuanku lihat aku minum dalam kali ini, yang memiliki jarak lebih dari duapuluh langkah dari tuanku tempat tuanku berdiri.
Dengan demikian dengan cara apapun hamba tidak mengganggu tempat minum tuanku
"Kaulah selalu pengganggguku," kata sang binatang buas
"Dan aku tahu, kau memberikan buruk tentang diriku tahun lalu"

Bagaimana hamba berbuat demikian, bila tahun lalu hamba belum dilahirkan, jawab domba berani... hamba masih menetek ibuku
"Bila bukan kau, kakakmulah yang menjadi mangsaku
Aku tidak perduli lagi — itu dalah urusanmu sendiri"
Karena bagi Anda, hamba hanyalah sekedar mahluk yang kecil
Anda, gembala-gembala dan penjaga-penjaga anda
Orang mengatakan kepadaku: harus bisa membalas dendam, jawab domba.
Disana, di dalam hutan belantara
Serigala menyeretnya, dan kemudian memakannya,
Tanpa proses....

Itu adalah cuplikan salah satu syair fabel Jean De La Fontaine, yang di dalam terjemahan bebasnya tidak sulit untuk dicerna. Syair-syair fabel itu berkembang dan tumbuh karena pada waktu itu situasi masyarakat rakyat yang tertekan oleh monarki yang absolut. Dan, fabel-fabel demikian berbicara atas nama keinginan masyarakat.

Jean de La Fontaine sesungguhnya akan diangkat menjadi anggota *Akademi Perancis (Academic Francais)*, sebuah simbul tertinggi bagi setiap seniman yang mendapatkan penghargaan secara resmi. Tetapi, hal itu ditentang oleh sang Raja, Louis XIV, karena sang Raja merasa tersinggung atas syair-syair ciptaan La Fontaine. ☐ Maria Sugiharto

Digitized by Google

Tanpa penjiwaan akan seni mungkinkah ia membuat suatu adi karya?

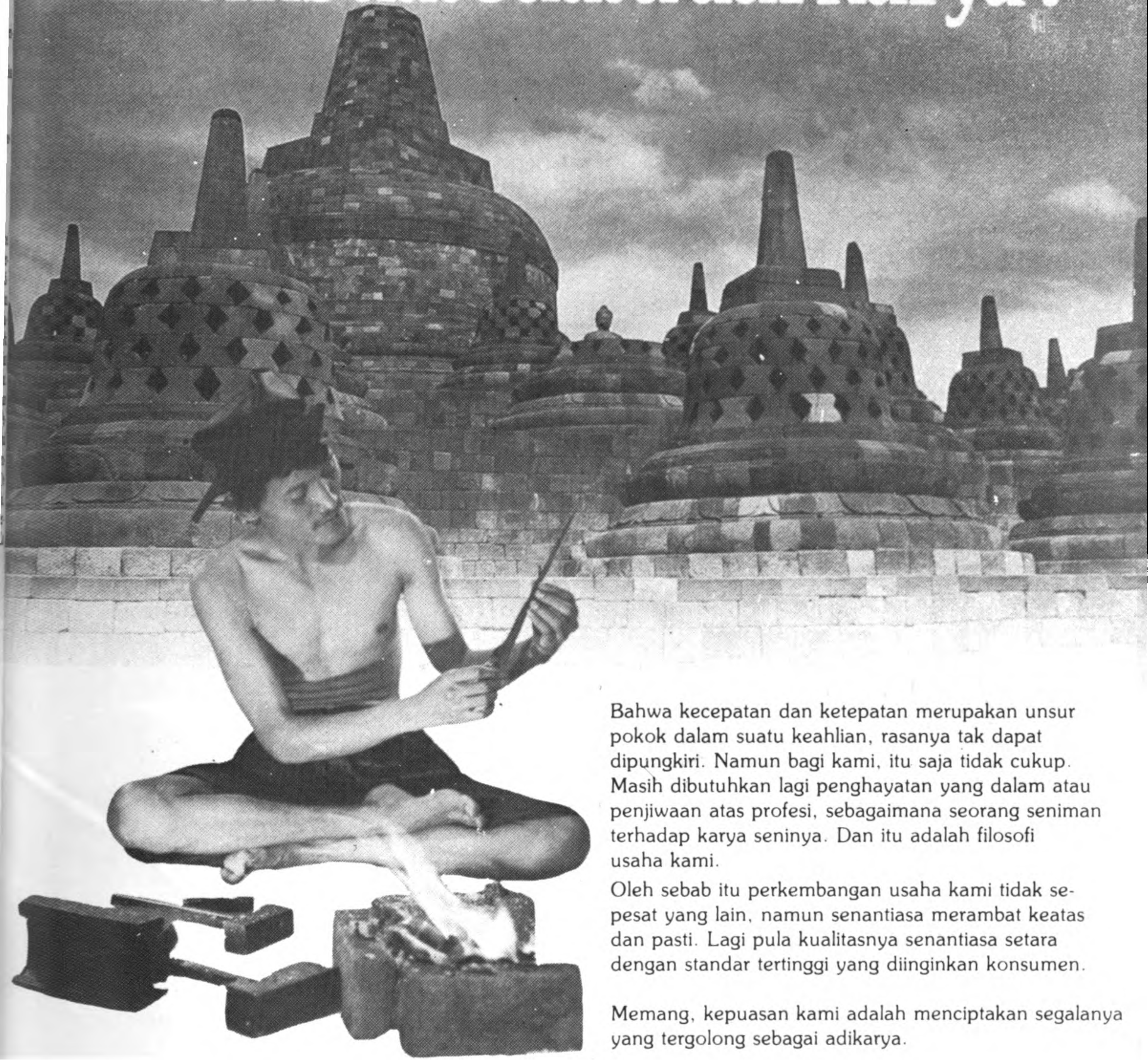

Bahwa kecepatan dan ketepatan merupakan unsur pokok dalam suatu keahlian, rasanya tak dapat dipungkiri. Namun bagi kami, itu saja tidak cukup. Masih dibutuhkan lagi penghayatan yang dalam atau penjiwaan atas profesi, sebagaimana seorang seniman terhadap karya seninya. Dan itu adalah filosofi usaha kami.

Oleh sebab itu perkembangan usaha kami tidak sepesat yang lain, namun senantiasa merambat keatas dan pasti. Lagi pula kualitasnya senantiasa setara dengan standar tertinggi yang diinginkan konsumen.

Memang, kepuasan kami adalah menciptakan segalanya yang tergolong sebagai adikarya.

Bakrie & Brothers

Berkarya nyata dalam pembangunan.

Digitized by Google

YAYASAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA
UNIVERSITAS EKASAKTI (UNES)
AKADEMI AKUNTANSI INDONESIA (AAI)
JALAN VETERAN DALAM NO. 26 B. TELEPON : 26770 – 28859 – 27565. PADANG

KAMPUS : UNIVERSITAS EKASAKTI AKADEMI AKUNTANSI INDONESIA

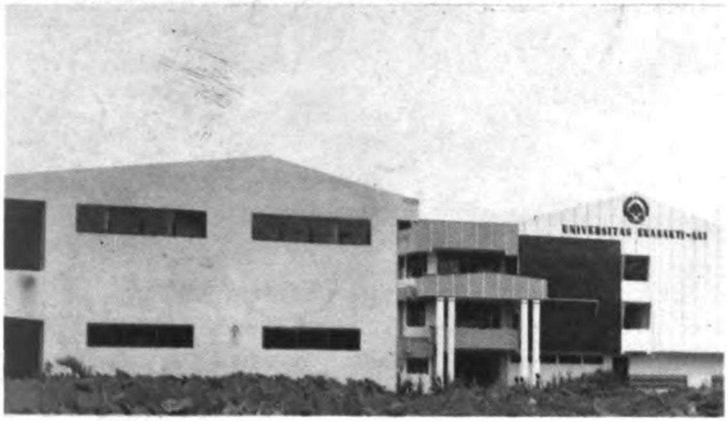

KAMPUS : UNIVERSITAS EKASAKTI AKADEMI AKUNTANSI INDONESIA

KEBERHASILAN PEMILU 1987
ADALAH WUJUD TUNTUTAN RAKYAT
TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG BERKESINAMBUNGAN
BERLANDASKAN PANCASILA DAN
UNDANG - UNDANG DASAR 1945

KELUARGA BESAR UNIVERSITAS
EKASAKTI - AAI PADANG BERTEKAD
UNTUK IKUT MENSUKSESKAN
PROGRAM PEMERINTAH ORDE BARU
DENGAN SEMANGAT PERSATUAN
DAN KESATUAN BANGSA

mengucapkan

Selamat

Idul Fitri

1 Syawal 1407 H

Mohon maaf lahir bathin

PADANG, M E I 1987
REKTOR UNIVERSITAS EKASAKTI PADANG

ttd

Drs. H. Andi Mustari Pide SH.

Digitized by Google

MEDIAKARYA
PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

PETA POLITIK SETELAH PEMILU 1987

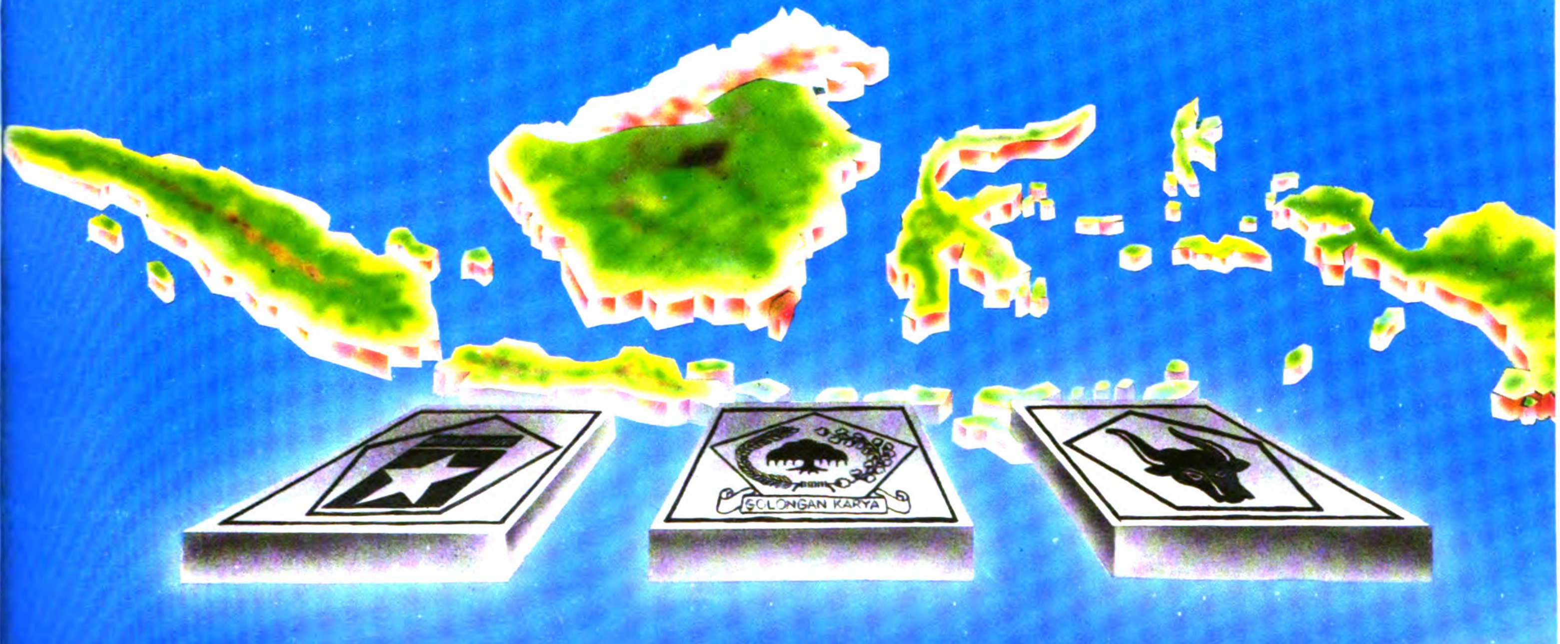

ISSN 0216 — 2571
Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

KELAPA GADING PERMAI
Semakin Lengkap Semakin Elite

Kelapa Gading Permai, kini berkembang pesat menjadi kawasan permukiman elite, dengan fasilitas pendukung paling lengkap di wilayah Jakarta Utara-Timur. Sekolah, pasar Mandiri, supermarket, pertokoan, dan sedang dibangun Kelapa Gading Plaza. **Sarana olahraga:** kolam renang, lapangan tenis-bulutangkis-squash, fitness centre. **Sarana rekreasi:** Taman Hiburan Mandiri, dengan Istana Hiburan Mustika & air mancur musik, Taman Rekreasi Khayangan, kolam pancing, Restoran Gading Kuring, Pasar Burung-Ikan-Tanaman hias. **Sarana lainnya:** Klinik Medikarya yang buka 24 jam, 5 apotek, unit pemadam kebakaran, kantor pos, penjagaan keamanan lingkungan 24 jam. **Fasilitas kredit** PT Papan Sejahtera sampai 15 tahun. Citibank 2-8 tahun.

PT. SUMMARECON AGUNG

Jl. Perintis Kemerdekaan 42 Jakarta Timur. Tel. 4892107 (5 saluran)
Kantor Pemasaran Proyek
Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok TN 2 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara

Digitized by Google

INDEKS

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/
Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.

Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Ariono Poernomo.
Subandrio.
Djonharro.
Rum Aly.
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noerijathy.
Robert Puang Sunur.
Issidarto BA.
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO.: 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981.
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI

Menuju Format Baru?

FOKUS

Peranan diplomasi perjuangan dalam sejarah Republik Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja

LAPORAN UTAMA

Menuju format baru? Peta politik setelah Pemilu 1987; Transformasi persepsi; Pikiran Orang Partai; Fenomena 1987: Antara Orpol dan Ormas.

NASIONAL

Pola pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan oleh Emil Salim; Menuju pembangunan berwawasan lingkungan; Menata Jakarta yang longgar; dan sejumlah peristiwa nasional lainnya.

ORGANISASI

Konsolidasi kemenangan; Kemenangan Pemilu 1987 bukti rakyat makin percaya kepada Golkar; Kehormatan pertama buat NTB; Tantangan Golkar, meningkatkan Kesejahteraan rakyat; dan sejumlah peristiwa organisasi lainnya.

KOMENTAR

Perguruan tinggi; Kurang proporsional; Polisi.

SPEKTRUM

Diperlukan konsep penerapan Pancasila di bidang tenaga kerja.

SENI & BUDAYA

Mencari identitas melalui karya seni lukis; Wayang, epik dan tokoh-tokoh penting.

— Disain cover FINIKA/HY Sudarsono —
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

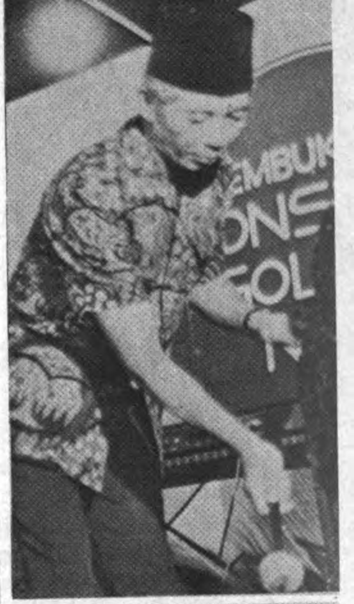

Akbar Tandjung

Digitized by Google

Menuju Format Baru?

Pemilihan Umum 23 April 1987 sudah terselenggara. Pada hari-hari pertama setelah pemilihan umum itu cukup banyak komentar dilontarkan — termasuk yang mengandung kritik dan ketidakpuasan subjektif. Tapi kini, dengan makin berlalunya waktu, emosi pun tampaknya telah cukup mengendap. Pernyataan-pernyataan dan pemikiran positif sudah lebih mendapat tempat. Beberapa di antara lontaran pernyataan dan pemikiran berkategori seperti itu, dapat kita ikuti dalam kolom laporan utama media ini. Baik dari sejumlah pengamat maupun praktisi dari organisasi politik peserta pemilihan umum.

Percaya bahwa pernyataan-pernyataan post pemilu itu tulus, terjanjikan suatu esensi penuh harapan tentang format baru dalam kehidupan politik di masa mendatang. Jika tidak dapat dikatakan sebagai format yang baru sama sekali, setidak-tidaknya — meminjam ucapan Dr Alfian — mempermantap format baru yang telah terbentuk sejak beberapa waktu ini.

Namun terlepas dari sekedar pernyataan-pernyataan, hasil pemilihan umum itu sendiri secara kuat memberikan resultante berupa kondisi objektif bagi format politik baru dan atau pemantapannya. Dan faktor terpenting yang besar dan bermakna strategis dalam hubungan ini adalah diraihnya 73% suara oleh Golkar, organisasi politik yang dalam kurun waktu Orde Baru ini menjadi tulang punggung pembaharuan dan pembangunan. Faktor tambahan lainnya yang tak boleh diabaikan, disatu pihak tentu adalah perbaikan perolehan suara oleh organisasi politik ranking ketiga dalam urutan peroleh suara 4 pemilu Orde Baru. Dan pada pihak lain, penurunan perolehan suara — tanpa merubah ranking — dari organisasi politik yang kurang mampu mengapresiasi dan mengoperasionalkan sikap keterbukaan organisasi politik yang menjadi tuntutan keadaan di tengah masyarakat sebagaimana juga merupakan tuntutan dalam undang-undang politik yang ada.

Perolehan suara 73% oleh Golkar untuk tingkat sekarang ini adalah pas dan menguntungkan bagi proses pembangunan politik yang ada. Mayoritas kerja yang akan dimiliki karenanya dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat akan mempunyai korelasi dengan mantapnya stabilitas untuk kurun waktu mendatang ini. Kemenangan Golkar akan terbukti merupakan sumbangan demi stabilitas nasional, khususnya stabilitas di bidang politik. Angka prosentasi yang 73 juga masih cukup jauh dari angka 100, setidaknya akan meredam kekuatiran yang berlebih-lebihan yang ditunjukkan beberapa pihak di masa pra pemilu. Maka dapat diharapkan ketenangan psikologis bagi mereka yang cemas akan suatu kemungkinan kehidupan politik yang monolitik.

Pada sisi lain, sikap keterbukaan dan tradisi menumbuhkan suasana demokratis dalam tubuhnya — sebagai hasil dari kemantapan konsolidasi idiil, wawasan dan organisasi yang dicapai melalui kerja keras — membuat Golkar akan tetap menjadi penyumbang bagi pemeliharaan dinamika dalam kehidupan politik. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen. Sekurang-kurangnya antara kurun waktu 1987 dan 1992.

Dalam posisinya yang idealistik sebagai konsekuensi dari cita-cita pembaharuan yang dinyatakannya sejak awal, Golkar post pemilu 1987 dihadapkan kepada tugas-tugas untuk mencernakan dimensi-dimensi baru dalam dinamika yang ditampilkan masyarakat belakangan ini sebagai response terhadap pemantapan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Salah satu response dinamis yang ditunjukkan adalah makin ditinggalkannya pola kesetiaan sempit atau primordialisme dan menggantikannya dengan pola kesetiaan berdasarkan keyakinan yang rasional.

Meminjam pengutaraan salah seorang pengamat dalam laporan utama edisi ini, dalam kaitan tersebut di atas, ke masa depan persoalan yang antara lain perlu diperhatikan adalah bagaimana lebih memperbaiki perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam budaya politik perlu dikembangkan etika dan moral politik yang berupa sesuainya kata dan perbuatan, pengurangan hal-hal yang tidak berkenan di hati rakyat dan sekaligus mengembangkan suasana baru yang lebih memungkinkan rasa kebersamaan. Suara dari tengah masyarakat yang meminta perlunya keadilan ditegakkan dalam berbagai hal, bagaimanapun harus diperhatikan dengan mengenyampingkan sikap aprioristis. Kecemasan yang bagaimanapun kecilnya yang ada di masyarakat tentang masa depan kehidupan ekonomi dan pemerataan yang terkait dengannya tak boleh tidak harus diberikan jawaban dengan cara-cara yang masuk akal.

Tuntutan baru lainnya yang objektif adalah kejelasan fungsi dan pemahaman fungsi itu oleh setiap kekuatan politik, termasuk Abri. Tanpa kejelasan dan pemahaman fungsi itu, pola peranan pun menjadi tidak jelas. Kedalam diri kekuatan politik itu masing-masing dengan sendirinya dituntut kemampuan melakukan manajemen politik dan manajemen organisasi — seperti yang telah mulai dilakukan Golkar beberapa waktu belakangan ini. Pasti tidaklah memadai untuk kepentingan pembangunan politik lebih lanjut bila hanya Golkar yang melakukan konsolidasi diri. Tapi membaca beberapa pernyataan beberapa tokoh partai politik sesudah pemilu, agaknya telah timbul kesadaran baru yang positif berdasarkan dorongan hasil pemilihan umum, untuk tidak sekedar menonton dan mengomentari gerak konsolidasi Golkar, tetapi melakukannya sendiri secara nyata untuk dirinya masing-masing.... *

Digitized by Google

Oleh : Mochtar Kusumaatmadja

Peranan Diplomasi Perjuangan Dalam Sejarah Republik Indonesia

Dengan digunakannya istilah "Diplomasi Kebudayaan" akhir-akhir ini, sudah pantas apabila timbul pertanyaan apa jadinya atau nasib daripada diplomasi perjuangan yang telah mengantar bangsa dan negara kita pada tempatnya yang sekarang di tengah-tengah masyarakat bangsa di dunia ini. Jawaban yang tegas adalah "Diplomasi Perjuangan" Indonesia masih tetap ada dan dilakukan dengan bersemangat dan gigih hingga sekarang.

Apa yang oleh khalayak ramai secara populer disebut diplomasi kebudayaan sebenarnya hanyalah merupakan suatu tahap perkembangan baru dalam sejarah diplomasi kita dengan mencoba untuk menambah suatu dimensi baru pada cara kita melakukan diplomasi dengan mempergunakan kekayaan perbendaharaan seni budaya kita sebagai sarana untuk melakukan diplomasi dalam arti seluas-luasnya.

Mulai dikembangkannya dimensi kebudayaan dalam diplomasi kita sekali-kali tidak mengurangi sifat dan gerak yang dinamis daripada diplomasi Indonesia yang terkandung dalam istilah diplomasi perjuangan. Yang berobah adalah situasi dan medan tempat diplomasi itu dilaksanakan serta sasaran yang hendak kita capai dengan jarak baru dalam kita menjalankan diplomasi ini. Tetapi marilah kita kembali kepada tema "Diplomasi Perjuangan" dengan mengingat kembali pengalaman sejarah kita.

Diplomasi Perjuangan sebenarnya mulai dengan didirikannya Departemen Luar Negeri sebagai alat negara Republik Indonesia yang baru lahir untuk melakukan tugas diplomasi. Departemen Luar Negeri lahir 2 hari setelah proklamasi pada tanggal 19 Agustus 1945 dan Menteri Luar Negeri pertama waktu itu, Alm. Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo mulai melakukan tugasnya di tempat kediamannya di Jl. Cikini Raya No. 80 dengan dibantu oleh 3 orang yaitu 2 orang wanita (1) Ny. Herawati Diah dan Ny. Paramita (Jo) Abdurachman dan seorang laki-laki, Saudara Soejoso.

Berlainan dengan Departemen-Departemen lain yang kebanyakan sudah ada pendahulunya di zaman Hindia Belanda, Departemen Luar Negeri harus mulai dari nol, tanpa gedung, tanpa anggaran dan tanpa pegawai yang berpengalaman sebelumnya, sekalipun di masa penjajahan Hindia Belanda. Apa namanya ini kalau bukan "Perjuangan"?

Dari semula sasaran diplomasi Indonesia adalah untuk menarik perhatian, simpati dan dukungan internasional untuk perjuangan republik yang baru lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan perkataan lain pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang waktu itu, yang karena pendidikan atau pergaulannya mengenal realita pergaulan masyarakat internasional menetapkan jenis diplomasi yang bertujuan *menginternasionalisasikan masalah Indonesia.* Sebaliknya pihak Belanda sebagai bekas penjajah ingin menggambarkan apa yang terjadi di Indonesia itu sebagai suatu peristiwa dalam negeri setelah mereka berusaha meyakinkan pemimpin-pemimpin dunia, terutama sekutu-sekutunya yang berkumpul di San Francisco untuk menandatangani Piagam PBB tahun 1945 bahwa rakyat Indonesia masih setia kepada mereka.

Dengan demikian tugas perjuangan diplomasi sangat berat karena secara kongkrit tujuan internasionalisasi itu sebagai langkah pertama harus diwujudkan dalam

Diplomat Indonesia di PBB 1947

Digitized by Google

Kekuatan diplomasi dan perundingan

bentuk pengakuan "de facto" atau "de jure" sebagai perwujudan kongkrit diakuinya Republik Indonesia sebagai kenyataan politik internasional. Dalam usaha mencapai tujuan di atas, pemimpin-pemimpin nasional kita harus pandai-pandai memakai 3 kenyataan kekuatan politik sebagai sarana yaitu: (1) dukungan rakyat Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan; (2) kemampuan didirikanlah Komite Nasional Indonesia baik di pusat maupun di daerah yang merupakan penyaluran aspirasi politik rakyat.

Kiranya jelas bahwa dari hari-hari pertama lahirnya Republik Indonesia sudah terjalin kerjasama yang erat antara Departemen Luar Negeri sebagai alat diplomasi Republik Indonesia dan Angkatan Bersenjata.

Adapun contoh-contoh diplomasi dalam tahap perjuangan yang mencerminkan pemikiran yang diuraikan di atas adalah antara lain (1) program pemulangan bekas tawanan perang dan intermiran sekutu (RAPWI). Dipercayakannya tugas ini oleh Komandan Tentara Inggris, Christison kepada pihak Republik Indonesia merupakan kemenangan diplomasi yang pertama yang perlu dicatat. Untuk melakukan tugas ini Tentara Keamanan Rakyat dibantu oleh Departemen Luar Negeri membentuk satuan khusus yang dinamakan POPDA.

Tindakan kedua di bidang diplomasi yang kemudian ternyata banyak juga hasilnya bagi pejuangan pengakuan internasional adalah Perjanjian Penjualan Beras kepada India sebanyak 500.000 ton di tahun 1947. Tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang sangat berani untuk menjual beras kepada India yang sedang diancam bahaya kelaparan, mendapat sambutan yang sangat baik di India dan menimbulkan simpati yang besar bagi perjuangan bangsa Indonesia.

Perlu juga dicatat perjalanan ke negara-negara anggauta Liga Arab oleh suatu delegasi yang dipimpin oleh Menteri Muda Luar Negeri pada waktu itu, Haji Agus Salim yang menghasilkan Perjanjian Persahabatan pertama dan pengakuan nyata yang pertama oleh suatu negara Arab dalam bentuk Perjanjian Indonesia—Mesir yang ditandatangai pada tanggal 10-11 Juni 1946. Pengakuan Mesir ini diikuti oleh negara-negara anggauta Liga Arab lainnya. Dukungan negara Arab yang diberikan selagi Republik Indonesia muda masih memperjuangkan hak eksistensinya sebagai negara merdeka melawan Belanda yang berkeras mengembalikan kekuasannya sebagai penjajah merupakan dukungan politik yang tidak kecil artinya masa itu.

Republik yang muda masa itu sedang mengalami keadaan politik dalam negeri yang sulit karena tentangan yang cukup kuat terhadap Perjanjian Linggarjati yang baru ditandatangani dengan Belanda yang masih harus mendapat pengesahan dari KNI Pusat sebagai badan perwakilan rakyat sementara di masa perjuangan. Ada sebagian kekuatan politik yang kurang menyetujui perundingan dengan Belanda itu dan menganjurkan suatu garis yang lebih radikal. Sebaliknya ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati mengakibatkan Inggris dan Amerika Serikat memberikan pengakuan "de facto" kepada Republik Indonesia proklamasi 17 Agustus 1945, suatu kejadian yang cukup penting dalam sejarah, apalagi mengingat apa yang terjadi kemudian. Bulan Juli tahun 1947 Belanda melancarkan agresi militer I dengan tujuan memaksakan interpretasi mereka mengenai Perjanjian Linggarjati. Agresi ini dikutuk oleh kawan-kawan Indonesia antara lain India dan Australia yang mengajukan suatu resolusi di Dewan Keamanan PBB agar kedua belah pihak melakukan gencatan senjata dan melakukan perundingan-perundingan untuk menyelesaikan sengketa. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir sebagai Dubes Keliling, beberapa kali berbicara dalam sidang Dewan Keamanan yang akhirnya membentuk Komisi Tiga Negara PBB untuk membantu menengahi sengketa Indonesia—Belanda

Agresi militer Belanda yang pertama ini merupakan kesalahan politik besar karena memberi kesempatan kepada pihak Indonesia untuk mengeksploitasikannya dengan sebesar-besarnya untuk mendapatkan simpati dan dukungan politik lebih banyak dari masyarakat dunia untuk perjuangan kemerdekaan republik.

Republik Indonesia karenanya sudah menjadi kenyataan politik internasional yang tidak bisa diabaikan lagi karena pada waktu yang bersamaan, perwakilan-per-

Digitized by Google

wakilan Indonesia di luar negeri yang telah dibuka di Singapura, India, Burma, Mesir dan London lebih memantapkan lagi, didukung pula oleh perlawanan senjata Indonesia yang berjalan terus walaupun tentara Belanda menduduki sebagian kota besar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya.

Kekuatan dan semangat tempur

Berkat semangat juang yang tidak kunjung padam baik dibidang diplomasi maupun di medan pertempuran, maka usaha Belanda kemudian untuk menjadikan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi salah satu republik saja dalam suatu negara Federal menemui kegagalan. Negara Federal Republik Indonesia yang didirikan atas dasar Perjanjian KMB merupakan suatu hasil yang ternyata tidak tahan lama karena negara-negara bagian buatan Belanda tidak dapat melawan dinamika dan semangat juang Republik Indonesia proklamasi 17 Agustus 1945. Juga karena pemimpin-pemimpinnya bukan tandingan Soekarno—Hatta waktu itu.

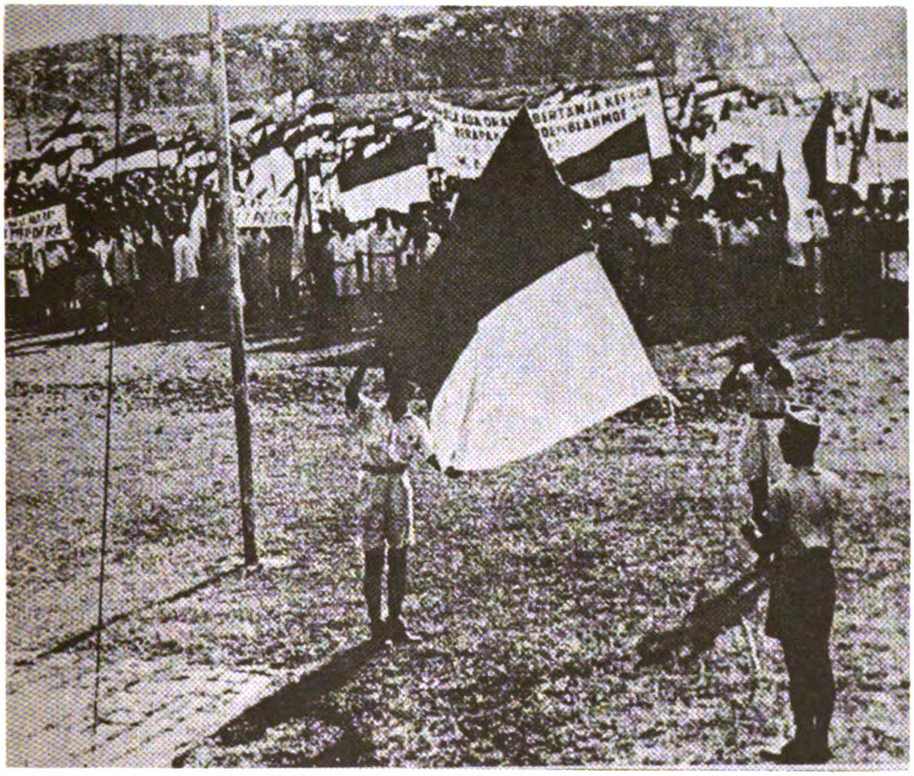

Kekuatan semangat kebangsaan

Selain dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana telah dilukiskan di atas, diplomasi Indonesia juga memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya dalam perjuangan merebut Irian Barat, yang sekarang telah menjadi Propinsi Irian Jaya. Juga disini terjadi kerjasama dan saling mengisi yang erat antara kegiatan diplomasi dan kekuatan angkatan bersenjata. Politik konfrontasi terhadap Malaysia sebaliknya kurang berhasil karena diplomasi agresip yang dilakukan oleh pimpinan pemerintahan waktu itu kurang didukung oleh Angkatan Bersenjata secara keseluruhan.

Lahirnya Orde Baru memberi tugas lain kepada diplomasi kita. Tugas utamanya adalah bahwa kita selain menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura untuk selanjutnya harus memperlihatkan itikad kita sebagai bangsa yang ingin hidup berdampingan secara damai dengan tetangganya sesuai dengan Dasa Sila Bandung. Dalam rangka kebijakan inilah kita harus melihat pembentukan ASEAN yang didirikan di Bangkok di tahun 1967.

Karena prioritas Pemerintah Orde Baru adalah pembangunan terutama untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang telah sangat parah kedaannya akibat politik petualangan dan salah urus rezim Orde lama, dimulailah suatu kebijakan yang mengundang penanaman modal asing dan mengumatakan rehabilitasi ekonomi dalam negeri, antara lain dengan mengusahakan pinjaman jangka panjang dengan syarat-syarat yang lunak di samping dua sasaran di atas. Pemerintah sebaliknya ingin tetap memelihara citra sebagai suatu negara yang berpolitik bebas aktip dan anggauta Gerakan Non-Blok yang tidak perlu diragukan.

Dua puluh dua tahun setelah peristiwa G 30 S dan munculnya Pemerintah Orde Baru dapatlah dikatakan bahwa ketiga sasaran itu dapat kita capai dan citra kita sebagai negara cinta damai yang terbuka bagi perdagangan dan modal asing, namun tetap berpolitik bebas aktip dapat dipelihara dengan baik.

Kita patut bersyukur bahwa hal ini bisa kita lakukan walaupun sementara itu telah terjadi peristiwa Timor Timur sebagai akibat tindakan yang kurang bertanggungjawab daripada Portugal di dalam melaksanakan politik dekolonisasinya.

Apabila kita bandingkan tugas diplomasi yang dihadapi dalam kurun waktu 1945-1965 dengan 1966-1986 dapatlah dikatakan bahwa walaupun tugas dalam periode kedua ini berlainan dengan masa perjuangan fisik periode pertama karena masalah dan sasaran yang dituju jauh lebih kompleks dan majemuk, namun pada hakekatnya masih sama sifatnya yaitu pada dasarnya masih merupakan diplomasi perjuangan dalam arti memperjuangkan kepentingan nasional sebagai tujuan utama. Dengan demikian apabila di tahun 1987 pimpinan Departemen Luar Negeri mengemukakan gagasan untuk menambah dimensi "kebudayaan" pada diplomasi Indonesia, maka pada hakekatnya itu tidak merobah esensi daripada diplomasi, yang pada hakekatnya masih tetap merupakan suatu diplomasi perjuangan dari suatu bangsa yang baru merdeka yang sedang membangun.□

Digitized by Google

Menuju Format Baru?

Peta Politik Setelah Pemilu 1987

Apakah kerja keras dan sikap memandang jauh ke depan dapat menular? Itu mungkin saja, meski bukan hal mudah. Dalam kehidupan politik mutakhir Indonesia, Golkar merupakan satu contoh dari organisasi yang mampu membuktikan kerja keras secara teratur. Sekaligus lebih mampu memproyeksi pandangan ke depan. Karenanya, lebih siap menghadapi Pemilihan Umum 23 April 1987 dan memetik hasil 73% suara — melampaui targetnya sendiri yang 70%.

Dan tatkala orang lain masih terlarut dengan soal-soal yang berkaitan dengan Pemilu 1987 itu, pimpinan-pimpinan Golkar telah mulai membicarakan persiapan menuju Pemilu 1992. Ketua Umum Golkar Sudharmono SH mengatakan persiapan menghadapi Pemilu 1992 pada hakekatnya dimulai tanggal 24 April 1987! "Itu merupakan suatu hal yang benar", ujar Ketua Umum PDI Drs Suryadi menanggapi. "Dan kebenaran yang datang dari manapun akan kita terima sebagai kebenaran", lanjutnya. "Sehingga kita ini didorong untuk dapat menyiapkan diri dalam Pemilu 1992". Suryadi menerima pikiran bahwa tak boleh tidak program itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. "Kalau kita mau bicara pemilu, maka tidak ada kata lain, tema-tema kampanye itu harus kita laksanakan, kita operasionalkan dengan berkesinambungan". Artinya kampanye tidak lagi kampanye yang sekedar seperti apa yang ada dalam undang-undang. Tapi juga kita lihat sebagai kegiatan rutin dalam menghadapi pemilu berikutnya.

Tokoh PPP Jusuf Zakir, dalam wawancara dengan Media Karya, juga menyentuh tahun 1992 dengan belajar dari ketidaksempurnaan 1987. Zakir melihat bahwa kampanye 1987 hampir sama dengan 1982, dalam hal masih banyaknya para peserta belum menonjolkan program. "Kendatipun ada, program itu hanya sepintas lalu dikemukakan". Menurut Zakir perlu dicari cara agar masyarakat mendapat kesempatan untuk tahu sebanyak-banyaknya program OPP. Ia menyarankan bentuk kampanye 1992 lebih merupakan diskusi terbuka: OPP menyampaikan program-programnya dan masyarakat diberikan kesempatan berdialog. Terlepas dari bagaimana teknis pelaksanaannya, Zakir menawarkan gagasan kampanye satu OPP dapat dihadiri anggota OPP lainnya "untuk mempertanyakan program OPP tersebut". Dengan demikian masyarakat mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. "Selama ini kampanye setiap kontestan terkesan kuat hanya boleh dihadiri oleh anggota atau simpatisan kontestan tersebut. Dan hal seperti ini tidak mendidik".

Bila etos kerja (keras) dan keteraturan memang dapat mengakar dalam tubuh setiap kekuatan politik, tentu masa depan kehidupan politik di Indonesia akan lebih memberi harapan dan kecerahan. Tanda-tanda baik memang sangat terasa terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dr Alfian menggambarkan terciptanya format-format baru politik di Indonesia selama ini. Dan hasil pemilihan umum yang baru lalu memperlihatkan beberapa hal "yang barangkali dapat dikatakan tambah mempermantap format

Digitized by Google

baru politik di Indonesia".

Tentulah, salah satu faktor yang amat strategis dalam hubungan ini adalah kemenangan Golkar sekali lagi — sekaligus dengan peningkatan peraihan suara. Makna strategis itu terutama terletak pada kenyataan penampilan Golkar selama ini sebagai tulang punggung proses pembaharuan dan pembangunan. Maka sifat-sifat bawaan Golkar akan kuat mewarnai kehidupan bangsa ke masa depan ini, khususnya kehidupan politik.

Kemenangan Golkar dalam pemilu yang baru lalu membawa Golkar ke posisi pemegang mayoritas kerja dalam DPR mendatang dan pemegang suara terbesar dalam MPR.

Dalam wawancara dengan Media Karya beberapa waktu setelah pemilihan umum, Ketua Umum Golkar Sudharmono SH menyebutkan keberhasilan Golkar untuk mempertahankan posisi politik baik di MPR, DPR maupun DPRD, merupakan hasil yang wajib disyukuri. Tetapi Sudharmono mengingatkan bahwa hal itu sekaligus juga merupakan tantangan apakah Golkar dapat memberikan pengabdian sesuai dengan harapan rakyat "yang memberikan kepercayaan bahkan melebihi target Golkar sendiri". Menurut Sudharmono, sudah barang tentu Golkar tidak ingin mengecewakan rakyat. Golkar akan bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi harapan rakyat. Dalam artian "Golkar akan melaksanakan sebaik-baiknya kewajiban dan rasa pengabdiannya bersama-sama rakyat melalui berbagai forum, melalui berbagai kesempatan yang memang dimungkinkan oleh peraturan dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945". Jelasnya, "Golkar akan menyalurkan aspirasi rakyat melalui forum-forum legislatif, eksekutif maupun forum yang ada dalam masyarakat". Golkar sebagai kekuatan Orde Baru, sebagai pendukung pemerintah Orde Baru, sebagai kekuatan yang dipercayai rakyat, akan selalu berusaha memberikan masukan-masukan yang konstruktif agar dinamika yang hidup dalam masyarakat betul-betul tertampung dan terlaksana.

Beberapa bagian dari pengutaraan Ketua Umum Golkar ini, sejalan dengan beberapa hal dalam telaah post pemilu dari Dr Alfian berikut ini.

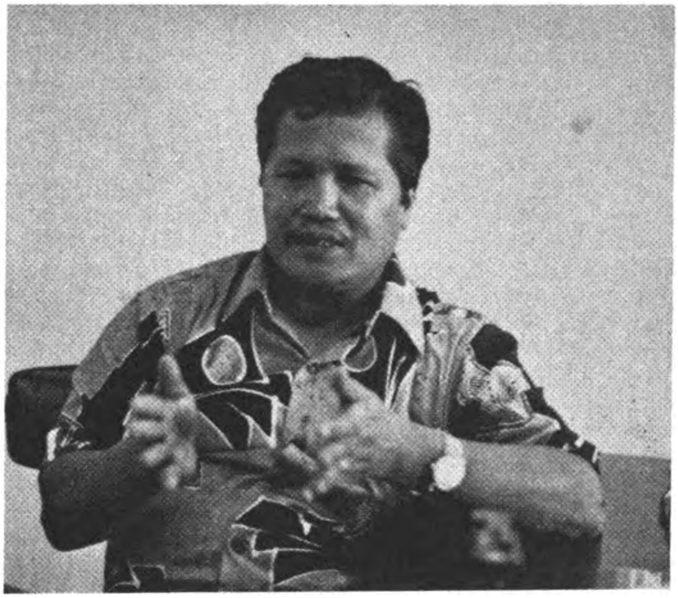

Alfian

Menuju Format Baru?

Ada beberapa hal yang menarik setelah selesainya pelaksanaan pemilu 1987 yang baru lalu. Pertama, pemilu ini buat pertamakalinya diselenggarakan pada saat Pancasila sudah diterima sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan kemasyarakatan. "Dengan demikian apa yang disebut pertentangan politik yang bersifat ideologis selama pelaksanaan kampanye memang sudah jauh berkurang atau bahkan boleh dikatakan tidak ada sama sekali", ujar Dr Alfian dalam wawancara dengan *Media Karya*.

Hal lain yang menarik, ujarnya lebih lanjut, bahwa dari hasil pemilu itu sendiri kita melihat beberapa hal yang barangkali dapat dikatakan tambah mempermantap format baru politik di Indonesia. Pada saat yang sama kita melihat pula adanya dinamika kehidupan demokrasi Pancasila. Pemantapan itu antara lain kita lihat bahwa selama empat pemilu dalam masa orde baru, ada kekuatan politik yaitu Golkar yang selalu berhasil memperoleh mayoritas suara baik suara maupun jumlah kursi. Dan dalam pemilu 1987 Golkar memperoleh kenaikan perolehan suara dibanding pemilu 1982, yaitu sebesar 9 persen. Tapi pada saat yang sama, kemenangan Golkar itu tidaklah mutlak benar, dalam arti Golkar memborong semua suara. Hal ini sekaligus menghilangkan anggapan atau kekhawatiran sebagian orang terhadap kemungkinan munculnya apa yang disebut suasana kehidupan politik yang monolitik.

Di samping itu dinamika kehidupan demokrasi bisa dilihat dari kenyataan bahwa partai kecil seperti PDI, yang semula diperkirakan sebelumnya adalah partai yang barangkali tidak bangkit lagi, tahu-tahu dalam pemilu 1987 bangkit dengan memperoleh tambahan suara yang cukup besar, yaitu dari 8 persen pada pemilu 1982 menjadi 11 persen pada pemilu 1987. Hal ini sudah barang tentu memberikan gambaran adanya dinamika kehidupan demokrasi kita. Sebuah organisasi politik (orpol) bagaimanapun kecilnya masih mempunyai peluang memperbaiki posisinya dalam pemilu yang baru lalu. Di sisi lain, PPP yang sebelumnya sudah diperkirakan orang, oleh karena berbagai faktor baik intern maupun ekstern, mengalami penurunan yang cukup berarti. Dan turunnya perolehan suara PPP ini juga membuktikan adanya perubahan yang cukup besar dalam tingkah laku politik pemilih PPP, dimana PPP telah kehilangan hampir 40 persen pemilihnya.

Ini menurut Alfian menunjukkan bahwa pemilih sekarang tidak lagi fanatik terhadap orpol yang mereka dukung sebelumnya. Sebab tidak tertutup kemungkinan kenaikan peroleh Golkar disebabkan beralihnya pemilih PPP. Ada semacam perpindahan suara di beberapa daerah dimana tingkah laku politik pemilih ini sangat dipengaruhi apa yang mereka peroleh dari parpol yang ada.

"Kalau kita lihat lebih jauh lagi, barangkali memang pengaruh satu-satunya asas Pancasila mulai terjadi pada kehidupan masyarakat. Terutama nampak pada PPP di Jawa, dimana banyak pendukungnya beralih ke Golkar dan PDI. Tapi kepindahan mereka itu bukan karena kampanye penggembosan, tapi oleh kesadaran masyarakat sendiri mereka berpindah suara kepada Golkar dan sebagian PDI".

Dilihat dari sini, kekhawatiran terhadap primordialisme yang cukup kuat selama ini, nampak semakin berkurang.

Jadi ada dua hal yang menarik dari pemilu 1987, dimana kehidupan politik kita sudah tidak lagi dicekoki oleh pertentangan politik yang bersifat ideologis, dan semakin berkurangnya ikatan primordial dalam kehidupan politik dalam menentukan pilihan oleh calon pemilih terutama di kalangan pemuda atau generasi mudanya.

Persoalannya sekarang, kata Alfian, bagaimana sesudah pemilu ini, lebih jauh lagi memperbaiki perwujudan demokrasi Pancasila dimasa yang akan datang. Sering dikatakan, dalam budaya politik kita perlu mengembangkan etika dan moral politik, dalam arti kata menyesuaikan ucapan dan perbuatan; mengurangi hal-hal yang kurang berkenan di hati rakyat, dan lebih banyak mengembangkan suasana baru yang lebih memungkinkan rasa kebersamaan lebih berkembang dan tidak saling curiga-mencurigai.

"Kunci daripada budaya politik demokrasi Pancasila adalah apa yang disebut rasa keadilan. Jadi, dalam kehidupan politik dimasa mendatang rasa keadilan sedapat mungkin dikembangkan. Sebab masih adanya suara yang mengatakan perlunya ditegakkan rasa keadilan, hal ini perlu mendapatkan perhatian. Rasa keadilan harus lebih ditegakkan, dimana etika dan moral politik Pancasila sebagai ukurannya. Dengan menegakkan rasa keadilan, se-

Digitized by Google

kaligus kita mengamalkan Pancasila itu sendiri".

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari lembaga-lembaga politik yang ada. Masyarakat masih melihat adanya kesenjangan dalam lembaga-lembaga politik yang ada. Kesenjangan antara lembaga supra yang dianggap lebih kuat dan mapan, yaitu pemerintah atau eksekutif, lebih kuat dibanding lembaga infra. Kesenjangan ini telah mengakibatkan pada diri lembaga-lembaga infra kurang nampak sifat kemandiriannya, kurang dapat menyalurkan aspirasi atau kepentingan masyarakat secara lebih segar dan lebih leluasa.

Dari lembaga supra sendiri juga masih adanya kesenjangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pada lembaga yang terakhir ini nampak belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga kesenjangan semakin besar. Dalam hal ini masalahnya kita tidak harus menurunkan apa yang sudah diperoleh oleh lembaga eksekutif, tetapi bagaimana meningkatkan fungsi lembaga legislatif itu sendiri. Dengan kata lain, bagaimana mengfungsionalkan lembaga legislatif lebih tinggi lagi.

Sementara itu pada lembaga infrastruktur, nampak sekali bahwa kemandiriannya secara kualitatif masih jauh dari semestinya. Dalam hal ini masih perlu dicari upaya bagaimana agar orpol, Golkar, PDI dan PPP bisa lebih mandiri lagi. Seberapa jauh pemerintah dapat memberikan kebebasan agar mereka itu dapat menentukan sendiri. Misalnya dalam menetapkan kepengurusan orpol yang bersangkutan atau dalam hal pemilihan calon anggota legislatif, birokrasi pemerintah masih ikut menentukan.

Selama ini pemerintah mengambil kebijaksanaan floating mass, untuk menjaga agar masyarakat di pedesaan tidak selalu dilibatkan dalam pertentangan politik yang bersifat ideologis. Namun sekarang, dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, walaupun belum mantap betul, relevansi dari kebijaksanaan dengan makna mencegah pertentangan politik yang bersifat ideologis, akan semakin berkurang. Ini tidak berarti bahwa floating mass harus dihilangkan, floating mass tetap ada. Tetapi di dalam kehidupan politik masyarakat, floating mass harus diberi arti atau dikembangkan lebih jauh. Keanggotaan bagi orpol harus terbuka bagi semua orang, tapi ini tidak berarti seseorang harus masuk parpol atau Golkar. Dengan demikian makna floating mass itu lebih bersifat sukarela, masuk parpol/Golkar atau tidak atau mau menjadi massa mengambang. Floating mass harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat kita dan tuntutan pembangunan kehidupan politik di masa mendatang. Dengan demikian akan membuat orpol yang ada lebih mandiri lagi, ujar Alfian.

Kemandirian akan lebih dapat dikembangkan. Bagaimana mengembangkan mekanisme demokratis yang ada dalam orpol. Sebagai contoh pemilihan calon anggota DPR, apakah prosesnya sudah melalui cara demokratis atau belum. Dalam hal ini masyarakat melihat bahwa secara langsung atau tidak birokrasi pemerintah terlalu terlibat dalam kehidupan politik. Kadang-kadang pengaturan oleh pemerintah terlalu jauh sehingga masyarakat melihat pemerintah terlalu mencampuri urusan orpol. Masalahnya sekarang bagaimana agar campur tangan pemerintah lebih dikurangi sehingga orpol bisa lebih mandiri, mampu mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam hal pencalonan, dimasa mendatang menurut Dr Alfian hendaknya dikembangkan proses pencalonan di samping memenuhi yang di pusat, juga memenuhi keingingan mereka yang ada di daerah. Di sini masalah demokrasi perlu diperhatikan. Kalau demokratisasi itu bisa berjalan maka akan terjadi sirkulasi darah baru dalam tubuh parpol. Orang-orang baru masuk menggantikan orang-orang tua yang

Transformasi Persepsi

Menyimak pelaksanaan pemilihan umum 1987, ada beberapa hal yang menarik, terutama menyangkut persepsi baru kalangan umat Islam dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Kalau dulu orang menganggap PPP sebagai wadah penyalur aspirasi umat Islam, ternyata setelah ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas persepsi lama itu berubah dimana ditandai dengan semakin banyak umat Islam menyalurkan aspirasinya kepada dua kekuatan politik lainnya, yaitu Golkar dan PDI. "Gejala Ini menarik bagi kami warga Muhammadiyah, karena tidak ada lagi partai yang didasarkan pada asas agama," ujar Drs Lukman Harun, wakil ketua PP Muhammadiyah dalam percakapannya dengan Media Karya sekitar post pemilu 1987.

Menurut Lukman Harun, PPP sendiri yang merupakan fusi dari beberapa kekuatan politik Islam, sekarang ini bukan lagi satu-satunya partai yang menampung aspirasi politik umat Islam di Indonesia.

Bagi Muhammadiyah sendiri yang pada tahun 1971 mempertegas dirinya bukan sebagai organisasi politik, fenomena itu bukanlah hal yang baru. Bahkan dalam kongresnya di Ujung Pandang, PP Muhammadiyah sudah menggariskan pendirian bahwa kepada warganya bebas menentukan sendiri pilihannya sesuai hak asasi masing-masing, apakah memilih PPP, Golkar atau PDI.

Muhammadiyah, katanya, tidak mengenal istilah tarik sana tarik sini, atau fatwa-fatwa bagi umatnya. Kesemuanya itu menjadi hak umat Islam untuk menentukan sendiri pilihannya. Dan, sudah menjadi kenyataan bahwa umat Islam akan memilih OPP yang betul-betul memperjuangkan kepentingan umat, yaitu terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya; terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur diridhoi Allah SWT.

Menjelaskan perbedaan Muhammadiyah dengan NU, Lukman Harun mengatakan kalau NU pernah menjadi partai politik, sementara Muhammadiyah tidak pernah menyatakan dirinya sebagai partai politik atau organisasi politik. Bahwa Muhammadiyah pernah ikut serta membangun Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), tapi sebagai organisasi Muhammadiyah tidak pernah menjadi Parpol. Maka kalau terjadi kemelut di tubuh PPP, Muhammadiyah tidak menganggapnya sebagai masalah. Sebab selama ini Muhammadiyah tidak menganggap PPP sebagai satu-satunya penyalur aspirasi politik warganya. Aspirasi warga Muhammadiyah tersebar di tiga organisasi peserta pemilu (OPP).

Faktor Menentukan

Di bagian lain Lukman Harun mengutarakan pula kenyataan yang berkembang saat ini, dan menarik untuk disimak, bahwa kendati tidak ada lagi partai Islam tapi kenyataan faktor umat Islam masih tetap merupakan faktor yang menentukan bagi ketiga OPP dalam berusaha memenangkan pemilu 1987. Kita lihat selama berlangsungnya kampanye merebut massa, ketiga OPP, baik PPP, Golkar maupun PDI, banyak memperebutkan pengaruh kiyai atau ulama.

Tokoh-tokoh informal tersebut dianggap besar perannya bagi tercapainya perolehan suara pada saat pemungutan suara. "Sebagai orang Islam saya bangga dengan kenyataan seperti itu. Bahwa umat Islam masih merupakan faktor yang menentukan dan tetap memegang peranan penting," ujarnya.

Kalau sekarang aspirasi politik umat Islam sudah tersalurkan di tiga kekuatan politik peserta pemilu, yang berarti pula telah terjadi transformasi persepsi di kalangan umat Islam sendiri yang semula

Digitized by Google

sudah tidak relevan lagi. Ini adalah makna dari pengembangan demokratisasi.

Manajemen Politik

Terlepas dari berbagai pertimbangan lainnya, agaknya memang dapat disepakati keperluan untuk memantapkan kemandirian orpol seperti yang diutarakan Alfian.

Dalam seminar yang diselenggarakan LIPI sesudah Pemilu yang lalu, Sekjen Golkar Sarwono Kusumaatmadja menyinggung hakekat kemandirian itu dari sudut penentuan peran dan fungsi politik partai-partai politik, Golkar maupun Abri.

Untuk dapat menemukan rumusan yang tepat mengenai fungsi itu, setiap kekuatan sospol tersebut harus melakukan dialog sesering mungkin. Khusus kepada partai-partai politik, Sarwono mengingatkan agar tidak terlalu terpaku pada kekecewaan ketidaksempurnaan sistem mekanisme pelaksanaan Pemilu. Tidak menutup mata

terhadap ketidaksempuranaan yang ada, Sarwono mengatakan bahwa "bagaimanapun sempurnanya sistem mekanisme itu, kalau masing-masing belum menemukan fungsinya secara tepat, maka ekspresi politik mereka akan terhambat".

Diantara tiga organisasi politik yang ada, tak dapat disangkal bahwa Golkar lah yang sejauh ini lebih di depan dan lebih berhasil dalam menemukan fungsi dan perannya. Kemandiriannya juga makin menemukan bentuk dari waktu ke waktu selama lebih 20 tahun ini - khususnya dalam 5 tahun terakhir - dan dari pemilu ke pemilu. Kendati selalu masih ada pihak yang mencoba mengecilkan pencapaian keberhasilan-keberhasilan Golkar dengan mengkait-kaitkan peranan birokrasi, tapi tak dapat ditutupi fakta bahwa keberhasilan itu sebenarnya tak lain hasil kerja keras melalui konsolidasi idiel, wawasan dan organisasi. Dalam beberapa tahun pendidikan kader berhasil menciptakan secara besar-besaran kader-kader yang sudah cukup menjadi andalan organisasi. Pencapaian angka 25 juta pendaftar untuk menjadi anggota Golkar, merupakan indikator tersendiri tentang potensi kemandirian Golkar.

Berkunjung ke beberapa daerah setelah pemilu, Ketua Umum Golkar juga selalu menekankan keberhasilan Golkar dalam pemilu yang baru lalu sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran Golkar, buah dari kaderisasi dan program eka sapta serta penggalangan yang terus menerus dan teratur. Bukan karena topangan birokrasi pemerintahan.

... PPP satu-satu parpol pe-...rasi umat Islam, maka dalam ...tu lima tahun mendatang saat ...nggarakannya lagi Pemilu 1992, ... siapa di antara ketiga OPP tadi ...pu mewujudkan janji-janjinya ...erlangsungnya kampanye.

...a ketiga OPP tersebut, kata Luk-...run, kami ajak untuk berlomba-...rbuat sesuatu untuk kepentingan ...kat khususnya juga umat Islam. ...ng paling baik, tentu nantinya ...lih lagi oleh umat Islam.

... orang mengatakan penduduk ... 90 persen lebih adalah umat ber-...Islam, maka apa yang akan diper-...iga OPP dalam kurun waktu lima ...nantinya akan sangat menarik. ...ang telah berbuat paling banyak ...entingan atau aspirasi umat Islam. ...u orang bertanya apa sebenarnya ... umat Islam, tidaklah sulit men-... yaitu pembangunan manusia se-...a, sebagaimana telah diamanatkan ... garis-garis besar haluan negara, ...ila dan UUD 1945.

...bangunan menurutnya tidak hanya ...ngunan fisik, berupa gedung-ge-... pabrik-pabrik, tapi juga manusia-...hklaknya, moralnya, agamanya. Dan ... tahapan akhir nantinya akan ter-...d masyarakat adil dan makmur yang ...oi Allah SWT.

...didikan Politik

...rbicara masalah pendidikan politik bagi warga negara Indonesia, Lukman Harun menegaskan bahwa Pemilu itu sendiri sudah merupakan pendidikan politik. Masyarakat dididik menentukan sendiri pilihannya terhadap ketiga OPP, dengan mengikuti program-program yang ditawarkan selama kampanye. Masyarakat dididik pula bagaimana melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Namun, masalahnya sekarang bagaimana pendidikan politik ini berjalan baik sampai ke bawah.

Dalam kaitan partai terbuka, Drs Lukman Harun mengemukakan bahwa secara teoritis itu bisa, tapi dalam prakteknya nampaknya masih butuh waktu yang cukup panjang. Seperti misalnya PPP, yang kehadirannya merupakan hasil fusi organisasi politik Islam waktu itu, nampaknya masih menjadi kendala bagi masuknya orang-orang non Islam. Misalnya kepengurusan di tingkat cabang atau daerah akan ada hambatan psikologis kalau pimpinannya dari non Islam sementara massa di bawah adalah orang-orang Islam. "Tapi itu tidak berarti tidak bisa, cuma nampaknya butuh waktu karena dalam prakteknya sulit. Lebih-lebih dalam kampanyenya PPP selalu mengutarakan tekadnya memperjuangkan aspirasi umat Islam," tuturnya.

Ada satu hal yang menarik selama ini, kata Lukman Harun, bahwa kendati PPP menyatakan partai yang memperjuangkan kepentingan umat Islam, namun kenyataannya untuk membahas masalah umat Islam Pemerintah selalu memanggil Muhamm... kadang bersama GU...PI serta ... "Tapi yang jelas tidak dengan PPP, dan dari partai tersebut tidak ada protes atau keluhan," tegasnya.

Masih Soal Kampanye

Lukman Harun mengakui masih adanya pemilih-pemilih tradisional dalam pemilu. Tapi pada saatnya nanti akan muncul pemilih-pemilih yang rasional dan tidak emosional serta lebih pragmatis. Begitu pula ikatan-ikatan primordial, akan semakin hilang.

Contoh konkret ditunjukkan pada NU, dimana kalau dulu yang namanya kiyai (ulama) mengeluarkan fatwa, menganjurkan pilih salah satu OPP, kini, dengan telah terjadinya krisis wibawa pada ulama, santri-santrinya pilih yang lain. Kalau dulu apa kata kiyai itu adalah kata umat, maka kini sudah tidak lagi, artinya telah terjadi pola pikir yang lebih rasional dan pragmatis di kalangan umat Islam.

Dan yang lebih menarik lagi, kata Lukman Harun, massa yang membludag memenuhi lapangan kampanye suatu kontestan, belum merupakan jaminan akan memilih kontestan bersangkutan. Diambil contoh massa yang memadati kampanye PDI pada kampanye terakhir yang sebagian besar generasi mudanya, nyatanya suara terbanyak masih saja pada Golkar. "Ini yang membikin heran kalangan pengamat," ujarnya mengakhiri percakapan dengan Media Karya.☐ Nunung S

Digitized by Google

Di masa-masa yang lalu, bahkan Abri pun pernah dituding menopang keberhasilan Golkar memenangkan pemilihan umum. Tudingan seperti itu kini tidak ada lagi. Tokoh PPP Jusuf Zakir misalnya menyatakan bahwa pemilihan umum yang baru lalu ini berjalan dengan bagus. Sikap Abri terhadap PPP juga lebih netral, meskipun ia juga masih menyebutkan sikap itu "masih belum merata di beberapa tempat, misalnya untuk tingkat kecamatan dan desa". Zakir tidak memperinci kenapa ia menyimpulkan demikian.

Tetapi barangkali menarik juga untuk mengetahui bahwa Golkar pun mengeluhkan betapa di beberapa daerah gerak mereka dalam kampanye cukup dibatasi dengan ketat oleh aparat keamanan - Abri maupun aparat pemerintahan daerah - demi menenggang perasaan dan memberi kesempatan kepada peserta pemilihan umum lainnya. Beberapa tokoh Golkar di daerah sempat merasa iri kepada sikap aparat keamanan dan birokrasi yang jauh lebih lunak terhadap parpol ketimbang terhadap Golkar. "Kawan-kawan sering-sering hanya bisa mengurut dada", ujar seorang tokoh Golkar Anang Adenansi. Tetapi sejauh ini para pimpinan Golkar tidak pernah menyatakan dan menunjukkan sikap berkecil hati apalagi melakukan protes.

Sikap aparat pemerintahan sipil dan LPU juga dinilai lebih baik oleh Zakir. Walau ada yang masih dianggapnya tak berbeda jauh dengan tahun 1982, namun Zakir menganggap "secara keseluruhan keadaan Pemilu 1987 ini lebih baik dan lebih menonjol". Sikap dan penilaian serupa ditunjukkan oleh tokoh PDI Ny. Fatimah. "Dalam pemilu yang baru lalu ini, Abri telah menunjukkan jarak yang sama diantara ketiga kontestan". Namun ia pun seperti halnya tokoh PDI lainnya, Drs. Sukowaluyo, masih mengeluhkan beberapa hal terhadap birokrasi pemerintahan. Sukowaluyo, seperti umumnya tokoh partai, menuduh kekuatan birokrasi ikut 'mendukung' kemenangan Golkar. Suatu hal yang oleh tokoh Golkar Jakob Tobing MPA pernah diberi jawab dalam seminar LIPI sesudah pemilu. "Secara historis Golkar memang dekat dengan pemerintah, tapi fakta lain menunjukkan pula bahwa Golkar memang sudah mengakar di masyarakat".

Bicara soal keluhan, tentu merupakan hak siapa pun untuk mengeluh. Setiap pihak punya subjektivitas, maka mengeluh merupakan hal yang tidak aneh. Namun sebagai pelaku politik yang sah menurut kehendak undang-undang yang ada, tentu tepat anjuran kepada partai-partai politik untuk tidak terlalu terpaku kepada apa yang mereka anggap ketidaksempurnaan sistem mekanisme. Bila porsi waktu yang digunakan untuk mengeluh lebih besar ketimbang waktu yang digunakan untuk bekerja membenahi diri, apa yang lalu bisa diharapkan?

Mengeluhkan faktor ekstern - katakanlah dalam hal ini apa yang disebut 'campur tangan pemerintah' yang secara klasik dikeluhkan oleh partai-partai politik - lebih banyak tidak relevannya, terutama bila dikaitkan dengan cita-cita kemandirian. Apalagi, dalam banyak kasus terlihat campur tangan pemerintah sebenarnya bukanlah menjadi keinginan pemerintah sendiri, melainkan karena 'undangan' dan permintaan tolong dari dalam tubuh partai sendiri.

Pemerintah bahkan pada hakekatnya berkeinginan untuk lebih memantapkan kemandirian orpol. Sikap itu terbaca kuat dari sikap Abri maupun birokrasi pemerintahan secara keseluruhan dalam penanganan pelaksanaan Pemilihan Umum 1987 yang lalu. Maka tepatlah kalau Alfian mengatakan "sekaranglah saatnya kita lebih memantapkan kemandirian orpol". Dan kunci kemandirian orpol itu menurut Alfian adalah kematangan dalam demokratisasi. "Kalau masih ada figur-figur yang dimantapkan atau dikatrol, maka selamanya kita selalu berada dalam keadaan ketergantungan. Inti kemandirian akan nampak kalau dalam orpol itu sendiri sudah matang demokratisasinya sejalan dengan berkurangnya campurtangan ekstern".

Wawancara: Nunung Suprono/Subandrio/Badrul M.
Pemadu: Rum Aly.

HONDA

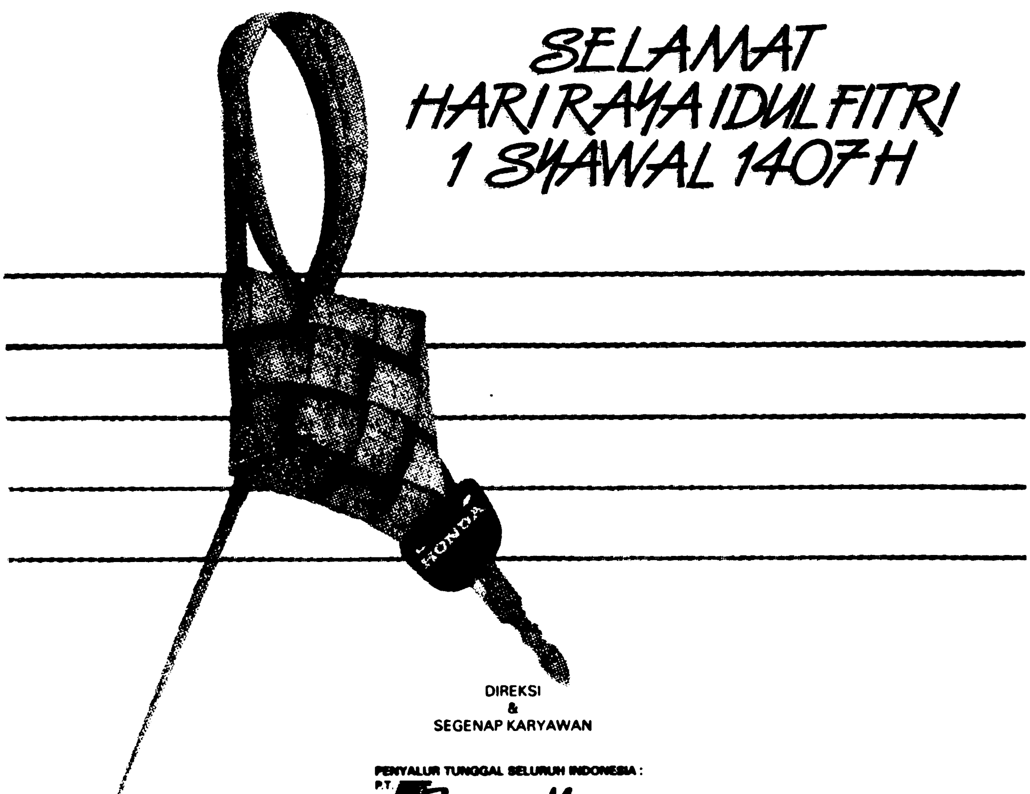

DIREKSI
&
SEGENAP KARYAWAN

PENYALUR TUNGGAL SELURUH INDONESIA :
P.T. Imora Motor
JL. P. JAYAKARTA No. 50. JAKARTA - PUSAT.
TELP. 6394337

Digitized by Google

Pikiran Orang Partai

PEMILU telah usai. Banyak hal yang perlu dipikirkan lebih jernih. Tanpa emosi yang berpangkal kepada apa yang dianggap kelemahan pelaksanaan sistem mekanisme pemilu itu.

Berikut ini diturunkan petikan cetusan pemikiran orang-orang partai yang perlu juga diketahui, terutama untuk hal-hal yang menjangkau ke depan. Dari PDI: Drs. Suryadi dan Drs. Sukowaluyo. Dan dari PPP : Jusuf Zakir.

Drs. SURYADI. Yang perlu kita pikirkan untuk masa mendatang, adalah bagaimana supaya keterlibatan OPP sedemikian efektif dalam pelaksanaan pemilu. Sejak awal sampai akhir. Yaitu keterlibatan mulai dari mempersiapkan undang-undang, mempersiapkan peraturan-peraturan pelaksanaan, memberikan penerangan, pendaftaran pemilih, mempersiapkan saksi-saksi, panitia-panitia, pelaksanaan pada waktu pencoblosan dan lain-lain. ''Diharapkan secara keseluruhan OPP itu dapat terlibat. Dan di lain pihak, bagaimana OPP juga ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilu itu''.

Selama satu tahun saya memimpin partai. Kami belum sampai pada posisi untuk menggarap infra struktur secara sistimatis. ''Dan selama satu tahun saya memimpin PDI, saya gunakan untuk menyatukan partai, setelah di masa lalu PDI selalau cakar-cakaran''. Dan yang berikutnya adalah mencoba tindakan susulan tentang perbaikan struktur, agar nantinya menjadikan PDI kukuh dan kuat. Banyak orang yang merasa terperanjat terhadap tampilnya PDI yang sebelumnya tak pernah diperhitungkan (''Tapi bagi kami, hal-hal itu sudah diperhitungkan'').

Hingga saat ini PDI belum mengadakan kaderisasi secara mantap. Dan sekarang ini akan kami lakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. ''Saya kira dalam satu atau dua tahun PDI akan melakukan kaderisasi. Golkar, saya kira, juga begitu, cukup lama waktunya sebelum dapat melakukan kaderisasi''.

Sukowaluyo

Ada yang menyatakan bahwa PDI itu dibanjiri oleh anak-anak muda (dalam kampanye). Pada waktu masuk gedung PDI tanggal 2 Mei tahun lalu, saya tegaskan kepada para wartawan bahwa PDI itu adalah partainya anak-anak muda. Ini berarti, kami harus memproses, bagaimana merangkul dan menarik anak-anak muda untuk masuk atau terikat pada PDI. ''Kendati PDI ini partai kecil, tapi paling tidak PDI itu tetap mempunyai citra terhadap anak-anak muda''. Langkah berikutnya, setelah 4 bulan di DPP, yang kami garap adalah wanita. ''Kami melakukan inovasi dilingkungan pemuda dan wanita, suatu hal yang juga dilakukan oleh OPP lain, sehingga dapat menjadi lebih menarik''.

Melihat ke depan ? ''Kami ini lebih ingin melihat ke masa depan daripada menangisi masa lalu. Kita harus belajar menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak positif''.

Drs. SUKOWALUYO. Kita harus secara bersama-sama untuk memikirkan agar

PDI partainya anak-anak muda

Digitized by Google

generasi muda tetap menjadi generasi muda bangsa yang punya tanggungjawab nasional. Bukan hanya menjadi kadernya PPP, kadernya Golkar, kadernya PDI, tetapi menjadi kader masa depan bangsa melalui pendidikan politik yang jujur dan wajar.

Dalam budaya politik kita sekarang, terkandung hal-hal positif. Tetapi kita tentu juga tidak bisa menutup mata terhadap hal-hal yang memerlukan koreksi, perbaikan atau pembaharuan di masa depan, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bagaimana usaha kita memantapkan sistem nasional yang konsisten berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kedua, memikirkan secara sungguh-sungguh proses pembangunan demokrasi di segala bidang. Pembangunan demokrasi akan terwujud apabila negara dalam keadaan aman tenteram dan damai dengan sistem politik yang mantap. Berarti negara tidak harus dalam keadaan darurat. Yang ketiga, masalah yang menjadi titik sentral adalah mendekati perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yusuf Zakir

JUSUF ZAKIR. Menurut undang-undang, partai itu harus terbuka. Dan secara formal PPP itu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak membatasi orang, apakah itu golongan tertentu atau agama tertentu. Tapi harus pula diingat bahwa PPP itu tadinya gabungan partai-partai Islam dan anggotanya juga orang-orang Islam saja. Namun sekarang ini, setelah PPP menjadi sama dengan Golkar dan PDI, tidak ada partai agama, tidak ada partai Islam. "Jadi, kalau partai ya partai, agama ya agama". Dengan demikian jelas PPP menjadi partai yang terbuka. Siapapun boleh masuk. Programnya pun harus bersifat nasional.

Sebenarnya, hal ini dapat menimbulkan masalah psikologis dalam tubuh PPP. Dan karena itu masalah psikologis, maka penyelesaiannyapun harus secara psikologis. Kita harus dapat menyelesaikan sedemikian rupa, sehingga jangan karena PPP merupakan partai terbuka lalu sebagian masyarakat merasa tidak punya lagi saluran politik, merasa aspirasi politiknya tak dapat tersalurkan lagi. "Masalahnya memang ibarat menarik rambut dalam tepung. Bagaimana rambut terambil, tepung pun tidak berantakan".

Kalau penterapan ide keterbukaan ini kurang bijaksana, saya kuatir adanya masyarakat yang merasa tidak punya saluran politik. Jangan sampai ada orang Islam beranggapan karena tidak ada Partai Islam, kemudian merasa tidak punya partai. Kita harus tetap meyakinkan masyarakat bahwa agama apapun dapat tersalur melalui ketiga OPP. Kita harus berhasil dalam hal ini. "Dan ini memang tantangan".

Tidak ada partai agama

Digitized by Google

Fenomena 1987 : Antara Orpol Dan Ormas

TERDAPAT sejumlah hal yang maju dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1987 yang baru lalu ini. Namun, Dr AMW Pranarka juga mencatat bahwa pola dasar pemilu itu sendiri - sebagaimana halnya pemilu Orde Baru lainnya - tidaklah berubah. Ini berarti sikap pilihan politik masyarakat itu sebenarnya ditentukan oleh apa yang sering disebutkan orang sebagai paternalisme atau panutan formal.

Akan tetapi bila diamati secara terbatas pada sebagian kecil masyarakat terjadi pergeseran sikap. Di kota-kota diantara kalangan intelektual dan kalangan dunia usaha. Lingkungan intelektual dan dunia usaha itu membuat orang lebih kritis. Sehingga mereka yang ada di lingkungan tersebut dapat membandingkan dan dapat mempunyai aspirasi baru serta kemungkinan baru. Bila ada rasa jenuh misalnya, mereka mencari alternatif baru. Proses ini sedang terjadi, meskipun belumlah menjadi perubahan yang mapan.

Menghadapi pemilu yang lalu, Golkar lebih siap dengan melakukan kaderisasi teritorial maupun fungsional. Semuanya itu dapat mendukung kemenangan Golkar. Kalau Golkar kemudian mencapai kemenangan 73%, itu adalah suatu kemajuan berarti namun tidak mengagetkan.

Kalau toh terdapat hal-hal yang mengagetkan atau mengherankan, itu mungkin terjadi dalam masa kampanye. "Saya sendiri berpendapat, kampanye itu tidak mempunyai arti yang terlalu banyak". Artinya, bila ditinjau dari aspek pilihan politik, sebenarnya kampanye itu tidak mempunyai arti. "Kampanye itu menurut saya lebih mempunyai arti sebagai arena dan kesempatan pendidikan politik". Kampanye itu merupakan momentum bagi penampilan dinamika politik, kesempatan mengungkap pikiran dan pendapat, dan momentum untuk memobilisir. Dengan adanya pemilihan umum itulah rakyat menunaikan tugas kenegaraan.

Tapi bilamana kampanye itu ditinjau dari aspek kekuatan politik, kampanye itu belum banyak menentukan. Dalam kampanye yang baru lalu itu banyak orang yang menjadi kaget oleh sejumlah fenomena yang timbul. "Sebenarnya, menurut saya, fenomena-fenomena itu tidaklah perlu membuat kaget". Sejumlah fenomena baru terutama tampak dalam kampanye PDI. Dan hal ini perlu dilihat dari membaurnya berbagai faktor.

Dr. Pranarka melihat, bagaimanapun, PDI akhirnya memperoleh modal-modal yang menguntungkan. PDI itu timbul dari kekacauan internal, kemudian pemerintah mengambil inisiatif dalam penyelesaiannya. Dan yang diharapkan sekarang adalah PDI yang 'tidak memusuhi' pemerintah. Faktor berikutnya, ditampilkannya tokoh-tokoh muda di kalangan pimpinan PDI. Ini menimbulkan citra muda yang baik. Dengan ini PDI mulai dapat berusaha melontarkan gagasan dan pemikiran mengenai demokrasi, kebangsaan, Pancasila, yang dikembangkan sebagai identitasnya. Kendati gagasan ini menguntungkan, tapi juga masih banyak tantangan. Apalagi kepemimpinan muda itu dalam jangka satu tahun sudah harus menghadapi pemilihan umum.

Fenomena eksternal yang dianggap mengagetkan adalah dari segi massa. "Tapi menurut saya pribadi, massa tak lain dari crowd - kerumunan orang yang tak dapat dikatakan massanya PDI. Dan kelihatannya massa ini menggunakan momentum kampanye untuk menampilkan ungkapan politik". Kita dapat melihat bahwa crowd ini terutama didukung oleh critical crowd - yaitu dari kalangan pemuda, intelektual dan lingkungan ekonomi. Dan para critical itu tidak hanya golongan yang menderita, melainkan juga mereka yang berkecukupan dan ingin lebih. Barangkali pula dari crowd itu ada yang serta karena ingin protes dan karena macam-macam sebab musabab lainnya. Lalu mereka menggunakan kampanye PDI. Sasarannya adalah Golkar. Sementara PPP tidak dapat digunakan untuk maksud yang sama karena situasi di dalamnya.

Antara crowd di satu pihak dengan PDI di lain pihak, dalam pengamatan Dr Pranarka "belum tentu merupakan ikatan yang jelas". Sekarang, yang paling penting, "jangan sampai salah membaca mengenai fenomena seputar crowd itu". PDI sendiri dapat menjadi kaget dan salah baca, "seolah-olah mereka itu sudah menjadi besar, padahal belum tentu". Yang paling penting lagi, crowd dalam kampanye itu kita baca secara psikologis dan sosiologis yang menggejalakan fenomena dari perubahan - phenomen of change. Dan ini semua karena pembangunan.

Kampanye dilihat oleh Dr Pranarka masih lebih merupakan ungkapan saja ketimbang sebagai change. "Dalam masa kampanye ada orang yang mengatakan bahwa PDI didukung oleh dan pelajar dan bahwa mereka akan memilih PDI. Lalu ada pula yang mengatakan PDI ini didukung oleh kelompok Kristen-Katolik dan mereka akan memilih PDI. Ternyata dalam pemilihan umumnya sendiri, tidak demikian halnya. Apa yang terjadi dalam kampanye belum tentu terjadi dalam pemilihan".

Sebenarnya kampanye itu sendiri merupakan wahana dimana kita dapat membaca dinamika. Dan ini menjadi kompetensi politik, dimana sistim politik yang kita ingin dan akan kita bangun, pemilihan umum bukanlah alat untuk change dan konflik. Melainkan, pemilihan umum adalah sarana untuk kesinambungan namun

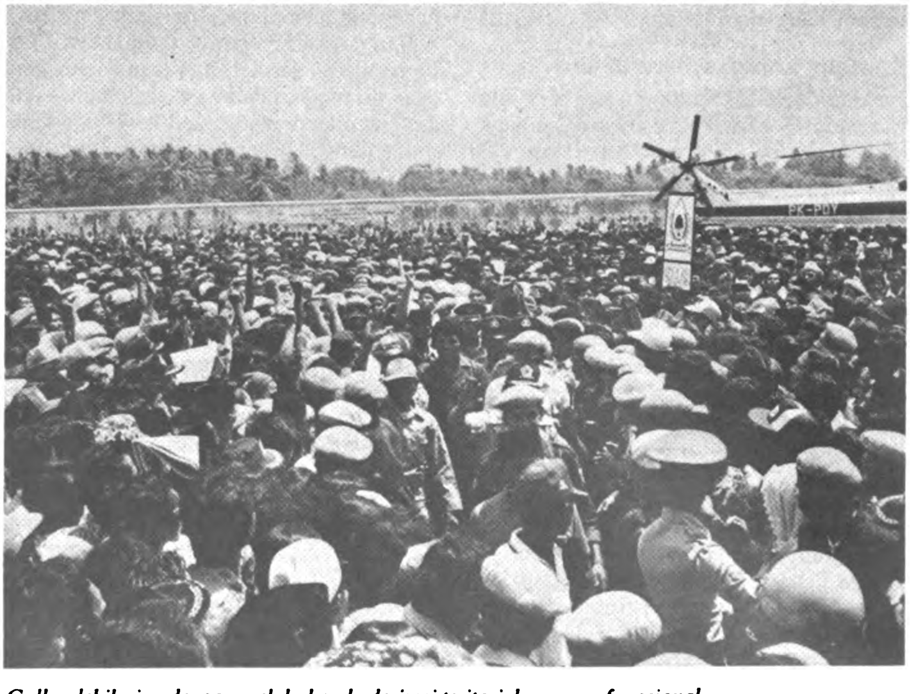

Golkar lebih siap dengan melakukan kaderisasi teritorial maupun fungsional

Digitized by Google

Adalah menarik, dalam pemilunya sendiri justru 80% pemilih terdiri dari kalangan generasi muda.

mengandung peningkatan yang korektif. "Kendati masih tetap memilih Golkar, tetapi perlu pengungkapan yang baru".

"Menurut saya", ujar Pranarka lebih lanjut, "format politik yang mau kita bangun, sebenarnya sudah berjalan. Tetapi kita tetap harus dapat membaca, yaitu format yang ada dinamika dan ada kontinuitas". Menurut saya, amanatnya adalah itu dan merupakan modal untuk membangun format yang akan datang.

Konteks-konteks Perubahan

Dalam pemilihan umum yang baru lalu itu, yang juga mendapat tanggapan agak banyak adalah Abri dan Pemerintah. Pemerintah, khususnya di tingkat pimpinan teratas, dianggap mampu memberikan cakrawala baru yang membuat suasana lebih demokratis. Pranarka mencontohkan misalnya sikap pemerintah terhadap PDI. Artinya, pemerintah tidak membatas-batasi dan memberikan perhatian yang sama. Pola lama memang masih terasa, tetapi sementara itu telah tampil pula pola baru. Berarti ada pembaharuan, dinamika dan ada pula stabilitas.

Yang dirasa amat baik peranannya dalam pemilu yang baru lalu, adalah Abri. Abri telah meletakkan peranan yang lebih nyata, tanpa meninggalkan strategi dasarnya selama ini. Peranan Abri itu terasa dalam konteks changing - perubahan. Artinya, mencari cakrawala baru, mendemokratisir secara lebih nyata.

Bagaimana dengan Golkar? Golkar amat rapih dan tertib, namun pola pokoknya masih sama dengan pola dasar yang dipakainya di masa-masa pemilu lalu. Golkar tetap didukung oleh jalur yang sama. Mungkin karena inilah antara lain ada yang menilai Golkar tidak terlalu dinamis. Kadar bahasa rakyat yang digunakan dianggap memerlukan peningkatan. Ini terutama diharapkan karena Golkar selalu dikaitkan dengan posisi dan misinya selaku pembaharu. Golkar dituntut memperbaharui dan memperbaharui terus menerus.

Bila dalam kampanye tampaknya PDI banyak memperoleh dukungan kalangan generasi muda, adalah menarik bahwa dalam pemilunya sendiri justru 80% pemilih dari kalangan generasi muda masih memilih Golkar. Fenomena bahwa waktu kampanye generasi muda ikut PDI, tapi waktu pemilihan kemudian memilih Golkar, perlu dibaca dengan saksama.

Dibanding Golkar dan PDI, yang paling ruwet keadaannya adalah PPP. Faktor internal dan eksternal jalin berjalin secara kompleks. Menurut Pranarka, secara internal terjadi konflik dalam diri PPP. Kemudian secara eksternal, adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi di kalangan umat Islam. Salah satu masalah misalnya, adalah keluarnya pengikut NU dari PPP. Ini semua merupakan hal yang berat bagi PPP. Dan karena keadaannya yang berat, akhirnya PPP harus memilih sikap bertahan. Pola behaviournya adalah pola kelompok politik yang harus bertahan. Selain itu, barangkali PPP ini banyak ditinggalkan oleh komponen-komponen yang lebih intelektual, moderat, maju dan lebih terbuka. Banyak yang masuk Golkar atau PDI atau walkout. Dan akhirnya di sana-sini dalam kampanye PPP masih tampak adanya kebringasan - yang selain karena banyaknya ditinggalkan oleh kalangan intelektual, juga karena pendukung yang fanatik.

Persoalannya sekarang menurut Pranarka adalah bagaimana mencari format baru supaya tetap dapat tumbuh berkembang ke masa depan. Apakah dalam tubuh PPP ini nantinya tak mungkin terjadi inovasi yang agak radikal ? Saya kira PPP harus mengadakan inovasi, misalnya saja dalam keterbukaan - yang betul-betul terbuka. Untuk ini terdapat arah perkembangan yang cukup baik, yakni bahwa partai politik itu tidak berdasarkan agama.

Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan aspirasi keagamaan nantinya?

"Sepertinya masih ada yang ingin memancing-mancing untuk membangkitkan masalah aspirasi Islam". Dana Pranarka sekali lagi mengingatkan agar jangan sampai salah membaca. Jika salah membaca, nanti ada yang menganggap seolah-olah walkoutnya NU dari PPP hanya karena pertimbangan-pertimbangan taktis: Dengan demikian nantinya NU akan dapat masuk PDI dan Golkar dan PPP sendiri. Untuk Golkar sendiri itu sudah akan menjadi persoalan, karena di dalamnya sudah ada Guppi, MDI, NU, sehingga arusnya semakin banyak. Sementara itu harus dicatat, yang ada hanya aspirasi pembangunan dan kebangsaan. Tidak ada aspirasi Islam, Kristen dan lain-lain. Begitu pula da-

Digitized by Google

Golkar amat rapih dan tertib, meski pola pokoknya masih sama dengan pola dasar yang dipakai dimasa-masa pemilu lalu.

lam PDI atau PPP sendiri. "Saya harapkan dalam PPP terjadi recovery. Bahwa dalam recovery itu nanti misalnya masih ada warna Islam, ini dapat saja. Tapi melihat perkembangan, PPP bisa saja menjadi terbuka, bersifat nasional. Hal ini dapat tercipta dari pemikiran keagamaan dari masyarakat yang makin terbuka.

Antara Ormas Dan Orpol

Terlepas dari itu, kejadian-kejadian antara NU dan PPP merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, apalagi bila dikaitkan dengan telah adanya 5 undang-undang bidang politik, termasuk undang-undang keormasan. Setelah lahirnya undang-undang bidang politik itu, timbul pertanyaan diseputar pola hubungan orpol dengan ormas, misalnya apakah peranan organisasi kemasyarakatan dan masihkah peranan itu punya dampak dalam kehidupan politik ?

Bagi Dr Pranarka, hubungan antara ormas dengan orpol adalah sangat penting. Undang-undang politik yang ada sekarang membawa ormas ke posisi selaku komponen dari masyarakat. Dan ormas adalah merupakan kekuatan sosial yang hadir di masyarakat secara lebih langsung. Tetapi sekarang ini ormas tidaklah merupakan kekuatan yang dapat membawa aspirasi dan kebutuhan kemasyarakatan menjadi keputusan kenegaraan.

Antara kenegaraan dan kemasyarakatan itu pada hakekatnya manunggal, tetapi rentangannya berlain-lainan. Ormas dapat bergerak dalam tatanan kemasyarakatan dan dapat bergerak sebagai kekuatan yang membangun konkrit - petani, guru, dan profesi lain. Tetapi ormas ini tidak mempunyai kekuatan untuk membawa aspirasi ketatanegaraan. Disinilah peran organisasi politik untuk membawa musyawarah kemasyarakatan menjadi musyawarah kenegaraan.

Menurut Pranarka, sekarang ini bila organisasi politik akan membuat program, adalah ideal untuk berdialog dengan ormas. Artinya, orpol mendapat masukan dan sumber dari ormas. "Dalam hal ini, mendapat sumber bukan berarti mendapat dukungan dari ormas". Dan sumber dari ormas ini kemudian dikonsensuskan menjadi program kenegaraan. "Oleh karena itu, ormas dapat mempengaruhi, karena organisasi politik hanya dapat mengenal dan melibatkan diri dengan aspirasi rakyat melalui kegiatan-kegiatan ormas, karena ormas itu merupakan aktualisasi dari masyarakat". Disini terjadi dialektika antara ormas dan orpol. Dengan ini ormas mempunyai posisi floating mass. Posisi floating itu terjadi karena bila salah satu ormas merasa tidak cocok lagi berdialog dengan orpol tertentu, ia dapat berdialog dengan orpol lainnya. Pranarka mencontohkan, bila NU misalnya sekarang ini merasa tidak ada lagi kecocokan berdialog dengan PPP, ia dapat berdialog dengan Golkar atau PDI dan seterusnya. "Jadi mereka tidak terikat. Dengan demikian akhirnya dapat mempengaruhi perubahan-perubahan politik, meskipun tak secara langsung". Tentunya yang dimaui adalah dalam pengertian program oriented. "Dan kalau bisa floating disini adalah floating dengan tetap mempunyai identitas. Yaitu floating yang membawakan dimensi kemajuan dan pembangunan. Bukan floating yang oportunis"☐ **BM/RA**

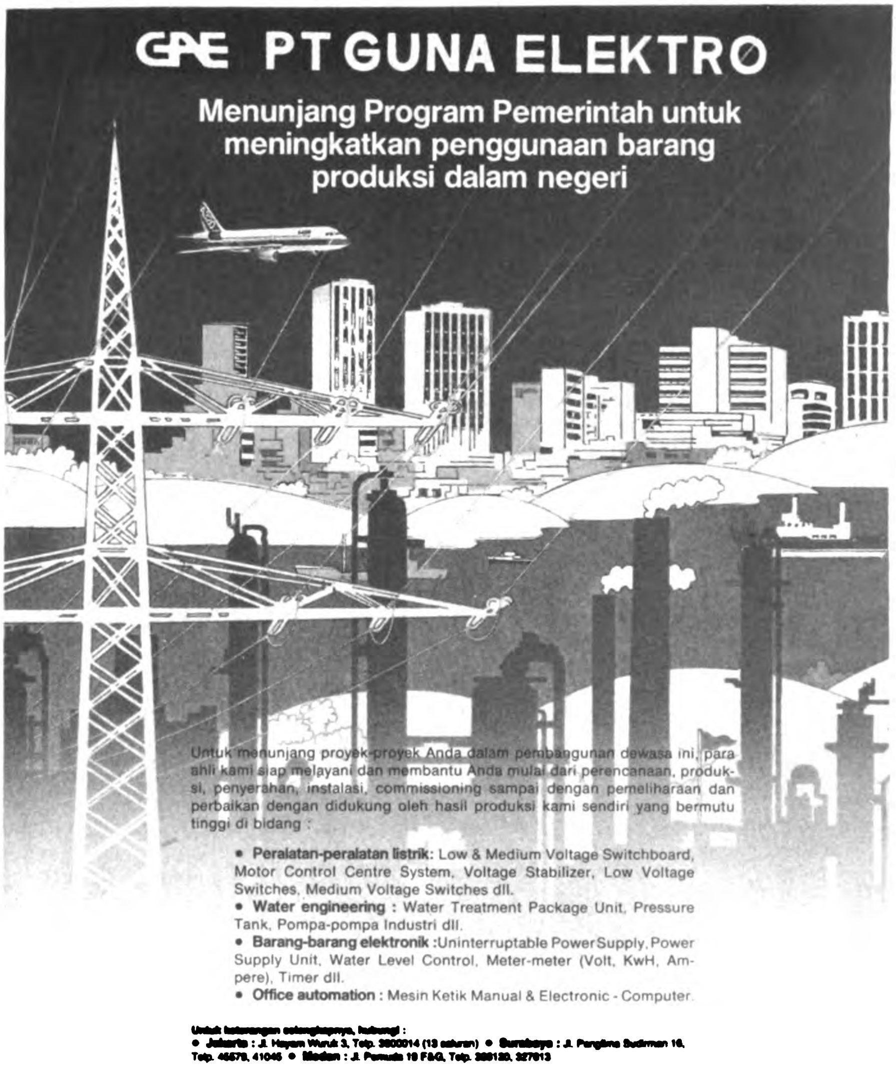

Digitized by Google

Segenap Pengasuh Majalah
MEDIA KARYA

Mengucapkan Selamat atas pengangkatan

Bapak Dr Edward Janner Sinaga

Menjadi

Direktur Jendral Pembinaan Pers dan Grafika
Departemen Penerangan RI

Digitized by Google

Oleh : Emil Salim

Pola Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan

Hasil pembangunan yang penting adalah tumbuhnya aspirasi baru mengenai kesejahteraan hidup yang didambakan manusia Indonesia. Semula, untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang-pangan. Nanti, mendambakan bagi dirinya, hidup yang sehat; pekerjaan; perumahan; mendambakan bagi anak-anaknya, pendidikan; jaminan sosial; kesempatan maju yang sama; dalam lingkungan hidup, dengan hukum yang adil dan berkualitas.

Tersimpul disini makna "pembangunan" yang lebih luas ketimbang "menaikkan pendapatan nasional," dan mengandung perluasan cakrawala mencakup dimensi kuantitas dan kualitas serta dimensi waktu yang mencakup antar generasi.

Karena itu perlu perluasan wawasan dalam menanggapi tantangan pembangunan masa depan.

Emil Salim

Konsep Wawasan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan memuat makna "mengolah sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan generasi masa kini, tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan mengolah sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya."

Tersimpul disini keperluan mengkaji ulang: macamnya sumber daya; makna kesejahteraan; tanggung-jawab generasi kini terhadap generasi nanti; dan kendala yang melekat pada konsep ini.

Macamnya sumber daya, terbagi atas:
(1) Sumber daya alam yang bisa diperbaharui dengan pendekatan "mengolah sumber daya alam ini tanpa mengurangi kemampuan sumber daya untuk memperbaharui diri supaya bisa tetap berfungsi", dan yang tidak bisa diperbaharui dengan pendekatan "teknologi agar bisa menghasilkan dan daur-ulang."
(2) Sumber daya manusia: dengan nilai kuantitatip (jumlah, pertumbuhan, persebaran); dan dengan nilai kualitatip (kemampuan kreatip, produktip sehingga yang dihasilkan melebihi yang dimakan dan dirusak):

Pembangunan mengolah sumber daya. Dengan pembagian sumber daya seperti ini timbul persoalan: lingkungan alam; lingkungan buatan manusia; lingkungan sosial.

Maka persoalan pembangunan berkaitan dengan masalah apa yang terjadi dengan sumber daya dalam lingkungan alam, lingkungan buatan manusia dan lingkungan sosial.

Makna kesejahteraan. Apabila keperluan untuk kelangsungan hidup (survival) sudah dicapai seperti tersimpul pada terpenuhinya 9 bahan kebutuhan pokok, maka kebutuhan manusia meluas mencakup berbagai segi kesejahteraan dengan muatan kuantitatip dan kualitatip.

Dalam mengejar kesejahteraan ini, berbagai dimensi tidak penuh ditampung oleh mekhanisme pasar yang mempengaruhi alokasi sumber daya, seperti: (1) segi kualitas lingkungan alam, "berapa nilai sumber daya yang habis terkuras, dsb."; (2) segi kualitas lingkungan buatan manusia, "berapa nilai air, udara dan ruang yang tercemar?"; (3) segi kualitas sosial, "bagaimana kepentingan yang miskin bisa diperjuangkan, apabila ia tidak memiliki sumber daya akibat kemiskinannya?".

Jawaban atas pertanyaan ini menghendaki intervensi Pemerintah menanggulanginya, baik dengan mengusahakannya secara langsung maupun dengan mengoreksi mekhanisme pasar.

Tanggungjawab antar generasi. Pembangunan berwawasan lingkungan memuat makna berkesinambungan bagaikan arus air mengalir, sehingga memuat unsur perobahan. Dalam proses perobahan ini maka pengolahan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perobahan kelembagaan berjalan seiring dengan keperluan memenuhi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Ini mengandung makna kesinambungan dalam kemampuan sumber daya menopang proses pembangunan ini.

Dan kemampuan sistem ekonomi menampung kebutuhan generasi masa depan (beserta sumber daya yang dibutuhkan dengan memperhitungkan perkembangan teknologi) dalam mengelola sumber daya di masa kini.

Kendala dalam konsep ini. Konsep ini memuat berbagai kendala yang membatasi usaha pembangunan berwawasan lingkungan, seperti berikut ini.

Perkembangan teknologi masa kini yang kebanyakannya menanggapi kebutuhan berdasarkan mekhanisme pasar yang sering tidak mengindahkan dimensi lingkungan dan kepentingan generasi masa depan. Contoh adalah perkembangan energi nuklir yang masih belum sanggup menjawab banyak pertanyaan lingkungan yang berkaitan dengan risiko yang dihadapi generasi masa depan. Hal ini mendorong keharusan untuk mengkaji ulang kemampuan dan posisi teknologi menopang pembangunan berwawasan lingkungan;

Kemampuan "biosphere" menyerap akibat perbuatan manusia. Kemampuan manusia dengan teknologi adalah "mengalihkan" sumber daya menjadi hasil buatan manusia. Teknologi belum sanggup "menciptakan" biosphere tambahan atau yang baru. Sehingga perkembangan teknologi harus tertuju pada mengurangi dampak negatif perbuatan manusia terhadap biosphere;

Kemampuan organisasi kemasyarakatan menanggapi tantangan persoalan baru yang ditimbulkan oleh: pertambahan jumlah penduduk; semakin kompleksnya permintaan kebutuhan masyarakat; terbatasnya kemampuan lingkungan mendukung jumlah dan permintaan manusia yang kian meningkat.

Digitized by Google

Pengembangan Pola Pembangunan ini

Hambatan pokok dalam mengembangkan pola pembangunan berwawasan lingkungan adalah bahwa unsur-unsurnya tidak tertampung dalam arus pemikiran ekonomi. Banyak dari unsur-unsur lingkungan tidak tercernakan oleh mekhanisme pasar. Sehingga banyak yang "lolos" dari penglihatan dan perhitungan penyusunan kebijaksanaan pembangunan.

Oleh karena pembangunan ekonomi masih merupakan tantangan pokok di masa depan, maka sewajarnyalah bila diusahakan supaya wawasan lingkungan diintegrasikan dalam wawasan ekonomi.

Dalam hubungan ini perlu dikembangkan peralatan analisa ekonomi lingkungan yang memuat: masalah pengolahan sumber daya yang dikonservasi; masalah pengolahan sumber daya yang menipis (depletion); masalah pengolahan sumber daya yang menjadi rusak; masalah pengolahan sumber daya yang menjadi semakin baik.

Dari berbagai sumber daya yang memerlukan prioritas perhatian dalam pengolahannya dengan wawasan lingkungan adalah: sumber daya air; sumber daya tanah; sumber daya hutan; sumber daya energi; sumber daya manusia.

Berbagai masalah lingkungan bertumpu pada 5 sumber daya ini, sehingga menimbulkan masalah kekeringan, banjir, erosi, kerusakan hutan, perobahan suhu, kerusakan keanekaragaman biologi, pencemaran, keracunan, dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya.

Untuk menanggulangi berbagai masalah lingkungan ini, perlu diusahakan pengembangan sumber daya air, tanah, hutan, energi dan manusia dengan pertimbangan lingkungan dalam arus fikiran ekonomi dan teknologi.

Wawasan lingkungan yang dimaksud mencakup segi-segi lingkungan alam, lingkungan buatan manusia dan lingkungan sosial. Peralatan analisa ekonomi dengan wawasan lingkungan yang relevan dengan pengolahan kelima-lima sumber daya yang strategis ini perlu dikembangkan.

Usaha ini tidak berhenti pada pengembangan peralatan analisa, tetapi harus bermuara pada penuangan peralatan analisa ini dalam kebijaksanaan Pemerintah.

Peranan Pemerintah adalah besar dalam pembangunan negara berkembang, dan mencakup hal-hal berikut.

Peralatan kebijakan menetapkan sumber pendapatan Pemerintah, seperti pajak, bea, cukai, pungutan, dan lain lain;

Peralatan kebijakan menetapkan sumber pengeluaran Pemerintah, seperti anggaran rutin dan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Kegiatan berproduksi langsung melalui Badan Usaha Milik Negara;

Hak dan kewajiban menetapkan peraturan

Kemampuan persuasi melalui penerangan dan pendidikan.

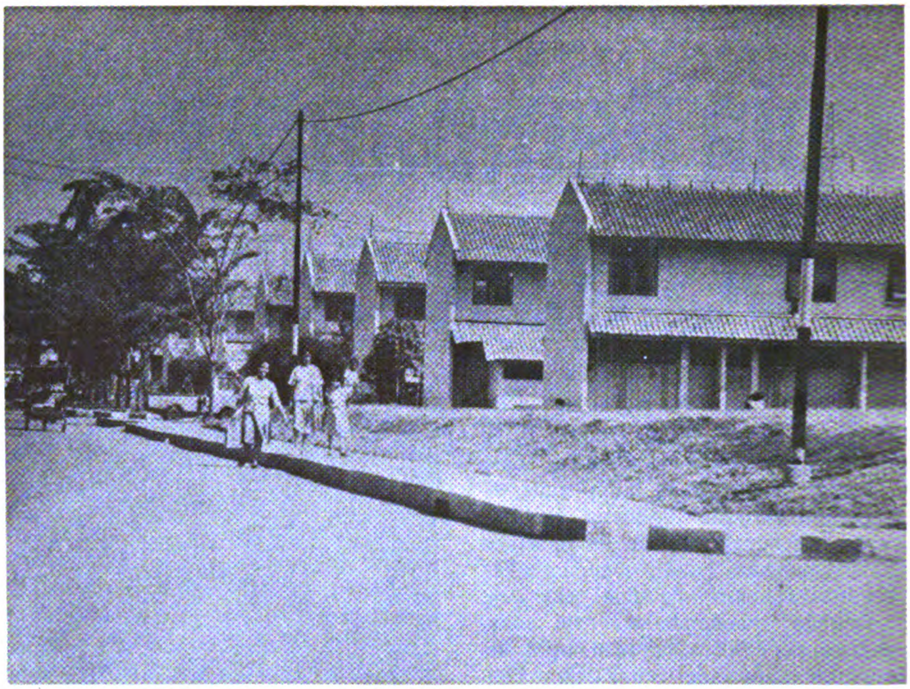

Mendambakan perumahan

Sungguhpun peranan Pemerintah penting, namun pelaksanaan pembangunan umumnya berada di tangan masyarakat yang mengorganisasi diri dalam; organisasi politik dengan motivasi politik; organisasi ekonomi dengan motivasi ekonomi; organisasi sosial dengan motivasi sosial; organisasi swadaya masyarakat dengan motivasi kemanusiaan.

Garis-garis Besar Haluan Negara perlu memberi dasar bagi pendekatan pola pembangunan berwawasan lingkungan, dengan kewajiban kepada Pemerintah mengusahakannya dalam ruang lingkup masyarakat yang berhak untuk berperan-serta baik melalui jalur organisasi politik, ekonomi, sosial dan swadaya masyarakat.

Peralatan analisa dan kebijakan Pemerintah ditujukan:

1. mengoreksi mekanisme pasar untuk menampung pertimbangan lingkungan dalam pembangunan;
2. menumbuhkan segi kualitatif pembangunan yang tidak bisa dicapai melalui tindakan ekonomi biasa;
3. menciptakan iklim usaha yang merangsang pertumbuhan organisasi-organisasi politik, ekonomi, sosial dan swadaya dalam arus jalur motivasi masing-masing.

Oleh karena hakekat masalah lingkungan bersifat saling kait-mengkait (interdependen) dalam hubungan lintas sektor maka sangatlah penting hal berikut ini.

Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan terdapat sedekat mungkin dengan lokasi kegiatan. Ini berarti dikembangkannya proses desentralisasi dengan debirokratisasi dalam pelaksanaan pembangunan dan lebih banyak peluang diberikan kepada prakarsa masyarakat untuk secara mandiri mengembangkan daya kreatifitasnya.

Proses perencanaan pembangunan memerlukan faktor integrasi antar sektor yang diharap bisa dicapai antara lain melalui pendekatan perencanaan daerah dan antar daerah. Perencanaan pengembangan tata ruang yang mencakup perencanaan penggunaan lahan, hutan dan sumber daya merupakan penunjang perencanaan daerah.

Mekanisme aparatur Pusat dan Daerah disempurnakan, dan hubungan antara Pusat dan Daerah dikembangkan dengan maksud memberi ruang gerak yang lebih luas kepada daerah.

Pandangan ke depan

Menjelang tahun 2000 proses pembangunan Indonesia dipengaruhi oleh keperluan lima hal.

Kesatu, meningkatkan mobilisasi sumber daya dalam negeri;

Kedua, menanggulangi tekanan pada sumber daya luar negeri;

Ketiga, merombak struktur ekonomi Indonesia dari berat sebelah mengolah sumber daya alam mentah (pertanian dan pertambangan) menjadi struktur ekonomi berimbang (pertanian dengan industri dan jasa);

Keempat, menanggapi akibat pertambahan penduduk Indonesia dari 168 juta orang (1987) menjadi 212 juta orang (2000);

Kelima, mengembangkan kualitas hidup dengan tingkat kemiskinan yang berkurang dalam masyarakat yang ber-keadilan sosial.

Keperluan yang begitu luas memerlukan sumber daya alam dan manusia. Dalam hubungan inilah sangat penting mengusahakan tercapainya sasaran ini dalam pola pembangunan berwawasan lingkungan. Supaya cita-cita yang bersifat jangka panjang ini bisa tercapai, tidak hanya untuk generasi masa kini tetapi juga generasi masa depan.□

Digitized by Google

Oleh : Prof. Bintoro Tjokroamidjojo

Menuju Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Aspek Kelembagaan Formal

Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya masyarakat Bangsa yang bersifat perubahan sosial meliputi berbagai dimensi kehidupan menuju ke arah kemajuan sosial dengan cita-cita Bangsa tersebut.

Pembangunan Nasional seperti itu meliputi dimensi pembangunan ekonomi baik pertumbuhan maupun keadilannya. Ada dimensi modernisasi dalam peningkatan pengembangan ilmu, teknologi, dan perubahan-perubahan mutu kehidupan. Dimensi lain adalah pembangunan bangsa, pemudaran kaitan primordial ke arah identitas dan ikatan kepentingan sebagai bangsa. Dimensi lain yang penting adalah pembangunan mutu kualitas manusia dikaitkan dengan dimensi lingkungan dan berkembanglah pendekatan ekologi dalam pembangunan nasional.

Yang terakhir ini pun dalam pemikiran berkembang melalui tahapan-tahapannya "Only One Earth" dari Barbara Ward, "The Steady State Economy" dari Herman Daly, "Econecol" dari Ramsay dan Anderson serta "Eco Development" dari Maurice Strong. "Sought to infuse the environmental dimensions into thinking on international strategies of development (Rajni Kotari). "The concept of eco-development based on harmonizing the economic, ecological and social factors so as to make best use of indigenous resources and skills in producing a sustainable pattern of development that will best accord with the values, needs and aspiration of the people concerned", (Maurice F. Strong).

"The Government of Indonesia is fully aware that the problems of environment should be given more consideration in the over all economic and social development of the country" dalam Environmental problems of Indonesia.

Pada akhir-akhir ini pemikiran tentang pembangunan manusia dalam keserasian dengan lingkungannya dikembangkan dalam pendekatan "sustainable development" (sering diterjemahkan dengan pembangunan yang lestari).

Namun demikian patut dicatat bahwa persepsi negara maju tentang pembangunan berwawasan lingkungan lain daripada di negara-negara baru membangun. Kepustakaan "Barat" lebih melihat masalah lingkungan hidup karena affluence (tingkat high mass consumption, tingkat waste yang tinggi), sedang di negara-negara baru berkembang tidak bisa dipertentangkan antara pembangunan dan kelestarian daya dukung lingkungan hidup. Masalah-masalah lingkungan hidup lebih karena keterbelakangan dan kemiskinan. Dalam jangka panjang diusahakan keserasian antara kegiatan-kegiatan manusia dalam pembangunan dengan mutu lingkungan hidup.

Pada dasarnya wawasan lingkungan ini adalah menjaga siklus-siklus yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan yaitu siklus hidrologi, yang mengatur tata perairan, siklus hara yang mengatur mata rantai makanan dan siklus energi dan bahan yang mengatur penggunaan dan perubahan bentuk energi, dan siklus-siklus lain yang merupakan struktur dasar dari ekosistem.

Apa sebab perlunya perhatian mengenai keserasian pembangunan kualitas manusia untuk meningkatkan bersama kualitas hidupnya (lingkungan sosial) dengan kelestarian keseimbangan daya dukung lingkungan hidup, karena kegiatan-kegiatan pembangunan dapat mengakibatkan: Pencemaran, baik pencemaran fisik dan pencemaran lingkungan, dan gangguan mendasar terhadap proses ekosistem.

Memang ada koreksi alam (melalui proses homoestatik = dipulihkan kembali oleh sistem lingkungan hidup itu sendiri), tapi pada umumnya perlu koreksi "Kebijaksanaan" (Dr.M. Soerjani). Dan disinilah berperan Pemerintah dan kelembagaan sosial. Diperlukan usaha untuk memulihkan gangguan keseimbangan sistem lingkungan hidup (Prof.Dr. Emil Salim).

Pembangunan Nasional Indonesia

Indonesia dewasa ini juga sedang melakukan usaha besar baik oleh Pemerintah dan Rakyat yaitu melaksanakan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional yang kita lakukan bersama ini sejak tahun 1983 dan kemudian tahun 1985 mendapat penegasan dan kesepakatan bersama yaitu Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, ber Bangsa dan ber Negara.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dewasa ini bisa dilihat juga diusahakan dalam suatu pendekatan sistem. Ada Landasannya, ada Hakekatnya, ada Tujuannya, dan kemudian ada Strateginya (kebijaksanaan dasar dalam rangka mencapai Tujuan) serta sistemnya (cara aturan/kelembagaannya).

Pembangunan Nasional Indonesia landasannya adalah Pancasila dan UUD 1945, dan berusaha untuk mewujudkan Tujuan Nasional dan Tujuan Pembangunan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Hakekat Pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dimensi pertama adalah pembangunan manusia yang seimbang, selaras, serasi antara kehidupan materiil dan spiritual. Dimensi kedua mempunyai tiga subdimensi yaitu semua golongan, semua daerah, dan generasi kita serta generasi mendatang.

Proses Pembangunan Nasional Indonesia mengusahakan (strateginya) secara serasi dan berkaitan, Trilogi Pembangunan

Digitized by Google

Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila

yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bersama dan saling menunjang Pembangunan Nasional akan memperkuat Ketahanan Nasional begitupun sebaliknya.

Dilihat dari dimensi waktu maka strategi pembangunan Indonesia dalam jangka panjang lebih berdasar pendekatan pembangunan bangsa dalam upaya modernisasi. Dilihat dari perencanaan pembangunan jangka menengah lebih berdasar pendekatan pembangunan sosial ekonomi.

Dalam Pembangunan Nasional yang bersamaan dengan memperkuat Ketahanan Nasional tersebut, dilakukan berdasar Wawasan Nusantara, yaitu wawasan atau cara pandang melihat Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, baik geo-politik maupun ideologi, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Bhineka Tunggal Ika.

Dalam Pembangunan nasional Indonesia inipun dimensi wawasan lingkungan terdapat di dalamnya. Bahkan akan lebih terasa untuk masa-masa mendatang.

Ini landasannya kuat dalam salah satu pokok Hakekat Pembangunan kita yaitu "Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya".

Selanjutnya dasar-dasar kebijaksanaan dapat kita lihat dalam ketentuan-ketentuan UU No. 4/1982. Bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. (Rumusan menimbang UU No. 4/1982)

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup (Bab I pasal 1 ayat 13 UU No. 4/1982).

Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Dasar-dasar kebijaksanaan.

Aspek administrasi atau pengelolaan ini juga sudah ada pegangan-pegangannya dalam ketentuan UU No. 4/1982. Disinilah diberikan petunjuk bagi kelembagaan formal.

"Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup".

Dasar-dasar pokok pengelolaan tercantum dalam GBHN yang menggariskan pokok-pokok pengarahan kebijaksanaan di bidang Sumber-sumber Alam dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Inventarisasi dan evaluasi sumber alam perlu terus ditingkatkan dengan tujuan untuk lebih mengetahui dan dapat memanfaatkan potensi sumber alam baik di darat, laut maupun udara berupa tanah, air, energi, flora, fauna, dan lain-lain yang sangat diperlukan bagi pembangunan.

Dalam penelitian, penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber alam serta dalam pembinaan lingkungan hidup perlu digunakan teknologi yang sesuai dan pengelolaan yang tetap sehingga mutu dan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan, untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diadakan penilaian yang seksama terhadap pengaruhnya bagi lingkungan hidup, agar pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidupnya dapat dilakukan sebaik-baiknya. Penilaian tersebut perlu dilakukan secara terpadu, baik sektoral maupun regional, dan untuk itu perlu dikembangkan kriteria baku mutu lingkungan hidup.

Rehabilitasi sumber daya alam berupa hutan, tanah dan air yang rusak perlu lebih ditingkatkan lagi melalui pendekatan terpadu daerah aliran sungai dan wilayahnya. Dalam hubungan ini program penyelamatan hutan, tanah, dan air perlu dilanjutkan dan makin disempurnakan.

Pendayagunaan daerah pantai, wilayah

Digitized by Google

laut dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

Kemudian pedoman-pedoman pengelolaan/administrasi pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang (kesejahteraan manusia).
(Konsideran Undang-Undang No. 4/1982).

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 4/1982. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya; terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup; terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang; terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sumber daya alam dipergunakan atau diatur penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat (Sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat). (Pasal 10 UU No. 4/1987).

2. Pengelolaan melalui perencanaan dan menejemen lingkungan.

Pembangunan yang memuat unsur perubahan sehingga menimbulkan ketidak-seimbangan lingkungan, perlu dilaksanakan dengan cara yang secara sadar memungkinkan pemulihan keseimbangan lingkungan hidup itu kembali. (Prof.Dr. Emil Salim).

Dalam mengusahakan kelestarian kemampuan lingkungan perlu koreksi Iptek dan sosbud dan lain-lain disamping koreksi alami sendiri (Dr. M. Soerjani).

Perlu a certain degree of planning (Ramsay and Anderson). "To correct the deficiencies in present ecosystem — the market must non only be understood, it must be modified or, frankly speaking, manipulated to achieve desired ends. We will call this manipulation the "planning process". (Environmental Impact Analysis at the project stage". J. Mc Evoy III dan Th. Dietz).

Hal ini juga dicantumkan dalam pasal 1 UU No. 4/1982 Seperti telah disebutkan terdahulu (upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup). Dalam bidang perencanaan juga sudah mulai ditemui adanya "Weaknes of costs-benefit analysis" dilihat dari segi implikasi terhadap lingkungan. Karena itu antara lain dikembangkan Analisis dampak lingkungan. Semua ini memerlukan perhatian terhadap asas-asas perencanaan dan menejemen, identifikasi masalah, perumusan kebijaksanaan, penanggulangan melalui program terpadu, pengendalian dan pengawasan aspek lingkungan dalam pembangunan nasional. Bahkan untuk memperkuat hal tersebut perlu dilandaskan dalam pengembangan dan tertib hukum (administrasi lingkungan).

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah

Pengelolaan Pembangunan pada tingkat Nasional mempunyai kadar dimensi politik dan ekonomi yang tinggi. Pembangunan Indonesia masih perlu ditekankan pada dimensi pembangunan Bangsa, persatuan dan kesatuan sebagai Negara maupun sebagai masyarakat bangsa. Wawasan Nusantara sebagai suatu wawasan integratif tetap perlu dijadikan pedoman dalam pengelolaan pembangunan.

Demikian pula dimensi ekonomi, yang didasarkan atas suatu kerangka rencana makro ekonomi dengan sasaran-sasaran pertumbuhan melalui investasi dan tabungan baik secara nasional maupun diagregasinya secara sektoral.

Dalam lingkup Daerah, maka dimensi

Pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Digitized by Google

sosial dan lingkungan akan makin terasa. Dimensi sosial karena pengelolaan pembangunan pada tingkat Daerah bersifat kontak langsung atau usaha pelibatan peranserta aktif masyarakat. Peran pengelolaan oleh Pemerintah sebagai "agent of change" adalah transfer of teknologi, transfer nilai, pembinaan kapasitas dan menggerakkan partisipasi. Disini menjadi penting arti dan kondisi sosial, situasi masyarakat dan lain-lain.

Di lain pihak pengelolaan pembangunan di tingkat Daerah, berarti pengelolaan pada tingkat lokasi. Kondisi lokasi, kelaikan lokasi dan dampak pada lokasi dari suatu usaha/kegiatan pembangunan menjadi penting untuk diperhatikan. Bisa dikatakan bahwa pengelolaan pembangunan di Daerah adalah juga pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. Aspek pengembangan wilayah menjadi penting.

"Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diadakan penilaian yang seksama terhadap pengaruh-pengaruh bagi lingkungan hidup, agar pengamanan terhadap pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidupnya dapat dilakukan sebaik-baiknya. Penilaian tersebut perlu dilakukan secara terpadu baik sektoral maupun regional, dan untuk itu perlu dikembangkan baku mutu lingkungan hidup". (GBHN).

Pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Daerah lebih lagi perlu diperhatikan dalam tingkat proyek. Pengembangan ANDAL agar ada environmental impact analysis at the project stage/level. Dalam suatu wilayah pun baku mutu lingkungan bisa berbeda bagi maksud/keperluan yang berbeda. Misalnya baku mutu air, lahan, dan lain-lain.

Memang ada permasalahan bahwa dari segi kriteria pengelolaan lingkungan hidup, wilayah bisa berbeda dengan wilayah administratif dalam pengelolaan pembangunan. Wilayah Daerah Aliran Sungai, Daerah Kawasan Industri misalnya.

Aspek kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup

Pengelolaan pada dasarnya adalah masalah kelembagaan. Bagaimana kebijaksanaan dan perangkat perundang-perundangannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bagaimana kelembagaan menejemen lingkungan seperti perencanaan, pengendalian dan pengawasan. Karena masalah pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya bersifat kelembagaan yang penting adalah koordinasi. Kesemuanya itu menuntut adanya tatanan kelembagaan untuk mendukung kebijaksanaan, perencanaan, menejemen aspek lingkungan dalam pembangunan.

Dasar dari aspek kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup adalah kebijaksanaan yang tertuang dalam perangkat perundang-undangan yang konsisten (a consistent policy frame work). Dalam hal ini sudah ada UU No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbagai ketentuan di dalamnya telah dikemukakan terdahulu.

Dalam hal ini sebetulnya masih terasa adanya beberapa kekurangjelasan misalnya dalam pengertian lingkungan hidup meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati dan lingkungan sosial. Yah jadinya semua aspek pembangunan termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Tetapi pada penggunaan kata lingkungan yang sama artinya dengan lingkungan hidup menurut UU tersebut, kesan kita hanya lingkungan fisik saja. (Dampak lingkungan). Dan masih ada lain lagi.

Pada pokoknya adalah suatu perkembangan penting dalam Pembangunan Nasional Indonesia adanya perangkat ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan atau kebijaksanaan pembangunan Nasional berwawasan lingkungan. Sebagai tindak lanjut masih diperlukan pekerjaan rumah cukup banyak untuk dapat meliputi berbagai aspek lingkungan dalam pembangunan yang belum ada dasar kebijaksanaan pengaturannya.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah kewajiban dan hak setiap orang, namun "Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan". Kemudian "Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan ling-

Kondisi lokasi, kelaikan lokasi dan dampak pada lokasi penting untuk diperhatikan.

Digitized by Google

kungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup".

Dua ketentuan lain yang punya implikasi pada kelembagaan pemerintah (formal) adalah pasal 16 dan 17 dan UU No. 4/1982: "Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah". Hal ini sudah ada yaitu PP no. 29 tahun 1986. "Ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan perusahaan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilaksanakan secara menyeluruh dan atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan".

Namun yang terpenting adalah ketentuan Kelembagaan Bab V Pasal 18 yang untuk memudahkan disini dikutip pula sepenuhnya.

Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri dan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, secara sektoral, dilakukan oleh departemen/lembaga non departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi pada hakekatnya penataan dan manajemen lingkungan hidup dalam pembangunan nasional adalah kewajiban semua jajaran lembaga pemerintahan dengan upaya keterpaduannya oleh seorang Menteri. Dalam hal ini menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Perlu digaris bawahi bahwa keterpaduan di tingkat daerah adalah oleh pemerintah Daerah cq Gubernur/Kepala Daerah.

Masalah lingkungan hidup jelas ditangani oleh hampir semua Lembaga pemerintahan sebagai bagian dari lingkup kegiatannya. Pertanian, Kesehatan, Industri, Perhubungan, PU, bahkan sosial ataupun Departemen Agama. Oleh karena itu fungsi Koordinasi atau Koordinasi fungsional pengelolaan lingkungan hidup adalah penting sekali. Disinilah letak fungsi Meneg. KLH seperti dirumuskan sebagai berikut: Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan kependudukan dan pengelolaan lingkungan hidup; Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada huruf a. di atas; Mengkoordinasikan dan menangani segala kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Koordinasi dan pengaturan pengelolaan di tingkat Nasional perlu ditujukan kepada pembangunan yang kritis lingkungan seperti DAS, daerah-daerah pemukiman kritis, daerah padat industri atau kawasan industri, air tanah perkotaan, penghijauan dan reboisasi, hutan kesepakatan, daerah pantai kritis, daur ulang limbah dan lain-lain.

Berbagai peraturan perundangan memang telah diterbitkan untuk itu antara lain; PP Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air. PP Nomor 23 tahun 1982 tentang irigasi. UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Keppres Nomor 48 tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta - Bogor - Puncak - Cianjur di luar DKI Jakarta, Kodya Bogor, Kota Administratif Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong. Inpres tentang Penghijauan dan Reboisasi. Keppres Nomor 76 tahun 1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak. SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Menteri PU tentang Penanganan Konservasi Tanah dalam rangka pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas. Dalam hal ini sebagai sekedar contoh saja.

Di bidang perencanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup semestinya dilaksanakan oleh Badan-badan perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah, terutama kelembagaan yang bertanggungjawb dalam perencanaan proyek-proyek pembangunan, lembaga penanaman modal di tingkat Pusat dan daerah, perencanaan tata kota dan tata daerah, kawasan industri, DAS, tata guna tanah, dan lain-lain.

Mengenai pengendalian termasuk pencegahan dan penanggulangan masih perlu penataan perundangannya. Berdasar peraturan perundangan yang ada Pemerintah Daerah dapat berperan dalam hal ini.

Di bidang pengawasan disebut oleh U.U. "Pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Patut diakui bahwa Lembaga-lembaga pengawasan seperti itu belum "equiped" untuk mengawasi aspek lingkungan ini.

Apabila dikaji secara umum maka ba-

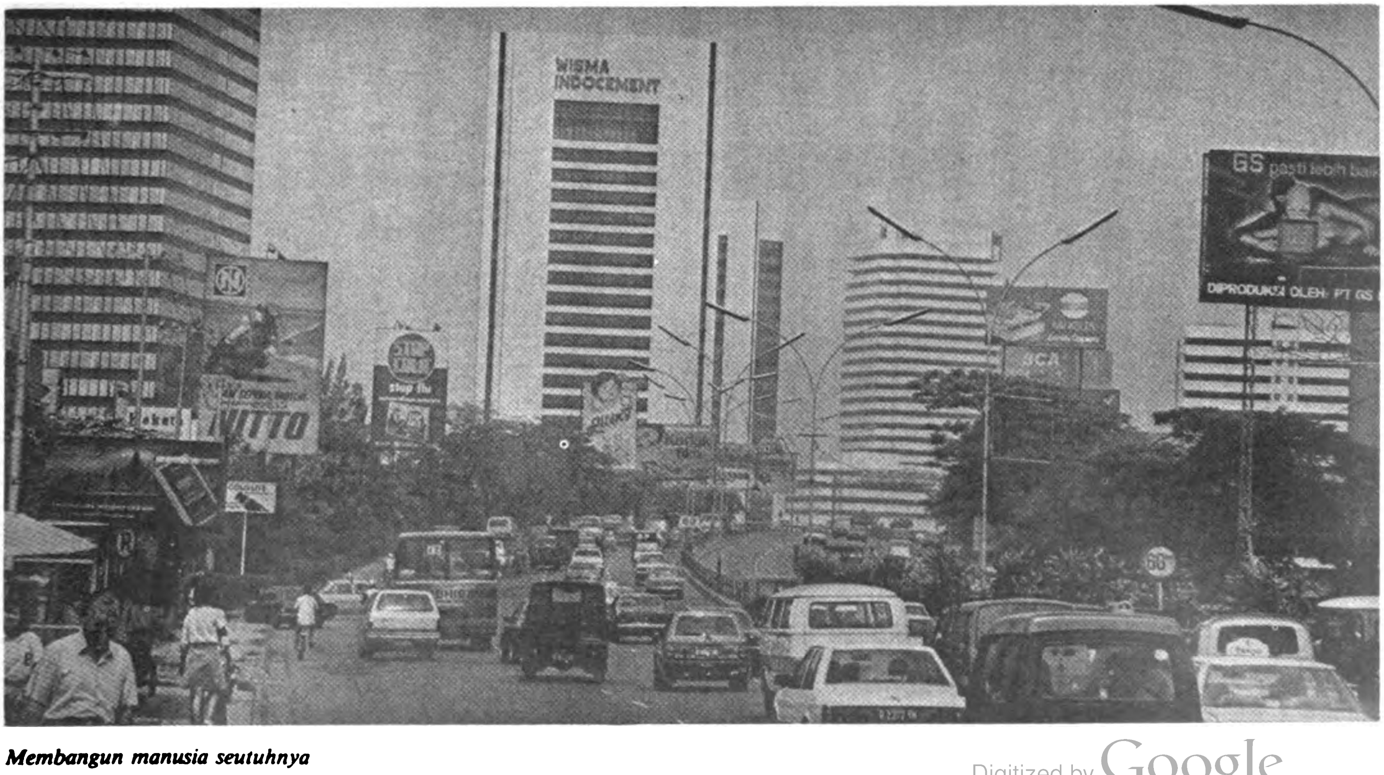

Membangun manusia seutuhnya

Digitized by Google

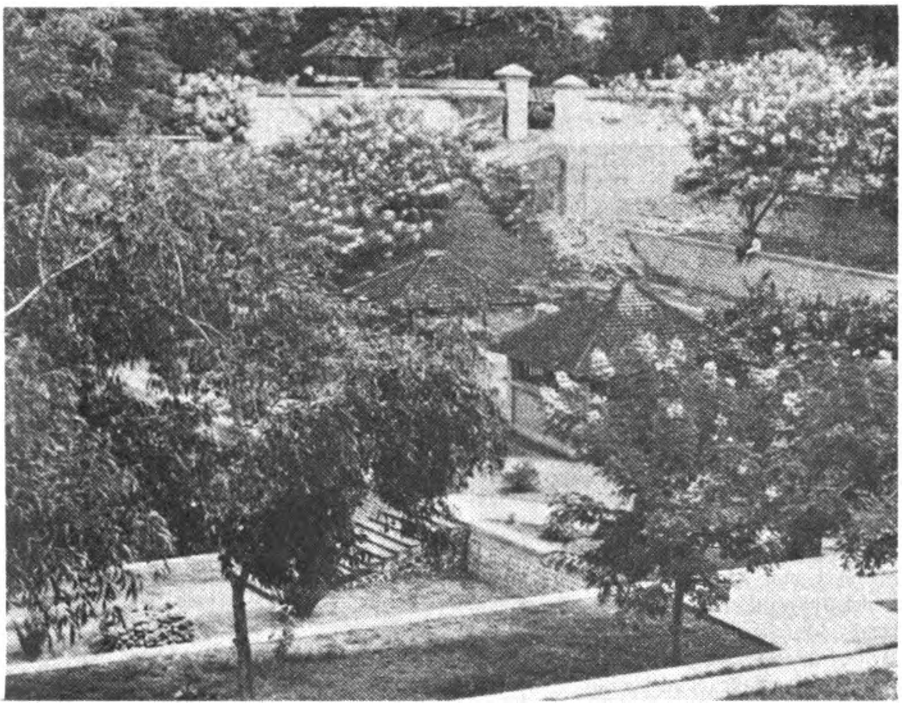

Pembangunan nasional akan memperkuat ketahanan nasional

nyak upaya kedepan untuk memfungsionalkan "kewajiban" lembaga pemerintahan tersebut, bahkan "awareness" terhadap adanya ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain melalui pendidikan dan latihan dikalangan aparatur Pemerintah.

Di tingkat Daerah sesuai dengan UU Nomor 5/1974 maka koordinasi pembangunan berwawasan lingkungan, artinya pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan daerah berada di tangan Gubernur Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 4 tahun 1982: "Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan Nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" Untuk itu ada aparatnya yaitu Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Sekretariat Wilayah Daerah.

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 tentang Pedoman dan Tata Kerja Setwilda dan Sekretariat DPRD, bahwa lembaga yang mengelola lingkungan hidup di Daerah terdapat pada Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada Setwilda yang terperinci sebagai berikut:

Pada Setwilda tipe A. Biro tersebut terdapat Asisten Kesra (Asisten III pasal 51 sampai dengan 54) dengan jumlah Bagian sebanyak 3 (tiga) buah, yaitu; Bagian Kependudukan, Bagian Lingkungan Pemukiman Perkotaan, Bagian Lingkungan Pemukiman Pedesaan.

Pada Setwilda Tipe B. Biro tersebut terdapat pada Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra (Asisten II pasal 82) dengan jumlah Bagiannya sama dengan tipe A tersebut di atas.

Pada Setwilda tipe C. Biro tersebut terdapat pada Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra (Asisten II pasal 105 sampai 106) dengan jumlah Bagiannya yang berbeda dengan kedua tipe di atas, yaitu; Bagian Kependudukan, Bagian Lingkungan Pemukiman Perkotaan, Bagian Lingkungan Pemukiman Pedesaan, Bagian Ketenagaan Kerja.

Dari kedua tipe Setwilda tersebut di atas (tipe A dan tipe B) tidak tampak Bagian yang mengelola tentang Ketenagaan Kerja (bahan terlampir).

Pada tingkat Daerah, lembaga yang mengelola Kependudukan dan Lingkungan Hidup telah diatur dengan Peraturan Daerah setempat. Sebagai bahan perbandingan, disampaikan 2 (dua) pola peraturan Daerah, yaitu:

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda dan Sekretariat DPRD (Pasal 83 sampai dengan 88). Pada Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup mempunyai 4 (empat) Bagian, yaitu; Bagian Kependudukan; Bagian Pembinaan Lingkungan Pemukiman; Bagian Pengendalian Kebersihan, Air Minum dan Penghijauan; Bagian Perbaikan Lingkungan.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 tahun 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwilda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat DPRD (pasal 91 sampai dengan 97).

Pada Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup hanya mempunyai 3 (tiga) Bagian, yaitu: Bagian Kependudukan; Bagian Lingkungan Pemukiman Perkotaan; Bagian Lingkungan Pemukiman Pedesaan.

Kalau dilihat dari tipe Setwilda termasuk tipe C (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 tahun 1980).

Pada peraturan perundang-undangan khususnya di tingkat Daerah, terdapat perbedaan ruang lingkup pengelolaan Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Namun juga dalam kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan daerah aspek lingkungan hidup juga harus diperhatikan oleh Bappeda, karena Bappeda yang mengkoordinasikan proyek-proyek/kegiatan-kegiatan sektoral maupun Daerah sendiri. Koordinasi juga lebih terasa penting antara unit-unit perencana dan pelaksana di tingkat Daerah dalam tata ruang, tata guna tanah, kesehatan lingkungan, pemukiman dan tata air. Perencanaan dan standar-standar pengelolaan di bidang ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU tetapi juga Direktorat Jenderal Agraria. Ditjen. Agraria mempunyai Direktorat Agraria Propinsi dengan Sub. Dit. Tata Guna Tanah, dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya dengan seksi Tata Guna Tanah.

Khusus mengenai perencanaan kota kejelasan pembagian tugas dan tanggungjawab Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum sesuai dengan fungsinya dijabarkan dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri PU Nomor 650-1595 dan Nomor 503/Kpts/1985 tentang tugas-tugas dan tanggungjawab Perencanaan Kota. Kemudian ada Biro Planologi Kehutanan yang kemudian, dikembangkan menjadi Balai Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, mengkoordinasikan soal Kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan. Jadi koordinasi di sini tidak hanya menyangkut aparat Pemerintah Daerah tetapi juga aparat Pusat.

Gubernur melalui Bappeda melakukan koordinasi fungsional perencanaan pembangunan daerah berwawasan lingkungan dan Gubernur melalui Sekwilda dan aparatnya mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

Dalam koordinasi baik di tingkat perencanaan tetapi juga dalam pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perusakan lingkungan masih banyak perlu ditingkatkan.

Kecuali aspek perangkat kebijaksanaan dan perundang-undangan, perangkat kelembagaan dan terutama aspek koordinasi fungsional, maka penting pula sebagai bagian atau pendukung aspek kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah aspek Pendidikan, Hukum dan Kesadaran Lingkungan Hidup Masyarakat.

Di sini peranan Universitas-universitas dengan Pusat Studi Lingkungannya serta lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat menjadi penting. Peranan mereka dalam the force of opinion dan people's centered development menentukan. Perlu dikembangkan iklim agar terdapat minat dan semangat keswakaryaan pengelolaan lingkungan hidup dari masyarakat sendiri. Segi ini lebih terasa pada pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Daerah. □

Digitized by Google

Menata Jakarta Yang Longgar

Tahun ini Jakarta menginjak usia 460 tahun. Tentu banyak persoalan yang mengganjal, seiring dengan prestasi yang membanggakan. Sebagai kawasan yang dihuni lebih dari tujuh juta manusia saat ini, ditambah fungsi dan posisinya sebagai ibukota negara, banyak dimensi yang harus dikembangkan oleh Jakarta. Untuk ini semua diperlukan kerangka strategis baik dari segi konsepsi pengembangan, maupun teknis pelaksanaannya.

Untuk mengetahui gambaran itu semua sekilas, *Media Karya* - melakukan wawancara khusus dengan Gubernur DKI Jakarta R Soeprapto yang dirangkum dalam laporan berikut ini.

Sebagai ibukota negara yang dihuni tujuh juta manusia lebih, Jakarta di satu sisi menyimpan harapan dan janji, tapi di sisi lain ibukota ini memendam ribuan problema. Persoalan yang mengancam bisa bermacam-macam. Tapi secara sederhana bisa disimpulkan, apapun masalah Jakarta sebenarnya berpangkal pada kepadatan penduduk. Atau dengan kata lain, persoalan Jakarta sebenarnya berpangkal pada masalah sosio-ekologis.

Sebagai ibukota negara yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan, Jakarta memiliki berbagai kelebihan yang tidak dipunyai sebuah dusun di Jawa Tengah atau Irian Jaya. Gemerlap di malam hari, prasarana yang relatif lebih canggih serta pola-pola kemapanan sosial yang mengemuka, menyebabkan Jakarta menjadi incaran. Orang tidak perduli mau jadi apa di ibukota, yang penting hadir dan ada di tempat ini. Persoalan yang muncul kemudian akibat kehadirannya, tidak diperhitungkan.

Orang nekad berlomba masuk Jakarta. Sementara itu orang jadi ngeri mendengar dan menyaksikan kepapaan hidup di metropolitan dimana gedung-gedung megah bertingkat berdiri anggun dikelilingi gubuk reot. Mengapa? Karena Jakarta yang ganas, juga menjanjikan kemudahan. Di Jakarta, si gembel rasanya sah untuk bermimpi kalau besok dia akan menjadi jutawan baru. Sementara itu di Jakarta juga sah orang cemas kalau kekayaan yang hari ini bertumpuk-tumpuk, besok bisa ludes entah kemana. Itulah Jakarta.

Karena problema Jakarta sebenarnya

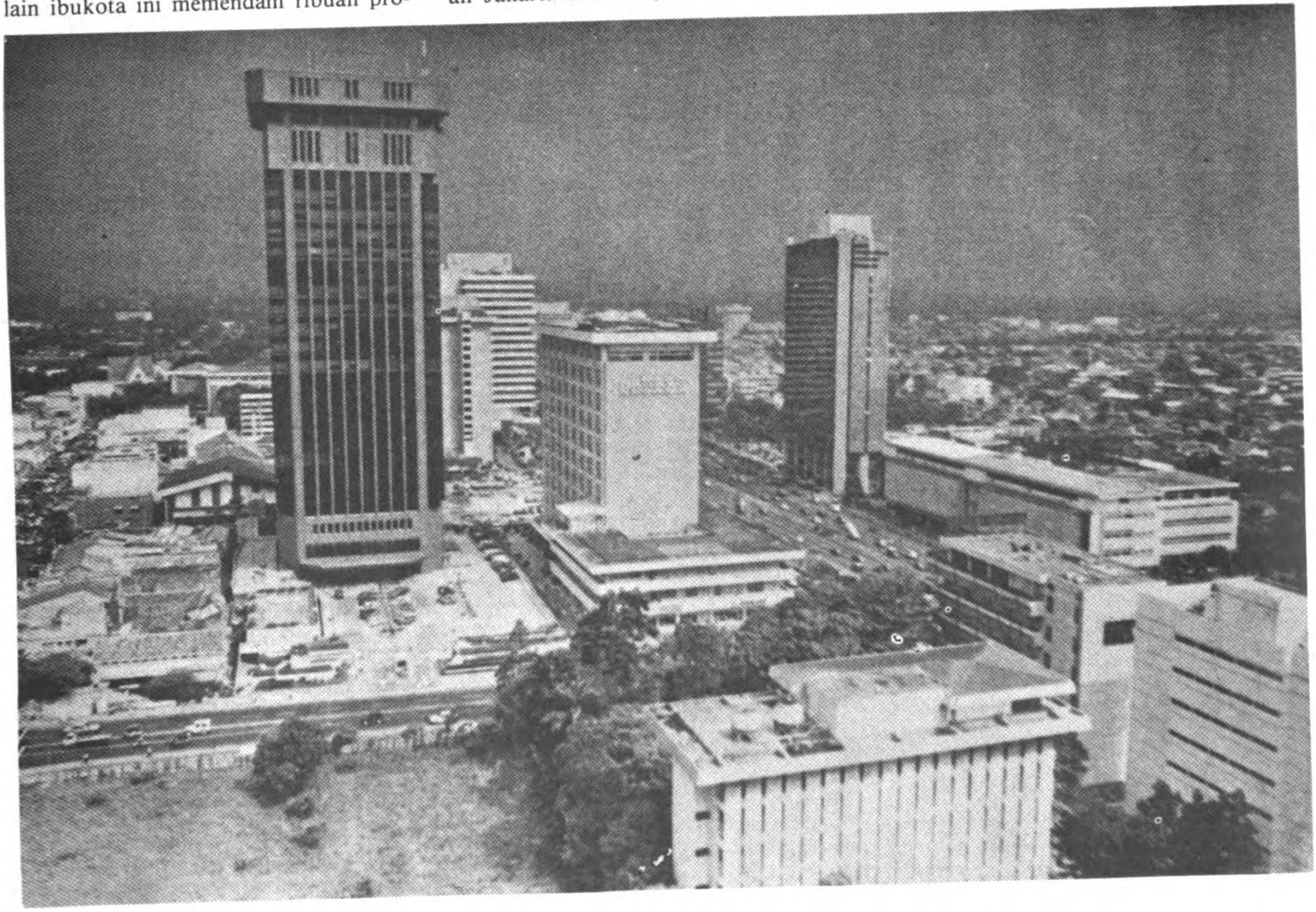

Jakarta merupakan pusat pemerintahan

Digitized by Google

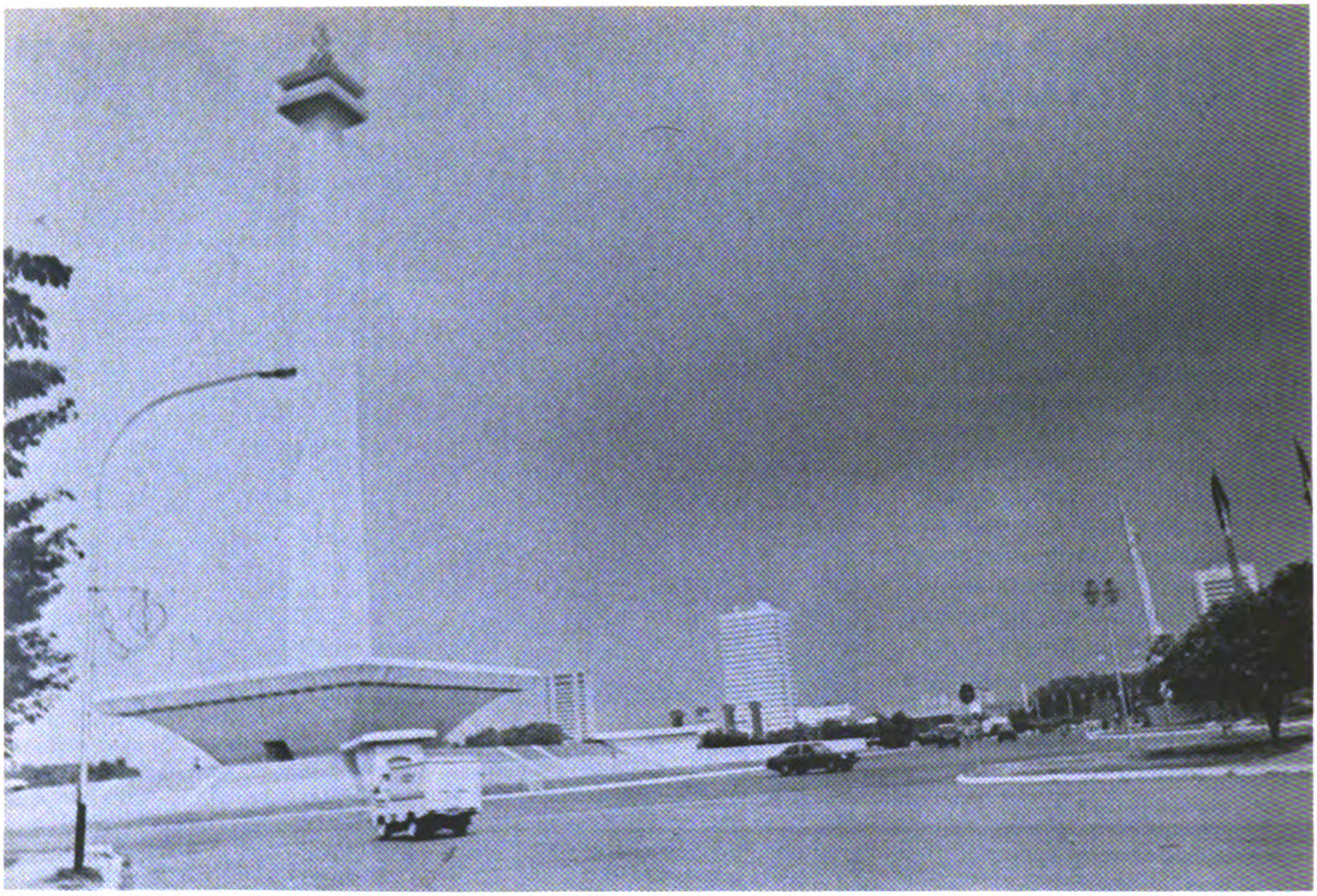

Membangun sebuah kota yang longgar

berpangkal pada masalah kependudukan yang tidak tertata baik, maka persoalan utama yang menantang R Soeprapto ketika untuk pertama kali dilantik jadi Gubernur DKI tahun 1982 ialah bagaimana membangun Jakarta menjadi sebuah kota yang longgar.

Cita-cita ini, rasanya menjadi simpul dari semua upaya pembangunan di ibukota. ''Apapun yang kita kerjakan, sebenarnya menjadikan Jakarta ini kota yang longgar dan tertata baik. Kalau hal ini bisa dicapai, maka problema-problema sosial seperti kemiskinan, kriminalitas dan sebagainya akan pelan-pelan bisa teratasi,'' kata Soeprapto.

Membangun Jakarta yang bisa merangkul kepentingan semua orang bukan pekerjaan gampang. Tapi itu tidak berarti orang harus mundur dan menyerah.

Kerangka landasan

Bila dalam konsep pembangunan nasional dikenal konsep kerangka landasan, maka pembangunan Jakarta juga memiliki perangkat konseptual yang strategis itu. Jakarta juga mengenal dan memiliki konsep kerangka landasan itu, yang bertolak dari kondisi obyektifnya.

Sesuai dengan garis pemerintah pusat, maka ada dua pendekatan pokok pemerintah daerah Jakarta dalam membangun wilayahnya. Pertama adalah pendekatan Pelita IV dimana disitu digariskan bahwa dalam kurun tersebut disiapkan kerangka landasan untuk nanti dimantapkan dalam Pelita V sehingga dalam Pelita VI bisa tinggal landas.

Sedangkan pendekatan kedua adalah sorotan situasional dan kondisional yang dikaitkan dengan kesinambungan pembangunan nasional dan kelanjutan perjuangan Orde Baru.

Berbicara tentang kerangka landasan pembangunan Jakarta, atau pendekatan Pelita, maka yang menjadi perhatian utama adalah mengelola pertumbuhan dan perkembangan Jakarta sebagai ibukota negara lengkap dengan kondisi obyektifnya seperti kepadatan penduduk dan kemajemukannya. Dengan kata lain, kerangka landasan bagi Jakarta adalah bagaimana mengarahkan dan mengendalikan pembangunan. Dengan upaya ini diharapkan, manusia atau penduduk Jakarta tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Atau jangan sampai pembangunan Jakarta sebagai ibukota negara yang menjadi pusat administrasi pemerintahan, terhambat karena faktor warganya.

Untuk menciptakan kerangka landasan bagi Jakarta yang longgar dan berfungsi optimal sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan, maka secara konvensional telah disiapkan sasaran pembangunan Jakarta tahun 1985-2005. Disitu dicakup tentang ruang lingkup dan tata ruang. Dengan demikian siapapun yang menjadi gubernur DKI nanti, tinggal melanjutkan kerangka landasan tersebut.

Kalau dilihat dari kerangka landasan yang lain, program-program di bidang ideologi melanjutkan penataran P-4, sehingga diharapkan pada akhir Pelita IV tidak ada lagi warga jakarta yang ragu terhadap Pancasila. Kita bersyukur bahwa selama ini perwujudannya adalah stabilitas yang lestari, karena tidak ada pertentangan ideologi yang gawat, seperti tercermin dari hasil pemilu 1971, 1977, 1982 dan 1987.

Ini adalah kerangka landasan yang kita hasilkan. Selama Orde Baru jarang sekali terjadi gejolak sosial politik yang meresahkan. Juga di bidang budaya.

Kerangka landasan yang sangat perlu diwujudkan adalah kondisi Jakarta sebagai ibukota negara yang sekaligus harus mengelola rumah tangganya sendiri. Tugas paling berat mengelola rumah tangga kota Jakarta, adalah bagaimana mewujudkan kondisi kota Jakarta sedemikian rupa sehingga kegiatan masyarakat di Jakarta termasuk kegiatan pemerintah pusat, regional maupun internasional, tidak perlu terhambat oleh warga Jakarta. ''Berarti harus diciptakan stabilitas yang dinamis''.

Politik dan Golkar

Untuk Jakarta, stabilitas yang dinamis ini dirumuskan secara sederhana tapi kena yaitu, di bidang keagamaan tidak ada kerawanan, ideologi yang tidak retak, sosial

Digitized by Google

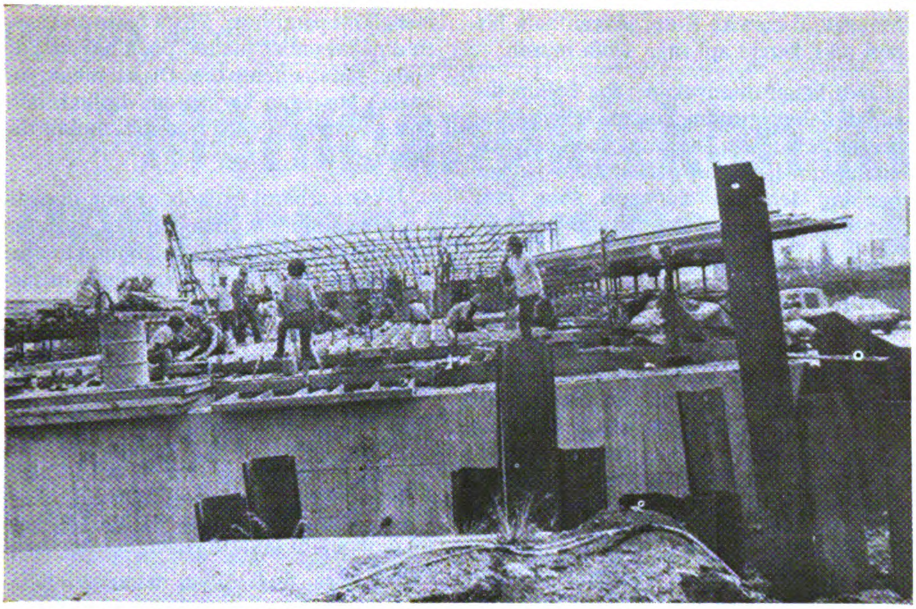

Penduduk Jakarta tidak boleh menghambat pembangunan

politik tidak resah, sosial ekonomi tidak ganas dan ekologi supaya tidak gersang. "Bila pembangunan Jakarta bisa menerjemahkan semua ini dengan pas, maka Jakarta akan menjadi kota yang sangat ideal.

Dari segi pendekatan politik, maka yang perlu diperhatikan adalah kondisi bahwa kita sekarang baru saja menyelesaikan pemilu. Tahun 1988, merupakan tahun pertama dimana kita mempersiapkan diri menghadapi pemilu 1992.

Dalam pemilu 1987, untuk pertama kali Jakarta memperoleh suara di atas 50 persen untuk kemenangan Golkar. Kemenangan ini harus kita manfaatkan dan mantapkan. Kedua, Golkar harus mantapkan konsolidasi dan kaderisasi, terutama yang berkualitas.

Yang ketiga, kalau dilihat dari usia pilih, maka target pembinaan adalah mereka yang sekarang duduk di SMP. Untuk ini maka peranan guru sangat penting. Juga peranan PGRI.

Dari evaluasi ternyata pendidikan politik yang menyangkut pemilihan umum itu sendiri, sangat kurang.

Di sekolah dan di perguruan tinggi, para siswa diajarkan tentang liberalisme, demokrasi, kapitalisme, sosialisme, komunisme dan sebagainya. Dalam penataran diajarkan Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Tetapi dikaitkan dengan kesadaran si warga negara sebagai pemilih, tidak dikenalkan. Padahal UUD 45 menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, MPR terdiri dari anggota DPR dan utusan-utusan Golongan yang dipilih melalui pemilihan umum, peserta pemilu adalah partai politik dan Golongan Karya. Jadi dalam soal generasi muda kita harus menyadarkan mereka berkonstitusi. Berarti penataran P-4 plus UU no. 5 yang dihasilkan tahun 1985. Sehingga orang menuju ke TPS tidak hanya karena disuruh, tetapi ia sadar, bahwa "saya menggunakan hak saya, tidak hanya ikutikutan".

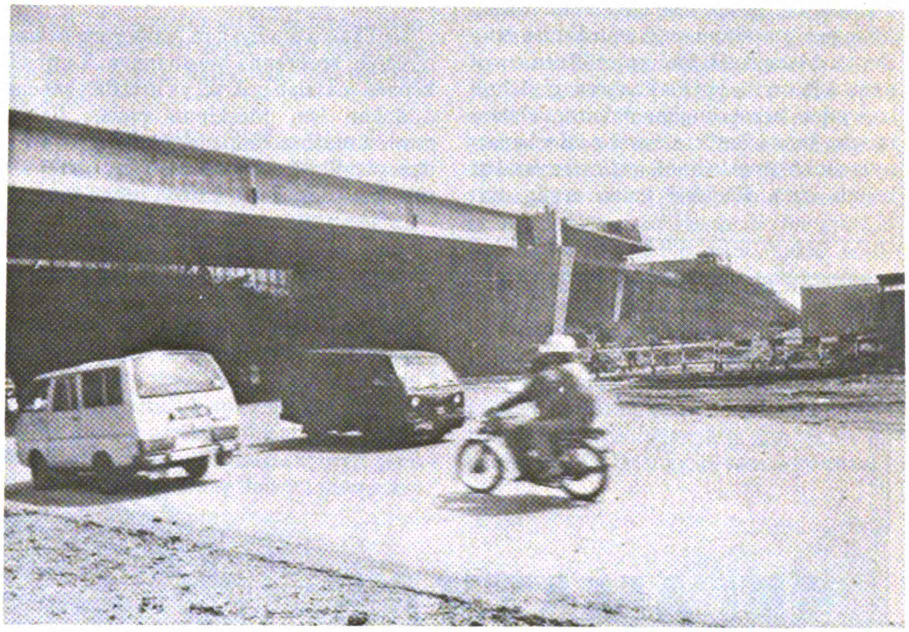

Yang menjadi problem orang yang tidak mengetahui aturan

Sekarang ini kalau orang berbicara tentang partai pemerintah tentu tidak lain adalah Golkar yang menjadi kekuatan utama Orde Baru. Sedangkan kita di Jakarta ini membangun di atas kota. Setiap kita melaksanakan pembangunan mesti ada dampaknya. Kita melebarkan jalan ada masalah. Kita bikin kereta layang ada yang kena. Kita menertibkan apa saja pasti ada dampaknya, apalagi kalau menertibkan kaki lima.

Jadi kalau dipelajari dari hasil pemilu prestasi di Jakarta selalu mencerminkan kesenjangan-kesenjangan sosial. Karena pemerintah harus membangun, dan pembangunan pasti menimbulkan dampak, maka tidak heran kalau Golkar paling sulit menang di Jakarta. Tapi syukur dalam pemilu lalu Golkar bisa menang. Sebenarnya bukan saja masalah Jakarta kalau partai yang memerintah menghadapi kesulitan. Dimana saja, parti yang memerintah pasti kalah dari oposisi di ibukota.

Namun bagaimanapun juga pembangunan harus jalan. Korban pasti ada. Karena itu harus diupayakan bagaimana memperkecil dampak sosial. Jadi pendekatan yang arif bijaksana. Inilah program-program tahun 1988-89 dalam rangka menciptakan kerangka landasan, yang akan dimantapkan dalam repelita ke V dan selanjutnya menuju tinggal landas.

Kependudukan

Jadi problema terpokok bagi Jakarta adalah masalah kependudukan. Jakarta menerima akibat daripada kedudukannya sebagai ibukota dengan segala kegiatannya sehingga menjadi daya tarik. Daya tarik untuk survive di Jakarta, daya tarik untuk dapat mendapatkan pekerjaan di Jakarta, daya tarik untuk dapat sekolah di Jakarta.

Sebetulnya yang setiap tahun membanjiri Jakarta adalah petani tradisional, sebagian besar buruh tani. ..... Mereka mencari jalan yang paling gampang, yang penting datang di Jakarta dulu. Karena itu untuk mengendalikan pertumbuhan kota Jakarta ini harus diupayakan antar daerah dan antar sektoral serta pemerataan pembangunan. Sehingga mereka yang datang ke Jakarta terjawab tentang lapangan kerja. Untuk kemudian diusahakan mereka yang ke Jakarta adalah yang memang diperlukan dan jelas pekerjaannya. Dan jelas ini mendapatkan pekerjaan. Jadi mereka harus profesional.

Sekarang ini tidak. Disamping mereka yang formal diperlukan, baik di sektor pemerintah maupun swasta, ada yang datang untuk mencoba diri. Maka timbullah pekerja musiman, yang sifatnya mengadu nasib, tapi tidak siap dengan ketrampilannya. Bagi yang beruntung mendapatkan pekerjaan, dan tempat berteduh. Tapi bagi mereka yang kurang beruntung, akan merasakan kepahitan Jakarta. Me-

Digitized by Google

reka lalu menjadi penghuni liar. Problema sosial di Jakarta sebenarnya timbul dari sini.

Pemerintah daerah Ibukota mengupayakan bagaimana menghadapi mereka ini. Ada pendidikan alih profesi, ketrampilan, penciptaan lapangan kerja, transmigrasi. Tapi ini tentunya tidak bisa hanya diatasi oleh DKI Jakarta. Contohnya misalnya penertiban kaum tuna wisma menjelang Lebaran. Bila penertiban artinya ditampung oleh DKI akan berarti mengundang para gelandangan membanjiri ibu kota, karena ada penampungan dan ada yang memberi makan.

Oleh karena itu perlu kerjasama antar daerah, dengan catatan daerah asal mereka mau menerima. Selain itu dalam ketentuan tata ruang Jakarta telah ditetapkan pemekaran kota harus menjurus ke timur dan barat, tidak ke selatan, karena di selatan adalah daerah serapan air.

Kemacetan

Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, dibangun prasarana angkutan kereta api, Depok-Manggarai, Manggarai-Kota. Juga nanti ada kereta api ke Tangerang. Belum lagi jalan bebas lingkar Jakarta. Dalam rangka kereta listrik, sekarang ini sebenarnya sudah operasional, tapi masyarakat belum tahu. Padahal kalau orang dari Manggarai mau ke Kota, jangan naik bis tapi naik kereta api saja, lebih murah.

Jadi kalau ditanyakan yang belum dicapai dalam pembangunan Jakarta sebenarnya banyak. Tapi yang penting harus ditetapkan landasan dan strategi jangka panjang sehingga siapapun yang jadi gubernur, tinggal melanjutkannya saja.

Itu problem pemekaran dan lalu lintas. Belum lagi, kuli pelabuhan, yang tugasnya bongkar muat barang. Dulu mereka tidak susah dapat pekerjaan. Tapi dengan masuknya peti kemas yang pelayanannya *door to door,* maka mereka tergusur. Itu sebabnya mengapa Golkar kalah di Tanjung Priok.

Jadi orang di kota besar itu meskipun pembangunan kota maju, tetapi lebih mudah mencerna yang kurang baik. "Jadi seandainya saya melihat, anda berbuat baik, tidak jadi soal. Tetapi begitu saudara kelihatan menggandeng perempuan lain, sudah jadi omongan. Itu sifat manusia".

Jadi kalau ditanyakan mana yang belum tercapai, sederhana jawabannya. Kembali kepada masalah pokok, ya masalah kependudukan itu. Meskipun padat, kalau masing-masing bisa mengendalikan diri, dan disiplin *no problem.* Yang menjadi problema sosial itu, karena orang kurang mengikuti peraturan. "Kita bikin trotoar, eh dipakai untuk jualan, pada hal tempat jualan sudah ditentukan. Disatu pihak, ini adalah lapangan kerja, tapi dipihak lain tata kotanya ini supaya tertib. Inilah dilemanya."

Jakarta sebagai ibu kota negara, dan pusat pemerintahan, menghimpun kegiatan ekonomi, perdagangan, pelabuhan, industri dan lain sebagainya. Kalau ingin memecahkan problem Jakarta dalam hal kepadatannya, maka fungsi-fungsi ini dipencarkan. Dengan cara ini, diantaranya lewat pola pemukiman terpadu, penduduk Jakarta tidak menumpuk di satu tempat. Dengan pola pemukiman terpadu, orang tidak perlu mondar mandir antar wilayah untuk mendapatkan kebutuhan primer. Untuk itu lokasi perkantoran yang selama ini numpuk di Jakarta pusat juga harus dipencarkan.

Jakarta yang longgar sekarang ini bukan lagi impian. Pada hari Minggu misalnya sangat terasa, betapa Jakarta menjadi lengang. Ini tentu kemajuan yang menggembirakan. "Tentu banyak masalah lain yang belum terselesaikan. Tetapi karena kita telah memiliki kerangka landasan pemecahan, maka saya bisa tidur nyenyak," kata Soeprapto.

TG/BM

SELAMATKAN
PERGAULAN
ANDA
DENGAN

GREEN
PAGODA
Pastilles
AFIAT PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD

Digitized by Google

Oleh Oka Mahendra

Membangkitkan Kekuatan Pembangunan Dalam Masyarakat

Pembangunan adalah proses dinamis yang terus berkembang, bergerak maju seakan merupakan proses tanpa akhir menuju keadaan yang lebih baik dari keadaan sekarang. Sebagai proses dinamis pembangunan merupakan rangkaian perubahan majemuk meliputi berbagai bidang kehidupan baik lahir maupun batin.

Pembangunan melibatkan segenap kekuatan yang ada dalam suatu bangsa. Keberhasilannya ditentukan oleh manusia pembangunan itu sendiri dan oleh struktur sosial masyarakatnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai program pemerintah belaka, tetapi yang merupakan gerakan seluruh masyarakat bangsa itu.

Oleh karena itulah pada bagian penutup GBHN dengan jelas dinyatakan sebagai berikut: "Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia".

Memang sesungguhnya masyarakat menyimpan suatu *enerji sosial* yang dapat merupakan kekuatan daya penggerak pembangunan. Kekuatan yang tersimpan dalam masyarakat itu baru bangkit bila makna pembangunan secara nyata dirasakan membawa perbaikan kehidupan dan mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya harapan-harapan rakyat dimasa yang akan datang. Dengan perkataan lain pembangunan harus mampu menjawab persoalan kehidupan sehari-hari seperti kemiskinan, keterbelakangan, penyakit, lapangan kerja, pendidikan, kebahagiaan rohani, di samping adanya komitmen untuk mewujudkan cita-cita yang lebih luhur. Peter L Berger dengan tepat mengatakan bahwa: "... pembangunan adalah juga tumpuan semua harapan bagi perbaikan nasib, baik secara materi ataupun secara rohani". (Piramida Pengorbanan Manusia halaman: 28).

Pembangunan yang dicanangkan oleh bangsa Indonesia sebagai pengamalan Pancasila memang bertujuan untuk memperbaiki nasib bangsa baik lahir maupun bathin. Hal tersebut diungkapkan dalam hakekat pembangunan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Berbagai kemajuan sebagai hasil pembangunan yang sekarang ini telah memasuki tahapan untuk terciptanya kerangka landasan menuju masyarakat adil dan makmur, memang telah dirasakan segenap lapisan masyarakat sebagai perbaikan kehidupan. Namun pembangunan bukanlah merupakan proses yang membujur lurus. Berbagai tantangan sebagai akibat dari perkembangan keadaan dunia yang dilanda resesi maupun karena dinamika pembangunan itu sendiri menuntut keterlibatan yang lebih intens dari segenap lapisan masyarakat.

Partisipasi aktif, kreatif dan kritis dari segenap lapisan masyarakat dapat ditingkatkan dengan terus menerus menghidupkan "motivasi dari dalam" dan membangkitkan "kemauan dari dalam" masyarakat itu sendiri.

Semua itu bisa diwujudkan apabila masyarakat tidak hanya dijadikan alamat wejangan dari atas. Tetapi mereka perlu lebih diberi kesempatan untuk mengartikulasikan diri, untuk bersuara, untuk memberi masukan ke atas. Dalam kaitan ini para aparat pemerintah hendaknya lebih menyadari peranannya sebagai abdi masyarakat penggerak pembangunan. Dengan demikian pembangunan akan semakin dihayati oleh seluruh masyarakat, karena semua merasa berkepentingan dan sekaligus merasa dihormati sebagai subyek pembangunan. Setiap orang dalam masyarakat tersalur harapan-harapannya, merasa "diwongke", dihormati hak-haknya, sehingga terpanggil dan tergerak untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya bagi nusa dan bangsanya. Masyarakat secara sadar akan mengambil bagian dalam pembangunan. Disitulah sifat partisipatif pembangunan di dalam masyarakat semakin terasa. Kekuatan-kekuatan produktif dalam masyarakat baik secara individual maupun kolektif dengan demikian akan bangkit. Kemajemukan dalam masyarakat akan merupakan kekuatan penggerak pembangunan, karena terjadinya proses demokratisasi melalui partisipasi politik yang seharusnya merupakan bagian dari perekayasaan pembangunan. Selain itu bangkitnya kekuatan pembangunan dalam masyarakat ditentukan pula oleh proses pendewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengembangkan nilai-nilai dan sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan pembinaan bangsa.

Sudah barang tentu dalam proses pembangunan yang semakin maju diperlukan pula penguasaan ketrampilan dalam berbagai bidang sehingga ilmu dan teknologi modern dapat ditanggapi secara konstruktif.□

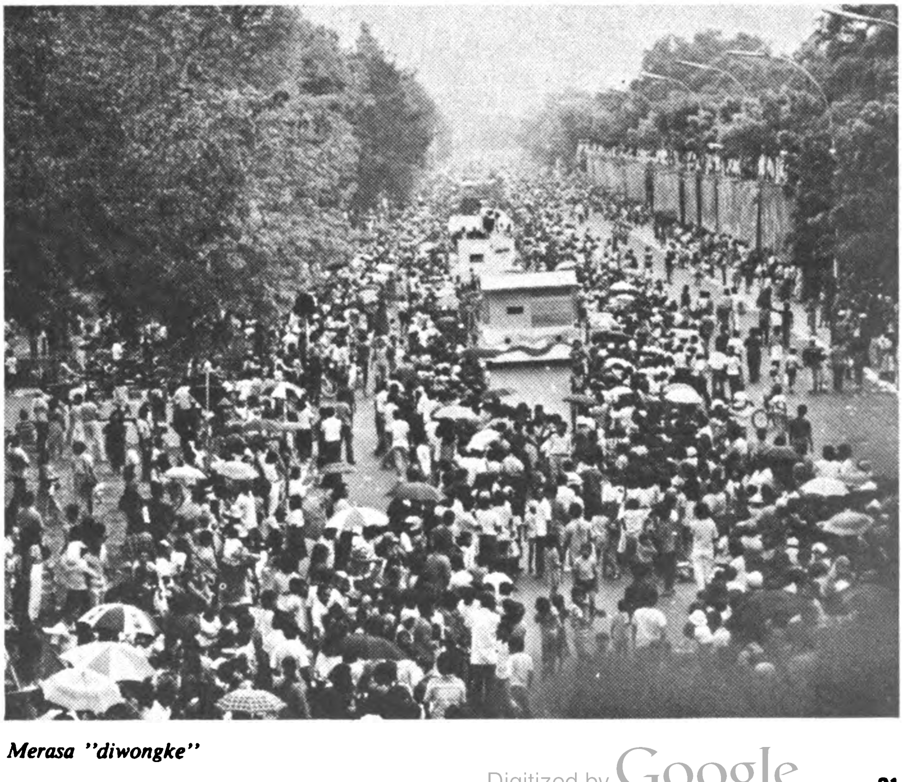

Merasa "diwongke"

Digitized by Google

Oleh : Akbar Tandjung

Peranan Dan Fungsi KNPI Dalam Kaitan UU Keormasan

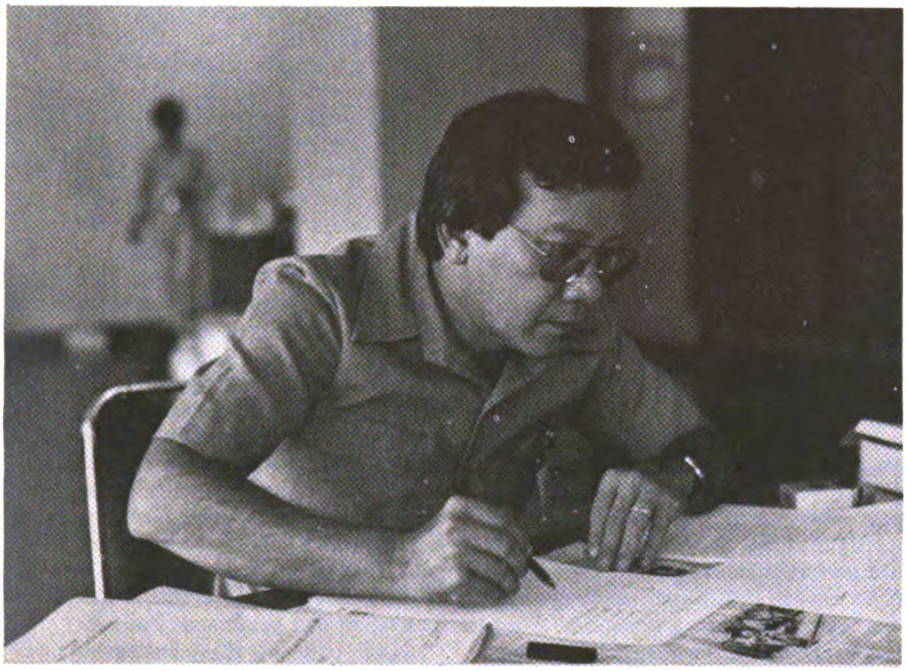

Keberadaan KNPI pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari cita-cita politik Orde Baru, khususnya dalam konteks penataan politik dan kehidupan kemasyarakatan di atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka penataan kehidupan politik di negara kita telah dilakukan penyederhanaan partai, dari banyak partai menjadi tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu PPP, GOLKAR dan PDI. Demikian juga di dalam kehidupan masyarakat khususnya di kalangan buruh, petani dan nelayan, masing-masing telah terbentuk FBSI (yang sekarang di kenal sebagai SPSI), HKTI, dan HNSI, Pembaharuan-pembaharuan tersebut dilakukan dalam rangka menjadikan organisasi-organisasi masyarakat menjadi lebih fungsional dalam proses pembangunan. Dengan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka fungsionalisasi ini semakin dipertegas lagi dalam wujud orientasi program.

Disamping semangat pembaharuan se-

Wadah komunikasi pemuda dengan kekhususan dan peranan.

Digitized by Google

perti tersebut di atas, KNPI sebagai wadah komunikasi pemuda mempunyai kekhususan fungsi dan peranan dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan pemuda tentang kehidupan berbangsa dan bernegara melalui program-program yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh para pemuda itu sendiri. Kekhususan fungsi dan peranan ini sangat mendasar artinya bagi hari depan bangsa, baik dalam rangka pengembangan pemikiran-pemikiran tentang hari depan Indonesia maupun dalam rangka menjamin tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, adalah pada tempatnya, jika segenap kreatifitas dan pemikiran pemuda Indonesia khususnya yang tergabung di dalam organisasi-organisasi pemuda yang ada secara struktural-kualitatif tertampung di dalam wadah komunikasi ini. Hal ini dapat dicerminkan antara lain di dalam pola rekrutmen yang lebih demokratis dengan memberi kesempatan yang sama dan proporsional kepada organisasi-organisasi pemuda yang ada. Dalam rangka masa depan KNPI yang lebih baik, maka demokratisasi dalam rekrutmen kepemimpinan ini juga harus diimbangi dengan ukuran-ukuran kualitatif secara obyektif.

Mandiri sebagai sumber kader, mandiri dalam kepemimpinan.

II

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dengan Undang-Undang Keormasan, maka eksistensi organisasi pemuda yang telah memenuhi Undang-Undang Keormasan tersebut semakin diakui keberadaannya. Eksistensi ini pada dasarnya telah menjadi modal dasar untuk lebih meningkatkan peranannya melalui program-program yang nyata sesuai dengan kebutuhan para anggota masing-masing organisasi. Sepanjang program-program yang dilakukan bersifat positif bagi kepentingan bangsa, maka organisasi-organisasi pemuda tersebut dapat dikatakan sebagai "assets bangsa".

Dengan cara penglihatan seperti tersebut di atas maka KNPI dapat merumuskan fungsi dan peranan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh organisasi-organisasi pemuda yang ada. KNPI dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran inovatif terhadap pola dan pendekatan program yang telah dijalankan dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada organisasi-organisasi pemuda yang membutuhkannya. Pemikiran-pemikiran inovatif tersebut haruslah lebih dapat membawa suasana kepemudaan Indonesia yang semakin kreatif, dinamis dan memiliki wawasan yang bersifat nasional tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing yang telah memberi makna kepada realitas "bhinneka tunggal ika" bangsa Indonesia.

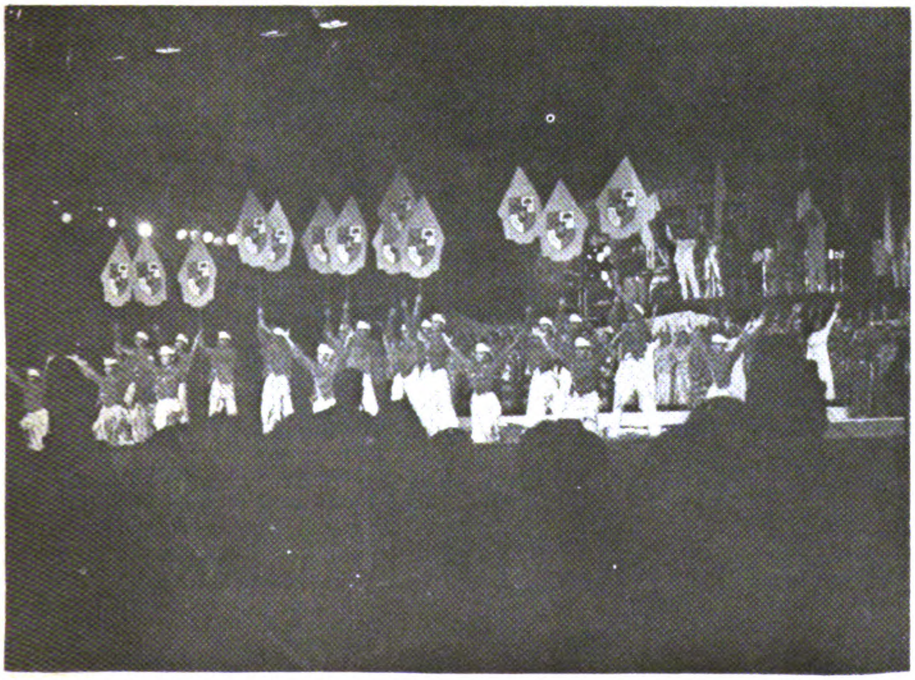

Memberi makna kepada realitas Bhinneka Tunggal Ika.

Fungsi komunikasi tersebut diatas akan semakin mudah dilakukan, karena setelah Undang-Undang Keormasan ini independensi organisasi-organisasi pemuda yang semakin dipertegas sehingga telah membawa suasana kepemudaan kepada kondisi yang mandiri karena secara struktural tidak lagi terikat kepada kekuatan sospol atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian persoalan-persoalan kepemudaan diharapkan sepenuhnya dapat dipikirkan, dirumuskan dan dicarikan jalan keluarnya oleh para pemuda itu sendiri sekaligus sebagai proses menyiapkan para pemimpin bangsa di masa depan yang lebih mandiri dan berkualitas. Fungsi komunikasi yang sama disamping dilakukan dikalangan organisasi pemuda yang ada, juga dapat dan perlu dilakukan terhadap potensi generasi muda lainnya yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari pemuda Indonesia secara keseluruhan.

Dalam konteks komunikasi ini, kenyataan independensi organisasi pemuda yang ada mengimplikasikan posisi KNPI yang juga harus mandiri baik dalam pengertian menempatkan diri sebagai sumber kader bangsa maupun kemandirian dalam kepemimpinan dan pola-pola pengambilan keputusan. Ini berarti, apa bila dari wadah komunikasi pemuda ini dapat dilahirkan kader-kader bangsa yang mandiri dan berkualitas, maka dengan sendirinya infra struktur politik akan semakin kuat dan mandiri pula di masa depan dan akan mempunyai peranan yang lebih berarti serta menentukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan cara berpikir seperti di atas, ma-

Digitized by Google

ka KNPI dapat sekaligus memainkan fungsi dinamisator terhadap organisasi-organisasi pemuda yang diwadahinya dalam rangka meningkatkan kualitas program-program yang dilakukan, sehingga dengan program-program yang semakin berkualitas tersebut dapat dilahirkan kader-kader yang semakin berkualitas yang untuk selanjutnya dipertebal wawasan nasionalnya melalui wadah komunikasi KNPI. Dengan cara ini infra struktur politik kita khususnya dikalangan pemuda sebagai titik yang paling strategis ini dapat semakin kuat sehingga pada gilirannya akan menjadi landasan yang kuat terhadap kepemimpinan diberbagai bidang.

III

Setelah menguraikan pokok-pokok pikiran di atas, maka sebagai catatan penutup kita harus menyadari bahwa betapapun idealnya sebuah konsepsi organisasi, pada akhirnya tergantung juga kepada siapa yang menjalankannya. Kombinasi yang diharapkan adalah paduan yang ideal antara konsepsi dan para pimpinan KNPI itu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi perlu kita sadari bahwa ukuran-ukuran kualitatif yang obyektif serta pola rekrutmen kepemimpinan yang semakin demokratis akan semakin menentukan masa depan KNPI. Dengan demikian, pengakuan politik terhadap KNPI secara riel dapat dibuktikan dengan kualitas pimpinan yang berbobot nasional. Oleh karena itu pengakuan politik yang sangat berharga itu harus diimbangi di dalam kenyataan.

Eksistensi KNPI di masa depan ditentukan oleh seberapa jauh para pimpinannya mampu secara tajam mengidentifikasikan masalah-masalah nasional saat ini dan proyeksinya ke masa depan serta memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Kemampuan dalam mengidentifikasikan masalah nasional tersebut serta kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan itulah yang akan menciptakan posisi strategis KNPI karena secara riel KNPI menempatkan diri sebagai milik nasional khususnya milik pemuda Indonesia secara keseluruhan. Ini berarti program-program yang bersifat kajian dan pemikiran perlu mendapat porsi yang lebih memadai di samping keberanian untuk meninjau pola rekrutmen yang masih berorientasi akomodatif kuantitatif untuk diperbaharui secara mendasar kepada pola rekrutmen yang demokratis dan kualitatif.

Selain itu, perlu dipikirkan adanya mekanisme yang lebih memungkinkan organisasi-organisasi pencetus dan pendukung KNPI memiliki akses dalam proses penentuan arah dan perkembangan KNPI.

Perlu juga sikap yang jelas dan konsisten terhadap lembaga-lembaga yang dibentuk di lingkungan KNPI. Lembaga mana pada mulanya diharapkan dapat melaksanakan fungsi kekaryaan, dikelola secara profesional dan memiliki otonomi dalam rangka melaksanakan program-program konkrit yang mempunyai dampak langsung terhadap kepentingan dan kebutuhan pemuda.

Struktur vertikal KNPI hendaknya lebih disederhanakan, sehingga menjadi lebih proporsional, sesuai dengan fungsi dan tujuan KNPI. Tidak terlihat urgensinya untuk menempatkan perangkat KNPI sampai ke tingkat Kecamatan.

Sebagai bangsa yang terdiri dari begitu banyak suku-bangsa, peranan KNPI dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara hendaknya semakin menonjol dan konkrit. Dirasakan perlu adanya suatu forum pendidikan yang diselenggarakan secara tetap dan kontinyu untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Terakhir dan yang terpenting adalah sikap kemandirian. Dinamika dan kreatifitas generasi muda, terlebih lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjawab berbagai tantangan-baik tantangan masa kini maupun tantangan masa depan - mustahil dapat tersalurkan dengan baik tanpa adanya sikap dan watak kemandirian itu. □

Segenap Pengurus Anggota dan Keluarga Besar KOHIPPCI

KOPERASI HIMPUNAN PEDAGANG PASAR CIKAPUNDUNG

Mengucapkan Selamat dan Sukses atas Prestasi Yang Dicapai Golkar dalam Pesta Demokrasi Pemilu 1987

Digitized by Google

Tindakan Moneter Tidak Perlu

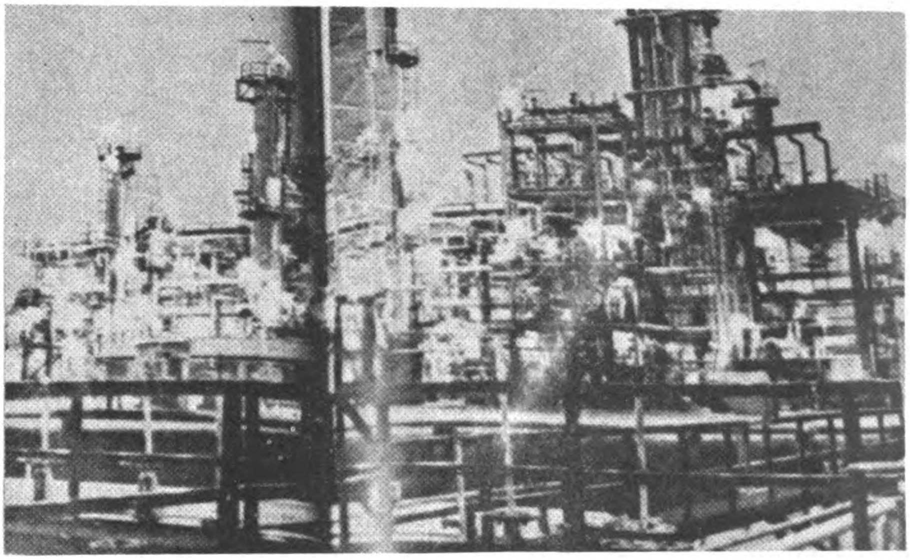

Pemerintah Indonesia bersama negara OPEC sepakat untuk melaksanakan batas tertinggi produksi minyak.

Komisi APBN DPR bersama Menteri Keuangan Drs Radius Prawiro selaku wakil Pemerintah, dalam rapat kerja di gedung DPR pada 29 Juni 1987 lalu berhasil mencapai kesepakatan, antara lain, pemerintah tidak akan melakukan tindakan moneter seperti devaluasi. Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak mempercayai rupiah.

Kesepakatan yang merupakan kesimpulan dari serangkaian rapat kerja sebelumnya untuk membahas RUU APBN TP (Tambahan dan Perubahan) serta RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara tahun anggaran 1983/1984 dan 1984/1985, dibacakan oleh Ketua Komisi APBN DPR Drs Rahardjo selaku pimpinan rapat kerja.

Kesimpulan rapat juga menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dengan menaikkan tingkat suku bunga simpanan serta pengendalian uang beredar, sebagai upaya untuk menanggulangi mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri. Sidang juga menyerukan agar masyarakat tidak lekas percaya untuk membeli obligasi atau saham yang ditawarkan oleh pihak luar negeri.

Kepada wartawan seusai sidang, Radius memberikan tambahan penjelasan bahwa masyarakat tidak perlu terjerumus dengan berbagai tindakan spekulatif, karena tidak mengetahui seluk beluk saham yang ditawarkan pihak luar negeri. Dikatakannya, penawaran saham luar negeri sangat peka dengan perubahan nilai uang dollar terhadap mata uang lainnya.

Berbeda dengan di luar negeri, di Indonesia para pembeli saham selain mendapatkan dividen juga memperoleh *capital gain* yang tidak terkena pajak. "Dan selama ini kalau ada devaluasi, pemerintah juga melakukan revaluasi, kata Radius.

Dikatakannya juga, iklim perekonomian dan situasi moneter Indonesia pun memberikan peluang yang lebih baik bagi para pembeli saham dan deposan untuk menginvestasikannya.

Dalam kesepakatan tersebut juga ditegaskan bahwa pinjaman komersial yang ditarik oleh pemerintah dimaksudkan untuk tambahan menutup biaya-biaya yang tidak dapat dibiayai dari pinjaman lainnya yang bersumber dari hubungan kerjasama bilateral, multilateral maupun kredit ekspor. Pinjaman komersial tidak ada yang digunakan untuk kegiatan rutin, akan tetapi dipergunakan antara lain untuk mendukung Neraca Pembayaran dan pembiayaan proyek-proyek bantuan luar negeri. Sedangkan pinjaman obligasi luar negeri yang telah dirintis di pasaran internasional terus dilanjutkan dan dikembangkan.

Dikemukakan pula dalam kesepakatan itu, pinjaman luar negeri masih tetap diperlukan terutama untuk membiayai pembangunan. Pemerintah senantiasa mengusahakan pinjaman luar negeri yang bersyarat lunak, yaitu bunganya rendah, jangka waktu pelunasannya panjang dan tenggang waktu yang panjang. Sedangkan untuk mengurangi tekanan terhadap tabungan pemerintah yang sejak tahun 1985 cenderung menurun, diupayakan untuk ditingkatkan melalui peningkatan penerimaan dalam negeri di luar migas, serta melalui penghematan dalam pelaksanaan pengeluaran rutin tanpa mengorbankan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang berjalan.

Untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan dan mengamankan penerimaan negara, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan negara-negara anggota OPEC sepakat untuk kembali melaksanakan batas tertinggi produksi minyak OPEC. Sementara itu, untuk lebih meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri telah diambil kebijaksanaan yang menunjang usaha peningkatan eksplorasi maupun intensifikasi tambang-tambang yang telah ada. Sedangkan untuk lebih memperlancar upaya peningkatan ekspor gas alam, khususnya LPG, telah dibangun terminal LPG di Tanjung Uban.

Berbagai kebijaksanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan ekspor terutama di bidang nonmigas diakui belum mencapai sasaran yang diharapkan. Masih diperlukan waktu untuk mengatasi berbagai faktor penghambat antara lain faktor biaya tinggi, lemahnya daya saing, kebijaksanaan proteksi negara maju dan ketidak stabilan harga komoditi ekspor. Namun diharapkan dalam tahun-tahun mendatang ekspor hasil industri dapat ditingkatkan.

Pemerintah juga berusaha menyehatkan BUMN mengingat pada tahun terakhir penerimaan bukan pajak yang berasal dari Dividen, Dana Pembangunan Semesta dan bagian laba pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp 41,3 milyar dibanding tahun sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena laba beberapa BUMN mengalami penurunan. Sehubungan dengan itu, pemerintah kini sedang mengadakan penelitian untuk mencari jalan keluar agar BUMN makin sehat.

Dalam kesepakatan itu tertuang pula suatu tekad untuk tetap mengusahakan tercapainya kondisi ekonomi dalam tingkat lepas landas sebagai sasaran pada Repelita VI, meskipun disadari bahwa dalam pelaksanaan Repelita IV sasaran laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan sulit untuk tercapai. Namun baik pemerintah maupun DPR bertekad untuk mengupayakan agar Repelita-repelita selanjutnya dapat mencapai rata-rata laju pertumbuhan sebagaimana telah ditetapkan.

Sepakat

Dalam rapat kerja itu keempat fraksi DPR dalam Komisi APBN menyepakati agar RUU APBN TP 1986/1987 dan RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara (PAN) 1983/1984 dan 1984/1985 diajukan ke dalam sidang paripurna DPR untuk dapat disetujui untuk diundang-undangkan.

Jurubicara FKP Ny. Sis Hendarwati Hadiwitarto menyampaikan pendapat Fraksinya agar perbaikan iklim investasi dilakukan secara mendasar dan menyeluruh sehingga investor baik dari dalam maupun dari luar negeri merasa tertarik. "Tanpa upaya yang mendasar dan menyeluruh kita akan terus terikat dengan pengendalian neraca pembayaran dengan kredit komersial yang makin menjerat",

Digitized by Google

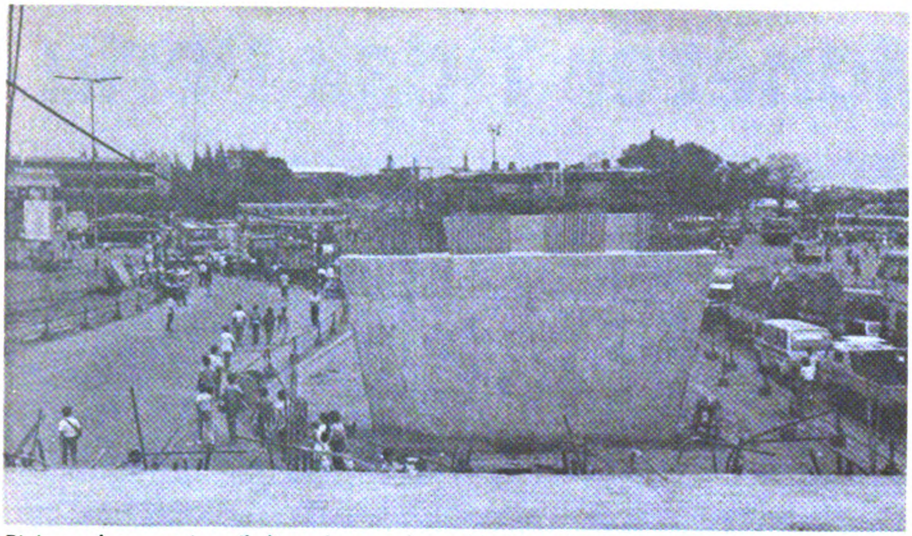

Pinjaman luar negeri masih digunakan untuk membiayai pembangunan.

katanya.

Dalam situasi seperti sekarang ini, FKP mengharapkan, hendaknya semua pihak berperan serta dalam menyukseskan pembangunan, dengan semangat lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau pun golongan.

Usaha peningkatan ekspor perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah perlu terus melahirkan kebijaksanaan yang menunjang usaha ekspor, sementara dunia usaha, dan sektor produksi meningkatkan kerja keras, meningkatkan produktivitas dan efisiensi sebagai bentuk partisipasi.

FKP memahami bahwa penyediaan dana sangat terbatas. Namun diingatkannya kebutuhan akan lapangan kerja merupakan masalah yang benar-benar mendesak dan perlu mendapat penanganan.

Upaya peningkatan investasi, demikian FKP, merupakan hal yang mutlak diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja.

Diakuinya pemerintah telah berusaha dengan berbagai kebijaksanaan untuk meningkatkan investasi. Namun sementara menunggu realisasinya, FKP mengingatkan hendaknya sektor informal yang merupakan jembatan untuk mengantar mereka yang belum mendapatkan lapangan kerja, mendapat perhatian dari pemerintah.

Erat kaitannya dengan usaha peningkatan investasi, Fraksi Karya menyambut baik kebijaksanaan moneter dalam pengendalian jumlah uang yang beredar serta kebijaksanaan di bidang suku bunga untuk mengatasi demam dollar akhir-akhir ini yang ternyata membawa hasil.

Dalam kaitan ini pula, FKP mengusulkan agar Pemerintah tidak terlalu lama menunggu untuk menurunkan suku bunga sehingga sesuai dengan perbaikan iklim investasi.

Di lain pihak, pengendalian uang beredar hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat mendorong partisipasi dan kegairahan ekonomi dan meningkatkan daya beli rakyat.

Jurubicara FPDI Parulihan Silalahi mengharapkan agar pemerintah tetap meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu Fraksi PDI juga mengingatkan agar penggunaan bantuan luar negeri dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan agar untuk selanjutnya tidak terlalu menjadi beban bagi bangsa.

Sementara itu Jurubicara FABRI dan FPP masing masing Mukrom As'ad dan TA Lingga mengharapkan agar pengelolaan keuangan oleh negara lebih efisien. □

Sugyanto

P.T. HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL
Gedung Wisata Internasional
Jln. MH. Thamrin, Jakarta
Telepon 320107, Telex 61274 HQHII IA,
P.O. BOX 3409 JKT
NO. FACSIMILE : (62) (021) 326175
KODE POS JAKARTA 10230

KEMENANGAN G O L K A R YANG TELAH DICAPAI DALAM PEMILIHAN UMUM 1987 SEMAKIN MENJAMIN TETAP TEGAKNYA PANCASILA DAN UUD 1945 DEMI KESINAMBUNGAN
PEMBANGUNAN NASIONAL DI BAWAH PEMERINTAHAN ORDE BARU

Digitized by Google

Gagasan Diplomasi Kebudayaan Perlu Dukungan Konsep Dan Strategi Yang Jelas

Belum lama ini Menlu Mochtar Kusumaatmadja melontarkan gagasan baru mengenai praktek diplomasi kita di luar negeri. Diplomasi kebudayaan, demikian pemikiran yang dikedepankan Menlu Mochtar menjawab tantangan di masa datang. Dalam kaitan ini perlu pengkajian secara lebih mendalam apa yang hendak kita harapkan dari praktek diplomasi kebudayaan, dukungan apa yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan diplomasi kebudayaan kita di luar negeri oleh aparat Deparlu maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dr AMW Pranarka, dari CSIS, dalam percakapannya dengan Media Karya mengatakan, diplomasi kebudayaan merupakan gagasan yang baik dari Menlu Mochtar, namun untuk terwujudnya gagasan itu diperlukan adanya konsep dan strategi yang jelas. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa gagasan itu suatu pemikiran yang besar, tetapi pemikiran yang besar tuntutan yang diminta juga besar, yaitu kemampuan dari para pelaku dan kreativitas orang-orang yang akan menjalankan diplomasi kebudayaan.

Dalam diplomasi kebudayaan ada dua pertanyaan mendasar yang harus dipahami, apakah kebudayaan dalam artian makro atau mikro. Makro dalam hal ini keseluruhan proses hidup manusia sebagai proses kebudayaan. Sedang kebudayaan dalam artian mikro, terkait dengan elemen-elemen, ungkapan daripada kebudayaan terutama kesenian, bahasa, sejarah dan sebagainya.

Diplomasi sendiri memberikan gambaran adanya kegiatan yang dinamik, yang saling kait-mengait dengan masalah-masalah ekonomi, politik, teknologi, keamanan, pendidikan dan lain-lainnya, yang kesemuanya itu bergerak, tidak statis. Dengan demikian diplomasi kebudayaan harus ditempatkan pada konteks yag integralistik, dinamis, dan oleh karenanya perlu adanya kreativitas.

Menurut Pranarka, diplomasi kebudayaan dalam artian yang makro pengertiannya harus konsepsional dan fundamental, sementara diplomasi kebudayaan dalam artian lebih menunjukkan kepada sifat taktikal. Berbicara tentang diplomasi kebudayaan harus menempatkan hubungan luar negeri itu di dalam pendekatan kultural yang besar, yang kesemuanya itu dikaitkan dengan kepentingan nasional, dan terciptanya tatanan dunia yang tertib dan damai.

Selama ini menurut pengamatannya apa yang dilakukan atase kebudayaan kita di luar negeri tidak lebih sekedar biro jasa perjalanan (travel biro). Dengan demikian atase kebudayaan kita tidak menjalankan

AMW Pranarka.

diplomasi kebudayaan dalam artian yang kreatif. Atase kebudayaan diperlukan untuk memahami nilai-nilai kebudayaan bangsa sendiri, misalnya struktur masyarakat, problem masyarakat sendiri, soal Pancasila dan konstitusi dan sebagainya. Atase kebudayaan harus mampu menterjemahkan hal-hal itu untuk kepentingan orang-orang di luar negeri sehingga mereka mudah memahami tentang budaya bangsa Indonesia.

Dalam konteks dunia yang kompleks ini, kata Pranarka, diplomasi budaya tidak hanya sekedar menyelenggarakan misi kesenian. Ini baik, tapi apa besar manfaatnya dalam konteks yang lebih luas. Sebab semacam misi kesenian itu hanya merupakan alat saja. Alat dari strategi yang hendak kita capai dengan diplomasi budaya. Atau dengan kata lain misi kesenian hanyalah taktik belaka. Misi kesenian hanyalah merupakan bentuk keakraban kita dengan negara-negara lain, dan juga menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa Indonesia mempunyai kesenian.

Apakah dalam melaksanakan diplomasi budaya itu perlu melaksanakan lebih dulu diplomasi budaya dalam artian mikro? Menurut Pranarka yang paling penting konsep dan strateginya dulu yang harus jelas. Sebab kalau strategi dan konsep tidak jelas, lalu menjalankan diplomasi dalam artian mikro, maka hal itu hanya merupakan tahapan awal saja. Sementara dalam strategi dan konsep diplomasi budaya itu diperlukan adanya tahap-tahap operasional, tidak sekedar menjalankan kegiatan yang bersifat taktikal atau taktik-taktik saja tanpa strategi.

Peranan atase kebudayaan maupun atase perdagangan penting dalam menunjang pelaksanaan diplomasi kebudayaan. Tapi kesemuanya harus diawali dari adanya keterpaduan di dalam negeri sendiri. Misalnya departemen perdagangan, departemen luar negeri harus saling mendukung, tidak saling berusaha untuk menjadi raja untuk kepentingan sendiri. Kalau sampai terjadi pihak-pihak tersebut bermain sendiri-sendiri, maka bagi pihak lain akan mudah mempermainkan kita.

Nantinya diplomasi kebudayaan tidak hanya dilaksanakan secara kenegaraan tapi juga oleh masyarakat. Pelaksanaan diplomasi tidak hanya secara vertikal tapi juga secara horizontal, formal maupun non formal. Hal ini perlu adanya penataan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kesemrawutan. Pemerintah yang harus memacu sementara masyarakat yang bergerak melaksanakan diplomasi kebudayaan.

BM/NS

Diplomasi kebudayaan merupakan gagasan yang baik

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

TEKAD UNTUK MEMBANGUN, TIDAK TERGOYAHKAN

Presiden Soeharto, dalam melakukan kunjungan kerjanya di Sumatera Barat, pada pekan terakhir bulan Juni ini, telah meresmikan beberapa proyek sekaligus.

Proyek yang diresmikan dalam sehari itu di antarnya; proyek PIR PTP IV, Irigasi Batang Kapar dan peresmian pabrik semen unit IIIB PT Semen Padang di Indarung.

Menurut Presiden, saat meresmikan proyek di Pasaman ini, bahwa proyek-proyek tersebut besar artinya dalam usaha untuk memperbesar kemakmuran rakyat, khususnya orang-orang yang tinggal di sekitar proyek ini.

Presiden dalam peresmian beberapa proyek yang disertai Ibu Tien Soeharto, Mensesneg Sudharmono, mendagri Supardjo Rustam, Mentan Achmad Afandi mengatakan, bahwa dengan selesainya proyek Batang Kapar, Batang Kenaikan I, Batang Alin dan Batang Tinggiran, dapat menjadikan ribuan hektar sawah akan dapat diairi. Dengan demikian semakin terbukanya kesempatan untuk meningkatkan hasil pertanian. Dan dengan demikian pula kesempatan untuk peningkatan pendapatan para petani.

Sedangkan dengan diresmikannya Ophir, perkebunan kelapa sawit, diharapkan usaha dalam pembangunan di bidang pertanian akan dapat dirasakan hasilnya. Dengan diresmikannya proyek tersebut, Presiden berharap, agar hal ini dapat membangkitkan semangat petani dalam usaha meningkatkan pertaniannya.

Sementara itu peresmian proyek Lubuk Alung — Menggapoh Simpang Empat, bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas di wilayah tersebut. "Kelancaran lalu lintas itu sangat besar artinya dalam pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan masyarakat di daerah itu.

Presiden pada saat meresmikan perluasan pabrik Semen Padang mengatakan, semangat kita dalam membangun tidak akan pernah melemah. Kepercayaan kita bahwa dengan melalui pembangunan, kita akan menikmati hari esok lebih baik tidak akan pernah goyah.

Selanjutnya dikatakan oleh Presiden bahwa dalam tahun-tahun yang akan datang, bangsa Indonesia akan mengalami ujian berat dalam perjalanan pembangunan nasional. Tetapi tekad bangsa untuk terus tetap membangun tetap teguh tidak tergoyahkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya proyek-proyek pembangunan yang berhasil diselesaikan dimana-mana di seluruh tanah air.

Dan yang paling penting, kata presiden, semua kegiatan pembangunan itu pada akhirnya bertujuan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat. "Peningkatan kesejahteraan rakyat itulah yang kita pegang dalam segala gerak dan arah pembangunan kita. Baik dalam merencanakan pembangunan jangka pendek, menengah maupun panjang." BM

Digitized by Google

PERISTIWA NASIONAL DALAM GAMBAR

IDUL FITRI - *Presiden Soeharto, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri menghaturkan sungkem kepada ibunda Sumoharyomo di tempat kediaman Presiden jalan Cendana, sebagai tanda hormat dan maaf. Setelah acara sungkeman keluarga Presiden berhalal bihalal dengan keluarga terdekat.*

Digitized by Google

PERISTIWA NASIONAL DALAM GAMBAR

ULANG TAHUN - Presiden Soeharto, 8 Juni lalu genap berusia 66 tahun. Di tempat kediamannya, jalan Cendana, perayaan itu dilakukan dengan sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga saja. Tampak Presiden sedang memotong tumpeng dengan didampingi oleh Ibu Tien Soeharto dan Ibu Sumoharyomo.

Digitized by Google

PERISTIWA NASIONAL DALAM GAMBAR

KESENIAN BALI *- Presiden Soeharto, minggu ke dua bulan Juni tahun ini, membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) ke 9. Pesta kesenian yang dipusatkan di lapangan Puputan, Badung, Denpasar itu dihadiri oleh ribuan seniman dan masyarakat Denpasar. Tampak Presiden sedang menikmati sajian dari kesenian daerah tersebut.*

LIMA MILYAR *- Presiden Soeharto ketika berdialog dengan ibu-ibu yang tergabung dalam wadah PKK dalam pengambilan film tentang Keluarga Berencana dan kependudukan, di desa Singajaya, kecamatan Jonggol, Bogor, 10 Juni lalu. Film yang dibuat oleh UNICEF ini akan disiarkan ke seluruh dunia, dalam rangka menyambut jumlah bayi yang ke lima milyar.*

Digitized by Google

PERISTIWA NASIONAL DALAM GAMBAR

PUTRI CITRA *- Setelah melalui seleksi yang cukup panjang, akhirnya terpilih juga juara dari putri Citra. Tampak para pemenang dari mereka diterima oleh Ibu Tien Soeharto.*

Digitized by Google

Konsolidasi Kemenangan

Rapat Kerja Konsultasi antara DPP Golkar dan DPD Golkar Tingkat I se Indonesia telah berlangsung di Jakarta tanggal 9-10 Juni yang lalu. Forum konsultasi seperti ini dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar tidak jelas terumuskan, namun sebagimana dikatakan oleh Ketua Umum DPP Golkar, pertemuan tersebut diperlukan guna memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program Golkar. Rapat Kerja Konsultasi kali ini khusus membahas hasil-hasil Pemilu 1987 serta tindak-lanjutnya.

"Kita semua sependapat, bahwa dengan segala kekurangannya, Pemilu yang baru lalu telah berjalan dengan sukses," ungkap Ketua Umum DPP Golkar dalam sambutan pengarahannya di forum tersebut. Dikatakannya bahwa ukuran sukses yang

Dengan segala kekurangannya, pemilu dapat berjalan dengan sukses.

Digitized by Google

Kesuksesan pemilu itu dapat dijamin.

dimaksud adalah bahwa Pemilu telah berjalan lancar, aman, tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam arti langsung, umum, bebas dan rahasia, serta diikuti oleh sebanyak mungkin warga negara yang berhak memilih. Ketua Umum menggambarkan bahwa dalam kenyataannya pada tanggal 23 April yang lalu, mulai pukul 08.00 sampai 14.00, Pemilu telah berlangsung di 300.000 TPS yang ada di seluruh Indonesia dan diikuti tak kurang 91 prosen dari jumlah warga negara yang berhak memilih.

Namun yang lebih penting, seperti dituturkan oleh Sudharmono, hasil Pemilu harus dapat menjamin kesinambungan pembangunan, tetap dapat mengukuhkan persatuan dan kesatuan, serta menjamin kepemimpinan nasional tetap berada di tangan Orde Baru. Dan Golkar telah berperan dalam keberhasilan Pemilu seperti ini. Dengan hasil yang dicapai, yaitu kemenangan yang 73 prosen itu, Golkar akan mampu secara obyektif memelopori kesinambungan pembangunan, memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa. Golkar juga sudah mempunyai calon yang mantap untuk menjamin kepemimpinan nasional tetap di tangan Orde Baru. "Dengan komposisi jumlah kursi yang dicapai Golkar dalam lembaga DPR dan MPR telah dapat dibaca bahwa kesuksesan Pemilu itu dapat dijamin," ujar Ketua Umum.

Oleh Sudharmono diutarakan pula bahwa dukungan rakyat kepada Golkar telah menyeluruh merata di seluruh Indonesia. Hasil Pemilu yang lalu menunjukkan bahwa di seluruh daerah tingkat I Golkar telah mencapai kemenangan sekurang-kurangnya 50 prosen. Demikian pula hampir di seluruh daerah tingkat II Golkar telah memperoleh suara yang lebih besar dari kedua kontestan lain. "Ini semua merupakan keberhasilan Golkar yang tidak lain adalah atas usaha kita bersama sejak dini secara sungguh-sungguh, sehingga sasaran dapat terpenuhi," kata Sudharmono. Untuk itu semua, lanjutnya, DPP Golkar untuk yang ke sekian kalinya me-

Keberhasilan Golkar atas usaha bersama.

Digitized by Google

Hadir pula para sekretaris Dewan Pembina Golkar

kepada seluruh jajaran Golkar, terlebih kepada para pimpinan Golkar di daerah, yang telah bekerja keras mensukseskan Pemilu yang lalu. "Pemilu yang lalu bukan hanya suksesnya Golkar dalam pemilu, tetapi juga suksesnya Pemilu itu sendiri untuk mensukseskan perjuangan bangsa dalam pembangunan ini," tegas Sudharmono.

Di balik keberhasilan itu, Sudharmono memaparkan adanya tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa saat ini dan dimasa mendatang. Dikatakannya bahwa hal ini merupakan beban dan tanggung jawab Golkar. Rakyat yang telah memberikan kepercayaannya kepada Golkar hendaknya tidak dikecewakan. Itu berarti bahwa Golkar harus bekerja keras untuk memenuhinya. Demikian pengarahan Ketua Umum DPP Golkar.

Rapat konsultasi yang berlangsung dua hari itu telah mendengarkan pula laporan dari seluruh daerah, dan juga tanggapan dari unsur-unsur pimpinan jalur ABRI dan jalur Beringin. Pembahasan yang dilakukan dimaksudkan menetapkan pedoman langkah-langkah Golkar selanjutnya, yang meliputi penyusunan kelembagaan (MPR, DPR, DPRD) sebagai hasil Pemilu, dan konsolidasi Golkar selanjutnya agar Golkar secara dini dapat menyiapkan diri melaksanakan program-programnya dimasa mendatang.

Rapat yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta termasuk para Sekretaris Dewan Pembina Golkar itu berlangsung dalam waktu yang masih diliputi suasana Idul Fitri. Kesempatan ini dipergunakan oleh Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH, baik selaku pribadi maupun atas nama DPP Golkar, untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada para peserta, sekaligus berhalal bi halal, memohon maaf atas segala kesalahan di waktu yang lalu.

Penetapan Terpilih

Pada kesempatan terpisah seusai Rapat berlangsung, Sekjen DPP Golkar Sarwono Kusumaatmadja memberikan penjelasan kepada kalangan pers yang meliput peristiwa organisasi itu. Dijelaskannya bahwa susunan calon dari Fraksi Karya Pembangunan dalam DPR hasil Pemilu 1987 tetap tidak mengalami perobahan sesuai Daftar Calon Tetap yang telah disahkan. Dalam proses penetapan terpilih untuk keanggotaan DPR, DPP Golkar tetap berpegang pada nomor urut seperti tercantum dalam Daftar Calon Tetap. Bila ada calon terpilih yang mengundurkan diri, calon urutan berikutnyalah yang akan mengisinya.

Adapun mengenai penyusunan keanggotaan MPR (unsur imbangan hasil Pemilu), di mana Golkar memperoleh 151 kursi, akan diputuskan oleh DPP Golkar dalam waktu dekat. Dalam hubungan ini dikatakan oleh Sekjen bahwa penyusunannya tidak dititikberatkan kepada nomor urut calon, namun lebih didasarkan kepada kebijaksanaan DPP Golkar sesuai dengan kebutuhan organisasi Golkar dalam pengisian lembaga MPR tersebut. Meskipun demikian, DPP Golkar juga akan menampung dan mempertimbangkan usulan-usulan yang diajukan oleh Daerah-daerah. □wit

Digitized by Google

Suatu keuntungan nyata memiliki Toyota Kijang, selain mesinnya bandel, perawatannya mudah dan murah, juga serbaguna penggunaannya.
Toyota Kijang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, bahkan bentuk kendaraan keluarga senyaman sedanpun dapat Anda peroleh dari Toyota Kijang.
Hubungi Showroom Toyota terdekat dan tentukanlah pilihan Anda.
TOYOTA KIJANG
Toyota Kijang TRACER
Toyota Kijang COMMANDO
Toyota Kijang FAMILY
Toyota Kijang ROADSTER
TOYOTA
KIJANG
SEMAKIN MANTAP
DAN NYAMAN
TOYOTA
TERPILIH KARENA TERPERCAYA
Andalan Dunia Usaha
PT. TOYOTA - ASTRA MOTOR JL. JEND. SUDIRMAN No.5 TELP. 587551 - JAKARTA

Kemenangan Pemilu 1987 Bukti Rakyat Makin Percaya Kepada Golkar

Agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan rakyat

Tiga pekan, pada bulan Sawal tahun ini, Sudharmono, Ketua Umum DPP Golkar, kembali mengunjungi kader-kadernya di daerah-daerah, setelah sebulan lebih — selesai pelaksanaan Pemilu — tidak mengadakan kunjungan kerjanya di luar kota.

Pekan terakhir bulan Juni, Sudharmono, yang juga Menteri Sekretaris Negara, di dampingi Ibu EN Sudharmono, kembali mengunjungi para kadernya di beberapa daerah Sumatera.

Pada bulan yang sama dalam tahun ini juga, Sudharmono, sudah melakukan empat kali kunjungannya di beberapa daerah, masing-masing Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada pekan berikutnya, perjalanan kerja Ketua Umum ini dilanjutkan ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dan beberapa hari berikutnya, dilanjutkan ke daerah Jawa Barat.

Aceh — Padang

Perjalanan kerjanya selama empat hari di wilayah Sumatera dan Aceh, mendapatkan kehormatan pertama dalam rangkaian kunjungan kerjanya antara lain Medan, Pekan Baru dan terakhir Padang. Perjalanan Ketua Umum di daerah tersebut dimaksudkan untuk mengadakan silaturahmi sekaligus mengucapkan rasa terima kasih dan rasa bersukur atas kerja keras dari daerah tersebut dalam memenangkan Golkar dalam Pemilu 1987.

Kemenangan Golkar dalam Pemilu 1987, seperti yang diumumkan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) adalah 73 persen suara dari yang diperebutkan. Suara yang diperoleh ini, kata Ketua, tidak terlepas dari sumbangan-sumbangan suara yang ada di daerah Aceh, misalnya. Dalam pemilu tahun ini telah menyumbangkan suaranya cukup mengesankan. Golkar yang tidak pernah menang selama pelaksanaan tiga kali Pemilu di wilayah ini, tahun ini mempunyai andil yang besar dalam perolehan suara secara nasional. Pelaksanaan Pemilu tahun ini, Golkar memperoleh 59 persen suara di daerah itu.

Kemenangan Golkar di daerah Aceh disambut gembira oleh Ketua Umum Golkar. Pasalnya, selama empat kali Pemilu diselenggarakan, semenjak Orde Baru, baru kali ini Golkar memperoleh kemenangan. Bahkan Ketua Umum mengakui, pada saat menunggu hasil Pemilu 1987 di daerah Aceh ini, jantungnya merasa berdebar-debar.

Selama tiga kali pelaksanaan Pemilu, Golkar selalu kurang beruntung. Tahun 1971, Golkar kalah sedikit dengan PPP, dengan mendapatkan 49 persen suara. Dan tahun-tahun berikutnya, 1977 dan 1982, perolehan suara Golkar di daerah itu terus saja menunjukkan penurunan. Dan baru Pemilu 1987 ini, Golkar unggul.

Sumbangan perolehan suara secara nasional juga diperoleh dari Sumatera Utara. Daerah yang dianggap basis Golkar ini juga mempunyai andil yang tidak kalah pentingnya. Dalam pelaksanaan Pemilu, Sumatera Utara menyumbangkan 15 kursi di DPR.

Perolehan kursi yang didapat Sumatera Utara, dalam pelaksanaan Pemilu 1987 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Pemilu tahun sebelumnya. Yaitu memperoleh tambahan 1 kursi dari tahun sebelumnya. Kendati ada peningkatan, daerah tersebut masih belum dapat meraih target yang ditetapkan. Dalam Pemilu 1987 ini, Sumut ditargetkan mendapatkan 16 kursi, tapi yang dapat digapai 15 kursi. "Kami masih belum berhasil dalam melakukan kaderisasi," ujar Kaharudin Nasution, merendah. Kendati Sumut tidak dapat meraih target, oleh Ketua Umum

Digitized by Google

Golkar dinilai lebih dari sukses.

Sumbangan perolehan suara, selain dari daerah-daerah lain juga datang dari Sumatera Barat. Daerah yang diandalkan oleh DPP Golkar itu juga tidak kalah pentingnya. Selama empat kali Pemilu untuk Sumatera Barat. Golkar selalu menang, dan perolehan suaranyapun selalu naik kecuali pada Pemilu 1982, yang mengalami penurunan 2 persen.

Hasil yang diperoleh selama empat kali Pemilu, tahun 1971 Golkar Sumbar memperoleh 62 persen, 1977 sekitar 66 persen, 1982 sekitar 64 persen dan Pemilu 1987 ini mengalami lonjakan cukup tinggi dengan memperoleh 78 persen.

Menanggapi hasil yang dicapai Sumbar ini, Azwar Anas, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar daerah itu mengingatkan, agar Golkar tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. "Sekali mengecewakan, maka kepercayaan itu bisa hilang," ujar Azwar.

Sementara itu, Ketua Umum Golkar Sudharmono, setiap kali memberi sambutannya selalu menekankan bahwa kemenangan Golkar dalam Pemilu 1987 ini membuktikan bahwa rakyat makin mempercayai dan memahami cita-cita Golkar dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk juga pembangunan keagamaan yang dianut oleh warga negara Indonesia.

Oleh Karena itu, Sudharmono meminta agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. "Kita masih harus bekerja lebih keras lagi, karena masih banyak yang harus kita kerjakan," ujar Ketua umum.

Ideologi

Pelaksanaan Pemilu 1987, yang ditandai dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak lagi merupakan perjuangan yang didasarkan kepada ideologi, tapi didasarkan kepada program.

Untuk dapat melanjutkan program tersebut, ujar Ketua Umum, Golkar harus berperan. Setidak-tidaknya, dalam Pemilu 1987 ini Golkar dapat meraih kemenangan 70 persen suara secara nasional. Golkar harus dapat memberi arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, kata Ketua Umum, agar Golkar harus dapat melaksanakan tugas nasional yang dinamis. Maksudnya, harus mampu menjaga stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, keamanan, politik dan sosial budaya. Dengan kata lain Golkar harus dapat melanjutkan dan menjamin kelangsungan pembangunan untuk menuju tahap tinggal landas.

Wawasan Golkar

Pada bagian lain sambutannya, seperti yang diutarakan di Padang, Ketua Umum mengajak kita kembali menilai dan merenungkan tentang suksesnya Pemilu menurut wawasan Golkar. Dikatakan oleh Ketua Umum bahwa pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali itu merupakan mekanisme yang penting dalam melaksanakan demokrasi Pancasila. Dimana dalam Pemilu itu rakyat menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam lembaga MPR/DPR.

Golkar, kata Ketua Umum lebih lanjut, sebelum berusaha untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maka yang lebih diutamakan adalah suksesnya pemilu itu sendiri. Yaitu Pemilu yang dapat berlangsung sesuai dengan aturan — Luber (Langsung, umum, bebas dan rahasia), dan diikuti oleh warga yang berhak memilih.

Di samping itu, sebelum mengajak rakyat untuk memilih Golkar, lebih dulu mengajak rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, yang sesuai dengan hati nuraninya.

Lebih lanjut dikatakan, pemilu dapat dikatakan sukses, apabila dapat menjamin tetap tegaknya rasa kesatuan dan persatuan bangsa, tetap menjamin stabilitas yang dinamis, yaitu stabilitas di bidang ekonomi, politik, keamanan dan stabilitas di bidang sosial dan budaya.

Dengan adanya kesatuan dan persatuan, serta stabilitas yang dinamis itulah, kata Ketua Umum, nantinya akan dapat menjamin kelanjutan dan kesinambungan pembangunan nasional "Ini yang diutamakan dan yang menjadi wawasan Golkar. Dan Pemilu yang demikian itulah yang kita utamakan," ujar Ketua Umum.

Lebih lanjut dikatakan, dalam setiap kesempatan Golkar selalu memberi wawasan dan janji bahwa Golkar berusaha untuk mensukseskan pemilu secara nasional dan mensukseskan Golkar dalam Pemilu itu sendiri.

Apabila Golkar dapat meraih suara 68 persen secara kwantitatip atau 70 persen kursi di DPR, diharapkan oleh Ketua Umum Golkar dapat memberikan arah perjuangan bangsa. Dan itulah yang menjadi konsep Golkar. Untuk itu, Golkar harus berjuang secara gigih dan didasarkan kepada Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.☐ BM

P.T. PERUSAHAAN PELAYARAN KHUSUS LEPAS PANTAI

BHAITA

KANTOR PUSAT : Wisma Gunung Sewu Lt. 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 22 – Jakarta
Telp. : 516785, 514721. Telex : 61870. Bhaita ia. Fax : 514156

KANTOR CABANG: Jalan Yos Sudarso No. 10 – Sorong, Irian Jaya
Telp. : (0951) – 21874. Telex : 77132 Bhaita ia

BIDANG USAHA :

– JASA ANGKUTAN LAUT DENGAN PENYEDIAAN LANDINGCRAFTS, TUGBOATS DAN BARGES BAIK DALAM PELAYANAN " PORT TO PORT " MAUPUN KEDAERAH " REMOTE AREA "

SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN P.T. PERUSAHAAN PELAYARAN KHUSUS LEPAS PANTAI "BHAITA" , MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERSELENGGARANYA PEMILU 1987 DENGAN AMAN TERTIB DAN LANCAR SERTA MENYAMBUT GEMBIRA SUKSES DAN KEMENANGAN YANG DICAPAI G O L K A R.

Digitized by Google

Tantangan Golkar, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Perjalanan Ketua Umum Golkar dan rombongan ke Jabar kali ini, merupakan kunjungan silaturakhmi dan syukuran, antara Ketua Umum Sudharmono SH, dengan jajaran Golkar se Jabar. Tak kurang dari lima ribu keluarga besar Golkar memenuhi gedung pertemuan Pusbangsisop Angkatan Darat, terdiri dari Ketua Dewan Penasehat, sekretaris, Ketua DPD Golkar Jabar dan Ketua Dewan Pertimbangan Jabar Yogi SM. Dalam sambutan pengarahannya Ketua Umum Sudharmono SH, menyatakan kebahagiaannya atas prestasi yang sangat baik dalam raihan suara yang melebihi target di Jabar. Juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua kader Golkar di segenap jajaran di Jabar yang dengan kerja keras tak henti-hentinya telah membuktikan keberhasilannya dalam meraih kemenangan.

Ditegaskan lebih jauh oleh Ketua Umum Golkar, bahwa kemenangan Golkar bukanlah untuk sombong, takabur, kemenangan Golkar merupakan tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena nyata-nyata rakyat sebagian besar memberikan kepercayaannya dalam pemilu yang baru lalu kepada Golkar.

Karena itu lanjut Ketua Umum, rakyat janganlah sampai kecewa terhadap Golkar. Selesainya Pemilihan Umum yang baru lalu dan Golkar mendapat kepercayaan yang demikian besarnya bukan akhir suatu perjuangan bahkan sesungguhnya itulah awal dari sesuatu perjalanan dalam melanjutkan cita-cita pembangunan berikutnya.

Ragu

''Semula saya ragu-ragu pada Jabar, tapi keraguan saya hilang seketika bahwa pada kenyataannya tujuh puluh satu persen lebih Golkar Jabar dalam Pemilihan Umum yang baru lalu,'' tutur Sudharmono.

Semuanya tidak bisa kita pungkiri lanjutnya, ini hasil kerja keras jajaran Golkar di seluruh Jabar dalam meningkatkan prestasi suara di tahun delapan tujuh. ''Memang Jabar hebat dan hebat!,'' puji Ketua Umum yang disambut dengan tepuk tangan hadirin. ''Tapi meskipun demikian saya berharap pada tahun 1992 nanti posisi Golkar Jabar mampu mencapai kembali posisi seperti tahun 1971, yang lebih tinggi prosentasenya daripada sekarang. Disamping kita semua sekarang sedang mensyukuri kemenangan, hendaknya mulai saat ini kita harus instropeksi, mengevaluasi, dan mulai lagi konsolidasi.''

Dan khusus kepada calon-calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II, Sudharmono memesankan, hendaknya jangan mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat kepada Golkar. Kita harus pandai menjembatani aspirasi rakyat. Golkar bukanlah organisasi yang hanya pandai menawarkan program melainkan harus mampu mengajak rakyat untuk menjabarkan program-program itu. Dalam kesempatan itu Ketua Umum menyerahkan piagam penghargaan secara simbolik kepada enam Ketua DPD Golkar Tingkat II, Serang, Kodya Bogor, Kodya Cirebon, Garut, Kab. Poerwakarta, Kodya Bandung.

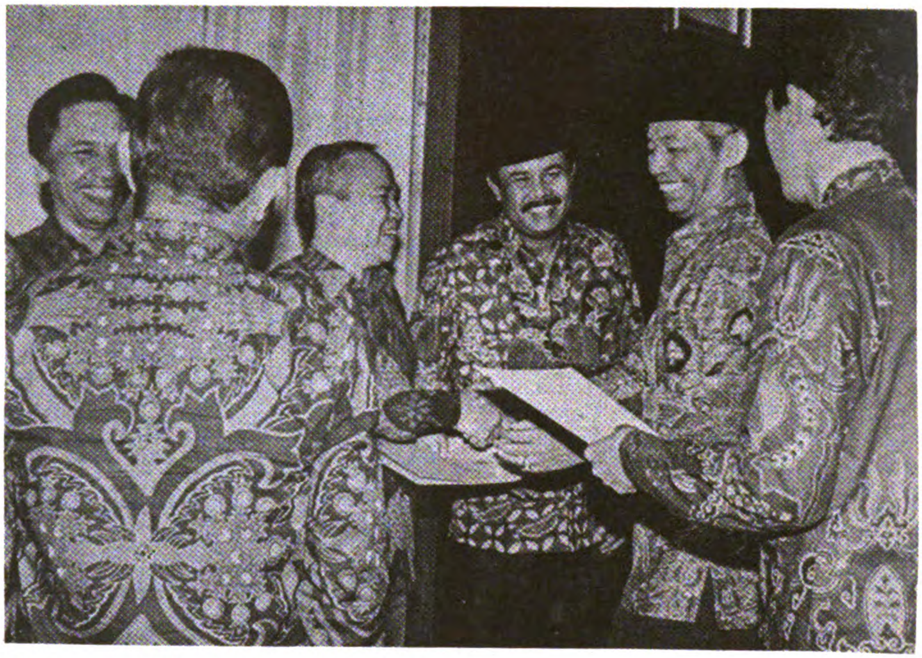

Kemenangan Golkar bukan untuk sombong

Seperti dalam setiap kunjungan Ketua Umum dalam akhir amanatnya selalu menyampaikan paket, baik dari Banpres atau YAMP. Sumbangan yang diberikan kali ini oleh Ketua Umum Golkar, selaku Mensesneg atau sebagai Sekretaris YAMP, bukan hadiah karena kenaikan prosentase Golkar di Jabar, kata Ketua Umum.

Bantuan Presiden merupakan amanat yang harus diteruskan kepada rakyat. Terhadap bantuan dalam bentuk apapun, setiap kader Golkar wajib mengawasi pelaksanaannya karena Golkar harus tampil sebagai pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Sumbangan yang disampaikan ini antara lain: untuk pembangunan ruang belajar pesantren Riyadul Muttaqin, di Kampung Bengkok Dago Atas, Kodya Bandung sebesar lima belas juta rupiah, sedangkan untuk Masjid Nurul Huda Kelurahan Padasuka Kodya Bandung tujuh juta rupiah, Masjid Jami Al Ikhlas Kuta Jaya Kab. Sukabumi sepuluh juta rupiah, Masjid Al Hikmat Blok 12 Perumnas Depok Tengah Kab. Bogor dua belas juta rupiah.

Sedangkan untuk pembangunan Masjid Agung Sumedang lima puluh juta rupiah, Masjid At-Taqwa Desa Karanghuni Kab. Cirebon delapan juta rupiah, Masjid Al Barokah Kampung Bolong Desa Selapraya Kab. Pandegelang sepuluh juta rupiah, sedangkan Masjid Jami Al Jihad Kab. Karawang mendapat bantuan sebesar seratus lima puluh juta Rupiah, Masjid Jami At-Taubah Desa Sukamulya Kab. Karawang lima belas juta rupiah. Untuk Kabupaten Subang, Mesjid Al Muttaalimin Desa Rancajaya delapan juta rupiah, sedangkan untuk Masjid At Taqwa Desa Arjasari Kabupaten Indramayu lima belas juta rupiah, Masjid Jami Kecamatan Kertasmaya, Kab. Indramayu tujuh juta rupiah, dan untuk pembangunan Masjid Jami Baiturahman Desa Blukbuk Kabupaten Tangerang tujuh juta rupiah.

Giliran Kabupaten Majalengka mendapat sumbangan Masjid dari YAMP untuk Desa Jagasari Kecamatan Cikijing senilai seratus tiga juta rupiah dengan ukuran 17 x 17 m.

Baik bantuan Presiden atau YAMP untuk sarana keagamaan di Jabar diserahkan melalui Kepala Daerahnya masing-masing malam itu dengan penuh kebahagiaan. Malam itu acara juga dimeriahkan oleh Tom Tam Group dan penyanyi Teti Kadi.☐

Rendy MS

Digitized by Google

Kemenangan Golkar Bukan Untuk Kesombongan

Pernyataan secara gamblang dan berulang-ulang, bahwa kemenangan Golkar bukan lantas menjadikan kita sombong dan takabur, disambut penuh perhatian massa Golkar di tiga tempat, masing-masing di Jatim, yang mengambil tempat di AULA Petro Kimia Gresik, Yogyakarta di Kridosono, dan Jateng di gedung megah BPD, dalam acara silaturahmi halal Bihalal antara Ketua Umum Golkar dan rombongan dari pusat dengan keluarga besar Golkar TK-II dan TK-I di tiga Propinsi itu.

Selanjutnya Ketua Umum Sudharmono SH menguraikan secara kronologis tentang prestasi yang dicapai Golkar dalam Pemilu yang baru lalu. Dikatakannya bahwa kemenangan Golkar adalah keberhasilan kita semua seluruh jajaran Golkar dari berbagai tingkatan. Keberhasilan itu adalah karena kerja keras kita semua warga Golkar jauh sebelum pelaksanaan Pemilu.

Kemenangan yang diberikan oleh rakyat pemilih kepada Golkar memang sangatlah wajar dan pantas, rakyat telah lama berdialog dengan program-program Golkar, melalui konsultasi dan konsolidasi secara terus menerus, ditambah lagi dengan pelaksanaan program karakterdesnya dan kader-kader fungsional yang ada diberbagai bidang yang semuanya itu berperan dalam mensukseskan Pesta Demo krasi yang baru lalu.

Kemenanganlah akhirnya yang kita peroleh di seluruh tanah air. Tapi setelah menang bukan berarti telah selesai cita-cita perjuangan Golkar dan cita-cita perjuangan Bangsa, malah menurut saya, kata Ketua Umum, kemenangan Golkar pada Pemilu yang baru lalu adalah merupakan permulaan untuk melanjutkan cita-cita perjuangan Bangsa dalam menyongsong era tinggal landas untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Masih panjang perjalanan yang harus kita tempuh, masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita atasi. Sedangkan rakyat telah menaruh kepercayaan pada Golkar yang berarti sekaligus menaruh harapan yang besar pada Golkar dalam mensejahterakan kehidupan Bangsa. Oleh karena itu kerja keras tidak akan berhenti hingga disini, kita akan terus kerja keras, kita terus memperbaiki kekurangan-kekurangan masa silam dan akan mempertahankan sekaligus meningkatkan yang telah baik di masa sekarang untuk masa-masa yang akan datang.

Kemenangan adalah suatu prestasi yang harus kita syukuri, syukur kepada Tuhan YME dan syukur pada diri sendiri. Tapi kemenangan bukan untuk menjadikan kita lupa kepada tugas-tugas berikutnya. Tugas-tugas hari esok telah berada di depan kita semua. Golkar telah menang bahkan kemenangannya di luar dugaan semua orang. Berarti telah demikian besarnya sebagian rakyat Indonesia memberikan kepercayaan yang bulat kepada Golkar.

Perjalanan yang ditempuh masih panjang

"Selaku pimpinan saya ajak semua warga Golkar untuk tetap meningkatkan kerja keras dengan rasa persatuan dan kesatuan, penuh solideritas demi terciptanya suasana yang kita inginkan bersama yaitu masyarakat yang tenteram secara lahir dan tenteram secara bathin," ujar Sudharmono.

Baik di Yogyakarta, Jatim dan Jateng, Ketua Umum memuji dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para kader Golkar yang telah berhasil dengan kerja kerasnya sehingga Golkar mencapai kemenangan gemilang.

Atas nama DPP Golkar, di tiga Propinsi itu, Ketua Umum Sudharmono SH, menyampaikan piagam Penghargaan untuk diteruskan kepada para Kader di daerahnya masing-masing.

Selanjutnya Ketua Umum menyatakan, sebagai manusia biasa, kita sesama manusia di suasana silaturakhmi yang masih diliputi suasana halal bilhalal selaku pribadi dan atas nama DPP menyampaikan permohonan maaf lahir dan bathin, semoga kita semua akan mendapat ridlo Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas perjuangan selanjutnya.

Dan kepada para pejuang Golkar yang dalam menyongsong Pemilu yang baru lalu meninggal akibat kecelakaan ataupun sakit, kita semua wajib mendo'akan agar arwahnya diterima di pangkuan Tuhan YME sesuai dengan amal dan pengabdiannya selama di dunia.

Dalam kesempatan kunjungan itu, Sudharmono SH selaku Mensesneg atau sebagai Sekretaris YAMP menyerahkan bantuan Presiden dan bantuan YAMP untuk beberapa proyek pembangunan, baik pembangunan sarana keagamaan ataupun pembangunan untuk sarana pendidikan di ketiga Propinsi: Jatim, Jateng dan DIY. Bantuan yang diberikan ini, kata Sudharmono selanjutnya, bukan kado karena kemenangan Golkar, tapi suatu bukti bahwa Pemerintah akan terus membangun sarana-sarana keagamaan dan sarana-sarana pendidikan karena dua hal itulah media yang sangat vital dalam rangka membangun manusia seutuhnya. Golkar dalam hal ini harus menjadi suri tauladan dalam mengamankan semua sarana, baik sarana yang sedang dibangun, yang akan dibangun maupun yang telah dibangun. Seperti biasanya sesuai acara silaturakhmi, artis Safari yang diwakili oleh Eddy Sud, Titik Puspa, Mus Mualim, Benyamin. S menyajikan nada, vokal, irama, dan canda, semua ikut tawa, antara tawa kemenangan dan tawa kesyukuran. ☐ **Rendy MS**

Digitized by Google

Kehormatan Pertama Buat NTB

Pertengahan Juni lalu, Ketua Umum Golongan Karya Sudharmono SH beserta rombongan mengadakan silaturahmi ke propinsi Nusa Tenggara Barat. Silaturahmi tersebut dimaksud untuk bertemu dengan semua kader Golkar yang dalam pemilu baru lalu telah tampil gigih untuk memenangkan Golkar sehingga mampu meraih kemenangan 73 persen secara nasional.

Kehadiran Sudharmono dan rombongan di Mataram dalam rangka silaturahmi dan syukuran atas kemenangan Golkar itu, merupakan kehormatan tersendiri bagi NTB. Mengapa? Karena setelah pemilu, NTB adalah propinsi pertama di luar pulau Jawa yang mendapat kehormatan kunjungan kerja Ketua Umum DPP Golkar.

NTB tentu berbangga dengan kehormatan tersebut. Namun kehadiran Sudharmono dan rombongan di NTB tidak hanya dalam rangka syukuran, tetapi adalah kunjungan kerja. Karena pada malam itu Sudharmono juga membuka Rapat Kerja Konsultasi Daerah Golkar se-NTB -suatu persiapan dini menghadapi Pemilu 1992-.

Sikap para fungsionaris Golkar NTB yang tidak terlena kemenangan, dipuji oleh Sudharmono. Padahal daerah ini meraih suara 82,06 persen untuk Golkar dalam pemilu baru lalu. "Kita memang harus melakukan persiapan-persiapan dini untuk pekerjaan apa saja," tandas Sudharmono dalam sambutan pengarahannya. "Sikap dan tekad para pengurus Golkar NTB yang tidak mabuk kemenangan sehingga melakukan persiapan sejak sekarang untuk menghadapi pemilu 1992 sungguh harus diteladani."

Selain memuji kesiagaan dini NTB, Sudharmono dalam sambutannya mengurai panjang lebar tentang arti perjuangan Golkar dan kemenangan yang sudah dicapai. Perjuangan Golkar, katanya, tidak berhenti setelah kemenangan pemilu. Sukses meraih mayoritas suara dalam pesta demokrasi yang baru lalu, tidak membuat Golkar membusung dada sehingga lupa pada kerja yang menanti di masa depan. Bagaimanapun juga, kemenangan pemilu tidak menjadi tujuan Golkar. Artinya, setelah menang Golkar lantas tinggal diam membuai diri. "Kemenangan pemilu merupakan langkah awal bagi Golkar mengemban kepercayaan dan tantangan bangsa yang membentang di masa depan," kata Sudharmono. Dalam pengertian seperti ini, maka sukses pemilu baru lalu, bukan menjadi sukses Golkar, tapi sukses bangsa.

Satu hal yang cukup gamblang terbaca dari pemilu lalu, bahwasanya, rakyat telah semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Salah satu petunjuk akan hal ini adalah kenyataan bahwa 91 persen rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih menggunakan haknya. "Bagi negara dengan penduduk sangat banyak dan ukuran sangat luas serta terdiri dari pulau-pulau yang tersebar luas di persada nusantara, hasil 91 persen pemilih yang memberikan suaranya merupakan fakta yang patut dibanggakan. Jarang negara lain mampu mencatat hal seperti itu," kata Sudharmono.

Kebanggaan bertambah lagi karena pemilu 1987 dilaksanakan dalam suasana dimana aturan main semakin dihormati. Hal ini disebabkan antara lain, suasana kekeluargaan dalam pelaksanaan pemilu lebih terasa, sehingga penyelenggaraan pesta demokrasi ini terasa lancar tanpa ketegangan berarti. Kemudian sukses di bidang politik berupa diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara sejak 1983 merupakan pendukung aturan main yang semakin dihormati itu.

Dan bagi Golkar, pemilu baru lalu menampilkan prestasi lain lagi. Ternyata kepercayaan rakyat kepada Golkar semakin merata. Di seluruh propinsi di tanah air, Golkar sudah mencatat kemenangan di atas 50 persen, kecuali dua propinsi yang walaupun di atas 50 persen tapi masih di

Rakyat akan semakin sadar akan hak dan kewajibannya.

Digitized by Google

bawah 60 persen, yaitu DI Aceh dan DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Sudharmono berpesan kepada kader-kader Golkar di NTB agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan rakyat yang sudah disalurkan kepada Golkar itu. "Kepercayaan rakyat itu harus kita kembalikan bagi kepentingan rakyat banyak," ujarnya. Sebaliknya rakyat pasti kecewa bila Golkar tidak mampu melaksanakan kepercayaan itu.

Masalahnya sekarang bagaimana mempertahankan kepercayaan itu? Jawabannya hanya satu. Setelah menang, jangan terpukau. Kepercayaan rakyat hanya bisa dipertahankan bila Golkar tidak lupa melakukan konsolidasi terus menerus. "Hanya dengan melanjutkan konsolidasi rakyat akan semakin sayang pada Golkar," kata Sudharmono.

Karena sadar akan hal itu, maka Golkar telah mengadakan rapat konsolidasi dengan daerah-daerah seluruh Indonesia di Jakarta 9-10 Juni baru lalu. Tentang prestasi NTB yang mampu meraih kemenangan 82,06 persen dari target 71,43 persen, Sudharmono menyatakan salut.

Senada dengan Sudharmono adalah penegasan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar NTB Gatot Suherman. Gubernur NTB ini menyatakan, kemenangan Golkar di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya itu adalah berkat kerja keras semua kader Golkar yang melibatkan para ulama, pemuda, komisaris dan simpatisan Golkar lainnya.

Dalam nada dan gaya yang persuasif, dia mengungkapkan pula bahwa kemenangan yang diraih NTB juga karena daerahnya melaksanakan dengan patuh petunjuk-petunjuk organisasi yang selama ini diberikan. Dan terlebih lagi, kemenangan Golkar di NTB disebabkan karena rakyat disini telah tumbuh kepercayaan diri. "Mereka semakin yakin dengan tekadnya membangun NTB yang mempunyai harga diri."

Seperti biasa, dalam kunjungan silaturahmi sehari di NTB, Sudharmono selaku Menteri Sekretaris Negara Menyerahkan Surat Keputusan Presiden tentang bantuan pembangunan mesjid di beberapa tempat di NTB yang menelan jumlah sekitar Rp 116 juta.

Selain itu sebagai tanda terima kasih kepada seluruh kader Golkar NTB yang tersebar di propinsi ini, Sudharmono menyampaikan piagam penghargaan secara simbolis yang diserahkan lewat para komisaris. *"Selamat atas suksesmu NTB."*

Usai melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke NTB, Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH beserta Nyonya EN Sudharmono dan rombongan, menuju Bali untuk keperluan yang sama. Dan setelah menemani bapak Presiden Soeharto meresmikan Pesta Kebudayaan Bali, rombongan menuju Gedung Wanita di Denpasar untuk bertatap muka dan silaturahmi dengan para kader.

Berlainan dengan di Mataram dimana silaturahmi dimeriahkan dengan pertunjukan musik dan acara santap malam, maka silaturahmi di Denpasar berlangsung sederhana dan singkat saja.

Kepercayaan rakyat pada Golkar makin merata.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar propinsi Bali Prof Ida Bagus Mantra dalam sambutannya menyatakan bahwa pemilu baru lalu cukup sukses di propinsi yang menjadi tanggungjawabnya, walaupun di beberapa kabupaten Golkar memperoleh suara naik, sementara di beberapa kabupaten lain, turun.

Untuk pemilu 1987, Golkar Bali berhasil menyumbangkan 87, 75 persen suara. Perolehan yang sudah sangat tinggi, ini ternyata turun 1,05 persen dibanding pemilu 1982. Namun menurut Ida Bagus Mantra, angka penurunan itu sesungguhnya relatif dan sangat kecil dibanding prestasi yang sudah dicapai. "Karena itu dengan penurunan ini jangan sampai kita mengecilkan arti perjuangan yang sudah dikerahkan," ujarnya.

Apapun kenyataan, dia menghimbau semua kader dan fungsionaris Golkar Bali agar mawas diri dan harus bersyukur atas prestasi tersebut. Pengalaman pemilu baru lalu, harus menjadi pelajaran bahwa untuk pemilu mendatang, yaitu 1992, tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan kerja keras dan melakukan persiapan sejak dini.

Ada beberapa hal yang menyebabkan prestasi Bali agak menurun kali ini dibanding 1982. Salah satu yang diungkapkan secara pas oleh Ida Bagus Mantra adalah bahwa Pemilu itu adalah karya bangsa yang sangat besar, sedangkan aparatur di desa sangat terbatas.

Terlepas dari apapun hasil pemilu 1987, kini saatnya kita memusatkan perhatian pada masalah-masalah pembangunan. Kita tidak persoalkan siapa-siapa yang duduk di lembaga legislatif dan siapa tidak. Bagi kader Golkar, pengabdian bisa dilakukan lewat jalur apa saja. Sebagaimana Sudharmono, dia mengingatkan agar kepercayaan yang diberikan rakyat kepada Golkar jangan sampai disalahgunakan.

Memadai

Sementara itu Ketua Umum Golkar Sudharmono SH dalam pengarahannya sekali lagi mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat yang sudah diberikan kepada Golkar, jangan sampai disalahgunakan sehingga rakyat akhirnya kecewa. "Rasanya kurang lengkap dan tetap mengganjel di hati saya bila belum bersilaturahmi ke Bali ini," ujar Sudharmono yang disambut tepuk tangan.

Kendati dalam pemilu 1987 prestasi Golkar Bali turun dibanding pemilu 1982, namun secara keseluruhan prestasi Golkar di tempat ini sejak pemilu 1977, tetap mantap dan memadai.

Yang menjadi persoalan sekarang, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar di balik prestasi Golkar di Bali dalam pemilu baru lalu. "Kita harus sejak sekarang mengalihkan perhatian kita pada masalah pembangunan dan pemilu 1992 mendatang," pinta Sudharmono. Tantangan untuk pemilu 1992, tidak ringan, karena saat itu nanti makin banyak pemilih yang berhak memberi suara, dan tambahan lagi mereka adalah pemilih-pemilih yang semakin kritis.

Pengalaman empat pemilu, membuat jajaran Golkar harus mengadakan evaluasi dan persiapan dini baik yang bersifat edukatif maupun strategi operasional.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali melanjutkan dan memantapkan konsolidasi sejak sekarang. Tidak boleh tinggal diam karena pemilu 1992 masih lama. "Tuntutan pemilu 1992 justru konsolidasi. Karena itu ukuran bagi sukses Bali nantinya adalah pemilu 1992 itu," kata Sudharmono. □ TG

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA ORGANISASI

INGIN LIHAT MARKAS GOLKAR

Keinginan Keluarga Besar Golongan Karya, Kabupaten Malang untuk dapat melihat dari dekat markas besar Golongan Karya di Jakarta akhirnya terlaksana juga.

Rabu, 25 Juni lalu, rombongan sebanyak 250 orang dari kabupaten tersebut, yang terdiri dari pembantu Ketua Dewan Penasehat yang meliputi; 31 kecamatan, pengurus DPD Tingkat II, Komisaris Kecamatan, Komisaris Desa, Juru kampanye Pemilu 1987 dan simpatisan Golkar datang di DPP Golkar.

Kedatangan mereka di DPP Golkar diterima Ketua DPP Golkar Sukardi dan didampingi oleh Ir Akbar Tanjung, AA Oka Mahendra, Moerdopo, Sukarno MPA serta fungsionaris Golkar yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari perwakilan Jawa Timur di antaranya; Ir Suwardjo, KH Machmud, Mulyadi dan Suwardjo.

Sukardi dihadapan keluarga besar Golkar Jawa Timur ini mengatakan, Markas besar Golkar yang berdiri ini paling megah bila dibandingkan dengan markas Orpol yang lain.

Menurut Sukardi gedung ini dibangun atas kesadaran dari para kader-kader Golkar — kader-kader Golkar banyak tersebar di berbagai bidang, misalnya di bidang wiraswasta, eksekutip dan yang lain. **Wit**

SUMBANGAN PEMIKIRAN GBHN

Ketua DPP Golkar, Oetoyo Oesman SH Jum'at 12 Juni lalu di Kantor DPP Golkar Jakarta, menerima kunjungan delegasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebanyak 30 orang, yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKKBN PP Sumbung dan Surdin Pabbadja, Kepala Biro perencanaan BKKBN.

Kunjungan dimaksud memberikan sumbangan pemikiran atau masukan-masukan, khususnya tentang masalah-masalah Keluarga Berencana, untuk bahan kelengkapan penyusunan materi GBHN dalam sidang umum MPR 1988 yang akan datang.

Dalam kesempatan itu Oetoyo Oesman, yang didampingi Wakil Sekjen Oka Mahendra dan Ketua Dept. Pengabdian Masyarakat Hatta Mustafa, mengucapkan terima kasih atas sumbangan pemikiran dimaksud. Hal mana akan sangat berguna bagi DPP Golkar dalam rangka kelengkapan bahan materi GBHN yang akan dibawa ke Sidang Umum MPR 1988.

Menurut Oetoyo, Keluarga Berencana merupakan suatu gerakan yang mempunyai jangkauan jauh ke depan dan mempunyai landasan filosifis yang sifatnya strategis yang tidak sekedar dapat terombang-ambing karena perubahan struktur politik.

Sumbangan pemikiran serupa untuk penyusunan materi GBHN, beberapa waktu lalu juga diterima Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono dari Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI).

DPP Golkar senantiasa terbuka untuk menerima bahan masukan dari masyarakat, guna menambah kelengkapan materi GBHN, yang akan dibawa ke dalam Sidang Umum MPR 1988 yang akan datang. **wt**

Digitized by Google

Kemenangan Golkar Dalam Pemilu 1987 Tantangan Ke Depan Lebih Berat

Penghitungan suara untuk pemilihan umum 1987 berakhirlah sudah. Lembaga Pemilihan Umum (LPU), 6 Juni lalu mengumumkan secara resmi hasilnya secara nasional. Pengumuman yang dikeluarkan oleh lembaga ini, sudah dapat diduga sebelumnya, bahwa hasil dari Pemilu 1987 yang diumumkan seusai pemungutan suara sementara dengan bertu rut-turut melalui TVRI, tidak akan banyak berubah.

Dalam penghitungan suara yang dilakukan Lembaga ini sudah menunjukkan bahwa Golkar dalam Pemilu 1987 menduduki peringkat teratas, dan bahkan meninggalkan OPP yang lain dalam peng hitungan suara. Dan 6 Juni lalu, saat Lembaga Pemilihan Umum secara resmi mengumumkan hasil dari perolehan suara, Golkar tetap menunjukkan keperkasaannya. Dari pengumuman itu Golkar mendapatkan dukungan 62.783.680 (73,17%) suara. Atau mendapat 299 kursi (74,75%).

Sedangkan dalam Pemilu sebelumnya (Pemilu 1982), Golkar memperoleh 246 kursi. Dengan demikian, perolehan kursi dalam DPR, dari hasil Pemilu 1987 ini Golkar memperoleh tambahan 53 kursi. Berarti pula perolehan yang dihasilkan Golkar dalam 1987 ini telah melebihi target yang sudah ditetapkan secara nasional. Target Golkar dalam Pemilu 1987 untuk perolehan suara 68%, tapi hasilnya 73,17%. Sedangkan untuk perolehan kursi targetnya 70% hasilnya 74%.

Kenaikan dari perolehan suara yang didapatkan Golongan Karya pada pemilu 1987, hasilnya hampir merata di seluruh daerah tingkat I — seluruh Indonesia terdapat 27 Daerah Tingkat I — dan hasilnya rata-rata di atas 50 persen. Begitu pula di tingkat kabupaten dan kota madya. Dari 298 daerah tingkat kabupaten, hampir secara keseluruhan Golkar mencapai keunggulan. Namun dari jumlah kabupaten sebanyak itu, ada 4 kabupaten Golkar kurang beruntung. Kendati demikian, dae rah-daerah tersebut telah juga mencapai banyak kemajuan.

Sudharmono, Ketua Umum Golkar saat memberikan pengarahan pada malam Halal Bilhalal, sekaligus syukuran atas kemenangan Golkar dalam Pemilu 1987, yang diadakan beberapa hari menjelang pengumuman secara resmi hasil penghitungan suara di Gedung Pertamina, Jakarta, mengatakan bahwa Pemilu 1987 ini telah mencapai banyak kemajuan diban dingkan dengan Pemilu tahun sebelumnya, dan hasilnyapun, kata Sudharmono, sangat menggembirakan.

Namun diingatkan, kemenangan Golkar

Hasil Pemilu 1987 sangat menggembirakan

dalam Pemilu 1987 ini bukan digunakan untuk takabur, atau sombong, bukan digunakan untuk menepuk dada, dan bukan pula digunakan untuk membanggakan diri. Sudharmono yakin, tidak ada warga Golkar yang mempunyai sifat demikian.

Kemenangan Golkar dalam Pemilu 1987 ini dinilai oleh Sudharmono merupakan jerih payah dari seluruh jajaran keluarga besar Golkar dan atas ridlo Tuhan YME. Untuk itu, lanjut Sudharmono, kemenangan Golkar dalam Pemilu 1987 perlu disertai dengan rasa tanggung jawab besar, khususnya untuk menyongsong tugas-tugas ke depan. Karena untuk menghadapi tugas-tugas itu pasti tidak lebih ringan.

''Kita harus menyadari tanggung jawab yang besar dan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada Golkar, pasti tidak mudah dalam memenuhi begitu saja. Tapi dengan kesadaran dan tanggung jawab yang besar itulah, kesinambungan akan pembangunan dapat digunakan untuk meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa, serta stabilitas nasional yang tidak saja untuk dipertahankan, tapi kalau perlu terus dimantapkan,'' ujar Sudharmono.

Kemudian untuk mempersiapkan Pemilu yang akan datang, Ketua Umum Golkar ini mengharapkan agar warga Golkar bekerja lebih keras lagi. Kerja keras baik untuk pembenahan ke dalam maupun ke luar. Pembenahan ke dalam misalnya, dengan mengadakan konsolidasi. Sedangkan keluar, Golkar berusaha untuk memenuhi harapan rakyat — harapan rakyat yang diberikan kepada Golkar —Sedang kan harapan rakyat yang diminta dari Golkar adalah untuk hari depannya yang lebih baik dan harapan untuk masa depan nya yang lebih meningkat. Baik itu lahir maupun bathin.

Lebih lanjut Sudharmono mengatakan, selama ini Golongan Karya tidak pernah menjanjikan kepada rakyat dengan janji yang muluk-muluk, atau hal-hal yang diluar kemampuan. Dalam hal harapan dari rakyat ini Golongan Karya hanya bisa menyerap aspirasi yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian akan diperjuangkan untuk menjadi kebijaksanaan dalam merumuskan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).

Ke Depan Lebih Berat

Dalam Pemilu 1987 Golkar mencapai

Digitized by Google

Hasil pemilu harus menjamin kesinambungan pembangunan

kemenangan dan bahkan kemajuan-ke majuan dalam perolehan suara di berbagai tempat. Namun dalam menghadapi tugas yang akan datang, yaitu Pemilu 1992, tugas yang harus dilakukan Golkar tidaklah ringan bahkan akan terasa semakin berat.

Menghadapi tugas-tugas yang akan datang, Ketua Umum Sudharmono mencoba untuk mengisahkan cerita pewayangan. Dikisahkan saat punakawan (abdi) mengikuti perjalanan majikannya menaiki dan menuruni gunung, setelah sampai di puncak, salah satu dari punakawan (Petruk) menangis tersedu-sedu. Kemudian salah seorang punakawan menanyakan, kenapa (Petruk) menangis, padahal kita ini sudah berhasil mengarungi perjalanan yang cukup berat, yaitu dengan menaiki dan menuruni gunung?

Dari pertanyaan itu Petruk menjawab. Memang perjalanan kita kali ini sudah sampai dan berhasil. Tapi, kata Petruk kepada saudara-saudaranya, tugas kita ke depan adalah lebih berat lagi. Lihat, kata Petruk, gunung yang ada di depan kita itu? Sebuah gunung yang lebih tinggi dan lebih berat lagi medannya.

Dan, itulah kisah yang diberikan Ketua Umum Golkar dalam menggambarkan tugas-tugas yang akan dihadapi Golkar dalam tahun-tahun mendatang. Dimana tugas yang dipikul akan datang tidaklah lebih ringan, bahkan cukup berat.

Perlu Evaluasi

Jakarta, sebagai ibu kota negara dan dianggap sebagai barometer bagi ketiga OPP (Organisasi Peserta Pemilu), dalam Pemilihan umum kali ini masih tetap saja dimenangkan oleh Golkar. Golkar dalam pemilihan di daerah ini memperoleh suara melebihi dari yang ditargetkan.

Target Golkar dalam Pemilu 1987 untuk wilayah DKI Jakarta adalah 45 persen. Sedangkan dari hasil pemungutan suara yang berlangsung tanggal 23 April lalu, Golongan Karya untuk wilayah DKI Jakarta memperoleh 50,039 persen. "Perolehan suara yang didapat Golkar DKI Jakarta ini merupakan angka yang maksimal, tapi masih belum optimal untuk pemilu yang akan datang," ujar Achmadi, ketua DPD Golkar tingkat I Jakarta ini.

Sementara Ketua Umum dalam menanggapi perolehan suara yang didapat di DKI Jakarta ini menilai sebagai yang marginal. Artinya suara yang diperoleh DKI Jakarta ini pas-pasan. "Bila Golkar ingin aman dalam perolehan suara di DKI Jakarta ini, seharusnya memperoleh 52 persen suara," ujar Ketua Umum.

Kendati perolehan suara yang didapatkan oleh Golkar DKI ini meningkat dan melebihi dari target, namun, kata Ketua Umum, perolehan itu dirasakan paling kecil bila dibandingkan dengan daerah tingkat satu yang lain.

Menghadapi Pemilu yang akan datang, yang juga dianggap berat ini, Ketua Umum mengajak kepada seluruh jajaran keluarga besar Golkar untuk mengadakan evaluasi, baik faktor-faktor yang mendukung kemenangan atau yang menghambat. Contoh mengenai kekalahan Golkar di beberapa tempat di Jakarta misalnya kelurahan Kayumanis, dan beberapa sekolah swasta. "Hal-hal seperti itu yang perlu kita teliti," ujar Ketua Umum.

Mengenai Pemilihan Umum 5 tahun mendatang, Ketua Umum mengajak kepada segenap jajaran keluarga besar Golkar untuk dapat mengadakan konsolidasi ke dalam, maupun ke luar. Ke dalam, misalnya dengan menyiapkan diri supaya dalam Pemilu 5 tahun mendatang, Golkar dapat meningkat lagi.☐ BM

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERUSAHAAN AIR MIMUM JAYA

Jalan Penjernihan II – Pejompongan

Tlp.: 581943 - 582652 - 582938 - 582334 - 582256 - 587019

Telex: 44216 PAMJAYA

DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
MENGUCAPKAN
SELAMAT ATAS TERSELENGGARANYA PEMILU 1987 DENGAN AMAN DAN
TERTIB, LANCAR SERTA MENYAMBUT GEMBIRA SUKSES DAN
KEMENANGAN YANG DICAPAI GOLONGAN KARYA. = HEMAT AIR BERSIH =

Digitized by Google

KOMENTAR

Perguruan Tinggi

SEORANG tokoh organisasi kemasyarakatan belum lama ini menyatakan kecemasan tentang makin tingginya biaya masuk perguruan tinggi swasta. Ia kuatir bahwa pada akhirnya mereka yang berasal dari kalangan keluarga sederhana takkan bisa masuk perguruan tinggi swasta karenanya.

Kekuatiran seperti ini mudah dipahami. Bahkan menjadi isi hati banyak anggota masyarakat. Apalagi, dalam pada itu, kesempatan masuk ke perguruan tinggi negeri - yang biayanya relatif jauh lebih murah - juga terasa makin langka dan terbatas karena begitu banyaknya peminat. Masuk perguruan tinggi menjadi kebutuhan bagi banyak generasi baru yang membayangkan bahwa pendidikan tinggi yang diperolehnya kelak akan menjadi bekal dalam kehidupan masa depan yang makin penuh persaingan.

Kenapa biaya perguruan tinggi swasta menjadi tinggi ? Para pengelolanya mampu memberi argumentasi yang masuk akal. Tapi bila kenyataan dan argumentasi biaya mahal ini diterima begitu saja, pada akhirnya akan tercipta keadaan bahwa PTN menjadi tempat menuntut ilmu bagi mereka yang berasal dari keluarga sederhana saja, dan PTS hanya untuk mereka yang berasal dari golongan ekonomi kuat. Cukup rumit. Dan akan bertambah rumit bila sudah jalin berjalin pula dengan kriteria kemampuan calon mahasiswa bersangkutan. Polarisasi akhirnya bisa diluar dugaan dan akan membuahkan sesal berkepanjangan bagi dunia pendidikan tinggi.

Maka tokoh organisasi kemasyarakatan tadi mengingatkan agar masalah biaya PTS ini menjadi perhatian untuk diatur dalam undang-undang pokok pendidikan mendatang. Agar dicantum bahwa pendidikan bukan bersifat komersial, melainkan bersifat sosial. Satu saran yang cukup pantas untuk diperhatikan.

Tetapi sebaliknya, tentu perlu pula diperhatikan aspek-aspek yang dapat menunjang kemampuan PTS tersebut untuk membiayai diri dan membiayai pengembangan kualitasnya. Prinsip gotong royong dalam pembiayaan akan relevan. Dalam artian, dari mereka yang berkemampuan lebih ditarik biaya yang lebih tinggi pula, sedang bagi mereka yang kurang mampu diberi keringanan ......

Kurang Proporsional

MENTERI Dalam Negeri Soepardjo Roestam menyampaikan suatu kesan dan kesimpulan yang menarik ketika memberi sambutan pada peringatan HUT 460 Jakarta baru-baru ini. Menteri mengatakan kepesatan perkembangan fisik ibukota pada satu sisi membanggakan. Akan tetapi pada sisi lain kadang-kadang memprihatinkan, karena pembangunan fisik itu menimbulkan pula masalah hukum dan keadilan, law enforcement, serta kesenjangan sosial.

Semua orang merasakan kebenaran kesimpulan ini. Dan adapun terapi umum yang disampaikan menteri untuk menghadapi hasil samping itu, adalah agar pembangunan fisik dan non fisik dilaksanakan seimbang.

Laju dinamika pembangunan mungkin saja memang kadang-kadang tak terhindarkan menghasilkan pula akibat sampingan. Tapi bila kita amati, sebenarnya banyak dari akibat samping pembangunan fisik di Jakarta dapat dihindari dan atau tak perlu terjadi, bila para pelaksana mau lebih cermat dan berhati-hati. Salah satu segi rawan misalnya adalah bila suatu pembangunan fisik memerlukan pembebasan tanah rakyat. Kadang-kadang ada saja 'permasalahan' timbul justru karena adanya oknum yang tak jarang kebetulan adalah dari kalangan aparat sendiri berulah aneh untuk maksud tertentu. Akan cukup banyak contoh lain yang dapat diutarakan yang diangkat dari keluhan masyarakat.

Jadi, dengan tidak mengecilkan arti para aparat pemerintahan yang telah menunjukkan dedikasi, tetap tak salah untuk mengingatkan di sini bahwa selain terapi yang diutarakan Menteri mengenai keseimbangan, hal klasik yang menyangkut masalah penertiban aparat tetap harus menjadi perhatian pula!

Polisi

TATKALA dari Sulawesi Utara datang berita tentang perkosaan oleh 4 pelaku yang dialami oleh seorang anggota Polisi Wanita, ada rasa gundah dan marah yang sukar untuk dilukiskan. Masyarakat merasa prihatin. Lebih sakit dari bila mendengar bahwa korban kejahatan adalah anggota masyarakat biasa. Tapi bersamaan dengan itu ada rasa mengharap agar jajaran kepolisian tak sampai menjadi dendam.

Dan adalah pada Dies 41 PTIK, Kapolri Jenderal Pol. M. Sanusi menyatakan penilaian bahwa kini masyarakat semakin mendambakan rasa aman. Masih dalam rangka dies tersebut, seorang psikolog, Dr Sarlito Wirawan mengungkapkan penelitiannya mengenai pendapat anggota masyarakat tentang Polri. Tentang Polantas misalnya ada pendapat bahwa penampilan mereka kurang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Dan secara umum Sarlito juga mengutarakan kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan polisi, makin rendah kecenderungannya untuk menampilkan sikap berkuasa.

Bicara tentang polisi, memanglah polisi hingga kini menempati suatu posisi yang agak 'tersendiri' dihati masyarakat. Disatu pihak mereka sangat dibutuhkan (dicintai) masyarakat, tetapi di lain pihak sering 'mengecewakan'. Ada rasa dekat, tapi berbarengan dengan itu ada gap psikologis.

Tentulah masalahnya menjadi ringan dan biasa bilamana masyarakat mampu melihat polisi sebagai orang per orang dengan segala kebaikan dan kekurangan atau keburukannya selaku manusia biasa. Tapi, sulitnya, perbuatan oknum toh tak selalu dapat dilepaskan dari nama korps. Banyak polisi yang baik, tapi tak sedikit pula yang sepanjang pengalaman masyarakat merupakan figur sebaliknya: Lebih senang denda damai daripada tilang, mencari-cari kesalahan, kurang tanggap terhadap laporan, menukang-nukangi persoalan antara masyarakat dan sebagainya. Dan ini bukan mengada-ada.

Maka bila Kapolri menyinggung rasa aman, tentu tak selalu hanya menyangkut faktor ekstern. Penilikan kedalam diri juga perlu, meskipun masyarakat juga maklum polisi juga toh manusia biasa. Tapi kalau terlalu biasa, yah, tentu sulit jadi polisi yang baik. Masyarakat mendambakan, polisi yang lebih dari sekedar biasa dalam sikap mental maupun ketrampilan.

Digitized by Google

Oleh: Soekarno D.

Diperlukan Konsep Penerapan Pancasila Di Bidang Tenaga Kerja

HIP Sebagai Konsep Dasar Operasionalisasi Pancasila Di Bidang Hubungan Ketenaga Kerjaan

Pancasila satu-satunya Asas

Kini, semua organisasi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh mereka itu merupakan perkembangan yang sangat penting dilihat dari proses pembentukan bangsa (nation building) kita. Dengan penerimaan tersebut, perbedaan dan perpecahan ideologi dalam tubuh bangsa kita yang di masa-masa yang lampau hampir-hampir merobek-robek kesatuan bangsa kita dari dalam, kini telah berakhir. Ini terjadi berkat kesadaran bangsa kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan itu demi menyongsong keberhasilan pembangunan bangsa di masa depan. Akan tetapi penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu tidak boleh hanya secara formal saja, akan tetapi Pancasila harus benar-benar dihayati dan diamalkan secara substansial dan nyata, dengan rela dan sungguh-sungguh. Karena itu bukan saja masing-masing warganegara harus menghayati dan mengamalkannya, tetapi juga masing-masing lembaga, masing-masing organisasi seyogyanya mengembangkan konsep penjabarannya agar supaya Pancasila tidak sekedar merupakan pengertian-pengertian yang bersifat umum, akan tetapi benar-benar bersifat operasional.

Diperlukan Konsep yang bersifat Operasional

Melalui TAP MPR No. II tahun 1978, kita telah memiliki Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bukan saja bagi setiap warganegara dan setiap penyelenggara negara, akan tetapi juga bagi setiap lembaga kenegaraan dan setiap lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah. Jika bagi setiap warganegara dan setiap penyelenggara Negara pelaksanaan P4 itu dilakukan antara lain dengan cara mengadakan penataran di berbagai tingkat dan echelon, di Pusat maupun di Daerah, maka bagi lembaga kemasyarakatan, khususnya organisasi profesi/fungsional, pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tersebut kiranya akan memiliki

bentuk yang lebih kongkret apabila ditunjang oleh sebuah konsep operasionalisasi Pancasila yang dikembangkan oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Dalam hubungan inilah penulis akan mencoba mengemukakan konsep operasionalisasi Pancasila di bidang ketenagakerjaan itu, yang dalam pelaksanaannya sudah barang tentu akan ditunjang oleh Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dilahirkan oleh TAP MPR itu.

HIP Konsep Operasional Penerapan Pancasila di bidang Tenaga Kerja

Praktek hubungan perburuhan atau hubungan industrial di Indonesia sejak zaman penjajahan dahulu sangat dipengaruhi oleh pola hubungan industrial yang berlaku di negara-negara Barat yang pada umumnya menganut sistem liberalisme. Pola semacam ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1960-an. Sejak lahirnya Orde Baru bangsa kita bertekad bulat untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Akibatnya pola hubungan industrial yang berorientasi kepada faham liberalisme sudah barang tentu tidak cocok lagi dengan semangat "kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen" itu, karena Pancasila dan UUD 1945 tidak memberi tempat kepada faham liberalisme. Maka timbullah pemikiran-pemikiran dari kalangan organisasi buruh, pengusaha dan Pemerintah untuk menyesuaikan pola hubungan industrial yang berlaku pada waktu itu dengan semangat kemurnian Pancasila dan UUD 1945 tersebut.

Pada tahun 1967 telah dikumandangkan istilah "Hubungan Perburuhan Pancasila", akan tetapi isinya masih dalam taraf pemikiran. Sementara itu dalam pidatonya di depan DPR tanggal 16 Agustus 1974 Presiden antara lain menekankan tentang perlunya hubungan antara buruh dan pengusaha di dalam alam Pancasila. Pidato Presiden itu sudah barang tentu merupakan dorongan yang cukup kuat bagi pemikiran-pemikiran yang sedang dikembangkan oleh organisasi buruh, pengusaha dan Pemerintah. Maka atas prakarsa Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi diadakanlah Seminar Nasional tentang Hubungan Perburuhan Pancasila pada tanggal 4-7 Desember 1974, yang diikuti oleh wakil-wakil dari organisasi Buruh, Pengusaha, Pemerintah dan wakil-wakil dari kalangan Cendekiawan/Universitas. Seminar ini menghasilkan sebuah konsep dasar mengenai Hubungan Perburuhan Pancasila yang penjabarannya dikembangkan hingga sekarang.

Pengertian HIP

Hubungan Industrial Pancasila ialah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, ialah antara pekerja, pengusaha dan Pemerintah. Hubungan itu didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan UUD 1945, tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional. Jika pengertian hubungan industrial itu biasanya hanya mencakup hubungan antara pekerja dan pengusaha saja, maka dalam Hubungan Industrian Pancasila ini di samping unsur pekerja dan unsur pengusaha, maka unsur Pemerintah dimasukkan sebagai salah satu pelaku dalam proses produksi barang dan jasa. Ini berarti bahwa dalam konsep HIP itu peranan Pemerintah dianggap cukup penting, baik sebagai stabisator dalam menciptakan asas keseimbangan dan keserasian maupun sebagai pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (secara

Digitized by Google

tidak langsung) mewakili kepentingan masyarakat umum.

Kerangka Dasar Konsep HIP

Adapun isi dari kerangka dasar konsep HIP itu dapat dibagi menjadi dua bagian, (1) menyangkut dasar falsafahnya, ialah Pancasila dan UUD 1945 yang dilengkapi dengan asas Tridharma sebagai peninggalan budaya bangsa, dan ke (2) ialah menyangkut Sarana-sarana Pelaksanaannya, atau Mekanisme yang perlu diadakan untuk menunjang dan mempermudah pelaksanaan dari HIP itu sendiri. Adapun mekanisme atau Sarana-sarana pelaksanaan yang dianggap perlu ialah:

(a) Lembaga-lembaga Kerjasama yang bersifat Tripartit (pekerja, pengusaha dan Pemerintah) dan Lembaga-lembaga Kerjasama yang bersifat Bipartit (pekerja dan pengusaha) perlu dibentuk, agar dapat digunakan untuk forum komunikasi dan konsultasi dalam menyelesaikan masalah-masalah perburuhan yang timbul.

(b) Penggunaan lembaga Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), atau perjanjian perburuhan yang bersifat kolektif antara organisasi pekerja dan fihak pengusaha perlu disebar-luaskan, karena melalui mekanisme ini kondisi dan syarat-syarat kerja bisa ditentukan bersama atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.

(c) Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang baik perlu dimiliki, agar supaya setiap masalah perburuhan atau perselisihan perburuhan yang timbul dapat diselesaikan melalui lembaga ini dengan cara musyawarah mufakat antara ketiga unsur Tripartit yang ada dalam lembaga itu.

(d) Pelaksanaan HIP perlu ditunjang oleh adanya peraturan-perundangan yang sejiwa dengan HIP itu sendiri.

(e) Perlunya dimiliki suatu strategi atau kebijaksanaan di bidang pendidikan dan pemasyarakatan HIP sedemikian rupa, sehingga penerapan HIP di tengah-tengah masyarakat dapat berlangsung lebih lancar. Adapun uraian lebih lanjut mengenai HIP, baik yang menyangkut dasar falsafahnya maupun yang berhubungan dengan bagaimana mekanisme itu dilaksanakan di tingkat operasional, akan diuraikan dalam tulisan yang akan datang.

Sasaran Pembahasan

Sebagai konsep dasar operasionalisasi Pancasila di bidang hubungan ketenagakerjaan, cakupan hubungan industrial Pancasila (HIP) terutama meliputi pola hubungan yang setepat-tepatnya antara pekerja, pengusaha dan Pemerintah sesuai dengan falsafah Pancasila. Akan tetapi hubungan tersebut hanya mungkin berkembang dengan baik kalau ditunjang oleh perbaikan syarat-syarat perburuhan yang memadai (upah, syarat-syarat kerja dan jaminan sosial) yang telah disepakati bersama oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Karena itu upaya operasionalisasi Pancasila di bidang ketenagakerjaan akan mencakup dua aspek (1) menyangkut para pelaku HIP itu sendiri (pekerja, pengusaha dan Pemerintah), dan yang ke (2) menyangkut masalah-masalah yang menjadi objek pembicaraan dari para pelaku HIP itu, ialah masalah-masalah mengenai syarat-syarat perburuan itu sendiri.

Ciri-ciri dari HIP

Dari konsep dasar HIP itu dapatlah disimpulkan, bahwa yang menjadi ciri-ciri pokok HIP itu antara lain ialah sebagai berikut:

(1). Bahwa HIP itu mendasarkan diri keseluruhannya kepada Pancasila dan UUD 1945.

(2). Bahwa HIP itu mengakui ajaran TRIDHARMA sebagai warisan budaya bangsa yang masih relevant dalam pengembangan konsep hubungan ketenagakerjaan.

(3). Bahwa HIP itu menjunjung tinggi asas keserasian dan keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.

(4). Bahwa HIP itu mengakui bahwa "bekerja" itu adalah sebagai pengabdian terhadap sesama manusia/masyarakat, bangsa dan negara, dan terhadap Tuhan Yang Esa.

(5). Bahwa HIP Itu tidak memperlakukan pekerja hanya sekedar sebagai alat produksi belaka, tetapi memperlakukan mereka sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.

Demikianlah ciri-ciri pokok dari HIP itu.

Tujuan

Dalam arti makro tujuan HIP tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pembangunan nasional kita sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, ialah ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Hal ini disebabkan karena pembangunan dibidang ketenagakerajaan adalah sebagian dari pembangunan nasional. Sedang dalam arti mikro tujuan HIP ialah untuk mencipta-

Digitized by Google

kan ketenangan kerja dan ketenangan usaha ("industrial peace"). Oleh karena itu secara singkat dapat dikatakan, bahwa tujuan HIP itu ialah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil melalui upaya penciptaan ketenangan kerja dan ketenangan usaha dalam perusahaan-perusahaan atau dalam unit-unit kerja. Dengan tercapainya kedamaian dan ketenagan dalam kehidupan industrial tersebut, maka melalui peningkatan kwalitas tenaga kerja, produksi dan produktivitas dapat dinaikkan, dan sebagai akibatnya kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya dapat pula diwujudkan.

Manifestasi ke lima sila dari Pancasila

Sebagaimana tercantum dalam pengertiannya HIP adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa berdasar nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan UUD 1945. Ini berarti bahwa masing-masing sila maupun keseluruhan sila Pancasila itu seharusnya tercermin dalam keseluruhan hubungan antara pekerja, pengusaha dan Pemerintah sebagai pelaku-pelaku dalam proses produksi tersebut. Dengan demikian pencerminannya dalam sila-sila Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut:

(1). Bahwa HIP itu adalah suatu hubungan industrial yang didasarkan atas *Ketuhanan Yang Maha Esa,* mengakui bahwa "kerja" itu sebagai pengabdian manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kepada sesama manusia/masyarakat, bangsa dan negara, dan tidak mengizinkan diskriminasi karena perbedaan agama maupun kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan asas ini sudah seharusnyalah bahwa para pelaku HIP itu selalu berpedoman kepada empat butir pengertian dari sila pertama Pancasila seperti yang tercantum dalam TAP MPR No. II tahun 1978 tentang P4.

(2). Bahwa HIP itu adalah suatu hubungan industrial yang didasarkan atas *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,* tidak menganggap pekerja hanya sekedar sebagai faktor produksi, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Dalam melaksanakan asas ini sudah seharusnyalah bahwa para pelaku HIP itu selalu berpedoman kepada delapan butir pengertian dari sila ke dua Pancasila seperti yang tercantum dalam TAP MPR No. II tahun 1978 tentang P4.

(3). Bahwa HIP itu adalah suatu hubungan industrial yang mengutamakan kesatuan dan *Persatuan Indonesia,* mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam melaksanakan asas ini sudah seharusnyalah bahwa para pelaku HIP itu selalu berpedoman kepada lima butir pengertian dari sila ketiga Pancasila seperti yang tercantum dalam TAP MPR. No. II tahun 1978 tentang P4.

(4). Bahwa HIP itu adalah suatu hubungan industrial yang selalu menempuh cara *Musyawarah untuk Mufakat* dalam menyelesaikan pelbagai masalah ketenagakerjaan, serta didasari oleh semangat kekeluargaan dan gotong-royong, berusaha untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan dan mencari persamaan-persamaan untuk mencapai kesepakatan antara para pelaku HIP. Dalam melaksanakan asas ini sudah sepantasnyalah kalau para pelaku HIP itu selalu berpedoman kepada tujuh butir pengertian dari sila ke empat Pancasila seperti yang tercantum dalam TAP MPR No. II tahun 1978 tentang P4.

(5). Bahwa HIP itu adalah suatu hubungan industrial yang memperjuangkan tercapainya *Keadilan Sosial badi Seluruh Rakyat Indonesia.* Sesuai dengan asas ini maka dalam konteks hubungan industrial, maka setiap kemajuan yang dicapai oleh fihak pengusaha seyogyanya juga berpengaruh secara langsung dan seimbang terhadap kesejahteraan para pekerja sesuai dengan peranannya dalam proses produksi tersebut. Dalam mewujudkan asas ini sudah sepantasnyalah kalau para pelaku HIP itu selalu berpedoman kepada dua belas butir pengertian dari sila kelima Pancasila seperti yang tercantum dalam TAP MPR No. II tahun 1978.

Konsekuensi Sikap Para Pelaku HIP

Konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar HIP serta P4 sebagai pedoman pelaksanaannya ialah, bahwa para pelaku HIP itu harus menyesuaikan seluruh pola pikir, tingkah laku dan tindakannya dengan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sedang dalam pelaksanaannya perlu berpedoman kepada P4.

(1). Anggapan bahwa "kerja" itu adalah sebagai pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, bangsa dan negara dapat kita jadikan motivasi kepada para pekerja dan setiap orang untuk bekerja lebih keras. Sebab kerja keras bukan saja memberi manfaat kepada diri sendiri akan tetapi juga berguna bagi masyarakat, bahkan sebagai pengabdian diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak saja memiliki manfaat materiil-ekonomis, tetapi juga idiil-spiritual. Pandangan ini bisa dikembangkan menuju pembinaan angkatan kerja yang disiplin, produktif dan berwatak. Sampai berapa jauh hal itu dapat dilaksanakan dalam praktek, tergantung dari upaya-upaya kita semua dalam mengembangkan sistem pembinaan angkatan kerja Indonesia yang lebih bermutu, fisik maupun mental-spiritual dalam mendukung suksesnya pembangunan kita di masa-masa yang akan datang.

(2). Anggapan bahwa dalam HIP pekerja itu tidak saja dianggap sebagai alat produksi, tetapi juga harus diperlakukan sebagai manusia pribadi dengan harkat dan martabatnya mendorong kepada semua pelaku HIP agar hubungan antara mereka, terutama perlakukan terhadap pekerja harus dilakukan lebih manusiawi. Ini bisa dicapai kalau di antara pelaku HIP terus-menerus dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa. Dengan demikian hubungan antara pekerja dan pengusaha di samping bersifat lugas juga hubungan yang dilandasi rasa kasih sayang sesama manusia. Dengan ini pula semangat kekeluargaan dan gotong-royong dapat dikembangkan.

(3). Tekad bahwa semua pelaku HIP harus berjuang untuk persatuan dan kejayaan bangsa Indonesia mendorong mereka untuk tetap bisa mengendalikan diri. Mereka harus membatasi kepentingan pribadi dan golongannya demi menyelamatkan kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan persatuan Indonesia. Pendek kata mereka harus selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pelaksanaan asas ini sering mendapat ujian dalam praktek, pada saat antara pekerja dan pengusaha menghadapi perbedaan pendapat mengenai sesuatu hal, yang kalau kedua belah fihak tidak bisa mengendalikan diri dapat menjurus ke arah timbulnya gejolak, padahal kepentingan negara menghendaki terpeliharanya ketenteraman dan stabilitas nasional. Juga antara tekad perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Kewajiban untuk memperhatikan lingkungan, dan sebagainya. Untuk mengatasi itu semua, maka pengembangan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan bentuk-bentuk kesadaran yang dapat menuntun para pelaku HIP tersebut untuk mengatasi ujian-ujian di atas.

(4). Penggunaan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bersama merupakan cara yang paling baik yang perlu ditempuh oleh para pelaku HIP terutama fihak pekerja dan pengusaha. Jika penggunaan cara ini selalu dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan gotong-royong, tenggang rasa, mawas diri dan semangat mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan diri dan golongan, dapatlah dipastikan, bahwa pelbagai masalah yang dihadapi oleh para pelaku HIP tersebut dapat di atasi secara damai, tenteram dan aman.

(5). Tujuan HIP ialah ikut menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil melalui upaya penciptaan ketenangan kerja dan ketenangan usaha ("industrial peace"). Jika ini bisa dicapai, banyak hal yang menyangkut hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam perusahaan itu bisa diperbaiki dan dikembangkan. Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha mudah diatur. Masing-masing menerima haknya sesuai dengan besarnya peranan mereka dalam produksi barang dan jasa. Rincian mengenai besarnya peranan mereka dalam proses produksi serta bahagian yang mereka

Digitized by Google

terima masing-masing digambarkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang bersifat kolektif, yang dihasilkan bersama oleh organisasi pekerja dan pengusaha melalui proses musyawarah dan mufakat. Melalui mekanisme ini upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam perusahaan sebagai bahagian dari perwujudan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil dapat dirintis.

Ajaran Tridharma

Ajaran "TRIDHARMA"[2] merupakan peninggalan budaya bangsa yang masih relevant dalam upaya pengembangan hubungan industrial karena dalam ajaran itu mengandung tiga hal yang perlu dipenuhi oleh para pelaku HIP khususnya pekerja dan pengusaha, ialah:

(1). Asas "Rumongso Melu Handarbeni" atau asas "merasa ikut memiliki", artinya, baik pekerja maupun pimpinan perusahaan/manajemen harus merasa ikut memiliki perusahaan itu. Mereka harus merasa seolah-olah perusahaan itu milik mereka sendiri, sehingga mereka mempunyai kecintaan terhadap perusahaan itu dan ingin melihat perusahan perusahaan itu selalu mendapat kemajuan. Di sini, baik pekerja maupun pengusaha merupakan partner dalam memperkembangkan kemajuan perusahaan itu. Karenanya asas ini juga sering disebut asas "partnership", yang sesuai dengan asas keseimbangan mengandung dua segi, ialah partner dalam produksi ("partner in production") yang terutama merupakan kewajiban dari pekerja, dan sebagai imbangannya adalah partner dalam peningkatan kesejahteraan pekerja ("partner in welfare"). Dengan demikian setiap kemajuan perusahaan akan berakibat meningkatkan keuntungan pemilik perusahaan dan sekaligus juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja. Secara implisit asas ini juga mengandung semangat kekeluargaan dan gotong royong yang sangat penting dalam upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam hubungan ketenagakerjaan.

(2). Asas "Melu Hangrungkebi" atau "ikut mempertahankan/memajukan" perusahaan "milik bersama" akan mendorong timbulnya rasa tanggungjawab bersama bagi pekerja dan pengusaha dalam pengelolaan perusahaan. Dengan demikian kedua-duanya merupakan partner dalam pertanggungan jawab atau "partner in responsibility". Sesuai dengan asas keseimbangan dan keserasian pekerja harus merasa bertanggungjawab terhadap majunya perusahaan, sebaliknya pengusaha harus pula bertanggungjawab terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Dan kedua-duanya harus bertanggungjawab terhadap majunya perusahaan maupun kesejahteraan para pekerja. Secara rinci tanggungjawab bersama itu dapat mencakup panca tanggungjawab, ialah: tanggungjawab terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya, kepada perusahaan tempat mereka bekerja, kepada lingkungan atau masyarakat sekelilingnya, kepada bangsa dan negara dan akhirnya juga bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan panca tanggungjawab tersebut akan menjadi lebih realistik kalau para pelaku HIP selalu berfikir dalam kerangka Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

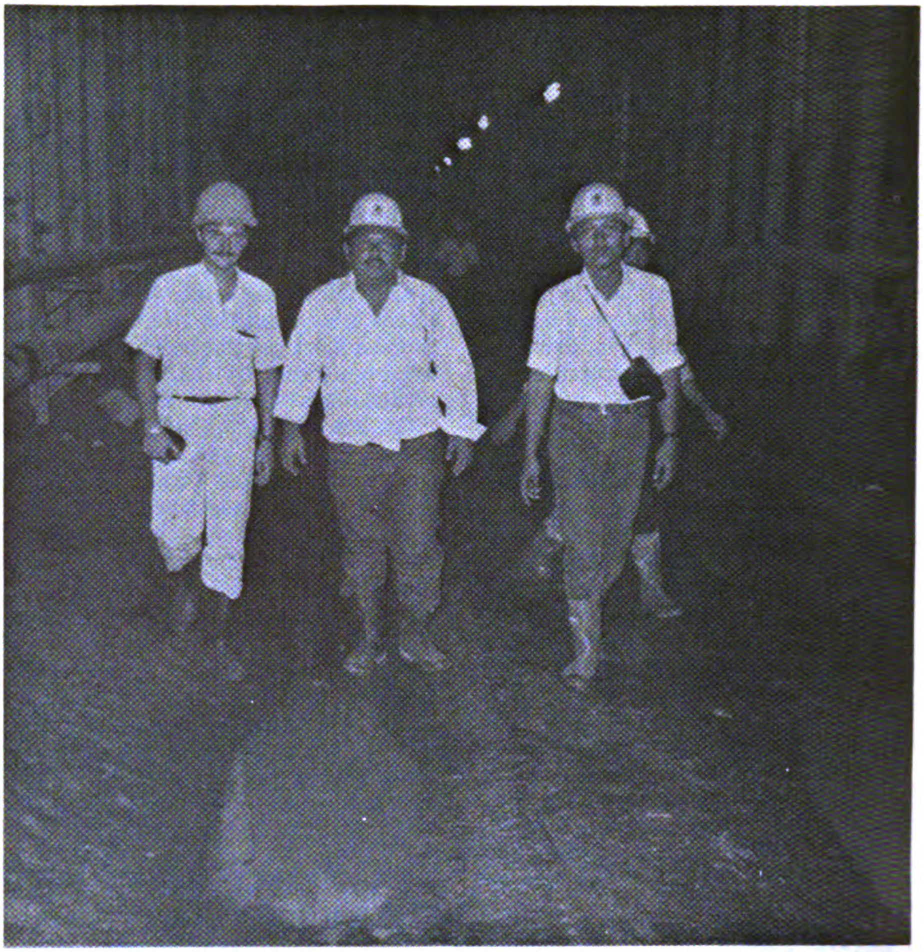

Hak mogok mendapat sorotan dalam konsep HIP

(3). Asas ketiga dari TRIDHARMA ialah "Mulat Sariro Hangroso Wani" atau "keberanian untuk mawas diri" ini harus dimiliki oleh pekerja maupun pengusaha, bahkan oleh ketiga pelaku HIP. Kebiasaan bahwa para pelaku HIP lebih mudah untuk mawas diri fihak lain dan kurang keberanian mawas diri sendiri merupakan kebiasaan yang tidak adil dan seimbang. Karena itu para pelaku HIP tersebut di samping memiliki kebiasaan mawas diri fihak lain harus pula ada keberanian untuk mawas diri sendiri. Dengan demikian, di samping bisa melihat segi negatif fihak lain juga mampu melihat segi negatif diri sendiri. Sebaliknya di samping dapat melihat segi positif diri sendiri juga mampu melihat segi positif fihak lain. Sikap semacam ini akan menimbulkan pandangan yang objektif dari kedua belah fihak. Pandangan semacam ini merupakan modal yang sangat berharga bagi pekerja dan pengusaha dalam menghadapi masalah-masalah bersama yang harus dipecahkan melalui musyawarah dan mufakat, apalagi kalau masalah yang dihadapi menyangkut hal-hal yang bersifat kongkret seperti upah, jaminan sosial bagi pekerja, uang lembur, jam kerja dan sebagainya.

Sebenarnya ke tiga asas dalam ajaran TRIDHARMA itu secara implisit sudah pula tercakup dalam keseluruhan butir-butir Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Masih dicantumkannya ajaran ini sebagai penunjang dasar HIP oleh karena ajaran TRIDHARMA memiliki pengertian yang langsung terhadap hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam tata hubungan industrial, dan karenanya dapat mempertajam pengertian-pengertian maupun pemahaman terhadap HIP itu.

Masalah Hak Mogok dan lock out

Mengingat pentingya, masalah hak mogok dan "lock out" mendapat sorotan khusus dalam konsep HIP. Pada dasarnya konsep HIP tidak menghendaki adanya penggunaan hak mogok dan "lock out" itu. Akan tetapi karena kedua hak itu dipandang cukup fundamental oleh kedua belah fihak, maka cara-cara untuk menghindari dipergunakannya kedua hak itu oleh pekerja maupun pengusaha merupakan serangkaian pembicaraan yang cukup luas, dan akan dijelaskan dalam tulisan berikutnya.

Digitized by Google

Mencari Identitas Melalui Karya Seni Lukis

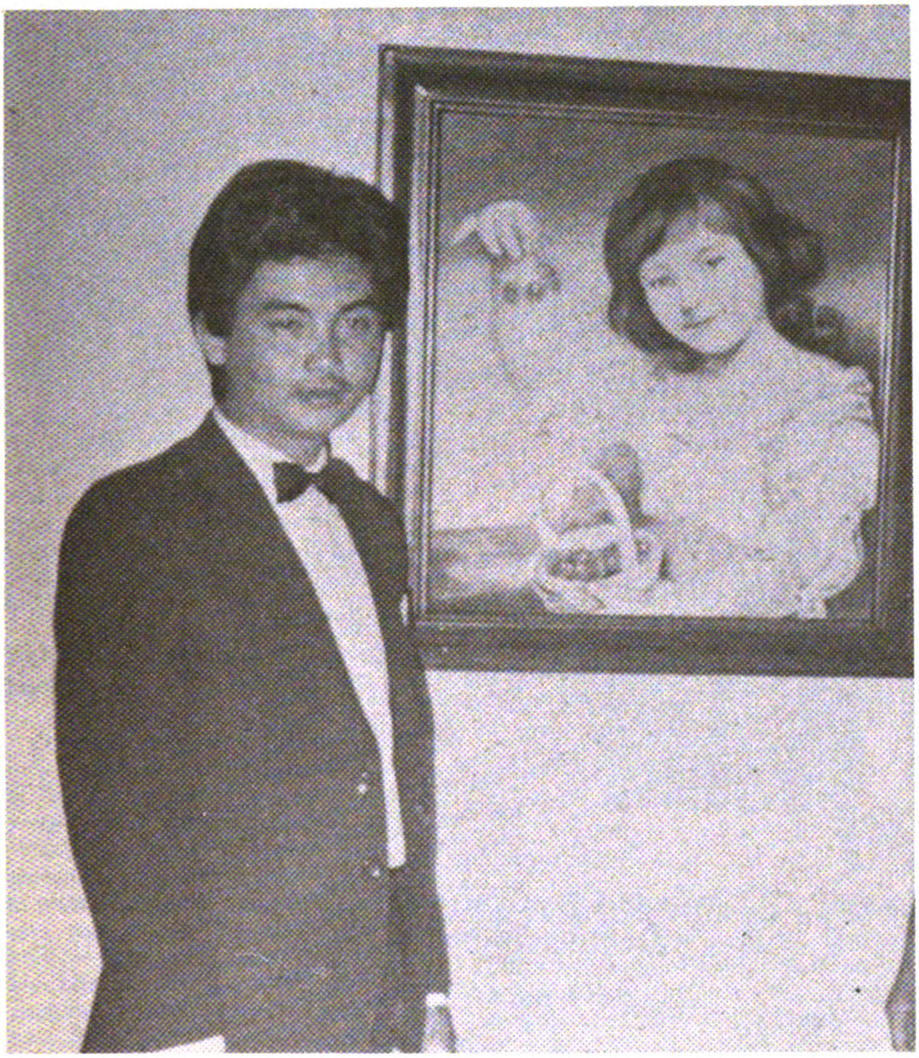

Tidak semua nilai bakat harus disalurkan melalui suatu disiplin ilmu dalam satu sekolah atau perguruan tinggi. Lihat saja bintang film Fadly, yang dokter gigi. Ia jadi dokter, eh nggak tahunya jadi bintang film. Atau Christine Panjaitan , si Sarjana Sastra Cina, yang terjun jadi penyanyi. Dan masih banyak lagi. Termasuk Lie Charlie calon Sarjana Sastra Indonesia dari Unpad Bandung, juga akhirnya terjun jadi pelukis.

Berarti menjadi pelukis bukan harus kuliah di Seni Rupa ITB misalnya. Pun menjadi wartawan tidak harus Sarjana Jurnalistik. Memang zaman sekarang penjurusan ilmu itu tidak mutlak kita masuk kedalam bidang pekerjaan yang sesuai dengan ilmu yang kita kuasai tersebut.

Demikianlah "Benekdiktus" Lie Charlie (24) kelahiran Medan. Ketika ia masih SMA Methodis Medan 1982, mulai mengembangkan bakatnya dalam dunia seni melukis. "Bukan apa-apa, cuma sebagai hobby," katanya menerangkan awal terjunnya sebagai pelukis. Hobbynya ini nampaknya berdekatan dengan bakatnya. Terbuki Charlie terus belajar melukis di samping kesibukannya menekuni ilmu Bahasa Indonesia plus sastranya di Universitas Padjadjaran Bandung.

Selama lima tahun belajar dan belajar seni lukis, akhirnya Lie Charlie pun mencoba memberanikan diri berpameran tunggal. Di Pusat Kebudayaan Indonesia Perancis Jl. Purnawarman 32 Bandung, selama 4 hari, Medio April lalu, Charlie tampil dalam pameran tunggalnya. Ada sekitar 25 karya lukisannya dipajangkan untuk dinilai dan dibeli publik. Dan nampaknya pameran tunggal ini sekaligus menghangatkan kesepian para seniman kota Bandung.

"Menjadi pelukis adalah sebuah konsekwensi. Banyak orang salah ketika mulai belajar melukis. Menurut saya, orang harus mulai dengan pinsil, lalu mencontoh gambar yang sudah jadi. Kemudian belajar teknik cat air. Lalu mulai melukis dari obyek yang sebenarnya," ujar Charlie menjawab pertanyaan seorang siswi SMA, Elly Renita, yang mengunjungi pameran ini.

Lie Charlie bisa mengembangkan bakatnya setelah ditempa oleh 3 guru yakni Chiang Yu Tie, Ju Siong dan She Ikh. Dari ketiga guru ini diperoleh bekal teknik melukis Kungpie dan Iepie (teknik yang hanya mementingkan detil-misalnya-sekali sapu jadi). Juga pengalaman lainnya dengan memakai cat air dan Brush Painting.

Dalam karya seni lukis, dikenal beberapa aliran. Ada aliran kontemporer, ekspresionis, realis maupun naturalis. Aliran Naturalis adalah karya seni lukis yang menorehkan gores dan komposisi sesuai dengan obyek yang sebenarnya. Karya ini selalu dikerjakan dibawah pandang foto. Jika melihat hasil karya Charlie ini memang cenderung berafiliasi naturalis.

Sebagai seniman muda, Charlie mengaku karyanya cenderung naturalis. Saya senang melihat obyek yang sebenarnya. Banyak orang menjadi pelukis profesional belajar dari gaya naturalis, begitu alasan mahasiswa Sastra Indonesia ini. Sehingga jadilah karya Charlie yang melukiskan alam, flora, fauna maupun obyek manusia seperti Potret Monalisa misalnya. Satu lukisan dihargai antara seratus ribu rupiah sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah. Lumayan. Ada juga yang beli sekedar koleksi di rumah. Hasil penjualan itu direncanakan Charlie membuyar uang kuliah dan beli alat-alat lukis.

Masih ada kejujuran di hati pemuda yang tampil berjas biru dan berdasi kupu-kupu dalam pameran ini. Charlie terus terang mengatakan bahwa karyanya masih berbau sontekan. Itu benar. Salah satu cara belajar terbaik adalah meniru. Kebiasaan tiru meniru ini sudah menjadi kebudayaan manusia semenjak doeloe kala.

Tapi apakah kita harus meniru terus? Charlie menjawab: tidak! Alasannya dari hasil meniru itu seseorang akan menemukan identitasnya suatu saat. Nah. Jika identitas itu telah ditemukan barulah dipertahankan sebagai sesuatu yang spesifik. Lihat contoh: Affandi, Basuki Abdullah, Amri dan lain-lain, tandas Charlie mantap.

Menjadi pelukis adalah profesi yang penuh unsur simbolik. Mengandung pelbagai perlambang yang mewujudkan kekayaan seni budaya. Dan profesi pelukis ini cukup terhormat. Sekaligus bisa dijadikan sumber hidup. Bagaimana pun Lie Charlie sudah membuktikan itu.□

M. Aman Simamora

Digitized by Google

Hari-hari penuh kepastian...

baca saja

Redaksi/Tata Usaha: Jl. Bangka Raya no. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. 791352 (3 Sal), 797020
Teleks 47459 Eska JKT.
Iklan: Jl. Gajah Mada No. 90A Tingkat III Telp. 621691 - 646146 Jakarta Barat.
Perwakilan Jawa Barat Jl. Warta no. 13 Telp 56213 Bandung.
Perwakilan Jawa Tengah & D.I.Y. Jl. Lamper Sari 12A Telp. 313113, Semarang.
Perwakilan Sumatera Utara Jl. Timor 14C Telp. 515089 Medan
Perwakilan Jawa Timur & Bali Jl. Ketintang Komplex Agar-agar Kav. 52 Telp. 814329, Surabaya
Sub. Perwakilan Bali Jl. Imam Bonjol 99 Telp. 3317 Denpasar

Digitized by Google

Maria Sugiharto :

Wayang, Epik Dan Tokoh-tokoh Penting

Di India, setiap *hari lahir Kresna* — tokoh didalam wayang — selalu merupakan hari libur, karena *Krsna* (Kresna) adalah merupakan junjungan para pemeluk agama Hindu. Bahkan, di India terdapat nama-nama negara bagian yang sama dengan nama-nama negara dalam pe wayangan, seperti *Ayodya, Mandura* dan *Sri Langka,* dapat diidentikkan dengan Alengka Diraja, dari epik Ramayana yang terkenal itu. Apakah wayang nyata-nyata diturunkan dari India, bersama agama Hindunya? Atau, apakah di Jawa sudah ada wayang sebelum pengaruh India datang, mengingat bahwa Mahabharata ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh, sedangkan Ramayana ditulis oleh Walmi ki?

Sedikit mengenai wayang secara harfiah

Dinamakan wayang, karena pagelarannya diwakili oleh boneka-boneka dari kulit hewan dan merupakan permainan *ba yang-bayang* (wayang, bahasa Jawa). Wayang dimainkan serta diceritakan oleh seorang *Dalang.* Dalam wayang, tabiat serta watak dilukiskan baik yang halus maupun yang kasar. Penempatannya pada kelir, — tempat dimana wayang ditayangkan dan membentuk bayang-bayang — yang halus ditempatkan pada sebelah kanan, sedangkan yang kasar disebelah kiri. Sebagai kebiasaan, sebelum sebuah pagelaran wayang diadakan, maka sesaji dipersembahkan disertai dengan pembakaran kemenyan. Hal ini dikarenakan ada hubungannya yang sakral dengan kepercayaan yang dianut.

Dalam sastra Jawa, wayang kulit telah dikenal semenjak abad ke-11. Menurut *Brandes,* mengingat peristilahan tehnis, maka wayang sudah dimulai semenjak kira-kira tahun 700 Caka (kira-kira 784 Masehi). Sedangkan menurut *Hazeu,* 1897, dinyatakan bahwa wayang merupakan ciptaan bangsa Jawa sendiri, dan bukan tiruan dari India, ataupun berasal-usul dari Cina. — Pendapat ini dinyatakan oleh DR. B.M. Gosling yang mengatakan bahwa wayang diturunkan dari Cina karena bahasa kromo (halus)-nya disebut *Ringgit,* kata mana memiliki kemiripan di dalam pengucapan dari perkataan Cina *ying-hi* atau *ying-gih* yang di dalam bahasa Cina berarti pertunjukan wayang. Wayang

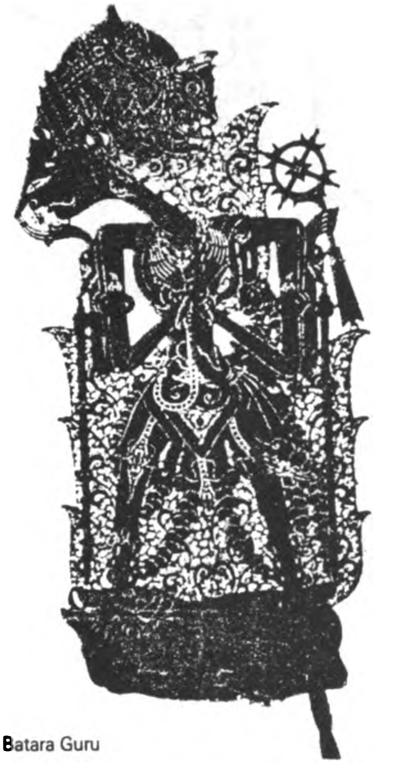

Batara Guru

dari Indonesia memiliki bentuk yang *ekspresif-simbolis,* sedangkan dari Cina bersifat *naturalistis.* Wayang, tidak banyak berbeda dengan India dan Yunani misalnya, karena lakon wayang (sandiwara) lahir dari upacara adat dan keagamaan, seperti di dalam tatacara memuja dewa-dewa atau arwah nenek moyang. Sisa-sisa sifat keagamaan ini terlihat dari adanya sesaji, pembakaran dupa, juga penyelenggaraannya yang dihubungkan dengan peristiwa tertentu seperti *ngruwat* (hajat tertentu untuk menolak bala), memohon kesejahteraan ataupun rasa terimakasih bila panenan berhasil.

Epik Mahabharata dan Ramayana

Epik yang sangat populer di dalam wayang adalah Ramayana dan Mahabharata. Ramayana ditokohi oleh Prabu Rama dan Dewi Shinta, sedangkan Maha bharata tokohnya adalah Keluarga Pandhawa serta Kurawa. Dari dua epik inilah yang mendapatkan perhatian paling besar di Jawa, mungkin sekali disebabkan karena kecenderungan orang Jawa kepada tuntutan yang berwarna warni terhadap perkembangan watak serta karakter manusia. Ramayana atau kisah Rama lebih populer di dalam penyajian tari, baik di Jawa Tengah maupun di India. Hal ini bisa demikian karena penyampaian karakter yang lebih nyata di dalam tari-tarian gaya Ramayana.

Rama, di dalam kisah Ramayana dikisahkan bahwa dia ini sudah berada di Mayapada (dunia) jauh sebelum tokoh-tokoh seperti Pandawa dan lain-lainnya, karena memang demikian kehendak Hyang Widhi. Rama dikirim ke dunia melalui *guagarba* (kehamilan) Dewi Raguwati dengan suaminya Raja Dasarata. Dewa telah menentukan bahwa nantinya Rama harus menjadi seorang Pahlawan. Tetapi, seperti pahlawan-pahlawan di dunia ini, untuk benar-benar menjadi pahlawan, harus melalui jalan yang panjang di dalam percobaan-percobaan kesengsaraan serta cobaan-cobaan yang sifatnya sulit. Sebenarnya Rama adalah titisan (inkarnasi) dari Dewa *Wisnu,* yang sengaja dikirim ke dunia untuk memerangi serta mengalahkan seorang raksasa yang menyembunyikan perwatakan manusia yang buruk, seperti tamak, gila kuasa, rakus, serta sifat-sifat negatif lainnya, bernama Raja Dasamuka, raja dari Alengka. (Disini bi-

Kresna

Digitized by Google

sa dilihat sinonim tentang Alengka dan Sri Langka). Bertahun-tahun Dasamuka telah mengkocar-kacirkan kerajaan Dasarata. Disamping isteri yang melahirkan Rama, Dasarata masih mempunyai dua orang isteri lainnya ialah Dewi Sumitra yang melahirkan putera bernama *Leksmana,* serta Dewi Kekayi yang melahirkan Bharata. Ketiga kakak beradik ini dibesarkan bersama dibawah asuhan seorang bijak bernama *Wismamitra,* dari beliaulah ketiga kakak beradik ini menimba pengetahuan kekesatryaan seperti di dalam etika serta peperangan bagi para pangeran yang berada di dalam kekastaan Ksatrya.

Setelah ketiganya menjadi dewasa, di dalam pengembaraannya disekitar kerajaan ayahandanya, Rama berhasil mengalahkan seorang raja yang mengadakan sayembara tentang ketangkasan memanah. Dari sinilah Rama bertemu calon isterinya, *Shinta,* karena Shinta adalah puteri raja yang disayembarakan tersebut.

Ketika Dasarata merasa dirinya sudah lanjut usia dan harus mengundurkan diri dari pemerintahan di Ayodya, dia pilih putera sulungnya, Rama untuk menggantikan kedudukannya sebagai kepala peme rintah. Namun, isteri lainnya yang bernama Dewi Kekayi menuntut bahwa sebelum Kekayi melahirkan Bharata sang Raja menjanjikan tahta terhadap bayi putera yang akan dilahirkannya. Dengan hati berat, tetapi melaksanakan *Sabda Pandita Ratu* atau sabda sang raja yang tidak bisa dicabut lagi karena hal ini merupakan suatu sumpah kehormatan bagi raja-raja di Jawa, maka tahtapun diserahkan kepada Bharata. Untuk selanjutnya, Rama, Sinta dan Leksmana dikucilkan kehutan untuk mengembara. Rama, dengan kekesatryaan yang sangat tinggi, meninggalkan kerajaan demi kesejahteraan kerajaan Ayodhya yang dipimpin Bharata. Bharatapun secara sangat kesatrya meminta restu dari abangnya, dan mengakui bahwa sebenarnyalah tahta itu milik abangnya, Rama.

Seperti telah banyak kita ketahui, kisah Rama-Shinta kebanyakan berkisar kepada pengembaraannya di hutan, dan merupakan sebuah trio Rama-Shinta-Leksma na. Kisah-kisah yang dipagelarkan di dalam tari-tarian Ramayana, juga yang menjadi pagelaran khas di pelataran candi Hindu Prambanan, kisah Rama dipagelarkan pada malam bulan purnama selama musim panas (Juli, Agustus) dengan fokus kepada pengembaraan trio tersebut dengan segala goda rencana, merupakan epik khusus tentang kejahatan serta kezaliman yang dikalahkan oleh budi baik. Pengembaraan trio Rama-Shinta-Leksmana dimulai dari pertemuan mereka dengan Sarpakenaka (adik perempuan prabu Dasamuka), — dan bagian ini merupakan bagian terpenting didalam epik Ramayana — Sarpakenaka berusaha setengah mati mempesona Leksmana yang tentu saja Leksmana tidak mau, malahan berakhir dengan kemarahan Leksmana sehingga membuat sebuah insiden, ialah kuping

Rama

rikan pertolongan kepada Rama, dan kelonggaran inilah yang diingini Dasamuka untuk menculik Shinta, dengan pura-pura menjadi seorang pengemis tua yang me melas. Penculikan yang dilaksanakan dengan mengendarai kereta kuda serta berjalan sangat cepat menjelajah langit, di ketahui oleh *Jatayu,* seekor garuda, yang berusaha menyelamatkan Shinta. Serangan Jatayu terhadap Dasamuka ternyata kurang seimbang, dan jatuhlah Jatayu ke tanah luka parah. Sebelum ajal dia ceritakan kepada Rama dan Leksmana tentang penculikan Shinta oleh Dasamuka. (Didalam pelaksanaan wayang orang, atau sendratari yang dipagelarkan dipelataran candi Prambanan, maka adegan ini bisa sangat intens dan membuat para penonton menitikkan airmata, karena Jatayu yang di dalam sekaratnya akan jatuh, masih bertahan untuk memberitahu Rama dan Leksmana tentang penculikan tersebut, dalam arti bahwa dilarikannya Shinta adalah penculikan, dan bukan merupakan kehendak berdua, dan adegan demikian selalu diiringi gending (lagu) yang menyayat hati, dengan efek lampu yang sangat sendu serta mengharukan.

Dalam usaha penyelamatan Shinta, singkat cerita Rama dan Leksmana men-

Dasamuka Sinta Anuman

Sarpakenaka dipotong oleh Leksmana. Insiden ini menyebabkan kemurkaan Dasamuka yang tiada terkira, dan dia mengutus raksasa bernama Marica untuk *mengambil hati* sang trio — ini tentu saja merupakan akal bulus — dengan Marica ber bentuk *kijang emas.* Setiap wanita pasti akan tertarik oleh seekor kijang emas yang sedang berlari-larian di hutan. Demikian juga Shinta. Hal mana memang merupakan taktik Dasamuka. Kijangpun diburu oleh Rama atas permintaan Shinta. Ketika kijang kena panah Rama, menjeritlah dia dan berbalik menjadi Marica lagi. Jeritan di dalam hutan itu terdengar oleh Leksmana yang sedang menjaga Shinta, yang dia kira jeritan sang kakak, Rama. Maka berlarilah Leksmana akan membe-

dapatkan sekutu dari sebuah kerajaan kera disekitar Alengka sana, dengan para pemimpinnya kakak beradik Sugriwa dan Subali. Disini keduanya bertemu dengan seorang perwira perang besar seekor kera putih bernama Anoman. Anoman dikirim untuk dapat menyelesaikan missi penyelamatan Shinta. Anoman sebenarnya adalah putera Dewa angin, Sang Hyang Bayu. Dengan satu lompatan istimewanya, Anoman berhasil melangkahi samudera dan sampai dikerajaan Alengka untuk menyelamatkan Shinta, serta menghancurkan kezaliman yang terjadi disana. Anoman, meyakinkan Shinta tentang missi yang diembannya, dengan menyerahkan cincin milik Rama. Karena anak Dasamuka Mega nanda terbunuh, maka sang ayah, Prabu

Digitized by Google

Dasamuka sangat murka, dan menangkap Anoman. Tertangkapnya sang pahlawan Anoman membuat Rama-Leksmana serta prajurit kera lainnya marah serta penasaran, dan dari saat itulah Rama-Leksmana berusaha menghancurkan kerajaan Dasamuka dengan bantuan penuh dari armada kera. Pertempuran ini dimenangkan oleh fihak Rama (demikianlah selalu cerita wayang yang berfilsafat bahwa yang jahat harus mati) — crime does not pay.

dalam satu kerajaan. Dua epik besar Ramayana dan Mahabharata pada dasarnya mendasarkan kepada keputusan pada masalah itu. Dalam Ramayana, titik balik dari kejadiannya adalah ketika Shinta diculik, yang mengalur menuju kepada sebuah *kemenangan* oleh kekuatan yang *alus* diwakili oleh Rama-Leksmana dan Anoman terhadap yang negatif atau *kasar* digambarkan didalam tokoh Dasamuka dan kerajaannya.

Arjuna

Pandawa, Nakula, Sadewa, Bima, Arjuna Yudistira

Salah satu yang harus dicatat di dalam pertempuran ini ialah kekesatryaan adik Dasamuka, yang juga bersifat raksasa, *Kumbakarna.*

Kumbakarna tahu sifat abangnya yang jahat, tetapi dia sebagai seorang *nasionalis* yang mengandalkan kesetiaannya, tetap berjuang untuk negerinya. Dan dia mati ditangan Anoman, dengan cara anggota badannya dilepas satu persatu. Dasamuka juga tewas di dalam pertempuran ini oleh tangan Anoman. Untuk memperlihatkan cara mati seorang yang meskipun jahat tetapi cukup perkasa, maka disini diceritakan bahwa Anoman mempergunakan se buah gunung untuk menimbun Sang Dasamuka, dan kekuatan Anoman yang demikian adalah atas bantuan Sang Dewa.

Salah satu lagi warga Alengka yang tidak menyetujui tindakan abangnya, ialah seorang kesatrya yang bukan raksasa, adik kandung Dasamuka bernama *Wibisana.* Setelah peperangan usai, maka Rama mengangkat Wibisana menjadi raja di Alengka, sedangkan dia dengan adik dan isteri nya pulang ke Ayodhya.

Episode Ramayana mengambil bagian yang terpenting ialah pada peperangan di Alengka, dimulai dari penculikan Dewi Shinta oleh Dasamuka. Hampir kedua epik besar perwayangan, *Ramayana dan Mahabharata* berciri kepada cerita yang dimulai dengan perselisihan atau percekcok an dalam suksesi (pergantian kekuasaan)

Mahabharata

Dalam Mahabharata, percekcokan atas kerajaan nampak lebih kompleks karena merupakan konflik antar grup saudara sepupu yang berperang. Hal ini digambarkan melalui keluarga *Pandawa* yang bersifat alus, dan keluarga *Kurawa* yang memiliki sifat sebaliknya, ialah kasar. Digambarkan bahwa pertentangan faham yang kronis itu diantara para sanak saudara sepupu, membuktikan penekanan epik Jawa, sebagai kompleksnya yang saling berhubungan antara yang bermusuhan, yang memperlihatkan dengan jelas mana yang kasar dan mana yang alus, secara lebih terinci.

Seperti juga didalam Ramayana, yang dimulai dengan periode suksesi, maka di dalam Mahabharata dimulai ketika raja Abiyasa sudah merasa uzur sehingga perlu mengundurkan diri, dan menunjuk penggantinya untuk memerintah kerajaan *Ngastina, Pandu,* yang adalah putera keduanya. Putera pertama, *Drestaratra* terlahir buta, sedangkan putra ketiganya, *Widura* terlahir cacat tubuh. Pada waktu kematian Pandu kemudian, tahta sementara dipegang secara ad-interim oleh Drestaratra, karena putra-putra Pandu masih sangat muda. Drestaratra memperlakukan putra-putra Pandu secara adil, sama dengan cara dia memperlakukan terhadap putra-putranya, Kurawa. Dibawah asuhannya, kedua sanak sepupu itu, Pandawa dan Kurawa hidup secara rukun dimana diajarkan bagaimana saling mengasihi dan saling menghormati. Guru-guru mereka secara tehnis (dalam mewujudkan ketrampilan fisik), adalah resi Durna dan Resi Bisma, di samping mereka itu dididik menjadi ke satrya-kesatrya yang bernilai, beretika serta berwatak.

Selanjutnya, sebagaimana di dalam filsafat wayang, karena yang baik akan menempati sisi yang *alus,* maka di dalam epik ini, terlihatlah bahwa meskipun dibesarkan di dalam keadaan serta situasi yang sama anak-anak Pandawa lebih cepat menguasai ilmu, serta nampak lebih cemerlang. Lagi pula, menurut garis keturunan, maka setelah Pandu mangkat, Pandawalah menjadi penggantinya. Drestaratra memilih sebagai pengganti tahta Ngastina Yudhistira, putra sulung dari Pandu. Dan sudah seperti diharapkan tentu saja, sulung dari Prabu Drestaratra Duryudana tidak setuju, apalagi atas desakan serta hasut an-hasutan yang dilontarkan oleh Sengkuni (pamannya). Sengkuni menghasut Drestaratra untuk mengusir warga Pandawa ke hutan, dan menentukan Duryudana, sulung Kurawa untuk menduduki tahta kerajaan Ngastina.

Penderitaan selama dipembuangan (hutan), membuat para Pandawa makin kuat secara fisik dan mental. Kurawa selalu ketakutan bahwa pada suatu hari Pandawa akan naik tahta. Maka, Kurawa berusaha agar Pandawa selalu diasingkan, atau dibunuh. Bermacam-macam cara dan tipu, seperti misalnya undangan pesta terhadap Pandawa, tetapi tempat penginapan me reka dibakar oleh Sengkuni.

Karena di dalam epiknya Pandawa akan selalu berada di dalam sisi yang alus, maka banyak episode mengungkapkan bah-

Digitized by Google

wa Pandawa yang sabar, alus dan tawakkal selalu akan berada di fihak yang menang dikemudian hari. Atas usul Drestaratra, Bisma dan Widura, Ngastina sebaiknya dibagi dua, bagi sepupu yang memerintah itu. Sudah dapat diterka, bahwa Kurawa memilih bagian yang sudah bagus, terbangun serta sejahtera. Sedangkan Pandawa diberi bagian yang masih berhutan serta masih banyak yang harus dibangun. Episode ini memperlihatkan betapa sebuah kerajaan atau negeri membangun negaranya seperti Pandawa, dengan rajin dan tawakkal, maka terwujudlah sebuah kerajaan baru dinamakan Indraprasta, atau Ngamarta, dengan Yudhistira sebagai rajanya.

Keadaan yang sudah tenteram ini dikacau lagi oleh fihak Kurawa, dalam rangka menyisihkan mereka itu. Maka dibuatlah pesta atau pertandingan dadu, dimana kecurangan-kecurangan dibuat oleh fihak Kurawa. Karena kekalahannya harus dibayar dengan Ngamarta yang sudah dibangun indah oleh Pandawa. Perjalanan panjang Pandawa dengan segala duka dan sengsara karena harus ***ngenger*** (ikut sebagai pembantu) di kerajaan Matswapati, selalu nantinya diakhiri dengan suatu kebahagiaan, yang akan dikacau lagi oleh Kurawa, sebab semuanya harus berakhir pada akbar yang dinamakan Bharatayuda.

Masing-masing anak Pandawa sudah mulai kawin dan beranak di dalam pembuangan serta naik turunnya pamor anak-anak Pandawa itu, sehingga nanti ketika waktunya telah tiba untuk peperangan besar atau Bharatayudha, maka Arjuna, putra penengah Pandawa (nomer tiga) telah bercucu yang bernama Parikesit.

Beberapa karakter di dalam tokoh wayang

Kresna, yang adalah ipar Arjuna serta merupakan titisan dari Dewa Wisnu, sebenarnya merupakan penengah, serta dewan penasehat. Ketika Pandawa sudah kembali dari pengasingannya, maka Kurawa mulai menjadi lebih antogonistis, karena kekhawatiran terdesak. Sementara situasi demikian, Kresna datang untuk memberikan pertimbangan kepada dua fihak. Sebenarnya, Duryudana sangat ingin agar Kresna menjadi penasehat mereka. Tetapi di dalam Mahabharata versi Jawa diceritakan bahwa Kresna menawarkan kepada fihak Kurawa, apakah mereka menginginkan Kresna sebagai penasehat, atau memilih diberi bantuan oleh Kresna berupa pasukan perang. Duryudana secara sangat tidak bijaksana memilih armada perang. Dan dengan demikian Kresna menjadi sekutu Pandawa.

Yudistira, putra sulung Ngastina, mewakili perwatakan sebagai pimpinan. Seorang yang halus serta bijaksana. Di dalam diskripsinya dikatakan bahwa dia memiliki darah putih di dalam urat-uratnya. Seperti diketahui bagi masyarakat Jawa, warna putih mewakili sifat murni dan anggun. Yudistira memiliki moral tinggi serta sangat adil dam bijaksana. Seperti

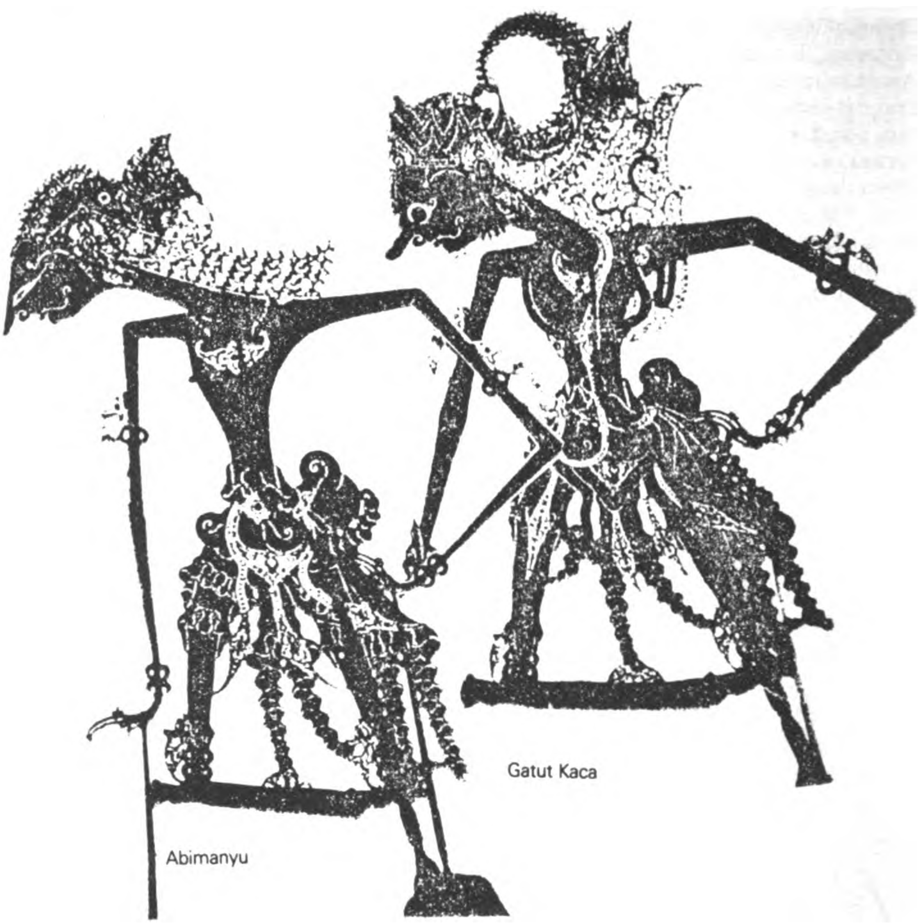

Gatut Kaca

Abimanyu

anggauta Pandawa lainnya, Yudistira juga memiliki kekuatan yang sifatnya magis dari Dewa yang bisa menghalangi serang-an dari luar.

Bima, putera kedua, mewakili watak yang gagah, seorang perwira perang, yang paling berani. Dalam banyak lakon, dia selalu menjadi seorang yang mengakhiri peperangan karena menekuk lututkan musuh. Dia memiliki senjata yang paling ampuh yang dinamakan kuku *pancanaka* dari tusukan mana sangat mematikan. Diapun memiliki kemampuan bisa terbang, seperti tokoh Anoman di dalam Rama-yana, karena pada dasarnya keduanya merupakan putera dari Batara (Dewa) Bayu (dewa angin).

Arjuna, putera penengah atau ketiga, yang memiliki banyak hal yang ideal bagi orang, baik pria, apalagi wanita. Dia terkenal alus, banyak pacar dalam lakon-lakon wayang, dia selalu menghindari tuduhan tersebut, meskipun pada akhirnya selalu diakuinya. Dia ahli dalam mempergunakan banyak senjata untuk perang karena dia terberkati oleh Dewa untuk kemampuan itu, karena pada dasarnya dia ini putera pungut Dewa Indera serta titisan Wisnu. Dia memiliki secara resmi dua is-teri, Sembadra (adik Kresna). dan Srikandi.

Abimanyu, Ditokohkan, karena dia ini putera Arjuna yang memiliki banyak sifat mirip ayahandanya. Diapun memiliki dua isteri, Siti Sundari (putri Kresna) dan Dewi Utari, putri sekutunya, Raja Matswapati. Dari Dewi Utari lahirlah Parikesit yang merupakan tokoh akhir Pandawa menghadapi perang besar Bharatayudha.

Abimanyu mempunyai pengasuh saudara sepupunya, *Gatutkaca,* putera Bima. Gatutkaca juga merupakan tokoh istimewa karena kehebatannya serta kejantanannya semenjak lahir. Waktu lahir, tali pusatnya tidak dapat dipotong, sampai harus dicarikan pisau istimewa. Tutup belati itu tinggal di dalam perutnya, yang membuatnya lebih sakti. Dia mati ditangan panglima perang Kurawa Adipati Karna, dibunuh dengan senjata yang sama yang memotong tali pusatnya. Seperti diketahui, di dalam wayang segala sesuatu harus kembali kepada asal. Maka belati pun harus bersatu kembali dengan tempatnya, yang pada waktu itu berada di dalam perut Gatutkaca.

Nakula dan Sadewa sang kembar dari Pandawa, tidak banyak diceritakan secara rinci tentang kemahirannya, yang jelas mereka berdua juga sakti seperti saudara-saudaranya, serta patuh kepada kakaknya di dalam segala keadaan.

Kresna, sebagai Penasehat agung, memiliki kearifan serta kebijakan di dalam berbicara. Dia selalu dapat meletakkan segala persoalan dan keruwetan kepada suatu posisi yang proporsional. Dia memiliki senjata yang terkenal dengan nama *Cakra,* sama kuatnya dengan jimatnya yang bernama Wijayakusuma yang kerap dipergunakan untuk menghidupkan yang telah mati. □

Digitized by Google

BINTARO JAYA

LANGKAH AWAL MENUJU KOTA SATELIT BARU

BINTARO JAYA ...
Dibangun dalam rencana Kota Satelit

Tengoklah Kebayoran Baru 20 tahun yang lampau, Ia merupakan kota satelit dari Jakarta.

Dengan luas 1000 Ha, Bintaro Jaya akan menjadi tempat permukiman paling luas dan paling lengkap dikawasan Ibu Kota Jakarta Raya.
Ia akan menghubungkan Jakarta dengan pusat-pusat industri baru seperti: Serpong dan Tangerang dengan jalan raya dan kereta rel listrik (KRL) yang melintas melalui Bintaro Jaya.

Fasilitas yang akan dibangun pun paling lengkap. Bukan sekedar sebuah Supermarket, Sekolah Dasar atau PUSKESMAS.

Tetapi seperti Kebayoran Baru sekarang. Bintaro Jaya akan membangun kompleks pusat perbelanjaan, sekolah-sekolah, rumah sakit, hotel-hotel, tempat rekreasi, olahraga dan fasilitas lainnya seperti layaknya sebuah kota besar.

Lebih dari itu, Bintaro Jaya dibangun dalam lingkup rencana tata kota modern, yang memperhatikan segala aspek sosial, budaya dan lingkungan dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang ini.

Bintaro Jaya ... Sebuah lingkungan segar dan nyaman. Tempat permukiman paling ideal, tidak hanya bagi Anda sekarang tapi juga bagi keturunan Anda di masa depan.

BINTARO JAYA ... Langkah awal menuju Kota Satelit Baru

Daftar harga rumah :

TIPE	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	HARGA
Pipit II	90 (6x15) m2	81,5 m2	Rp. 28.510.000,-
Parkit	120 (8x15) m2	87,5 m2	Rp. 34.860.000,-
Punai	135 (9x15) m2	108 m2	Rp. 40.400.000,-
Camar	180 (9x20) m2	109 m2	Rp. 48.360.000 -
Perkutut	180 (9x20) m2	120 m2	Rp. 50.310.000,-
Pelikan I	250 (10x25) m2	122 m2	Rp. 58.875.000,-
Pelikan II	250 (10x25) m2	155 m2	Rp. 65.530.000,-

Dapat diangsur melalui KPR PAPAN SEJAHTERA selama 5-15 tahun
dan melalui KPR BANK DUTA selama 2-7 tahun

hidup nyaman di alam segar
BINTARO JAYA

Developer Anggota REI No. 1

P.T. PEMBANGUNAN JAYA

GEDUNG JAYA Lantai 11, Jl. M.H. Thamrin 12, Telp. 323203, 323554
KANTOR TAMAN BINTARO JAYA, Gedung A, Lantai 2, Jl. Bintaro Raya
Jakarta 12330, Telp. 736898, 737674 ext. 244, 245, 246

Digitized by Google

Segenap Pimpinan dan Karyawan
GARUDA INDONESIA
Dengan rasa syukur dan gembira
Mengucapkan Selamat dan Sukses
atas Prestasi yang dicapai G O L K A R dalam
Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 1987.

Digitized by Google

GOLONGAN KARYA
No. 42 Agustus 198

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

42 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Laporan Utama : Menjawab Tantangan Zaman

Laporan Khusus : Swasembada, Bagaimana Di Masa Depan?

ISSN 0216 — 2571

Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

KIJANG BARU

Menampilkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia

KIJANG BARU Makin Mewah

Sosok KIJANG BARU makin menawan. Dashboard semewah sedan, ventilasi segala cuaca pada kedua ujung dashboard, serta panel instrumen yang bebas silau.

KIJANG BARU Makin Nyaman

Interiornya sangat lapang. Bantalan tempat duduk dari bahan urethane yang dilengkapi per, nyaman dan tidak melelahkan. Pemasangan AC* ("SUPER KIJANG**") tidak mempersempit ruang kaki berkat saluran yang sudah terpasang (built-in).

KIJANG BARU Makin Aman Dikendarai

KIJANG BARU dirancang lebih aman. Pada model "SUPER KIJANG**", rem depannya tipe cakram berventilasi. Dilengkapi LSPV (Load Sensor Proportioning Valve), menyeimbangkan tenaga pengereman sesuai beban, agar kendaraan tetap stabil walau direm mendadak.

KIJANG BARU Makin Perkasa dan Makin Ekonomis

Mesin Toyota 5K – 1500 cc bertenaga besar, dilengkapi Fuel Saving System (sistem penghemat bahan bakar) untuk menghindarkan pemborosan.

KIJANG BARU Makin Mantap Dikendarai

Suspensi depan tipe Double Wishbone, lebih memantapkan pengemudian. Gigi kemudi yang variabel memudahkan pengendalian.

Tingkat aerodinamikanya lebih baik (CD = 0,45), sehingga hambatan angin lebih kecil, bahan bakar lebih irit, dan laju kendaraan semakin mantap.

** Dealer option ** Bertransmisi manual 5-kecepatan*

Ya, inilah mobil idaman kita semua

TOYOTA 1500
KIJANG

Saksikan Kijang Baru di ruang pamer berikut yang dibuka penuh pada hari Sabtu (8.30 – 17.00) dan hari Minggu (09.00 – 13.00)

Main Dealer : PT. ASTRA MOTOR SALES • JAKARTA
- Jl. Jend. Sudirman No. 5, Telp. 587123.
- Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Telp. 375008.
- Jl. Salemba Raya No. 67, Telp. 884025.
- Jl. Daan Mogot No. 146-147, Telp. 596110.
- Jl. Jagorawi-Lebak Bulus Cilandak, Telp. 760780.
- Jl. Kunir No. 7, Telp. 671829.
- Jl. Muara Karang Raya No. 15 (Pluit), Telp. 6697640.
- Jl. Garuda No. 84. Telp. 414235.
- Jl. Prof. Dr. Supomo SH. No. 37, Tebet , Telp. 8290176.

Dealer : • JAKARTA,
- **P T. TUNAS RIDEAN MOTOR I** Jl. Pecenongan No. 60-62, Telp. 359491(5 sal).
- **P T. TUNAS RIDEAN MOTOR II** Jl. Dewi Sartika No. 145, Telp. 801860.
- **P T. KUSUMA MOTOR** Jl. Batu Tulis No. 34, Telp. 366907.
- **P T. PROUNION INDO JAYA** Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 48, Telp. 354253.
- **P T. ASTRIDO JAYA MOBILINDO I** Jl. Batu Tulis No. 9, Telp. 352421-3.
- **P T. ASTRIDO JAYA MOBILINDO II** Jl. Panglima Polim No. 60-A, Telp. 715129.
- **P T. MOBILINDO SUMBER KARYA** Jl. Bandengan Utara No. 41-A, Telp. 673950.
- **PT. KUSUMA INDRA MOTOR** Jl. Raya Bekasi Timur Km. 19, Telp. 4891903.
- **PT. ANEKA MOBILINDO,** Jl. Balikpapan No. 32 A-B, Telp. 377913.
- **PT. SINAR INTI TELAGA,** Jl. H. Samanhudi No. 7. Telp. 350022.
- **BEKASI, PT. KUSUMA BEKASI MOTOR** Jl. Ir. H. Juanda No. 98-A, Telp. (99) 72938.
- **TANGERANG, PT. TUNAS RIDEAN MOTOR III** Jl. Raya Serang No. 80 (Cimone), Telp. (99) 24932,
- **SERANG, PT TUNAS RIDEAN MOTOR IV** Jl. K.H. Wachid No. 91, Telp. (0254) 81270

TOYOTA
TERPILIH KARENA TERPERCAYA
PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR JL. JEND. SUDIRMAN No. 5 Telp. 587561 – JAKARTA

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/ Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.

Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Ariono Poernomo.
Subandrio.
Djonharro.
Rum Aly.
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noerijathy.
Robert Puang Sunur.
Issidarto BA.
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO. 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi peherbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI

Tetap Tegak, Menjawab Tantangan Zaman

FOKUS

Banyak hal yang perlu dilanjutkan Pemerintah bersama masyarakat, wawancara dengan Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH

LAPORAN UTAMA

Menjawab Tantangan Zaman. Beri kesempatan semangat mandiri dan swadaya berkembang lebih semarak: Wawancara dengan Dr Emil Salim, Drs Anton Prajitno, Drs Bambang Sulistomo, Dr Hadisusastro, Abdurrachman Wahid, Dr Bambang WK, dan sejumlah tokoh muda lainnya.

LAPORAN KHUSUS

Swasembada, Bagaimana Di Masa Depan? Kemampuan mempertahankan swasembada ditopang teknologi dan peningkatan pendapatan petani, dari Ir Achmad Affandi, Ir Usman Hasan, dan H Oyon Tahyan.

NASIONAL

Tanggungjawab Kemajuan Sepenuhnya Di Pundak Kita, Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto tanggal 15 Agustus 1987 di depan Sidang DPR; Berbagai kalangan sambut positif pidato Presiden; Tatanan politik desintegratif dirubah menjadi integratif, dan sejumlah peristiwa nasional lainnya.

KOMENTAR

Sepatu Saksi; Pra Peradilan & Bentakan; Asap Jalan Tol; Kasus Calon Wagub.

ORGANISASI

Sejumlah rekaman peristiwa organisasi: Lokakarya pengembangan organisasi; Golkar bantu yayasan Fatwa Samawi.

SPEKTRUM

Titik puncak tekad bangsa, oleh M Syafa'at Habib; Type-type kepemimpinan, oleh AA Oka Mahendra; Tripartit dan bipartit, oleh Soekarno D.

SENI & BUDAYA

Oidipus, Misteri Sebuah Nujuman, oleh Maria Sugiharto; Kisah Rendra Jadi Oidipus, oleh Rendy MS.

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

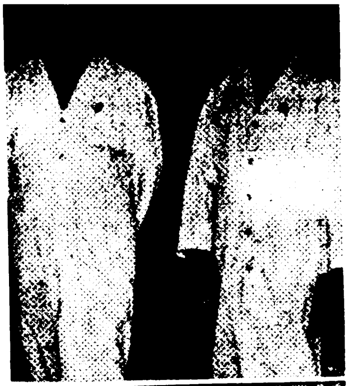

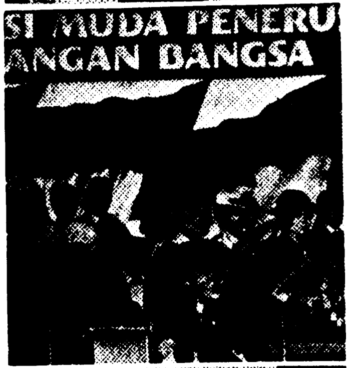

Soedarmadji

Digitized by Google

Tetap Tegak, Menjawab Tantangan Zaman

SAMPAI hari ini, kita tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu — dan itu telah berlangsung 42 tahun lamanya. Padahal, seperti diutarakan Presiden Soeharto 15 Agustus ini, kita semua tak sedikit menghadapi tantangan-tantangan. Kita acapkali dihadapkan pada perubahan-perubahan besar, baik dalam lingkup nasional, dalam lingkup regional maupun dalam lingkup internasional. Tidak jarang pula perubahan-perubahan itu sangat mendasar sifatnya.

Kemampuan untuk bertahan tetap tegak itu, secara rendah hati dikatakan oleh Presiden pertama-tama karena kita semua selalu berusaha untuk memahami makna pengalaman pendahulu-pendahulu kita dan pesan-pesan luhur yang telah mereka nyatakan kepada kita semua yang hidup sampai hari ini.

Apa yang dinyatakan oleh Presiden — sebagai kesimpulan berdasarkan pengamatan atas pengalaman empiris — dapat disepakati. Dalam budaya kita memang terdapat nilai yang memiliki esensi penghargaan terhadap para pendahulu dan 'pesan-pesan luhur'. Pada pihak lain, terdapat pula dalam budaya kita kemampuan untuk terbuka terhadap hal-hal dan nilai-nilai baru kendati tak jarang ada rasa was-was terhadap yang baru.

Seorang cendekiawan Indonesia yang duduk dalam kabinet dalam dekade terakhir ini, menggambarkan bahwa Indonesia mempunyai keadaan yang tersendiri atau unik dalam arti bahwa walaupun pada satu pihak manusia Indonesia tak dapat mengisolasikan dirinya dari pergaulan dengan bangsa lain, dipihak lain ia masih dekat bahkan dalam beberapa hal masih terikat oleh adat kebiasaan dan tradisi-tradisi tempat asalnya. Dengan perkataan lain, dilihat secara budaya orang Indonesia masa kini sering merupakan seseorang yang berada di tengah-tengah atau di pinggiran dua kebudayaan yang berlainan dengan tuntutan-tuntutan yang berlainan pula. Di satu pihak kebudayaan dunia masa kini atau modern dan di lain pihak kebudayaan tradisional atau kebudayaan masa silam.

Apa yang diutarakan cendekiawan itu, menjadi lebih menarik, ketika ia juga lalu menyebut bahwa potret kehidupan Indonesia seperti itu interesan untuk diamati, akan tetapi sekaligus juga menempatkan manusia-manusia Indonesia sering dalam keadaan yang sulit. Manusia Indonesia harus pandai-pandai tidak saja menempatkan dirinya tetapi juga mengadakan pilihan yang tepat dalam suasana dan pada saat tertentu. Kita ingin meminjam beberapa bagian pemaparan beliau atau setidak-tidaknya alur pemikiran beliau dalam memo ini.

Manusia Indonesia masa kini benar-benar merupakan seorang manusia yang mengalami tarikan dari dua arah yaitu ikatan dan tarikan-tarikan dari masyarakat tradisional tempat asalnya dan masyarakat masa kini dimana ia sekarang berada dan berfungsi. Posisi seperti itu tidaklah jelek, sepanjang ada kesadaran dan kemampuan untuk selektif dan rasional.

Tantangan masa kini membawa kita untuk berpikir dalam kerangka modernisasi. Secara teoritis, modernisasi akan berarti akan adanya landasan-landasan tradisional yang harus diganti oleh landasan-landasan yang lebih modern. Para pemikir dan ahli-ahli sosial menyebutkan bahwa proses pembangunan lebih besar kemungkinannya untuk melengkapi landasan-landasan tradisonal dengan landasan-landasan lain yang baru. Di beberapa negara berkembang, bahkan banyak landasan tradisional dibongkar dan ditinggalkan sama sekali dan menggantinya dengan landasan baru yang ditiru dari negara-negara maju. Sepertinya cara ini lebih mampu segera membuahkan atau menampakkan kemajuan fisik dengan nyata, tetapi dalam dirinya kerap tampak kerapuhan yang menempatkannya ke dalam situasi tidak stabil. Setelah kedaulatan, hingga tahun 1959, Indonesia agaknya cenderung mengambil patron tersebut. Dan pada masa berikutnya berayun ke kutub lain dan masuk ke dalam periode yang lebih tertutup. Tapi pada masa Orde Baru, kita lebih moderat dan bersikap dan berfikir lebih sintesis. Modernisasi dilakukan, tapi secara selektif nilai-nilai tradisional dalam budaya dipertahankan untuk difaedahkan.

Secara lebih umum, dapat dikatakan sebagai manusia Indonesia masa kini dalam menterapkan sifat-sifat yang diperlukan di dalam pergaulan masa kini yang modern, kita menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang ada, demikian pula tradisi dan sejarah sebagai manifestasi kebudayaan dan jiwa bangsa kita. Meskipun harus diakui pula adanya ketergelinciran di sana-sini untuk verbal dan hanya mengutamakan kulit daripada isi.

Hanya dengan perpaduan antara memenuhi dan menterapkan sifat-sifat yang diperlukan dalam pergaulan masa kini dengan penghormatan adat kebiasaan serta tradisi dan sejarah kita — dengan tidak mengabaikan selektifitas — kita sebagai manusia Indonesia yang merupakan anggota dari masyarakat yang sedang dalam perubahan, bisa berhasil.

Kesulitan-kesulitan memang sering timbul dan situasi konflik sering terjadi apabila di dalam usaha menterapkan sifat-sifat atau tuntutan-tuntutan masyarakat masa kini kita bersikap kurang dapat menghormati adat kebiasaan atau tradisi sejarah yang masih berlaku dan dianut oleh masyarakat di sekeliling kita. Pembangunan waduk raksasa yang modern diterima, tetapi masyarakat mengharapkan tatacara tertentu yang dikenal dalam tradisi maupun pandangan religi tidak dilangkahi begitu saja. Lebih dalam dari sekedar tatacara atau seremoni adalah makna bahwa pembangunan hendaknya dilakukan tidak secara pongah dan hendaknya para pelaksana berhati bersih dan jujur. Tidak pongah, bersih dan jujur adalah pula sebagian dari persyaratan manajemen pembangunan yang modern. Mencipta perpaduan itulah tantangan yang dihadapi oleh manusia Indonesia masa kini. Dan kemampuan meramu seperti itu pulalah yang membuat manusia Indonesia seorang makhluk yang menarik.

Bahwa orang bisa mengatasi atau mencari jalan keluar dari tarikan antara masyarakat masa kini dan alam tradisional telah ditunjukkan bangsa lain. Bangsa Jepang misalnya merupakan contoh yang baik daripada suatu bangsa yang dapat menyerap dan menterapkan teknik dan teknologi masa kini tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat melakukan yang sama.

Cermat, hemat, rajin, jujur, setia, tepat janji, tegas tapi bijaksana, berani, berpendirian dan mawas diri misalnya, adalah sejumlah sifat yang direkomendasi oleh nilai-nilai lama dalam budaya. Tapi sekaligus direkomendasi pula oleh pelajaran tentang motivasi dan achievement dalam kehidupan modern. Sementara itu, pergaulan dan komunikasi lebih terbuka dengan bangsa-bangsa lain telah dan akan memberi perkuatan akan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat melengkapi, seperti: semangat kompetisi sehat, tak ragu akan keduniawian, keterbukaan, keefisienan, zakelijkheid, lebih agresif dan dinamis dan sebagainya.

Di atas segalanya, bagaimanapun, setelah melalui masa yang tidak begitu singkat, bangsa ini pun telah mengkristalisasikan perpaduan nilai-nilai yang ada dalam budayanya dengan sentuhan pembaharuan, dalam suatu kerangka acuan sistim nilai yang berdasarkan Pancasila. Dengan itu, kita akan mencoba menjawab tantangan zaman.•

Digitized by Google

Wawancara Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH

Banyak Hal Yang Perlu Dilanjutkan Pemerintah Bersama Masyarakat

Perlu memberi kesempatan agar yang muda bisa jadi pemimpin. Tapi, tak bisa ditarik-tarik begitu saja.

Kita sekarang berada dalam tahapan melanjutkan perjuangan mencapai masyarakat adil makmur yang menjadi cita-cita kemerdekaan. Dan bentuk perjuangan itu kini, menurut Ketua Umum Golkar Sudharmono SH adalah melaksanakan pembangunan dan menciptakan sistim kerangka landasan yang kuat sebagai jaminannya. ''Partisipasi masyarakat diharapkan sehingga perjuangan pembangunan pada tahapan sekarang ini bisa berhasil''.

Menyatakan hal-hal tersebut dalam wawancaranya dengan The Indonesia Times, Sudharmono memberikan gambaran umum perjalanan 42 tahun Indonesia merdeka dan juga menyinggung berbagai perkembangan aktual di tanah air di bidang politik dan ekonomi. Ia memberi pula catatan yang menarik tentang bagaimana ''menghadirkan kepemimpinan dari yang muda''.

Khusus mengenai generasi muda, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kaderisasi Golkar, Sudharmono SH menyebutkan adanya prioritas kaderisasi terhadap generasi muda. ''Ini bukan saja karena jumlah generasi muda yang besar, tetapi karena kita memang beranggapan pendidikan kepada generasi muda lebih berdaya jangkau jangka panjang''. Pendidikan kepada yang lanjut usia hanya akan berlangsung beberapa tahun, tapi untuk yang muda jangkauannya berjalan terus sampai puluhan tahun. Ini berarti kaderisasi yang mempersiapkan diri untuk regenerasi. Dan ini bukan saja pada kerangka kaderisasi, tetapi juga memberi kesempatan pada kader-kader muda untuk berpartisipasi dalam praktek politik untuk menunjukkan kemampuan mereka sehingga nanti bisa menjadi pemimpin. ''Yang bisa jadi pemimpin bukan orang luar, bukan dropping, tetapi harus dalam dirinya sendiri. Kalau memang menunjukkan kepemimpinan yang baik dia akan terpilih. Secara alamiah umur manusia tidak bisa dikendalikan, artinya pada saatnya mesti ganti. Agar yang muda bisa jadi pemimpin, kita perlu memberi kesempatan seluasnya agar bisa menghadirkan kepemimpinan yang muda, tetapi tentu tidak pula bisa ditarik-tarik begitu saja. Ya, dengan proses sesuai aturan permainan''.

Belajar Dari Sejumlah Pengalaman

Pengalaman sejarah kita menunjukkan, setelah proklamasi, antara tahun 1945 sampai 1950 kita harus berjuang mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Dan berikutnya dalam periode 1950-1959 dicoba membangun kehidupan negara yang berlandaskan paham liberal. ''Dengan menggunakan sistim parlementer, pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuatan-kekuatan politik yang ada''. Pengalaman menunjukkan bahwa sistim tersebut tidak dirasakan manfaatnya. Tidak membawa bangsa ini mencapai kemajuan mencapai cita-cita. ''Dalam periode itu kita tidak bisa membangun. Persatuan dan kesatuan bangsa kita diancam oleh perpecahan dan pemberontakan-pemberontakan sam-

Digitized by Google

Pendidikan generasi muda lebih berdaya jangka panjang

pai kita kembali ke UUD 1945 di tahun 1959".

Sejak tahun itu kita berusaha melaksanakan (kembali) UUD 1945. Tetapi dalam kenyataan pelaksanaan tak banyak yang bisa dicapai, kalau tidak dikatakan malah mengalami masalah-masalah berat. Waktu itu coba diterapkan azas Nasakom dimana Pancasila hendak dijadikan landasan faham-faham ideologi yang sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Berakhir dengan pengkhianatan kaum komunis PKI. Pembangunan ekonomi macet sama sekali, bahkan kita mengalami kemunduran.

"PKI berontak dan gagal". Itu dijadikan ancang-ancang dan sekaligus pembuka jalan untuk memperbaharui tekad melaksanakan kembali UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dan menterapkan kehidupan konstitusional dan demokratis, menciptakan stabilitas nasional sehingga dapat mengadakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan kepribadian maupun pembangunan bangsa serta pembangunan untuk mencapai kesejahteraan lahir batin.

Sekarang ini kita sudah berada pada penghujung tahapan pembangunan menciptakan kerangka landasan masyarakat adil makmur yang terdiri dari aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Selama 4 tahun kita melaksanakan Repelita IV dan telah dicapai banyak hal di bidang politik ideologi "dalam menyatukan seluruh bangsa ini menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas". Kita juga sudah menerima bahwa pembangunan kita adalah pembangunan masyarakat Pancasila. Pembangunan adalah pengamalan Pancasila, artinya pembangunan kita harus mewujudkan nilai-nilai Pancasila.

Di bidang politik, kita menghasilkan bangunan struktur politik yang terdiri dari dua partai politik dan Golkar, disamping organisasi kemasyarakatan, "yang merupakan kekuatan-kekuatan masyarakat yang akan mampu berkiprah untuk melaksanakan pembangunan menurut sistim konstitusi". Kita juga sudah mempunyai pengalaman yang banyak di bidang politik dengan melaksanakan mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan, membentuk MPR, Sidang Umum MPR, menetapkan GBHN, lalu memilih pelaksana GBHN yaitu Presiden/Mandataris MPR. Dan selanjutnya menjabarkan GBHN itu dalam Repelita yang akan dilaksanakan menurut UUD melalui APBN. "Itu semua telah kita nikmati hasilnya, kita telah banyak mencapai kemajuan di bidang ekonomi dan sosial budaya".

Hal-hal tersebut merupakan modal yang harus kita lanjutkan. Jadi tahapan perjuangan bangsa kita sekarang adalah melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang sudah jelas polanya. Pola pembangunan yang menyeluruh, yang dibagi tahapannya menjadi pembangunan jangka menengah lima tahunan dan jangka panjang dua puluh lima tahunan. "Kita sekarang sudah berada dalam Pelita ke-IV, sudah di penghujung penyelesaian pembangunan tahapan pembangunan jangka panjang yang pertama". Berakhirnya Repelita IV akan dilanjutkan dengan Repelita V. Maka Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1987 mempunyai peranan penting menjamin kesinambungan pembangunan.

"Yang tak kalah pentingnya adalah pengalaman kita selama membangun". Selama Repelita I hingga IV ini banyak sekali pengalaman yang sudah kita alami, yang manis maupun yang pahit. "Kita harus bisa belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut dalam arti memanfaatkan sebaik-baiknya hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal negatif". Secara operasional telah banyak yang kita jadikan pengalaman. Mulai dari tahapan permulaan pembangunan ekonomi dimana kita mengerem inflasi, mengerahkan kemampuan dalam negeri yang ditambah dengan bantuan luar negeri untuk bisa membangun. Kita juga memanfaatkan kemampuan-kemampuan nasional kita, baik itu kekayaan alam maupun tenaga dan pikiran dari sumber daya manusia.

Kita pernah mengalami harga minyak yang tinggi, tetapi kita juga pernah dirundung harga minyak yang sangat rendah. Hal itu harus bisa kita tarik sebagai pengalaman untuk me-

Digitized by Google

Sidang Umum MPR akan membuat GBHN

nyongsong masa depan. "Karena itu, pembangunan kita sekarang harus dijamin kelanjutannya". Kita juga harus meningkatkan kewaspadaan akan adanya kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul. "Rupanya harga minyak sekarang stabil, tetapi kita masih harus mengamati terus apakah harga tersebut ada kemungkinan turun kembali — yang tergantung pada berbagai faktor. Kemungkinan-kemungkinan itu harus kita perhitungkan baik-baik. Salah satunya, tentu kita tak boleh menggantungkan diri hanya pada minyak. Karena itu, alternatif lain perlu kita ciptakan dengan mendorong produksi dan ekspor. Kita perlu membuat barang-barang produksi dalam negeri kompetitif dengan barang-barang luar negeri. Untuk itu kita harus meningkatkan produksi dan efisiensi. Hal-hal yang tak perlu dan pengeluaran yang bersifat pemborosan perlu ditiadakan. "Hal ini perlu diikuti dengan langkah-langkah memberi keleluasaan pada masyarakat dunia usaha untuk meningkatkan usahanya sehingga produksi kita meningkat dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan negara". Hal ini yang perlu dilanjutkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Masyarakat diharapkan partisipasinya sehingga perjuangan pembangunan pada tahapan sekarang ini bisa berhasil — yaitu tahapan penyelesaian kerangka landasan di berbagai bidang. Kemudian landasan tersebut dimantapkan dalam Repelita V yang akan dihasilkan GBHN hasil Sidang Umum MPR 1988. Sehingga, nantinya siklus kepemimpinan nasional berikutnya yang dimulai dengan Pemilu 1992 menghasilkan Sidang Umum MPR yang akan membuat GBHN yang berisi dan memberi arah tinggal landas pembangunan karena kita sudah menciptakan landasannya.

Tanda-tanda Cerah 1987

Menuju kesana, ada tanda-tanda cerah di tahun 1987 ini. Berbeda dengan tahun 1986 yang lalu. Tahun 1986 kemarin itu kita memang mengalami masalah terberat, terutama karena anjloknya harga minyak di pasaran luar negeri yang tak terduga sebelumnya akan begitu drastis. Memang suatu bencana, sebab bagaimanapun minyak masih merupakan sumber penerimaan negara yang besar dan sumber devisa yang penting.

"Jadi kalau harga minyak anjlok sekonyong-konyong, memang berat. Dan ini bukan kita saja yang mengalaminya". Masalahnya bagi Indonesia menjadi lebih berat karena kita dalam tahap pembangunan yang memerlukan biaya yang besar dan mempunyai masalah kependudukan yang sangat rumit. Kalau penduduk kita seperti di Brunei hanya 200.000, di Singapura hanya 2,5 juta atau Malaysia yang 15 juta, tidaklah terlalu berat.

Penduduk kita sekarang 165 juta, bahkan menuju 170 juta, inilah yang berat. Banyak yang membutuhkan lapangan kerja, terutama yang muda-muda. Disamping itu timbul masalah-masalah sosial lainnya, seperti di bidang pendidikan misalnya.

Masalah-masalah itu adalah akibat dari masalah kependudukan. Untuk tahun 1987, kita mengharapkan stabilitas harga minyak dan bersamaan dengan itu usaha-usaha kita mendiversifikasi komoditi ekspor non migas meningkat. Upaya untuk yang terakhir ini, kita dukung dengan berbagai langkah efisiensi. "Mudah-mudahan ini bisa berhasil sehingga kita punya kemampuan yang lebih besar untuk melanjutkan pembangunan, paling tidak bisa lebih besar dari tahun 1986". □ RA

Digitized by Google

Menjawab Tantangan Zaman

Beri kesempatan semangat mandiri dan swadaya berkembang lebih semarak

HINGGA akhir dasawarsa kedua kemerdekaan Indonesia, pimpinan nasional 'tertinggi' di negara ini selalu memacu rakyat dengan slogan 'revolusi belum selesai'. Ungkapan tentang revolusi yang agaknya tak pernah mau selesai sebenarnya berlebih-lebihan. Dan bukan hal yang mengherankan kalau kemudian timbul kejemuan dan kejenuhan. Tapi bila ungkapan revolusi itu diperlunak sebagai proses pengisian kemerdekaan, ia akan terasa wajar dan orang akan sedikit lebih mudah mencernanya.

Kemudahan mencerna ini akan cukup penting dalam manajemen kehidupan bangsa merdeka. Sebab setidak-tidaknya ia berkait dengan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam membangun kehidupan bangsa - sesuatu yang banyak disebut dalam kurun waktu 42 tahun, namun tak pernah dirasakan 'sempurna' dalam kenyataan. Padahal seperti yang disimpulkan Prof Dr Emil Salim, bangsa kita ini sebagaimana terbukti dalam sejarah adalah bangsa yang tidak lekas menyerah dan tahan banting. Pemberian kesempatan yang luas, dengan demikian akan besar artinya.

Prof. Dr. Emil Salim

Tapi, apapun yang telah terjadi, nyatanya negara dan bangsa ini telah exist 42 tahun lamanya. Dan menurut Dr Emil Salim dalam wawancaranya dengan Media Karya "setelah 42 tahun, Republik Indonesia berhasil tegar berdiri secara utuh ditengah-tengah pergolakan banyak negara berkembang lainnya yang menderita berbagai konflik rasial, agama, intervensi fihak luar, ketegangan dalam negeri, konflik dalam pergantian pimpinan, kemandegan pembangunan dan sebagainya". Kemudian, dari seorang tokoh muda, Drs Anton Prijatno - pengajar di perguruan tinggi Surabaya - diperoleh kesimpulan bahwa "selama 42 tahun merdeka, telah dicapai kemajuan yang cukup pesat, khususnya selama dua dekade terakhir, dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Dan bila Emil Salim memberi perbandingan dengan negara berkembang lain yang 'bergolak', Anton memberi perbandingan pada sisi lainnya. Ia berkata, "hanya saja, perlu disadari bahwa kemajuan yang dicapai bangsa kita juga berbarengan dengan bangsa lain yang dalam beberapa hal juga mencapai kemajuan yang lebih pesat". Disamping itu, kemajuan itu sendiri membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan kualitatif yang lebih banyak lagi dari hasil kemajuan. "Disinilah problema kita untuk selalu berpacu dengan tuntutan-tuntutan masyarakat".

Berpacu dengan tuntutan masyarakat? Sudah semestinya demikian, karena tujuan pembangunan memang adalah manusia. Dan memang pula, menurut Drs Bambang Sulistomo - seorang tokoh muda lainnya, juga pengajar di perguruan tinggi di Jakarta - sepertinya permasalahan di dalam masyarakat itu tidak ada habis-habisnya.

"Tetapi kita tidak perlu 'pusing', harus diterima, karena itu adalah akibat yang logis dari perkembangan masyarakat sebagai pengaruh perkembangan teknologi, pengetahuan, komunikasi dan informasi". Saat ini, semua berita, apakah itu benar atau tidak, telah dapat dengan mudah tersebar luas, dengan segala akibatnya, baik atau buruk. Kepercayaan maupun ketidakpercayaan masyarakat, akan dapat dipengaruhi oleh tersebarnya berita-berita tersebut. "Inilah yang akan ikut menentukan arah pengisian kemerdekaan nasional kita dimasa mendatang. Artinya, bagaimanapun baiknya isi dari GBHN, kalau kita tidak dapat menjelaskan dengan baik, akan ada anggapan bahwa kita sebenarnya belum menjalankan isi dari GBHN itu secara murni dan sungguh-sungguh. Belum lagi kalau ada yang menganggap itu karena masih ada yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negaranya". Terhadap kemungkinan gejala yang disebut terakhir ini, catatan R. Soekardi Ketua Fraksi Karya Pembangunan di

Digitized by Google

DPR-RI perlu digarisbawahi, "Dalam keadaan kehidupan seperti sekarang, bagi yang kebetulan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik, jangan hendaknya mendemonstrasikan kenikmatan itu kepada rakyat yang belum mendapat kenikmatan"

Swasembada beras telah dicapai

Yang Telah Dicapai Dan Yang Masih Memerlukan Perhatian

Dalam perkembangan waktu 42 tahun yang cukup sulit, menurut Dr Emil Salim Republik Indonesia berhasil mencapai banyak hal. Ekonom yang duduk di kabinet sebagai Menteri Negara KLH ini menyebut setidaknya lima pokok keberhasilan pencapaian. Pertama, kita telah mencapai swasembada beras. Berikutnya, seperti yang secara objektif diakui oleh Bank Dunia, walaupun penduduk Indonesia bertambah namun tergolong stabil dan mampu meningkatkan pendapatan per kapita hingga masuk kelompok negara berpendapatan menengah. Tercapai pula, sebagai pokok ketiga, penurunan tingkat kematian sekaligus tingkat kelahiran sebagai hasil pembangunan. Lalu keempat, meluasnya pendidikan dasar bagi semua anak usia 7 - 12 tahun di seluruh tanah air. "Di manapun mereka berada, apakah di Aceh ataukah di Irian Jaya, semuanya diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama". Dan yang kelima, Indonesia berhasil memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa hadirnya lagi perlawanan bersenjata. "Kalaupun ada beda pendapat diantara sesama bangsa itu hanya lokal dan tak terjadi apa-apa".

Tokoh wanita muda usia Danny Sudarsono menambahkan catatan tentang tercapainya pula sejumlah kemajuan di bidang politik dan kemasyarakatan. Diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas merupakan kemajuan penting dan menonjol, ujarnya. Kemajuan lain dalam kehidupan politik selama hampir dua dasawarsa terakhir, tambahnya, adalah semakin berfungsinya pranata-pranata politik baik infra maupun supra strukturnya. "Kesadaran politik masyarakat semakin meningkat, gejolak politik semakin berkurang". Dan ia menyimpulkan telah terwujud wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi dan budaya dengan masuknya Irian Jaya dan Timor Timur ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Hadisusastro

Ada kemajuan dan keberhasilan. Tapi masih ada pula banyak hal yang masih memerlukan perhatian. Kendati di bidang pendidikan dasar tercapai kemajuan dalam hal pemerataan seperti yang dikatakan Emil Salim, tapi secara menyeluruh bidang pendidikan ini toh memerlukan perhatian lanjut menurut Anton Prijatno maupun Bambang Sulistomo. Sementara itu, Dr Hadisusastro mengutarakan beberapa hal yang berkait dengan beberapa kelemahan dalam struktur ekonomi kita yang perlu diperhatikan. Dan dari Dr Emil Salim ada lima pokok sektor kehidupan bangsa yang dicatat sebagai masih memerlukan perhatian lebih banyak. Ia meminta perhatian untuk ikhtiar perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi semua orang dalam iklim usaha yang fair dan adil. Perlu pula perhatian bagi pengembangan ekonomi rakyat kecil, seperti nelayan tradisional, buruh tani, pengusaha sektor informal dan yang sejenisnya. Berikutnya, mengisi otonomi daerah. Mengembangkan bahasa dan kebudayaan daerah sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mengisi kebhinnekaan dalam ketunggalan bangsa. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pembangunan dengan mengendalikan dampak negatif pembangunan kepada lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Berangkat dari pertanyaan apakah pembangunan selama ini berhasil atau tidak, Dr Emil Salim menyatakan "jelas pembangunan ini berhasil". Tetapi sementara itu, sebagai hasil pembangunan itu sendiri sekarang muncul aspirasi baru dan tuntutan-tuntutan baru. Satu diantara tuntutan yang aktual adalah perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang membutuhkan iklim yang fair dan adil. Emil Salim juga menjelaskan kenapa ia menunjuk pengembangan ekonomi rakyat kecil merupakan satu hal yang perlu diperhatikan. Menurut Emil, dalam Pelita I dan II misalnya, kita diliputi iklim meningkatkan Bimas, meningkatkan produksi pangan, membangun jalan dan membuka industri. Ini semua berhasil menyentuh sejumlah petani dan industriawan. Tapi serenta dengan itu,

Digitized by Google

masih terdapat pula lapisan penduduk di pinggiran yang tak tersentuh atau belum cukup tersentuh manfaat pembangunan. Mereka adalah antara lain nelayan tradisional, buruh tani dan petani kecil, usahawan kecil dan pelaku sektor informal lainnya. Setelah sasaran swasembada pangan dan sasaran lain dalam industri tercapai, persoalannya kini menjadi bagaimana menyentuh ekonomi rakyat kecil tersebut lebih detail. "Ibarat membuat gambar, bermula dengan sketsa, lalu berikutnya harus diperhalus lebih mendetail. Dalam Pelita V dan VI tiba saatnya memperhalus apa yang telah dimulai melalui Pelita I hingga IV".

Penghalusan detail juga menyangkut masalah otonomi daerah dan pengembangan budaya daerah. Menurut Emil Salim, di masa lampau kita masih mengalami masa elementer, kita mengalami separatisme sehingga kesukuan dan sifat primordial masih kuat. Dalam kurun waktu transisi, mau tidak mau kita harus berfikir terutama mengenai kesatuan, sehingga menjadi sentral. Dalam Pelita awal, dilakukan pembinaan persatuan dan kesatuan, sehingga tercapai resultante berupa menguatnya persatuan dan kesatuan. Setelah tingkat ini kita capai, maka langkah berikut adalah memberi isi lebih luas kepada otonomi daerah, sehingga mampu lebih berkembang. Dalam kerangka persepsi yang serupa, juga dianggap saatnya untuk memberi kesempatan lebih besar kepada pengembangan kelebihan-kelebihan atau faktor-faktor unggul dari setiap budaya daerah dan kesempatan untuk saling menularkannya. Yang tak lain berarti mengisi semangat ke-bhinneka-tunggal-ika-an.

Selain dari budaya, peningkatan kualitas jelas adalah melalui sektor pendidikan. Dihadapkan pada tantangan masa depan, kata Anton Prijatno, maka sektor pendidikan seharusnya memperoleh perhatian yang amat banyak. Begitu pula Bambang Sulistomo.

Kenapa pendidikan? Anton Prijatno menyebutkan "karena dari pendidikanlah manusia akan mampu menghadapi tantangan masa depan". Pendidikan pada hakekatnya mempersiapkan manusia untuk menghadapi masa depan, baik untuk bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya dan pertahanan. "Sistim pendidikan nasional dalam wujud undang-undang harus segera diselesaikan, dan bersamaan dengan itu yang sekarang mendesak ialah perbaikan atas mutu dan kesejahteraan para guru atau pendidik".

Boy Musbar Nurmawan

Bambang Sulistomo mempertajam apa yang diutarakan Anton. Menurut Bambang, sampai saat ini kita belum dapat memantapkan suatu sistim pendidikan yang secara terpadu dapat menghasilkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yang sesuai dengan proses atau kebutuhan kemajuan bangsa di masa depan. "Gagasan yang sudah sering saya lontarkan adalah bagaimana misalnya seorang anak didik sejak dini sudah harus mengetahui kemampuan maupun kelemahan negara dan bangsanya. Sehingga sejak dini mereka pun dapat menentukan mau jadi apa, atau bagaimana peranan yang diinginkannya dalam masyarakat, atau bagaimana perilakunya dalam berhubungan dengan lingkungannya dan sebagainya". Agak 'romantis' ia menambahkan "Yang saya impikan adalah bagaimana akan tumbuh dan berkembang satu generasi muda yang semakin sadar akan kelangsungan hidup negara dan bangsanya, dan bukan anak muda yang hanya dapat rebut-rebutan keduduk-

Ekonomi, Antara Kelemahan & Kemajuan

SELAMA 42 tahun Indonesia Merdeka, kebutuhan pokok dari masyarakat sudah terpenuhi. Misalnya sandang dan pangan. Sedangkan untuk kebutuhan papan, yang berupa perumahan, kendati ada kemajuan, masih perlu terus diperbaiki. Dalam kurun waktu itu pula, menurut Dr Hadisusastro — seorang pengamat terkemuka — struktur ekonomi kita di sana- sini masih mengandung beberapa kelemahan.

Kelemahan dalam struktur ekonomi ini menurut Hadisusastro disebabkan ketergantungan kita yang masih tertuju pada satu jenis komoditi. Ketergantungan akan satu jenis komoditi tersebut akan sangat mengganggu kemampuan kita dalam merencanakan sektor ekonomi. Dan struktur tersebut, kata Hadisusastro, secara terus menerus perlu diperhatikan dan diupayakan untuk dirombak. "Kita telah melihat adanya perombakan-perombakan tersebut, tapi masih belum memuaskan. Hal ini tak lain karena ketergantungan kita akan minyak yang begitu besar".

Kemajuan di bidang ekonomi cukup pesat dibandingkan 20 tahun lalu. Kemajuan yang dicapai selama kurun waktu itu adalah pengaruh penerimaan minyak yang pernah mengalami - *boom*. Dan hasil minyak itu secara keseluruhan dapat dikatakan dapat didayagunakan dengan baik.

Kemudian, sektor produksi, pertanian khususnya, juga mengalami kemajuan cukup pesat. Pangan, khususnya beras, dalam beberapa tahun lalu kita impor, Tapi kini tidak lagi, bahkan kita sudah berswasembada. Kemajuan-kemajuan lain menurut Hadisusastro setelah 42 tahun merdeka, juga dirasakan di sektor sandang. kebutuhan masyarakat akan sandang sudah terpenuhi, harganya pun murah. "Ini merupakan indikator dari keberhasilan di bidang ekonomi".

Bidang papan — perumahan — juga telah banyak mengalami kemajuan. Namun hambatan-hambatan di sektor perumahan ini juga masih dirasakan. Masalah perumahan ini, menurut Hadisusastro, masih dapat lebih diperbaiki lagi. Kita belum banyak mengenal adanya kredit perumahan untuk kelompok yang berpendapatan rendah. Sedang kebutuhan untuk perumahan golongan menengah sudah banyak tersedia, kendati akhir-akhir ini banyak mengalami penurunan, akibat

Digitized by Google

an politik, atau keuntungan ekonomi, tetapi tidak mempunyai karya apapun bagi lingkungan masyarakatnya. Yang saya dambakan adalah tumbuhnya satu lapisan anak muda yang dalam keadaan sesulit apapun dapat selalu menghasilkan gagasan berisi pilihan lain bagi pemecahan masalah lingkungan atau negaranya".

Hukum Dan Tanah Bagi Petani

Selain soal pendidikan, Bambang Sulistomo juga menyinggung masalah hukum. "Pembangunan di sektor hukum akan sangat penting dan besar manfaatnya di masa mendatang. Sumber daya alam akan semakin terbatas, sedangkan jumlah penduduk meningkat. Salah satu akibatnya tingkat persaingan di seluruh bidang kehidupan akan semakin tinggi. Persaingan akan dapat menjadi tak terkendali, kecuali oleh tegaknya hukum".

Dua tokoh muda Golkar dari Jawa Barat — Drs Boy Musbar Nurmawan dan Drs Adjan Sudjana — dalam pa-

Andung Aminullah Adiwilaga

da itu menyentuh masalah pemilikan tanah seperti apa yang menurut mereka dikehendaki oleh GBHN. Sasaran penting dalam Pelita V menurut mereka adalah menata kembali penggunaan dan pemilikan hak atas tanah. "Kita tahu, sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian. Sektor ini diharapkan akan sanggup mendorong kegiatan perekonomian kita", kata Boy Musbar. Pertanian yang maju akan meningkatkan daya beli mayoritas rakyat yang hidup di sektor ini dan dengan demikian mereka mampu menyerap hasil industri. Nyatanya saat ini daya serapnya belum memadai, yang satu dan lain hal merupakan akibat adanya pemilikan tanah yang tidak produktif di sektor pertanian. "Sebagian petani memiliki tanah yang sangat sempit dan hasilnyapun kecil, sementara sebagian lainnya lagi hanyalah buruh tani".

Maka, diperlukan pemerataan pemilikan tanah. Mengapa hal itu kini dianggap perlu? Boy Musbar mengingatkan bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan, sengaja atau tidak, telah terjadi beberapa ketidakadilan dan ketidakpastian proses akumulasi kapital. Kendati terdapat upaya yang kuat mengeliminir segala kemungkinan ketidakadilan melalui delapan jalur pemerataan, toh disana sini ada saja ketimpangan dalam tingkat pendapatan. Salah satu ekses dari akumulasi pendapatan pada orang-orang yang tertentu, adalah praktek pemborongan pemilikan tanah. Penguasaan tanah seperti itu mengakibatkan tidak produktif dan terpeliharanya sejumlah besar lahan. "Perlu dipikirkan penataan kembali, katakanlah semacam landreform", ujar Adjan. "Di banyak negara yang maju sekarang ini, pada awalnya ada landreform sebelum melangkah ke era industrialisasi".

Mendukung Boy dan Adjan, tokoh Golkar Jawa Barat lainnya Drs Andung Aminullah Adiwilaga menyatakan "dalam masyarakat kita yang masih agraris, tanah memiliki korelasi yang tinggi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat". Kenyataan seperti ini merupakan pokok soal yang perlu diperhatikan oleh setiap ideolog bangsa kita. Karena, keadaan seperti ini, pada gilirannya akan menempatkan tanah sebagai komoditi yang mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi ekonomi dan fungsi politik. Andung menganggap diperlukan kemauan politik untuk menjaga agar tanah lebih berfungsi ekonomis dalam rangka upaya untuk mewujudkan pemerataan pemba-

---

[illegible] yang tinggi.

[illegible]ara-negara maju, kredit perumahan merupakan unsur yang amat [illegible]ing bagi ekonomi. Sebab, dalam [illegible]aan tertentu, perumahan ini dapat [illegible]jadi motor penggerak ekonomi. [illegible]an keadaan yang lesu saat ini, [illegible] perumahan menjadi masalah [illegible] cukup penting. Namun dalam [illegible]ngsang ekonomi melalui sektor [illegible]mahan kita menghadapi persoal[illegible]. Ada kekuatiran bahwa adanya [illegible]sangan itu nantinya akan dapat [illegible]perburuk neraca pembayaran. [illegible]ena, komponennya diimpor.

[illegible]emudian timbul pertanyaan, kalau [illegible]g tersebut dialihkan untuk perumahan rakyat, apakah eksesnya besar [illegible]u tidak? Dan jawabannya pun juga [illegible]gantung apakah nantinya dalam membangun perumahan itu komponennya banyak yang dari impor atau tidak. Mestinya, ujar Hadisusastro, komponen impor itu digunakan dalam porsi sekecil mungkin. Sedangkan untuk menciptakan daya beli, diperlukan peningkatan kredit dengan syarat-syarat lunak. Dan cara-cara seperti ini banyak dilakukan di negara-negara maju, dalam menggerakkan ekonominya.

Dalam pembangunan ekonomi selama 42 tahun, khususnya 20 tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa kebutuhan pokok lain adalah lapangan kerja. Pada saat ini tidak ada salahnya kalau kita memberikan perhatian kepada masalah lapangan kerja. Namun sekarang timbul persoalan, bagaimana caranya dapat menangani tersedianya lapangan kerja tersebut.

Ada dua pemikiran untuk menangani masalah penyediaan lapangan kerja. Pemikiran pertama, upaya penyediaan lapangan kerja itu harus dilakukan secara aktif, yaitu dengan mengadakan kebijaksanaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Lalu, pemikiran kedua, untuk menangani tersedianya lapangan kerja tersebut, adalah dengan mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, tenaga kerja dapat diserap. Kedua pemikiran untuk menangani lapangan kerja ini masing-masing mendapat kritik. Untuk pemikiran kedua misalnya, ada yang mengatakan, dengan mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu membutuhkan padat modal. Dan ini pernah dialami di masa lampau di sini, adanya investasi yang tinggi telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tetapi di mana-mana kebijaksanaan ekonomi itu selalu mengambil jalan tengah. Untuk menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan dibutuhkan. Tapi kita juga tidak dapat mengandalkan usaha-usaha yang terlalu mengatur secara aktif. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita mencapai keseimbangan? Format ekonomi dan proses pembangunan di tahun 70-an menunjukkan kecenderungan negara-negara berkembang mengambil pola yang padat modal. Mungkin karena padat modal itu memang 'lebih murah' dibandingkan dengan padat tenaga kerja.☐ BM

Digitized by Google

ngunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. "Kemauan politik untuk menempatkan tanah lebih berfungsi ekonomi, tidak hanya dapat dilakukan dengan telah dikeluarkannya UUPA saja, akan tetapi mencakup kemauan politik untuk melaksanakannya — terutama untuk mendorong agar setiap jengkal tanah menjadi lebih produktif". Bila dalam empat Pelita selama ini, pembangunan bidang politik telah mencapai hasil yang cukup menggembirakan — Pancasila telah diterima sebagai satu-satunya azas — "maka pelaksanaan kemauan politik tersebut akan dapat diwujudkan dalam tahapan berikutnya dari proses pembangunan masyarakat kita".

Kemampuan Manusia Indonesia

Dari berbagai permasalahan yang disampaikan Dr Emil Salim hingga kepada apa yang diutarakan Drs Andung Adiwilaga, terlihat bahwa tugas ke depan bukanlah hal yang mudah. Katakanlah terlihat sederet tugas pembenahan. Dan siapa yang akan membenahi? Jelas, bangsa ini sendiri. Tapi bagaimana kemampuan bangsa ini dalam menjawab tantangan? "Ada, bahkan saya yakin kuat", jawab Emil Salim. "Kemampuan bangsa Indonesia cukup besar untuk menanggapi tantangan zaman lebih-lebih apabila semangat mandiri dan swadaya diberi kesempatan untuk berkembang lebih semarak".

Danny Sudarsono sama yakinnya dengan Emil Salim. Keyakinan itu didasarkan berbagai pengalaman bangsa Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman. Ia menyebutkan Pancasila dan semangat kesetiakawanan sosial sebagai penunjang ketahanan mental manusia Indonesia. "Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang dan bangsa yang tahan bantingan". Kita memiliki ABRI yang profesional pejuang, kita memiliki pula banyak potensi yang menjanjikan Indonesia akan tetap kokoh berdiri sepanjang masa, baik potensi manusia maupun alami". Dan menurut Anton Prijatno, bangsa Indonesia hingga saat ini memiliki potensi yang amat tangguh dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. "Kita memiliki daya tahan yang amat luar biasa sebagai bangsa dan mampu untuk memacu diri asal kita mampu mengelolanya dengan tepat".

Danny Sudarsono

Selain itu, kata Danny, kemampuan kita dalam melakukan sosialisasi dan transformasi nilai-nilai baru yang berkembang sesuai dengan perjalanan zaman — seperti yang dapat dilihat dalam lintasan perjalanan hidup bangsa kita — telah menunjukkan gambaran yang menggembirakan. "Dan bangsa kita senantiasa mampu melakukan terobosan-terobosan dari himpitan konflik nilai. Sementara itu kemampuan bangsa Indonesia dalam mengadaptasi nilai-nilai baru selama ini dapat diandalkan". Tapi terlepas dari itu, ia menganggap tetap masih diperlukan pembenahan di sana sini atas kualitas manusia. "Dengan meningkatkan kualitas melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang menawarkan bagi setiap manusia Indonesia memperoleh peluang, perlindungan dan keterjaminan untuk berusaha mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia utuh". Manusia, kata Danny, pada dasarnya adalah makhluk yang terentang antara potensi dan aktualisasi diri. Agar aktualisasi diri manusia Indonesia tampil dalam wajah yang utuh, maka pengembangan sumber daya manusia tidak hanya terbatas pada upaya pemberian keterandalan dalam mengenal dan mendayagunakan peluang kerja dan peluang usaha, tetapi juga perlu dibarengi dengan penciptaan iklim yang menjanjikan perlindungan dan keterjaminan. "Sebab, peluang semata tanpa disertai perlindungan dan keterjaminan hanya akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dan persaingan yang tidak sehat dapat menjadi embryo goyahnya ketahanan nasional dan ketahanan sosial".

Dalam masalah manusia ini Anton pun menyatakan "Aktualisasi diri atas potensi yang dimiliki harus dipacu lebih besar lagi dengan memberikan dorongan serta iklim berpikir kritis dalam kerangka tanggung jawab nasional". Realisasi pembangunan manusia seutuhnya harus benar-benar bermakna, sehingga setiap manusia mampu mengaktualisasikan dirinya dalam berkarya dengan arahan serta ruang lingkup Pancasila. Sikap hidup manusia Indonesia dalam menghadapi era industri harus dipersiapkan secara lebih mantap sehingga dapat mengerem shock serta korban yang tak perlu terjadi. Masuknya teknologi yang tanpa dibarengi dengan persiapan kultural dan mental sering membawa korban di masyarakat. "Ini tanggung jawab pemimpin bangsa".

Memang, bagaimanapun menurut Dr Emil Salim, pembangunan menimbulkan perubahan sistim nilai. "Perubahan sering berjalan lebih cepat daripada kemampuan kita membangun nilai dan norma baru sebagai pengganti yang lama". Akibatnya, tolok ukur mengenai apa yang patut dan tidak patut menjadi kabur. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengatasi perbenturan kepentingan — conflict of interest.

Membangun masa depan sebagai lanjutan 42 tahun masa kemerdekaan, mengisyaratkan tidak sedikitnya tantangan. Menghadapi tantangan zaman semua institusi dalam kehidupan bangsa dan negara ditawarkan pengambilan posisi dan peran. Maka untuk proyeksi ke masa depan diperlukan beberapa hal. Di bidang kekuatan kemasyarakatan dan rakyat, menurut Dr Emil Salim, perlu ditingkatkan mutu iklim dan suasana bagi tumbuhnya prakarsa masyarakat untuk dikerjakan secara mandiri sebagai wujud semangat kreatifitas yang hidup dalam kalbu masyarakat dan rakyat. Sebagai faktor dukungan, di bidang pemerintah perlu usaha mengurangi campur tangan birokrasi — debirokratisasi — dan pemusatan ikhtiar dan penciptaan iklim usaha sosial, ekonomi dan politik yang kondusif bagi pengembangan menanggapi tantangan masa depan untuk dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Dan di sektor kekuatan politik, kata Dr Emil Salim, diarahkan kepada pengembangan kekuatan politik sebagai mitra pemerintah yang tangguh, "supaya pembangunan sebagai pengamalan Pancasila mencerminkan aspirasi politik yang hidup dalam masyarakat".□

**Wawancara: Badrul M/-
D. Triyono/Rendy MS
Pemadu: Rum Aly**

Digitized by Google

Wawancara dengan Abdurachman Wahid

Mencari Terobosan Meningkatkan Partisipasi Dan Kebersamaan

Memang pola pembangunan kita penekanannya ekonomis sekali. Itulah konsekwensinya selama 20 tahun, sehingga penekanan ini bukan seolah-olah lagi, ya memang begitu. Jadi mengapa orang meributkan masalah bentuk pembangunan itu sedemikian rupa. Dan masalah ini tidak ada kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Alasannya, partisipasi itu bentuk atau pendekatan pembangunan. Disadari atau tidak, bisa saja dalam suatu pembangunan ekonomi itu muncul pendekatan partisipatoris. Dengan demikian tidak berarti kalau bentuk pembangunan itu penekanannya pada ekonomi, maka Indonesia akan partisipatoris.

Untuk itu, dinilai Abdurachman Wahid, supaya ada batasan yang jelas apa yang dinamakan tindakan politik dengan yang tidak. Agar jangan sampai bicara soal bantuan hukum atau lingkungan dianggap politik dan ada apa-apa disebut politik. Akibatnya orang merasa takut terhadap politik, karena politik itu seperti momok saja. Akan tetapi, bilamana ada batasan yang jelas, maka semua orang tahu untuk membatasi diri supaya aman dalam mengambil tindakan politik itu. Apalagi, kini situasi politik itu sendiri kondusif, sehingga bagaimana mengharapkan partisipasi politik sedang situasinya tidak menggairahkan. Kalau semua diatur secara birokratis atau institusional, orang tidak melihat ruang untuk berpartisipasi lagi.

Kata Abdurachman Wahid, untuk menimbulkan gairah partisipasi politik bukan pada kebudayaan letaknya. Letaknya, pada situasi itu sendiri. Apakah situasi politik memungkinkan orang untuk berpartisipasi, kalau tidak, orang tidak ingin berpartisipasi. Untuk apa sulit-sulit.

Di sini, sebenarnya ada masalah antara keinginan dengan kendala-kendala, dimana kendala bagi tercapainya keinginan. Kita ingin politik itu situasinya bisa memungkinkan kita untuk berpartisipasi. Itu diperlukan keterbukaan sikap dan kemampuan

dialog timbal balik, antara pengambil keputusan dengan warga masyarakat dan sebagainya. Jika itu tidak terjadi, maka orang-orang akan dialog dengan siapa tidak tahu. Sedangkan dialog dengan Pemerintah hanya dikasih tahu produk GBHN, Repelita, Undang-Undang dan peraturan-peraturan. Kalau sudah demikian mau apa, lebih baik diam saja. Yang jelas, selama ini belum cukup terjadi dialog timbal balik. Pada umumnya baru dialog sesisi dan itupun bukan dialog, melainkan seremonolog. Dimana masyarakat bicara lain, pemerintah pun bicara masalah lain. Karenanya, supaya dialog timbal balik ini terjadi, paling tidak harus membuka diri dulu terhadap kritik, saran-saran dan pertanyaan. Sebab, orang baru bicara minta informasi ini — apa yang terjadi, sudah ribut dan tidak boleh. Akibatnya tidak ada yang berpartisipasi bukan berarti tidak mau, tapi mungkin dikarenakan tempatnya tidak ada.

Dalam situasi sekarang ini, yang namanya hidup sederhana itu bisa omong kosong, tidak mungkin bisa terjadi bila yang teriak-teriak hidup sederhana sendiri hidupnya mewah. Kita masih serba semboyan atau sloganistis, bahkan bermimpi tentang keadaan yang baik dengan slogan-slogan itu. Kita belum apa-apa dan dalam beberapa hal masih jauh dari kenyataan. Untuk mewujudkan harapan itu, orang hidup sederhana harus dikontrol mekanisme yang efektif. Seperti di Israel, orang bisa hidup sederhana dimana gaji dari negara hanya sebesar yang diterima, sebab bilamana ada pegawai negeri hidup lebih dari kemampuannya, dia akan diperiksa. Di Indonesia mekanisme seperti itu belum terwujud, lantaran yang ngontrol (petugas) kerap tidak bisa dikontrol. Kesan sloganisme makin tampak jelas, kendatipun tidak jelas sloganisme itu. Padahal slogan itu baik, tapi bila berhenti pada slogan — tidak ada follow upnya, ya sudah.

Untuk mengharapkan mekanisme itu terwujud, pemerintah harus terbuka dan bisa dikritik bilamana belum bisa sedemikian rupa, tidak mustahil mekanisme itu bisa diwujudkan secara kongkrit. Apalagi pemerintah tidak bersikap terbuka dan memperlakukan kritik sebagai musuh, ya tidak bisa baik. Padahal kritik itu teman. Sehingga, kapan kita punya pemerintahan yang para pejabatnya beranggapan bahwa kritik itu perlu dan diterima sebagai hal wajar dari pelaksanaan tugasnya. Dan berpegang teguh pada kebenaran itu wajar, sebelum dibuktikan salah oleh hukum. Kalau baru kritik sudah kena pukul, lalu siapa yang mau kritik lagi. Ini bukan pada masalah mekanisme letaknya, melainkan etosnya. Etos pemerintahan yang terbuka atau tertutup dan tidak bisa kurang dari itu.

Di Singapura, bila seorang warga negara tidak senang terhadap kelakuan seorang pejabat, dia bisa lapor dan langsung ditindak sesuai dengan peraturannya. Di Thailand, DPR punya wewenang praktis untuk menyelesaikan suatu hal sebagai tindak kontrol. Di Indonesia agaknya tidak ada kultur pengawasan yang efektif dari DPR. Calon-calonnya tidak diharuskan untuk bersaing dengan ketat, ada kesan siapa dekat dengan Ketua OPP, tentunya jaminan untuk menjadi anggota DPR. Jadi,

Digitized by Google

untuk menata kultur organisasi politik kita penting. Soal kelembagaan sudah beres sampai ke bawah, baik PPP, Golkar maupun PDI. Sudah benar teorinya, tapi dalam praktek harus didukung suatu kultur yang kuat.

Bila dikaji, tambahnya, fungsi demokrasi itu pemberian hak untuk melakukan kritik. Kurang dari itu sudah bukan demokrasi lagi, hanya ornament demokrasi konstitusional-nya sedang kultur politiknya belum. Dan kritik itu punya fungsi, jangan sampai hilang. Nantinya, segala hal dilakukan dengan sloganisme saja. Karena budaya kita saling mengkritik mencari fakta nyata tidak ada, ditutup dengan kebenaran slogan-slogan. Sementara orang mengkritik dianggap memusuhi, padahal pemegang kekuasaan haruslah arif bahwa sikap memusuhi terhadap orang yang mengkritik tidak benar sekalipun kritiknya jelek, apalagi baik. Itu belum tentu punya kesan memusuhi. Jadi, kita resah, sementara persoalan kecil dibesar-besarkan yang tidak bisa masuk akal atau penalaran.

Persoalan kita demikian kompleks, tidak hanya terkait pada masalah ekonomis saja. Masalah kontrol, struktur pemerintahan dan sebagainya pun, adalah masalah yang menjadi tantangan. Sehingga tidak ada 'resep ajaib' yang bisa dikeluarkan, bilamana ada orang yang berani mengeluarkan resep itu bohong. Satu-satunya jalan, sebaiknya kita bertindak dengan membuka saluran-saluran politik, agar ide-ide baru bisa mengalir dan dialognya jujur terbuka. Kita akan memperoleh informasi cukup, gagasan cukup dan sesuatunya bisa menggairahkan hidup kembali. Bahkan mampu memecahkan persoalan. Sebaliknya, kini orang dengan mudah mengatakan deregulasi. Hal ini berarti pengurangan dan bahayanya bisa besar sekali, bila tidak cermat, dimana perusahaan kecil dimakan yang kuat. Dalam jangka waktu yang panjang, kalau kurang hati-hati pelaksanaannya, persoalan ini bisa menimbulkan masalah baru. Yang jelas, bagaimanapun kita mengimbangkan golongan ekonomi kuat dan lemah, karena ada sepakat ke arah sana. Jadi, deregulasi begitu saja. Deregulasi diperlukan untuk beberapa bidang saja, paling tidak untuk menghilangkan kendala di sektor birokrasi atau suatu prosedur. Dalam hal perlu ada terobosan-terobosan baru. Tanpa itu hanya fatamorgana saja. Janganlah sektor tradisional diabaikan, yang modern saja digalakkan sehingga timbul kesenjangan. Seharusnya, ingin memecahkan masalah, adalah membuka rintisan beramai-ramai. Hasil yang baik dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. □ DT/BM

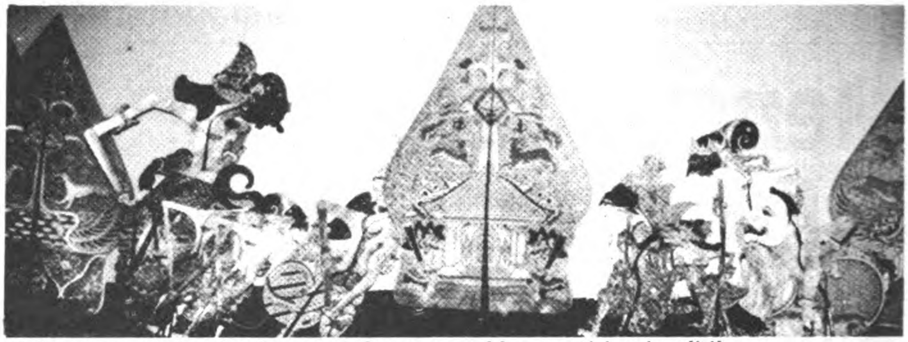

Kebudayaan bukan letaknya untuk menggerakkan partisipasi politik

PELNI

PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
Kantor Pusat: Jl. Angkasa 18 Jakarta
Tel. 411963-416262-417137 PO Box 115/JKT

Mengucapkan

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

Ke-42

17 Agustus 1945 - 1987

Digitized by Google

Wawancara dengan Bambang W. Koesoema, Anggota MPR-RI

Mencari Terobosan Dalam Pembangunan Ekonomi

"Dalam situasi pembangunan ekonomi sekarang ini, pemikiran-pemikiran yang bersifat terobosan sangat diperlukan. Yang dimaksudkan dengan terobosan dalam konteks saat ini adalah usaha-usaha untuk mengimbangi penurunan harga minyak yang bersifat struktural itu", ujar Bambang W. Koesoema, anggota MPR-RI dari FKP dalam wawancara dengan *Media Karya.*

Mengapa harga minyak jatuh, tidak menjadi rahasia lagi bagi umum. Komoditi yang paling vital dalam perolehan devisa bagi pembangunan ekonomi Indonesia ini, gejolak harganya tidak lagi ditentukan oleh faktor ekonomi semata, ujarnya, tapi sudah dipengaruhi oleh faktor politik.

Tentu saja, terobosan yang dimaksudkan dalam hal ini tidak boleh naif. Artinya, tidak hanya mendasarkan diri pada usaha dan gerakan kita di bidang ekonomi saja. Terobosan yang diperlukan adalah pemikiran-pemikiran yang bersifat multidisipliner. Berikut ini sejumlah pemikiran dari Bambang WK.

Untuk sanggup menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan beberapa keadaan kondusif. Secara sederhana untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang bagaimana yang kita butuhkan, diperlukan dua keadaan kondusif, yaitu yang bersifat eksternal dan internal. Yang eksternal berhubungan dengan situasi ekonomi internasional dan bagaimana cara kita mengadaptasi dan mengantisipasinya. Sedangkan yang internal menyangkut dua hal penting yaitu investasi modal dan barang, dan human investment. Jadi laporan pemerintah tentang investor-investor yang disetujui BKPM misalnya, sangat penting dalam mencari hubungan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Kalau investasi kita mengecil, sudah bisa diramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di masa mendatang bakal seret. Thailand, negara yang sebentar lagi bakal masuk dalam kelompok The New Industrialized Countries karena mampu mempertahankan pertumbuhan yang relatif tinggi di tengah situasi perekonomian dunia yang dilanda resesi lima tahun terakhir, adalah contoh kemampuan negara ini di bidang investasi dan kesanggupan mereka mengantisipasi kondisi-kondisi bisnis internasional.

Sedangkan yang kita maksudkan dengan human investment adalah semua kondisi yang menyangkut kualitas manusia sebagai pelaku-pelaku ekonomi, politik dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan, bagaimana prestasi perekonomian suatu negara bila kualitas manusianya rendah. Dalam hal ini, usaha pemerintah mengganti peran Bea Cukai dengan SGS sedikit banyaknya berhubungan dengan kualitas manusia kita di bidang ini di masa-masa lalu.

Sekarang ini, terasa ada kebutuhan yang semakin urgen untuk melakukan upgrading birokrat-birokrat kita yang berperan di sektor ekonomi. Kebutuhan ini sama urgen dan intens dengan kebutuhan kita ketika melakukan penataran P4. Dampak dari penataran P4 selama ini telah menunjukkan bukti prestasi kita di bidang politik, seperti sukses membuat Pancasila sebagai satu-satunya asas serta kestabilan yang berkesinambungan selama ini.

Sekarang kita memerlukan upgrading seperti itu, khususnya untuk sektor yang memiliki kaitan erat dengan usaha mencari terobosan baru itu. Jadi antara strategi, struktur dan personil memiliki kaitan erat. Kalau kualitas manusianya rendah, walaupun struktur dan strateginya benar, sasaran pembangunan tidak bisa tercapai.

Dari segi strategi, sudah jelas, yaitu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di sektor nonmigas. Struktur ke arah sana pun sudah jelas, seperti debirokratisasi dan deregulasi. Tapi kalau tidak dibarengi oleh human investment yang tepat, percuma.

Paling lemah

Dari segi eksternal, yaitu yang menyangkut hubungan kita dengan dunia luar, kita harus jujur mengakui bahwa di sektor yang satu ini, kita paling lemah. Selama 15 tahun terakhir, kiblat kita adalah inward looking. Ini tentu menyangkut strategi industri kita yang substitusi impor. Strategi ini, tidak sepenuhnya salah, karena kalau dibandingkan dengan Thailand misalnya, mereka memulai industri dalam negeri dengan substitusi impor. Yang membedakan kita dengan Thailand hanya terletak pada derajad efisiensi. Mereka, harus kita jujur mengakui, lebih efisien. Salah satu yang mendukung prestasi perekonomian Thailand, adalah akses mereka ke pasar internasional lebih baik dibanding kita. Industri kita yang substitusi impor tidak dibarengi dengan koreksi dalam hubungan serta akses kita ke pasar internasional. Banyak industri kita yang baik dari segi pemenuhan kebutuhan kedalam, tapi tidak efisien dari segi biaya, karena penalty cost terlalu tinggi, sehingga perlindungan dengan sistem bea masuk pun tidak menolong. Untuk melindungi model industri yang begini, akhirnya ditempuh cara penutupan kranimpor. Pilihan ini pada akhirnya harus ditanggung oleh konsumen kita dengan rasa berat hati. Dengan demikian jelas, bahwa di tengah efisiensi yang sangat rendah khususnya di sektor industri,

Digitized by Google

usaha membalikkan kiblat inward looking ke kiblat outward looking (ekspor) terasa sangat seret.

Bila kita ingin mampu menganalisa dan mengadaptasi perkembangan pasar internasional, variable yang harus didekati sebenarnya sederhana saja. Pertama, trend perekonomian internasional. Bagaimana surplus perdagangan Jepang dan defisit di pihak Amerika bisa menguntungkan kita serta tendensi tumbuhnya negara-negara industri baru. Di ASEAN sebentar lagi kita akan melihat negara industri baru, selain Singapura, adalah Thailand.

Kasus Thailand ini menarik, karena dari segi income per capita, tidak ada separuh dari Malaysia. Indonesia belum ada separuh dari Thailand. Yang menarik bahwa yang muncul sebagai negara industri baru bukan Malaysia, tapi Thailand. Salah satu faktor yang memungkinkan Thailand bisa berprestasi seperti ini, adalah aksesnya ke pasar internasional yang jauh lebih baik dibanding Malaysia maupun Indonesia.

Variabel kedua, adalah peristiwa-peristiwa penting dalam bidang ekonomi dan bisnis internasional. Peningkatan situasi politik di Timur Tengah yang memanas, bagi kita adalah peluang atau kendala? Peristiwa jatuhnya kurs dolar terhadap Yen, bagi kita peluang atau kendala? Kondisi eksternal ini sangat penting diamati dan diantisipasi.

Variabel ketiga, adalah kemauan politik. Peristiwa kurs dolar adalah contoh dalam hal ini. Jatuhnya kurs mata uang AS ini pada tahun 1970-an, lebih banyak diakibatkan oleh spekulasi yang tumbuh berbarengan dengan krisis energi atau krisis harga minyak. Tapi jatuhnya dolar sekarang ini terhadap Yen, adalah kemauan politik Washington. AS sengaja mendiversivikasikan cadangan dolarnya kepada Yen. Kasus Yen-Dolar ini, merupakan contoh bahwa pada tingkat makro hubungan ekonomi dan politik sangat erat, kendati dalam tingkat mikro mungkin tidak terasa, karena ada hukum-hukum tersendiri yang mengaturnya.

Dan variabel terakhir adalah kemajuan-kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, penemuan super conductor di negara-negara maju belakangan ini merobah secara drastis struktur perdagangan antara negara berkembang dan negara maju khususnya dalam impor-ekspor energi Demikian pula penemuan serat optik yang harus dibayar mahal oleh negara berkembang karena suplai tembaga ke pasaran negara industri turun drastis. Dan yang harus diamati oleh negara berkembang adalah kemajuan-kemajuan di bidang bio-teknologi. Semua kemajuan ini bila tidak kita ambil manfaatnya, maka keunggulan komparatif kita diperkecil terus-menerus. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan memaksa pembalikan dari natural comparative advantage menjadi manmade comparative advantage. Jepang adalah contoh klasik dari sukses di bidang ini.

Jadi singkatnya dalam faktor eksternal, kunci sukses kita adalah bagaimana sikap dan kemampuan kita mengantisipasi untuk memanfaatkan perkembangan-perkembangan dunia luar dan hubungan internasional.

Industri tradisional Thailand menjadi begitu pesat, karena didukung oleh politik pintu yang begitu terbuka bagi orang asing yang masuk ke negeri itu. Setelah melihat keadaan di Thailand, para turis itu akhirnya memberi job order. Dari kontak bisnis orang-per-orang inilah yang mendorong industri tradisional Thailand melaju pesat. Para turis bebas membawa contoh barang yang lagi laris di negeri mereka, untuk kemudian dibuat job-order yang pada gilirannya diekspor. Cara ini, menyebabkan para pengelola industri tradisional di Thailand tidak memerlukan biaya yang mahal untuk mengetahui perkembangan pasar internasional.

Di Indonesia, baru Bali yang mampu mengembangkan keterbukaan seperti contoh Thailand itu. Sehingga, tidak mengherankan kalau produk-produk kerajinan Bali sekarang ini umumnya mampu berbicara di pasar ekspor. Orang Bali kini dalam taraf yang berbeda, telah berkembang menjadi manusia yang export-minded. Padahal lebih dari separuh turis yang ke Bali, masuk lewat Jakarta. Trend ini akhirnya memunculkan pertanyaan, mengapa transaksi-transaksi bisnis (paling tidak untuk ukuran small and medium enterprises) tidak terjadi di Jakarta? Jawabannya mungkin harus dicari pada persepsi Jakarta tentang keterbukaan.

Jadi sebetulnya untuk meningkat menjadi negara pengekspor ada fase-fase yang harus dilalui. Fase pertama adalah penerima job order. Fase kedua, mendorong ekspor, ketiga, membangun kapabilitas industri dalam negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan internasional; keempat adalah bagaimana merobah produksi menjadi produk dan fase kelima — contohnya Jepang — adalah membangun industri-industri ekspor di negara orang lain, karena memanfaatkan comparative advantages dalam labour cost.

Dalam konteks ini, maka sebagian besar industri Indonesia baru berada pada fase pertama dan kedua. Padahal

Bali mampu mengembangkan keterbukaan seperti Thailand

Digitized by Google

Thailand sudah masuk ke fase tiga dan empat. Untuk bisa melangkah dari fase yang satu ke fase berikutnya, tidak hanya ditunjang oleh kebijakan-kebijakan ekonomi saja, tapi harus didukung secara komprehensif oleh kebijakan-kebijakan di sektor lain. Jadi pada tingkat makro keputusan-keputusan ekonomi, secara komprehensif adalah keputusan politik.

BKPM kunci

Dari segi pengamatan internal, peranan kunci yang menentukan perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan adalah BKPM. Thailand misalnya, peraturan di bidang investasi sedemikian jelasnya sehingga eselon satu dan eselon lima kalau berbicara tentang penanaman modal, sama. Karena demikian jelasnya peraturan investasi, sehingga semua orang bisa ngomong dan sama. Kunci untuk mendorong investasi adalah kepastian-kepastian, sehingga pengusaha bisa melakukan perhitungan secara cermat. Kalau variable terlalu banyak, sehingga pengusaha tidak bisa menghitungnya dengan cermat maka jelas, mereka akan enggan melakukan investasi. Untuk ini harus ditumbuhkan aturan main yang jelas. Bila BKPM mencanangkan one stop service, harus konsekuen. Artinya jangan sampai terjadi apa yang telah disetujui oleh BKPM, dimentahkan oleh Pemda hanya karena penafsiran yang berbeda tentang aturan main.

BKPM harus menciptakan iklim yang kondusif terhadap investasi. Investasi yang dulu meningkat pesat lebih banyak didukung oleh penghasilan pemerintah yang tinggi karena minyak sehingga tercipta pasar yang kuat di dalam negeri. Tapi sekarang dimana pasar dalam negeri menciut sejalan dengan penerimaan minyak pemerintah yang mengecil dan para pengusaha diminta meningkatkan ekspor, para pengusaha akan melakukan investasi sejauh variabel-variabel yang dipakai untuk melakukan perhitungan bisa didapat secara jelas. Selain itu dari pemantauan yang bisa diperoleh dari kalangan investor Jepang, faktor yang membingungkan mereka dalam melakukan perhitungan bisnis di Indonesia, adalah devaluasi yang terlampau sering dilaksanakan.

Dengan demikian pembenahan BKPM secara strategis, struktural dan personil yang mendukung institusi kunci ini harus benar-benar ditingkatkan. Thailand mampu muncul dari negara yang begitu berbelit-belit dalam aturan ivestasi menjadi negara yang begitu cekatan. Kalau dulu untuk mengurus investasi disana bisa makan waktu bertahun-tahun, maka kini sistem one stop service dilaksanakan secara Konsekuen. Kalau dulu para pengusaha Amerika dan Jepang yang ingin menanamkan modal di Thailand harus datang ke Bangkok, maka sekarang cukup dilakukan di New York atau Tokyo. Mereka cukup menunggu waktu sebulan untuk memperoleh jawaban. Dan bila jawaban dari Bangkok mengatakan ya, maka semua perijinan yang diperlukan telah tuntas, termasuk ijin tinggal sang pengusaha tersebut.

Trend sekarang menunjukkan bahwa pengusaha Jepang yang mau melakukan investasi di luar negeri, tidak lagi terbatas pada pengusaha besar, tapi juga pengusaha menengah dan bahkan pengusaha kecil. Untuk pengusaha kecil, tinggal berbulan-bulan di negara lain hanya demi keperluan ijin, adalah pemborosan. Jadi untuk menarik modal pengusaha kecil yang sekarang mulai mengalir ke luar Jepang harus disiapkan pelayanan yang cekatan. Pengusaha besar mungkin tahan tinggal di hotel berbulan-bulan sambil melakukan negosiasi bisnis. Tapi pengusaha kecil, sedikit mengalami hambatan dalam usahanya memperoleh ijin, akan lari. Mereka lebih tergantung pada hubungan-hubungan emosional yang tumbuh dari jasa pelayanan.

Soal lain yang mengganjal adalah human investment. Masalah ini telah menjadi ciri klasik Indonesia, yaitu ketidakmutlakan relevansi antara pendidikan dan pasaran tenaga kerja. Banyak tamatan SMA yang tidak memperoleh pekerjaan, bukan karena lapangan kerja yang tidak ada, tapi kemampuan untuk mengisi lowongan yang tersedia. Dan banyak tamatan SMA yang tidak masuk perguruan tinggi juga adalah kesalahan besar dalam arah pengembangan sumber daya manusia.

Bagi yang tidak masuk perguruan tinggi, sebaiknya dididik agar mereka berlomba-lomba masuk sekolah-sekolah ketrampilan, dan jangan merasa rendah diri. Di Jerman misalnya, banyak Doktor yang terpaksa mengikuti lagi pendidikan ketrampilan untuk bisa memperoleh pekerjaan.

DIRGAHAYU
HUT RI
KE 42

PERUM PERCETAKAN UANG R I
Jl. Palatehan No.4 Telp. 735000 Jakarta Selatan
MENCETAK KERTAS BERHARGA NON UANG BENDA-BENDA LOGAM NON UANG

Digitized by Google

Ekonomi Jerman ternyata lebih banyak menyediakan pekerjaan bagi mereka yang trampil daripada mereka yang memiliki jabatan-jabatan prestise.

Bagaimana banting stir dalam arah human investment yang terlanjur melenceng demikian? Sebetulnya sekolah-sekolah kejuruan harus diperbanyak dan diperluas sejak Repelita I sehingga kita bisa memetik hasilnya sekarang. Kini kita memang menyadari sekolah kejuruan seperti pembangunan politeknik, basis-basis pendidikan dan latihan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya terlalu terlambat. Tapi terlepas dari masalah terlambat atau tidak, banting stir dalam dunia pendidikan kita harus dilaksanakan sekarang juga. Karena tenaga-tenaga trampil adalah lokomotif perkembangan industri di masa depan.

Sebuah lowongan pekerjaan yang diiklankan di surat kabar, memang diserbu puluhan ribu peminat. Tapi sayang, hampir tidak ada yang memenuhi syarat. Jadi yang ada adalah jutaan tamatan SLTA yang tidak ada relevansinya dengan kesempatan kerja yang ditawarkan itu. Ini adalah problem terbesar human investment di Indonesia. Adalah pemborosan besar, jika untuk membuat tambak udang saja, kita harus datangkan ahli dari Taiwan. Padahal informasi tentang penambakan udang terbuka luas dan bisa dipelajari oleh siapa saja. Dan juga cukup naif, bila kita harus mendatangkan ahli dari Taiwan atau Thailand untuk mengembangkan jagung atau pepaya di Indonesia. Gejala seperti ini, akhirnya menyadarkan bahwa investasi pendidikan selama ini telah terbuang di sektor yang keliru.

Jadi pemerintah harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus untuk menemukan relevansi kemutlakan pendidikan kita dengan pasaran tenaga kerja. Sebab kalau strategi kita adalah industrialisasi, dia harus didukung oleh pendidikan yang ada. Dan DPR harus terus mengontrol apakah pemerintah melakukan itu atau tidak.

Bisnis tingkat makro

Dalam tingkat makro, keputusan politik secara komprehensif adalah keputusan bidang ekonomi juga. Demikian juga pelaku-pelaku ekonominya. Pada tingkat perusahaan-perusahaan besar, keputusan-keputusan bisnis mereka juga mempunyai dampak terhadap perkembangan dunia politik dan sosial kemasyarakatan.

Di dunia ini, seperti Jepang dan AS serta negara-negara maju lainnya, yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar, walaupun sedikit jumlahnya tapi kontribusi mereka terhadap gerak perekonomian sangat besar. Mereka sebetulnya lokomotif pertumbuhan.

Bagi perusahaan kecil, praktek bisnis mereka adalah bagaimana menciptakan keuntungan. Sedangkan perusahaan-perusahaan menengah parameternya tidak profit lagi, tapi market share, pangsa pasar. Jadi tugas dan tanggungjawab sosial perusahaan-perusahaan kelas ini adalah memelihara pasar. Tapi perusahaan-perusahaan besar, orientasinya tidak sekedar menjaga market share dan mengeduk keuntungan, tapi pada growth, atau pertumbuhan. Karena itu tugas dan tanggungjawab nasional mereka adalah mendorong gerak maju perekonomian. Kunci bagi perusahaan besar menjalankan tanggungjawabnya adalah sejauh mana dia melakukan investasi.

Persoalan kita mungkin bagaimana menanamkan kesadaran berinvestasi kepada pengusaha-pengusaha besar kita, agar supaya bila mereka memiliki uang nganggur, tidak bermain dolar tapi untuk investasi. Spekulasi dolar yang gencar beberapa waktu lalu, sebenarnya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar. Bila pengusaha besar berspekulasi dengan menahan rupiahnya, sebenarnya mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka mengingkari tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam deru pembangunan kita, mulai terbaca adanya trend berpindahnya pusat-pusat kekuasaan dari zone politik ke zone ekonomi. Untuk membeli mobil merek tertentu, orang tergantung pada importir tertentu. Kalau ada kelangkaan barang tertentu, orang ramai-ramai menuding pengusaha tertentu yang diserahkan tanggungjawab sebagai importir ditunjuk. Jadi mulai terasa bahwa pusat-pusat ekonomi sudah mulai tumbuh sebagai pusat-pusat 'kekuasaan' baru.

Dalam sebuah negara demokratis, harus disadari bahwa tugas dan tanggungjawab politik, tidak hanya terbatas pada zone politik saja. Proliferasi kekuasaan ke zone ekonomi, tidak jelek, asal dijamin demi kepentingan rakyat. Artinya bagaimana kita memberikan garansi kepada rakyat, bahwa perusahaan-perusahaan yang diberi monopoli itu tetap bekerja untuk kepentingan rakyat, dan apa

P.T. KERTA NIAGA (PERSERO)
EKSPOR-IMPOR-DISTRIBUSI-ANTAR PULAU
HASIL BUMI & PEMEGANG STOCK NASIONAL CENGKEH

KANTOR PUSAT :
Jl. Kali Besar Timur 8-9
Jakarta Barat
Telepon : 679311 (5 Saluran)
Teleks : 42717-42718
Kawat : KERTANIAGA.

CABANG DI DALAM NEGERI :
Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang Bandar Lampung, Pangkalpinang, Jambi Bengkulu, Pekan Baru, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Manado, Ujung Pandang, Palu, Denpasar, Ampenan, Kupang, Dili, Ambon, Sorong.

BANK : Bank Bumi Daya
Bank Dagang Negara
Bank Negara Indonesia 1946
Bank Ekspor Impor Indonesia
Bank Rakyat Indonesia.

PERWAKILAN DI LUAR NEGERI :
1. B.V. Handelmaatschappij "UNIPRO"
Rokin 95. 1012 km, Amsterdam-Holland
Telepon : 224849
Teleks : 12098 UNIP NL
Telgram :UNIPRO.
2. CENTRAL INDONESIAN TRADING COMPANY
30 Vessey Str. Room 902, New York N.Y. 10007, USA
Telepon :(212) 223-5310
Teleks :CENTRAN 421191
Telgram :CENTRANEW.

Digitized by Google

ukurannya. Yang penting sekarang bukan membenci perusahaan-perusahaan besar, tapi bagiamana membuat perusahaan-perusahaan besar itu menjadi demokratis. Caranya, adalah mendorong perusahaan-perusahaan besar itu menjadi public listed company dengan cara menjual sahamnya di pasar modal. Karena hanya dengan cara ini, bisa dijamin perusahaan-perusahaan raksasa tidak berlawanan dengan kepentingan rakyat. Kepastian ini mutlak karena proliferasi kekuasaan di luar sektor politik, tidak bisa dicegah. Demikian juga, kita tidak bisa mencegah tumbuhnya konglomerasi di sektor bisnis.

Sebagian besar transaksi dan konsesi bisnis internasional kita adalah dengan Jepang. Enam puluh persen lebih dari volume perdagangan kita dengan Jepang itu berada di tangan sepuluh trading house (sogososha) seperti Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Seito, Nichiman dan Marubeni serta beberapa lainnya.

Kita tentunya memerlukan perusahaan-perusahaan raksasa juga yang bisa menjadi kekuatan pengimbang (countervailing power) dari raksasa-raksasa trading company Jepang itu. Bila tidak maka nilai tambah dari perdagangan luar negeri kita hanya dinikmati oleh perusahaan luar negeri saja. Sekarang masalahnya, bagaimana kita menyusun raksasa-raksasa bisnis Indonesia, supaya betul-betul menjadi asset nasional murni. Caranya, adalah mendemokratisir perusahaan-perusahaan besar, sejalan dengan beban misi nasional yang implisit berada di pundaknya. Thailand rupanya telah melihat trend ini. Untuk itu mereka telah membentuk 11 sogososha ala Jepang yang empat di antaranya sengaja dibentuk oleh PM Kriangsak.

Bagaimana dengan Indonesia? Perusahaan raksasa di Indonesia dan perusahaan-perusahaan keluarga yang terkelola baik dan sekarang mulai tumbuh mempunyai potensi ke arah sana. Masalahnya adalah sebelum dibebankan misi nasional harus ditempuh dulu demokratisasi dalam perusahaan itu. Salah satu cara adalah go public. Selain itu adalah BUMN-BUMN yang bekerja efisien. Selama ini ada kesan kalau BUMN pasti tidak efisien. Padahal ada beberapa BUMN yang efisien yang bisa menjadi raksasa dengan daya pengimbang sogososha. Contoh BUMN yang efisien adalah Sari Pasific di bidang perhotelan dan beberapa lagi di sektor perdagangan.

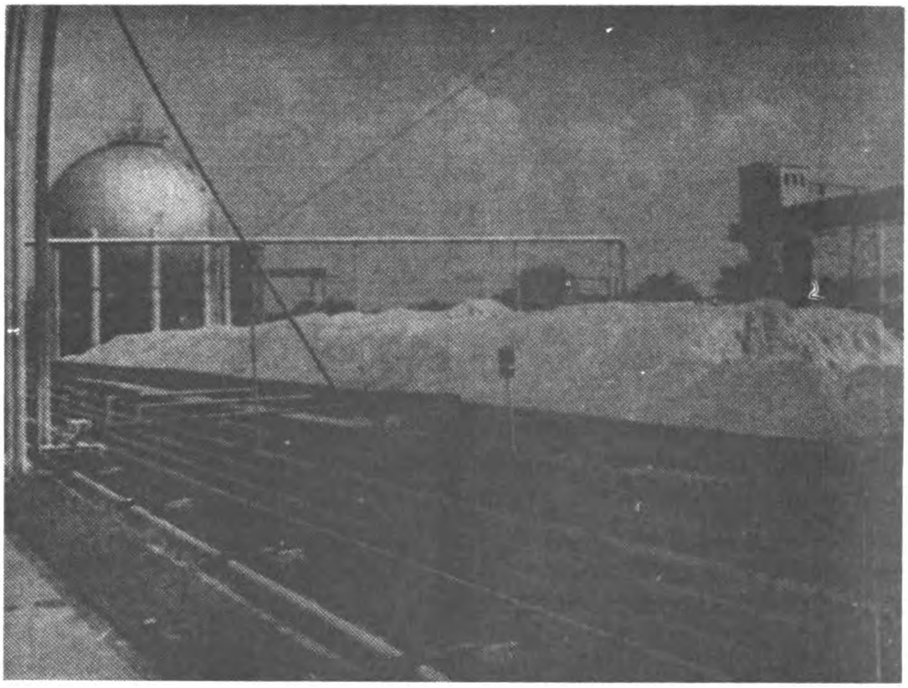

Beberapa keadaan kondusip diperlukan untuk tumbuhkan ekonomi

Berdasarkan kenyataan dan pertimbangan ini maka dalam GBHN mendatang Golkar menganjurkan formula, "Struktur ekonomi yang diwujudkan pada kemajuan usaha perdagangan yang bertitik berat pada industri dan didukung oleh pertanian yang kuat." Formula ini dianjurkan karena kita menganggap industrialisasi harus didukung oleh pasar. Dan ini berarti kegiatan di sektor perdagangan. Dalam pembangunan industri, selain pertimbangan technological experience, juga adalah volume dan pasar. Sedangkan volume dan pasar hanya bisa dicapai kalau perdagangan kita maju. Jadi kunci untuk bisa melakukan terobosan pasar di tengah suasana sulit dewasa ini adalah konglomerasi perusahaan-perusahaan Indonesia.

Restrukturisasi industri

Terobosan baru yang diperlukan dalam mencari jalan keluar dari kesulitan dewasa ini adalah restrukturisasi industri dalam negeri sehingga mampu menembus pasaran internasional. Restrukturisasi industri ini harus dilakukan sekarang juga, karena berdasarkan data 1982, yaitu hasil penelitian IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), dari seluruh industri yang ada, 67,4 persen tidak efisien, karena memiliki cost ratio di atas 1 persen.

Dan dari jumlah yang ada tercatat hanya 9 jenis mewakili 69 industri yang exportable karena memiliki cost ratio di bawah 1 persen. Dari hasil penelitian itu juga bisa dilihat bahwa hanya 14 jenis yang mewakili 315 industri yang masuk dalam kategori cukup efisien, atau 26,7 persen saja. Sedangkan 25 jenis yang mewakili 793 industri, atau 67,4 persen tidak efisien. Masuk dalam kategori ini adalah semua industri otomotif dalam negeri. Jadi menurut perhitungan sehat, sebagian besar industri dalam negeri, sebenarnya harus dinyatakan bangkrut, karena tidak efisien. Salah satu sebabnya adalah tingginya penalty cost.

Data-data di atas adalah hasil penelitian sampai dengan 1982, yang bisa saja ada perubahan disana-sini sekarang ini. Artinya jumlah perusahaan yang exportable, bisa saja bertambah. Tetapi pertambahan itu sudah bisa dipastikan tidak spektakuler sehingga mampu mengubah prosentase yang ada.

Restrukturisasi industri dalam negeri ini semakin urgen lagi karena lima tahun lagi kita sudah masuk dalam Pasar Bersama Asean. Untuk ini kita harus memiliki industri-industri yang mampu bersaing. Kalau tidak, kita hanya mampu sebagai pembeli, tidak sebagai penjual. Dan tentang pilihan teknologi yang dibutuhkan untuk melakukan industrialisasi? Jenis teknologi maupun industri yang dikembangkan nanti boleh apa saja, asal memenuhi satu syarat mutlak: Efisien. Hanya membangun industri-industri yang efisien, kita mampu bersaing dan survive dalam percaturan bisnis internasional.□ LT

Digitized by Google

Swasembada, Bagaimana Di Masa Depan?

Kemampuan mempertahankan swasembada ditopang teknologi dan peningkatan pendapatan petani

Ir Achmad Affandi

Indonesia memang pernah menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia. Tapi itu, dulu. Kini, sejak dua tiga tahun terakhir ini Indonesia sudah menjadi negara dengan kemampuan swasembada. Maka ketika ada yang mendesas-desuskan — mungkin dengan tujuan yang politis — bahwa belum lama berselang diam-diam ada impor beras lagi untuk membantu pengadaan stok nasional, jelas itu betul-betul isyu. Dan pejabat pemerintah yang berkompeten untuk itu membantah dengan keras. Bulog kini memiliki stok nasional tak kurang dari dua setengah juta ton yang semuanya berasal dari pembelian dalam negeri.

Jelas tak masuk akal kalau pemerintah mengimpor beras justru setelah swasembada tercapai dan dapat dipertahankan selama beberapa tahun ini. Tahun 1986 yang lalu produksi beras mencapai 26.784.000 ton. Dan tahun 1987 ini diperkirakan akan mencapai 27.430.000 ton. Namun, terlepas dari isyu impor, seperti yang diutarakan oleh Presiden Soeharto sendiri dalam pidato kenegaraan 16 Agustus yang lalu ada hal yang perlu diwaspadai dalam masalah produksi beras tersebut. Produksi beras tahun 1986 yang 26,7 juta ton itu hanya naik 0,9% dibanding produksi tahun 1985. Menurut Presiden "ini berarti kenaikan tadi berada di bawah kenaikan ratarata penduduk kita yang sebesar sekitar 2%". Logikanya, bila tak waspada, dengan kalahnya peningkatan produksi beras oleh peningkatan laju pertambahan penduduk, pada suatu waktu memang impor beras diperlukan lagi.

Penciutan Lahan Pertanian

Sesungguhnyalah banyak hal yang harus diwaspadai bila ingin mempertahankan swasembada beras. Tercapainya kemampuan berswasembada bukan datang begitu saja. Sebelum tiba ke posisi swasembada, telah dilalui bentangan perjalanan yang tidak mudah. Kini, swasembada itu pun takkan begitu saja berlanjut tanpa upaya yang berkesinambungan. Karena, permasalahan juga tak berhenti muncul.

Belakangan ini, sejumlah ahli pertanian mengisyaratkan perlunya diwaspadai gejala penciutan lahan pertanian. Perubahan fungsi lahan yang memang tidak produktif, tidak menjadi soal. Tapi bila hal serupa terjadi atas lahan yang produktif dan termasuk dalam area berpengairan yang baik, persoalannya menjadi lain. Kepada Media Karya, Menteri Pertanian Ir Achmad Affandi menyebutkan angka 'penciutan' lahan rata-rata 55 ribu hektar per tahun. Termasuk di dalamnya lahan kelas satu dan dua yang merupakan areal pengairan yang dibangun dalam beberapa Pelita.

Selain masalah penciutan lahan, dalam rangka memelihara kemampuan swasembada tak kalah menentukan adalah yang menyangkut kepentingan petani itu sendiri. "Pertanian akan tangguh, kalau petaninya juga tangguh", kata tokoh HKTI Ir Usman Hasan. Salah satu soal yang harus diperhatikan adalah bagaimana peningkatan pendapatan petani dapat sejalan dengan peningkatan produksi.

Presiden agaknya cukup prihatin melihat gejala penciutan lahan ini. Dalam penegasannya kepada Menteri KLH Dr Emil Salim, Presiden meminta diupayakan agar lahan kelas satu dengan irigasi teknis jangan sampai dialihkan fungsinya menjadi lokasi industri. Pengembangan industri hendaknya diarahkan ke lahan lain. Emil Salim menambahkan, persoalannya terletak kepada pemerintah daerah. Mereka harus menolak memberi izin bagi industri yang memilih lokasi pertanian kelas satu. Tentu pengetatan serupa dapat dikenakan kepada permohonan real estate untuk

Digitized by Google

membangun di lokasi yang masih merupakan lahan pertanian produktif.

Menteri Pertanian juga telah membicarakan masalah penciutan lahan pertanian ini dengan Presiden.

"Kita ini sekarang sudah swasembada beras. Produksi beras harus terus meningkat", ujar Menteri Pertanian. Ia menyebut target angka 37,5 juta ton untuk tahun 2000 untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya sudah meningkat pula. 31 juta ton dimaksudkan untuk kebutuhan makanan manusia, 6 juta ton untuk kebutuhan lainnya. Tapi dalam masalah lahan kita menghadapi dilema. "Disatu pihak, lahan itu dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pangan tersebut, di lain pihak ia juga digunakan untuk keperluan pembangunan sektor lainnya. Misalnya, untuk industri dan perumahan". Juga untuk jalan tol. Areal persawahan harus dikorbankan untuk jalan tol Cikampek—Karawang misalnya. "Kita akan kehilangan 270 ribu hektar hingga tahun 2000 nanti", kata Ir Affandi. Sementara itu, pada pihak lain areal hasil program pencetakan sawah tidak mampu mengejar laju penciutan lahan yang mencapai 55.000 hektar pertahun itu.

Lalu bagaimana? "Saya matur dengan pak Harto mengenai keadaan ini", tutur Ir Affandi. "Penciutan yang 55.000 hektar itu kita rencanakan, kita atur, kita programkan". Artinya, ada perubahan program yang merupakan antisipasi terhadap menciutnya lahan.

"Produksi beras yang harus dicapai untuk memenuhi berbagai kebutuhan pada tahun 2000 sasarannya ialah 37,5 juta ton beras yang bertitik tolak dari produksi tahun 1986 sebanyak 26,784 juta ton dengan kenaikan tiap tahunnya 2,4% untuk jumlah penduduk yang telah mencapai 222,75 pada tahun 2000". Menurut Menteri Pertanian, sasaran produksi 37,5 juta ton beras diusahakan bisa dicapai melalui peningkatan intensifikasi dan kerjasama antar kelompok tani — supra insus. Areal panen — khususnya sawah berpengairan — yang diperlukan cukup sekitar 7 juta hektar saja dengan produktivitas 53,57 ku beras per hektar (10,7 ton GKP). "Jumlah areal tersebut bisa disediakan 3 juta hektar dari musim kemarau dan 4 juta hektar dari musim penghujan".

Penciutan areal ini disebabkan beralihnya fungsi tanah pertanian, khususnya sawah menjadi areal non pertanian, seperti pemukiman, industri, jalan tol dan lain-lain yang "tidak bisa

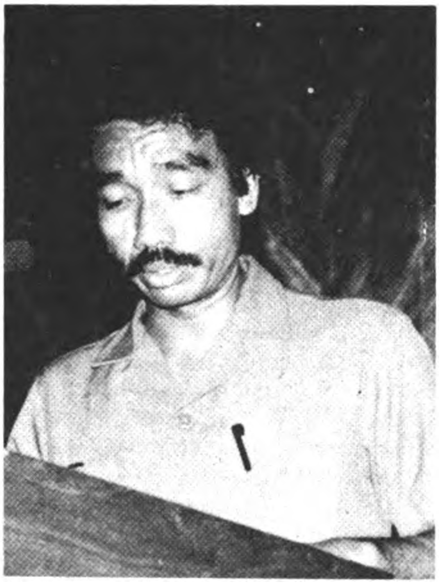

Usman Hasan

dielakkan lagi sebagai konsekuensi pembangunan secara keseluruhan".

Program yang diutarakan Menteri Pertanian ini memperlihatkan bahwa kendati ada penciutan lahan sampai 2,8 juta hektar, produksi tetap bisa naik sehingga swasembada dapat dipertahankan sampai tahun 2000 — dan tentunya sesudahnya juga. "Hal ini disebabkan pula oleh karena teknologi yang kita miliki untuk menunjang sektor ini sudah memadai. Selain itu, petani kita saat ini sudah dinamis dan kenal sistimatika".

Sisa areal panen sawah dan areal ladang dalam program tersebut, kata Menteri, bisa diarahkan untuk ditanami palawija, tebu dan hortikultura dengan catatan bahwa produktivitas areal bekas sawah — yang umumnya berpengairan sederhana — harus bisa ditingkatkan, sehingga nilai hasilnya tidak jauh berbeda dengan padi. "Mudah-mudahan dalam 10 tahun yang akan datang produktivitas pertanaman palawija, tebu dan hortikultura sudah bisa mengimbangi pendapatan dari padi".

Tapi 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dan tahun 2000 masih 12 tahun lagi. Masa yang 12 tahun itu akan menentukan tercapai tidaknya target-target yang diletakkan sampai tahun itu. Semuanya terkait dengan persepsi dan keputusan-keputusan yang diambil sejak saat ini.

Orientasi Baru

Tokoh HKTI, anggota DPR-RI dari FKP Ir Usman Hasan, dalam wawancara dengan Media Karya melengkapi pengutaraan Ir Affandi dengan beberapa telaah dan pemikiran.

Setelah mencapai swasembada beras, menurut Ir Usman Hasan diperlukan sedikit peninjauan atau reorientasi. Usman Hasan menyentuh tak kurang dari lima pokok masalah.

Yang pertama, kalau dulu adalah bagaimana mencapai swasembada, maka sekarang adalah bagaimana melestarikan swasembada beras itu seraya menuju tingkat swasembada yang lebih luas yakni swasembada pangan. Artinya, swasembada beras ditambah dengan swasembada mata pangan lainnya.

Reorientasi yang kedua tertuju kepada masalah pendapatan petani. Bila dulunya pembangunan pertanian lebih mengutamakan peningkatan produksi, sekarang dengan telah tercapainya swasembada beras, penekanan perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produksi. Beras merupakan bahan yang paling pokok di antara sembilan bahan pokok kebutuhan rakyat. Beras dengan demikian menempati posisi price leader dari berbagai macam komoditi lainnya dan beras menentukan ketahanan rumah tangga petani bila dikaitkan dengan nilai tukar — term of trade. Setelah itu semua tercapai, wajar untuk kini memperhatikan masalah peningkatan pendapatan petani tersebut.

Pokok reorientasi berikutnya menyangkut diversifikasi atau perkayaan fokus. "Kalau tadinya, apapun yang terjadi, pokoknya beras, sekarang strategi berfokus tunggal demikian sudah tak dapat dipertahankan lagi. Karena, beras justru dapat diproduksi maksimal hanya pada lahan-lahan beririgasi. Padahal lahan-lahan irigasi sudah 'terancam' oleh kebutuhan pembangunan non pertanian". Usman Hasan memperkuat kecenderungan untuk memilih komoditi yang tak terbatas pada beras saja. "Walaupun swasembada beras harus tetap dipertahankan, tapi pada lahan-lahan tertentu kiranya tak perlu lagi difokuskan kepada beras. Kita perlu memilih komoditi-komoditi non-beras yang bernilai tinggi yang memberikan income kepada para petani".

Peninjauan keempat adalah mengenai kebijaksanaan pasca panen. Hal itu menurut Usman Hasan merupakan masalah tersendiri. Masalah pasca panen bukan hanya masalah teknologinya — mulai dari trasering, transporting dan processing — tetapi juga menyangkut masalah pemasaran dan harga. "Hal ini kelihatannya merupakan masalah yang lebih men-

Digitized by Google

dasar". Sepanjang apa yang kita ketahui, dalam pola umum pembangunan jangka panjang titik beratnya adalah pada pertanian, yakni pertanian yang mendukung industri. Sudah dibuktikan semenjak Pelita I sampai Pelita IV, bahwa pertanian telah menunjukkan dukungannya. "Namun masih ada yang belum terbukti secara baik, yaitu industri yang mendukung pertanian". Keinginan dalam rangka pembangunan yang seimbang untuk beralih dari pertanian ke industri bukan berarti pertanian diabaikan dan industri dianakemaskan. Pengertiannya sebenarnya adalah "pertanian dikuatkan untuk mampu mendukung industri sehingga pada suatu ketika pada waktunya industri juga akan kuat dan mampu mendukung pertanian". Dukung mendukung ini belum tercermin dengan baik sepanjang apa yang tercermin dari fenomena pasca panen, terutama dalam kebijaksanaan harga dan kebijaksanaan pembayaran. "Sehingga kita seringkali tertegun atau terkejut oleh berbagai berita dan kenyataan tertentu yang terasa pahit. Contohnya, impor gaplek, impor kedelai, impor kacang tanah yang menunjukkan demi industri seolah-olah petani rela kita korbankan. Sungguh sesuatu yang terasa tidak enak". Alasannya, untuk mempertahankan suplai dalam negeri atau untuk memelihara kontinuitas industri dalam negeri, untuk mencukupi bahan-bahan dalam negeri. "Padahal yang kita harapkan, pertanian yang selama ini sudah memperlihatkan bukti mendukung industri, hendaknya juga di lain pihak didukung oleh industri dengan menempatkan industri sebagai bapak angkat. Kalau industri sebagai bapak angkat petani dalam negeri, masalah harga perlu ditata di dalam negeri. Bukan karena selisih harga sedikit, lantas berpaling ke luar negeri dan akhirnya akan menjadi bapak angkat petani luar negeri".

Reorientasi kelima, menyangkut masalah ekspor. Kelihatannya kita belum begitu berhasil mempromosikan barang-barang kita di luar negeri. Dan kita juga belum begitu berhasil dalam mencapai standar-standar yang mereka butuhkan. Kita sering mendengar barang-barang kita diklaim, udang misalnya. Crude Palm Oil (minyak sawit) kita kurang bersaing dengan CPO negara lain, begitu pula kopi. Disamping macam-macam hal dan masalah kualitas, masalah kemampuan untuk mempromosikan juga tidak boleh kita lupakan. Apalagi pasaran di luar negeri seringkali berlaku diskriminatif.

"Dalam rangka eskpor, saya berpikir sudah waktunya kita pikirkan untuk mengekspor beras. Saya melihat keberhasilan-keberhasilan peningkatan produksi beras per hektar akan bertambah dan masih akan naik terus, terutama bila tak ada gangguan bencana wereng dan segala macamnya". Pada pihak lain, konsumsi per kapita di dalam negeri cenderung menurun. Walaupun konsumen bertambah dengan 2,3 persen per tahun, tetapi peningkatan produksi secara rata-rata juga lebih dari 3 persen. "Dalam keadaan demikian, kendati jumlah mulut yang membutuhkan beras bertambah, peningkatan produksi kelihatannya akan mampu mengejar. Surplus bisa lestari, bahkan bisa terakumulasi asal tidak terjadi bencana-bencana alam yang luar biasa".

Karena kecenderungan konsumsi dalam negeri cenderung menurun, maka ekspor beras bukan hal yang tidak mungkin. Thailand pun saat mulai mengekspor beras tak terbayangkan sebelumnya. Yang menjadi masalah kita sekarang bila berkeinginan mengekspor beras hanyalah masalah harga. "Tetapi bila kita teliti masalah harga ini tidak terletak pada sektor petani. Hingga tingkat memproduksi gabah kering panen, harga yang ada masih menunjukkan kemampuan bersaing. Akan tetapi pada pasca panen, saat proses gabah menjadi beras, cost kita menjadi lebih tinggi". Berarti terjadi highcost economy pada periode pasca panen. "Inilah yang saya kira perlu dibenahi. Tapi karena ini pada periode pasca panen, jelas petani tak dapat disalahkan". Bila highcost pasca

Asuransi Jasa Indonesia mengambil alih resiko anda

Digitized by Google

Produksi beras harus terus meningkat

panen ini bisa diatasi, "saya yakin ekspor beras bukan hal yang mustahil bagi Indonesia".

Petani Yang Tangguh Untuk Lepas Landas

Dihubungkan dengan masalah penciutan lahan pertanian, ke masa depan optimisme yang bersandar kepada manusia pelaksana pertanian dan teknologi merupakan jawaban masalah. Dengan lahan yang digarap intensif, Menteri Pertanian yakin mencapai produksi 37,5 juta ton pertahun di tahun 2000. Kenaikan itu diprogramkan bertahap antara 0,5 hingga 1 juta ton pertahun sejak 1987 hingga 1999. Produksi pada tahun 2000 itu, diperhitungkan hanya dikonsumir sebanyak 31 juta ton. Kemajuan teknologi mungkin saja mampu merubah angka-angka yang dihitung di tahun 1987 ini.

Tetapi selain faktor teknologi, faktor manusia tak kalah pentingnya. Tokoh Kontak Tani Nasional H. Oyon Tahyan berdasarkan pengalamannya berani menyimpulkan bahwa para petani Indonesia akan mampu menyerap dan memanfaatkan kemajuan teknologi. "Dengan ditunjang para ahli dengan teknologi maju, para petani pun siap untuk menterapkan teknologi baru", ujarnya kepada Media Karya (Lihat: Dari Penganekaragaman Menu Hingga Teknologi Baru).

Menghadapi fase lepas landas, para perencana pembangunan menyebutkan perlunya pertanian yang tangguh. "Tepat untuk merumuskan demikian", kata Ir Usman Hasan. "Tapi pertanian baru tangguh kalau petaninya tangguh". Salah satu point penting yang terkait dengan ketangguhan petani tentu adalah ketangguhan ekonomisnya. "Inilah sebabnya saya menitikberatkan orientasi kepada masalah pendapatan petani. Kini kita tidak lagi sekedar mengejar peningkatan produksi, melainkan juga harus mengupayakan peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produksi".

Menurut Ketua Departemen Tani & Nelayan DPP Golkar ini, kalau pendapatan petani rata-rata seperti sekarang ini tidak meningkat, perlu kuatir "apakah kita mampu menjadikan pertanian sebagai landasan yang kuat". Tapi ia percaya bahwa policy yang ada sekarang bisa ditingkatkan untuk ikut mendorong kenaikan pendapatan petani. "Sehingga pendapatan petani secara nasional akan mencapai rata-rata lima atau enam ratus dollar AS untuk mereka yang rata-rata mempunyai tanah setengah hektar".

Peningkatan pendapatan petani bukan hanya berasal dari pertanian. Produksi petani juga bisa berasal dari usaha non tani. Non usaha tani ini sering tidak dihitung, padahal itu adalah produksi petani, misalnya kerajinan, jasa dan segala macam. "Sebutlah produksi usaha tani plus".

Bila ingin menuju kesana, kata Usman Hasan, tentu perlu diatasi apa yang menjadi kelemahan utama rata-rata petani saat ini, yakni permodalan. "Kalau soal skill, saya kira itu lebih mudah, dengan berbagai kemajuan teknologi itu bisa diatasi, apalagi sekarang ini mereka terbukti cukup responsif terhadap kemajuan dan teknologi baru. "Maka untuk menjamin arah menuju peningkatan pendapatan petani, perlu ada reorientasi dan dukungan kebijaksanaan perkreditan".☐ Subandrio/Rum Aly

Bagaimana Mensukseskan Swasembada Pangan Sampai Tahun 2000

Untuk dapat mensukseskan usaha swasembada pangan sampai dengan tahun 2000, menurut Menteri Pertanian ada tiga hal utama perlu diusahakan perwujudannya.

Pertama: KUD harus terus dibina dan dikembangkan agar benar-benar mampu melayani kebutuhan anggotanya dan KUD menjadi organisasi pedesan yang mandiri serta mampu bertindak sebagai Perusahaan Pembimbing. Oleh karena itu seluruh KUD yang pada tahun 1986 berjumlah 7.053 buah diharapkan sudah mampu melaksanakan fungsi tersebut.

Kedua: Permodalan usahatani akan diperlukan sebesar Rp 6,3 trilyun, dengan penggunaan input senilai Rp 900.000 per hektar. Dengan berkembangnya tabungan kelompok tani, maka pembiayaan swadana diharapkan sudah bisa mencapai 80% sehingga kebutuhan kredit diperkirakan hanya Rp 140 milyar dengan ancer-ancer paket sebesar Rp 100.000 per hektar.

Ketiga: Seperti halnya usaha dibidang lain, usaha tani juga dihadapkan pada berbagai resiko yang seringkali berada di luar jangkauan kemampuan petani (banjir, kekeringan, bencana alam dan sebagainya). Dengan besarnya input yang dikeluarkan maka upaya perlindungan terhadap resiko tersebut dipandang sangat strategis sekali. Oleh karena itu Asuransi panen perlu mendapat perhatian untuk diterapkan melalui suatu Pilot Proyek terlebih dahulu. Proposal untuk pelaksanaan Pilot Proyek Asuransi Panen telah tersusun sebagai hasil study yang dibiayai FAO tahun 1981-1984.☐

Digitized by Google

Dari Penganekaragaman Menu Hingga Teknologi Baru

Dengan menciutnya lahan-lahan pertanian, apa yang harus dilakukan oleh para petani? Sebenarnya, kata H. Oyon Tahyan tokoh Kontak Tani, lahan-lahan yang kering, maupun yang sudah digarap petani, harus ditingkatkan lagi. "Dan saya optimis, swasembada beras dapat dipertahankan".

Petani yang hidup di pedesaan itu, kata Oyon bukan hanya hidup di sawah. Mereka juga menanam pada lahan-lahan kering seperti palawija, umbi-umbian dan yang lain. Dan tanaman-tanaman ini akan dapat menghasilkan keanekaragaman tanaman.

"Lahan-lahan kering itu harus kita garap mulai sekarang. Dan lahan yang sudah ditingkatkan pengelolaannya perlu diperhitungkan untuk dilestarikan. Misalnya saja, lahan-lahan yang masih terlantar bisa dibikin sawah dengan cara swadaya, swadana atau dengan cara gotong royong".

Sedangkan tanah-tanah yang ada diluar Jawa, banyak rawa-rawanya baik itu daerah yang pasang surut atau lebak dalam. Saya pernah menghimbau kepada para ahli, supaya tanah-tanah tersebut dapat difaedahkan seperti yang diprogramkan pemerintah. Himbauan saya adalah, agar pelaksanaannya didukung tenaga ahli dan mendatangkan bibit unggul. Penggarapan lahan-lahan kering ini jangan sampai kalah dengan pelaksanaan penanaman padi-padi di sawah. "Ini merupakan tantangan untuk dapat menemukan jenis padi di daerah rawa, daerah pasang surut atau lebak dalam" katanya.

Dengan ditunjang oleh tenaga ahli, teknologi maju, petani pun sudah siap untuk menerapkan teknologi baru tersebut. Petani dalam pembangunan harus bekerja sama secara keseluruhan dan saling mendukung. Termasuk bekerja sama dengan pedagang obat-obatan, pupuk dan yang lain. Selain itu, supaya program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah dan swasta juga harus bekerja sama.

Sekarang ini, kata Oyon, petani harus kita didik supaya ada diversifikasi menu. Istilahnya, jangan baru disebut makan hanya setelah makan nasi. "Bagi saya dan keluarga saya, makan yang masuk di mulut itu juga berarti makan. Apakah itu dengan umbian-umbian, kacang-kacangan, daging, sayur-sayuran atau buah-buah". Saya kira makanan tersebut untuk kesehatan juga lebih baik. "Dan saya mengharapkan diversifikasi menu itu harus dimulai dari sekarang. Saya mengharapkan para ahli gizi, mencoba membuat suatu ramuan dari kacang-kacangan, jagung, umbi-umbian menjadi makanan yang lebih hebat dan mempunyai gizi tinggi".

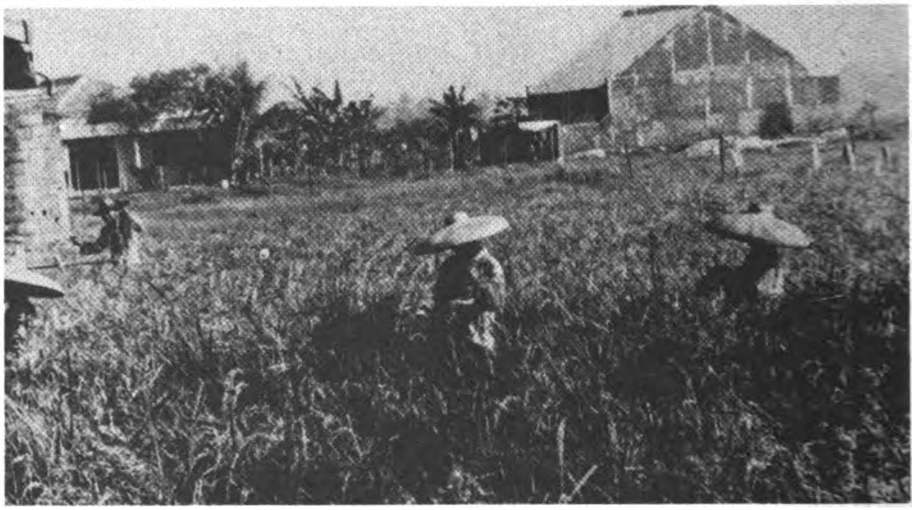

Petani perlu juga dididik beternak

Dari pengamatan saya di pelosok-pelosok desa, maupun gunung, makan bakso, membuat mie telor puyuh ini sudah memasyarakat. Dan hal seperti ini harus dikembangkan dan dimasyarakatkan. Maka dari itu, kata Oyon, janganlah tergantung pada nasi. Bagi daerah yang menghasilkan jagung, makanlah jagung dan yang lain.

Selain bertani, petani itu juga perlu dididik berternak. Perlu pula dikembangkan ayam huras, ayam kampung. "Dan yang dulu-dulu ayam kampung itu tidur di pohon, perlu dibuatkan tempat, sehingga dapat terhindar dari penyakit telo dan sebagainya. Kemudian ayam tersebut diatur dengan makanan yang berprotein. Dengan demikian nantinya akan dapat meningkatkan gizi dari keluarga petani dan bisa juga dijual untuk sebagian".

Untuk itu petani harus dididik kreatif. Misalnya saja, makanan ayam dapat dibuat dengan bekatul dicampur dengan pisang, atau dicampur dengan serangga. Contoh lain, rayap juga dapat digunakan untuk makanan ayam, karena rayap itu juga berprotein. Dan kalau perlu rayap ini juga diternakkan, dari pada merusak rumah.

Di NTB, ternak sapi diberikan makanan campuran dari pohon pisang yang diramu dengan bekatul. Bahan ini bisa mempercepat pertumbuhan sapi.

Selain itu perlu dikembangkan kerja sama pertanian yang didukung industri. Contoh, percobaan kelompok Kontak Tani Jawa Barat dengan luas tanah seratus hektar, dengan perusahaan yang akan menyediakan benih. Kemudian hasilnya akan dibeli oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan unggas.

Di Subang, Jawa Barat, kerja sama antara pertanian dan industri berjalan satu tahun. Kemudian perjanjian itu diperbarui dan sekarang ini telah mencapai 6560 hektar. "Ini merupakan kemajuan dibidang pertanian yang didukung industri." Contoh lain lagi adalah pengelolaan singkong, tomat dan cabe.

Dengan demikian upaya peningkatan pendapatan petani dapat dikembangkan dari Aneka Usaha Tani dengan Industri rumah tangga. "Berbagai kerajinan dapat dikembangkan secara terpadu dan diarahkan oleh organisasi pedesaan atau KUD".□

Digitized by Google

Tanggung Jawab Kemajuan Sepenuhnya Di Pundak Kita

''Kita prihatin akan ujian besar dan berat yang sedang dan akan kita hadapi. Tetapi ujian itu tidak membuat kita bimbang atau kehilangan semangat''.

Presiden pidato di depan sidang DPR

MENGAKUI terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang masih dirasakan sampai sekarang, Presiden Soeharto mengajak bangsa Indonesia bekerja lebih keras. "Dewasa ini kita semua sedang bekerja keras dan berusaha keras untuk "menciptakan landasan pembangunan yang kokoh kuat dengan menyelesaikan kerangka landasan dalam Pelita IV". Dan menurut Presiden yang tampil membawakan pidato kenegaraan 15 Agustus 1987 di depan sidang DPR, berbicara tentang tahap tinggal landas bukan berarti sedang dibuai mimpi indah atau melarikan diri dari kenyataan dan tantangan-tantangan dewasa ini. Secara nyata kita memiliki harapan, "selama ini pembangunan yang kita laksanakan di berbagai bidang mengalami banyak kemajuan".

Selengkapnya pidato kenegaraan Presiden adalah sebagai berikut ini.

Jika kita memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan dan pada saat itu dikumandangkan kembali naskah Proklamasi, maka sewajarnyalah jika perhatian kita akan terpusat pada kata-kata kalimat kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar '45. Kata-kata itu selalu mengharukan dan sekaligus menggetarkan hati setiap kali kita mendengarkannya; ialah yang berbunyi: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

Ini merupakan pengakuan kita bahwa kemerdekaan nasional itu bukan datang begitu saja. Kemerdekaan nasional kita

Digitized by Google

sama sekali bukan hadiah, pemberian, belas kasih atau kebaikan hati siapapun juga. Kalimat-kalimat luhur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu menunjukkan dengan jelas bahwa kemerdekaan nasional kita adalah hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan setelah berlangsung selama 37 tahun sejak memasuki tahap perjuangan moderen yang diawali pada tahun 1908. Malahan jauh sebelum itu, sama tuanya dengan saat pertama kali penjajah menginjakkan kaki di Bumi Pertiwi kita ini, telah bangkit perlawanan terhadap penjajahan di mana-mana di seluruh Indonesia, dari kurun waktu yang satu dilanjutkan dalam kurun waktu berikutnya, dari generasi yang satu diteruskan oleh generasi selanjutnya.

Perjuangan yang satu bisa saja lebih besar dari perjuangan yang lain, perjuangan yang satu bisa saja lebih lama dari perjuangan yang lain. Namun semua perjuangan-perjuangan itu mempunyai satu tujuan yang sama ialah melawan penindasan dan mengusir penjajahan. Bukti sejarah mengenai ini adalah banyaknya nama-nama pahlawan bangsa yang kita miliki.

Perjuangan yang satu bisa lebih lama dari yang lain

Kurun waktu Revolusi dan Perang Kemerdekaan dalam perjuangan merebut, mempertahankan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45, merupakan perjuangan besar yang berkobar-kobar di mana-mana di seluruh Tanah Air. Bukti sejarah dari semangat juang Bangsa kita yang tak kenal menyerah itu adalah tersebarnya makam-makam pahlawan Perang Kemerdekaan sampai ke pelosok-pelosok Tanah Air kita.

Karena itulah pada hari-hari menjelang peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan, kita semua dengan cara yang sekhidmat-khidmatnya menyatakan penghormatan kita yang setinggi-tingginya kepada semua pejuang bangsa kita; dari semua kurun waktu, dari semua generasi, dari semua golongan, pria dan wanita, tua dan muda, yang dengan berbagai cara dan bentuk telah menyumbangkan pikiran, kegiatan dan ketrampilan, serta mengorbankan kekayaan, kesehatan dan bahkan jiwa raga mereka, demi tegaknya Kemerdekaan Nasional yang sampai hari ini kita nikmati bersama.

Kita berjanji untuk menyatakan hormat dan terima kasih atas segala pengorbanan tadi dengan melanjutkan dan meningkatkan perjuangan mereka semua dalam cara dan bentuk yang paling tepat bagi tahap-tahap perjuangan kita dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara di waktu-waktu yang akan datang.

Karena tekad yang demikian itulah, maka setiap kali kita memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan, maka kata-kata yang sama dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan kita, kata-kata yang sama dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar '45 dan kata-kata yang sama dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar '45, berbicara kepada kita secara baru dan segar di tengah-tengah keadaan yang setiap kali juga baru dan menghadapi tantangan-tantangan yang setiap kali baru juga.

Sebab itu setiap kali kita memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan maka kita pertama-tama selalu berusaha untuk memahami lebih dalam lagi makna dari segala pengalaman pendahulu-pendahulu kita dan segala pesan-pesan luhur yang telah mereka nyatakan kepada kita semua yang hidup sampai hari ini.

Itulah kekuatan utama mengapa sampai hari ini kita tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu walaupun kita acapkali dihadapkan pada perubahan-perubahan besar baik dalam lingkup nasional, dalam lingkup regional maupun dalam lingkup internasional. Padahal, tidak jarang pula perubahan-perubahan itu sangat mendasar sifatnya.

Kita menyadari sepenuhnya adanya kelemahan dan kekurangan dalam usaha kita membangun masyarakat, bangsa dan negara ini. Kelemahan dan kekurangan memang tidak pernah lepas dari hasil pekerjaan bangsa, di mana pun di dunia ini dan dalam zaman apapun.

Namun, setelah kita memasyarakatkan Pancasila melalui P-4, setelah kita menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dengan kebahagiaan yang dalam dan rasa percaya diri yang besar, kita dapat mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat yang disebut dalam kalimat kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar telah dapat kita tegakkan.

Sebab itu, dengan terus menyempurnakan apa yang telah kita capai sampai sekarang, maka tugas utama kita selanjutnya ialah melanjutkan perjuangan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat itu dapat kita tingkatkan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sesuai dengan pesan Pembukaan Undang-Undang Dasar, kita percaya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu akan sepenuhnya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan juga akan sepenuhnya ikut memperjuangkan penghapusan penjajahan dan segala sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan di atas dunia.

Kita percaya dan berketetapan hati bahwa masyarakat yang kita cita-citakan itu akan dapat kita wujudkan setelah kita dapat menciptakan landasan yang kokoh kuat, yang Insya Allah, akan dapat kita rampungkan dalam Repelita ke-V nanti.

Tanpa landasan yang kokoh kuat baik — di bidang ekonomi, bidang politik maupun di bidang-bidang lainnya — tidak mungkin kita tinggal landas mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan. Jika untuk menciptakan landasan yang kokoh kuat itu diperlukan waktu 25 tahun — 5 kali Repelita —, maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, jelas diperlukan waktu yang jauh lebih panjang lagi. Namun setidak-tidaknya dalam kurun waktu 25 tahun pertama itu kita sudah memiliki landasan yang kuat untuk tinggal landas mencapai sasaran-sasaran antara dalam pembangunan jangka panjang, untuk selanjutnya bangsa kita melanjutkan perjalanan sejarahnya menuju sasaran akhir.

Pada dasarnya hakekat tinggal landas dalam pembangunan nasional yang kita maksudkan adalah membangun di atas landasan yang kokoh kuat, landasan yang berupa kondisi-kondisi di berbagai bidang kehidupan:

Digitized by Google

— Bidang ekonomi, dimana terdapat struktur ekonomi yang seimbang antara bidang industri yang kuat dengan dukungan pertanian yang tangguh, sedangkan unsur kebutuhan pokok masyarakat sudah tersedia dan terjangkau oleh rakyat banyak;

— Bidang politik, dimana setiap warga negara telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45, sedangkan mekanisme kepemimpinan nasional telah berlangsung dengan mantap berdasarkan konstitusi secara demokratis dan berdasarkan hukum.

— Bidang sosial-budaya, dimana kehidupan bermasyarakat yang penuh keseimbangan, keserasian dan keselarasan sesuai dengan Pancasila telah mulai membudaya dan menjadi kepribadian kita;

— Bidang hankam, dimana wawasan pertahanan-keamanan yang didasarkan pada kekuatan rakyat semesta dengan inti kekuatan ABRI telah mampu mengamalkan dwi fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Ini berarti bahwa tahapan tinggal landas merupakan tahapan pembangunan yang terus meningkat, tidak kenal berhenti, menuju kemajuan, keadilan dan kesejahteraan lahir batin yang makin baik, setelah kita mampu menciptakan dan memiliki landasan mental spiritual dan landasan fisik material yang kuat sebagai bangsa yang kehidupannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45, sehingga arah dan isi pembangunan itu benar-benar menjamin tercapainya cita-cita kemerdekaan kita, benar-benar merupakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Dan dewasa ini kita semua sedang bekerja keras dan berusaha keras untuk menciptakan landasan yang kokoh kuat itu dengan menyelesaikan kerangka landasan dalam Pelita ke-IV, untuk kita lanjutkan dan memantapkan landasan itu di dalam Pelita ke-V nanti.

Berdiri Di Atas Kenyataan

Jika menjelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan, kita menjernihkan pikiran mengenai tahap tinggal landas pembangunan nasional kita, maka hal ini sama sekali tidak berarti bahwa kita sedang dibuai mimpi-mimpi indah. Juga sama sekali tidak berarti bahwa kita melarikan diri dari kenyataan dan tantangan-tantangan yang dewasa ini sedang meliputi kita, terutama keadaan perekonomian yang sungguh berat.

Tanpa memiliki tujuan bersama yang besar dan berat tetapi menggairahkan, dan tanpa menyadari betapa besarnya tantangan yang kita hadapi dalam mencapai tujuan tersebut, maka setiap kekecewaan, ujian, hambatan dan rintangan dapat melahirkan sikap putus asa, sinis dan pesimis. Sebaliknya, setiap keberhasilan jangan sampai membuat kita lupa diri, takabur dan menghambur-hamburkan dana dan daya dengan melupakan prioritas-prioritas yang sangat mendesak.

Dengan memiliki tujuan jangka panjang yang besar dan berat tetapi menggairahkan tadi, dan dengan menyadari akan beratnya tantangan yang membentang di hadapan kita, maka kita semua akan selalu bertemu dalam pemikiran bersama dan kegiatan bersama. Ini jelas merupakan unsur yang akan lebih memperkuat lagi persatuan dan kesatuan kita, kegairahan dan dinamika kehidupan kita.

Seperti yang saya katakan di hadapan Sidang Dewan yang terhormat tepat setahun yang lalu, di dalam melaksanakan dan melanjutkan perjuangan pembangunan ini kita tetap bertekad untuk berdiri di atas kenyataan dengan kedua belah kaki kita. Tidak ada niat pada kita untuk menutup mata atau melarikan diri dari kenyataan yang sedang dan akan menghadapkan kita dengan ujian-ujian yang besar dan berat; termasuk ujian dalam bidang ekonomi dan moneter yang kita alami dewasa ini serta penyediaan lapangan kerja bagi angkatan-angkatan kerja yang akan memasuki pasaran kerja di tahun-tahun yang akan datang dalam jumlah yang sangat besar.

Tetapi kita tidak boleh tenggelam dalam pesimisme apalagi sinisme berhubung dengan kenyataan adanya ujian besar dan berat itu. Di samping berdiri kokoh di atas kedua belah kaki kita, maka kita tetap memandang ke depan dengan penuh harapan dan kesetiaan kepada Pancasila.

Kita memang memiliki harapan itu, sebab selama ini pembangunan yang kita laksanakan di berbagai bidang mengalami banyak kemajuan. Kemajuan-kemajuan tadi memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua untuk terus melangkah ke depan bersama-sama.

Tahun ini langkah ke depan yang penting telah kita lakukan di bidang politik, ialah dengan melaksanakan pemilihan umum.

Seperti tadi telah saya singgung, jika kita berbicara mengenai kerangka landasan, maka kerangka landasan itu tidak saja dalam bidang ekonomi akan tetapi juga di bidang politik, dan bidang-bidang lainnya.

Dengan melaksanakan pemilihan umum

PUSRI, ADALAH PRODUSEN PUPUK UREA PERTAMA DI INDONESIA, DENGAN KAPASITAS 1,6 JUTA TON PER TAHUN

PUSRI, ADALAH DISTRIBUTOR SEGALA MACAM JENIS PUPUK KEPADA SETIAP PETANI SAMPAI KESELURUH PELOSOK DESA DI INDONESIA

PUSRI KELUARGA PETANI

PUSRI

P.T. PUPUK SRIWIDJAJA

KANTOR PUSAT & PUSAT PRODUKSI
Jln. Mayor Zen
Telp. : 25855 – 21244
Telex : 27117
PALEMBANG 30118
INDONESIA

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA
Jln. Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya
PO Box : 2371
Telp. : 5481208
Telex : 44460 – 44249
Jakarta – Indonesia
Kawat : PUSRI JAKARTA.

Digitized by Google

yang baru lalu berarti kita telah mengalami empat kali putaran siklus kepemimpinan nasional di bawah naungan Undang-Undang Dasar '45. Ini menunjukkan usaha kita yang sungguh-sungguh untuk terus menghidupkan, mengembangkan, memperkaya dan menyegarkan kehidupan demokrasi dan kehidupan konstitusional kita.

Pesta demokrasi itu telah berlangsung dalam suasana yang penuh kegairahan dari ketiga peserta pemilihan umum dan dari seluruh rakyat Indonesia. Kita semua berbahagia karena pemilihan umum itu telah berjalan lebih tertib dan lebih aman jika kita banding dengan pemilihan umum sebelumnya pada tahun 1982. Suasana penuh kegairahan, tertib dan aman itu menunjukkan kualitas yang makin tinggi dari pesta demokrasi kita. Ini merupakan sumbangan yang penting bagi pelaksanaan pemilihan umum di masa-masa yang akan datang, yang kita harapkan bertambah bermutu dan bertambah baik lagi.

Sama halnya dengan pemilihan umum di negara-negara lain dengan sistem politik apapun, setiap kali diadakan pemilihan umum tentu ada peserta yang mendapat suara kepercayaan rakyat yang lebih besar jika dibanding dengan peserta yang lain. Hal ini juga terjadi pada pemilihan umum yang baru saja kita selenggarakan dalam tahun ini.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, dalam negara kekeluargaan kita, maka kita tidak berbicara tentang siapa yang kalah atau siapa yang menang. Jika kita harus berbicara tentang kemenangan dalam pemilihan umum ini, maka yang menang adalah kita semua; sebab, dengan menyelenggarakan pemilihan umum itu berarti kita semua maju selangkah lagi dalam mengembangkan dan makin mendewasakan kehidupan politik kita dalam rangka mengembangkan demokrasi Pancasila.

Pengembangan dan pendewasaan kehidupan politik itu memang sangat mewarnai suasana pemilihan umum kita kali ini.

Pemilihan umum kali ini mempunyai makna yang khusus, ialah :

Pertama, merupakan pemilihan umum yang pertama sejak kita menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, pemilihan umum pertama yang diikuti oleh lapisan besar kaum muda.

Ketiga, pemilihan umum yang kita lakukan dalam rangka peletakan kerangka landasan di bidang politik untuk kita mantapkan dalam Repelita ke-V nanti.

Karena itu segala pengalaman dan suasana batin dari pemilihan umum yang baru lalu akan besar pengaruhnya dan jauh jangkauannya bagi pelaksanaan pemilihan umum di masa-masa yang akan datang.

Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka semua generasi, lapisan, golongan dan kekuatan bangsa telah menyatu dengan dasar, ideologi dan cita-cita bangsa dan negaranya. Dengan demikian, dalam pemilihan-pemilihan umum sepanjang masa nanti, dan juga dalam kehidupan bangsa dan negara kita umumnya, maka semua generasi, semua lapisan, semua golongan dan semua kekuatan bangsa kita Insya Allah akan terhindar selama-lamanya dari konflik batin dan ketegangan-ketegangan yang menjadi sumber keretakan dan luka-luka bangsa.

Dengan tidak menutup mata atas masih timbulnya penyimpangan-penyimpangan di sana-sini dalam pelaksanaan kampanye, maka pengalaman sangat berharga yang dapat kita tarik dari pemilihan umum yang baru lalu adalah, bahwa semua peserta pemilihan umum telah berusaha sebaik-baiknya untuk menawarkan program-program yang terbaik dan tokoh-tokoh yang terbaik kepada bangsanya.

Pengalaman itu juga mengajarkan kepada kita bahwa kampanye pemilihan umum yang menitik beratkan kepada program-program nyata yang ditawarkan oleh peserta pemilihan umum ternyata tetap menarik dan semarak. Tidak kalah menariknya jika dibanding dengan kampanye yang berbau ideologi golongan atau asas ciri golongan, yang hanya menimbulkan ketegangan dan keretakan.

Semuanya itu meyakinkan dan melegakan kita semua bahwa penegasan kita mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah keputusan bersejarah yang sangat dalam maknanya dan akan sangat jauh jangkauannya bagi kebaikan kehidupan bangsa kita sepanjang masa.

Kita bersama-sama telah membuktikan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas sama sekali tidak membatasi ruang gerak kehidupan politik dan demokrasi kita, sama sekali tidak membelenggu gagasan-gagasan kita, sama sekali tidak membatasi ruang gerak kehidupan agama kita, serta sama sekali tidak membatasi ruang gerak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sepanjang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum yang berlaku yang dibentuk secara demokratis dan konstitusional berdasar Undang-Undang Dasar 1945.

Sebaliknya, dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas, pelaksanaan demokrasi kita justru mendapat arah yang kreatif, positif dan dinamis; sebab justru memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita semua dalam memberi sumbangan bagi pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Semuanya itu berarti bahwa kita telah mulai meninggalkan buat selama-lamanya tingkah laku dan budaya politik lama, yang menganggap politik sebagai adu kekuatan, pembentukan kekuatan dan pengerahan kekuatan untuk berhadap-hadapan dengan golongan lainnya, walaupun golongan itu adalah keluarga besar bangsanya sendiri. Sebaliknya, kita justru merasa memasuki suasana baru dan segar, ialah tingkah laku dan budaya politik yang bersuasana kekeluargaan dan lebih bermartabat. Tingkah laku dan budaya politik yang demikian merupakan sumbangan besar dalam pengembangan sistem demokrasi Pancasila di masa datang.

Tingkah laku politik dan budaya politik yang demikian itulah yang akan kita kembangkan terus dan kita berharap agar dalam Sidang Umum MPR yang akan datang — terutama dalam menetapkan GBHN 1988 — arah dan ciri budaya politik yang demikian itu makin jelas dan terwujud.

Dalam rangka semuanya tadi, maka saya ingin menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang dalam kepada Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia atas sumbangan besar yang telah dibuktikan

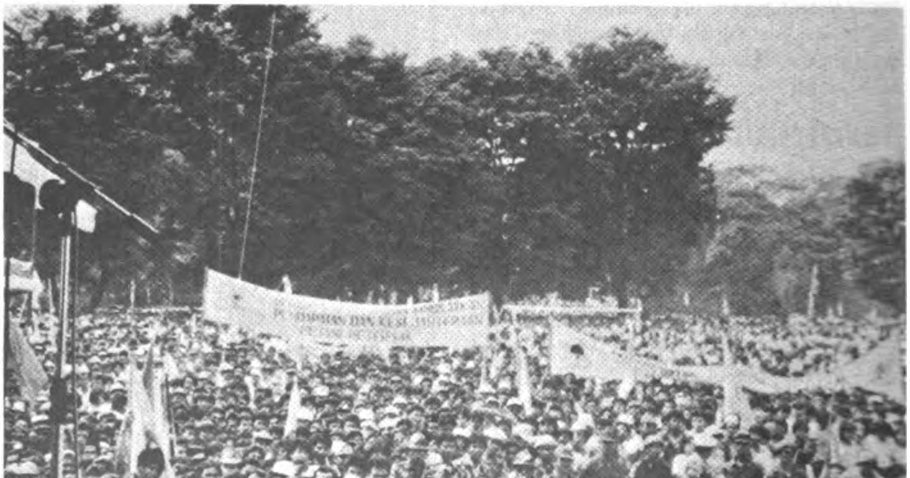

Pesta Demokrasi berlangsung penuh kegairahan

Digitized by Google

dalam pelaksanaan pemilihan umum yang baru lalu.

Dengan lega kita dapat mengatakan, bahwa di bidang ideologi dan politik kita telah berhasil meletakkan kerangka landasan yang kita perlukan.

Langkah penting berikutnya adalah agar semua kekuatan politik dan semua organisasi kemasyarakatan menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam bidang masing-masing dengan program-program yang akan diperjuangkan dalam Sidang Umum MPR yang akan datang dan selanjutnya melaksanakan program umum nasional berupa GBHN hasil Sidang Umum MPR tahun depan.

Untuk itu semua kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan pada waktunya perlu menyusun kembali program masing-masing dalam rangka melaksanakan GBHN yang akan ditetapkan MPR nanti.

Jika semua kekuatan sosial politik dan semua organisasi kemasyarakatan telah menyusun dan melaksanakan program masing-masing dalam rangka pelaksanaan GBHN, maka gerak dan gairah seluruh kekuatan bangsa kita akan tertuju kepada pelaksanaan garis-garis besar dari haluan negara tersebut. Ini akan merupakan langkah penting dalam usaha kita untuk mengembangkan tanggung jawab bersama dalam sistem demokrasi Pancasila.

Pemilihan umum yang berjalan bergairah, lancar dan aman itu tidak terlepas dari pelaksanaan tugas aparatur penyelenggara yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Untuk itu saya dan kita semua menyampaikan penghargaan yang besar.

Demikian pula, terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada ABRI yang telah bersikap bijaksana namun tegas, sehingga luapan kegairahan dalam pemilihan umum tersalur secara wajar dan tidak menjurus pada ketegangan. Hal ini sangat melegakan hati kita semua, karena mencerminkan makin matangnya pelaksanaan dwi fungsi ABRI dalam memikul tugas sejarah sebagai kekuatan stabilisator dan dinamisator.

Di masa-masa datang kita semua berharap agar peranan dwi fungsi ABRI itu terus tambah berbobot, terutama sebagai kekuatan yang menjaga dan sekaligus menyegarkan demokrasi Pancasila. Kita percaya akan hal itu sebab sejarah membuktikan bahwa sejak kelahirannya ABRI adalah kekuatan utama pendukung serta pembela ideologi negara, Pancasila. Sejarah kelak akan membuktikan juga ketidakbenaran anggapan bahwa peranan ABRI tidak akan dapat mendorong pertumbuhan demokrasi.

Tradisi ABRI sebagai kekuatan utama pendukung serta pembela ideologi negara itu bertambah penting artinya, sebab di kalangan ABRI hampir rampung secara tuntas peralihan generasi. Generasi '45 di kalangan ABRI telah berhasil menanamkan tradisi kejuangan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian kita semua berharap agar peranan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator di masa-masa yang akan datang akan makin mendorong mantapnya sistem demokrasi Pancasila dalam tahap tinggal landas pembangunan bangsa kita.

Bersamaan dengan semuanya tadi, tugas ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan juga telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Segala langkah dan upaya telah dilakukan, sehingga di atas landasan tradisi kejuangan, ABRI tetap kita bangun menjadi kekuatan pertahanan keamanan yang moderen sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman.

Peranan dwi fungsi ABRI yang setepat-tepatnya itu telah makin memantapkan stabilitas nasional yang dinamis, seperti yang telah kita rasakan.

DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA
42
ASSOSIASI BAHAN BAKU IMPORT MAKANAN TERNAK INDONESIA
ASBIMTI
Sekretariat :Jl. Hayam Wuruk 103-104
Telp.: 6295185-6297432-6295291
Jakarta Barat.

Digitized by Google

Arah selanjutnya yang kita tempuh adalah memelihara stabilitas yang tetap memberi ruang gerak bagi kreativitas dan prakarsa masyarakat, sehingga stabilitas itu mampu menyalurkan gerak masyarakat secara dinamis. Di lain pihak kita semua harus menjaga jangan sampai dinamika itu bergerak tanpa arah sehingga mengancam stabilitas.

Dalam memantapkan stabilitas yang dinamis tadi, pers dapat menyumbangkan peranan yang positif. Untuk itu kebebasan pers perlu selalu diimbangi dengan tanggung jawab yang memadai.

Kita merasa lega bahwa dalam arus besar stabilitas yang dinamis demikian tadi kehidupan kemasyarakatan, kebudayaan dan keagamaan kita terus mengalami penyesuaian-penyesuaian dan pembaharuan-pembaharuan, sehingga dapat menampung gerak dinamika masyarakat yang sedang membangun. Dengan semua pihak dan kalangan makin mendalami, menghayati dan mengamalkan Pancasila, kita merasakan segala penyesuaian dan pembaharuan tadi berlangsung secara positif, tanpa ketegangan dan pertentangan. Dibanding dengan gejolak dan kepahitan yang dialami negara-negara lain dalam hal ini, kita sungguh beruntung.

Yang juga membahagiakan kita semua adalah berkembangnya kehidupan keagamaan yang makin dalam, makin terasanya kerukunan hidup dalam umat seagama dan makin akrabnya kerukunan hidup antara umat dari berbagai agama yang berlain-lainan.

Perkembangan-perkembangan yang positif dalam kehidupan politik, kemasyarakatan, kebudayaan dan keagamaan tadi, menambah kuatnya ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional yang demikian itu besar sekali sumbangannya dalam suasana kita sedang menghadapi keadaan ekonomi yang berat dewasa ini.

Ada Tanda-tanda Membaik

Seperti tahun-tahun yang lalu, tantangan dan ujian berat memang tetap kita hadapi di bidang ekonomi.

Tekanan yang sangat berat itu kita rasakan dalam tahun 1986. Tahun 1987 ini ada tanda-tanda bahwa keadaan ekonomi kita tidak seberat tahun lalu.

Kendatipun demikian kewaspadaan kita harus tetap tinggi, keprihatinan harus kita buktikan, kerja keras harus kita lakukan, dan segala langkah harus kita perhitungkan sematang-matangnya.

Setelah mengalami sukses-sukses awal dalam Repelita I, II dan III, memasuki Repelita IV tekanan dan tantangan berat mulai kita rasakan. Sebagian tantangan dan ujian itu datang dari luar sebagai akibat perkembangan ekonomi dunia yang masih saja serba tidak menentu.

Walaupun ada tanda-tanda awal dari perbaikan, namun laju pertumbuhan ekonomi negara-negara industri tidak seperti yang diharapkan, sehingga kurang mendorong perkembangan ekonomi dunia, terutama ekonomi negara-negara yang sedang membangun. Sementara itu sejumlah negara industri maju makin mengetatkan pelaksanaan proteksionisme untuk melindungi kepentingan sempit sementara pihak di negara masing-masing.

Ketegangan dan kegawatan yang sewaktu-waktu mendadak muncul di berbagai bagian dunia, tidak saja membawa pengaruh pada keamanan dunia, akan tetapi langsung mempengaruhi perkembangan ekonomi. Semuanya ini membuat perekonomian dunia terasa makin tidak menentu.

Sebagai bagian dari perekonomian dunia, mau tidak mau, perekonomian kita kena pengaruhnya. Usaha kita adalah mengurangi sampai batas yang terkecil pengaruh-pengaruh buruk terhadap perekonomian kita di satu pihak, dan di lain pihak, kita berusaha agar selalu ada titik terang ke arah perbaikan.

Kepada negara-negara industri maju kita tidak henti-hentinya mengingatkan akan tanggung jawab dan kemampuan mereka untuk mengatasi keadaan yang tidak menguntungkan negara manapun juga. Dunia yang makin menjadi satu telah membawa semua bangsa dan negara saling membutuhkan. Kesulitan yang dialami suatu negara menjadi pangkal kesulitan negara lain, kawasan lain, malahan kesulitan seluruh dunia. Sebaliknya, kemajuan suatu negara menjadi unsur yang mendorong kemajuan negara lain, kawasan lain dan malahan dunia secara keseluruhan.

Apakah kita masih harus belajar lagi dari pengalaman pahit, sehingga dunia ditimpa oleh malapetaka yang tidak tertolong lagi buat selama-lamanya.

Pengalaman mengajarkan kepada kita, bahwa proteksionisme yang dilakukan oleh negara manapun bukan merupakan jawaban untuk mengatasi kesulitan masing-masing negara, lebih-lebih dalam keadaan perekonomian dunia yang makin menjadi satu ini.

Proteksionisme oleh negara-negara maju mengakibatkan terhalangnya ekspor negara-negara lain, terlebih lagi ekspor negara-negara yang sedang membangun. Bagi negara yang sedang membangun seperti negara kita, ekspor bukan hanya berarti sumber penerimaan devisa, akan tetapi berarti dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi berjuta-juta manusia. Jika pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sedang membangun tertekan, maka kemampuannya untuk ikut menggerakkan perdagangan dunia juga akan semakin lemah. Pada gilirannya ini berarti terbatasnya pula perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara industri maju.

Bagi kita yang sedang berada pada tahap-tahap awal pembangunan, peningkatan penerimaan devisa merupakan kebutuhan yang mutlak. Sumber penerimaan devisa kita adalah dari ekspor migas, ekspor non migas dan pariwisata.

Harga minyak bumi di pasaran dunia memang telah melewati titik terendah. Akhir-akhir ini malahan naik, di atas 18 dolar Amerika setiap barel yang menjadi tingkat harga yang disepakati oleh negara-negara anggota OPEC. Namun, tingkat harga yang tinggi itu tampaknya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat sementara, sehingga masih memerlukan waktu untuk mengamati perkembangan apakah tingkat harga tadi cukup mantap. Dalam pada itu harga komoditi-komoditi ekspor lainnya di pasaran dunia juga masih tetap lemah, walaupun akhir-akhir ini ada tanda-tanda cenderung membaik.

Dengan demikian tantangan pokok kita dalam jangka pendek ini adalah, di satu pihak, kita harus benar-bnar berhasil meningkatkan penerimaan devisa sebesar-besarnya; dan di lain pihak, kita harus menggunakan devisa itu setepat-tepatnya agar devisa yang sangat langka itu benar-benar dipergunakan untuk mendukung pembangunan, khususnya untuk menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja yang dewasa ini sangat mendesak.

Dalam situasi yang penuh keprihatinan seperti itu, ada diantara kita yang bertindak secara tidak bertanggungjawab tanpa memikirkan keselamatan pembangunan nasional kita. Ada diantara mereka yang bernafsu untuk membeli devisa, semata-mata untuk tujuan-tujuan keuntungan sendiri. Inilah yang menjadi sebab mengapa dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi pembelian devisa dalam jumlah yang cukup besar.

Masyarakat kita juga sempat terombang-ambing oleh desas-desus yang tidak jelas ujung pangkalnya dan tidak beralasan. Kegelisahan dan ketidakpastian bertambah, karena ada analisa-analisa dan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh sementara pengamat yang tidak didasarkan atas data yang lengkap dan menyeluruh, yang seolah-olah hanya didorong oleh keinginan untuk menonjolkan kepintarannya.

Saya menghargai pandangan-pandangan dari manapun yang bertujuan untuk memikirkan secara bertanggungjawab berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Namun adalah lebih bijaksana dan lebih mengenai tujuannya apabila pandangan itu dipertimbangkan masak-masak terlebih dahulu akibat-akibatnya yang negatif, sebelum dilontarkan ke tengah-tengah masyarakat.

Gejala pembelian devisa akhir-akhir ini lebih menjurus kepada spekulasi daripada kebutuhan nyata. Oleh karena itu Pemerintah telah bertindak dengan tegas untuk mematahkan kekuatan spekulasi secara tuntas, sebab jika dibiarkan berkepanjangan akhirnya dapat menghancurkan segala sesuatu yang dengan susah payah telah kita capai dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memelihara gerak pembangunan.

Semua pihak hendaknya menyadari bahwa perekonomian kita merupakan satu kesatuan. Gangguan pada satu sektor dapat menjalar ke sektor-sektor lain, yang pada akhirnya hanya akan merugikan kita

Digitized by Google

semua.

Di lapangan ekonomi pun kita perlukan semangat kebangsaan, semangat juang, semangat kebersamaan. Yang kita dahulukan adalah kepentingan kita secara keseluruhan, bukan keuntungan pribadi atau kelompok kita sendiri.

Keadaan ekonomi kita memang berat. Namun ketahanan ekonomi Indonesia yang kita pupuk selama bertahun-tahun sebelumnya ternyata cukup kuat sehingga mampu meringankan beban yang berat dewasa ini. Bahkan lebih dari itu, kita juga masih berhasil mencapai berbagai kemajuan.

Daya tahan ekonomi dan kemajuan-kemajuan itu tampak dalam berbagai bidang, yang garis-garis besarnya akan saya jelaskan.

Inflasi dapat tetap terkendali, sehingga dalam tahun 1986 yang lalu mencapai sekitar 9%. Tingkat inflasi itu masih cukup untuk menjaga kestabilan ekonomi dan memelihara gerak pembangunan.

Dalam pada itu, bidang pertanian yang menjadi pusat medan juang ekonomi kita mencapai kemajuan-kemajuan yang besar. Tingkat swasembada beras yang telah kita capai beberapa waktu yang lalu tetap dapat kita pertahankan. Selama beberapa tahun terakhir produksi beras kita terus meningkat, dan mencapai lebih dari 26,7 juta ton dalam tahun 1986. Namun ada hal yang perlu kita waspadai, ialah produksi beras tahun 1986 itu hanya naik 0,9% jika dibanding dengan produksi dalam tahun 1985. Ini berarti kenaikan tadi berada di bawah kenaikan rata-rata penduduk kita yang sebesar sekitar 2%. Hal ini menyadarkan kita bahwa pembangunan pertanian tetap harus mendapatkan perhatian yang besar. Dalam rangka inilah maka kita harus terus meningkatkan produksi pertanian dengan menggerakkan berbagai usaha.

Pembangunan pertanian ini telah dapat meningkatkan penghasilan kaum tani yang merupakan lapisan terbesar masyarakat kita, memperluas kesempatan kerja, dan menggerakkan ekonomi di pedesaan. Inilah sebabnya mengapa tekanan ekonomi yang kita rasakan sangat berat pada tingkat nasional, pengaruhnya terhadap lapisan terbesar masyarakat ternyata lebih terbatas. Di samping itu sumbangan penting sektor pertanian terhadap perekonomian kita adalah ekspor hasil-hasil pertanian dan perikanan, yang juga menunjukkan tanda-tanda yang memberi harapan.

Kemampuan kita untuk berswasembada beras bagi penduduk Indonesia yang 170 juta besarnya itu merupakan hasil kerja keras yang sangat panjang, melibatkan banyak sekali pihak dan kegiatan. Yang tidak kalah penting adalah bahwa pembangunan bidang pertanian itu telah membangkitkan minat, kesadaran dan kemampuan petani untuk bercocok tanam secara lebih moderen dan mengenalkan mereka dengan pengelolaan kegiatan pertanian secara moderen pula. Ini berarti bahwa pembangunan pertanian telah menyentuh dan menggerakkan pembangunan manusia tani yang merupakan bagian terbesar manusia Indonesia. Kita percaya bahwa sekali kemampuan petani ini bangkit, maka kebangkitan itu akan merupakan kekuatan yang makin besar di masa datang dalam usaha kita untuk terus memperkokoh pembangunan di segala bidang.

Itulah sebabnya, kalangan dunia internasional sangat menghormati keberhasilan petani Indonesia dalam meningkatkan produksi beras. Kehormatan itu kita terima dengan rendah hati dan tanggung jawab yang lebih besar.

Sejalan dengan kemajuan pertanian, perkembangan dan pertumbuhan industri kita mengalami kemajuan yang membesarkan hati.

Tanda yang paling kuat adalah makin besarnya sumbangan industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak tahun 1984 laju pertumbuhan industri dapat melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Tanda penting lainnya adalah terobosan yang berhasil dilakukan oleh sejumlah industri kita ke pasaran dunia. Dewasa ini, misalnya, kita menjadi negara pengekspor kayu lapis terbesar di dunia. Berbagai jenis hasil industri kita yang makin kuat memasuki pasaran dunia antara lain adalah tekstil dan pakaian jadi, produk-produk industri kimia seperti semen, pupuk, kertas, ban dan lain sebagainya. Demikian juga produk kita dari industri logam dasar seperti besi baja dan lainnya.

Kemajuan serupa juga kita alami dalam hasil industri kecil dan kerajinan, sehingga mulai membuat terobosan pula ke pasaran internasional.

Secara singkat, semuanya itu menggambarkan terjadinya kemajuan dalam perkembangan industri kita yang membuka harapan di masa datang. Jika dahulu mutu dan harga barang-barang industri kita kalah dengan barang impor, maka kini keadaannya sudah berlainan sama sekali. Pada gilirannya hal itu telah membangkitkan kepercayaan dan kebanggaan masyarakat kita untuk menggunakan produksi negerinya sendiri. Perkembangan ini telah mendorong industri kita berjalan mendekati kapasitasnya yang penuh, sehingga makin meningkat pula efisiensinya secara nasional.

Kemajuan penting lainnya tampak makin nyata dalam kemampuan rancang bangun dan rekayasa industri. Sekarang kita mulai mampu membuat komponen-komponen mesin, peralatan dan mem-

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ALAMAT : JL: LAKSDA ADISUCIPTO , TELP' 2474 YOGYAKARTA

SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN

IAIN SUNAN KALIJAGA

, MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERSELENGGARA NYA
PEMILU 1987 DENGAN AMAN TERTIB DAN LANCAR SERTA MENYAMBUT
GEMBIRA SUKSES DAN KEMENANGAN YANG DICAPAI G O L K A R.

Digitized by Google

bangun pabrik-pabrik tertentu, mulai dari pembuatan mesin dan peralatan yang menggunakan teknologi sederhana sampai teknologi maju.

Dalam pada itu kemampuan kewiraswastaan, profesionalisme, penguasaan teknologi, ketrampilan pengelolaan industri dan lain-lainnya juga berkembang pesat.

Industri hulu dan industri hilir makin tumbuh; dan juga makin berkembang hubungan yang erat antara industri hulu dan industri hilir itu. Demikian pula mulai terbangun hubungan yang saling mendukung antara industri besar, industri menengah dan industri kecil serta kerajinan.

Semuanya tadi merupakan kemajuan-kemajuan besar yang akan menjadi dasar dan kekuatan kita untuk memasuki tahap pembangunan industri besar-besaran di masa datang. Industrialisasi bagi kita bukan hanya berarti pembangunan pabrik-pabrik saja, akan tetapi pembangunan masyarakat industri dalam arti yang seluas-luasnya.

Perlu kiranya dikemukakan bahwa kemajuan-kemajuan di bidang perindustrian khususnya dan kelangsungan kehidupan ekonomi nasional kita pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan Pemerintah akhir-akhir ini dengan mengadakan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka mendorong dan memperlancar ekspor dan impor, penanaman modal dan kegiatan ekonomi pada umumnya, yang pada dasarnya untuk memberikan keleluasaan kepada dunia swasta untuk meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan ekonomi nasional yang sedang menghadapi tantangan yang berat itu.

Disamping langkah-langkah yang telah diambil seperti : Inpres No. 4 tahun 1985, kebijaksanaan 6 Mei 1986, kebijaksanaan 25 Oktober 1986, langkah-langkah mempermudah investasi dan perluasan dibidang industri, maka Pemerintah akan terus mempelajari dan meneliti langkah-langkah deregulasi apa lagi yang masih dapat dan perlu diambil dalam rangka memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Dalam rangka ini Pemerintah berharap agar dunia usaha khususnya dapat memanfaatkan langkah-langkah deregulasi itu sebaik-baiknya dan disamping itu Pemerintah juga selalu membuka diri untuk menerima saran-saran yang konstruktif dari masyarakat luas dalam rangka mengembangkan lebih lanjut kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ini.

Makin Baik, Meski Masih Ada Kekurangan

Kemajuan-kemajuan dalam pembangunan pertanian dan industri tadi dapat kita capai berkat pembangunan prasarana ekonomi yang selama ini telah kita lakukan.

Kita telah membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah produksi dan pemasaran, yang memperlancar hubungan ekonomi dan lalu lintas masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Kita telah membangun bendungan-bendungan dan irigasi yang mengairi sawah-sawah. Kita telah membangun pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang menggerakkan pabrik-pabrik, industri-industri dan menerangi rumah-rumah; juga mulai menerangi desa-desa. Kita telah membangun pelabuhan udara dan pelabuhan laut, malahan sampai ke daerah-daerah terpencil melalui penerbangan perintis dan pelayaran perintis. Kita telah membangun jaringan telekomunikasi, yang dapat menghubungkan satu kota ke kota lain, malahan sampai ke seluruh dunia.

Dalam rangka melaksanakan Trilogi Pembangunan — khususnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya — dan sekaligus untuk mengembangkan demokrasi ekonomi, kita akan terus menggerakkan dan mengembangkan kehidupan koperasi. Meskipun dalam pembangunan koperasi ini telah banyak dicapai kemajuan, namun masih banyak lagi yang harus dibenahi untuk memperkuat dan makin memasyarakatkan koperasi, sehingga benar-benar menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar '45.

Semua kegiatan pembangunan tadi pada akhirnya tertuju kepada peningkatan kesejahteraan rakyat; yang makin hari makin bertambah baik.

Semua daerah dan semua desa kita bangun, baik melalui program-program Inpres maupun atas swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri.

Dewasa ini muncul lembaga-lembaga swadaya masyarakat, yang mencerminkan kesadaran masyarakat untuk menanggulangi berbagai masalah dengan kreativitas dan prakarsa mereka sendiri. Gerakan PKK dari kaum Ibu di pedesaan dan di daerah perkotaan telah banyak memberi sumbangan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia juga terus kita perluas dan terus kita dekatkan ke tengah-tengah masyarakat, melalui Puskesmas-puskesmas dan Posyandu. Perumahan rakyat kita bangun, kampung-kampung terus kita perbaiki dan desa-desa kita pugar sehingga kehidupan masyarakat terasa lebih sehat dan segar.

Jika beberapa waktu yang lalu semua anak telah tertampung di sekolah-sekolah dasar, maka perhatian mulai kita berikan pada perluasan sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama; disamping usaha kita untuk terus mengembangkan pendidikan lanjutan tingkat atas sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Berbagai kampus universitas di Indonesia ini telah mulai ditingkatkan kemampuan dan fasilitasnya.

Tanggung jawab kita kepada kebahagiaan generasi yang akan datang telah membangkitkan kesadaran kita agar dalam melaksanakan pembangunan masa sekarang kita tetap menjaga terpeliharanya sumber alam dan lingkungan hidup.

Tanggung jawab terhadap masa depan itu pula yang mendorong kita untuk menyiapkan dan mengantarkan generasi muda dalam memikul tanggung jawab untuk melanjutkan, meningkatkan, memperluas dan memperdalam makna pembangunan nasional kita.

Tanggung jawab terhadap tantangan-tantangan besar pembangunan masa datang itu pula telah menggerakkan tekad kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita menyadari bahwa penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan menjadi kunci apakah kita akan dapat hidup terhormat di tengah-tengah kemajuan besar yang akan menjadi ciri abad ke-21, yang akan kita masuki hanya dalam tempo 13 tahun lagi dari sekarang.

Demikianlah secara sekilas kemajuan-kemajuan yang telah kita capai pada saat kita berada di hari-hari peringatan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-42 sekarang ini.

Seperti tadi saya katakan, kita pun menyadari bahwa banyak kekurangan dan kelemahan yang masih kita rasakan sampai sekarang. Untuk itu kita harus meningkatkan disiplin nasional di segala bidang, makin membulatkan tekad untuk membangun, makin memperbesar kebebasan yang bertanggungjawab, makin bekerja lebih keras, makin meningkatkan efisiensi dan produktivitas di segala bidang.

Kita juga menyadari betapa besar masalah-masalah sosial ekonomi yang harus kita tanggulangi; seperti perluasan lapangan kerja terutama bagi golongan muda, perluasan dan perbaikan pendidikan, pembangunan perumahan dan lain sebagainya.

Kita juga menyadari bahwa tanggung jawab kemajuan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang pada akhirnya, sepenuhnya berada di pundak kita sendiri.

Ini berarti kita harus mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan yang bisa kita kerahkan. Salah satu jalan ke arah itu ialah peningkatan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, terutama melalui perpajakan. Sejak kita memperbaharui sistem perpajakan di tahun 1983, maka penerimaan dalam negeri yang berasal dari non migas memang telah bertambah besar. Di waktu-waktu yang akan datang, tidak ada jalan lain, kita harus terus berusaha agar kesadaran membayar pajak benar-benar mendarah daging dalam masyarakat kita.

Harus tergugah hati kita, bahwa membayar pajak bukan hanya karena terpaksa, melainkan karena kesadaran bahwa dengan membayar pajak itulah kita dapat membangun masyarakat yang memberi kemajuan dan kesejahteraan kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita semuanya.

Sumber pembiayaan pembangunan lainnya adalah penanaman modal dalam negeri. Kita berbesar hati melihat perkembangan yang menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri ini dari tahun ke tahun bertambah besar jumlah

Digitized by Google

Struktur ekonomi yang seimbang, bidang industri yang kuat harus didukung pertanian yang tangguh

modal yang ditanam dan bertambah luas pula bidang yang digarap. Sehubungan dengan itu saya serukan kepada dunia usaha kita, khususnya para pemilik modal, untuk memanfaatkan sebesar-besarnya kesempatan yang terbuka di negeri kita. Saya yakin bahwa kesempatan tersebut tidak kurang menarik daripada kesempatan di negara-negara lain. Apabila tidak kita manfaatkan sendiri maka akan dimanfaatkan oleh dunia usaha dan pemilik modal dari negeri-negeri lain.

Dalam pada itu kita juga masih harus terus mengobarkan semangat patriotisme di bidang ekonomi dengan makin mencintai, mengutamakan dan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, yang telah makin banyak mampu kita hasilkan dengan mutu dan harga yang cukup bersaing.

Kita memang masih memerlukan bantuan dari luar. Bantuan itu bukan sembarang bantuan, melainkan bantuan dengan syarat-syarat yang ringan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan kita. Akan tetapi, bantuan yang demikian itu hanya mungkin kita terima, jika kita membuktikan bahwa bantuan itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk membangun hal-hal yang berguna bagi peningkatan kehidupan rakyat. Itulah yang memang kita kerjakan. Karena itu pula bantuan dari luar negeri, terutama bantuan dari IGGI, tetap dapat kita peroleh selama ini.

Bantuan dari luar itu mencerminkan kepercayaan dunia luas kepada kita. Mereka percaya bahwa bantuan itu telah kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperbesar kemampuan kita sendiri; bukan membuat kita tergantung selamanya dari luar.

Dalam kerangka regional, kita kembangkan terus kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN, yang makin hari makin mantap.

Dalam usianya yang 20 tahun ini kita menyambut KTT ASEAN yang akan datang dengan tekad untuk terus menyegarkan dan memperkuat wadah kerjasama regional kita itu.

Kita yakin bahwa kerjasama regional yang konstruktif dapat memberi sumbangan bagi kemajuan, kesejahteraan dan ketenteraman dunia. Sementara dunia yang menjadi dambaan umat manusia tadi masih jauh dari kenyataan, maka akhir-akhir ini keadaan bertambah mengundang kegawatan karena munculnya berbagai perkembangan yang rumit di Timur Tengah. Kita menyerukan agar semua pihak menahan diri, sehingga keadaan tidak menjadi lebih buruk.

Itulah renungan kita ke belakang dan pandangan kita jauh ke depan pada hari ini. Kita melihat dengan jelas tempat kita berpijak hari ini dalam perjalanan sejarah kita mulai dari Proklamasi Kemerdekaan sampai babak akhir dari usaha kita untuk meletakkan landasan pembangunan nasional menuju tahap tinggal landas nanti.

Dua kali 21 tahun yang lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya dengan tekad membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Selama kurun waktu 21 tahun yang pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan, maka seluruh perhatian, waktu, pikiran, perjuangan dan pengorbanan bangsa kita ditujukan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila terhadap bermacam-macam marabahaya dan ancaman.

Selama kurun waktu 21 tahun kedua setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita telah melaksanakan tahap awal pembangunan nasional kita, memasyarakatkan Pancasila secara luas dan memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebab itu, sekarang, 42 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita dapat mengatakan bahwa dengan segala kekurangannya, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang merdeka, bersatu dan berdaulat telah berdiri tegak di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini.

Seperti saya katakan tadi, tekad kita adalah melanjutkan perjuangan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat itu terus tumbuh dan berkembang sehingga memberi keadilan dan kemakmuran kepada kita semua.

Untuk mencapai keadilan dan kemakmuran itulah kita bertekad melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dengan meletakkan landasan yang kokoh kuat menuju tinggal landas menjelang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

Kita menyadari bahwa meningkatnya aspirasi dan harapan-harapan masyarakat kita di masa datang, di tengah-tengah perkembangan kemajuan dunia dan perkembangan ekonomi dunia yang belum menentu, akan menghadapkan kita kepada banyak ujian besar dan berat.

Kita bangga mengenai banyak hal yang telah kita capai selama kemerdekaan hingga hari ini. Kita menyadari bahwa sejarah kita tidak bebas dari kekurangan dan kelemahan. Kita menarik manfaat dari sejarah kita itu.

Kita prihatin akan ujian besar dan berat yang sedang dan akan kita hadapi. Tetapi ujian itu tidak membuat kita bimbang atau kehilangan semangat.

Dengan bekerja makin keras, dan dengan memohon bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, marilah kita dengan kepala tegak mengarahkan pandangan ke depan dengan tekad untuk terus melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan ini dengan pelaksanaan pembangunan menuju cita-cita bersama kita, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.☐

Digitized by Google

Berbagai Kalangan Sambut Positif Pidato Presiden

Sambutan bernada positif segera terekam sesaat setelah Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR. Tanggapan itu tercatat tidak saja dari para politisi, dan pengamat ahli, tetapi juga dari kalangan masyarakat awam. Sejumlah surat kabar Ibukota merekam tanggapan dari berbagai kalangan itu dalam berbagai titik pandang yang intinya menyatakan isi bahwa pidato kenegaraan itu realistik, menunjukkan suatu kepercayaan diri yang kuat, terbuka dan jujur.

Sekjen DPP Golkar, Ir Sarwono Kusumaatmadja menyatakan, selain menunjukkan suatu kepercayaan diri yang besar, realistik, dan optimistik, isyu tentang tantangan masa depan yang ditonjolkan dalam pidato kenegaraan itu tepat. "Terus terang, Presiden dalam pidatonya itu juga memberikan 'warning' bahwa produksi beras kita tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pidato Presiden itu bagus, ada ajakan untuk waspada," kata Sarwono.

Sarwono juga memberikan perhatian atas peringatan Presiden terhadap para pengamat ekonomi yang kurang beralasan dalam memberikan analisis. Dari hasil studi para pengamat dan ilmuwan luar negeri sepanjang yang dibacanya, tidak pernah ditemukan indikasi bahwa ekonomi Indonesia mengkhawatirkan atau makin buruk. Dalam jangka panjang ekonomi Indonesia tidak buruk, meski ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu peningkatan efisiensi, disiplin nasional, deregulasi, dan debirokratisasi. Ia berharap para pengamat ekonomi Indonesia lebih mendalam dalam mendasari uraiannya. "Pengamat yang dangkal hanya memperoleh pasaran bila masyarakat mudah terpengaruh," katanya, menjelaskan.

Keterangannya, Sekjen DPP Golkar itu mengatakan spekulasi dapat timbul apabila masyarakat termasuk para terpelajarnya belum dapat mengolah data secara lugas.

Sementara itu bekas Sekjen DPP PDI yang kini menjadi anggota DPA Sabam Sirait menilai, kritik Presiden terhadap para analis itu membuktikan

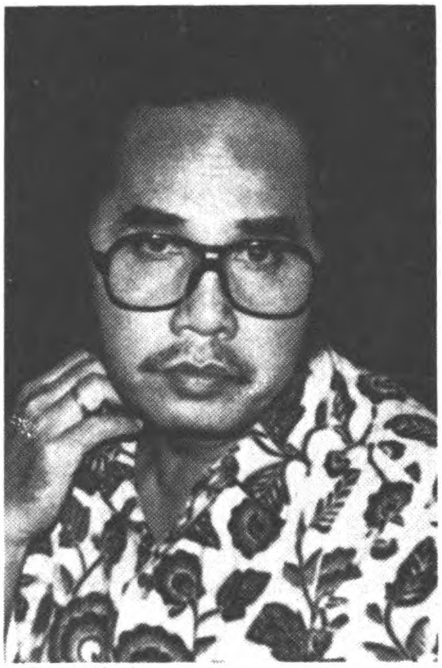
Sabam Sirait

adanya keterbukaan pemerintah. "Memberi tanggapan berarti memberi perhatian," katanya, menjelaskan.

Menurut Sabam, analisa para pengamat ekonomi itu mungkin didasarkan pada penglihatan dan pengalamannya. Bagi mereka mungkin sudah dirasakan adanya ketidakpastian, yang mestinya segera dibantah dengan tindakan nyata oleh para pembantu Presiden. Jika saja para pembantu Presiden lebih aktif, demikian Sabam, keadaan tidak akan menjurus pada tindakan spekulasi berlebihan seperti terjadi baru-baru

Rachmad Witoelar

ini. Dengan kasus itu, ia mengharapkan dapat diambil suatu hikmah, betapa pentingnya usaha mengoptimasikan fungsi dan peranan lembaga riset di tiap instansi pemerintah, berikut perangkat kehumasan. Ia merasa prihatin atas berkurangnya anggaran penelitian. Menurut hematnya, fungsi dan peranan lembaga seperti LIPI perlu ditingkatkan sehingga menjadi penggerak dan pendorong kalangan ilmuwan dan pengkaji pelaksanaan pembangunan.

Bagian pidato Presiden yang menyangkut bidang ekonomi ini masih disoroti oleh anggota-anggota DPR lainnya, antara lain Dr Arnold Baramuli SH, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin, Ir Rachmat Witoelar, bekas ketua Komisi VI, Drs Bomer Pasaribu SH, dan Imam Chourmen.

Baramuli menyambut baik perhatian Kepala Negara mengenai penting-

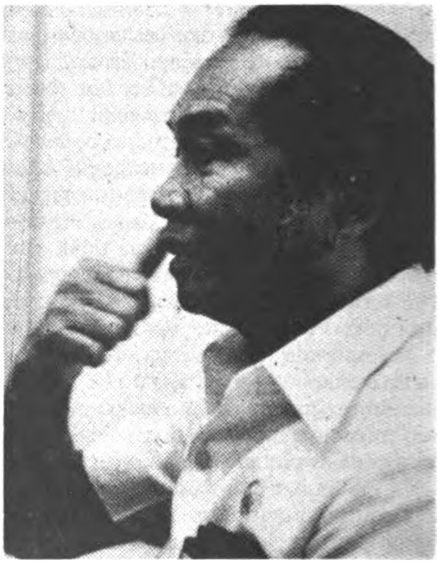
Arnold Baramuli

nya peningkatan keleluasaan para pengusaha swasta. Ia yakin, pelaksanaan dari kebijakan itu akan mendorong usaha ekspor, impor dan penanaman modal. Sedangkan Imam Chourmen mencatat isyarat Presiden tentang perlunya peningkatan pertanian agar tingkat swasembada pangan dapat dipertahankan. Namun menurut anggota DPR dari FPP itu mengatakan, swasembada pangan itu harus meningkatkan kesejahteraan petani.

Digitized by Google

Perasaan keadilan dan kesejahteraan petani harus dilindungi, dan jangan sampai justru petani yang memberikan subsidi kepada pemerintah. "Misalnya, harga beras untuk pegawai negeri sipil dan ABRI ditetapkan Rp 415 per kg, sementara Bulog membeli dari petani hanya Rp 350 per kg. Pada hal beras yang dibeli pegawai negeri sipil dan ABRI itu kurang bagus kualitasnya, sedang beras yang dijual petani dengan harga Rp 350 adalah beras yang bermutu baik," kata Imam.

Bomer Pasaribu menilai, pidato Presiden itu realistik. Pidato kenegaraan itu dinilainya memberikan nasihat positif bagi bangsa untuk tetap bersikap optimistis dalam menyongsong masa depan. Sementara Ir Rachmat Witoelar mengatakan tantangan utama yang dihadapi dalam kurun waktu sekarang adalah bagaimana mewujudkan rasa keadilan dan pemerataan dalam masyarakat. Tolok ukur kebersamaan yang telah tercapai kini bergeser pada tolok ukur pribadi warganegara, yang berkaitan dengan kedaulatan dan hak-haknya. Menurut hematnya, pidato kenegaraan itu telah menyadari hal itu. Karenanya, dalam mencanangkan tahap tinggal landas nanti, perlu lebih jelas pencakupan perhatian akan jaminan kepada individu.

Hamzah Haz, anggota DPR lainnya menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah atas keterbukaan dalam menerima pendapat dari masyarakat, sebagaimana tercermin dalam upaya untuk menuntaskan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Pendapat senada juga disampaikan oleh pengamat ekonomi Dr Anwar Nasution. Ia mengharapkan, kebijakan deregulasi dan debirokratisasi harus berlanjut. Di lain pihak, menurut Dr Anwar Nasution, semangat patriotisme di bidang ekonomi perlu dimasyarakatkan, antara lain diwujudkan dengan peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Dengan kesadaran itu, ia yakin bangsa Indonesia akan mampu melaksanakan pembangunan dengan kekuatannya sendiri.

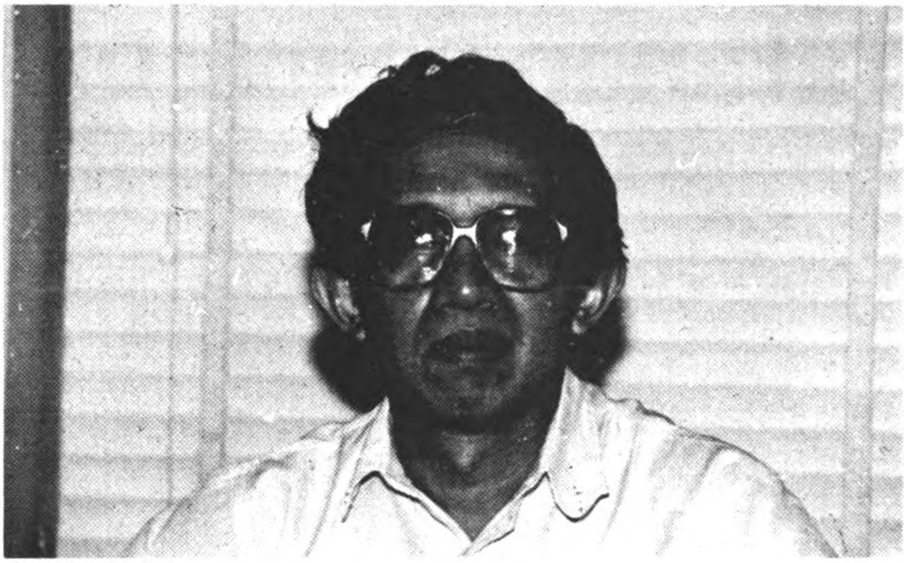

Anwar Nasution

Rusli Desa, Wakil Ketua Komisi I DPR dari FKP menyambut anjuran Presiden mengenai pelaksanaan pola hidup sederhana. "Anjuran itu jelas tidak ditujukan kepada rakyat kecil. Rakyat kecil jelas tidak dapat hidup bermewah-mewah," katanya.

Ketua FKP DPR R Soekardi menyatakan sependapat dengan penilaian Presiden terhadap peranan ABRI khususnya dalam Pemilu yang lalu. "ABRI telah berperanan sebagaimana mestinya. ABRI telah menunjukkan sikap yang makin dewasa dan matang," kata Soekardi.

Soedardji, dari FPP berpendapat, penegasan Presiden tentang Pemilu sangat penting. Dalam Pemilu yang dibicarakan bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. "Penegasan seperti itu sangat penting untuk diperhatikan," katanya. Tentang para pengamat, Soedardji berharap hendaknya mereka berbicara secara obyektif, tidak bertindak sebagai politisi.

R. Soekardi

Tentang pemilu Sabam Sirait menyatakan, masih terdapat kelemahan yang harus mendapat perhatian khusus. Pemilu mendatang diharapkan masih lebih baik lagi. Untuk itu peranan Sospol perlu lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya sekedar pelaksana, tetapi juga penyelenggara.

Sementara itu seorang supir taksi bernama A Sumarto menyatakan sangat menaruh harapan atas pidato Presiden. "Yang penting bagi kami orang awam ini, jangan banyak lagi terjadi hal-hal yang merisaukan seperti pada zaman Orde Lama dulu," katanya. Dulu, katanya, keadaan serba tidak menentu dan membuat kehidupan serba tak menentu pula. "Pahit rasanya hidup waktu itu," katanya menegaskan. Lain dengan sekarang. "Hidup menjadi lebih bergairah dan optimis," sambungnya.

Ny Ummi Savitri dari Depok menyatakan, pidato Presiden itu mengisyaratkan semua pihak untuk bekerja makin keras. "Hanya dengan bekerja keras akan dicapai perbaikan dalam situasi negara yang serba prihatin seperti sekarang ini," katanya lebih lanjut. Ia sendiri dulu tidak pernah bermimpi memiliki rumah. Tetapi berkat pembangunan Orde Baru, melalui Perumnas keluarganya berhasil dapat memiliki rumah di kawasan Depok. □

Sugyanto

Digitized by Google

Tatanan Politik Disintegratif Dirubah Menjadi Integratif

Lembaga Studi Agama dan Filsafat bersama Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia menyelenggarakan diskusi politik di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, belum lama ini. Diskusi terbuka ini menampilkan dua panelis, yaitu Sekjen DPP Golkar Ir. Sarwono Kusumaatmadja dan Drs. Ridwan Saidi anggota DPR dari F-PP, dimana kedua figur panelis itu menampilkan ciri khasnya masing-masing guna memaparkan argumentasi dan persepsinya tentang masalah-masalah aktual dan pertumbuhan politik di Indonesia.

Dalam makalahnya 'Partisipasi Politik Dalam Rangka Integrasi Nasional', Ir. Sarwono Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa di dalam diri bangsa Indonesia yang majemuk, selalu akan hadir kekuatan-kekuatan yang berlawanan — disatu pihak kekuatan-kekuatan yang sifatnya integratif dan di pihak lain kekuatan-kekuatan yang sifatnya disintegratif. Dan mengingat, cita-cita kebangsaan Indonesia adalah mewujudkan suatu bangsa yang bersatu, merdeka dan berdaulat, maka segala upaya politik haruslah diarahkan sehingga kekuatan-kekuatan yang sifatnya integratif akan selalu dapat dominan terhadap kekuatan yang sifatnya disintegratif.

Dengan mengindahkan pengalaman bangsa Indonesia pada kurun waktu 1950-1965, dimana kekuatan-kekuatan yang disintegratif telah demikian berperan dalam kehidupan politik kita, maka dapat dimengerti bila setelah periode itu yakni selama Orde Baru, titik perhatian bangsa dicurahkan pada upaya-upaya untuk melembagakan serta memperkuat integrasi bangsa. Peranan integratif selama Orde Baru dipelopori serta dilaksanakan oleh Pemerintah melalui proses pembangunan (rekayasa) politik. Melalui proses pembangunan politik ini, tatanan politik lama yang dipandang disintegratif dirubah secara gradual ke arah tatanan baru, yang sifatnya integratif. Sehingga tumbuh lembaga-lembaga politik sebagai hasil perekayasaan ini, baik yang bersifat suprastruktur maupun infrastruktur. Bahkan, diupayakan tumbuhnya faham sikap

Sarwono Kusumaatmadja

serta perilaku politik yang integratif yang berkulminasi dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu telah berhasil pula menetapkan stabilitas nasional yang mulus selama Orde Baru, kehidupan politik dewasa ini menciptakan masalah-masalah baru seperti masalah partisipasi politik.

Tuntutan Partisipasi politik

Masalah partisipasi politik ini, dinilai Sekjen DPP Golkar, timbul karena berbagai sebab. Antara lain, wawasan integratif telah meluas, namun belum sepenuhnya dapat tertampung dalam sistim yang berlaku, karena sistim ini masih menganggap masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh potensi-potensi disintegratif; Wawasan disintegratif terdesak, sehingga tidak tersalurkan aspirasinya dalam sistim yang pada gilirannya melahirkan gerakan-gerakan sempalan. Tuntutan akan peningkatan partisipasi politik diperlihatkan dalam berbagai gejala antara lain munculnya isyu-isyu yang sifatnya kwalitatif seperti keadilan, demokrasi, moral dan etika.

Tuntutan partisipasi politik adalah masalah yang riil dan harus segera diberikan perhatian. Namun, dengan mengingat komitmen pada persatuan dan kesatuan bangsa, menurut Sarwono Kusumaatmadja, masalah ini harus tetap diletakkan pada arahan dasarnya, yaitu untuk menciptakan keunggulan dari kekuatan-kekuatan integratif terhadap kekuatan-kekuatan disintegratif. Dengan demikian, peningkatan partisipasi politik hendaknya tidak dipandang sebagai suatu tujuan yang absolut, tapi lebih tepat dipandang sebagai cara dalam rangka meningkatkan bobot demokrasi dari proses integrasi nasional.

Dalam pengertian ini yang diperlukan, adalah peningkatan kualitas implementasi dari proses pembangunan nasional dan bukan merubah orientasi serta strategi pembangunan nasional itu sendiri. Untuk itu, dalam menghadapi tuntutan partisipasi politik yang meningkat diperlukan beberapa tindakan yang sifatnya 'penyesuaian' atau transformasi semata-mata dan tidak bersifat perombakan. Disamping itu, pengaruh positif dari peningkatan partisipasi politik tidak terlepas dari mutu partisipasi tersebut. Hal ini sangat tergantung dari kwalitas pengorganisasian masyarakat serta kualitas manusia partisipan didalamnya. Juga, meningkatnya kualitas integrasi nasional tidak terlepas dari upaya operasionalisasi Pancasila sebagai azas nasional.

Dewasa ini Pancasila sebagai azas, menurut pandangan Sarwono Kusumaatmadja, masih bersifat sangat umum dan masih perlu ditingkatkan kemampuannya sebagai azas yang operasional dalam rangka memecahkan masalah-masalah etis serta normatif, yang riil dan kongkrit. Kesukaran-kesukaran dalam operasionalisasi Pancasila, akan terasa jika azas Pancasila yang bersifat umum serta nasional dihadapkan pada azas-azas partikularistik yang hidup dalam budaya bangsa, baik yang berdimensi religik, etnik maupun ras. Resolusi dari konflik nilai yang implisit dalam perbenturan-perbenturan di atas, tidaklah mudah, karena menyangkut masalah 'rasa' dan identitas kelompok.

Terlepas dari masalah-masalah tadi,

maka kita harus bermodalkan kepercayaan bahwa sebagai hasil dari pembangunan politik, kekuatan-kekuatan integratif dalam masyarakat lebih dominan dibanding dengan kekuatan-kekuatan disintegratif. Dengan demikian, proses penyesuaian atau transformasi dari sistim politik hendaknya dapat segera dilaksanakan. Sedang upaya-upaya yang dapat dilaksanakan, adalah;

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional dengan terlebih dulu mengidentifikasikan potensi-potensi integrasi, yang terdapat dalam masyarakat serta menciptakan iklim yang mendorong partisipasi masyarakat tersebut. Melaksanakan transformasi peran pada institusi-institusi politik, baik infra maupun suprastruktur dengan melaksanakan fungsionalisasi yang lebih jelas. Dan mendorong tumbuhnya kemandirian, kedewasaan serta demokratisasi dari infrastruktur politik yang tidak dapat dilepaskan dari fungsionalisasi dari institusi-institusi politik kita, termasuk yang berada dalam jajaran pemerintahan.

Kepompong politik

Sementara itu Drs. Ridwan Saidi dalam panel diskusi politik ini menegaskan, penggembosan yang muncul secara spektakuler dalam Pemilu 1987 harus dilihat sebagai gejala mengendurnya partisipasi politik, dalam arti menurunnya rasa terwakili pada sesuatu OPP (Organisasi Peserta Pemilu). Dalam konteks ini, upaya rujuk NU-Muhammadiyah mungkin dipandang secara skeptis. Juga dapat dilihat secara positif, sebagai pengembangan peluang baru di kalangan Islam untuk — setidaknya — menahan 'selera' partisipasi politik umat dari ambang kemerosotan.

Rujuk kedua ormas berpengaruh itu akan berjaya bila ditempatkan dalam pandangan ke depan sekaligus dapat memerdekakan dirinya dari kepompong suasana politik pra-Orde Baru. Hal ini tidak mudah dilakukan mengingat belum terjadi regenerasi secara berarti di kedua ormas itu. Adapun tenaga muda yang kini muncul di lapis kepemimpinan pun masih memperlihatkan kecenderungan nostalgia terhadap masa lampau, meski tidak semuanya begitu.

Dalam kerangka struktur kepartaian yang tersedia, kiranya masalah partisipasi politik dapat ditempatkan, dengan menyadari beberapa kelemahan yang ada, misalnya kekurang-mandirian dan rekrutmen yang belum sepenuhnya disandarkan pada pertimbangan kualitas personil. Sudah tentu keterlambatan atau kealpaan dalam mengatasi kelemahan akan membuat mengendurnya partisipasi masyarakat.

Tuntutan partisipasi politik, masalah riil dan harus diberi perhatian

Pemilu 1987 memperlihatkan sekitar sembilan persen, mereka yang berhak memilih tidak datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) disamping terdapat petunjuk semakin banyaknya jumlah kertas suara yang tidak dicoblos, atau kalaupun dicoblos tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dengan sendirinya batal.

"Kiranya dapat difahami, bilamana pemerintah Orde Baru setidaknya sejak 1968 berusaha menemukan format politik yang tepat dalam rangka pembangunan politik, dimana integrasi nasional menjadi agenda yang terpokok. Faktor sejarah memberi alasan sah untuk tersusunnya suatu format politik, yang menjamin integrasi nasional sebagai kerangka yang pada dirinya mengandung stabilitas," ujar Ridwan Saidi dalam makalahnya yang berjudul 'Partisipasi Politik Sebagai Penunjang Integrasi Nasional.

Di masa lampau, menurut pandangan anggota DPR dari F-PP ini, kecuali jaman Sriwijaya (abad ke-7) dan Majapahit (abad ke-14) belum pernah ada kekuasaan politik yang punya kendali atas seluruh Nusantara, begitupun partai-partai politik yang lahir awal abad ke-20, tidak ada yang punya pengaruh merentang Nusantara. Partai Syarekat Indonesia (PSI) memperoleh kejayaan dalam waktu yang sangat singkat sekitar 1912-1914, mencatat 2 juta anggota, tapi benih perpecahan pun menyusup setelah itu. H.O.S. Tjokroaminoto meninggal dunia tahun 1934, mengakibatkan partai besar ini, yang makin melemah itu memperlihatkan gerak 'centrifugal' dengan lahirnya Partai Islam Indonesia di bawah pimpinan Dr. Sukiman dan Gerakan Penyadar (1936) di bawah pimpinan H. Agus Salim.

Akan halnya Partai Nasional Indonesia (1927), tidak pernah punya pengaruh merentang Indonesia termasuk dalam Pemilu 1955. Kendati-

Digitized by Google

Dialog langsung

pun PNI keluar sebagai pemenang utama dalam perolehan suara — perolehan kursinya sama banyak dengan masyumi yakni 67 kursi di Parlemen, tapi PNI hanya memenangkan daerah pemilihan Jawa Tengah.

Selama 20 tahun sejak kemerdekaan, pergumulan sistim politik yang tepat menghasilkan pengalaman traumatik. Parlemen tidak dapat dijadikan 'bastion' kekuasaan politik, jatuh-bangunnya kabinet banyak diwarnai oleh selera personal. Karena di dalam banyak kasus, jatuhnya sesuatu kabinet disusul dengan kabinet baru yang punya program persis dengan kabinet yang digantikannya. Modifikasi kabinet Presidentil, dengan peran besar tetap pada Parlemen tidak kunjung menjadi kenyataan. Usul semacam itu tidak terlepas dari selera personal. Wakil Presiden Hatta, yang diusulkan Masyumi memimpin kabinet, tidak populer bagi PNI. Ironis memang, ketika Masyumi menentang Presiden Soekarno menunjuk warga negara Soekarno menjadi formatur kabinet pada 1957. Dua tahun kemudian, aktualisasi format Demokrasi Terpimpin ternyata tidak menjamin integrasi nasional, bahkan era itu berakhir dengan adanya tragedi nasional pemberontakan G30S PKI/Gestapu pada 1965.

Sistim politik yang tidak dapat memelihara integrasi nasional, juga tidak dapat menggairahkan partisipasi politik rakyat. Kecuali debat yang meletihkan di Parlemen pada masa 'leberal' dan demonstrasi serta 'aksi rakyat' di masa Demokrasi Terpimpin, sebagai model partisipasi. Padahal pelaksanaan partisipasi politik bukan saja manifestasi 'kreatifitas', melainkan juga stabilitas.

Partai Pelopor

Memang benar, kata Ridwan Saidi, bahwa sistim politik yang dikembangkan bukan cangkokan dari sistim apapun yang dilaksanakan negara-negara luar. Sistim itu tumbuh dari pengalaman berbangsa dan bernegara selama ini, dalam 20 tahun pertama sejak kemerdekaan. Perubahan struktural dalam bidang politik sebagai konsekuensi pelaksanaan sistim politik, yang memiliki concern sejarah yang kuat itu untuk memelihara integrasi dan stabilitas nasional. Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang menjadi peserta Pemilu, disamping PPP dan PDI, berhasil merentang pengaruh politiknya secara kuantitatif ke seluruh kawasan tanah air. Kemenangan 72 persen, yang diraih Golkar pada Pemilu 1987 memperlihatkan dirinya sebagai 'partai politik' atau 'kekuatan sosial politik' dan mampu mencapai prestasi sebagai 'partai pelopor', yang belum pernah diraih oleh partai pelopor apapun dalam sejarah politik Indonesia. Secara embrional, sambungnya, gagasan adanya 'partai pelopor' yang dapat menjadi elemen pemersatu bangsa dan berfungsi sebagai wahana gerakan rakyat dicetuskan Ir. Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia pertama, beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Identifikasi gagasan itu karena eksistensi PNI, atau karena gagasan itu lahir dalam suasana dan dimensi waktu yang tidak tepat, maka muncul perlawanan terhadap gagasan itu. Sutan Syahrir memberi reaksi yang paling keras. Lahirnya Maklumat No. X, yang membolehkan berdirinya banyak partai sekitar 50 partai sebagai peserta Pemilu 1955. Sehingga sistim kepartaian macam ini yang ternyata tidak membuahkan stabilitas, bukan respon yang tepat terhadap penolakan gagasan adanya 'partai pelopor' yang diumumkan 10 tahun sebelumnya.

Dialog langsung

Sementara Itu Sarwono Kusumaatmadja melanjutkan, bahwa partisipasi masyarakat menjadi nampak bila sifat-sifat ketergantungan mulai dikurangi dan meningkatkan kualitas program, baik ormas maupun kekuatan sosial politik yang ada. Ketergantungan yang mengakibatkan segalanya serba mohon petunjuk, pengarahan dan konsultasi, yang hanya akan menambah frekuensi kuantitas yang pada akhirnya tidak punya inisiatif dan akan melihat atau membesarkan kekurangan-kekurangan yang ada. Padahal kita tahu, persoalan bangsa bukan persoalan orang-perorangan, melainkan persoalan bersama. Karenanya, kita tahu dalam proses pembangunan akan ditemui tantangan dan berbagai masalah — sehingga kita perlu meningkatkan kualitas manusianya untuk menjawab setiap permasalahan.

"Saya berbicara sesuai dengan konteks yang diinginkan oleh pihak penyelenggara. Jadi, saya bukan mengarang dan diplomasi seperti yang disampaikan Agus Santoso. Untuk itu, partisipasi politik dalam integrasi nasional bukan menjadi tanggung jawab satu golongan atau kelompok saja. Baik Golkar, PPP maupun PDI punya tanggung jawab sama besarnya sebagai kekuatan sosial politik dalam mewujudkan integrasi nasional ini. Karenanya, mulailah kita dalam mengamati setiap permasalahan yang berkembang, jangan dengan sudut pandang yang subjektif," tegas Sekjen DPP Golkar dalam menjawab pertanyaan peserta diskusi.☐

RS/Deddy Triyono

Digitized by Google

Waspada Hadapi Bencana Kekeringan

Presiden Soeharto dalam Sidang Terbatas Bidang Ekuin di Bina Graha, Agustus lalu, menginstruksikan kepada para menteri dan pejabat supaya berita-berita kekeringan dan segala permasalahannya, yang terjadi di daerah-daerah terus diamati untuk diambil langkah-langkah penanggulangannya, lebih-lebih menghadapi musim tanam 1987/88 mendatang. Khusus kepada Departemen Dalam Negeri, Kepala Negara memberi petunjuk, agar menginsutruksi bupati untuk benar-benar memanfaatkan laporan metereologi dan geofisika yang telah dikirim Departemen Perhubungan.

Ini penting untuk mengikuti keadaan cuaca, sehingga dapat memperkirakan daerah-daerah mana yang mengalami kekeringan. Masalah ini merupakan salah satu pokok penting yang dibahas dalam pertemuan sidang itu dan dihadiri pula Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah. Demikian kata Menteri Penerangan Harmoko melaporkan hasil-hasil sidang tersebut.

Bencana kekeringan yang telah melanda daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak beberapa tahun yang lalu, kini telah dirasakan pula di daerah Yogyakarta kendatipun baru mencakup sekitar 104 ha, Jawa Timur dan kemungkinan besar akan melanda pula beberapa daerah lain .

Sedangkan menurut Kepala Sub bidang Ramalan dan Jasa Metereologi dan Geofisika, Soerjadi, beberapa waktu lalu menjelaskan, bahwa kekeringan yang melanda Indonesia saat ini diduga disebabkan oleh gejala alam yang disebut El Nino, juga diduga menjadi penyebab berbagai bencana alam di dunia akhir-akhir ini.

Kemungkinan daerah yang akan terkena kekeringan akibat El Nino itu meliputi hampir seluruh Indonesia, kecuali Sumatera. Gejala alam El Nino itu, kata Soerjadi, karena naiknya suhu air laut di Pasifik, yang berarti memperbesar penguapan. Perbedaan suhu dan tekanan menyebabkan udara bergerak ke sana bersama awan. Akibatnya, di Indonesia udara menjadi kering terutama di bagian Timur. Pergeseran pusat panas ke Pasifik akan menurunkan suhu permukaan laut di tempat yang menjadi sumber siklon tropis. Pembentukan awan menjadi sedikit karena kecilnya penguapan. Padahal awan inilah yang akan turun menjadi hujan di Indonesia.

Dalam skala global, El Nino juga mempengaruhi cuaca di seluruh dunia. Sementara itu, daerah-daerah di Indonesia yang akan terancam kekeringan di Pulau Jawa akibat gejala El Nino ini antara lain Subang, Indramayu, Cirebon, Sukabumi, Ciamis, Cilacap, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Jember, Probolinggo, Situbondo dan Bondowoso. Sementara daerah lain di luar Pulau Jawa adalah sebagian Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku dan Timur Timor.

Sistem gogoh rancah

Menurut Harmoko, Presiden Soeharto memberi petunjuk agar gerakan gogoh rancah yang telah dimulai dilakukan di Kabupaten Sumba Timur saat ini dengan swadaya masyarakat, akan dikembangkan pula di kabupaten lainnya, yang mengalami kekeringan. Sementara Departemen Pertanian bekerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), kini sedang melakukan pengkajian untuk membuat hujan buatan guna mengisi waduk-waduk utama di beberapa lokasi. Antara lain di Jatiluhur, Wonogiri, Sempor dan lain-lain, yang secara teknis dan ekonomi memungkinkan.

"Selain untuk keperluan pertanian, pengamatan yang perlu dilakukan tersebut juga bertujuan mengatasi keperluan untuk air minum," kata Harmoko.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bulog (Badan Urusan Logistik) Bustanil Arifin SH mengatakan, guna mengatasi kekeringan yang terjadi di NTT dan NTB dilakukan operasi pasar berupa beras yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kemampuan rakyat. Di NTT dengan harga Rp 200 dan Rp 275 per kg, sedangkan di NTB sekitar Rp 300 per kg. Untuk operasi pasar di NTT disiapkan beras 5.000 ton dan di NTB 2.000 ton.

Agar operasi itu tepat sasaran, maka seleksi kepala keluarga yang akan memperoleh bantuan menjadi tanggung jawab pejabat setempat. Baik kepala desa, camat maupun bupati. Selanjutnya, dengan cara memberi pinjaman lumbung pangan melalui KUD (Koperasi Unit Desa) dalam bentuk beras kepada daerah-daerah, yang masyarakatnya secara potensial bisa menghasilkan padi pada musim panen berikutnya. Untuk pengelolaan lumbung padi tersebut, di NTB telah disiapkan 1.000 ton untuk 15 KUD di lima kabupaten yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Bima. Sedang di NTT disiapkan sebanyak 750 ton untuk 11 KUD di tujuh kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Ende, Flores Timur, Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat. Selain itu ada juga bantuan cuma-cuma dari Departemen Sosial bagi masyarakat, yang tidak mampu serta jumlah beras yang dicadangkan sebanyak 750 ton di NTT dan 500 ton di NTB.

Di samping upaya-upaya di atas, Harmoko menambahkan, Departemen pertanian juga telah mempersiapkan sistem gogoh rancah, padat karya gaya baru oleh Departemen Tenaga Kerja serta bantuan sosial sebesar 182 ton untuk program pangan ke depan (food foreward) bagi kegiatan gogoh rancah dan non-gogoh rancah sekaligus optimalisasi daerah irigasi dan pemanfaatan sumber air lainnya oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Pengoperasian pola penanggulangan akibat kekeringan tersebut mulai dilaksanakan bulan Agustus yang lalu.

Dampak kekeringan

Sementara itu seperti diberitakan pers ibukota, musim kemarau tahun ini kemungkinan besar bakal berlangsung panjang dan kering. Dampaknya sudah semakin terasa di berbagai wilayah Indonesia. Seperti Sungai Batanghari di Jambi - Sumatera, sejak dua bulan lalu telah mendangkal. Surutnya air menjadikan alun pelayaran sungai terganggu dan banyak kapal tidak bisa lagi merapat ke Pelabuhan Jambi.

Sedangkan laporan surutnya air sungai belum muncul dari Sumatera utara. Tapi kendati demikian, di Kabupaten Asahan dan Simalungun sekitar dua ribu hektar area persawahan tidak dapat lagi ditanami. Musibah serupa juga dilaporkan dari daerah

Digitized by Google

penghasil tembakau virginia di Bojonegoro, Jawa Timur. Kekeringan di tempat itu kecuali menyusutkan area dan produksi pada musim tanam '87/88, yang merupakan beban berat terhadap masyarakat tani setempat. Meskipun tanaman tembakau mungkin dapat atau sanggup bertahan sampai panenan mendatang, namun biaya yang dikeluarkan untuk penyulaman bakal tidak sebanding dengan harga jual yang bisa diperoleh.

Musibah ini ternyata tidak hanya menimpa daerah langganan seperti Gunung Kidul, Yogyakarta, Jawa Tengah. Bupati Sosrohadiningrat sendiri melaporkan, 376 dusun di 39 desa meliputi enam kecamatan setempat mengalami kekeringan cukup parah. Bencana yang sama juga menimpa wilayah subur seperti Klaten, Jawa Tengah. Pemda menyebutkan, terpaksa mengoperasikan armada truck pengangkut air ke 17 desa di Kecamatan Karangnongko, Jatinom, Kemalang dan Tulung.

Di Jambi, surutnya air sungai Batanghari memang selalu terjadi di musim kemarau. Akan tetapi, pendangkalan alur pelayaran, khususnya di sekitar Kampung Baru dua kilometer di hilir pelabuhan terus bertambah. Saat ini kedalaman alur tinggal 2,5 sampai 2,8 meter. Sehingga kapal-kapal sungai yang luasnya lebih dari angka tersebut, harus membongkar muatan di Tanjung Johor sekitar tiga kilometer di hilir atau malah harus bongkar di Kemingking, 25 kilometer hilir pelabuhan Jambi. Demikian kata Aminudin Jahari selaku Ketua Asosiasi Penilik Kapal Indonesia (INSA) Jambi.

Karena itu, keharusan membongkar muatan di luar pelabuhan menyebabkan naiknya ongkos buruh serta transport tongkang di samping banyak menyita waktu. Sedang Pelabuhan Jambi yang terletak di pinggir Sungai Batanghari dan berjarak sekitar 110 kilometer dari pantai, perbedaan ketinggian airnya di saat musim hujan dan kemarau mencapai delapan meter. Selama enam bulan dalam setahun, dermaga beton di pelabuhan memang tidak bisa difungsikan kecuali dermaga apung — ponton ferrocement bisa disandari kapal sepanjang tahun.

Di Kalimantan Selatan, bilamana hujan tetap tidak turun, maka persawahan di tiga kabupaten setempat bakal tertimpa bencana yang memprihatinkan. Sebab, sekitar 100.000 hektar padi siap panen di bulan Agustus dan September ini menderita. Sehingga kecemasan kaum petani terhadap kegagalan panen tahun ini, sudah membayangi diri. Mereka masih ingat, bahwa saat kekeringan 10.000 hektar di tahun 1986 sudah menderita, bagaimana lagi kalau musibah tersebut harus menimpa areal 100.000 hektar. Tetapi, diperkirakan Ir. Madjedi Aseri Kepala Dinas Pertanian, kekeringan ini menimpa areal sekitar 454 hektar — bukannya 100.000 hektar area yang terancam.

Sekitar dua ribu hektar sawah di dua kabupaten daerah Sumatera Utara menderita kekeringan. Di daerah lain hujan justru mulai turun, bahkan ada kekhawatiran munculnya ancaman banjir sebagaimana yang baru saja menimpa sebagian Kabupaten Langkat dan Asahan, sekalipun banjir itu belum menyebabkan kerusakan berarti karena genangan air di persawahan dan perkampungan cepat surut.

Di daerah sentra penghasil tembakau virginia Bojonegoro — sampai minggu kedua Agustus, banyak tanaman baru mulai tumbuh. Biasanya, sekitar bulan Agustus tersebut, tembakau sudah setinggi satu meter kecuali tanaman tembakau itu 'kerdil' dan kekeringan di daerah Bojonegoro ini dilengkapi bencana ratusan hektar tanah persawahan dibiarkan 'bero' yakni tidak ditanami. Ini bisa ditemukan di Kecamatan Kedungadem, Sugihwaras, Balen, Sumberjo, Kapas, Kalitdu sampai Purwosari. □ DT

PRASETYA
ULAH SAKTI BHAKTI PRAJA

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. PEMUDA NO. 1 SEMARANG
TELEPON: 21673, 285514, 285516

SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH JAWA TENGAH

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERSELENGGARANYA PEMILU 1987 DENGAN AMAN TERTIB DAN LANCAR SERTA MENYAMBUT GEMBIRA SUKSES DAN KEMENANGAN YANG DICAPAI GOLKAR

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"WALISONGO"
Jl. Walisongo No. 3 Telp. 289554 Semarang Kode Pos 50151

SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN " IAIN WALISONGO "
DENGAN RASA SYUKUR DAN GEMBIRA MENGUCAPKAN
SELAMAT DAN SUKSES ATAS PRESTASI YANG DICAPAI GOLKAR
DALAM PESTA DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM 1987

Digitized by Google

Oleh : Aulia Rachman S.H.

KNPI - AMPI Perangkat Dan Piranti Pembaharuan Orde Baru

Sebuah ide dan cita-cita Pembaharuan hanya akan terwujud apabila dalam diri manusia-manusia yang menjalankan ide tersebut terdapat jiwa dan semangat sebagai Pembaharu yang tanpa pamrih dan selalu bersedia dikritik oleh masyarakat sekelilingnya bahkan dibenci sekalipun. Dan itulah risiko yang harus dipikul oleh Pembaharu dimanapun dia berada. Maka dalam menyambut Hari Ulang Tahun KNPI yang jatuh pada tanggal 23 Juli 1987 dan Hari Ulang Tahun AMPI yang jatuh pada tanggal 28 Juni 1987 sebagai Organisasi Pemuda yang diharapkan sebagai alat Pembaharu didalam Pembaharuan Struktur Politik Orde Baru.

Sebagai alat pembaharu dalam cara berpikir dikalangan organisasi Pemuda KNPI dan AMPI ide dan cita-cita kelahirannya diuji daya tahan dan juangnya dalam mengembangkan ide pembaharuan didalam masyarakat.

Namun serentak dengan itu pula maka setiap kritik dan urun rembuk pikiran yang datangnya dari masyarakat itu harus dijadikan sebagai bekal untuk mawas diri dan introspeksi kedalam terhadap seluruh kekurangan dan kelemahannya yang kita miliki sebagai pembaharu tersebut.

Sejak awal kelahiran Orde Baru, yang hadir dengan ide pembaharuan struktur politik dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen dan pra syarat bagi terlaksananya Pembangunan Nasional secara berencana dan bertahap, maka dirasakan adanya suatu kebutuhan akan adanya suatu kekuatan sosial politik yang kuat, dominan dan effektif untuk melaksanakan ide dan cita-cita pembaharuan tadi. Dimana iklim dan kondisi sistem politik yang ada pada masa sebelumnya (Orde lama), hal ini tidak dimungkinkan. Didalam konstelasi dan tuntutan politik yang demikian itu, maka tampillah Golongan Karya sebagai salah satu alternatif dengan membawa suatu orientasi baru yang diejawantahkan kedalam bentuk pemikiran dan tindakan dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa secara menyeluruh dan terpadu.

Tentunya harus disadari pula bahwa ide pembaharuan yang demikian dilatar-belakangi pula oleh faktor kemajemukan latar belakang sosio-kultural bangsa Indonesia yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Agar faktor disintegrasi ini tidak menjadi suatu hambatan didalam proses Pembangunan Nasional, tentunya harus dicarikan alternatif berupa pembaruan dalam berpikir dan bertindak dalam cita dan citra yang sesuai dengan cita-cita orde baru. Pembaharuan ini dapat diartikan sebagai suatu gerak dan dinamika sosial yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembaruan tersebut, karena tujuan dari pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya.

Sebagai salah satu jawaban konkrit terhadap ide dan tuntutan pembaruan tersebut maka oleh sebagian generasi muda GOLKAR diawal Dasawarsa 70-an telah melahirkan atau sedikitnya mendorong kelahiran dari apa yang kita kenal sekarang dengan nama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Ide tersebut saat ini telah semakin membaku didalam tubuh KNPI setelah hampir 15 tahun kehadirannya didalam pasang surutnya arus dan gelombang tantangan yang dihadapinya. Dan kalau kemudian apa yang kita kenal dengan nama Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia sebagai wadah perjuangan dari pemuda GOLKAR yang melahirkan KNPI ini baru hadir setelah enam tahun kemudian yaitu pada tahun 1979, maka hendaknya hal ini dilihat sebagai suatu kehendak sejarah semata-mata, sebagai proses dinamika sosial yang terjadi dari ide pembaharuan tersebut. Satu hal yang pasti harus diyakini saat ini; adalah bahwa AMPI harus menyadari bahwa ia bertanggung jawab penuh untuk kelanjutan perjuangan KNPI dimasa datang sebagai tindak lanjut dan konsekwensi kesejarahan.

Saat ini, setelah melalui 4 kali Pemilihan Umum dimana GOLKAR kembali memperlihatkan dirinya sebagai suatu kekuatan Sosial Politik yang kuat, effektif dan dominan dan ini berarti pula bahwa bagian terbesar bangsa Indonesia menerima dan menyetujui ide dan cita-cita pembaruan yang dikembangkan oleh Golongan Karya sebagai alternatif yang terbaik, terutama didalam melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini merupakan cerminan satu-satunya bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi KNPI hal ini merupakan tumpuan perjuangan yang sudah sampai kepada suatu "tidik nadir" (point of no return) yang harus terus diperjuangkan dan tidak mengenal adanya kamus menyerah atau puas diri. Sudah barang tentu AMPI sebagai salah satu tiang penopang utama KNPI tentunya juga memiliki sikap dasar perjuangan yang sama.

Didalam melanjutkan perjuangan-perjuangan ini, sudah selayaknya apabila kita mengadakan evaluasi terhadap apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai, yang mungkin secara situasional saat ini berupa bercermin kepada pengalaman PEMILU 1987 dan proyeksi persiapan menyong-

Digitized by Google

Ide pembaharuan dapat terwujud, bila manusianya bersedia dikritik

song sidang Umum MPR 1988. Karena sesungguhnya didalam proses dinamika sosial terhadap ide pembaharuan yang kita cita-citakan; KNPI dan AMPI adalah ibarat sebuah mata uang logam (coin) dari mekanisme Politik didalam pemerintahan Orde Baru yang harus mampu untuk memberikan warna dominan dalam ujud diri sebagai "agen pembaharu" yang juga bersedia untuk terus menerus diperbaharui dalam sikap, cara, dan penampilannya baik dalam pemikiran maupun didalam tindakannya. Dengan demikian sebagai generasi muda yang diharapkan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Bangsa dimasa datang tidak dapat tidak harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan tidak terjerumus atau terperangkap kedalam kepentingan Politik yang semu dan sesaat, seperti didalam menghadapi Pemilu yang baru lalu.

Suatu keterpaduan berfikir dan bertindak dalam dinamika dan mekanisme Politik yang berlaku, antara anggota AMPI yang ada didalam KNPI dan yang berada didalam struktur AMPI harus terjalin secara otomatis dan harmonis dan jangan sebaliknya, yang karena kepentingan sesaat di antara sesama anggota AMPI saling sikut menyikut. Apabila ini disadari dengan mendasar, maka kebersamaan dan solidaritas di antara sesama kita haruslah kita tempatkan di atas kepentingan individu dan sesaat tadi.

Bertolak dari kenyataan dan pengalaman bersama selama ini maka didalam upaya kita untuk mengurat akarkan hakekat dan keberadaan AMPI di tengah masyarakat luas pada umumnya dan di tengah-tengah generasi muda Indonesia pada khususnya, maka hal yang mendesak harus dilakukan saat ini adalah perubahan terhadap pola pendekatan (approach) yang dilakukan oleh AMPI selama ini dari suatu pendekatan yang birokratis kwantitatif menjadi pendekatan yang human-kwalitatif. Sehingga dengan demikian kita bisa mengharapkan lahirnya kader-kader AMPI yang matang bukan karena "dikarbit" tetapi kader-kader yang matang karena kesadaran dan motivasi perjuangan yang tinggi dan dinamis dan selektif. Karena secara naluri politik kader-kader AMPI juga yang diharapkan menjadi kader KNPI yang tangguh dan memiliki doktrin perjuangan yang baku, dimana jiwa nasionalisme, semangat patriotik dan idealisme berada di atas pemikiran sempit dan nafsu individu atas dasar kepentingan sesaat.

Untuk mencapai maksud di atas melalui program umum AMPI diwaktu dekat ini yang perlu memperoleh penataan ulang adalah yang menyangkut tiga aspek pokok yaitu: Konsolidasi — Mobilisasi — Kaderisasi. Ketiga aspek ini perlu dikaji secara mendasar, terutama dari segi metode pendekatan (approach) terhadap masalah dan manusia-manusianya. Sehingga dengan demikian kita dapat memperoleh suatu kondisi objektif yang proporsional antara input dan output dari kader-kader AMPI secara nasional, regional dan lokal. Didalam praktek nyata, maka KNPI dapat dijadikan ukuran dari peranan dan partisipasi kader-kader AMPI, dimana dari sifat dan fungsi KNPI sebagai wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda Indonesia dan sebagai satu-satunya wadah stabilisator dan dinamisator generasi muda bangsa bisa dijadikan sarana yang effektif bagi AMPI didalam usaha Konsolidasi — Mobilisasi — Kaderisasi dari anggota-anggota AMPI. Sudah barang tentu ini merupakan subjektifitas dari mereka — mereka yang berasal dari AMPI yang berada di KNPI saat ini.

Dari gambaran tersebut di atas, dapatlah kita membayangkan secara strategis akan langkah-langkah taktis yang harus dikerjakan dalam waktu dekat ini, terutama segera setelah RAPIM ini berakhir. Dimana tentunya dalam waktu yang singkat ini KNPI akan melaksanakan Kongresnya dalam tingkat Nasional, dan dalam hal ini diharapkan kesiapan dan kesiagaan AMPI didalam menyongsong Kongres tersebut baik dari segi personalia maupun tentunya konsepsi. Disamping itu tentunya persiapan AMPI secara konsepsional dalam menghadapi Sidang Umum MPR 1988 dan MUNAS GOLKAR 1988 yang akan datang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, baik itu berupa langkah strategis maupun taktis, ini membutuhkan persiapan dan kerja keras yang sungguh-sungguh secara menyeluruh dan terpadu dari alat perlengkapan Organisasi dari tingkat Pusat sampai daerah. Dengan memantapkan Konsolidasi — Mobilisasi — Kaderisasi dengan suatu pendekatan human — kwalitatif, kita boleh merasa yakin dan bangga untuk melanjutkan tugas perjuangan organisasi ini diwaktu-waktu yang akan datang.

KNPI dan AMPI sebagai perangkat dan piranti perjuangan dan pembaharuan yang dicita-citakan oleh Orde Baru dapat berguna bagi bangsa dan negaranya apabila GOLKAR sebagai sumber ide dasarnya. KNPI — AMPI bersedia pula diperbaharui dirinya secara terus menerus terutama sikap, cara berpikir dan bertindak dari manusia-manusia yang ada didalamnya. Ini merupakan tugas dan perjuangan dari generasi mudanya yang masih penuh gejolak dan dinamika idealisme perjuangan. Dan setiap pembaharu pasti akan mendapatkan tantangan yang tidak ringan. Itulah risiko dari pejuang-pembaharu dan pembaharu-pejuang. □

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

DETIK-DETIK PROKLAMASI : *Tepat jam 10 pagi, tanggal 17 Agustus, Presiden Soeharto sebagai inspektur upacara memimpin langsung acara peringatan proklamasi kemerdekaan di halaman Istana Negara. Tampak dalam gambar Presiden Soeharto menyerahkan bendera pusaka kepada salah seorang Paskibraka.*

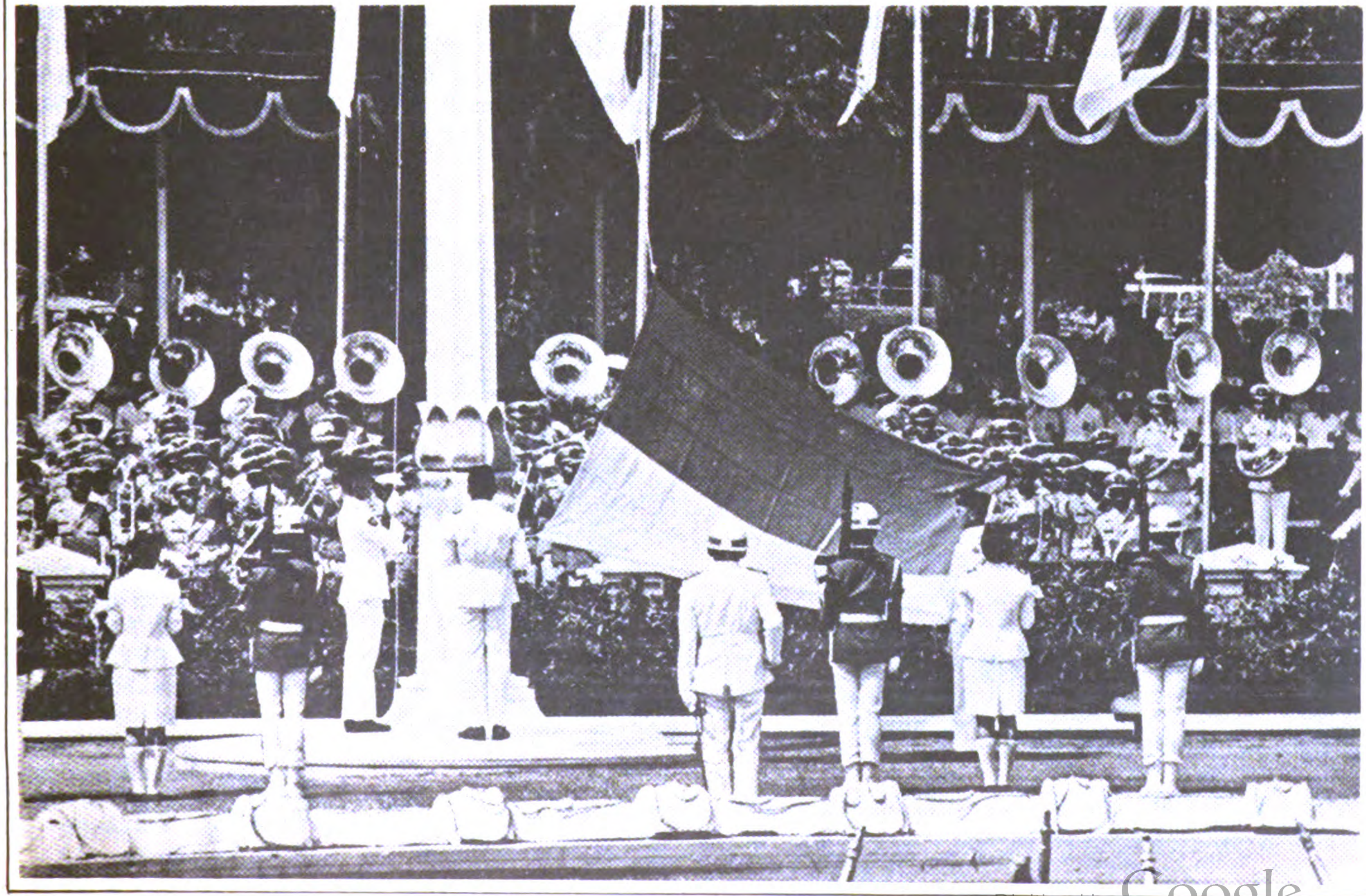

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

30 ORANG TERIMA BINTANG MAHA PUTRA

Presiden Soeharto, Medio Agustus lalu menganugerahkan Bintang Maha Putra, kepada 30 orang. Penerimanya kebanyakan adalah Menteri. Dengan diterimanya Bintang itu, hampir dikatakan semua Menteri praktis telah menerima Bintang tersebut.

Penganugerahan Bintang yang diberikan Presiden di Istana Negara didasarkan atas jasa-jasa dari mereka yang luar biasa kepada nusa dan bangsa. Dari 30 penerima Bintang Maha Putra, 25 orang menerima Bintang Maha Putra Adipradana (Bintang Maha Putra kelas II). Sedangkan yang 5 orang menerima Bintang Maha Putra Utama (Maha Putra kelas III).

Sebetulnya, yang akan menerima Bintang Maha Putra Utama ini masih ada tiga orang lagi. Tetapi, karena mereka sudah almarhum, maka pemberian penghargaan ini diberikan tanggal 10 Nopember, yang waktunya bersamaan dengan hari Pahlawan.

Penerima Bintang Maha Putra Adipradana itu diantaranya; Ny Karlinah Umar Wirahadikusumah, Prof Dr Saleh Afiff, Menteri PAN merangkap Ketua Bappenas; Soepardjo Rustam, Mendagri; Harmoko, Menpen; Soedjarwo, Menteri Kehutanan; Ir Hartarto, Menteri Perindustrian; Dr Ir Suyono Sosrodarsono, Menteri PU.

Achmad Tahir, Menteri Parpostel; Prof Dr Fuad Hasan, Mendikbud; H Munawir Sjadzali, MA, Menteri Agama; Ny Nani Soedarsono SH, Menteri Sosial; Drs Moerdiono, Menmud/Sekkab; Ir Drs Ginandjar Kartasasmita, Menteri Muda UP3DN; Ir Wardoyo, Menmud Peningkatan Produksi Pangan; Ir Hasjrul Harahap, Menmud Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Prof Dr JH Hutasoit, Menmud Produksi Peternakan dan Perikanan; Jenderal LB Moerdani, Pangab/Pangkopkamtib.

Hari Soeharto SH, Jaksa Agung; Dr Arifin Siregar, Gubernur Bank Indonesia; M Kharis Suhud, Wakil Ketua MPR/DPR; H Amir Moertono SH, Wakil Ketua MPR/DPR; H Nuddin Lubis, Wakil Ketua MPR/DPR; Letjen (purn) GH Mantik, Wakil Ketua MPR; FS Wignyosumarsono, Wakil Ketua DPA dan Marathon Wirijamihardja, Wakil Ketua Bapeka.

Sedangkan yang menerima Bintang Maha Putra Utama diantaranya; Mayjen (Purn) Aswismarmo, Sekjen Depdagri; Mayjen (Purn) Yasir Hadibroto, Gubernur Lampung; Mayjen (Purn) Hasan Slamet, Gubernur Maluku; Prof Dr Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali; Soeprapto BA, Gubernur Bengkulu.

Dan tiga penghargaan lainnya yang akan diberikan pada tanggal 10 Nopember nanti adalah Moekarto Notowidagdo, terakhir Dubes RI untuk Kanada; Nazir Datuk Pamontjak, terakhir Dubes RI untuk Pilipina dan almarhum Abdul Halim, bekas Perdana Menteri RI di Yogyakarta. ☐ BM

SAPI QURBAN : *Seusai melaksanakan sembahyang Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Presiden Soeharto menyerahkan Sapi Qurban, yang kemudian untuk diteruskan kepada yang berhak menerima.*

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

REAKTOR NUKLIR SIWABESSY

Kamis, 20 Agustus desa Puspitek Serpong, Jawa Barat mendadak ramai. Hari itu di kawasan Serpong diresmikan sebuah Reaktor Nuklir oleh Presiden Soeharto.

Dalam peresmian itu tampak hadir para menteri Kabinet Pembangunan IV, sejumlah duta besar, Gubernur Jawa Barat dan masyarakat sekitar yang berbondong-bondong ikut menyaksikan peresmian kendati berada di luar lokasi.

Reaktor Nuklir yang diresmikan Presiden Soeharto itu diberi nama "Reaktor Nuklir Serba Guna GA Siwabessy". Pemberian nama itu berkaitan dengan jasa almarhum dalam merintis pengembangan pemanfaatan tenaga atom di Indonesia. Prof Dr GA Siwabessy yang pernah menjadi Menteri Kesehatan itu ikut merintis penggunaan tenaga atom di Indonesia tahun 1954, tatkala ia masih menjabat sebagai Kepala Bagian Radiologi UI, dan tahun 1959, tatkala ia menjabat sebagai Dirjen Lembaga Tenaga Atom (kemudian menjadi Batan).

Dalam sambutannya, Presiden Soeharto menegaskan, pengetahuan dan teknologi merupakan satu-satunya pilihan bagi Indonesia bila tidak ingin ketinggalan jauh lagi dengan bangsa-bangsa yang sudah maju. Terlebih lagi, kata Presiden, bila mengingat kemajuan yang luar biasa di bidang Iptek, selalu memberi kemungkinan baru yang tak terbatas. Penguasaan Iptek juga menentukan percepatan laju jalannya pembangunan.

Selain itu, Presiden mengatakan, bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini masih tetap menyisakan banyak pekerjaan. "Banyak pembangunan yang sudah kita rasakan, namun masih banyak yang perlu kita bangun. Banyak kemajuan yang kita capai, namun masih banyak lagi ketinggalan yang harus kita kejar".□

BM

JANGAN LUPA JASA PAHLAWAN

Presiden Soeharto mengingatkan, agar generasi muda Indonesia tidak melupakan jasa dan pengorbanan para pahlawan nasional, yang telah merebut, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Generasi muda harus berterima kasih kepada mereka, terutama harus diwujudkan dalam usaha meneruskan perjuangan mereka semaksimal mungkin.

Itu disampaikan pada Apel Besar Hari Pramuka ke-26 dihadapan peserta apel di Istana negara. Generasi muda ini perlu mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan, yaitu terwujudnya masyarakat Pancasila. Artinya, pembangunan harus dilanjutkan, ditingkatkan dan diperluas.

Oleh karenanya, mereka yang berada dalam Gerakan Pramuka supaya mempersiapkan diri dengan berbagai ketrampilan dan kemampuan bekerja. Disamping menumbuhkan dan memupuk semangat pengabdian kepada nusa dan bangsa. Bahkan, cinta tanah air adalah bagian penting dari semangat kepramukaan. Ini harus tumbuh subur sepanjang jaman di hati kaum generasi muda.

"Gerakan Pramuka adalah gabungan dan lanjutan dari berbagai organisasi kepanduan, yang telah berjuang membina putra-putri Indonesia jauh sebelumnya, yaitu ketika bangsa Indonesia di bawah kekuasaan penjajah. Gerakan ini sekaligus menanamkan benih-benih semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi pada putra-putri Indonesia," tegas Kepala Negara.

Usai dari acara Apel Besar Hari Pramuka ini, Presiden dan Ny. Tien Soeharto, Wapres dan Ny. Karlinah Umar Wirahadikusumah serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi sipil dan militer, beramah tamah dengan para teladan serta anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Sasono Langen Budoyo, TMII.□

Digitized by Google

Sepatu Saksi

Sepatu lalu melayang. Sasaran yang dituju adalah seorang hakim yang baru selesai membacakan vonnis di sebuah ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kena, hanya palu hakim. Pelempar ternyata seorang nyonya, yang dalam perkara itu menjadi saksi pelapor — saksi korban penggelapan uang.

Tak hanya melempar sepatu, sang nyonya yang agaknya tidak puas atas vonnis yang dijatuhkan kepada terdakwa, berteriak-teriak di depan khalayak yang menyaksikan dan menyebut-nyebut soal uang sogok. Ia bilang, pernah memberi sang hakim dua setengah juta rupiah dari permintaan lima juta rupiah. Maka ia marah ketika hakim 'hanya' menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang 2 tahun 8 bulan.

Selesai unjuk rasa di pengadilan, sang nyonya pergi ke Departemen Kehakiman untuk mengadu. Departemen Kehakiman cukup terbuka dan menampung pengaduan tersebut. Dan berjanji akan mengusut persoalan ini. Sementara itu sang hakim maupun atasannya yang disebut-sebut juga namanya, sama-sama membantah.

Insiden ini sekaligus juga menyangkut martabat pengadilan. Tak heran bila Ketua Mahkamah Agung bersuara. Ketua lembaga tinggi ini Ali Said SH memberikan jaminan bahwa yang menodai lembaga peradilan akan dituntut sesuai hukum yang berlaku. Hakim yang dituduh akan diperiksa. Tapi sang nyonya juga akan diperiksa dan dituntut.

Apa yang diutarakan Ketua Mahkamah Agung adalah tepat. Sang hakim bila terbukti menerima uang yang dua setengah juta, tak boleh tidak harus kena sanksi sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Perbuatan tercela seperti ini tak boleh dimaafkan untuk tidak menimbulkan krisis kepercayaan. Tetapi pada pihak lain, sang nyonya juga tak boleh lepas dari tindakan hukum. Bukan karena ia berani mengadu dan mengungkap soal uang suap itu, tetapi karena tindakannya melempar sepatu — yang menghina martabat lembaga peradilan — dan karena keterlibatannya selaku pemberi suap.

Perasaan kecewa sang nyonya bisa dimaklumi, tetapi caranya melampiaskan kekecewaan, apa boleh buat harus ditindak, karena melanggar hukum. Begitu pula keterlibatannya selaku pemberi suap.

Dibalik itu, peristiwa ini mencerminkan suatu hal yang memprihatinkan. Dan perlu dipikirkan lebih lanjut. Agar terjawab pertanyaan yang selama ini secara umum ada di masyarakat apakah pola 'dagang' seperti ini dalam dunia peradilan sudah lazim? Ada prasangka sejak lama bahwa suatu putusan bisa diatur berat ringannya. Maka dalam kasus ini, kalau benar misalnya sang nyonya memberi uang, dan andaikan uang itu sebesar apa yang diminta, akankah terdakwa dihukum lebih berat sesuai keinginan saksi pelapor? Atau sebaliknya, andaikan seorang terdakwa mau membayar, akankah ia bisa membeli kebebasannya atau setidaknya memperoleh hukuman lebih ringan? Tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan sejumlah pertanyaan lain yang serupa — yang ada di benak banyak orang mengenai lembaga-lembaga peradilan dan instansi penegak hukum kita — tidak mudah untuk dijawab secara memuaskan. Kalau dijawab, mudah terjadi debat kusir yang klasik.

Lalu apa? Tetap harus selalu ada tanggapan dari pejabat yang berkompeten. Dan setiap ada kasus, hendaknya segera ditanggapi dengan penanganan nyata dan pemeriksaan yang diumumkan dengan jelas hasilnya. Harus terlihat bahwa yang bersalah ditindak atau dikenakan tindakan hukum. Hanya dengan cara demikian, kepercayaan dapat ditumbuhkan....

Pra Peradilan & Bentakan

Inipun peristiwa diseputar masalah penegakan hukum di badan peradilan yang sama. Kali ini antara polisi dan bekas tahanannya. Tiga pemuda yang pernah ditahan karena tuduhan pengeroyokan, mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Polres Jakarta Pusat, karena anggapan terkena penangkapan tidak sah dan penganiayaan dalam tahanan.

Sesuai Kuhap, hal ini merupakan suatu yang wajar saja. Tetapi pers memberitakan terjadinya insiden. Ketika sidang gugatan selesai, para penggugat ditemui oleh tiga orang berpakaian preman yang dikenali kemudian sebagai anggota Polres tersebut. Para pemuda itu dibentak-bentak dan ditegur keras kenapa mengajukan gugatan padahal sudah membuat pernyataan tidak akan menuntut. Beberapa waktu kemudian mereka juga mendapat surat panggilan untuk diperiksa dengan tuduhan lain (pemerasan).

Proses pra-peradilan itu kini telah selesai. Gugatan ditolak. Andaikan insiden itu tak terjadi, segalanya akan diterima wajar. Tapi dengan adanya insiden itu, citra kepolisian rasanya terpercik sedikit noda. Apalagi dalam berreaksi kepolisian tampak menonjol ciri mekanisme defensifnya. Seolah-olah kepolisian tidak ikhlas menegakkan hukum, setidak-tidaknya tak ikhlas terhadap pelaksanaan Kuhap secara utuh. Kalau polisi tak ikhlas, bagaimana nantinya dengan masyarakat?

Asap Jalan Tol

Untuk pertama kalinya dalam sejarah jalan tol di Indonesia, terjadi tabrakan beruntun yang terbesar, bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Dua puluh dua kendaraan terlibat, ada yang tewas dan puluhan mengalami luka-luka.

Yang jadi gara-gara adalah asap tebal karena ilalang yang dibakar di luar pagar jalan tol Tanggerang—Jakarta. Tertiup angin, asap itu menggulung di bagian tertentu jalan tol menjelang pintu gerbang masuk Jakarta menghalang pandangan para pengendara dan terjadilah kecelakaan itu.

Karena belum berpengalaman dengan bahaya asap seperti ini, maka petugas pengelola jalan tol agaknya kurang gesit dalam prevensi. Para pengemudi relatif tidak mendapat isyarat-isyarat peringatan — misalnya agar melambatkan laju kendaraan. Ketika kecelakaan telah terjadi barulah semua pihak terperangah. Terutama ketika ada suara yang menuntut tanggungjawab dan kemungkinan ganti rugi.

Meskipun sumber asap berasal dari luar, agaknya tak terlalu salah permintaan pertanggungjawaban dialamatkan kepada pengelola. Selain bahwa peraturan yang ada juga memuat masalah tanggung jawab tersebut, diluar itu ada masalah psikologis dan tanggungjawab moral yang semestinya rela dipikul oleh pengelola. Maka tak perlu debat berkepanjangan. Upayakanlah musyawarah dan pendekatan terhadap korban sebaik-baiknya. Dan selain itu, agaknya selain harus lebih gesit, tindak pengamanan yang lebih luas sampai diluar batas pagar jalan tol sudah perlu dipikirkan. Lalu, tak kalah pentingnya, penyuluhan dan pendekatan kepada penduduk sekitar jalan tol....

Kasus Calon Wagub

Masalah hukum kita diperkaya lagi oleh jenis kasus menarik. Kini sedang berlangsung proses peradilan terhadap seorang terdakwa yang dituduh 'menipu' seorang pejabat yang berkaitan dengan kursi Wakil Gubernur — di salah satu propinsi.

Terdakwa menerima uang sekitar 150 juta rupiah dengan janji akan memperjuangkan kursi Wakil Gubernur bagi sang pejabat. Ternyata, orang lain yang menjadi Wakil Gubernur. Terungkap pula bahwa pejabat yang sama pernah menyetor dana untuk sebuah yayasan tempo hari dengan catatan diperjuangkan untuk jadi Walikota di sebuah kota besar di pulau Jawa ini.

Diluar aspek hukum, tersirat fenomena baru: Jabatan pemerintahan hendak dijadikan komoditi dagang, dan pembelinya ternyata ada saja.

Semoga, kasus ini hanya yang pertama dan yang terakhir, artinya hanya itu satu-satunya. Tapi tak ada salahnya untuk menghimbau semua pihak untuk tidak tergiur ke dalam bisnis jenis baru. Terutama bagi yang berminat sebagai pembeli jasa. Kalau ada desas-desus — tentang jual beli kursi jabatan pemerintahan ataupun lembaga legislatif — biarlah itu sekedar desas-desus, bukan hal yang nyata....

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA ORGANISASI

LOKAKARYA PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pemiilu 1987 sudah terlaksana, hasil-hasilnya sudah diketahui, dan penyusunan lembaga MPR dan DPR di tingkat pusat sedang dalam penyelesaian. Hasil Pemilu yang dicapai oleh kekuatan sospol peserta Pemilu sangat ditentukan oleh ketangguhan organisasi termasuk para kadernya.

Sehubungan dengan hasil yang dicapai itu DPP Golkar menyelenggarakan lokakarya pengembangan organisasi Golkar awal bulan Agustus yang lalu. Lokakarya yang bersifat diskusi bebas ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari tokoh-tokoh penggerak organisasi yang kompeten, dalam rangka menyusun rencana-rencana organisasi di masa yang akan datang. Termasuk dalam rencana ini adalah tentang peningkatan peranan kader-kader Golkar baik teritorial maupun fungsional dalam kehidupan Golkar, inventarisasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemenangan Pemilu 1992, dan strategi pemenangan pemilu 1992 tersebut.

Peserta lokakarya terdiri dari DPP Golkar dan unsur-unsur DPD Golkar tingkat I se Indonesia. Unsur-unsur daerah tersebut terdiri dari tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh DPD Golkar tingkat I, yang dianggap menguasai masalah-masalah yang didiskusikan. Ditentukan masing-masing daerah mengirim 2 orang peserta.

Lokakarya yang dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi DPP Golkar itu telah membahas pula tentang masalah penyelenggaraan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Nasional yang merupakan kegiatan organisasi lima tahunan sekali seperti ditentukan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi. Kalau di masa-masa lalu Musyawarah Daerah selalu dilakukan sesudah Musyawarah Nasional, maka kini dipikirkan kemungkinan pelaksanaan Musyawarah Daerah mendahului Musyawarah Nasional.

Hasil-hasil Lokakarya akan disampaikan kepada DPP Golkar guna diolah menjadi keputusan lebih lanjut.☐

GOLKAR BANTU YAYASAN FATWA SAMAWI

Golkar sangat menghargai para kadernya yang turut serta memajukan bidang pendidikan dan tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Demikian dikatakan Ketua DPP Golkar Ny AS Moerpratomo dalam kesempatan penyerahan bantuan DPP Golkar kepada Yayasan Fatwa Samawi di desa Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, 11 Agustus lalu.

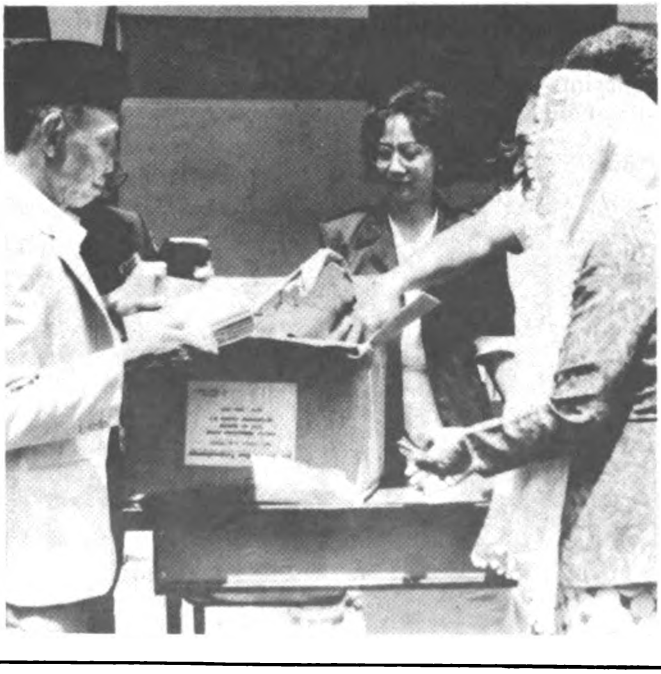

Bantuan yang diserahkan DPP Golkar itu adalah 120 meja kursi, berasal dari Ny Gunariah Muhdi, kader muda Golkar yang juga duduk sebagai bendahara AMPI, 450 Juq Amma dan Al-Quran untuk yayasan Fatwa Samawi dan satu buah mesin ketik untuk DPD AMPI rayon Bekasi selatan.

Lebih lanjut Ny Moerpratomo dalam sambutannya mengatakan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, oleh karena itu merupakan suatu tugas yang pokok dari kita bersama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur yang dilandasi manusia-manusia yang berpendidikan cerdas.

Mencerdaskan bangsa adalah suatu program yang tidak pernah mempunyai titik akhir dan juga merupakan kunci kemajuan bangsa dan negara, ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, dalam zaman pembangunan sekarang ini, tugas pokok kita adalah meningkatkan kecerdasan dan memperkuat watak bangsa, agar kita mampu tumbuh menjadi bangsa yang maju dan berbudaya kuat dan terhormat. Dalam proses belajar dan mengajar setiap generasi dari suatu bangsa ditantang untuk melakukan tugas pendidikan itu sebaik-baiknya. Oleh karena itu mutlak harus kita himpun kesamaan di antara kita dan mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang dapat memperuncing pertentangan dan perbedaan. Sebab, kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu syarat pokok untuk mewujudkan masyarakat Pancasila, tandasnya.☐ WT

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA ORGANISASI

LPPH DKI DI DPP GOLKAR

Oka Mahendra, atas nama DPP Golkar, Rabu, 19 Agustus lalu, menerima pengurus harian Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH), DKI Jakarta. Rombongan yang berjumlah 13 orang itu dipimpin oleh M Prodjo Amidjoyo SH dan Drs Kusrin SH.

Acara yang berlangsung di DPP Golkar itu berjalan dengan penuh kekeluargaan. Kehadiran LPPH ke DPP Golkar ini bermaksud untuk melaporkan pelaksanaan program dari LPPH secara tetap. Program tersebut di antaranya meliputi: konsultasi hukum, penanganan perkara, penyuluhan hukum, penerbitan buku hukum, panel diskusi hukum, tanggapan serta pendapat lewat mass media.

Khusus mengenai penyuluhan hukum, dilaporkan, bahwa semenjak tahun 1984 hingga pertengahan tahun 1987, LPPH telah berhasil memberikan penyuluhan hukum kepada warga dilingkungan RT dan RW diwilayah DKI Jakarta. Selama kurun waktu itu telah diberikan 1.235 kali penyuluhan.

Sedangkan materi yang diberikan itu adalah pengantar ilmu hukum yang meliputi; pengertian hukum, macam-macam hukum, tujuan hukum dan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat seperti pembunuhan, penipuan, penggelapan, pencurian, saksi palsu serta pelanggaran.

Tentang hukum pidana penyuluhan yang diberikan meliputi; masalah KUHP, upaya hukum yang ditempuh dalam penegakan keadilan, persidangan di pengadilan negeri, naik banding dan kasasi. Kemudian tentang hukum perdata penyuluhan yang diberikan di antaranya adalah masalah KUH Perdata, jual beli tanah, gunanya akte, warisan dan perkawinan.

Selain itu juga diberikan penyuluhan tentang hukum acara perdata yang meliputi; gugat menggugat, peradilan perdata, eksekusi, masalah Perda no 3 tahun '72 yang menyangkut tata tertib IMB, kaki lima, angkutan, perlistrikan, perkereta-apian, tuna karya, tuna wisma, tuna susila, banjir dan tertib sosial politik.

Dalam kesempatan itu, Oka Mahendra yang juga adalah penasehat LPPH dalam pengarahannya mengharapkan, agar tradisi yang baik ini terus ditingkatkan. Terlebih lagi, kata Oka, yang menyangkut masalah yang dihadapi masyarakat di DKI Jakarta, yang semakin tahun semakin meningkat.☐ Wit

DPP GOLKAR SALURKAN QURBAN

Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya dalam melaksanakan ibadah qurban tahun ini berhasil mengumpulkan hewan qurban, sebanyak 11 ekor sapi dan 89 ekor kambing. Penyerahannya kepada fakir miskin dan yang berhak menerima selain melalui DPP Golkar juga melalui orsosmasinal, antara lain GUPPI, MDI, Al Hidayah, Wanita Tarbiyah, PPTI dan Pondok Pesantren Al Kamal.

Penyerahannya secara simbolis dilakukan berturut-turut oleh Ketua DPP Golkar Drs Gatot Suwagio kepada panitia qurban Al Kamal 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing; Ir Akbar Tandjung menyerahkan kepada MDI 3 ekor sapi dan 7 ekor kambing; KH Qodratullah menyerahkan kepada GUPPI 7 ekor kambing, Ny. Moerpratomo menyerahkan kepada Al Hidayah 7 ekor kambing dan Ketua Panitia Andi Rorotonang menyerahkan kepada PPTI 7 ekor kambing.

Dalam memberikan sambutan pada acara tersebut Ketua DPP Golkar Ny AS Moerpratomo mengatakan bahwa pelaksanaan Qurban di DPP Golkar setiap tahunnya selalu meningkat baik volumenya maupun kualitas penyelenggaraannya. Jika penyaluran hewan qurban ini selain dilakukan di DPP Golkar juga dipercayakan kepada orsosmasinal kerohanian, ini menunjukkan kebersamaan di antara umat Islam Keluarga Besar Golongan Karya. Apabila ini terus dikembangkan maka diharapkan kerjasama antara orsosmasinal kerohanian akan dapat menjamin terlaksananya program Golkar khususnya konsolidasi organisasi yang lebih mantap, ujarnya.

Selain itu ia mengatakan, umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia merupakan potensi bangsa yang besar dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar pula dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Oleh karenanya, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah mutlak diperlukan demi tetap terjaminnya stabilitas dan ketahanan nasional. Perkembangan dan masa depan bangsa kita menuntut kesungguhan kita dalam mengembangkan peri kehidupan beragama yang sejalan dengan usaha pembangunan bangsa kita sebagai pengamalan Pancasila. Hal ini merupakan modal dasar bagi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, tegas Ny Moerpratomo.☐ WT

Digitized by Google

Oleh : M. Syafa'at Habib

Titik Puncak Tekad Bangsa

Proklamasi Kemerdekaan R.I. 1945 Merupakan Titik Puncak Tekad Seluruh Bangsa Indonesia Untuk Bersatu Memperjuangkan Pemilikan Negara Merdeka Yang Mandiri Dan Berwibawa

Hari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak akan pernah dilewatkan oleh seluruh warga Indonesia di manapun mereka berada, untuk diperingati dengan upacara yang dianggap paling mengesankan. Saat ini merupakan tonggak sejarah yang paling penting, karena di saat itulah bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia, bahwa tidak hanya bangsa Indonesia yang harus bebas dari cengkeraman Kolonialisme, akan tetapi juga di seluruh dunia sudah tidak layak lagi ada penindasan penjajahan.

Dilatar-belakangi oleh kemiskinan total, yang diakibatkan oleh penjajahan barat yang tiga setengah abad, ditambah dengan pendudukan bala-tentara Jepang yang mengibarkan bendera diktatur militerisme selama berkecamuknya Perang Dunia ke II, serta dibayangi oleh akan kembalinya kekuatan Kolonialisme di bumi Indonesia yang didukung pasukan Sekutu yang telah memenangkan perang besar itu, bangsa Indonesia melalui proklamator Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan sekaligus berdirinya Negara Republik Indonesia.

Proklamasi ini merupakan keberanian, yang didorong oleh desakan kekuatan bangsa sendiri, yang makin matang untuk mandiri sebagai bangsa yang merdeka. Sejarah dan kultur bangsa cukup sebagai pendukung, yang bisa menghantarkan bangsa Indonesia untuk berdiri tegak sejajar dengan bangsa lain. Proklmasi ini dinyatakan bukan tanpa persiapan, tetapi jelas menggambarkan titik puncak tekad bangsa yang telah disadarkan oleh kematangan perjuangan politik yang cukup panjang, penuh tragedi dan tahap-tahap percobaan yang tidak ringan. Masa lampau telah diisi oleh

penindasan kolonial, konflik dan konfrontasi politik maupun fisik melawan kekuatan penjajah, penjara dan penyiksaan, pembrontakan dan peperangan yang banyak mengalirkan darah, keterbelakangan - kebodohan dan kemiskinan yang menghantu oleh politik divide et impera serta pauverisasi kaum kolonial, politik etik maupun non-etik yang menyesatkan dan menjerumuskan, serta lain-lain pengalaman pahit yang perlu segera dihempaskan dari lembaran sejarah bangsa. Bangsa Indonesia telah mengimpikan masa depan yang cerah, penuh kesejahteraan dan keadilan.

Mukadimah UUD Republik Indonesia, yang dikumandangkan hanya sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, menderingkan suara yang benar-benar nyaring, bahwa "Penjajahan harus dihapus karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".

Berdasarkan filosofi kemanusiaan yang tinggi dan benar, dan sadar sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak hanya berani menyatakan kemerdekaannya, akan tetapi juga berkata lantang berterus-terang kepada dunia, bahwa penjajahan harus segera dihapus dari permukaan bumi, terutama ditujukan kepada mereka yang masih mengibarkan bendera diskriminasi ras dan tingkatan manusia dengan menghalalkan kolonialisme.

Bumi ini, oleh sikap religiositas bangsa Indonesia, dipandang sebagai ni'mat Tuhan YME, yang harus dikelola secara sama derajat di antara manusia dengan menegakkan "perikemanusiaan" dan "perikeadilan". Di atas bumi itu manusia diperkenankan berlomba mengerjakan kebaikan dan membanteras keburukan. Hal ini telah menjelma sebagai kesadaran rakyat yang tidak bisa ditawar lagi. Proklamasi adalah pengejawantahannya.

Manusia Indonesia telah siap mental maupun fisik untuk menghadapi konsekuensi proklamasi itu. Dan terbukti perang kolonial tak bisa dihindarkan, bahkan telah merenggut putera-putera bangsa yang terbaik, dalam perang gerilya selama hampir lima tahun revolusi fisik di awal kemerdekaan.

Belanda yang paling bertanggung-jawab dalam mengeksploitasi Indonesia dalam dekapan kolonialisme. Belanda tidak menyadari aspirasi yang telah membara dari bekas jajahannya, yang dulu disebut sebagai Hindia Belanda ini. Mereka ingin kembali menjajah, tanpa mau belajar dari pahitnya pendudukan Nederland sendiri selama perang dunia ke II, oleh Jerman dan kekalahan mereka di Hindia Belanda oleh Jepang. Kecerobohan ini berhadapan dengan patriotisme yang telah ditempa oleh sejarah yang tidak mungkin dibendung lagi oleh Imperialisme Belanda, sekalipun dibantu sekutu-sekutunya. Ketangguhan tekad bangsa Indonesia terbukti dalam pertempuran

Digitized by Google

sengit yang bermula di Surabaya. Dengan semangat "amanat penderitaan rakyat" dan dengan teriakan yang sering terdengar "Allahu Akbar", akhirnya kemudian perang kemerdekaan ini dimenangkan oleh pihak yang benar ialah bangsa Indonesia. Tema Belanda yang memakai istilah mengelabuhi dunia, yakni "Aksi polisionil" ternyata tidak lagi sanggup menahan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Belanda harus mundur dari bumi Indonesia yang didudukinya secara tidak sah, selama berabad-abad. Bahkan kurang lebih enam belas tahun kemudian, dengan segala dalih keberatan, merekapun harus menarik diri dari bagian bumi Indonesia yakni Irian Barat; hanya kegigihan bangsa Indonesia jualah yang mampu mengenyahkan kekuatan penjajah dari Irian ini.

Bangsa-bangsa terjajah telah bangkit untuk mandiri setelah kemelut perang dunia ke II berakhir, melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan modern. Tak ada kata lain bagi PBB, yang terlanjur mengumandangkan "Declaration of Human Rights, dan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen", untuk mendukung setiap negeri terjajah melepaskan diri mereka dari cengkeraman penjajahan, yang tidak sesuai lagi dengan hak dan peri kemanusiaan. Demikianlah India, Pakistan, Malaysia, Singapura, banyak negeri-negeri Afrika dan lain-lain menyatakan berdiri mandiri bebas dari kekangan penjajahan. Sedang penjajah yang enggan meninggalkan territoire nasional tertentu, oleh tuntutan Geopolitik modern, terbukti harus berhadapan dengan kekuatan liberalisasi rakyat terjajah, seperti Aljazair, Viet Nam dll. Bahkan sampai detik inipun masih ada daerah-daerah dunia yang berteriak ingin lepas dari penjajahan dan politik diskriminasi.

Proklamasi Kemerdekaan Menyaratkan Persatuan Dan Kesatuan Langkah

Semua pertentangan antar suku, agama, paham politik, kepentingan ekonomi, jenis budaya dan lain-lain harus berakhir dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan itu. Hal ini merupakan prasyarat mutlak bagi suksesnya tujuan proklamasi itu sendiri. Persatuan dan kesatuan langkah akhirnya disadari oleh bangsa Indonesia sendiri, sekalipun tidak tanpa rintangan dan hambatan. Bahkan sejarah bangsa selama ini membuktikan

Proklamasi merupakan keberanian yang didorong oleh kesadaran sendiri

bahwa rintangan dan hambatan itu begitu besarnya, sehingga sering sangat membahayakan eksistensi Negara hasil perjuangan mereka bangsa Indonesia sejak proklamasi.

Sejak proklamasi, kibaran bendera Merah Putih milik Republik Indonesia makin menantang dunia, dan akhirnya seluruh persoalan sengketa dengan penjajah terselesaikan. Persoalan dalam negeri pun satu demi satu terselesaikan, yakni persoalan proses sejarah penyatuan bangsa. Sekarang setelah lebih dari empat dekade kemerdekaan bangsa Indonesia, ternyata dunia dapat menyaksikan Indonesia yang telah lebih maju dan mampu berswa-sembada beras, walaupun di hadapan bangsa ini masih menghadang banyak persoalan nasional maupun internasional, namun hikmah proklasi kemerdekaan dan kesadaran yang makin tinggi dari rakyat Indonesia sendiri, in syaAllah bangsa ini mampu tegak berdiri sebagai bangsa yang kuat dan sentausa.

Bukankah sejak bendera kemerdekaan dikibarkan itu telah bulat diniatkan oleh bangsa Indonesia sendiri, bahwa Negara RI yang diproklamasikan itu haruslah menjadi suatu negeri yang: (1) Merdeka, yang (2) Bersatu, yang (3) Berdaulat dan yang (4) Adil dan Makmur. Proses sejarah selama ini, memang perwujudan cita-cita luhur yang didambakan proklamasi dan UUD 1945 sejak 17 dan 18 Agustus 1945.

Kemerdekaan harus disertai persatuan dan kesatuan seluruh rakyat, sekalipun dalam ragam kebhinekaan mereka. Keragaman bukan penyebab perpecahan, akan tetapi justru harus menjadi kekayaan unsur nasional yang dipadukan dalam kekuatan persatuan. Segala suku, faham keagamaan, tradisi, kultur, dan latar-belakang lain tidak boleh meretakkan persatuan dan kesatuan langkah bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Sehingga dampaknya positif berupa terwujudnya stabilitas, mutu kedaulatan yang tinggi dan keadilan masyarakat dalam kemakmuran bersama. Negeri Indonesia diharapkan menjadi Negeri yang "Mardikengrat, mBau-denda, Hanyakrawati" (Merdeka berdaulat dan berwibawa). Hendaknya menjadi Negeri

Digitized by Google

yang ''Panjang-apunjung, Pasir-hawukir, Loh-jinawi, Gemah-ripah, Tata-tentrem, Karta-raharjo'' (ialah, Negeri yang jauh tersohor namanya, tinggi kewibawaannya, terdiri dari lautan luas dan daratan yang bergunung-gunung, tumbuh apa saja yang ditanam dan murah segala apa yang dibeli, dimana-mana perdagangan ramai, tenang mereka yang berumah tangga, masyarakat tertib, keamanan terjamin, sejahtera dan jauh dari segala ancaman bahaya).

Negeri yang hebat itu hanya akan bisa tercapai oleh bangsa besar Indonesia, apabila mereka sanggup untuk melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam semua aspeknya. Kemerdekaan yang didukung oleh persatuan dan kewibawaan kedaulatan tersebut akan mampu secara lancar menciptakan masyarakat yang tertib dan stabil, Indonesia yang adil dan makmur. Bukankah leluhur bangsa Indonesia sendiri pernah mendambakan suatu Negara kuat, yang bersifat: (1) Jembar jagade (besar dan luas territoirenya), (2) Padang obore (terang-benderang sinar yang dipancarkan), (3) Duwur kukuse (tinggi asap kewibawaannya), dan (4) Adoh kuncarane (jauh nian kemasyhurannya, oleh sifat-sifat mulia negeri tersebut).

Oleh sebab itu persatuan dan kesatuan langkah, yang sering disymbolkan dalam konsensus nasional dan jiwa besar bangsa Indonesia, merupakan syarat mutlak terwujudnya amanat proklamasi kemerdekaan. Penataan politik tak lain bertujuan memperkokoh persatuan dan kesatuan langkah bangsa.

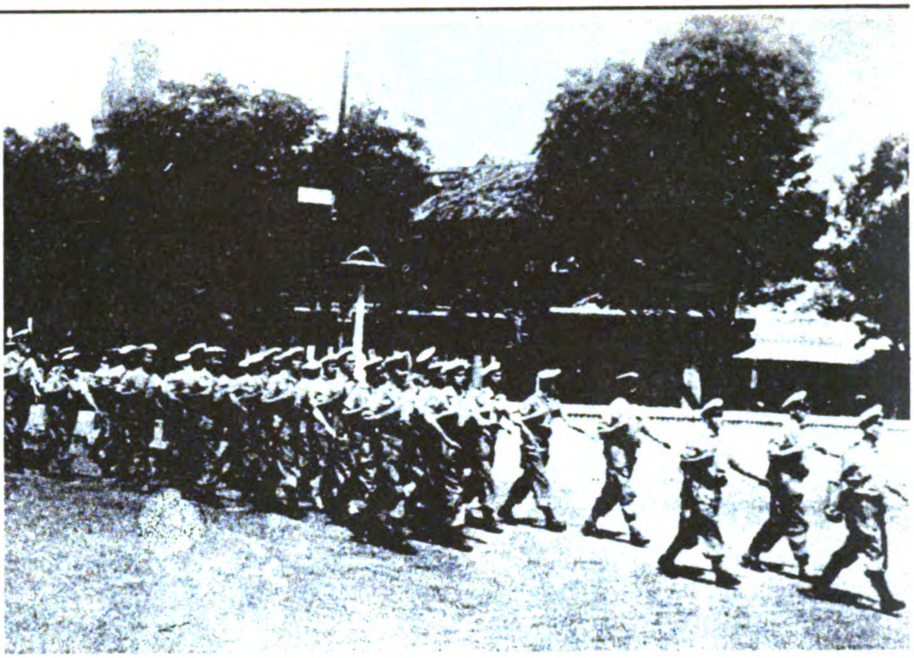

Proklamasi adalah suatu perjuangan

Proklamasi Adalah Suatu Perjuangan

Ketika proklamasi dinyatakan kepada dunia, mungkin timbul pertanyaan, mengapa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jawaban pernyataan ini dapat dengan mudah diberikan oleh setiap warga Indonesia, yakni agar urusan Indonesia bisa diatur oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak hanya untuk memberikan kepuasan tetapi juga demi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kalau ditanyakan kepada suasana di awal kemerdekaan, maka jawabannya akan muncul dari Mukadimah UUD, ialah

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SEMARANG
JL KELUD UTARA III TELP. 311502 SEMARANG – 50232

SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN
" INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SEMARANG "
MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERSELENGGARANYA
PEMILU 1987 DENGAN AMAN TERTIB DAN LANCAR SERTA MENYAMBUT
GEMBIRA SUKSES DAN KEMENANGAN YANG DICAPAI G O L K A R.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Imam Barjo, SH No. 1, Kotakpos 270, Semarang, Telpon 311513 – 311514 – 311516 – 311520

SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN
" UNIVERSITAS DIPONEGORO "
MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERSELENGGARANYA PEMILU 1987 DENGAN AMAN TERTIB DAN LANCAR
SERTA MENYAMBUT GEMBIRA SUKSES DAN KEMENANGAN YANG DICAPAI GOLKAR

Digitized by Google

Proklamasi Kemerdekaan menyaratkan persatuan dan kesatuan langkah

"Agar bangsa Indonesia bisa berkehidupan kebangsaan yang bebas" Jawaban UUD 1945 tidak akan berhenti di sini. Kehidupan yang bebas tersebut untuk apa, ialah untuk bisa membentuk "Pemerintahan Negara Indonesia", yang mampu: (1) Melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. (2) Memajukan kesejahteraan umum. (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa. (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tampaknya jawaban-jawaban tersebut sederhana, namun sebenarnya mengandung amanat kemerdekaan yang sangat kompleks dan sukar, penuh tantangan masa depan, yang memerlukan pemecahan masalah secara nasional yang serius.

Kalimat dalam proklamasi memang sangat sederhana, kalimat-kalimat dalam UUD 1945 pun sangat sederhana. Tetapi dibalik kesederhanaan itu termuat amanat sejarah bangsa yang sangat kompleks dan luhur. Amanat ini hanya bisa diwujudkan dengan "perjuangan". Oleh sebab itu proklamasi mengandung acuan perjuangan. Istilah perjuangan mengandung tiga arti penting, ialah (1) Merebut atau achieving, (2) Memanfaatkan atau utilizing dan (3) Mengembangkan atau developing. Merebut kemerdekaan dari tangan penjajahan adalah perjuangan, memanfaatkan hasil kemerdekaan, dengan mengisinya secara positif adalah perjuangan, sedang mengembangkan dengan pembangunan nasional yang terus ditingkatkan dari waktu ke waktu lain adalah puncaknya perjuangan.

Memang bangsa Indonesia oleh kegigihan perjuangannya, telah berhasil membuktikan mampu berkehidupan kebangsaan yang bebas mandiri, serta berpemerintahan Negara yang cukup stabil dan kuat, namun sejarah akan terus mempertanyakan, bagaimanakah pengejawantahan yang seharusnya tata-kehidupan kebangsaan yang bebas itu, dan bagaimanakah kriteria pemerintahan Negara Indonesia yang stabil dan kuat itu. Keduanya perlu peningkatkan mutu terus menerus dengan perjuangan dari manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

Nah tentunya empat syarat, yang perlu menjadi jawabannya, yang rumusannya telah dipateri dalam mukadimah UUD 1945 tadi, si empat "Me", harus dibuktikan dalam perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Penyelenggaraan sistem keamanan nasional yang mampu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia perlu terus disempurnakan. Sistem perekonomian nasional yang dijiwai falsafah Negara Pancasila harus mampu menjawab tantangan memajukan kesejahteraan. Sistem sosial-budaya Indonesia harus tuntas mencerdaskan kehidupan bangsa dari segala kelemahan dan kebutaan terhadap tantangan kemajuan zaman. Dan peranan internasional Indonesia harus mempunyai arti maksimal dalam ikut serta menertibkan dunia yang makin banyak kemelutnya ini, berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tak seorangpun dapat mengatakan kepuasan dalam tingkat perjuangan yang bagaimanapun hebatnya, namun kesadaran bangsa untuk terus meningkatkan perjuangannya perlu terus ditumbuhkan untuk mengatasi semua masalah, sebagai akibat proklamasi kemerdekaannya sendiri.

Negara RI telah terbentuk, bahkan sekarang terbukti makin kokoh dan kuat. Negara ini berkedaulatan rakyat, berarti rakyatlah yang harus memegang kekuasaan tertinggi dan menentukan jalannya sejarah bangsa. Oleh sebab itu peran rakyat harus makin ditingkatkan, baik mutu maupun perannya. Sedang dasar Negara adalah Pancasila, yang harus menjadi sumber dari segala sumber tata nilai bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu semua hanya akan berhasil oleh perjuangan seluruh warga Indonesia tan-

Digitized by Google

Dibayangi oleh kekuatan kolonialisme

pa pandang bulu, dalam derapnya persatuan dan kesatuan.

Tujuan Proklamasi Terutama Terselenggaranya Dengan Baik Pemilikan Negara Yang Merdeka, Mandiri dan Berwibawa

Kelahiran Republik Indonesia dipertengahan abad duapuluh ini sungguh memberikan harapan besar sekaligus tantangan yang tidak ringan. Hampir duapuluh lima tahun setelah proklamasi, bangsa Indonesia baru bisa berbenah diri, dengan mengetrapkan sistem pembangunan nasional yang mantap. Dari satu Pelita ke Pelita yang lain telah diusahakan secara bersungguh-sungguh oleh rakyat bersama Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Pemanfaatan bantuan luar negeri, yang sering mengundang resiko besar, baik politik maupun pengelolaan perekonomian, bagaimanapun masalah yang dihadapi, telah sedikit demi sedikit merubah wajah kemiskinan sosial menjadi kesejahteraan. Penataan politik telah banyak memberikan hasil, terutama dalam bentuk sistem nasional yang makin mapan dan mantap. Penataan ekonomi, dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan berarti, sekalipun masih ada ganjalan prinsipal tentang bentuk "pemberlakuan sistem perekonomian Pancasila di bumi Indonesia", dan koperasi sebagai soko guru ekonomi masih perlu banyak penegasan dan penentuan langkah positif.

Amanat kemerdekaan yang diperoleh dari proklamasi, yang sekaligus menjadi tujuan utama nasional, ialah terselenggaranya dengan baik pemilikan Negara yang merdeka, mandiri dan berwibawa, selain merupakan tugas nasional yang berat dan terus-menerus, juga akan meminta pencurahan seluruh hak dan kewajiban setiap warga dan seluruh rakyat Indonesia ditingkat apapun dia berada untuk mewujudkan secara nyata. Bangsa ini memang telah merdeka. Kemerdekaan haruslah suatu kemerdekaan yang bulat tanpa ketergantungan dan campur tangan atau penindasan dalam bentuk apapun dari tangan atau kekuasaan asing. Kemandirian perlu perangkat lunak maupun keras, yang tidak cukup diperjuangkan oleh satu generasi manusia Indonesia. Indonesia sedang menuju menjadi Negeri yang modern dan penuh produktivitasnya kegiatan industrialisasi, hal ini merupakan kecenderungan yang akan sangat menunjang bagi kemandirian bangsa. Dampak modernisasi dan industrialisasi adalah sisi lain yang memerlukan perhatian khusus, baik dampak yang positif maupun yang negatif.

Kiranya telah menjadi tekad seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya menuju cita-cita bersama yang luhur itu, yakni merdeka, mandiri dan berwibawa, tetapi mereka semua telah sepakat bahwa dalam menaklukkan AGHT yang menghadang cita-cita tersebut, mereka bangsa Indonesia telah mempunyai senjata ampuh perjuangan, ialah Pancasila. Pandangan hidup dan ideologi Negara ini jelas telah memaklumkan kepada dunia, bahwa Indonesia bukanlah Negara yang akan mengikuti pola atau sistem Negara lain, baik yang liberal maupun totaliter, tetapi tegas berpendirian, bahwa bekal hidup bangsa yang berupa Pancasila akan mampu memberi warna khusus bagi bangsa dan Negara Indonesia. Indonesia tidak akan menganut faham materialistik, faham humanistik (yang sering disebut sebagai faham agama tanpa Tuhan), faham eksistensialitik yang mengingkari atau meragukan akan peranan Tuhan dalam diri dan masyarakat manusia, faham positivistik atau pragmatik yang mungkin hanya mengandalkan keampuhan reasoning dan ilmiah manusia, faham atheistik yang anti Tuhan dan faham-faham lain, karena Indonesia telah cukup memiliki falsafah dan pandangan hidup serta ideologi yang kokoh kuat serta lengkap, yang rasional, terbuka, ber-Tuhan, positif, demokratis, dinamis dan selaras dengan hati-nurani manusia sendiri, serta yang paling menentukan adalah sebagai sarana dasar pemersatu dalam kebhinekaan bangsa Indonesia dan kemajemukan masyarakatnya.

Tidak berlebihan kiranya, apabila dalam akhir tulisan ini disimpulkan, bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 merupakan titik puncak tekad seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu memperjuangkan pemilikan Negara Merdeka yang merdeka, mandiri dan berwibawa.□

Digitized by Google

Oleh : AA. Oka Mahendra

Type-type Kepemimpinan

Tiap pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinan guna mencapai tujuannya memiliki kekhasannya sendiri. Berdasarkan cara-cara dan gaya kepemimpinan tersebut para ahli menggolongkan type kepemimpinan dengan berbagai kriteria.

Conway misalnya membagi kepemimpinan kedalam tiga type kepemimpinan seperti berikut ini.

Yang pertama, Crowd compeller, yaitu type kepemimpinan yang membakar semangat para pengikutnya dengan pandangan-pandangannya.

Kedua, Crowd exponent, yaitu type kepemimpinan yang merasakan dan mengexpresikan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Dan yang ketiga, Crowd representative, yaitu type kepemimpinan yang hanya dengan bermodal suaranya saja ia membentuk pendapat dari masyarakatnya.

Ahli pikir lainnya yang berusaha untuk menyimpulkan pandangannya dan mengajukan bermacam-macam typologi kepemimpinan antara lain Borgadus.

Borgadus membagi type kepemimpinan menjadi type otokratik, demokratik, exekutif dan type cerminan intelektual. Sedangkan Bell, Hill dan Wright dalam penelitiannya tentang kepemimpinan mengidentifikasikan type-type kepemimpinan: formal, reputasional, sosial dan type kepemimpinan yang mempengaruhi orang lain dalam kontak sehari-hari.

Masih banyak lagi sarjana yang mempelajari kepemimpinan dan mengklasifikasikan type kepemimpinan dengan berbagai tolok ukur.

Dengan memperhatikan berbagai pandangan para ahli, secara garis besar dapat dikemukakan enam type kepemimpinan yang pada umumnya dikenal.

Type Otokratis. Kepemimpinan dengan type otokratis menganggap organisasi sebagai miliknya sendiri, ia bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggotanya. Dan menganggap mereka sebagai bawahan yang merupakan alat untuk mencapai tujuannya. Type kepemimpinan semacam ini hanya menggantungkan kekuasaannya atas pengangkatan formalnya dan semua tindakannya tidak boleh diganggu gugat dan kekuasaannya yang kuat ini sudah menimbulkan sikap "ABS" dikalangan pengikut-pengikutnya.

Type Militeristis. Kepemimpinan militeristis disini dimaksudkan menerapkan kepemimpinan yang biasa digunakan dalam kemiliteran pada kepemimpinan biasa. Ciri-ciri kepemimpinan dengan type militeristis antara lain: menggunakan sistim perintah/komando dalam menggerakkan bawahan, tingkah laku seseorang ditentukan oleh pangkat dan jabatannya, senang formalitas yang berlebihan, disiplin yang keras dan lain-lain.

Type paternalistis. Kepemimpinan paternalistis bersifat "KEBAPAKAN" ia menganggap anak buahnya sebagai "ANAK" atau orang yang belum dewasa yang dalam segala hal dianggap masih membutuhkan perlindungan yang kadang-kadang berlebihan. Dalam type kepemimpinan tidak memperoleh kesempatan untuk mengambil inisiatif atau bertindak sendiri.

Type kharismatis. Sebenarnya lebih tepat jika dikatakan pemimpin yang mempunyai kharisma daripada melaksanakan type kepemimpinan kharismatis. Memang sulit untuk menemukan sebab-sebabnya mengapa seorang pemimpin mempunyai "DAYA TARIK" yang amat besar. Para pengikutnya menaruh simpati dan mudah tergerak untuk mengikuti kepemimpinan seorang pemimpin yang memiliki kharisma. Simpati dan kesetiaan para pengikut dari pemimpin yang memiliki kharisma tumbuh karena adanya kepercayaan yang penuh kepada pemimpin yang dicintai, dihormati, disegani dan dikagumi. Pemimpin kharismatis mampu menguasai pengikut-pengikutnya melalui daya tariknya yang luar biasa.

Type "LAISSE FAIRE". Kepemimpinan dengan type "LAISSE FAIRE" sebenarnya tidak memberikan kepemimpinan, sebab anak buahnya dibiarkan untuk berbuat sekehendaknya sendiri. Petunjuk maupun pengawasan tidak diadakan. Pembagian tugas, cara kerja diserahkan sepenuhnya kepada anak buahnya. Dalam kepemimpinan semacam ini tidak terasa adanya organisasi, segala sesuatu dilakukan tanpa rencana dari pimpinan, kekuasaan dan tanggung jawabnya tidak jelas.

Type demokratis. Kepemimpinan dengan type demokratis bersifat kerakyatan atau persaudaraan. Anak buah dipandang sebagai kerabat kerja yang perlu diajak bekerjasama dalam melaksanakan tugas. Dalam kepemimpinan demokratis saran-saran atau kritik membangun darimanapun datangnya sangat dihargai dan dapat diterima demi suksesnya tugas bersama. Kepemimpinan demokratis selalu mengusahakan agar anak buah yang digerakkannya mampu mencapai hasil maksimal, mereka diberikan kebebasan dan kepercayaan yang cukup untuk mengembangkan kreatifitas dan mengambil inisiatif untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Masing-masing type kepemimpinan seperti diuraikan di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kepemimpinan yang baik tergantung dari kemampuan untuk menilai keadaan masyarakat dan memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat pada suatu waktu. Perlu diketahui bahwa masyarakat terus berubah, dan untuk kondisi masyarakat tertentu lebih membutuhkan type kepemimpinan tertentu agar kepemimpinan tersebut benar-benar efektif.

Disamping itu ada pula berbagai faktor yang mempengaruhi kepemimpinan yaitu yang bersumber dari diri pimpinan itu sendiri, pandangannya terhadap manusia keadaan masyarakat yang dipimpinnya dan situasi waktu kepemimpinan itu dilaksanakan.

Oleh karena itu setiap pemimpin perlu mengerti diri sendiri, terutama yang berhubungan dengan peranannya sebagai pemimpin, orang-orang yang dipimpin secara perorangan maupun sebagai kelompok dan situasi dimana kepemimpinan itu berlangsung. Berdasarkan pengertian itulah ditentukan gaya atau type kepemimpinan yang paling membawa hasil dan manfaat bagi masyarakat yang dipimpin. □

Digitized by Google

Oleh: Soekarno D.

Tripartit Dan Bipartit

Penerapan semangat gotong royong dan kekeluargaan antar lembaga ketenagakerjaan

Salah satu esensi dari jiwa Pancasila ialah semangat gotong-royong dan kekeluargaan. Dalam bidang hubungan ketenagakerjaan, penerapan semangat tersebut bukan saja ditujukan kepada individu-individu yang terlibat dalam bidang hubungan ketenagakerjaan, akan tetapi juga mencakup lembaga-lembaga yang mengelola dan menjadi wadah unsur tenaga kerja tersebut. Lembaga-lembaga ini ialah: Serikat Pekerja sebagai wadah kaum pekerja, organisasi Pengusaha (APINDO-KADIN) sebagai wadah kaum pengusaha, dan Pemerintah (Departemen Tenaga Kerja) sebagai wakil Pemerintah. Ketiga lembaga ini biasanya disebut Tripartit. Peranan ketiga lembaga tersebut demikian pentingnya sehingga terjalinnya semangat gotong-royong dan kekeluargaan di antara ketiga lembaga tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap mantapnya hubungan antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah. Karena itulah maka dihayatinya dan diamalkannya semangat tersebut oleh ketiga lembaga itu perlu mendapat perhatian dan pembinaan yang sungguh-sungguh.

Tripartit di Forum ILO, Asia dan Indonesia

Pentingnya lembaga tersebut ternyata diakui pula oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga salah satu Badan Khususnya yang bernama "International Labour Organization" (ILO) yang didirikan pada tahun 1919 tersusun atas ketiga unsur tersebut. Di antara berbagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO adalah satu-satunya lembaga yang tersusun atas dasar Tripartit. Tiap-tiap negara anggota ILO memiliki 4 wakil, yang terdiri atas: Wakil Pemerintah 2 orang, Wakil Pekerja 1 orang, dan Wakil Pengusaha 1 orang. Di dalam General Conference yang bersidang setahun sekali, maupun di dalam instansi-instansi lain yang menjadi bagian dari ILO itu, selalu terdiri atas Tripartit tersebut, ialah Wakil Pemerintah, Wakil Pekerja dan Wakil Pengusaha, yang masing-masing membentuk sebuah Kelompok, ialah Kelompok Pemerintah dari semua negara anggota, Kelompok Pekerja dan Kelompok Pengusaha dari semua negara anggota. Umumnya masing-masing Wakil Pemerintah mewakili kepentingan Pemerintahnya sendiri-sendiri mengingat masing-masing Pemerintah adalah berdaulat. Akan tetapi Kelompok pengusaha (Employers' Group) terutama sekali Kelompok Pekerja (Workers' Group), biasanya bersuara mewakili kaum pengusaha dan kaum pekerja seluruh dunia, karena di antara mereka dikembangkan semacam setiakawan. Oleh karena itu sekalipun keberadaan unsur-unsur Tripartit tersebut dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan, akan tetapi dalam pelaksanaanya perbedaan antara ketiganya sering cukup besar sehingga tercapainya suatu kesepakatan memerlukan perdebatan yang panjang dan berlarut-larut, karena masing-masing fihak selalu berpegang teguh pada kepentingannya sendiri.

Keberadaan lembaga-lembaga Tripartit tersebut telah diikuti pula oleh beberapa negara, khususnya di negara-negara di Asia Tenggara dan Selatan, seperti: Pakistan, India, Srilangka, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan sudah barang tentu Indonesia. Akan tetapi penggunaan lembaga-lembaga Tripartit di negara-negara tersebut masih sangat terbatas, dan pada umumnya dalam ujud kerjasama Tripartit untuk hal-hal tertentu saja. Ujud lembaga-lembaga Tripartit di negara-negara tersebut antara lain ialah: di Pakistan dan Srilangka dalam ujud Badan Peradilan Khusus, di India dalam ujud Badan Peradilan untuk menangani masalah perselisihan hak, di Malaysia (pada tahun 1969) pemindahan tanggung jawab atas perkara-perkara pemecatan ke pengadilan Industri (Industrial Court), di Thailand dalam ujud Peradilan Perburuhan, demikian seterusnya.

Jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga atau forum-forum yang bersifat Tripartit di negara-negara tetangga dan negara-negara Asia umumnya, maka Lembaga Kerjasama Tripartit di Indonesia adalah jauh lebih menyeluruh dan komprehensip. Di samping itu keberadaan Lembaga Kerjasama Tripartit kita berfungsi sekaligus sebagai sarana pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila atau sarana penerapan Pancasila di bidang hubungan ketenagakerjaan. Dengan demikian fungsinya lebih mendasar, tidak hanya sebagai forum penanganan sesuatu masalah ketenaga kerjaan, akan tetapi mencakup keseluruhan jiwa dan semangat yang mendasari penanganan segala masalah yang menyangkut ketenagakerjaan, ialah semangat dan jiwa Pancasila. Itulah sebabnya maka penerapannya selalu berpedoman kepada semangat yang terkandung dalam falsafah Pancasila atau butir-butir yang terdapat dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dalam kerangka ini pula Lembaga Kerjasama Tripartit di Indonesia dikembangkan.

Sebagai Sarana Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila

Oleh karena Lembaga Kerjasama

Digitized by Google

Kesepakatan dan semangat gotong royong

Tripartit adalah sebagai sarana pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, sudah barang tentu asas yang mendasari keberadaan lembaga tersebut tidak lain adalah Pancasila pula. Adapun tujuannya ialah untuk mewujudkan terciptanya ketenangan kerja dan usaha, peningkatan produksi dan produktivitas dan perbaikan kesejahteraan kaum pekerja dan seluruh karyawan dalam rangka peningkatan partisipasi dalam pembangunan. Dan ini diupayakan melalui kerjasama, konsultasi dan komunikasi timbal balik antara ketiganya, serta memecahkan segala masalah bersama melalui musyawarah mufakat. Kegiatan semacam ini dilakukan secara terus-menerus sehingga masing-masing fihak dapat meningkatkan saling mengerti dan saling memahami kepentingan fihak lain. Dengan demikian perasaan atau sikap tenggang-rasa dan tepa-selira dapat ditumbuhkan, yang pada akhirnya semangat kekeluargaan dan gotong-royong lebih mudah dibina dan dikembangkan. Hambatan yang mungkin timbul ialah apabila para pelaku dalam Tripartit itu, baik Wakil Pekerja, Pengusaha maupun Aparat Pemerintah belum siap dengan sikap mental yang sesuai dengan jiwa dan semangat Hubungan Industrial Pancasila. Jika Wakil Pekerja maupun Wakil Pengusaha hanya mementingkan golongannya sendiri daripada kepentingan fihak lain dan kepentingan umum, maka perbedaan pendapat yang bersumber dari perbedaan kepentingan akan makin melebar dan sukar dipertemukan. Apa lagi kalau Wakil Pemerintah kurang dapat menempatkan diri sebagai stabilisator yang bertindak adil dari dua kepentingan yang berbeda. Itulah sebabnya dibinanya sikap mental yang sesuai dengan jiwa Pancasila seperti yang dikemukakan di atas sangat penting, seperti perlunya masing-masing fihak mengembangkan sikap tenggang-rasa, tepa-selira, mawas diri dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan golongannya sendiri. Itu semua perlu diamalkan oleh Wakil-wakil dari unsur Pekerja, unsur Pengusaha dan unsur Pemerintah dalam Lembaga Kerjasama Tripartit di berbagai tingkat.

Unsur-unsur Tripartit terdiri atas Wakil-wakil Organisasi Pekerja (SPSI), Wakil Pengusaha (APINDO/KADIN), dan pemerintah (Departemen Tenaga Kerja). Dalam mensukseskan tugas Lembaga Kerjasama Tripartit ini peranan Wakil-wakil dari tiga unsur tersebut sangat menentukan. Karena itulah sangat diperlukan pula suatu kondisi dimana ketiga unsur tersebut berada dalam keadaan yang mantap, baik segi organisasi maupun sikap mental, terutama pemahaman dan penghayatan terhadap jiwa Hubungan Industrial Pancasila sebagai perwujudan pengamalan Pancasila di bidang hubungan ketenaga kerjaan. Dalam kondisi semacam ini pengamalan Hubungan Industrial Pancasila lebih mudah diwujudkan. Unsur Pekerja yang diwakili oleh SPSI yang sejak lahirnya FBSI tahun 1973 telah merupakan satu-satunya organisasi yang mewakili kaum pekerja seluruh Indonesia perlu dibina terus. Sedang Unsur Pengusaha yang diwakili oleh APINDO/KADIN perlu dijaga jangan sampai timbul dualisme antara APINDO dengan KADIN. Koordinasi, dan jika perlu integrasi antara keduanya perlu diupayakan terus-menerus. Hal yang sama perlu pula dilakukan bagi Unsur Pemerintah. Hanya dengan kondisi kemantapan segi organisasi dan sikap mental ketiga unsur pendukung itulah Lembaga Kerjasama Tripartit memiliki modal yang kuat untuk mengemban misinya sebagai sarana yang tangguh dari pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila.

Kesepakatan & Semangat Gotong Royong

Lembaga Kerjasama Tripartit kita mengambil bentuk, dimana di tingkat nasional dibentuk *Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional* yang diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja, sedang di tingkat Propinsi dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah yang diketuai oleh Gubernur. Pada dasarnya Lembaga ini bertugas untuk menggalang kerjasama antara Pekerja, Pengusaha

Digitized by Google

dan Pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan. Untuk melaksanakan fungsi ini maka antara ketiganya selalu dikembangkan konsultasi, komunikasi timbal-balik antara ketiganya, serta memecahkan segala permasalahan ketenagakerjaan bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat. Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional mengembangkan kebijaksanaan serta menanggulangi masalah-masalah ketenagakerjaan tingkat Nasional sedang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah mengemban tugas yang sama di tingkat Daerah. Hasil Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional berwujud satu Kesepakatan Tripartit Nasional yang kedalam dengan sendirinya mengikat unsur-unsur Tripartit yang bersangkutan. Agar supaya hasil kesepakatan itu dapat mengikat seluruh jajaran ketenagakerjaan secara nasional, biasanya Kesepakatan Tripartit Nasional itu materinya kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan atau Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Dengan demikian produk hukum dalam ujud Peraturan atau Surat Keputusan menteri Tenaga Kerja yang dikeluarkan itu adalah hasil Kesepakatan Tripartit Nasional, didukung oleh unsur-unsur Tripartit nasional, dan hasil dari proses konsultasi, komunikasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat dari unsur-unsur Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong-royong.

Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional dan Tripartit Daerah ini merupakan jalur utama di antara berbagai jenis lembaga Tripartit lainnya, baik Tripartit Sektoral atau bentuk-bentuk tripartit yang lain seperti kerjasama di tingkat perusahaan yang disebut BIPARTIT maupun susunan berbagai Panitya yang terdiri dari unsur-unsur Tripartit.

Untuk mengukur sampai berapa jauh efektivitas Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional itu dalam mewujudkan semangat gotong-royong dan kekeluargaan melalui musyawarah mufakat, di bawah ini disampaikan beberapa contoh tentang Kesepakatan-kesepakatan sebagai hasil musyawarah dari Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional sebagai berikut:

Atas dasar semangat gotong-royong dan kekeluargaan serta musyawarah mufakat telah disepakati oleh Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional materi tentang Tatacara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 tahun 1985.

Atas dasar semangat gotong royong, kekeluargaan dan musyawarah mufakat telah disepakati oleh Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional materi tentang keberadaan Lembaga Kerjasama Tripartit Sektoral, yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 650 tahun 1985.

Atas dasar semangat yang sama telah disepakati oleh Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional materi tentang Tatacara Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian, yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 tahun 1986.

Atas dasar semangat yang sama telah disepakati oleh Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional materi tentang keberadaan Lembaga Kerjasama Bipartit, yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Keputusan menteri Tenaga Kerja No, 328 tahun 1986.

Atas dasar semangat yang sama pula telah disepakati oleh Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional materi tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Serikat Pekerja di Perusahaan, yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1109 tahun 1986; dan masih ada beberapa lagi yang tentunya tidak perlu disebutkan semuanya.

Dengan contoh-contoh di atas jelaslah, bahwa cara-cara musyawarah mufakat yang didasari semangat gotong-royong dan kekeluargaan sebagai bahagian dari nilai-nilai Pancasila ternyata bisa diamalkan oleh dan di antara unsur-unsur Tripartit maupun di antara lembaga-lembaga ketenagakerjaan seperti yang telah dilakukan oleh Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Yang perlu kita amati ialah bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan itu memiliki kualitas, baik isinya maupun proses untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tersebut. Perlu dijaga agar supaya kesepakatan-kesepakatan itu betul-betul dicapai melalui proses yang wajar, atas dasar pandangan yang jernih serta keikhlasan dari masing-masing unsur dari Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tersebut. Di masa-masa yang akan datang kiranya perlu dipantau dan dikaji lebih saksama untuk mengetahui kekurangannya dan hambatannya, agar kita dapat mengadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan mengenai efektivitas Lembaga tersebut dalam rangka memacu terwujudnya Hubungan Industrial Pancasila sebagai pengamalan Pancasila di bidang ketenagakerjaan. □

DIRGAHAYU PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I. KE.42

GEDUNG VETERAN R.I.
"GRAHA PURNA YUDHA"
Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta Selatan
Telp. 510909 - 30 Saluran.

MENYEWAKAN

- Ruangan untuk kantor yang representatip bagi setiap Pengusaha, aman, nyaman, fasilitas memadai dengan A.C. Central, Lift Otis, perlengkapan pencegahan kebakaran memenuhi persyaratan D.K.I. tempat parkir luas dengan sewa yang menarik.
- Ruangan untuk pertemuan, pesta dan lain-lain berikut perlengkapannya dengan kapasitas ruangan masing-masing ± 500 dan 1.700 undangan.

Keterangan lebih lanjut hubungan Bagian Niaga di Gedung Graha Purna Yudha - Lantai IX Telp. 510909 ext. 1312.

Digitized by Google

Oleh : Ramli Sutenegara. MA, FKP DPRD I Sumsel

Sebuah renungan setelah 42 Tahun Merdeka

Diperlukan Evaluasi Dan Penyesuaian Sikap Moral Serta Pola Fikir

Tujuan dasar Proklamasi 17 Agustus 1945, ialah mewujudkan masyarakat adil makmur yang berazaskan Pancasila bagi Bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Diawal Revolusi Kemerdekaan dulu, cara serta pola perjuangan kita pada dasarnya bertumpu dengan memanfaatkan kondisi emosional dan pola fikir yang Irrasional, yang pada saat itu memang didukung penuh oleh situasi dan kondisi psikologis Bangsa Indonesia. Akan tetapi setelah saat itu terlampaui, setelah kita selama 42 tahun menikmati Kemerdekaan ini, disebabkan adanya pergeseran keadaan serta berlangsungnya proses kemajuan zaman, maka cara dan pola fikir itu sudah tidak sesuai lagi. Kondisi dan situasi perjuangan sekarang, ternyata menuntut adanya suatu evaluasi dan penyesuaian yang tepat, atas sikap moral dan pola fikir kita, baik secara individu maupun sebagai Bangsa dan Negara.

Beberapa faktor yang mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian dan tinjauan, disebabkan berlangsungnya suatu proses kemajuan Iptek yang demikian cepat, pada sisi lain, kitapun menyadari sepenuhnya, bahwa masalah Bangsa dan Negara Indonesia sekarang sudah berkembang demikian kompleks. Sasaran perjuangan dan masalah yang kita hadapi sekarang ini, tidak lagi sekedar bertumpu pada perlawanan terhadap kolonialisme dan kapitalisme belaka, akan tetapi telah berkembang dengan begitu banyak permasalahan dalam dimensi yang lebih luas pula.

Maka, tanpa berupaya melakukan evaluasi terhadap sikap moral dan pola fikir kita, jelas kita tidak akan memperoleh kemajuan yang berarti. Malah dikhawatirkan pula, akibat lebih jauh, justru kita akan mengalami kemunduran serta kerugian yang tragis sekali jadinya. Jauh dari maksud-maksud untuk mendiskreditkan salah satu pihak, hanya semata-mata demi tanggung jawab dan rasa kesadaran sebagai Putra Indonesia, kita terpanggil

untuk menyatakan sesuatu secara terbuka.

Dari pengamatan dan pengalaman masa lampau, masih ada di antara kita, disadari atau tidak, masih saja bertindak bersikap apriori dan menempatkan rasa kecurigaan yang amat berlebihan didalam melihat serta menangani sesuatu permasalahan.

Dapat diperkirakan, bahwa dengan menempatkan diri pada sikap dan pandangan demikian, tidak akan banyak membantu kita dalam penyelesaian sesuatu permasalahan yang kita hadapi bersama sebagai Bangsa dan Negara. Sering permasalahan dan penyelesaian menjadi mengambang dan tidak terkendali, karena tidak mendapatkan sentuhan yang tepat. Keadaan yang demikian malah sering memojokkan kita kepada keadaan yang bertolak belakang dan saling berhadapan untuk saling memukul, yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Suatu contoh sederhana dapat ditampilkan disini. Bahwa dalam menilai dan menerima hasil-hasil pembangunan sekarang ini masih ada di antara kita, yang mengambil sikap dan berfikir tidak rasional, dengan kecenderungan mengedepankan "sinisme" yang berlebihan. Mereka mengambil sikap menolak kenyataan keberhasilan pembangunan di zaman orba ini, terjebak di dalam pola pikir yang sempit serta sikap yang negatip belaka. Sudah terang bahwa sikap dan pendirian semacam ini, ditinjau dari sudut kepentingan perjuangan Bangsa dan Negara, sangat tidak tepat dan tidak menguntungkan kita. Dengan sikap seperti ini, apa yang mereka temui adalah serangkaian kesalahan dan kekurangan belaka, tanpa mau melihat segi-segi positifnya.

Jika kasus seperti di atas kita angkat kepermukaan sebagai salah satu contoh, tidak berarti bahwa kita ingin melarikan diri dan menutup mata atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Masalahnya ialah, bagaimana kita berusaha untuk menempatkan permasalahan serta persoalan pada porsi yang wajar, pada pola pikir dan sikap moral yang lebih luas dan lebih dinamis. Kita sekedar berkeinginan agar kita dapat melihat dan menerima kelebihan dan kekurangan kita, sebagai suatu kesatuan yang bulat atas sikap dan pola pikir yang konstruktif dan dinamis. Sesuai dengan logika yang berlaku terhadap sesuatu masalah, dari segi buruk dan baiknya. Kami kira ini adalah sikap yang adil dan bijaksana. Pada landasan sikap inilah, kita bangun keyakinan diri, optimisme yang wajar, dilandasi rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu Bangsa. Jika sikap dasar ini telah tergenggam, kitapun baru dapat bangkit dengan tegar untuk menjawab dan mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi.

Kesadaran yang wajib kita bangun, ialah bahwa kondisi dan posisi perjuangan kita sekarang ini, kita harus mampu untuk menggunakan kekuatan dan kelebihan kita. Bukan justru sebaliknya, tenggelam pada kekurangan dan kelemahan kita. Disinilah menurut penilaian kita, letak kunci permasalahan yang harus kita sadari.

Apa yang sekarang ini kita miliki sebagai Bangsa, barangkali dapat disepakati, cukup besar dan cukup potensial. Asset itu antara lain ialah,

Digitized by Google

satu-satunya asas Pancasila, stabilitas nasional dan keamanan yang mantap, persediaan kekayaan alami yang cukup besar, serta semakin kuat-kokohnya rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai Bangsa. Semua ini dapat kita manfaatkan sebagai modal dasar dalam perjuangan ini.

Di atas kekuatan dasar itulah kita mempunyai kesempatan emas untuk melangkah maju menghadapi semua permasalahan dan tantangan, sembari secara sadar memperbaiki kekurangan serta kelemahan kita. Dan tentunya kita tidak boleh sekali-kali memutarbalikkan keadaan ini, yang sudah pasti akan menenggelamkan diri kita sendiri.

Bekerja dan berjuang, adalah serangkaian gerak dan tindak guna memperoleh sesuatu dengan segala kekuatan dan kelemahan yang kita miliki sebagai suatu kenyataan yang ada, bukan secara tidak adil hanya mengkaji kelemahan dan kekurangan belaka. Inilah mungkin hakikat hidup dan kehidupan ini.

Atas uraian di atas, maka sudah waktunya kita untuk melakukan suatu penyesuaian dan pembenaran atas sikap moral dan pola pikir kita yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, dimana sesuatunya telah berobah dan bergeser demikian jauhnya. Ini artinya secara konsekuen kita harus berani merobah sikap moral dan pola pikir perjuangan kita yang emosional dan irrasional, seperti pernah kita gunakan pada masa-masa lampau.

Mewujudkan masyarakat berdasarkan Pancasila

Kiranya tepat, jika saat ini kita menggunakan landasan perjuangan pada hal-hal pokok: percaya diri, pola fikir rasional, terbuka terhadap semua pihak, memperkokoh rasa Persatuan dan Kesatuan. Pada saat-saat kita memperingati usia Ke 42 Tahun Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini, adalah tepat sekali kita semua mencoba menyempatkan diri merenungkan hal-hal itu semua. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian, khususnya bagi hari depan Bangsa dan Negara Indonesia tercinta ini.□

ASSOSIASI REKANAN JASA ANGKUTAN BULOG

ARJASA BULOG

Alamat Sekretariat : GRAHA PURNA YUDHA Bldg, 10 th floor
Jl. Jend. Sudirman 50, Kebayoran - Jakarta Selatan
Phone : 512279, 510909 Ext. 1347, Telex 48119 HS Jkt.

SEGENAP ANGGOTA ARJASA BULOG

DENGAN RASA SYUKUR DAN GEMBIRA MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES

ATAS PRESTASI YANG DICAPAI G O L K A R DALAM PESTA DEMOKRASI

PEMILIHAN UMUM 1987.

Digitized by Google

Maria Sugiharto

Oidipus, Misteri Sebuah Nujuman

"Anda sendirilah sebenarnya pembunuh yang sedang anda cari-cari itu..." kata *Teiresias,* ahli peramal yang buta asal Thebes, ketika ditanya oleh Oidipus sang Raja, mengapa Thebes dilanda bencana tak henti-hentinya, dan bagaimana penyelesaiannya.

Ini adalah salah satu cuplikan kalimat didalam karya Sophocles, *Oidipus Sang Raja,* yang dimainkan dengan sangat cemerlang oleh Rendra dan kelompok Bengkel Teaternya. Dan, Oidipus yang dimainkan oleh Rendra sendiri, disamping sebagai sutradara, sungguh memukau, ketika tuduhan Teiresias itu jatuh atasnya, karena tanpa dinyana, apa yang dia laksanakan selama ini memerintah Thebes ternyata membawa aral.

Mahluk apa yang berjalan dengan empat kaki pada pagi hari

Karya Sophocles yang telah lebih dari duaribu tahun lamanya ini, masih selalu menarik untuk dimainkan, karena filsuf Yunani ini membuat karyanya yang khayalan belaka, jauh dari *kebolehjadian,* tetapi bisa muncul didalam kenyataan. Cerita Oidipus Sang Raja, sudah banyak diungkapkan, sudah tiga kali selama kurun waktu hampir dua dekade — oleh Bengkel Teater pimpinan Rendra, seorang seniman besar yang dijuluki Si Burung Merak. Setiap kali Oidipus diteaterkan, selalu saja masih sangat menarik, karena memang demikianlah inti dari kehidupan manusia, yang merupakan tragedi yang sempurna.

Ini semua dimulai dengan sebuah *kutukan,* yang bagi masyarakat Yunani kuno dimana Sophocles hidup, merupakan sebuah akibat dari dosa-dosa yang dibuat oleh nenek moyang sebuah bangsa, dan diderita oleh generasi penerusnya. Orakel (sabda dewa) dari Delphi menujumkan bahwa Raja *Laius* dan permaisuri *Iocasta* (baca: Yokasta) akan memiliki seorang putera yang akan membunuh ayahandanya, serta mengawini ibudanya. Dibayangi ketakutan oleh masa depan yang mengerikan, Raja dan Permaisuri memutuskan untuk memazulkan putera pertamanya, dan diberikan ke-

Digitized by Google

Rendra memainkan Oidipus dengan cemerlang

pada seorang penggembala yang tinggal di gunung Cithaeron. Bertujuan untuk membunuh sang putera secara tidak langsung, bayi laki-laki itu diikat kakinya, sehingga terjadilah nama Oidipus yang akhirnya kaki yang bengkak (karena diikat). Karena merasa sangat iba dan kasihan kepada sang putra raja, penggembala mempersembahkan bayi tersebut kepada seorang Corintha yang membawanya kemudian kenegerinya, dan diambil putra oleh raja Corintha *Polybus* dan permaisurinya.

Oidipus sangat yakin bahwa Polybus dan sang Permaisuri adalah ayah dan ibu kandungnya. Maka, ketika dewasa dan dia mendengar dari nujuman bahwa kelak dia akan membunuh ayahandanya serta mengawini ibunya, diapun pergi dari Corintha, untuk menghindari ramalan tersebut.

Dalam perjalanannya ke Delphi, dipersimpangan jalan Amphissa (sampai kini jalan ini masih ada), dia bertemu dengan seorang dengan empat orang pengawalnya, yang berusaha mengusir Oidipus. Orang itu, adalah Raja Laius, yang bersama ketiga pengawalnya dibunuh olehnya, sedangkan satu pengawalnya pulang ke Thebes, melaporkan kepada Iocasta, permaisuri raja. Kejadian itu tidak langsung diselidiki, karena di Thebes sedang dilanda suatu malapetaka disebabkan karena wabah yang dibawa oleh *Sphinx,* sebuah mahluk berbadan singa dan berkepala wanita, yang berdiri di atas karang diluar gerbang kota, serta mencelakakan setiap orang, yang tidak dapat menebak teka-teki yang diucapkannya, ialah *"Mahluk apa, yang pada pagi hari berjalan dengan empat kaki, dan di atas dua kaki pada siang hari, serta dengan tiga kaki pada senja hari?"*

Penduduk Thebes dicekam ketakutan, karena teka-teki tersebut, sampai kedatangan Oidipus, pembunuh Laius, yang "menyelamatkan" rakyat Thebes, karena dia bisa menjawab tekateki yang maha sulit itu, ialah: *Manusia.* Pada masa kanak-kanaknya (bayi), dia merangkak (empat kaki), dan ketika dewasa, dia berjalan tegak dengan dua buah kaki, dan pada masa tuanya, dia berjalan dengan tiga kaki, dan kaki ketiga itu adalah tongkatnya. Sebagaimana telah disabdakan dewa, maka ketika Oidipus telah bisa menebak teka-teki tersebut, matilah monster Sphinx tersebut, dan Oidipus diangkat menjadi Raja Thebes, serta memperisteri Iocasta. Kehidupan Raja dan permaisurinya sangat harmonis, rakyat sejahtera dan makmur. Sampai mereka dikarunia dua orang putera dan dua orang puteri yang menanjak dewasa, maka dimulailah *Kisah Oidipus Sang Raja.*

Lagi-lagi Thebes dilanda wabah malapetaka, dan penduduk berbondong-bondong mendatangi *Oidipus Sang Raja yang perkasa,* demikian dia menamakan dirinya sendiri, untuk memohon petunjuk cara penyelesaiannya. Oidipus selalu berpenampilan arrogan, kecongkak-congkakan yang memukau serta berwatak tidak sabar seperti seorang tirani serta cepat marah. Dia menuduh *Creon,* iparnya yang berkomplotan dengan *Teiresias* sang peramal buta, karena nasihat-nasihatnya tidak sesuai dengan nurani Oidipus, sebagai komplotan yang akan menggulingkannya. Oidipus, yang reputasinya sebagai penyelamat Thebes merupakan taruhan hidupnya, kemudian mengutus Creon ke Delphi untuk meminta bantuan kepada Appolo (sang Dewa). Kata-kata dewa (orakel) mengatakan bahwa bencana yang terjadi akan lenyap apabila pembunuh Laius *dihukum.* Dengan keterangan ini, kemudian Oidipus mengundang Teiresias yang memiliki kekuatan meramal tentang kebenaran. Teiresias menolak permintaan Oidipus. Oidipus pun menjadi murka serta

Digitized by Google

menuduhnya berkomplot dengan Creon untuk menggulingkan tahtanya. *"Kau sendirilah yang sebenarnya merupakan pembunuh yang sedang kau cari-cari"*, kata Teiresias tandas.

Kemelut itu membuat Oidipus makin murka, tetapi akhirnya Iocasta membantu membeberkan sejarah hidupnya dan mengatakan tentang orakel yang mengatakan bahwa Laius akan dibunuh oleh puteranya sendiri. Meskipun demikian Iocasta bertahan kepada pendiriannya bahwa suaminya, Laius dibunuh oleh serombongan perampok dipersimpangan jalan. "Mereka berlima, dan hanya seorang yang hidup", kata Iocasta. Dan, dari perkataan Iocasta ini, Oidipus ingat pertemuannya dengan Laius dipersimpangan jalan, dan meminta agar pengawal yang masih hidup itu dipanggil. Disini Oidipus ingat tentang pertemuan itu, dan dia ungkapkan bahwa ketika dia sedang mencari dirinya sendiri ketika masih di Corinthe, dikatakan bahwa orakel mengatakan dia akan membunuh ayahandanya serta mengawini ibundanya. Karena keyakinannya bahwa pembunuh Laius adalah perampok, Iocasta merasa lega, karena dia sangat yakin bahwa bayi yang dibuang di gunung ketika lahir, dengan membawa sebuah *dosa asal* sesuai orakel, telah mati di gunung Cithaeron. Untuk ini, Iocasta berpendapat bahwa orakel itu salah.

Cerita ini menjadi bermakna sangat besar kendati telah lebih dari duaribu tahun adanya, karena menyentuh kehidupan manusia dari jaman kejaman. Dan selanjutnya, pendapat Iocasta yang demikian terpaksa kena sanggahan, karena ada seorang utusan yang menyatakan bahwa Raja Polybus meninggal karena sakit. Iocasta memberikan reaksi tentang kematian ini, dan berkata keras di depan audiens keraton yang ada: "Dimanakah kau kini, orakel yang terkenal dari Dewa? Orang itu telah mati, tetapi tidak dengan tangan anaknya". Ketika ketegangan sedang terjadi, utusan dari Corinthe pun mengatakan kepada Oidipus "Apakah Anda menyingkir dari Corinthe karena takut akan membunuh ayahanda?. Anda bukan putera Polybus" Utusan itulah yang mengetahui sejarah Oidipus, dan menerangkan bahwa dialah yang menerima bayi dari gembala dari gunung Cithaeron dan mempersembahkan bayi itu untuk dipungut oleh Raja Polybus.

Penyelidikan sampai kepada dipanggilnya gembala yang kini sudah tua, yang dulu diserahi bayi putera Iocasta. Meski dengan ketakutan, dia mengutuk utusan dari Corinthe mengapa menguakkan ingatan yang sudah lama dia pendam. Pada waktu itu, wanita itulah (Iocasta) yang menyerahkan sendiri bayi itu, serta menyuruh untuk membunuhnya. "Anaknya sendiri?" teriak Oidipus. Kemudian dia tambahkan: "Kata-kata Dewa telah membuat wanita ini menjadi ganas?" Sang gembalapun menyahut: *"Nujuman* lah yang membuatnya, yang mengatakan bahwa bayi ini akan membunuh ayahandanya kelak".

Akhirnya Oidipus sang Rajapun tahu tentang kebenaran semuanya itu, sehingga seperti dikuakkan seluruh topeng kehidupannya. Ketika dia masuk, didapatinya Iocasta bunuh diri menggantung. Melihat pemandangan yang demikian, Oidipus pun merasakan kesedihan yang luar biasa dan diapun *menghukum* dirinya sendiri dengan menusuk kedua buah matanya dengan jarum sebagai simbul bahwa mata itu merupakan mata pengertian yang selama bertahun-tahun buta dan gagal, karena kurang kepercayaan

Karya Sophocles masih menarik dimainkan

Digitized by Google

Oidipus yakin Polybus dan permaisuri adalah ayah dan Ibu kandungnya

kepada dewa-dewa, mata yang merasakan kebohongan-kebohongan selama hidupnya. Dengan bercucuran darah karena mata yang telah ditusuk dengan jarum yang tajam, diapun keluar, serta memanggil dua orang puterinya, yang juga adiknya, karena lahir dari ibu yang sama. Oidipus menganjurkan kepada keduanya, untuk hidup dengan damai setelah sepeninggalnya nanti. Dengan sangat puitis dikatakan: ''Tidak, Tidak, jangan renggut putri-putriku dari sisiku''. Dan, dengan segala kerelaan serta kebesaran jiwa, dia serahkan tahta kepada iparnya Creon, agar meneruskan memerintah Thebes. Dan, Sophocles menutup Oidipus Sang Raja dengan mengakhiri cerita ini, Creon memerintah Thebes dan memperlakukan Oidipus dengan segala kebaikan meskipun rakyat Thebes memintanya untuk meninggalkan Thebes.

Rendra, sang Oidipus dan Bengkel Teaternya

Bengkel Teater Rendra merasa ada urgensi untuk mementaskan naskah ''Oidipus Rex'' karya Sophocles. Di dalam tragedi ini masalah nasib dan sikap rohani yang biasa dibicarakan oleh bangsa kita secara mistik, oleh Sophocles dibicarakan secara filsafat, jadi dengan penalaran obyektif. Demikian kata Rendra. Suatu usaha untuk secara sederhana ikut terlibat didalam menegakkan kebudayaan Indonesia. Rendra mengakui bahwa dia bukan *chauvinis*, tetapi dia melihat serta merasa bahwa dunia dewasa ini dilanda oleh globalisme dari nilai-nilai barat yang sering tidak ada hubungannya dengan efisiensi pembangunan kebudayaan moderen.

Mengapa Rendra memilih mementaskan karya orang Barat?.

Rendra berpendapat bahwa pergaulan antara kebudayaan itu sangat wajar di dunia. Bahkan, belajar kebudayaan dari orang asingpun bukanlah salah. Bila diingat bahwa bangsa Jepang belajar budaya orang Cina dan bangsa kita belajar dari India, kita dewasa ini perlu juga belajar dari Sophocles tanpa kehilangan *kemungkinan diri,* tanpa menjadi orang Yunani. Maka, karya *rekan* dari Yunani ini, demikian Rendra menyebut Sophocles, berdasarkan kepentingan mengembangkan *kemungkinan Indonesia.*

Mengapa Topeng? Demikianlah bagi yang awam terhadap teater, pementasan Oidipus dengan mengenakan topeng membuat pertanyaan yang besar.

Fuad Hassan, Menteri PDK yang juga seorang budayawan dan seniman, memberikan pendapatnya bahwa topeng merupakan pesona kreasi seniman. Jadi, disamping suguhan teater yang teatral dengan mementingkan pernafasan, ekspresi anggauta badan dan torso, merupakan tantangan bagi Bengkel Teater Rendra dengan pementasan bertopeng ini.

Rendra, seorang seniman besar yang sangat memukau dan bermain total serta cemerlang dalam memerankan Oidipus. Ini tidak dipungkiri lagi, karena setiap orang tahu siapa Rendra. Gerak, ekspresi, pengaturan suara dan segala persyaratan seni teater dipenuhi semua dengan sempurna. Sangat memukau ketika tragedi mencapai puncaknya, ialah ketika dia keluar dengan mata bercucuran darah (kendati bertopeng), serta menyesali hidupnya yang sudah keliru, karena memang demikianlah nujuman baginya. Dan, situasi yang mencekam juga terjadi ketika penjelasan oleh bhayangkara raja, pembantu setianya, yang diperankan oleh *Adhi Kurdi* juga dengan cemerlang, disampaikan kepada khalayak dengan gaya yang teatral dan puitis, ketika melukiskan tragedi yang menimpa Oidipus ketika menyaksikan *isteri dan ibunya* Iocasta bunuh diri.

''Disana kita saksikan Ratu tergantung, terayun dikayu, bak seekor burung yang mati. Dia (Oidipus) pun roboh ketika melihatnya. Kemudian terdengar erangan yang sangat mengerikan, dan segera dilepaskan tali yang terikat dilehernya, menggendongnya dengan sangat iba, diletakkan di bawah, dan terjadilah pemandangan yang sangat mengerikan. Jarum emas itu, untuk menusuk kedua matanya, kiri dan kanan, darahpun mengucur....''

Dan, melompatlah dia sambil berteriak ''Pergilah... pergilah.... Kau tidak akan pernah melihat aku lagi, baik ketakutanku maupun dosa-dosaku....''

Dan Oidipus memang rebah dengan segala kehancuran jiwa dan badannya, serta keluh kesah yang berkepanjangan menyesali hidupnya, dibawakan oleh sang Rendra yang sangat memukau sekaligus mencekam.

Dan demikianlah Sophocles. Karyanya, yang diciptakan dengan kepandaian yang prima, menggabungkan akibat-akibat yang mencelakakan dari sebuah sisi gelap dalam kehidupan yang berdasarkan satu nujuman, merupakan suatu akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.□

Digitized by Google

Oleh : Rendy MS

Kisah Rendra Jadi Oidipus

Suatu kesaksian yang lengang, sepi dan menyedihkan!

Dalam kesempatan dan lakon apa saja Rendra tetap sebagai sosok figur yang selalu mengundang pesona, terlebih bagi para pengagumnya. Ketika ia sedang baca sajak, bahkan ketika ia sedang mimpi barangkali orangpun akan merasa tertarik. Semua mass media selalu menulis Rendra dengan huruf huruf dan angka besar.

Kehebatannya, ia selalu bersungguh-sungguh didalam menghayati kata-kata, dan ia selalu dengan siaga memperagakannya. Itulah barangkali keberhasilan yang ia capai, karena jarak tempuhnya dalam bergumul dengan dunianya yang berpuluh tahun digelutinya, dari duka ke duka ia tak pernah lari dan baginya itu adalah revolusi karya-karyanya, inspirasi kreasi-kreasinya. Rendra memang telah menjadi besar, ia menjadi besar dari kekerasannya - kesungguhannya dalam menghadapi dunianya, dan menjadi semakin besar karena semua orang menganga untuk hormat dan kagum terhadapnya.

Akhirnya bisa jadi Rendra telah menobatkan dirinya sebagai figur sentral seniman Indonesia. Sebagai tokoh sentral selalu saja akan menjadi perhatian banyak orang, tak hanya kehebatannya Rendra dalam menguras perhatian setiap ia tampil tapi masyarakat kesenianpun banyak sekali ambil bagian dalam membesarkan namanya.

Untuk kepenyairannya, tak bisa dikalahkan oleh sederetan penyair dengan gelar-gelar besarnya, baik yang angkatan muda dari Norca, Yudistira, sampai Abdulhadi, Sutarji Calsum Bachri, untuk ukuran penonton Rendra tetap memegang rekor yang paling unggul. Bisa jadi sebuah sajak yang berbobot tinggi tak menjadi berarti bila sang pembaca/penyampai bukanlah Rendra. Hingga betul apa yang dikatakan Arifin C.Nur, setiap kali Rendra tampil membacakan sajak-sajaknya, lahirlah kemudian Rendra-

Digitized by Google

rendra yang lain dimana-mana sampai masuk ke desa-desa bila ada hari-hari besar Nasional. Sang deklamator semula hanya dengar nama Rendra, baca gaya Rendra dari media massa dan jadilah ia Rendra-Rendra kecil wah hebat memang Rendra pengaruhnya dalam bergaya dan berlaga!

Rendra, sebagai seorang dramawan merasa dan diakui mampu bermain dengan bagus. Akibatnya tidak lengkap dan kurang menarik bila sebuah tontonan tanpa Rendra. Lakon apa saja selalu menjadi menarik bila ada sang Rendra yang senang bila disebut penyair si burung merak.

Lakon-lakon yang ia pentaskan menjadikan penonton selalu tergoda untuk menonton, sejak ia masih di Jogya, dan apalagi setelah ia pernah masuk tahanan namanya menjadi sebuah garansi bagi produksi keseniannya.

Tidak lengkap tontonan tanpa Rendra

Ia selalu berkata dimana-mana, akan setia terhadap kata, setia terhadap kehidupan yang dihadapinya akan setia dan menyatu dengan alam sekitarnya. Konstitusi ku telah aku bangun dalam jarak waktu yang cukup lama tak mungkin aku tidak setia terhadap duniaku, terhadap kesenianku terhadap cita-citaku, karena katanya lagi, orientasi kontekstual kami adalah kepentingan untuk meningkatkan dinamika akal sehat kolektip Bangsa kita. Sedangkan sumber orientasi gaya seni kami adalah ingatan naluri dan bathin kolektip Indonesia Raya, entah apa maksud semua yang ia utarakan dalam setiap pertemuan bahkan yang terakhir ini cukup jelas kata-katanya datang dalam bentuk buku pengantar untuk menyaksikan karya besar Sophocles dalam gaya masyarakat Depok, Jawa Barat, Indonesia.

Segala pemutaran pemikirannya selalu menjadi menarik, dan belum tentu menjadi benar-benar menarik kalau Bukan sang Rendra yang berbicara, bahkan gegernya berbagai mass media memberitakan rencana pementasannya. Rendra mengolah kesadaran akal sehat dengan kekuatan dibawah sadar dalam bentuk petuah petuah kepada anak-anak asuhnya yang baru berangkat bersamanya, semuanya terlanjur terkagum-kagum terhadapnya, sehingga tak sempat secara tajam dan detail memamah makna-makna yang terkandung dalam setiap wejangannya, maka dijadikanlah sebagai obor, sebagai pegangan dalam menghadapi peran yang akan dibawakan. Kondisi ini barangkali dapatlah berlaku bagi Untung Basuki, Adi Kurdi, Arifin C Nor, tapi bagi mereka yang baru beberapa hari berkenalan dengan gaya dan pola fikir Rendra pasti akan terburu-buru lelap terbuai, dan hasilnya adalah sebuah slogan dan poster raksasa yang dipajang oleh impresario barunya dimana-mana. Tetap saja masyarakat pecinta drama akan menjenguk Rendra kembali sebagai sebuah nostalgik yang cukup silam dimakan waktu.

Demikianlah sebuah latar belakang kisah Rendra jadi Oidipus di Balai Sidang yang berlangsung selama empat hari empat malam dalam duakali pertunjukan, tiketnya sangat mahal dan bagaimanakah hasilnya....?

Entah apa tiba-tiba yang terasa berat dan menukik kedalam bathin ketika saya saksikan adegan pertama dari Oidipus, bukanlah suasana yang dikehendaki naskah dimana Rendra sebagai sutradara dan sekaligus sebagai sang lakon secara terinci mengangkat betapa agung dan besarnya karya itu. Namun yang saya rasakan justru bisikan musik yang meraba-raba kita dengan kekuatan yang amat dahsyat sehingga ketika itu suasana jadi hening dan mencekam. Rendra tidak salah pilih menempatkan Nano.S. yang juga dia kagumi sebagai penggarap musiknya.

Tak tercipta oleh saya sebuah gambar utuh dari sajian panggung yang miskin akan jiwa naskah agung Yunani itu. Layar, level, setting, dan bahkan sampai dengan tata lampupun tak mampu mencipta nuansa kedalaman. Gebyar yang ada adalah gebyar pop seperti pagelaran Guruh bila tanpa Nano S. Gebyar yang ada hanyalah gebyar cahaya tanpa suasana, tanpa karakter, tanpa rupa, tanpa kekuatan, gebyar yang ada, tentu selain musik itu adalah suara Oidipus yang bagi saya tak asing lagi adalah gaya dan vokal Rendra yang tak berubah sejak saya kenal hingga sekarang.

Dengan lakon Oidipus kali ini Rendra dan para pemainnya menggunakan topeng, yang menurut pembuatnya, Danarto, topeng pesanan Rendra tersebut sudah merupakan pencerminan watak masing-masing peranan yang dimainkan. Watak yang mengekspresikan kekuatan magis (bathin) dari seluruh peranan sungguh tidaklah gampang untuk menghidupkannya dengan penghayatan yang total. Toh Oidipus bukan sebuah karya Indonesia Raya, tapi tetap ia adalah gubahan Rendra dengan versi Depok, Jawa Barat, Indonesia, katanya. Tentu mengubah masing-masing watak dari masing-masing peran yang harus dimainkan, atau katakanlah menghayati peran yang harus dibawakan dari naskah asli ke naskah adaptasi versi Rendra tahun 1987 pekerjaan yang cukup serius, walaupun bagi Rendra pagelaran kali ini bukan suatu kisah baru, karena telah untuk kesekian kalinya dipentaskan, hanya tempat, gaya, dan barangkali pendekatannya saja yang berbeda. Tapi pada titik intinya, Oidipus tetap sebuah kisah atau dongeng dari Yunani yang cukup menyayat, kental dan tak pernah basi, betapa besar kekuatan naskah karya. Sophocles yang telah melampaui ribuan tahun namun tetap

Digitized by Google

Pemain menggunakan topeng

menarik walaupun hanya kita baca saja. Kali ini dengan gagahnya Bengkel Teater Rendra 1987, menggelarkan kembali di gedung pertemuan mewah yang bernama Balai Sidang.

Suatu cita-cita yang patut kita hargai, Rendra ingin menempatkan harga kesenian semacam teater (khususnya bagi karya-karyanya) menjadi trade mark yang tiada tandingannya, dan mungkin saja bila cita-cita itu menjadi kenyataan, maka akan beruntunglah nasib dan kehidupan kesenian kita khususnya teater di jagad Indonesia, cita-cita Rendra itu sama halnya juga ingin mengubah nasib harga teater kita dengan berangkat dari Oidipus, sebuah lakon yang membicarakan nasib manusia yang ditakdirkan oleh dewa dirundung duka dan malapetaka yang sarat, penuh dosa, penuh noda dan luka-luka abadi parah buat selamalamanya. Tapi tetap Oidipus ingin melawan nasib dan masih belum percaya bahwa Raja tetap kalah dengan apa yang telah digariskan oleh penguasa jagat raya semesta (Dewata).

Rendra (Oidipus) benar-benar sebuah lakon yang menyentuh, ia penuh laknat tapi menggugah nurani, Oidipus membunuh ayahnya lalu kawin dengan Ibu kandungnya, dan begitulah pada mulanya kejadian petaka, bencana yang beruntun di Thebes, yang dipagelarkan Rendra 4 malam berturut-turut di Balai Sidang Senayan Jakarta. Sebagai sebuah tontonan kolektip, tontonan bersama, kerja bersama, hanya Rendra, Adi Kurdi yang ditiap pagelaran mampu menyuguhkan peran dengan baik, ia tetap jempolan sebagai aktor, deklamator. Semua kata, semua kalimat jadi telanjang dan berguna, semua panggung yang lena akan tata pentas menjadi sesak diisi gaya Rendra, gaya Oidipus berbicara. Sama halnya dengan Adi Kurdi, walau peran yang diberikan seharusnya tidak menonjol tetapi ia tetap aktor yang mampu mengangkat peranannya dengan sangat baik. Adi tampil sebagai peranannya dan ia membantu betul keangkuhan Oidipus yang menyedot perhatian penonton, mata penonton, dari Fuad Hasan sampai Murdiono yang tak berkedip menyaksikan setiap pemunculan Oidipus apakah itu sebagai sebuah tanda-tanda.

Sebagai sebuah tanda-tanda atau sebagai tanda-tanda banyak adanya, sebagai tanda-tanda apakah memikatnya kehadiran Rendra sebagai Oidipus adalah suatu tanda keberhasilan pagelaran Oidipus secara keseluruhan. Kalau memang ya, lalu apa fungsinya, pemeran yang lain yang jumlahnya begitu banyak, dari Bhayangkara Raja yang dimainkan Adi Kurdi sampai Ismene yang dimainkan Prita Indriani, Antigone dimainkan Jose Rizal Manua, dan apa gunanya perangkat pagelaran yang lain, property, tata cahaya, tata dekorasi, tata vokal, tata gerak, dan meskipun penggarap musik tak bisa dipisahkan oleh kehadiran Oidipus di atas pentas. Tapi apa dong arti suatu pagelaran besar dengan sutradara besar semacam Rendra yang juga saya hargai dalam membangun konstitusinya sebagai seniman, bila kemudian naskah yang begitu mulya dan dimulyakan oleh setiap orang yang pernah membacanya nasibnya semalang nasib yang menimpa Oidipus!

Artinya yang lain hampir menjadi tak berguna, ada topeng, tapi kemudian topengpun menjadi tidak punya jiwa, tidak bernyawa, tidak menyatu dengan peran yang dibawakannya sesuai dengan buku petunjuk yang diterima oleh setiap penonton. Dengan jelas kita semua yang menonton seperti menanti suatu kelahiran, suatu harapan-harapan, harapan yang tak kunjung datang selama pertunjukan sebagai sebuah pagelaran yang besar, memang cukuplah jitu Rendra melakukan tambal sulam sehingga akhirnya semua penonton tertuju pandangannya kepadanya (Oidipus Rendra).

Soraya Perucha yang bermain sebagai Iocasta, juga datang dalam ketidaksiapan, topengnya yang cantik itu jadi macet tanpa suara yang datang dari dalam, untuk sosok Soraya sudah cukup kita kenal sebagai pemain film dengan postur tubuh yang tentunya tidak jelek, maka Rendra tidak salah pilih dalam menempatkan Ucha sebagai pendampingnya. Tapi hanya itukah sebuah tanggung jawab seorang pemeran penting? Bisa dimaklumi Ucha wanita dan baru beberapa hari saja mengenal apa sih itu bermain drama (teater), walau ia pasti pernah membaca dan belajar pada almarhum suaminya. Toh tak cukup itu rupanya untuk mengangkat dirinya sebagai permaisuri raja Oidipus suami yang juga anak kandungnya, sungguh berat ya Ucha! Biarkan Ucha. Dan bagi sekian pemain lainnya sangat menyedihkan, karena tidak siap mengimbangi Oidipus, tapi yang paling penting adalah, drama ini disajikan dengan topeng, topeng sebagai media ekspresi haruslah berbicara!

Tapi mungkin Oidipus Bengkel Teater 1987, dengan sutradara dan pemeran utama Rendra adalah sebagai sebuah hasil kerja maksimal, atau malah setengah hati, dan hanya beberapa saja yang sungguh-sungguh bermain atau siap bermain, tak bisa kita tinggalkan, Untung Basuki, Adi Kurdi, Kodok Sukodok, Iwan Burnani Toni, Sawung Jabo kitapun maklum mereka semua adalah orang-orang lama. Rendra tetap besar walau tanpa siapa-siapa, dan siapa-siapa yang ada di sekitar Rendra adalah pengagum-pengagumnya yang telah setia membacakan prasetia.

Rendra menjadi Oidipus, saya sangat sedih dan semua yang melihatnya sedih atas nasib malang yang menimpa hingga akhirnya jadi buta, dan kesedihan yang lain adalah Rendra tetap sendiri di panggung besar itu, lengang sepi tanpa siapa-siapa. Oidipus akan kemana nasibmu?□

Digitized by Google

Tanpa penjiwaan akan seni mungkinkah ia membuat suatu adi karya?

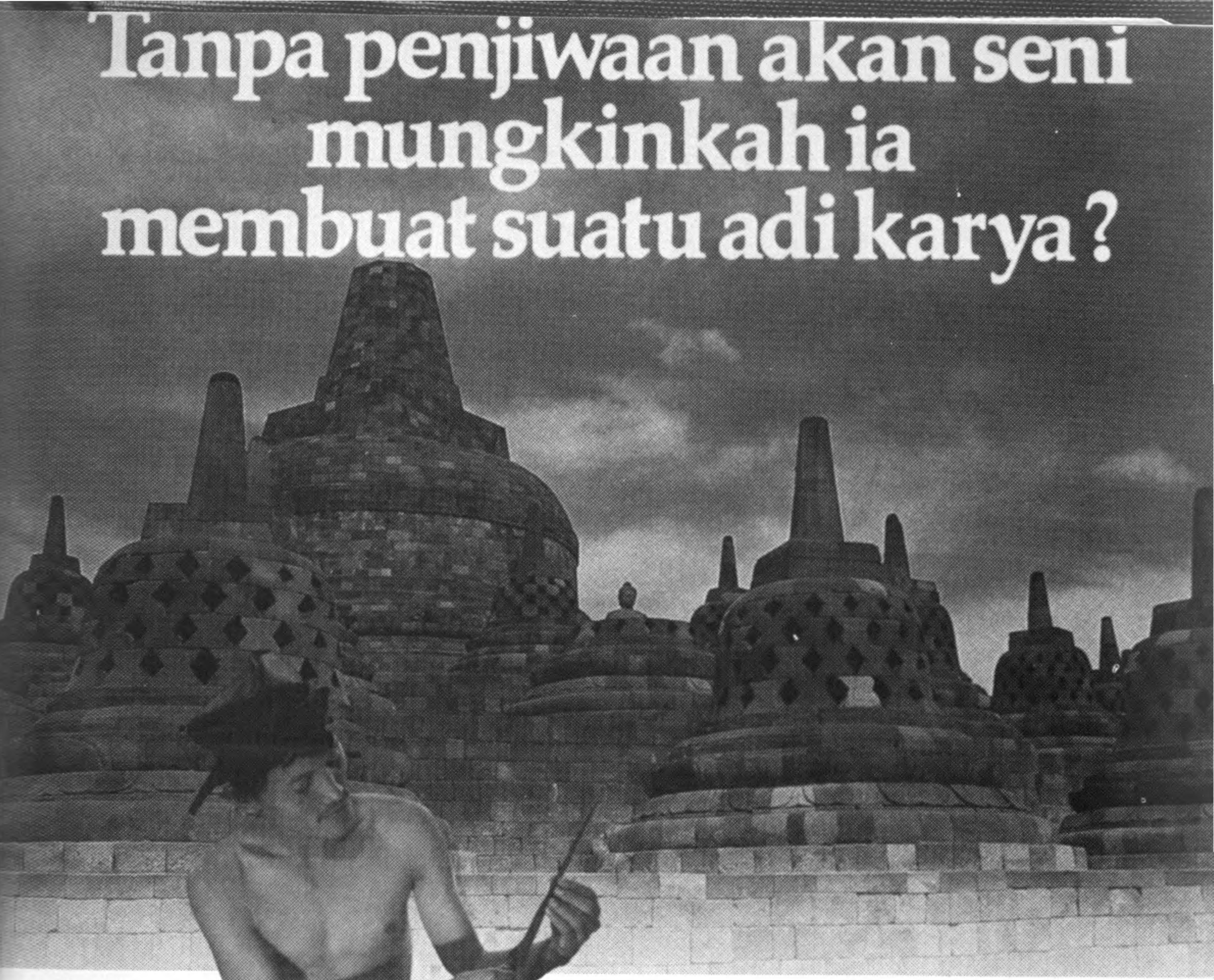

Bahwa kecepatan dan ketepatan merupakan unsur pokok dalam suatu keahlian, rasanya tak dapat dipungkiri. Namun bagi kami, itu saja tidak cukup. Masih dibutuhkan lagi penghayatan yang dalam atau penjiwaan atas profesi, sebagaimana seorang seniman terhadap karya seninya. Dan itu adalah filosofi usaha kami.

Oleh sebab itu perkembangan usaha kami tidak sepesat yang lain, namun senantiasa merambat keatas dan pasti. Lagi pula kualitasnya senantiasa setara dengan standar tertinggi yang diinginkan konsumen.

Memang, kepuasan kami adalah menciptakan segalanya yang tergolong sebagai adikarya.

Bakrie & Brothers

Berkarya nyata dalam pembangunan.

Digitized by Google

Segenap Pimpinan dan Karyawan
GARUDA INDONESIA
Mengucapkan

Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 42

Digitized by Google

GOLONGAN KARYA

No. 45 Nopember 1987

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

'DARI BAWAH KE ATAS' MENUMBUHKAN DEMOKRASI

UNIV. OF MICH.
JAN 10 1990
Current Serials

Laporan Khusus:
KNPI, [illegible]blema Apresiasi dan Persepsi Diri.

Majalah [illegible]ulanan D[illegible] Pimpinan Pusat Golongan Ka[illegible]

Digitized by Google

KIJANG BARU

Menampilkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia

KIJANG BARU Makin Mewah

Sosok KIJANG BARU makin menawan. Dashboard semewah sedan, ventilasi segala cuaca pada kedua ujung dashboard, serta panel instrumen yang bebas silau.

KIJANG BARU Makin Nyaman

Interiornya sangat lapang. Bantalan tempat duduk dari bahan urethane yang dilengkapi per, nyaman dan tidak melelahkan. Pemasangan AC* ("SUPER KIJANG**") tidak mempersempit ruang kaki berkat saluran yang sudah terpasang (built-in).

KIJANG BARU Makin Aman Dikendarai

KIJANG BARU dirancang lebih aman. Pada model "SUPER KIJANG**", rem depannya tipe cakram berventilasi. Dilengkapi LSPV (Load Sensor Proportioning Valve), menyeimbangkan tenaga pengereman sesuai beban, agar kendaraan tetap stabil walau direm mendadak.

KIJANG BARU Makin Perkasa dan Makin Ekonomis

Mesin Toyota 5K – 1500 cc bertenaga besar, dilengkapi Fuel Saving System (sistem penghemat bahan bakar) untuk menghindarkan pemborosan.

KIJANG BARU Makin Mantap Dikendarai

Suspensi depan tipe Double Wishbone, lebih memantapkan pengemudian. Gigi kemudi yang variabel memudahkan pengendalian.

Tingkat aerodinamikanya lebih baik (CD = 0,45), sehingga hambatan angin lebih kecil, bahan bakar lebih irit, dan laju kendaraan semakin mantap.

** Dealer option ** Bertransmisi manual 5-kecepatan*

Ya, inilah mobil idaman kita semua

TOYOTA 1500 KIJANG

Saksikan Kijang Baru di ruang pamer berikut yang dibuka penuh pada hari Sabtu (8.30 – 17.00) dan hari Minggu (09.00 – 13.00)

Main Dealer : PT. ASTRA MOTOR SALES • JAKARTA
- Jl. Jend. Sudirman No. 5, Telp. 587123.
- Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Telp. 375008.
- Jl. Salemba Raya No. 67, Telp. 884025.
- Jl. Daan Mogot No. 146-147, Telp. 596110.
- Jl. Jagorawi-Lebak Bulus Cilandak, Telp. 760780.
- Jl. Kunir No. 7, Telp. 671829.
- Jl. Muara Karang Raya No. 15 (Pluit), Telp. 6697640.
- Jl. Garuda No. 84. Telp. 414235.
- Jl. Prof. Dr. Supomo SH. No. 37, Tebet , Telp. 8290176.

Dealer : • JAKARTA,
- **P T. TUNAS RIDEAN MOTOR I** Jl. Pecenongan No. 60-62, Telp. 359491(5 sal).
- **P T. TUNAS RIDEAN MOTOR II** Jl. Dewi Sartika No. 145, Telp. 801860.
- **P T. KUSUMA MOTOR** Jl. Batu Tulis No. 34, Telp. 366907.
- **P T. PROUNION INDO JAYA** Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 48, Telp. 354253.
- **P T. ASTRIDO JAYA MOBILINDO I** Jl. Batu Tulis No. 9, Telp. 352421-3.
- **P T. ASTRIDO JAYA MOBILINDO II** Jl. Panglima Polim No. 60-A, Telp. 715129.
- **P T. MOBILINDO SUMBER KARYA** Jl. Bandengan Utara No. 41-A, Telp. 673950.
- **PT. KUSUMA INDRA MOTOR** Jl. Raya Bekasi Timur Km. 19, Telp. 4891903.
- **PT. ANEKA MOBILINDO,** Jl. Balikpapan No. 32 A-B, Telp. 377913.
- **PT. SINAR INTI TELAGA,** Jl. H. Samanhudi No. 7. Telp. 350022.
- **BEKASI, PT. KUSUMA BEKASI MOTOR** Jl. Ir. H. Juanda No. 98-A, Telp. (99) 72938.
- **TANGERANG, PT. TUNAS RIDEAN MOTOR III** Jl. Raya Serang No. 80 (Cimone), Telp. (99) 24932.
- **SERANG, PT TUNAS RIDEAN MOTOR IV** Jl. K.H. Wachid No. 91, Telp. (0254) 81270

TOYOTA
TERPILIH KARENA TERPERCAYA

©PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR Jl. JEND SUDIRMAN No 5 Telp. 587551 - JAKARTA

INDEKS

MEMO REDAKSI

Soal Kemandirian Golkar

FOKUS

Patriotisme Politik Dan Kekuasaan. Politik sering dicap kotor. Betulkah? Sayidiman Suryohadiprodjo dan Roeslan Abdulgani berusaha menjawabnya.

LAPORAN UTAMA

"Dari Bawah Ke Atas" Untuk Menumbuhkan Demokrasi. Golkar merintis dalam dirinya suatu proses demokrasi dari bawah ke atas. Munas yang dulu diadakan sebelum Musda I dan II, kini dibalik. Musda dulu baru kemudian Munas. Dr Alfian, Bas Saebu, GPH Mangkubumi, Uton Hartono, H Arifin dan Joao da Costa memberikan tanggapan mereka atas prakarsa mekanisme *bottom-up* tersebut.

LAPORAN KHUSUS

KNPI, Problema Apresiasi Dan Persepsi Diri. Kongres KNPI baru lalu menghadirkan kepengurusan "massal." KNPI yang merupakan produk sejarah, dalam 14 tahun keberadaannya menghadapi segudang problema. Tokoh-tokoh pemuda berbicara tentang KNPI menurut analisa dan penghayatan mereka.

NASIONAL

ABRI Menyempurnakan Doktrin; Maulud Nabi; In Memoriam Ny L Soetanto SH; Sumbangan pemikiran Soeharto Di Depan MPR; Hikmah Sebuah Kecelakaan; Yang Kuno Itu Penting.

KOMENTAR

ORGANISASI

Segalanya Sesuai Aspirasi Rakyat; Mendengar, Menyaring dan Menyalurkan; Golkar lah Yang Paling Mampu Berperan; Semarak 23 Tahun Golkar; Golkar Dan Gatotkaca.

SPEKTRUM

Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Oleh Oka Mahendra; Operasionalisasi Pancasila Di Bidang Ketenagakerjaan oleh Soekarno D.

INTERNASIONAL

Endi Rukmo menganalisa tentang Kongres XIII PKC.

SENI & BUDAYA

Sang Bima: Maria Sugiharto

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

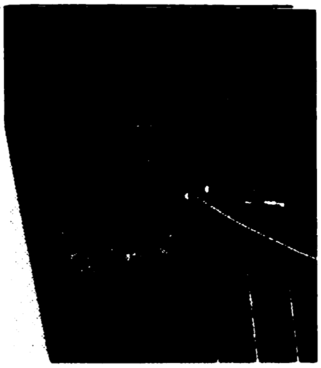

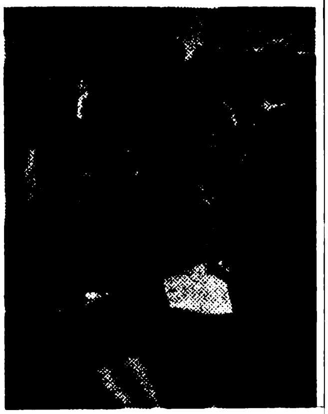

Akbar Tandjung

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/ Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli.
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Ariono Poernomo.
Subandrio.
Djonharro.
Rum Aly.
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noerijathy.
Robert Puang Sunur.
Issidarto BA.
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO.: 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981.
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

Digitized by Google

Soal Kemandirian Golkar

DALAM suatu suasana yang dinamis dan demokratis, di sekitar berlangsungnya Rapat Pimpinan Golkar yang baru lalu, sejumlah tokoh utama Golkar berbicara tentang kemandirian Golkar. Mencoba berbicara dalam semangat mawas diri dan rendah hati, Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar misalnya, memaparkan tingkat-tingkat keberhasilan Golkar dari Pemilu ke Pemilu serta kemajuan-kemajuannya langkah demi langkah dalam meningkatkan kemandirian. Salah satu bagian penilaian itu memang bisa terasa cukup menyentak, yaitu ketika beliau menggambarkan masih besarnya peranan 'birokrasi' dalam turut menunjang kemenangan Golkar pada Pemilihan Umum Maret 1987 yang lalu. Artinya, masih ada sesuatu yang belum mencukupi dalam kemampuan kemandirian Golkar.

Kendati cukup tersentak oleh ucapan yang sebelumnya sebenarnya telah beberapa kali diutarakan oleh sejumlah pengamat politik — dan kali ini oleh seorang tokoh terkemuka Golkar sendiri — toh tampaknya jajaran Golkar mampu mendengarnya dan menjadikannya bahan pemikiran lebih lanjut. Suatu pembicaraan yang dinamis lalu terbuka. Seorang tokoh yang sehari-harinya adalah berposisi sebagai pembina politik dalam negeri, turut menyumbangkan pikiran agar dalam membicarakan masalah kemandirian, perlu diperjelas lebih dulu beberapa pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kemandirian.

Dan adapun dari Ketua Umum Golkar, baik di forum Rapim maupun pada beberapa kesempatan sebelumnya, terlontar beberapa pemikiran untuk memperkaya wawasan seluruh jajaran Golkar mengenai kemandirian tersebut. Dari pandangan Ketua Umum dapat disimpulkan bahwa Golkar telah memiliki potensi kemandirian yang memadai. Kemandirian dalam pandangan tokoh Golkar ini adalah bagaimana Golkar tampil sebagai suatu kekuatan sosial politik yang representatif. Bukan kuat kalau ada kekuatan lain — katakanlah Abri atau kekuatan birokrasi — yang mendukung. Tapi sebaliknya, tidak pula berarti menutup diri terhadap yang mau mendukung.

Pandangan tiga tokoh tersebut — yang esensinya kita coba paparkan di atas — adalah pandangan-pandangan yang berharga. Bila ada yang mengandung kritik, maka kritik itu tidaklah akan memperkecil arti Golkar. Bahkan jauh lebih bernilai daripada sekedar sanjungan-sanjungan. Sanjungan memang bisa memberi 'hiburan' dalam beberapa saat, tapi nilai konstruktifnya nyaris atau bahkan dapat dikatakan sama sekali nol.

Akan tetapi terlepas dari itu semua, bagaimanapun adalah penting bagi Golkar untuk menelaah secara obyektif segala sesuatunya yang berkaitan dengan masalah kemandirian ini.

Suatu institusi yang mandiri mempunyai kemampuan berdasarkan mekanisme dalam dirinya sendiri untuk mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan itu berdasarkan kekuatan yang dimilikinya. Namun tanpa pretensi menggunakan ukuran-ukuran yang mutlak. Sebagai suatu kekuatan sosial politik — diantara kekuatan faktual lainnya di tanah air — Golkar memiliki potensi kemandirian. Dalam usianya yang 23 tahun, melalui penyempurnaan demi penyempurnaan, Golkar telah mempunyai suatu mekanisme internal yang cukup mapan. Selain mekanisme internal organisasi yang teratur, Golkar pun telah mengkonsolidasi dirinya sesuai perundang-undangan yang ada sehingga mempunyai pijakan nyata berupa 28.793.152 orang anggota terdaftar — dan 25 juta dari jumlah tersebut telah memiliki kartu anggota. Sebanyak 8.256.081 orang diantaranya telah mengalami pendidikan selaku kader teritorial ditambah 876.067 kader fungsional. Dibandingkan dengan jumlah suara yang diraih dua peserta pemilihan umum lainnya, yang sebesar 23.202.916, jumlah anggota terdaftar Golkar adalah sedikit lebih besar. Disamping itu, potensi Golkar pun tercermin pada meluasnya unsur pendukung Golkar di berbagai kalangan profesi: usahawan besar, menengah dan kecil, kaum cendekiawan, karyawan serta pegawai negeri dan sebagainya. Belum lagi dukungan program peningkatan kualitas yang dijalankan terus menerus di dalam Golkar.

Mengamati pelaksanaan pemilihan umum yang lalu — terutama variabel yang berupa peranan dan sikap Abri yang berusaha keras berdiri di atas semua golongan — meskipun ini bukan persoalan matematis, tetapi angka-angka yang ada menunjukkan memang wajar bila Golkar meraih suara 62.672.798 pemilih. Terutama bila dibandingkan dengan jumlah anggota yang dimilikinya — serta program pemenangan pemilu 'eka sapta' yang dijalankan Golkar. Bila kemudian ada suara bahwa toh kekuatan birokrasi ikut menunjang kemenangan Golkar, sehingga kemandirian Golkar lalu dipertanyakan, semestinya ada jawaban yang dapat diberikan.

Memang, tak dapat dipungkiri, kebanyakan anggota birokrasi pemerintahan dalam kedudukannya selaku warga negara mempunyai aspirasi yang sejalan lalu menjadi anggota Golkar. Ini jelas merupakan hak mereka. Tetapi jauh-jauh hari sebelum pemilihan umum, Golkar juga telah menyatakan tak menginginkan ada anggota yang berasal dari lingkungan birokrasi itu menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya untuk kepentingan Golkar. Tak terkecuali dalam masalah yang sensitif, yakni pengumpulan dana. Sebab Golkar yakin, sikap over acting seperti itu bnkan saja tidak dibutuhkan untuk memenangkan Golkar tetapi bahkan dapat merugikan Golkar. Mungkin saja, ada diantara kader Golkar yang kebetulan duduk dalam birokrasi tergelincir berbuat sesuatu yang mengesankan menggunakan wewenang dan kedudukannya dalam birokrasi untuk kepentingan Golkar — karena tak mampu membedakan kedudukan selaku pribadi anggota Golkar dan pada pihak lain selaku pemangku tugas birokrasi, atau karena memang over-acting dan miskin wawasan. Kalau ada, sangat disayangkan dan patut dijadikan pengalaman sebagai bahan pemikiran dan pelajaran pada masa mendatang. Mencoba berpikir sederhana saja — kendati persoalan kemandirian bukanlah masalah yang begitu sederhana, sesederhana mengucapkannya — maka menurut logika dengan mencegah adanya improvisasi yang salah kaprah dari satu dua kalangan birokrasi, maka ciri kemandirian Golkar akan tertampilkan dengan baik.

Tapi di luar itu, perlu dipahami juga bahwa sebagai suatu kekuatan politik Golkar harus menghindarkan diri terjerumus kepada suatu pengertian kemandirian secara harfiah dengan pengertian yang sempit. Kemandirian tidak harus berarti Golkar berdiri eksklusif dalam kehidupan sosial politik. Selaku pelaku dalam kehidupan sosial politik tersebut — apa lagi dengan misi selaku pembaharu — Golkar tentulah harus berkemampuan melakuan penggalangan-penggalangan horizontal selain yang vertikal. Dalam konteks tersebut wajar bagi Golkar untuk berupaya memperoleh dukungan yang seluas-luasnya, termasuk dukungan simpati kalangan ABRI dan kalangan birokrasi — sebagaimana juga Golkar mengupayakannya kepada organisasi-organisasi dan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Sepanjang ini semua dijalankan dalam lingkup batas yang benar dan cermat sehingga tidak tergelincir kepada pencampuradukan yang mengarah kepada sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang, itu semua hal yang wajar saja.

Kekuatan politik memang harus pandai-pandai me-manage fakta, unsur dan situasi politik. Hanya mereka yang berpikiran dan berwawasan sempit yang percaya bahwa hanya mereka yang paling tahu dan paling mampu melakukan segalanya seorang diri. Mereka yang bijaksana, tahu bahwa di luar dirinya selalu ada pula orang-orang yang sama bijaksananya atau bahkan lebih bijaksana, sehingga ada kesediaan untuk juga mempertimbangkan pikiran orang lain. Agaknya Golkar memilih peran yang bijaksana seperti ini. □

Digitized by Google

Patriotisme Politik Dan Kekuasaan

Penyelenggaraan power politik dan kekuasaan dalam paham demokrasi berarti merealisir kehendak rakyat. Bias memang ada, tapi harus ditangkal dengan upaya dini.

Politik dalam praktek bernegara adalah segmen kekuatan yang begitu berpengaruh, bahkan menentukan. Orang seakan berlomba untuk memperoleh pengaruh politik yang memberinya akses untuk menggenggam kekuasaan. Sebab dengan kekuasaan di tangan orang bisa berbuat "apa saja." Namun kekuasaan yang jatuh ke tangan seorang politikus atau negarawan, sering bias. Tidak jarang kekuasaan itu dipergunakan untuk menindas atau melawan.

Itu lah sebabnya politik oleh sementara kalangan dicap sebagai sebuah dunia yang kotor. Terhadapnya melekat sejumlah persepsi negatif. Para cendekiawan dan penemu teori kekuasaan agaknya tidak keliru mengingatkan: - *"Power tends to corrupt."* Ditambah dengan legalitas penggunaan kekerasan oleh yang memegang kekuasaan, maka orang yang memiliki ambisi politik, patut dicurigai.

Namun bersamaan dengan persepsi negatif yang melekat padanya itu, politik dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara, adalah kebutuhan mutlak. Tidak mungkin sebuah administrasi kenegaraan terlaksana tanpa politik. Karena itu dalam konteks pembangunan secara makro, politik pun perlu memperoleh penanganan, dengan nama pembangunan politik.

Peranan politik yang begitu sentral, akhirnya menuntut para pemegang kekuasaan dan power politik agar tampil sebagai patriot-patriot dalam kehidupan politik. Caranya? "Abdikanlah kekuasaan politik bagi kepentingan rakyat banyak," kata Sayidiman Suryohadiprojo dalam wawancaranya dengan Media karya. Menurut bekas Dubes RI di Jepang yang kini menjadi staf ahli Menristek Habibie ini, politik itu kotor atau tidak, tergantung dari cara kita memandang dan juga pada perilaku pemegang kekuasaan itu sendiri. Bahwa ada istilah power tends to corrupt (pemegang kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya) menurut bekas Gubernur Lemhanas ini, adalah gejala universal. Bagaimanapun juga pemegang kekuasaan adalah orang, sehingga kemungkinan untuk bias sangat besar. "Untuk itu harus ada mekanisme dan sistim ampuh yang mampu mencegahnya."

Sayidiman Suryohadiprodjo

Bila ukurannya adalah kepentingan rakyat banyak, maka pada periode 1945-1950, politik kala itu bercitra positif. Tapi dalam periode 1950, bersamaan dengan sistim demokrasi parlementer yang kita anut, kehidupan politik lebih membersitkan citra sebagai instrumen kotor. Partai-partai, tidak semua, tidak lagi memperjuangkan aspirasi rakyat secara nasional, tetapi terjebak dalam kepentingan kelompok dengan ideologi yang berbeda. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah contoh.

Jadi untuk menilai politik itu kotor atau bersih, selain tergantung dari sisi mana kita melihatnya, juga dari perilaku para pemegang kekuasaan. Untuk Indonesia jelas, alat ukurnya adalah sampai sejauh mana perilaku politik sesuai dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila atau tidak. "Berbicara tentang patriotisme dalam kehidupan politik, berarti berbicara tentang moral kekuasaan," ujarnya. UUD dan Pancasila sebenarnya padat dengan imperatif-imperatif moral agar pemegang kekuasaan tidak menyalahgunakannya.

Banyak sekali hal yang perlu ditangani bila ingin membangun politik dan kekuasaan yang tidak menyalahi pesan moral UUD'45 dan Pancasila. Bila berpikir dalam konteks demokrasi, maka kekuasaan yang demokratis adalah kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian pembangunan politik berarti upaya menciptakan sistim yang menjamin mekanisme kekuasaan rakyat yang disalurkan lewat lembaga perwakilan. Atau merealisir kehendak rakyat melalui kekuasaan. Perangkatnya adalah lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. "Pembangunan politik yang demokratis berarti membuat ketiga lembaga ini berfungsi optimal," ujarnya.

Jaminan Satu Asas

Pembangunan politik yang dijalankan selama Orde Baru, terlepas dari segala kekurangannya yang masih menggejala disana sini, namun patut diakui bahwa semangat untuk mengabdikan politik dan kekuasaan bagi kepentingan rakyat cukup kuat mengakar. Hanya saja karena yang namanya demokrasi dan kehendak rakyat demikian kompleks, maka selalu timbul persoalan di sekitar perilaku politik.

Menurut Sayidiman, setelah pembangunan politik Indonesia tiba pada kesepakatan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka jaminan bahwa politik semakin mencerinkan kehendak rakyat bisa dipegang. "Dengan landasan itu agaknya beralasan untuk membicarakan patriotisme dalam kehidupan politik," ujarnya.

Digitized by Google

Hanya saja, bila kita telah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka perwujudannya dalam perilaku politik bagaimana? "Sebab selama kita masih berbicara dan bertengkar soal prinsip satu asas, sebenarnya kita belum memahami Pancasila itu sendiri." Sebuah landasan sikap yang perlu dipahami oleh insan Pancasila, bahwa "Bila kita menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka konsekuensinya, kita menerima prinsip harmoni (keseimbangan). "Tanpa memahami ini, percuma kita berbicara tentang Pancasila."

Dan bila kita telah menerima Pancasila, sebenarnya tidak ada lagi persoalan antara pendekatan yang programis atau ideologistis, apalagi mempertentangkan keduanya. Setiap program yang dilontarkan dalam Pelita misalnya, adalah keputusan politik. Dan kalau itu keputusan politik, logis bila mencerminkan penghayatan kita terhadap ideologi. "Sekali lagi bila kita tetap mempersoalkan hal ini, sebenarnya kita belum mengerti apa itu Pancasila," tandas Sayidiman.

Dengan demikian, berbicara tentang kekuasaan yang mengabdi pada kepentingan dan kehendak rakyat, berarti kita mempersoalkan perimbangan kekuatan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, tanpa menimbulkan antagonisme di salah satu pihak.

Sayidiman mengungkapkan, dari pengamatannya selama ini, "Terus terang yang berperanan paling dominan dari ketiga lembaga kekuasaan ini adalah eksekutif." DPR kendati telah menjalankan peranannya dengan baik, tapi dalam satu hal, yaitu fungsinya mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan agak lemah. "Saya tidak tahu mengapa sampai demikian." Melihat peranan dan bobot parlemen selama ini, Sayidiman bertanya: "Bila mutu kontrol DPR seperti sekarang, siapa yang berani menjamin bahwa eksekutif menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat?" Untuk menjamin ini semua tidak bisa lain kecuali DPR harus mampu menampilkan diri sebagai lembaga yang berbobot sehingga dapat mengimbangi eksekutif.

Hanya yang agaknya tidak masuk di akal Sayidiman adalah kenyataan bahwa kita terlalu sering meributkan mutu para anggota wakil rakyat, tapi belum menemukan jalan keluar untuk menjawab permasalahan itu. Salah satu cara untuk menjawab masalah ini adalah staf. Artinya setiap anggota dewan, atau komisi, harus memiliki staf ahli yang memberi input dan pertimbangan kepada dewan. Namun kesulitan lain muncul: "Siapa yang mau membiayai staf ini?"

Dengan standar gaji yang diterima para anggota dewan seperti sekarang, keinginan untuk memiliki staf terasa tidak mungkin. Sedangkan untuk membebankan pembiayaan staf kepada pemerintah, kita masih menghadapi persoalan klasik yaitu kekurangan dana. Namun terlepas dari mampu atau tidak membiayai staf kebutuhan ini perlu mendapat perhatian kita.

Menurutnya, sekarang ini, maaf saja, para anggota DPR terkadang tidak menyadari bahwa dirinya adalah politisi. "Mereka lebih mendifinisi diri sebagai aparat organisasi."

Agar tampil menjadi lembaga yang benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat, DPR harus berbobot dan berwibawa. Keharusan ini tidak berarti kita mengimpikan sebuah lembaga legislatif yang kuat seperti Kongres-nya Amerika Serikat. "Sebab bagaimanapun juga lembaga perwakilan yang terlalu kuat tidak baik karena akan mengurangi keleluasaan eksekutif dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan negara," kata Sayidiman. Tapi ada bahaya bila legislatif terlalu lemah, karena eksekutif akan berjalan tanpa kendali.

Menurutnya bila DPR cukup berbobot dan berwibawa, maka tanpa mengurangi hak prerogatif presiden untuk memilih para menteri sesuai dengan sistim kabinet kita yang presidensil, sebelum susunan kabinet diumumkan presiden, nama-nama para menteri sebaiknya disetujui oleh DPR. Demikian juga pinjaman pemerintah dari sumber luar negeri, misalnya.

Mengapa hal ini perlu? Menurut Sayidiman, bila anggota kabinet yang dipilih presiden tidak mendapat persetujuan, ada bahaya para menteri menganggap dirinya hanya sebagai pembantu presiden yang menjalankan fungsi administratif semata atau teknis saja. Padahal dalam menjalankan tugasnya, seorang menteri akan mencerminkan aspirasi rakyat atau tidak. Dengan mendapat restu DPR, maka seorang menteri tidak saja berfungsi sebagai *an administrative or technical man,* tapi dia juga mempunyai fungsi politis. Dia adalah aparat yang menjalankan kekuasaan yang dipercayakan rakyat. Kalau hal ini untuk sekarang belum bisa terlaksana, karena sejumlah alasan, namun di masa mendatang adalah kebutuhan.

Untuk lebih memberi bobot kepada kedaulatan rakyat Sayidiman menginginkan sistim pemilihan distrik. Karena dengan sistim pemilihan umum seperti sekarang (sistem proporsional), rakyat sebenarnya tidak diwakili. Konsep pemilihan distrik ini pernah dikemukakan dalam Seminar Angkatan Darat 1966. Namun dia sendiri tidak mengerti mengapa konsep ini hingga sekarang belum juga dilaksanakan. Mungkin kita masih khawatir akan kambuhnya semangat kedaerahan bila sistim distrik diterapkan.

Kita belum mengerti Pancasila

Digitized by Google

Aparatur Pemerintah

Bila lembaga perwakilan berbobot dan berwibawa, maka hal itu akan memaksa eksekutif menampilkan diri lebih sempurna. Tetapi sebaliknya bila legislatif belum cukup kuat, maka eksekutif pun akan ikut-ikutan lemah. Dan salah satu kelemahan di jajaran eksekutif menurut penglihatan Sayidiman adalah kualitas aparatur pemerintah.

Kalau tidak salah semenjak 1973 dicanangkan upaya peningkatan kualitas aparatur pemerintah, termasuk tekad menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa. "Kita harus jujur, dengan aparatur seperti sekarang, apa yang bisa dicapai?" tanya Sayidiman. Ibarat di jajaran tentara, sebaik apapun strategi dan konsep seorang panglima, kalau serdadunya untuk menembak saja belum tentu beres, maka strategi dan konsep itu akan mubazir.

Bagi Golkar sebagai organisasi politik yang terus memenangkan pemilu selama era Orde Baru, perbaikan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah adakah hal yang crucial. "Tetapi saya tidak mengerti mengapa Golkar kelihatannya enggan ngotot dalam hal ini. Mungkin rikuh barangkali," ujarnya. Bila Golkar sukses dalam hal ini, demikian Sayidiman, maka tanpa terlalu membuang banyak biaya untuk kampanye, Golkar akan memenangkan pemilu lagi. Logikanya begini. Kemenangan Golkar kan banyak ditentukan juga oleh aparat pemerintah, sehingga kalau aparatur pemerintah ini berkualitas dan bersih, maka rakyat akan senang, dan pada gilirannya Golkar akan semakin mudah memperoleh dukungan rakyat bagi program-programnya. "Dan kalau Golkar ngotot dalam hal ini, percayalah, ABRI pasti mendukung," kata Sayidiman lagi.

Dia menganjurkan untuk mencari sebab, mengapa dalam hal perbaikan aparatur pemerintah, terasa sangat lamban. Padahal kita memiliki kantor Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara. Dalam kenyataan sehari-hari, sangat terasa bahwa aparatur pemerintah, belum memberikan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan masyarakat. Belum lagi kalau kita berbicara tentang korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di kalangan birokrasi pemerintah.

Tentu saja dengan mengemukakan hal ini kita tidak bermaksud menutup kenyataan bahwa dalam banyak hal, aparatur pemerintah telah mencatat kemajuan-kemajuan dalam pelayanan publik. Namun ada gejala bahwa dalam melihat kelemahan-kelemahan di kalangan aparatur pemerintah, lembaga legislatif maupun masyarakat, agaknya enggan atau rikuh untuk mengatakan pendapat yang berbeda.

Lantas bagaimanakah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah? Banyak cara, termasuk perbaikan gaji pegawai negeri. Menurut Sayidiman tidak realistis standar gaji yang diterima oleh para pegawai negeri sekarang ini. Seorang sarjana yang baru tamat, yang bila bekerja di perusahaan swasta memperoleh gaji minimal Rp 150.000/bulan, tapi kalau memilih bekerja sebagai pegawai negeri maka akan menerima Rp 32.000/bulan. Ditambah dengan tunjangan lainnya maka total penerimaan cuma Rp 60.000,- "Ini kan tidak realistis. Seorang sopir yang bekerja di kantor swasta bisa menerima penghasilan sekitar Rp 200.000, mengapa seorang sarjana harus begitu menderita bila bekerja sebagai pegawai negeri?

Dengan tingkat gaji seperti ini, maka tidak mengherankan kalau korupsi yang selama ini diusahakan sekuat tenaga untuk dilenyapkan, agaknya belum juga berhasil. Dan dengan tingkat penghasilan seperti itu, maka seorang atasan tidak berani menegur bawahannya yang diketahui nakal. Mereka yang nakal memang selalu dinyatakan hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh pegawai negeri yang ada. Itu kita akui.

Namun bila berkaca pada realita dan sedikit berpikir tentang proses maka penanggulangannya harus diupayakan secara terus menerus. Sayidiman melontarkan sebuah jalan pikiran untuk mengukuhkan keharusan memerangi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, betapapun hal itu masih kecil dalam ukuran kita.

Walaupun kita berkeyakinan teguh bahwa masih sangat banyak pegawai negeri yang bermoral terpuji, namun bila mereka yang bermoral demikian dalam kesehariannya melihat dan mengetahui ada rekan sekerja yang berbuat nakal dan menikmati hidup yang layak dan tidak diapa-apakan, lama-kelamaan idealisme dan semangat pengabdiannya akan jebol. Bila kenakalan rekan sekerja mulai meluas dan tidak menjadi rahasia lagi dalam lingkungan bersangkutan, maka kelompok nakal ini akan menjadi semakin kuat. Bila demikian maka akan terjadi pembalikan norma. Orang jujur malah dianggap bahaya dalam lingkungan tersebut. Karena proses ini berlangsung cukup lama, maka kendati kita masih bertengkar soal kebenaran istilah, namun ada yang dengan berani mengatakan korupsi menjadi kebudayaan.

Dengan demikian maka tugas utama seorang kepala biro misalnya, ialah mengidentifisir anak buahnya yang nakal tersebut, serta menghalanginya dengan menutup peluang-peluangnya. Yang baik memang masih banyak, tetapi hanya meyakini ini tanpa berbuat apa-apa tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah menciptakan *mainstream* baru agar orang-orang yang memiliki idealisme dan pengabdian tidak kalah pengaruh oleh mereka yang nakal. Untuk menciptakan mainstream baru itu, salah satu pilihan adalah memperbaiki standar gaji pegawai negeri. "Kalau perusahaan swasta bisa mengatur skala gaji yang memadai untuk menjamin kualitas kerja para pegawainya, maka pemerintah tidak bisa?" tanya Sayidiman.

Bila upaya moderat dan persuasif, tidak juga berhasil untuk menghilangkan praktek nakal di aparatur pemerintah, maka menurut Sayidiman, salah satu cara adalah penanganan lewat keputusan politik, yang mungkin agak bersifat radikal, seperti yang pernah dibuktikan pemerintah ketika membongkar keruwetan di Bea Cukai melalui Inpres 4 itu. Untuk ini, eksekutif tidak boleh dibiarkan bertarung sendirian. Lembaga legislatif, termasuk parpol dan Golkar harus mendukungnya.

Managerial Approach

Salah satu alasan mengapa gaji pegawai negeri tidak bisa diperbaiki secara drastis, adalah jumlah pegawai pemerintah yang terlalu banyak, tidak seimbang dengan kemampuan finansial negara. Tapi kenyataan yang agak membingungkan juga adalah pemerintah setiap tahun selalu membuka formasi baru bagi calon pegawai negeri, kendati ada kesan umum bahwa dengan jumlah pegawai negeri yang kini ada saja tidak sebanding dengan volume kerja yang tersedia. Satu pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh satu orang, terpaksa dibagi-bagi untuk 10 orang, sehingga tidak ada pegawai yang makan gaji buta. Fakta ini adalah salah satu penyebab mengapa birokrasi kita mengesankan keruwetan.

Sayidiman membantah teori lama yang menganggarkan jumlah pegawai

Digitized by Google

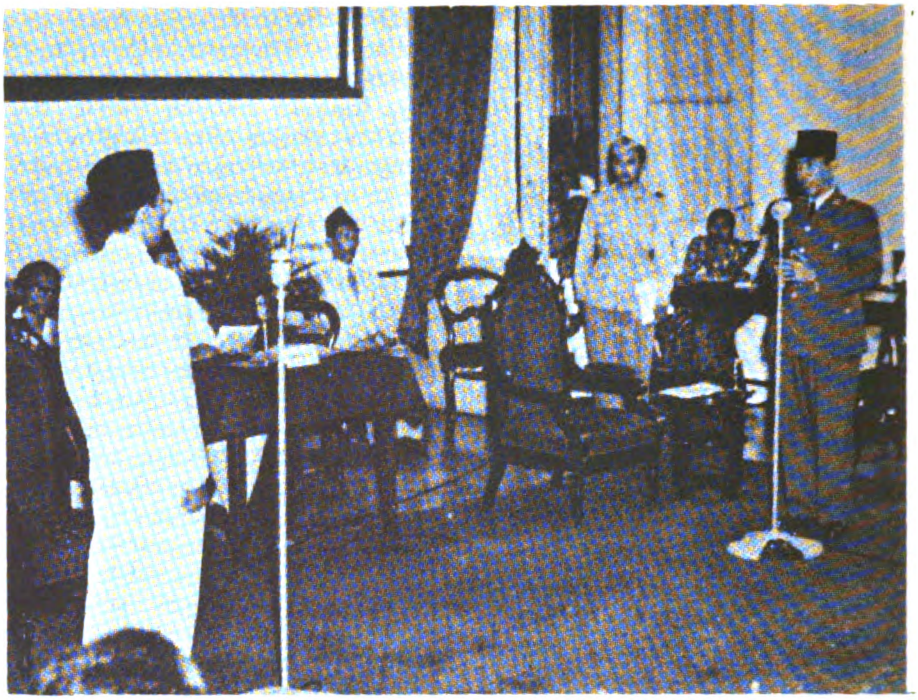

Teori lama sudah saatnya ditinggalkan

negeri berdasarkan ratio jumlah penduduk. Menurutnya itu adalah teori lama yang sudah saatnya ditinggalkan. Sebab bila kita mendasari diri pada teori bahwa anggota angkatan bersenjata harus 1 persen dari jumlah penduduk, maka untuk Indonesia yang penduduknya sekitar 170 juta saat ini dibutuhkan 1 juta lebih anggota tentara. "Ini tidak realistis," ujarnya.

Penentuan jumlah aparatur pemerintah dewasa ini, tidak lagi didasarkan atas jumlah penduduk tapi pada kebutuhan kerja birokrasi pemerintah sebagai sebuah organisasi. Ini berarti dalam menentukan jumlah pegawai negeri tolok ukurnya adalah *managerial approach.*

Dengan pendekatan ini, maka persoalan berikutnya adalah bagaimana membereskan BUMN. Badan usaha milik negara, harus menggunakan patokan pendekatan manajerial. Mengapa hal ini perlu? Karena bila dihitung, maka negara sebenarnya rugi besar bila mentelantarkan management BUMN. Antara hasil yang diperoleh dengan asset yang tertuang ke BUMN sungguh tidak seimbang. Bahwa untuk menyehatkan BUMN ditempuh cara swastanisasi atau go-public, itu terserah. Tapi yang penting pendekatan atasnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.

Bila BUMN mampu menghasilkan keuntungan, maka dari sana didapat sumber pembiayaan untuk meningkatkan standard gaji pegawai negeri. Dan dari segi kebijaksanaan ekonomi secara makro, Sayidiman minta perhatian pada perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah. Sebab perusahaan-perusahaan jenis ini selain menghabiskan modal yang tidak terlalu besar, mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Manajemennya pun tidak terlalu ruwet.

Pembebanan BUMN dengan misi sosial, justru baik. Namun misi seperti itu tidak berarti kita seolah membenarkan bila BUMN rugi terus-menerus sehingga disubsidi sepanjang hidupnya. Kalau ini yang terjadi maka misi sosial BUMN justru gagal, karena pada akhirnya rakyat yang mensubsidi BUMN. "Terbalik kan?".

Kepemimpinan Sipil

Dalam era 20 tahun terakhir, fakta yang tidak bisa diingkari adalah tampilnya ABRI sebagai pemegang kekuasaan dalam berbagai lembaga kenegaraan sejalan dengan dwifungsi yang kita anut dan kekaryaan yang

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TKT II CIREBON BESERTA STAF
KETUA SERTA SEGENAP ANGGOTA DPRD KOTAMADYA TKT II CIREBON

Mengajak seluruh warga Kotamadya Cirebon khususnya untuk turut serta berperan aktif mengamankan dan menyukseskan jalannya SIDANG UMUM MPR TAHUN 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA TKT II CIREBON
ttd
H. SALEH SACHYANA

WALIKOTA KDH TKT II C I R E B O N
ttd
DRS. H. MOH DASAWARSA

Digitized by Google

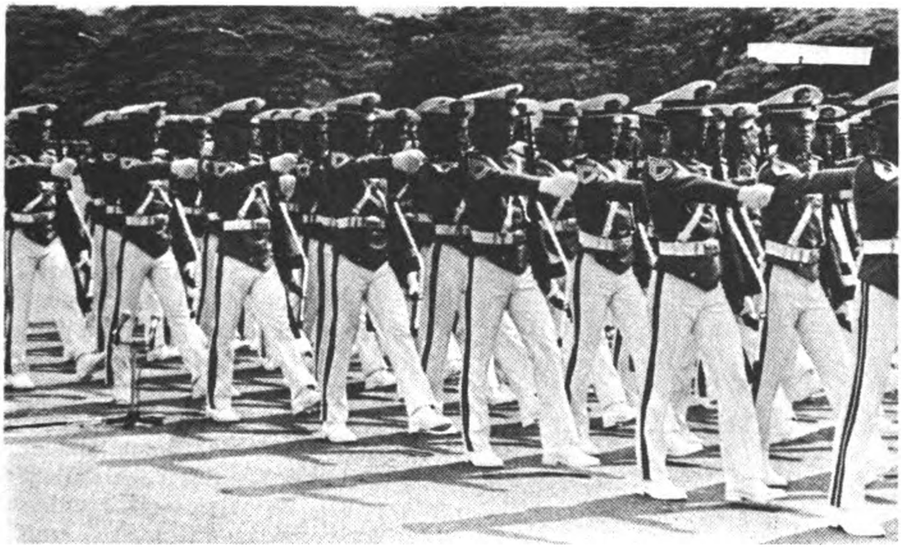

Kepemimpinan ABRI butuh kekuatan lain

diterapkan. Bila kita menerima bahwa Pancasila mengandung falsafah harmoni, maka kepemimpinan ABRI membutuhkan kekuatan lain yang mengimbangi, katakanlah sebagai sparing partner, untuk mencapai harmoni itu. Bila ABRI terlalu kuat, tidak baik. Dia membutuhkan kekuatan lain yang memacunya untuk bersaing, yaitu kepemimpinan sipil.

Menurut Sayidiman, selama masa Orde Baru, kita harus jujur mengakui lemahnya kepemimpinan sipil ini. Padahal menurut keyakinannya yang berulang kali dilemparkan di kalangan perwira-perwira muda ABRI, di masa depan negara ini membutuhkan kepemimpinan sipil yang kuat. Sebab bagaimanapun juga ABRI hanya segelintir kecil dari masyarakat Indonesia. Tentu saja kepemimpinan sipil yang kita harapkan, tidak dimaksudkan untuk dipertentangkan dengan kepemimpinan ABRI.

Untuk menjamin kepemimpinan ABRI yang akan terus baik, dibutuhkan kepemimpinan sipil yang kuat juga. Bila tidak, sudah menjadi sifat manusia, merasa tidak ada saingan yang perlu diperhitungkan, lantas terjerumus dalam sikap berpuas diri.

Lantas permasalahannya sekarang adalah bagaimana menumbuhkan kepemimpinan sipil itu? Sayidiman dengan tegas menjawab, "Itu harus datang dari kaum sipil sendiri." Tokoh-tokoh sipil yang berbobot misalnya, harus mampu menyaingi ABRI dalam memperebutkan kursi gubernur, bupati dsb. "Bagaimana sipil mampu melakukan hal itu tanpa menimbulkan antagonisme dan disrespect terhadap ABRI, itu baru jago," kata Sayidiman. "Dan bagaimana anda mengatasi persoalan tanpa menimbulkan persoalan baru, itulah seni kepemimpinan."

Namun karena kepemimpinan itu adalah seni, maka banyak cendekiawan kita yang pandai-pandai belum mampu melakukan itu. Mengapa? Karena seorang cendekiawan hanya berjuang selama perjuangan itu masih dalam batas faktor-faktor obyektif. "Setelah keluar dari faktor obyektif para cendekiawan umumnya mundur." Kepintaran tidak jelek. Tapi kalau kepandaian tanpa diimbangi kepemimpinan Sayidiman mengatakan: *"It leads to nothing."* Karena itu bagi sipil yang ada di lembaga partai, harus memiliki ambisi kepemimpinan. Hanya saja perlu digarisbawahi, ambisi untuk apa? Dalam negara Pancasila ambisi itu diterjemahkan sebagai ambisi untuk menciptakan harmoni. Bukan untuk dipertentangkan dengan ABRI. Sebab kepemimpinan ABRI akan terus membaik bila diimbangi dengan kepemimpinan sipil yang kuat pula. Mengenai kepemimpinan sipil di kalangan kaum muda kita, Sayidiman mengatakan bahwa kelompok ini menampilkan perilaku yang bila tidak berada pada posisi ekstrim menentang, berada pada ekstrim menjilat.

Kepemimpinan ABRI sekarang diterima dan mampu, karena dulu pada masa perjuangan dan awal kemerdekaan, ABRI berhadapan dengan politisi-politisi dan tokoh-tokoh dari kalangan sipil yang relatif kuat. Dan tambahan lagi kepemimpinan ABRI dipercaya karena ABRI mampu mematahkan gerakan-gerakan pengacau kemerdekaan seperti DI/TII dsb.

Sayidiman berupaya mengerti, bahwa surutnya kepemimpinan sipil selama Orde Baru dalam banyak hal disebabkan dwifungsi dan kekaryaan ABRI. Namun kalau itu yang menjadi penyebabnya, hanyalah bias saja. Dwifungsi dan kekaryaan ABRI tidak dimaksudkan untuk mematikan kepemimpinan sipil. Dwifungsi menurut definisi Sayidiman adalah keterlibatan ABRI dengan tujuan-tujuan politik bangsa dan negara. Angkatan bersenjata yang tidak mempunyai kepedulian terhadap pencapai politik bangsanya, adalah serdadu sewaan. Jadi menurutnya dwifungsi sudah dijalankan ABRI sebelum tahun 1966. Dalam konsep dwifungsi seperti ini, maka dwifungsi ABRI akan terus berjalan walaupun tanpa kekaryaan.

Kekaryaan ABRI yang dilakukan cukup intensif sejak 1966, karena pada saat itu begitu banyak anasir komunis/PKI menerobos masuk di kalangan sipil. Karena kekhawatiran atas kenyataan itu, maka ABRI terpaksa mengkaryakan orangnya untuk menduduki sejumlah posisi dalam pemerintahan yang sebelum itu menjadi jatah orang sipil. Namun di masa depan, kekaryaan ABRI sebaiknya mulai dibatasi, karena personil ABRI yang kini ada belum tentu cukup untuk mengurus organisasi ABRI sendiri.

Itulah kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan kekuasaan yang kita hadapi. Kekuasaan yang diperoleh eksekutif, legislatif dan yudikatif semuanya harus bermuara pada manifestasi kehendak rakyat. Kekuasaan diharap dapat melahirkan realitas baru. Tetapi kenyataan baru tidak mungkin terealisir tanpa perbuatan. Prestasi yang sudah dicapai lewat politik dan kekuasaan harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Namun bersamaan dengan itu, bias dan kelalaian kita untuk melihat kekurangan yang menggejala dari penyelenggaraan kekuasaan, harus ditanggulangi secara dini. Revolusi dalam sejarah umat manusia terjadi karena orang lalai atau tidak peduli terhadap borok-borok sosial kemasyarakatan. Untuk mencegah revolusi, jalan terbaik adalah menempuh reformasi. Ini berarti perbaikan dan pembenahan harus dilakukan dari hari kehari. Sayidiman menyarankan agar memakai ilmu air menetes di batu. Kalau borok itu begitu ampuh dan kokoh bagai batu karang, bukan tidak mungkin untuk diperbaiki. Setetes air yang menimpa batu karang dengan konsistensi yang terjaga, lama kelamaan akan memecahkan batu karang itu. Untuk itu politik dan kekuasaan bisa menjadi patriot.☐ (RA/BW/LT)

Digitized by Google

Jangan Salah Tafsir

Citra atau konotasi negatif yang dilekatkan ke alamat politik pada awal masa kemerdekaan, menurut Dr H Roeslan Abdulgani, adalah suatu pandangan yang tidak benar terhadap masa lalu. Sebab, pada jaman pergerakan kemerdekaan dan di jaman perintis kita dulu, politik itu mempunyai nilai sebagai sikap hidup patriotik dan nasionalistik. Artinya, pada jaman Dr. Setiabudi, Dr. Tjiptomangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, politik berkarakter semangat keksatriaan. Oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada masanya politik itu dipergunakan untuk melawan kekuatan serta kelemahan kaum kolonial. Bahkan, sebagai alat untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan Belanda disamping menganalisa kemampuan bangsa Indonesia dalam melawan bangsa penjajah itu.

Kemudian, Bung Karno mendengungkan seruan bahwa *"politik is machtsvorming en machtsaan wending"*, yaitu politik adalah menyusun kekuatan dan menggunakan kekuatan itu untuk menghantam kaum kolonial. Namun, hal ini oleh generasi sekarang seakan-akan sudah tidak berlaku lagi dan hanya sesuai untuk jaman pergerakan saja. Ini, jelas pandangan yang salah. Padahal, "machtsvorming en machtsaan wending" ini di jaman kemerdekaan pun masih berlaku, yaitu guna menghadapi kekuatan dari luar yang ingin menggoyahkan kedaulatan negara kita.

Juga tidak benar bilamana kegiatan politik saat itu dikaitkan untuk tujuan kekuasaan atau kepentingan orang-perorang. Karena, pada saat Bung Karno menginginkan adanya 'partai pelopor', maka Syahrir dan Bung Hatta memprotesnya sebagai tanda tidak setuju atas gagasan Bung Karno itu. Indonesia sebagai negara yang demokrasi harus mempunyai partai banyak. Sehingga, pada awal masa kemerdekaan kita — politik bukan untuk kepentingan orang perorang melainkan untuk kepentingan aliran partai yang bersangkutan. Dan timbul ekses dalam usaha menyebarluaskan pengaruh partai kepada massa. Itu bukan berarti politik yang menyebabkan (kotor), tapi partai sebagai penyebab utamanya. "Oleh karena itu, kita harus mampu membedakan mana partai, politik dan arti politik. Supaya pengertian-pengertian itu tidak rancu

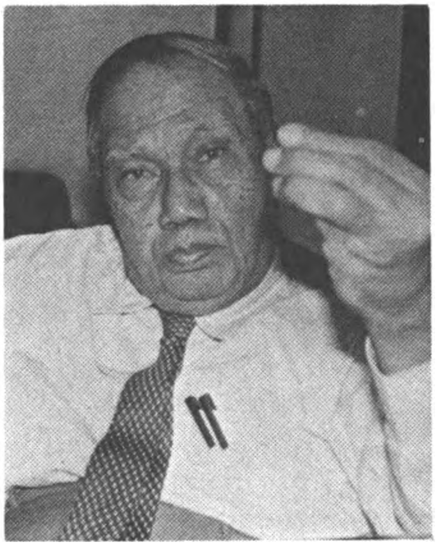

Roeslan Abdulgani

dan tumpang tindih untuk ditafsirkan."

Dan, jangan terlalu simplitis — seakan-akan pada waktu itu hanya partai dan politik yang kotor. Padahal, ada aliran-aliran politik (partai) yang justru menyusun kekuatan untuk dihantamkan pada kolonialis. Bahkan, tahun 1945 dan 1949, memang dengan gerakan politik ada orang-orang atau aliran politik mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi. Jadi, dalam hal ini jangan digeneralisir, karena ada aliran politik (partai) yang mampu mengimbangi kekuatan partai lain yang sedikit keluar dari jalur. Aliran politik (partai) Nasionalisme dan Islam misalnya, adalah satu bukti kekuatan yang mampu memberikan perimbangan terhadap kondisi dan situasi politik saat itu.

"Saya kadang-kadang mendengar ada penjabat yang menyatakan bahwa apa gunanya partai-partai dulu dan tidak punya jasa apa-apa. Hal ini seakan-akan semua dari sejarah dulu itu yang ikut berpolitik tidak punya jasa apa-apa pula," keluhnya.

Atas dasar ini, kiranya generasi sekarang perlu dan harus mempelajari sejarah secara jujur dan objektif, agar tidak salah dalam menafsirkan sejarah masa lalu. Karena, sejarah itu adalah bukti nyata dan tidak bisa ditambahi maupun dikurangi menurut versi masing-masing pribadi.

Dengan demikian, kita harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi sebagai potensi yang terkandung dalam UUD '45. Dan, negara kita pun adalah negara nasional bukan diktatorial sehingga potensi yang ada dalam UUD '45 itu merupakan potensi yang hebat dan siapa yang ingin belajar politik harus punya jiwa nasionalisme Pancasila.

Adapun proses pembangunan politik kita, Roeslan menilai sudah mengalami kemajuan dalam pengertian pola politik yang menitikberatkan pada ideologistis ke arah pola program pembangunan politik di atas satu azas bersama, yaitu Pancasila. Namun, hal ini jangan sampai 'longsor' lagi, karena antara PDI, PPP dan Golkar sudah tidak ada perbedaan ideologistis yang prinsipil sekali. Mekanisme politik yang sedemikian rupa ini jangan nanti menimbulkan pilih kasih. Seperti dalam kampanye Pemilu yang lalu, semua mengakui Pancasila sebagai satu-satunya azas, tapi dalam hati kecil jangan ada kecurigaan yang sangat mendasar.

Sedang terkait dengan masalah nilai-nilai kepahlawanan atau patriotisme sebagai unsur dan dimensi pendukung bagi pembangunan politik, katanya, perlu adanya tiga kekuatan bagi bangsa kita, yaitu kekuatan intelektual, kekuatan moral dan kekuatan kemauan untuk beramal dan berbakti. Sebab, sebutan pahlawan di jaman revolusi adalah suatu watak atau sifat manusia yang menjalankan tugas untuk dilaksanakan dalam menghadapi bahaya. Seperti halnya perjuangan arek-arek Suroboyo dalam menghadapi serangan udara, laut maupun darat dari tentara Inggris. Itupun bukan rakyat atau arek-arek Suroboyo yang menganggap dirinya sebagai pahlawan, tapi pihak pemerintah yang mengakui bahwa pertempuran Surabaya adalah perlu diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Oleh karenanya, atas dasar tiga kekuatan tersebut, maka dalam usaha memberikan dukungan terhadap pembangunan politik setiap generasi tidak akan melaksanakan dan mewujudkan perjuangannya sebagai sikap sloganistis dan menjadi artifisial. Arek-arek Suroboyo dalam mempertahankan kotanya, mempunyai kekuatan moral atau kekuatan dan kemauan untuk beramal dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Di jaman pembangunan ini sifat dan watak pahlawan itu bisa diwujudkan dalam gerak langkah roda-roda program pembangunan nasional sebagaimana adanya. ☐ DT

Digitized by Google

'Dari Bawah Ke Atas' Untuk Menumbuhkan Demokrasi

Organisasi Politik Mutlak Memerlukan Otak dan Otot

AKAN ada sesuatu yang baru di Golkar yang 20 Oktober lalu berusia 23 tahun. Melalui Rapat Pimpinan empat hari menjelang HUT 23 itu, jajaran pimpinan tingkat nasional dan daerah dari organisasi politik terbesar ini sepakat mengambil langkah baru yang terkait dengan peningkatan demokratisasi sistim dalam organisasi Golkar. Dan adalah Dr Alfian — ahli ilmu politik terkemuka di tanah air saat ini — yang menyebutkan bahwa langkah yang diambil Golkar ini sangat tepat. "Suatu policy yang patut dihargai karena akan memberikan dampak yang sangat luas dikemudian hari". Rentang kaitnya terutama tentulah dengan aspek pembangunan politik.

Peserta Rapim Golkar 17-20 Oktober 1987 itu memang berbulat kata melaksanakan gagasan yang pada awalnya dilontarkan oleh DPP Golkar dalam suatu rapat konsultasi dengan ketua DPD I se-Indonesia di bulan Juni tak lama setelah Pemilu. Melalui Ketua Umum Golkar Sudharmono SH, DPP waktu itu mengajak untuk mempelajari kemungkinan penyelenggaraan Musda Tingkat II terlebih dahulu, baru disusul berturut-turut dengan Musda Tingkat I dan Munas. Munas itu sendiri tetap berlangsung Oktober 1988.

Dengan urutan mulai dari bawah ini, Musda II sebagai level musyawarah organisasi yang paling dekat kepada akar-akar rakyat menjadi forum terdepan bagi organisasi dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam kaitan penyusunan dan penjabaran program organisasi. Musda tingkat I meningkatkan penjabaran itu sebelum diangkat lagi ke tingkat nasional melalui Munas. Begitu pula dalam jenjang pembentukan kepengurusan dan kepemimpinan organisasi.

Alfian

"Gagasan ini", menurut Sudharmono tatkala memberikan pengarahan pada Rapim Oktober 1987, "dilandasi oleh pemikiran dalam rangka mengembangkan pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan organisasi Golkar". Golkar ingin memberikan peranan yang lebih besar kepada para anggota dan kader yang berada di akar-akar rakyat dalam partisipasinya dalam organisasi yang sekaligus dikaitkan dengan langkah konsolidasi organisasi setelah suksesnya pelaksanaan Pemilu yang baru saja berlangsung. "Hal ini berlainan dengan tradisi selama ini, dimana Musyawarah Nasional diselenggarakan terlebih dahulu dan kemudian disusul oleh Musyawarah tingkat Daerah". Siklus mekanisme kepemimpinan Golkar yang berlangsung dari bawah (tingkat II) ke atas (tingkat I dan tingkat pusat) — yang diistilahkan sebagai bottom up system — diharapkan akan membuat citra demokrasi yang baik akan makin tampil. Dan menurut Sudharmono ini juga merupakan bagian konsolidasi organisasi yang penting. Merupakan harapan, "dengan terciptanya mekanisme baru ini, akan terdapat perasaan yang meluas bahwa jajaran kepemimpinan Golkar benar-benar tumbuh dan didukung dari bawah, atau dari daerah ke pusat". Demikian juga, secara aspiratif akan timbul perasaan bahwa aspirasi anggota tersalur berjenjang dari daerah sampai ke tingkat pusat. "Inisatif dan kreativitas kader, juga akan lebih terbuka dalam berpartisipasi pada kegiatan organisasi. Pada gilirannya, semua hal ini akan memperkuat perasaan bertanggungjawab dan perasaan memiliki di kalangan anggota Golkar".

Akankah demikian nantinya? Cukup beralasan untuk mengatakan 'ya'. Esensi dari demokrasi adalah kebersamaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Makin luas kesempatan untuk turut dalam kebersamaan tersebut, apalagi dengan pengutamaan bagi arus kehendak dari bawah, makin demokratis pula suatu sistim. Maka bottom up system yang hendak segera diterapkan Golkar di tahun 1988 mendatang ini, dianggap oleh Dr Alfian sebagai wujud dari tekad untuk menum-

Digitized by Google

buhkan kehidupan demokrasi. Ia berpendapat proses pengembangan demokrasi yang ditempuh Golkar itu perlu dilanjutkan dalam lembaga infrastruktur politik. Dengan perkataan lain, segenap organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas diharapkannya mendukung dan mengembangkan langkah yang telah dirintis dan dipelopori Golkar. "Saya yakin, bila kehidupan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan telah berhasil mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan wajar dalam diri masing-msing, dapat dipastikan kehidupan sehat itu juga akan terrefleksikan dalam lembaga-lembaga politik lain, tidak terkecuali lembaga-lembaga perwakilan rakyat".

Memberi Kedaulatan Yang Lebih Besar

Ahli ilmu politik ini melihat bahwa Golkar ingin mengembangkan suasana baru. Apabila selama ini suasana lebih diwarnai oleh iklim dari atas ke bawah — top down — maka dengan langkah baru itu Golkar ingin mengembangkan suasana yang diwarnai iklim dari bawah ke atas. Dalam kalimat lain, "Golkar akan mengembangkan demokrasi dalam kehidupan bersamanya". Menurut hemat Alfian, sistim baru akan memberikan kedaulatan yang lebih besar kepada para anggota untuk menentukan arah organisasi di masa mendatang. Termasuk dalam menentukan siapa yang dapat dipercaya para anggota untuk duduk dalam badan-badan kepengurusan dari tingkat bawah sampai tingkat atas, sehingga para anggota tidak menerima saja siapa yang jadi pengurus. "Dari segi ini saja, saya lihat suasana sehat dapat diharapkan makin berkembang", ujar Dr Alfian.

Sejumlah tokoh pimpinan Golkar di daerah tingkat II maupun tingkat I, berpikiran dan berpengharapan seperti apa yang diutarakan Alfian. Ketua DPD I Golkar Irian Jaya Barnabas Suebu SH menganggap langkah Golkar kali ini sebagai 'terobosan' yang penting dalam rangka menumbuhkan Demokrasi Pancasila. "Proses itu justru kita mulai dari dalam organisasi kita", ujarnya. Memang sudah waktunya bagi kita untuk tidak hanya menjalankan top down, tetapi memulai dengan bottom up. Kita kawinkan keduanya, sehingga keinginan dari bawah dan keinginan dari atas dipertemukan. Keinginan dari bawah selama ini menurut Bas Suebu belum berkembang. "Maka dengan terobosan ini kita harapkan menjadi tradisi baru yang makin berkembang di masa-masa mendatang". Salah satu arah perkembangan yang diharapkan, adalah seperti yang diutarakan Drs

Barnabas Suebu

KGPH Mangkubumi

Uton Hartono, Ketua DPD II Golkar Majalengka (Jawa Barat), "Pada gilirannya nanti akan menjawab harapan semua pihak tentang kemandirian Golkar". Selain itu, menurut Uton, bila bottom up system ini dilaksanakan secara konsisten, dimulai dari hal-hal yang mendasar — yang menyangkut masalah keformaturan misalnya — maka kian hari akan lebih banyak muncul kader-kader Golkar yang berkualitas dan dapat diandalkan. Karena itu, ujarnya lagi, sistem paket dari atas mesti dikurangi sedikit demi sedikit. "Ajaklah kita yang di daerah untuk merumuskan, jangan dipaketkan, karena kita yang berada di daerah tahu persis apa yang sedang akan terjadi di daerah."

Kendati menganggap bahwa pada hakekatnya urut-urutan pelaksanaan Munas dan Musda di masa lalu dengan yang akan diterapkan pada masa mendatang tidaklah menjadi masalah pilihan yang pelik — "karena secara prinsip takkan mengubah struktur kewenangan dan sistim peringkat organisasi" — KGPH Mangkubumi SH, Ketua DPD I Golkar DI Yogyakarta, sependapat bahwa bila Musda II dan I diselenggarakan lebih dahulu dari Munas, akan terasa lebih demokratis. Tetapi ia mengingatkan, letak nilai lebih demokratis ataupun kurang demokratisnya sistim organisasi bukanlah terletak pada prosedur Musda dulu atau Munas dulu, melainkan pada penentuan sistim keformaturan dalam penyusunan kepengurusan. Dan yang terakhir ini, berkaitan dengan tingkat kualitas dan kedewasaan jajaran Golkar sendiri. Untuk ini, Mangkubumi menganggap perlu pengkajian mendalam.

Drs Slamet, Ketua DPD II Golkar Madiun, berpendapat sama dengan Mangkubumi. Pada hakekatnya, dilaksanakan Munas dulu atau Musda Tingkat II dan I dulu, adalah sama. "Tapi kalau saya diminta untuk memilih, saya akan memilih Musda tingkat II dulu yang dilaksanakan, karena hal itu akan lebih demokratis". Dalam penyusunan ke-

Digitized by Google

pengurusan, hendaknya mendengarkan suara-suara dari bawah yang sebisa mungkin sesuai pula dengan saran dan petunjuk dari atas. "Maksudnya, supaya ada paduan, sehingga jalannya kepengurusan berlangsung sebaik-baiknya. Bila masalah kepengurusan ini tidak mendengarkan suara dari bawah, dapat menimbulkan masalah di dalam. Saya berpendapat, bahwa demokrasi itu sebetulnya terdapat dalam proses penyusunan. Maksud saya, tata cara dalam pemilihan itu sendiri yang nantinya akan mencerminkan demokrasi".

Dinamika Akan Berkembang

Dr Alfian berpendapat, meski langkah yang diambil merupakan langkah yang strategis untuk jangka panjang, namun dapat dimaklumi apabila pada saat ini pelaksanaannya belum dapat segera seperti yang diharapkan. Bagaimanapun, telah bertahun-tahun masyarakat terbiasa dengan suasana bahwa segala sesuatu diterapkan dari atas. Namun dalam jangka panjang dapat dipastikan dinamika dari bawah akan berkembang, sehingga sasaran yang dicitakan akan tercapai. Mungkin tidak dalam 5 tahun, tetapi dalam 10 tahun atau lebih.

Mungkin saja, diperlukan waktu untuk adaptasi — yang mudah-mudahan takkan terlalu lama — karena seperti kata Ketua DPD II Golkar Pare-pare H. Arifin, "dari pengalaman masa lalu, daerah-daerah itu masih menunggu sifatnya". Menurut H. Arifin, selama ini hasil yang ditelorkan Munas kadang-kadang sulit dilaksanakan di daerah-daerah. Bahkan bukan hanya itu, kadang-kadang pula tidak cocok dengan kondisi daerah-daerah. Dan nanti, bila Musda II dan I dilaksanakan lebih dulu, masukan program datang dari bawah. Tentu akan lebih sesuai dengan kondisi daerah, tinggal bagaimana memformulasikannya dengan DPP. Dengan dilaksanakannya Musda II lebih dulu, kata Ketua DPD II Golkar Maluku Utara H. Abubakar, itu akan memudahkan menyerap aspirasi rakyat. Jajaran tingkat II memang merupakan ujung tombak organisasi yang terdekat dengan sumber aspirasi. Sedang pada pihak lain, "Dengan adanya bottom up ini", ujar H. Eddy Suchaedi Ketua DPD I Golkar Kalimantan Timur, "daerah akan dapat membawakan aspirasinya ke atas". Bagaimana daerah mengetahui apa yang menjadi kehendaknya, bila program itu datangnya dari atas. Namun memang, ujarnya, bisa terjadi dalam masing-masing daerah membawakan programnya terdapat ketidaksamaan. Maka dalam pelaksanaan Musda perlu dijaga agar tak terlepas dari landasan strategi bersama. Ketua DPD II Golkar Ambenao (Timtim) Joao Da Costa sependapat. "Prakarsa mendahulukan Musda untuk mendapatkan masukan dari bawah untuk meningkatkan demokrasi pada prinsipnya merupakan langkah paling bagus", ujarnya. Begitu pula dalam masalah pembangunan. "Memang sebaiknya perencanaan pembangunan dari bawah lebih baik. Pembangunan dari desa menurut saya lebih baik dan sesuai dengan program daerah, tetapi juga tidak terlepas dan harus sesuai pula dengan program Pembangunan Nasional.

Uton Hartono

Menurut Dr Alfian, pelaksanaan sistim dari bawah itu memerlukan suatu mekanisme komunikasi. Komunikasi satu arah, apakah dari atas saja, ataukah dari bawah saja, tidak dapat dikatakan baik. Komunikasi yang baik harus menjalin keselarasan antara aspirasi dari bawah dan kebijakan dari atas. "Sebenarnya, dalam suatu organisasi tidak ada keputusan yang diambil berdasarkan 100 persen aspirasi dari bawah saja, tetapi juga ada unsur dari atas. Yang diperlukan adalah pertemuan antara apa yang dipikirkan oleh para pemimpin dan apa yang diinginkan oleh warganya atau masyarakat". Pelaksanaan demokrasi adalah pertemuan antara pemikiran para pemimpin dan keinginan atau aspirasi dari masyarakat. Vocal pointnya, kata Mangkubumi SH, memang terletak pada titik temu kesepakatan atas-bawah.

Mekanisme komunikasi dalam organisasi mutlak diperlukan, mengingat pengetahuan atau informasi yang diperoleh warga masyarakat tidak selalu lengkap. Organisasi perlu menghidupkan suatu jaringan sistim komunikasi timbal balik yang mampu memberikan informasi kepada jajaran anggota. Apabila mekanisme atau jaringan komunikasi hanya menjangkau sebagian kecil kelompok organisasi, dapat dipastikan arus informasi akan berjalan pincang. Penyaluran aspirasi akan tidak lancar. Padahal dalam dunia komunikasi saat ini, ujar Alfian, informasi adalah kekuatan. Siapa yang menguasai informasi pada gilirannya akan meraih 'kekuasaan'. Karenanya dalam pengembangan demokrasi mendatang diperlukan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi yang mampu menjangkau segenap jajaran masyarakat atau jajaran organisasi.

Bas Suebu pun melihat kebutuhan jembatan komunikasi. Dalam saling isi antara proses top down dan bottom up, memang harus ada instrumen untuk menampung, mengkaji dan menyalurkan kedalaman-kedalaman aspirasi dan keinginan-keinginan masyarakat. Sejauh ini perangkat ini telah dimiliki Golkar. Dari desa misalnya, meskipun kualitasnya belum sepenuhnya memadai, menurut Bas, Karakterdes kita sudah mulai dapat menjalankan fungsi penjembatanan tersebut.

Darah Baru

Selain mekanisme komunikasi, kata Alfian, untuk pengembangan demokrasi diperlukan pula suasana kesegaran. Organisasi perlu setiap saat menyegarkan diri dengan memasukkan darah baru, tenaga baru, yang bisa lebih mendinamisir organisasi. Seleksi kepemimpinan yang akan duduk dalam kepengurusan perlu dilaksanakan, baik dari atas maupun dari bawah, dalam suatu sistim kompetisi yang sehat. Tenaga baru berupa aktivis tidak saja dilahirkan dari bawah, tetapi juga dari atas. Suatu hal yang sering dikeluhkan para pengamat ialah mengapa kaum intelektual pada umumnya jarang tampil dalam organisasi kemasyarakatan, khusus organisasi politik. Organisasi politik seperti Golkar tidak hanya memerlukan orang yang pandai bicara, berani, populer dengan dukungan

Digitized by Google

massa, tetapi juga memerlukan tokoh yang mempunyai bobot intelektual, meski kadang-kadang tokoh seperti ini sulit mengkomunikasikan diri secara populer. Sistim organisasi Golkar yang baru nantinya perlu tetap membuka kesempatan bagi siapapun, termasuk kaum intelektual yang ingin aktif. Memang tidak semua kaum intelektual atau cendekiawan harus tampil sebagai pemimpin. Yang diperlukan adalah keseimbangan, yaitu tampilnya tokoh yang berilmu dan tokoh yang 'kuat' dalam masyarakat. Suatu organisasi politik tidak cukup mengandalkan 'otak', tetapi juga mutlak memerlukan 'otot'. Tidak hanya memerlukan kaum intelektual, tetapi juga memerlukan tokoh yang mampu menjadi penggerak atau motivator massa.

Faktor lain yang menurut Dr Alfian perlu diperhatikan adalah keterbukaan. Demokrasi kita adalah demokrasi yang mementingkan keterbukaan. Keterbukaan merupakan komitmen seluruh bangsa. Keterbukaan itu sangat diperlukan untuk mencari jembatan persamaan atas masyarakat kita yang majemuk. Kesepakatan untuk melaksanakan Pancasila sebagai satu-satunya asas hanya dapat terlaksana apabila masing-masing pihak bersedia bersikap dan menunjukkan keterbukaan, yang berarti tidak main 'cap-capan' atas dasar ukuran subyektivitas primordial.

Apabila mekanisme komunikasi, penciptaan kesegaran dengan memasukkan darah baru serta keterbukaan itu mendapat perhatian sepenuhnya dari Golkar, Dr Alfian yakin bahwa sasaran yang diinginkan Golkar akan tercapai. Perjuangan Golkar untuk mewujudkan komunikasi timbal balik antara atas dan bawah pada gilirannya akan memberi dampak bahwa dalam pengambilan suatu keputusan, suara dari bawah benar-benar akan menjadi perhatian dan pertimbangan. "Ini suatu langkah politik yang menarik", ujar Alfian, "Saya tidak mengira Golkar sedemikian maju". Dan ia berharap organisasi lain bergerak mengikuti Golkar, supaya sumbangan Golkar dalam pembangunan politik tersebut tak menjadi sia-sia. Dan ke dalam diri Golkar sendiri, pengutaraan Drs Uton Hartono, agaknya mewakili suatu harapan: Jangan hanya menciptakan kesan demokrasi ada, tetapi harus ada realitanya yang kongkrit. Kita sedang menghadapi saat yang tepat untuk memantapkan kemandirian Golkar.□

Wawancara: Badrul M/Rendy MS/D. Triono/Subandrio/N. Suprono. Pemadu: Sugyanto/Rum Aly.

Melaksanakan Yang Baru

ADA sebab musabah tertentu sehingga tempo hari Golkar mendahulukan pelaksanaan Munas daripada Musda I dan II. Urut-urutan musyawarah dari tingkat atas ke tingkat bawah adalah produk ketika Golkar berusia sangat muda dan masih berwujud sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya.

Ketua DPD II Golkar Pare-pare (Sulawesi Selatan) H. Arifin mencatat bahwa di masa-masa awal Orde Baru dan menjelang Pemilu 1971 terbaca masih cukup kuatnya keinginan mengganti dasar negara Pancasila dengan yang lain. Agar tangguh membendung kecenderungan seperti itu, Sekber Golkar melaksanakan program konsolidasi yang cepat. Karena keterbatasan waktu, diperhitungkan bahwa kesempatan mencetak perangkat organisasi dari bawah menuju ke atas takkan mencukupi. Maka dari itu DPP waktu itu langsung mengadakan Musyawarah Nasional dan baru kemudian disusul Musyawarah Daerah Tingkat I dan II — dan ini berlangsung hingga kini.

Dan adalah Rapim Golkar 1987 yang memutuskan untuk merubah urut-urutan menjadi Musda II lebih dulu, baru Musda I dan Munas. Ini setelah memeriksa apakah hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. Dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga disebutkan jangka waktu 5 tahun bukanlah harga mati. "Boleh dipercepat, bila waktu dan kegunaannya misalnya sudah mendesak. Boleh juga diadakan musyawarah luar biasa. Itu bisa saja, dan hal itu tergantung pada keinginan daerah-daerah", ujar H. Arifin.

Daerah tidak merasa keberatan terhadap diterapkannya bottom up system ini, kata Ketua DPD I Golkar Kalimantan Timur Eddy Suchaedi. "Dulu memang merupakan pertanyaan, apakah tidak menyalahi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga". KGPH Mangkubumi SH Ketua DPD I Golkar DIY misalnya memang menganggap bila Musda hendak didahulukan berarti Munas harus mengubah Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Golkar lebih dulu. Tetapi menurut Rapim 1987, ternyata tak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.

Bottom up system bukan hal yang asing bagi Ketua DPD II Golkar Ambenao (Timor Timur) Joao Da Costa. "Saya dulu adalah raja Okuisi. Kalau ada permasalahan dalam masyarakat, dibicarakan dulu melalui musyawarah dengan tetua desa. Hasil musyawarah itulah yang dilaksanakan raja". Dan Barnabas Suebu SH pimpinan Golkar tingkat I Irian Jaya menyatakan "Kami dari daerah-daerah mendukung penuh pelaksanaan kebijakan itu". Sesuai dengan pendidikan politik yang kita berikan kepada para kader, tujuan kita adalah membekali mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Terkait dengannya, tentu keberanian — yang diimbangi kedewasaan — untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. "Yang ada di akar-akar bawah tidak perlu kuatir untuk menyampaikan pendapat. Sebab kalau kita kuatir terus, kapan kita bisa mulai? Sekarang sudah waktunya", ujar Bas.

Menyongsong mekanisme baru dengan arus utama dari bawah ke atas ini, Ketua DPD II Golkar Majalengka (Jawa Barat) Drs Uton Hartono berkata "saya ada beberapa usul". Hendaknya semangat bottom up itu tercermin dalam rekruitmen personalia kepengurusan. Tampilkanlah kader berdasarkan kriteria memiliki kemampuan, kemauan, diterima masyarakat secara baik, berpengetahuan, berpengalaman dalam berorganisasi. "Jangan asal tunjuk. Kini sudah saatnya kader-kader Golkar diberi kepercayaan tampil berdasarkan kualitasnya".

"Kita siap melaksanakan Musda II lebih cepat dan lebih dulu", kata Ketua DPD II Golkar Maluku Utara H. Abubakar. Percepatan Musda II, secara otomatis memang akan memperpendek periode kepengurusan DPD II. "Tapi hal ini tidak akan merupakan beban mental bagi jajaran pengurus, sebab merupakan ketentuan organisasi".□

Digitized by Google

KNPI, Problema Apresiasi Dan Persepsi Diri

Empat belas tahun silam sejarah melahirkan seorang bayi dengan nama Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sebuah nama yang cukup keren memang. Si jabang bayi yang diprakarsai kelompok pencetus dengan Deklarasi 23 Juli 1973 yang ditandatangani 35 "bidan" itu, hadir di tengah hingar bingar pro dan kontra dari kalangan kaum muda sendiri. KNPI kala itu adalah produk yang oleh para perancang dianggap kompromistis, tapi bagi yang menentang dia adalah sebuah kontroversi.

Kini setelah satu dasawarsa lewat, KNPI tetap mampu mempertahankan kehadirannya. Kepengurusan yang bergilir setiap tiga tahun sekali dipatuhi. Persyaratan organisasi seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan. Pendek kata dari segi mekanisme organisasi yang menunjang keberadaannya, KNPI boleh membusungkan dada.

Bila memakai analogi pertumbuhan seorang anak manusia, usia 14 tahun dia masih berupa insan ingusan. Tapi bagi sebuah organisasi rentang waktu eksistensi seperti itu bisa mengundang pro dan kontra dalam arti bila orang mempertanyakan : "Sudah pantas kah sebuah organisasi yang berdiri selama 14 tahun mencapai tahap kedewasaan?". Dari sudut pandang progresif, usia organisasi yang sudah menginjak masa 14 tahun, memadai untuk dikatakan dewasa. Pengingkaran dari keharusan tersebut, bisa dianggap hanya apologi yang berlebihan. Ini tentu pendekatan kualitatif.

Laporan khusus ini didasarkan pada hasil diskusi yang diadakan Media Karya, Kamis 22 Oktober di kantor DPP Golkar, dengan sejumlah eksponen pemuda. Diskusi yang dibuka oleh Wakil Sekjen Ir Akbar Tanjung dan dimoderator oleh Kakanda Hatta Mustafa itu dihadiri sekitar 30 pemuda dan aktivis organisasi kepemudaan.

Yang tampil sebagai pembicara pada waktu diskusi tersebut adalah Alex Paat, Edy Sukirman, Markus Mali, Ali Yahya, Jayadi Kamrasyid, Dr. Johan Sahperi Saleh, Postdam Hutasoit, Freddy Latumahina, Samsyir Alam, Ida Wara Suprida, Robert Puang Sunur, Ir Saleh Khalid, Martin Sirait, Suryo Susilo dan Bondan Winarno.

Kendati beberapa dari mereka adalah aktivis organisasi, tetapi dalam diskusi tersebut, pendapat dan kehadirannya adalah dalam kapasitas pribadi.

Tapi bila ingin obyektif, mungkin kita dianggap mengingkari kenyataan kalau menilai KNPI sekarang telah menemukan bentuk yang dewasa. Tidak dalam pengertian format dan mekanisme organisasi, tetapi lebih pada apresiasi terhadap wadah itu sendiri. Itulah persoalan yang selalu menjadi topik bila membicarakan KNPI dari tahun ke tahun. Tidak mengherankan bila seorang tokoh yang mengikuti KNPI selama 14 tahun terakhir mengatakan, topik-topik diskusi tentang KNPI selama ini masih berkisar pada soal yang itu-itu saja, sehingga terasa usang. Namun bagi kita justru menarik, mengapa persoalan di sekitar KNPI kok terasa usang?

Padahal KNPI seperti kata Dr Johan Sahperi Saleh, Presiden Dewan Pemuda Asia, menikmati status dan

Markus Mali

perlakuan istimewa dari pemerintah. Hanya sedikit organisasi kepemudaan di negara lain yang memperoleh keistimewaan seperti itu. Perlakuan istimewa yang diberikan kepada KNPI, mungkin didasari keyakinan bahwa pemuda/kaum muda adalah pewaris masa depan. Namun penanganan terhadap organisasi pemuda sebagai realisasi dari kita terhadap masa depan, membersitkan kesan over organized. Semuanya mau serba diatur. Kemandirian organisasi ini dalam melakukan apresiasi terhadap eksistensinya, agak terabaikan.

Tidak mengherankan kalau orang seperti Markus Mali, ex pengurus PMKRI yang kini bergabung dalam Kelompok Cipayung, menilai ada sejumlah ambivalensi yang terpantul

Alex Paat

dari keberadaan KNPI selama ini. KNPI adalah organisasi independen, tapi dalam praktek terlalu kentara keberpihakannya. "Kalau sang Ketua Umum KNPI mau memilih partai A atau B, itu adalah haknya sebagai pribadi. Tapi jangan menggiring lembaga untuk berpihak," katanya.

Persoalan Ide Dasar

Apa yang dikemukakan Markus, diperluas oleh Alex Paat dari GAMKI. Menurutnya salah satu persoalan yang melilit KNPI dewasa ini adalah masalah bias antara fakta dan ide dasar. KNPI dalam beberapa hal dianggapnya mengingkari ide dasar sebagai forum komunikasi dan lembaga pembinaan dan pembentukan kader bangsa. Tugas besar ini menurut ide dasar dijalankan oleh KNPI yang independen. Dan menurut ide dasar juga,

Digitized by Google

keanggotaan KNPI adalah organisasi kepemudaan dan mahasiswa. KNPI di masa lalu, menurutnya agak menganaktirikan ormas.

Tapi setelah UU No 8/1985 tentang Keormasan disahkan, keanggotaan KNPI adalah ormas dan perorangan juga. "Ini tidak merupakan hal baru, tapi memang seharusnya demikian," katanya. "Kita lihat nanti bagaimana kedua jenis keanggotaan ini bisa dijalankan secara proporsional tanpa yang satu mengorbankan yang lain." Paat menambahkan, bila konsisten dengan ide dasar, maka keanggotaan KNPI tidak federatif seperti sekarang, yaitu adanya DPD KNPI I dan II, tapi hanya organisasi kepemudaan di daerah dan di pusat.

Lain Edy Sukirman. Fungsionaris DPP Pemuda Demokrat ini berpendapat, kendati ide dasar KNPI betul seperti yang dikatakan Alex Paat, bahwa KNPI hanya dibentuk di pusat, namun apakah dengan ketentuan ide dasar itu berarti keinginan kaum muda di daerah untuk membentuk KNPI di tempatnya harus dilarang? "Ingat pasal 28 UUD'45 menjamin kebebasan

Hatta Mustafa

berserikat dan berpendapat."

Dengan lahirnya UU Keormasan, menurutnya, kerancuan dalam keanggotaan KNPI bisa diluruskan kembali. Tapi Edy mengingatkan, kendati ada kemungkinan keanggotaan perorangan dalam KNPI, namun dia tetap mencerminkan organisasi. "Enak nih. Dulu pemuda hanya kepalanya saja yang masuk KNPI, tapi buntutnya tidak," ujarnya berseloroh. Artinya dulu yang menjadi anggota KNPI adalah eksponen pemuda, bukan ormas.

Hatta Mustafa, bekas Sekjen KNPI pada awal berdirinya, coba meluruskan masalah pertikaian di sekitar ide dasar ini. Sebagai salah satu pemuda

Edy Sukirman

yang menandatangani Deklarasi 23 Juli, menurut Hatta, ketika KNPI berdiri keinginan pertama yang diperjuangkan para eksponen pemuda kala itu adalah membebaskan diri dari kepentingan ormas. Kenapa demikian? Dalam Munas I Mahasiswa Indonesia di Bogor, hadir 118 utusan dari organisasi pemuda dan Dewan Mahasiswa. Karena 118 utusan berebut bicara dan mempertahankan pendapat, Komisi Tata Tertib yang bekerja maraton tiga hari tiga malam, gagal menyepakati apa-apa. Tidak mengherankan kalau Munas itu pun gagal.

Karena pengalaman Bogor itu, maka timbul keinginan untuk mendirikan organisasi yang menjadi mekanisme sentral dari regenerasi bangsa ini. Itulah KNPI. Implisit dengan mekanisme sentral adalah fungsinya sebagai komunikator. "Bisakah ormas berperan dalam rangka itu?" tanya Hatta.

Sebagai mekanisme sentral dan forum pembinaan kader bangsa, KNPI memang diharap mampu melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang memiliki wawasan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian selepas dari KNPI, sang tokoh bisa berperan dimana saja dan dalam organisasi politik apa saja.

Bila sikap seperti ini menjadi watak kader yang dihasilkan KNPI, maka dalam kampanye pemilu misalnya orang tidak usah gontok-gontokan dan saling tidak bertegur sapa. Mengapa? Karena dengan bekal "pendidikan" di KNPI seorang kader bangsa tidak mempersoalkan lagi dimana dia berafiliasi secara politik. Entah di Golkar, PDI atau PPP, seorang kader bangsa bertugas satu, yaitu mengurusi Indonesia.

Dan sejalan dengan Hatta, Jayadi Kamrasyid mempertegas lagi permasalahan di sekitar ide dasar ini. Menurut fungsionaris KNPI Jawa Barat ini, KNPI sebagai sebuah konsep pembinaan kader bangsa, sangat tepat, terlepas dari bias yang kini menguak ke permukaan. Persoalan di sekitar KNPI, menurutnya berputar-putar pada persepsi dan operasionalisasi dari hakekat peranan KNPI sebagai forum komunikasi, mekanisme sentral dan sarana pembinaan kader bangsa itu. Yang menjadi pertanyaan, "Apakah KNPI sekarang berperanan optimal dalam merealisir ide dasar itu?".

Terlalu Luas

Persoalan yang melilit eksistensi KNPI menurut Suryo Susilo dari PP Pemuda Katolik, adalah kenyataan bahwa KNPI sekarang belum mampu menetapkan dimana dia berfungsi dan berperan. Para pendiri KNPI mungkin tidak menduga KNPI sekarang berkembang demikian besar dan demikian strategisnya. Dan menurutnya karena perkembangan yang demikian itu, maka KNPI telah tumbuh dan mengurusi persoalan yang begitu luas sehingga melampaui kapasitas dan kemampuannya sendiri. KNPI tumbuh sebagai lembaga yang nyaris memonopoli semua masalah kepemudaan. Padahal pemuda sebagai kelompok sosial mempunyai kompleksitas permasalahan yang sangat luas.

Kalau menelusuri ide dasar KNPI bahwa lembaga ini berperan di bidang pembinaan kader bangsa dan sebagai forum komunikasi, maka bobot keterlibatan KNPI dalam masalah kepemudaan adalah pada dimensi politik. Sedangkan dimensi lain dari masalah kepemudaan sudah ada departemen teknis atau organisasi yang membawahi dan menaunginya. Jadi pada dimensi politik lah KNPI sebenarnya mempertaruhkan bobotnya. "Persoalan kita sebenarnya mengembalikan KNPI pada orientasi yang jelas," katanya.

Bila kita ingin jujur, demikian Susilo, KNPI sekarang tidak mengetahui lagi apa yang menjadi porsinya. "Semua mau diurus sehingga akhirnya malah tidak mengurus apa-apa." Dia yakin kalau KNPI mau terlibat dalam segala aspek kepemudaan, jelas tidak mampu. Jadi bagi KNPI di masa mendatang mungkin menjadi keharusan untuk merefleksi diri agar berperan di sektor yang sesuai dengan kapasitasnya. "Tidak bisa A mau, B mau, semuanya mau."

Mungkin karena batasan tentang sektor dimana dia berperan masih

Digitized by Google

Freddy Latumahina

rancu, maka KNPI sering membersitkan keusangan. Freddy Latumahina, bekas fungsionaris KNPI yang kini duduk di Departemen Kepemudaan DPP Golkar, coba mengetengahkan sebuah analisis yang ingin melihat KNPI secara utuh lewat pendekatan struktur dan program, mirip dengan pemikiran yang terungkap dari makalah Ir. M. Saleh Khalid, Ketua PB HMI.

Menurut Freddy, bila berbicara tentang KNPI fakta yang menggoda adalah mungkin pertanyaan ini : "Mengapa setelah 14 tahun hadir, KNPI belum menemukan bentuknya yang utuh seperti yang tertuang dalam ide dasar?". Untuk menjawab ini tidak mungkin bila kita tetap mamakai analisa struktur. Untuk mengelola KNPI menjawab tuntutan masa depan, maka persoalannya barangkali adalah pada kemampuan kita bermain dalam program. Sebab bila kita terus-terusan mempersoalkan struktur, maka sampai kapanpun KNPI akan berputar pada masalah yang itu-itu juga.

KNPI sebagai forum komunikasi misalnya, terlalu membuka penafsiran yang berbeda-beda. Mengapa dalam 14 tahun usia, KNPI belum mampu mendefinisikan diri secara utuh? Belum ada kesepakatan tentang fungsi KNPI sebagai forum komunikasi yang menjembatani kaum muda Indonesia yang beraneka latarbelakang budaya, bahasa dan warna kulit, harus ditempuh lewat pendekatan apa. Kalau terus-terusan memakai pendekatan program, kita akan terus salah. Padahal KNPI diakui atau tidak memiliki kelebihan tertentu.

Lewat pendekatan program, mungkin kesenjangan antara ide sebagai forum komunikasi dengan aplikasi aktual dalam kehidupan bermasyarakat, akan terjawab. Kalau program KNPI sudah demikian hebatnya, maka kita mungkin tidak lagi mempersoalkan apakah ormas akan menjadi anggota KNPI atau tidak. Yang jelas dengan program yang tangguh, KNPI tinggal menagih pada ormas apa saja program spesifik yang menjadi ciri keberadaan mereka.

Harapan Freddy diperjelas oleh Saleh Khalid. Menurutnya, antara KNPI dan ormas kepemudaan, ada semacam interaksi nilai tambah. KNPI menyalurkan nilai tambah bagi ormas, sedangkan ormas pun demikian. Dengan interaksi ini, maka antara ormas dan KNPI tidak akan terjadi saling curiga. KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda-pemuda dengan kualitas tangguh, diharap mampu melahirkan ide-ide besar. Dan sarana komunikasi antara KNPI dengan ormas adalah pada program itu. KNPI tinggal menanyakan kepada HMI, GMNI atau GAMKI misalnya, "Apa program kalian dalam pembangunan kepemudaan di tanah air?".

Secara struktur, menurut Freddy, KNPI periode David Napitupulu telah berbuat banyak, yaitu dengan membentuk KNPI di tingkat I dan II hampir di seluruh Indonesia, kendati Hatta Mustafa yang dalam periode David menduduki jabatan Sekjen mengungkapkan dalam diskusi bagaimana sulitnya mencari pemuda yang mau duduk sebagai pengurus DPD KNPI ketika itu. Kalau David berhasil membina struktur KNPI secara vertikal, maka pada masa kepengurusan Akbar Tanjung struktur itu dimantapkan lagi lewat pendekatan horizontal, dengan program merangkul atau bersahabat dengan ormas-ormas kepemudaan yang ada.

Setelah tiba pada periode Aulia Rachman dan terakhir Abdullah Puteh, kelihatan program mulai diberi bobot agak istimewa. Tetapi seperti apa yang disitir oleh Suryo Susilo bahwa KNPI semua serba mau, maka program-program tersebut akhirnya tidak jalan. "Pada saat masyarakat membutuhkan ide-ide besar yang harus keluar dari KNPI, lembaga ini bahkan mengurusi pompa air masuk desa. Tidak salah, tapi mengapa pekerjaan itu harus dilakukan KNPI, tidak diserahkan kepada AMPI misalnya?", tanya Freddy.

Senada dengan Freddy, Markus Mali mengungkapkan, menurut pengamatannya, KNPI lama-kelamaan terjebak menjadi lembaga yang terlalu melibatkan diri dalam urusan teknis operasional, ketimbang konsepsi. Terlalu berbobot politik ketimbang memikirkan persoalan bangsa secara utuh. "Sikap KNPI dari pemilu ke pemilu mencerminkan cukup gamblang *double morality* itu," katanya.

Pendekatan program menurut Markus, adalah kebutuhan. Tapi hal itu tidak berarti KNPI berhenti melahirkan konsep dan ide-ide besar. KNPI menurutnya harus menjadi *policy body,* atau dengan istilah yang lebih keren : *think-tank.* Sedangkan untuk masalah teknis, serahkan saja pelaksanaannya kepada ormas.

Bila sepakat dengan keinginan Markus, - dan dalam perjalanan ke depan agaknya harus demikian, - maka diperlukan sebuah konsep tentang profesionalisme pemuda. Sanggupkalı KNPI berperanan dalam skala itu?

Program

Peserta diskusi umumnya sependapat tentang satu hal ini, yaitu sudah saatnya pro kontra atau kontroversi di sekitar KNPI dihapus dan digantikan dengan sikap yang lebih positif terhadapnya. Bagaimana caranya? Dekatilah KNPI secara program. Atau dengan kata lain, menilai KNPI di masa depan harus dilihat dari program-program yang dilahirkan dan dijalankannya. "Bukan saatnya lagi kita bersikeras di sekitar pendirian setuju atau tidak setuju dengan KNPI," kata Robert Puang Sunur yang pada awal kehadiran KNPI menjabat sebagai bendahara.

KNPI menurutnya adalah konsensus nasional dan kini dengan lahirnya UU Keormasan memiliki landasan yuridis formal. Siapa yang tidak setuju dengan KNPI, maaf dia berada di luar dulu, menunggu kapan dia berubah pikiran. "Tidak ada lowong lagi kita mempersoalkan apa itu KNPI, mau dibawa kemana KNPI dsb," ujar Robert. Dengan demikian satu-satunya pegangan untuk berpolemik tentang KNPI nantinya, adalah adu argumen di sekitar program. Kita tidak lagi berbicara tentang partisipasi ormas ini maupun ormas itu. "Itu sudah *out of date.*"

KNPI lahir justru karena pada periode sebelum 1966, tidak ada kesamaan persepsi di kalangan kaum muda kita tentang sejumlah masalah kebangsaan. "Setelah dia lahir, apakah kita harus merusaknya dengan sikap-sikap kontroversial?". Dus, persoalan KNPI nantinya adalah profesionalisme pemuda yang didukung oleh orientasi program. Salah satu tantangan profe-

Digitized by Google

sionalisme pemuda dicontohkan secara sederhana oleh Robert. "Bagaimana pemuda kita berhasil memproduksi singkong sebesar 1 kuintal di atas tanah yang tidak memerlukan pupuk sama sekali?". Atau bagaimana pemuda menghasilkan tokoh las yang mampu membuat kursi goyang yang tidak copot selama 10 tahun? Keinginan Robert ini adalah pendekatan pragmatis atas sebuah program.

Lantas bagaimana supaya KNPI bisa menciptakan program-program seperti ini? Robert menunjuk suatu proses sederhana. Tugas utama KNPI menurutnya membuat program lengkap dengan kualifikasinya. Program itu dikawinkan dengan kebutuhan jaman. Setelah program rampung baru kita berpikir tentang seorang ketua KNPI yang mampu menjalankan program tersebut. Jadi pertanyaannya adalah, ketua KNPI yang bagaimana yang mampu memenuhi standar dan kualifikasi program yang tersedia. Jangan dibalik. "Jangan memilih sang ketua lebih dahulu, setelah itu baru darinya dituntut program."

Lewat program yang jitu, bisa diharap partisipasi akan mengalir. Dan bentuk partisipasi yang realistis, adalah jika kaum muda Indonesia mampu menjawab tuntutan hidupnya sesuai dengan kebutuhan dimana dia berada. Robert mengatakan, jangan terlalu berharap seorang pemuda desa di Flores misalnya mampu melahirkan sesuatu yang besar bagi kebutuhan bangsa ini. Tetapi bila si pemuda Flores itu berhasil membuka kebun singkong dan bisa hidup layak, apakah dia tidak berbuat sesuatu dalam skala kepentingan bangsa ini?

Dengan demikian seorang pemuda desa yang tidak memiliki pijakan organisasi bisa saja menjadi ketua KNPI. Ini berarti pendekatan kita adalah pendekatan kualitas. Belum lagi kalau ingin membahas segi-segi kuantitatif. Bahwa KNPI dalam tindak lakunya juga berbobot politis, terang. Dalam pemilu 1992, diperkirakan 60 persen lebih jumlah pemilih adalah kaum muda. Tentu saja mereka ini akan menjadi incaran partai politik dan Golongan Karya. Sebagai kelompok yang diincar, lumrah saja kalau pemuda sedikit genit.

Berbicara tentang program, berarti kita juga mempertimbangkan masa laku kepengurusan DPP. Untuk seorang ketua yang selalu berganti (tidak tertutup kemungkinan dia dipilih kembali) dengan interval tiga tahun sekali, jelas orang tidak akan mampu

Robert Puang Sunur

berbuat apa-apa kalau tidak didukung oleh program yang realistis. Mungkin karena itu Suryo Susilo sampai mengatakan KNPI mencampuri urusan kepemudaan yang begitu luas, sehingga akhirnya tidak mengerjakan apa-apa.

Senafas dengan Robert adalah pendapat Johan Sahperi. Menurutnya KNPI sekarang terjebak dalam kompleksitas kegiatannya sendiri sesuai dengan statusnya yang istimewa. Citra dan langkah KNPI sangat ditentukan oleh figur ketua umum-nya. Mengapa? Karena program yang dilontarkan tidak mengakar. Jalan keluarnya, KNPI dalam setiap kongres-nya harus berbicara tentang program yang berorientasi kedepan. Setelah mampu memformalisasikan program seperti itu, baru kemudian menentukan ketua umum mana yang paling sesuai dengan program tersebut.

Dan bila menginginkan KNPI sebagai think-tank, maka program yang disusunnya harus relevan dan bisa dilaksanakan. Tetapi Johan sendiri bertanya: "KNPI sebagai wadah komunikasi dan berhimpun yang diharap mampu bertindak sebagai think-tank akan mampukah dia berperanan dengan kualitas itu bila mengabaikan pemuda kampus sebagai sumber insani yang sangat besar?". Dia mengkonstatir bahwa selama KNPI ada, terasa ada jarak antara lembaga ini dengan kampus.

Bila menarik perspektif ke tahun 2000, maka kita akan melihat banyak sekali tantangan yang menghadang. Tetapi bersamaan dengan rumitnya tantangan itu ada janji dan peluang yang terbuka lebar bagi kita agar berperan. Persoalannya, mampukah kita mengidentifisir tantangan dan peluang itu, sehingga menyiasatinya lewat program-program yang jitu?

Tentang program ini Saleh Khalid menyumbangkan pemikiran yang agak sistematis. Dengan asumsi bahwa KNPI tidak diributkan lagi karena sudah disahkan oleh UU Keormasan, maka dia beranggapan sebagai wadah berhimpun KNPI dan anggotanya, dalam hal ini baik ormas maupun perorangan, saling memberi nilai tambah. Sebagai wadah berhimpun kehadiran ormas dalam KNPI tidak lain adalah dalam rangka meningkatkan fungsi masing-masing. Dalam konteks ini maka KNPI adalah pemegang policy, sementara ormas adalah pelaksananya. Sedangkan bagi pemuda yang karena profesinya tidak bergabung ke KNPI, kepada mereka dilakukan pendekatan profesional. Kalau tidak bisa direkrut menjadi ketua umum, paling tidak pemuda seperti ini bisa duduk dalam majelis

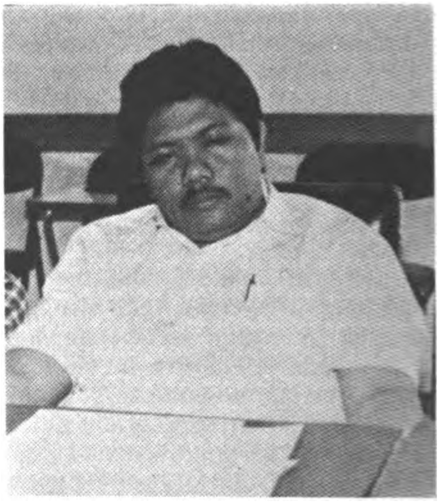

Saleh Khalid

pemuda. Mereka diharap mampu memberi input kepada KNPI dalam rangka pelaksanaan program maupun melahirkan program-program yang pragmatis. "Tinggal bagaimana formula ini didisain secara utuh sampai ke tingkat propinsi dan kabupaten," katanya.

Jawaban Postdam

Semua keluhan dan harapan terhadap KNPI, dijawab oleh Postdam Hutasoit, Ketua Steering Committee Kongres KNPI baru lalu, yang juga hadir dalam diskusi. Dengan pendapat yang penuh semangat akomodatif, Postdam mengatakan segala kekurangan yang masih menggejala dalam tubuh KNPI sekarang adalah hal yang biasa. "Kalau di antara kita atau anggota masyarakat yang tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti apa itu KNPI, itu lumrah saja," ujarnya. Yang penting perbedaan pendapat adalah dalam rangka mencari

Digitized by Google

mufakat. Menurut Postdam, tidak hanya KNPI saja yang menimbulkan pro dan kontra. "Kemerdekaan bangsa kita pada waktu diproklamirkan dulu pun ada yang tidak setuju."

Tentang pertanyaan bahwa KNPI yang melahirkan tokoh atau tokoh yang melahirkan KNPI, Postdam menjawab "KNPI memang dilahirkan oleh tokoh, dan kemudian kita berharap KNPI dalam proses selanjutnya mampu melahirkan tokoh. Sebab tidak mungkin tanpa tokoh muncul sebuah organisasi. Bahwa keluhan seolah-olah dua periode terakhir KNPI tidak melahirkan tokoh lagi, dibantah oleh Postdam. "Kalau KNPI tidak melahirkan tokoh, bagaimana mungkin organisasi ini berjalan?" Persoalannya mungkin dari sisi mana kita melihatnya.

Orang bisa saja menilai KNPI sekarang merosot dan sebagainya. Masalahnya adalah terletak pada harapan bahwa KNPI mampu melemparkan tokoh-tokoh ke tengah masyarakat dengan kualitas sebagai kader yang memiliki wawasan kebangsaan yang terpuji. Hadirnya wakil-wakil ormas dalam KNPI memang diharap mampu berkomunikasi untuk melahirkan kompromi maupun keputusan yang berwawasan besar.

Bahwa orang mengatakan KNPI sekarang menurun reputasinya sebagai lembaga kader bangsa, dibantah oleh Postdam. Menurutnya KNPI tidak menurun, hanya kurang "masuk di televisi." Bahwa dulu pada jaman Bung David Napitupulu dan Akbar Tanjung KNPI dianggap menonjol, mungkin karena situasi ketika itu lain, dan kebetulan David dan Akbar dibesarkan dulu oleh ormasnya baru muncul memimpin KNPI. Postdam secara jujur mengakui bahwa dalam anggota pengurus KNPI periode lalu (periode Puteh), ada juga "tokoh" yang berorganisasi saja belum pernah. Mereka mengatakan wakil dari ormas, tetapi setelah diselidiki ternyata hanya orang yang kesekian dalam ormasnya. Jadi yang dikirim ke KNPI, bukan kader terbaik. "Itu biasa," kata Postdam lagi.

Jangankan KNPI, di DPR seperti yang diramaikan koran-koran, masalah seperti ini terjadi. Ada anggota DPR yang tidak mengerti apa-apa tentang lembaga legislatif ini, juga banyak. Postdam minta agar ada kearifan kita untuk menilai KNPI. "Jangan berharap KNPI mampu berbuat seperti Departemen Pekerjaan Umum atau Departemen Tenaga Kerja. Selain anggaran untuk KNPI terbatas, juga bukan itu pekerjaan KNPI." Yang kita kembangkan di KNPI, demikian Postdam, adalah idealisme dan wawasan kebangsaan, ditunjang oleh program-program yang membantu meringankan pekerjaan pemerintah. "Untuk urus tenaga kerja, jangankan KNPI, Depnaker saja belum tentu mampu. Demikian juga di bidang pendidikan," katanya.

Bahwa KNPI kurang mampu berkomunikasi dengan ormas, pun dibantah oleh Postdam. Menurutnya, bukan KNPI yang tidak mampu tetapi tokoh-tokoh ormas itu sendiri yang tidak bisa mengkomunikasikan program kepada ormasnya. Masalahnya banyak wakil ormas yang ternyata di dalam ormasnya hanyalah orang yang ke-20 misalnya. "Yang begini banyak."

Menjawab Johan yang mensitir seolah KNPI "takut" berkomunikasi dengan pemuda kampus sehingga mengabaikan sumber insani yang begitu besar, Postdam mengatakan bahwa pemuda kampus tidak masuk dalam hitungan KNPI karena mereka bukan ormas. Sedangkan bagi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi di luar kampus, aspirasi mereka ditampung. Mahasiswa memang menyandang predikat "maha" tetapi mereka tetap saja siswa yang perlu banyak belajar. Aspirasi dan potensi mereka yang diperlihatkan pada segi keterlibatan sosial, ditampung oleh KNPI. "Bila mereka memiliki rasa keterlibatan sosial, silahkan masuk

Program Untuk Masa Depan

Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang KNPI. "Saya bisa saja bersikap sinis terhadap apa yang saya lihat selama ini. Tapi saya pikir tidak ada gunanya kita bersinis-sinis saat ini, karena permasalahan yang kita hadapi sangat besar," kata Bondan Winarno, kolumnis yang mengasuh rubrik Kiat pada majalah Tempo.

Tatkala berada di Universitas Hawaii dalam satu seminar, Bondan agak tersentak ketika seorang pembicara mengatakan bahwa bangsa Indonesia masih tidur di atas begitu banyak kekayaan alam, dan menikmatinya. Sentilan orang asing tersebut coba diproyeksi ke belakang oleh Bondan. Pada usia 32 tahun, dia kebetulan dipercaya menyunting buku *Laporan Dari Banaran* yang ditulis oleh TB Simatupang.

Dia agak terpesona. Simatupang ketika masih berusia 28 tahun dengan pangkat kolonel mampu mencapai kedudukan Asisten KSAD. Tambahan lagi pemikiran-pemikiran beliau ketika itu, rasanya tidak sebanding dengan pemikiran Bondan tatkala menginjak usia yang sama. Bondan lantas bertanya dalam dirinya: *"What have I done?"* "Apakah kita telah begitu menyia-nyiakan waktu dalam hidup ini?".

Bondan bercerita lagi. Tidak lama setelah menghadiri seminar yang menyentakkan itu, dia kebetulan berada di RRC. Ketika duduk-duduk di pinggir jalan Bondan menikmati suatu pemandangan monoton, bahwa orang-orang RRC yang memenuhi jalan raya dengan sepeda begitu teratur mengayuh pedal sepedanya. Tidak ada saling salip-salipan untuk mendahului yang lain. Muncul pertanyaan, "Kok orang disini sepertinya tidak punya ambisi untuk berada di depan?".

Keadaan di Indonesia jauh lebih baik. Di jalan-jalan Jakarta kalau ada serombongan anak muda yang naik sepeda pasti ada yang salip-salipan sehingga terjatuh tindih-menindih. Bahkan saking mau berkompetisi, kereta api pun balapan akhirnya tabrakan.

Kita memang jauh lebih baik dari RRC. Ketika pesiar di Canton, Bondan memasuki toko *Friendship Store*. Barangnya murah-murah. Ingin memborong 20 lusin pun bisa. Tetapi mutunya, astaga ... ada yang jahitannya tidak beres dan ada lagi yang capnya copot dan sebagainya. Pabrik sepatu Naiki dari AS pernah terkecoh oleh dolar, sama dengan kita pada periode itu. Tetapi saat ini pendapatan per capita mereka sudah 2500 dolar. Taiwan bahkan sudah mencapai 3500 dolar. Sedangkan pendapatan per capita kita saat ini baru sedikit di atas 500 dolar. Korea dan Taiwan melihat bahwa tekstil adalah *sunset industry* (industri yang sebentar lagi bakal tewas). Mereka ramai-ramai memindahkan industrinya ke Malaysia dan Thailand, karena buruh yang murah. Mengapa belum ada yang ke Indonesia?

Melihat kenyataan ini, Bondan merasa terusik sehingga bertanya: "Apakah betul kita sudah bangun?" Dan kalau orang-orang pintar memilah-milah pembangunan

Digitized by Google

HMI, PMKRI atau GMNI dsb," kata Postdam.

Bukan hanya masyarakat yang salah mengartikan KNPI. Pemerintah pun menurut Postdam ikut-ikutan keliru. Sebagai contoh, dalam sebuah pemberitaan di televisi dibacakan berita seperti ini: kegiatan ini dilakukan oleh pemuda AMPI dan KNPI. Ini salah karena menyamakan AMPI dan KNPI, padahal kegiatan tersebut diorganisir oleh KNPI dan dilaksanakan oleh AMPI. "Kalau pemberitaan resmi saja sudah salah, ya kita ikut-ikutan salah," ujarnya.

Kualitas Mondial

Yang sangat concern dengan kualitas pemuda kita adalah Martin Sirait dari AMPI, dengan catatan bahwa segala kekurangan yang kini menggejala dalam keseharian pemuda Indonesia, jangan disalahkan sepenuhnya pada KNPI. Dari segi ide KNPI adalah wadah yang harus kita dukung. Permintaan serupa juga datang dari Luhut Sitompul, fungsionaris FKPPI. Luhut mengungkapkan pengalamannya. Sewaktu masih mahasiswa, dia sangat membenci KNPI, karena dilihatnya tidak bermanfaat. "Tetapi setelah mempelajari dan memahami ide dasarnya, saya melihat KNPI ini sangat strategis," katanya. Karena itu dia menghimbau kaum muda agar memanfaatkan KNPI ini.

Postdam Hutasoit

Sejalan dengan Luhut adalah pendapat Ida Wara Suprida. Satu-satunya peserta diskusi yang wanita ini mengatakan, selama kita masih mempersoalkan struktur, mekanisme dan ide dasar, kita sebenarnya berjalan mundur. Pro kontra di sekitar KNPI sebaiknya dihentikan. "Jangan kita menghancurkan apa yang sudah ada. Kalau seseorang tidak setuju dengan KNPI selama masih terbatas pada apriori terhadap pengurusnya, boleh saja. Tapi jangan ingin meniadakan ide yang begitu dengan susah payah dilahirkan oleh sejarah," katanya.

Untuk mengatasi semua itu, baik Luhut, Martin maupun Ida Wara mengajak kita semua khususnya kaum muda melihat jauh ke depan. Dan agar mampu survive dalam peradaban moderen di masa yang akan datang, profesionalisme pemuda, seperti yang dianjurkan Martin adalah profesionalisme yang mondial. Martin memberi contoh, bahwa seorang pemuda yang menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan memiliki pekerjaan yang lebih mudah ditambah dengan kemungkinan imbalan yang lebih tinggi dibanding dengan pemuda lain yang tidak menguasai bahasa Inggeris. "Nah di masa depan mudah-mudahan KNPI tanggap dengan persoalan-persoalan seperti ini.

Namun untuk tampil dan berperanan dalam abad 21, kaum muda Indonesia seperti diungkapkan oleh Ali Yahya, seorang wartawan, tidak cukup dibekali sarana organisasi, tapi juga etos kepemudaan. Kalau pemuda jaman dulu memiliki etos kemerdekaan, "Apakah etos pemuda kita sekarang?". Untuk mampu bertanding dengan pemuda negara lain merebutkan porsi kehidupan abad 21, mungkin etos kompetisi yang kita butuhkan. Ini berarti kita tidak hanya berpuas diri pada perbandingan waktu tapi juga ruang. Artinya kita tidak boleh berpuas diri karena hari ini lebih baik

---

buruh murah di RRC. Tetapi apa lacur? Sebanyak 75 persen sepatu Naiki yang dibuat di RRC ditolak konsumen karena kualitasnya buruk. Untuk mensiasati itu terpaksa dibuat sepatu Naiki yang warnanya gelap. Sebab kalau berwarna putih pasti cepat kotor.

Dari pengalaman itu muncul semacam keyakinan bahwa kualitas produk sesuai dengan kemampuan bangsa. Berpikir dalam jalur itu, Bondan kembali bersyukur bahwa keadaan kita lebih baik, minimal lebih baik dari RRC dalam hal kualitas sepatu.

Menghibur Diri

Tapi Bondan mengatakan keunggulan kita dari RRC dalam hal kualitas sepatu menjadi tidak berarti bila kita mengambil perbandingan dengan negara lain yang relatif memulai debut pembangunan sama dengan kita. "Bila mengambil perbandingan dengan Taiwan, Korea Selatan atau Thailand, kita ketinggalan sangat jauh," katanya. Kebanggaan karena lebih dari RRC, hanya menghibur diri saja.

Mengapa tidak? Dalam hal pendapatan per capita, kita kalah jauh dari Korea dan Taiwan. Pada tahun 1962, pendapatan per capita Korea Selatan adalah di bawah 100 kedalam sejumlah gelombang sesuai perkembangan, "Sudah pada gelombang manakah kita sekarang?". Mau dikatakan belum bangun, pasti kita menipu diri karena pembangunan kita telah berjalan selama empat Pelita.

Tetapi terlepas dari jawaban kita sudah bangun atau belum, Bondan mengajak kaum muda, sekaranglah saatnya kita bangun untuk bersaing dengan bangsa lain. Sebab bila kesadaran ini tidak tumbuh sejak sekarang Bondan khawatir, pada suatu saat kita mungkin menjadi bangsa yang paling miskin di dunia.

Kemampuan kita memenangkan persaingan di tingkat dunia, telah terbukti. Sebagai contoh adalah di sektor kayu lapis. Dulu ketika kita belum menyadari nilai tambah, kita ekspor bulat-bulat kayu gelondongan. Tetapi setelah kita sadar bahwa membangun industri kayu lapis di dalam negeri memberi nilai tambah yang sangat besar bagi perekonomian domestik, hasilnya luar biasa. Pabrik-pabrik kayu lapis di Jepang dan Amerika gulung tikar karena ketiadaan bahan baku. Maka muncullah kita sebagai eksportir kayu lapis terbesar di dunia saat ini.

Cerita sukses kayu lapis, agaknya mulai ditiru juga oleh rotan. Indonesia melarang ekspor rotan mentah, sehingga pabrik-pabrik meubel di Taiwan dan Korea kini siap-siap menutup perusahaan mereka. Tapi menurut Bondan bila kualitas produk rotan kita masih seperti yang dipajang di pinggir-pinggir jalan, jelas itu tidak masuk hitungan konsumen di Amerika atau Jepang.

Kepedulian terhadap masalah-masalah ekonomi, merupakan sarana untuk maju. Karena itu Bondan merasa senang bahwa KNPI sekarang mulai mempedulikan program. Program tentu sangat banyak. Tetapi yang jelas kita harus pintar-pintar memilih program di antara begitu banyak kebutuhan untuk dijadikan prioritas dalam perspektif masa depan.

Kita sekarang harus berpikir dalam skala global. Di bidang ekonomi fakta yang tidak bisa ditolak adalah globalisasi pasar. Bahwa eksodus modal asing dari Jepang, Korea dan Taiwan belum kita nikmati, mungkin mendorong kita untuk bertanya, "Apakah sistim ekonomi yang kita anut sekarang menyebabkan kita terkucil dari arus globalisasi pasar ini?".

Tanpa harus menuding siapa yang bersalah, sudah menjadi kewajiban kaum muda Indonesia untuk mulai mempedulikan masalah-masalah ekonomi ini. Kalau selama ini kita agak mengabaikan perspektif ini, sekarang lah saatnya.

Digitized by Google

Johan Sahperi Saleh

dari kemarin, tapi karena kita juga lebih baik dari orang lain.

Bagaimana pun juga, perkembangan teknologi kemudian hari, menyebabkan batas-batas kedaulatan negara misalnya, menjadi sangat transparan. Orang hanya mengukuhkan keberadaan dan kedaulatannya lewat adu kualitas. Siapa yang unggul dia lah yang berdaulat.

Untuk berkompetisi dalam arena yang global sifatnya, menurut Johan Sahperi harus ada kesadaran tentang perlombaan itu sendiri. Kaum muda Indonesia harus menyadari bahwa pembangunan adalah pertarungan melawan waktu. Kita ibarat menaiki sebuah eskalator yang berjalan turun. Bila kita diam saja maka kita akan terbawa mundur, sedangkan bila kecepatan kita normal saja, maka kita sebenarnya berjalan di tempat. Jadi untuk mencatat kemajuan, orang paling tidak berjalan dengan kecepatan dua kali atau lebih dari gerak turun eskalator tersebut.

Dalam semangat progresif seperti itu, seorang seperti Samsyir Alam, bekas aktivis mahasiswa di tahun 1966 yang kini menjadi pengusaha dan lebih banyak bersikap sebagai orang luar membuat sejumlah definisi tentang gejala yang menghinggapi KNPI. Menurut dia, KNPI adalah produk Indonesia yang karena lemahnya semangat *salesmanship,* akhirnya kurang terkenal, walaupun sudah 14 tahun diproduksi. Ibarat produk yang ditawarkan, KNPI lebih banyak ditolak daripada diterima, mungkin karena kurang kampanye. Ironinya, KNPI yang menjadi wadah komunikasi, justru tertimpa *communication gap* dengan konsumen sehingga tidak disayang.

Namun ini tidak berarti KNPI adalah produk yang salah. Masalahnya adalah pada teknik pemasarannya, sehingga terkadang salah menawarkan kepada konsumen yang tidak menggunakannya.

Pengamatan sepintas Samsyir ini diperkuat lagi oleh kesimpulan sepintasnya tentang karakter pemuda tahun 1980-an. Pemuda kita menurutnya, suka yang formal gaya safari. Mereka lebih senang berada dalam wadah yang populer, ketimbang di KNPI yang karena salah strategi pemasaran menjadi tidak populer. Dan bagi pemuda yang terjun ke dunia usaha, diwarnai watak tidak sabar, ingin cepat kaya, sehingga tidak tahan terhadap goncangan. "Loyalitas terhadap organisasi cenderung rendah." Sejumlah karakter ini adalah bawaan, karena seorang anak Indonesia sejak dilahirkan diwarnai oleh sejumlah ketidakpastian. Bila keinginan tidak tercapai, langsung frustrasi. "Oleh karena itu target-target KNPI yang tertuang dalam program harus yang realistis, sehingga tidak lebih banyak lagi menggiring pemuda untuk frustrasi secara massal," ujarnya.

Ida Wara Suprida

Semangat UU Keormasan

KNPI memang menikmati status yang agak istimewa, dibanding ormas lainnya. Bila ormas lain dalam rangka menyesuaikan diri dengan UU No 8 hanya beranggota perorangan, maka KNPI selain menerima anggota perorangan juga ormas pemuda. Itulah keistimewaannya. HKTI misalnya, setelah menyesuaikan diri dengan UU Keormasan, maka semua ormas petani yang tergabung di dalamnya bubar.

Tapi KNPI tidak. Dalam kongres baru lalu ormas pemuda yang dulu hanya sebagai peninjau diakui keanggotaan tetapnya, dan dengan demikian mempunyai hak suara. Untuk mengakomodir keanggotaan yang perorangan dan ormas ini, maka Ketua Umum KNPI sekarang Didiet Haryadi terpaksa menyusun sebuah "kabinet massal." Bayangkan sebuah DPP dengan 87 ketua. Di satu segi dapat

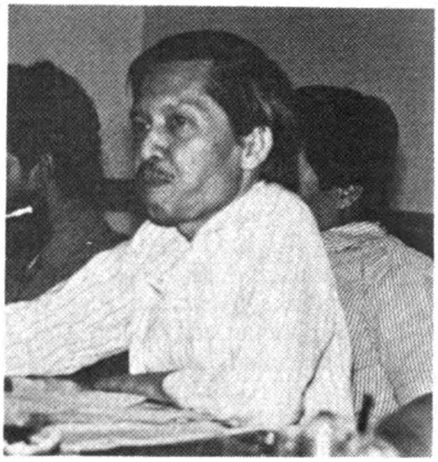

Samsyir Alam

dibayangkan bagaimana repotnya mengurusi organisasi dengan distribusi kewenangan yang begitu luas. Yang sinis akan mengatakan DPP KNPI sekarang ibarat sebuah komunitas paguyuban. Sedangkan yang setuju akan membela bahwa kepengurusan yang begitu banyak ketua dan wakil sekjen (ada 10) itu adalah pencerminan sikap akomodatif. Berarti *sense of belonging* terhadap KNPI yang susut di masa lalu, kini membaik.

Repot memang. Tim formatur yang diketuai Ekie Syahrudin paling tidak harus menyerap begitu banyak kepentingan yang ingin terwakili dalam KNPI. Selain orang ormas yang jumlahnya 31, juga harus meladeni titipan-titipan yang entah dari mana asalnya. Tercatat 60 rekomendasi, 553 riwayat hidup, 96 nota, 27 kartu nama dan 74 nama yang dititipkan. Bila semua bentuk titipan ini diakomodir, maka kepengurusan KNPI periode 1987-1989 akan melibatkan 1473 nama.

Keanggotaan KNPI dalam Kongres baru lalu dibahas peserta diskusi agak intensif. Edie Sukirman misalnya merasa puas, karena keanggotaan ormas dalam KNPI yang kini memperoleh status penuh adalah kemenangan dari sebuah perjuangan yang makan waktu 14 tahun lamanya.... "Itu sesuai dengan ide dasar," katanya. Dulu ketika keanggotaan KNPI masih perorangan, sebenarnya bukan perorangan dalam arti murni, tapi perorangan yang membawa tiket organisasi. Tetapi sayangnya, tatkala wakil

Digitized by Google

organisasi itu duduk dalam KNPI, ormas yang menjadi asalnya seperti tidak dipedulikan lagi.

Edie menceritakan bagaimana dia dianggap pengkhianat oleh Pemuda Demokrat karena ikut menandatangani berdirinya KNPI 14 tahun lalu. Dia nyaris dikucilkan dari organisasi gara-gara itu. Tetapi sekarang enak. Keanggotaan KNPI adalah perorangan dan juga ormas. Dengan demikian menurutnya, KNPI di masa mendatang tidak lagi perlu mencetak kaos oblong untuk dijual kepada ormas. Setiap anggota ormas dengan sendirinya mengenakan jacket organisasi yang dilengkapi logo KNPI. Ibarat pada seragam ABRI yang di lengan kiri bertuliskan Angkatan Udara tetapi di lengan kanan ada tulisan TNI.

Namun dalam rangka menyesuaikan diri dengan UU keormasan, persoalan terpokok adalah apa yang diketengahkan oleh Saleh Khalid, bahwa bagaimana mendisain keanggotaan "kembar" ini sampai ke tingkat propinsi dan kabupaten. Sebab orang seperti Markus Mali misalnya beranggapan bila keanggotaan KNPI adalah ormas, maka fungsi KNPI adalah sebagai policy body saja, yang tidak perlu sibuk mencari anggota. Jadi dalam penafsirannya, KNPI bukan ormas. Disinilah esensinya sebagai wadah komunikasi. Ibarat DPR-nya kaum muda. Menurut pemikirannya bila KNPI adalah ormas dan juga beranggotakan ormas, maka dimana letak perbedaan antara KNPI dengan parpol?

Ali Yahya

Pikiran senada juga diutarakan Hatta Mustafa. "Kalau mau dikatakan maju sesuai dengan UU Keormasan, barangkali kita ramai-ramai masuk KNPI tanpa membawa-bawa lagi ormas. Artinya ormas pemuda dengan sendirinya tidak ada akibat KNPI. "Tidak seperti sekarang dimana kita mengakui adanya KNPI tapi masih melakukan bargaining dengan bendera ormas," katanya.

Inilah tugas berat KNPI di masa mendatang, agar keanggotaan kembar ini bisa berfungsi secara padu.

Segala pemikiran, kritik dan harapan terhadap KNPI yang berkembang dalam diskusi bermuara pada satu kerinduan tunggal, mudah-mudahan KNPI di masa depan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kontroversi di sekitar KNPI agaknya mulai hilang setelah lembaga ini secara konsisten mempertahankan keberadaannya selama 14 tahun terakhir. Peserta diskusi umumnya sependapat bahwa sebagai ide, KNPI pantas dipertahankan dan dibesarkan agar berperanan optimal dalam porsinya. Kalau disana sini masih terdapat suara-suara sumbang terhadap lembaga ini, itu adalah tambahan atau pengurangan *aransemen* atas sebuah lagu nasional. "Itu pratanda bahwa KNPI sebagai organisasi masih berproses dalam dinamika bangsanya," kata Markus Mali.

Bila kita sekarang mempersoalkan KNPI, tidak ada iktikad untuk mempertanyakan pantas atau tidaknya eksistensi lembaga ini. Bagaimana pun juga KNPI adalah produk sejarah yang brilian. Yang kita permasalahkan adalah penyempurnaan-penyempurnaan terhadapnya agar tampil sebagai organisasi yang berwibawa dan berbobot. Dalam banyak hal, harapan ini sangat tergantung pada pengurus KNPI yang kita pilih.

Ada kerinduan agar KNPI berperanan utuh dalam persoalan bangsanya. Ini tergantung bagaimana KNPI mengapresiasi dan menentukan persepsi tentang dirinya. □

Pemadu: Laurens Tato

P.T. TUGU PRATAMA INDONESIA

Gedung Patra, lantai 1 - Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta P.O. Box 3789/Jkt.
Telepon 512041 - 512293 - 512654 - 512468 - 511764
Telex : 44699 GUTAMA IA & 45337 GUTAMA IA

Digitized by Google

ABRI: Menyempurnakan Doktrin

Pertengahan bulan lalu pimpinan teras ABRI menyelenggarakan rapat, Rapim ABRI 1987. Dalam penjelasannya, Panglima ABRI Jendral TNI LB Moerdani mengemukakan, hal-hal menonjol dalam Rapim antara lain pemaparan latar belakang pemikiran dan materi konsep RUU tentang Keprajuritan ABRI serta perkembangan dan upaya generasi penerus ABRI untuk menata kembali doktrin pertahanan keamanan nasional dan doktrin perjuangan ABRI sebagaimana dikenal dengan Cadek (Catur Dharma Eka Karma) 1967.

Doktrin Cadek adalah pedoman ajaran yang selain mengandung nilai-nilai hakiki dan pandangan ABRI yang kekal, juga mengandung bagian-bagian yang bersifat pemikiran strategi dan situasional. Doktrin Cadek yang digunakan sekarang lahir pada tahun 1967 ketika bangsa Indonesia sedang dalam suasana penumpasan pemberontakan G 30 S/PKI dan kelahiran Orde Baru. Karena itu doktrin banyak diwarnai oleh suasana revolusi. Pada hal suasana sekarang sudah jauh berbeda setelah pembangunan selama 20 tahun terakhir ini. "Bukan untuk diubah substansinya, tetapi untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang dan masa mendatang," kata Jendral LB Moerdani. Sebagai gambaran, Jendral Moerdani mengatakan, setelah 20 tahun doktrin Cadek dilahirkan, keadaan telah berubah banyak. Perubahan struktur ABRI dilakukan pada 1969 dan sejak 1982 ABRI mengadakan reorganisasi sehingga di kalangan pimpinan ABRI tumbuh pemikiran untuk mengadakan penyesuaian Cadek dalam Rapim 1987 ini.

Presiden Soeharto menyambut baik keinginan untuk meninjau kembali Cadek sebagai upaya ABRI untuk terus memantapkan dan mendewasakan diri agar lebih kokoh dan tegar dalam melaksanakan peranannya dengan menggali dan mengangkat serta melestarikan nilai-nilai hakiki TNI sebagai prajurit dan pejuang. Penyempurnaan dan pembaruan terhadap Doktrin Cadek 1967 diharapkan dilakukan de-

Melestarikan nilai-nilai hakiki TNI

Digitized by Google

ngan tetap memegang teguh, menganut, dan melestarikan falsafah nilai luhur hakiki ABRI.

Atas harapan Presiden itu, Pangab mengatakan bahwa penataan Doktrin Cadek 1967 tidak sedikitpun akan mengurangi nilai-nilai hakiki yang tersurat dan tersirat secara jelas di dalamnya. Penataan dilakukan dengan tetap berpegang pada dokumen-dokumen yang telah dikodifikasikan sejak tahun 1967 seperti Dharma Pusaka 1945, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional.

Selain Cadek, hal lain yang dibahas intensif pada pertemuan adalah RUU tentang Keprajuritan, suatu RUU yang perlu lahir sebagai bagian dari UU nomor 20 tahun 1982 yang kini telah diundangkan. RUU Keprajuritan itu antara lain akan mengatur secara lebih terinci pelaksanaan pertahanan rakyat semesta. RUU itu sudah selesai disusun dan secepatnya akan disampaikan kepada DPR dengan harapan agar pembahasan dapat segera dilaksanakan sehingga pada 19 Desember nanti, bertepatan dengan peringatan "clash" kedua sudah dapat diundangkan.

Selain masalah konsepsional, Rapim juga membahas masalah operasional antara lain pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Hankam III yang akan berakhir pada tahun anggaran 1988/1989, pengamanan Sidang Umum MPR tahun depan. Tentang pelaksanaan Renstra III, Pangab mengatakan, pada umumnya berjalan sesuai dengan rencana walaupun terdapat penyesuaian karena menurunnya pendapatan pemerintah. Sedangkan pengamanan Sidang Umum juga dirasa mantap meski tidak mengurangi kewaspadaan ABRI. Dikatakan oleh Pangab ketika melaporkan hasil-hasil Rapim kepada Presiden Soeharto di Istana Negara, ABRI melalui Rapim 1987 menegaskan bahwa ABRI siap menghadapi keadaan-keadaan yang terburuk, dan dengan sekuat tenaga berusaha mewujudkan keadaan yang terbaik bagi pembangunan bangsa. Khusus menyangkut stabilitas nasional, Pangab mengemukakan bahwa Rapim menilai stabilitas keamanan dalam negeri menggambarkan kondisi yang mantap dan terkendali. Dengan menyadari arti penting Sidang Umum MPR 1988 dan Pelita V, Rapim menggariskan langkah-langkah upaya untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan serta mempersiapkan Renstra IV 1989-1993.

Presiden Soeharto dalam amanatnya di depan peserta Rapim mengemukakan harapannya agar hasil-hasil Rapim dapat memberikan ketenangan kepada segenap rakyat Indonesia, serta memberikan harapan bahwa SU MPR bulan Maret 1988 nanti akan dapat dilalui dengan aman, tenang, dan tertib. Kepala Negara yakin bahwa ABRI akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. "Keberadaan dwi fungsi ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan benar-benar menjadi kekuatan mendorong dan penyegar kehidupan yang berdasarkan demokrasi, konstitusi dan hukum," kata Kepala Negara. Terhadap masalah ini Pangab mengatakan, berdasarkan pengalaman pada lima tahun lalu, dan melihat kenyataan sampai hari ini, ABRI sebagai penanggungjawab keamanan melihat tidak ada hal-hal yang dapat diartikan bisa menimbulkan kekacauan atau gejolak dalam menghadapi SU MPR nanti.

Dalam amanatnya setelah menerima hasil-hasil Rapim, Presiden Soeharto menegaskan bahwa upaya ABRI bukanlah sekedar mewujudkan stabilitas keamanan, tetapi juga stabilitas dalam arti luas yaitu stabilitas nasional mengingat gerak langkah ABRI merupakan perpaduan bulat antara upaya di bidang pertahanan keamanan dan upaya di bidang kesejahteraan melalui peranan ABRI sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik.

Presiden menyatakan keyakinannya, dalam menghadapi pembangunan nasional mendatang, ABRI bukan hanya terpanggil untuk menghadapinya, tetapi juga menjadi salah satu tumpuan harapan rakyat. Kepala Negara percaya bahwa putusan Rapim akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Hasil Rapim diharapkan tidak hanya menjadi pedoman jajaran ABRI, tetapi hendaknya juga akan mewarnai sendi-sendi kehidupan bangsa dalam perjalanan menuju kemakmuran. □ Sugyanto.

PIMPINAN, STAF DAN KARYAWAN
PERSERO P.T. WASKITA KARYA
MENGUCAPKAN
SELAMAT HARI ULANG TAHUN YANG KE XXIII GOLONGAN KARYA
20 OKTOBER 1987

PERSERO P.T. WASKITA KARYA

Kantor Pusat : Jl. Hang Tuah Raya No. 26 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, Telepon: 737545 (4 Saluran) - 772828 - Telex : 47198 WASKITA IA - Alamat Kawat : WASKITA JAKARTA

Digitized by Google

Maulud Nabi Penuh Keteladanan

Memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW di Istana Negara 3 Nopember lalu, Presiden Soeharto menegaskan, bahwa bagi kita kaum muslimin — pribadi dan perjuangan Nabi Muhammad SAW mempunyai arti yang sangat penting. Sebab, beliau adalah panutan kita. Juga perikehidupan beliau penuh contoh teladan bagi kita yang mengikuti risalahnya. Beliau adalah contoh bagaimana kita harus berjuang melawan berbagai bentuk ketimpangan dan penyimpangan.

Apalagi dalam dunia yang penuh tantangan ini, kita mengenang dan merenungkan kembali arti kedatangan atau kelahiran beliau sebagai pembawa agama illahi kepada seluruh umat manusia, agar nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan beliau dapat memberikan kekuatan bathin bagi kita sebagai bangsa yang dihadapkan pada tugas-tugas pembangunan. "Kita harus membangun bangsa supaya kualitas kehidupan bangsa kita makin meningkat dan mampu hadir secara bermartabat di tengah-tengah pergaulan hidup antara bangsa-bangsa." Dan menurut Presiden, masalah peningkatan kualitas kehidupan bangsa kita juga menjadi tekanan dalam agama kita, yang mengajarkan agama kita tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita nanti — bukan sekedar lemah dalam arti jasmani, akan tetapi juga lemah dalam arti mental spiritual, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Dengan kata lain, melalui pembangunan kita melahirkan dan membangun manusia, generasi dan masyarakat Indonesia yang kuat, berkualitas dan mampu hadir dengan penuh kepercayaan diri dalam pergaulan umat manusia.

Kendati demikian, kita sadar bahwa membangun bangsa supaya kualitas kehidupan generasi dan masyarakat Indonesia makin meningkat, bukan masalah yang mudah dan sederhana. Tugas pembangunan adalah tugas se-

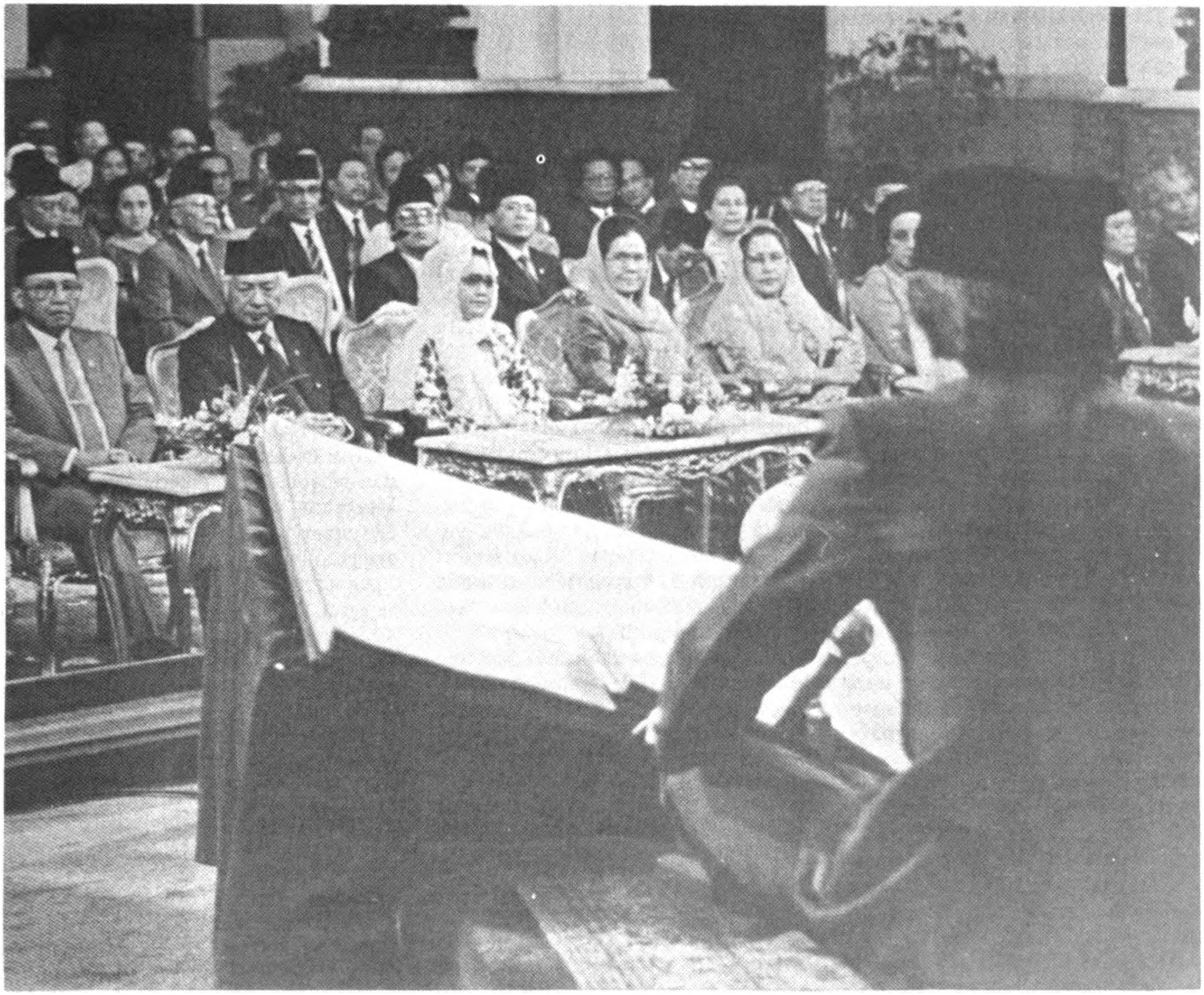

Meningkatkan kualitas kehidupan bangsa

Digitized by Google

luruh bangsa dan umat. Pembangunan itu bukan hanya tugas pemerintah, melainkan seluruh lapisan dan golongan masyarakat yang harus terlibat dalam kegiatan pembangunan seluruh segi kehidupan bangsa kita. Jangan ada lapisan atau golongan masyarakat yang hanya ingin menikmati hasil di atas pengorbanan dan cucuran keringat orang lain.

"Pembangunan bagi kita tidak bisa lepas dari ideologi nasional bangsa kita — Pancasila. Sehingga, pembangunan adalah pengamalan Pancasila. Ini berarti, kita harus selalu menjaga keseimbangan aspek jasmani, budi dan rohani dalam pengembangan manusia Indonesia serta menjaga keseimbangan segi-segi politik, ekonomi, budaya dan agama dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Untuk itu, kesepakatan dan kesetiaan kita semua guna menciptakan suatu masyarakat yang benar-benar disemangati dan diwarnai Pancasila, harus kita wujudkan dalam derap langkah kita untuk membangun bangsa dan negara", kata Presiden.

Sedang salah satu tantangan besar yang kita hadapi, menurut Presiden, adalah dalam bidang pendidikan, karena, pendidikan sangat erat kaitannya dengan peningkatan dan pengembangan kualitas mental serta intelektual suatu bangsa. Sebagai umat beragama, kita punya kepentingan dan berbahagia adanya sumbangan umat Islam dalam bidang pendidikan bangsa yang tidak kecil artinya. Dan, dalam kehidupan kaum muslimin di negeri kita terdapat ribuan majlis taklim, pengajian, pesantren serta madrasah. Baik di kota maupun di desa. Oleh karenanya, kita tidak boleh puas dengan apa yang telah kita capai itu. Generasi anak-cucu kita akan menghadapi tantangan yang tentu berbeda dengan apa yang kita hadapi sekarang. Keberhasilan pendidikan yang kita lakukan hari ini, tentu akan diukur dengan kemampuan yang diperoleh anak-anak kita untuk menjawab segala tantangan yang mereka hadapi di masa mendatang. Sehingga, adalah suatu kesalahan besar bagi kita sebagai orang tua, bila kita tidak mampu mempersiapkan mereka dengan baik dan tergilas arus kemajuan yang mereka hadapi, atau mereka tersisih karena kalah berlomba dengan teman-teman segenerasi mereka dari bangsa-bangsa lain.

Tugas Nasional

Menyadari akan besarnya tanggung jawab kita guna menghadapi segala tantangan, Presiden Soeharto menegaskan, dalam rangka mewariskan keadaan yang lebih baik kepada anak-cucu kita itu maka kita harus berusaha menghindari segala bentuk pencemaran alam dan lingkungan hidup. Kesadaran akan pentingnya kelestarian sumber daya alam serta fungsi lingkungan hidup ini harus menjadi kesadaran kita semua. Bagi kita umat beragama, alam adalah rakhmat Tuhan untuk semua umat manusia. Karena itu, sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup itu harus kita pelihara, agar bumi tanah air kita ini tidak saja mendatangkan kemakmuran bagi kita yang hidup di masa sekarang, tetapi juga bagi generasi-generasi yang akan datang sepanjang jaman.

"Usaha memelihara sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, adalah suatu tugas nasional yang harus kita laksanakan bersama. Ini perlu bantuan dari segenap pemuka agama serta para alim ulama untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dan umat akan pentingnya tugas ini," lanjut Presiden.

Budaya Musyawarah dan Mufakat

Menteri Agama H. Munawir Sjadzali yang juga memberikan sambutannya pada acara itu menyatakan, bahwa Islam mengajarkan kepada kita prinsip musyawarah sebagai salah satu sendi utama bagi kemantapan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan Tuhan, sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah itu. Di luar soal-soal aqidah dan ibadah murni, beliau tidak segan meminta pendapat para sahabatnya dan memberikan pendapat beliau sendiri serta mengikuti nasehat sahabat beliau tanpa melihat tinggi-rendahnya kedudukan orang itu.

Musyawarah adalah usaha bersama untuk mencari titik temu antara berbagai pendapat yang berbeda serta antara bermacam-macam kepentingan yang bertentangan. Oleh karenanya, untuk berhasil, maka jangan ada orang yang beranggapan bahwa hanya pendapatnya sendiri yang benar. Sebaliknya harus dikembangkan sikap mau menghargai hak orang lain untuk berbeda pendapat serta dibenarkan. "Kita bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa selama dua dekade terakhir ini menikmati kemantapan politik dan keserasian sosial, yang merupakan dua syarat mutlak untuk memungkinkan kita melaksanakan pembangunan. Untuk pengamanan kelangsungan dan kelancaran pembangunan, umat Islam supaya berusaha lebih meningkatkan pengamalan tatakrama-tatakrama yang diajarkan Islam bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, satu di antaranya adalah budaya musyawarah."

Dalam hal ini, Menteri H. Munawir Sjadzali menyitir fatwa Iman Abu Hanifah; Apa yang kami sampaikan itu (hanyalah) suatu pendapat dan pendapat itulah maksimal yang kami mampu berikan. Kalau ada orang (lain) datang membawa pendapat yang lebih baik maka (pendapat) orang itu lebih berhak untuk diambil sebagai yang benar.

Tatakrama Qurani lain, yang merupakan penunjang bagi keberhasilan musyawarah adalah sikap saling percaya dan terbuka antara sesama anggota masyarakat, khususnya antara para pemimpinnya. Sedangkan kegiatan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan keretakan hubungan antar berbagai golongan di masyarakat maupun rakyat dan pemimpin negara kiranya bukan sesuatu yang baru. Pada jaman Nabi pun kegiatan semacam itu telah dilakukan orang. Namun, menurut Islam, perbuatan keji seperti itu lebih jahat daripada pembunuhan seperti difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 191, yaitu "Dan fitnah adalah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan".

Kemudian, sebagaimana yang dijanjikan Nabi untuk mengikuti ajaran Al-Quran dan telah diperagakan Nabi dan sahabatnya, Menteri mengatakan, kita akan mampu mempertahankan keutuhan bangsa dan negara sekaligus sanggup meneruskan program pembangunan nasional sampai mencapai sasaran akhir, yaitu masyarakat yang adil, makmur dan merata dalam wadah negara yang berdasarkan Pancasila.

Sementara Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. H.M. Jusuf Hanafiah, menekankan pada arti perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW bagi kemashlahatan hidup dan kehidupan kita di masa sekarang. Rektor ini bercerita tentang asal usul Nabi sebagaimana adanya serta dikaitkan dengan kemajuan jaman yang makin terus berkembang ini, terutama terkait dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.☐ DT

Google

In Memoriam :

Ny. L. Soetanto SH, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita

Semoga diterima di sisi Tuhan

Dua Nopember 1987, awan kelabu menyelimuti jalan Manggarai Utara IV/D-I, Jakarta Selatan. Dari rumah itu tiada kegembiraan dan tawa. Yang ada hanya muka sedih dan kepala tertunduk. Karena menyatakan rasa belasungkawa atas dipanggilnya seorang tokoh dan abdi negara ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa.

Dia adalah Ny. Lasiyah Soetanto SH, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Kepergian Ny. Lasiyah ke pangkuan sang Maha Pencipta, membuat kaget banyak orang. Sebab, sebelumnya masyarakat tidak banyak yang mengetahui, Ny. Lasiyah mengidap suatu penyakit. Hanya keluarga dan orang dekat saja yang mengetahui.

Mendengar Ny. Lasiyah meninggal, tetangga, sahabat, sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan IV dan Presiden Soeharto beserta Ibu Tien Soeharto datang untuk menyatakan bela sungkawa.

Bahkan, setelah dua koran sore memberitakan meninggalnya, jumlah orang makin banyak melayat. Mereka datang silih berganti, dari pagi hingga keesokan harinya, baik di saat jenazah masih disemayamkan di kediaman Manggarai Utara maupun setelah jenazah dipindahkan ke kediaman Komplek Menteri jalan Gatot Subroto.

Mendadak

Kepergian Ny. Lasiyah Soetanto, dirasakan begitu mendadak dan tanpa disangka oleh siapapun. Sebab, sepekan sebelumnya, Menteri Negara ini sempat melantik beberapa pejabat eselon I hingga IV di lingkungan kantornya. Dan 20 Oktober malam Ny. Lasiyah masih menghadiri pula HUT 23 Golkar di Balai Sidang, meski pulang lebih cepat dari tamu lainnya.

Tetapi, sebetulnya, penyakit yang diderita Ny. Lasiyah Soetanto sudah lama. Yakni penyakit sejenis paru-paru atau penyempitan pembuluh darah di paru-paru, yang istilah kedokterannya disebut Interstitial Lung Disease (ILD).

"Penyakit inilah yang membuat almarhumah sulit bernafas," kata R.M. Soetanto Reksopratomo, suaminya.

Pada bulan-bulan terakhir, kesehatan almarhumah memang terus menyusut. Enam bulan yang lalu, Menko Kesra H. Alamsyah Ratu Perwiranegara yang berkantor satu gedung

Digitized by Google

dengan UPW pernah menasehatkan, agar almarhumah mengurangi kegiatannya.

Menjelang akhir hayatnya, kadang-kadang untuk berdiri, duduk dan berjalan, Ibu Menteri terpaksa dibantu, ujar salah seorang pegawai kantornya.

Untuk menyembuhkan penyakitnya itu, almarhumah pernah berobat di RS Colorado, Denver, Amerika Serikat dua tahun lampau. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1986, dokter yang merawatnya menyarankan agar Ny. Lasiyah tetap melakukan check up di sana. Namun almarhumah keberatan lantaran cuaca yang sangat dingin di sana, sehingga beliau mempercayakan pengobatan dirinya kepada dr. Kalopaking di Jakarta.

Usaha penyembuhan sudah dilakukan, tetapi Tuhan telah berkehendak lain atas hambanya. Tepat pukul 08.55 WIB 2 Nopember 1987, Menteri Negara UPW yang dikenal ulet, pendiam dan pekerja keras yang berpendirian tegas itu dipanggil ke pangkuan yang Maha Pencipta. Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji'un.

Kehilangan

Meninggalnya Ny. Lasiyah Soetanto SH di awal Nopember itu mengundang berbagai pendapat dan komentar, baik dari sejumlah menteri maupun masyarakat.

Menko Kesra H. Alamsyah Ratu Perwiranegara mengatakan: "Kita kehilangan seorang tokoh yang harus diteladani, terutama dalam memperjuangkan gagasannya tentang peranan wanita.".

Komentar senada diucapkan oleh Menteri Sosial, Ny. Nani Sudarsono SH yang mengatakan; "Beliau sangat berpegang teguh pada prinsip dan sangat disiplin. Kerjasama kami sangat baik, terutama di proyek peningkatan peranan wanita, khususnya di bidang kesejahteraan sosial."

Sedangkan Ketua Umum Kowani, Ny. Moerpratomo, yang menggantikan almarhumah dalam jabatan puncak organisasi wanita ini berpendapat, peranan Ny. Lasiyah Soetanto selama ini besar sekali, sehingga dia dipercaya Presiden untuk menduduki jabatan Menteri Negara UPW dua kali.

"Selama ada almarhumah, peran wanita dapat dikoordinir, kendati peranan wanita sudah ada di masing-masing departemen," ujar Ny. Moerpratomo.

"Kita bangsa Indonesia, khususnya kaum wanita, merasa kehilangan tokoh dan pejuang kepentingan bangsa," kata Sri Redjeki SH, Sekjen Himpunan Wanita Karya (HWK).

Ny. Lasiyah menurut Sri Redjeki telah meletakkan landasan di lembaga peningkatan peranan wanita di Kabinet, sehingga peranan wanita sebagai subyek pembangunan di segala bidang mengalami peningkatan.

Ketua Departemen Wanita DPP Golkar ini juga berpendapat, Ny. Lasiyah selalu bisa menempatkan dirinya sebagai seorang ibu, walaupun dia seorang menteri. Dan tentunya, setiap kebijaksanaan yang diambilnya dipengaruhi pula oleh sifat keibuannya, kata Sri Redjeki.

Sedangkan Sekretaris FKP DPR Ir. Rachmat Witoelar mengatakan, dengan tiadanya Ny. Lasiyah Soetanto SH, ia pribadi merasa kehilangan seorang ibu dan seorang kader Golkar yang tangguh, yang selalu gigih memperjuangkan peranan wanita agar mempunyai kedudukan, harkat dan martabat sebaik-baiknya.

Organisasi

Semasa hidup, perjuangan almarhumah di bidang kewanitaan sangat menonjol, baik sebelum menduduki jabatan Menteri Negara UPW maupun sesudahnya.

Perjuangan di bidang kewanitaan, untuk mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita itu dilakukan sejak usia muda.

Pada masa clash ke-II, semasa almarhumah masih mahasiswa, bersama-sama teman-temannya dia mendirikan "Warung Mbok Minah" di Yogyakarta.

Di tempat inilah, pemudi Lasiyah dan kawan-kawannya membantu pengiriman berita dan obat-obatan di kancah perjuangan.

Selama clash ke-II itu pula, pemudi Lasiyah pernah mengajar di SMA 'Bawah Tanah', yang dikoordinir oleh Ibu Arudji Kartawinata.

Lasiyah muda juga pernah menjadi anggota Kwartir Besar Pandu Kesultanan Yogyakarta (1943-45), pemimpin Pemuda Mataram 9, Pandu Rakyat Indonesia/Ipindo Yogyakarta (1945-58), pemimpin Penyuluhan Pancar Cahaya, Pandu Rakyat Indonesia/PKPI Yogyakarta (1948-58), Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka dan anggota Makinari sejak tahun 1984.

Sebagai isteri seorang pegawai PJKA, almarhumah pernah menjadi pengurus Ikatan Wanita Kereta Api (IWKA). Karena keaktifannya, kemudian ia terpilih menjadi anggota Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) Jakarta (1969-75) dan sebagai Ketua Umum Dewan Kowani (1974-78).

Sebagai Menteri Negara UPW, Ny. Lasiyah Soetanto dipercayai sebagai ketua delegasi RI ke Konperensi Regional ESCAP untuk persiapan Konperensi Sedunia Dasawarsa Wanita PBB 5-9 Nopember 1979 di New Delhi, India dan sebagai ketua delegasi RI pada Konperensi Sedunia Dasawarsa Wanita PBB di Copenhagen 14-30 Juli 1980.

Di parlemen, Ny. Lasiyah Soetanto SH juga tercatat sebagai anggota MPR-RI Nomor C-783 dari Fraksi Karya Pembangunan, yang ikut diambil sumpahnya beberapa waktu yang lalu.

Di bidang hukum, almarhumah pernah menjabat sebagai bendahari Persahi cabang Yogyakarta (1964-67).

Ny. Lasiyah, yang menguasai empat bahasa asing, yakni Inggeris, Perancis, Belanda dan Jerman, juga dikenal sebagai wanita yang supel.

Cinta Keluarga

Meskipun berbagai kegiatannya banyak menyita waktu, namun almarhumah selalu berusaha menyediakan waktu untuk keluarganya.

Kehidupan keluarga yang tenteram dan damai merupakan bagian terpenting dari wanita yang lahir di Bantul, Yogyakarta 13 Agustus 1924 ini.

Kebahagiaan dinikmatinya tatkala berkumpul dengan R.M. Soetanto Reksopratomo, sang suami serta D Indira Laksmi (31 tahun), Duswanto Harimurti (29 tahun) dan Baroto Kusumo (25 tahun), putera-puterinya.

Meskipun berhasil dalam meniti karier, namun menurutnya seorang wanita sesuai dengan kodratnya tetap berkewajiban membina dan mendidik anak-anaknya bersama sang suami.

Dan sebagai wanita yang berhasil meniti kariernya, almarhumah berhasil melaksanakan hal itu, karena sampai akhir hayatnya ia tetap bertindak sebagai ibu rumahtangga yang utuh mendampingi suami dan anak-anaknya.

Ny. Lasiyah Soetanto SH, salah seorang pendekar, pembangun semangat wanita Indonesia kini telah tiada. Namun kita percaya, semangatnya, pemikiran-pemikirannya untuk memajukan kaumnya akan terus dikenang sepanjang masa. ☐ BM/AK

Digitized by Google

Sumbangan Pikiran Soeharto Di Depan MPR 1987 - 1992

TAMPIL 1 Oktober 1987 pada pangambilan sumpah dan janji anggota MPR dan DPR periode 1987-1992, Presiden/Mandataris MPR Soeharto menyampaikan sumbangan pokok-pokok pikiran untuk penyusunan GBHN mendatang (Lihat Laporan Khusus, Media Karya Oktober 1987). Penyampaian itu menurut Soeharto tidak dimaksudkan untuk menggurui apalagi mengurangi wewenang Majelis. Melainkan karena "saya merasa terpanggil oleh kewajiban untuk membantu kelancaran tugas Majelis".

Secara lengkap, Presiden menyampaikan hal-hal berikut ini.

"Hari ini kehidupan kenegaraan kita merasakan kesegaran baru dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai hasil pemilihan umum yang telah kita laksanakan sebaik-baiknya beberapa bulan yang lalu."

Pembentukan Dewan dan Majelis sebagai hasil pemilihan umum sekarang ini merupakan yang keempat kalinya di bawah naungan Undang-Undang Dasar '45 . Pemilihan umum yang terakhir itu telah berjalan dengan tertib, lancar dan makin menggairahkan organisasi-organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum maupun seluruh rakyat. Pemilihan umum yang terakhir itu juga terasa makin berbobot, yang kita percaya akan memberi sumbangan yang besar bagi makin berbobotnya pemilihan umum di waktu-waktu yang akan datang.

Saya pernah mengatakan, bahwa pembangunan politik merupakan bagian yang paling sulit dari pembangunan suatu bangsa.

Kita semua merasa sangat berbahagia karena setahap demi setahap, dari waktu ke waktu, dengan ketabah-

Presiden memegang teguh UUD '45

Digitized by Google

an dan ketekunan kita semua, dengan kesabaran dan ketulusan kita semua, dengan pengendalian diri dan pengorbanan, dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab, maka bagian yang sulit dari pembangunan bangsa kita itu dapat kita kembangkan sehingga makin mantap dan makin matang.

Pembentukan Majelis yang baru sebagai hasil pemilihan umum ini membuktikan bahwa kita mampu melaksanakan rangkaian putaran lima tahunan dari kepemimpinan nasional sesuai yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Semuanya ini mempunyai makna yang dalam, karena dengan itu kita telah mengembangkan kehidupan demokrasi yang makin sehat dan menegakkan kehidupan konstitusional yang makin mantap.

Sejarah dan pengalaman menunjukkan kepada kita betapa untuk menegakkan kehidupan demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan yang sehat, tidak sedikit negara-negara yang mengalami berbagai kegoncangan hebat yang melemahkan sendi-sendi kehidupan bersama mereka. Semuanya itu kita saksikan dengan penuh keprihatinan. Kita memetik pelajaran dengan arif dan bijaksana dari pelajaran sejarah itu, demi kebaikan dan kesentosaan kita. Karena semua itulah, maka pembentukan Majelis yang sumpah atau janji para anggotanya baru saja berlangsung dengan penuh keagungan dan kekhidmatan, kita sambut dengan kebahagiaan yang sangat dalam dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Undang-Undang Dasar kita menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan yang tetap berada di tangan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang merupakan penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara itu merupakan penyelenggara negara yang tertinggi. Agar Majelis betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat maka seluruh rakyat, seluruh golongan dan seluruh daerah mempunyai wakil dalam Majelis. Karena Majelis memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas!

Kalimat-kalimat Undang-Undang Dasar yang penuh kewibawaan itulah yang menguasai pikiran dan sanubari kita saat ini, saat para Anggota Majelis yang demikian besar kekuasaannya mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Tuhan Yang Maha Tahu menurut keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Itulah sebabnya, dengan pelantikan ini para Anggota Majelis yang terhormat dilimpahi kehormatan yang setinggi-tingginya dan tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

"Karena itu pula, izinkan saya menggunakan kesempatan yang penuh keagungan kenegaraan ini menyampaikan ucapan selamat dan hormat yang sedalam-dalamnya kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Di Bawah Majelis

Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Di bawah Majelis, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Presiden tidak berada di samping, akan tetapi di bawah Majelis. Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis. Berlainan dengan sistim pemerintahan di negara-negara lain, maka dalam sistim pemerintahan negara kita Presiden Republik ini — yang juga sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan — tidak mempunyai haluan sendiri. Dia hanya Mandataris Majelis, yang wajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis.

Ketika saya dipilih oleh Majelis untuk menjadi Presiden, dan saya mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saya di hadapan Majelis, maka saya menyadari sedalam-dalamnya kewajiban Presiden untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar.

Sekarang, saya berdiri di hadapan Majelis yang mulia ini, yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, dengan penuh kerendahan hati ingin menyampaikan sumbangan pikiran saya kepada Majelis dalam rangka pelaksanaan tugas utama Majelis untuk menetapkan GBHN.

Karena itu, dengan menyampaikan sumbangan pikiran tadi sama sekali tidak ada niat saya untuk mengurangi barang sedikit pun wenang mutlak Majelis untuk menetapkan GBHN. Juga jauh dari niat saya untuk menggurui Majelis yang terdiri dari negarawan-negarawan terkemuka bangsa ini, yang telah mendapatkan kepercayaan sepenuh-penuhnya dari seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Sebagai penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis, saya

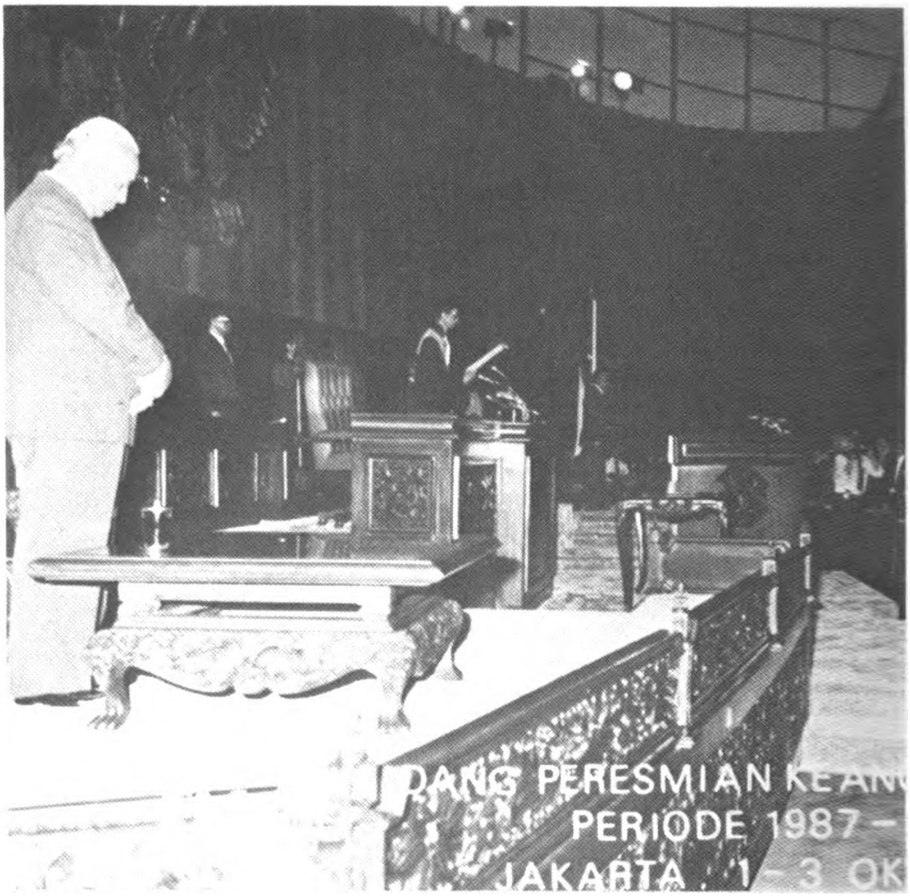

Membangun bangsa yang maju dan modern

merasa dipanggil oleh kewajiban untuk membantu kelancaran tugas Majelis dengan menyampaikan sumbangan pikiran berupa bahan-bahan mengenai GBHN 1988.

Sumbangan pikiran mengenai bahan GBHN yang disampaikan Presiden kepada Majelis kali ini adalah untuk yang keempat kalinya, sejak terjadi untuk yang pertama kali menjelang Sidang Umum MPR tahun '73. Dengan demikian praktek penyelenggaraan negara seperti ini makin berkembang menjadi konvensi. Penyampaian sumbangan pikiran dari Presiden tadi merupakan jalan keluar dari ketidakberhasilan MPR(S) menetapkan GBHN yang menjadi wenang dan tugasnya dalam Sidang Umum tahun '68.

Lagi pula, Presiden dengan bantuan segenap aparatur pemerintahan, mengetahui dengan jelas dan menyeluruh hasil pembangunan yang dapat dicapai oleh bangsa ini hingga sekarang dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat kita kembangkan di masa datang.

Dengan penugasan oleh Presiden, maka bahan-bahan mengenai GBHN itu telah dihimpun oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dalam waktu tidak kurang dari tiga setengah tahun. Bahan-bahan yang dihimpun, disaring dan dibahas itu berasal dari kalangan yang sangat luas dari masyarakat kita: dari tokoh-tokoh politik, pemuka-pemuka masyarakat, pemuka-pemuka agama, organisasi petani, organisasi pekerja, organisasi nelayan, kalangan dunia usaha, seniman dan budayawan, kalangan pendidik, kalangan cerdik pandai, universitas-universitas dan kalangan-kalangan lainnya. Di samping itu juga merupakan masukan yang penting bahan-bahan yang telah dihimpun oleh Pimpinan MPR yang lalu.

Berdasarkan bahan-bahan yang telah disusun oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional tadi telah saya bentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Saudara Moerdiono, Menteri Muda/Sekretaris Kabinet, yang karena jumlahnya terdiri dari sembilan orang, tim ini kemudian dikenal sebagai "Tim Sembilan". Tim ini saya tugasi untuk menyiapkan akhir bahan-bahan mengenai GBHN, yang hari ini melalui Saudara Pimpinan saya sampaikan kepada Majelis yang terhormat.

Sekiranya Majelis memandang perlu, "Tim Sembilan" ini saya tugasi untuk membantu kelancaran tugas Majelis atau badan yang ditunjuk seperti misalnya Badan Pekerja Majelis.

Badan Pekerja Majelis

Tentu saja tidak semua pikiran, keinginan dan bahan-bahan yang berasal dari kalangan luas masyarakat tadi dapat dituangkan seluruhnya dalam bahan-bahan mengenai GBHN yang saya ajukan kepada Majelis. Semuanya harus disaring dàn diteliti agar di satu pihak sejalan dengan cita-cita pembangunan kita; dan di lain pihak, ada kemungkinan untuk kita laksanakan dalam melanjutkan pembangunan di masa datang.

Latar Belakang Pemikiran

"Izinkan saya sekarang menyampaikan latar belakang pemikiran dan pokok-pokok isi dari bahan-bahan mengenai GBHN tersebut."

Dalam menyiapkan bahan-bahan mengenai GBHN ini saya menggunakan beberapa pedoman.

Pedoman yang pertama adalah, bahwa GBHN yang akan datang harus tetap merupakan usaha kita dalam menempuh perjalanan panjang menuju terwujudnya cita-cita nasional ialah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ini tidak lain merupakan penegasan dari kesepakatan nasional kita, ialah untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Kita memang bertekad untuk membangun diri menjadi bangsa yang maju dan moderen, di tengah-tengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Akan tetapi pembangunan yang kita lakukan bukanlah sembarang pembangunan. Pembangunan yang kita lakukan adalah pembangunan dengan konsep yang jelas, ialah konsep kita sendiri dengan tidak meniru-niru begitu saja model pembangunan yang mana pun. Tentu saja kita harus belajar dari segala pengalaman pembangunan masyarakat-masyarakat moderen, baik belajar dari keberhasilan-keberhasilan mereka maupun belajar dari kegagalan-kegagalan mereka.

Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila tidak lain adalah pembangunan yang kita laksanakan berdasar nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan hidup bangsa kita. Sikap kita ini merupakan kelanjutan dan pemantapan dari kesepakatan nasional yang telah kita capai, ialah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan kita laksanakan sebagai upaya pengamalan dari semua sila dalam Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh.

Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk bersama-sama dan secara terus menerus meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh bagi pem-

Digitized by Google

bangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi.

Pengamalan Sila Persatuan Indonesia, antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga makin kuat rasa kesetiakawanan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengamalan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, antara lain mencakup makin menumbuhkan dan mengembangkan sistim politik demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara serta bergairahnya rakyat dalam proses politik.

Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistim ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pedoman kedua yang saya gunakan dalam menyusun bahan-bahan mengenai GBHN 1988 adalah, bahwa GBHN 1988 harus merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan dari segala hasil pembangunan yang telah kita capai hingga sekarang. Dengan itu kita terus memelihara kesinambungan pembangunan masa datang dengan kesetiaan kita kepada cita-cita kemerdekaan, sambil terus menyegarkan pembangunan dalam menjawab tantangan-tantangan zaman moderen. Kita menyadari bahwa pembangunan adalah proses perubahan menuju kemajuan. Karena itu kita harus terus menerus mengadakan penyegaran dan pembaharuan. Malahan, jika dianggap perlu, kita harus berani mengadakan koreksi, sebab pembangunan bangsa yang sangat luas dimensinya itu pasti tidak akan luput dari munculnya akibat samping yang negatif, yang bukan merupakan tujuan utama pembangunan kita. Koreksi-koreksi itu terasa bertambah perlu karena perkembangan politik, keamanan dan perekonomian dunia yang serba tidak menentu mengharuskan kita segera mengadakan penyesuaian sikap dan langkah yang setepat-tepatnya dan sebaik-baiknya bagi kelanjutan pembangunan kita.

Pedoman ketiga adalah bahwa kurun waktu Repelita V nanti merupakan kurun waktu penutup dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun yang pertama, yang telah menjadi kesepakatan nasional selama ini.

Dalam perspektif pembangunan bangsa kita dalam jangka panjang, dewasa ini tidak ada perkembangan strategi baru yang mengharuskan kita merubah kesepakatan nasional itu. Dengan kata lain, saya mempertimbangkan kepada Majelis agar Bab I, Bab II dan Bab III GBHN 1983, yang antara lain memuat Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, tetap menjadi bagian dari GBHN 1988.

Sesuai dengan kesepakatan nasional kita selama ini, dengan selesainya Repelita V yang akan menjadi pelaksanaan dari GBHN 1988 nanti, diharapkan bangsa Indonesia akan dapat mencapai sasaran pembangunan yang merupakan landasan yang mantap bagi tercapainya masyarakat adil makmur yang kita cita-citakan. Landasan yang kokoh kuat itu merupakan pemantapan tercapainya kerangka-kerangka landasan yang kita wujudkan dalam Repelita IV yang sekarang sedang kita laksanakan ini.

Dalam pada itu kita menyadari bahwa perjalanan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita nasionalnya merupakan proses sejarah yang sangat panjang. Pengalaman menunjukkan kepada kita semua, betapa bangsa-bangsa yang dewasa ini mencapai tingkat kemajuan dan kemakmuran yang sangat tinggi telah mencapai tingkat kemajuan dan kemakmurannya itu setelah mereka bekerja keras tanpa henti-hentinya selama puluhan, malahan ada yang sampai ratusan tahun.

Sejak semula kita menyadari bahwa proses sejarah yang panjang itulah yang akan kita tempuh untuk mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan.

Agar kita tetap memiliki perspektif sejarah, agar kita tidak kehilangan arah, agar kita tahu apa yang mungkin kita capai dalam suatu tahap pembangunan dan apa yang belum mungkin kita capai dalam suatu tahap pembangunan, maka kita perlu membuat pembabakan jangka panjang dari pembangunan kita.

Ini berarti, setelah kita nanti merampungkan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama, maka kita harus melanjutkannya dengan Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua. Jika pada akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama kita bertekad untuk meletakkan landasan yang kokoh kuat bagi masyarakat yang kita cita-citakan, maka dalam Pembangunan Jangka Panjang kedua kita masuki proses tinggal landas, ialah dengan landasan yang kokoh yang telah kita capai dalam Pembangunan Jangka Panjang pertama tadi terus memacu pembangunan dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri yang telah makin besar menuju masyarakat yang kita cita-citakan itu.

Dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua kita tingkatkan lagi pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, yang hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam suasana kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila.

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa segala sesuatu mengenai Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua umumnya dan Repelita VI khususnya adalah wewenang Sidang Umum MPR tahun 1992 yang akan datang.

Namun, sekali lagi, dalam rangka meletakkan Repelita V dalam perspektif sejarah jangka panjang bangsa kita maka kita perlu mempunyai gambaran sekilas mengenai wajah masyarakat masa depan. Dengan jalan ini maka kita memberi makna yang luas terhadap perintah Undang-Undang Dasar agar MPR senantiasa memperhatikan dinamika dalam masyarakat kita. Dalam hal ini dinamika itu kita lihat dalam jangkauan sejarah jauh kedepan, yang lebih jauh dari sekedar lima tahun mendatang.

Semuanya itu mengharuskan kita memandang Repelita V sekaligus sebagai ancang-ancang dan pembuka jalan bagi kelancaran Repelita VI, yang akan merupakan awal dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua.

Selanjutnya, pedoman keempat ada-

Digitized by Google

lah sikap realistik yang dipadukan dengan idealisme. Sikap realistik yang dipadukan dengan idealisme inilah yang merupakan salah satu kunci keberhasilan kita dalam mencapai kemajuan pembangunan di berbagai bidang sejak Repelita I hingga sekarang.

Itulah sebabnya saya pernah mengatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan yang tidak pernah sepi dari ujian dan tantangan, kita selalu mengembangkan sikap realistik yang berpengharapan. Kenyataan yang ada kita lihat seperti apa adanya, betapapun pahitnya kenyataan itu, betapapun beratnya keadaan itu. Namun kenyataan yang pahit dan berat tidak pernah mematahkan semangat dan harapan kita mengenai masa depan. Kita telah dan akan tetap bekerja keras membanting tulang bersimbah peluh untuk mengatasi semua rintangan, hambatan dan tantangan agar kita tetap dapat melangkah maju. Karena itu semuanya tadi kita rasakan sebagai tantangan yang menggairahkan.

Kita tidak akan menggantungkan harapan kita secara berlebihan, seolah-olah kita hidup dalam mimpi-mimpi yang indah. Harapan yang berlebihan, yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dapat kita kembangkan, yang tidak dapat kita wujudkan hanya akan mendatangkan kekecewaan dan sikap putus asa.

Ini berarti bahwa dalam merancang GBHN 1988 kita harus memperhatikan dengan penuh kejujuran keadaan kita dewasa ini, serta kemampuan yang dapat kita kembangkan dan keterbatasan-keterbatasan kita dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Pedoman yang kelima adalah segala faktor dan perkembangan regional dan internasional yang akan datang, yang mau tidak mau akan mempengaruhi keadaan bangsa dan negara kita. Keadaan dan arah perkembangan regional dan internasional di bidang ekonomi dan keamanan, yang selama sepuluh tahun terakhir ini dapat berubah tak terduga-duga, kita amati dengan saksama dan kita nilai dengan penuh kewaspadaan. Kita mengambil sikap dan langkah, agar di satu fihak, akibat negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan itu dapat diusahakan sekecil mungkin; dan di lain fihak, agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Dalam pada itu, penjelasan Undang-Undang Dasar dengan bijaksana mengingatkan agar MPR sekali dalam lima tahun tidak hanya harus memperhatikan dinamik masyarakat dan aliran-aliran yang ada dalam masyarakat. MPR juga harus memperhatikan segala yang terjadi.

Dalam hubungan ini maka kejadian yang perlu mendapat perhatian sebesar-besarnya dari MPR adalah Pemilihan Umum 1987 yang baru lalu. MPR adalah hasil Pemilihan Umum 1987 itu. Karena itu dalam menyampaikan bahan-bahan mengenai GBHN ini sangat diperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi-aspirasi, gagasan-gagasan, tekad, harapan-harapan, keluhan dan kritik yang telah diungkapkan selama masa kampanye yang lalu.

Karena itu semua yang terungkap dalam Pemilihan Umum yang lalu menjadi pedoman keenam dalam penyusunan bahan-bahan mengenai GBHN ini.

Tantangan dan Ujian

Dengan selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tetap dalam suasana yang prihatin setelah bangsa kita berhasil mengatasi berbagai ujian dan tantangan berat khususnya di bidang ekonomi serta dengan menyadari kelemahan dan kekurangan yang masih ada, maka dapat diperkirakan bahwa pada akhir Pelita IV ini bangsa kita dapat meletakkan kerangka landasan masyarakat yang kita cita-citakan.

Perjalanan pembangunan kita makin jauh; dan kita banyak belajar dari pengalaman membangun bangsa kita selama ini, baik pelajaran yang kita petik dari keberhasilan kita maupun pelajaran yang kita ambil dari kesulitan-kesulitan kita.

Kita menyadari bahwa tahun-tahun mendatang kita dihadapkan kepada tantangan dan ujian yang berat. Dengan bekal pelajaran masa lampau dan dengan tetap menyadari tantangan berat yang akan kita hadapi, maka sebagai bangsa pejuang kita bertekad teguh untuk mencapai sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama. Dengan semangat membaja dan bekerja keras, kita percaya bahwa dalam Repelita V itu kita akan dapat mewujudkan landasan

Prihatin atas ujian berat

Digitized by Google

yang kokoh dari masyarakat yang kita cita-citakan, sehingga dalam Repelita VI bangsa kita akan memasuki proses tinggal landas.

Pengalaman pembangunan bangsa-bangsa lain menunjukkan betapa penting peranan manusia dalam pembangunan. Ada negara-negara, yang sekarang menduduki tempat terdepan dalam barisan negara-negara maju, yang mencapai kemakmuran yang tinggi, padahal mereka hanya sedikit saja memiliki kekayaan alam. Kunci keberhasilan mereka adalah kemampuan manusia untuk membangun yang dapat dikembangkan sebesar-besarnya.

Betapapun pentingnya peranan manusia dalam pembangunan, namun kita tidak akan menurunkan martabat manusia sebagai bagian dari mesin raksasa pembangunan. Bagi kita, manusia adalah kekuatan dan sekaligus tujuan pembangunan. Ini sikap dasar kita sejak semula, karena itu kita menegaskan bahwa hakekat pembangunan kita adalah pembangunan manusia Indonesia yang utuh dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Karena itulah dalam Repelita V nanti, yang akan merupakan babak penutup dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama, yang sekaligus merupakan ancang-ancang untuk memasuki tahap tinggal landas, kita berusaha keras untuk meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya insani dalam makna yang seluas-luasnya.

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, juga dengan kesadaran bahwa tantangan-tantangan besar akan kita hadapi, kita harus mengembangkan suasana yang makin membangkitkan peranan yang aktif dan dinamis dari seluruh masyarakat dalam pembangunan. Dengan begitu kegairahan membangun akan makin terasa di mana-mana. Gerakan untuk membangkitkan peranan aktif masyarakat itu akan makin terasa nyata apabila kita berhasil makin menggalakkan kehidupan usaha koperasi sebagai salah satu bentuk usaha yang cocok bagi perwujudan demokrasi ekonomi ialah kehidupan ekonomi yang disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan makin kita tingkatkan pelaksanaannya, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memadai dan dengan makin memeratakan pembangunan.

Sejalan dengan itu kita lanjutkan dan kita tingkatkan pula penanganan masalah-masalah sosial ekonomi yang selama Pelita Keempat telah kita usahakan tetapi belum sepenuhnya terpecahkan.

Masalah-masalah sosial ekonomi itu meliputi lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, kependudukan, perumahan, pembangunan daerah-daerah tertentu dan masalah-masalah lainnya.

Dalam Pelita Kelima pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling mengkait dan perlu kita kembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat.

Prioritas pembangunan tetap diletakkan pada bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian. Bersamaan dengan itu kita tingkatkan pembangunan sektor industri; khususnya industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri yang mengolah hasil pertanian dan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri. Dengan itu kita akan memperkuat struktur ekonomi yang makin seimbang antara sektor industri dan sektor pertanian, yang akan memperkokoh ketahanan ekonomi dan memantapkan kerangka landasan dibidang ekonomi yang akan dapat menggerakkan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Kita merasa berbahagia, karena sejak semula kita mempunyai konsep yang sangat dalam maknanya mengenai pembangunan itu. Sejak semula kita menegaskan bahwa pembangunan kita adalah pembangunan lahir batin. Hakekat pembangunan kita adalah membangun manusia yang utuh dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, walaupun kita menempatkan pembangunan ekonomi pada prioritas yang tinggi, namun kita sama sekali tidak mengabaikan pembangunan bidang-bidang yang lain. Pembangunan ekonomi dibarengi dengan pembangunan politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lainnya. Pembangunan juga kita arahkan untuk memantapkan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional.

Demikian garis-garis besar sumbangan pikiran yang saya ajukan dengan penuh kerendahan hati kepada Majelis yang mulia ini. Adapun bahan-bahan yang lebih rinci saya persilakan Saudara-saudara mempelajari pada bahan-bahan tertulis yang saya sampaikan sebagai lampiran penjelasan saya ini. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini dan atas kesabaran para Anggota Majelis yang terhormat dalam mengikuti pandangan-pandangan saya.

Sekiranya sumbangan pikiran tadi dapat diterima, maka hal ini sama sekali bukan karena sumbangan pikiran itu berasal dari Presiden, sebab, Presiden berada di bawah Majelis, malahan harus tunduk kepada Majelis.

Sekiranya pertimbangan saya tadi diterima, maka penerimaan itu semata-mata karena pertimbangan tadi dapat menangkap aspirasi rakyat yang bertekad untuk melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan, kemajuan dan kesentosaannya.

Pada akhirnya, keputusan sepenuhnya berada di tangan Majelis, karena Majelis adalah pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, karena Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat.

Kita menyadari bahwa meningkatnya aspirasi dan harapan rakyat kita di masa datang, ditengah-tengah kemajuan dunia dan perkembangan dunia yang masih saja serba tidak menentu, akan menghadapkan kita kepada berbagai ujian berat dan tantangan besar.

Kita prihatin atas ujian berat dan tantangan besar itu. Namun sebagai bangsa pejuang, yang dapat menarik manfaat dari segala ujian dan cobaan yang menghadang kita di masa lampau, kita tidak akan bimbang menghadapi ujian berat di masa datang. Tantangan besar dihadapan kita malahan kita rasakan sebagai tantangan yang menggairahkan.

Dengan memohon kekuatan lahir batin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan membulatkan tekad baja dan dengan bekerja keras, maka dengan kepala tegak bangsa kita akan melanjutkan perjalanan sejarahnya menuju masyarakat yang maju, sejahtera, adil, makmur dan lestari berdasarkan Pancasila.

"Kepada seluruh Anggota Majelis yang baru saja dilantik saya ucapkan selamat bersidang dan selamat bekerja."□

Digitized by Google

Hikmah Sebuah Kecelakaan

Masyarakat Bintaro, Jakarta Selatan, tidak mengira bahwa daerahnya bakal menjadi pusat perhatian orang, dan juga perhatian sementara pejabat tinggi pemerintah kalau sekiranya tidak terjadi musibah yang mengerikan, merenggut lebih dari 130 jiwa manusia dan ratusan lagi yang menderita luka berat dan cacat seumur hidup yang diakibatkan oleh tubrukan dua rangkaian kereta api dari arah yang berlawanan 19 Oktober 1987 yang baru lalu.

Kecelakaan kereta api yang menurut ukuran terbesar dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia telah menempatkan dirinya dalam berita utama di media cetak dan elektronika (radio dan TVRI). Dari hasil penelitian sementara diperoleh hasil bahwa sebab-sebab kecelakaan karena faktor manusia. Kelengahan atau kelalaian manusia dalam melaksanakan tugasnya, telah menebar maut bagi penumpang kereta api yang setiap harinya memanfaatkan jasa angkutan dari arah Jakarta — Merak dan sebaliknya.

Kesalahan fatal yang dilakukan masinis, kondektur dan sejumlah petugas PPKA (Pemimpin Perjalanan Kereta Api), tidak saja menimbulkan kerugian materi berupa uang lebih dari Rp 1,4 milyar, tapi juga harapan dan gantungan hidup keluarga yang ditinggalkan korban. Sejumlah komentar dan pendapat bermunculan setelah pihak pimpinan PJKA mengeluarkan keterangan resmi di depan pers, bahwa empat orang untuk sementara dinyatakan bersalah. Pernyataan paling keras, hendaknya kesalahan tidak hanya ditimpakan kepada empat petugas PJKA, tapi juga unsur pimpinan yang bertanggungjawab atas pengelolaan jasa angkutan kereta api di Indonesia ini.

Tudingan kepada manajemen PJKA nampaknya paling mengena, dan belakangan muncul pemikiran untuk secepatnya PJKA membenahi diri, melengkapi dengan peralatan komunikasi yang lebih canggih. Setiap kesalahan yang disebabkan oleh kekeliruan instruksi berangkat kepada rangkaian kereta api, bisa dikoreksi secara cepat dan akurat melalui jasa komunikasi yang canggih. Tidak hanya antar stasiun dilakukan kontak komunikasi, tapi dengan masinis dan kondektur yang memimpin perjalanan kereta api bisa dilakukan secepatnya. Sehingga kemungkinan terjadinya musibah tubrukan bisa dihindarkan sekecil mungkin.

Akibat kekeliruan instruksi

Digitized by Google

Untuk jalur-jalur yang padat penumpang, sebagai sarana angkutan menuju tempat bekerja masing-masing penumpang, sudah saatnya dipikirkan pembuatan rel ganda, sehingga memungkinkan adanya peningkatan frekuensi angkutan setiap saat, sesuai dengan tingkat kepadatan penumpang setiap harinya.

Penggunaan isyarat-isyarat konvensional, nampaknya sudah saatnya untuk mendapat perhatian agar digantikan dengan tanda-tanda yang lebih canggih. Faktor kelelahan, kejenuhan atau faktor nonteknis lain yang bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, minimal bisa dicegah melalui penggunaan peralatan yang lebih canggih. Namun, persoalan keselamatan tetap saja tergantung pada faktor manusianya.

Di sini tekanan secara khusus diberikan kepada tingkat rasa tanggungjawab, dedikasi, loyalitas dan jiwa pengabdian dari manusia-manusia yang memegang kendali perkeretaapian di Indonesia. Mulai dari pelayanan perjalanan kereta api, tukang sinyal, radio komunikasi, pemimpin perjalanan KA, tukang langsir, bangunan jalan dan jembatan, sampai kepada jajaran pimpinan puncak (direksi) yang menetapkan kebijakan dan menjalankan manajemen perkeretaapian.

Faktor keterbatasan anggaran, nampaknya kendala yang paling dominan dalam usaha mengembangkan perkereta-apian di Indonesia ini maju seperti negara-negara lain. Namun acungan jempol tetap kita berikan kepada pemerintah yang terus berupaya mengembangkan sistem perkeretaapian di Indonesia, melalui kerjasama dengan negara-negara maju lainnya. Seperti untuk jalur Tanah Abang — Cigading sedang diproses usaha modernisasi sarana komunikasi dan jalur rel yang sudah ada. Penggantian sistem komunikasi yang semula melalui telegram mulai ditinggalkan, dan digunakan sistem rekaman. Bahkan sampai tujuan Sudimara, akan dibuat jalur rel ganda, dan penambahan dengan kereta disel (KRD) dan listrik (KRL).

Persoalannya sekarang, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain, yang juga membutuhkan perhatian guna peningkatan keselamatan perjalanan kereta api. Dibanding sektor angkutan yang lain, PJKA nampaknya harus iri terhadap sektor perhubungan udara, laut dan darat lainnya. Usaha mengatasi kemacetan lalu lintas jalan darat, ditempuh dengan pembangunan jalan tol di beberapa tempat. Bidang usaha jasa angkutan bus, terus digalakkan, terbukti dengan tumbuhnya perusahaan angkutan bus seperti cendawan. Sementara itu, berbagai peralatan canggih guna menghindari terjadinya kecelakaan udara terus diupayakan oleh pemerintah melalui kerjasama dengan negara-negara yang sudah maju.

Sedang kereta api sendiri, nampaknya masih harus berjuang bersama lokomotif dan gerbong yang sudah tua. Hadirnya industri kereta api di Madiun, belum sepenuhnya menolong modernisasi perkereta-apian di Indonesia. Beberapa Balai Yasa masih dalam kemampuan merakit dan mereparasi gerbong-gerbong yang masih jalan. Jawaban yang pasti, ditentukan oleh tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai itu semua.

Peningkatan kesejahteraan karyawan di lingkungan PJKA, juga merupakan jawaban guna merangsang peningkatan prestasi kerja masing-masing orang. Manusia disini, tetap titik sentral perhatian bagi peningkatan kualitas kerja. Bagaimana membuat mereka itu tidak lagi terlilit oleh kesulitan ekonomi, sehingga membolehkan alat angkutan yang menjadi tanggungjawabnya dipenuhi manusia tanpa karcis yang sah. Semua berharap, musibah yang dikenal tragedi Bintaro itu, tidak terjadi di daerah lain. Keluarga berharap setiap yang berada di atas kereta api, pulang dengan selamat. Tidak meninggalkan nama dan percikan darah. Semoga. □

NS

PATRA TANI

Patra Tani

SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN
P.T. PATRA TANI
SIAP MENSUKSESKAN SIDANG UMUM M.P.R. TAHUN 1988
SEMOGA TERCAPAI CITA–CITA PERJUANGAN G O L K A R DALAM
RANGKA KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

• Jl. Senopati No. 43A
Telp. 582746, 714668
Kebayoran Baru
JAKARTA SELATAN

• Jl. Talangkerangga No. 12
Telp. 22356, 20581
PALEMBANG

• Jl. Prawatan
Jogonalan – Klaten
Telp. 21563
JAWA TENGAH

• Jl. Yos Sudarso 179
Telp. 21039
Jember
JAWA TIMUR

Digitized by Google

Yang Kuno Itu Penting

Ribut tentang hilangnya benda-benda kuno berbentuk keramik buatan Cina pada zaman dinasti Sung, Yuan dan Ming telah mengundang perhatian kalangan luas, khususnya para pecinta keramik kuno. Aparat keamanan juga dibuat sibuk karena ulah pencuri yang secara berani mencuri keramik kuno yang tersimpan di sebuah almari di Museum Nasional Jakarta.

Memberikan penjelasan tentang arti penting benda-benda kuno tersebut, Dirjen Kebudayaan Prof. Dr Haryati Soebadio mengemukakan kepada - *Media Karya,* bahwa sebagai obyek penelitian keramik atau sejenisnya itu mempunyai arti penting. Dari benda-benda kuno itu bisa diketahui sejauh mana hubungan yang telah dilakukan nenek moyang kita dengan bangsa-bangsa lainnya.

Selain itu, melalui penelitian benda-benda kuno itu, kita bisa mengetahui pula sejarah kebudayaan bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk barang-barang yang dibuat, atau barang-barang yang didapat dari luar negeri, apakah melalui hubungan perdagangan atau membeli. Ditegaskan oleh Dr Haryati, kita perlu mengetahui akar budaya kita melalui benda-benda penemuan itu. "Ini perlu karena kita ingin membangun masyarakat atau manusia menjadi manusia modern dengan memperhatikan akar budaya sendiri," ujarnya.

Memang dalam usaha melestarikan budaya bangsa, sering dihadapkan alternatif pilihan yang sulit. Sebagai contoh dikemukakan, pada saat terjadi bencana alam, mana yang harus diselamatkan, sebuah masjid kuno yang kita selamatkan dari bencana alam itu. Dalam keadaan sulit tentu muncul pilihan yang paling ekstrim, yaitu menyelamatkan manusia dulu.

Di luar negeri hal semacam itu pernah timbul. Dimana pada saat berkecamuknya perang di daratan Eropa, timbul pilihan mana antara menjaga keutuhan sebuah bangunan gereja yang antik dan manusianya dari akibat pemboman. Sudah barang tentu pilihan utama adalah menyelamatkan manusianya dari akibat bom yang jatuh selama terjadinya perang.

Prof. Dr. Haryati Soebadio

Monumenten Ordonantie

Indonesia menurut Dr Haryati sudah memiliki undang-undang warisan pemerintah kolonial Belanda, yang disebut Monumenten Ordonantie, yang dibuat tahun 1931. Namun dalam perkembangan zaman kini ordonansi itu perlu ditingkatkan. Kini sedang diajukan suatu rancangan undang-undang tentang benda cagar budaya yang saat ini sudah masuk ke sekretariat negara. Diharapkan dalam waktu dekat Undang-undang tentang Benda Cagar budaya bisa diwujudkan, sebagai pengganti Monumenten Ordonantie buatan Belanda.

Sebagai upaya perlindungan bagi benda-benda kuno, kehadiran Monumenten Ordonantie itu sudah didukung dengan dikeluarkannya serangkaian surat edaran, surat keputusan Menteri dan sebagainya, yang jumlahnya sekitar 9 buah. Tapi lebih baik lagi kalau nantinya UU yang melindungi Benda Cagar Budaya itu terwujud. Jadi secara hukum benda cagar budaya benar-benar terlindungi dengan peraturan-peraturan yang ada. "Cuma masalahnya lagi, kita sering lemah dalam implementasi dari pada peraturan itu sendiri, disamping dana bagi usaha perlindungan juga tidak sedikit anggarannya," tambahnya.

Sebagai contoh dikemukakan untuk memberikan pengawalan kepada sebuah Museum Nasional, paling tidak dibutuhkan 10 orang petugas Satpam. Namun anggaran atau dana yang ada baru mencukupi untuk dua petugas Satpam. Lebih-lebih kalau menggunakan alat perlindungan yang canggih, lebih besar lagi dana yang diperlukan untuk pengadaan alat canggih tersebut. "Ini artinya untuk melakukan perlindungan terhadap semua benda kuno memang dibutuhkan dana yang tidak kecil jumlahnya," tegasnya.

Menambah Daya Tarik

Sebagai sebuah museum nasional, apa yang nampak sebagai kesan pertama adalah sebuah gedung kuno yang mirip gudang, dimana display benda-benda kuno di Museum Nasional itu tidak cukup menarik dan kurang memenuhi syarat sebagai sebuah museum. "Kesan kita Museum Nasional itu sepertinya gudang saja. Ini memang gedung kuno yang dipenuhi macam-macam benda kuno yang hampir tidak pernah diperhatikan," ujarnya.

Pemerintah menyadari kondisi tersebut. Maka dilakukan training bagi petugas yang menangani museum tersebut. Keluar negeri, pemerintah juga mengirim tenaga konservator untuk memperdalam pengetahuan permuseuman. Diakui pula bahwa penanganan museun perlu ilmu khusus yang belum berkembang di semua negara, yaitu yang disebut museologi. Di negeri Belanda ilmu ini diajarkan lewat antropologi, sementara di negara yang lain diajarkan melalui arkeologi dengan kekhususan sejarah seni. Di Indonesia, ilmu ini belum ada. Dulu pernah akan dibuka cabang keilmuan ini lewat antropologi atau arkeologi tapi belum sempat berjalan.

Menurut Dr Haryati yang aktif mengikuti berbagai seminar atau simposium dan kongres di bidang benda-benda kuno di luar negeri, usaha menarik minat pengunjung ke museum ada beberapa patokan-patokannya. Apakah penyusunan benda-benda dalam museum itu disesuaikan sejarah atau sesuai kepentingan bendanya sendiri. Umpamanya kita bicara tentang benda keramik, apakah semua berupa piring, mangkuk, guci atau lain-lainnya. Bisa juga disusun menurut zaman sejarahnya. Misalnya pada abad ter-

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

PIMPINAN BARU BP-7 DAN BAKN

Oetoyo Oesman, akhirnya terpilih menjadi Kepala di BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Dengan dilantiknya, Oetoyo, oleh mensesneg Sudharmono, akhir Oktober lalu, maka berakhirlah teka-teki, siapa yang bakal menggantikan Sarwo Edhie Wibowo.

Bekas komandan baret merah (RPKAD) yang pernah mencuat namanya tahun 1966, dalam menumpas aksi makar yang dilakukan PKI, dalam Pemilihan Umum 1987 lalu terpilih menjadi anggauta DPR/MPR dari fraksi FKP. Dalam tugas yang baru ini, Sarwo Edhie diberi kepercayaan sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

Bersama dengan Oetoyo Oesman, seorang fungsionaris DPP Golkar lainnya, Drs. Waskito, dari Departemen Seni dan Budaya, bulan lalu juga diambil sumpah oleh Sudharmono menjadi Ketua Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), menggantikan AE Manihuruk. (BM)

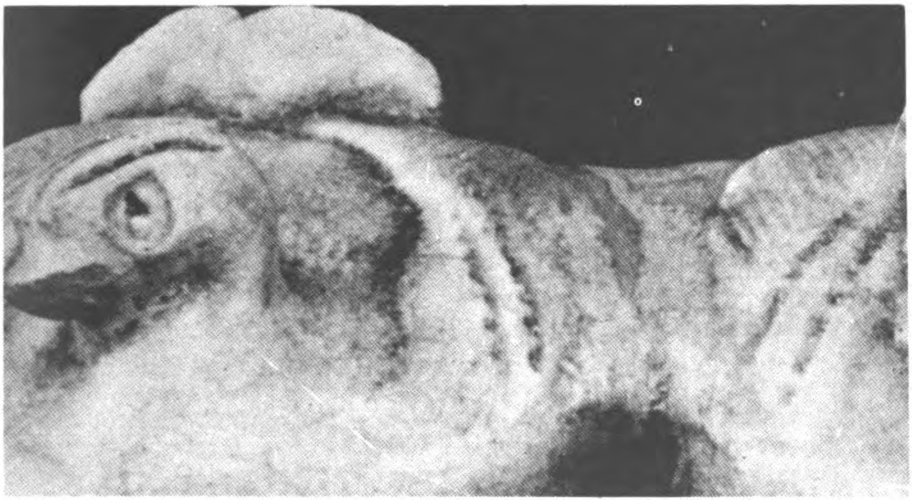

Dengan benda kuno, sejarah bangsa dapat diketahui

tentu benda-benda apa saja yang sudah dihasilkan atau pernah ada. Atau jenis-jenis keramik apa saya yang pernah ada pada abad tertentu. Terserah bagaimana penyusunannya. Yang penting dengan sistem penataan tertentu bisa mengundang minat orang untuk menyaksikan, baik untuk kepentingan penelitian maupun sekedar mengenal saja.

Dituturkan pula, kalau kita melihat sebuah benda kuno, kita bisa tahu pada zaman tersebut nenek moyang kita sudah mampu membuat benda-benda tersebut. Atau kalau benda kuno itu berasal dari luar negeri, kita juga tahu bagaimana hubungan yang pernah terjalin dengan luar negeri. Kalau dulu orang mengetahui hubungan dagang dengan Cina lewat Laut Cina Selatan, dengan diketemukannya serpihan-serpihan keramik di daerah sebelah timur Sulawesi, dugaan baru muncul bahwa ada kemungkinan hubugan dagang dengan Cina lewat Filipina turun ke bawah lewat laut sebelah timur Sulawesi. "Ini yang menarik kalangan peneliti sejarah," ujarnya penuh antusias.

Bahwa soal keramik kuno itu hanya kesenangan orang tertentu saja, Dr Haryati tidak membantah. Itu bisa saja, ujarnya. Tapi kalau kembali dilihat arti penting benda tersebut bagi penelitian sejarah hubungan kita dengan Cina, ini mempunyai pengertian lain bahwa sesungguhnya lewat pengenalan atau evaluasi setiap benda kuno yang berhasil ditemukan, bisa diketahui tingkat kebudayaan pada masa lalu. Dan yang tidak kalah pentingnya, melalui museum benda kuno itu, kita bisa mengenali jenis-jenis tiruan dari yang aslinya. "Kalau tidak hati-hati kita bisa terjebak oleh barang tiruan. Lebih-lebih sekarang ini ada yang mampu membuat benda tiruan yang sulit dibedakan dengan aslinya. Ini berbahaya sekali. Dan kehadiran undang-undang semacam monumenten ordonantie nantinya bisa terlindung benda-benda kuno yang asli," jelasnya lagi.

Benda yang Dicuri

Dituturkan pula perihal benda kuno berupa mangkuk keramik dari zaman dinasti Ming, Yuan dan Sung yang dicuri di salah satu lemari di Museum Nasional. Dari kalangan ahli benda kuno didapat petunjuk bahwa sulit untuk menjual benda-benda kuno kepada kolektor atau museum yang bonafide baik di dalam maupun luar negeri.

Setiap kolektor benda-benda kuno tahu akan kode etik, tidak begitu saja mau menjadi tukang tadah benda-benda kuno hasil curian. Lebih-lebih yang mengetahui arti penting benda tersebut bagi suatu penelitian sejarah.

Dan kalau baru-baru ini ada keterangan pihak aparat polisi menerima informasi tentang benda kuno ada di salah satu toko benda antik di Surabaya, ini menggembirakan sekali, artinya masyarakat pencinta benda kuno tersebut memahami arti penting benda-benda yang mempunyai nilai sejarah tersebut. Kendati masih perlu diteliti apakah benda yang dicuri di Museum Nasional.

Dituturkan pula adanya sebuah museum di Australia yang memberikan informasi tentang benda kuno asal Indonesia yang berada di Australia. Ini membuktikan pula bahwa museum yang bonafide tidak begitu saja mau menerima tawaran membeli benda-benda kuno.☐ (NS/BM)

Digitized by Google

Setelah Peristiwa Ujungpandang

DIANTARA sekian banyak reaksi dan komentar yang dilontarkan setelah peristiwa unjuk rasa soal helm di Ujungpandang, agaknya ucapan Kapolri Jenderal. M. Sanoesi lah yang paling patut diperhatikan. Pers mengutip ucapannya didepan sebuah raker intern, bahwa selama ini Polri selalu datang dan bekerjasama dengan kampus. Tetapi, dengan terjadinya peristiwa Ujungpandang, kini Polri akan melihat dan menilai kembali pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan.

Ucapan itu tidak betul-betul gamblang, dalam artian masih memerlukan sedikit tafsiran lanjut. Misalnya, apakah dengan peristiwa itu Polri tetap melanjutkan pendekatannya dengan kampus (perguruan tinggi) tetapi dengan penyempurnaan? Ataukah sebaliknya, Polri takkan lagi meneruskan pendekatan (karena kecewa)? Kemudian, apakah ucapan itu berlaku untuk semua kampus — dan ada begitu banyak kampus di tanah air yang satu sama lain terjalin sekedar dalam kesatuan nama namun bukan suatu korps yang organisatoris — ataukah hanya kampus-kampus di ibukota Sulawesi Selatan?

Kita mungkin dapat menyumbangkan saran dan percaya bahwa pimpinan Polri pastilah berpikir positif — bukan termasuk penganut negative thinking. Tak boleh tidak, terkait dengan tugasnya selaku salah satu pengayom masyarakat — dan warga kampus adalah bagian dari masyarakat — tentu tak ada dalam kamus Polri bahwa suatu ketika Polri menghentikan pendekatan kepada masyarakat dan atau salah satu kelompok dalam masyarakat. Kalau itu terjadi, jelas keliru.

Masih dalam semangat berpikir positif, paling tepat bagi Polri tentulah tetap melanjutkan pendekatan-pendekatannya secara wajar saja dengan kampus dan dengan masyarakat secara keseluruhannya. Salah satu pendekatan yang paling ampuh adalah bila Polri mampu menunjukkan kemampuannya mengoreksi apa yang selama ini dikeluhkan masyarakat tentang 'perbuatan oknum'. Ini bukan mengada-ada, tapi kalau kita jujur, kita akan mengakui betapa masih cukup terdapatnya oknum-oknum perusak penegakan hukum dalam tubuh Polri sendiri. Begitu banyak keluhan yang misalnya pernah disampaikan kepada pers, kepada anggota-anggota DPR — dan kita tak tahu keluhan-keluhan yang tak terucapkan — tetapi tampaknya tak ada upaya tuntas dan memadai untuk menyembuhkannya.

Akan halnya kasus unjuk rasa soal helm di Ujungpandang yang meningkat ke wujud kekerasan — sehingga tak terelakkan jatuhnya korban — jelas patut disesali. Sejumlah mahasiswa dan pelajar yang menjadi pelopor unjuk rasa dengan kekerasan tersebut, agaknya lebih dikuasai oleh emosi daripada rasio. Sangat disayangkan, bahwa mereka tak mampu memilih saluran yang sah dalam menyampaikan pendapat. Pastilah mereka belum menguasai seni mengajukan pendapat yang tak kurang dinamisnya namun tak tergelincir melanggar hukum.

Tetapi di sela-sela ketidaksetujuan dan keprihatinan kita kepada aksi yang melanggar hukum dan tak demokratis itu — yang seharusnya hanyalah ciri ketidakterpelajaran — kita perlu pula menangkap sesuatu keluhan sayup-sayup dari masyarakat setempat yang mendahului peristiwa ini. Pertama, soal kemampuan ekonomis. Kendati punya sepeda motor — yang dibeli karena perhitungan ekonomis transportasi — para pengendara sepeda motor umumnya adalah golongan ekonomi pas-pasan, termasuk mahasiswa dan pelajar yang kebanyakan berasal dari wilayah pedalaman Sulawesi Selatan. Maka ketika ada ketentuan lanjutan untuk menambah helm satu lagi (bagi yang dibonceng), dianggap beban. Bila ada tenggang waktu lebih lama lagi — seraya mengadakan kampanye manfaat penggunaan helm bagi keselamatan pengendara — barangkali soalnya agak lain. Kedua, memang ada keluhan tentang perbuatan oknum yang katakanlah memanfaatkan ketentuan helm sebagai ladang rejeki (dan ini bukan rahasia bagi masyarakat di kota itu). Selain itu, terdapat pula keluhan masyarakat tentang oknum yang tidak mencitrakan fungsi bhayangkara dan pengayom, tetapi bersikap 'mentang-mentang'.

Rasanya, memang perlu ada peninjauan kembali dalam semangat positif namun terbuka dan tuntas dalam hubungan pendekatan Polri dan masyarakat. Negara ini milik kita bersama, mari kita huni bersama dengan baik....

Unjuk Rasa Sopir

DAN ini adalah berita kecil tentang unjuk rasa lainnya. Sejumlah sopir — ratusan orang — minibus di Wonogiri dikabarkan melakukan unjuk rasa dalam bentuk mogok jalan di awal Nopember ini. Mereka katanya memprotes karena tak tahan terhadap 'perlakukan keras' petugas kepolisian.

'Perlakukan keras' itu dikenakan terhadap para pelanggar batas muatan. Para pengemudi mengeluh, lebih satu atau dua penumpang saja, langsung digiring ke kantor polisi.

Tapi bukankah polisi justru menjalankan tugas dengan baik, sesuai peraturan yang berlaku? Persoalannya ternyata adalah bahwa ada oknum yang tidak konsekuen. Dengan membayar ribuan rupiah, 'perlakuan keras' tidak berlaku.

Masalahnya adalah equal treatment. Masyarakat menghendaki perlakuan yang sama, keadilan yang merata. Mungkinkah hukum dan peraturan ditegakkan tanpa persamaan perlakukan dan keadilan?

Setelah Musibah Bintaro

BEBERAPA waktu setelah peristiwa tabrakan kereta api di Bintaro bulan Oktober lalu, diumumkan hasil pemeriksaan tentang siapa yang bersalah dan bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan yang mengorbankan lebih dari seratus nyawa itu. Dan empat orang karyawan PJKA ditunjuk sebagai yang bersalah. Tetapi seperti yang tercermin dalam pemberitaan pers, soal pertanggunganjawab ini meluas. Beberapa nama yang lebih tinggi disebut-sebutkan.

Biarlah soal pertanggunganjawab itu diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Lebih penting dari itu agaknya ialah bagaimana kecelakaan serupa tak terjadi lagi. Lepas dari soal faktor manusia, kiranya terlihat betapa aspek pengamanan perkeretaapian di Indonesia seakan tak tersentuh modernisasi dan kemajuan teknologi. Padahal saat ini tersedia begitu banyak pilihan teknologi pengamanan lalu lintas kereta api. Setidak-tidaknya berupa jaringan komunikasi (radio) antar stasiun dan antar kereta maupun antara stasiun dan kereta api. Sehingga, tak perlu terjadi seorang kepala stasiun lari sampai pingsan mengejar kereta yang salah berangkat.

Sepanjang keterangan yang ada, bukannya tak pernah ada usaha PJKA memodernisir diri, tetapi upaya itu terbentur aspek biaya. Memang, kita mengenal skala prioritas dalam pembelanjaan negara. Tetapi kiranya, segala sesuatu yang berkaitan pada keselamatan manusia pastilah pantas diletakkan dalam urutan atas prioritas tersebut. Bukan hanya di sektor perkeretaapian, tetapi juga di sektor kepentingan umum lainnya. Para penentu dan pengambil keputusan di pemerintahan kita pasti sepakat.

Pada sisi lain, sudah saatnya ditanyakan, kapankah PJKA — yang notabene adalah satu-satunya perusahaan di sektor perkeretaapian — mampu dikelola sebagai suatu 'perusahaan' yang mampu menghidupi dan mengembangkan dirinya sendiri?

Digitized by Google

PT. PETROKIMIA GRESIK (PERSERO)

KAMI SEBAGAI SAHABAT PETANI
SENANTIASA SEIRING DENGAN KEBUTUHAN PARA PETANI
SENANTIASA IKUT MENUMBUHKAN DAN MERATAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KAMI PRODUSEN PUPUK : ZA, TSP, DAP, NPK DAN BAHAN KIMIA YANG LAIN
DENGAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN :

PT PETROKIMIA KAYAKU	:	PENGHASIL FORMULASI PESTISIDA —INSEKTISIDA, FUNGISIDA DAN HERBISIDA
PT PETROSIDA GRESIK	:	PENGHASIL BAHAN AKTIF PESTISIDA —BPMC, MIPC DAN DIAZINON
PT PETRONIKA	:	PENGHASIL DIOCTHYL PHTHALATE (DOP)

HIJAU SUBUR YANG DAMAI
ADALAH CITRA PERSAHABATAN KAMI DENGAN PETANI.

KANTOR PUSAT : JL JENDERAL A YANI GRESIK, KOTAK POS : 2 GRESIK-61101
TELP : 81701, 81721, 81811 s/d 81814 TELEX : 31477 PETRO GS IA, 31012 PETRO IA
31289 PETRO IA, TELECOPIER : 81722.
KANTOR PERWAKILAN : JL TANAH ABANG DUA 63 JAKARTA, KOTAK POS : 365 JAKARTA-10160
TELP : 353681, 353682, 340948, 340949 TELEX : 340941 PETRO JK IA TELECOPIER : 340941

Segalanya Sesuai Aspirasi Rakyat

Golkar tak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan kepercayaannya

Golkar tidak ingin mengecewakan rakyat

SETELAH acara puncak HUT Golkar ke-23 di Jakarta, Ketua Umum Golkar Sudharmono SH mengadakan serangkaian kunjungan menghadiri acara peringatan serupa di beberapa propinsi. Tiga propinsi Indonesia bagian Timur — Irian Jaya, Maluku dan Sulawesi Tenggara — mendapat giliran pada 31 Oktober dan 1 Nopember. Lalu Jawa Timur dan Jawa Tengah pada pekan berikutnya.

Kesempatan merayakan HUT Golkar ke-23 bersama keluarga besar Golkar di tiga ibukota propinsi tersebut, digunakan oleh Ketua Umum untuk setidak-tidaknya mengingatkan tiga hal. Pertama, mempersiapkan diri mengsukseskan Sidang Umum MPR 1988. Dan dua lainnya yang saling berkaitan, keharusan Golkar melanjutkan konsolidasi organisasi dan mempersiapkan diri sejak dini untuk menghadapi Pemilu 1992.

Bagi Golkar, menurut Sudharmono SH, pengertian mengsukseskan SU MPR adalah bagaimana Golkar memperjuangkan aspirasi yang hidup di masyarakat dapat tertampung dalam GBHN yang disusun SU tersebut.

Berbicara di Sasana Krida Jayapura Sabtu malam 31 Oktober, Sudharmono menyebutkan aspirasi rakyat itu tak lain keinginan rakyat agar pembangunan dilanjutkan dan ditingkatkan. Termasuk di dalamnya aspek pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang di pelosok dan yang jauh dari pusat seperti di Irian Jaya.

Dan keesokan harinya di Baileo Siwa Lima Ambon, Ketua Umum membentangkan bahwa sebagai pemenang empat kali berturut-turut Pemilu Orde Baru, Golkar tak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan kepercayaan. Golkar bertekad untuk terus memperjuangkan segala kepentingan rakyat, lahir dan batin.

Dukungan rakyat yang diperoleh Golkar itu, ujar Ketua Umum pada malam harinya di Kendari, bukan karena paksaan. Tentunya, pilihan seseorang untuk menyalurkan aspirasi bukanlah tanpa motivasi. "Dukungan itu adalah karena rakyat menilai bahwa bersama Golkar terbentang masa depan yang lebih baik, untuk mereka yang hidup hari ini dan bagi generasi mendatang."

Merupakan pula keinginan Golkar, kata Sudharmono SH, agar Sidang Umum MPR Maret 1988 menghasilkan terpililınya Presiden/Mandataris MPR selaku pelaksana GBHN 1988-1993 yang bagi Golkar figurnya sudah jelas dan pasti yakni Jenderal Purnawirawan Soeharto — sesuai aspirasi rakyat.

Tidak berhenti sampai kepada mengsukseskan SU itu, Sudharmono juga mengingatkan untuk mempersiapkan diri untuk selanjutnya mengsukseskan pelaksanaan hasil SU tersebut. "Kita mempercayakan pelaksanaan GBHN tersebut kepada Presi-

Digitized by Google

den Mandataris, tetapi kita harus pula membangkitkan partisipasi rakyat agar pelaksanaan hasil SU itu berjalan lancar".

Terkait dengan itu semua, Sudharmono menggambarkan perlunya peningkatan kemampuan organisasi Golkar. "Kita perlu terus melakukan konsolidasi organisasi Golkar di semua tingkatan, sehingga Golkar berkemampuan melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan rakyat kepadanya". Konsolidasi organisasi menurut Ketua Umum mempunyai fungsi ganda, selain untuk memperkokoh organisasi, juga dalam rangka kemampuan turut mengsukseskan jalannya pembangunan sebagaimana diamanatkan rakyat. Kita bisa bicara apa saja, ujarnya, tapi kalau pembangunan malah mundur, jangan harap kepercayaan rakyat terhadap Golkar akan tetap besar.

Memang selama empat kali Pemilu, rakyat tetap memberikan kepercayaan yang besar kepada Golkar. Tapi itu tidak untuk berbangga diri, melainkan sebagai cambuk untuk terus bekerja keras memperjuangkan aspirasi rakyat. Menyatakan hal ini di Ambon Minggu siang, Sudharmono sekaligus mengajak jajaran Golkar untuk sedini mungkin mempersiapkan diri, menghimpun kekuatan yang lebih besar lagi — terutama di kalangan generasi muda — guna menghadapi Pemilihan Umum 1992. Ketua Umum Golkar ini menggambarkan bahwa pada tahun 1992 mendatang diperkirakan sekitar 60 persen dari pemilih adalah dari kalangan generasi muda. "Dengan demikian, mereka merupakan potensi pemberi suara terbesar dalam Pemilu 1982". Bertolak dari hal ini, Ketua Umum lalu menyebutkan Golkar di masa mendatang ini akan mengadakan peremajaan kepemimpinan.

Tiga propinsi yang dikunjungi Ketua Umum yang didampingi Ny EN Sudharmono dan sejumlah pimpinan Golkar lainnya ini, dalam pemilihan umum yang baru lalu mencatat prestasi cukup mengesankan. Sulawesi Tenggara bahkan menjadi satu diantara dua — bersama Timor Timur — propinsi yang 'menyumbangkan' 100 persen kursi perwakilan di DPR. Prosentase perolehan suara di Sulawesi Tenggara mencapai 97, 17% — yang tertinggi bagi Golkar di antara 27 propinsi. Sedang Irian Jaya yang menduduki rangking perolehan ketiga sebesar 92,90% — setelah Timtim yang 93,68% — 'menghasilkan' 8 dari 9 kursi. Dan Maluku menghasilkan 3 dari 4 kursi — karena perolehan suara 81,31%.

Karena prestasi yang memadai itu, maka acara penyerahan piagam penghargaan kepada kader-kader yang terkemuka dalam perjuangan pemenangan pemilu yang baru lalu menjadi mengesankan. Secara simbolis, Ketua Umum menyerahkan penghargaan melalui 10 kader di masing-masing daerah.

Selain itu, di ketiga ibukota propinsi belahan Timur ini, selaku Mensesneg maupun Sekretaris YAMP, Sudharmono SH menyampaikan sejumlah bantuan. Irian Jaya misalnya, memperoleh Bantuan Presiden untuk pembangunan sarana olahraga serta pengadaan sapi Banpres yang seluruhnya berjumlah 560 juta rupiah. Diluar itu ada sumbangan untuk sarana peribadatan — gereja maupun mesjid. Gubernur Irja Izaac Hindom dan sejumlah Bupati mewakili rakyat Irja menerima bantuan tersebut. □ Ant/RA

Sudharmono Tentang Calon Wapres

Siapa calon Wakil Presiden RI yang akan datang? Pertanyaan ini sering terdengar dalam pembicaraan di kalangan masyarakat atau terbetik dalam berita-berita surat kabar dan majalah berita lainnya. Beberapa nama terdengar disebut-sebut sebagai calon Wakil Presiden, bahkan ada perorangan yang secara pribadi mencoba mengusulkannya melalui surat resmi kepada Pimpinan DPR/MPR atau kepada salah satu fraksi dalam lembaga MPR.

Namun demikian hingga saat ini belum ada kekuatan sosial politik atau salah satu fraksi dalam MPR yang melontarkan secara resmi calon Wakil Presiden RI tadi.

Pihak Golkar sendiri sampai sekarang juga belum memutuskan siapa yang dicalonkannya. Mengingat persyaratan-persyaratan calon Wakil Presiden, khususnya bahwa Wakil Presiden harus dapat bekerja sama dengan Presiden, rupanya Golkar belum dapat menyatakan siapa calonnya sebelum dikonsultasikan dengan calon Presiden terpilih, dalam hal ini dengan Jenderal Soeharto yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar itu. Proses demikian juga terjadi pada penentuan calon Wakil Presiden 5 tahun yang lalu. Pada tanggal 25 Februari 1983 para pimpinan 3 fraksi dalam lembaga MPR yakni Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI dan Fraksi Utusan Daerah (Tri Fraksi) bersama-sama menemui Presiden Soeharto untuk menkonsultasikan tentang calon Wakil Presiden RI periode 1983-1988. Hasil konsultasi adalah keluarnya satu nama yakni Jenderal Oemar Wirahadikusumah untuk dicalonkan oleh ketiga Fraksi tersebut menjadi Wakil Presiden RI dalam Sidang Umum MPR Maret 1983.

Mengenai masalah Wakil Presiden itu, Ketua Umum DPP Golkar dalam konperensi pers seusai Rapim Golkar bulan lalu menjelaskan bahwa Rapim hanya memutuskan satu nama saja, yakni Jenderal Soeharto untuk jabatan Presiden RI masa bakti 1988-1993. Maksudnya, Rapim tidak menghasilkan usulan nama untuk calon Wakil Presiden. Menjawab pertanyaan wartawan, Sudharmono berpendapat bahwa belum keluarnya calon resmi Wakil Presiden RI sampai sekarang ini tidak akan berakibat kepada gangguan stabilitas politik.

Mengenai adanya keinginan dari sementara anak-anak (kader-kader) Golkar di kalangan bawah (daerah-daerah) untuk mencalonkan Sudharmono SH sebagai Wakil Presiden seperti diutarakan oleh seorang wartawan dalam konperensi pers tersebut, Sudharmono mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu. Sebagai seorang kader Golkar sejati, Ketua Umum DPP Golkar itu menjawab lebih lanjut : "Yang penting bagi saya adalah melaksanakan yang terbaik bagi Golkar, bagi bangsa dan negara!"

Demikian, kiranya warga Golkar sendiri masih harus bersabar untuk memperoleh kepastian tentang siapa calon Wakil Presidennya. Dan saat ini pun rupanya masih terlalu dini, karena pada periode yang lalu kepastian itu baru diperoleh kira-kira sepekan menjelang diselenggarakannya Sidang Umum MPR Maret 1983. □

TAP

Digitized by Google

Mendengarkan, Menyaring Dan Menyalurkan

Peringatan Hari Jadi ke 23 Golkar tahun ini mempunyai arti dan momentum khusus. Pertama ia diwarnai oleh suasana kemenangan Golkar dalam Pemilu yang baru terlaksana beberapa bulan yang lalu, dan yang kedua adalah suasana menghadapi Sidang Umum MPR bulan Maret tahun depan.

Momentum khusus tersebut dikemukakan oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Jenderal Soeharto dalam pidato sambutannya pada resepsi Peringatan HUT ke XXIII Golkar tanggal 20 Oktober 1987 yang lalu. Dikatakannya bahwa hari ulang tahun Golkar kali ini ditandai oleh kepercayaan rakyat Indonesia yang sangat besar kepada Golkar yang diungkapkan dalam Pemilu yang baru lalu. Kepercayaan rakyat yang besar tadi merupakan kehormatan yang tidak ternilai harganya. Namun kepercayaan rakyat tersebut oleh Pak Harto disebutkan sekaligus merupakan tanggung jawab yang besar pula bagi Golkar. Tanggung jawab itu adalah mendengarkan dengan mata hati, menyaring dengan akal sehat, dan menyalurkan dengan tanggung jawab aspirasi dan harapan-harapan rakyat mengenai masa depan. Oleh karena itu diharapkan agar seluruh jajaran Golkar memusatkan perhatian sebulat-bulatnya kepada tugas-tugas besar di masa depan itu.

Meletakkan landasan kukuh dalam Repelita V diartikan oleh Ketua Dewan Pembina Golkar bahwa di tahun-tahun mendatang kita harus dapat merampungkan sebaik-baiknya tugas sejarah kita dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama, dan sekaligus kita harus membuat ancang-ancang memasuki kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua.

Jenderal Soeharto menekankan pentingnya konsolidasi Golkar yang telah menunjukkan hasil-hasilnya itu dilanjutkan dan ditingkatkan lagi.'' Konsolidasi harus kita beri makna dinamis, yang terus menerus dan secara segar kita sesuaikan dengan perkembangan keadaan dan tantangan-tantangan baru yang kita hadapi. Golkar harus berpikir dan bertindak dinamis, karena masyarakat kita sendiri memang sedang dalam proses perubahan yang sangat cepat,'' arahnya.

Tidak berubah

Namun demikian oleh Ketua Dewan Pembina Golkar diingatkan bahwa dalam Menghadapi dinamika yang cepat itu kita harus menjaga agar nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila sama sekali tidak berubah. Sehubungan dengan itu dikemukakannya bahwa kita telah menemukan jalan keluar dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka yang pengamalannya kita beri arah melalui konsensus-konsensus nasional. Secara kritis, kreatif dan dinamis kita semua mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk memainkan peranan dalam pengamalan Pancasila tadi dalam pembangunan nasional disegala bidang. ''Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila itulah yang hendaknya menjadi arus pokok dari perjalanan bangsa kita selanjutnya, yang akan kita tuangkan dalam GBHN 1988 nanti melalui musyawarah yang menghasilkan mufakat dalam Sidang Umum MPR,'' jelasnya.

Terhadap hasil-hasil Sidang Umum MPR mendatang, Presiden Soeharto menekankan agar kesepakatan nasional yang nanti akan diputuskan oleh MPR dilaksanakan oleh semua kekuatan, semua golongan dan semua lapisan masyarakat kita. Dalam hubungan ini diharapkan hendaknya semua kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan membuat program sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing untuk melaksanakan keputusan-keputusan MPR yang tak lain merupakan keputusan seluruh rakyat Indonesia sendiri. Dan Golkar beserta segenap jajarannya harus tampil ke depan dalam penyusunan program-program nyata untuk melaksanakan keputusan-keputusan lembaga negara tertinggi pemegang kedaulatan rakyat tersebut.

Ketua Dewan Pembina Golkar menilai bahwa Golkar memang telah siap

HUT Golkar ke-23 mempunyai arti dan momentum khusus

Digitized by Google

untuk itu. Dikatakannya bahwa kader-kader Golkar yang besar jumlahnya yang tersebar di semua lapisan dan kalangan masyarakat kita akan membuktikan diri bahwa mereka bukan hanya kader Golkar semata-mata, melainkan sekaligus juga kader pembangunan bangsa kita. "Semangat dan tekad itulah yang hendaknya kita segarkan kembali dan kita bulatkan lagi pada peringatan hari ulang tahun sekarang ini," tegas Pak Harto di akhir sambutannya.

Kualitas manusia

Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH dalam sambutannya di depan resepsi Peringatan HUT ke XXIII Golkar mengharapkan GBHN nanti hendaknya memberi perhatian yang lebih besar terhadap peranan manusia Indonesia, yang bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Dalam hubungan ini maka peran dari organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan dalam menyusun program bagi para pendukungnya akan semakin penting. Oleh Sudharmono diartikannya bahwa kita akan mendayagunakan sebaik-baiknya seluruh potensi sumber daya manusia yang kita miliki sebagai bangsa untuk menyukseskan program nasional kita. Menempatkan peranan manusia di tempat sentral ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian sikap, semangat dan langkah-langkah, baik pada tataran supra maupun infrastruktur politik. Disyukurinya bahwa keberhasilan konsolidasi Golkar yang telah dilakukan selama ini telah merupakan persiapan bagi penyesuaian-penyesuaian tadi.

Lebih jauh dikemukakannya bahwa pembangunan sumber daya insani merupakan pembangunan berjangka panjang, memerlukan wawasan yang luas serta upaya yang terus menerus. Organisasi Golongan Karya yang didasarkan kepada kekaryaan sangat sesuai dengan tugas nasional ini. Sudharmono mengharapkan agar setiap unsur organisasi Golongan Karya mampu meningkatkan kualitas manusia dalam bidang kekaryaannya, baik pemuda, wanita, petani/nelayan, pekerja/karyawan, cendekiawan, pengusaha, pegawai negeri, pendidik, peneliti, wartawan, seniman, rokhaniawan, veteran atau bidang-bidang kekaryaan lainnya. "Dengan peningkatan kualitas manusia dalam segala bidang kekaryaan itu diharapkan kita dapat meningkatkan hasil-hasil karya pembangunan yang akan membawa dan meningkatkan kemajuan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kita pada umumnya," ujarnya.

Dari bawah

Dalam pidato HUT itu Ketua Umum DPP Golkar kembali mengemukakan mekanisme organisasi dari bawah ke atas. Dikatakannya, sebagai organisasi sosial politik kita menyadari bahwa kedaulatan berada di tangan anggota. Karena itu proses demokratisasi di dalam jajaran Golongan Karya di mana gerak bermula dari bawah menuju ke atas itu secara teguh harus dilaksanakan. Orientasi setiap organisasi kekuatan sosial politik haruslah ke bawah, maksudnya kepada aspirasi dan kepentingan rakyat banyak, baik yang menjadi anggotanya secara langsung maupun yang menjadi simpatisannya di tengah masyarakat. Disebutnya bahwa setiap eselon pimpinan Golongan Karya pada dasarnya adalah abdi bagi aspirasi dan kepentingan warganya yang berada di tengah-tengah masyarakat. "Setiap organisasi kekuatan sosial politik yang tidak berorientasi kepada rakyat berarti mengabaikan sumber kekuatannya yang paling besar, yaitu masyarakat pemilih sendiri," ungkapnya.

Menghadapi Pemilihan Umum tahu 1992 mendatang, Ketua Umum DPP Golkar mengakui pentingnya perhatian kepada para pemilih muda yang baru pertama kali akan memberikan suaranya. Sehubungan dengan itu ditegaskannya agar Golkar terus berusaha makin memantapkan dan merapikan organisasi ke dalam atau ke luar, agar dapat memberikan peluang dan jaminan bahwa rakyat akan tetap memberi kepercayaan yang besar kepada Golkar. Dan kepercayaan ini diperlukan agar Golkar dapat menjaga kesinambungan dari pembangunan nasional. □ TA PURNOMO

SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN
P.T. PERUSAHAAN PELAYARAN SAMUDERA
"SAMUDERA INDONESIA"
SIAP MENSUKSESKAN SIDANG UMUM MPR TAHUN 1988
SEMOGA TERCAPAI CITA–CITA PERJUANGAN GOLKAR
DALAM RANGKA KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

Golkarlah Yang Paling Mampu Berperan

Sudah menjadi tradisi Golkar dalam tiga tahun terakhir, mengadakan Rapat Pimpinan Paripurna (RAPIM) setiap kali menjelang hari ulang tahunnya. Rapim, forum organisasi tertinggi setelah Munas itu, kali ini diadakan pada tanggal 19 Oktober, sehari menjelang ulang tahun Golongan Karya ke 23.

Seperti lazimnya, dalam Rapim III baru lalu, tokoh-tokoh Golkar dari berbagai jajaran dan jalur, tampil memberikan pengarahan. Rapim yang dibuka oleh Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar, M Panggabean itu, diisi pengarahan antara lain dari Pengab Jenderal LB Moerdani, Mendagri Soepardjo Roestam dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Golkar, Sudharmono SH sendiri.

Tidak seperti biasanya, Rapim III kali ini mengikutsertakan para Ketua DPD Golkar tingkat II se-Indonesia. Tentu terkandung maksud dan urgensi tertentu dengan diperluasnya jumlah unsur peserta Rapim itu. Seperti dikatakan oleh Ketua Umum DPP Golkar dalam pengarahannya, Rapim III diadakan dalam suasana yang menuntut keputusan-keputusan, bagi kepentingan organisasi dan sekaligus bagi Negara dan Bangsa. Suasana seperti itu menuntut Rapim III membahas hal-hal yang berkenaan dengan pensuksesan Sidang Umum MPR 1988, peningkatan konsolidasi organisasi serta kualitas kader Golkar, bahkan sudah mulai memperbincangkan pokok-pokok pikiran dalam rangka mensukseskan Pemilu 1992.

Pangab, Jenderal LB Moerdani dalam kesempatan terpisah menyebutkan bahwa Rapim ini merupakan kesempatan yang baik untuk digunakan sebagai sarana konsolidasi organisasi serta menyatukan persepsi terhadap persoalan-persoalan nasional maupun tugas-tugas dan tanggung jawab yang dihadapi saat sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Sedang M Panggabean menyatakan, setiap kali berakhir suatu tahap perjuangan selalu diikuti oleh konsolidasi. Demikian seterusnya sehingga merupakan siklus perjuangan Golkar yang berkesinambungan. Rapim 1987 menurutnya merupakan tahap untuk mendalami proses pelaksanaan program umum Golkar 1983-1988 yang pada intinya adalah penyelenggaraan Tri Sukses Golkar. Pelaksanaan ketiga program Sukses itu dinilainya telah memperlihatkan hasil-hasil nyata.

Sementara itu Mendagri Soepardjo Roestam menilai pada dasarnya Rapim merupakan salah satu langkah dan upaya introspeksi Golongan Karya agar senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan lingkungan dan situasi yang ada, sehingga peran dan sumbangan Golkar dalam pembangunan politik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya dapat ditingkatkan terus menerus. "Kaji ulang dan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan sangatlah perlu untuk menemukan kelemahan dan kekurangan-kekurangan selama ini," kata LB. Moerdani.

Ia berharap dengan ditemukannya kekurangan-kekurangan tersebut maka setiap warga Golkar akan mampu untuk selalu tampil ke depan melakukan perbaikan dan pemantapan-pemantapan. Rapim sebagai salah satu langkah dari serangkaian kegiatan konsolidasi diharapkan mampu mengambil dan menetapkan kebijaksanaan organisasi yang selalu terkait dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila. "Dengan menerapkan semua ketentuan yang telah digariskan dan didukung oleh iktikad atau semangat kenegarawanan yang andal maka diharapkan Golongan Karya akan dapat menjadi penggerak dan suri tauladan bagi organisasi kekuatan sosial politik lainnya di dalam pengamalan Demokrasi Pancasila," ujar Pangab.

Sidang Umum MPR

Sukses Sidang Umum MPR 1988 merupakan kelanjutan pelaksanaan program Pemilu 1987 Golongan Karya. Panggabean mengatakan bahwa sukses Pemilu tidak hanya terletak pada jumlah suara yang diperoleh, namun juga pada keberhasilan memperjuangkan konsepsi Golkar untuk dijadikan konsepsi nasional melalui lembaga politik MPR. "Golkar akan memperjuangkan apa yang

Golkar memperjuangkan terpilihnya kembali Jendral (purn) Soeharto sebagai Presiden Mandataris MPR 1988-1993

Digitized by Google

menjadi aspirasi rakyat dan mensukseskan Sidang Umum MPR pada umumnya dan menghasilkan GBHN khususnya," ungkap Sudharmono.

Ia menjelaskan bahwa yang menjadi aspirasi rakyat yang diserap oleh Golkar selama ini ialah terutama suara-suara yang bergema dalam kampanye Pemilu 1987 yang lalu. Pertama-tama adalah keinginan melanjutkan dan meningkatkan pembangunan nasional yang selama ini telah dilaksanakan dan telah menghasilkan banyak kemajuan dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat banyak. Yang kedua ialah untuk memilih seorang tokoh pimpinan Orde Baru sebagai pimpinan nasional yang mampu mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Oleh Sudharmono hal ini diartikan bahwa pelaksanaan pembangunan harus makin bercorak kerakyatan, mencakup makin luasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan oleh berbagai lapisan masyarakat seperti swasta, golongan ekonomi lemah, koperasi, golongan informal, dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat banyak serta sekaligus memperkecil jurang perbedaan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Golkar menurutnya telah jauh-jauh hari menyiapkan diri menyusun rumusan-rumusan konsepsi pembangunan yang akan diperjuangkan dalam Sidang Umum MPR, yang menjadi bahan penyusunan GBHN. Materi yang akan diperjuangkan itu boleh dikatakan secara keseluruhannya telah ditampung oleh naskah bahan-bahan GBHN yang disampaikan Presiden Soeharto kepada MPR pada tanggal 1 Oktober 1987 yang lalu.

Di samping menghasilkan GBHN, Golkar juga akan memperjuangkan terpilihnya kembali Jenderal (Pur) Soeharto, Bapak Pembangunan Nasional, sebagai Presiden Mandataris MPR masa bakti 1988-1993 sesuai dengan yang telah dicanangkan dalam Pernyataan Politik Golkar pada HUT ke 22 Golkar tahun lalu. Dalam hubungan dengan perjuangan di lembaga MPR itu Sudharmono menekankan agar Golkar telah mulai mempersiapkan diri menjadi pelaksana-pelaksana yang tangguh dan trampil dari GBHN. "Betapapun baiknya GBHN, apabila pelaksanaannya tidak memadai, maka tidak akan ada manfaatnya dan tidak akan terwujud peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Ketua Umum.

Mandiri

Dalam upaya konsolidasi organisasi rupanya cukup penting untuk melihat kembali sejauh mana Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik telah mampu mandiri. Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar M Panggabean mengungkapkan tahap-tahap kemampuan Golkar untuk mandiri itu. Menurut pengamatannya dalam Pemilu 1971 dan 1977 Golkar masih lebih menampilkan ABRI beserta keluarganya. Dalam tahap menghadapi Pemilu 1982 peranan jalur Beringin khususnya KORPRI tampak lebih menonjol. Kemudian dalam Pemilu 1987 jalur G (Golkar) lebih dikedepankan. Namun demikian menurut M Panggabean Golkar belum dapat dikatakan mampu untuk berdiri sendiri. Buktinya? Dalam pemenangan Pemilu 1987 yang lalu Golkar masih memerlukan bantuan birokrasi.

Mendagri Soepardjo Roestam kepada forum Rapim mengatakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kemandirian Golkar memang dirasakan relevansinya, tidak hanya bagi lingkup organisasi Golkar saja, tetapi juga lingkup pembangunan politik umumnya, dan kualitas demokrasi Pancasila pada khususnya. Mendagri menekankan hendaknya pemahaman yang mendalam mengenai kemandirian Golkar sebagai salah satu kekuatan perjuangan Orde Baru perlu diperjelas terlebih dulu. Sebab, kekacauan pengertian mengenai kemandirian mungkin sekali akan mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan baru yang sebenarnya tidak kita inginkan. Menurutnya permasalahan sekitar kemandirian Golkar itu tampaknya terkait dengan permasalahan pelaksanaan hak dan kewajiban yang sama yang dimiliki oleh partai politik dan Golongan Karya dalam kehidupan politik nasional. "Kita memang tidak mengingkari bahwa keberhasilan Golkar dalam percaturan kepartaian disebabkan oleh topangan unsur-unsur kekuatan Orde Baru yang lain," ujar Mendagri. Namun demikian, lanjutnya, hendaknya tetap diyakini bahwa Golkar merupakan salah satu kekuatan inti dari perjuangan cita-cita politik yang memberikan komitmen total kepada Pancasila, UUD 1945 dan pembangunan nasional yang terencana dan berkesinambungan, serta sebagai kekuatan yang terkait manunggal dengan ABRI dan Pemerintah Orde Baru. "Jelaslah bahwa Golongan Karya yang mandiri itu adalah Golongan Karya yang kuat dan tangguh dalam memperjuangkan tercapainya cita-cita perjuangan kebangsaan Indonesia," tegasnya.

Mengenai hal yang sama, Ketua Umum DPP Golkar juga menjelaskan bahwa kemandirian Golkar tidak berarti Golkar merupakan kekuatan yang eksklusif. Artinya, Golkar tidak mungkin menutup diri terhadap keikutsertaan pihak-pihak lain, baik berupa dukungan atau partisipasi lainnya. Dalam kaitan dengan birokrasi, lanjut Sudharmono, perlu diingat bahwa Golkar memiliki kader-kader yang duduk dalam birokrasi sebagai pejabat-pejabat Pemerintah. Menurutnya, kemungkinan image adanya campur tangan birokrasi terhadap Golkar itu karena orang tidak bisa membedakan peran seorang tokoh yang di satu saat bertindak sebagai pejabat pemerintah dan di saat lain berbuat sebagai kader Golkar. (Baca: Persoalan Kemandirian Golkar).

Berjenjang dari bawah

Dalam rangka konsolidasi organisasi, beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Juni, telah diadakan rapat konsultasi antara DPP Golkar dengan Ketua-Ketua DPD Golkar tingkat I sehubungan dengan gagasan DPP Golkar untuk mengadakan perubahan tahap-tahap penyelenggaraan antara Munas, Musda tingkat I, dan Musda tingkat II. Bila selama ini Munas selalu diselenggarakan sebelum Musda I dan Musda II, maka untuk waktu mendatang dipikirkan tahapan-tahapan dengan mendahulukan penyelenggaraan Musda tingkat II yang disusul oleh Musda tingkat I, dan baru kemudian yang terakhir Munas Golkar. Dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh DPP Golkar di bulan Agustus 1987 yang juga mengikutsertakan para ketua DPD tingkat I Golkar, gagasan itu mendapat sambutan baik. Dan dalam Rapim III gagasan itu dimantapkan lagi untuk dapat dilaksanakan.

Menurut Ketua Umum gagasan pentahapan seperti itu dilandasi oleh pemikiran dalam rangka mengembangkan pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan organisasi Golkar. Dengan cara itu diharapkan para anggota dan kader di tingkat bawah atau yang berada di akar-akar rakyat dapat ditingkatkan peran dan partisipasinya dalam organisasi. Dengan terciptanya mekanisme baru ini, maka akan terdapat perasaan yang meluas

Digitized by Google

bahwa jajaran kepemimpinan Golkar benar-benar tumbuh dan didukung dari bawah, atau dari daerah ke pusat. Juga akan timbul pula perasaan-perasaan bahwa aspirasi anggota tersalur berjenjang dari daerah sampai ke tingkat pusat. "Pada gilirannya semua hal itu akan memperkuat perasaan bertanggung jawab dan perasaan memiliki di kalangan anggota Golkar," ucap Sudharmono.

M Panggabean dalam sambutannya menanggapi positif gagasan dari bawah ke atas itu, dan mengatakan bahwa Hasil Musda-Musda akan sangat berguna sebagai bahan masukan bagi Munas Golkar yang akan datang. "Kesemua itu tidak lain adalah untuk menyukseskan Pelita V dan memenangkan Pemilu 1992," ujarnya.

Kaderisasi

Sukses besar Pemilu 1987 yang lalu tak dapat dilepaskan dari peranan para kader Golkar, baik karakterdes yang berjumlah lebih dari 8 juta itu, maupun para kader fungsional yang jumlahnya meliputi hampir 900.000 orang. Jumlah kader yang sekitar 9 juta dan 25 juta anggota Golkar merupakan potensi yang besar. Sehubungan dengan itu Ketua Umum DPP Golkar mengemukakan bahwa yang menjadi tantangan ialah bagaimana membina dan mengarahkan potensi daya manusia sebesar itu. Karena itu peningkatan kualitas kader merupakan masalah yang dibahas oleh Rapim III. Masalah pokoknya berkisar kepada pembinaan anggota yang melebihi 25 juta orang itu agar tetap setia kepada organisasi dan ditingkatkan menjadi kader yang handal, serta bagaimana meningkatkan kualitas kader sehingga mampu menjadi kader organisasi dan kader pembangunan yang tangguh.

Sementara itu Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar mengkaitkan masalah kaderisasi dengan tahapan regenerasi bangsa. Diuraikannya bahwa GBHN 1987-1993 amat penting karena punya kekhususan-kekhususan yang bermakna substansial. Dalam Pelita V bangsa Indonesia harus bekerja keras memantapkan kerangka landasan untuk tinggal landas. Selain itu juga akan dihadapi tahapan terpenting dari proses alih generasi, yakni dari generasi pembebas yang akan merampungkan tugas sejarahnya kepada generasi penerus.

Mengingat regenerasi dalam kurun waktu Pelita V nanti adalah regenerasi pertama sejak Proklamasi Kemerdekaan dan akan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, maka diperlukan penanganan secara konsepsional dan strategis. "Pendirian dan pegangan kita sudah jelas dan tegas yaitu bahwa regenerasi yang akan kita laksanakan itu harus benar-benar dapat menjamin kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan landasan konstitusional UUD 1945, kesinambungan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, serta kepemimpinan nasional tetap di tangan Orde Baru," tegas Panggabean.

Dikatakannya bahwa menghadapi proses alih generasi di semua lapangan dan lapisan yang berlangsung sampai tahun 1992, maka bagi Golkar salah satu unsur penting dalam persiapannya ialah kaderisasi. "Sulit dibayangkan adanya regenerasi yang baik dan mantap tanpa adanya kaderisasi yang baik dan mantap pula," katanya.

Rapim III diadakan dalam suasana yang menuntut keputusan bagi organisasi

Pada kesempatan yang sama Mendagri Soepardjo Roestam mengharapkan agar pola dan sistem kaderisasi mampu menghasilkan kader-kader Golkar yang memiliki ketangguhan guna membawakan Golkar sebagai kekuatan pergerakan kemasyarakatan, gerakan kebangsaan dan gerakan kemajuan. Menurutnya, pada akhirnya semua langkah kaderisasi akan bermuara kepada upaya mengantisipasi masa depan yang makin kompleks.

Tuntutan kualitatif

Di masa-masa mendatang, khususnya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Golkar akan menghadapi berbagai tantangan. Seperti dapat dimonitor baik dari suasana kampanye Pemilu 1987 maupun dari perkembangan kehidupan kemasyarakatan akhir-akhir ini, tampak nyata bahwa tuntutan masyarakat makin mengarah kepada hal-hal yang lebih bernilai kualitatif.

Diutarakan oleh M. Panggabean bahwa bersamaan dengan semakin kritis dan korektifnya rakyat, maka semakin canggih pula aspirasi, tuntutan dan harapan-harapannya. Tidak hanya terbatas pada hal-hal fisik materiil, tetapi meningkat kepada hal-hal yang kualitatif non-materiil. Aspirasi itu mencakup pengembangan demokrasi, pemenuhan hak-hak warga negara, kepastian perlindungan hukum, pelayanan birokrasi yang lebih baik dan manusiawi, dan sebagainya.

Sementara itu Soepardjo Roestam menekankan perlunya dipupuk kemampuan seluruh jajaran Golkar dalam membaca dan memahami kontekstualitas. Golkar akan senantiasa berhadapan dengan tantangan dan masalah yang berbeda dari waktu ke waktu yang karena itu memerlukan pula jawaban dan penyelesaian yang berlainan dengan masa-masa sebelumnya. Namun demikian Mendagri mengingatkan agar dalam setiap gerak perjuangan politik Golkar, sifat dan hakikat dari tujuan perjuangan yakni membangun kehidupan Demokrasi Pancasila harus senantiasa menjadi pegangan utama dan tidak dapat dirubah sedikitpun. "Jiwa dan semangat perjuangan berdasarkan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia harus selalu dipegang teguh dan senantiasa me-

Digitized by Google

Pelaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan

landasi segala gerak dan derap politik Golongan Karya, kini dan di masa yang akan datang," ujarnya.

Untuk menghadapi pemenuhan aspirasi yang berkembang itu, M Panggabean menegaskan perlunya peningkatan penyadaran dan pendewasaan sosial politik dan bersamaan dengan itu meningkatkan institusionalisasi politik. Dengan adanya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat serta semakin meningkatnya institusionalisasi politik itu, maka tampilnya aspirasi, tuntutan dan harapan yang bersifat kualitatif dapat diolah dan diserap dalam sistem politik yang ada pada tatanan dan tingkatan yang sepadan. "Dalam tatanan seperti disebutkan tadi maka aspirasi, tuntutan dan harapan yang bersifat kualitatif dan non-materiil itu akan menjadi energi baru yang memperkuat dan mempersegar kehidupan politik nasional kita," ungkapnya.

Mengenai sistem politik yang ada, Soepardjo Roestam mengatakan bahwa perwujudan sistem politik demokrasi yang paripurna kini semakin tampak jelas dalam arah perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia. Secara sadar kita telah menentukan pilihan bahwa mekanisme demokrasi Pancasila dalam sistem politik bertumpu pada organisasi kekuatan sosial politik, yang dalam pelaksanaannya pimpinan lah yang harus berusaha agar sistem itu dapat berfungsi dengan baik.

Sementara itu Jenderal LB Moerdani dalam pengarahannya di depan Rapim yang berjudul **"Stabilitas Nasional dalam Tahap Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang ke-I"** mengatakan, berdasarkan apa yang telah dicapai Orde Baru selama ini maka jelaslah bahwa sistem nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan sistem yang mampu mewujudkan stabilitas nasional menopang segala upaya yang akan dilaksanakan, baik selama ini maupun di masa-masa yang akan datang.

Sedang, Panggabean mengingatkan menghadapi tahap 5 tahun mendatang dalam pemantapan kerangka landasan, maka tugas pemantapan kehidupan politik terutama diarahkan pada perwujudan secara operasional Pancasila sebagai satu-satunya asas. Menurutnya Golkar lah yang paling mampu berperan dalam upaya ini dibanding kekuatan sosial politik yang lain.

Dalam hubungan dengan masalah satu asas Soepardjo Roestam mengartikan bahwa bagi organisasi kekuatan sosial politik tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus bersifat terbuka bagi setiap warga negara. Diakuinya bahwa Golkar pada kenyataannya mampu memberi warna dalam kehidupan kepartaian nasional sesuai apa yang menjadi cita-cita politik Orde Baru.

Di samping itu Mendagri mengharapkan agar Golkar mampu menjalin hubungan dengan organisasi kemasyarakatan. Interaksi fungsional dan/atau profesional antara organisasi kemasyarakatan dengan kekuatan sosial politik perlu dijabarkan lebih lanjut. Organisasi kemasyarakatan adalah wakil nyata dari aspirasi masyarakat yang secara langsung tidak bisa menjalankan fungsi politik. Untuk itu perlu dialog politik antara organisasi kekuatan sosial politik dengan organisasi kemasyarakatan yang ada. "Proses seperti ini jelas akan memacu perkembangan kualitas demokrasi Pancasila. Sebab di dalam interaksi itu Golongan Karya dan juga partai politik yang lain makin ditantang untuk mempunyai identitas dan kepribadian," ujar Mendagri. Dengan ungkapan lain, kehidupan nasional yang makin *program oriented* akan banyak memacu peranan organisasi kemasyarakatan profesi dan fungsional di dalam dinamika demokrasi Pancasila.

Kebesaran Golkar harus dapat menjadi faktor pendorong dan pemacu pertumbuhan (kualitas) demokrasi itu sendiri. Sebab itu sungguh tepat bila sejak sekarang Golongan Karya mulai mengupayakan langkah-langkah dasar yang sangat diperlukan dalam penyelenggarakan kehidupan demokrasi. Dalam kaitan ini diingatkannya kepada para peserta Rapim dengan mensitir pengarahan Presiden Soeharto kepada Munas III Golkar tanggal 20 Oktober 1983 yang mengatakan: "Sebagai kekuatan sosial politik Golongan Karya perlu mengembangkan dan mendewasakan suasana demokrasi ke luar dan ke dalam. Hanya dengan semangat demokrasi ke dalam, Golongan Karya akan dapat ikut menumbuhkan dan mendewasakan suasana demokrasi ke luar."

Dari uangkapan-ungkapan yang tertuang dalam pengarahan-pengarahan para tokoh dan pimpinan Golkar kepada peserta Rapim ke III itu tergambar padat tugas-tugas, tantangan yang harus dihadapi, serta harapan-harapan yang menjadi tumpuan rakyat banyak yang dibebankan pada pundak Golkar, baik saat ini maupun di masa mendatang. Dan tepatlah harapan Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH kepada Rapim, yaitu hendaknya Rapim dapat menghasilkan keputusan-keputusan organisasi yang tidak semata-mata demi terpenuhinya kepentingan organisasi, tetapi lebih-lebih demi terpenuhinya kehendak, kebutuhan dan kepentingan masyarakat bangsa Indonesia. "Betapapun juga, keberadaan, ketangguhan dan kejayaan Golkar terutama ditujukan untuk keperluan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia," demikian Sudharmono. □ TA. PURNOMO

Semarak 23 Tahun Golkar

Golkar genap berusia 23 tahun di bulan Oktober 1987, hari-hari sepanjang bulan tersebut dan juga pekan pertama Nopember hampir seluruhnya seakan-akan menjadi 'milik' Golkar. Hanya tiga peristiwa nasional lainnya di luar itu yang menonjol, yaitu Hari ABRI 5 Oktober, Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober dan berlangsungnya Kongres Pemuda/ KNPI.

Kemudian, dalam rangkaian memperingati HUT ke-23 ini, Golkar menyelenggarakan Bulan Bakti Sosial dari 10 Oktober sampai 8 November 1987. Rangkaian kegiatan HUT ini diawali dengan rekreasi ke Dunia Fantasi bersama anak-anak panti asuhan tepat 10 Oktober, selesai dengan Lomba Palang Merah Remaja dan Lomba Bayi Sehat. Lalu, di tengah-tengahnya kegiatan itu diisi dengan aneka kegiatan lainnya seperti penyuluhan hukum, Lomba Pidato Kebersihan dan Anti Narkotika, kunjungan ke panti-panti sosial, aksi pengobatan cuma-cuma, donor darah, hiburan cuma-cuma oleh artis Golkar dan Safari di 5 wilayah Walikota DKI Jakarta, kegiatan olahraga, wayangan dan sebagainya.

Para dermawan darah Golkar

Bulan Bakti Sosial ini diselenggarakan bukan semata-mata sekedar memperingati HUT Golkar ke-23 saja, tetapi punya makna khusus bagi Golkar untuk menunjukkan sikap solidaritas, simpati serta kecintaan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Rekreasi ke Dunia Fantasi

Tepat di hari pertama Bulan Bakti Sosial Golkar, 10 Oktober, halaman DPP Golkar Slipi sedikit agak ramai dan penuh ceria oleh gelak tertawa anak-anak panti asuhan, yang berjumlah sekitar 350 orang pergi berdarmawisata ke Dunia Fantasi Ancol.

Acara ini kendatipun cuma sekedar 'berbau' hura-hura, namun punya arti yang cukup dalam bagi Golkar guna memberikan dan membagi sedikit rasa kebahagiaan kepada anak-anak itu.

Artis Safari menghibur masyarakat

Sumbang Darah

Gerakan sumbang darah melalui PMI melibatkan ratusan kader dan pimpinan Golkar, yang berlangsung selama beberapa hari di Kantor PMI Jakarta Pusat, di Gedung DPP Golkar — Slipi dan di Wisma Karya Senayan.

Para dermawan darah Golkar ini meliputi peserta Rapat Pimpinan Golkar, anggota BKS Kostrad dan para keluarga besar Golkar dari pengemudi Kosti Jaya. Sedang khusus pengemudi Kosti Jaya ini diberikan pelayanan kesehatan reguler untuk setiap keluarga pengemudi tersebut. Sehingga, adanya gerakan sumbang darah ini mempertebal rasa solidaritas Golkar terhadap kepentingan dan kebutuhan orang banyak.

Hiburan Gratis

Artis Safari di bawah koordinator Eddy Sud, memberikan hiburan gratis di lima wilayah Walikota DKI Jakarta setiap malam dari 11 sampai 16 Okto-

Digitized by Google

ber, dengan 10 artis penyanyi plus grup lawak bersama band pengiring tetap Bambang Brothers.

Kelima wilayah tersebut, adalah untuk Jakarta pusat di Stadion Mini Rawa Sari dengan artis Meriam Bellina, Shitta Devi, Hanna Pertiwi, Dina Mariana, Maya Angela, Aryo Grup, lawak Ateng - Iskak dan penyanyi lainnya. Pada malam hiburan ini hadir pula Gubernur Wiyogo, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta H. Achmadi, walikota Jakarta Pusat dan unsur Muspida.

Sedang wilayah lainnya penampilan artis-artis Safari ini tidak jauh berbeda dengan penampilannya di Jakarta Pusat. Baik di Jakarta Barat, Selatan, Timur dan Utara. Hanya beberapa penyanyi dan pelawak yang sedikit berubah susunannya, di antaranya adalah penyanyi Chrisye, Dian Piesesha, Jaja Mihardja, pelawak Jojon Cs, Tom Tam grup, D'Bodor, Batik grup serta penyanyi lainnya.

Olahraga

Cara lain untuk sehat adalah olahraga. Di Stadion Menteng antara 16 - 18 Oktober dilangsungkan 'turnamen' sepakbola, yang diikuti kesebelasan PWI Pusat, Mabes ABRI, Korpri Pusat, Paguyuban Lawak, Parfi dan DPP Golkar. Turnamen ini dibuka Ketua Umum PSSI Kardono dengan 'tendangan pertama'. Tuan rumah DPP Golkar yang diperkuat Sekjen DPP Golkar Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Noegraha Besoes, Rachmat Witoelar tidak berhasil menjuarai 'turnamen' ini dan hanya mampu menduduki urutan keempat setelah kesebelasan Korpri Pusat. Juara Pertamanya, adalah kesebelasan Mabes ABRI setelah dalam final mampu menundukkan kesebalasan Kadin Pusat dengan score 2-0.

Acara olahraga lainnya yang dikoordinir Drs. Theo L Sambuaga ini antara lain Relly Gerak Jalan dan Sepeda. Sedang di cabang bola tenis, Mabes ABRI kembali mencatat kemenangan dan menggondol piala juara pertama setelah dalam final menggulingkan Mensekab/Sekneg.

Kebersihan dan Anti Narkotika

Selain sejumlah mata acara lainnya guna memperingati HUT Golkar ke-23 ini, AMPI DKI menyelenggarakan Lomba Pidato Kebersihan dan Anti Narkotika pada tanggal 11, 13, 14, 15 dan 25 Oktober.

Lomba dikoordinasi oleh Gandhi Bharata dan Abdul Rachman, tujuan untuk menanam kesadaran pada generasi muda terhadap bahaya narkotika dan arti penting bersih lingkungan. Itu sebabnya, lomba ini diselenggarakan kelima penjuru wilayah DKI Jakarta.

Penyuluhan Hukum

Tatap muka dengan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara di Tangerang merupakan salah satu acara Bulan Bakti Sosial Golkar. Mengharukan sekaligus melegakan hati, karena diwarnai lawakan D'Bodor dan wejangan Drs. H. Kusrin SH.

Penyuluhan hukum ini sangat berarti bagi anak-anak yang menghuni LP itu. Dimana, mereka mendapat satu arahan positif yang dapat dijadikan bekal setelah keluar dari 'sekolah di Amerika' itu menurut istilah Drs. H. Kusrin SH. Sehingga nantinya mampu menjadi masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Pada kesempatan itu 17 Oktober,

Kesebelasan Golkar bersama Ketua Umum PSSI Kardono

Digitized by Google

Ketua Umum DPP AMPI Drs. Agung Laksono didampingi Banjar Marpaung, SH dan Ny. Eni Busiri dari DPP Golkar menyerahkan seperangkat alat-alat olahraga seperti bola volly, bola sepak kepada Kepala LPAN Tangerang Drs. Marjaman.

Derap Remaja Indonesia 87

Di tengah kesibukan para pimpinan Golkar mengikuti Rapat Pimpinan di Gedung Serba Guna — Senayan, di pelataran Parkir Timur Senayan lain lagi kesibukannya, yaitu kesibukan Derap Remaja Indonesia 87 untuk membahas masalah disiplin dan tertib lalulintas sembari meldendangkan musik jazz rock.

Acara ini diselenggarakan Lestari yang melibatkan kalangan remaja pelajar tingkat SLTP/SLTA dan Polri/Polda Metro Jaya, untuk memeriahkan HUT Golkar sekaligus mengajak masyarakat luas untuk mematuhi peraturan rambu-rambu lalulintas. Boleh disebut acara pada 18 Oktober itu, sebagai acara musik pengantar tertib lalulintas bagi remaja Indonesia 87.

Selain itu, BKS Kostrad juga mengadakan pertunjukan hiburan di Balai Sidang pada hari yang sama. Kemudian, tanggal 19 Oktober, BKS kostrad menghibur para narapidana di Rumah Tahanan Salemba dan LP Cipinang. Yang langsung mengajak joget Pak De alias Sirajuddin.

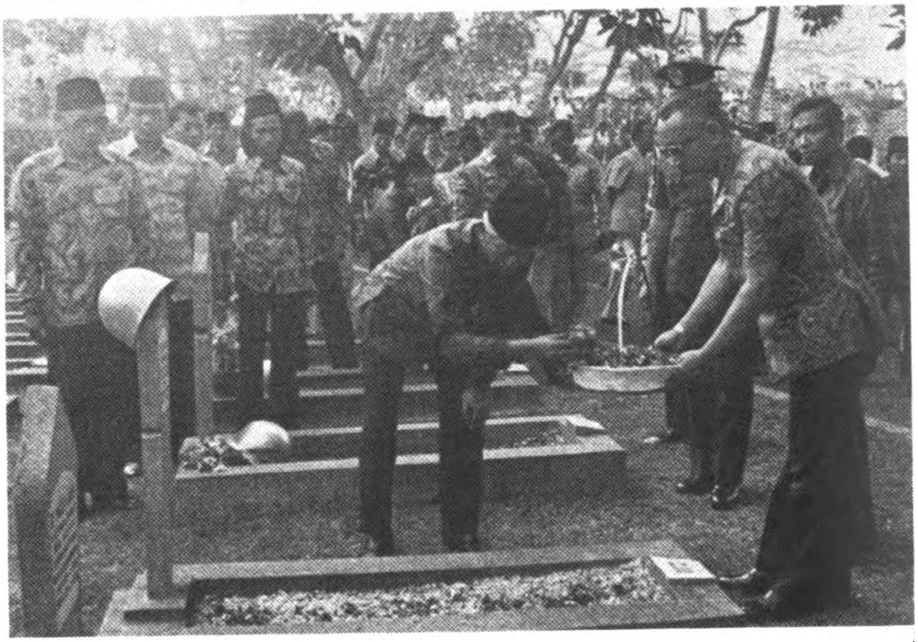

Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata

Ziarah, Rapim, Pengobatan Gratis

Selain hiburan dan sejumlah kegiatan lainnya, pada 18 Oktober, peserta Rapim, Orsosmasinal dan FKP DPR-RI melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata di samping pada kesempatan yang sama ini, masyarakat Tanjung Duren - Jakarta Barat memperoleh pelayanan pengobatan cuma-cuma sebagai tanda pengabdian Golkar kepada masyarakat.

Bahkan, dalam hal ini diresmikan penggunaan Klinik Karya Bhakti Tanjung Duren untuk tempat pelayanan kesehatan masyarakat setempat.

Resepsi, Kesenian, Penutupan Rapim

Tanggal 20 Oktober, Rapat Pimpinan Golkar selesai sudah dan disambung dengan acara malam resepsi HUT Golkar ke 23 di Balai Sidang. Acara ini menampilkan artis-artis Safari guna memberikan hiburan sebagai selingan serta 'pendingin' pimpinan Golkar yang selesai merumuskan sikap politiknya.

Ya, paling tidak untuk melemaskan urat-urat pada susunan syaraf yang habis dipergunakan berpikir selama tiga hari di Gedung Serba Guna. Karena itu, pada malam kesenian dan resepsi itu, yang hadir hampir seluruh peserta Rapim dan para undangan dari keluarga besar Golkar.

Menyumbang seperangkat peralatan olahraga

Lomba PMR, Bayi Sehat dan PKS

Pada akhir acara kegiatan HUT Golkar, DPP AMPI dan HWK yang masing-masing dipimpin koordinator pelaksana H.M. CH. Muas dan Ny. Nugraha Besoes menyelenggarakan Lomba PMR 5 November dan Lomba Bayi Sehat serta PKS 8 November.

Lomba ini merupakan matarantai dari keseluruhan kegiatan yang diselenggarakan oleh Orsosmasinal. Juga, satu gerakan sosial dalam Bulan Bakti Sosial Golkar.☐ DT

Digitized by Google

Golkar dan Gatotkaca Sama Digembleng Di Kawah Candradimuka

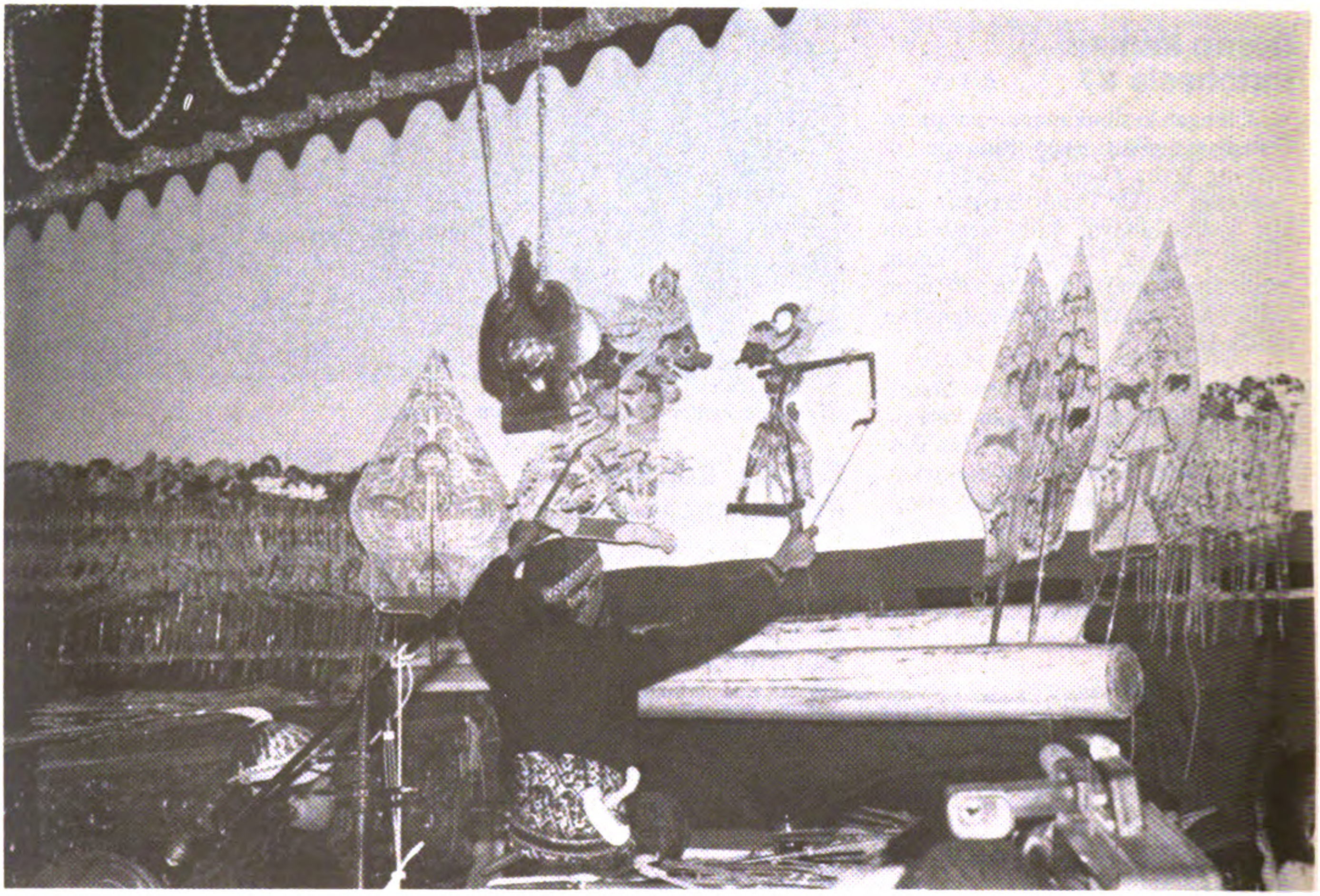

Golkar tampil seperti Gatotkaca

Meskipun hidup di alam yang berbeda, namun antara Golkar dan Gatotkaca ada kemiripannya.

Gatotkaca, putera Bima ksatria Pandawa dari isteri Dewi Arimbi, pada usia 35 hari sudah dijagokan para Dewa untuk menumpas serbuan raja raksasa Kala Pracona dan patihnya Kala Sekipu, yang berambisi menguasai kahyangan atau istana para Dewa karena lamarannya kepada bidadari Dewi Supraba ditolak.

Sebelum menghadapi Prabu Kala Pracona dan Patih Sekipu, bayi Gatotkaca terlebih dahulu digembleng di kawah Candradimuka, agar menjadi ksatria sakti mandraguna yang memiliki otot bagaikan kawat, tulang bagaikan besi, kulit bagaikan baja yang di dalam istilah pewayangan disebut 'ora tedas tapak paluning pande sisaning gurenda, tinatah mendal, jinantra menter' alias benar-benar perkasa dan digdaya.

Ternyata, Gatotkaca yang juga bernama Purbaya berhasil keluar dari kawah Candradimuka dengan segar bugar, gagah perkasa, dan segera menjadi jagonya para Dewa.

Alhasil, Gatotkaca berhasil menumpas Raja Kiskendapura beserta seluruh wadyabalanya. Sebagai hadiah, Gatotkaca diizinkan oleh para Dewa untuk menjadi raja sementara di kahyangan.

Tepat

Pemilihan lakon 'lahirnya Gatotkaca', yang dipagelarkan secara memikat oleh dalang Ki Mantep Sudarsono dari Surakarta pada peringatan HUT ke-23 Golkar di Gedung Serba Guna Gelora Senayan 24 Oktober lalu, dianggap cukup relevan dengan sejarah lahirnya Golkar.

Gatotkaca, yang kemudian menjadi ksatria utama pembela dan pembangun negara leluhurnya Amarta atau Indrasprasta, juga dikenal sebagai ksatria yang jujur, bertanggungjawab dan berwatak setia-kawan, suatu sikap yang senantiasa dikobarkan oleh Golkar.

Seperti halnya Gatotkaca, Golkar lahir dalam situasi tanah air tidak tenang tenteram. Karena ketika Golkar lahir pada 20 Oktober 1964, Indonesia dalam situasi yang panas, penuh kecurigaan dan ketegangan politik terjadi di dalam maupun di luar negeri. Baru mencapai usia sebelas bulan, pecah pengkhianatan G-30-S/PKI pada 30 September 1965.

Dalam situasi negara yang kacau, penuh kecurigaan dan penuh pengkhianatan yang sangat membahayakan persatuan rakyat dan keutuhan negara itulah Golkar yang baru berusia se-

Digitized by Google

belas bulan harus tampil di tengah pergolakan, bekerjasama dengan berbagai kekuatan rakyat pecinta Pancasila dan ABRI, bergerak untuk memulihkan situasi dan kepercayaan rakyat kepada politik.

Dalam 'kawah Candradimuka' seperti itulah, sang bayi Golkar yang baru berumur enam bulan dipaksa oleh sejarah harus tampil mengatasi pergolakan politik, sebelum ia memiliki bekal pengalaman politik yang cukup.

Jika Haryo Gatotkaca berhasil keluar dari kawah Candradimuka dengan gagah perkasa, segar bugar bahkan bertambah kuat dan teguh, demikian pula Golkar. Setelah melampaui masa gejolak 'kawah Candradimuka' politik pada tahun 1965, Golkar justru berhasil meloncat ke atas panggung politik dengan kekuatan yang makin besar.

Alat pendorong demokrasi Pancasila

Mewujudkan jalinan kerjasama

Sejak itu, Golkar secara bertahap dan mantap tampil menjadi organisasi kekuatan sosial politik paling besar, yang biasa disebut dengan istilah 'mayoritas tunggal'.

Bersama ABRI, Golkar menjadi alat pendorong utama lahirnya perubahan-perubahan besar dan mendasar sistem demokrasi di Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila.

Kasmaran

Lakon ini, dimulai dengan jejeran atau adegan di kerajaan Kiskendopura yang dipimpin seorang raja raksasa Prabu Kala Pracona dengan patihnya Kala Sekipu, yang terkenal sakti mandraguna.

Dalam sidang yang dihadiri oleh seluruh punggawanya, sang Raja memaparkan impian dan rasa kasmarannya kepada bidadari Dewi Supraba.

Keputusan sidang, sang Prabu Kala Pracona mengutus patih Kala Sekipu untuk melamar Dewi Supraba di kahyangan dengan pesan, jika lamarannya ditolak kerajaan para Dewa itu hendaknya dihancurkan.

Sementara itu di Kahyangan Jonggringsalaka, para Dewata sedang bingung menghadapi dua masalah yang harus segera diselesaikan. Pertama, memadamkan serangan Raja Kiskendopura Kala Pracona dan patih Sekipu, kedua tali pusat bayi yang lahir di kerajaan Pringgondani Haryo Gatotkaca belum berhasil dipotong karena ternyata tidak ada senjata tajam yang mampu memutuskan tali pusat tersebut.

Atas perintah Sang Hyang Batara Guru, raja para dewa di Kahyangan, Batara Narada diutus memberikan senjata Kunto Wijayandanu kepada Arjuna, ksatria penengah Pandawa untuk memotong tali pusat sang bayi Gatotkaca.

Sebab, Gatotkacalah kelak yang bisa memadamkan serangan Kala Pracona dan Patih Kala Sekipu di Suralaya.

Narada, atas perintah itu segera turun ke arcapada/dunia untuk menemui Raden Arjuna, memberikan senjata Kunto Wijayandanu. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Karna yang menjelma mirip Arjuna atas bantuan Betara Surya.

Batara Narada yang sudah berusia lanjut terperdaya oleh Karna dengan segala tipu dayanya.

Setelah mengetahui kekeliruannya, Batara Narada menugaskan Arjuna untuk merebut senjata itu dari Karna, yang sebetulnya masih saudara berlainan ayah dengan Arjuna.

Dalam perang-tanding, Arjuna hanya berhasil merebut warangka atau sarung Kunto Wijayandanu, sedangkan kerisnya masih di tangan Karna. Meskipun hanya dengan warangkanya, ternyata dapat digunakan untuk memotong tali pusat Gatotkaca.

Suatu keajaiban terjadi, warangka tersebut musnah meraga dalam jasad Gatotkaca.

Di kemudian hari, ketika perang Bharatayudha berlangsung, Gatotkaca akan menemui ajalnya di tangan Adipati Karna, dihunjam senjata Kunto Wijayandanu. Di saat itulah senjata Kunta kembali ke warangkanya.

Disambut meriah

Pagelaran wayang kuling semalam suntuk ini mendapat sambutan meriah oleh ribuan penonton yang memadati Gedung Serba Guna Gelora Senayan, di Jakarta.

Di antara penonton terdapat sejumlah pejabat, para Duta Besar negara sahabat, Kasad Jenderal TNI Try Sutrisno, Ketua DPP Golkar Oetoyo Oesman SH, Brigjen TNI Darsoyo dan Ny. Tati Darsoyo, Drs. Moerdopo dan isteri, juga Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH yang hadir bersama tiga cucunya. □ Wt/AK

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA ORGANISASI

GOLKAR DAN PAHLAWAN

''Bangsa yang besar, adalah bangsa yang selalu menghormati para Pahlawannya''. Golkar, dalam setiap merayakan HUT nya selalu menyelenggarakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Tidak saja di tingkat Pusat, tapi juga di seluruh DPD Tk I dan Tk II juga demikian.

Tahun ini DPP Golkar dalam merayakan HUT nya ke 23 mengadakan acara ziarah ke TMP Kalibata, dengan Irup Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH, yang diikuti oleh segenap ribuan anggota dan kader Golkar Keluarga Besar Golongan Karya DKI Jakarta dan segenap pengurus DPP Golkar, DPD Golkar Tk I, Tk II seluruh Indonesia yang sedang Rapim di Jakarta.

Ziarah pagi itu, 18 Oktober dimulai Jam 07.30 tepat, di awali dengan mengheningkan cipta dipimpin Inspektur upacara Ketua Umum DPP Golkar, dilanjutkan peletakan karangan bunga di bawah Tugu TMP Kalibata, dan selanjud diikuti seluruh hadirin tabur bunga di pusara makam pahlawan yang didahului oleh Sudharmono, SH Ketua Umum Golkar yang antara lain menabur bunga di makam Jenderal TNI Achmad Yani, Sukowati, Adam Malik dan diteruskan pembacaan doa yang dipimpin oleh seorang anggota Satkar Ulama.

RAPIM DAN MUSIBAH BINTARO

INI bukan keputusan politik, walau 'keputusan' yang satu ini juga diambil dalam Rapim Golkar yang lalu. Dan adalah Ketua Umum Golkar sendiri secara khusus mengumumkannya pada malam HUT 23 di Balai Sidang Senayan.

Para peserta Rapim, kata Ketua Umum, terketuk hatinya oleh musibah Bintaro. Atas prakarsa beberapa peserta, dilakukan pengumpulan sumbangan untuk diberikan kepada korban musibah tabrakan kereta api itu. Berapa jumlahnya ? ''Beberapa jutalah ...'', ujar Ketua Umum. Lalu DPP Golkar menggenapkannya menjadi Rp. 10 juta.

Sumbangan spontan tersebut diterimakan malam itu kepada Menteri Sosial Ny. Nani Soedarsono SH untuk diteruskan kepada para korban.

TAKSI DAN KESEHATAN

JAGA kesehatan anda baik-baik, sebab sebagai pengemudi taksi anda semua memerlukan kesehatan fisik yang prima''. Nasehat ini datang dari Sekjen Golkar Ir Sarwono Kusumaatmadja. Masih ada lagi. ''Berolahraga lah. Olah raga penting untuk menjaga kesehatan fisik. Meskipun sudah bekerja berat bergulat dengan taksi sepanjang hari, jangan lupa berolahraga. Daripada duduk-duduk ngomong tentang hal-hal yang bersifat spekulasi, lebih baik waktu yang ada digunakan untuk berolahraga''.

Biasa mengurusi 'masalah politik', kali ini selaku penasehat Koperasi Sopir Taksi Jakarta Raya - Kosti Jaya - Sarwono bicara kesehatan dan olah raga. Soalnya hari itu, Jumat 23 Oktober di Slipi, ada penandatanganan naskah kerjasama bidang kesehatan antara Kosti Jaya dengan Yayasan Karya Bhakti Golkar. Dalam yayasan ini bergabung kader-kader Golkar yang berprofesi di bidang medis - dan mengelola sebuah rumah sakit.

Penandatanganan naskah kerjasama itu bersamaan dengan hari donor darah melalui PMI Jaya. Para pengemudi taksi anggota Kosti Jaya bersama Keluarga Besar Golkar lainnya menyumbangkan darah dalam kegiatan yang tak terlepas dari rangkaian peringatan HUT Golkar yang ke-23. Turut menyumbangkan darah antara lain Ketua DPP Golkar KH Tarmudji, Sekjen Golkar Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Ir. Tati Sumiarno dari Departemen Tani & Nelayan serta Hatta Mustafa SH dari Departemen Pengabdian Masyarakat DPP Golkar.

Digitized by Google

Oleh: A.A. Oka Mahendra

Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan

MASALAH nilai sudah cukup banyak dibahas oleh Ilmuwan Sosial maupun filsuf, baik dulu maupun sekarang. Ada berbagai pendapat yang dikemukakan.

Howard Becker misalnya, meninjau nilai dari segi Sosiologi dan anthropologi, ia mengatakan sebagai berikut: "... nilai menunjuk pada ukuran-ukuran kultural yang dianut bersama yang berdasarkan itu pertalian moral, estetik atau kognitif dari obyek-obyek dari sikap, hasrat dan kebutuhan dapat dibandingkan dan dipertimbangkan". Sedangkan Benyamin Walman mengartikan nilai sebagai "derajat dari keberhargaan atau keunggulan yang diberikan kepada atau diperoleh dari suatu obyek".

Dari kalangan filsuf dapat dikemukakan pendapat Richard Bender yang menyatakan bahwa "Suatu nilai adalah sebuah pengalaman yang memberikan suatu pemuasan kebutuhan yang diakui bertalian, tersatu padukan, atau menyumbang pada pemuasan demikian itu. Dengan demikian kehidupan yang bermanfaat ialah pencapaian sejumlah pengalaman nilai yang senantiasa bertambah". Filsuf lainnya yaitu Findlay mempergunakan istilah nilai sebagai suatu pedoman falsafati dari kebaikan, keunggulan, hal-hal yang disukai dan lain-lain sebagainya, yang dipertalikan pada macam-macam benda, suasana dan keadaan tertentu. Nilai itu bertimbalan menurut kenyataannya atau pada asasnya dengan sikap manusia yang disebut penilaian.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan *kenyataan obyektif* dari hal-hal di luar manusia maupun *kesadaran subyektif* berupa sikap dalam diri manusia. Suatu nilai terbentuk bilamana ada hubungan timbal balik antara kenyataan obyektif dengan kesadaran subyektif.

Nilai dibedakan dengan norma. Nilai adalah ukuran umum (general standard) sedangkan norma adalah aturan-aturan untuk berperilaku. Nilai merupakan preferensi atau suatu yang lebih disukai.

Nilai Sosial

Nilai dapat dikatagorikan dengan berbagai macam cara. Dari segi filsafat misalnya dikenal ada 2 macam nilai yaitu: nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik bertalian dengan sifat baik atau bernilai dari benda itu sendiri. Sedangkan nilai instrumental ialah nilai yang berperan sebagai sarana atau alat untuk mencapai suatu hal lain.

Kepahlawanan pembangkit semangat juang

Nilai dapat pula dikatagorikan sebagai nilai sosial, nilai ekonomik maupun nilai politik. W.I. Thomas dan E. Znaniecki merumuskan nilai sosial sebagai arti obyektif dari suatu gejala bagi anggota-anggota sebuah kelompok manusia dan arti obyektif tersebut menjadi sasaran aktivitas bagi anggota-anggota kelompok itu.

Nilai Sosial itu sendiri masih dapat digolongkan kedalam 2 jenis nilai sosial yaitu nilai perserikatan dan nilai karakter.

Menurut Walter G Everett nilai perserikatan menyangkut aneka bentuk perserikatan manusia dari persahabatan dan kehidupan keluarga sampai hubungan-hubungan yang meliputi seluruh dunia. Sedangkan nilai karakter mencakup seluruh kebajikan perseorangan dan kemasyarakatan yang diinginkan manusia, termasuk keadilan, kedermawanan, pengendalian diri dan kejujuran. Horold Osborne merumuskan bahwa nilai yang konsepsinya bercorak sosial ialah nilai yang merupakan sasaran dari cita atau tujuan yang disetujui masyarakat bersama dan nilai sebagai kemampuan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat (mengenai nilai sosial lebih lanjut periksa The Liang Gie, Teori-teori keadilan 1979, halaman 14).

Dari berbagai pandangan tersebut dapatlah dipahami bahwa kepahlawanan merangkum nilai yang dapat dimasukkan kedalam nilai sosial yang menyangkut masyarakat bangsa pada satu segi dan pada segi lainnya meliputi kebajikan perorangan yang didambakan dalam kehidupan manusia. Kepahlawanan sebagai suatu nilai yang bersifat instrinsik menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh masyarakat bangsa dan diusahakan untuk mewujudkannya.

Pahlawan Dan Kepahlawanan

Sebelum menelaah mengenai nilai kepahlawanan terlebih dulu perlu kita pahami dulu makna kata pahlawan dan kepahlawanan. Pahlawan akar katanya dari kata pahala (sansekerta) dengan akhiran kata wan, yang mempunyai makna orang yang mempunyai pahala. Sedangkan kata kepahlawanan menunjukkan kepada sifat dari orang yang disebut pahlawan.

Digitized by Google

Didalam masyarakat kita mengenal macam-macam pahlawan ada pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, pahlawan kamanusiaan, pahlawan pembangunan dan ada pula pahlawan tanpa tanda jasa. Sebagai bangsa yang besar bangsa Indonesia menghargai dan menghormati pahlawan-pahlawannya, sebab mereka telah menunjukkan jasa-jasanya dan dharma bhaktinya untuk kemajuan bangsanya.

Penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan tersebut bukan saja ditunjukkan pada saat-saat upacara resmi, tetapi dalam perbuatan sehari-hari dengan meneruskan citacita perjoangannya secara tulus dan ikhlas.

Sebagaimana dimaklumi seorang pahlawan berjoang secara berani dan memandang perjoangan sebagai kewajiban atau panggilan hidup, tanpa pamrih pribadi sehingga pantas mendapat pahala.

Dalam alam yang masih mistis dan magis pahlawan seakan-akan dipisahkan dari tokoh nyata dan dijadikan personifikasi suatu ide. Hidupnya ditafsirkan secara idealistis: secara baik dan murni. Hal ini dapat dimengerti, karena masyarakat yang demikian membutuhkan penjelmaan ide-ide dalam organisasi yang berfungsi sebagai sarana identifikasi.

Dalam zaman perjoangan kemerdekaan kita memiliki tokoh-tokoh yang berani berkorban demi cita-cita, maka tidak mengherankan bahwa sebagian besar pahlawan kita adalah mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan bangsanya.

Seorang pahlawan memiliki pahala berkat keterlibatan mereka secara intens, kejujuran dan kesetiaannya untuk cita-cita yang diperjoangkannya, mereka mengorbankan apa saja yang dimiliki untuk nusa dan bangsanya.

Walaupun sebagian besar pahlawan berasal dari mereka yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengangkat senjata, tetapi dewasa ini sangat dibutuhkan pahlawan-pahlawan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membebaskan rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan. Bangsa kita memerlukan keteladanan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam mengisi kemerdekaan, guna mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Di negara-negara lain kita mengenal pahlawan-pahlawan pejoang kemerdekaan bangsanya maupun pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang tak pernah pudar kebesaran namanya. Di India kita mengenal Mahatma Gandhi, sebagai pahlawan bangsanya yang berpegang teguh kepada ahimsa sebagai prinsip perjoangan membebaskan bangsanya dari belenggu penjajahan Inggris. Kita juga mengenal Ibu Theresa pahlawan pengabdian rakyat jelata di Kalkuta. Kita juga mengenal Marthin Luther King pahlawan kemanusiaan dari Amerika Serikat. Dan banyak lagi pahlawan yang telah mengabdikan dirinya untuk suatu citacita yang luhur.

Tidaklah penting apakah mereka gugur dalam menunaikan panggilan tugasnya, tetapi yang terutama ialah bahwa mereka mengabdikan hidupnya demi kewajiban terhadap sesama manusia tanpa pamrih, walaupun tidak jarang untuk pengabdiannya itu mereka juga tidak memperoleh pengakuan resmi.

Memang pengakuan resmi dan pengakuan sejarah tidak selalu sama. Tidak menjadi soal bagi seorang pahlawan apakah ia dibuatkan monumen atau tidak, namanya diabadikan sebagai nama jalan atau tidak. Yang penting adalah kualitas pengabdian dan relevansi pengabdiannya untuk zamannya untuk mewujudkan citacitanya.

Dalam zaman pembangunan sekarang ini nilai-nilai kepahlawanan yang menjadi pembangkit semangat joang para pahlawan kita memang patut diteladani dan dilestarikan.

Nilai-nilai kepahlawanan itu secara nyata dapat dijabarkan secara garis besar sebagai berikut: 1. Cinta tanah air, 2. Kepeloporan, 3. Kerelaan berkorban, 4. Kesetia kawanan, 5. Kejujuran, 6. Mengutamakan kepentingan perjoangan/cita-cita bersama, 7. Persatuan, 8. Keadilan dan kebenaran, 9. Kesejahteraan Sosial.

Nilai-nilai kepahlawanan tersebut merupakan nilai-nilai yang luhur dan telah mengantarkan bangsa kita kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia dan terus membimbing bangsa kita dalam menentukan jalannya sejarah perjoangan mengisi kemerdekaan.

Pelestarian Nilai

Pembangunan mau tidak mau membawa perubahan juga dalam dunia dan skala nilai. Nilai lama mungkin melemah, nilai baru dalam proses untuk tampil. Oleh karena itu perlu usaha-usaha pelestarian nilai-nilai luhur, nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi tegaknya negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk melestarikan nilai-nilai luhur itu maka perlu dicegah kemerosotan nilai-nilai luhur tadi. Dan kita harus berusaha mempengaruhi proses timbulnya nilai-nilai baru agar kita tetap maju sebagai bangsa yang berdiri kokoh di atas kepribadiannya sendiri.

Pelestarian nilai maupun pengembangan pada proses lahirnya nilai baru bukan dilakukan dengan cara indoktrinasi melainkan dengan teladan, pendidikan dan komunikasi antar generasi yang akrab.

Selain itu yang penting pula diperhatikan ialah bahwa nilai-nilai yang hendak dilestarikan itu adalah nilai-nilai yang sungguh-sungguh hidup, bukan sekedar kenang-kenangan masa lampau yang makin jauh dari realitas zaman. Hanya nilai yang hiduplah, atau hanya nilai yang menjadi semangat zamanlah bermakna dalam kehidupan, dan dapat penggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan, untuk berkarya memelihara momentum pembangunan. Sebab nilai itu sendiri statis yang bergerak adalah dinamik dari spirit atau semangatnya.

Karena itu milikilah dinamik dari spirit atau semangat nilai-nilai itu, agar generasi muda penerus perjoangan bangsa dapat melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai luruh kepahlawanan itu demi masa depan yang lebih sejahtera.

Bahkan lebih dari itu, generasi muda diharapkan pula memberikan sumbangan dalam pembentukan nilai-nilai baru, yang memperkaya nilai-nilai yang telah ada. Sebab dalam masa yang akan datang diperlukan pemuda-pemuda yang bukan sekedar mampu mewarisi atau melestarikan. Nilai-nilai yang diterima dari pendahulu-pendahulunya tetapi, harus mampu melakukan pembaharuan dan memberi sumbangan yang kreatif dan penuh rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas sejarah membangun bangsanya. Semua itu merupakan bagian dari nilai kepahlawanan yang penuh dinamik dan perlu terus ditanamkan dalam kalbu setiap pemuda sehingga benar-benar menjiwai cipta, rasa, karsa dan karyanya. Sebab tantangan pembangunan dimasa mendatang menuntut nilai-nilai baru seperti rasionalitas, effisiensi, disiplin dan produktivitas kerja yang perlu ditumbuhkan untuk melengkapi nilai-nilai yang telah ada.☐

Digitized by Google

Oleh: Soekarno D

Operasionalisasi Pancasila Di Bidang Ketenaga-kerjaan

Penerapan Semangat Kekeluargaan Dan Gotong-royong Antar Lembaga Ketenaga-kerjaan: Tripartit Dan Bipartit

Telah dijelaskan, bahwa Lembaga Kerjasaına Tripartit Nasional dan Daerah, merupakan jalur utama dari sistim tripartism di Indonesia. Jalur Tripartit Nasional/Daerah ini merupakan wadah sentral, dimana kerjasama antara ketiga unsurnya selalu dibina dan dikembangkan. Konsultasi dan komunikasi timbal balik dikembangkan terus, dan setiap masalah bersama diatasi melalui cara musyawarah mufakat. Atas dasar pola kerjasama semacam itulah Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional/Daerah merintis perumusan berbagai kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan di tingkatnya masing-masing. Jika pada suatu ketika timbul masalah, Lembaga Kerjasama Tripartit bersidang, membahas serta mencari cara-cara penyelesaian yang sebaik-baiknya. Sebagai contoh ialah, pada waktu Pemerintah mengadakan devalusi rupiah, harga barang-barang kebutuhan hidup bergerak naik, dan kaum pekerja menghendaki kenaikan upah. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan berkembang terus tanpa pengarahan yang tepat, bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional bersidang, dan membahas cara-cara yang perlu ditempuh oleh kaum pekerja dan para pengusaha dalam menghadapi masalah tersebut. Akhirnya oleh Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional diputuskan, bahwa dalaın jangka waktu tiga bulan pengusaha diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian tentang perkembangan harga, untuk kemudian mengadakan kalkulasi-kalkulasi tentang penyesuaian upah pekerja. Setelah itu maka antara Organisasi Pekerja dan Pengusaha dipersilakan mengadakan musyawarah tentang cara-cara kenaikan upah pekerja di perusahaannya masing-masing. Dengan cara demikian maka proses penyesuaian upah akibat devaluasi dapat berjalan terarah, teratur, dan dilakukan melalui cara

musyawarah, sehingga gejolak perburuhan dapat dihindari.

Kesepakatan Tripartit Nasional berlaku secara nasional, dan menjadi pedoman pula bagi Tripartit Daerah. Tugas Tripartit Daerah pada pokoknya serupa dengan tugas Tripartit Nasional, kecuali ruang lingkupnya yang terbatas untuk daerahnya masing-masing.

Untuk melengkapi kelembagaan yang bersifat tripartism di atas dibentuklah lembaga-lembaga lain yang serupa, ialah: (1) Lembaga Kerjasama Tripartit Sektoral yang bersifat Nasional dan Daerah, (2) Lembaga Kerjasama Bipartit di tingkat Perusahaan maupun tingkat Unit Kerja. Dan di samping kedua Lembaga Kerjasama ini, terdapatlah berbagai Panitya atau Dewan yang tersusun atas dasar unsur-unsur tripartit pula, yaitu (a) Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) baik di tingkat Pusat maupun Daerah, (b) Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dan Daerah, (c) Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan Wilayah, (d) Dewan Produktivitas Nasional, dan (e) Dewan Latihan Kerja Nasional.

Lembaga Tripartit Sektoral Nasional dan Daerah. Jika Lembaga Tripartit Nasional dan Daerah merupakan jalur utama dari pola tripartism di Indonesia, maka Lembaga Kerjasama Tripartit Sektoral Nasional dan Daerah ini merupakan jalur samping, yang tugasnya serupa dengan Lembaga Tripartit Nasional dan Daerah tapi scopenya hanya mencakup masalah-masalah ketenagakerjaan di sektornya masing-masing. Namun demikian, karena tugasnya disamping memecahkan masalah-masalah ketenagakerjaan di sektornya masing-masing juga memberi pertimbangan kepada Menteri Tenaga Kerja maupun kepada Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional bagi Tripartit Sektoral Nasional, dan kepada Lembaga Tripartit Daerah bagi Tripartit Sektoral Daerah, maka pada hakekatnya Lembaga Tripartit Sektoral itu dapat juga mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang masalah-masalah ketenagakerjaan pada umumnya sebagai masukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan kepada Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Disini terjadilah interaksi dan komunikasi timbal balik antara kedua Lembaga tersebut. Lembaga Tripartit Sektoral memiliki kesempatan untuk berpartisipasi mengenai pengembangan kebijaksanaan yang bersifat nasional, sedang Lembaga Tripartit Nasional mendapat masukan dari Lembaga Tripartit Sektoral. Adanya Sekretariat yang berfungsi sebagai pelaksana tugas sehari-hari dari kedua Lembaga tersebut memungkinkan efektivitas kedua Lembaga tersebut terjamin. Sudah barang tentu Sekretariat itu sendiri harus berfungsi secara baik.

Keterpaduan kedua Lembaga tersebut bukan saja karena tugas keduanya serupa dan saling melengkapi, akan tetapi karena kedua Lembaga tersebut kedua-duanya dibentuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh Lem-

Digitized by Google

baga Kerjasama Tripartit Nasional merupakan pedoman bagi Lembaga Tripartit Sektoral. Sedangkan Lembaga Tripartit Sektoral Nasional/Daerah berada dibawah koordinasi dari Lembaga Tripartit Nasional/Daerah. Dengan demikian semangat gotong-royong antara kedua Lembaga tersebut dapat diwujudkan dengan mudah melalui mekanisme yang telah disediakan. Di samping itu diupayakan pula terwujudnya keterpaduan antara unsur-unsur Pemerintah, ialah antara Departemen Tenaga Kerja dengan Departemen yang membidangi Sektor yang bersangkutan, karena unsur Pemerintah yang duduk dalam Lembaga Tripartit Sektoral terdiri atas dua unsur, ialah unsur Departemen Tenaga Kerja dan unsur Departemen Tehnis yang bersangkutan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Daerah. Sedang untuk menjamin spesialisasi Lembaga Tripartit Sektoral sebagai organisasi yang memiliki kekhususan dalam memperhatikan dan menangani masalah ketenagakerjaan, maka unsur Pekerja yang duduk dalam Lembaga Tripartit Nasional terdiri atas dan berasal dari SBLP atau sektor yang bersangkutan, sedang unsur Pengusaha diambil dari Asosiasi yang membidangi sektor tersebut. Dengan demikian pemikiran dan pendapat atau pemikiran yang diputuskan atau disarankan oleh Lembaga Tripartit Sektoral ini diharapkan bersifat profesional dan benar-benar dapat mewakili kepentingan sektor yang bersangkutan.

Berbagai Panitya yang bersifat Tripartit. Paling sedikit ada lima Panitya atau Dewan ditingkat Nasional atau Daerah telah dibentuk, baik atas dasar Undang-Undang maupun atas keputusan Presiden atau Menteri. Salah satu di antaranya memiliki wewenang yang cukup besar, ialah berhak mengambil keputusan yang mengikat, ialah Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) baik tingkat Pusat (P4P) maupun di tingkat Daerah (P4D). Ada dua sistim dalam menangani dan menyelesaikan sengketa dibidang perburuhan, pertama melalui Pengadilan atau Peradilan Perburuhan; dan yang kedua melalui sebuah Panitya yang bersifat Tripartit. Indonesia memilih yang kedua ialah melalui Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) yang bersifat Tripartit. Mengapa sistim yang kedua ini yang dipilih? Karena sistim ini lebih menjamin sifat kegotong-royongan di antara ketiga unsur Tripartit. Ketiga unsur ini memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan bertukar fikiran dalam sidang-sidang P4 itu, sebelum P4 mengambil keputusan mengenai perselisihan perburuhan. Di dalam sidang itulah proses tukar pendapat, adu kebenaran dan musyawarah terjadi. Boleh dikatakan seluruh rangkaian penyelesaian perselisihan perburuhan diupayakan melalui proses musyawarah untuk mufakat. Sejak perselisihan terjadi di tingkat perusahaan atau unit kerja, fihak-fihak yang berselisih diwajibkan berunding dan bermusyawarah. Jika ini gagal, masih terbuka kesempatan melalui perantaraan oleh pejabat Pemerintah. Jika inipun gagal maka masalahnya wajib dibawa ke P4D yang susunannya adalah bersifat Tripartit. Di sini terjadilah proses musyawarah mufakat. Keputusan P4D bisa bersifat anjuran, tetapi juga bisa bersifat mengikat. Sekalipun demikian, kalau salah satu fihak yang berselisih tidak puas terhadap keputusan P4D dapat minta banding kepada P4P. P4P yang tersusun atas dasar Tripartit inipun dalam mengambil keputusan harus didahului oleh proses tukar pendapat, adu pemikiran dan akhirnya harus pula menggunakan cara musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Dan keputusan yang diambil oleh P4P bersifat mengikat. Dengan gambaran sepintas di atas itu jelaslah bahwa proses musyawarah untuk mufakat itu diharapkan juga selalu dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong-royong dalam seluruh tahap penyelesaian perselisihan antara fihak Pekerja dan Pengusaha tersebut. Itulah sebabnya Indonesia memilih sistim ini karena lebih menjamin diamalkannya prinsip-prinsip yang terkandung dalam falsafah negara Pancasila. Satu hal yang perlu mendapat perhatian dan perlu dijaga ialah, agar semangat kekeluargaan yang tulus betul-betul bisa diterapkan dalam musyawarah tersebut. Jangan hendaknya ada salah satu unsur Tripartit yang karena merasa kuat lalu ingin menangnya sendiri. Karena itu diperlukan adanya keberanian bagi masing-masing unsur untuk mawas diri dan selalu tenggang rasa di dalam proses musyawarah tersebut, sehingga setiap keputusan hasil musyawarah itu benar-benar dilandasi oleh akal sehat dan rasa tanggungjawab. Hanya dengan cara demikian kualitas musyawarah tersebut benar-benar murni seperti yang diharapkan.

Panitya atau Dewan lain yang perlu dicatat di sini ialah *Dewan Penelitian Pengupahan Nasional* yang juga terdapat di Daerah. Dewan ini bertugas untuk memberi pertimbangan kepada Pemerintah mengenai kebijaksanaan yang perlu diambil mengenai prinsip-prinsip pengupahan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, tenaga kerja serta perkembangan pembangunan pada umumnya. Dewan yang tersusun atas Tripartit ini dapat memberi pertimbangan dan saran kepada Pemerintah cq Menteri Tenaga Kerja baik diminta maupun tidak, dan Pemerintah dapat menggunakan saran tersebut sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan di bidang pengupahan. Dalam penetapan upah minimum misalnya mekanisme yang dikembangkan ialah: Dewan Penelitian Pengupahan Daerah menyampaikan saran kepada Gubernur, kemudian Gubernur mengusulkan hal tersebut kepada Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja setelah mendengar pendapat dari Dewan Penelitian Pengupahan Nasional menetapkan tingkat upah minimum di sesuatu Daerah Propinsi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Penelitian Pengupahan yang anggota-anggotanya terdiri atas unsur Tripartit, bahkan untuk tingkat nasional adalah Tripartit plus (unsur Perguruan Tinggi) selalu mempertimbangkan perkembangan keadaan pembangunan, baik ekonomi, keuangan, tingkat biaya hidup pada umumnya, kebutuhan fisik minimum (KFM) dan sebagainya. Dengan demikian disatu fihak Dewan ini berkewajiban untuk memikirkan bagaimana caranya upah para pekerja itu secara bertahap bisa diperbaiki, akan tetapi juga harus memikirkan pula hal tersebut masih tetap dalam batas kemampuan perusahaan, sehingga kelangsungan kerja dan usaha tetap terjamin. Pendek kata Dewan ini berkewajiban untuk menciptakan suatu tingkat upah yang adil bagi semua fihak.

Di samping Panitya dan Dewan yang bersifat Tripartit tersebut di atas, lembaga lainnya ialah *Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja* Nasional dan Daerah. Adapun tugas pokok dari Dewan ini tidak jauh berbeda dengan Dewan Penelitian Pengupahan, ialah memberikan pertimbangan kepada Pemerintah cq Menteri Tenaga Kerja mengenai hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bahan bagi Pemerintah untuk mengambil keputusan serta merumus-

Digitized by Google

Kaum pekerja menghendaki kenaikan upah

kan kebijaksanaan di bidang Keselamatan dan kesehatan kerja. Sedang untuk tingkat Daerah, pertimbangan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Daerah diberikan kepada Pemerintah Daerah/Gubernur yang bersangkutan.

Di samping kedua lembaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja tingkat Nasional dan Daerah di atas, maka di tingkat Unit Kerja dibentuk Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tugasnya terutama membantu Perusahaan untuk meningkatkan penyuluhan serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang bersangkutan. Kedudukan Panitya ini sangat penting oleh karena kualitas keselamatan dan kesehatan kerja dari sesuatu perusahaan sangat ditentukan oleh keadaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang bersangkutan. Dan Panitya inilah yang secara langsung bertanggung jawab membantu perusahaan dalam menciptakan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang diinginkan. Panitya dapat mengingatkan kepada perusahaan maupun kepada para pekerja apabila mereka tidak mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena Panitya ini bersifat Tripartit, maka segala sesuatu yang disarankan sudah barang tentu melalui permusyawaratan di antara ketiga unsur Tripartit tersebut.

Dua Dewan yang lain yang hanya terdapat di tingkat Pusat ialah *Dewan Produktivitas Nasional* dan *Dewan Latihan Kerja Nasional*. Kedua Dewan yang bersifat Tripartit ini pada dasarnya mempunyai tugas serupa, ialah memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah mengenai hal-hal yang menyangkut bidangnya masing-masing, baik diminta maupun tidak, sebagai bahan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut bidang-bidang tersebut.

Jika kita perhatikan keberadaan berbagai lembaga yang bersifat Tripartit tersebut, kita mencatat adanya beberapa perbedaan gradual seperti berikut:

Kategori pertama ialah Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional/Daerah dan Lembaga Kerjasama Tripartit Sektoral Nasional/Daerah. Keduaduanya merupakan jalur utama dan jalur pendukung yang bersifat sektoral, dimana masing-masing unsurnya, unsur Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah sedikit banyak memiliki sifat independent (kebebasan) dalam menyalurkan aspirasi organisasi yang diwakilinya, yang satu tidak di bawah yang lain. Dengan demikian musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan benar-benar merupakan interaksi serta tukar pendapat yang berkadar mandiri, dimana yang satu harus menghormati yang lain dan sebaliknya. Sebab di dalam proses musyawarah itulah sebenarnya amanat dari masing-masing organisasi yang mewakili kepentingan masing-masing anggota itu diekspresikan dan oleh karenanya perlu dipadukan oleh ketiga unsur bersama-sama. Oleh karena itu kedudukan kedua lembaga ini sangat sentral. Keputusan-keputusan perlu diperhitungkan oleh lembaga-lembaga Tripartit yang lain bahkan oleh Pemerintah sekalipun.

Kategori yang kedua ialah *Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan* Pusat dan Daerah. Panitya ini memperoleh wewenang berdasarkan Undang-undang, ialah Undang-undang No. 22 tahun 1957. Karena itu jika Panitya ini memiliki hak untuk mengambil keputusan yang mengikat mengenai masalah perselisihan perburuhan, maka wewenang itu sematamata karena kuasa atau atas dasar Undang-undang. Namun demikian keanggotaannya yang bersifat Tripartit sudah barang tentu diharapkan, bahwa dalam memutuskan perkara-perkara perselisihan perburuhan, perpaduan aspirasi dari masing-masing unsur bisa tercermin dalam putusan-putusan yang diambilnya. Karena itu sifat musyawarah untuk mencapai mufakat diharapkan pula menjiwai proses pengambilan keputusan di dalam sidang-sidang P4P maupun P4D di berbagai tempat. Jika hal-hal di atas ini bisa terlaksana dengan mulus, maka operasionalisasi Pancasila di bidang hubungan ketenagakerjaan setapak demi setapak akan terwujud.

Kategori yang ketiga ialah yang menyangkut Fungsi dan tugas *Dewan Penelitian Pengupahan, Dewan Keselamatan* dan *Kesehatan Kerja, Dewan Produktivitas,* dan *Dewan Latihan Kerja*. Keempat Dewan ini pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga yang memberi pertimbangan dan saran kepada Pemerintah, baik diminta maupun tidak. Sekalipun susunannya terdiri atas unsur-unsur Tripartit namun tugasnya sebagai lembaga pertimbangan kepada Pemerintah sudah barang tentu terbatas wewenangnya. Namun demikian susunannya yang bersifat Tripartit diharapkan, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan kepada Pemerintah telah menjembatani dan merangkum keinginan-keinginan dan pandangan-pandangan dari ketiga unsur Tripartit tersebut.

Lembaga kerjasama Bipartit kita temukan di Perusahaan atau Unit kerja. Lembaga Kerjasama yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pekerja dan Pengusaha itu pada dasarnya bertugas untuk menjaga ketenangan kerja dan usaha. Dia menampung berbagai keluhan-keluhan baik yang datang dari fihak Pekerja maupun yang datang dari Pengusaha dan berusaha untuk menanganinya/menyelesaikannya. Dia berusaha untuk menjamin adanya disiplin dan motivasi kerja, tetapi dia juga bertugas dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan adanya lembaga Kerjasama Bipartit ini diharapkan segala permasalahan yang timbul di tingkat Perusahaan dan Unit Kerja dapat diatasi secara dini sebelum masalah tersebut berlarut-larut menjadi masalah perselisihan perburuhan. Proses tukar pendapat, tukar informasi, sikap saling memahami kepentingan yang berbeda sangat diperlukan, sehingga musyawarah yang dilakukan dapat berjalan dengan sebaikbaiknya. Dengan demikian keseluruhan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Bipartit itu benar-benar menjadi sarana yang ampuh dalam upaya mewujudkan jiwa Pancasila dalam hubungan ketenagakerjaan.□

Digitized by Google

Oleh : Endi Rukmo

Kongres PKC Ke- XIII : Pengokohan Kemenangan Kelompok Pembaharu

Di Beijing baru saja berlangsung Kongres Nasional Partai Komunis Cina (PKC) ke- XIII (tanggal 25 Oktober — 3 Nopember 1987). Banyak pengamat Cina mengikutinya dengan cermat dan bahkan tidak sedikit yang meramal apa yang akan terjadi atau yang akan diputuskan oleh kongres itu. Meskipun pada waktu tulisan ini dibuat kongres itu belum ditutup, hasil terpenting sudah diputuskan pada tanggal 1 Nopember 1987. Terdapat beberapa kesepakatan yang perlu dicatat di sini antara lain: diputuskannya Zhao Ziyang untuk menjabat sebagai Sekjen PKC yang baru menggantikan rekannya Hu Yaobang; mundurnya tokoh pembaharu utama, Deng Xiaoping dari seluruh jabatan yang dipegangnya dalam PKC dan munculnya muka-muka baru yang relatif lebih muda dari tokoh-tokoh sebelumnya dalam Komite Sentral. Demi efisiensi lembaga ini juga disepakati penciutan anggota dari 209 menjadi hanya 175 orang saja.

Diangkatnya Zhao Ziyang sebagai Sekjen partai, berarti bahwa ia kini menjadi orang terpenting dan tak tersaingi di PKC. Hal itu mungkin yang cukup melegakan Deng Xiaoping sehingga keputusannya untuk mundur dari semua jabatannya dalam PKC semakin teguh. Ini semua merupakan kemenangan strategi yang selama ini diterapkan Deng yang sudah banyak makan garam dan jatuh bangun dalam perjuangan memenangkan gagasan-gagasan kelompok pembaharu di Cina. Dipegangnya jabatan tertinggi oleh Zhao Ziyang itu jelas akan memperlicin usaha kelompok pembaharu dalam melanjutkan program-program modernisasi yang dimulai pada tahun 1978.

Sejak 1956

Kalau perkembangan di Cina diikuti secara cermat, sebenarnya sudah bisa dilihat ke mana arah Kongres PKC ke-XIII itu. Banyaknya ramalan yang dilontarkan mungkin disebabkan oleh terlalu seringnya pergolakan politik yang melanda negeri itu, terutama sejak dilangsungkannya Kongres Nasional PKC ke- VIII dalam bulan September 1956. Pada kongres itu, kedudukan tokoh Cina tertinggi pada waktu itu, Mao Zedong, mulai goncang. Kongres memutuskan untuk menghapus semua yang berkenaan dengan Mao Zedong dan pemikirannya. Apa-apa yang diputuskan kongres pada waktu itu merupakan kemenangan kelompok pembaharu di bawah pimpinan Liu Shaoqi dan Zhou Enlai. Sejak kongres itu berakhir kekuasaan Mao Zedong dibatasi dan bahkan dalam tahun 1959 kedudukannya sebagai ketua PKC digantikan oleh Liu Shaoqi. Sebaliknya bagi Deng, kongres itu merupakan awal keterlibatannya dalam pengambilan keputusan lembaga tertinggi partai.

Hanya karena pengaruh kharisma yang tinggi sebagai pemimpin revolusi, Mao Zedong mampu bertahan dan bahkan mendapatkan banyak pengikut dalam melontarkan kritikan terhadap kelompok Liu. Pada suatu pertemuan Komite Sentral PKC bulan September 1962 Mao berhasil mewujudkan prakarsa tentang "kampanye pendidikan sosialis". Dengan dalih membersihkan unsur-unsur revisionis, ia melancarkan kampanye pembersihan terhadap para penentangnya. Kedudukan Mao semakin kuat setelah pertemuan Komite Tetap Politbiro (September — Oktober 1965) menerima rancangan Mao mengenai kampanye anti pemikiran borjuis yang reaksioner dalam partai. Dengan kata lain, Mao berhasil menggunakan kembali prinsip-prinsip dasar gerakan revolusi. Gagasan-gagasan Mao itu diterima dan didukung oleh kaum muda yang kemudian diorganisir menjadi Pengawal Merah yang merupakan kekuatan inti Gerakan Revolusi Kebudayaan (1966-1967). Lebih dari itu, Mao berhasil pula memperkuat kelompoknya, terutama dengan munculnya kelompok Revolusi Kebudayaan cabang Shanghai yang diketuai oleh isterinya sendiri, Ny. Jiang Qing dan

Menghapus pemikiran Mao Zedong

tiga rekannya, Ya Wanyuan, Wang Hungwen dan Zhang Chungqiao. Kelompok ini, yang kemudian dikenal sebagai 'Empat Sekawan', berhasil masuk ke dalam keanggotaan lembaga tertinggi partai, Politbiro, berkat pengaruh Mao.

Ketika kelompok Mao itu melancarkan serangannya terhadap kelompok pembaharu yang dicap sebagai revisionis, situasi politik di Cina menjadi kacau, sehingga sekolah-sekolah ditutup pada bulan Juni 1966. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pengawal Merah untuk menyerang apa saja yang dianggap menyimpang dari pemikiran Mao. Pada saat itulah sebagian besar anggota kelompok pembaharu ditangkapi oleh Pengawal Merah yang semakin banyak pendukungnya tidak saja karena sekolah-sekolah ditutup, tetapi juga karena suasana konflik antara Cina dan Uni Soviet semakin memanas, sehingga orang-orang yang mendukung kelompok pembaharu semakin dibenci karena dianggap pro Soviet. Begitu gencarnya serangan Pengawal Merah ini sehingga kecuali Zhou Enlai, semua tokoh pembaharu berhasil dibersihkan.

Gerakan Revolusi Kebudayaan ini memuncak pada bulan Januari 1967, ketika Komite Pusat gerakan itu memerintahkan Pengawal Merah mengambil-alih kekuasaan partai. Mereka lalu bergerak ke seluruh kota di Cina dan menduduki kantor-kantor PKC dan mengusir para pejabat partai setempat. Gerakan ini menjadi kacau dan tak terkendali sehingga akhirnya mengundang Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) turun tangan. Tetapi kedatangan mereka itu terlambat karena semua infrastruktur pemerintahan dan partai sudah hancur. Tentara sendiri terpecah-pecah akibat pro dan kontra pada Pengawal Merah yang diperintahkan Beijing untuk menangkapi tentara yang dianggap mengikuti "jalan kapitalis," sehingga bentrokan fisik antara mereka tidak dapat dihindarkan. Karena kekacauan semakin tidak dapat diatasi, akhirnya sebagai Ketua Gerakan Revolusi Kebudayaan Mao memutuskan untuk membubarkan Pengawal Merah pada bulan Juli 1968 dengan alasan mereka gagal mengemban misi dan memerintahkan TPR untuk melaksanakan pembentukan Komite Revolusi di seluruh propinsi. Karena TPR yang diserahi tugas, maka wajar kalau keanggotaan Komite itu didominasi oleh kaum militer.

Dominasi militer dalam komite ini membuka peluang bagi Lin Biao untuk mencalonkan diri sebagai pengganti Mao. Namanya naik pesat setelah ia menjabat Menteri Pertahanan dan berhasil membawa TPR ke era modern dengan suksesnya percobaan nuklir pertama tahun 1964 meskipun tanpa bantuan Soviet. Percobaan ini diteruskan dan sampai bulan Mei 1966 Cina telah berhasil melakukan tiga kali percobaan. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebanggaan nasional rakyat Cina terutama dalam usahanya menandingi Uni Soviet. Ketenaran Lin Biao memuncak setelah Revolusi Kebudayaan dinyatakan berhenti. Bahkan dia dianggap sebagai pemimpin kedua Cina setelah Ketua Mao dan sebagai calon penggantinya pada Kongres Nasional PKC ke-IX yang berlangsung pada bulan April 1969.

Mao dan Zhou Enlai menafsirkan semakin meningkatnya dominasi militer dan terutama pengaruh Lin Biao itu sebagai ancaman atas kedudukan mereka. Oleh karenanya, dalam tahun-tahun awal 1970-an dimulailah usaha-usaha untuk mendepak Lin. Untuk itu Mao sendiri melakukan lawatan ke daerah-daerah dan bertemu dengan para kepala daerah militer

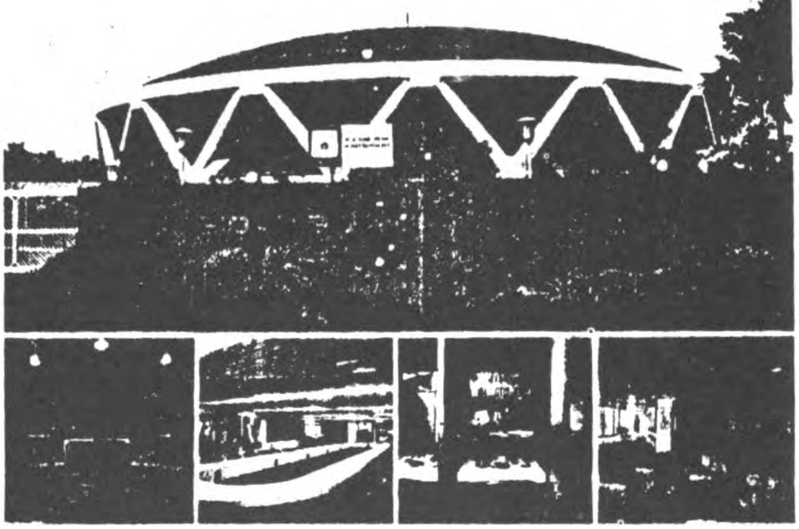

BALAI SIDANG JAKARTA

Di gedung yang megah, terletak antara jantung Ibu kota dengan daerah elite Kebayoran Baru, adalah Balai Sidang Jakarta tempat prestise dan prestasi anda.

Balai Sidang Jakarta menyediakan fasilitas-fasilitas bukan hanya untuk Rapat, Konperensi, Konggres dan Seminar, tetapi juga untuk Pameran, Pertunjukan, Pertemuan, Kontes Kecantikan, Resepsi Perkawinan, maupun Konser.

Selain dilengkapi dengan alat-alat modern dan lengkap, juga ruangan-ruangan berbagai kapasitas dari mulai 100, 150, 200, 800, 1600 dan 4000 tempat duduk.

Beberapa fasilitas di Balai Sidang Jakarta, antara lain :

- Gallery yang besar dengan kapasitas 2650 tempat duduk.
- VIP Arena 752 tempat duduk dan VIP Tribune 600 tempat duduk.
- Tiga ruangan Rapat untuk 200,100 dan 200 tempat duduk.
- Ruangan-ruangan untuk Sidang Komisi.
- Lobby-lobby yang sangat ideal untuk Pameran.
- Kafetaria dengan kapasitas 150 tempat duduk.

Demi sukses anda, kami menunggu anda di Badan Pengelola Balai Sidang Jakarta, Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Telpon : 584750 - 584755 ; Telex : 46345

Digitized by Google

untuk memeriksa loyalitas mereka. Setelah terjadi usaha kudeta militer yang melibatkan anaknya, pada bulan September 1971 Lin Biao dan isterinya berusaha lari ke luar Cina, tetapi pesawat yang mereka tumpangi jatuh dan menewaskan semua penumpangnya. Penyebab kematian Lin itu sampai sekarang masih misterius. Ada yang mengatakan bahwa pesawat yang ditumpanginya itu ditembak jatuh. Tetapi ada pula sumber lain yang mengatakan bahwa di dalam pesawat itu tidak terdapat Lin Biao.

Peluang Deng Xiaoping

Meninggalnya Lin Biao itu membuka peluang kelompok pembaharu untuk tampil kembali. Pada kongres PKC ke- X yang diselenggarakan pada bulan Agustus 1973, Zhou Enlai berhasil merehabilitir Deng Xiaoping, meskipun mendapat tantangan dari para pendukung Revolusi Kebudayaan yang pada waktu itu masih cukup kuat. Dengan dukungan Deng dan kawan-kawan dalam Kongres Majelis Rakyat Nasional ke- IV bulan Januari 1975, Zhou melontarkan kembali gagasannya tentang modernisasi.

Memang, setelah Zhou Enlai meninggal dalam bulan Januari 1976 Deng terpaksa keluar lagi dari kepengurusan partai, karena dituduh bertanggungjawab atas pengerahan massa demonstran di Lapangan Tiananmen pada bulan April 1976 untuk menghormati meninggalnya Zhou Enlai. Tetapi kekuatan kelompok pembaharu yang nampaknya mulai mendapat banyak dukungan, berhasil mengangkatnya kembali pada Konperensi Kerja Komite Pusat PKC yang berlangsung bulan Maret 1977. Sidang Pleno ke- 3 Kongres Komite PKC ke-X yang mengolah hasil Konperensi Kerja itu bahkan memutuskan untuk mengangkat Hua Guofeng menjadi Ketua Partai dan Ketua Komisi Militer Komite Pusat PKC, dan Deng Xiaoping menjadi Wakil Ketua I PKC, Wakil Ketua Komisi Militer Komite Pusat, Wakil PM dan Ketua Staf Umum TPR. Di samping itu sidang juga sepakat untuk menyatakan bahwa Empat Sekawan adalah musuh bersama sehingga mereka dipecat untuk selamanya dari PKC. Oleh sebab itu kelompok pembaharu semakin kuat dan sebaliknya kelompok Mao (tanpa Mao karena meninggal bulan September 1976) semakin terdesak.

Kongres PKC ke- XI yang berlangsung dalam bulan September 1977, atau tepatnya Sidang ke-3 Komite Sentral Kongres PKC ke-XI dalam bulan Desember 1978, adalah awal kekuasaan kelompok pembaharu. Sidang sepakat bahwa Pemerintah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi secara drastis dan timbulnya pergolakan politik yang tak kunjung padam. Untuk itu sidang sepakat untuk mengadakan koreksi serta penyesuaian dan bahkan telah merumuskan stratregi yang akan ditempuhnya.

Lebih dari itu, di dalam Politbiro, kelompok pembaharu berhasil memasukkan Hu Yaobang dan Zhao Ziyang dan mendepak orang-orang yang sangat pro Mao dan Revolusi Kebudayaannya seperti Wu De, Ji Dengkui, Chen Xilian, Ni Zhinfu dan Wang Dongxing. Deng akhirnya juga berhasil mendepak Hua Guofeng dari Politbiro dan pemerintahan pada bulan September 1980. Untuk memperkuat kedudukannya, Deng memasukkan lebih banyak lagi orang-orangnya, seperti Chen Yun, Bo Yibo dan Yao Yilin, ke dalam Politbiro dan menjadi wakil Perdana Menteri.

Kebijaksanaan Modernisasi

Setelah berhasil mengukuhkan kedudukan politiknya, Deng dan kawan-kawannya mulai melontarkan kritik-kritik dan pernyataan anti Revolusi Kebudayaan yang memang merupakan pengalaman terpahit bagi kelompok pembaharu. Mereka juga segera menyiapkan program pelaksanaan Empat modernisasi seperti yang pernah dilontarkan oleh Zhou Enlai. Untuk itu Hu Yaobang diserahi tugas membenahi urusan kepartaian dan Zhao Ziyang urusan pemerintahan menggantikan Hua Guofeng.

Kebijakan modernisasi itu nampak membawa dampak pada kehidupan rakyat di pedesaan, manajemen perindustrian maupun kehidupan politik. Sedikit demi sedikit rakyat mulai mengubah pola hidup mereka dari hanya membicarakan soal-soal ideologi saja dan kemana-mana membawa buku merah yang berisi ajaran Mao kepada bagaimana berjuang meningkatkan taraf hidup mereka.

Pemerintah baru juga berhasil sedikit demi sedikit memenuhi tuntutan yang makin populer di kalangan rakyat, yaitu tuntutan demokrasi. Ditampungnya aspirasi rakyat itu terungkap dari pembukaan kembali Kongres delapan organisasi politik yang dibubarkan pada masa Revolusi Kebudayaan, munculnya poster-poster yang mengeritik kebijakan pemerintah atau partai di dinding-dinding demokrasi dan dikabulkannya tuntutan mahasiswa untuk memiliki kembali gedung-gedung mereka yang diduduki militer sejak tahun 1972.

Sementara itu sistem baru mulai dilaksanakan di sektor pertanian pedesaan. Dalam sistem ini cara kuota mulai

Pemerintah memenuhi tuntutan demokrasi

Digitized by Google

diterapkan. Para petani diwajibkan memenuhi jatah produksi yang akan dibeli oleh pemerintah dan sisanya boleh dijual di pasar. Untuk mendukung sistem pasar ini pemerintah mengijinkan usaha-usaha swasta dibuka kembali. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan sebelum tahun 1957 yang berusaha membasmi usaha swasta dan menasionalisasi sekitar 9 juta perusahaan swasta. Usaha pemerintah di bidang pembangunan perekonomian ini meningkatkan hasil pertanian rata-rata 6,5 persen per tahun. Keberhasilan-keberhasilan inilah yang semakin meningkatkan dukungan rakyat kepada pemerintah.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, Deng dan kawan-kawannya tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Secara bertahap dan hati-hati mereka melaksanakan pembaharuan. Mereka juga terbuka terhadap kritik-kritik. Sebagai contoh, pada Kongres PKC ke-XII yang berlangsung bulan September 1982, koreksi-koreksi dilakukan berdasarkan kritik-kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak. Koreksi penting yang dilakukan misalnya adalah penundaan pembangunan di beberapa sektor industri berat dan meningkatkan pembangunan industri ringan yang lebih banyak hubungannya dengan sektor pertanian.

Pendekatan Bersahabat

Sementara itu perekrutan kader-kader baru juga terus dilakukan tanpa menyakitkan hati tokoh-tokoh tua yang diberhentikan karena sistem pensiun mulai diterapkan. Bahkan tokoh-tokoh revolusi dan teman-teman dekat Deng tidak langsung dipensiun, tetapi digeser bertahap yaitu dengan dibentuknya Komisi Penasehat Pusat. Pada Kongres PKC ke- XIII, sekali lagi Deng memperlihatkan keunggulannya dalam melakukan pergeseran-pergeseran. Bahkan dengan merelakan dirinya mundur, Deng berhasil menarik mundur tokoh-tokoh tua seangkatannya yang selama ini dianggap sebagai penghalang pembaharuan seperti Chen Yun, Li Xiannian, Peng Zhen, Deng Liqun, Yang Deshi dan Yu Quili. Usaha bertahap Deng ini membawa hasil, misalnya, dengan diangkatnya 175 anggota Komisi Sentral yang rata-rata berusia 55 tahun.

Pendekatan bersahabat yang dilakukan oleh kelompok pembaharu ini nampaknya berhasil menciptakan stabilitas politik. Setelah aksi de-

Cina lebih terbuka

monstrasi mahasiswa pada akhir tahun 1986 dan awal tahun 1987 ini yang mengakibatkan jatuhnya Hu Yaobang dari jabatan Sekjen PKC, misalnya, tidak timbul suatu kampanye balik yang menyerang pemikiran liberal borjuis seperti yang pernah terjadi dalam pertengahan tahun 1960-an ketika Liu Shaoqi dan Zhou Enlai melontarkan gagasan-gagasan modernisasinya. Memang terdapat kritik-kritik dari apa yang disebut "kelompok konservatif", tetapi kelompok ini bukanlah kelompok pro Mao. Mereka ini sebenarnya sepaham dengan Deng, hanya tidak menyetujui cara Hu Yaobang yang dianggap sudah terlalu menyimpang dari prinsip-prinsip partai.

Dari apa yang dihasilkan pada kongres yang terakhir itu, nampak bahwa kelompok pembaharu tidak ingin menggunakan lagi apa yang disebut cara pembersihan. Hu Yaobang, meskipun pernah salah tetap diangkat menjadi anggota Komite Sentral, demikian pula Hua Guofeng yang dianggap tokoh pewaris Mao Zedong.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa di Cina sedang terjadi perubahan-perubahan. Pernyataan Zhao Ziyang pada pembukaan Kongres PKC ke- XIII mengungkapkan bahwa sikap para pemimpin Cina di dalam partai sudah berubah. Tanpa ragu-ragu Zhao mendesak agar pemerintah mempercepat pembaharuan dan mengritik habis pola berpikir yang kaku dan berakar pada masa lalu. Dari pidato itu saja sudah dapat diterka bahwa kelompok pembaharu semakin mantap posisinya dan diterima oleh rakyat maupun anggota partai. Tak ada kritik atau sanggahan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Zhao dipilih menjadi tokoh tertinggi dalam PKC, yaitu Sekjen partai. Hal ini bisa terjadi karena Deng dan kawan-kawan berani mengadakan koreksi dan menerima kritik dari pihak lain.

Bagi Zhao sendiri perubahan itu merupakan peluang baik untuk melontarkan ide-idenya. Terlebih-lebih setelah dia terpilih menjadi sekjen partai, dapat dipastikan ia akan melaksanakan apa-apa yang diucapkan dalam pidatonya seperti mempercepat pelaksanaan pembaharuan, meningkatkan efisiensi atau kebijakan pintu terbuka.

Ide atau kebijakan Zhao itu akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina. Yang jelas ide Zhao itu sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Gorbachev di Uni Soviet dan juga pasti diterima oleh negara-negara Barat yang selalu mengharap agar Cina lebih terbuka. Untuk memperoleh bantuan bagi modernisasinya, Cina akan berusaha meningkatkan hubungan baiknya baik dengan negara-negara komunis khususnya Uni Soviet, maupun dengan negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan Jepang. Meskipun pada dasarnya Cina akan tetap memegang teguh prinsip-prinsip partai, saling ketergantungan yang semakin meningkat dalam masyarakat internasional dewasa ini memaksa negara itu mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Hal ini sudah disadari oleh Zhao dan terungkap di dalam pidatonya. Oleh karena itu hasil kongres ke- XIII ini diharapkan akan membawa perubahan-perubahan lebih lanjut di Cina yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas di kawasan Asia Pasifik di mana kita juga berada.☐

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA INTERNASIONAL

VIETNAM KIRIM PASUKAN

Vietnam mengirimkan 1.500 tentara lagi ke Kampuchea antara Juni — Agustus lalu.

Ini mengesankan pengumuman Hanoi untuk menarik sebagian pasukannya Nopember depan hanya 'tipu daya', kata seorang jurubicara militer Thailand, akhir Oktober lalu.

Pasukan Vietnam di Kampuchea sekarang diperkirakan sekitar 140.000 orang, untuk mendukung pemerintah pro Vietnam di Phnom Penh melawan koalisi tiga kelompok perlawanan, yang berkekuatan 50.000 gerilyawan.

Vietnam menyerbu Kampuchea Desember 1978. Sejak itu diperkirakan 170.000 tentaranya ditempatkan di sana.

RAMAI-RAMAI MUNDUR

Ada kejutan baru di Beijing setelah Kongres Partai Komunis Cina XIII yang berakhir awal bulan ini. Pemimpin tertinggi Cina, Deng Xiaoping diikuti sejumlah tokoh penting lainnya yakni Presiden Li Ciannian (82), ahli ekonomi Chen Yun (82) dan Ketua Kongres Rakyat Nasional Peng Zhen (85) mengundurkan diri dari pentas politik.

Deng (83) adalah tokoh pembaharu Cina setelah Mao Zedong. Ia adalah tokoh Politbiro, Komite Sentral, Komisi Penasehat Partai Komunis Cina dan salah seorang di antara lima anggota Komite Tetap, suatu badan pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang memberikan kata akhir pada setiap permasalahan di negara berpenduduk lebih dari satu milyar tersebut.

Pengunduran diri Deng dan rekan-rekannya tampaknya bertujuan memberikan kesempatan kepada PM Zhao Ziyang, anak didiknya yang lebih muda, lebih berperan dalam partai maupun pemerintahan.

MENJELANG KTT ADIKUASA

Uni Soviet mengatakan pihaknya kini sudah mempunyai rencana yang mantap untuk menyongsong pertemuan puncak dua negara adikuasa AS-US sebelum akhir tahun ini.

Dalam KTT mendatang itu, kedua negara adikuasa diharapkan menandatangani sejumlah perjanjian, termasuk perjanjian pembatasan rudal jarak sedang.

Jubir Kemlu Soviet Boris Pyadyshev mengatakan di Moskow, akhir Oktober, pembahasan di KTT juga akan mencakup cara-cara untuk membatasi senjata rudal jarak jauh.

Akan tetapi kapan tepatnya KTT itu diselenggarakan belum dicapai kesepakatan, setelah pembicaraan mengenai hal itu di Kremlin antara Menlu AS George Shultz, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan Menlu Shevardnadze minggu lalu gagal.

PENGGANTI NAKASONE

Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone, hari Jum'at 30 Oktober secara resmi melepaskan jabatannya sebagai ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa.

Tindakannya itu, untuk melicinkan jalan bagi penyerahan jabatan PM kepada bekas Menteri Keuangan Takeshita.

Takeshita, ketua kelompok terbesar LDP, secara resmi diangkat sebagai ketua LDP pada suatu konvensi hari itu pula.

RAMAI-RAMAI DITANGKAP

Pemerintah Malaysia setidaknya telah menangkap 10.000 pendatang gelap asal Indonesia dan telah memulangkan lebih dari 9000 di antaranya dalam tahun ini.

Masalah ini sempat memusingkan negara tetangga tersebut, sebab ternyata pendatang gelap yang datang dari Indonesia, Thailand, Birma dan Filipina tak henti-hentinya mengalir ke negerinya.

Gelombang penangkapan tidak hanya tertuju kepada para pendatang gelap, karena sampai akhir Oktober Malaysia setidaknya telah menahan lebih dari 90 orang untuk apa yang disebut 'usaha mencegah ketegangan rasialis Cina-Melayu' di negeri itu.

Gelombang penangkapan bermotif politik ini justru mendapat perhatian besar karena di negara berpenduduk 16 juta itu terdiri atas ras Melayu, Cina dan India.

OPOSISI KORSEL PECAH

Partai oposisi Korea Selatan menghadapi perpecahan karena salah seorang tokoh utamanya, Kim Dae-Jung bertekad akan meninggalkan partai itu untuk membentuk partai baru yang mendukung pencalonannya sebagai presiden menyaingi Kim Young-Sam, seorang tokoh utama partai oposisi lainnya.

Gerakan pembentukan partai baru ini memperuncing pertikaian antara kedua Kim, sehingga pendukung oposisi mencemaskan pertikaian tersebut justru membuka peluang bagi kemenangan Roh Tae-Woo, calon presiden dari partai partai yang memerintah dalam pemilihan langsung presiden Korea Selatan Desember depan.

Sementara itu, di tengah pertikaian antar tokoh partai oposisi, 73 mahasiswa Korea Selatan ditahan sehubungan dengan demonstrasi anti pemerintah di Seoul. AK

Digitized by Google

Maria Sugiharto

SANG BIMA

DEWARUCI

Angkatan Laut Republik Indonesia memiliki Kapal latih yang diberi nama sakral, *Dewaruci*. Kapal latih ini dalam sejarah Angkatan Laut RI telah banyak mengarungi samudera di dunia dalam mengemban tugas sebagai Baita latih bagi para calon perwira Angkatan Laut. Pembabtisan nama tersebut terasa tepat, meskipun bila dipandang dari segi size atau ukurannya, tidak berada di dalam kategori sebagai kapal induk. Bahkan pernah dinamakan *sloop* (kapal pengiring yang kecil) oleh beberapa perwira bahkan Kapten Kapal Induk Inggris yang suatu kali datang di Indonesia. Tentu saja para pemilik Dewaruci menjadi berang, tetapi memang demikianlah pandangan seseorang yang memegang kapal yang besar sekali, karena secara size tadi, kapal induk tersebut dapat memuat berpuluh kapal semacam Dewaruci. Namun, size yang tidak besar ini tidak mengurangi bobot pengartiannya serta kekuatannya, karena kenyataan bahwa Dewaruci telah menyeberangi samudera di dunia ini bahkan bisa dipameokan seperti pameo orang Inggris di Laut ialah *Britania Rule The Waves*. (Inggris Raya Menguasai Seluruh Samudera), karena kita dapat mengatakan bahwa *Dewaruci Rule The Waves*.

Nama yang sakral itu memang tidak sia-sia, karena memberikan semacam *amulet* (jimat) kepada kelestarian Dewaruci beserta anak buahnya, yang adalah para kadet Angkatan Laut RI, bahkan pada suatu ketika pelayaran bahari mengelilingi dunia beberapa tahun yang lalu, karena terpaan ombak yang besar, arca lambang Dewaruci pecah... dan kapal tetap saja tangguh. Seperti mendapatkan berkah dari pengorbanan sang Dewaruci.

Memang demikian, karena Dewaruci adalah Dewanya sang Wrekudara. Ruci berarti halus, dan Dewa adalah dewa atau Pepunden (yang didewakan). Dewaruci adalah *halusnya* Wrekudara. Dalam buku mengenai Dewaruci diriwayatkan bahwa sang Wrekudara pada waktu itu sedang berguru ilmu kemanusiaan pada Pendeta Durna sehingga dapat menemukan apa yang dimaksudkan ialah bertemu

Dewaruci, yang pada hakekatnya adalah *kehalusan* Sang Wrekudara sendiri, yang juga berarti kepribadiannya, yang senyata-nyatanya. Maka di dalam penggambaran Dewaruci selalu dilukis Wrekudara dalam bentuk kecil, karena yang dimaksud adalah kehalusan Wrekudara.

Pertemuan Wrekudara atau Bima dengan sang Dewaruci, diceritakan demikian. Sudah menjadi garis sejarah bahwa keluarga Kurawa tidak senang dengan keluarga Pendawa, sehingga selalu saja ada usaha untuk menyingkirkan. Karena sang Bima yang menjadi benteng keluarga, maka dia inilah yang selalu menjadi sasaran pertama kali, sebab bila sang Bima hancur, seluruh keluarga akan hancur, demikian pendapat Kurawa.

Usaha ini banyak didalangi oleh sang mahapatih Sengkuni, dengan cara membujuk Pandita Durna untuk menguji kekuatan Bima terhadap gurunya.

Oleh Durna, Bima disuruh mencari air suci yang bernama *tirta amerta* yang letaknya di hutan Tikbrasara di bawah gunung Candradimuka di wilayah Gadamadana. Sebagai seorang *Ksatria* (tanda kejantanan dan keberanian) Bima tidak sedikitpun menaruh syak. Dengan ikhlas dia turuti perintah sang guru, meskipun dia tahu bahwa di tempat itu penuh dengan marabahaya, serta untuk mendapatkan tirta amerta banyak sekali tantangannya. Ketika sampai di gunung Candradimuka, muncullah dari kawahnya dua raksasa yang menakutkan menghadang Bima. Rukmaka dan Rukmakala menghadang serta mencegahnya untuk mendapatkan air suci tersebut. Bagi seorang Bima, lebih baik *mati* dari pada tidak patuh kepada sang guru. Dalam peperangan yang terjadi, dimenangkan oleh Bima. Ini semua sebenarnya hanya merupakan percobaan serta ujian yang berat bagi Ksatria seperti sang Bima. Dengan kematian dua Raksasa tersebut, muncullah Dewa Bayu dan Indra. Keduanya malahan menanyakan di mana letak air suci tirta amerta itu. Bima pun dengan setia kembali kepada gurunya sang Durna, menanyakan letak sebenarnya air suci itu. Durna sebagai guru (berhak menguji tentu saja) mengatakan bahwa letak air suci itu telah pindah ialah di pusat samudera raya. Tanpa pertimbangan lebih lanjut Bima pun berangkat menempuh ombak samudera untuk mencari tirta amerta. Disana dia diserang oleh seekor naga yang besar serta melilitnya. Ketika naga dapat dikalahkan, muncullah makhluk kecil yang mirip sekali dengan dirinya. Itulah *Dewaruci*. Pertemuan antara Bima dan Dewaruci menghanyutkannya ke alam kesempurnaan. Masuklah Bima ke dalam tubuh Dewaruci, dan di situ Bima mendapatkan serta memahami seluruh kehidupan, dan Dewaruci pun memberikan wejangan-wejangan tentang makna kehidupan manusia. Di situ, karena kesengsem oleh Dewaruci, Bima tidak mau pulang. Hal ini tidak diperkenankan Dewaruci, dan Bima pun harus pulang ke mayapada, karena tugas masih banyak bagi dirinya.

Babad Alas Mertani

Dalam tulisan terdahulu mengenai sang Bima, telah disinggung tentang prestasi Bima dalam mengayahi serta menjadi panutan keluarganya serta

Digitized by Google

panutan masyarakat karena keksatria-annya, kejujurannya, juga kesetiaan-nya. Demikian pula di dalam seri Babad Alas Mertani diperlihatkan ten-tang betapa sang Bima banyak berjasa di dalam menjalani kehidupan di arca-pada, atau kehidupan manusiawi di kalangan masyarakat di dunia.

Seperti diceritakan di dalam *Bale Sigolo-golo,* keluarga Pendawa lolos dari percobaan pembunuhan dengan membakar pondokan Pandawa oleh Kurawa. Alkisah, Pandawapun ber-partisipasi di dalam sayembara Pan-dala — sayembara memperebutkan se-orang Dewi (Dropadi, Putri Prabu Dropada) dan disitu para kontestan harus menghadapi Patih Gondomono si jago berkelahi yang sakti dan me-miliki keahlian berkelahi luar biasa. Di dalam perang tanding, Bimalah se-bagai wakil keluarga Pandawa yang dapat mengalahkan Patih Gondo-mono. Kemenangan Pandawa ini membuka tabir penyamaran mereka sebagai Brahmana, dan pihak Kurawa mencium hal ini. Karena perkiraan matinya Pandawa, Duryudana (Suyu-dana) pun diangkat menjadi Raja di Hastina, Yamawidura diutus oleh Prabu Duryudana untuk menjemput Pandawa pulang ke Hastina. Pandawa sebenarnya kecewa melihat siasat Seng-kuni yang akhirnya menobatkan Duryu-dana sebagai raja di Hastina. Di sini, sebagaimana watak Bima yang impul-sif disebabkan karena kejujurannya, marah dan mengamuk. Kakaknya, Yudistira meredakannya, dan atas usul para pinisepuh Pandawa diberi tanah di hutan Mertani untuk diusahakan. Bukan pekerjaan yang sederhana, karena hutan Martani adalah *alas gung liwang liwung* — hutan belantara — yang penuh dengan onak dan duri serta angker karena penuh dengan makhluk halus yang ganas, selain merupakan kerajaan binatang buas serta bermukimnya para raksasa. Bima, dan sang Bima lagi yang me-melopori pembabadan (pembersihan) hutan Martani, dengan gagah berani menghadapi segala tantangan yang berupa bermacam-macam gangguan yang sudah disebutkan itu. Setelah Pandawa berhasil menaklukkan segala rintangan yang ada di dalam belantara itu, dibangunlah kerajaan yang akan mereka tinggali. Pembangunan keraja-an ini tidak dilaksanakan sendiri, te-tapi seperti layaknya sebuah negara yang membangun, mendapatkan ban-tuan dari fihak yang bersimpati. Di-dalam hal pembangunan negeri bekas hutan Mertani ini, bantuan datang dari

Asura Maya yang adalah cucu/cicit Batara Brahma. Asura Maya gigih membantu Pandawa karena pada suatu saat dia pernah ditolong oleh Arjuna, satria penengah Pandawa. Se-telah siap, negeri ini dinamakan *Indra-prasta,* karena keindahannya mirip Kahyangan.

Bima Suci

Setelah Bima mendapatkan penge-tahuan tentang kesempurnaan hidup (Dewaruci), dia berniat untuk melaku-kan *penebusan* (ruwatan) untuk ayah-nya, Pandu. Niat ini timbul karena dia mendengar bahwa Pandu tidak di-masukkan ke Surga oleh para Dewa. Perlakuan para Dewa yang demikian tidak dapat diterima oleh Bima dan dia ingin menuntut agar ayahandanya segera diangkat dari neraka dan di-masukkan ke surga. Usaha ini tidak terlepas dari sebuah keprihatinan yang mendalam. Bima pun bertapa di sumur Jalatunda. Di pertapaan ter-sebut Bima ditemui saudara tunggal-nya (tunggal Bayu) Hanoman. Di-ingatkan kepada Bima bahwa cara yang ia tempuh itu akan membuat para Dewa marah serta menyebabkan kematiannya.

Kurawapun menjadi marah ketika mendengar bahwa Bima bertapa di Jalatunda, dan tidak segan-segan Kurawa menyerang Jalatunda. Masa-lah yang membuat Kurawa berang adalah karena di Jalatunda itu banyak jajahan Kurawa berguru kepada sang Bima, sedangkan Jalatunda termasuk wilayah Hastina. Namun, serangan-serangan Kurawa dapat dikalahkan oleh *Hanoman* (saudara se-Bayu) dan *Gatutkaca,* putera Bima.

Tetapi, niat Bima untuk menuntut para Dewa itu terdengar oleh Hyang Guru (Batara Guru) serta para dewa lainnya. Batara Guru marah, dan me-merintahkan Bhatara Yamadipati (dewa maut) untuk mencabut nyawa sang Bima. Pesan yang disampaikan oleh Yamadipati dari Batara Guru kepada Bima, ditentang oleh Bima. Tanpa kompromi, Bima dimasukkan ke neraka bersama raganya. Anehnya, neraka yang semula panas (demikian selalu gambaran sebuah neraka) men-jadi dingin, ketika Bima masuk ke sana. Ini bukan kekuatan Bima sen-diri, tetapi karena Hyang Tunggal te-lah manunggal bersamanya. Kejadian ini tentu saja membuat para dewa lebih berang lagi.

Sementara para Dewa sedang ke-bingungan memikirkan Bima, sau-dara-saudara Bima Tunggal Bayu da-tang menuntut balas kepada Dewa. Kahyangan diobrak-abrik, sehingga menyebabkan Sang Batara Guru mengutus Narada untuk turun ke bumi minta bantuan kepada Kresna, tokoh bijaksana yang selalu mendamaikan fihak-fihak yang berselisih.

Kresna tidak bereaksi atas perminta-an Hyang Guru, malah mengatakan bahwa memasukkan Pandu ke neraka adalah tindakan yang keliru. Meski-pun nasehat Narada agar Pandawa mengadakan sesaji Rajasoyo telah di-laksanakan, toh Pandu masih dibiar-kan di neraka. Maka, berjanjilah para Dewa bahwa mereka akan mengang-kat Pandu dari neraka untuk dinaik-kan ke surga. Dengan janji tersebut, berangkatlah Narada dan Kresna me-nemui saudara-saudara Bima tunggal Bayu di kahyangan. Saudara-saudara Bima tunggal Bayu juga mengadakan *bargaining position* (tawar menawar) bahwa bila Bima tidak diangkat ke surga, mereka masih akan mengada-kan huru-hara. Sedangkan Bima, mau diangkat ke surga dengan syarat bila ayahandanya, Pandu sudah diangkat ke surga. Namun itu ternyata hanya siasat Bima untuk memperjuangkan ayahandanya, karena ketika Pandu telah diangkat ke surga, Bima dan saudara-saudaranya tunggal Bayu pu-lang ke Indrasrasta, bersatu dengan saudara-saudaranya Pandawa.☐

Digitized by Google

HARIAN
Pelita
MANAGEMENT BARU
Lebih Berisi !

Harian Pelita kini tampil dengan
aspirasi generasi muda dan ummat Islam yang lebih pas.

Didukung oleh penulis-penulis Intelektual Islam.

- ☑ Berita-berita lebih **AKURAT.**
- ☑ Tulisan-tulisan lebih **BERISI.**
- ☑ Mengungkap masalah lebih **DEWASA.**
- ☑ Rubrik : Generasi Muda yang ***Akrab.***
  Kesehatan yang ***mudah dipahami.***
  Agama Islam ***mantap tapi teduh.***

Pelita sekarang, memang lain !

Mulai
11 Maret '86.

Hubungi :
Redaksi/Iklan :
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Telp. 581362 Jakarta.

Digitized by Google

BOGASARI tepung terigu murni berprotein tinggi

Protein 12% — 13%	Protein 10% — 11%	Protein 8% — 9%
BOGASARI cap CAKRA KEMBAR khusus untuk roti dan mi istimewa	BOGASARI cap SEGITIGA BIRU istimewa untuk kue donat dan bakpao	BOGASARI cap KUNCI utama untuk biskuit dan tart

Remaja yang sehat dapat menikmati masa-masa santai yang memberikan mereka gairah hidup. Untuk menjaga kesehatan anak-anak remaja Anda, gizi dalam makanan sehari-hari harus dipenuhi. Tepung terigu Bogasari mengandung unsur-unsur gizi yang tinggi dan menjamin mutu.
Agar anak-anak Anda dapat menikmati masa-masa santai yang sehat, berikanlah mereka setiap hari roti atau aneka olahan dari tepung terigu Bogasari!

bs FLOUR MILLS

p.t. bogasari flour mills

Head office:
Level 18 Wisma Indocement Kav. 70-71
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta — Indonesia
Phone : 5782500 Telex : 44506 JKT
Cable : SARIMILL JAKARTA P.O. Box 4118

Factories:
Jalan Sindang Laut Tanjung Priok, Jakarta
Phone: 492908

Jalan Nilam Timur 16 Tanjung Perak, Surabaya
Phone: 293081-293082-293083
Telex: 31396 BOGASARI SB
Cable: SARIMILL SURABAYA P.O. Box 203

Digitized by Google

GOLONGAN KARYA
No. 46 Desember 1987

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

MENUJU INDONESIA 1988

Ekonomi Indonesia '87, Berat Tapi Mengasyikkan.

ISSN 02
Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Digitized by Google

DENGAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN
SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN
PT (Persero) INDOSAT
SIAP MENYUKSESKAN SIDANG UMUM MPR TAHUN 1988
DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

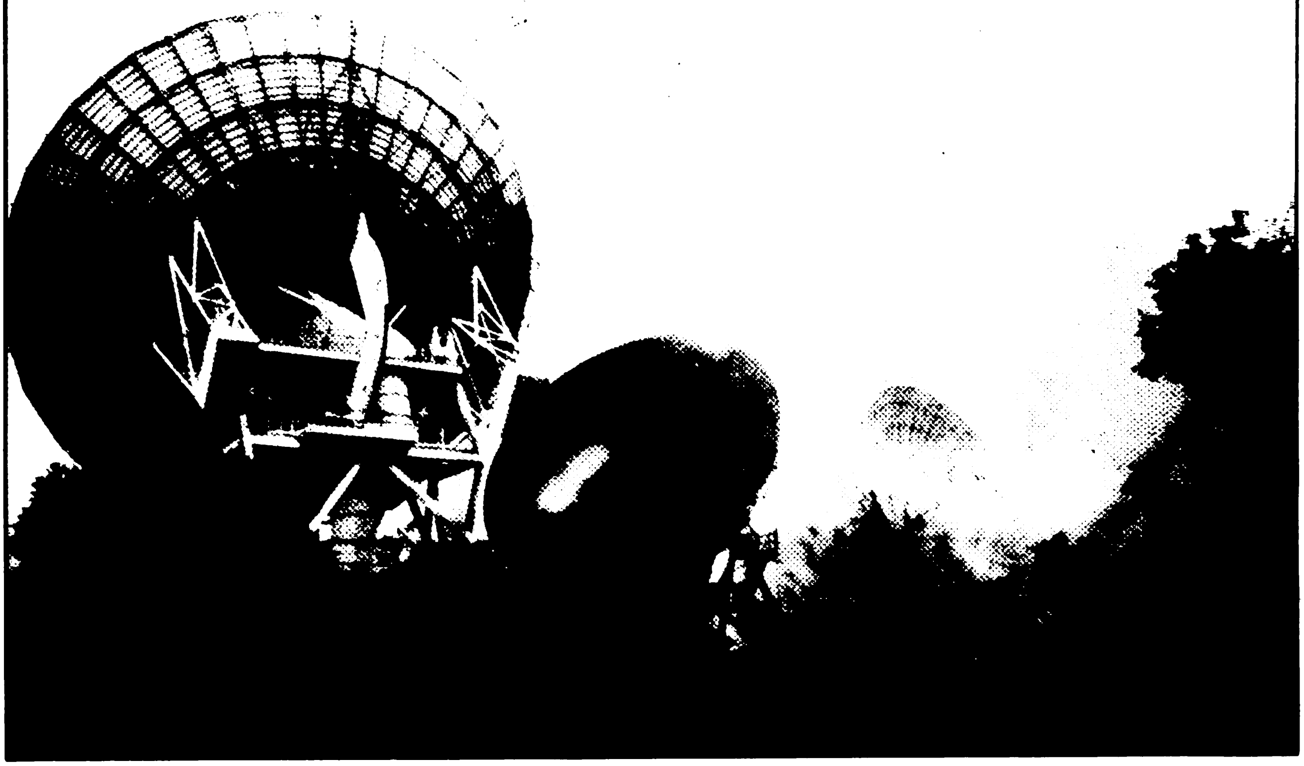

INDOSAT

Persero Penyelenggara Telekomunikasi Untuk Umum Internasional

Digitized by Google

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/
Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli.
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Ariono Poernomo.
Subandrio.
Djonharro.
Rum Aly.
Ibnu Sawamo.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noenjathy.
Robert Puang Sunur.
Issidarto BA.
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan komentar analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan Media Karya sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI

Bersama Sebagai Bangsa

FOKUS

Perekonomian Kita Berat Tapi Mengasyikkan. Ikutilah pendapat Prof Dr Emil Salim.

LAPORAN UTAMA

Berat Namun Mencipta Gairah. Sebuah evaluasi multi-aspek tentang perjalanan kita sebagai bangsa selama 1987. Syamsul Basri, Pemred Suara Karya, Ir Djoko Sudyatmiko Wakil Ketua FKP Bidang Ekonomi dan Muhammad Halim, dosen ITB mengulas fakta dan gejala yang berkembang selama tahun yang sebentar lagi silam itu.

LAPORAN KHUSUS

Evaluasi Dua Praktisi. Di tengah ekonomi kita yang terasa berat, dua praktisi ini, Sukamdani dan Tony Agus Ardie mencatat kemajuan di bidang bisnis yang mereka geluti. Karena itu keduanya optimis memasuki 1988.

NASIONAL

Pidato Presiden Soeharto di KTT ASEAN; Disepakati Naskah Utama GBHN; Ringkasan Peristiwa Nasional 1987; Proses Demokrasi Tidak Dengan Sendirinya Menggelinding; Panti Transmigran Dharmais; Tantangan Pembangunan Kaltim; Postur Politik Internasional Kita dan Bu Moer Menteri UPW Baru.

KOMENTAR

ORGANISASI

Berita-berita tentang kunjungan Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH ke Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

SPEKTRUM

Menghargai Waktu oleh Oka Mahendra SH.

INTERNASIONAL

Renungan KTT ASEAN oleh AR Sutopo, dan Rekaman Peristiwa Internasional selama 1987.

SENI & BUDAYA

Maria Sugiharto membahas tentang keampuhan mendongeng yang kini nyaris tergusur oleh teknologi mutakhir.

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

Zarlons Zaghlul SH

Digitized by Google

Bersama Sebagai Bangsa

PERUBAHAN-PERUBAHAN bisa terjadi dalam sekejap. Tetapi lebih sering lagi adalah bahwa perubahan itu terasa lamban dan tak mampu mengejar harapan. Nyatanya, baik dalam konsep waktu maupun dalam persepsi manusia berlangsung hal seperti ini: Memburuknya keadaan sering terasa lebih cepat dan tiba-tiba, tetapi membaiknya keadaan adalah lamban sehingga sering tak terasa. Apalagi secara manusiawi, kepekaan akan kemunduran memang lebih tajam daripada kepekaan terhadap kemajuan. Orang berkata pula proses destruksi memang cenderung lebih kuat, lebih mudah dan lebih cepat daripada proses konstruksi. Termasuk dalam tata kehidupan sosial.

Apakah yang telah terjadi dengan kita semua sebagai suatu bangsa menurut konsep waktu dan persepsi kita pada tahun-tahun terakhir ini?

Ketika kita mengakhiri tahun 1985, kita semua menyimpulkan bahwa tahun 1985 bukan tahun yang mudah. Dan terbesit harapan agar tahun 1986 akan lebih mudah. Ternyata, di sana sini di beberapa sektor kehidupan, tahun 1986 lebih berat. Lalu ada sedikit rasa was-was — dan karenanya lebih waspada — memasuki tahun 1987. Memang tidak semua kesulitan dapat teratasi di tahun 1987, akan tetapi dengan bekal sikap waspada banyak yang berhasil dilakukan untuk mengatasi banyak persoalan. Dilecut oleh pengalaman pahit tahun sebelumnya, ekspor non migas misalnya lebih bergairah. Dan semacam blessing indisguise, peristiwa-peristiwa tertentu di belahan bumi yang lain telah membawa harga minyak bumi naik kembali ke sekitar delapan belas dollar, hampir dua kali lipat dari sebelumnya, kendati tak dapat naik lagi melebihi batas dua puluh dollar seperti di masa-masa keemasan minyak bumi pada tahun-tahun yang lampau.

Kehidupan politik dalam tahun 1987 juga memperoleh warna yang cerah dan itu besar artinya dalam rangka pembangunan politik. Di antara empat pemilihan umum Orde Baru yang telah diseleggarakan hingga kini, sejauh ini Pemilu 1987 lah yang tampaknya paling sempurna pelaksanaannya. Dalam arti, kendati ada complain dari satu dua peserta, tetapi pada hakekatnya semua pihak mengakui bahwa pemilihan umum ini berlangsung demokratis sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Organisasi politik peserta pemilu tersebut tampil lebih dewasa namun tetap dinamis. Kasus pelanggaran hukum dan undang-undang jauh lebih sedikit dan lebih terbatas. Tudingan post pemilu yang mengecilkan arti kemenangan Golkar jauh mengecil. Bila dulu selalu ada tuduhan bahwa kemenangan Golkar ditopang peranan Abri dan birokrasi, kini tudingan ke arah Abri tak ada lagi.

Terlepas dari apa pun, pemilu 1987 yang sukses mempunyai arti tersendiri dan berpengaruh baik bagi perkembangan lanjut kehidupan politik di masa mendatang. Dan keberhasilan dan pencapaian di sektor politik tersebut dengan sendirinya besar pula pengaruh konstruktifnya pada berbagai sektor kehidupan lainnya. Di sektor kehidupan sosial dan kemasyarakatan, cara kita melaksanakan pemilu tanpa mengganggu persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa, besar maknanya. Dan begitu pula di sektor ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Suatu asumsi yang telah menjadi semacam adagium menyebutkan bahwa stabilitas politik berpengaruh memberi nilai tambah bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan. Plus point yang paling banyak dikaitkan dalam hal ini ialah terhadap sektor penanaman modal asing — dan penanaman modal dalam negeri sendiri tentunya. Terlebih-lebih bilamana jelas bahwa stabilitas politik yang ada itu juga dinamis.

Di antara celah harapan yang terbit kembali di sektor ekonomi dan kecemerlangan yang tercipta dalam manajemen kehidupan politik, agaknya ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Kesulitan-kesulitan yang masih dialami di sektor ekonomi sepanjang 1987 — dan juga tahun sebelumnya — sekaligus menampilkan sisi yang belum cemerlang dalam kehidupan umumnya kalangan masyarakat bawah dan bahkan sebagian golongan menengah. Tidak dengan maksud memberikan dramatisasi, tetapi memang tak sedikit keluhan yang terpantul dan dapat kita tangkap dari tengah-tengah 'akar-akar rumput' kehidupan masyarakat. Keluhan-keluhan serupa bahkan juga mulai memantul dari kalangan menengah bawah, termasuk usahawan-usahawan kecil yang mulai mengalami kesulitan likuiditas dan kesempatan. Memang kesempatan-kesempatan di ladang usaha non skala besar terasa mengalami penyempitan ketimbang untuk skala usaha yang lebih besar. Kesempatan-kesempatan yang tidak seimbang itu berkecenderungan pula menciptakan ketidak seimbangan akumulasi dana.

Pada hakekatnya, bagi masyarakat kecil gerak kehidupan ini sebenarnya sederhana saja. Tuntutan kebutuhan hidup mereka sejauh ini, baik kebutuhan sandang maupun pangan, tidak tinggi dan tidak rumit. Sepertinya gejolak moneter, krisis kurs valuta dan sebagainya tak punya akses ke dalam lingkup kehidupan mereka. Tapi bila harga beras dan bahan pokok lainnya berubah, mereka resah. Begitu pula perubahan tarif angkutan umum, harga minyak tanah dan akibat kenaikan BBM (kalau terjadi), beban-beban baru berupa pungutan baru dan sebagainya yang sekecil apapun. Bagi golongan menengah paling bawah, suatu kewajiban semisal keharusan membeli helm karena ketentuan lalu lintas yang berlaku pun dapat terasa sebagai beban ekonomis kendati mereka juga sadar bahwa itu adalah demi keselamatan diri mereka sendiri. Menggelantung di bus kota atau berjejal sampai ke atap gerbong kereta api kelas bintaro, bukan semata-mata karena rendahnya kecintaan akan keselamatan diri atau masalah disiplin, tetapi bisa karena soal to be or not to be dalam pergulatan kebutuhan hidup sehari-hari ini. Mungkin banyak dari kita akan sulit memahami ini semua, sepanjang kita belum mengalami realita kehidupan terjepit seperti ini secara langsung. Kata orang-orang bijak, sadar dan faham tercipta setelah mengalami.

Sadar dan faham seperti ini juga akan membawa kita kepada memahami arti sepasang kata: 'tenggang rasa'. Makin sulit keadaan ekonomi seseorang, makin peka mereka terhadap lambang-lambang kesenjangan. Adalah kewajiban — yang harus disadari dalam-dalam — bagi mereka yang kebetulan beruntung dalam kehidupan ini (terutama dalam ukuran ekonomi) untuk mencoba 'tenggang rasa' ini. Industriawan-industriawan mobil — sekedar contoh — yang sebenarnya juga sedang mencoba mengatasi kelesuan pasar dan tajamnya persaingan akan berlomba meluncurkan produk baru yang berkesan berlomba untuk tampil lebih mewah. Dari sudut pandang dan pergulatan bisnis, itu wajar saja. Tapi pada sisi lain, ikut menampilkan sarana kesenjangan baru. Ini bukan tuntutan, tapi bagaimana bila para penentu dunia industri ini, termasuk produsen produk kebutuhan konsumtif sekunder lainnya, ikut memasukkan perhitungan 'tenggang rasa' di tahun-tahun yang sulit ini? Secara menyeluruh, di segala sektor, adakah kemauan kita untuk sedikit berkorban untuk lebih mengutamakan kesetiakawanan di antara sesama bangsa? Kita masuki tahun 1988 dengan semangat baru. Bersama sebagai bangsa. □

Digitized by Google

Perekonomian Kita 1987 Terasa Berat Tapi Mengasyikkan

Tahun 1987 memang cukup berat bagi perekonomian Indonesia. Berbagai hantaman faktor ekstern maupun intern menggebuk bertubi-tubi. Tapi di tengah-tengah badai kerumitan, sejumlah sektor berprestasi mengagumkan. Ekonomi kita ibarat petinju yang tahan gebuk. Itulah yang mengasyikkan.

Evaluasi yang cermat dan proyeksi yang jitu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Terkadang, bahkan sering, suatu prakarsa mengalami jalan buntu dalam pelaksanaan karena ketidakmampuan orang melakukan evaluasi dan proyeksi. "Oleh karena itu kepintaran menyusun kedua hal tersebut sangat penting," ujar Prof Dr Emil Salim kepada *Media Karya.*

Menjelang akhir sebuah periode, biasanya orang melakukan evaluasi. Sebuah rumah tangga yang terkelola baik akan menghitung pengeluaran dan pemasukan. Perusahaan-perusahaan swasta menerbitkan neraca laba rugi. Demikian juga dengan lembaga-lembaga non-profit. Pendek kata orang membutuhkan suatu neraca yang mengukur secara pas prestasi maupun keteledoran. Dari neraca itu bisa terbaca hasil kerja dalam periode tertentu mengukur surplus atau defisit.

Dalam rangka evaluasi dan proyeksi itu, bagaimana kita bisa membuat sebuah neraca yang pas mengenai penampilan ekonomi Indonesia selama 1987 yang sebentar lagi silam? Emil Salim coba membuat evaluasi itu dalam kapasitasnya sebagai ekonom ketimbang Menteri Negara Kependudukan dan lingkungan hidup.

"Harus diakui terus terang, perekonomian Indonesia 1987 cukup berat. Negara-negara di dunia masih diselimuti resesi. Apresiasi Yen dan DM (Deutsche Mark) terhadap dollar turut memberatkan perekonomian kita. Belum semuanya itu teratasi, menjelang tutup tahun, tepatnya pada bulan Oktober lalu, dunia dikejutkan oleh kejatuhan drastis nilai saham di bursa saham terbesar sejagad, *Wall Street* (New York) yang kemudian dikenal dengan sebutan *The Wall Street Crash* itu," tutur guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengawali pembicaraannya dengan *Media Karya.*

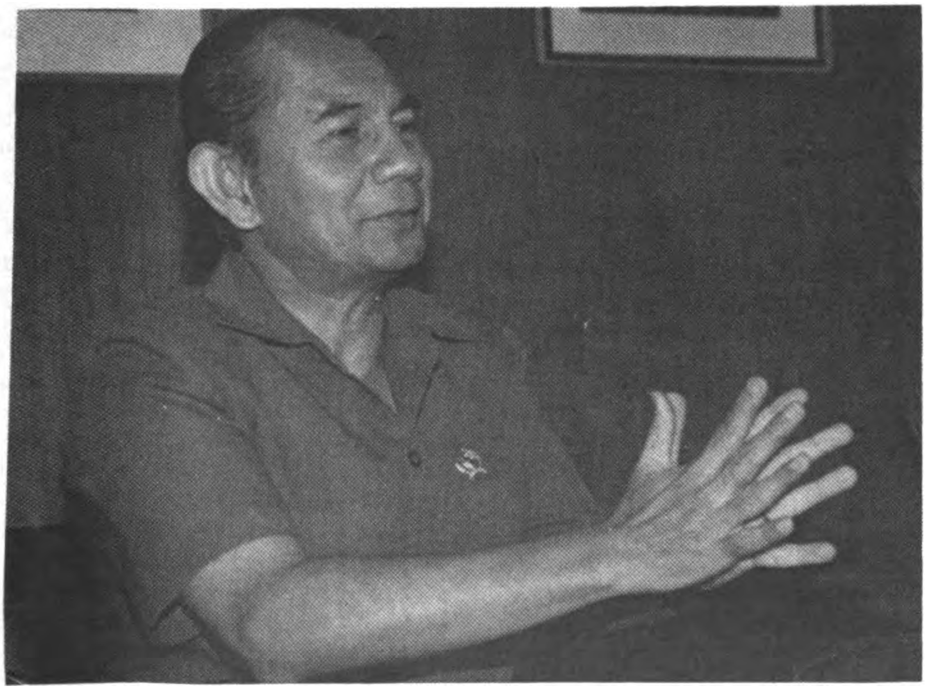

Prof Dr Emil Salim

Tentang The Wall Street Crash ini, para pakar ekonomi mempunyai penilaian dan antisipasi yang beragam. Ada yang mengambil ancang-ancang untuk memanfaatkan keuntungan jangka pendek yang bisa dikeruk dari sana. Indonesia, misalnya, seperti yang diungkapkan kepada pers oleh Gubernur BI Arifin Siregar usai menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha beberapa hari setelah keruntuhan harga saham di Wall Street itu, merasa beruntung karena paling tidak modal yang selama ini dilarikan ke luar negeri untuk berspekulasi di pasar modal negeri orang, akan kembali mengalir ke dalam negeri. Namun bagi negara-negara industri maju, The Wall Street Crash ini dinilai sebagai pratanda untuk bersiap-siap menghadapi resesi baru yang bakal muncul dalam jangka panjang.

Orang masih ingat betul bahwa resesi yang melanda dunia pada tahun 1930-an, berawal dari The Wall Street Crash tahun 1929. Terlepas dari pro dan kontra terhadap siapa yang bersalah dalam tragedi Wall street itu, Indonesia memang harus bersiap-siap menghadapi situasi buruk bila The Wall Street Crash itu bakal menyeret dunia ke dalam resesi baru. Logikanya sederhana. Bila negara-negara industri tenggelam dalam resesi, dampaknya akan terasa bagi Indonesia. Karena dalam kondisi resesi, berarti negara-negara industri yang selama ini menjadi pasar komoditi ekspor Indonesia akan kekurangan *cash money* untuk membiayai impor mereka. Konsekuensinya ekspor Indonesia ke negara negara tersebut akan mengalami hambatan serius.

Namun terlepas dari mata rantai sebab akibat The Wall Street Crash, Emil Salim melihat ada keasyikan dalam penampilan ekonomi Indonesia selama 1987 ini. "Ibarat petinju yang digebuk habis-habisan oleh lawannya

Digitized by Google

dalam keseluruhan ronde pertarungan, namun petinju yang bernama "ekonomi Indonesia" mampu bangkit kembali dan meladeni gebukan itu," kata Emil Salim beranalogi. "Kita tidak sampai knok-out."

Dengan demikian, apa yang bisa disimpulkan dari penampilan seperti ini? Tentu tidak bisa lain kecuali kita harus jujur mengatakan, "Perekonomian kita memiliki daya tahan yang memadai untuk tidak knock-out walaupun digebuk habis-habisan," kata Emil Salim. "Jadi ekonomi kita sudah tahan gebukan."

Tentu saja predikat "tahan gebukan" ada dasarnya. Sejumlah data yang mencatat prestasi perekonomian Indonesia di tahun 1987, bisa disimak dalam rangka mensahkan predikat tahan gebukan itu. Di sektor pertanian misalnya, ekspor hasil pertanian yang pada tahun 1984 mencapai 91 juta dolar lebih dan walaupun turun pada periode 1985 dan 1986, namun pada tahun 1987 (periode Januari-Juli) tercatat kenaikan menjadi 96 juta dolar lebih. Ini berarti ekspor hasil pertanian kita telah melampaui angka 1984. Padahal kita semua tahu bahwa perekonomian Indonesia mulai dilanda akibat resesi dunia sejak 1983. "Gejala di sekitar hasil pertanian ini penting karena perekonomian kita adalah ekonomi pertanian," katanya.

Coba simak lagi perkembangan ekspor hasil industri. Bila tahun 1984 ekspor sektor ini baru mencapai 22 juta dollar lebih, maka pada tahun 1985 naik menjadi di atas 24 juta dollar. Angka ini naik lagi pada tahun 1986 melampaui jumlah 25 juta dollar. Dan tahun 1987 — periode Januari-Juli — sudah di atas 31 juta dollar.

Di bidang ekspor hasil industri pun tercatat sejumlah prestasi yang menggembirakan. Bila tahun 1984 baru mencapai angka sekitar 22 juta dolar, maka tahun 1985 naik di atas 24 juta dolar, dan naik lagi menjadi 25 juta dollar di tahun 1986. Dalam tahun 1987 (periode Januari-Juli) tercatat kenaikan menjadi 31 juta dolar lebih.

Di sektor pertambangan (tidak termasuk minyak dan gas bumi) pun terjadi peningkatan nilai ekspor, kendati komoditi di sektor ini masih mengalami kemerosotan harga di pasar internasional. Bila tahun 1984 ekspornya mencapai 101 juta dollar dan tahun 1985 naik lagi menjadi 119 juta dollar dan naik lagi menjadi 152 juta dollar di tahun 1986, maka pada tahun 1987 masih mampu mencatat 126 juta dollar. Angka ini memang lebih kecil dibanding dengan perolehan tahun 1985 dan 1986, tapi lebih tinggi dari prestasi 1984.

Apa arti ini semua? Dari pengamatan sederhana, kiranya tepat apa yang diyakini Emil Salim bahwa perekonomian kita dari tahun ke tahun membuktikan daya lenting. "Tahun 1987 memang berat, tapi kita punya kepercayaan bahwa perekonomian Indonesia telah memiliki daya tahan." Dengan mengungkapkan keyakinan seperti ini, tidak maksud Emil Salim untuk mengatakan bahwa tidak ada soal lagi dalam perekonomian Indonesia. "Persoalan yang harus dibenahi masih cukup banyak dan berat. Tapi apa yang saya kemukakan ini adalah fakta positif bahwa di tengah persoalan baik intern maupun ekstern, perekonomian kita telah memperlihatkan daya tahan yang menggembirakan," ujarnya.

Ekonomi Rakyat

Ada indikasi lain lagi yang bisa memperkuat keyakinan bahwa ekonomi kita memiliki daya tahan dan kemampuan beringsut maju di tengah kerumitan yang menghadangnya. Di bidang indeks harga konsumen, instrumen yang mengukur laju inflasi, tahun 1987 ini kendati keadaan perekonomian kita cukup berat tetapi angka inflasi masih di bawah 10 persen. Bahkan masih di bawah angka 1986 yang 7,95 persen.

Belum lagi kalau dianalisa tentang perekonomian rakyat. "Bila anda memperhatikan sejumlah variabel dalam perekonomian rakyat, akan terlihat sejumlah indikasi yang mengasyikkan,:" kata Emil Salim. Yang paling menarik perhatiannya adalah angka-angka di sekitar Kredit Umum Pedesaan. Bila pada Januari 1987 jumlah kredit yang diserap sektor pedesaan (angka kumulatif) adalah Rp 981 milyar, maka pada bulan Agustus 1987 angka itu telah mencapai Rp 1,3 trilyun, dengan total nasabah sebanyak 3,5 juta orang.

Lalu Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen? Juga ada kenaikan. Bila pada Januari 1986 total KIK dan KMKP mencapai Rp 3,8 trilyun, maka pada Januari 1987 jumlah itu telah mencapai Rp 4,8 trilyun. "Ini menarik karena penerima kredit-kredit pedesaan bukan *the big business* tapi sektor ekonomi rakyat," katanya. Jadi sebenarnya sedang terjadi ekspansi monometer di sektor-sektor yang menjadi ekonomi rakyat, kendati dalam suasana resesi banyak yang mengeluh seolah-olah di Indonesia sedang berlangsung kontraksi moneter untuk mencegah lonjakan inflasi yang tak terkendali.

Dan bila ditelusuri lebih lanjut, lonjakan-lonjakan ekspor di sektor industri misalnya, sangat ditopang oleh laju kenaikan ekspor komoditi yang digeluti perekonomian rakyat. Hasil tenun misalnya, ekspornya naik dari 149 juta Dollar tahun lalu menjadi 150 juta dollar pada Agustus tahun ini.

Kemudian kerupuk udang misalnya. Tahun 1984 menghasilkan devisa sebesar dua juta dollar, lalu turun menjadi 1,7 juta dollar tahun 1985, tapi naik menjadi 2,1 juta dollar tahun lalu, dan tahun ini sampai dengan Agustus sudah melampaui angka 1986.

Lalu lihat lagi anyaman rakyat. Terjadi lonjakan besar di sektor ini. Bila tahun 1984 barang anyaman meraih devisa sebesar 5 juta dollar, maka pada tahun 1985 naik menjadi 7,2 juta dollar, naik lagi menjadi 10,9 juta dollar tahun lalu dan melonjak tajam menjadi 24,2 juta dollar sampai dengan Agustus tahun ini. Kemudian hasil kerajinan barang-barang dari permata. Walaupun untuk 1987 belum diperoleh angka perkembangannya namun pertumbuhannya terus naik dari tahun ke tahun. Bila pada tahun 1984 barang-barang dari permata ini menghasilkan 1,6 juta dollar, namun tahun 1985 naik menjadi 3,7 juta dollar dan melonjak tajam pada tahun 1986 menjadi 29 juta dollar.

Yang paling spektakuler dalam komoditi yang digeluti rakyat mungkin rempah-rempah. Komoditi yang membuat kita dijajah lebih dari 3,5 abad oleh Belanda ini ternyata maju pesat. Bila pada tahun 1984 baru menghasilkan 55 juta dollar, dan tahun 1985 naik menjadi 66 juta dollar, tapi tahun 1986 melonjak menjadi 132 juta dan melejit lagi menjadi 192 juta dollar sampai dengan Agustus tahun ini.

Kalau orang mengatakan tahun 1987 itu berat dan penuh tantangan, itu betul. "Tapi yang membikin pusing kepala saya adalah angka-angka yang diperlihatkan itu," ujarnya. Jadi ternyata ekonomi kita memang mengasyikkan. "Ini bukan khayalan tetapi berdasarkan angka-angka."

Jadi dengan sederetan kemajuan yang diperlihatkan oleh angka-angka tadi, kita agaknya tidak perlu pesimis menghadapi tahun 1988 yang bakal datang. Seandainya keadaan per-

Digitized by Google

ekonomian dunia tahun depan lebih buruk dari tahun ini, tidak perlu pesimis karena kita sudah memiliki modal dasar, yaitu daya tahan itu tadi.

Tumbuhkan Kemandirian

Memang banyak soal yang melingkari perekonomian kita selama ini dalam proses perjalanannya. Selama ini orang terbawa untuk mempersoalkan seakan kunci membangun perekonomian yang berdaya tahan adalah gebrakan deregulasi, debirokratisasi serta penghapusan monopoli dan oligopoli dan sebagainya. Kita seakan terbawa arus pemikiran seolah-olah dengan debirokratisasi dan deregulasi berarti mengurangi sejauh mungkin campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan ekonomi, sehingga hambatan administratif dan birokrasi terkikis.

Bukan itu saja. Apapun upaya perbaikan ekonomi bangsa entah itu harus ditempuh dengan cara debirokratisasi atau deregulasi, tujuannya tidak sekedar menangkal hambatan administratif dan birokrasi. "Muara paling akhir dari semua upaya pembenahan itu adalah menumbuhkan kemandirian dan rasa percaya diri" tegasnya.

Mengapa ini perlu? Dari angka-angka yang dipaparkan pada bagian awal laporan ini, tersirat secara jelas bahwa daya tahan perekonomian kita untuk selalu bangkit setiap kali ada gebukan, adalah kondisi obyektif yang perlu dipelihara. Pertimbangan lain, bahwa sumbangan terbesar dalam ketahanan ekonomi kita ternyata ada di sektor ekonomi rakyat yang tersebar di pedesaan. Bila sekarang masih terdapat kerumitan dalam menumbuhkan kemandirian yang berdaya tahan, betapapun beratnya, "Kita harus keluar dari kerumitan itu dengan kekuatan sendiri, karena kita telah memiliki potensi untuk itu."

Ambil saja contoh rempah-rempah, minyak atsiri, kerupuk udang, bahan tenunan dan barang anyaman yang mengukir prestasi lonjakan dalam perolehan devisa. Komoditi yang digeluti oleh sektor ekonomi rakyat ini ternyata mampu berprestasi di tengah sektor lainnya lesu karena resesi dan pelbagai konjunktur eksternal.

Bahwa ekonomi rakyat kecil mampu merendam resesi, dan bahwa ekspansi kredit di pedesaan bisa terus menanjak di tengah kesulitan itu adalah pratanda bahwa vitalitas ekonomi rakyat telah tumbuh. "Memelihara vitalitas ini adalah tugas kita di masa mendatang

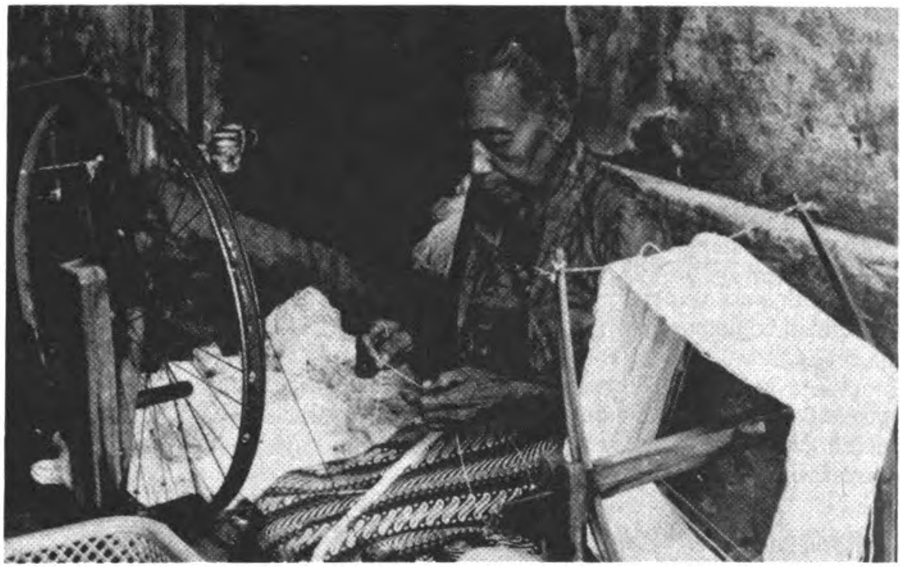

Ekonomi rakyat menunjukkan indikasi yang mengasyikkan

baik lewat acuan ekonomi, politik maupun pendekatan lainnya. Karena vitalitas itu ada, maka yang menjadi tugas pokok di masa mendatang adalah perkuat arus kemandirian ini," ujarnya. Ini berarti kita harus mendorong dan memperkuat rasa percaya diri semua unsur yang terlibat dalam kegiatan perekonomian rakyat. Bukan itu saja, tapi dorong juga rasa percaya diri dan vitalitas ekonomi daerah. "Karena di sana, di sektor perekonomian rakyat lah daya tahan dan daya lenting itu ada."

Sebab dengan menumbuhkan vitalitas dan rasa percaya diri yang disebut arus kemandirian itu, konsekuensi logisnya bahwa ada persebaran beban yang dipikul, karena semakin melebarnya basis perekonomian rakyat. Bila persebaran basis ada maka beban yang dipikul ekonomi nasional semakin terbagi. "Esensi partisipasi sebenarnya terletak pada persebaran beban dan pengambilan keputusan ini," tegas Emil Salim.

Akibat pembangunan yang dijalankan gencar selama 20 tahun terakhir, maka rakyat kita makin pintar baik secara politik maupun ekonomi. Karena itu perluaslah basis untuk menghadapi tantangan jaman di masa depan lewat persebaran beban tadi. Dan itu berarti perkuat basis perekonomian rakyat. Mengapa? Karena disana lah sebetulnya inti kekuatan perekonomian kita.

Namun Emil juga tidak menutup mata terhadap pertimbangan dan mungkin keraguan yang dalam banyak hal lebih bersifat politis ketimbang ekonomi, bahwa memperkuat arus kemandirian perekonomian rakyat di desa dan daerah bisa memunculkan kembali semangat kedaerahan yang pada masa lalu nyaris merobek-robek keutuhan negara kesatuan. Karena pertimbangan itu maka mungkin saja sebuah proyek di daerah yang visible secara ekonomi, biasa saja dikalahkan karena pertimbangan politik.

Menurutnya, pertimbangan semacam ini sudah saatnya diminimalisir. Dulu semangat kedaerahan begitu kuat karena kita belum memiliki ideologi yang sama. Tapi sekarang dengan disahkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, maka ada jaminan bahwa semangat untuk memisahkan diri dari bingkai negara persatuan, tidak bakal muncul lagi. Setelah sekian lama mengalami masa stabil, semangat separatis sudah tidak ada. "Anda lihat sendiri, Panglima Siliwangi tidak perlu orang Sunda. Yang menjadi gubernur di Maluku misalnya, tidak perlu yang berdarah Ambon. Jadi rasa persatuan sekarang ini jelas lebih kuat dibanding 20 atau 30 tahun lalu."

Bukan berarti bahwa unsur keterikatan seseorang dengan daerah yang menjadi asal-usulnya terhapus sama sekali. Emil melihat bagi generasi mendatang keterikatan primordial seperti itu lebih berbobot keterikatan budaya ketimbang keterikatan aspirasi politik. Dalam wujud penghayatan seperti itu lah orang kemudian mengapresiasi apa yang disebut Bhineka Tunggal Ika itu.

Memang banyak faktor yang mampu mengikat penduduk suatu kawasan untuk bersatu. Tetapi kesamaan ideologi adalah kuncinya. Emil Salim memberi contoh Jerman, sebuah negara yang homogen dari segi suku dan bahasa, tapi bisa terbelah dua antara

Digitized by Google

Jerman Timur dan Jerman Barat karena faktor perbedaan ideologi. Juga Korea yang terbelah antara Korea Utara dan Korea Selatan karena perbedaan ideologi, dan banyak lagi contoh lainnya. Karena pengalaman negara lain tersebut maka selama empat pelita kita mengupayakan agar memiliki ideologi yang satu, yaitu Pancasila. Untuk masa ke depan, persoalannya adalah bagaimana mengisi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi itu. Pengisian itu jelas dilakukan oleh masyarakat. "Maka yang diupayakan adalah menggalakkan peran serta masyarakat itu tadi."

Membaca Tantangan Jaman

Persoalan sebuah bangsa yang sedang membangun sangat kompleks. Plafon kepuasan dan target prestasi dan pencapaian seolah tanpa batas. Namun dalam kondisi dan cita rasa yang bagaimanapun juga, partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak perlu Dengan menyebarkan partisipasi, rakyat akan memperoleh kepuasan terhadap eksistensi dan kemandiriannya. Mungkin sulit untuk meramalkan bentuk tipikal masyarakat Indonesia yang adil sejahtera pada abad ke 21 nanti. Namun persoalan mendasar dalam hal evaluasi dan proyeksi adalah ketepatan mengukur dan menganalisa apa yang telah terjadi, dan mengantisipasi secara jitu apa yang bakal muncul di kemudian hari.

Dalam konteks ekonomi Indonesia, mungkin akan sangat panjang bila kita melakukan evaluasi dan proyeksi yang detil lengkap dengan hubungan kausal antara ribuan variable yang mempengaruhinya. Bila terhadap penampilan ekonomi Indonesia selama 1987 Emil Salim memberinya label sebagai "petinju yang tahan pukul" maka terhadap ekonomi Indonesia 1988 suatu label yang akurat mungkin sulit ditempel. Tapi satu hal jelas bahwa seandainya keadaan tahun depan lebih buruk, toh ekonomi kita telah memiliki daya tahan sehingga wajar untuk optimis. "Persoalan kita sebenarnya bagaimana menumbuhkan rasa optimis ini," ujarnya.

Bahwa orang harus memperhitungkan secara cermat semua variable dan *determinat factor* yang mempengaruhi masa depan, jelas. Tapi bila memperhitungkan sebuah perjalanan pembangunan, kita tidak saja membutuhkan orang pintar, tetapi juga kearifan. Singkat kata, untuk memperhitungkan sebuah proyeksi, sangat tergantung pada kejelian dan kearifan kita melihat dan membaca tanda-tanda jaman. Kemampuan ini penting, karena sebuah tanda jaman menuntut respon tertentu. "Jangan sampai jaman menuntut yang lain, kita terbelenggu pada respons yang lain.

Adalah juga sebuah kearifan bila kita sejak dini mulai menjalankan konsep pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Wawasan demikian membutuhkan kesabaran dan stamina luar biasa. Sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak seperti orang berlomba dalam lari 100 meter yang setelah mencapai garis finish, perlombaan selesai dan pemenangnya dikukuhkan. Atau tidak seperti orang mendirikan proyek yang satu atau dua tahun usai.

Emil Salim mengatakan pembangunan yang berwawasan lingkungan ibarat kita mengikuti lomba lari marathon. Harus ada stamina luar biasa untuk menyentuh finish tanpa ambruk begitu sampai. Dan marathon dalam konteks pembangunan membutuhkan ketangguhan luar biasa. Sebab orang harus memiliki stamina super dan terjaga baik untuk berlari bertahun-tahun. Kalau stamina pelarinya tidak terjaga baik, maka pada tahun pertama lari marathon masih kelihatan lucu, tahun kedua dan ketiga asyik tapi pada tahun kelima orang mungkin bosan karena belum sampai juga.

Inti dari pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan adalah menempatkan deru pembangunan dalam alur jangka panjang, sehingga kelestarian sumber daya alam dan juga manusia terpelihara dengan baik, untuk melakukan lari marathon secara terus menerus tanpa kehabisan stamina. Konsep tersebut juga mengandung implikasi progresif, artinya debut pembangunan harus menghasilkan generasi dan peri kehidupan yang lebih baik di masa mendatang dibanding dengan masa sebelumnya.

Untuk ini semua diperlukan kearifan. Atau seperti yang dikatakan Emil Salim: "Kita harus pandai-pandai membaca tantangan jaman. Jangan sampai jaman membutuhkan respons tertentu, kita terbelenggu dan asyik pada respons yang lain."☐ Laurens Tato

"SUKSESKAN SIDANG UMUM MPR TAHUN 1988"

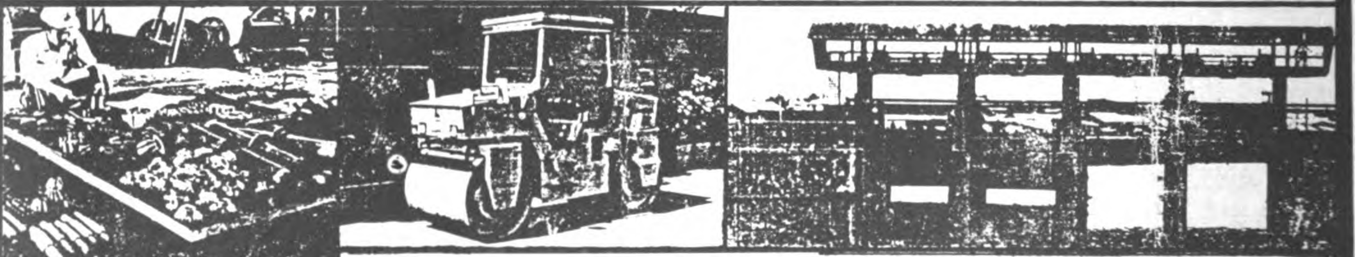

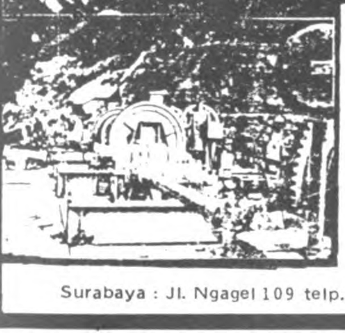

"Produk dalam negeri"

BERGERAK DI BIDANG-BIDANG :
- Instalasi Mesin & Listrik
- Konstruksi Baja /& Pelat
- Pengecoran Besi & Baja & Peralatan Pabrik
- Produksi Permesinan
Mesin Gilas Jalan. Traktor Dasar
Mesin Pemadat Tanah
Mesin Pemecah Batu

barata indonesia P.T. (PERSERO)

Kantor Pusat Pemasaran :

Surabaya : Jl. Ngagel 109 telp. 69075 Telex : 31329 Jakarta Jl. Kapt. P. Tendean 12 - 14a Telp. : 795708 Telex : 47316 barata la

Digitized by Google

Berat Namun Mencipta Gairah

Sumber kegoncangan politik telah tertangani. Perekonomian nasional menunjukkan daya tahan dan juga potensi daya kembang.

SECARA menarik, Prof Dr Emil Salim telah menggambarkan pengalaman 1987 yang telah tiba pada ujungnya dengan pengibaratan ronde-ronde tinju yang berat. Kalau kita ini petinju, ronde demi ronde kita mendapat banyak pukulan, termasuk jenis-jenis pukulan yang telak dan dapat mengknockout. Tetapi setiap kali, di antara hujan pukulan itu, kita masih bisa bangkit. ''Sejauh ini saya kira, daya tahan kita cukup qualified''. Tahun 1987 memang masih cukup berat, ujar ekonom yang duduk sebagai Menteri KLH dalam Kabinet Pembangunan IV ini, tetapi ada daya tahan. Dan daya tahan itu bertumpu pada beberapa prestasi kita bersama pada waktu-waktu sebelumnya (Baca juga: Fokus).

Agaknya, banyak yang sepakat bahwa tahun 1987 masih termasuk berat bagi kehidupan kita sebagai suatu bangsa. Tetapi, tidak lebih berat dari tahun 1986. Sehingga anggota DPR — Koordinator Inbang FKP DPR-RI — Djoko Sudyatmiko misalnya menganggap bahwa muncul optimisme dan kegairahan baru di tahun 1987 yang berguna untuk langkah tahun 1988. Pengajar Institut Teknologi Bandung Ir Muhammad Halim juga menampilkan optimisme 1988 berdasarkan kesimpulan sejumlah perkembangan 1987. Lalu seorang tokoh pers cukup terkemuka, Syamsul Basri, Pemimpin Redaksi Suara Karya, memberi catatan serupa di sektor kehidupan politik.

Optimisme Ir Muhammad Halim bersandar kepada adanya peluang-peluang mencipta baik daya tahan maupun daya kembang dalam perekonomian kita. Tapi mencipta kedua daya itu, yang berkaitan dengan manajemen kualitas manusia, tentu bukan hal yang begitu saja mudah dilakukan. Bagaimana? Halim melontarkan beberapa pemikiran yang tampaknya saling mengisi dengan pengutaraan Dr Emil Salim, bahkan dengan pengamatan dan analisa Djoko Sudyatmiko yang terasa aktual.

Di bawah tiga judul, wawancara tiga tokoh dari professi berbeda ini, diturunkan berikut ini, dimulai dari Syamsul Basri yang menyinggung sektor kehidupan politik yang merupakan satu diantara sektor penopang kehidupan bangsa ini.

1 Mencipta Kegairahan Demokrasi

Perkembangan politik setelah Pemilu 1987 tampak sekaligus sebagai suatu proses kristalisasi politik, dalam arti makin dimengertinya wawasan politik nasional yang didapatkan pada penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya azas tunggal. Dengan demikian, tentunya untuk masa-masa mendatang bisa diharapkan bahwa kemungkinan timbulnya goncangan-goncangan politik yang bersumber pada ideologi tidak ada lagi. Namun, setelah masalah ideologi sebagai sumber kegoncangan tertangani sedemikian rupa, maka hal ini bukan berarti sumber-sumber kerawanan itu berakhir. Karena, memang dalam melaksanakan program nasional yang berlandaskan pada ideologi yang satu, sebagai negara yang bersistem demokrasi, mestinya tidak bisa dihindarkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam melaksanakan program nasional itu.

Syamsul Basri

Adanya perbedaan pendapat itu, menurut tokoh pers nasional (Pemimpin Redaksi Suara Karya) Syamsul Basri, karena memang salah satu ciri yang sangat esensial bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Untuk itu, kini masalahnya pada tahun 1988 adalah mengupayakan suatu proses musyawarah guna mencari titik temu sehingga semua keinginan atau aspirasi masyarakat bisa dipadukan menjadi aspirasi nasional. Sedang dalam memadukan aspirasi yang berbeda-beda itu menjadi aspirasi nasional, maka sangat dibutuhkan peningkatan iklim akomodatif di semua kalangan kekuatan sosial politik. Jangan bersikap mau menang sendiri, karena sikap yang demikian tidak akan melahirkan suatu konsensus, yang harus tetap berpijak dan diukur dari kesepakatan menerima Pancasila sebagai azas dalam arti yang kongkrit — tidak hanya sekedar formalitas.

Sikap akomodatif itu diharapkan akan melahirkan suasana atau iklim yang lebih segar, agar di tahun mendatang (1988) kita menghadapi suasana perkembangan politik yang lebih bergairah. Namun, Syamsul Basri menilai, bahwa hal itu tidak bisa dilepaskan dari peranan yang dimainkan semua unsur kekuatan sosial politik. Baik suprastruktur maupun infrastruktur. Ini berarti lembaga-lembaga perwakilan harus benar-benar mengfungsikan dirinya. Artinya, lembaga-lembaga perwakilan itu mau mendengar dan menghayati keinginan atau aspirasi yang berkembang di masyarakat. Apalagi, selama ini ada kesan bahwa

Digitized by Google

lembaga tersebut belum berfungsi optimal yang lepas dari berbagai masalah.

Selain itu, perlu adanya sikap membuka diri terhadap penyelenggaraan interaksi politik yang lebih mendukung perkembangan kegairahan kehidupan demokrasi.

Juga, dalam pengambilan keputusan nasional DPR — dengan berbagai alasan — seolah-olah belum mampu menjadi mitra eksekutif yang seimbang. Padahal, adanya 'forum dengar pendapat' itu menurut Syamsul Basri adalah sumber masukan yang tidak terbatas pada bidangnya masing-masing. Dan, bisa dijadikan bahan untuk mensejajarkan posisinya dalam pelaksanaan politik antara lembaga-lembaga itu. Atas dasar itu pula, seberapa jauh lembaga-lembaga politik kita bisa menampung dan menyalurkan aspirasi yang berkembang di masyarakat?

''Sistem perencanaan nasional kita yang terkesan 'dari atas ke bawah' perlu sekali diperbaharui dengan sistem kesempatan 'dari bawah ke atas' dalam rangka mewujudkan pembaharuan untuk menyongsong masa depan bangsa dan negara,'' katanya.

Adapun hal ini secara tidak langsung perlu mengikut-sertakan unsur generasi muda guna menyongsong masa depan itu, karena generasi muda sejak awal terpanggil untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga mereka menjadi generasi yang mandiri sesuai dengan potensi pada diri mereka masing-masing.

2 Mencipta Pusat Pertumbuhan Baru

Suasana atau perasaan optimis secara umum lebih terasa selama tahun 87 ini dibandingkan tahun sebelumnya. Hal-hal yang dulu dirasakan menekan selama tahun 1986, pada tahun 1987 telah berubah menjadi suasana yang lebih optimistis. Ada kegairahan tertentu yang menyembul selama tahun 87 ini didalam bidang ekonomi. Hal ini menurut anggota FKP DPR-RI Djoko Sudyatmiko merupakan faktor yang sangat penting — sekalipun itu belum memecahkan apa-apa — karena suasana ini justru modal bagi suatu gerak lebih lanjut perekonomian kita. Bahwa muncul suasana optimisme dan kegairahan baru, bisa dimengerti, karena dibandingkan dengan suasana 1986 angka-angka indikator menunjukkan tanda-tanda yang memang lebih baik. Mungkin hal ini disebabkan karena tahun 1986 merupakan tahun dimana kita betul-betul didalam titik yang sangat bawah. Dan tahun 1987 menunjukkan recovery yang sangat berarti. Kita lihat misalnya minyak bumi, pengalaman bahwa minyak bumi sampai berharga kurang dari $ 10 US per barel tahun 1986 lalu diikuti tanda-tanda yang sangat membaik sehingga dapat mencapai harga $ 18 US selama tahun 1987, membantu optimisme baru. Disamping itu usaha-usaha yang telah lama untuk mendorong ekspor dibidang lain yang telah dikenal dengan istilah klasik yaitu ekspor non migas, juga menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan khususnya ekspor hasil-hasil industri.

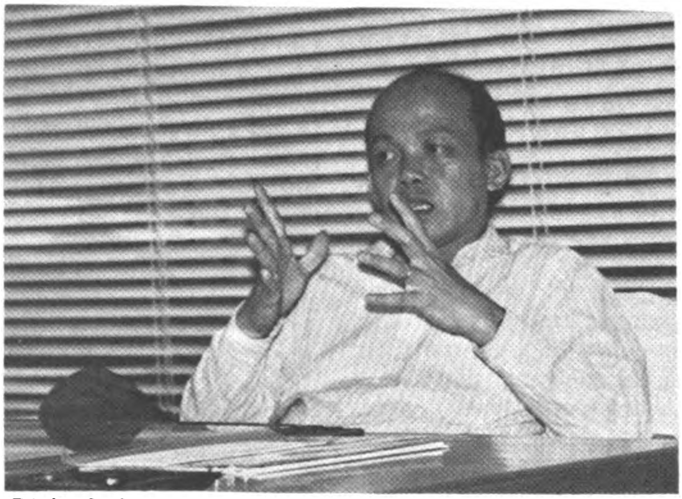

Djoko Sudyatmiko

Ada dua sebab utama, menurut Djoko Sudyatmiko yang mendorong menaiknya ekspor hasil-hasil industri. Yang pertama adalah merupakan hasil dari upaya yang berturut-turut berupa deregulasi dan debirokratisasi. Yang kedua adalah adanya situasi ekonomi internasional khususnya dibidang moneter. Lebih spesifik lagi saya sebutkan adanya fluktuasi mata uang asing berupa naiknya mata uang asing non dollar terhadap dollar. Hal ini memberikan peluang tersendiri bagi produk-produk kita untuk bersaing ditingkat internasional. Sekalipun hasil-hasil manufacturing kita dulunya didisain untuk keperluan dalam negeri — lebih dikenal sebagai substitusi impor. Tetapi dengan adanya suasana baru itu dan dengan pembenahan-pembenahan yang memadai ternyata dapat diperoleh tingkat kemampuan kompetisi sehingga bisa memasuki pasaran internasional.

Kata Kunci, Migas & Non Migas

Ekspor ini memang menjadi kata kunci kita pada kurun waktu akhir-akhir ini dan masih akan menjadi kata kunci didalam tahun-tahun mendatang. Mengapa? Apabila kita ingin tetap mempertahankan anggaran belanja berimbang, apabila kita tetap ingin untuk mempertahankan cara-cara devisa bebas, apabila kita tidak ingin untuk melakukan rescduling hutang-hutang luar negeri, maka satu satunya kunci pemecahan adalah ekspor.

Ketiga hal yang saya sebut itu merupakan landasan dasar kita berfikir dan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi selama ini. Itu perlu kita pegang teguh. Oleh karenanya kunci adalah ekspor. Karena sebagaimana dinyatakan beberapa pejabat Pemerintah dan para pengamat ekonomi, neraca pembayaran adalah suatu bidang dari seluruh kegiatan ekonomi, yang pada kurun waktu akhir ini memerlukan perhatian serius sebab kita justru sedang sampai pada puncak pembayaran cicilan dan bunga hutang luar negeri. Dalam konteks ini, usaha-usaha untuk mendorong ekspor itu mempunyai arti yang sangat substansial. Masalahnya adalah bahwa sekalipun hasil-hasil ekspor non migas naik secara mengesankan, tapi tetap belum dapat begitu saja menggantikan posisi minyak dan gas bumi. Mengapa? Karena ekspor minyak dan gas bumi disamping membantu untuk memperbaiki neraca pembayaran, juga sekaligus secara langsung menghasilkan dana-dana dalam bentuk rupiah untuk kepentingan APBN. Karena, praktis seluruh hasil ekspor minyak dan gas bumi itu menjadi perolehan dalam negeri berupa pajak perseroan minyak, sedangkan ekspor non MIGAS memang akan sangat membantu neraca pembayaran namun tidak dengan segera menghasilkan dana-dana dalam bentuk rupiah untuk kepentingan penyusunan APBN. Oleh

Digitized by Google

karena dari seluruh total nilai ekspor, arti perolehan dana bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baru didapat setelah pajak-pajaknya diambil. Selebihnya itu milik para pelaku ekspor itu.

Tetapi bagaimanapun juga, kecenderungan yang membaik dan meningkatnya secara mengesankan sasaran-sasaran ekspor non migas ditambah dengan kecenderungan harga-harga minyak bumi yang secara rata-rata tahun 1987 baik, telah menumbuhkan kegairahan-kegairahan baru di dalam negeri. Namun kita perlu kembali untuk waspada dan waspada sekali. Sebagaimana kita ketahui sekalipun harga-harga minyak bumi selama kurun waktu yang kita lewati tahun 87 mempunyai kecenderungan membaik, tetapi juga kita catat bahwa terdapat kecenderungan-kecenderungan melemah didalam satu dua bulan terakhir ini. Juga tercatat sekian banyak anggota-anggota OPEC memproduksi dan mengekspor minyak bumi jauh melebihi kuota. Ada lebih dua juta barrel per hari produksi Opec yang berada di atas plafon sekarang ini.

Ketua Koordinator Bidang Inbang FKP itu mengutip keterangan Menteri pertambangan Subroto di Komisi VI DPR beberapa waktu yang lalu bahwa Uni Emirat Arab secara praktis telah memproduksi dan mengekspor minyak buminya duakali lipat dari kuota, itu berarti kelebihan 900.000 barrel per hari. Irak sebagai anggota OPEC telah menyatakan dalam sidang Opec 1986 tidak terikat pada kuotanya dan secara terang terangan dan resmi menyatakan bahwa Irak sekarang dalam level lebih dari 2,7 juta barrel per hari yang berarti kira-kira 1 juta barrel per hari di atas kuota yang seharusnya. Irak dalam waktu mendatang tidak sampai setahun, kata Menteri Subroto, Irak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produksi menjadi empat juta barrel per hari.

Faktor Irak dan pertentangan yang terjadi antara Irak dan Arab Saudi merupakan suatu kerumitan tersendiri dan apabila hal tersebut tidak dapat 'dipersatukan' akan menyebabkan terbukanya kemungkinan hancurnya harga minyak kembali. Hal ini yang perlu kita waspadai, karena bagaimanapun juga ekspor non migas kita sekarang meningkat tetapi khusus untuk APBN posisi ekspor non migas tidaklah sama dengan posisi migas. Artinya hasil dari ekspor migas disamping memperbaiki neraca pembayaran juga secara langsung berpengaruh juga pada besarnya pendapatan di dalam RAPBN. Sedangkan ekspor nonmigas berpengaruh terhadap neraca pembayaran, tetapi pengaruhnya terhadap APBN tidak dengan segera terasakan. Karena para pelaku ekspor nonmigas ini adalah masyarakat swasta kalau toh itu BUMN sumbangannya terhadap APBN tidaklah sebesar volume ekspor itu melainkan hanya melalui pajak-pajaknya. Maka dalam waktu yang dekat ini dari segi penerimaan, ekspor nonmigas belum dapat menggantikan posisi penerimaan dari migas. Oleh sebab itu dari segi APBN, migas ini masih tetap memegang peranan yang terpenting.

Namun demikian, berbeda dengan tahun yang lampau, maka tahun ini diwarnai oleh optimisme yang makin berkembang. Jadi sekalipun APBN masih ada dalam pertanyaan besar karena belum diputuskannya masalah minyak, namun terdapat suasana ekonomi yang bergairah; pelaku-pelaku ekonomi tampak bergairah dan data-data menunjukkan kegairahan itu dapat dilihat dari makin meningkatnya ekspor non migas dari bulan ke bulan.

BPS terakhir mencatat bahwa ekspor nonmigas September 1987 melonjak dengan sangat tajam dan mencapai angka 872,3 juta dollar AS. Hal ini dengan sendirinya akan sangat membantu memperbaiki posisi neraca pembayaran kita terutama di tengah-tengah meningkatnya kewajiban-kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang yang sedang mencapai puncaknya. Maka suasana yang demikianlah yang harus dipertahankan terus. Upaya-upaya untuk lebih merangsang lagi perlu menjadi prioritas, deregulasi deregulasi lanjutan perlu terus dilakukan, dan perlu dihindari keputusan-keputusan yang menggoyahkan suasana ini. Barang kali termasuk didalam hal ini perlu sangat dipertimbangkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak dengan alasan untuk memperkecil atau menghilangkan subsidi BBM yang muncul. Hal itu tidak lain agar suasana yang terbina ini dapat mempunyai kesempatan yang cukup untuk menjadi lebih mantap dan berakar kuat. Namun demikian kemajuan-kemajuan yang telah kita capai didalam bidang ekspor nonmigas ini tidaklah lepas dari kemungkinan-kemungkinan lain yang bersifat ekses. Sebagaimana kita ketahui bahwa ekspor nonmigas kita ini sebagian besar diandalkan pada hasil-hasil olahan industri. Juga kita ketahui industri-industri yang telah berhasil melakukan ekspor sebenarnya pada awalnya merupakan industri yang dibangun untuk memproduksi bahan-bahan yang bersifat subsitusi impor. Jadi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Apabila suasana ekspor ini berkembang terus, dan harga-harga internasional demikian menariknya, maka ekses yang bisa terjadi adalah orang beramai-ramai memilih menjual produksinya keluar sehingga pada suatu waktu bisa terjadi kekurangan supply di dalam Negeri. Juga dengan derasnya arus ekspor disebabkan karena harga-harga internasional memungkinkan kita ekspor, maka pada gilirannya itu berarti kita menarik harga-harga internasional ke dalam negeri yang bisa berarti harga-harga dalam negeri ikut terangkat naik. Ini merupakan risiko.

Menekan Ekses, Growth Centre Baru

Untuk menekan kemungkinan-kemungkinan ekses tersebut, maka perlu dilakukan pemerintah upaya-upaya untuk mencegah kekurangan supply dalam Negeri, namun mekanisme yang dipilih hendaknya tetap mekanisme yang sesuai dengan semangat deregulasi. Karena apabila yang dilakukan melalui larangan-larangan, maka hal tersebut akan menambah kerumitan baru dan merupakan sumber dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya manipulasi-manipulasi. Hendaknya mempergunakan mekanisme ekonomi.

Ini merupakan risiko yang kita hadapi dan sampai batas batas tertentu memang harus dapat diterima, karena memang ekspor merupakan tuntutan utama pada saat ini. Ekspor adalah merupakan kunci apabila kita ingin mempertahankan anggaran berimbang, mempertahankan sistim devisa bebas dan apabila kita tidak ingin rescheduling hutang luar negeri. Pendek kata dapat dikatakan bahwa telah terjadi momentum baru di bidang ekonomi secara keseluruhan yang memberikan harapan dan optimisme. Tetapi tetap tidak luput dari kemungkinan-kemungkinan yang sangat menekan. Se-

Digitized by Google

cara lebih luas kita melihat ada gejala peranan dari masyarakat makin lama makin menonjol dibandingkan dengan peranan sektor negara melalui APBN-nya.

Dari segi pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa secara keseluruhan hal ini merupakan gejala sehat, karenanya perlu dimantapkan terus. Lokomotif pembangunan tidak lagi hanya ditumpukan kepada APBN melainkan juga pada masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan tinggal landas, maka keadaan yang demikian itulah yang harus kita capai.

Di tahun 1987 ini ada momentum optimisme yang diharapkan berjalan tahun yang akan datang. Faktor lain yang bisa mempengaruhi keadaan adalah memang situasi ekonomi internasional, moga-moga crash yang terjadi pada pasar bursa yang terjadi akhir-akhir ini tidak menggelinding menjadi depresi ekonomi karena kalau itu terjadi, kemampuan membeli dari negara-negara industri menciut pada gilirannya mereka akan mengurangi pembelian-pembelian, mengurangi impornya termasuk impor dari Indonesia. Dengan sendirinya itu akan memukul kembali export drive yang sedang berjalan dengan kepesatan yang sangat mengesankan sekarang ini.

Dalam jangka yang agak panjang, maka usaha kita untuk menggalakkan ekspor harus segera dibarengi dengan usaha-usaha untuk membangun industri-industri yang sejak awal didisain untuk masuk ke pasaran ekspor sehingga tidak terjadi tarik menarik antara kebutuhan dalam negeri dengan pasaran ekspor. Dan industri-industri semacam ini yang paling tepat adalah industri-industri yang resources base. Artinya industri-industri yang melakukan pengolahan sumber-sumber daya alam baik yang kita miliki dibidang pertanian maupun dibidang pertambangan. Ini yang harus segera dipromosikan, harus segera distimulir untuk tumbuh. Disamping itu kalau kita berbicara mengenai ekspor, sebetulnya kita berbicara mengenai perdagangan internasional. Maka alangkah anehnya apabila di dalam berbicara menggebu-gebu mengusahakan ekspor tidak kita tumbuhkan lembaga-lembaga perdagangan yang memadai. Maka untuk usaha-usaha memperkokoh lembaga-lembaga perdagangan, perusahaan-perusahaan perdagangan ini menjadi sangat penting dan kita patut memberikan penghargaan kepada siapa saja yang mau mengambil prakarsa untuk bergerak di bidang perdagangan ini. Dengan demikian dapat kita harapkan supaya lembaga perdagangan, perusahaan-perusahaan perdagangan ini menembus segala lapisan yang ada, bisa langsung terjun ke daerah-daerah pedesaan dimana sumber-sumber komoditi itu terdapat. "Dengan demikian apa yang dilakukan secara internasional dapat segera mempunyai dampak menaikkan taraf hidup di lingkungan pedesaan. Sehingga lingkungan pedesaan menjadi growth centre yang baru."

3 Mencipta Daya Tahan Dan Daya Kembang

Sebenarnya ada sejumlah tanda yang membuat perekonomian Indonesia tahun 1988 menjadi *optimistik*, kata Ir Muhammad Halim pengajar ITB. Optimisme ini dapat di lihat dari apa yang terjadi tahun 1987 dalam perekonomian nasional kita.

Resesi dunia tetap berlangsung, bahkan di dalam penghujung tahun 1987 ini perekonomian dunia juga diguncangkan adanya turunnya nilai saham di wall street. Di saat ekonomi dunia dalam keadaan tersebut bagaimana dengan perekonomian nasional kita?

Ada dua hal yang saya amati bersamaan dengan keadaan perekonomian dunia tersebut. Pertama kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat, bertambah baik. Bahkan dengan terjadinya kemarau panjang yang melanda Indonesia juga tidak terdapat kemelut. Dan yang kedua adalah bahwa saham-saham yang tertanam di luar negeri juga telah dapat kembali ke dalam negeri. "Jadi menurut pendapat saya prestasi yang dicapai dalam tahun 1987 itu cukup tinggi". Dan ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional kita itu mempunyai daya tahan dan punya daya tarik. Kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, komponen-komponen apa yang dapat atau yang mempunyai daya tahan dan daya tarik yang tinggi tersebut?

Dua Segmen

Menurut saya ada dua segmen yang dapat berbicara sehingga kita itu mempunyai daya tahan. Pertama segmen perekonomian kita yang relatip tradisional, misalnya industri kecil yang berupa kerajinan rakyat. Dan yang berikut adalah segmen ekonomi yang modern yaitu yang mempunyai skala besar. Dalam perekonomian kita, masing-masing segmen mempunyai peranan sendiri-sendiri.

Kalau kita bicara tentang ekonomi modern dan berteknologi tinggi, menurut saya, berarti kita berbicara mengenai unsur ekonomi yang mempunyai kaitan dengan daya kembang dari bangsa kita. Namun kalau kita berbicara tentang industri kecil yang orientasinya untuk memenuhi kebutuhan lokal, maka kita akan berbicara mengenai daya tahan. Misalnya saja, industri kerupuk ini tidak mengeluh adanya resesi dunia dan akibat dari kebijaksanaan moneter. Dan dalam hal yang saya contohkan itu, kendati ada pukulan yang bertubi-tubi, perusahaan tersebut tetap mempunyai kelenturan (punya daya tahan yang besar).

Dengan hal seperti itu pada masa yang akan datang, saya berpendapat bahwa disamping ekonomi kita itu mempunyai daya kembang — dalam rangka untuk memacu pertumbuhan ekonomi — ada daya tahan. Dan dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, saya pikir selain meningkatkan daya kembang, kita memang juga perlu memperkokoh pelaku ekonomi yang dapat memperkuat daya tahan kita. "Agak riskan bagi kita untuk menggantungkan diri

Muhammad Halim

Digitized by Google

pada industri modern saja untuk meningkatkan daya kembang. Sedangkan kita belum tahu persis arah perkembangkan." Saya rasa dalam keadaan demikian, kita perlu agak defensiflah. Yaitu dengan memperkuat daya tahan dan sambil memecahkan masalah-masalah yang mendesak. Tapi saya tidak mengatakan, bahwa pembangunan yang mempunyai daya kembang harus di stop. Tidak. Hanya, kita harus mempunyai perhatian yang besar kepada sisi pembangunan yang nantinya memiliki daya tahan. Karena masalah yang mendesak itu dan pembangunan yang mempunyai daya tahan tersebut erat sekali kaitannya.

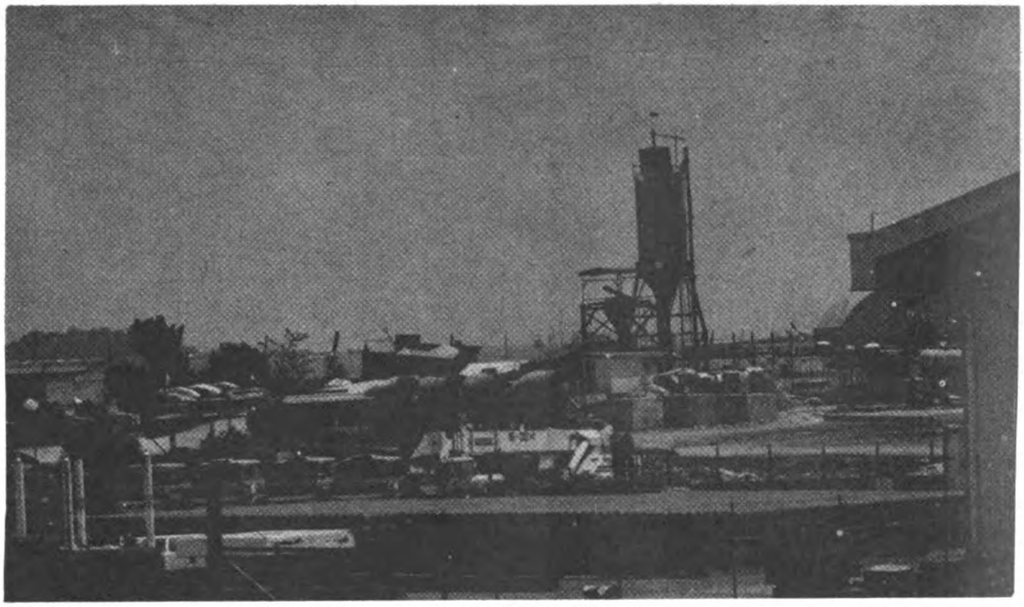
Agak riskan menggantungkan diri pada industri modern saja

Dalam jangka pendek, untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang mendesak, adalah soal perkuatan daya tahan perekonomian bangsa kita. Dan yang berikutnya adalah masalah jangka panjang yang berkaitan dengan pemekaran ekonomi bangsa kita. Menurut pendapat saya, banyak persoalan-persoalan, baik pembangunan ekonomi yang mempunyai jangka pendek atau jangka panjang. Dan hal tersebut pada umumnya berkaitan dengan aneka variable. Pertama adalah yang berkaitan dengan kependudukan, sumber daya alam.

Mengenai kependudukan: Penduduk kita sekarang ini 170 juta jiwa. Tahun 2000 diperkirakan mencapai 210 juta. Dan lembaga riset di Washington meramalkan pada tahun 2100 penduduk kita akan mencapai 356 juta jiwa. Jumlah yang besar itu akan mempunyai kaitan dengan perekonomian kita jangka pendek.

Dan yang berikutnya lagi menurut saya adalah bahwa ethos kerja kita itu masih belum melembaga dalam sistim nilai kita. Maksudnya adalah bahwa di dalam masyarakat kita sering melihat bahwa kerja itu belum merupakan nilai dan belum merupakan kemuliaan manusia. Banyak orang bekerja karena didesak oleh adanya kebutuhan. Dan kalau kebutuhan itu sudah terpenuhi, kemudian banyak orang yang enggan bekerja. Hal tersebut terjadi karena adanya kelompok-kelompok masyarakat yang masih memandang kerja sebagai instrumen untuk hidup dan bukan merupakan ukuran kemuliaan. Contohnya, banyak orang yang memandang bahwa orang yang bekerja dalam usia yang relatif tua itu kurang baik.

Hal yang berikutnya adalah **Sumber daya alam:** Dalam masyarakat kita masih belum dapat dihindarkan ketergantungan terhadap sumber daya alam untuk menopang kehidupan. Misalnya saja pada jaman dulu, kalau kita tidak mempunyai sawah dan kebun, maka kita tidak dapat makan. Sedangkan pada saat ini orang yang menggunakan kemampuan pikirannya, rasa ketergantungan itu mulai dapat berkurang. Misalnya saja wartawan.

Dilain pihak sekarang ini justru faktor sumber daya alam ini menjadi berkurang. Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan penduduk yang besar maka penggunaan sumber daya alam itu harus dalam skala besar. Dan dalam pendayagunaan sumber daya alam yang besar itu, jelas juga diperlukan modal yang besar dan teknologi yang canggih. Justru ke dua-duanya itu, apakah modal maupun teknologi yang canggih tersebut, untuk saat ini masih merupakan barang langka bagi kita.

Bagaimana upaya pemecahannya, dengan melihat sumber daya alam tidak bertambah sedangkan jumlah penduduk semakin tahun semakin bertambah? Apa efek yang kita hadapi kalau sumber daya alam dan perkembangan penduduk gambarannya demikian?

Efeknya adalah pada masalah lapangan kerja, pendidikan dan yang berikut adalah pada daya beli rakyat.

Dalam bidang lapangan kerja. Yang ingin saya soroti adalah, selama ini kita mengandalkan pembangunan di bidang industri untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan lapangan kerja. Kita harus melihat dengan adanya peranan industri besar, industri modern yang capital intensif justru dalam penyerapan tenaga kerja itu terbatas. Sekarang ini, juga terlihat adanya gejala bahwa investmen per capita per employ pertenaga kerja di pabrik-pabrik itu besar. Misalnya saja investasi 2 milyar, tetapi tenaga yang terserap 200 orang. Maka investmen per kapita itu adalah 2 milyar itu dibagi 200 orang. "Jadi kalau kita mengandalkan hal yang semacam ini untuk menanggulangi masalah lapangan kerja maka tidak akan terkejar". Kecuali kalau kita itu mempunyai dana yang luar biasa. Menyelesaikan masalah lapangan kerja dengan industri modern itu cocok untuk negara dengan pertumbuhan penduduk yang kecil. Atau, di negara yang dananya berlimpah-limpah. "Kendati daya serap dari industri besar ini lemah, namun harus tetap dibina. Sebab hal tersebut nantinya akan dapat menopang daya kembang kita."

Sebaliknya, di sektor industri kecil atau industri rakyat, dengan modal kecil, 3 juta misalnya pandai besi dapat menyerap 6 tenaga kerja.

Dan kalau kita katakan masalah lapangan kerja itu suatu masalah yang mendesak, agaknya kita harus berpikir lain, yaitu mendorong para pengusaha kecil tersebut, yang berorientasi pada pasar lokal atau regional.

Industri kecil itu memang mempunyai daya serap terhadap tenaga kerja tinggi.

Digitized by Google

Perlu dijaga relavansi pendidikan dan pembangunan

Tetapi bukan berarti industri besar kurang penting. Bagaimanapun daya kembang itu harus dibangun. Sebagaimana pula perhatian terhadap industri kecil, tradisional itu perlu ditingkatkan lagi. Karena industri kecil atau tradisional tersebut mempunyai daya lentur dan daya serap terhadap tenaga kerja. Kalau hal tersebut dikaitkan dengan masalah-masalah yang lebih besar, pengembangan industri kecil dan sebangsanya itu akan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Masalah pendidikan: Dalam masalah ini ada yang dihadapi. Pertama dalam lapangan kerja sekarang ini sering kita jumpai, kesempatan kerja itu ada namun tidak dapat di isi dengan tenaga kita karena tingkat pendidikan yang tidak memadai. Apalagi dengan masuknya perkembangan teknologi ke Indonesia. Selain itu pendayagunaan sumber alam itu memerlukan teknologi yang tinggi. Dalam hal ini diperlukan dukungan sains dan teknologi yang makin maju.

Kembali kepada masalah pendidikan maka saya melihat dua pokok. Pokok pertama adalah kebutuhan akan pendidikan makin lama akan semakin besar. Hal ini kita lihat dalam dua arti. Pertama penduduk yang semakin banyak itu menuntut kesempatan belajar yang lebih tinggi. Dan yang ke dua adalah pembangunan yang makin meningkat itu memerlukan dukungan ilmu pengetahuan yang lebih maju juga.

Kita amati dari sudut pembangunan. Disini kita berbicara tentang relevansi pendidikan nasional kita dengan proses pembangunan yang kita selenggarakan. Dari sini kita lihat, bahwa bidang pendidikan ini relevansinya dengan pembangunan perlu kita jaga. Karena pendidikan ini mempunyai dua fungsi yang terpenting. Pertama fungsi lembaga-lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi dan pusat pengembangan ilmu dan teknologi. Dan yang kedua adalah fungsi lembaga-lembaga pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja yang siap.

Dan yang ada kaitannya dengan pengembangan ilmu itu mempunyai orientasi jauh ke depan. Tapi untuk berfungsi sebagai pemasok tenaga kerja yang siap, itu jangka pendek. Dan hal tersebut dapat menimbulkan kekacaubalauan. Misalnya saja ada yang mengatakan Bahwa universitas harus dapat menghasilkan tenaga yang siap pakai. Namun kalau hanya digunakan tenaga yang siap pakai dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang, ini bisa saja. Tapi setelah mereka bekerja di industri dan industri ini terus saja berkembang, bagaimana? Kalau mereka tidak punya landasan-landasan keilmuan yang kuat, maka mereka tidak punya kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang tepat. Dan barangkali insinyur yang ada (dengan menggunakan tenaga yang siap pakai) barangkali dalam lima tahun sudah tidak dapat dipakai lagi.

Kalau kita melihat jangka panjang, maka kita membutuhkan lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan ilmu dan teknologi. Tapi kalau kita melihat pembangunan dan kebutuhan akan tenaga kerja, kitapun juga melihat kebutuhan adanya tenaga yang siap pakai, tetapi dengan catatan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi (tenaga yang bisa menyiapkan diri).

Bila kita mengamati pendidikan di Indonesia, pendidikan tinggi khususnya, tampaknya pendidikan tinggi itu dituntut untuk mampu mengembangkan ilmu sekaligus menciptakan tenaga yang siap pakai. Jadi rasa-rasanya pendidikan tinggi itu diberi beban yang cukup berat. Akhirnya kalau beban terlalu berat, bisa susah. Jadi mengenai pendidikan ini apakah kita tidak perlu untuk mengadakan reformulasi: Kalau kita melihat persoalan jangka panjang yang intinya adalah pengembangan ilmu dan teknologi, dan kalau kita melihat jangka pendek yang intinya adalah untuk mencetak tenaga yang siap pakai.

Memikirkan Desa

Yang saya prihatinkan adalah daya beli dari masyarakat pedesaan kita. Bukan hanya saja karena masyarakat pedesaan itu besar jumlahnya. Dan juga karena masyarakat pedesaan inilah yang menopang swasembada di bidang pangan. Kalau kita mau obyektip, bahwa swasembada beras kita telah berhasil, kita gembira. Namun perlu kita lihat, siapa pendukung utama dari swasembada ini. Yaitu petani yang sawahnya rata-rata 0,2 ha. Apakah kita tidak prihatin bahwa swasembada pangan kita itu ditopang oleh para petani yang mempunyai tanah sekecil itu? Saya pernah mendengar wawancara di TVRI, seorang petani yang diwawancarai mengatakan, bahwa padinya yang belum waktunya dipanen dijual, karena petani itu butuh uang untuk kebutuhan anaknya yang sekolah.

Siapa yang tidak senang dengan adanya swasembada

Digitized by Google

beras? Ini merupakan suatu prestasi. Swasembada beras ini tidak pernah tercapai mulai dari sejak jaman penjajahan Belanda. Justru dengan pemerintah Orde Baru bahkan dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 170 juta itu swasembada dapat dipenuhi.

"Untuk dapat menolong dan meningkatkan daya beli para petani menurut pendapat saya ada dua unsur. Pertama adalah pengembangan usaha tani. Dan yang kedua adalah usaha-usaha industri kecil, perlu untuk ditingkatkan untuk dapat memperkuat posisi dari pada petani kita."

Di pedesaan sekarang ini sudah banyak anggota masyarakat yang menyadari perlunya mengembangkan usaha tani dan usaha-usaha industri. Jadi iklim-iklim yang dibina oleh pemerintah sudah mulai terbentuk. Jadi kita sudah maju selangkah lagi untuk merealisirnya. Terutama masalah daya beli yang ada di masyarakat pedesaan.

Sengaja dalam menyoroti masalah ekonomi jangka pendek, saya tidak bicara bisnisnya. Tapi berbicara tentang elemen-elemen yang lebih mendasar, misalnya saja masalah lapangan kerja, dengan tekanannya industri kecil, usaha rakyat. Karena dengan usaha tersebut ada 3 sasaran yang dapat dicapai. Pertama, yaitu daya tahan ekonomi kita bertambah baik dan lapangan kerja tambah baik. Dan yang ketiga kalau di pedesan itu dibangun industri kecil, maka daya beli dari masyarakat desa akan meningkat. Dan ini akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan hal ini juga akan memperkuat swasembada pangan. Sehingga keseimbangan antara industri dan pertanian akan merupakan unsur yang penting dalam bidang ekonomi sebagai landasan untuk lepas landas. Dan hal ini harus diperhatikan betul dalam tahun 1988, sebab tahun itu adalah akhir dari masa Repelita IV. Dan dalam Repelita V nanti itu kita sudah berbicara tentang lepas landas.

Inti Masalah Jangka Panjang

Sedangkan untuk masalah jangka panjangnya dalam pembangunan ekonomi. Saya kutip dari salah satu ekonom terkenal, Peter Drucker namanya. Dia mengatakan, ekonomi produk primer makin terlepas dari ekonomi industri. Yang dimaksud dengan ekonomi produk primer itu adalah sektor yang menghasilkan bahan-bahan, misalnya saja pertanian, pertambangan dan yang lain. Hal ini akan terlepas dari ekonomi industri. Ekonomi industri disini adalah manufacture. Jadi esensi dari pandangan Peter Drucker itu adalah, keterkaitan antara manufacture dengan sektor yang menghasilkan bahan mentah itu makin lama makin berkurang. Peter Drucker memberikan contoh-contoh mengenai industri dalam pabrik, dalam production cost itu ada biaya yang disebut material cost. Dalam industri dulu, misalnya saja dalam industri yang memproduksi panci, material cost itu sekitar 60% dari production cost. Disini peran material masih tinggi. Dalam industri yang lebih maju, material costnya itu turun menjadi 40%, dari production cost. Sedangkan sekarang ini industri yang diterapkan dalam teknologi tinggi, misalnya saja industri microchip atau konduktor, material cost hanya 1 sampai 3 persen dari pada produksi. Sehingga disimpulkan bahwa keterkaitan dari industri manufacture dengan bahan-bahan tersebut mengendur. Kemudian biaya apa yang meningkat di dalam industri yang ditopang dengan industri yang makin maju? Ternyata yang meningkat itu adalah biaya ilmu pengetahuan. Kongkritnya adalah dalam bidang research and development.

Jadi pernyataan Peter Drucker itu kalau mau kita kaji kembali, mempunyai inti yang penting bagi kita dalam masalah jangka panjang. Pertama adalah masalah ketergantungan kita pada masalah ekonomi industri pada sumber daya alam mengendur. Dan yang kedua sumber daya alam nantinya bukan lagi merupakan kekayaan yang terpenting. Dan di negara yang kaya sumber daya alamnya belum tentu dikatakan negara yang kaya. Dan yang ketiga adalah bahwa di dunia ini makin ramai dan makin tercipta kesempatan yang besar kepada mereka-mereka yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik.

Oleh penulis lain yang namanya James Lynch itu disebut sebagai knowledge worker. Katanya kalau pekerja makin berpengetahuan, produktivitas dan efisiensi dari unit-unit produksi akan makin meningkat. Dan hal ini sudah dapat terasa di Indonesia.

Peter Drucker juga memperingatkan bahwa knowledge worker itu sudah tidak lagi berkaitan dengan produktivitas, efisiensi dari unit produksi, tapi lebih mendasar lagi. Yaitu hal tersebut merupakan masalah yang berkaitan dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peringatan James Lynch dilontarkan sekian belas tahun yang lalu sekarang mulai terasa. Jangan-jangan peringatan Peter Drucker yang dilontarkan sekarang ini juga akan dirasakan oleh kita menjelang tahun 2000-an.

Kemudian bagaimana efeknya pada kita? Tadi sudah saya katakan untuk menopang penduduk yang besar, kita itu mempunyai rasa ketergantungan kepada sumber daya alam yang besar. Padahal kalau kita ikuti peringatan Peter Drucker, bahwa peran dari sumber daya alam itu lama-lama akan mengendur. Dan dunia akan memberikan kesempatan kepada mereka para knowledge worker. Artinya untuk jangka panjang kita itu perlu untuk mengutarakan kualitas manusia. Saya kuatir bila kita tetap mengandalkan pendayagunaan sumber daya alam semata, kita akan ketinggalan. Negara-negara yang dalam hal sumber daya alam tidak kaya, seperti Jepang, Korea, Israel, ternyata mampu bersaing dalam dunia internasional.

Namun ketergantungan terhadap sumber daya alam sama sekali tidak harus dihilangkan. Tapi perannya itu akan berkurang. Jadi kalau kita ingin mempunyai daya tahan dan daya kembang ekonomi dalam jangka panjang, maka saya kira daya kembang kualitas manusia itu perlu untuk diutamakan. Dan kalau manusianya itu dalam pengembangan kwalitas manusia itu nanti harus membina manusia harus dari tiga segi. Pertama harus memiliki pengetahuan, dan ditopang dengan pengetahuan yang memadai, dan itu saja tidak cukup. Dan yang kedua adalah etik. Dan yang ketiga adalah moral. Jadi untuk mengembangkan kwalitas manusia menjadi knowledge worker. Apalagi kalau pembangunan kualitas manusia itu dilakukan dalam masyarakat Pancasila, dimana landasan etik dan moral tidak dapat kita kesampingkan. "Saya sadar, bahwa pembangunan manusia yang berkualitas ini tidak bisa dilaksanakan dengan jangka pendek. Tapi memerlukan waktu yang panjang, barangkali memerlukan beberapa generasi. Sehingga dengan manusia yang berkwalitas tersebut, jumlah penduduk yang 170 juta jiwa itu bukan merupakan suatu beban, tapi merupakan suatu aset nasional."☐ Subandrio/ D.Triono/Badrul Mustofa/RA

Digitized by Google

Evaluasi Dua Praktisi

Keterlibatan seseorang dalam suatu lingkup kegiatan, melahirkan pengalaman. Atas dasar itu tumbuh kemampuan dan mungkin juga insting untuk membuat penilaian terhadap gejala dan fakta yang berkembang di sekitar obyek perhatian yang digeluti. Orang akhirnya mempunyai kemampuan melahirkan argumen pembenaran maupun penolakan.

Dan tentang dinamika kehidupan ekonomi kita tahun ini, telah banyak yang mengeluarkan pendapat. Para ilmuwan yang mengamati perjalanan ekonomi dengan memakai acuan teori untuk menyimpulkan gejala, mengemukakan pendapat mereka bahwa ekonomi kita tahun ini memang berat. Tapi harapan untuk mencapai kemajuan dan keluar dari kerumitan tetap ada. Para ilmuwan sosial yang lebih menekankan bobot manusia dalam pertumbuhan ekonomi, bisa saja berbicara lain. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan sederetan angka bukan tidak diakui, tapi kualitas perkembangan itu sendiri juga dipersoalkan. Para teknorat maupun birokrat, juga melakukan hal yang sama dengan kerangka acuan yang berlainan.

Dan masih tentang ekonomi selain ilmuwan, ekonomi, teknorat dan birokrat yang pantas didengar pendapat dan penilaian mereka, siapa lagi? Tidak kalah pentingnya tentu saja adalah evaluasi atau penilaian para praktisi ekonomi, yaitu mereka yang sehari-hari menekuni aktivitas sesungguhnya dari perekonomian itu sendiri. Mereka adalah praktisi dunia usaha, yang dijuluki sebagai pelaku-pelaku ekonomi. Mereka adalah mata rantai terdepan yang menggeret pertumbuhan.

Tentu saja dengan menampilkan para pelaku ekonomi secara khusus dalam laporan ini, tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau mengecualikan peranan segmen lain dalam menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi nasional. Para ahli ekonomi diperlukan pengetahuannya untuk melahirkan konsep-konsep yang bisa dipakai oleh kalangan dunia usaha. Sedangkan pemerintah berperanan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lewat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menopang. Kita berkeyakinan bahwa berperanannya suatu sistem dibutuhkan interaksi yang proporsional antara semua unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan mengemukakan pemikiran seperti ini, dalam konteks ekonomi, kita sebenarnya ingin mengatakan bahwa gerak pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan keterlibatan yang proporsional antara sektor swasta, pemerintah dan rumah tangga, yang di Indonesia terwakili dalam koperasi.

Untuk mengetahui liku-liku problema, harapan dan penilaian ekonomi kita tahun ini, pendapat ekonom dan ilmuwan (lihat Laporan Utama dan Fokus) juga ditampilkan. Sedangkan dari pihak praktisi **Sukamdani Sahid Gitosarjono** dan **Tony Agus Ardie** dimunculkan **Media Karya** kali ini. Tentu saja pendapat keduanya yang di tampilkan dalam kapasitas pribadi, bukan sebuah fungsionaris organisasi, bisa saja dianggap tidak mewakili seluruh pemikiran dan penilaian kalangan praktisi. Tetapi sebagai sebuah pemikiran, kiranya kita tidak perlu apriori. Kita, dalam rangka mencari suatu kesimpulan yang jitu atas sebuah perkembangan, toh perlu mendengar pendapat orang lain.

Sukamdani Sahid Gitosardjono

Lebih Baik

Berbeda dengan penilaian para ekonom dan ilmuwan, baik Sukamdani maupun Tony Agus Ardie menilai bahwa perkembangan ekonomi kita tahun ini, kendati masih terasa berat, tapi lebih baik dibanding tahun lalu. Alat ukur yang mereka pakai tidak terlalu rumit. Perkembangan perusahaan yang dipimpin keduanya menjadi dasar penilaian itu.

Menurut Sukamdani, Sahid Jaya Group mengalami perkembangan yang lebih baik tahun ini dibanding tahun lalu. "Sahid yang di Jakarta berhasil memperoleh Bintang Lima, dan Sahid yang di Manado, Jogya dan Surabaya mencatat prestasi menggembirakan," katanya sambil menambahkan bahwa kemajuan itu tidak ingin dibocorkan dalam bentuk pengutaraan angka keuntungan karena "rahasia perusahaan." Atas dasar trend positif yang mulai menggejala tahun ini maka proyek perluasan bangunan Hotel Sahid yang terletak di Jalan Sudirman, Jakarta, akan segera terealisir. Proyek yang tertunda beberapa tahun itu, menurut Sukamdani akan seluruhnya rampung dua tahun lagi. Untuk tahap pertama yang direncanakan selesai sekitar Mei atau Juli tahun depan Sahid akan mendapat tambahan kamar sebanyak 50. Perluasan yang menambah total kamar sebanyak 306

Digitized by Google

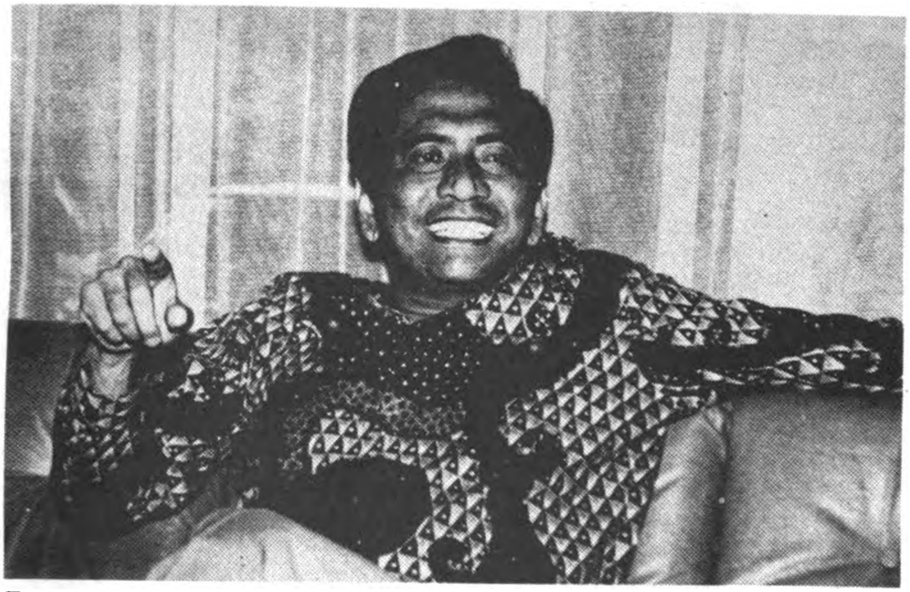

Tony Agus Ardie

lengkap dengan Convention Hall yang mampu menampung 1000 orang itu, menelan investasi sebanyak Rp 50 milyar. "Tapi duitnya ngutang dari bank," ujarnya polos.

Kemajuan tahun ini dicatat oleh perusahaan Indocor yang dipimpin Tony Agus Ardie. Kendati seperti Sukamdani tidak mau membocorkan apa yang menjadi rahasia perusahaan, Indocor kini melakukan ekspansi cukup serius di sektor agribisnis. Ada tambak udang di daerah Banten yang siap panen, serta sejumlah perusahaan rintisan di NTT. Kini Indocor bahkan mulai melirik komoditi kerajinan rakyat dan mulai pula meminati *wood products* untuk ekspor.

Seandainya sempat mewawancarai semua pimpinan perusahaan di negeri ini cerita tentang kemajuan mungkin akan lebih banyak. Namun itu tidak berarti kita ingin menutup mata terhadap perusahaan-perusahaan yang terpaksa gulung tikar atau prihatin karena pengaruh kesulitan ekonomi. Dalam setiap suasana perkembangan ekonomi, cerita tentang kebangkrutan usaha dan kemajuan akan selalu dijumpai.

Tanpa menutup-nutupi kesulitan yang melanda perekonomian Indonesia sejak 1983 dan dampaknya masih terasa hingga sekarang, Tony dan Sukamdani menganggap semua kesulitan itu ada hikmahnya. Untuk bisnis keduanya yang kini mencatat ekspansi, hal itu tercapai karena mereka tidak tenggelam dalam kesulitan tapi selalu berupaya mencari terobosan baru. Kejatuhan harga minyak yang menyebabkan proyek-proyek pemerintah menciut, dinilai Tony sebagai hikmah yang positif bagi dunia usaha. "Bagi pengusaha, kesulitan adalah peluang."

Mengapa Tony kok "mensyukuri" kejatuhan harga minyak yang menjadi andalan lebih dari 60 persen penerimaan devisa negara? Alasannya sederhana. Pada saat minyak masih mencapai harga di atas 30 dolar per barrel, pemerintah memiliki banyak uang. Proyek-proyek pemerintah bertaburan dimana-mana. Bersamaan dengan itu muncullah kontraktor dalam negeri dalam jumlah ribuan yang kerja utamanya menunggu proyek pemerintah.

Namun ketika pemerintah ketiadaan dana lagi karena harga minyak yang merosot tajam (awal tahun ini harga bahkan pernah mencapai 10 dolar perbarrel) para kontraktor yang menadah proyek pemerintah ketiadaan kerja. Mereka seakan kehilangan pegangan, dan banyak yang gulung tikar. Jumlah kontraktor yang menjadi anggota GAPENSI misalnya turun drastis.

Ada semacam *blessing in disquise* yang muncul dari kerumitan ini. Yaitu para kontraktor yang ketiadaan kerja lagi karena proyek pemerintah yang terbatas, mulai banting stir untuk memikirkan sektor lain yang masih terbuka luas serta memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan. Dan bersamaan dengan politik banting stir pemerintah yang menggalakkan ekspor nonmigas, banyak pengusaha kini yang terjun ke agribisnis atau sektor lain yang bisa menghasilkan uang sehingga eksistensi perusahaannya tetap terjaga. "Seandainya harga minyak tidak anjlog, sektor-sektor potensial di bidang nonmigas akan tidak tersentuh oleh pengusaha dalam negeri," ujar Tony.

Jadi kejatuhan harga minyak merupakan stimulus yang membuka cakrawala kepengusahaan maupun rancangan penerimaan negara, serta kebijaksanaan industri dalam negeri. Sebagai misal, larangan ekspor kayu bulat dan kemudian disusul dengan larangan ekspor rotan mentah, merupakan kearifan yang ditumbuhkan oleh blessing kejatuhan harga minyak itu. Dan hasilnya luar biasa. Setelah larangan ekspor kayu bulat diberlakukan, banyak pabrik kayu lapis di Jepang dan Taiwan bahkan Korea Selatan yang bangkrut karena ketiadaan bahan baku. Bersamaan dengan itu muncullah Indonesia sekarang ini sebagai produsen plywood terbesar di dunia. "Bayangkan kalau harga minyak tidak jatuh dan pemerintah tidak sempat berpikir untuk melarang ekspor kayu bulat, berapa kerugian nilai tambah yang kita buang begitu saja?", tanya Tony.

Paralel

Tentu saja kemajuan di sektor usaha, tidak semata-mata karena kepintaran si pengusaha belaka. Sukamdani mengatakan, sukses dunia usaha, atau paling tidak kemajuan yang dialami kelompok bisnis Sahid Jaya, sangat dibantu oleh kebijaksanaan pemerintah yang paralel dengan kebutuhan dunia swasta. Serangkaian kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang mulai dilancarkan sejak 1983, menurutnya, kini telah mulai memperlihatkan hasil.

Walaupun masih terlihat kekurangan disana-sini namun ekspor nonmigas untuk tahun anggaran 1987/1988 yang ditetapkan pada angka 7,6 milyar dollar agaknya bisa tercapai. "Ini semua berkat tekad dan persepsi paralel antara swasta sebagai pelaku ekonomi nasional dan pemerintah selaku pemegang kebijaksanaan di dalam negeri.

Sebagai contoh bahwa kegiatan dunia usaha paralel dengan kebijaksanaan pemerintah, Sukamdani menunjuk sejumlah kegiatan yang diprakarsainya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Selama periode kepengurusannya telah banyak upaya yang dilakukan untuk menggalakkan ekspor nonmigas sesuai dengan PP I/1982 tentang *export drive*. Sudah hampir semua kawasan di dunia ini yang didatangi rombongan Kadin dalam rangka itu. Negara-negara industri bahkan sudah semuanya dikunjungi. Dengan negara-negara

Digitized by Google

sosialis di Eropa Timur pun sudah dijajagi peningkatan hubungan dagang. Dan lebih dari itu, Kadin Indonesia merupakan pemrakarsa pembukaan hubungan dagang langsung dengan RRC yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* antara kedua pihak di Singapura 5 Juli 1985. "Padahal antara Indonesia dan RRC belum ada pemulihan hubungan diplomatik yang beku sejak 1966 lho," ujar Sukamdani.

Bahkan dalam rangka meningkatkan ekspor nonmigas itu Kadin pada akhir tahun 1982 menyelenggarakan simposium tentang ini, yang dari segi peserta mungkin paling representatif dibanding simposium bertema sama yang pernah diadakan selama ini. Peserta terdiri dari unsur pemerintah, Kadin Daerah I dan II, unsur universitas yang memiliki Fakultas Ekonomi, lembaga-lembaga pengkajian ekonomi, dan ada juga peserta dari *International Chamber of Commerce* (Kadin internasional) serta para ahli perdagangan khususnya yang bergerak di bidang ekspor impor dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Dan masih dalam rangka menggerakkan potensi dalam negeri di bidang komoditi nonmigas, Kadin sekarang telah memiliki Kadinda I di 27 propinsi dilengkapi dengan 295 Kadinda II.

Sejumlah langkah yang ditempuh Kadin ini menurut Sukamdani adalah wujud dari respons mereka (dunia usaha) terhadap kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi yang dijalankan selama ini. Dan untuk menggolkan tujuan kebijaksanaan pemerintah, Sukamdani menjelaskan bahwa dia selalu memberi motivasi kepada sektor swasta agar berperan maksimal menumbuhkan dunia usaha yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepada pengusaha disadarkan bahwa bila mereka menggeluti dan memajukan usaha masing-masing, maka hal itu akan merupakan sumbangan positif bagi kemajuan bangsa. Dengan perusahaan yang sehat maka bisnis bersangkutan mampu menyerap tenaga kerja, dan untuk pemerintah bisnis bersangkutan merupakan sumber penghasilan pajak. "Semangat semacam ini sekarang sudah mulai tumbuh merata di kalangan anggota Kadin," ujar Sukamdani.

Bila Sukamdani mewujudkan prinsip pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha dalam apresiasi seperti yang dituntut di atas, maka Tony merealisirnya dalam bentuk yang lain. Dua tahun lalu, ketika perusahaannya sedang gawat dihantam resesi, dia dengan senang hati melatih 135 orang anggota pasukan khusus (RPKAD) yang memasuki usia pensiun. Bekerjasama dengan Depnaker, mereka dididik dengan ketrampilan khusus agar menjadi modal menghasilkan uang bila pensiun nanti.

Hasilnya? Sebanyak 20 persen sukses, dalan arti menciptakan kerja sendiri atau menduduki posisi supervisor dalam suatu perusahaan. Sedangkan yang 60 persen belum bisa terjun ke dunia wiraswasta karena hambatan modal. Sementara yang 20 persen lagi, gagal. Menurut Tony kegagalan mereka terutama karena sulitnya melakukan *mental switch* dari seorang serdadu ke seorang wiraswasta. "Padahal kita sudah melakukan upaya maksimal malah dengan psiko tes segala," ujarnya.

Kesediaan Tony mendidik para calon pensiun RPKAD (sekarang bernama Kopasus) itu dalam banyak hal terdorong oleh pengalamannya melihat daya tahan dan semangat juang para pekerja Korea Selatan di proyek-proyek yang mereka menangkan di Timur Tengah. Ternyata keuletan pekerja Korea disana lebih diperlihatkan oleh para buruh yang memperoleh pendidikan militer. Jadi dari segi fisik dan daya tahan mereka memang dipersiapkan untuk bertarung di medan yang kejam seperti di Timur Tengah itu. "Ini bentuk positif dari dwifungsi militer yang diperlihatkan di Korea."

Kita juga pernah memiliki sebuah konsorsium dengan nama ICCI Yang beroperasi di Timur Tengah. Tapi karena kurangnya kegesitan dan kerja keras maka konsorsium itu bangkrut, sehingga proyek yang seharusnya ditangani oleh ICCI akhirnya jatuh ke tangan perusahaan Korea juga.

Sumber Daya Manusia

Dengan mengungkapkan kemajuan yang diperoleh Tony dan Sukamdani dalam tahun sulit seperti sekarang, bukan berarti perekonomian kita sekarang tidak ada soal lagi yang mengganjal. Masalah yang diungkit oleh Sukamdani misalnya, masih berkisar sekitar deregulasi dan debirokratisasi. "Peraturan dan prosedur perijinan yang seandainya masih berbelit-belit hendaknya disederhanakan. Kalau untuk suatu keperluan yang mendorong aktivitas bisnis secara keseluruhan perlu diadakan, ciptakanlah segera," ujarnya.

Terlepas dari itu semua, baik Tony maupun Sukamdani menunjuk bahwa kunci keberhasilan pada akhirnya terletak pada kualitas sumber daya manusia. "Soal kekayaan alam, kita masih mempunyai potensi yang sangat besar. Tetapi yang masih memprihatinkan adalah masalah kualitas sumber daya manusia," kata Tony.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan mereka. Taiwan, Jepang dan Korea Selatan yang relatif jauh lebih miskin dari kita dalam masalah ketersediaan sumber daya alam, akhirnya mampu mengungguli kita hanya karena kualitas sumber daya manusia yang teruji dan capable. Sebuah replika bergambar istana Buckingham yang ramai diperebutkan para penggemar cinderamata di London misalnya, setelah dibolak-balik, ternyata di bagian bawahnya tertulis *Made in Taiwan*. Demikian juga karpet-karpet yang diperebutkan para jemaah haji di Arab Saudi.

Bila kualitas manusia Indonesia sudah mencapai taraf seperti ini, kita seharusnya bisa melakukan pada yang dikerjakan Taiwan itu. Beberapa produk kerajinan tangan Indonesia memang telah menempuh "modus operandi" seperti itu di Meksiko untuk melayani selera konsumen pelancong AS yang berakhir minggu ke Amerika Selatan, tapi jumlah dan mutunya masih perlu ditingkatkan.

Dan masih banyak lagi yang bisa diperbuat di Indonesia ini, bila kualitas manusia kita memang teruji. Kendati demikian Tony merasa bersyukur bahwa belakangan ini masalah kualitas sumber daya manusia semakin vokal disuarakan. Bahkan dalam GBHN mendatang, konon, kualitas manusia Indonesia secara eksplisit dicantumkan di dalamnya. Bila kualitas manusia Indonesia cukup dibanggakan, maka mungkin saja masalah pengangguran yang kini menjadi beban berat pembangunan nasional, bisa teratasi, karena manusia yang berkualitas baik akan mampu menciptakan lapangan kerja.

Manusia demikian tidak saja mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi sekaligus sanggup menghasilkan produk yang kualitas tinggi dan harga bersaing. Dalam konteks perdagangan internasional, persoalan sesungguhnya adalah kemampuan kita menjual barang. Manusia Indonesia belum men-

Digitized by Google

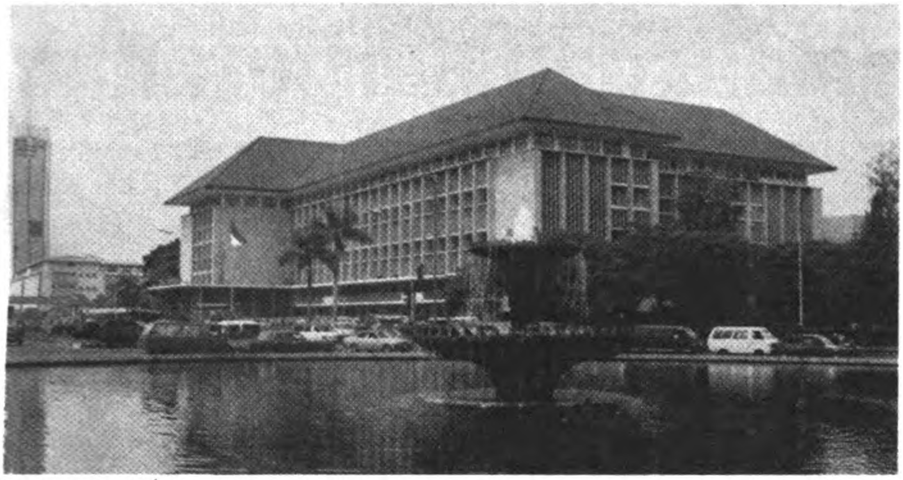

Tidak sekedar dagang uang

capai tahap memiliki kapasitas untuk bersaing di dunia internasional, terutama dalam bidang bisnis ini. Para ahli menyatakan manusia Indonesia dari segi mutu masih sebagai beban, belum asset.

Idealisme Bank

Seperti telah dikemukakan di atas, masih banyak soal dalam perekonomian kita yang perlu dibenahi. Pengusaha swasta yang oleh Sukamdani dinilai sebagai asset nasional, pada hakekatnya mau dan mampu melakukan terobosan bisnis ke sektor-sektor yang masih menjanjikan peluang. Asal ada kesamaan arah dalam kebijaksanaan dan persepsi antara pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan ekonomi dan pengusaha sebagai pelaku di lapangan.

Esensi dari terobosan di bidang bisnis, mungkin adalah apa yang disebut Sukamdani sebagai penyebaran sentra-sentra kegiatan ekonomi, sehingga tidak terpusat di kota-kota atau daerah tertentu saja. Dengan penyebaran itu maka potensi daerah terserap. Sebab esensi dari pemerataan, bukan membagi-bagi perolehan bisnis seseorang kepada orang lain tanpa memperhitungkan untung rugi, tapi harus ditempuh lewat pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh nafkah. Untuk ini perlu penyebaran sentra-sentra kegiatan ekonomi sehingga tidak bertumpuk di satu tempat saja.

Dengan penyebaran itu, logikanya, akan semakin banyak orang yang terserap oleh perusahaan. Mereka dengan demikian akan memiliki penghasilan yang pada gilirannya menaikkan daya beli masyarakat. Bila daya beli masyarakat tinggi, maka produksi pabrik dalam jumlah berapa pun akan terserap pasar.

Namun untuk melakukan penyebaran aktivitas ekonomi, bukan saja dibutuhkan pengusaha-pengusaha yang memiliki naluri dan kemampuan menerobos, tapi juga harus ada sarana dan prasarana yang disiapkan untuk itu. Dalam kondisi geografis seperti Indonesia, sarana perhubungan dan telekomunikasi menjadi sangat vital. "Bayangkan anda mau membuka perusahaan di desa kalau di sana belum tersedia sarana jalan, telepon, listrik dan sarana angkutan lainnya," ujar Sukamdani.

Selain prasarana fisik seperti ini, Sukamdani dan Tony menunjuk idealisme bank di Indonesia yang belum memadai. "Bank-bank kita sekarang masih berlaku sebagai pedagang uang," kata Sukamdani. Atau "Belum berperanan sebagai *Agent of Development*," ujar Tony.

Karena bank-bank masih terperangkap dalam fungsi sebagai pedagang uang maka mereka umumnya mengkerubuti nasabah yang sudah mampu saja, tanpa berupaya menciptakan nasabah baru yang bisa dipercaya. Konsekuensinya pengusaha besar yang tumbuh dari tahun ke tahun bisa dihitung dengan jari.

Bank, demikian kedua tokoh Kadin ini, harus mampu menciptakan pengusaha baru. Ini berarti bank harus juga berperanan sebagai *business supervisor*, yang memberikan petunjuk dan pengarahan bisnis kepada nasabahnya. Untuk bisa begini tentu saja dibutuhkan semacam terobosan dalam tradisi perbankan selama ini. Artinya bank-bank harus berani mengambil risiko. Kalau ada calon nasabah yang membutuhkan kredit, yang pertama ditanyakan bukannya agunan tapi kelayakan usaha. Bila sebuah rencana usaha dianggap layak, jangan sampai prakarsa itu gagal hanya karena pemohon kredit tidak memiliki agunan yang memadai. "Untuk ini sangat dibutuhkan apa yang disebut idealisme bank," kata Sukamdani.

Bank-bank harus membina nasabahnya dari tingkat teri sampai nasabah itu mencapai kelas kakap. Sebab hampir tidak bisa dibayangkan sebuah bank yang mampu hidup tanpa nasabah. Dalam kondisi dimana perbankan tidak mampu menciptakan nasabah baru (baca pengusaha) maka yang terjadi adalah rebutan nasabah antar bank yang terkadang menyalahi etika perbankan sendiri.

Karena itu tidak mengherankan bila bank-bank di Indonesia lebih suka memasang tarif bunga deposito yang tinggi. Dengan suku bunga seperti itu bagaimana mungkin orang melakukan investasi. "Terus terang suku bunga di Indonesia sekarang masih terlalu tinggi. Yang wajar adalah sekitar 12 sampai 13 persen," kata Tony. Sementara Sukamdani menyebut angka 14 sampai 15 persen. Untuk bisa menurunkan suku bunga, bank-bank seharusnya memperkecil margin bunga yang diperolehnya dari kredit investasi dengan suku bunga deposito.

Karena orientasi bank-bank di Indonesia adalah berdagang uang, menurut Sukamdani, tidak mengherankan kalau bank-bank kita lebih cenderung bermain di pasar uang sambil menunggu kapan ada devaluasi. "Gebrakan Sumarlin yang menarik deposito BUMN dari sejumlah bank pemerintah antara lain karena kenyataan permainan itu," ujarnya.

Lebih layak lagi kalau suku bunga sama dengan tingkat inflasi. Di luar negeri suku bunga berkembang sesuai dengan mekanisme pasar, karena disana ada alternatif lain yaitu pasar modal. Orang yang merasa meminjam uang kelewat mahal dari bank, bisa lari ke pasar uang. Tetapi sayangnya pasar modal di Indonesia belum berperanan semestinya. "Terlalu banyak campur tangan," tutur Sukamdani.

Ekonomi kita 1987 memang terasa berat. Tetapi dengan keyakinan bahwa pemerintah akan selalu menempuh kebijaksanaan yang menciptakan iklim yang mendorong perkembangan, kedua pelaku ekonomi ini merasa optimis memasuki tahun 1988. "Keadaan yang mulai membaik sekarang ini hendaknya menjadi modal dasar untuk meningkatkan kemajuan di tahun mendatang," ujar keduanya. "Kesulitan memang ada, tetapi peluang juga ada."☐ LT/BM

Digitized by Google

ASEAN Makin Maju dan Berperanan

ASEAN, organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang menghimpun Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Brunei Darussalam telah semakin maju dan berperanan dalam usianya ke 20 dewasa ini. "Semangat kebersamaan dan solidaritas antara negara-negara ASEAN telah dapat kita kembangkan dan kita perkuat sehingga berhasil menciptakan suasana yang menguntungkan bagi masing-masing anggota. ASEAN telah menunjukkan kemajuan dengan makin meluasnya kerjasama di pelbagai bidang dan ruang Lingkup masalah yang dibahas. Kerjasama di forum internasional juga telah berkembang sehingga semakin menatapkan citra ASEAN dalam percaturan internasional," kata Presiden Soeharto ketika berpidato pada pembukaan KTT ASEAN III di Manila 14 Desember lalu.

Presiden menyatakan Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN III yang diselenggarakan di Kota Manila ini mempunyai arti penting, karena di samping memperingati 20 tahun ASEAN, juga merupakan kesepakatan berharga untuk menilai dan mengkaji kembali apa yang telah dilaksanakan dan kita dihasilkan sejak Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN I di Bali 1976 dan Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN II di Kuala Lumpur 1977. "Kita semua datang ke mari dengan harapan, agar konperensi ini menghasilkan langkah-langkah baru yang akan lebih menyempurnakan hasil-hasil dan keputusan yang pernah kita ambil bersama sebelumnya. Dengan demikian, ASEAN benar-benar akan mampu mencapai sasaran yang kita cita-citakan," kata Kepala Negara di hadapan semua kepala pemerintahan ASEAN yang hadir.

Ketika berkumpul di Manila ini, kata Presiden, situasi umum dunia masih cenderung dipengaruhi oleh pertentangan dan persaingan antara kedua negara adikuasa baik dalam bidang persenjataan nuklir maupun perluasan pengaruh. Permasalahan dunia yang saling berkaitan antara masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keamanan internasional telah pula membawa pengaruh terhadap konflik-konflik regional. Di berbagai kawasan dunia masih terlihat berlanjutnya permusuhan dan konflik bersenjata, bahkan di beberapa wilayah telah menunjukkan intensitas yang meningkat. Berlanjutnya gejolak di berbagai negara dan kawasan tersebut juga mempunyai dampak terhadap situasi di Asia Tenggara.

Asia Tenggara merupakan wilayah strategis, dan negara-negara besar masih memainkan peranannya di kawasan Asia Pasifik, yang masing-masing memiliki wawasan geo-politik dan geo-strategik yang berbeda.

Persaingan pengaruh antara negara-negara besar dapat menimbulkan ketegangan politik, yang tentunya mengakibatkan terbaginya perhatian negara-negara ASEAN dari kegiatan pembangunan yang sedang mereka laksanakan. Oleh karena itu bangsa di Asia Tenggara sendirilah yang harus mencari upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

"Di tengah keadaan dunia yang masih penuh suasana tegang dan tidak menentu itu, dan dengan penuh keprihatinan atas masih terjadinya konflik-konflik di berbagai wilayah dunia termasuk di Asia Tenggara, kita merasa bersyukur bahwa antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet baru-baru ini telah tercapai persetujuan mengenai pengurangan persenjataan nuklir. Apa yang telah dihasilkan dalam perundingan antara kedua negara adikuasa tersebut dapat merupakan faktor yang positif dalam rangka peredaan ketegangan dunia dan akan ikut membantu menyelesaikan konflik-konflik regional. Persetujuan tersebut juga mengandung harapan yang lebih besar bahwa pada waktunya umat manusia akan dapat terhindar dari ancaman kemusnahannya," ujarnya.

Kemampuan Politik

Jika pada mulanya ASEAN dibentuk sebagai wadah kerjasama ekonomi dan sosial-budaya, namun dalam perkembangannya ASEAN menunjukkan kemampuan menggalang kerjasama politik. Solidaritas ASEAN telah menumbuhkan kesadaran dan kemauan politik untuk meningkatkan kerjasama, bukan saja dalam rangka kepentingan regional, tetapi juga kepentingan global. Gagasan ZOPFAN yang dicetuskan di Kuala Lumpur tahun 1971 dan diberi arahan lebih jauh dalam Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN I di Bali tahun 1976, merupakan pernyataan dari tekad ASEAN untuk menciptakan suatu kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas dan netral sebagai sumbangan bagi perdamaian dunia. Realisasi ZOPFAN sangat penting bagi stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara dan akan lebih menjamin kesinambungan, kelancaran dan keberhasilan pembangunan nasional masing-masing negara di Asia Tenggara.

Kerjasama ASEAN di bidang politik semakin menonjol sejak timbulnya masalah Kampuchea. Dalam masalah Kampuchea, ASEAN telah menunjukkan sikapnya yang bulat dan konse-

 Digitized by Google

kuen untuk membantu rakyat Khmer mencari penyelesaian politik yang memungkinkan bangsa Khmer Khmer dapat menentukan nasibnya sendiri dan mendirikan negara Kampuchea yang merdeka, nonblok dan netral.

Perkembangan penting di bidang kerjasama politik lainnya yang kiranya perlu dikemukakan adalah kesepakatan ASEAN dalam rangka mewujudkan ZOPFAN, untuk mengembangkan dan mewujudkan Zone Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara sebagai komponen penting ZOPFAN. "Saya mencatat dengan gembira adanya kemajuan-kemajuan penting yang dicapai ASEAN dalam usahanya mewujudkan zona yang dimaksudkan untuk mencakup semua negara Asia Tenggara itu, termasuk kemajuan dalam mempersiapkan satu Rancangan Perjanjian tentang Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Upaya ASEAN untuk mewujudkan zona ini, yang akan merupakan sumbangan penting bagi perdamaian dan keamanan di kawasan kita, perlu diteruskan dan ditingkatkan, meskipun masalah Kampuchea belum dapat terselesaikan. Dalam usaha ini tentunya ASEAN akan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara lain yang bersangkutan," kata Presiden.

Tambah Berat

Jika ASEAN ikut menanggung akibat-akibat dari persaingan antara negara-negara adikuasa di bidang politik dan keamanan, maka beban itu terasa bertambah berat karena ASEAN-pun harus turut menanggung akibat keadaan ekonomi dunia yang tetap saja serba tidak menentu. Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN III sekarang ini berlangsung dalam suasana ekonomi dunia yang kurang menggembirakan.

Di bidang perdagangan, langkah-langkah proteksi yang dilakukan oleh beberapa negara maju sangat menghambat kemajuan negara-negara berkembang dan usaha menciptakan perdagangan internasional yang lebih luas. Perdagangan komoditi juga kurang menguntungkan negara-negara berkembang. Arus dana ke negara-negara berkembang masih jauh daripada yang diharapkan, termasuk arus investasi yang juga memperlihatkan perkembangan yang tidak membantu negara-negara berkembang pada saat beban hutangnya yang makin meningkat. Situasi dan perkembangan ekonomi dunia yang demikian ini telah mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kerjasama ekonomi regional, di samping usaha meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain.

Dengan makin mantapnya kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, diharapkan ASEAN akan dapat memberikan sumbangan yuang berarti bagi perekonomian dunia dan kerjasama internasional, khususnya untuk mendorong lebih lanjut kerjasama Selatan-Selatan, dalam rangka menciptakan Tata Ekonomi Dunia Baru yang lebih adil, seimbang dan merata.

Kerjasama ekonomi ASEAN yang berkembang selama ini telah pula mendorong ikut sertanya sektor usaha dan sektor non-pemerintah sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip yang telah diletakkan dalam Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN I di Bali. ASEAN telah membuktikan bahwa dalam situasi perekonomian dunia yang sulit, ternyata masih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing.

Pada umumnya negara-negara ASEAN menganut sistem perekonomian yang terbuka, yang sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian dunia. Dalam menghadapi situasi perekonomian dunia yang masih tidak menentu itu berbagai usaha telah dilakukan ASEAN yaitu antara lain dengan meningkatkan kerjasama perdagangan melalui perbaikan skema Pengaturan Perdagangan Preferensi (PTA) dan di bidang industri melalui penyempurnaan skema Usaha Perusahaan Patungan Industri (AIJV). "Dengan kedua pengaturan tersebut, kita berusaha makin mendorong partisipasi sektor usaha sehingga ASEAN mempunyai landasan ekonomi yang kuat untuk mengembangkan kerjasama bagi tercapainya situasi perekonomian dunia yang adil, seimbang dan merata," tegas Presiden.

Kerjasama ASEAN dengan mitra wicara, baik dengan negara, kelompok negara-negara maupun dengan organisasi internasional, telah mendatangkan manfaat yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN maupun bagi usaha membina kerjasama. Dialog ASEAN dengan mitra wicara atau fihak-fihak ketiga telah menghasilkan saling pengertian yang mendalam dan saling menguntungkan, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Kerjasama ASEAN dengan fihak ketiga diarahkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi ASEAN dengan memperbesar akses barang-barang ASEAN ke pasaran mereka, meningkatkan arus investasi ke ASEAN dan mendorong kerjasama pembangunan ASEAN.

"Dalam pada itu kita juga patut merasa bangga menyaksikan kemajuan kerjasama ASEAN di berbagai bidang lain, yang telah berhasil memupuk saling pengertian antar sesama negara ASEAN dan meningkatkan peran serta berbagai lapisan masyarakat, yang telah turut memperkukuh kebersamaan di kalangan masyarakat luas," kata Kepala Negara.

Asia Tenggara turut bertanggung jawab atas terpeliharanya perdamaian, stabilias dan keamanan di kawasan ini. Untuk itu masing-masing negara perlu meningkatkan ketahanan di segala bidang. Ketahanan masing-masing negara pada gilirannya akan memperkukuh ketahanan regional melalui kerjasama di bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kukuhnya ketahanan regional merupakan kekuatan utama untuk membendung setiap ancaman dari manapun arahnya dan apapun sifatnya. Indonesia menurut Presiden, selalu berpendapat bahwa meningkatkan ketahanan nasional untuk dapat menciptakan suatu ketahanan ASEAN merupakan hakikat dari kerjasama ASEAN.

Perlu Mekanisme

Untuk dapat menampung dan tanggap terhadap aspirasi negara anggota ASEAN dalam mengembangkan kerjasama, maka diperlukan satu mekanisme, baik di dalam lingkungan maupun di luar ASEAN, yang bersifat luwes dan dinamis, terutama untuk menghadapi perkembangan dan pertumbuhan ASEAN di masa mendatang. Pesatnya pertumbuhan ASEAN sejalan dengan pesatnya perkembangan dunia harus diimbangi oleh satu bentuk mekanisme kerjasama ASEAN yang terarah dan terpadu yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Sekretariat ASEAN yang lebih sempurna.

Dalam rangka ini ASEAN harus menghindari diri dari program kerjasama yang ambisius yang dapat mengorbankan kepentingan salah satu atau beberapa negara anggotanya. Khususnya dalam pengembangan kerjasama ekonomi. ASEAN hendaknya juga memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi negara-negara ASEAN lainnya serta memperhatikan perbedaan ekonomi di antara negara-negara tersebut.

"Apa yang telah kita capai hendak-

Digitized by Google

nya dapat kita jadikan sarana untuk mendukung dan menunjang kerjasama politik dan ekonomi, sehingga terdapat kebersamaan yang lebih mengarah pada keserasian di semua aspek kehidupan ASEAN "kata Presiden.

Selama ini salah satu kekuatan utama ASEAN dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan adalah sikap keterusterangan dan saling percaya yang merupakan ungkapan dari rasa persaudaraan. Di masa datang yang akan penuh dengan tantangan dan sekaligus kesempatan baru keterusterangan dan saling percaya itu perlu ditingkatkan lagi.

Di samping itu, untuk menuju hari depan yang lebih cerah, sudah tiba saatnya ASEAN melengkapi dan menyempurnakan strategi yang sudah digariskan, bukan saja dalam rangka meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN tetapi juga dalam menghadapi situasi dan perkembangan dunia, dengan tetap mengarah pada usaha meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membina stabilitas kawasan.

Sebagai wadah kerjasama regional, ASEAN harus juga memiliki orientasi global dengan memberi perhatian terhadap setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di setiap kawasan dunia. ASEAN seyogyanya berperan secara aktif untuk ikut membina dan memelihara stabilitas dan perdamaian dunia. Setiap peristiwa penting di dunia secara langsung atau tidak langsung akan mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ASEAN. Partisipasi aktif ASEAN dalam berbagai fora internasional baik dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun non-Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah menempatkan posisi ASEAN semakin diperhitungkan dalam percaturan politik dan ekonomi internasional.

Salah satu kemajuan penting dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan ASEAN selama dua dasawarsa sejak kelahirannya, adalah makin luasnya semangat ASEAN dalam masyarakat-masyarakat anggotanya.

Untuk menggalang rasa kebersamaan ASEAN di kalangan masyarakat yang lebih luas khususnya pada generasi mendatang, ASEAN harus mampu menumbuhkan rasa kebersamaan ASEAN sehingga selalu menjadi milik bersama masyarakat dari masa ke masa.

Karena itu perlu ditingkatkan peran serta yang lebih besar dari berbagai lapisan masyarakat di segala bidang kerjasama termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan.

ASEAN perlu memberi perhatian yang lebih besar di bidang pengembangan potensi serta kemampuan pemuda dan wanita agar mereka terlibat secara maksimal dalam pembangunan dan masa depan ASEAN.

Kerjasama yang telah terjalin selama ini seperti pertukaran kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan penyalahgunaan obat bius, tenaga kerja, kependudukan, kesejahteraan sosial dan kerjasama di bidang hukum, perlu terus dikembangkan.

"Akhirnya saya ingin menegaskan keyakinan Indonesia akan keluhuran cita-cita ASEAN, akan kemajuan-kemajuan penting yang telah dicapai oleh ASEAN sampai hari ini dan akan masa depan ASEAN," ujar Presiden mengakhiri sambutannya.

Terimakasih

Dan ketika akan meninggalkan Manila kembali ke Jakarta Presiden dalam sambutan perpisahannya menyatakan : pada saat-saat menjelang penutupan pertemuan kita yang bersejarah ini, perkenankanlah saya atas nama seluruh delegasi dan atas nama saya sendiri menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas keberhasilan Yang Mulia Presiden Corazon Aquino dalam memimpin Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN III ini.

"Berkat kepemimpinan yang penuh kebijaksanaan yang telah Yang Mulia tunjukkan kita berhasil membuka suatu lembaran sejarah baru bagi kerjasama ASEAN. Apa yang telah kita capai dalam pertemuan yang relatif singkat ini adalah berkat kemampuan Yang Mulia untuk membawa sidang kedalam suasana yang penuh kekeluargaan, dan rasa kebersamaan di kalangan ASEAN sehingga hal ini akan menjadi landasan yang makin kokoh bagi kerjasama ASEAN selanjutnya. Kita semua menyadari bahwa landasan yang kokoh semacam ini diperlukan oleh ASEAN agar secara tepat dapat menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh ASEAN baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi," kata Presiden lagi.

Kepala Negara menyambut dengan lega apa yang telah dicapai dalam melaksanakan kerjasama di bidang politik, yang merupakan suatu langkah maju dan cukup menggembirakan. Hal ini hanya dapat dicapai setelah mampu menyelaraskan sikap dan pandangan dari masing-masing negara anggota ASEAN terhadap perkembangan politik di Asia Tenggara dan keadaan dunia pada umumnya.

Keberhasilan dalam kerjasama politik menurut Presiden, akan lebih memantapkan stabilitas politik dan keamanan di kawasan ini, yang pada gilirannya akan mendukung usaha-usaha pembangunan ekonomi baik yang dilaksanakan pada tingkat nasional maupun tingkat regional. Di lain pihak kerjasama ekonomi yang kokoh dan berhasil akan meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat di negara-negara ASEAN. Hal ini akan turut memberikan sumbangan terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan ini.

"Dalam hubungan ini pula saya ingin menyambut dengan penuh harapan berbagai prakarsa baru yang telah kita sepakati untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama tersebut merupakan pengejawantahan dan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip yang telah kita sepakati di Bali dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional dan ketahanan regional. Dalam kurun waktu 20 tahun sejak berdirinya ASEAN, kerjasama di bidang-bidang lain meminta perhatian kita bersama, karena ternyata memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Saya merasa bersyukur bahwa mengenai hal inipun kita telah berhasil menggariskan langkah-langkah peningkatannya sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan ASEAN," ujarnya.

Dengan makin luasnya kerjasama dan makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh ASEAN, maka sangatlah tepat kesepakatan yang telah dicapai bersama dalam menyempurnakan mekanisme kerja ASEAN agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

"Pada kesempatan ini saya ingin menarik perhatian Sidang yang terhormat, bahwa seluruh rakyat di kawasan kita menaruh harapan terhadap apa yang telah dihasilkan oleh Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN III ini. Oleh karena itu merupakan kewajiban kita bersama untuk dapat melaksanakan hal-hal yang telah kita sepakati. Dan akhirnya perkenankanlah saya menyampaikan salam hangat rakyat Indonesia kepada rakyat Filipina serta terima kasih atas keramah-tamahan yang diberikan kepada saya dan rombongan," kata Kepala Negara. □

Digitized by Google

Disepakati Naskah Utama GBHN Sumbangan Presiden

Setelah melalui sidang-sidangnya yang berlangsung sejak Oktober lalu, BP MPR yang bertugas menyiapkan bahan-bahan persidangan Sidang Umum MPR 1988 berhasil mencapai kesepakatan mengenai naskah GBHN. Baru-baru ini, Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I BPMPR Ginandjar Kartasasmita mengemukakan bahwa naskah GBHN 1988/1993 sumbangan Presiden/Mandataris MPR diterima sebagai bahan utama dalam pembahasan. "Bukan karena ada instruksi atau ada peraturan perundang-undangan atau ketetapan-ketetapan lain yang mengharuskan, tetapi karena kesepakatan fraksi-fraksi di MPR," kata Ginandjar dalam konperensi pers di Jakarta, belum lama ini.

Bahan utama memang diperlukan. Tanpa suatu dokumen yang dapat dijadikan acuan akan sulit bagi BPMPR untuk melaksanakan sidang-sidang secara lancar. Dijelaskan oleh Ginandjar, setelah Majelis membentuk Badan Pekerja dan fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, akhirnya tercapai kesepakatan bahwa naskah GBHN sumbangan Presiden dapat dijadikan bahan utama pembahasan.

Tentu saja naskah dari Presiden itu tidak diterima begitu saja. Dalam sidang-sidang BPMPR yang dinyatakan tertutup, banyak usul perubahan atas naskah itu. Ginandjar mencatat, 768 usul perubahan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi telah dibahas dalam 24 kali rapat pleno. Usul-usul itu bersifat penajaman, penjelasan, redaksional, selain tidak sedikit bersifat prinsipal. Contoh usul prinsipal dikemukakan oleh Drs Jusuf Syakir dari FPP. Anggota FPP itu mengusulkan agar kata "Pancasila" selalu diikuti "dan UUD 1945". Usul itu didasari pemikiran bahwa pernah terjadi pembukaan UUD menetapkan Pancasila, tetapi penjabarannya dalam batang tubuh UU tidak sejalan dengan Pancasila.

Prinsip yang dikemukakan FPP itu tidak diterima fraksi-fraksi lain. FKP menyatakan, bukannya tidak setuju penggabungan dua kata itu, hanya saja harus pada tempatnya, misalnya, "pengamalan Pancasila" tidak perlu dilanjutkan dengan kata-kata "dan UUD 1945".

Sidang BPMPR dinyatakan tertutup

Dalam rapat PAH I pada 3 - 4 Desember lalu, empat fraksi, FKP, FABRI, FUD dan FPDI secara utuh menerima materi Rantap GBHN sumbangan pemikiran Presiden/Mandataris MPR. Sementara itu FPP semula menginginkan penyempurnaan ketentuan-ketentuan naskah GBHN bab I,II dan III mengenai Pendahuluan, Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. Untuk Bab I, FPP mengusulkan penambahan asas pembangunan nasional dengan "kehidupan beragama, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan asas efisiensi dan kejujuran" Dalam perkembangannya, usul itu ditarik, dengan pertimbangan "untuk memperlancar pembahasan", selain dikarenakan hal-hal itu telah ditampung secara tidak langsung dalam asas-asas yang telah ada.

Tarik Dengan Catatan

Meskipun belum dapat menerima seluruh materi, khususnya Bab I, II, dan III, FPP bersedia menarik lebih dari separuh usul-usulnya. "Sebagian lagi dalam proses penyelesaian," kata Ginandjar.

Sementara itu Suko Waluyo dari FPDI mengemukakan, semula fraksi itu mengajukan sejumlah usul sebagai upaya untuk menyempurnakan naskah GBHN Bab I, II dan III. Tetapi usul-usulnya ditarik kembali. "Kami tetap minta dijadikan catatan dan akan kami perjuangkan lagi dalam penyusunan Rantap GBHN yang akan datang", katanya.

Ketika ditanyakan mengapa Fraksi ABRI yang tidak banyak menyampaikan usul Ginandjar yang juga anggota Fraksi ABRI mengatakan, Fraksi itu bersikap "tut wuri handayani". Dalam kebijakannya FABRI tetap mempunyai pendirian. Diam bukan berarti tidak mempunyai sikap. Pendapat FABRI sama dengan rumusan yang ada pada Rantap GBHN.

Jurubicara FUD Drs August Kafiar MA menegaskan fraksinya menekankan pentingnya pembangunan di daerah-daerah. Masyarakat desa tetap harus berada dalam lingkup kesatuan nasional. Pemerataan pendapatan, peningkatan dan pemerataan kebutuhan

Digitized by Google

Kualitas GBHN mendatang lebih tinggi dibanding sebelumnya

pokok merupakan sasaran yang perlu diwujudkan.

Mengenai materi Bab I, II dan III, Ir Usman Hassan dari FKP menyatakan, fraksinya dapat menerima sepenuhnya naskah yang diajukan oleh Presiden. Ia menilai, keseluruhan isi ketiga bab itu sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. FKP beranggapan tidak merasa perlu mencantumkan kata "UU 1945" di belakang tiap kata "Pancasila". Kita hanya akan menerima pencantuman keduanya kalau secara kontekstual benar. Tetapi kami pasti menolak kalau dirasa pencantumannya tidak tepat dalam konteksnya," katanya.

Menurut anggota FKP itu, Bab I rancangan GBHN dengan tegas menyebutkan bahwa landasan GBHN adalah Pancasila dan UUD 1945. Dalam bab II hal itu lebih diperkuat lagi dengan mengatakan, landasan pembangunan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Pancasila yang dimaksud oleh FKP adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan bukan Pancasila dari rumusan pada naskah-naskah lainnya. "Alasan kami juga berdasarkan pada pengalaman sejarah bahwa pemahaman yang salah dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Usman Hassan.

Wewenang MPR

Atas pertanyaan, Ginandjar mengemukakan hasil-hasil PAH I BP MPR masih bisa diubah oleh MPR dalam Sidang Umum nanti. BP MPR, apalagi PAH I, hanyalah alat kelengkapan MPR. Kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan MPR. "Kedaulatan tidak didelegasikan kepada BP, apalagi PAH," kata Ginandjar. Keputusan yang dihasilkan oleh PAH maupun BP MPR masih dimungkinkan untuk diubah atau dibongkar kembali dalam Sidang Umum MPR nanti. "Masih terbuka kemungkinan untuk penyempurnaan, karena dalam hal ini kedaulatan tertinggi tetap ada pada MPR," kata Ginandjar.

Ginandjar memberikan jaminan bahwa kualitas GBHN mendatang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Meski berasal dari sumbangan pikiran Presiden, naskah GBHN itu tidak diterima secara bulat begitu saja. "Lima atau 10 tahun lalu tidak pernah terjadi yang demikian," katanya.

Dalam pembahasan Rantap GBHN, banyak rumusan yang diusulkan Panitia 9 (pembantu Presiden) mengalami perubahan, termasuk perubahan yang dimaksudkan untuk menampung aspirasi rakyat. Tentang sumbangan pikiran Presiden ini, Ginandjar mengemukakan pendapatnya, "Ibarat MPR itu panglima, dan Presiden sebagai Kastafnya, Kastaf merasa berkewajiban menyampaikan laporan meski tidak diminta oleh Panglima. Penyusun laporan tentu saja para staf Kastaf."

Atas pertanyaan, apakah masalah korupsi akan dimasukkan dalam GBHN, Ginandjar mengatakan, semua fraksi menginginkan pemberantasan korupsi, hanya saja bagaimana merumuskannya dalam GBHN. "Itu yang menjadi masalah", katanya.

Sebelumnya, dalam keterangan pers Ketua PAH II yang membahas Rantap-rantap non-GBHN Drs Jacob Tobing MPA mengemukakan bahwa Presiden terpilih akan mengucapkan sumpah 11 Maret 1988 mendatang. Setelah acara kenegaraan ini selesai, Pimpinan MPR akan berkonsultasi dengan Presiden terpilih untuk membicarakan Wakil Presiden. Konsultasi direncanakan di gedung DPR/MPR.

Jacob Tobing mengatakan Rantap tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wapres sudah dibahas. Namun ia tidak bersedia menjelaskan isi Rantap itu. Dalam Rantap ditetapkan bahwa proses pencalonan Wakil Presiden dilaksanakan sesudah pelantikan Presiden terpilih.

BP MPR hingga saat ini tetap terus melaksanakan tugasnya. Rapat kerja tetap dilaksanakan secara tertutup sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di dalam sidang-sidang BP.☐

Sugyanto

Digitized by Google

Ringkasan Peristiwa Nasional Tahun 1987

Tahun 1987 menjelang akhir. Selama tahun 1987 yang akan lewat, banyak pengalaman diperoleh bangsa Indonesia dalam perjalanannya, khususnya dalam kehidupan kenegaraan. Beberapa peristiwa nasional tercatat ikut menandai perjalanan sejarah bangsa.

JANUARI

Ketika menyambut tahun baru, 1 Januari 1987, Presiden, Kepala Negara, Soeharto dalam pidatonya melalui TVRI mengemukakan perkiraannya bahwa tahun yang akan dijalani penuh dengan ujian dan tantangan.

Ujian dan tantangan sebagaimana dikemukakan itu, tercermin kembali dalam pidato kenegaraan mengantarkan Nota Keuangan dalam rangkaian penyusunan RUU APBN 1987/1988 di gedung DPR/MPR, 6 Januari 1987. Jumlah anggaran yang diproyeksikan berimbang pada Rp 22.783,1 milyar atau Rp 22,7 trilyun lebih. Jumlah itu lebih tinggi 6,4 persen dari jumlah anggaran tahun sebelumnya. RAPBN 1987/1988 itu disusun berdasarkan harga patokan BBM sebesar 15 dollar per barrel.

Pidato Presiden Soeharto itu selain menekankan kembali ketegasan sikap pemerintah untuk melaksanakan debirokratisasi dan deregulasi sebagai upaya untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi, juga membela sikap pemerintah dengan kebijakan devaluasi bulan September 1986. Presiden Soeharto menegaskan sikap tanggungjawabnya ketika kebijakan devaluasi itu dilaksanakan. "Lebih bermoral menyatakan apa adanya kepada rakyat," demikian antara lain dikatakan Presiden.

Presiden Soeharto di depan anggota DPR/MPR

Hentakan deregulasi mulai tercermin dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada 15 Januari 1987. Hari itu, pemerintah mengumumkan 300 jenis barang impor yang bebas bea masuk. Kebijakan itu diumumkan oleh Menko Ekuin Ali Wardhana di Bina Graha. Untuk lebih mempercepat pelaksanaan deregulasi, dan tercapainya efisiensi, Wapres Umar Wirahadikusumah mengeluarkan pernyataan di depan raker Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, di Jakarta, 22 Januari. Wakil Presiden mengingatkan bahwa kelemahan kordinasi pembangunan berada di semua eselon, baik di tingkat pusat maupun di bawahnya.

Pada pertengahan Januari, di depan peringatan Tritura, Panglima ABRI, Jendral LB Moerdani mengatakan, Tritura bukanlah identitas suatu gerakan baru. Tritura adalah gerakan segenap kekuatan Pancasila untuk menghadapi falsafah lain, Komunis, yang berusaha merebut dominasi kehidupan bangsa.

Bulan Januari diakhiri dengan isyu yang menjadi pembicaraan cukup ramai mengenai dana revolusi yang dilontarkan oleh Wakil Ketua FKP bidang Polkam, Dr Suhardiman SE. Menurut Suhardiman, dana revolusi itu ada. Ia mendesak pemerintah agar mengusutnya, karena dana itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

FEBRUARI

Memasuki bulan Februari, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan PM Mahathir di Kuala Lumpur, Malaysia, 6 Februari. Dalam pertemuan itu, kedua kepala pemerintahan

Digitized by Google

mengucapkan dukungan atas pelaksanaan plebisit di Pilipina dan mendukung terselenggaranya KTT ASEAN di Manila.

Pada pertengahan Februari, ramai dibicarakan isyu tentang swastanisasi BUMN. Isyu itu erat berkait dengan pelaksanaan secara efisien tiap bidang usaha milik negara.

21 Februari Komisi APBN DPR menyelesaikan pembahasan RAPBN 1987/1988. 27 Februari DPR, dalam sidang paripurna menyatakan persetujuan bagi diundang-undangkannya RUU APBN dengan volume Rp 22,7 trilyun lebih.

MARET

Suhu politik mulai meningkat dan memanas. Genderang kampanye belum lagi ditabuh tetapi ketiga kekuatan sosial politik sudah mulai ancang-ancang untuk berlaga dalam kampanye, suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan program masing-masing kepada rakyat untuk menghadapi Pemilu yang sudah di ambang pintu.

Tepat 24 Maret genderang kampanye mulai ditabuh. Pesta demokrasi dimulai. Hanya 25 hari, jauh lebih singkat dari masa-masa kampanye sebelumnya. Pemilu 1982 berlangsung 40 hari.

Kampanye Pemilu 1987 mempunyai ciri khusus: — ketiga OPP (Organisasi Peserta Pemilu) memberlakukan asas satu-satunya, Pancasila, dan tidak lagi ada yang menggunakan asas ciri. — kampanye merupakan arena adu pengenalan program.

Kampanye selama 25 hari berjalan tenang, aman dan tertib, terutama bila dibandingkan dengan kampanye-kampanye sebelumnya.

APRIL

Suasana politik yang hangat masih terasa pada pertengahan bulan pertama. Kampanye mendekati titik akhir.

18 April, kampanye berhenti bergema dan suasana berubah senyap, karena masyarakat politik memasuki Minggu Tenang yang berlangsung selama satu minggu.

23 April, pemungutan suara berjalan aman, tertib dan lancar. Tercatat 93.963.953 warganegara Indonesia mempunyai hak untuk memberikan suara. Dari jumlah itu, 90 juta lebih menggunakan hak pilih mereka. Golkar keluar sebagai pemenang dengan merebut sekitar 72% lebih dari jumlah suara.

Selain kemenangan Golkar, pelaksanaan pemilu itu juga memberikan beberapa perkembangan yang menarik. PDI berhasil menggeser kedudukan PPP di DKI. Golkar di Aceh membuat terobosan, berhasil menggeser PPP yang selalu dominan di daerah itu.

Para pengamat mencatat, benteng-benteng primordialisme diharapkan telah terterobos, sebagaimana tersimpul dari fenomena hasil pemilu itu.

Sikap ABRI menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Selama Pemilu ABRI menunjukkan diri sebagai kekuatan yang netral, berdiri di atas semua kelompok politik.

MEI

4 Mei, Presiden Soeharto membentuk "Tim Sembilan" yang bertugas membantu Presiden untuk menyusun naskah GBHN 1988 yang akan disumbangkan kepada MPR hasil Pemilu 1987. Tim Sembilan itu diketuai oleh Menmud Seskab, Drs Moerdiono dengan anggota-anggota, Menpera, Drs Cosmas Batubara,

Ketua Umum kampanye di depan massa Golkar

Wakil Ketua MPR GH Mantik, Sekjen Wanhankamnas, Machmud Subarkah, Kasospol ABRI, Mayjen Soegiarto, Deputy Ketua Bappenas, Dr Adrianus Mooy, Kepala Biro Komunikasi Sosial dan Ilmu Pengetahuan Bappenas, Dr Astrid S Susanto, Menmud UP3DN Ir Ginandjar Kartasasmita, dan Staf Ahli Menmud Seskab, Dr Soerjanto Poespowardojo, yang juga sebagai Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas, Tim Sembilan memanfaatkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh Wanhankamnas, tokoh-tokoh masyarakat, kalangan cendekiawan, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dalam menyusun naskah GBHN, Tim telah memproyeksikan pembangunan jangka panjang tahap II.

JUNI

Sejumlah Ormas melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Selain keberadaannya, mereka juga melaporkan pelaksanaan dan penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi mereka.

Tindakan pelaporan itu merupakan pelaksanaan UU nomor 8 tahun 1985 tentang Keormasan. Ormas yang sudah melaporkan ke Depdagri itu umumnya sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, meski ada yang baru menerima Pancasila secara tersirat, belum tersurat.

AGUSTUS

Rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 42 dimulai ketika Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR 15 Agustus. Dalam pidatonya itu, Presiden menyatakan penghargaan terhadap ABRI yang telah mampu bertindak tegas tetapi bijak dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu. Menurut Kepala Negara, sikap ABRI itu mencerminkan semangat dwi fungsi, dan sekaligus menunjukkan peran sebagai dinamisator dan stabilisator politik nasional.

Presiden juga menyinggung pelaksanaan Pemilu yang baru saja berlalu. Dikatakan oleh Kepala Negara, Pemilu yang berlandaskan program ternyata tetap menarik dan menggairahkan. Ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas mengandung arti bangsa Indonesia meninggalkan budaya politik lama, yaitu adu kekuatan. Bangsa Indonesia telah memasuki suasana baru, kehidupan politik yang bersifat kekeluargaan yang bermartabat.

17 Agustus, dilaksanakan peringatan HUT Proklamasi ke 42 secara sederhana dan khidmad. Presiden Soeharto memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi di beranda dan halaman Istana Merdeka.

18 Agustus diadakan peringatan hari Pramuka ke 26. Sejumlah Pramuka mengikuti apel di Istana Negara. Presiden mengatakan, gerakan pramuka berperan dalam menanamkan benih-benih semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

SEPTEMBER

3 September, Istana Mangkunegaran, Surakarta dirundung duka. Penguasa puri Mangkunegaran, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (KGPAA) Sri Mangkunegoro VIII (67th) meninggal dunia di RSCM, Jakarta. Ia dirawat sejak 31 Agustus 1987, karena menderita serangan jantung.

Menurut catatan, keadaan kesehatan Mangkunegoro mulai menurun sejak meninggalnya putera pertama GPH Raditya Prabukusumo pada 1977 lalu karena kecelakaan lalu lintas,

Presiden Soeharto memimpin upacara peringatan detik-detik Proklamasi

Digitized by Google

Presiden Soeharto selaku inspektur upacara dalam HUT ABRI

serta permaisurinya RA Sunituti, 1978 lalu. Pada acara halal bihalal di Istana Mangkunegaran, 7 Juni lalu, ia tidak kuat berdiri saat menerima ucapan selamat. Pada 21 Agustus, dalam kondisi yang belum pulih benar, ia memaksakan diri memberikan penjelasan kepada wartawan di bangsal Pracimoyoso sehubungan surat instruksi Gubernur Jawa Tengah tentang larangan pejabat Pemda menerima tanda jasa atau gelar kehormatan dari Kraton Mangkunegaran.

Pada 4 September, jenasah Mangkunegoro dimakamkan dengan upacara kebesaran militer di Astana Girilayu, Karanganyar.

12 September, keluarga Mangkunegaran mengumumkan putera almarhum ke 4 GPH Sujiwokusumo menjadi Kepala Keluarga Istana Mangkunegaran.

12 September Presiden Soeharto bersilaturahmi dengan para anggota DPR periode 1982/1987 yang akan berakhir masa bakti pada tanggal 30 September 1987. Dalam kesempatan itu Presiden mengemukakan, DPR bersama pemerintah telah dapat mengembangkan kehidupan konstitusional yang makin mantap dan demokratis. ''Kekurangan dan kelemahan tentu masih ada, namun kita yakin bahwa kita telah berjalan ke arah yang benar,'' kata Presiden.

Hari itu juga DPR menyetujui ditetapkan sebagai Undang-Undang, RUU tentang Protokol. Sebelumnya, pembahasan RUU itu cukup alot, hingga diperlukan lobbying tingkat tinggi, yang melibatkan pimpinan DPR dan Presiden.

OKTOBER

1 Oktober, bertepatan hari Kesaktian Pancasila, para wakil rakyat hasil Pemilu 1987 mengucapkan sumpah dan janji di depan Ketua Mahkamah Agung. Jumlah anggota MPR 1.000 orang, DPR 500 orang. Anggota DPR terdiri atas ABRI 100 orang, Golongan Karya 299 orang, PPP 61, dan PDI 40 orang. Anggota MPR non anggota DPR berjumlah 500, terdiri atas 147 orang dari Utusan Daerah, 100 orang Utusan Golongan, 253 anggota imbangan hasil Pemilu yang terdiri dari 31 utusan PPP, 151 utusan Golkar, 20 utusan PDI, dan 51 utusan Golongan Karya ABRI.

Dalam sidang paripurna 3 Oktober, terpilih pimpinan DPR dan MPR. Ketua M Kharis Suhud (FKP), Wakil-wakil Ketua Saiful Sulun (ABRI), R Soekardi (FKP), Drs Soerjadi (FPDI), Dr HJ Naro SH (FPP), dan R Soeprapto (FUD — khusus Wakil Ketua MPR).

5 Oktober, peringatan Hari ABRI yang ditandai upacara militer di Senayan. Dalam pidatonya, Presiden Soeharto selaku Inspektur Upacara menegaskan bahwa ABRI bukanlah kekuatan yang mematikan demokrasi, justru sebaliknya. Dalam melaksanakan dwifungsinya, ABRI justru bertindak sebagai stabilisator di samping dinamisator kehidupan demokrasi.

Panglima ABRI, Jendral LB Moerdani dalam amanatnya mengemukakan bahwa regenerasi ABRI perlu berjalan terus, tetapi semangat dan jiwa kejuangan ABRI yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh surut, bahkan harus tetap lestari.

20 Oktober, peringatan HUT Golkar dengan tema ''Dengan semangat persatuan dan kesatuan Golkar menyukseskan Sidang Umum MPR dan meningkatkan konsolidasi organisasi''. Dalam rangkaian peringatan itu, Golkar tingkat pusat menyelenggarakan Rapim yang berlangsung 17 - 20 Oktober 1987. Presiden Soeharto, selaku Ketua Dewan Pembina Golkar dalam amanatnya mengatakan, Golkar, sebagai pemenang Pemilu hendaknya menyadari tanggungjawabnya atas kepercayaan rakyat yang dipikulkan kepada organisasi itu. Ia meng-

Digitized by Google

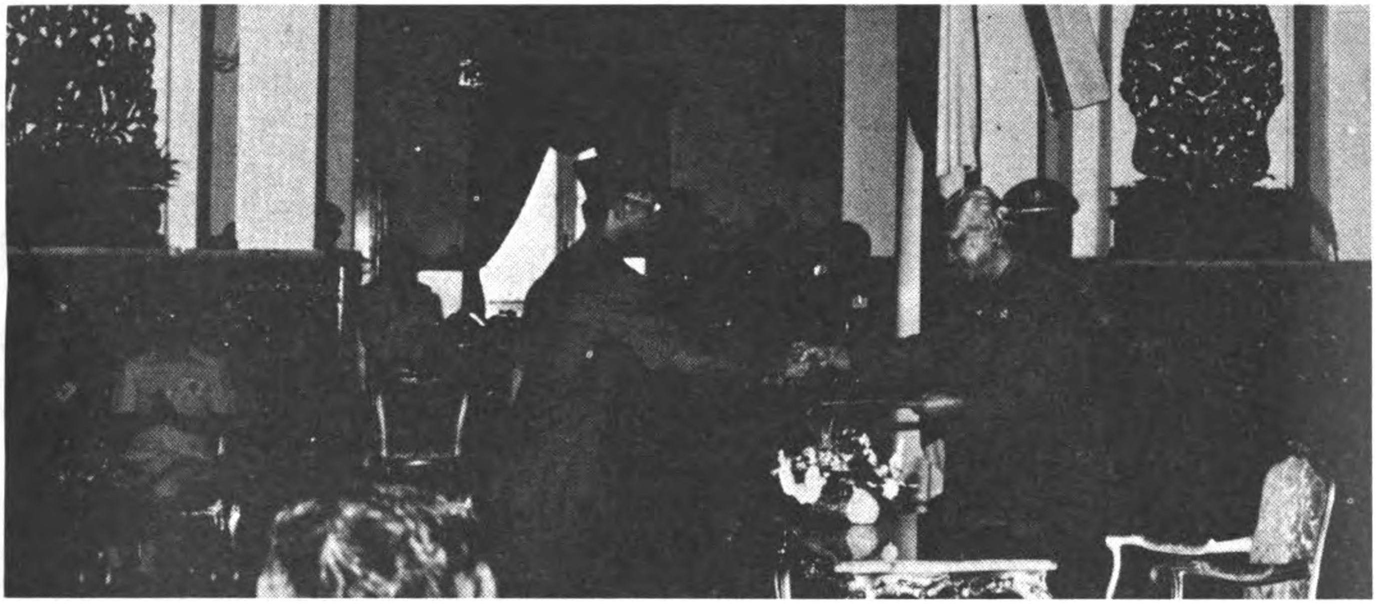

Pimpinan Golkar diterima Presiden Soeharto di Istana Negara

harapkan agar Golkar mendengarkan dengan mata hati, menyaring dengan akal sehat dan menyalurkan dengan tanggungjawab aspirasi dan harapan rakyat. 21 Oktober, pimpinan Golkar diterima Presiden Soeharto di Istana Negara. Ketua Umum DPP Golkar H Sudharmono SH melaporkan bahwa Rapim berhasil merumuskan pernyataan politik Golkar yang menunjukkan sikapnya mengenai SU MPR 1988 dan GBHN. Dalam pernyataan politiknya, Golkar antara lain menyatakan, Golkar menghendaki pembangunan yang bersifat kerakyatan, dengan penekanan pada pemerataan dan keadilan, terutama bagi daerah-daerah yang masih tertinggal dibanding daerah lain. Golkar juga tetap mencalonkan Jendral TNI Purn Soeharto untuk kembali menjadi Presiden/Mandataris MPR.

28 Oktober, peringatan Hari Sumpah pemuda berlangsung di Balai Sidang. Presiden Soeharto mengingatkan agar persatuan nasional perlu terus dijaga.

Pada kesempatan itu, Presiden membuka Kongres KNPI ke-V. Kongres berakhir 4 November. Drs Didiet Haryadi Priyohutomo terpilih sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 1987/1990.

NOVEMBER

18 November, NU menyelesaikan Konferensi Besar di Cilacap. Konferensi menegaskan bahwa NU tetap berpegang pada hasil muktamar Situbondo 1984 lalu yang dikenal sebagai "kembali ke Khittah 1926". NU kembali menegaskan dirinya sebagai ormas keagamaan, dan bukan ormas yang berpolitik praktis. Perbedaan pendapat semula terjadi karena ada pihak-pihak yang menginginkan agar NU kembali berpolitik praktis. Perbedaan pendapat akhirnya terselesaikan, dan NU tetap berpegang pada keputusan Muktamar.

29 November, Presiden Soeharto bertemu PM Lee Kuan Yew di Pulau Batam. Pertemuan kedua kepala pemerintahan pada peresmian Batam Centre itu dimanfaatkan untuk membahas persiapan KTT ASEAN di Manila.

DESEMBER

13 Desember, PP Muhammadiyah menyelesaikan Sidang Tanwir (Evaluasi) di Yogyakarta, yang berlangsung 3 hari. Sidang Tanwir itu menghasilkan resolusi dan rekomendasi, yang menyoroti masalah dalam negeri dan luar negeri. Muhammadiyah menyerukan kepada Pemerintah agar menertibkan film, kaset video, majalah, suratkabar, buku, iklan yang menyebarkan pornografi, serta meningkatkan pemberantasan penggunaan obat-obat terlarang. Muhammadiyah juga berpendapat, KB dengan cara vasektomi dan tubektomi haram. Di bidang luar negeri, Muhammadiyah menyerukan pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta penyelesaian konflik bersenjata.

13 Desember, Presiden Soeharto berangkat ke Manila melalui Manado, untuk mengikuti KTT ASEAN. Presiden Soeharto memperoleh kepercayaan untuk membuka pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN itu.☐ **Sugyanto**

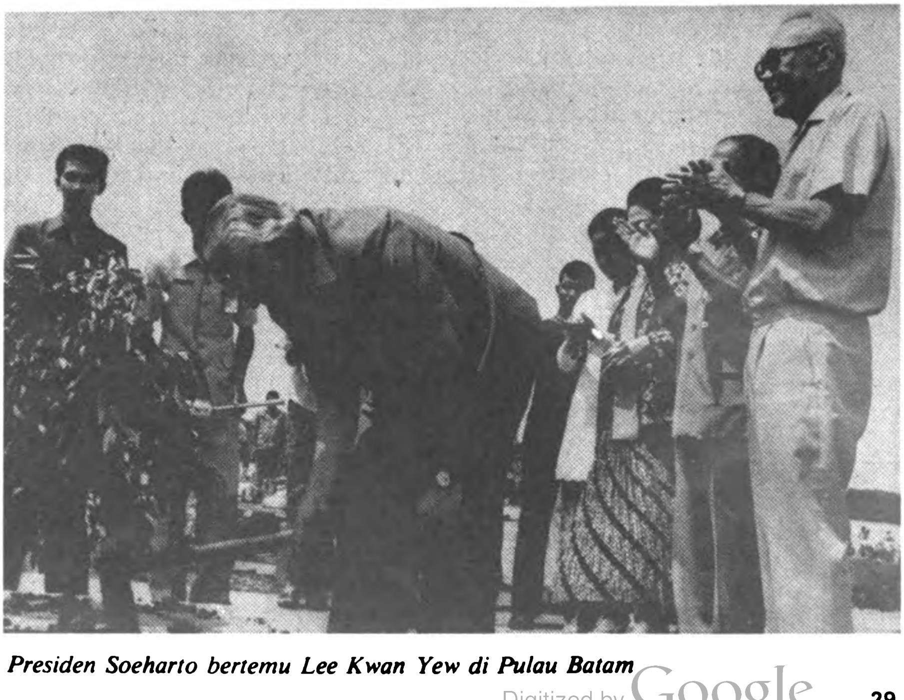

Presiden Soeharto bertemu Lee Kwan Yew di Pulau Batam

Digitized by Google

Proses Demokratisasi Tidak Dengan Sendirinya Menggelinding

Berbagai organisasi massa telah didirikan selama Orde Baru untuk mengimbangi orientasi politik praktis dari ormas-ormas lama. Walau secara konseptual fungsi ormas tersebut telah dirumuskan secara benar namun ormas-ormas belum tampil sebagai organisasi yang mandiri dan berpengaruh. "Mungkin karena tahap perkembangannya masih dalam proses tapi mungkin juga karena proses pembentukannya yang menyebabkan mereka belum berakar secara mantap di tengah masyarakat", kata Sekjen DPP Gokar, Ir. Sarwono Kusumaatmadja pada seminar sehari yang diselengarakan DPD Mahasiswa Kosgoro Jateng di Semarang.

Seminar ini dibuka oleh Wagub Jateng, Drs Soeparto. Seminar dihadiri tak kurang dari lima ratus tokoh-tokoh mahasiswa se Jateng, baik perguruan tinggi Negeri maupun swasta, demikian laporan ketua Panitia Seminar Leo Nababan. Dalam diskusi yang mengambil thema "Kemandirian Dalam Sistim Politik Pancasila di dalam Kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara", bertindak sebagai pembahas adalah Ir Sukoraharjo, Ketua DPRD TK I Jateng, Prof Slamet Raharjo MA, Guru besar UNDIP dan Drs T. Sugito SH dari IKIP Negeri Semarang.

Sarwono yang lebih banyak membahas masalah kemandirian ormas tak segan-segan menunjuk KNPI sebagai contoh organisasi yang berkembang lain dari cita-cita dasar semula. KNPI seingat saya, didirikan dengan tujuan menjadi wadah komunikasi antar generasi muda sebagai mekanisme sentral dari pemuda. Tapi dalam perjalanannya KNPI justru menjalankan fungsi ormas, sehingga tak bisa dibedakan dengan ormas-ormas yang lain. Yang bisa dibedakan hanya jaketnya saja. KNPI melakukan fungsi apa saja yang dilakukan oleh ormas kecuali satu fungsinya sendiri, mudah-mudahan di tangan pengurus yang sekarang akan ada perbaikan-perbaikan, ujarnya.

Menurut Sarwono, ormas yang telah lama hadir di Indonesia menghadapi masalah penyesuaian diri dengan suasana baru. Banyak di antaranya yang lahir sebagai onderbouw organisasi politik, atau dibentuk sebagai alternatif terhadap orpol. Karena itu orientasi mereka adalah politik. "Misalnya saja Bung Mahbub Djunaidi, dari NU, bagi dia kelihatannya satu-satunya alternatif untuk bergerak adalah menjadikan NU sebagai parpol". Kalau demikian peran ormas yang sifatnya profesional, fungsional kemasyarakat-

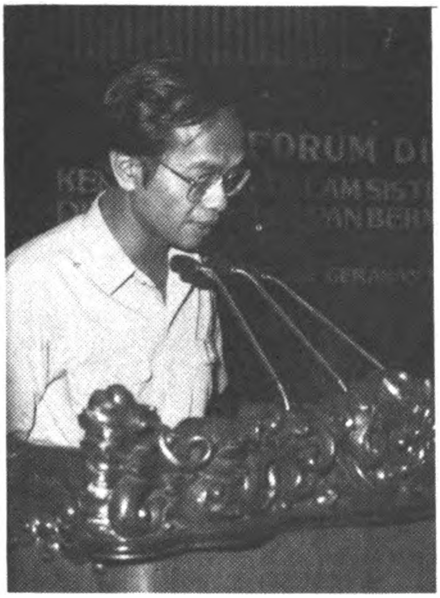

Sarwono Kusumaatmadja

an maupun aspiratif tidak dikembangkan secara mandiri agar muncul dan berpengaruh sebagai potensi politik. Masalah lain yang dihadapi ormas menurut Sarwono, secara umum dengan beberapa pengecualian, ormas-ormas menderita kelemahan wawasan dan manajemen organisasi.

Peranan individu pemimpin atau pembina lebih menonjol dari peranan sistem. Dengan demikian kelangsungan hidup ormas amat situasional sifatnya. Namun demikian Golkar tetap melihat adanya prospek bagi perkembangan ormas. Kecuali undang-undang memungkinkan, potensi masyarakat diperlukan untuk pembangunan. Ormas bisa berperan untuk mewujudkan swadaya masyarakat. Naluri manusia untuk berkumpul juga merupakan pembenaran bagi hadirnya ormas. Dan masyarakat yang semakin maju, akan mampu melahirkan pengorganisasian yang efektif. Ini berarti, lanjut Sekjen, "ormas yang dapat menjawab tantangan kemajuan akan hidup dan berkembang, sedang yang kadaluarsa akan kehilangan dukungan dan keluar dari peredaran, istilah yang populer akhir-akhir ini adalah puso".

Potensi politik ormas, dengan demikian juga potensinya untuk mengembangkan demokrasi dapat terwujud. Sebab walau peranannya yang langsung tidak dimungkinkan oleh UU, tapi ormas yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan sendirinya muncul sebagai kekuatan yang berwibawa, ini yang menyebabkan ormas diperhitungkan, baik oleh orpol ataupun pemerintah.

Demikian juga dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan yang semakin komplek, kemandirian merupakan salah satu jalan keluar yang ditawarkan. Membahas ciri-ciri manusia Indonesia yang ideal kemandirian telah pula masuk sebagai salah satu ciri manusia yang ideal yang diakui, katanya.

Kemandirian berarti kemampuan dari pribadi maupun kelompok manusia untuk bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya. Maka kemandirian suatu organisasi dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi tersebut untuk berprilaku sebagai subyek dalam mewujudkan tujuan-tujuannya.

Bila dilihat dalam konteks politik maka kemandirian dari suatu kelembagaan politik infra struktur ataupun suprastruktur dapat diartikan lembaga-lembaga tadi dapat berfungsi sesuai dengan panggilan tugasnya secara utuh. Karena itu, lanjut Sekjen, organisasi kemasyarakatan yang mandiri, tidak dapat membiarkan dirinya dijadikan obyek, atau diperalat oleh tujuan, program dari pihak diluar organisasi itu sendiri.

Kemandirian tidak dapat diartikan sebagai suatu konsepsi individualistis, baik secara kelompok maupun individu menempuh jalannya sendiri-sendiri bertindak semaunya. Pola hubungan yang mencerminkan semangat kemandirian adalah yang

dapat menjamin terpenuhinya kepentingan masing-masing kelompok yang serasi dan sesuai dengan kepentingan umum, ketentuan konstitusi dan hukum. Dalam semangat kemandirian tersebut maka hubungan horisontal yang bersifat saling tunjang saling menghargai dan saling mengisi adalah sangat penting, karena menandakan bahwa kemandirian erat hubungan dengan demokrasi. Karena sistem sosial yang demokratis mementingkan kesamaan derajat. Sebaliknya pola hubungan vertikal yang menitik beratkan penguasaan serta dominasi tidaklah mencerminkan pola hubungan yang bersemangat kemandirian.

Hubungan horizontal antar organisasi atau lembaga sulit terwujud dalam suasana kekaburan fungsional, karena tatakrama hubungannya sukar dirumuskan. Akibatnya akan selalu terjadi vertikalisasi dimana yang kuat mendominasi yang lemah. Diferensiasi fungsi diatas merupakan masalah modernisasi, sehingga kemandirian menjadi masalah modernisasi masyarakat. Oleh karena itu lanjut Sekjen, kalau kita ingin membangun bangsa dan masyarakat yang demokratis, kemandirian juga merupakan masalah yang amat penting. Jika kita lihat gejala-gejala masyarakat manapun, terlepas dari sistem sosial yang dianut maka semakin maju suatu masyarakat semakin tinggi tuntutan kemandiriannya semakin keras pula desakan demokratisasi. Hal tersebut terjadi antara lain di Uni Sovyet dan Korea Selatan, dua Negara yang menganut sistem dan falsafah sosial yang berbeda tetapi sama-sama dipersepsikan oleh kekuatan dalam masyarakatnya masing-masing sebagai sistem yang memerlukan pengembangan demokrasi. Kita sebagai bangsa yang menganut falsafah Pancasila hendaknya mampu membaca pertanda zaman seperti yang saya sebutkan tadi, katanya. Tidak hanya berilusi, karena kita menganut falsafah sendiri akan bebas dari dinamika sosial yang sifatnya universal.

Pada bagian lain, Sarwono mengingatkan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 mengenai organisasi kemasyarakatan (UU keormasan) menunjukkan adanya kehendak untuk mewujudkan sistim pengorganisasian masyarakat yang demokratis. Baik UU mengenai Parpol dan Golkar maupun UU keormasan terlihat adanya pemisahan struktural antara orpol dan ormas. Berbeda dengan situasi terdahulu dimana ormas dapat menjadi onderbouw dari orpol. Sekarang dengan adanya UU tersebut kedudukan orpol dan ormas adalah mandiri secara struktural. Namun potensi politik ormas tidak terhapus oleh hapusnya hubungan struktural, karena UU keormasan juga menegaskan bahwa ormas berfungsi menyalurkan anggotanya, baik terhadap pemerintah, lembaga politik maupun orpol. Tidak terkaitnya Orpol dan Ormas secara struktural berarti bahwa Ormas tidak diwajibkan mempunyai hubungan permanen dengan Orpol. Jika suatu ormas berkesimpulan bahwa secara aspiratif suatu Orpol tidak memadai dalam rangka penyaluran aspirasinya, ormas tersebut dapat menentukan sikap yang lain. Indikasi tadi menunjukkan dimasa yang akan datang orpol tidak lagi bisa memandang ormas sebagai aset yang permanen. Tapi merupakan aset yang mempunyai potensi untuk "lari". Contohnya, NU "lari" dari PPP. Karena itu pola hubungan ormas dan orpol adalah horizontal yang mengharuskan adanya suasana yang saling membutuhkan dan saling menghargai". Suatu pola hubungan horizontal memerlukan diferensiasi fungsional. Karena itu, lanjut Sekjen, apakah suasana demokratis seperti yang dikehendaki UU keormasan, bisa dimanfaatkan atau tidak oleh ormas tergantung ormas dalam mengembangkan kemampuannya sehingga terwujud suatu potensi politik yang tinggi yang menjadikan dirinya sebagai suatu kekuatan kemasyarakatan yang disegani. Kekaburan fungsi ormas, menyebabkan ormas secara politis tidak potensial karena dirinya akan selalu bergantung pada orpol. Lemahnya ormas juga menyebabkan orpol merasa tak memerlukan ormas dalam pemeliharaan eksistensinya. Yang pada gilirannya menyebabkan orpol menjadi tidak peka terhadap aspirasi masyarakat, seharusnya secara efektif dibawakan oleh ormas. Suasana yang timbul justru vertikalisasi dan keterasingan baik dari ormas maupun orpol dari aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan secara baik. Suasana demikian tentunya tidak demokratis, ujar Sekjen.

Seminar sehari di Semarang

Jika yang saya utarakan diatas tadi, tegas Sarwono, mengandaikan kemandirian ormas mampu menciptakan suasana dan iklim yang demokratis maka tidak bermaksud menyatakan bahwa proses demokratisasi dengan sendirinya menggelinding dengan kuatnya posisi ormas dalam konfigurasi Nasional. Demokrasi tidak akan bisa terwujud hanya dengan timbulnya kenyataan-kenyataan struktural baru yang memungkinkan perkembangan demokrasi. Menurut Sekjen Golkar, untuk menjamin perkembangan masyarakat kearah bentuk yang lebih demokratis maka yang diperlukan adalah pengembangan wawasan dan organisasi yang juga demokratis. Wawasan serta organisasi yang dikembangkan, karena kita menganut Pancasila sebagai satu-satunya asas, tentunya adalah wawasan dan organisasi yang sesuai dengan demokrasi Pancasila. Menanggapi bahasan Slamet Raharjo yang menyatakan demokrasi Pancasila jelas tapi tak jelas,

Digitized by Google

Sarwono menyatakan, demokrasi Pancasila bukan demokrasi yang lain. Dan menurut Sekjen, masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang mengaku adanya kaidah-kaidah yang berlaku dan atas dasar itulah masyarakat punya pilihan-pilihan. Oleh karena itu gejala dinamika sosial yang universal harus mampu kita pelajari sebagai bahan untuk memperkuat dan mengembangkan sistem sosial kita sendiri dan bukan untuk meniru perkembangan bangsa lain, apalagi untuk meramalkan bahwa perkembangan di Indonesia akan identik dengan perkembangan mereka. Dalam pengertian itu kemandirian adalah suatu sikap yang perlu dikembangkan dan didorong. Karena bangsa kita harus kita bangun dengan kedaulatan dan kemandirian dalam konsepsi perkembangan sistem sosialnya.

Kemandirian Ormas mampu menciptakan suasana dan iklim demokratis

Kemandirian dalam konsep di dunia internasional dengan diakuinya hukum laut Internasional, serta wawasan nusantaranya, katanya. Diskusi sehari yang diikuti secara antusias bertempat di gedung BPD Jateng, tidak memperlihatkan tanda tanda kejenuhan, baik dari pembahas, pemrasaran dan peserta, sampai diskusi berakhir hanya sebagian kecil saja yang lebih dulu meninggalkan ruang diskusi. Kemandirian dalam konsepsi sistim sosial kita, tidaklah mudah, ujar Sekjen, karena bagi suatu masyarakat yang terbiasa dengan pola-pola hubungan yang didominir oleh vertikalisasi, maka kemandirian akan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak enak, karena memaksa orang untuk bersikap kreatif, mampu mengambil putusan dan mampu bertanggung jawab bukan saja atas keberhasilannya namun juga atas kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi.

Tetapi masyarakat yang makin maju, apapun falsafah dan sistim sosialnya, akan menghadapi tuntutan-tuntutan demokratisasi. Antisipasi yang dini terhadap kecenderungan ini akan membantu terwujudnya masyarakat yang demokratis dalam iklim stabilitas Nasional yang dinamis. Untuk itu, menurut Sekjen, kita sebagai bangsa terpanggil untuk membuktikan kendatipun kita tidak bisa lepas dari universalitas dinamika sosial. Namun kita dapat menangani tuntutan demokratisasi dengan lebih mulus.☐ Rendy.MS

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA BARAT

ALAMAT : JALAN KARAPITAN NO. 116 A TELP. 430601 BANDUNG

REKTOR DAN SELURUH SIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG

BERTEKAD UNTUK MENYUKSESKAN
SIDANG UMUM MPR TAHUN 1988 DALAM RANGKA
MENUJU TINGGAL LANDAS PEMBANGUNAN NASIONAL
DIBAWAH PEMERINTAHAN ORDE BARU

Digitized by Google

Panti Transmigran "Dharmais" Sebuah Pengharapan Masa Depan

Dharmais, bermula dari sebuah gagasan seorang putra Bangsa bernama Soeharto. Sebagai insan Tuhan, sebagai mahluk sosial hatinya terharu, merasa terpanggil dan merasa berkewajiban untuk berusaha memberi perhatian, kasih dan sayang kepada orang lain yang hidup dalam penderitaan dan benar memerlukan pertolongan. Soeharto, yang sampai kini adalah Presiden Indonesia menerawang jauh kepada mereka yang menderita, untuk dibina, di kembangkan, di tunjukkan jalan hidupnya, seperti anak yatim piatu, cacad jasmaniah dan rokhaniah, orang tua jompo, gelandangan agar tetap menjadi warga negara yang dapat merasakan arti hidupnya.

Maka cita-cita luhur itu lahirlah, tepat pada hari Jum'at Wage 8 Agustus 1975 dengan nama Yayasan Dharma Bhakti Sosial di depan Notaris Abdul Latief. Akhirnya terbentuklah kepengurusan "YAYASAN DHARMAIS", Soeharto sebagai Ketuanya, Sudharmono sebagai Sekretarisnya, Ismail Saleh Wakil Sekretris I, Sigit Haryoyudanto WK. Sekretaris II, sedangkan Bendaharanya adalah Bustanil Arifin, Wakil Bendahara I Hediyanto, WK. Bendahara II Indra Rukmana, anggota terdiri dari, Amir Machmud, Piet Haryono, Darjatmo, Hasyim Ning, S. Triman, R.A.B. Massie, Probosutejo, Tjokro Pranolo, Radius Prawiro, Indra Kartasasmita, sedangkan Administratir adalah Soedihardjo. Dharmais berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima. Untuk mencapai tujuan luhur tersebut, Dharmais memberikan bantuan kepada badan badan atau Organisasi Sosial dan badan badan atau Organisasi yang bergerak dalam bidang Sosial, seperti rumah rumah Yatim Piatu, rumah jompo, rumah-rumah penampungan gelandangan dan semacamnya. Sedangkan kekayaan Dharmais diperoleh dari sokongan atau sumbangan dari masyarakat dan Pemerintah yang tidak mengikat. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam sebelas tahun ini, Dharmais telah melakukan apa yang menjadi cita-citanya. Yayasan telah memberikan bantuan kepada berbagai badan Sosial dan badan lainnya atau organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang sosial seperti rumah rumah orang orang yang menderita, baik lahir atau bathin, ia jompo, tua dan cacat. Dharmais, disamping memberikan bantuan berupa tambahan biaya makan perawatan kesehatan dan peralatan, yayasan juga telah melakukan beberapa kegiatan antara lain, membangun perumahan Cacad Veteran RI, membantu Penca perorangan, memberi pendidikan ketrampilan calon

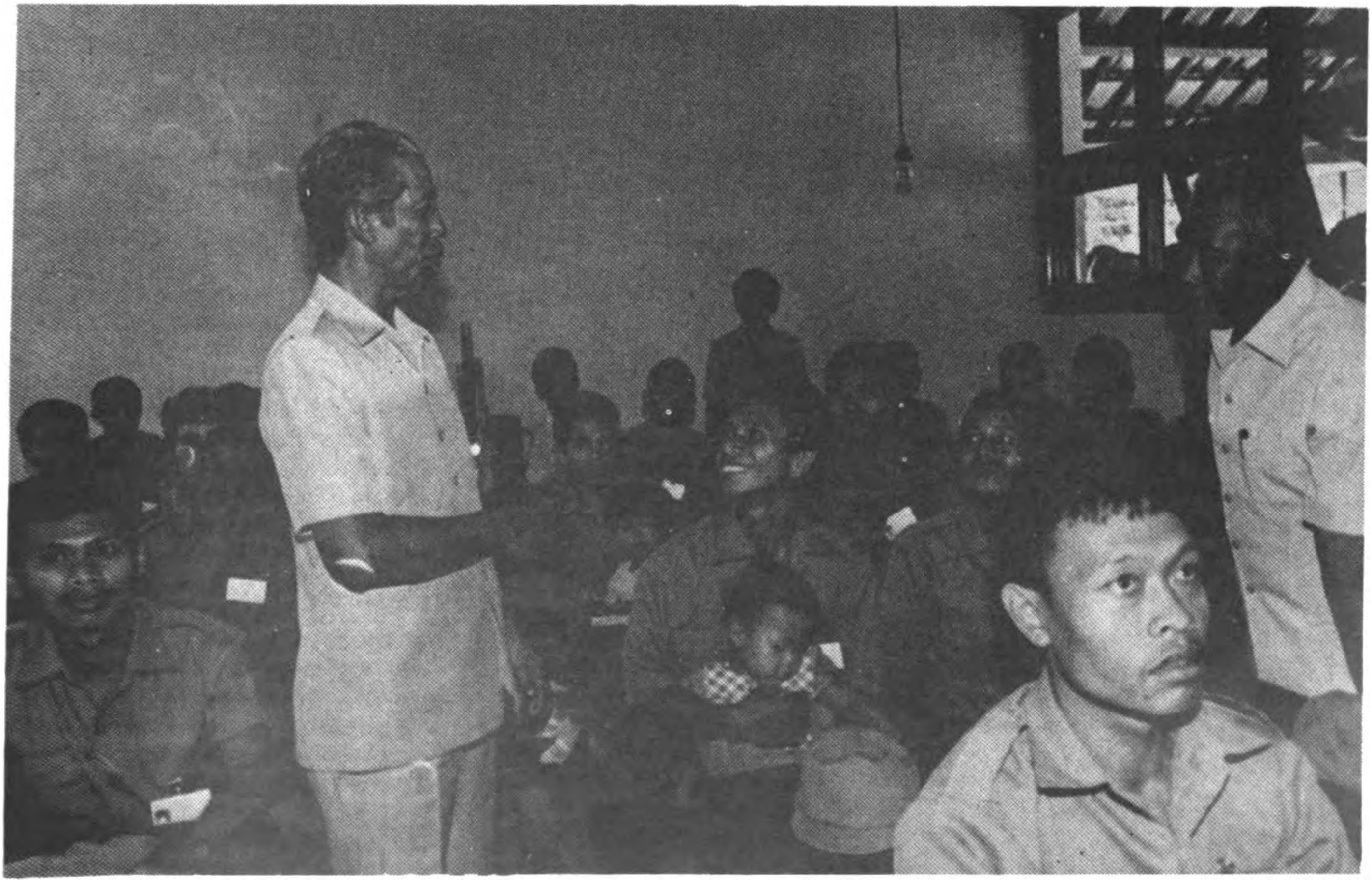

Dharmais untuk mencapai tujuan luhur

Digitized by Google

Sudah 40.250 orang terima bantuan Dharmais

transmigran di Pilot Proyek Yayasan "Dharmais" Bogor, kerjasama dengan Perdami seluruh Jawa dalam operasi penanggulangan penyakit mata katarak, menerbitkan berita "Dharmais", juga bantuan untuk anak asuh.

Demikian antara lain uraian yang disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Dharmais, Mensesneg Sudharmono SH, ketika meresmikan penggunaan Panti ketrampilan Calon Transmigran Pilot Proyek Yayasan Dharmais, di-Kelurahan Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Sebuah lokasi yang berjarak tempuh tiga puluh lima kilometer dari Pusat Kota Yogyakarta, memang sangat strategis, meski untuk mencapai tempat itu harus menempuh jalan jalan yang berliku diapit jurang yang curam dan tebing tebing gamping. Acara peresmian tersebut dihadiri antara lain oleh Menteri Transmigrasi Martono, Wagub DIY Sri Paduka Paku Alam VIII, pengurus Dharmais, Rombongan DPP Golkar, dan Ketua DPD Golkar DIY Mangkubumi SH.

Secara terinci juga disebutkan hingga saat ini Yayasan Dharmais telah menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada 540 Panti Asuhan dan Panti Werda seluruh Indonesia yang meliputi 40.250 orang penerima bantuan.

Setiap orang diberi santunan Rp 11.000, terdiri dari sepuluh ribu rupiah untuk makan seribu rupiah untuk perawatan kesehatan. Diungkapkan pula dalam tahun 1986-1987 Yayasan Dharmais telah membantu tiga puluh ribu anak asuh. Setiap anak mendapat santunan empat puluh lima ribu rupiah pertahun. Dan bagi penderita penyakit mata Yayasan juga memberi bantuan, bekerja sama dengan dokter mata. Sejak dua tahun lalu sudah lebih dari dua ribu penderita penyakit mata tertolong.

Kegiatan terakhir adalah memberikan ketrampilan bagi para tunawisma, tuna karya, dan orang putus sekolah yang berkeinginan menjadi calon transmigran, dengan mendirikan Panti Ketrampilan Calon Transmigran. Pendirian Panti semacam ini diprakarsai olah Pak Harto dengan mendirikan Panti Ketrampilan di Bogor yang sampai kini telah mendidik 1.500 KK (5.400) jiwa transmigran. Mereka sekarang sudah disalurkan bertransmigrasi ke Daerah-daerah penerima Transmigran. Melihat keberhasilan Panti Ketrampilan Calon Transmigran di Bogor ternyata daerah lain juga berminat, termasuk Yogyakarta yang sekarang sebentar lagi akan diresmikan. Maka atas bantuan Pemda setempat, terutama dalam penyediaan tanah siap pakai, Yayasan Dharmais akhirnya berkenan menyediakan dana sebesar Rp 470,85 juta untuk mewujudkan impian rakyat Yogyakarta.

Panti ketrampilan yang terletak di Kelurahan Sendangsari tersebut, sebagaimana dilaporkan Administratir Yayasan Dharmais, R. Soedihardjo SH, terdiri dari enam rumah, tiga ruang belajar, delapan asrama, dapur umum, Poliklinik, kandang kambing dan sampi, gudang, Aula, kantor contoh rumah transmigrasi serta penunjang lainnya. ☐ **Rendy.MS**

Digitized by Google

Tantangan Pembangunan Di Kaltim

Betapapun hebatnya perencanaan pembangunan suatu wilayah, tanpa peran serta masyarakat secara menyeluruh, sulit akan berhasil. Karena itu, dalam upaya memperlancar proses pembangunan suatu daerah, keikutsertaan masyarakat mutlak perlu.

Masyarakat hendaknya tidak saja menjadi obyek pembangunan, tetapi juga harus menjadi subyek dalam pembangunan. Untuk itu peran serta — betapapun kecilnya — sangat penting. Pelaksanaan pembangunan sangat tergantung pada faktor-faktor sosial budaya masyarakat daerah bersangkutan. Karenanya, dalam menyusun rencana pembangunan, pendekatan serta pengikutsertaan masyarakat daerah bersangkutan sangat diperlukan, — jika tidak dikatakan mutlak perlu —.

Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta orang dan luas wilayah hampir sepertiga luas wilayah Indonesia, serta penyebaran penduduk yang tidak merata, cukup sulit untuk dibangun.

Untuk itu, Wakil Gubernur H.M. Ardans SH berusaha melakukan pembagian wilayah pembangunan. Ia membagi Kalimantan Timur menjadi tiga kawasan pembangunan, yaitu: Kawasan Pantai, Kawasan pembangunan Tengah dan Kawasan Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Pembagian wilayah pembangunan ini, dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi wilayah dengan proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan. Misalnya, di wilayah pembangunan pantai, lebih sesuai untuk pabrik dan industri. Wilayah tengah, lebih sesuai untuk pembangunan agraris dan wilayah pembangunan perbatasan disediakan untuk proyek transmigrasi serta resettlement (pemukiman kembali).

Mencegah kesenjangan

Pembagian kawasan pembangunan dimaksud adalah untuk mencegah timbulnya kesenjangan antara wilayah pantai dengan wilayah pedalaman (tengah) serta wilayah perbatasan. Soalnya, wilayah pantai yang menjadi pusat pembangunan industri, mengutamakan tenaga kerja trampil dan dilakukan secara sangat selektif.

Tidak mengherankan jika kesenjangan penghasilan antara penduduk wilayah pantai dengan penduduk wilayah tengah dan perbatasan sangat mencolok. Kesenjangan ini, perlu dicegah, agar tidak timbul kecemburuan sosial yang pada gilirannya akan menghambat jalannya pembangunan. Ide pembagian wilayah pembangunan ini, sesungguhnya merupakan gagasan pemecahan masalah pembangunan Kalimantan Timur.

"Saya menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur ini cukup sulit dan berat. Terutama karena letak geografis propinsi ini, yang mengakibatkan tidak meratanya pembangunan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Masalah pokok yang dihadapi Kalimantan Timur sekarang adalah soal perhubungan (darat, laut/air dan sungai serta perhubungan udara). Ini yang ingin diterobos lewat pembagian kawasan pembangunan itu tadi", kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H.M. Ardans SH kepada *Media Karya*.

Menghadapi situasi geografis demikian itu, Ardans SH sejak tiga tahun lampau, saat ia dibebani pelaksanaan tugas Gubernur sehari-hari, (karena Gubernur Suwandi menjalani perawatan intensif), sudah mencanangkan langkah-langkah ke arah mengatasi hambatan pembangunan tersebut.

Upaya pembangunan

Sesuai dengan pembagian kawasan pembangunan yang ditetapkan, Ardans mulai melakukan upaya-upaya pembangunan secara menyeluruh; kendati masih banyak hambatan. Upaya pertama dilakukan melalui peningkatan pembangunan bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

Di bidang pertanian, ia telah mulai membuka perkebunan dengan sistem Pertanian Inti Rakyat Perkebunan (PIR BUN), untuk penanaman kelapa sawit, karet dan coklat, di Kabupaten Pasir seluas 80.000 ha.

Di bidang perikanan, telah dibuka lahan budidaya udang (tambak) seluas 1000 ha dengan investasi sebesar Rp 12 milyar. Khusus mengenai per-

HM Ardans

Digitized by Google

tambakan udang ini, ada masalah yang masih belum selesai, yaitu tumpang-tindihnya pemanfaatan lahan. Karena lahan yang dicadangkan untuk pertambakan udang ini ternyata berada dalam kawasan eksplorasi Pertamina karena mengandung minyak dan gas alam.

Untuk mengatasi hal ini, pihak Pemda Kaltim telah mengadakan konsultasi dengan pihak Pertamina, agar lahan tersebut dibebaskan dari pengeboran, selama masih berada dalam masa kontrak dengan pihak penanam modal untuk tambak udang, dalam hal ini Bank Dunia.

Kebutuhan Investasi

Dalam melaksanakan pembangunan, Kalimantan Timur membutuhkan investasi dalam skala besar di segala bidang, terutama di bidang pertanian dan perhubungan. Untuk itu, diperlukan penggalian sumber dana baik dalam maupun luar negeri.

Menurut rencana, Bank Dunia akan membantu dana untuk pertambakan udang seluas 1600 ha, dengan nilai investasi sebesar Rp 12 milyar (untuk tahap pertama dipersiapkan 1000 ha lahan).

Kebutuhan investasi ini tidak hanya untuk bidang pertanian, tetapi juga untuk bidang perhubungan (laut, darat dan udara). Kalimantan Timur yang luasnya hampir sepertiga luas wilayah republik ini, belum seluruhnya tersentuh pembangunan. Padahal, potensi ekonomi yang dikandung daerah ini, cukup besar.

Kalimantan Timur memiliki sumber kekayaan alam yang cukup besar, seperti minyak, batubara, emas, kayu dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya. Tetapi untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam yang terkandung dalam bumi propinsi ini, dibutuhkan dana yang tidak sedikit; sementara penghasilan murni daerah maupun dana pemerintah pusat sangat terbatas. Untuk itu, pihak pemda Kaltim, melalui Wakil Gubernur-nya, H.M. Ardans SH, telah diupayakan pencarian dana dari pihak swasta baik nasional maupun asing termasuk badan-badan keuangan dunia (Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia = ADB).

Pertumbuhan penduduk

Nampaknya, laju pertumbuhan penduduk di daerah ini sangat tinggi, jika dilihat secara keseluruhan yaitu 5,6 persen setahun (pertumbuhan penduduk secara nasional hanya 2,3% persen setahun). Tetapi ternyata pertumbuhan penduduk yang tinggi itu kebanyakan karena adanya imigran (3,2 persen), pertumbuhan penduduk real hanya 2,4 persen (0,1 persen di atas pertumbuhan penduduk secara nasional).

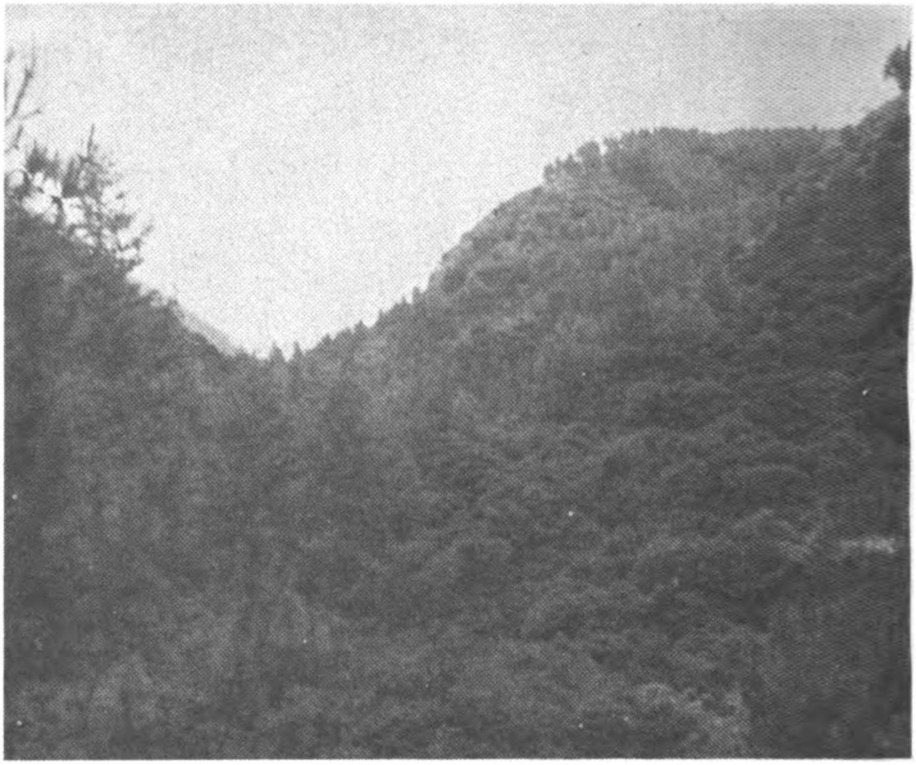

Kaltim membutuhkan infestasi dengan skala besar

Jumlah penduduk Kalimantan Timur seluruhnya hanya 1,6 juta jiwa, dengan penyebaran yang tidak merata. Daerah padat penduduk adalah daerah pantai (Samarinda, Tarakan dan Balikpapan), sementara penduduk yang paling jarang adalah di daerah pedalaman Mahakam serta sekitar perbatasan dengan wilayah Malaysia (Serawak).

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama yang berada di daerah pedalaman Mahakam yang sangat tergantung pada hasil pertaniannya, akan diupayakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan khususnya perhubungan udara dan darat. Hal ini penting untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan, dari daerah-daerah produksi ke pasar.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, diusahakan dengan mendatangkan dokter terbang. Sedangkan untuk peningkatan kemampuan beli masyarakat diupayakan membangun pusat-pusat perdagangan hasil pertanian (pasar) yang dapat menampung hasil para petani.

Selain itu diusahakan juga pembangunan proyek-proyek yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, sebagai upaya meratakan penyebaran penduduk. Selama ini daerah pantai (Tarakan, Balikpapan, Bulungan, Bontan) merupakan wilayah yang padat penduduknya, karena terdapat industri/pabrik yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sayangnya, kebanyakan tenaga kerja yang ada di daerah tersebut adalah imigran dari luar Kalimantan Timur.

Beban Politis

"Pembangunan suatu masyarakat, tidak hanya menyangkut sektor ekonomi tetapi menyangkut pembangunan di segala bidang; pembangunan sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Ini sesuai dengan ketetapan GBHN 1983, dimana pembangunan dimaksudkan sebagai pembangunan manusia seutuhnya dan merupakan pengamalan Pancasila. Itu berarti disamping pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan politik/ideologi serta pertahanan keamanan harus pula mendapat perhatian", kata Ardans.

Nah dalam rangka ini, ada beban politis yang akhir-akhir ini terasa sekali mengganjel, yaitu dualisme kebijaksanaan pemerintahan daerah,

Digitized by Google

sejak Gubernur menjalani perawatan karena sakit, keluh Wakil Gubernur Ardans. "Dualisme ini harus segera diakhiri, agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan kesimpangsiuran dalam melaksanakan pembangunan daerah", Ardans menegaskan. Menurutnya, dualisme kebijaksanaan pemerintah daerah ini merupakan beban politik yang sangat mengganggu. Dualisme dimaksud adalah antara kebijaksanaan Wakil Gubernur sebagai pelaksana tugas Gubernur dan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Sekwilda.

Kebakaran hutan

Sejak tahun 1984, masalah yang paling menonjol adalah kebakaran hutan serta penebangan liar. Mengenai kebakaran hutan, sebenarnya tidak sebanyak 3,6 juta ha seperti yang diberitakan selama ini. Yang benar adalah hanya beberapa ribu ha saja. Ini sudah bisa diatasi melalui pemukiman kembali penduduk pada lokasi yang telah ditetapkan, sehingga mereka tidak lagi berpindah-pindah.

Yang melakukan pembakaran, bukan penduduk asli tetapi para pendatang (kaum imigran). Mereka melakukan hal itu sebagai upaya mencari lahan pertanian yang masih subur untuk bertani, setelah tempat sebelumnya tak lagi memberikan hasil. Sistem ladang berpindah-pindah itu lah yang menyebabkan kebakaran hutan.

Kemudian para petani pendatang itu lantas minta ijin untuk melakukan penebangan di daerah bekas kebakaran tersebut, namun ternyata setelah mendapat ijin, bukan hutan bekas kebakaran itu yang ditebang, tetapi di lokasi yang tidak terbakar. Jadi penebangan liar itu tidak mendapat ijin, mereka menggunakan ijin penebangan hutan bekas kebakaran untuk melakukan penebangan di hutan yang masih hijau.

Inipun dapat ditertibkan melalui peningkatan pengawasan oleh pihak kehutanan (polisi kehutanan) bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya.

Ardans yang lulusan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ini, telah bekerja di bawah pimpinan tiga orang Gubernur Kalimantan Timur, masing-masing, Gubernur Wahab Syahrani, Gubernur Eri Supardjan dan Gubernur Suwandi yang akan berakhir tugasnya tanggal 20 Juni 1988 mendatang. Sejak tahun 1986 hingga sekarang, H.M. Ardans SH menjalankan tugas Gubernur, karena Gubernur Suwandi harus menjalani perawatan secara intensif.

Tanggal 3 November 1987 lalu, ia menyampaikan pidato pertanggungan-jawab Gubernur (Gubernur Suwandi hadir tetapi dalam keadaan masih sakit), dalam rangka akhir masa jabatan, di depan sidang paripurna DPRD yang dihadiri seluruh pimpinan teras Instansi/Dinas, Bupati, Walikota, seluruh Kalimantan Timur. Juga hadir Inspektur Jenderal Departemen Dalam negeri beserta 18 anggota rombongan yang akan melakukan penelitian terhadap jalannya pemerintahan daerah selama masa jabatan Gubernur Suwandi. □ (Anang Adenansi)

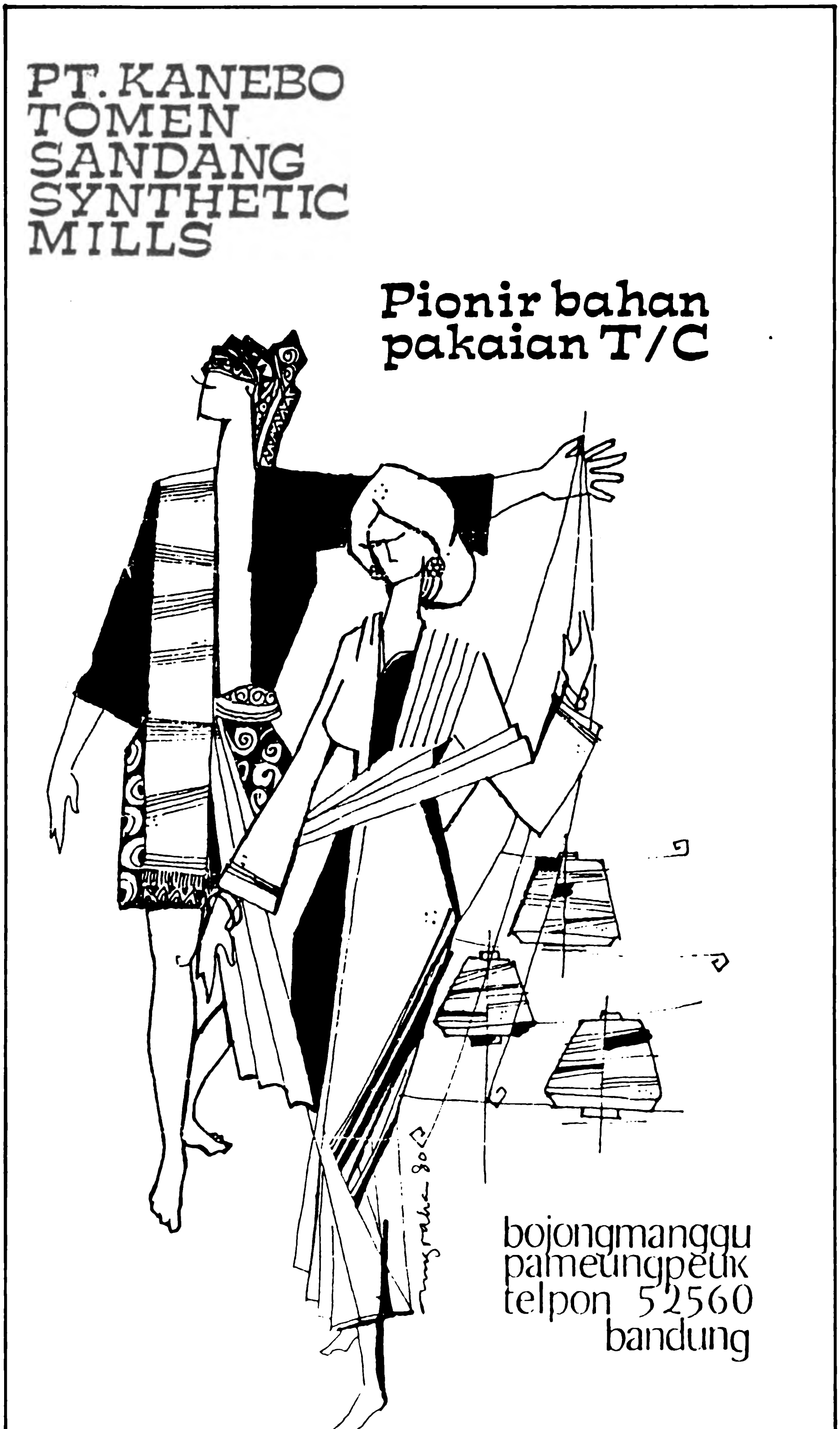

Digitized by Google

Kini Sudah Saatnya Mengembalikan Postur Politik Internasional Kita

Kini sudah waktunya Indonesia mengembalikan *political posture* pada forum internasional tanpa mengenyampingkan ASEAN. Hal itu diungkapkan oleh Jenderal (purn) Sumitro sebagai pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Hubungan Luar Negeri Golkar di kantor DPP Golkar akhir November yang lalu. "Kita harus menciptakan suatu forum internasional untuk mengeksploitir situasi sekarang ini seperti yang pernah kita lakukan dengan Konprensi Asia Afrika dulu," ujarnya. Dikatakannya bahwa di jaman Bung Karno itu Indonesia pernah punya tempat dalam kegiatan politik internasional. Bahkan Jakarta waktu itu sempat disebut sebagai *centre of idea,* tambahnya. Untuk merealisasikan peran internasional seperti itu oleh Sumitro dianjurkan perlunya mendekati negara-negara berkembang lainnya seperti Mesir, India dan Yugoslavia.

Menurut Sumitro, kurang menonjolnya peran Indonesia di arena politik internasional selama kurun waktu 20 tahun terakhir ini adalah karena politik *inward looking* yang dijalankan Pemerintah, yang lebih mengutamakan politik ke dalam yaitu politik pembangunan.

Di depan diskusi yang berjudul "Perspektif Politik Luar Negeri RI dan ASEAN sebagai salah satu Pilar Utamanya" itu, Sumitro lebih lanjut mengemukakan pendapatnya yang disebutnya sebagai suatu hipotesa, yakni bahwa dunia kini dalam keadaan di mana pola politik global warisan Perang Dunia II akan berakhir. Hal itu ditandai dengan tak adanya perang ideologi, tak adanya perbedaan mencolok politik negara-negara adidaya yang menciptakan adanya pakta-pakta militer dan lain sebagainya.

Adanya perundingan-perundingan antara negara adidaya seperti perundingan Geneva disusul dengan pertemuan Reagan-Gorbachev bulan Desember ini dinilai oleh Sumitro sebagai pertanda akan berakhirnya ketegangan dunia. Bila hipotesa itu benar, hal itu akan membawa beberapa konsekuensi seperti perlunya peninjauan kembali terhadap organisasi Perserikatan Bangsa-Banga berkenaan dengan fungsi-fungsinya, komposisi Dewan Keamanan dan sebagainya. Blok-blok yang diciptakan oleh negara-negara adidaya akan hilang, diikuti pula oleh hapusnya kekuatan Non Blok. Negara-negara akan menjadi blak-blakan (terbuka). Dikemukakannya contoh negeri RRC yang begitu komunisnya kini sudah menjadi terbuka. "Sudah waktunya kita yang tidak komunis ini untuk lebih terbuka lagi," ujar Sumitro.

Bekas Pangkopkamtib itu lebih jauh mengemukakan perkiraan akan terjadinya rekonfigurasi kekuatan dunia. Rusia dan Amerika Serikat kemampuan ekonomisnya akan berada pada titik terendah. Di lain pihak Jepang dan Jerman akan muncul sebagai kekuatan ekonomi yang paling menonjol dan tidak mustahil kedua negeri ini suatu saat akan menjadi kekuatan militer.

Dalam hubungan itu ditekankan oleh Sumitro bahwa negara-negara berkembang harus tanggap terhadap perkembangan seperti itu dan segera mengambil inisiatif. Jepang akan tampil sebagai kekuatan ekonomi dunia, yang juga akan menjadi kekuatan politik dan militer yang tangguh di kawasan Asia Pasifik. "Indonesia harus mempunyai persepsi yang jelas menghadapi perkembangan itu," ujarnya.

Uraian Sumitro tentang peredaan ketegangan dunia mendapat tanggapan dari Hasnan Habib yang siang hari itu menjadi peserta diskusi. Bekas Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu mengemukakan bahwa kita perlu bersikap hati-hati terhadap kesepakatan Reagan-Gorbachev. Dari peristiwa itu belum bisa dilihat tanda-tanda terwujudnya detende II. Mengapa? Menurut Hasnan Habib secara substansial kesepakatan yang akan mereka (AS-US) wujudkan itu belum berarti apa-apa karena hanya mencakup sebesar 2 proses dari seluruh persediaan senjata yang dimilikinya. "Ini hanya merupakan *test-case* saja untuk Reagan-Gorbachev, dan kita jangan terpesona oleh gejala-gejala tersebut," tandasnya. Apalagi, tambahnya, kapitalisme dan komunisme itu sifatnya diametral sehingga pertentangan akan tetap ada.

Sumitro: Jangan sekali-kali mendiskreditkan ASEAN

Asia Tenggara

Mengomentari tentang ASEAN, Sumitro menegaskan bahwa kita jangan sekali-sekali mendiskreditkan ASEAN. Indonesia berkepentingan terhadap ASEAN dalam hal *indirect security* yang menciptakan ketenangan yang diperlukan Indonesia guna mem-

Digitized by Google

Diskusi Hublu di DPP Golkar

bangun negeri ini. Dengan organisasi ASEAN Indonesia bisa mengajak negara-negara tetangganya itu untuk bersama-sama bertindak tegas terhadap sisa-sisa komunis. "Mumpung sisa-sisa komunis itu sudah tidak punya bapak angkat lagi, karena Rusia dan Cina sudah bersikap lain, sudah terbuka," ujarnya. Melalui organisasi ASEAN akan dapat pula diatasi masalah-masalah berkenaan dengan faktor peninggalan historis negara-negara berkembang itu sendiri, yaitu masalah kesukuan, ras, perbatasan, kecurigaan satu sama lain, dan lain sebagainya. Juga dengan ASEAN diharapkan dapat ditanggulangi pola-pola subversi baru lainnya, seperti subversi Libia dan Iran.

Sumitro menyatakan kegembiraannya atas usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam penyelesaian masalah Kampuchea. Oleh Sumitro hal itu dinilai bahwa RI sudah berani bergerak tanpa terlalu bergantung kepada ASEAN.

Mengenai Vietnam dikatakannya bahwa tidak ada tanda-tanda atau data intelijens yang menunjukkan Vietnam akan mengekspor ideologi. Vietnam memang komunis, tetapi tidak akan ekspansi ke negara tetangga, ungkapnya.

Pembicara lain dalam diskusi, yakni Sabam Siagian SH mengetengahkan perlunya perumusan politik luar negeri untuk mengamankan kepentingan nasional yang diproyeksikan 10-15 tahun ke depan. Dalam kaitan ini, menurut *chief-editor* harian *The Jakarta Post* itu, adalah penting menciptakan lingkungan geopolitik Asia Tenggara yang aman dan menggairahkan. Untuk itu perlu di deteksi hal-hal yang dapat mengganggu terciptanya lingkungan geopolitik yang aman itu. Dikemukakannya contoh antara lain masalah Kampuchea. Sabam menekankan penyelesaian masalah Kampuchea tak dapat ditunda-tunda lagi. Sebab, jika masalahnya tak terselesaikan akibatnya adalah terjadinya dikhotomi di kawasan ini, yaitu di satu pihak negara-negara Asia Tenggara bagian Selatan termasuk ASEAN akan semakin tergantung kepada AS dan Jepang atau Barat, sedang di lain pihak negeri-negeri di Asia Tenggara bagian utara seperti Vietnam, Laos dan Kamboja akan semakin tergantung kepada Soviet.

Menurut Sabam, sebenarnya masalah Kampuchea adalah masalah antara Vietnam dan Thailand yang sudah ada semenjak 250 tahun yang lalu. Cara-cara penyelesaiannya menurutnya memerlukan perpaduan antara faktor hukum internasional dan faktor geopolitik.

Lebih lanjut Sabam menekankan perlunya diadakan pengkajian tentang masalah Cina (RRC). "Sudah terlalu lama kita mengabaikan masalah Cina," ujarnya. Cina perlu diperhitungkan karena menurutnya pada pertengahan abad 21 yang akan datang akan muncul Cina sebagai suatu negara modern yang kuat ekonominya, yang akan menduduki tempat yang wajar di panggung dunia ini.

Tentang Filipina Sabam menganjurkan agar terus diadakan pengkajian sehubungan dengan perkembangan-perkembangan yang ada di negeri itu, khususnya yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap ketenteraman di kawasan Asia Tenggara.

Diskusi hari itu juga menampilkan pembicara unsur Pemerintah, yaitu Wisber Louis, Dirjen ASEAN Deplu RI, yang menjelaskan tentang berbagai kebijaksanaan Pemerintah yang ditempuh selama ini dalam meningkatkan kerja sama ASEAN.

Menlu Mochtar Kusumaatmadja yang sempat hadir untuk mengantar diskusi mengatakan bahwa prinsip yang mendasari didirikannya organisasi ASEAN adalah komitmen kita untuk hidup berdampingan secara damai dengan negara manapun tanpa membeda-bedakan besar kecilnya atau sistem politik sosial-ekonomi yang dianutnya. Dengan prinsip ini maka semua masalah politik luar negeri harus diselesaikan dengan jalan damai dan bukannya dengan kekerasan. Menlu memberikan contoh tentang hubungan RI dengan Vietnam, yang akhir-akhir ini semakin membaik, meskipun Vietnam negara komunis. Kepada Vietnam telah dibeberkan tentang sistem pembangunan di Indonesia. "Vietnam kini telah menyadari bahwa membangun itu jauh lebih sukar daripada berperang," jelas Menteri.

Menarik untuk dicatat ialah ungkapan Menlu Mochtar yang mengatakan bahwa secara intern partai (intern organisasi) DPP Golkar berhak memanggil dirinya datang ke kantor DPP Golkar untuk dimintai penjelasan tentang pelaksanaan kebijaksanaan di bidang politik luar negeri.

Diskusi siang hari itu dibuka oleh Ketua DPP Golkar R.H. Soegandhi. Tampak hadir anggota DPP yang lain seperti A.E. Manihuruk, Zarlons Zaghlul SH, Ny. Tati S. Darsoyo dan Drs. Soedarmadji, serta tokoh-tokoh lain seperti Hasnan Habib, Hasyim Djalal (Kabalitbang Deplu), anggota-anggota FKP DPR-RI dan undangan lainnya. ☐ TA Purnomo

Digitized by Google

Bu Moer Menteri UPW Baru

Awal Nopember lalu, segenap bangsa Indonesia dikejutkan oleh meninggalnya Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Ny Lasiah Sutanto. Teka-teki kemudian muncul di permukaan. Apakah sisa jabatan almarhum yang tinggal beberapa bulan itu, tetap dikosongkan sampai berakhir bulan Maret, atau akan ada penggantinya?

Teka-teki itu kemudian terjawab, setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan No. 285/M tanggal 17 Nopember 1987, dengan mengangkat Ny Anindiyati Sulasikin Moerpratomo menduduki kursi yang ditinggal almarhumah.

Ibu Moer, panggilan akrapnya, dengan demikian menjadi Menteri ke dua dalam kabinet Pembangunan IV yang diangkat karena pendahulunya meninggal. Rekannya Fuad Hasan, kira-kira satu setengah tahun yang lalu diangkat Presiden menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena pejabat sebelumnya Prof Dr Nugroho Notosusanto, dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pengangkatan Ny AS Moerpratomo agaknya sesuai dengan bursa calon yang diperbincangkan masyarakat. Dan yang terkejut mungkin Ibu Moer Sendiri. Ia dihubungi posisi sekarang pada saat berada di Bandung, mengikuti kunjungan kerja Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH. Ibu berusia 60 tahun ini dengan demikian menjadi wanita Indonesia ke tiga dalam era Orde Baru yang dipercayakan jabatan Menteri. Dua yang lain adalah almarhumah Ny Lasiah Sutanto dan Menteri Sosial Ny Nani Sudarsono.

Pengangkatan Ny AS Moerpratomo untuk mengisi jabatan Menteri UPW yang lowong dinilai para wakil rakyat di DPR maupun pers sebagai keputusan yang tepat dan penting.

Keputusan Presiden itu menunjukkan betapa besarnya perhatian terhadap kewanitaan. Bukan saja karena wanita jumlahnya lebih banyak dari pria, tapi lebih dari itu, wanita juga mempunyai potensi yang besar dalam ikut membangun manusia seutuhnya.

Untuk menunjang terwujudnya harapan, agar wanita dapat berperan banyak dalam pembangunan, pengorganisasian sangatlah penting dan perlu. Oleh karena itu, kebijaksanaan Presiden segera mengisi kekosongan Menteri UPW, yang meskipun waktunya tinggal beberapa bulan saja, dinilai tetap saja relevan.

Sedangkan dipilihnya Ny AS Moerpratomo, salah satu Ketua DPP Golkar Ketua Umum Kowani, menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dirasakan juga tepat. Sebab, Ny AS Moerpratomo, kendati sudah berumur 60 tahun masih saja lincah dan energik, juga telah banyak makan asam garam dalam dunia organisasi, baik di organisasi politik seperti Golkar maupun organisasi kewanitaan Kowani.

''Pertimbangan Bapak Presiden untuk memilih Ny. AS Moerpratomo adalah karena yang bersangkutan pemimpin Kowani dan sekaligus sebagai tokoh wanita'' kata Presiden yang disampaikan oleh Mensesneg Sudharmono, waktu itu.

Sementara Ny. Gunariyah M. Mochdi Kartasasmita, merasa bangga atas dilantiknya Ny. AS Moerpratomo, menjadi Menteri UPW. Sebab, katanya, wanita mempunyai peranan penting dalam kabinet. Selain itu Ibu Moer juga dipandang sebagai orang yang mempunyai dedikasi dan dapat dijadikan panutan bagi generasi yang lebih muda.

Gunariyah yang anggota DPR-FKP mengharapkan agar Ibu Moer dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan melanjutkan tugas yang telah dirintis oleh pendahulunya.

Mengenai harapan masyarakat terhadapnya Moer yang ditanya wartawan usai dilantik Presiden, belum banyak memberi komentar. ''Saya harus melapor dan meminta petunjuk dari Bapak Presiden,'' ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam waktu yang relatif singkat ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan program pembinaan kaum wanita dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang digariskan dalam Repelita IV, dimana sebagian besar telah dilaksanakan oleh pendahulunya.

Tidak ada janji lain kecuali kerja keras, demikian katanya ketika dicegat wartawan.☐ BM

Bu Moer, wanita ketiga menjadi menteri

Digitized by Google

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

MAULUD MENGAJARKAN DISIPLIN

Maulud Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam bukan sekedar peristiwa tradisional atau seremonial belaka. Namun, suatu peristiwa yang mempunyai arti tersendiri dan sekaligus memperkuat langkah-langkah kita untuk selanjutnya.

Apalagi isi risalah atau khotbah Maulud, selama ini tidak pernah terbelakang dan ketinggalan jaman. Karena, ada penonjolan masalah-masalah yang mempunyai relevansi waktu dan berisikan tauladan-tauladan Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita gunakan sebagai dalil-dalil untuk perbandingan serta tolak ukur kehidupan kita.

Selain itu, menurut Ketua DPD I Golkar DKI H Achmadi, pada setiap peringatan Maulud selalu ada hal-hal yang meningkat, berkembang dan unsur pembaharuan.

Maulud Nabi juga mengandung makna agar kita berusaha untuk tertib dalam hidup menurut urut-urutannya. Bilamana tidak tertib, maka kita hidup tidak sah. Seperti halnya kita mengambil air wudhu atau melaksanakan sholat, kalau tidak sesuai dengan urut-urutannya otomatis tidak sah sebagaimana adanya.

Di samping itu, Achmadi mengajak warga Golkar dan Islam yang berada di wilayah Ibukota DKI ini supaya mendukung kebijaksanaan Gubernur Wiyogo, dalam rangka menegakkan disiplin diri terhadap lingkungan — yang terkait dengan masalah kebersihan kota dan peningkatan kualitas manusia sebagai kekuatan utama pembangunan.

Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Ketua DPD I Golkar DKI 7 Desember lalu dihadiri Gubernur Wiyogo, anggota DPR, MPR, DPRD DKI, tokoh ulama dan masyarakat lainnya.☐ DT

RAKERNAS MUI

Dalam Ketetapan MPR No. 11/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, telah ditegaskan bahwa hak kebebasan agama adalah hak asasi manusia yang paling asasi dan bukan pemberian negara atau pemberian golongan. Artinya, urusan agama yang dianutnya bagi umat adalah otonom. Dengan demikian, dalam prinsipnya tergantung kepada prakarsa, daya, cipta, kesatuan, persatuan serta kerukunan dalam masing-masing umat itu sendiri, untuk menggalang potensi serta kemampuan bagi kesejahteraan umatnya. Baik lahir maupun batin.

Demikian kata Menteri Sudharmono, SH kepada para peserta Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI)

''Mengingat besarnya jumlah umat Islam serta beragamnya kedudukan sosial ekonominya, tugas membina umat Islam ke dalam ini jelas bukan tugas ringan. Sehingga, sangat tepat bila MUI telah melengkapi susunan personalianya dengan kaum cendekiawan yang dapat membantu memberikan gagasan-gagasan untuk pembinaan umat sebaik-baiknya.''

Untuk maksud itu, menurut Sudharmono, peningkatan keikutsertaan ulama dalam umat beragama Islam dalam pembangunan perlu dititik-beratkan pada pembinaan kualitas pribadi Manusia Indonesia yang menjadi penganutnya. Ini secara langsung berarti ikut mengelola hakekat pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Suatu konsekuensi dari peranan yang diharapkan dari agama serta umat beragama ini dalam rangka pembangunan nasional, adalah agar kita mencurahkan perhatian besar kepada diri manusia seutuhnya itu khususnya aspek rokhaniahnya.☐ DT

Digitized by Google

R.A. Kartini & Sejarah

BILA keabsahan sejarah seorang pahlawan nasional tiba-tiba seakan digugat, tentu mengejutkan dan akan ada reaksi. Hal itu terjadi tatkala seorang ilmuwan terkemuka dikutip pendapatnya oleh pers mengenai Raden Ajeng Kartini di bawah judul "Harsya: Kartini Bukan Contoh yang Baik. Carilah Pahlawan Nasional yang tak Pernah Menyerah pada Musuh".

Ilmuwan yang bersangkutan juga menyatakan kaget, terutama oleh judul berita. Bahkan ia tak menyangka bahwa pembicaraan yang dianggapnya sekedar pembicaraan antara seorang guru sosiologi dan sejarah masyarakat dengan beberapa mahasiswa — yang diantaranya ada yang berprofesi wartawan — dapat menjadi bahan pemberitaan. Tapi yang terpenting lagi, ia tidak mengharapkan judul berita itu dibaca terlepas dari konteks pembicaraan yang sesungguhnya.

Cukup banyak reaksi, termasuk reaksi yang tercatat cukup keras dari Menteri Negara UPW.

Setelah suatu media terkemuka menurunkan tulisan ilmuwan bersangkutan yang berisi penjelasan lengkap dari konteks pembicaraan yang sebenarnya, segera kita dapat menyimpulkan bahwa pada hakekatnya masalah tersebut lebih merupakan masalah ilmiah ketimbang masalah di luar itu. Potongan judul "Kartini Bukan Contoh yang Baik", jadinya telah mengecoh dan sejenak sempat mengundang 'persoalan'. Dan apa boleh buat, kali ini kita terpaksa ikut menyesalkan ketidakcermatan rekan pers dalam penyajian berita.

Sepanjang penjelasan yang ada, pembicaraan ilmuwan tersebut sebenarnya pada esensinya adalah pembahasan yang tidak lepas dari metode pendekatan dan teknik dalam telaah sejarah. Dan dalam metode sejarah, obyektivitas berdasarkan bukti dan fakta adalah penting. Tapi bukti dan fakta itu sendiri juga membutuhkan kemampuan penafsiran sesuai dengan tingkat kemajuan dan sistim nilai yang ada di masyarakat dalam dimensi waktu yang ada. Dan ilmuwan tadi agaknya sedang mempertanyakan keabsahan penafsiran terhadap beberapa pahlawan nasional kita, karena beberapa dari penafsiran yang ada masih banyak bersandar kepada visi orang-orang Belanda untuk tidak menyebutnya visi warisan kolonial. Suatu upaya untuk memperbaiki kedudukan moral penafsiran sejarah justru dibutuhkan di Indonesia sekarang dan di masa-masa mendatang. Dan tidak dengan sendirinya upaya mencari penafsiran kembali akan merugikan posisi sejumlah tokoh dalam sejarah kita, bahkan mungkin akan dapat ditampilkan sejumlah tokoh sejarah lainnya yang selama ini terbenam karena satu dan lain hal yang tidak adil, apalagi bila kita memperhitungkan perspektif kepentingan generasi mendatang.

Khusus mengenai RA Kartini misalnya, ada tanda-tanda bahwa pihak kolonial telah memusnahkan beberapa surat Kartini yang tajam mengenai kekuasaan kolonial. Termasuk juga penjelasan-penjelasannya kenapa ia bersedia di-poligami.

Barangkali, untuk masa mendatang, kita semua perlu cermat dalam menanggapi kegiatan para ilmuwan — termasuk rekan-rekan pers dalam menjalankan tugas memberitakannya — karena reaksi keras yang terburu-buru dapat juga membunuh kegairahan dan kegiatan ilmiah. Tetapi tentu sebaliknya, nasihat Presiden seperti yang dikutipkan oleh Menteri UPW, hendaknya para ilmuwan juga jangan mudah melontarkan pernyataan tanpa mempertimbangkan kemungkinan dampaknya yang meresahkan masyarakat. Carilah jalan dan cara yang tepat, karena seorang ilmuwan memang juga tak dapat mengabaikan kepekaan maupun emosi serta kepentingan masyarakat.

Gaji Pegawai Negeri

GAJI pegawai negeri dipersoalkan lagi. Dihitung-hitung memang gaji pegawai negeri saat ini sudah tambah jauh ketinggalan di tengah laju peningkatan harga-harga. Tapi secara menakjubkan, bak akrobat, dijungkir balik, insan abdi negara dan masyarakat ini toh masih bisa tegak dalam kehidupan ini. Kendati ada yang bertanya-tanya dengan was-was: sampai kapan?

Sepanjang suara yang ada, sepertinya sulit untuk mengharap adanya kemungkinan kenaikan gaji pegawai negeri saat ini. Antara lain kalau mengingat kemampuan keuangan negara. Tak kurang dari Ketua MPR/DPR sudah menggambarkan tipisnya harapan itu.

Kalau toh gaji pegawai negeri pada akhirnya dinaikkan, orang juga was-was, berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu pasti harga-harga tak kalah gesitnya melejit. Mereka, yang di Jakarta bilang, paling-paling sobat-sobat di Glodok, Pasar Pagi dan sekitarnya yang panen. Pegawai negeri hanya jadi tempat persinggahan. Lebih repot lagi, mereka anggota masyarakat biasa yang bukan pegawai negeri, gaji tak naik, harga sudah naik.

Tapi itu bukan berarti gaji pegawai negeri tak boleh naik. Kalau ada jalannya, naikkanlah.

Porkas SOB

UNDIAN Porkas yang oleh pejabat pemerintah sendiri diakui sering menimbulkan perbedaan pengertian dan penilaian di masyarakat, diumumkan dapat dilanjutkan. Salah satu pertimbangan pokok diizinkannya Porkas dilanjutkan adalah bahwa selama ini melalui Porkas berhasil dihimpun dana yang besar manfaatnya dalam pembinaan olahraga.

Salah satu contoh yang ditunjukkan adalah pelaksanaan Sea Games yang lalu. Lebih dari dua pertiga biaya Sea Games yang sebesar Rp. 15 milyar dipenuhi dari dana Porkas.

Diakui oleh pemerintah terdapat pula ekses dalam pelaksanaan Porkas — yang digolongkan undian dan bukan perjudian — tetapi bersifat kasuistik. Dalam pelaksanaan Porkas lebih lanjut, ekses-ekses ini diperhatikan dan dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan.

Lebih dari sekedar penyempurnaan pelaksanaan, bahkan nama Porkas pun akan segera diganti menjadi Sumbangan Olahraga Berhadiah yang disingkat menjadi SOB. Nama baru ini banyak ditanggapi secara humoristis. Soalnya orang masih ingat betul betapa bertahun-tahun lamanya kita di zaman Orde Lama dulu ada dalam situasi SOB — Staat van Oorlog en Beleg — alias negara dalam keadaan darurat perang.

Tapi ya, bisa dibilang, apalah arti nama. Yang penting tentu esensi dari perubahan yang dimaksudkan dan dijanjikan pemerintah: pelaksanaannya yang lebih sempurna. Pemerintah harus tetap awas mengikuti penyelenggaraannya agar segala ekses dapat dihindari. Bagaimanapun Porkas alias SOB adalah sesuatu yang tetap sensitif karena belum diterima sepenuh hati oleh seluruh anggota masyarakat. Semoga singkatan baru SOB tidak ikut menambahkan konotasi baru — cara darurat mengumpulkan sumbangan olahraga yang sedang darurat — dan kepekaan baru....

Digitized by Google

Menghapus Rasa Terisolasi

Suasana sejuk setidak-tidaknya mewarnai silaturrahmi Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono, SH dengan keluarga besar Golkar Kalimantan Tengah malam itu, 6 Desember 1987, Sekitar 2000 kader Golkar memenuhi Gedung Serbaguna Jayang Tingang, Palangkaraya.

Kunjungan yang sempat tertunda dua kali ini merupakan kunjungan terakhir di pulau Kalimantan dan merupakan propinsi ke-25 yang sempat dikunjungi Ketua Umum DPP Golkar, tinggal dua propinsi dari seluruh propinsi di Indonesia yang belum sempat terkunjungi sehabis Pemilu '87 yaitu Nusa Tenggara Timur dan propinsi termuda Timor Timur.

Namun kesejukan itu tidak membuat Golkar Kalimantan Tengah tertidur, terbukti konsolidasi organisasi post pemilu masih terus berjalan, pendaftaran anggota terus digalakkan, begitu juga pembinaan kader, karakterdes maupun kader fungsional, masih terus menerus diberikan bimbingan dan penyuluhan, kelompok diskusi tetap juga masih berjalan, meskipun diakui frekwensinya belum sehangat pada waktu menjelang pemilu '87. Ini pengakuan Soeshandoko Ketua DPD Golkar Tk I Kalimantan Tengah.

Kesadaran, kesiapan dan langkah-langkah nyata yang mulai diambil Golkar Kalteng ini sungguh membesarkan hati, ujar Ketua Umum. Memang, konsolidasi organisasi merupakan tugas dari setiap organisasi politik, terutama Golkar yang telah memperoleh kepercayaan besar oleh rakyat.

Ini merupakan langkah nyata yang sangat penting, lanjut Sudharmono. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan itu mutlak harus terus dilakukan terlebih untuk memelihara semangat kejuangan Golkar dalam rangka menyongsong tugas-tugas kedepan, baik tugas jangka pendek maupun tugas panjang bagi pembangunan. Menurut Sudharmono tugas Golkar saat ini bercorak dua hal yaitu ke dalam Golkar mengadakan konsolidasi secara terus-menerus, sedang ke luar Golkar memberikan pengabdian yang sebesar-besarnya kepada rakyat melalui pelaksanaan pembangunan, sesuai amanat rakyat yang dituangkan dalam GBHN hasil SU MPR yang akan datang dibawah pimpinan Presiden Mandataris. Oleh karena itu merupakan tugas besar Golkar untuk mensukseskan Sidang Umum MPR tahun 1988 bersama seluruh bangsa Indonesia, dan bukan hanya tugas yang duduk di MPR.

Silaturahmi Ketua Umum Golkar

Sidang Umum MPR

Ukuran Sidang Umum (SU) sukses menurut Sudharmono, disamping SU itu berjalan aman, tertib dan lancar, SU dapat membuahkan rumusan-rumusan yang sesuai dengan harapan rakyat, yang sesuai dengan kehidupan demokrasi Pancasila. Karena itu GBHN yang akan datang diharapkan berisi pokok-pokok mengenai kelanjutan kesinambungan pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan melalui Repelita I sampai Repelita IV. Maka GBHN diharapkan dapat merupakan petunjuk dan garis besar yang dapat melanjutkan Repelita IV ini menjadi repelita V. Yang berarti pembangunan di segala bidang ini akan terus berlanjut dengan menonjolkan dan mengutamakan berbagai segi dan nilai yang merupakan harapan dari rakyat. Salah satu diantaranya adalah mengusahakan pemerataan pembangunan, termasuk pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Ini berarti, kata Sudharmono lebih lanjut, pembangunan di setiap daerah termasuk pembangunan di Kalimantan Tengah, secara nyata akan terlihat bahwa kelanjutan dan kesinambungan pembangunan itu antara lain akan dapat memenuhi harapan rakyat di Kalteng agar makin dapat ditingkatkan kelancaran hubungan komunikasi, sehingga rasa terisolasi daerah satu dengan daerah lain akan makin terhapus.

"Kalau sekarang, dalam Repelita ke IV misalnya, bukan saja hubungan antara Jakarta dan Palangkaraya dapat langsung setiap hari, diharapkan bukan saja hubungan antara Palangkaraya dan Sampit dapat ditempuh melalui jalan darat, tapi dalam Repelita V nanti Insya Allah kalau arah dan jalannya telah ditetapkan, dari Sampit bisa tembus ke Kotawaringin bahkan mungkin dari Kalimantan Tengah dapat menyambung ke Kalimantan Barat, ini sekedar contoh," ujar Sudharmono menjelaskan.

Oleh karena itu, konsolidasi organisasi itu perlu terus dilanjutkan. Konsolidasi yang meliputi penyebaran dan peningkatan kualitas para kader dan anggota, penyegaran para fungsionaris dan menyempurnakan mekanisme organisasi. Sehingga suasana demokrasi organisasi kita makin berkembang. Dengan melaksanakan musyawarah daerah (Musda) Tingkat I dan Tingkat II terlebih dahulu, menjelang Musyawarah Nasional yang akan datang, itu semua merupakan langkah nyata, agar organisasi kita, anggota dan kader Golkar dapat memberikan

Digitized by Google

Kesejukan tidak harus membuat Golkar tertidur

peranan yang lebih besar didalam mensukseskan pembangunan. Ini berarti Golkar menyiapkan diri untuk berpartisipasi mensukseskan Repelita ke V nanti. Sukses dalam Repelita ke V akan menentukan sukses Pemilu tahun 1992. Langkah-langkah nyata semuanya itu masih akan dibuktikan dengan keberhasilan konsolidasi Golkar dalam memberikan sumbangan partisipasi di dalam melaksanakan GBHN hasil SU MPR yang akan datang.

Kepercayaan Rakyat

Menyinggung keberhasilan Golkar Kalimantan Tengah dalam pemilu yang lalu Ketua Umum bangga karena perolehan suara dan jumlah wakil-wakil Golkar yang duduk di DPR, DPRD Tk I maupun DPRD Tk II lebih dari 89 persen. Terlebih yang membesarkan hati Ketua Umum Golkar lagi, bahwa Golkar Kalimantan Tengah tidak takabur, tidak puas diri dengan hasil hasil yang telah dicapai, bahkan justru makin meningkatkan kesadarannya, bahwa dengan kepercayaan rakyat yang besar itu Golkar Kalimantan Tengah tidak akan mengecewakan rakyat, seperti yang diucapkan Ketua DPD Golkar Kalteng, Soeshandoko.

"Itu berarti," kata Ketua Umum, "Kita semua telah melaksanakan tugas yang diemban oleh Golkar sebagai hasil Munas tahun 1983, yaitu Tri Sukses Golkar, telah disukseskan oleh Golkar Kalimantan Tengah".

Dalam kaitan itulah Ketua Umum memberikan tanda penghargaan kepada Golkar Kalteng sebagai dorongan semangat dan tanda solidaritas, untuk lebih membulatkan tekad sehingga pelaksanaan tugas yang masih berat, yaitu mensukseskan pembangunan dalam Repelita ke V, dan mengusahakan sukses pemilu 1992, akan menjadi kenyataan.

Dalam kesempatan itu pula Sudharmono, SH selaku Menteri Sekretaris Negara, menyerahkan sejumlah bantuan Presiden sebesar Rp 819,218 juta, masing masing untuk pembangunan masjid Raya Palangkaraya Rp 75 juta, bantuan pembangunan Gereja Maranata Barito Selatan Rp 12 juta, bantuan pembangunan Gereja Santo Paulus di Buntok Rp 12 juta dan bantuan pembangunan Pelabuhan udara perintis di Kalimantan Tengah sebesar Rp 720,218 juta.

Ikut dalam rombongan acara silaturahmi Ketua Umum DPP Golkar ke Kalimantan Tengah antara lain RH Sugandhi, Sukarton Marmosudjono, Ir Akbar Tandjung, Zarlons Zaghlul, Anang Adenansi, RH Subono, Sudarsono dan pelawak Dian Grup artis safari Golkar untuk menghibur acara warga Golkar tersebut hingga larut malam. ☐ wt.

Membesarkan hati langkah yang diambil Golkar

Digitized by Google

Jambi, Hikmah Kesempatan Terakhir

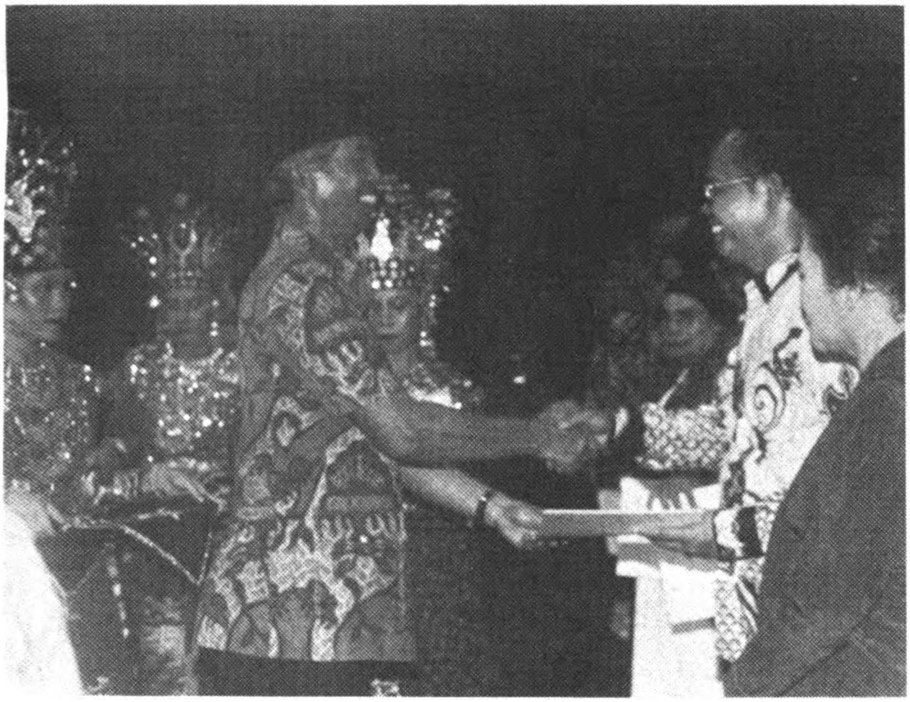

Jambi tidak perlu kecil hati

Setelah pemilu, delapan propinsi di Sumatera semuanya telah dikunjungi Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH dalam rangka silaturahmi untuk mensyukuri sukses Golkar memenangkan pesta demokrasi yang lalu. Ternyata untuk melakukan kunjungan kerja ke 27 propinsi di Indonesia bukan saja membutuhkan tekad dan perencanaan matang, tapi juga urut-urutannya. Mengapa? Karena ada daerah tertentu yang merasa kurang pas bila mendapat giliran terakhir.

Tentu saja bukan maksud Ketua Umum menghargai prestasi dan kepentingan kader di daerah menurut urutan kunjungan. Daerah yang pertama dikunjungi tidak dengan sendirinya lebih penting dari daerah lain. Penegasan ini disampaikan Sudharmono ketika berada di Jambi akhir bulan lalu. Soalnya Sudharmono pernah mendapat keluhan dari Gubernur Bengkulu Suprapto yang merasa seolah-olah propinsinya "dilanggar" dalam rangkaian kunjungan kerja Ketua Umum di Sumatera." "Semua kader Golkar yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sama pentingnya bagi organisasi dan bangsa," tegas Sudharmono.

Masalah giliran ini pun diungkapkan lagi di Jambi. Sudharmono yang terbang ke Jambi langsung dari Yogyakarta — karena sebagai Sekretaris Yayasan Dharmais meresmikan Panti Ketrampilan Calon Transmigran (yang merupakan pilot project Dharmais) di Kelurahan Sendangsari, Kulon Progo pada hari yang sama — mengungkapkan bahwa di dalam pesawat menuju Jambi ada yang bertanya, Jambi ini giliran ke berapa dari propinsi di Sumatera yang dikunjungi?: "Giliran terakhir dari delapan propinsi yang ada," jawab Sudharmono.

Memang dengan kondisi geografis seperti Indonesia, sangat tidak mungkin melakukan kunjungan kerja ke seluruh propinsi dalam sehari. Karena itu bagi kader-kader di daerah sebaiknya memiliki kearifan untuk tidak merasa dianaktirikan bila tidak mendapat kesempatan pertama dikunjungi Ketua Umum. Untuk meredam kekhawatiran seperti ini, maka Sudharmono menegaskan : "Sejak lama saya ingin cepat-cepat datang ke Jambi ini, tapi apa boleh buat baru sekarang terlaksana."

Dan Jambi menurut Ketua Umum tidak perlu berkecil hati karena kebagian giliran terakhir. "Siapa yang terakhir itu yang terbaik," ujar Sudharmono yang disambut tepuk riuh sekitar 5000 kader Golkar dari berbagai unsur yang memadati Gelora Kotabaru malam itu.

Tentu tidak berlebihan bila Sudharmono memuji Jambi sebagai yang terbaik. Dalam pemilu yang baru lalu, Golkar Jambi berhasil meraih 88,55 persen suara pemilih untuk DPR pusat dan 88,9 persen untuk DPR Tingkat I. Ini berarti ada kenaikan rata-rata 3,75 persen dari pemilu 1982. Namun sukses yang dituangkan dalam bentuk angka oleh Ketua DPD I Jambi HM Syukur ini menurut Sudharmono, tidak perlu membuat kader Golkar disana membusung dada. "Kita harus terus meningkatkan bobot kuantitas maupun kualitas," pesan Sudharmono.

Dan bagi Jambi juga ada hikmah lain dari keuntungan memperoleh kesempatan terakhir. Menurut Sudharmono, bila di daerah-daerah lain yang dikunjunginya sebelum ini belum sempat dijelaskan secara terperinci program Golkar, terutama yang menyangkut serangkaian keputusan dalam Rapim bulan Oktober lalu, maka di Jambi program tersebut bisa dijelaskan kepada para kader.

Di antara program tersebut adalah pelaksanaan Musda yang diselenggarakan lebih dahulu dari Munas. Keputusan ini diambil untuk lebih memperkokoh mekanisme demokrasi di dalam organisasi Golkar. Masih dalam rangka itu Sudharmono menjelaskan juga tentang sejumlah langkah yang menjadi tindak lanjut Golkar setelah memenangkan pemilu.

Untuk itu dalam Sidang Umum MPR mendatang, Golkar telah sepakat untuk memperjuangkan agar Soeharto dipilih lagi menjadi Presiden Republik Indonesia untuk masa bhakti 1988-1993. Agar SU sukses, maka kader-kader Golkar harus menciptakan suasana tertib dan aman, sehingga para wakil rakyat bekerja untuk merumuskan aspirasi bangsa ke dalam GBHN dengan sebaik-baiknya. Dan suasana tertib yang diperlihatkan oleh sekitar 5000 kader Golkar di Gelora Kotabaru malam itu, dipuji Sudharmono sebagai kemajuan yang menggembirakan.

SU, kata Sudharmono, mau tidak mau harus sukses. Karena forum itu

Digitized by Google

Menghargai prestasi dan kepentingan daerah

bahwa bila pembangunan akan terus berdenyut di masa depan, tidak ada pilihan lain kecuali memenangkan Golkar lagi pada pemilu 1992.

Golkar dengan demikian tidak ingin mengatakan bahwa pembangunan yang hingga sekarang berjalan adalah hasil keringat sekelompok orang saja. Sebagaimana ditegaskan, tanpa partisipasi rakyat, pembangunan yang diprakarsai siapa pun tidak akan sukses.

Oleh karena itu Sudharmono mengingatkan apa yang disinggung oleh Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Jambi H Masjchun Sofyan SH, yaitu tentang proyek jembatan Aur Duri yang melintasi Sungai Batanghari yang

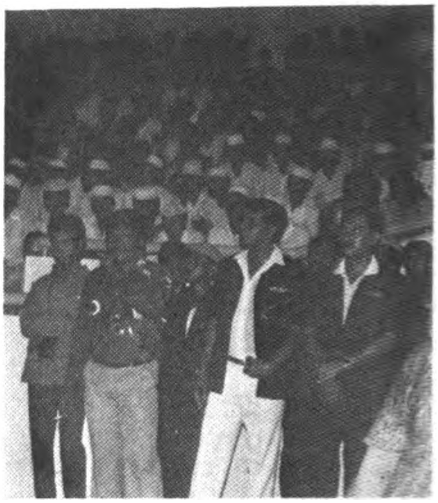

menjadi lembaga dimana rakyat melalui wakil-wakilnya merancang masa depan, dan memutuskan yang terbaik bagi bangsa ini di kemudian hari. "Kita harapkan mereka selalu arif agar sesuai dengan harapan rakyat," ujarnya.

Namun untuk merancang masa depan sesuai dengan harapan dan kebutuhan bangsa Golkar harus mempunyai program-program yang menunjang hal tersebut. "Artinya program-program yang mampu kita laksanakan." Masih dalam konteks program ini, menurut Sudharmono, Golkar juga membutuhkan program-program yang mengundang partisipasi masyarakat. "Pembangunan tidak bisa berjalan tanpa partisipasi." Dan konsekuensinya, kualitas para kader Golkar harus ditingkatkan. Dan karena suksesnya Orde Baru menuntut denyut pembangunan yang berkesinambungan, maka sejak dini Golkar harus mempersiapkan diri lewat konsolidasi di berbagai sektor agar mampu memenangkan lagi pemilihan umum pada tahun 1992 nanti.

Tidak Hanya Jembatan

Tidak dengan maksud untuk membusungkan dada, Sudharmono mengungkapkan bahwa Gelora Kotabaru — fasilitas olahraga yang termegah di Jambi —, dibangun atas prakarsa Golkar. Ini tentu mengandung makna

Golkar butuh program yang mengundang partisipasi masyarakat

belum beres sampai saat ini kendati penancapan tiang pertama sudah dilakukan sejak Agustus 1983, bahwa Golkar memperjuangkan kepentingan bangsa secara menyeluruh. Alokasi pembangunan yang tercermin pada proyek-proyek di daerah adalah bagian dari kepentingan nasional itu. Tapi bagi masyarakat Jambi, jangan berputus asa karena pada saatnya nanti jembatan yang didambakan itu akan rampung.

Dalam konteks pembangunan bangsa, Golkar tentu saja tidak hanya memperjuangkan pembangunan jembatan. "Namun jangan khawatir, bila Golkar terus mendapat kepercayaan rakyat, maka pasti akan lebih banyak lagi jembatan yang dibangun di atas Sungai Batanghari," ujarnya.

Dalam rangka silaturahmi dan sekaligus memperingati ulang tahun ke 23 Golongan Karya, Sudharmono tidak saja didampingi oleh sejumlah fungsionaris DPP, tapi juga membawa serta kelompok lawak Jojon cs untuk menghibur masyarakat Jambi.□ (LT)

Digitized by Google

Golkar Tumbuh dan Berkembang Menjadi Organisasi Yang Lebih Nyata

Memperingati keberadaan Golkar yang ke-23 kali ini mempunyai makna yang dalam. Bukan sekedar mengadakan acara kumpul-kumpul, ramai-ramai, bersenang-senang dan bergembira. Di balik peringatan, ada makna lain yaitu saatnya untuk mendalami dan menghayati tujuan, latar belakang daripada kelahiran sebuah organisasi.

Setidaknya ada momentum khusus yang dikemukakan ketua umum DPP Golkar, Sudharmono SH, ketika memberikan sambutan pada HUT Golkar ke-23 di Bengkulu, 11 Nopember 1987. Pertama, mensyukuri prestasi Golkar Bengkulu dalam Pemilu 1987, dimana telah dirasakan adanya kemajuan jika dibandingkan dengan tiga Pemilu sebelumnya, yang sempat merosot pada Pemilu 1977 dan 1982. Prestasi Golkar di Bengkulu pada Pemilu 1987, menunjukkan lompatan yang besar, melampaui perolehan suara pada Pemilu 1971. Kedua, kelahiran Golkar itu sendiri dimana 23 tahun lalu ditandai dengan timbulnya gejolak politik yang sangat membahayakan kehidupan kenegaraan, keutuhan bangsa, ideologi dan dasar negara Pancasila.

Orde Baru

Dikemukakan oleh ketua umum Golkar, saat kelahiran Golkar ditandai oleh terjadinya gejolak politik di tanah air. Gejolak politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa, mengancam keberadaan ideologi dan dasar negara Pancasila. Suasana Nasakom, dimana unsur Kom-nya (PKI) berusaha mendominir, telah menciptakan suasana yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia, terutamanya ideologi bangsa Pancasila. Keadaan ini menyebabkan organisasi-organisasi fungsional yang sebelumnya tidak mempunyai ikatan politik dengan Parpol yang ada pada waktu itu, sepakat membentuk Serikat Bersama (Sekber) Golongan Karya, dengan tujuan pokok ikut berperan-serta mengamankan, mempertahankan keutuhan dan kemantapan ideologi Pancasila. "Dan apabila kita lahir 20 Oktober 1964, dengan latar belakang seperti yang saya katakan tadi, maka setahun kemudian ternyata PKI telah mengadakan pemberontakan kepada pemerintah yang sah," ujar Sudharmono.

HUT Golkar ke-23 mempunyai makna yang dalam

Beruntung sekali Tuhan Yang Maha Esa memberikan lindungan kepada bangsa Indonesia. Angkatan Bersenjata dengan dukungan penuh Golkar dan kekuatan Pancasilais lainnya berhasil menggagalkan 'kup' yang dilakukan PKI. Dan dari peristiwa itu, sekaligus menyadarkan kepada bangsa Indonesia untuk melakukan mawas diri, mengadakan koreksi terhadap segala penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. "Dalam rangka itulah, Orde Baru dimana Golkar merupakan kekuatan pokok pendukungnya, telah lahir," ujarnya.

Orde Baru bagi Golkar merupakan tatanan kehidupan yang didasarkan kepada dan dilaksanakan sesuai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Dan atas dasar itu, Golkar membulatkan tekad untuk melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang kita cita-citakan. Orde Baru adalah Orde Pancasila, Orde UUD 1945, dan sekaligus Orde Pembangunan. Golkar sebagai kekuatan utama Orde Baru, ingin menempatkan diri sebagai kekuatan orde baru yang tangguh bersama-sama kekuatan Orde Baru lainnya. Sekarang dalam usianya 23 tahun, Golkar tumbuh-berkembang menjadi organisasi yang lebih nyata, mantap dan selalu memperoleh kepercayaan yang besar dari rakyat.

Konsolidasi

Dalam kesempatan itu, ketua umum DPP Golkar menguraikan usaha Golkar mengkonsolidasi diri dan membuktikan diri hidup di tengah-tengah masyarakat. Pada Pemilu 1971, untuk pertama kali Golkar ikut serta bersama 9 Parpol yang sudah lama ada. Disini Golkar mampu menempatkan sebagai

Digitized by Google

Ketua Umum: Saat Golkar lahir ditandai adanya gejolak politik

peraih kepercayaan terbesar, yaitu meraih 62 persen suara. Ini berarti Golkar memang mempunyai landasan dan kekuatan di tengah-tengah masyarakat. Golkar memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat. Tapi ini tidak membuat Golkar membusungkan dada atau puas diri, sebaliknya Golkar menyadari tugas dan tanggungjawab yang besar. Melalui sidang umum MPR 1973, telah dihasilkan GBHN yang bukan saja memuat strategi pembangunan lima tahun, tetapi juga berisi dasar dasar yang lebih pokok, yang lebih jauh jangkauannya sehingga dapat dijadikan landasan pembangunan untuk jangka waktu yang lebih jauh.

Diuraikan pula tentang Pemilu 1977, dimana setelah memperoleh pengalaman dan hasil yang baik dalam Pemilu 1971, Golkar terus mengkonsolidasi diri menghadapi Pemilu 1977, yang kali itu hanya diikuti 3 kontestan, Golkar dan dua Parpol lainnya. Dan kembali Golkar memperoleh kepercayaan masyarakat, dimana perolehan suara tidak berbeda dengan Pemilu 1971, ialah 62 persen. "Ini berarti perjuangan Golkar dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan Orde Baru memperoleh tanggapan positif dari rakyat. Dengan hasil Pemilu 1977, Golkar berjuang untuk mengkonsolidasikan persatuan dan kesatuan bangsa, mengkonsolidasikan keterikatan kita, penghayatan kita kepada Pancasila," ujar ketua Golkar. Karena itu, lanjutnya, dalam Sidang Umum MPR 1978, Golkar berjuang untuk menghasilkan konsensus/keputusan bagaimana kita dapat menghayati dan mengamalkan Pancasila sebaik-baiknya. Melalui perjuangan keras maka dihasilkan Ketetapan MPR Nomor 2 tahun 1978, disamping GBHN. Ketetapan itu mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang tujuannya tidak lain bagaimana kita melaksanakan Pancasila ini, yang merupakan ideologi dan kepribadian bangsa, di dalam kehidupan seharihari, sehingga pembangunan nasional, ketahanan nasional dan persatuan bangsa makin kokoh.

Dengan bermodalkan hasil Pemilu 1977, dan hasil sidang Umum MPR 1978, Golkar melaksanakan pembangunan dan maju lagi dalam Pemilu 1982, dimana perolehan suara meningkat lagi menjadi 74 persen. Ini sekali lagi membuktikan kepercayaan yang besar dari rakyat kepada Golkar. Dan pada Sidang Umum MPR 1983, Pancasila telah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap organisasi politik dan kemasyarakatan. Dalam suasana yang demikian itu, lanjut Ketua Umum, Golkar terus melaju tidak berhenti mengkonsolidasi diri, bahkan mempelopori konsolidasi itu sekaligus melaksanakan ketentuan Undang-undang partai politik dan Golkar. Dalam Munas 1983, Golkar telah mengadakan perubahan anggaran dasar. Kalau sebelumnya anggaran dasar itu menyatakan bahwa anggota Golkar dapat berbentuk Ormas, maka dalam Munas itu dirobah keanggotaan adalah perorangan seperti yang diwajibkan dalam UU Parpol dan Golkar.

Meskipun keanggotaan adalah perorangan, kata Sudharmono, Golkar tetap menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, terutama Ormas yang telah melahirkan Golkar 23 tahun yang lalu. Dan ternyata dengan konsolidasi ini, Golkar di dalam melaksanakan Pemilu 1987, telah berhasil memperbesar lagi perolehan kepercayaan dari rakyat, dimana Golkar memperoleh hampir 73 persen, melonjak dari 1982. "Oleh karena itulah, kita sungguh bersyukur, bangga dan bahagia bahwa perjuangan Golkar memperoleh tanggapan, respons, apresiasi yang sebaik-baiknya dari rakyat Indonesia," tegasnya. Namun diingatkan, bahwa prestasi yang dicapai Golkar itu tidak harus membuat warga Golkar menjadi silau atau lupa daratan. Sebaliknya tanggungjawab yang besar dan kerja keras akan terus dituntut.

Sidang Umum MPR 1988

Menyinggung tentang Sidang Umum MPR 1988 mendatang, ketua umum Golkar mengingatkan adanya tiga hal yang menentukan arti sukses SU MPR itu. Pertama, apabila SU MPR berjalan lancar, aman, tertib sesuai dengan tata tertib dari MPR. Ini berarti disamping usaha dari wakil-wakil rakyat di MPR, seluruh bangsa Indonesia harus turut menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, sejuk, aman, agar memberi kesempatan kepada wakil-wakil rakyat yang 1000 orang jumlahnya itu dapat bermusyawarah, dapat mengambil keputusan yang sebaik-baiknya bagi rakyat. Dan ini juga menjadi tugas Golkar dimanapun berada.

Kedua, yang menjadi ukuran suksesnya SU MPR, apabila SU itu dapat menghasilkan keputusan-keputusan sesuai dengan tugas MPR dan UUD, yaitu menghasilkan GBHN yang isinya sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat. Dalam hal menyelesaikan GBHN ini, kita semua, terutama Golkar, merasa bangga, merasa bersyukur dan merasa perlu untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Presiden mandataris yang telah menyerahkan bahan-bahan untuk dijadikan bahan pembahasan di dalam SU MPR.

Menurut Sudharmono, sepintas bahan yang telah diberikan Presiden telah menampung aspirasi yang diserap oleh Golkar dari rakyat pendukungnya. Yang pokoknya adalah melanjutkan pembangunan nasional yang didasarkan kepada pemerataan,

Digitized by Google

Golkar mendapat kepercayaan besar dari rakyat

petumbuhan dan stabilitas nasional. Disamping tugas menyusun GBHN, tugas MPR lainnya adalah menetapkan Presiden mandataris dan wakil presiden. Jauh-jauh hari sudah dikumandangkan oleh rakyat agar Presiden Soeharto bersedia dipilih kembali menjadi Presiden mandataris, memimpin bangsa, memimpin pembangunan dalam melaksanakan GBHN yang akan datang. Golkar tentu dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab akan mencalonkan dan memperjuangkan terpilihnya kembali Presiden Soeharto sebagai presiden mandataris dalam masa 1988-1993. "Kita semua berharap, kita semua berdoa agar Bapak Presiden Soeharto yang sudah mengisyaratkan bersedia memimpin kita untuk 5 tahun lagi, dapat perlindungan, berkat dan rakhmat Tuhan sehingga mampu memimpin kita dalam masa bhakti 5 tahun lagi," tegas Sudharmono.

Disamping dua hal tersebut sebagai ukuran sukses daripada SU MPR, bagi Golkar sidang umum MPR akan sukses jika pelaksanaannya berjalan lancar, dan siapa yang menjamin suksesnya pelaksanaan hasil-hasil SU MPR itu disamping Presiden mandataris yang bertanggungjawab untuk memimpin pelaksanaan pembangunan, kita semua rakyat turut bertanggungjawab untuk suksesnya pelaksanaan hasil-hasil SU MPR. Golkar sebagai kekuatan Orde Baru, kekuatan pembangunan, kekuatan terpercaya dari rakyat, dari jauh-jauh hari dan sedini mungkin harus sudah menyiapkan diri untuk berperan, turut mensukseskan pelaksanaan dari hasil-hasil SU MPR agar hasil SU MPR itu benar-benar mempunyai arti bagi kita

Ketua Umum di Bengkulu

semua dengan kata lain, Golkar harus mampu menggerakkan rakyat, mampu mengajar rakyat, mempelopori berdiri dibarisan terdepan untuk berpartisipasi melaksanakan hasil-hasil SU MPR dimanapun berada, termasuk di daerah Bengkulu

Rapim Golkar

Dalam kesempatan perjumpaan dengan warga Beringin di Bengkulu, ketua umum DPP Golkar juga menjelaskan sekitar Rapim Golkar yang baru lalu di Jakarta. Disamping pernyataan politik menyangkut kesiapan Golkar mensukseskan SU MPR dan penegasan pencalonan Presiden Soeharto sebagai Presiden Mandataris mendatang, juga disebutkan keputusan menyangkut berbagai hal konsolidasi. Konsolidasi mekanisme pengambilan keputusan organisasi, mekanisme dalam menyusun program-program organisasi yang diadakan perobahan secara mendasar, mekanisme yang selama ini diadakan dari atas ke bawah melalui Munas baru Musda Tingkat I dan Musda Tingkat II. Mulai tahapan sekarang, Rapim menentukan bahwa kita akan membuat program, membentuk pimpinan mulai dari bawah ke atas. Karena itu, Golkar nantinya akan mengadakan Musda Tk. II lebih dulu, dilanjutkan Musda Tk. I, dan baru kemudian Munas, dimana sesuai jadwal menurut anggaran dasar yaitu bulan Oktober 1988.

Hal-hal lain yang dikemukakan ketua umum Golkar, bahwa dalam konsolidasi penyusunan program-program dan kepemimpinan yang dilaksanakan dari bawah ke atas, maka konsolidasi dilakukan terhadap kader-kader Golkar yang merupakan tugas tidak ringan dan kecil, karena sebagai gerakan, pendaftaran anggota dan gerakan kaderisasi selama beberapa tahun ini ternyata dengan sukarela pemegang kartu anggota Golkar sudah sangat besar jumlahnya. Untuk seluruh Indonesia meliputi kurang lebih 25 juta orang pemegang kartu anggota Golkar. Bengkulu sendiri terdapat 90 ribu anggota Golkar diantara 1 juta penduduk atau lima ratus ribu pemilih.

Tantangan sekarang bagaimana membina, bagaimana meningkatkan kualitas para kader itu dan para anggota yang jumlahnya jutaan. Kepada mereka harus diberikan kesempatan untuk benar-benar berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan dalam kegiatan pembangunan. Itulah tugas konsolidasi yang tidak ringan. Dan siapa yang akan dikonsolidasi, adalah seluruh jajaran pimpinan Golkar, terutama pimpinan Golkar di daerah-daerah, baik Tingkat I mengkoordinasikan pimpinan daerah Tingkat II, yang langsung menangani kegiatan para anggota dan kader-kadernya.

Oleh karena itu, kata Sudharmono, dalam kesempatan HUT ini, sekaligus diserukan kepada jajaran Golkar dibawah bimbingan ketua dewan penasihat, untuk melaksanakan program konsolidasi sebagai hasil Rapim yang lalu sebaik-baiknya. "Kita mutlak melaksanakan program konsolidasi itu apabila kita ingin melaksanakan amanat kepercayaan rakyat sebaik-baiknya sehingga kita akan tetap di hati rakyat dan kita tetap akan memperoleh kepercayaan rakyat pada Pemilu yang akan datang," ujar Sudharmono.□ (WT/NS)

Digitized by Google

Diabdikan Untuk Kesejahteraan Rakyat

"Kemenangan Golkar adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia". Demikian antara lain pernyataan Ketua Umum Golkar di dua tempat Semarang (Jateng) dan Bandung (Jabar), dalam rangkaian kunjungan kerja dalam memperingati Hari Ulang Tahun Golkar yang kedua puluh tiga tahun. Pernyataan tersebut disampaikan dihadapan keluarga besar Golkar, baik kader fungsional, pengurus DPD Golkar TK. II, Komcat, serta pengurus DPD Golkar TK.I, serta tokoh tokoh Parpol baik dari PDI dan PPP.

Telah dua puluh tiga tahun usia Golkar, banyak sudah kemajuan dan prestasi yang bisa kita catat, bukan hanya dalam angka, tapi secara kwalitatif Golkar telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan sospol yang selalu secara berturut-turut mendapat kepercayaan dari Rakyat Bangsa Indonesia, pada tiap Pemilu. Oleh sebab itu, lanjut Ketua Umum, dalam rangka memperingati kelahiran Golkar, setiap kader harus betul-betul menghayati dan mendalami serta melakukan introspeksi kembali apa tujuan Golkar dan mengapa ia harus lahir, pada tanggal dua puluh Oktober tahun 1964 yang lalu.

Golkar harus lahir dan di dalam detik-detik kelahirannya situasi rawan, Pancasila berada dalam kondisi terancam oleh idiologi komunis. Dan situasi demikianlah yang membuat sembilan puluh tujuh organisasi kemasyarakatan, fungsional dan didukung sepenuhnya oleh ABRI, kemudian bergabung dalam Sekber Golkar untuk menghadapi komunisme, yang dua tahun kemudian PKI berusaha melakukan pemberontakan. Akan tetapi, lanjut Sudharmono dihadapan keluarga besar Golkar baik di Jateng dan Jabar, Golkar bersama ABRI menyelamatkan situasi dan lahirlah Orde Baru yang bertekad mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sudharmono SH yang juga salah satu penanda-tangan kelahiran Sekber Golkar mengatakan, konsolidasi yang dilakukan Golkar selama ini bukan hanya konsolidasi organisasi tetapi sekaligus melakukan pembaharuan terhadap politik Nasional. Golkar telah membuktikan hal ini dalam perjalanan sejarah organisasi selama dua puluh tiga tahun hingga sekarang ini. Konsep pembangunan dan pembaharuan politik telah ditunjukkan sejak pertama kalinya Golkar mengikuti Pemilu tahun 1971 yang sekaligus berhasil memenangkannya.

Dengan kemenangan itulah Golkar turut serta dalam proses perombakan struktur politik dari sepuluh organisasi politik menjadi tiga orpol. Selanjutnya pada Pemilu 1977 dan SU MPR 1978 Golkar kembali maju mempelopori pembaharuan konsep politik dengan memantapkan pelaksanaan Idiologi Pancasila dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara melalui program P-4.

Uraian Ketua Umum yang detail itu diperhatikan dengan sangat antusias baik di tengah keluarga besar Golkar Jawa Tengah di Semarang, atau keluarga besar Golkar Jabar di Bandung.

Selanjutnya pada SU MPR 1983, setelah kembali Golkar memenangkan Pemilu 1982, organisasi kita ini lebih maju lagi menanamkan idiologi Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan ormas. Dan rancangan itu telah berhasil jadi keputusan dengan dilahirkannya 5 UU bidang Politik oleh DPR periode 1983-1987. Peristiwa HUT Golkar hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk merenung dalam menyambut tugas-tugas yang berikutnya. Golkar kini telah melangkah jauh dalam pelaksanaan konsolidasinya. Telah berkiprah selama dua puluh tiga tahun dalam berpartisipasi memajukan pembangunan dan penyempurnaan politik Nasional.

Saat ini telah tercatat kurang lebih tiga puluh juta kader Golkar di seluruh Indonesia, dan itu merupakan tantangan tersendiri bagi Golkar dalam meningkatkan kualitas anggota-anggotanya dan para kader-kadernya yang berjumlah sebanyak itu. Sedangkan tantangan pertama yang dihadapi Golkar setelah memenangkan Pemilu 1987 adalah mensukseskan SU MPR 1988.

Menurut Sudharmono ada tiga kriteria yang mengukur suksesnya SU MPR tahun depan. Pertama, SU dapat dikatakan sukses bila berlangsung aman, tertib dan lancar. Ini bukan saja menjadi tanggung jawab 1000 anggota MPR, tetapi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, terutama para kader Golkar. Kedua, SU MPR sukses jika MPR dapat melaksanakan fungsinya

Mengajak Kader untuk ikut mensukseskan SU MPR 1988

Digitized by Google

sesuai yang digariskan UUD 45. Membuat GBHN, memilih Presiden dan wakilnya. Ketiga, SU MPR sukses jika rakyat Indonesia, khususnya para kader Golkar siap mental dan fisik dalam melaksanakan SU MPR. Ketua Umum Golkar mengajak semua jajaran Golkar untuk mensukseskan SU MPR Maret 1988. Ini berarti disamping wakil-wakil Golkar berjuang di MPR untuk menghasilkan GBHN memilih Presiden Mandataris yang tak lain adalah Bapak Soeharto, kita juga sejak dini menyusun program perjuangan yang akan memperlancar pelaksanaan hasil SU MPR. Sebab betapapun baiknya hasil SU MPR jika kita tidak menyiapkan diri untuk melaksanakan keputusan itu tentu tidak dapat menghasilkan seperti yang diharapkan yaitu peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bila tiba saatnya nanti Munas Golkar 1988 juga dalam rangka melaksanakan GBHN. Munas yang didahului dengan Musda tingkat I dan II, bukan sekedar formalitas tapi harus mengandung isi.

Dengan demikian pelaksanaan Demokrasi kita harus semakin terasa, yaitu Demokrasi dalam membuat program, Demokrasi dalam menentukan kepemimpinan organisasi yang akan dimulai dari bawah ke atas.

Ketua Umum Golkar Sudharmono SH, dalam kunjungannya seperti biasanya baik di Jateng ataupun di Jabar, selain bersama artis artis penghibur Edy Sud dan kawan kawan, juga sebagian besar jajaran pengurus DPP Golkar, serta anggota DPR dari FKP di dua daerah pemilihan Jabar dan Jateng menyertainya. Dalam kesempatan tersebut di dua daerah Ketua Umum Golkar selaku Sekretaris YAMP ataupun selaku Mensesneg menyerahkan surat-surat Keputusan Presiden untuk kepentingan Pembangunan.☐ Rendy.MS

SUMBANGAN POSITIF RAMAKO

Lomba pengucapan Pembukaan UUD 1945 dan Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya yang diselenggarakan Radio Ramako FM 106,15 stereo, tanggal 4,5 dan 11 Desember lalu, sebagai acara peringatan HUT Ramako group ke II mempunyai dampak positif.

Ini tercermin pada ungkapan Sekjen DPP Golkar Ir. Sarwono Kusumaatmadja saat menutup lomba itu, bahwa kegiatan lomba semacam ini mengandung arti penting bagi bangsa dan Golkar. Karena, hal ini bisa dipahami dan dihayati seluruh peserta sekitar 84 orang itu dalam rangka pembinaan mental bangsa Indonesia yang makin meluas, terutama di kalangan generasi muda. Sehingga langkah atau kegiatan ini akan mampu menciptakan masa depan yang lebih baik.

"Lomba ini merupakan suatu cara terbaik sebagai sarana memasyarakatkan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa," tegasnya.

Sedangkan menurut Direktur Utama Ramako Ny. Adyanti B.N. Rachmadi MBA, lomba ini bertujuan untuk memasyarakatkan Pancasila seperti tercantum pada Pembukaan UUD 1945, yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa sehingga tercermin dalam penghayatan dan pengalamannya.

Jumlah Peserta yang mencapai 84 orang itu (35 peserta wanita dan 49 peserta pria), menyebabkan Ny. Adyanti berniat untuk menjadikan lomba ini sebagai tradisi baru Radio Ramako di masa mendatang. Kendatipun para peserta yang bersangkutan, adalah para pendengar dan pencinta setia Radio Ramako.

Perlombaan ini selain memperebutkan piala juga memperoleh hadiah Tabanas untuk juara pertama sebesar Rp 250 ribu, kedua Rp 200 ribu, ketiga Rp 150 ribu dan juara harapan sampai pertama sampai ketiga sebesar Rp 100 ribu. Baik juara putra maupun putri.

Juara putra diraih RY. Aribertus, kedua Sulaiman dan Hasanuddin Ayubi. Juara pertama putri diraih Cucu Sugiarti, kedua Irza Aulia dan Flora Adriyani DT

Digitized by Google

Prestasi Mencolok Jawa Timur

Jawa Timur bukan daerah yang asing bagi Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH. sejak 1983, tidak kurang dari 11 kali Sudharmono berada di propinsi ini dalam rangka kunjungan kerja sebagai Ketua Umum Golkar. Dan 8 November lalu, Sudharmono berada lagi di Surabaya. Kali ini dalam rangka merayakan HUT Golkar ke-23 sekaligus bersilaturahmi untuk bersyukur atas kemenangan Golkar dalam pemilu yang baru lalu. Juga tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka konsolidasi.

Puncak acara yang diselenggarakan Go Skate - gedung yang berlokasi di pusat pertokoan itu - dihadiri oleh para kader Golkar baik fungsional maupun teritorial dari Surabaya dan sekitarnya. Juga hadir para tokoh PPP dan PDI. Pemilihan Go Skate sebagai lokasi upacara peringatan HUT Golkar tidak kebetulan. Menurut Moh. Said, Ketua DPD I Golkar Jatim, Go Skate mempunyai makna untuk dikenang, karena di gedung ini, Sudharmono untuk pertama kali menginjak Jawa Timur dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar.

Dalam sambutannya yang hampir satu jam lamanya, Sudharmono menilai, bahwa selama 4 tahun ini, suasana di Jawa Timur tidak banyak yang berubah. Namun, dalam semangat berdisiplin, Jawa Timur patut dicontoh. "Ini merupakan pertanda bahwa Golkar Jawa Timur, membuat organisasi lebih dewasa, mandiri dan makin berakar di tengah-tengah masyarakat", ujar Ketua Umum.

Dan perubahan yang paling mencolok dalam 4 tahun terakhir ini adalah dari perolehan kursi dalam Pemilu 1987 lalu. Dari 32 kursi DPR Pemilu 1982, dan 40 kursi yang ditargetkan untuk DPR dalam Pemilu 1987, Golkar Jawa Timur telah melebihi yang ditargetkan, yaitu mendapat 46 kursi. "Ini merupakan hasil terbesar di tingkat propinsi yang diraih Golkar," ujar Sudharmono.

Menyinggung usia Golkar yang sudah mencapai 23 tahun yang oleh Ketua Umum dilukiskan secerah bulan purnama itu, tidak berarti Golkar harus membusungkan dada. "Sama sekali tidak," tegas Ketua Umum.

Tugas dan Tantangan

Justru, dalam usianya yang sudah mencapai 23 tahun ini, Golkar harus selalu menyadari, bahwa keberhasilan yang telah diraih dalam usia itu, membawa serta tugas dan tantangan yang berat. "Golkar memang mendapat kepercayaan besar dari rakyat. Namun di balik kepercayaan itu, kita (Golkar) harus bertanggung jawab, bahwa Golkar telah mengemban harapan-harapan yang besar dari rakyat" ujarnya.

Dan langkah-langkah yang menjadi harapan rakyat tersebut, adalah tantangan . Dan dalam HUT Golkar ke-23 ini, lanjut Ketua Umum, Golkar harus secara kusus mengadakan evaluasi, renungan ulang, instropeksi dan membulatkan tekad untuk jalan ke depan.

Dengan demikian, Golkar harus mengambil langkah-langkah yaitu bagaimana harus dapat melaksanakan yang dapat melaksanakan semangat kesatuan dan persatuan, mensukseskan Sidang Umum MPR 1988 dan meningkatkan kaderisasi.

Semangat kesatuan dan persatuan tidak mungkin diabaikan. Semangat ini harus dipupuk dan dibina. Kemerdekaan tidak mungkin dapat diraih tanpa adanya rasa kesatuan dan persatuan. Selain itu pembangunan juga tidak mungkin sukses tanpa adanya rasa kesatuan dan persatuan tersebut. "Dalam jangka pendek, kita tidak mungkin mensukseskan SU tanpa adanya rasa kesatuan dan persatuan tersebut" ujar Ketua Umum.

Untuk mensukseskan Sidang Umum (SU) Maret 1988 nanti, Golkar telah mengeluarkan pernyataan politik dan mengartikan bahwa SU itu sukses apabila, sidang dari lembaga tertinggi

Golkar harus mengambil langkah-langkah

tugas ke depan yang berat itu. Ini artinya, kata Ketua Umum, tema "Dengan semangat Kesatuan dan Persatuan Kita Bertekad mensukseskan Sidang Umum MPR 1988 dan Meningkatkan Konsolidasi Organisasi" perlu diisi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Maka dari itu, Rapat Pimpinan (Rapim) Golkar pertengahan Oktober lalu yang diikuti oleh para tokoh Golkar dari daerah tingkat I, tingkat II maupun pusat, telah mengambil keputusan yang akan merupakan hal negara, pengemban dan pemegang kedaulatan rakyat itu berlangsung aman dan lancar.

"Kita serahkan hal tersebut kepada wakil-wakil rakyat di DPR yang dipercaya untuk mengadakan pembahasan, permusyawaratan dan permufakatan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat banyak".

Namun untuk dapat menciptakan suasana tersebut, bukan hanya keamanan dan kelancaran dari sidang umum itu sendiri, tetapi SU itu sukses,

Menyerahkan Surat Keputusan Presiden

apabila SU itu dapat melaksanakan fungsinya seperti yang tertuang dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Yaitu dengan memilih Presiden mandataris dan wakil Presiden sesuai dengan aspirasi rakyat.

Terkait dengan itu, Ketua Umum Golkar juga menyinggung tentang materi dari GBHN. Materi GBHN yang diperjuangkan untuk menjadi GBHN itu materinya diserap dari masyarakat. Yang tidak lain, kata Ketua Umum, adalah untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan yang merata lahir dan batin.

"Inilah yang akan diperjuangkan Golkar dalam SU Maret nanti. Sedangkan mengenai Presiden Mandataris, Golkar akan memperjuangkan untuk memilih kembali Soeharto, kembali menjadi Presiden RI, untuk masa bakti lima tahun mendatang".

Sedangkan bagi Golkar, bila bicara tentang mensukseskan SU MPR, jangkauannya harus lebih jauh lagi. Jangkauannya tidak hanya sekedar untuk menciptakan suasana aman, dan dapat menghasilkan keputusan dengan sebaik-baiknya. Tapi lebih jauh dari itu, karena Golkar mengetahui akan konsekwensi amanat dari rakyat tersebut.

Dalam, kesempatan itu, Ketua Umum memberikan penghargaan kepada kader-kader Golkar Jawa Timur yang telah berprestasi dengan piagam. Dan sebagai Mensesneg, maupun Sekretaris Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP), menyerahkan surat-surat Keputusan Presiden dan keesokan harinya di Jombang meresmikan ruang kuliah Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, Universitas Darul 'Ulum dan menyerahkan 6 buah mesjid bantuan dari yayasan tersebut.☐ (BM)

DENGAN SEMANGAT BERKARYA

KELUARGA BESAR

POLEKO GROUP

SIAP MENYUKSESKAN SIDANG UMUM MPR TAHUN 1988

SEMOGA TERCAPAI CITA-CITA DAN PERJUANGAN GOLKAR

DALAM RANGKA KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

Demokratisasi Kepemimpinan Golkar

SELAIN mengenai SU MPR 1988, terdapat pula beberapa hal lain yang penting untuk dicatat dari pernyataan Ketua Umum DPP Golkar ketika berada di Sulawesi Utara dan dan Sulawesi Tengah bulan Nopember lalu. Salah satu diantaranya adalah mengenai proses demokratisasi dalam kepemimpinan Golkar.

Kepada warga Golkar, Ketua Umum mengingatkan bahwa salah satu pekerjaan besar yang akan dihadapi Golkar secara intern pada bulan Juli hingga Agustus 1988 adalah rangkaian Musyawarah Daerah tingkat II dan I dan Munas pada bulan Oktober. Melalui Musda dan Munas itu akan dilaksanakan proses pembaharuan mekanisme organisasi. Musda dan Munas menurut Sudharmono SH ketika berbicara di Palu (23/11), akan bercirikan alih generasi dan pemilihan kepemimpinan Golkar secara demokratis sesuai aspirasi anggota. Golkar ingin melaksanakan estafet kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, ujar Ketua Umum, dan dengan jalan yang demokratis. "Generasi muda pasti tidak kalah semangat juang dan patriotismenya dari generasi pendahulunya". Pemilihan kepemimpinan secara demokratis itu sendiri tak terlepas dari upaya Golkar untuk menyumbang pembangunan demokrasi di negara kita.

Di Manado (22/11) Ketua Umum mengharapkan kader-kader Golkar untuk bersikap aktif dalam masalah program maupun dalam pemilihan pengurus. Apalagi dalam tahun 1988 mendatang Golkar akan menjalankan mekanisme baru, yakni mendahulukan Musda II dan I daripada Munas. Pengurus DPD yang terpilih nanti akan menentukan susunan pengurus DPP melalui Munas Golkar Oktober 1988. "Ini adalah hal yang baru", kata Ketua Umum.

Menjaga Situasi

Baik di Manado maupun di Palu, Ketua Umum Golkar membentangkan bahwa dengan pencapaian melalui Pemilu 1987 yang lalu, Golkar dapat menempatkan wakil-wakil rakyat terbanyak di MPR. Pemilihan umum bukanlah tujuan, tapi sekedar sarana. Sedang SU MPR mendatang merupakan tempat dan kesempatan bagi wakil-wakil rakyat tersebut untuk memperjuangkan aspirasi rakyat secara konstitusional. Para wakil rakyat ini mempunyai peran langsung untuk mengsukseskan Sidang Umum tersebut. "Golkar akan benar-benar berupaya memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat melalui MPR, dan tugas ini akan dijalankan oleh FKP di MPR". Tapi peran anggota masyarakat tak kalah pentingnya. Dalam kaitan ini, Ketua Umum menyerukan kepada segenap anggota Golkar di manapun berada untuk turut serta berperan menjaga situasi dan kondisi yang menunjang suksesnya SU MPR itu. "Paling utama, menjaga persatuan dan kesatuan".

Ketua Umum: Kader Golkar harus bersikap aktip

Sudharmono mengutarakan bahwa Presiden telah menyampaikan rancangan GBHN kepada MPR. Rancangan tersebut menampung aspirasi rakyat yang disampaikan rakyat kepada Golkar dalam pemilihan umum yang lalu. Wakil-wakil Golkar dalam pada itu juga telah menampung aspirasi rakyat yang menginginkan Pak Harto dipilih kembali sebagai Presiden/Mandataris, karena beliau telah membuktikan kemampuannya memimpin bangsa dan negara selama ini. Dan selain itu, agar pembangunan yang ada sekarang dapat dilakukan terus secara berkesinambungan.

Penghargaan

Acara di Manado, masih termasuk dalam rangkaian acara peringatan HUT Golkar ke-23 — yang puncak acaranya berlangsung di Jakarta bulan Oktober. Di Manado itu, Ketua Umum menyampaikan piagam penghargaan Pemilu kepada sejumlah kader Golkar mewakili kader-kader lainnya. Sedang acara di Palu keesokan harinya adalah acara Silaturrachmi Ketua Umum dan sejumlah tokoh DPP lainnya — antara lain Drs Gatot Suwagyo, Ir Sarwono Kusumaatmadja, AA Oka Mahendra SH dan Zarlons Zaghlul SH — dengan warga Golkar Sulawesi Tengah.

Kunjungan Ketua Umum ke Sulawesi Tengah adalah untuk kedua kalinya. Yang pertama masih pada masa sebelum pemilihan umum. Kunjungan ke Sulawesi Utara adalah yang keempat kali — satu di antaranya pada masa kampanye. Kendati meraih 83,03% suara (650.870 dari 783.926 suara yang masuk), Golkar di Sulawesi Tengah hanya memperoleh 3 dari 4 kursi DPR yang tersedia untuk wilayah pemilihan tersebut. Tapi target yang ditetapkan Golkar untuk Sulawesi Tengah memang hanya 82%. Di Sulawesi Utara, Golkar meraih prosentase lebih tinggi yakni 87%, tapi kurang dari target 90% yang ditetapkan, dan memperoleh 5 dari 6 kursi DPR yang tersedia untuk wilayah pemilihan tersebut. Untuk Sulawesi Tengah, Golkar menyisakan 1 kursi untuk PPP, dan untuk Sulawesi Utara Golkar menyisakan 1 kursi untuk PDI.

Dalam kunjungan ke Sulawesi Utara dan Tengah, Sudharmono SH menyampaikan sejumlah bantuan Presiden terutama rumah-rumah peribadatan dan juga bantuan-bantuan dari DPP Golkar sendiri. □ Ant/RA

Digitized by Google

oleh : A.A. Oka Mahendra, SH

Menghargai Waktu

Tiap akhir Desember orang merayakan malam Tahun Baru. Tepatnya tiap tanggal 31 Desember jam 00.00 dirayakan sebagai malam *Old and New*. Saat itu tahun yang lama silam dengan segala kenangannya, sedang yang baru muncul dengan berbagai tantangan dan harapannya.

Berbagai cara orang merayakan malam old and new itu. Ada yang berpesta pora di hotel mewah menghabiskan jutaan rupiah, ada yang melewatkan malam panjang itu di tempat-tempat hiburan umum. Ada pula yang merenung mengenang masa yang silam dan memikirkan apa yang dilakukan esok. Sebagian lagi menganggap saat seperti itu seperti hari-hari biasa saja yang tak perlu disambut atau dimeriahkan, apalagi kalau harus menguras kocek. Yang sewajarnya dilakukan adalah bersyukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, maka kita dapat menikmati kehidupan ini dengan segala suka dan dukanya.

Dalam tulisan ini yang akan dibahas bukan cara-cara orang menyambut atau merayakan tahun baru itu, tetapi sisi lain dari peristiwa penting itu, yaitu menyangkut kesadaran manusia tentang dimensi waktu. Sebab kesadaran itu sangat penting dalam menentukan jalannya sejarah peradaban manusia. Dan kesadaran itu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Hewan tidak memiliki kesadaran tentang dimensi waktu, karena itu hewan terhimpit dalam kekinian saja. Hewan tak dapat membedakan masa lalu, dan masa kini, apalagi memproyeksikan masa depannya.

Mengenai pentingnya kesadaran tentang dimensi waktu, Prof Dr. Paulo Freire dalam bukunya : **Pendikan sebagai Praktek Pembebasan**, antara lain menulis : "...dimensi waktu adalah suatu penemuan yang sangat mendasar dalam sejarah kebudayaan manusia".

Kesadaran temporalitas manusia menyebabkan dia tidak terkungkung dalam "hari ini" yang permanen, melainkan muncul menjadi temporal. Dengan demikian peranan manusia tidak terbatas pada suasana alami, melainkan berperan juga dalam dimensi kreatif. Manusia dapat memasuki realitas dan mengubahnya, manusia mampu menjangkau hari kemarin, mengenal hari ini dan menemukan hari esok.

Kesadaran manusia tentang dimensi waktu memang amat penting dalam eksistensinya. Sebab dengan demikian manusia dapat mewarisi pengalaman-pengalaman, bahkan mengembangkan pengalaman-pengalaman itu. Manusia dapat mencipta dan mencipta kembali, mengintegrasikan diri dengan lingkungan, menanggapi tantangan-tantangan, melihat diri secara obyektif, merenungkan dan mengatasi. "...manusia memasuki bidang yang khas manusiawi, yakni sejarah dan kebudayaan" kata Freire dalam bukunya tersebut diatas.

Mengenai pentingnya kesadaran manusia tentang dimensi waktu Alvin Toffler, penulis buku **Kejutan Masa Depan** antara lain menyatakan : "Tanpa sang waktu, perubahan tidak berarti dan tanpa perubahan, waktu akan berhenti. Waktu dapat dipahami sebagai suatu interval selama peristiwa berlangsung. Persis seperti uang yang memungkinkan kita memberi nilai pada sebuah apel atau jeruk, waktu memungkinkan kita membandingkan proses yang berlainan".

Persoalannya sekarang, apakah kita telah menghargai waktu yang kita miliki secara layak? Bukankah pepatah Inggris mengatakan "Time is Money"? Waktu amat berharga. Dan waktu akan berjalan terus, tak pernah berhenti menanti siapapun. Ia akan lewat dan tak akan tergantikan.

Menyadari hal itu, maka sebagai bangsa yang sedang membangun tak sedikitpun waktu yang ada boleh disia-siakan. Detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari dan seterusnya harus diisi dengan karya-karya kreatif yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa.

Budaya "Jam Karet" harus dibuang jauh-jauh. Sebab budaya "jam karet" mencerminkan tipisnya kesadaran orang tentang hakekat dimensi waktu dalam kehidupan ini. Budaya "Jam Karet" adalah budaya ber-malas-malasan bahkan boleh dikatakan budaya koruptif yang harus diperangi habis-habisan. Sebab waktu yang hilang tak akan kembali lagi. Waktu yang dibuang percuma tanpa diisi oleh karya nyata tak bisa diganti. Mengerjakan sesuatu besok adalah terlambat. Berbuat, bekerjalah hari ini juga. Manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin untuk mengukir masa depan. Lebih-lebih lagi setiap kader Golkar yang selalu berikrar untuk "mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab, dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan". Tak ada pilihan lain kecuali harus berbuat, berkarya sekarang juga.

Cita-cita masyarakat adil dan makmur hanya dapat diwujudkan bila kita mampu berkejaran dengan waktu. Berpacu dengan waktu yang berlalu begitu

Kesadaran manusia tentang dimensi waktu

Digitized by Google

cepat. Waktu terus berlalu membawa berbagai perubahan dan perkembangan di bidang ilmu dan teknologi. Bangsa kita tidak bisa menunggu lagi, kalau tak ingin ketinggalan. Zaman kita sekarang ini ditandai dengan perubahan yang tiada henti-hentinya "Perubahan sedang berakselerasi", seperti dikatakan Alvin Toffler dalam bukunya Kejutan Masa Depan itu.

Memang tak ada lagi waktu untuk ongkang-ongkang kaki atau bersantai-santai. Dunia sekarang ini memerlukan manusia aktif dan kreatif yang mampu melahirkan karya-karya baru untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Untuk itu waktu mesti digunakan secara produktif, efesien dan efektif. Kita harus menghargai waktu dengan mengekspresikan cipta, rasa dan karsa dalam karya guna memperindah kehidupan ini.

Bagaimana caranya mengelola waktu yang sangat berharga itu? Secara ringkas dan sederhana dalam uraian ini akan dikemukakan teknik pengelolaan waktu. Tentu resep ini bukan dengan sendirinya mujarab. Sebab sangat ditentukan oleh semangat mereka yang akan memanfaatkan waktu yang diberikan secara merata kepada manusia di seluruh dunia. Setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Tak ada yang diberikan waktu kurang atau lebih dari 24 jam sehari. Meskipun demikian kesibukan hidup setiap orang tidak sama. Ada yang dalam waktu 24 jam harus menyelesaikan banyak hal, bahkan kadang-kadang memerlukan waktu lebih dari 24 jam sehari.

Dalam zaman pembangunan sekarang ini, dalam zaman yang berubah cepat dewasa ini, dimana masa depan sudah menghadang di depan kita, kecakapan mengelola waktu menjadi semakin penting untuk dikuasai. Sebab orang yang cakap mengelola waktu hidup "disini" dan "di tempat ini" pasti menaruh perhatian pada lingkungan. Dia peka terhadap orang-orang yang ada, terhadap lingkungannya dan menikmati suasana yang ada.

Orang yang cakap mengelola waktu, melakukan apa yang sedang dilakukan dengan efektif dan efisien. Dia menaruh perhatian ke masa lampau, bukan karena ingin bernostalgia, tetapi melihat masa lampau itu dalam hubungannya dengan masa sekarang. Dia memikirkan masa depan dalam hubungannya dengan masa sekarang dan mencari hubungan di antara keduanya. Dia hadir di masa kini, tetapi melihat masa kini dalam perspektif masa lampau dan masa depan dengan cara yang realitas. Ada kelanjutan nyata antara masa lampau, kini dan masa depan.

Berbicara mengenai teknik mengelola waktu intinya ialah mengetahui bagaimana kita memboroskan waktu dan bagaimana kita dapat menghentikannya. Secara sederhana teknik pengelolaan waktu dapat dilakukan dengan mencatat penggunaan waktu, mempergunakan agenda kerja dan membatasi waktu secara tepat. Dengan teknik sederhana itu penggunaan waktu dapat diatur dengan tertib. Selain itu yang amat penting pula disadari adalah disiplin dari dalam penggunaan waktu. Disiplin diri menentukan efisiensi dan efektifitas penggunaan waktu sebaik-baiknya sebagai unsur hidup yang tak terganti.

Waktu memang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya; dengan bekerja keras, berdialog dengan alam untuk kemakmuran bersama. Sebab sekali waktu dijalani atau dilampaui ia hilang lenyap tak muncul lagi. Karena itu sekali lagi mari kita hargai waktu. Marilah kita renungkan ucapan seorang cendekiawan yang menyatakan sebagai berikut: "Siapa yang menguasai waktu, menguasai hidup. Siapa yang mampu mengatur waktu mengatur hidup". Gunakanlah waktu yang berharga dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun masa depan yang gemilang. Atau seperti dikatakan oleh Freire, kita diharapkan berpartisipasi dalam kurun-kurun sejarah dengan mencipta dan mencipta lagi. Suatu kurun sejarah ditandai oleh serangkaian cita-cita, minat dan nilai nilai yang mau diwujudkan dengan mengada dan berbuat, dengan sikap-sikap yang sedikit banyak ditularkan.□

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI)

HASIL HUTAN BERKUALITAS TINGGI

KAYU JATI OLAHAN :
- KAYU JATI GERGAJI
- PARKET MOSAIK/LANTAI KAYU
- PARKET BLOK
- PANEL DINDING
- PLINTH/SKIRTING
- PINTU SOLID
- KOMPONEN JENDELA DAN PINTU

KAYU BULAT :
- JATI
- SONOKELING
- MAHONI
- RASAMALA
- PINUS
DLL

HASIL HUTAN NON KAYU :
- GONDORUKEM
- TERPENTIN
- MINYAK KAYU PUTIH
- LAK
- BENANG SUTRA ALAM
DLL

SILAHKAN HUBUNGI :

JAKARTA
DIREKSI PERUM PERHUTANI
Gd. MANGGALA WANABAKTI BLOK IV Lt 4
Jl. Gatot Subroto, Senayan, P.O. Box.19/ Jkwb
TELP : 583038, 583048, 587090, 587944
TELEX : 46283 phtdirjkt.
JAKARTA PUSAT

SEMARANG
PERUMPERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH
Jl. Pahlawan No. 151
TEL. : 311611
TELEX : 22280 phlunitsm
Semarang

SURABAYA
PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR
Jl. Genteng Kali No. 49
TELP. : 43852, 472323
TELEX. : 31480 phtunitsb
Surabaya

BANDUNG
PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
Jl. Jend.A. Yani No. 276
TELP. : 72791 s/d 72794
TELEX. : 28302 phtunitbd
Bandung

Digitized by Google

A.R. Sutopo

ASEAN Menghadapi KTT III : Suatu Renungan

Pada bulan Agustus 1987 yang lalu ASEAN baru saja mencapai usia 20 tahun, dan selama itu pula ia berupaya memajukan kerjasama regional di Asia Tenggara. Selama perjalanan waktu 20 tahun itu Asia Tenggara berada dalam iklim yang lebih damai kendati Perang Vietnam baru berakhir pada tahun 1975 dan sejak akhir tahun 1978 masalah Kampuchea muncul. Sepanjang kurun waktu itu ASEAN telah mencapai kemajuan-kemajuan penting dalam mengembangkan saling pengertian dan kerjasama di antara para anggotanya. Ini berbeda sekali dengan situasi hubungan masa lampau mereka yang ditandai oleh ketegangan dan kerawanan.

Menengok sejenak ke belakang, iklim politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara sebelum terbentuknya ASEAN ditandai oleh berbagai konflik antar negara seperti politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, persengketaan Malaysia dan Filipina mengenai status Sabah, dan konflik Vietnam Utara — Vietnam Selatan. Sementara itu, negara-negara besar saling bersaing untuk memperoleh daerah pengaruh *(sphere of influence)* dan melakukan campurtangan dalam politik regional maupun dalam urusan dalam negeri negara-negara Asia Tenggara. Amerika Serikat makin terlibat dalam masalah-masalah politik dan keamanan Asia Tenggara daratan melalui kehadiran militernya di Muangthai setelah tercapainya persetujuan keamanan dan pertahanan bilateral mereka pada tahu 1962. Terlebih lagi, Amerika Serikat juga meningkatkan keterlibatan militernya di Vietnam, yang, pada gilirannya, meningkatkan konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Sementara Uni Soviet dan RRC bersaing untuk memperoleh pengaruh di kawasan, khususnya di Indonesia dan hingga tingkat tertentu di Vietnam Utara. Sedangkan Inggris, Australia dan Selandia Baru berada di belakang Malaysia menghadapi politik konfrontasi Indonesia. Singkat kata, konflik-konflik regional yang terjalin dengan persaingan negara-negara besar di kawasan ini sangat membahayakan dan mengancam perdamaian, keamanan dan stabilitas Asia Tenggara. Kemungkinan dipergunakannya ancaman atau kekuatan militer sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan sengketa antara negara di kawasan ini sangat besar.

Di lain pihak, konflik-konflik domestik di berbagai negara Asia Tenggara mengancam dari berbagai penjuru dengan kemungkinan akibat-akibat buruk yang menyertainya. Iklim politik di Indonesia diliputi oleh makin meningkatnya persaingan di antara Kekuatan-kekuatan politik yang berpuncak pada usaha kudeta PKI yang gagal dalam tahun 1965. Malaysia dan Singapura dicekam oleh masalah-masalah politik multi-rasial dan usaha-usaha untuk menyatukan Sabah dan Serawak ke dalam Federasi Malaysia. Brunei kala itu juga menghadapi kemelut politik di dalam negerinya kendati ia masih berada dalam protektorat Inggris. Singapura pada tahun 1965 kemudian keluar dari Federasi Malaysia. Di Muangthai dan Filipina para gerilyawan dan partai komunis mengancam keamanan kedua negara itu dan mengeksploitasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik demi keuntungan mereka sendiri. Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga menghadapi masalah yang serupa.

Belum Hilang

Pembentukan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 dilakukan melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok yang mencanangkan kerjasama regional dalam berbagai bidang. Meskipun bukan suatu Perjanjian *(Treaty)*. Deklarasi Bangkok mencanangkan tujuh butir maksud dan tujuan ASEAN yang meliputi kerjasama ekonomi, sosial dan kebudayaan, mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian dan keamanan regional serta memajukan studi-studi mengenai Asia Tenggara. Akan tetapi Deklarasi Bangkok tidak secara eksplisit menekankan atau menjadikan salah satu bidang tertentu sebagai fokus kerjasamanya. Meskipun demikian, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya, baik secara formal maupun tidak, selama satu dasawarsa sejak berdirinya pada umumnya diberi cap ASEAN. Ini tercermin seperti misalnya dalam pembentukan *ASEAN Tour and Travel Association* (1971), Konfederasi Wartawan ASEAN, CAJ (1975) *Association of ASEAN Museum Experts* (1974) dan *ASEAN Chamber of Commerce and Industry* (1971) yang dilakukan oleh pihak swasta. Sedangkan kerjasama antar pemerintah tercermin dalam berbagai pertemuan seperti Sidang Tahunan Menteri-menteri Luar Negeri, Pertemuan Menteri-menteri Kesehatan, dan Pertemuan Menteri-menteri Perekonomian dan Perencanaan ASEAN. Tampaknya selama dasawarsa pertama ini negara-negara ASEAN lebih memusatkan pada usaha-usaha untuk lebih saling mengenal satu sama lain.

Pengamatan demikian itu mungkin tidak terlalu salah mengingat bahwa konflik-konflik kepentingan, persengketaan dan kecurigaan di antara negara-negara anggota ASEAN satu sama lain belum seluruhnya hilang. Sebagai contoh, misalnya, bahkan keputusan Indonesia untuk menghentikan politik konfrontasinya dan terjadi-

Digitized by Google

nya perubahan pemerintahan setelah peristiwa G30S/PKI yang menekankan pada politik bertetangga baik dan bersahabat, tidak secara otomatis membuat Malaysia dan Singapura mempercayai arah kebijakan baru Indonesia dan ambisinya di masa depan terhadap negara-negara tetangganya. Sikap demikian itu antara lain dicerminkan dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap dua marinir Indonesia yang tertangkap pada masa politik konfrontasi, kendati himbauan Presiden Soeharto kepada pemerintah Singapura untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu, pada bulan Oktober 1968. Sementara itu, masalah Sabah terus mendominasi hubungan Malaysia dengan Filipina, terutama dalam kaitan dengan timbulnya gerakan separatisme Moro di Mindanao. Hubungan Malaysia dengan Singapura dibayangi oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan kecurigaan rasial khususnya antara kelompok Melayu dan Cina. Di lain pihak, kerawanan menghantui hubungan Malaysia dengan Muangthai karena hadirnya gerilyawan dan separatis Muslim di wilayah Muangthai bagian Selatan yang berbatasan dengan Malaysia.

Masalah Perdamaian

Memasuki dasawarsa kedua, hubungan antar negara anggota ASEAN makin membaik, terutama sejak KTT ASEAN pertama di Bali bulan Februari 1976. KTT Bali itu sendiri menunjukkan besarnya perhatian ASEAN pada masalah-masalah perdamaian, stabilitas dan kerjasama regional dalam lingkungan internasional yang sedang berubah. Menjelang akhir tahun 1969, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan baru yang disebut Doktrin Guam, juga sering disebut Doktrin Nixon, yang pada intinya menyatakan bahwa Amerika Serikat akan lebih memberikan bantuan ekonomi dan perlengkapan militer kepada negara-negara sekutu dan sahabatnya di Asia dalam mempertahankan diri menghadapi ancaman keamanan dan stabilitas negerinya, bukan melalui pengiriman pasukan atau turut bertempur di medan Asia. Ini kemudian diikuti oleh penyelenggaraan pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN di Kuala Lumpur bulan September 1971 yang menghasilkan Deklarasi Kuala Lumpur untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai zona bebas, damai dan netralitas (ZOPFAN). Pada permulaan tahun 1973 Amerika Serikat dan Vietnam menandatangani Persetujuan Paris guna memulihkan perdamaian di Vietnam. Pada tahun 1975 semua negara di kawasan Indocina dikuasai oleh pemerintah komunis. Sementara itu, negara-negara ASEAN secara *de factor* merupakan negara-negara nonkomunis di kawasan Asia Tenggara.

Di KTT Bali ASEAN menghasilkan serangkaian persetujuan yang, di satu pihak, meneguhkan dan melembagakan cakupan lingkup kerjasamanya dan, di lain pihak, menyepakati seperangkat mekanisme untuk menjawab dinamika perkembangan politik dan keamanan di kawasan. Deklarasi *ASEAN Concord* meletakkan dasar-dasar bagi *program aksi* kerjasama ASEAN di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan informasi, keamanan, dan kelembagaan ASEAN. Bersamaan dengan itu ditandatanganilah persetujuan untuk mendirikan Sekretariat ASEAN. Perjanjian penting lain yang juga ditandatangani pada waktu itu ialah *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* yang menekankan persahabatan, kerjasama dan penyelesaian secara damai atas sengketa-sengketa yang terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara. Persetujuan-persetujuan itu dapat dipandang sebagai langkah baru bagi ASEAN dalam menghadapi realitas yang berkembang dalam lingkungan ASEAN sendiri maupun lingkungan eksternalnya.

Penjabaran kerjasama ASEAN dalam berbagai bidang seperti dicantumkan dalam Deklarasi *ASEAN Concord* dapat dipandang sebagai suatu cara yang ditempuh oleh negara-negara anggota ASEAN dalam memadukan usaha dan tenaga mereka secara bersama-sama untuk kepentingan bersama pula dalam berbagai bidang. Itulah sebabnya berbagai usaha dilakukan oleh ASEAN untuk menterjemahkan program aksi Deklarasi

DENGAN SEMANGAT BERKARYA
KELUARGA BESAR

BP2 PARKIR K.M.S.

SIAP MENYUKSESKAN SIDANG UMUM MPR TAHUN 1988
SEMOGA TERCAPAI CITA-CITA DAN PERJUANGAN GOLKAR
DALAM RANGKA KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Digitized by Google

ASEAN Concord baik dalam lingkup ASEAN sendiri maupun dalam hubungan ASEAN dengan pihak-pihak luar. Tetapi memang perlu disadari bahwa tidak semua cita-cita yang diidealkan oleh ASEAN dapat diterjemahkan ke dalam persetujuan-persetujuan atau kesepakatan-kesepakatan dan memberinya label program aksi. Salah satu contoh untuk ini adalah cita-cita ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netralitas yang belum mampu memberikan mekanisme konkrit dan memadai menyangkut lingkupannya, maknanya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya ZOPFAN dapat terselenggara. Bahkan dalam masalah-masalah ekonomi, sosial, kebudayaan dan informasi, lambannya kemajuan ASEAN dalam usaha kerjasama di bidang-bidang ini tidak dapat dinilai semata-mata dari hasil kesepakatan yang telah dicapainya hingga kini. Perbedaan pandangan dan persepsi di antara negara-negara anggota ASEAN tampaknya memainkan peranan penting atas terjadinya kelambanan kemajuan kerjasama ASEAN dalam bidang-bidang tertentu.

Politik Menonjol

Dengan segala kekurangan yang mungkin masih disandangnya di berbagai bidang kerjasama seperti diutarakan itu, ASEAN justru menunjukkan keberhasilan yang menonjol dalam bidang kerjasama politik dan dalam masalah-masalah keamanan. Sampai batas-batas tertentu kini orang dapat menyebut ASEAN sebagai suatu masyarakat majemuk yang berkeamanan di Asia Tenggara. Konsultasi-konsultasi dan interaksi politik yang intensif di antara negara anggotanya, tindakannya yang sangat berhati-hati dalam menanggapi persengkataan antar negara baik yang sedang terjadi maupun yang mungkin timbul, dan kecenderungan mereka untuk menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai, seperti dalam kasus Sabah, sengketa-sengketa bilateral mengenai kedaulatan wilayah, dan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan perbatasan dan lintas batas, adalah beberapa pertanda yang dapat diartikan ke arah tersebut. Demikian juga tingkat sosialisasi ASEAN yang telah terjadi di berbagai kalangan swasta merupakan indikasi lainnya. Tambahan lagi, latihan militer bersama dan pertukaran informasi intelijen di antara negara-negara ASEAN, meskipun sifatnya bilateral dan non-ASEAN, tidak dapat dilepaskan dari konteks ini. Dan bahkan sampai batas-batas tertentu ASEAN telah mampu mengembangkan pandangan dan posisi bersama dalam menghadapi lingkungan politik dan ekonomi eksternalnya seperti dalam menghadapi masalah Kampuchea dan dalam hubungan ekonomi ASEAN khususnya dengan negara-negara industri maju.

Setelah 20 tahun belajar saling mengenal satu sama lain, kadang-kadang disertai dengan salah pengertian dan kepedihan di antara sahabat, ASEAN kini sedang menuju ke dalam suatu era yang membutuhkan konsolidasi lebih lanjut dan kerjasama yang lebih erat dalam usahanya menjadikan masyarakat negara-negara anggotanya dan lingkungannya aman dan makmur. Sementara terdapat nuansa dalam persepsi negara-negara ASEAN tentang hakikat ancaman dari luar terhadap keamanan mereka, tidak satu pun negara ASEAN beranggapan bahwa akan terjadi ancaman militer dalam waktu dekat ini, khususnya dalam bentuk invasi langsung, dari negara luar mana pun. Justru kecenderungannya adalah bahwa mereka mempunyai kesamaan pandangan tentang ancaman keamanan dari dalam negeri sendiri dalam bentuk subversi, insurgensi, ketidakstabilan politik, kesenjangan sosial-ekonomi, kemiskinan, dan hal-hal semacam itu lainnya. Meskipun jenis-jenis ancaman seperti ini bersifat domestik, bisa jadi akan mempunyai dampak terhadap ASEAN jika negara yang bersangkutan tidak dapat mengatasinya secara tepat. Sebagai contoh, serangkaian pertanyaan dapat diajukan seperti bagaimana jika masalah-masalah keamanan dan politik dalam negeri Filipina memburuk; jika suatu negara anggota mengalami kesulitan ekonomi yang sangat besar; jika sesuatu negara anggota menghadapi masalah rasial yang serius; jika di suatu negara anggota muncul generasi pemimpin baru yang mempunyai pandangan dan pemikiran yang berbeda dengan anggota lainnya, dan sebagainya.

Sementara ASEAN telah mampu mengembangkan suatu tingkat masyarakat pluralistik yang berkeamanan di antara para anggotanya, masalah-masalah regional yang lebih luas telah muncul atau akan muncul yang tidak hanya akan menjadi perhatian ASEAN tetapi juga negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan bahkan negara-negara luar kawasan. Malaysia, Filipina, Vietnam, RRC dan Taiwan misalnya, telah lama terlibat dalam sengketa-sengketa atas kedaulatan terhadap pulau-pulau dan wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Tuntutan-tuntutan mereka itu bukan semata-mata menyangkut masalah pemilikan dan kedaulatan berdasarkan bukti-bukti historis dan legal tetapi tampaknya juga berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan strategis dan ekonomik seperti untuk kepentingan komunikasi dan eksploitasi kekayaan laut yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, masalah Kampuchea yang merupakan salah satu faktor pen-

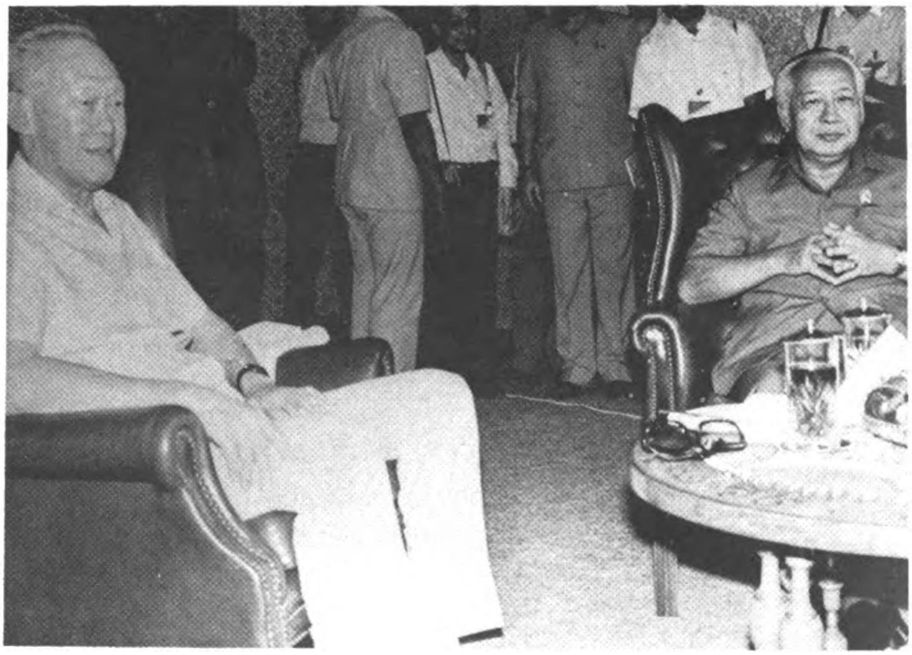

ASEAN berada dalam posisi yang lebih damai

Digitized by Google

ting dalam ketidakstabilan kawasan tak kunjung terselesaikan kendati ASEAN telah berusaha selama lebih dari delapan tahun untuk mencapai penyelesaian politik atas masalah itu. Beberapa kalangan dalam ASEAN berpendapat bahwa masalah Kampuchea merupakan rintangan utama bagi terselenggaranya gagasan ZOPFAN karena hal ini tidak saja melibatkan hubungan ASEAN dengan negara-negara Indocina tetapi juga kepentingan negara-negara besar atas kawasan ini. Di lain pihak, pengakuan terhadap peranan positif dan kostruktif negara-negara besar dalam kawasan ini demi tercapainya ZOPFAN juga diperlukan.

Dasar Lebih Kokoh

Kesulitan-kesulitan yang dialami ASEAN dalam upaya-upaya diplomatiknya untuk menyelesaikan masalah Kampuchea secara politik telah mendorong negara-negara anggotanya untuk mengusahakan agar Asia Tenggara menjadi zona bebas senjata nuklir sebagai upaya awal ke arah terwujudnya cita-cita ZOPFAN. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN selama ini terutama berkaitan dengan kemungkinan untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan serta penghormatan atas Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir dari negara-negara nuklir yang berkepentingan. Tetapi tampaknya negara-negara anggota ASEAN belum sampai pada kesimpulan bersama mengenai implikasi politik dan strategis dari penerapan zona seperti itu mengingat tidak semua negara nuklir, khususnya Amerika Serikat, menyatakan dukungannya atas gagasan itu. Di lain pihak, kehadiran negara-negara adikuasa di kawasan ini melalui pangkalan dan fasilitas militer — Amerika Serikat di Filipina dan Uni Soviet di Vietnam — menambah rumitnya kalkulasi negara-negara di kawasan ini mengingat berbagai kepentingan masing-masing yang mungkin terkait.

Berkenaan dengan kerjasama ekonomi, kemajuan ASEAN dalam bidang ini tidak terlalu menggembirakan, dan ASEAN sangat berhati-hati dalam mengembangkan kerjasama ekonomi regional. Memang setelah KTT Bali ASEAN telah menetapkan arah dan berbagai bentuk konkrit kerjasama ekonominya yang meliputi *Preferential Trading Arrangements* (PTA), proyek-proyek industri ASEAN (AIP), Komplementasi industri ASEAN (AIC), usaha patungan industri ASEAN (AIJV), kerjasama fungsional, dan dialog-dialog ASEAN dengan mitranya dari luar kawasan. Tetapi dari itu semua tampaknya yang paling menunjukkan kemajuan adalah dialog ASEAN dengan para mitranya dalam mendukung proyek-proyek fungsional ASEAN. Prestasi ASEAN yang demikian itu mungkin cukup mengherankan karena kerjasama ekonomi merupakan salah satu yang secara khusus dicantumkan dalam Deklarasi Bangkok pada permulaan berdirinya ASEAN.

Secara umum dapat dikatakan bahwa selama dua puluh tahun ini ASEAN mampu mempertahankan eksistensinya dan bahkan juga menghadirkan stabilitas bagi kawasan Asia Tenggara, khususnya kawasan ASEAN sendiri. Tetapi kelemahan-kelemahan dan kekurangannya juga masih membayanginya. Dan kini ASEAN sedang menghadapi KTT-nya yang ketiga setelah 10 tahun KTT II diselenggarakan di Kuala Lumpur. Tempat penyelenggaraan KTT III pertengahan Desember 1987 di Manila, Filipina, memang membawa persoalannya sendiri karena situasi dalam negeri tuan rumah. Di sana para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN bertemu untuk menjawab berbagai tantangan guna lebih memajukan kerjasama regional di Asia Tenggara ini. Beberapa masalah yang telah dikemukakan di atas mungkin merupakan persoalan yang perlu ditangani secara bersama-sama oleh negara-negara ASEAN guna mengukuhkan kerjasamanya. Tentu ASEAN memerlukan dasar-dasar yang lebih kokoh lagi untuk menghadapi masa depannya. Karena itu berkumpulnya kembali para kepala pemerintahan ASEAN di Manila dalam KTT ASEAN III mempunyai makna seperti itu.☐

SEGENAP PIMPINAN DAN KARYAWAN

PUSAT KOPERASI UNIT DESA
JAWA TIMUR

SIAP MENYUKSESKAN SIDANG UMUM MPR TAHUN 1988
DALAM RANGKA MENUJU TINGGAL LANDAS PEMBANGUNAN NASIONAL
DIBAWAH PEMERINTAHAN ORDE BARU

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA INTERNASIONAL 1987

Washington, 12/1 — Dunia dikejutkan terungkapnya skandal penjualan senjata AS kepada Iran bernilai jutaan dolar yang hasil penjualannya dinyatakan lenyap.

Dua Kolonel Angkatan Darat AS dituduh terlibat dalam skandal tersebut. Sementara itu para penyelidik Kongres memperoleh bukti, bahwa hasil keuntungan penjualan senjata tersebut disalurkan kepada kaum pemberontak 'Contra' Nikaragua. Akibat tersingkapnya skandal ini, Oliver North dipecat dari Dewan Keamanan Nasional (NSC), sedangkan atasannya, John Poindexter, mengundurkan diri.

Beirut, 27/1 — Orang-orang Palestina yang terperangkap di dalam tiga kamp pengungsi di Libanon menyerukan kepada Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konperensi Islam (OIC) di Kuwait, agar membantu mengakhiri penderitaan yang mereka alami.

Lebih dari 700 orang tewas selama lebih dari tiga bulan pertempuran antara milisia Amal Syiah dengan para gerilyawan Palestina untuk merebut pengawasan atas lima kamp pengungsi di Beirut dan Libanon Selatan.

New Delhi, 5/2 — India dan Pakistan menandatangani naskah perjanjian untuk mengakhiri ketegangan di tapal batasnya melalui tahapan pengurangan bala tentara di garis depan, dan berjanji menahan diri untuk tidak saling serang.

Daerah tapal-batas tersebut merupakan tempat beberapa perang paling berdarah antara kedua negara pada tahun 1965 dan 1971, di daerah Punyab.

Georgetown, Guyana, 14/3 — Gerakan Non Blok mengutuk agresi AS terhadap Nikaragua, serta Israel dan Afrika Selatan yang mendukung kebijaksanaan militer AS di Amerika Tengah itu.

Dalam dokumen 100 butir, Non Blok mengutuk AS dan Israel yang melancarkan kebijaksanaan intervensi terhadap gerakan gabungan di Amerika Tengah, dan mengutuk Pretoria karena memberikan dukungan logistik serta mempersenjatai pejuang Contra yang berjuang melawan Nikaragua. Sebaliknya, Gerakan Non Blok mendukung rencana perdamaian yang dikemukakan kelompok Contadora (Mexico, Panama, Venezuela dan Kolumbia).

Moskow, 3/3 — Pemimpin Uni Sovyet, Mikhail Gorbachev, mengharapkan terwujudnya suatu persetujuan adikuasa yang akan menghapus senjata-senjata nuklir jarak-sedang dari daratan Eropa. Persetujuan tersebut, diharapkan dapat mendorong ke arah kemajuan di bidang-bidang pembatasan senjata lainnya, dan hubungan Timur-Barat.

Gedung Putih menyambut berhati-hati usul Kremlin itu. Seorang pejabat senior mengatakan, persetujuan untuk menghapuskan rudal-rudal Cruise dan Pershing-2 AS dan SS-20 Sovyet dari Eropa itu baru enam bulan mendatang dapat ditandatangani.

Beijing, 8/4 — Cina dan Uni Sovyet sepakat mengadakan perundingan babak baru mengenai normalisasi hubungan mereka di Moskow, pada saat hubungan antara kedua negara raksasa komunis dunia itu berada dalam kondisi paling baik sejak percekcokan mereka di awal tahun 1960-an.

Kedua negara komunis tersebut memutuskan hubungan pada awal tahun 1960-an karena alasan ideologi dan strategi. Sementara pertentangan ideologi antara keduanya hilang, Cina menganggap kehadiran Sovyet di Afghanistan dan Kampuchea sebagai pertanda ekspansionisnya ke Asia.

PBB, New York, 10/4 — AS dan Inggeris kembali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi wajib terhadap Afrika Selatan.

Sembilan dari 15 negara anggota DK-PBB memberikan dukungan kepada resolusi yang bertujuan memaksa Afrika Selatan melaksanakan rencana PBB yang disetujui delapan tahun lalu, bagi kemerdekaan Namibia (Afrika Barat Daya), wilayah berpenduduk jarang tetapi kaya mineral itu.

AS, Inggeris dan Jerman Barat memberikan suara negatif, sedangkan Perancis, Italia dan Jepang abstain terhadap resolusi.

Hong Kong, 30/4 — Sebagian eksportir Asia mengutuk perubahan RUU Perdagangan AS yang disetujui DPR.

Jepang menyebut kebijaksanaan tersebut tidak konsisten dengan Persetujuan Umum mengenai Perdagangan dan Tarif (GATT). Sedangkan para pejabat perdagangan di beberapa ibukota Asia menyatakan, perubahan RUU itu akan mengekang ekspor mereka dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas.

RUU tersebut meminta negara-negara pengekspor

Mikhail Gorbachev berharap Reagan dapat kunjungi Moskow

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA INTERNASIONAL 1987

Mencoba gulingkan Presiden Aquino

mengendorkan hambatan dan menurunkan surplus perdagangannya dengan AS, atau menghadapi kemungkinan dikuranginya impor AS 10 persen per tahun sampai 1992.

Tokyo, 1/5 — Jepang mengajukan protes diplomatik kepada Uni Sovyet sehubungan perubahan pidato Duta Besar Jepang untuk Moskow yang disiarkan televisi Sovyet awal Mei.

Protes yang diajukan kepada Kementerian Luar Negeri Uni Sovyet di Moskow menuduh penerjemah bahasa Rusia mengubah arti pidato mengenai empat pulau Jepang yang diduduki Sovyet pada akhir Perang Dunia II.

Jepang menuntut keempat pulau tersebut dikembalikan sebagai syarat penandatanganan Pakta Perjanjian Resmi dengan Uni Sovyet.

Suva, 16/5 — Letkol Sitiveni Rabuka, setelah berhasil menggulingkan Perdana Menteri Timoci Bavadra (15/5) membentuk Dewan Menteri Fiji yang baru dan menyerukan kepada dunia agar mendukung rejim baru yang dipimpinnya.

Kudeta tak berdarah yang dilakukan Rabuka kemudian ternyata dikutuk oleh beberapa negara, termasuk Selandia Baru, Australia, Inggeris dan Amerika Serikat.

Bavadra, yang membentuk pemerintahan koalisi setelah berhasil mengungguli Partai Aliansi Konservatif yang dipimpin Ratu Sir Kamisese Mara dalam pemilihan umum bulan April, hanya bertahan beberapa minggu. Tapi Rabuka akhirnya menyerahkan kembali kekuasaan kepada kaum sipil, karena, katanya, tidak berambisi untuk memimpin negeri itu.

Jakarta, 23/6 — Sekjen PBB, Javier Perez de Cuellar mengusulkan gagasan empat pasal untuk pemecahan 'berimbang' masalah internasional yang menyangkut kehadiran tentara Vietnam di Kampuchea.

Selain kepada Vietnam, Sekjen juga menyampaikan usulan itu kepada Pemerintah Koalisi Demokratik Kampuchea (CDGK) pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk, para pimpinan Kampuchea, Cina dan keenam Menteri Luar Negeri ASEAN.

Usul Sekjen PBB meliputi penarikan mundur sebagian tentara Vietnam, dilanjutkan dengan perundingan keempat pemimpin Kampuchea untuk membentuk pemerintahan koalisi, kemudian penarikan mundur seluruh tentara Vietnam dengan jaminan keadaan negara itu tidak kembali rusuh seperti semula, serta dilangsungkannya pemilihan umum secara bebas di bawah pengawasan internasional.

Moskow, 25/7 — Uni Sovyet menuduh Amerika Serikat melanggar perjanjian Rudal Anti Balistik (ABM) 1972 melalui pernyataan Kementerian Luar Negerinya di Moskow.

Washington telah melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut dengan mengoperasikan sebuah stasiun radar di Thule, Greenland, untuk mendeteksi serangan rudal, tuduh Moskow.

Uni Sovyet menghimbau Amerika Serikat untuk segera mengambil langkah-langkah guna memperbaiki pelanggaran perjanjian ABM, sebagai akibat pemasangan secara tidak sah stasiun radar tersebut.

Hanoi, 3/8 — Para pejabat Amerika Serikat dan Vietnam di Hanoi sepakat untuk memulai lagi perundingan mengenai tentara AS yang terdaftar hilang dalam tugas (MIA) di Vietnam.

Pernyataan bersama itu dikeluarkan mengakhiri perundingan tiga hari di ibukota Vietnam antara utusan Khusus Presiden AS, Jenderal John Vessey dengan Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach.

Diduga, hingga kini masih terdapat 1.776 tentara AS yang masih belum terhitung di Vietnam. Sedangkan Vietnam, selama beberapa tahun belakangan ini, telah mengembalikan 161 kerangka MIA kepada AS.

Manila, 28/8 — Ratusan tentara Pilipina yang membangkang mencoba menggulingkan Presiden Corazon Aquino dengan menembaki Istana Presiden dan menguasai beberapa bagian kamp-kamp militer dalam pemberontakan berdarah.

Sejumlah 29 orang termasuk beberapa penjaga Istana Presiden dan seorang pemberontak terbunuh, dan sekurang-kurangnya 70 orang luka-luka dalam pertempuran sporadis.

Aquino, didampingi beberapa pembantu seniornya berbicara lewat radio tiga jam setelah aksi kudeta, untuk memberikan jaminan kepada rakyatnya bahwa aksi pemberontakan itu berhasil dipatahkan.

Bangkok, 12/9 — Vietnam mengirim 14.400 serdadu baru untuk memperkuat pasukannya di Kampuchea dari Juni hingga Agustus, kata Gerakan Perlawanan Khmer Merah.

Sebagian besar balabantuan itu ditempatkan di sepanjang perbatasan Kampuchea dengan Thailand.

Sebelumnya, Vietnam mengatakan pihaknya akan menarik mundur 20.000 serdadunya dari Kampuchea pada Oktober atau Nopember, sebagai bagian penarikan tahunan yang keenam sejak tahun 1982.

Hanoi berjanji akan me-

Digitized by Google

REKAMAN PERISTIWA INTERNASIONAL 1987

narik seluruh pasukan dari Kampuchea sebelum 1990, asalkan pemerintah Phnom Penh dianggap aman.

New York, 3/10 — Menlu AS, George Shultz mengatakan kepada Pangeran Norodom Sihanouk bahwa AS sunguh-sungguh membantu perjuangan Kampuchea untuk merdeka dari Vietnam.

Shultz juga menekankan dukungan menyeluruh bagi Sihanouk sebagai Presiden Pemerintah Koalisi Demokrasi Kampuchea dukungan PBB.

Bangkok, 15/10 — Resolusi PBB tentang penarikan pasukan Vietnam dari Kampuchea — yang disponsori ASEAN — disahkan dengan perbandingan suara 117 lawan 21 dan 16 abstain.

Perolehan suara ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dengan posisi 115 banding 21 dengan 13 abstain.

Resolusi ini menunjukkan kepada Vietnam, bahwa ia tetap dipencilkan oleh masyarakat internasional.

Washington, 31/10 — Presiden AS Ronald Reagan mengumumkan ia dan Pemimpin Uni Sovyet Mikhail Gorbachev akan mengadakan Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) di Washington mulai 7 Desember, untuk menandatangani perjanjian penghapusan rudal nuklir jarak sedang yang dimiliki kedua negara adidaya tersebut.

Reagan juga mengharapkan dapat mengunjungi Moskow tahun depan untuk menandatangani perjanjian pengurangan senjata strategis jarak jauh.

Kedua pemimpin negara adikuasa tersebut mengadakan KTT pertama tahun 1985 di Jenewa, kemudian disepakati untuk menyelenggarakan KTT selanjutnya, yaitu di Washington dan di Moskow.

Roma, 9/11 — Edouard Saouma dari Libanon terpilih ketiga kalinya untuk masa jabatan enam tahun berikutnya sebagai Direktur Jenderal badan PBB, Organisasi Pertanian dan Pangan (FAO).

Gedung putih sambut hati-hati usul Kremlin

Saouma mendapat 94 suara pada konperensi FAO yang diadakan sekali dalam dua tahun, lawan 59 suara bagi Moise Mensah, penantang utamanya dari Benin.

Saouma, yang kepemimpinannya dalam FAO mendapat kritikan keras beberapa negara donor, adalah pemimpin FAO pertama yang memperoleh tiga kali masa jabatan.

Selama 12 tahun memimpin FAO, Saouma menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam masa kelaparan di Ethiopia 1984, yang terburuk dalam sejarah Afrika.

PBB 12/11 — Untuk kesembilan kalinya sejak pasukan Sovyet memasuki Afghanistan Desember 1979, Majelis Umum PBB menyerukan penarikan mundur pasukan asing dengan segera dari Afghanistan.

Pemungutan suara mengenai resolusi itu, yang disponsori hampir 50 negara, menghasilkan 123 suara mendukung, 19 suara menentang dan 11 negara abstensi. Hasil pemungutan suara tahun lalu adalah 122 suara mendukung, 20 menentang dan 11 abstensi.

Resolusi tahun ini hampir sama dengan resolusi yang disetujui setiap tahun sejak persidangan khusus MU-PBB mengenai masalah itu tahun 1980. Resolusi tersebut tidak menyebutkan nama Uni Sovyet, tetapi hanya menyebutkan "pasukan asing" dan "intervensi bersenjata pihak asing."

Seoul, 12/11 — Salah seorang pemimpin partai oposisi Korea Selatan, Kim Dae Yung serta pendukungnya meresmikan partai baru bernama "Partai Perdamaian dan Demokrasi" dalam suatu upacara yang dihadiri lebih dari 3.300 utusan dari seluruh negeri.

Kim dipilih sebagai pemimpin partai baru itu, dan mereka menetapkan Kim sebagai calon presiden Korea Selatan dalam pemilihan presiden bulan depan.

Kim keluar dari pimpinan partai oposisi "Partai Reunifikasi Demokrasi (RDP)", setelah ia gagal dalam pembicaraannya dengan Presiden RDP, Kim Young Sam, tentang pemilihan calon tunggal Presiden dari partai itu.

Managua, 3/12 — Wakil pemberontak sayap kanan Nikaragua, Contra, dan utusan pemerintahan kiri Sandinista mengadakan pertemuan tidak langsung di Republik Dominika untuk membahas gencatan senjata guna menyelesaikan perang saudara yang sudah berlangsung enam tahun di negeri itu.

Pertemuan gencatan senjata ini ditengahi oleh Primas Gereja Katholik Nikaragua, Kardinal Miguel Obando Y. Bravo.

Tetapi, Presiden Nikaragua Daniel Ortega menyatakan, usul gencatan kaum pemberontak bisa merintangi perdamaian di negeri itu.

Paris, 3/12 — Pemimpin kelompok perlawanan Kampuchea, Pangeran Norodom Sihanouk dan PM rejim Phnom Penh, Hun Sen, sepakat untuk memperpanjang pertemuan mereka. Mereka juga sepakat untuk melanjutkan pertemuan tersebut di Pyongyang, ibukota Korea Utara dalam waktu dekat.

Pertemuan ini merupakan dialog pertama antara kelompok perlawanan Kampuchea dengan pemerintah Heng Samrin dukungan Vietnam, sejak kemelut Kampuchea mencuat 25 Desember 1978.

Pertemuan ini diharapkan dapat menerobos jalan buntu militer dan politik dalam upaya penyelesaian krisis yang sudah berlangsung sembilan tahun itu. □ AK

Digitized by Google

Maria Sugiharto

Mendongeng, Masih Perlukah Kini?

Aku pernah punya guru yang selain biarawan, juga ahli mendongeng. Saya ingat sekali, ketika ia mendongeng tentang salah satu bab di dalam *kitab Perjanjian Lama,* tentang *Air Bah,* yang terjadi pada jaman ketika Allah murka kepada manusia, sehingga mengadakan keputusan untuk memusnahkan saja yang berdosa, tetapi menyisakan yang masih setia, yaitu keluarga *Nabi Nuh.* Nuh harus membuat sebuah perahu besar yang nantinya dapat memuat keluarganya serta binatang-binatang yang ada di dunia ini masing-masing sejodoh, untuk melestarikannya, agar tidak punah. Singkat cerita, Nabi Nuh yang mendapatkan bisikan Tuhan Allah dan segera melaksanakan perintah-Nya itu, mempersiapkan segalanya. Dan, setelah semuanya beres, Nuh beserta keluarga dan binatang-binatang yang harus dilestarikan memasuki kapal, karena pada saat itu mendung sudah mulai nampak, pratanda bahwa hujan lebat yang akan membanjiri bumi selama empat puluh hari empat puluh malam akan turun.

Air mulai menggenang dan merambat naik mili demi mili, senti demi senti. Genangan air yang mengganas, menelan segala yang ada di permukaan bumi, membinasakan segalanya. Sang guru mendongeng dengan suatu peragaan yang sangat menarik serta memukau. Peragaan itu sedemikian memukau sehingga seluruh kelas seperti terbius. Setiap kali bruder (biarawan itu) memberikan semacam aba-aba bahwa air makin naik, makin naik banjirpun seperti terjadi didalam kelas itu. Naik lagi, naik lagi, dan air sudah mulai mencapai mata kaki, terus, teruuuuuuuus.... Dan, ketika bruder mengatakan bahwa air mulai mencapai setengah meter, anak-anakpun seperti terbius Tanpa dikomando mulai ikut naik, di atas bangku, naik terus, akhirnya berdiri di atas bangku, seperti benar-benar terjadi banjir di kelas itu.

Demikianlah sang bruder yang guru, yang ahli mendongeng, serta sangat meyakinkan, dapat mengisi kalbu-kalbu murid-muridnya sehingga percaya benar kepada apa yang dia dakwahkan. Dan, ingatan ini masih selalu terjadi pada mereka (biasanya anak-anak) yang mengalami, bahkan pada usia saya yang hampir setengah abad ini, masih mengingat dengan jelas dongeng itu, dan menikmatinya setiap kali mengenang dongeng tersebut.

Mengapa Dongeng?

Pada suatu kunjungan jurnalistik ke Austria, saya dipertemukan dengan Wakil Gubernur kota metropolitan Wina, yang adalah seorang wanita. Dari beberapa program yang dia terapkan bagi kemajuan serta keindahan metropolitannya, banyak yang sangat menarik. Antara lain dikatakan bahwa dia mengembalikan tugas wanita, — di dalam hal ini para *Nenek* — untuk kembali kepada masa mendongeng bagi cucu-cucunya. Baginya, mendongeng adalah salah satu cara pendidikan bagi anak-anak balita, untuk mengisi kalbu mereka dengan hal-hal yang baik — karena seperti diketahui, di dalam dongeng, di mana saja ada pesan moral bahwa kejahatan akhirnya harus musnah karena perjuangan gigih yang menentangnya. Dan fihak yang baik selalu mengalahkan angkara murka, atau dimenangkan pada akhirnya.

Program ibu wakil gubernur itu sangat menarik, sehingga saya tanyakan lagi, mengapa program tersebut harus ditrapkan kepada para nenek untuk mendongengkan kepada para cucunya. Dengan tersenyum dia menjawab, para ibu masa kini, masa tehnologi canggih, masa perjuangan emansipasi wanita, biasanya bekerja. Dengan bekerja, kesempatan untuk mengadakan pendekatan kepada anak-anak mereka yang masih balita, hilang. Bahkan yang sudah di atas usia balita. Dan juga menurut pengalamannya, karena merupakan generasi dongeng para nenek pasti pintar mendongeng secara mengesankan, sehingga moral yang terbetik di dalam dongeng-dongeng itu bisa ditanamkan di dalam kalbu anak-anak sedemikian rupa, dengan cara yang sangat menarik. Bahkan ibu-ibu mereka masih harus belajar cara mendongeng dari nenek-nenek itu. Tentu, yang paling menarik ialah bila si pendongeng itu (apakah nenek, kakak, tante, guru atau siapa saja) memiliki gaya rhetorika yang indah, sehingga dongeng yang sederhana itu dapat disampaikan misinya dengan alur cerita yang indah, menarik, serta mimik-mimik yang menawan, sehingga mereka yang mendengarkan dapat terbawa serta terbuai kepada alam dongeng itu,

Mendongeng untuk cucunya

Digitized by Google

Dongeng diasosiasikan kurang terpelajar

dan meresaplah pendidikan tentang moral baik itu.

Ternyata baru-baru ini, tentang *mendongeng,* jadi topik sebuah diskusi, di antara menjamurnya diskusi-diskusi atau seminar-seminar dewasa ini. Topik dongeng itu, yang kali diselenggarakan oleh Goethe Institut. Ternyata para pakar tentang dongeng serta cerita anak-anak itu berbincang tentang hal-hal yang menurut pengamatan masa sekarang memang merupakan pertanyaan besar, ialah di masa robot dan komputer kian merasuki kehidupan, masih perlukah acara mendongeng? Dongeng dan mendongeng, sering diasosiasikan sebagai sesuatu yang kuno dan kurang terpelajar.

Kisah-kisah seperti *Cinderela, Peter Pan, Putri Salju, Seribu Satu Malam,* atau *Bawang Putih Bawang Merah,* (yang pernah diangkat ke layar perak dengan gaya satyre), Si Kabayan atau Si Kancil yang sangat terkenal itu, tentu tidak asing lagi. Tetapi, kini tampak ada kencenderungan bahwa anak-anak terutama di kota besar, mempunyai pujaan dan "pahlawan baru" yang datang dari dunia sana, yang lebih bersifat pahlawan Jepang, yang bisa disaksikan lewat video. Gaban, Goggle Five, Sarivan, adalah nama-nama pahlawan itu. Meskipun kisah-kisah moderen itu pada hakekatnya adalah dongeng juga, atau untuk membedakan dengan apa yang dinamakan dongeng kuno, dongeng moderen ini bisa dinamakan sebagai fantasi moderen. Tokoh-tokoh yang ditampilkan di dalam keduanya pada umumnya digambarkan sebagai yang memiliki kesaksian atau tenaga lebih. *Superman atau Superwomen* adalah pelukis tokoh-tokoh fantasi itu. Bedanya, kelebihan atau kesaktiannya bukannya merupakan hasil dari bertapa di gunung atau gua-gua, melainkan hasil kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang beda lagi, dan sangat relevan dengan apa yang saya peroleh dari ibu wakil gubernur metropolitan Wina itu, ialah bahwa dongeng biasa dibawakan oleh ibu, ayah, nenek, guru, atau seorang pendongeng. Dan, cerita-cerita dongeng fantasi modern, dibawakan oleh layar televisi. Dan, di sini lah letak persoalannya, mengapa orang mendiskusikan cara-cara nostalgia berdongeng, yang dirasa sangat efektif hasilnya di dalam segi pendidikan anak.

Siapa Pendongeng Itu?

Dongeng, cerita dan hikayat — apapun bentuknya — akan memiliki seni bila itu diceritakan, didongengkan, dibawakan oleh seseorang secara mengesankan sehingga tumbuh semacam daya magis yang mampu membentuk pengetahuan dan watak si anak.

Dongeng dalam sejarahnya tidak terbatas untuk anak-anak saja. Menurut sejarah, dongeng sebenarnya justru diciptakan untuk pendengar dewasa. Seperti pernah saya kemukakan di dalam salah satu bab di dalam tulisan di rubrik ini, dongeng-dongeng milik *La Fontaine* sastrawan penulis fabel atau dongeng mengenai binatang, dibawakan oleh seseorang, dan mengandung filsafat yang mendalam. Di masa lampau, beberapa bangsa di dunia mempunyai kebiasaan mendengarkan dongeng. Seorang pendongeng profesional, sering juga berperan sebagai tabib, ketika ia tampil mendongeng. Untuk mengajarkan adat kebiasaan dan moral pada orang muda, selain memakai media dongeng, masyarakat dahulu juga menyampaikan lewat puisi, teka-teki, atau berbagai ekspresi kesan lainnya. Para ahli semacam itu, pada jaman dahulu, di Sumatera, misalnya, disebut Pelipur Lara. Dia tak lain adalah seorang *story teller* atau punggawa kerajaan yang tugasnya menghibur raja, permaisuri dan kalangan istana lainnya. Di Jawa, terdapat misalnya seseorang yang namanya tukang Kentrung. Orang ini mengembara dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa kentrung — semacam tambur untuk mengamen. Cerita yang dibawakan biasanya berbau magis dan religius.

Hans Christian Andersen, adalah seorang Denmark, yang terkenal di dunia bagi anak-anak, karena dia adalah penulis dongeng yang sekaligus pendongeng. Meskipun dilahirkan sebagai anak yang melarat dari daerah kumuh di pinggiran kota Odense, Denmark, dia toh bercita-cita tinggi, ingin menjadi orang terkenal. Liku-liku jalan menuju cita-citanya, bukannya semudah diucapkan, atau didongengkan. Dia mencapai kemasyuran karena penulisannya tentang dongeng sebanyak 168 buah yang sangat digemari anak-anak sedunia antaranya yang banyak diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia seperti *The Tinderbox, The Princess and The Pea, Little Clause* and *the big Clause, Little Ida's Flowers* dan lain-lainnya. Patung Christian Andersen kini terpampang di *Central Park New York City,* yang sangat digemari anak-

Digitized by Google

anak Amerika.

Dongeng, Dan, Video Cassette

Pahlawan-pahlawan baru pun muncul di dalam bentuk robot yang dapat *bertiwikrama* (mengubah bentuk) yang bernama *Gaban, Sarivan.* Tiwikrama itu tergantung kebutuhannya. Apakah dia harus menyerang musuh dan berbentuk sebuah mobil, ataukah harus berbentuk robot yang berdiri, tergantung alur cerita dan kebutuhan hiburan anak-anak yang bersifat fantasi moderen itu. Juga apa yang dinamakan Goggle Five adalah manusia-manusia pahlawan yang berjumlah lima orang dengan satu wanita yang dinamakan *Goggle Pink,* karena bajunya berwarna merah jambu. Goggle-goggle lainnya yang laki-laki sebanyak empat orang berbaju warna-warni, dan dinamakan sesuai dengan warna bajunya. Ada Goggle Red, White, Blue dan Black. Dan anak-anakpun sangat mengidolakannya, sehingga ketika sebuah impressariat mendatangkan para Goggle dari Jepang itu ke Indonesia, anak-anak seperti kedatangan pahlawan dari angkasa luar, karena kedatangan mereka itu. Dan, karena fantasi-fantasi yang didongengkan di dalam cerita-cerita seri Goggle sedemikian memukau anak-anak, maka ketika Goggle asli itu berpanggung di Indonesia, dia (yang Jepang asli) berpesan kepada anak-anak, agar tidak menirukan tindakan-tindakan yang suka dilakukan Goggle seperti melompat dari ketinggian, bak Superman, misalnya, karena di dalam kenyataan hal itu tidak benar.

Dan, anak-anak boleh meniru Goggle yang diperankan oleh aktor Jepang itu, tetapi benar-benar harus tekun mempelajarinya, karena dia dapat melompat sejauh dan setinggi itu, bukannya tanpa latihan.

Dan, dengan fantasi-fantasi moderen semacam itu, anak-anak lebih dituntut untuk mendongeng sendiri, tanpa seorang pelipur lara. Karena, si anak yang dari pada merengek-rengek kepada ibunya itu, justru diajari bagaimana mengoperasikan videonya, dan ceklek...ceklek... videopun berjalan, anak dengan gembira menonton di depan TV serta menikmatinya, tanpa sentuhan atau dongengan nenek, ibu, ataupun guru. Mereka mendongeng sendiri, dan karena segalanya dilaksanakan sendiri dengan mesin-mesin itu, bisa diterka nanti akibatnya, bahwa dia akan menjadi lebih individualistis.

Lain, bila hal itu didongengkan oleh seseorang (ibu, nenek, ayah, kakek, ataupun kakak) maka di samping nada suara yang mempengaruhi jalannya dongeng, segala mimik dan aksen sangat meresap di kalbunya. Dan dongeng yang selalu dimulai dengan *pada suatu hari...* adalah bahasa universal, karena di dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris misalnya, permulaan sebuah dongeng selalu dengan *Once Upon A Time,* dan *Ilyya un jour atau Il y avait un jour* dalam bahasa Perancis, karena dongeng tidak di batasi oleh waktu. Introduksi dongeng yang begini teras sangat nostalgik.

Balada Kera, yang adalah merupakan panggung pertunjukan di kawasan Dunia Fantasi Ancol, adalah fantasi moderen, karena dijalankan secara animatronik — adalah sebuah dongeng yang dapat dinikmati oleh penonton, meskipun bukan benar-benar dongeng —. Yang akan saya kemukakan di sini, ialah bahwa ada hubungannya antara dongeng binatang-binatang kera itu (fabel) dan dunia fantasi moderen yang dijiwakan kepada boneka-boneka kera elektronik itu. Dalam nomor pertunjukannya, misalnya, tiba-tiba saja kera-kera itu dikagetkan dengan kedatangan seekor kera dari luar angkasa. Dan, sang pemimpin kera, mengatakan kepada teman-temannya bahwa hal itu tidak mungkin, sehingga diapun tidak percaya. *Tak mungkin, tak Percaya...* tak Mungkin, tak Percaya... demikian dia nyatakan dengan lagu dalam operette itu. Tetapi, beberapa anak yang kritis pernah menyatakan kepada saya bahwa dengan adanya peluncuran pesawat luar angkasa berpenumpang kera dan kembali ke bumi dengan selama, anak-anak ini berkomentar kepada saya bahwa apa yang dinyatakan oleh raja kera dengan tak mungkin... tak percaya... ternyata tidak benar, karena di dalam kenyataannya benar-benar ada kera yang mengangkasa.... Nah, begitulah dongeng kuno dan fantasi moderen bertemu di dalam suatu kenyataan hidup.□

SEGENAP DIREKSI DAN KARYAWAN

P.T. PUTRA SEJATI SPINNING MILLS LTD.

MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI NATAL 25 DESEMBER 1987

DAN

TAHUN BARU 1 JANUARI 1988

Office : Gedung Kemakmuran - Jl. K.H. Hasyim Ashari 28 A - Jakarta 10130 - Indonesia - P.O. Box 2113 Jakarta
Cable : SINARDJATI - JAKARTA - Telp. (021) 370009 (6 lines) - Facsimile (021) 367511 Telex : 45391 SEJATI IA

Digitized by Google

626 CAPELLA

INOVASI MENYELURUH

5 KEUNGGULAN MAZDA 626 CAPELLA UNTUK KEPUASAN DAN KEBANGGAAN BERKENDARA

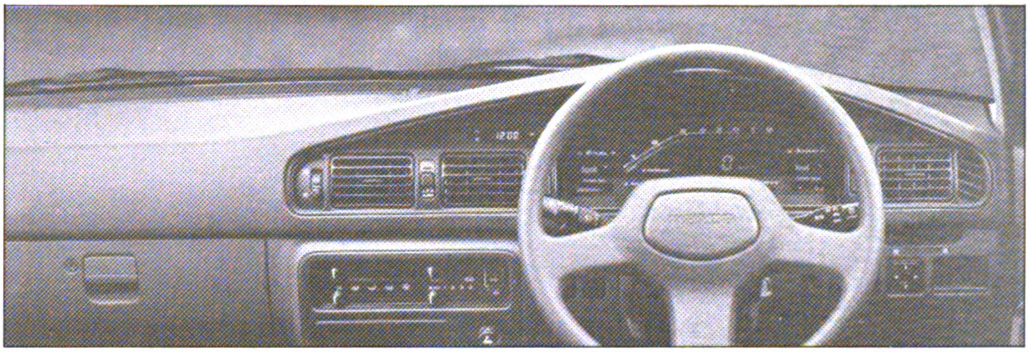

Mazda 626 CAPELLA tampil dengan 5 keunggulan yang akan memberikan kepada Anda kepuasan dan kebanggaan berkendara:

- **Super Flush Body** lebih elegan dan aerodinamis.
- Interior lebih mewah dengan *Dashboard* **Light Emitting Diode (LED) dilengkapi Fuel Change Scale** yang menyatu dengan desain kursi ergonomis.
- **Super Suspension TTL (Twin Trapezoidal Link)** memberikan daya manuver yang semakin mantap dan meyakinkan.
- **New AAS (Automatic Adjusting Suspension)** menghasilkan stabilitas dan kenyamanan menyeluruh pada setiap tingkat kecepatan dan segala kondisi jalan.
- **12 Valve Engine 2.0** dengan **Hydraulic Lash Adjuster (HLA)** yang paling kompak dan terkecil di kelasnya. Menghasilkan tenaga lebih besar, hingga mencapai **109 HP.**

Mazda 626 CAPELLA baru saja meraih **1987 GREAT AUSTRIAN AUTOMOBILE PRIZE.** Penghargaan tertinggi dalam kompetisi khusus mobil-mobil baru produksi tahun 1987.

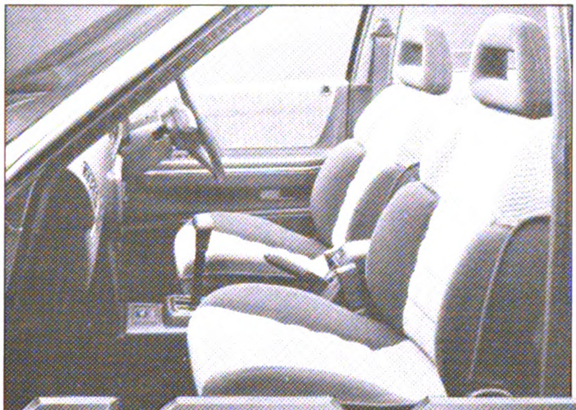

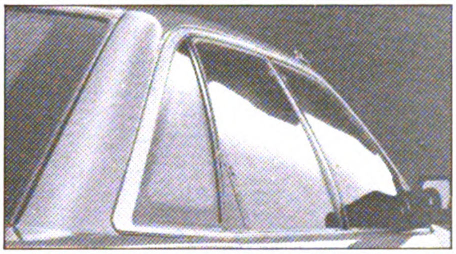

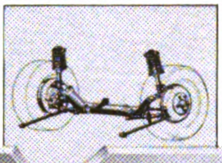

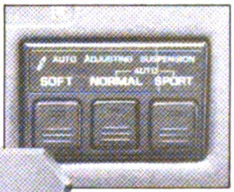

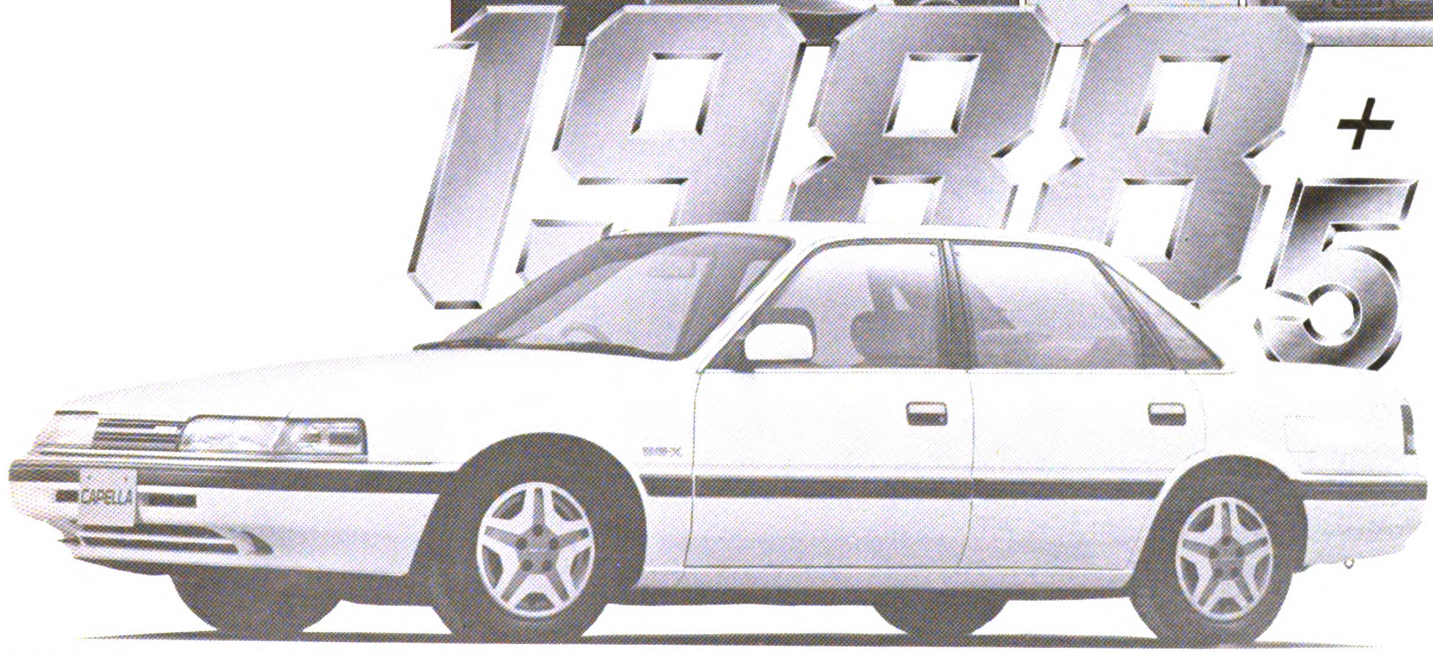

BUKANKAH MOBIL ANDA SAAT INI MENJADI KETINGGALAN ?

Sole Agent :
P.T. NATIONAL MOTORS Co.

Emergency Call 24 Jam

JAKARTA UNICOR PRIMA MOTOR Telp. 6390190
KEBAYORAN JAYA INDAH UTAMA Telp. 738213, 738214, 738215, 738216, 738217
SURABAYA SAUJAYA MOTOR Telp. 60321, 65451
DENPASAR CAHAYA SURYA BALI INDAH Telp. 26296, 24855

mazda
Hadirkan Teknologi Masa Depan Saat Ini

Digitized by Google

Digitized by Google